

10/1395-

**PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM 1971
DI
D. C. I. DJAKARTA**

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
D. C. I. DJAKARTA**

Docs

JS 7206
D 53 A 851
DOCS.

KATA PENDAHULUAN

Buku mengenai kegiatan Pemilihan Umum 1971 di Wilayah D.C.I. Djakarta ini disadjikan kepada para pambatja dan masjarakat umumnja didalam 2 (dua) bagian ;

Bagian jang pertama terdiri dari Pelaksanaan Pemilu 1971 di D.C.I. Djakarta berupa pendjelasan-pendjelasan setjara umum dan menjeluruh mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum itu sendiri.

Sedangkan pada bagian kedua jang terdiri dari Lampiran sebanjak 8 (delapan) Bab; merupakan pendjelasan jang mendetail setjara juridis dan technis tentang pelaksanaan Pemilu jang berisi Pola Dasar, Undang-undang dan Peraturan-peraturan Pemerintah, beserta Surat-surat Keputusan dan petundjuk-petundjuk technis tentang penjelenggaraannya.

Mudah-mudahan penerbitan buku ini dapat berguna dan mendjadi perpustakaan untuk pedoman dalam Pelaksanaan Pemilu-Pemilu pada masa-masa mendatang.

Djakarta, 31 Desember 1971.

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

KATA PENGANTAR

Pemilihan Umum 1971 adalah merupakan yang kedua sedjak Proklamasi Kemerdekaan R.I. dan yang pertama dalam rangka pelaksanaan azas kedaulatan rakyat yang termaktub dalam konstitusi 1945. Sedjak dekrit 5 Djuli 1959, jaitu moment sedjarah yang menetapkan kembali ke U.U.D. 1945, maka peristiwa demi peristiwa telah menghalangi diselenggarakannya formalitas penting dalam rangka pelaksanaan azas terpokok dari berdirinya Republik ini; jaitu azas kedaulatan rakyat dalam bentuk Pemilihan Umum.

Kenyataan ini telah membawa ekses-ekses yang tidak dikehendaki dalam kehidupan bangsa dan negara; berupa makin djauh menjimpangnya tata kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan dari tjita-tjita yang terkandung dalam falsafah negara & konstitusi serta impotensi dari lembaga-lembaga perwakilan serta aparat kontrol yang ada. Penjimpangan ini djuga mengundang petualangan politik dalam berbagai bentuk, yang memuntjak dalam wujud Peristiwa G.30.S./P.K.I.

Dengan Rachmat Tuhan J.M.E., bangsa dan negara kita dapat menjelamatkan diri dari bahaya kehantjuran itu. Dengan beladjar pada sedjarah, maka Sidang-sidang MPRS yang diselenggarakan sedjak tahun 1966 telah memetik pelajaran dari kesalahan-kesalahan masa lalu dan meletakkan dasar-dasar baru, kearah meluruskan kehidupan bangsa & negara seperti yang dikehendaki dalam falsafah Pantjasila dan konstitusi. Dalam rangka itu maka ketetapan terpenting dari lembaga tertinggi itu adalah pemurnian pelaksanaan azas Pantjasila dan pelaksanaan U.U.D. 1945 setjara konsekwen.

Sebagai tindak landjut dari landasan dasar itu maka dengan TAP MPRS No. XI/MPRS/1966 jo. TAP MPRS XLII/MPRS/1968 ditetapkanlah penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersifat umum, langsung, bebas dan rahasia selambat-lambatnja 5 Djuli 1971. Ketetapan tersebut diikuti dengan rangkaian tindakan dan persiapan yang setjara djelas mentjerminkan keteguhan tekad bangsa Indonesia untuk kembali kepada pemurnian Pantjasila.

Demikianlah maka Pemilihan Umum yang tertib aman dan berhasil mantjapai sasaran yang dikehendaki oleh Ketetapan MPRS itu telah terselenggara pada tanggal 3 Djuli 1971. Lepas dari segala kekurangan akibat djadwal yang harus disusun dengan ketat, aparatur yang masih harus dibentuk seketika persiapan diadakan, perlengkapan dan kemampuan pembiayaan yang terbatas, maka Pemilu 1971 telah tertjatat sebagai salah satu sukses nasional.

Seperti halnya di Daerah-daerah lain, persiapan dan penyelenggaraan Pemilu 1971 di Djakarta mencatat pula rangkaian kejadian yang disamping mempunyai nilai sejarah juga mengandung pelajaran yang sangat berharga untuk penjemputan penyelenggaraan Pemilu-pemilu yang akan datang. Berkenaan dengan itu penulisan tentang jalannya penyelenggaraan Pemilu 1971 ini patut mendapat tempat yang sewajarnya dalam usaha mendokumentasikan peristiwa-peristiwa penting di Tanah Air.

Kami utjapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta dalam mensukseskan Pemilu 1971 di Djakarta. Setjara khusus, terima kasih itu kami tudjukan kepada MUSPIDA DCI Djakarta, slagorde Laksus Kopkamtibda Djaya selaku Komando Keamanan Tidak Langsung, slagorde Komdak Metro Djaya selaku Komando Keamanan Langsung, Aparatur Pemerintah Wilayah selaku pelaksana teknis Pemilu 1971 dan masyarakat Djakarta terutama Pengurus RT/RW yang setjara aktif berpartisipasi dalam mensukseskan Pemilu 1971.

Djakarta, 31 Desember 1971.

Pd. GUBERNUR KEPALA DAERAH/
KETUA PANITIA PEMILIHAN DAERAH
D.C.I. DJAKARTA

t.t.d.

(ALI SADIKIN)

Letnan Djenderal KKo.



**Ali Sadikin, Letdjen TNI/KKo (A.L.)
Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta.**



Wiriadinata, Laks. Muda T.N.I./A.U.
Pd. Wk. Gub. K.D.C.I. Djakarta/Wakil Ketua merangkap anggota P.P.D. D.C.I. Djakarta.

DAFTAR ISI

BAB

Hal.

KATA PENGANTAR

I. PENDAHULUAN

1.1. Umum	14
1.2. Pendekatan	14
1.3. Situasi Pemilu	15
1.4. Sikap Parpol terhadap hasil Pemilu	16
1.5. Kesimpulan	18

II. GAMBARAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN TEHNIK PEMILU 1971

22

2.1. Persiapan dan Pembentukan Aparatur	22
2.2. Penjelenggaraan	22
2.3. Djendjang tanggung jawab dan koordinasi	23
2.4. Pembiajaan	23
2.6. Penerangan	23
2.6. Keamanan	24
2.7. Administrasi	24
2.8. Perbekalan, Peralatan dan Pengelolaannya	25
2.9. Pengawasan	26

III. PENJELENGGARAAN

3.1. Aparatur dalam persiapan; Projek Officer	32
3.2. Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta dan Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta	33
3.3. Panitia-panitia Pemilihan pada Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan (P.P.Kota, PPS, dan PPP)	37
3.4. Kegiatan-kegiatan pendahuluan	39
3.5. Pendaftaran Penduduk/Pemilih	40
3.6. Data Pendaftaran Penduduk/Pemilih	42
3.7. Pentjalonan	44
3.8. Kampanje	48
3.9. Persiapan Pemungutan Suara	49
3.10. Pemungutan Suara	51
3.11. Penghitungan Suara	53
3.12. Penetapan Tjalon Terpilih	55

3.13. Penerangan dan Publikasi	60
3.14. Dokumentasi dan Statistik	62
3.15. Keamanan	64

IV. ADMINISTRASI.

4.1. Bidang Ketata-Usahaan	74
4.2. Penjusunan dan Pengolahan Progress Report . . .	76
4.3. Administrasi Personil	77
4.4. Urusan Dalam	79
4.5. Keuangan	82
4.6. Rapat Dinas	91

V. PERBEKALAN DAN PENGHUBUNG.

5.1. Umum	93
5.2. Kotak Kartu Pemilih dan Kotak Surat Suara . . .	94
5.3. Bilik Pemberian Suara dan Perlengkapan TPS lainnja .	96
5.4. Barang-barang Tjetakan	96
5.5. Kendaraan	99
5.6. Saranan Perhubungan/Penerangan	101
5.7. Perlengkapan Kantor	102
5.8. Penambahan ruangan dan peralatan (Meubilair) Kantor	103
5.9. Sarana Komunikasi	104
5.10. Angkutan	105

VI. PENGAWASAN.

6.1. Umum	106
6.2. Pengawasan Tehnis	106
6.3. Pengawasan Keuangan	111
6.4. Pengawasan Barang	112
6.5. Peradilan Kilat	113

VII. BEBERAPA POKOK-POKOK BAHAN PERBANDINGAN ANTARA PEMILU 1955 DENGAN PEMILU TAHUN 1971.

7.1. Dasar Hukum	116
7.2. Pemungutan Suara	127
7.3. Panitia Pelaksana	129

BAB	H a l.
7.4. Penduduk dan Pemilih	132
7.5. Parpol dan Ormas jang turut Pemilu	136
7.6. Djumlah Tjalon	139
7.7. Anggaran Belandja	140
7.8. T.P.S.	140
 VIII. P E N U T U P.	
8.1. Evaluasi Politik	141
8.2. Aparatur Pemilu	141
8.3. Penjelenggaraan	143
8.4. Administrasi	144
8.5. Perbekalan	145
8.6. Pengawasan	145

BAB I

PENDAHULUAN.

1.1. Umum.

Pemilihan Umum jang kedua sedjak kemerdekaan telah menundjukkan sukses dan aman dalam penyelenggaraannya; singkatnja Pemilu tahun 1971 telah berhasil dengan baik.

Dalam suasana dekat sesudah Pemilu ini, pergeseran dan imbalanced kekuatan sosial-politik telah berubah. Perhitungan atas pandangan djauh dimuka menimbulkan berbagai pertanyaan tentang penataan kembali atas lembaga-lembaga Pemerintahan; pendeknja menjangkut bidang legislatif dan eksekutif. Kemenangan mutlak Golongan Karya dalam Pemilihan Umum 1971 terutama sekali membawa satu problema baru. Tidak sadja problema jang bersifat segi positif jang timbul dalam rangka penjunusan personalia, melainkan djuga segi negatif, sedjauh mana dapat terdjadi berkenaan dengan kemenangan tersebut. Mempertimbangkan segi positif dan negatif inilah pendekatan perhitungan keadaan politik post Pemilu chususnja di Ibukota ini diberikan. Perhitungan ini sudah barang tentu tidak sadja membatasi dirinya pada lingkungan Ibukota sadja melainkan djuga melajangkan djauh kedepan diluar Daerah Ibukota.

1.2. Pendekatan.

Sebagai tjatatan untuk pengantar, Pemilu sukses karena telah memenuhi harapan seperti jang telah ditargetkan dan aman dalam penyelenggaraannya berkat koordinasi jang baik dan rapi, dari aparatur Pemerintah jang ada termasuk aparatur Panitia Pemilihan Daerah; berkat mobilitasnya alat negara di Ibukota sampai pada petugas-petugas Hansip/Wanra di TPS-TPS.

Hasil Pemilu dalam Daerah Pemilihan DCI Djakarta jang diumumkan oleh Panitia Pemilihan Daerah ialah :

GOLKAR	—	904.358	—	15	kursi
N. U.	—	463.438	—	8	kursi
P.N.I.	—	225.028	—	4	kursi
PARMUSI	—	149.097	—	2	kursi
PARKINDO	—	56.680	--	1	kursi
P.S.I.I.	—	55.426	—	1	kursi
KATOLIK	—	54.072	—	1	kursi

IP-KI	—	13.415	—	0	kursi
PERTI	—	11.310	—	0	kursi
MURBA	—	5.658	—	0	kursi

Kiesquotient yang diperlukan untuk 1 (satu) kursi dalam hal ini bagi DPRD DCI Djakarta ialah 60.578 suara. Suara tidak sah termasuk salah tjoblos dan suara blanko, sedjumlah 50.559 untuk DPRD I hampir mendekati 1 (satu) kursi untuk DPRD DCI Djakarta.

Mentjatat setjara umum daripada hasil tersebut terbukti bahwa dilingkungan yang warga kotanja masih tradisionil maka disana ternjata bahwa golongan Agama Islam, chususnja N.U. dominant. N.U. menurut hasil-hasil Pemilu, sementara per-Kelurahan memenangkan 33 Kelurahan diantara 220 Kelurahan chususnja Kelurahan pinggiran kota dan dari 18 Departemen memenangkan Departemen Agama.

PARMUSI umumnja menang di-TPS-TPS yang berada dalam kampus-kampus Mahasiswa di Djakarta.

Dalam pada itu kekuatan Nasionalis P.N.I. diluar perhitungan MURBA dan IP-KI basisnja terpetjah-petjah baik diwilayah maupun di Pegawai Negeri. Pergeseran ini adalah pada daerah sisa-sisa anggota ditahun 1955. Ia tidak menundjukkan satu daerah mutlak. Hasil-hasil dari P.N.I. merata adanja ditiap Daerah Walikota.

Demikian pula halnja dengan KRISTEN-KATOLIK.

Sementara itu untuk kekuatan GOLONGAN KARYA sendiri hampir menjeluruh dikota dan didaerah-daerah, hampir merata adanja. Dengan kenjataan djauh diatas yang lain; dominant. Hasil mutlak daripada Golongan Karya diatas dengan petundjuk bahwa kemenangan itu ditjapai merata dan adil diseluruh wilayah Daerah Walikota sangat menguntungkan adanja, baik dalam pembinaan maupun dalam pengembangan pembangunannja.

1. 3. Situasi Pemilu

Pra Pemilu.

Situasi Pra Pemilu ditandai dengan meningkatnja kegiatan PARPOL/GOLKAR chususnja dalam masa-masa kampanye dalam usaha masing-masing fihak untuk memenangkan Pemilu.

Pada umumnja Parpol-parpol chususnja N.U. — P.N.I. dan PARKINDO lebih banjak melontarkan serangan-serangan terhadap GOLKAR/Pemerintah dengan tuduhan intimidasi, over-acting dan lain-lain.

Periode tersebut ditandai dengan diperingatkannya beberapa tokoh/pembitjara baik dari PARPOL maupun dari GOLKAR sebagai peringatan dari KOKAMSUNG.

Muntjulnja beberapa organisasi politik/moral jang disponsori oleh Pemuda Peladjar dan Mahasiswa seperti Komite Penegak Kedaulatan Rakjat (KPKR) jang disponsori oleh Peladjar jang berasal dari Parpol-parpol, serta Golput jang disponsori oleh perseorangan-perseorangan jang kebanyakan tokoh muda Angkatan '66, adalah tidak terlepas dari kepentingan masing-masing golongan dalam menghadapi Pemilu.

Persiapan-persiapan Pemilu, chususnja dalam pemenangan GOLKAR telah dilaporkan setjara terperintji pada Progress Report Gubernur KDCI Djakarta pada Pertemuan Gubernur Seluruh Indonesia bulan Djuni 1971.

Pelaksanaan Pemilu.

Pelaksanaan Pemilihan Umum 3 Djuli 1971 dapat dikatakan berhasil sepenuhnya, baik ditinjau dari segi djumlah pemilih jang mentjoblos maupun dari segi aman dan tertibnja situasi.

Adanja gangguan ketjil jang tidak berarti seperti pertjobaan pembakaran TPS dari oknum-oknum jang tidak bertanggung-djawab tidak mengganggu sukses dan lantjarnja pelaksanaan Pemilu.

Naiknja harga-harga 9 bahan pokok sehari-hari pada saat mendjelang dan pelaksanaan Pemilu adalah disebabkan absent-nja pedagang-pedagang ketjil jang melaksanakan hak pilihnja diluar daerah Djakarta.

Post Pemilu.

Hasil Pemilihan Umum jang dimenangkan setjara mutlak oleh GOLKAR telah menimbulkan reaksi-reaksi dikalangan Parpol-parpol, chususnja jang menondjol dikalangan Parpol N.U. dan P.N.I., sedangkan PAR-MUSI dan beberapa Parpol ketjil lainnja seperti PARKINDO – MURBA dan IP–KI segera mengakui. Sementara itu beberapa diantara Parpol tersebut belum mengeluarkan sikap atau terpetjah dua seperti P.S.I.I.

1. 4. Sikap Parpol terhadap hasil Pemilu.

NAHDATUL ULAMA.

Adanja djandji pimpinan pusat N.U. selama masa kampanye kepada anggotanja untuk memperdjoangkan penjelesaian ekkses-ekkses pelaksanaan kampanye, baik melalui saluran Nasional dan bila perlu saluran Internasional, dihubungkan pula akan kenjataan hasil daripada Pemilu itu sendiri, telah menimbulkan sikap dikalangan N.U. untuk menunda

pengakuan terhadap hasil Pemilu yang ditjapai. Sikap tersebut seperti tertjerminkan dalam statement P.B. N.U. yang ditanda-tangani oleh *Subchan Ze* dan *Jusuf Hasjim* selaku Ketua 1 dan Sekdjen pada tanggal 12 Djuli 1971 :

- Disinjalir terdjadinja manipulasi dan ketjurangan-ketjurangan dalam penghitungan suara.
- Peradilan Kilat Pemilu ternjata hanja mengadili/menghukum tertuduh dari Parpol-parpol tetapi tidak satupun kepada pihak yang lain.
- Akan membentuk Lembaga Pembelaan Umum, untuk membela Rakjat yang diintimidasikan serta ditindas hak-hak azasi-nja.
- N.U. belum dapat membenarkan kesimpulan yang telah diambil/diumumkan mengenai hasil-hasil Pemilu, sampai ada penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan.

PARTAI NASIONAL INDONESIA.

PARTAI NASIONAL INDONESIA adalah salah satu dari sekian Partai-partai yang paling terkena kepahitan yang ditjerminkan oleh hasil Pemilu. Dari Partai No. 2 diwilayah DCI Djakarta mendjadi Partai ketiga setelah N.U. Berkenaan dengan itu dapat kita tjatat reaksi-reaksi sbb.:

- (1). *MOCH. ISNAENI* Pd. Ketua Umum PARTAI NASIONAL INDONESIA, menjatakan dalam wawantjaranja kepada Pers pada tanggal 12 Djuli 1971 bahwa ia tidak menduga sama sekali hasil Pemilu bagi P.N.I. seperti yang ditemui sekarang; untuk menanggapi ini :
 - Diinstruksikan kepada aparat-aparat Partai didaerah agar melakukan penelitian terhadap hasil-hasil Pemilu.
 - P.N.I. membentuk Team Pembela yang diketuai oleh Usep Ranuwidjaja S.H.
 - Kemenangan GOLKAR adalah tidak wajar; menurut laporan dari daerah ada tanda-tanda bahwa Pemungutan Suara dilakukan dengan tidak wajar, dengan mengemukakan tjontoh-tjontoh manipulasi suara dibeberapa daerah.
- (2). *Drs. H.A. KARUNDENG* Sekdjen DPP PNI.
 - Kekalahan P.N.I. adalah tidak fair, main paksa, main tekan dan intimidasi.
 - Monoloyalitas yang dilantjarkan sepihak mengakibatkan anggota-anggota P.N.I. kehilangan legalitas.
 - A.B.R.I. dipakai setjara langsung dalam memenangkan GOLKAR.

- Kemenangan mutlak GOLKAR adalah berbahaja, karena berakibat tidak adanya kontrol yang efektif.

PARTAI MUSLIMIN INDONESIA.

PARMUSI merupakan salah satu Parpol yang telah memberikan tanggapan positif terhadap hasil Pemilu sebagai dikemukakan oleh Ketua Umumnya *Mintaredja S.H.* sebagai berikut :

- Bahwa Pemilu telah berdjalan dengan baik.
- Bersyukur atas kemenangan GOLKAR yang program oriented.
- Kemenangan GOLKAR berarti kemenangan rakyat yang gan-drung kepada pembangunan berarti juga adalah kemenangan PARMUSI.

Timbulnja reaksi Parpol-parpol terhadap hasil-hasil Pemilu menundjuk-kan :

- a. Masih adanya kekuatan ekstreem fanatisme ideologi dalam Partai-partai tertentu yang sukar menerima kenyataan akan timbulnja kekuatan politik baru di Indonesia.
- b. Tindakan Parpol tersebut lebih banyak merupakan tindakan pem-belaan diri sebagai kompensasi dari akibat kekalahan dan sebagai pertanggung-jawab terhadap anggota.
Dilain pihak sikap tersebut diambil guna mendapatkan dan memberikan tekanan psikologis kepada Pemerintah dalam perundingan-perundingan berikutnya.

Sementara itu, adanya pernyataan Presiden *Soeharto* bahwa hasil Pemilu adalah sah dan tidak dapat diganggu-gugat karena telah dilaksanakan menurut Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang demokratis dan disusun oleh Wakil-wakil Rakyat di D.P.R.—G.R. telah membawa akibat lunaknya sikap Partai-partai chususnja N.U. dan P.N.I. Keadaan ini membawa akibat pula kearah menurunnja suhu politik di Ibukota.

Terdapatnja suara-suara blanko dalam penghitungan suara sedikit banyak menunjukkan masih adanya pengaruh golongan Muda Anti Pemilu (AM-GOLPUT-GKK) didalam masyarakat.

Keadaan mana dapat merupakan dukungan moril bagi kemungkinan timbulnja aksi-aksi extra parlementer, terutama dalam menghadapi masa-masa persidangan DPR/MPR yang akan datang.

1. 5. Kesimpulan.

Gedjala masyarakat yang diperkirakan bakal terus memanass dekat maupun sesudah Pemilihan Umum temjata diluar dugaan tidak menun-dukkan tanda-tandanya kemudian.

Dalam hubungan dengan mentjatat dan memperhatikan pers sebagai tjermin masjarakat pada waktu itu diadjudkan pembuktian bahwa di Ibukota – pertentangan tadjam, bentrokan panas ataupun djenis lain dapat diatasi dan tenggelam dalam suasana hiruk-pikuknja pembangunan.

Adjakan Gubernur Kepala Daerah pada waktu pengumuman resmi hasil-hasil Pemilu agar semua bersedia untuk maju kemedan pembangunan, tidak sia-sia adanja. Pers dalam hubungan ini besar sekali andilnja.

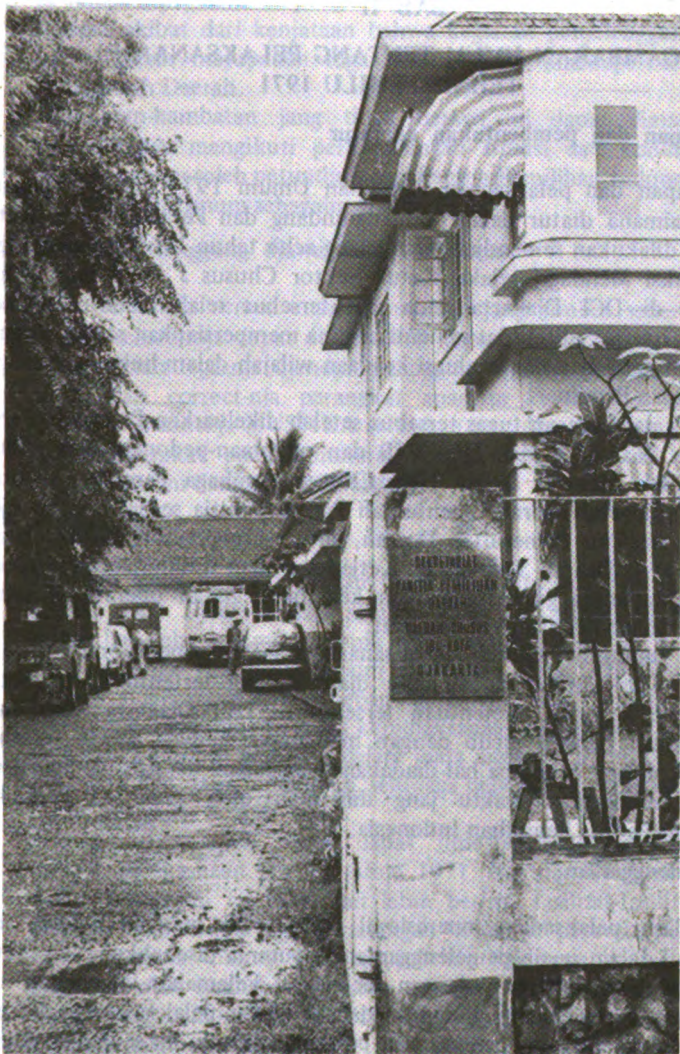
Memperhatikan ikut sertanja $\pm 90\%$ daripada Wargakota dalam Pemilu, menundjukkan adanja kesadaran Rakjat jang merasa terpanggil untuk ikut serta dalam tanggung djawab bernegara. Segi lain bahwa Pemilu merupakan pendidikan politik bagi Rakjat ialah bahwa dengan Pemilu ini Rakjat kembali bergerak untuk mengudji politik dan ideologi jang dipegangnja. Walaupun N.U. dan P.N.I. menggunakan thema kampanye menjerang GOLKAR jang dinilai menjalahi „aturan permainan Pemilu”, namun achirnja harus mengakui kegesitan dan ketrampilan GOLKAR jang baru terdjun dalam arena Pemilu dan ternjata dapat merebut mayoritas rakjat Pemilih.

Untuk DCI Djakarta dalam hubungan ini dapat diadjudkan pendekatan bahwa pertentangan politik tidak menadjam sesudah Pemilu. Sekat-sekat politik, pertentangan politik & ideologi hanja bakal terdjadi pada saat mendjelang Pemilu, periodesasinja adalah 4 tahun kemudian. Kesemuanja ini djelas menguntungkan sebab tidak setiap kali lahir bentrokan-bentrokan politik dan ideologi. Dalam suasana jang demikian djernih ini kepada GOLKAR jang menang mutlak dalam Pemilu ini dikedjar satu tugas untuk memungkinkan adanja keinginan dan kesegaran dalam kerdja agar tidak terasa adanja serba mutlak ditangan GO-LONGAN KARYA. Dalam hubungan ini problema baru timbul jaitu menjertakan semua kekuatan sosial politik dalam satu medja kerdja, satu medan pembangunan, sehingga ter-eleminir segi negatif dalam pengertian diatas.

Tentang kemungkinan lahirnja aksi-aksi extra parlementer/parlemen djalanan dapat ditjatat bahwa pada masa lalu, kelahiran „Parlemen Djalanan” selalu merupakan ledakan reaksi atas tidak beresnja Lembaga-lembaga Perwakilan Rakjat.

Impotensi atau kelemahan-kelemahan jang terdapat dalam lembaga perwakilan disatu pihak mendorong orang untuk menempuh djalan extra parlementer ini. Sebagai tjontoh soal korupsi, Undang-undang Pemilu, pendidikan dan sebagainya. Dilain pihak lemahnja aparat koreksi (DPR–GR) menimbulkan frustrasi dikalangan massa luas jang dalam hubungan kelompok ketjil, intelektuil jang tampil kedepan.

Maka dalam hubungan ini memperkuat posisi kontrol (Lembaga Perwakilan Rakyat) jelas akan membawa keuntungan untuk menghindarkan lahirnya frustrasi. Pendidikan politik dan menanamkan pengertian untuk menimbulkan kewibawaan sebagai Wakil Rakyat, adalah tjarang terbaik untuk melenjapkan suatu frustrasi.



Inilah:
Kantor Sekretariat PPD I DCI Jakarta, Djl. Imam Bondjol No. 13, Jakarta;
dapur pengolahan segala perentjana serta pelaksanaan dalam rangka Pemilu 1971.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN TEHNIK PEMILU 1971

2.1. Persiapan dan pembentukan aparatur

Persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum 1971 di DCI Djakarta sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah telah dilakukan semendjak mendjelang achir tahun 1969. Sesuai dengan Instruksi Mendagri selaku Ketua Sektor Khusus J Pemilihan Umum maka di DCI Djakarta pada saat tersebut telah dibentuk Project Officer serta Sekretariat sementara guna mempersiapkan serta mengumpulkan data-data dan evaluasi keadaan wilayah dalam hubungan dengan persiapan Pemilu.

Untuk pelaksanaan tugas tersebut setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1/70 dan No. 2/70 dan pedoman-pedoman yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, maka di daerah-daerah dibentuklah Panitia-panitia sesuai dengan djendang struktur Pemerintah Daerah, jaitu masing-masing untuk Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, Ketjamatan dan Kelurahan, beserta alat kelengkapannya guna melakukan kegiatan-kegiatan operasional untuk pelaksanaan Pemilu 1971 tersebut.

Pada umumnya seluruh pelaksanaan kegiatan operasional ini telah diatur dan ditetapkan dengan djadwal yang tertentu untuk setiap tahapan kegiatan. Ketentuan tersebut di DCI Djakarta telah dapat dilakukan dengan tertib dengan memenuhi djadwal waktu tersebut; malah dalam beberapa hal diadakan penjesuaian dengan mempertjepat dari kelonggaran waktu yang diberikan oleh Lembaga Pemilihan Umum/Panitia Pemilihan Indonesia.

2.2. Penjelenggaraan.

Didalam pelaksanaan operasional Pemilu ini masalah-masalah yang timbul dalam tertib penyelenggaraan, umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang inherent dengan beberapa kelemahan-kelemahan dari ketentuan per-Undang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Sementara itu kelantjaran pelaksanaan persiapan Pemilu ini sedjadjar dengan perkembangan situasi politik dan ekonomi di tanah air umumnya dan di Djakarta khususnya.

Pada tingkat persiapan pendahuluan sikap sementara pihak yang masih diliputi keragu-raguan terhadap kesungguhan dan kemampuan Pemerintah untuk melaksanakan Pemilu 1971 itu djuga mempengaruhi kelantjaran pelaksanaannya.

Beberapa problem lapangan yang timbul hanyalah semata-mata sebagai akibat dari kenyataan bahwa kegiatan penyelenggaraan Pemilu ini belumlah merupakan tugas routine yang dihadapi oleh Aparatur Pemerintah Daerah.

Hambatan-hambatan yang tidak berarti ini dapat diatasi seketika baik dengan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi maupun dengan memperoleh petunjuk dari Panitia Pemilihan Indonesia/Lembaga Pemilihan Umum sebagaimana mestinya.

2. 3. Djendjang tanggung djawab dan koordinasi

Pada umumnya semua masalah-masalah yang timbul seperti tersebut diatas, seluruhnya dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini disebabkan karena telah tegasnya djendjang tanggung djawab pelaksanaan Pemilu, tertib dan correct-nja perangkat aparatur Pemerintah tingkat DCI Djakarta khususnja MUSPIDA serta bantuan dan kerdja sama yang baik dari masyarakat pada umumnya, hingga memungkinkan pelaksanaan operasional ini dengan sebaik-baiknya.

2. 4. Pembiajaan.

Didalam penggunaan anggaran biaya yang tersedia, Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta dari semula telah mengambil kebidjaksanaan untuk berusaha sedemikian rupa agar sedjumlah anggaran yang diotorisir dari Lembaga Pemilihan Umum digunakan sesuai dengan kebutuhan, dengan tidak memberikan beban tambahan pada Pemerintah Daerah. Hal ini memungkinkan karena kebidjaksanaan penggeseran terhadap pos yang satu pada pos yang lain dalam mata anggaran Pemilu (9A.5.1.260) diizinkan dan dapat dilakukan, sehingga pelaksanaan operasional Pemilu dapat berdjalan dengan baik.

Prinsip ini ternyata telah dapat dipertahankan sampai selesainya seluruh pelaksanaan Pemilu tahun 1971. Bantuan Pemerintah Daerah dalam hubungan ini diberikan lebih berupa fasilitas-fasilitas gedung, pemeliharaan kendaraan, pemasangan beberapa pesawat telepon, listrik dan sebagainya. Faktor yang menjulitkan dalam penggunaan anggaran biaya hanyalah disebabkan karena tenggang waktu dalam otorisasi anggaran, yang dalam beberapa hal tidak dapat tepat menurut jadwal kegiatan yang harus dibiayai.

2. 5. Penerangan

Untuk menggairahkan masyarakat dalam mensukseskan Pemilu ini kegiatan-kegiatan penerangan baik melalui surat-surat kabar maupun mass media yang tersedia lainnya seperti R.R.I., Radio Non-RRI dan

TV—RI disamping penerangan face to face-communication melalui RT/RW dilakukan pula. Hasil baik yang ditjapai dalam memberikan penerangan ini dapat diwujudkan terutama berkenaan dengan adanya koordinasi dan integrasi kegiatan penerangan Pemilu antara unsur Panitia Pemilihan Daerah dengan Djawatan Penerangan serta bagian-bagian penerangan dari Laksusda yang merupakan satu team yang kompak.

Disamping itu penerangan berupa visualisasi juga dilakukan antara lain dengan menerbitkan brosur, leaflets dan papan-papan poster ditempat-tempat yang dianggap strategis dan ramai dikundungi umum. Kesulitan yang dihadapi dalam hal penerangan ini ialah terutama bahwa lingkup dan intensitas kegiatan ternyata sangat dibatasi anggaran biaya yang tersedia. Namun dengan kebidaksanaan penggeseran dari pos ke pos yang sejenis dapat memungkinkan pelaksanaan tersebut.

2. 6. Keamanan

Dalam rangka penertiban pelaksanaan Pemilihan Umum 1971 ini beberapa ketentuan dan peraturan-peraturan telah dikeluarkan baik oleh Laksusda selaku Badan Keamanan tidak langsung maupun oleh Komdak Metro Djaya selaku Komando Keamanan langsung disamping oleh Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta.

Pengarahan dari tertib keamanan ini lebih ditunjukkan pada periode pendaftaran penduduk/pemilih, kampanye dan pemungutan suara, situasi dan stabilisasi sosial politik masyarakat. Sementara itu dilaporkan bahwa situasi sebelum periode persiapan tersebut telah cukup memberikan harapan yang baik dalam hubungan pelaksanaan Pemilihan Umum ini setjara aman, tertib dan lancar.

Beberapa pelanggaran yang sangat tidak berarti ada terdapat, namun tidak mempengaruhi jalannya pelaksanaan operasional Pemilu ini. Terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut telah diambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan melalui proses peradilan Kilat yang khusus dibentuk untuk itu.

2. 7. Administrasi.

Dalam pengolahan administrasi umum baik dalam masa persiapan maupun pelaksanaan operasional Pemilu 1971 telah diusahakan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penata usaha setjara tertib. Surat-menjurat maupun instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk guna memudahkan para aparaturnya melaksanakan tugasnya dapat diproses melalui mekanisme administratif yang lancar.

Kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dibidang administrasi ini adalah kurang lengkapnya peralatan kantor yang tersedia baik berupa mesin-mesin maupun meubelair; terutama pada saat pendahuluan dan puncak kegiatan administratif Pemilu sehingga mengakibatkan beberapa keterlambatan-keterlambatan penyelesaian beban-beban yang harus diselesaikan.

Volume kegiatan surat menjurat khususnja dan ketata usahaan umumnja tidak merupakan kegiatan yang rata intensitasnja. Load pekerjaan bervariasi banjaknja sesuai dengan matjam kegiatan pada suatu tahap tertentu.

Sebaliknya pelaksanaan setjara menjeluruh dari kegiatan administrasi ini dengan djumlah tenaga Sekretariat yang ada telah dapat dilakukan dengan baik. Penjediaan ruangan kantor yang tjukup memadai di Djalan Imam Bondjol 13 merupakan faktor yang berpengaruh pula dalam penjurusan administrasi yang baik.

2. 8. Perbekalan, peralatan dan pengelolaannja.

Kelengkapan merupakan faktor penentu pula terhadap berhasil atau tidaknja pelaksanaan Pemilu ini. Oleh karenanja pemenuhan pada kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan diusahakan sedemikian rupa dengan membentuk Panitia Pengadaan Barang-barang Kebutuhan Pemilu. Djuga kesulitan yang ditemukan dalam penjediaan alat kelengkapan seperti Kotak Kartu Pemilih dikarenakan djumlah anggaran yang di-disadjikan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Lembaga Pemilihan Umum dalam hal ini mengalokir djumlah anggaran yang sama untuk tiap desa diseluruh Kepulauan Indonesia walaupun djumlah kepadatan penduduk antara desa diluar Djakarta dengan desa/Kelurahan di Djakarta sangat djauh bedanja. Disamping itu penjadjian anggaran yang tidak sesuai dengan waktu yang dibutuhkan serta ketatnja peraturan U.P.I. (I.C.W.) mengakibatkan pelaksanaan penggunaan anggaran untuk kebutuhan alat kelengkapan tersebut kadang kala mengalami kesulitan-kesulitan. Tjontoh yang dapat dike-mukakan kebutuhan riel dari Kotak Suara dan pembuatan Tempat Pemungutan Suara di bulan Djuli 1971 (Kwartal II 1971/72) sedangkan anggaran itu telah disadjikan pada kwartal ke-III tahun anggaran 1970/1971.

Penjediaan alat kendaraan yang merupakan prasarana utama untuk pelaksanaan Pemilihan Umum di Daerah DCI Djakarta tjukup memuaskan dan mendapat perhatian penuh dari Lembaga Pemilihan Umum; walaupun droppingnja akan lebih bermanfaat apabila dapat disediakan lebih awal.

2. 9. Pengawasan.

Setiap kegiatan pelaksanaan operasional Pemilu ini pengawasan yang tertib tetap dilakukan disegala bidang baik berupa pengontrolan dan pengetjekan melalui surat menjurat maupun penindjauan ditempat. Dengan tjara ini maka setiap permasalahan yang timbul diwilayah segera dapat diatasi. Dengan demikian kemungkinan kematjetan atau hambatan lainnja dapat sedjauh mungkin dihindari. Rapat berkala setjara routine baik dari unsur Panitia maupun Sekretariat selalu dilakukan sebagai salah satu sarana komunikasi dan pengawasan langsung dan pengetjekan sampai dimana telah dilakukan setiap tahap kegiatan oleh aparat tingkat Kota, Ketjamatan maupun Kelurahan. Kesempatan pertemuan tersebut digunakan pula untuk memberikan tugas serta penegasan tanggung djawab untuk setiap anggota Panitia. Mereka sesuai dengan tingkatannja dibebani pula tugas pengawasan menurut pembagian masing-masing. Untuk dapat gambaran yang lebih djelas terhadap kegiatan operasional Pemilu ini dapat diuraikan setjara terperinci menurut bidang-bidang kegiatan Penjelenggaraan, Administrasi, Perbekalan dan Perhubungan, Pengawasan serta beberapa pokok bahan perbandingan antara Pemilu tahun 1955 dengan Pemilu 1971.

ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN DAERAH TK. I
D.C.I. DJAKARTA



WIRIADINATA
 Laks. Muda T.N.I./A.U.
 Pd. Wk. Gub. K.D.C.I. Djakarta/
 Wakil Ketua merangkap anggota
 P.P.D. D.C.I. Djakarta.



EMAN SJAHBAN
 Kol. T.N.I./A.D.
 Kodam V Djaya/Anggota P.P.D.
 D.C.I. Djakarta.



DJUMADJITIN, S.H.
 Sekretaris Daerah D.C.I. Djakarta.
 Anggota P.P.D.—D.C.I. Djakarta.



ALEXANDER WENAS

Wakil Ketua D.P.R.D.—G.R.—D.C.I. Djakarta
Anggota P.P.D.—D.C.I. Djakarta.



**HARSONO RADJAK
MANGUNSUDARSO**

Wakil Ketua D.P.R.D.—G.R.—D.C.I. Djakarta
Anggota P.P.D.—D.C.I. Djakarta.



M. MOEFFRENI MOE'MIN

Anggota D.P.R.D.—G.R.—D.C.I. Djakarta
Anggota P.P.D.—D.C.I. Djakarta.



Drs. MOH. DJAMIN ALI
Wakil Ketua D.P.R.D.—G.R.—D.C.I. Djakarta
Anggota P.P.D.—D.C.I. Djakarta.



H. AJATULLAH SALEH
Wakil Ketua D.P.R.D.—G.R.—D.C.I. Djakarta
Anggota P.P.D.—D.C.I. Djakarta.



Drs. JUNUSI JUSUF, A.K.B.P.
Komdak Metro Djaya/Anggota P.P.D.
D.C.I. Djakarta.



SOETJIPTO WIROSARDJONO, M.Sc.
Kepala Kantor Sensus & Statistik
D.C.I. Djakarta.
Sekretaris P.P.D. D.C.I. Djakarta

BAB III

PENJELENGGARAAN

3.1. Aparatur dalam persiapan; Project Officer.

Untuk memenuhi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. SDX 22/1/6 tanggal 23 Maret 1969 tentang beberapa masalah dalam menghadapi Pemilihan Umum, maka oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta dengan Surat Keputusan No. Ib. 3/1/43/69 tanggal 10 April 1969 telah ditunjuk dan ditetapkan Assisten Sekda *Teuku Akbar* sebagai Project Officer untuk persiapan Pemilihan Umum dalam wilayah DCI Djakarta. Tugas Project Officer ini ialah menjampaikan konsepsi-konsepsi serta mengumpulkan data-data dan evaluasi keadaan wilayah dalam hubungan dengan Pemilu, untuk disampaikan sebagai bahan dalam rapat kerdja Gubernur Kepala Daerah Tk. I seluruh Indonesia di Djakarta pada tanggal 19 s/d 22 Djanuari 1970.

Selanjutnja untuk memenuhi Instruksi Mendagri selaku Ketua Sektor Khusus J Pemilihan Umum No. 1/Inst/69 tanggal 17 Oktober 1969 tentang Pembentukan Sekretariat-sekretariat pada Tingkat Daerah, Kota dan Ketjamatan, maka dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah DCI Djakarta No. Aa.18/3/53/1969 tanggal 29 Desember 1969 telah dibentuk Sekretariat Pemilihan Umum untuk Tingkat Daerah DCI Djakarta dengan susunan sebagai berikut :

Kepala Sekretariat	: <i>Ilik Amir B.A.</i>
dengan membawahi bagian-bagian	
a. Kepala Pendaftaran	: <i>Burhanuddin Hs.</i>
b. Kepala Pengolahan	: <i>Drs. G. Hasibuan</i>
c. Kepala Penelitian & Penilaian	: <i>Omsjah Sinaga</i>
d. Kepala Umum/Perlengkapan dan Publikasi.	: <i>Gunarto S.H.</i>
e. Kepala Keuangan	: <i>Oebed Soebhagio</i>
f. Kepala Keamanan	: <i>Muchrodji</i>

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah No. Aa.18/3/51/1969 tanggal 29 Desember 1969 ditetapkan untuk tiap Ketjamatan ditunjuk 4 orang petugas Pemilu jang terdiri dari :

- a. Tjamat selaku Ketua Pelaksana.
- b. Wakil Tjamat selaku Sekretaris
- c. 2 orang Staf sebagai anggota Sekretariat.

Oleh karena Wilayah Kota di Daerah DCI Djakarta tidak merupakan Daerah Otonom yang perlu mengadakan persiapan Pemilihan Umum sebagaimana Daerah-daerah Tk. II lainnya, maka pada tingkat ini tidak diadakan Sekretariat tersebut.

Dalam pelaksanaan tugasnya Project Officer ini telah melaksanakan kegiatan dalam rangka memenuhi Instruksi Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Sektor Khusus J Pemilu No. 18 tahun 1969 tanggal 8 Nopember 1969 tentang Usaha-usaha Persiapan kearah kesiapan Operasionil Pemilihan Umum yang antara lain meliputi : penjurusan usul rentjana-rentjana organisasi aparatatur Panitia Pemilihan di beberapa tingkatan; penjurusan rentjana anggaran dan kebutuhan finansiel materiel; menjusun taksiran djumlah penduduk dan pemilih serta volume pekerdjaan; menjusun penilaian administratif dan politis sekitar penyelenggaraan Pemilu 1971; menjusun rentjana daftar tempat pemungutan suara dan lain-lainnya guna bahan rapat kerdja Gubernur seluruh Indonesia tersebut diatas. Didalam laporan tersebut dikemukakan pula gambaran serta perkiraan situasi dan perbandingan keadaan pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 1955 dan perkiraan situasi menjelang Pemilihan Umum 1971.

3. 2. Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta dan Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta.

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 6/Th. 1970 tanggal 19 Djanuari 1970 telah diangkat dan ditetapkan Gubernur Kepala Daerah DCI Djakarta selaku Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta. Selandjutnja dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 34/1970 tanggal 6 Pebruari 1970 telah diangkat dan ditetapkan anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta terdiri dari :

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. A. <i>WIRIADINATA</i>
Wakil Gubernur KDH. | selaku Wakil Ketua merangkap Anggota |
| 2. <i>DJUMADJITIN S.H.</i>
Sekda DCI Djakarta | selaku Anggota |
| 3. <i>AKBP. Drs. JUNUSI JUSUF</i>
Komdak Metro Djaya | selaku Anggota |
| 4. Letkol <i>EMAN SJAHBAN</i>
Kodam V Djaya | selaku Anggota |
| 5. <i>H. AJATULLAH SALEH</i>
Wakil Ketua DPRD-GR. | selaku Anggota |

6. *ALEXANDER WENAS* selaku Anggota
Wakil Ketua DPRD-GR.
7. *Drs. MOH. DJAMIN ALI* selaku Anggota
Wakil Ketua DPRD-GR.
8. *HARSONO RADJAK MANGUN- SUDARSO* selaku Anggota
Wakil Ketua DPRD-GR.
9. *M. MOEFFRENI MOE'MIN* selaku Anggota
Anggota DPRD-GR.

Untuk pelaksanaan tugas-tugas pada Panitia Pemilihan Daerah tersebut dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 5 Th. 1970 tanggal 17 Januari 1970 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Tingkat II, telah diatur tugas-tugas pokok serta kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dimaksud.

Sebagai kelengkapan PPD DCI Djakarta, maka dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 108/1970 tanggal 23 Maret 1970 telah diangkat dan ditetapkan Saudara *SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.*, Kepala Kantor Sensus dan Statistik DCI Djakarta disamping jabatannya tersebut sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta dengan membawahi Biro-biro dan Bagian-bagian sebagaimana yang diatur oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 5 Th. 1970 tersebut diatas.

Kelengkapan personalia dari Sekretariat ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No. Aa.18/3/70 tanggal 14 April 1970 dan No. 645/III/2/1970 tanggal 6 Djuli 1970.

Dengan terbentuknya Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah tersebut dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah DCI Djakarta No. Aa.18/3/4/70 tanggal 14 April 1970, Project Officer Pemilu DCI Djakarta ditarik kembali; demikian pula dengan Sekretariat Project Officer tersebut.

Personalialia yang menduduki Biro-biro dan Bagian-bagian pada Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta ini diambilkan dari unsur-unsur pegawai sipil Pemerintah Daerah DCI Djakarta, dari ABRI dan Instansi-instansi Pemerintah lain yang sehubungan dengan bidang tugasnya serta beberapa orang tenaga lepas.

Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta terdapat 4 Biro jaitu :

- A. **BIRO PENJELENGGARA** dikepalai oleh Saudara *BURHANUDDIN HS.* (Dari unsur Direktorat I/Pemerintahan DCI Jakarta) dengan membawahi bagian-bagian :
- a1. Bagian Penjelenggaraan dikepalai oleh Sdr. *FARID HAKIM* (Dari unsur Kantor Urusan Penduduk).
 - a2. Bagian Keamanan yang dikepalai oleh Sdr. *MUCHRODJI SUTOMO* (Dari unsur Direktorat II/Kamtib DCI Jakarta)
 - a3. Bagian Humas yang dikepalai oleh Sdr. *HERMAN SUMARNO*, atas permohonannya sendiri mengundurkan diri yang kemudian diganti oleh Sdr. *SUMARDI* (Dari unsur Djapen DCI atas penundjukan Kepala Djapen DCI Jakarta)
 - a4. Bagian Dokumentasi & Statistik yang dikepalai oleh Sdr. *SUPODO* yang kemudian digantikan oleh Sdr. *BURDIAS BURHANUDIN B.St.* (Dari unsur Kantor Sensus & Statistik DCI Jakarta)
- B. **BIRO ADMINISTRASI** dikepalai oleh Sdr. *GUNARTO S.H.* (Dari unsur Direktorat I/Pemerintahan DCI Jakarta) dengan membawahi bagian-bagian :
- b1. Bagian Tata Usaha yang dikepalai oleh Sdr. *PANDJI MURDI*, yang kemudian kembali ke instansi asalnya dan jabatan tersebut kemudian dirangkap oleh Kepala Biro Administrasi.
 - b2. Bagian Urusan Dalam yang dikepalai oleh Sdr. *SUGIARTO B. BA.* (Tenaga lepas)
 - b3. Bendaharawan yang dikepalai oleh Sdr. *OEBED SOE-BHAGIO* (Dari unsur Direktorat VI/Kuangan DCI Jakarta)
- C. **BIRO PERBEKALAN & PERHUBUNGAN** yang dikepalai oleh Sdr. *Drs. MAX SUMARAW* (Dari unsur Direktorat I/Pemerintahan DCI Jakarta) dengan membawahi bagian-bagian :
- c1. Bagian Pengadaan yang dikepalai oleh jabatan rangkap Kepala Biro yang bersangkutan.
 - c2. Bagian Alokasi yang dikepalai oleh Sdr. *SUKADI S.H.* (Dari unsur Direktorat I/Pemerintahan DCI Jakarta) yang kemudian kembali ke instansi asalnya digantikan oleh Sdr. *DJOKO SUDONO* (Tenaga lepas)
 - c3. Bagian Angkutan dan Perhubungan yang dikepalai oleh jabatan rangkap Kepala Biro yang bersangkutan.

D. BIRO PENGAWASAN jang dikepalai oleh Sdr. *HELIOS KUNTO S.H.* jang atas permintaannya sendiri berhenti dan digantikan oleh Sdr. *E. PANDJAHITAN S.H.* dari unsur Kedjaksanaan Tinggi. Biro ini membawahi bagian-bagian.

- d1. Bagian Pengawasan Tehnis Pemilihan Umum jang dikepalai oleh Sdr. *Drs. F. SAHADI* (Unsur Direktorat II DCI Djakarta) jang kemudian kembali ke instansi asalnya dan dirangkap oleh Kepala Biro jang bersangkutan.
- d2. Bagian Pengawasan Keuangan jang dikepalai oleh Sdri. *ERNY S.H.* (Tenaga lepas).
- d3. Bagian Pengawasan Barang jang dikepalai oleh Sdr. *ATANG DANAKUM* (Tenaga lepas) kemudian diberhentikan dari jabatannya karena tidak pernah aktif dalam melakukan tugasnya.

Walaupun pembagian tugas diatur menurut Biro-biro dan bagian-bagian tersebut diatas, namun setjara menjeluruh tugas tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan jang lain sehingga penjelenggaraannya dilaksanakan setjara dikoordinir dengan erat.

Namun tiap kegiatan masing-masing Biro dan bagian-bagian dimaksud tetap berpedoman dan terarah sesuai dengan garis jang telah ditentukan.

Sebagai realisasi pasal 12 dari lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 5 th. 1970, maka kepada anggota Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta dengan Nota Dinas Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No. 511/III/2/1970 tanggal 21 Mei 1970 telah diatur pembagian tugas dan tanggung jawab untuk masing-masing sebagai berikut :

1. Penanggung Djawab Umum : Gubernur Kepala Daerah/
Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta.
2. Penanggung Djawab Harian : Wakil Gubernur Kepala Daerah/Wakil Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta.
3. Pengawas Sekretariat : Anggota Sdr. *DJUMADJITIN S.H.*
4. Sdr. Letkol. *EMAN SJAHHAN* bertugas sebagai penghubung antara Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta dengan Kodam V/Djaya.

5. Sdr. AKBP *Drs. JUNUSI JUSUF* bertugas sebagai penghubung antara Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta dengan Komdak Metro Djaya.

sedangkan :

6. Sdr. *Drs. MOH. DJAMIN ALI* untuk wilayah Jakarta Selatan, Sdr. *ALEXANDER WENAS* untuk wilayah Jakarta Pusat, Sdr. *HARSONO RADJAK MANGUNSUDARSO* untuk wilayah Jakarta Barat.

Sdr. *M. MOEFFRENI MOE'MIN* untuk wilayah Jakarta Utara, Sdr. *H. AJATULLAH SALEH* untuk wilayah Jakarta Timur, bertugas untuk mengawasi kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum tingkat Kota di wilayah masing-masing sebagai tersebut diatas. Disamping itu kepada mereka ditugaskan pula untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang dipandang perlu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilu.

3. 3. Panitia-panitia Pemilihan pada Tingkat Kota, Ketjamatan dan Kelurahan (P.P. Kota, P.P.S., dan P.P.P.).

Pokok-pokok Kebidaksanaan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta tanggal 30 Maret 1970, untuk pelaksanaan penjurusan Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta dan perangkat kelengkapannya diselenggarakan di wilayah Administratif, Ketjamatan dan Kelurahan, adalah seperti yang tertuang dalam Nota Dinas Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta No. 645/III/2/1970 tanggal 15 Mei 1970 tentang Struktur dan personalia Panitia Pemilihan pada tiap-tiap eselon tersebut.

Untuk Panitia Pemilihan Tingkat II oleh karena di Daerah DCI Jakarta kelima wilayah kotanya adalah merupakan daerah administratif, maka sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia No. 2 th. 1970 tanggal 16 April 1970 tentang membentuk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II di tiap-tiap Kotamadya dan Ketjamatan, maka dibentuklah Panitia Pemilihan Kota dengan personalia yang ditentukan sebagai berikut :

- | | | | |
|----|-------------------------|---|---------------------------------------|
| a. | Walikota | : | sebagai anggota merangkap Ketua |
| b. | Wakil Walikota | : | sebagai anggota merangkap wakil Ketua |
| c. | Unsur dari Kodim | : | sebagai anggota |
| d. | Unsur dari Komwil | : | sebagai anggota |
| e. | Unsur dari Kedjaksanaan | : | sebagai anggota |

- f. Unsur dari AURI : sebagai anggota (Chusus untuk Kota Djakarta Timur)
- g. Unsur dari ALRI : sebagai anggota (Chusus untuk Kota Djakarta Utara)

Untuk itu dengan S.K. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No. 539/III/2/1970 tanggal 29 Mei 1970 telah diangkat dan ditetapkan masing-masing personalia Panitia Pemilihan pada 5 wilayah Kota Administratip tersebut dengan tugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta dalam wilayahnya masing-masing dan
- b. mengkoordinir, mengawasi dan meneliti pelaksanaan operasional Pemilu pada eselon-eselon dibawah dalam wilayahnya.

Sebagai alat kelengkapan Panitia Pemilihan Kota tersebut, maka dibentuk pula sekretariat beserta Biro dan bagiannya untuk masing-masing wilayah kota administratip tersebut dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No. 558/III/2/1970 tanggal 2 Juni 1970.

Pada tingkat Ketjamatan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia No. 1 th. 1970 tanggal 16 April 1970 telah ditetapkan Panitia-panitia Pemungutan Suara pada tiap wilayah Ketjamatan dengan personalianja yang ditentukan sebagai berikut :

- 1. Tjamat : sebagai anggota merangkap Ketua
- 2. Wakil Tjamat : sebagai anggota merangkap Wakil Ketua
- 3. Unsur Koramil : sebagai anggota
- 4. Unsur Komsekko : sebagai anggota
- 5. Unsur Parpol (Nasionalis) : sebagai anggota
- 6. Unsur Parpol (Agama) : sebagai anggota
- 7. Unsur Golkar : sebagai anggota

Dengan surat instruksi Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No. 306/III/2/1970 tanggal 16 April 1970 telah diinstruksikan kepada masing-masing Walikota untuk segera mengangkat dan menetapkan Panitia-panitia Pemungutan Suara beserta sekretariatnya untuk masing-masing Wilayah Ketjamatan dalam wilayah kota masing-masing sesuai dengan pasal 8 ayat 4 sub. d dan e Undang-undang No. 15 th. 1969 jo PP. No. 1 th. 1970 pasal 12 dan 13 serta instruksi Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia tanggal 14 April 1970 No. 14/11/70.

Demikian pula halnya pada tiap tingkat Kelurahan telah dibentuk Panitia-panitia Pendaftaran Pemilih dengan personalianja dari unsur Pemerintah sebagai berikut :

1. Lurah : sebagai anggota merangkap Ketua
2. Wakil Lurah : sebagai anggota merangkap Wakil Ketua
3. Unsur Babinsa : sebagai anggota
4. Unsur Binamas : sebagai anggota dan
5. Seorang staf Kelurahan : sebagai Sekretaris.

3. 4. Kegiatan-kegiatan pendahuluan

Sesuai dengan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Pebruari 1970 No. 4/III/K/1970 dari staf Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta telah dikirimkan ke Pusat sejumlah 3 (tiga) orang masing-masing Sdr. *ILIK AMIR B.A.* Sdr. *BURHANUDDIN HS.* dan Sdr. *GUNARTO S.H.* guna mengikuti santiadji yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum/Panitia Pemilihan Indonesia selama 6 hari.

Tenaga-tenaga yang telah mengikuti santiadji tersebut diatas dipersiapkan pula untuk dapat memberikan santiadji kepada aparat pelaksana pada eselon tingkat bawah.

Dalam rapat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta yang pertama telah diputuskan agar Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta segera pula mengadakan santiadji/coaching terhadap para petugas Pemilu pada eselon bawah.

Mengingat djumlah Panitia-panitia yang ada di DCI Djakarta serta praktis hubungan yang sangat mudah, maka dengan instruksi Wakil Gubernur Kepala Daerah/Wakil Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta tanggal 19 Maret 1970 No. 63/III/2/1970 telah dilakukan coaching/santiadji untuk tiap kota a 3 orang = 15 orang dan untuk tingkat Ketjamatan a 3 orang = 81 orang. Santiadji diadakan sesuai dengan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 5 Maret 1970 No. SDP/23/3/1; untuk Djakarta program tersebut diadakan selama 3 hari mulai tgl. 25 s/d 28 Maret 1970 dengan 20 djam peladjaran, bertempat di Kompleks Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat Kebon Djeruk dengan mewajibkan para peserta untuk di asramakan.

Bahan-bahan coaching yang diberikan terdiri dari :

- bahan-bahan Pemilu yang diberikan oleh LPU/PPI termasuk peraturan perundang-undangannya.
- hubungan Sensus dengan Pemilu
- hubungan Keamanan dengan Pemilu

- hubungan Penerangan dengan Pemilu
- latihan praktek dilapangan :
 - a. tjara mendaftar para pemilih/penduduk
 - b. tjara pemungutan suara

Para pengadjar/pemberi santiadji disamping tenaga jang pernah mengikuti Santiadji pada LPU/PP1 djuga dimintakan tenaga-tenaga dari :

- a. Laksus Kopkamtibda Djaya
- b. Komdak Metro Djaya
- c. Kantor Sensus & Statistik DCI Djakarta dan
- d. Djawatan Penerangan DCI Djakarta.

Chusus kepada Panitia Pendaftaran Pemilih lebih banjak diberikan bahan santiadji berupa *tata tjara tehnik pendaftaran penduduk/pemilih* walaupun tata tjara penjelenggaraan Pemilihan Umum setjara garis besarnja diberikan pula, sebagai bahan pengetahuan petugas seperlunja. Didalam pemberian santiadji ini lebih banjak merupakan penguraian bahan-bahan tertulis jang ada. Sedangkan beberapa tjontoh formulir jang sesungguhnya untuk dipergunakan dalam Pemilihan Umum tahun 1971 tidak dapat diperagakan karena pada saat santiadji diadakan bahan-bahan formulir tersebut belum tersedia.

Pemberi santiadji untuk P.P.P. di Kelurahan ditugaskan kepada para peserta-peserta santiadji dari petugas Pemilu ditingkat Kota dan P.P.S.-nja masing-masing menurut wilayah mengadakan sendiri-sendiri. Dalam djadwal santiadji P.P.P. ditetapkan bahwa selambat-lambatnja pada achir bulan Mei 1970 sudah harus selesai.

Demikian pula kepada masjarakat melalui organisasi-organisasi jang ada seperti RT/RW dan pemuka-pemuka masjarakat dilakukan pula santiadji melalui suatu rapat besar RT/RW se DCI Djakarta jang diadakan di Gedung Istora Senajan tanggal 20 April 1970 dengan pemitjara Utama Bapak Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU (vide Instruksi Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No. 309/III/2/1970 tanggal 16 April 1970). Djuga pada Kantor-kantor Pemerintah dan Swasta, Kesatrian-kesatrian dan Kesatuan-kesatuan ABRI dilakukan pula penerangan dan santiadji-santiadji jang sama. Terhadap jang terachir ini santiadji tersebut diberikan disamping berupa peragaan lebih banjak sifatnja berupa penerangan-penerangan.

3. 5. Pendaftaran Penduduk/pemilih.

Oleh karena per-Undang-undangan Pemilu 1971 menjebutkan bahwa dalam menetapkan djumlah wakil pada tiap Lembaga Perwakilan diperhitungkan djuga berdasarkan djumlah penduduk, maka diadakanlah pendaftaran pemilih sekaligus bersama dengan pelaksanaan pendaftaran penduduk. Untuk itu telah dikeluarkan Instruksi Bersama Menteri Da-

lam Negeri/Ketua LPU dan Kepala BPS tanggal 31 Maret 1970 No. 124/1970 dimana ditetapkan antara lain :
P. 15/1970

- a. Kegiatan pendaftaran pemilih dan pendaftaran penduduk W.N.I. dimulai pada tanggal 5 Djuli 1970
- b. Pendaftaran Penduduk dan pendaftaran Pemilih pelaksanaannya diintegrasikan dan dikerdjakan bersama-sama oleh petugas dari Panitia Pendaftaran Pemilih dan Kantor Sensus & Statistik Daerah.
- c. Penjusunan daftar pemilih dilakukan berdasarkan atas hasil kegiatan petugas-petugas tersebut diatas.

Di DCI Djakarta pelaksanaan pendaftaran ini diintegrasikan dengan seorang petugas untuk melakukan pekerjaan rangkap baik sebagai petugas pendaftaran pemilih (Pemilu) yang djuga sekaligus sebagai petugas pendaftaran penduduk (Sensus). Petugas-petugas ini diambil dari unsur-unsur Pegawai Negeri, unsur-unsur RT/RW dan Mahasiswa yang sebelumnya diberikan petunjuk praktis dalam tata pelaksanaan pendaftaran pemilih oleh masing-masing PPS dan PPP yang bersangkutan. Pendaftaran ini dibagi menurut kelompok-kelompok. Pengelompokan ini disusun sesuai dengan batas-batas Blok Sensus/RT dan disesuaikan pula dengan djumlah pemilih per TPS, dalam rangka penjemputan rentjana pembentukan TPS-TPS. Tehnis pelaksanaan pendaftaran pemilih ini dibebani pula dengan pekerjaan untuk sekaligus memperhatikan persjajaran per-Undang-undangan Pemilu tentang orang-orang yang tidak berhak didaftar sebagai pemilih.

Tugas ini ternyata memerlukan waktu yang banjak karena pendaftaran pemilih adalah merupakan kegiatan untuk mengutip daftar nama dari hasil pendaftaran Sensus/Rumah Tangga yang pada azasnja mendaftar setiap orang. Untuk menentukan siapa-siapa yang tidak didaftar sebagai pemilih, dari Laksus Kopkamtibda Djaya telah diterima daftar nama-nama orang-orang yang dimaksud. Disamping itu diterima pula daftar nama-nama yang disampaikan oleh Pamong Pradja dan telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Daftar-daftar ini dalam kenjataanja diterima tidak tepat waktunja menurut djadwal pendaftaran pemilih dan tidak memuat kelengkapan identitas yang diperlukan guna penelitian di Daftar Pemilih. Khusus terhadap para Tuna dan awak kapal serta nelayan-nelayan yang pada umumnja tidak bertempat tinggal tetap, dilakukan pendaftaran yang khusus. Pendaftaran untuk mereka ini dilakukan pada suatu waktu yang khusus dan tempat yang tertentu pada hari menjelang achir selesainya pendaftaran pemilih.

Ketjepatan gerak mutasi penduduk baik karena inisiatip sendiri maupun dikarenakan oleh suatu akibat dari ketentuan Pemerintah Daerah,

seperti pindahan karena terkena proyek pembangunan atau pemindahan karena penertiban atas wilde occupatie atau bentjana alam lainnja menjabkah proses pendaftaran pemilih dan pemeliharaan Daftar Pemilih sangat memakan banjak tenaga.

Disamping itu, jarak waktu antara achir pendaftaran pemilih (Oktober 1970) dengan waktu Pemungutan Suara (3 Djuli 1971) agak terlalu pandjang (lebih kurang 8 bulan), sehingga dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan administratif dalam pengelolaannja karena banjakkja mutasi. Demikian pula alat kelengkapan untuk keperluan pendaftaran penduduk dan pemilih baik berupa alat-alat tulis seperti: tinta, pensil, kertas-kertas tjatatan, stap map, terutama ditingkat P.P.P./Kelurahan dan lain-lainnja tidak tersedia (karena tidak dianggarkan) merupakan handicap jang mempengaruhi kelantjaran tugas pendaftaran dimaksud. Sementara itu djuga sifat kegiatan dari sementara penduduk Djakarta jang mobile (pedagang) dan sebagainya, menjabkan penyelesaian penanda tangan untuk kartu pendaftaran pemilih (Model A1) tidak dapat terselesaikan pada waktunja. Setiap petugas mengundjungi kerumah penduduk jang tergolong dalam katagori ini selalu jang bersangkutan sedang bepergian/tidak berada dirumah. Guna pelaksanaan pendaftaran ini tertjatat untuk seluruh D.C.I. Djakarta 6.550 petugas, 19.920 Blok Sensus, 20.351 RT, 8.105 TPS dan djumlah pemilih 2.140.591 orang.

Permulaan pendaftaran ini dapat dilakukan serentak pada tanggal 5 Djuli 1970. Seminggu sebelumnja telah diadakan siaran-siaran pemberitahuan melalui mass-media jang ada serta pengumuman-pengumuman dalam rapat RT/RW.

Praktis pendaftaran dari rumah kerumah dapat diselesaikan dalam djangka waktu 20 hari. Sedangkan sisa waktu jang 10 hari lagi digunakan untuk menjusun Daftar A (Daftar Pemilih) dan tepat pada waktunja Daftar Pemilih Sementara tersebut dapat diumumkan kepada masjarakat melalui masing-masing Kantor Kelurahan.

Selama masa pengumuman ini jaitu ± 30 (tiga puluh) hari, masjarakat pemilih ternjata sangat kurang animonja untuk memeriksa nama-nja dalam daftar-daftar jang diumumkan tersebut. Demikianlah maka pada pendaftaran tambahan, masih banjak ($\pm 5\%$) pemilih-pemilih jang harus didaftar kemudian.

3. 6. Data Pendaftaran Penduduk/Pemilih.

Untuk kepentingan ketertiban pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pemilih di D.C.I. Djakarta maka wilayah pentjataan (enumeration area) lebih dahulu diatur/dibagi sesuai dengan kebutuhan pendaftaran. Berdasarkan pedoman persiapan Sensus Penduduk, wilayah ini merupa-

kan suatu lingkungan tempat tinggal yang terdiri dari beberapa rumah tangga dengan disebut „Blok Sensus”. Untuk memudahkan pelaksanaan ini dengan Instruksi Gubernur No. Ac.8/1/43/1970 tanggal 1 April 1970 diadakan penertiban-penertiban terhadap lingkungan RT/RW sehingga lingkungan untuk satu RT akan menjadi sama dan memenuhi syarat untuk satu Blok Sensus.

Demikian pula untuk 2 sampai 3 RT/Blok Sensus dengan dasar ketentuan antara 200 s/d 300 orang pemilih dapat digunakan dasar pembentukan T.P.S.

Dari hasil-hasil pendaftaran dan penjempurnaan angka-angka tersebut, tertjatat data-data sebagai berikut (keadaan akhir Djuni):

	Blok Sensus	Penduduk	Pemilih
1. Djakarta Pusat	5.455	1.380.551	626.321
2. Djakarta Utara	2.810	576.012	287.094
3. Djakarta Barat	3.939	791.844	376.309
4. Djakarta Selatan	3.616	1.021.921	491.516
5. Djakarta Timur	4.100	780.153	359.351
Djumlah seluruh Djakarta.	19.920	4.550.481	2.140.591

Perintjian setjara mendetail tentang angka Penduduk keadaan sampai bulan Oktober 1970 telah tertjantum dalam Dokumen Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta yang merupakan lampiran dari laporan Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD DCI Djakarta dalam rapat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia tanggal 26 s/d 28 Oktober 1970. Dengan perkembangan terachir serta kebidjaksanaan dalam penyelenggaraan pemungutan suara, maka terhadap djumlah T.P.S. terpaksa diadakan perbaikan-perbaikan/pemetjahan. Hal ini disebabkan karena dirasakan djumlah pemilih yang tertjatat untuk beberapa TPS melebihi dari ketentuan yang berlaku sebagaimana ketetapan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri/Ketua Sektor Khusus J Pemilihan Umum No. 18 tahun 1969 tanggal 8 Nopember 1969.

Demikian pula dengan pembentukan TPS pada Unit kerdja/Kantor, yang djuga telah mengakibatkan djumlah TPS mengalami perubahan/penambahan.

Pada saat terachir menjelang pemungutan suara djumlah TPS tertjatat :

	U m u m	Kantor	Mobile dan Tunawisma
1. Djakarta Pusat	2.379.	498.	16.

2.	Djakarta Utara	1.030.	271	6.
3.	Djakarta Barat	1.515.	114.	5.
4.	Djakarta Selatan	1.984.	138.	2.
5.	Djakarta Timur	1.398.	72.	1.
	Djumlah seluruh Djakarta.	8.306.	1.093	30.

3. 7. Pentjalonan

Sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Lembaga Pemilihan Umum maka penetapan organisasi PARPOL dan GOLKAR yang telah disahkan untuk turut dalam Pemilu 1971 ini tertuang dalam Keputusan Presiden No. 43 thn. 1970 tanggal 23 Mei 1970. Selanjutnya tata tjara pentjalonan untuk Pemilihan Anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II diatur dalam Keputusan Presiden No. 40 th. 1970 tanggal 23 Mei 1970. Kepada organisasi PARPOL dan GOLKAR dalam daerah DCI Djakarta sesuai dengan Pedoman Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 56/LPU/70 tanggal 3 Oktober 1970 mulai tanggal 15 Nopember 1970 telah diundang untuk mengajukan tjalon-tjalonnya guna diikuti sertakan dalam pemilihan Keanggotaan DPRD Tk. I DCI Djakarta. Mulai tanggal 2 Nopember 1970 (berhubung permulaan Puasa terpaksa diundur satu hari) sampai dengan tanggal 14 Nopember 1970 para organisasi PARPOL/GOLKAR dimaksud telah mengambil formulir untuk pentjalonan bagi masing-masing anggotanya yang berupa formulir B, B1, C, D, E1, E2, E3, E4, E5; sedangkan formulir B2 tidak digunakan dikarenakan pentjalonan keanggotaan DPRD DCI Djakarta tidak didasarkan kepada daerah Tk. II. Untuk mempertjepat dan mempermudah organisasi dalam penyelesaian pengaduan tjalon-tjalon tersebut, maka dalam batas-batas yang memungkinkan, oleh pihak Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta telah diberikan bantuan antara lain dengan tjara menjampaikan sendiri formulir-formulir yang dibutuhkan oleh Organisasi PARPOL/GOLKAR, membebaskan biaya-biaya Administrasi perjalanan masyarakat untuk mendapatkan surat-surat keterangan yang dibutuhkan oleh Tjalon dari Pamong Pradja, Kepolisian, kesehatan dan lain sebagainya. Surat-surat yang tersebut belakangan ini diperlukan guna lapihan surat-surat pentjalonan. Kebidjaksanaan ini dituangkan dalam surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No. 1007/III/2/1970 tanggal 2 Nopember 1970 tentang Pemberian Surat Keterangan guna keperluan pentjalonan dan Instruksi Kadapol Metro Djaya No. 18/SEKR/INST/Komdak Metro Djaya/1970 tanggal 12 Desember 1970 tentang Pemberian prioritas surat keterangan guna keperluan pentjalonan serta surat Kepala Dinas Kesehatan DCI Djakarta No. 3253/Um/1970 tanggal 22 Desember 1970 tentang surat

keterangan kesehatan jiwa untuk para tjalon anggota DPRD DCI Djakarta.

Djuga kepada para pengurus organisasi PARPOL/GOLKAR dengan surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta tanggal 10 Desember 1970 No. 1030/III/1/1970 perihal Petundjuk tentang tjara Pentjalonan, diberikan petundjuk-petundjuk dan pendjelasan-pendjelasan tjara-tjara mengisi formulir oleh organisasi masing-masing.

Menurut djadwal, pemasukan terachir dari surat-surat pentjalonan tersebut ditentukan pada tanggal 13 Djanuari 1971. Namun ternjata oleh beberapa tjalon masih belum dapat diselesaikan pada waktunja beberapa surat-surat keterangan guna lampiran surat pentjalonan tersebut; antara lain Surat Keterangan G.30.S., Surat Keterangan Dokter tentang Kesehatan Jiwa dan surat izin dari instansi/kantor bagi pegawai negeri yang masih aktif bekerdja.

Sesuai dengan surat kawat Menteri Dalam Negeri Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 2 Djanuari 1971 No. 6/11/71 ditegaskan bahwa pengadjuan surat pentjalonan formulir model B tetap dilakukan selambat-lambatnja tanggal 13 Djanuari 1971 oleh Organisasi yang bersangkutan; sedangkan bila pada tanggal tersebut surat-surat keterangan lain sebagai lampiran dari surat pentjalonan tersebut belum selesai dapat disampaikan selambat-lambatnja pada tanggal 13 Pebruari 1971.

Pada kesempatan ini djuga diperkenankan kepada organisasi untuk mengadakan perbaikan dan perobahan-perobahan terhadap penulisan nama tjalon, penempatan urutan-urutan tjalon dan perbaikan-perbaikan lainnja; namun tidak berarti kesempatan untuk penambahan djumlah tjalon.

Untuk memudahkan hubungan antara organisasi PARPOL/GOLKAR dengan Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta didalam penjelesaian hal-hal yang menjangkut kepentingan organisasi PARPOL/GOLKAR dalam rangka Pemilihan Umum, maka dengan Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta tanggal 25 Djanuari 1971 No.0062/III/1/1971 dimintakan kepada masing-masing organisasi PARPOL/GOLKAR menundjuk seorang penghubung yang mempunyai mandat penuh petugas dari organisasi.

Dengan demikian setjara routine dan berkala selalu diadakan pertemuan-pertemuan/musjawarah-musjawarah dengan wakil organisasi tersebut dalam penjelesaian hal-hal yang menjangkut kepentingan organisasi dan Panitia didalam pelaksanaan Pemilu ini.

Guna penelitian tjalon-tjalon yang diajukan sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 39 tahun 1970 tanggal 23 Mei 1970 dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 31. Oktober 1970 No. 74/LPU/70 telah

dibentuk Panitia Peneliti Daerah DCI Djakarta yang terdiri dari :

1. Ketua merangkap anggota : *SANTOSO WIWOHO S.H.*
Unsur dari Kejaksaan Tinggi D.C.I. Djakarta.
2. Sekretaris merangkap anggota : *SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.*
Unsur dari Pemerintah Daerah/Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta.
3. Anggota : Major Inf. *K. SIMBOLON*
Unsur dari Kodam V/Djaya/Laksus Kopkamtibda Djaya.
4. Anggota : *A.K.P. SOETRISNO*
Unsur dari Komdak Metro Djaya.
5. Anggota : *DJUMADJITIN S.H.*
Unsur dari Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta.
6. Anggota : *Drs. F.H. HUTASOIT*
Unsur dari Pemerintah Daerah.

Panitia tersebut bertugas untuk melakukan kegiatan penelitian terhadap tjalon-tjalon yang diadjudkan dibidang tehnis-administratif, sebagaimana ditetapkan sebagai persyaratan dari tjalon-tjalon yang diadjudkan menurut ketentuan yang ada. Disamping itu pada Laksus Kopkamtibda Djaya dibentuk pula Team Peneliti dengan Surat Keputusan Panglima Laksus Kopkamtibda Djaya No. Kep-057/PC/9/70 tanggal 2 September 1970 dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : Asisten 1 Kaskodam V Djaya
2. Anggota : Asisten 5 Kaskodam V Djaya
3. Anggota : Asisten 6 Kaskodam V Djaya
4. Anggota : Pairdam V Djaya
5. Anggota : Pakehdam V Djaya.

Team ini bertugas untuk melakukan penelitian terhadap tjalon keanggotaan DPRD DCI Djakarta dibidang politis dan ideologis. Dari hasil penelitian ini baik oleh Panitia Peneliti maupun Team Peneliti telah dapat disusun suatu Daftar Tjalon Sementara untuk anggota DPRD DCI Djakarta guna Pemilihan Umum tahun 1971. Daftar Tjalon Sementara tersebut mulai tanggal 14 Maret 1971 selama 30 hari telah disebarakan untuk diumumkan kepada masyarakat luas melalui aparat Pemerintah Daerah sampai dengan Kelurahan dan RT/RW, ditempelkan

pada tempat-tempat yang strategis dan ramai dikunjungi orang seperti Kantor-kantor Pemerintah, Kantor-kantor Swasta, Stasiun, Terminal Bus, Pasar-pasar dan tempat-tempat lainnya diseluruh pelosok DCI Jakarta. Dari hasil penelitian beberapa persyaratan administratif pada lampiran surat-surat keterangan tjalon masih terdapat kekurangan-kekurangan persyaratan yang ditentukan. Namun kemudian oleh pihak Lembaga Pemilihan Umum/Panitia Pemilihan Indonesia dengan Surat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 22/11/1971 tanggal 13 Januari 1971 sementara diperkenankan untuk misalnya sebagai Surat Keterangan Kesehatan Jiwa tjukup dari Dokter Umum Pemerintah.

Sedangkan dari Team Peneliti beberapa tjalon yang kurang memenuhi persyaratan politis ideologis diadakan penggeseran nomor urut tjalon ketempat yang terbawah sebagaimana yang dimaksud Surat Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 131/11/1971 tanggal 6 Maret 1971.

Selama masa pengumuman Daftar Tjalon Sementara tersebut, dari masyarakat dan organisasi telah mengadakan protes/keberatan terhadap tjalon-tjalon organisasi yang diajukan tersebut.

Protes tersebut sejumlah 9 (sembilan) organisasi yang mengajukan dan sejumlah 5 (lima) perorangan. Namun semua protes tersebut tidak disertai bukti-bukti/fakta-fakta yang tjukup menguatkan terhadap materi keberatannya itu, sebagaimana diharuskan dalam ketentuan yang ada. Sebagai usaha preventif, walaupun sebenarnya materi dan penjam-paian protes-protes tersebut setjara juridis tidak dapat dipertanggung-jawabkan, namun surat-surat protes tersebut menjadi bahan pertimbangan Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta. Untuk itu bahan-bahan tersebut diteruskan kepada Laksus Kopkamtibda Djaya dan Direktorat VII/Chusus Politik DCI Jakarta untuk perhatiannya. Setelah melalui konsultasi dan pertimbangan-pertimbangan politis dan situasi dalam menghadapi Pemilu oleh Laksus Kopkamtibda Djaya telah diberikan perbaikan-perbaikan terhadap tjalon yang semula tergeser jauh kebawah untuk dinaikkan kebatas-batas nomor urut tertentu.

Terakhir didalam penjurusan Daftar Tjalon Tetap dengan melalui konsultasi serta penyesuaian dari masing-masing wakil organisasi PARPOL/GOLKAR pada tanggal 20 April 1971 telah dapat ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta suatu Daftar Tjalon Tetap dan telah dituangkan dalam Lembaran Daerah Pemerintah Daerah DCI Jakarta No. 36 tahun 1971. Dari hasil-hasil pentjalonan untuk Daerah DCI Jakarta tidak terdapat penggabungan suara untuk antar organisasi (Stembus-accord).

3. 8. Kampanje.

Sesuai dengan jadwal peraturan dan per-Undang-undangan Pemilu, maka Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta telah memberi kesempatan sebaik-baiknya kepada organisasi PARPOL/GOLKAR yang turut dalam Pemilu 1971 untuk mengadakan kampanye Pemilihan Umum guna mengemukakan program-program masing-masing melalui rapat-rapat umum, penerangan, pertunjukan-pertunjukan, poster-poster, spanduk-spanduk dan lain-lain kegiatan kampanye yang berbentuk visualisasi sebagai alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Kep. Pres. No. 68 tahun 1970 tanggal 27 Oktober 1970.

Untuk kepentingan keseragaman pelaksanaan teknis pengamanan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum pada umumnya, maka seluruh aparat Pemilu di Daerah DCI Djakarta telah mengadakan rapat kerja di Puntjak dari tanggal 4 s/d 6 Januari 1971 dan berhasil merumuskan langkah-langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan pengaturan tertib dan keamanan kampanye.

Untuk tertibnya penyelenggaraan kampanye maka oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dengan keputusannya No. 39/LPU/1971 tanggal 22 April 1971 dan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD DCI Djakarta No. 0372/III/2/1971 tanggal 21 April 1971 serta Instruksi Kadapol Metro Djaya No. 3/I/Instr/Dak Metro Djaya/1971 tanggal 1 Februari 1971 telah diatur beberapa ketentuan tata-tertib pelaksanaan bagi organisasi PARPOL/GOLKAR dalam mengadakan Kampanje di Daerah DCI Djakarta. Keputusan tersebut mengatur antara lain : jadwal waktu dan tempat setjara bergilir menurut organisasi dan disesuaikan dengan wilayah/lapangan tempat berkampanje.

Saat mulanya berkampanje telah ditentukan yakni tanggal 27 April 1971; pada hari tersebut semua organisasi sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan kampanye. Namun pada minggu-minggu pertama kegiatan kampanye yang berupa rapat-rapat umum dan penempelan-penempelan tanda gambar hanya dilakukan oleh 3 organisasi PARPOL/GOLKAR yakni: GOLKAR, N.U. dan P.N.I. Sedangkan organisasi lainnya tampaknya masih mempergunakan waktu tersebut untuk mengadakan konsolidasi kedalam berupa pertemuan-pertemuan intern sambil melihat perkembangan situasi dan kondisi dari kegiatan organisasi-organisasi lainnya.

Bantuan materiel yang diberikan Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta guna kelanjutan organisasi tersebut untuk berkampanje antara lain berupa sarana kampanye, yaitu dengan menempatkan sejumlah papan-papan untuk tempat-tempat penempelan tanda gambar, poster-poster dan sebagainya dari organisasi PARPOL/GOLKAR ditempat-

tempat strategis pada kelima wilayah dalam DCI Djakarta, alat-alat kantor berupa kertas-kertas stensil, podium/panggung lima buah untuk 5 wilayah. Sedangkan dari Pemerintah Daerah diberikan pula bantuan kendaraan bermotor Jeep Isuzu serta uang/dana sejumlah Rp. 12 djuta sebagai sumbangan untuk organisasi-organisasi tersebut dalam mengadakan kegiatan kampanye.

Beberapa pelanggaran atas tata-tertib dari ketentuan-ketentuan berkampanje telah terdjadi, namun sangat tidak berarti. Gangguan-gangguan tersebut antara lain berupa penempelan tanda gambar pada tempat yang tidak diperbolehkan (rambu-rambu lalu lintas), penempelan tanda gambar oleh organisasi diatas menutup tanda gambar organisasi lain, kampanje diluar tempat dan waktu yang diizinkan dsb.

Keseluruhannya telah diselesaikan dengan memberikan peringatan dan teguran kepada masing-masing pihak. Perhatian masyarakat terhadap kampanje dari masing-masing organisasi tjukup baik. Terlebih-lebih pada masa kampanje oleh GOLKAR, perhatian/kundjungan masyarakat tjukup banyak. Sedangkan untuk didaerah pinggiran yang dilakukan oleh Parpol N.U. mendapat sambutan luas pula. Dibeberapa tempat tertentu P.N.I. djuga telah dapat mengerahkan massa setjara memadai. Sedangkan untuk organisasi lainnya boleh dikatakan kurang mendapat pengundjung.

Dengan berakhirnya masa kampanje selama 1 minggu mendjelang saat pelaksanaan pemungutan suara yang disebut „Periode Minggu Tenang” dengan pengumuman Mendagri/Ketua LPU No. 3/LPU/1971 tanggal 27 Djuni 1971 telah diadakan beberapa ketentuan-ketentuan larangan kegiatan-kegiatan Kampanje. „Minggu Tenang” dimaksud untuk memberi kesempatan konsentrasi seluruh pikiran segenap lapisan masyarakat dan aparaturnya Pemilu dalam menghadapi hari Pemungutan Suara. Untuk itu berdasarkan Nota Dinas PPD DCI Djakarta No. 0630/III/2/1971 tanggal 26 Djuni 1971 telah diinstruksikan kepada seluruh aparat Pemilu diwilayah agar mengadakan penghapusan/pembersihan terhadap alat-alat peragaan kampanje dari djarak radius 200 meter dari TPS dimasing-masing wilayah. Dan dengan Pengumuman Mendagri/Ketua LPU No. 6/LPU/1971 tanggal 2 Djuli 1971 selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 10 Djuli 1971 sesudah Pemungutan Suara semua alat peraga untuk berkampanje sudah harus dibersihkan.

3. 9. Persiapan Pemungutan Suara

Mendjelang Pemungutan Suara untuk dapat menjelenggarakan event tersebut dengan setertib-tertibnya telah diadakan berkali-kali checking dan rechecking terhadap persiapan-persiapan aparaturnya ditingkat Wali-

kota, Ketjamatan dan Kelurahan serta alat kelengkapan guna keperluan pemungutan suara di TPS-TPS.

Dengan adanya penelitian terhadap djumlah-djumlah pemilih pada suatu TPS dan dibentuknja TPS-TPS pada unit kerdja/Kantor, maka diadakan perbaikan penambahan sehingga djumlah dari TPS keseluruhan mentjapai angka sebagaimana telah disebutkan diatas. Untuk pelajanan pada TPS-TPS tersebut pada awal bulan Djuni 1971 telah dipersiapkan sedjumlah anggota KPPS jang ditentukan 5 orang tiap TPS dengan unsur-unsurnja dari pegawai negeri dan unsur RT/RW; sesuai dengan ketentuan jang diatur oleh Lembaga Pemilihan Umum.

Sebelum KPPS ini melaksanakan tugasnja kepada mereka telah diberikan santiadji-santiadji khusus mengenai penjelenggaraan Pemungutan Suara dan penghitungan suara serta pengisian Berita Atjara jang dilakukan oleh masing-masing KPPS untuk tiap wilayah kerdjanja (TPS-nja). Santiadji diberikan disamping petundjuk-petundjuk setjara lisan djuga diberikan dalam bentuk tertulis (sematjam buku saku) dan peragaan-peragaan tentang tata tjara pemungutan suara. Disamping itu dalam pematangan masjarakat untuk menghadapi pemungutan suara tanggal 3 Djuli 1971, penerangan dan peragaan-peragaan diberikan pula diwilajah-wilajah, kantor-kantor dan kesatuan-kesatuan ABRI. Penerangan/Santiadji sematjam ini jang terachir setjara massal diadakan berupa rapat besar RT/RW se DCI Djakarta di Senajan pada tanggal 24 April 1971 dengan pemitjara-pemitjara Menteri Dalam Negeri/ Ketua Lembaga Pemilihan Umum, Aspri Presiden Ali Murtopo dan Gubernur KDCI Djakarta.

Beberapa kesulitan jang timbul dalam mempersiapkan pemungutan suara antara lain terdapatnja mutasi pemilih jang sangat tinggi baik keluar daerah maupun pindah pada TPS lain di DCI Djakarta; dalam hal ini sebagian besar karena kepindahan ke TPS Unit Kerdja.

Dalam hubungan TPS Unit Kerdja karena waktu ketetapannja jang sudah sangat sempit, sedangkan dari pihak instansi/kantor untuk penyelesaian kartu A4-nja (kutipan daftar pemilih) memberikan daftar nama-nama karyawan setjara kolektif dengan tidak melengkapi identitas jang diperlukan (alamat djelas, terdaftar di TPS mana dan sebagainya) mengakibatkan petugas-petugas mengalami berbagai kesulitan dalam menghadapinja. Sedangkan dilain pihak surat-surat panggilan model G telah terlandjur lebih dahulu dibuat oleh KPPS masing-masing. Dengan demikian beberapa tempat terdapat kasus dimana kepada pemilih disamping diberikan A4 djuga memperoleh surat panggilan Model G karena administrasi mutasi jang singkat waktunja itu. Walaupun atas kesadaran pemilih sendiri, doubleres demikian dapat diatasi dengan djalan seo-

rang pemilih hanya menggunakan satu hak pilihnya dan mengembalikan surat panggilan (Model G) kepada KPPS atau Lurah yang bersangkutan. Disamping itu, terdapat pula sejumlah besar masyarakat warga kota atau sejumlah pekerja borongan yang berkeinginan untuk memberikan hak suaranya di daerah tempat asal sehingga mutasi pemilih pada saat tersebut sangat tinggi sekali.

Penjampaian alat kelengkapan pemungutan suara berupa formulir-formulir surat suara, Berita Acara Penghitungan Suara telah dapat disampaikan tepat pada waktunya walaupun dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada.

3. 10. Pemungutan Suara.

Untuk memantapkan pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 3 Juli 1971 telah diambil langkah-langkah untuk mempersiapkan penanggulangan dengan sebaik-baiknya, antara lain:

1. Mengadakan penyetoran on the spot dari persiapan lapangan di tiap-tiap wilayah.
2. Briefing Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD DKI Jakarta kepada seluruh aparatur Pemilu sampai dengan Lurah/Koordinator KPPS.
3. Konsinjiring para Staf Sekretariat mulai dari tanggal 1 sampai 5 Juli 1971.

Berkenaan dengan adanya permintaan dari LPU/PPI untuk mengatur atjara peninjauan oleh Bapak Presiden beserta Menteri Dalam Negeri dan Menteri Penerangan Malaysia, maka telah diadakan pula persiapan dan penyetoran terhadap TPS yang akan dikunjungi itu.

Untuk memudahkan pengawasan dalam kegiatan operasional selama pemungutan suara, di Operation Room DKI Jakarta telah dipusatkan Komando Operasi yang langsung dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah /Ketua Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Jakarta.

Tata tertib penjampaian laporan jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS-TPS telah diatur dalam S.O.P. yang telah dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 1971.

Dalam S.O.P. tersebut ditentukan bahwa mulai dari tanggal 2 Juli 1971 jam 18.00 W.I.B. setjara continue terus-menerus setiap jam masing-masing eselon setjara bertingkat melaporkan situasi keadaan wilayah.

Hubungan antara Pos Komando dan Operation Room dengan eselon bawah dilakukan melalui telepon dan kurir. Sedangkan antar pejabat teras melalui alat Walkie-Talkie dan antara MUSPIDA dengan Radio Telekomunikasi masing-masing.

Pada umumnya diseluruh TPS dalam Daerah D.C.I. Djakarta tepat pada jam 08.00 pagi telah dapat dimulai pembukaan rapat pemungutan suara setjara serentak.

Umumnya para tjalon pemilih telah datang berdujun-dujun dimasing-masing TPS djauh sebelum jam yang ditentukan, yakni sekitar jam 06.00 dan jam 07.00. Pada permulaan pemberian suara oleh para pemilih sedikit berdjalan lambat pada kelompok pertama dikarenakan petugas KPPS belum menemukan sistematik untuk memudahkan dalam pentjaharian daftar pemilih/tambahan (rata-rata sekitar 3 s/d 4 menit seorang). Selanjutnya setelah tjalon pemilih yang lain dapat mengikuti tjara-tjara dari kelompok pertama tadi telah berdjalan lebih lantjar bahkan lebih singkat waktunya (sekitar antara 1 a 2 menit per orang). Dalam pelaksanaan di-TPS-TPS terdapat pula perbedaan waktu dalam penyelenggaraan antara TPS yang berada di Kota dengan yang berada didaerah pinggiran. Hal ini disebabkan karena disamping ketrampilan serta ketjerdasan KPPS dan masyarakat pemilih djuga antara kedua matjam lingkungan masyarakat itu mempunyai perbedaan kondisi. Umumnya di TPS-TPS yang berada di Kota termasuk TPS Unit Kerdja rata-rata antara jam 12.00 s/d 15.00 telah selesai melakukan penghitungan suara. Sedangkan pada TPS yang berada didaerah pinggiran rata-rata sekitar jam 16.00 s/d 20.00.

Sesuai dengan petunjuk yang diberikan, copy Berita Atjara (Model K) yang diperuntukkan Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta pada malam itu djuga dikumpulkan oleh PPS (tidak dimasukkan dalam Kotak Suara) dan diambil oleh Petugas Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta dimasing-masing PPS. Guna memenuhi kebutuhan data hasil sementara untuk mass-media diambilkan tjatatan sementara dari laporan yang disampaikan oleh masing-masing eselon bawah melalui hubungan komunikasi/tilpon kepada Operation Room dan Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta. Pada tahap pertama telah dapat terkumpul data-data yang bersifat sementara dan dapat diumumkan jam 18.00 sore pada tanggal 4 Djuli 1971 oleh Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta. Setjara berangsur tambahan laporan data dari sebagian TPS yang belum masuk telah disusulkan pula sehingga dikeluarkan lagi pengumuman data-data sementara yang kedua pada tanggal 6 Djuli 1971.

Sambil menunggu laporan resmi yang bersifat Berita Atjara Penghitungan Suara dari PPS dan P.P.Kota masing-masing data-data yang telah diumumkan ini ternyata telah mendekati gambaran tentang hasil angka angka keseluruhan.

Untuk angka resmi hasil Pemilu di Daerah Pemilihan DCI Djakarta telah dilakukan penghitungan suara pada rapat yang diadakan di Gedung

DPRD-GR DCI Jakarta tanggal 29 Djuli 1971. Pada umumnya peristiwa-peristiwa yang terjdadi baik menjelang, selama, maupun sesudah pemungutan suara dapat dikatakan tidak mengganggu kelanjutan djalannya pemungutan suara.

Beberapa peristiwa yang tertjatat ialah:

1. Pembakaran TPS no. 25 Kelurahan Simpruk Ketjamatan Kebajoran Lama Jakarta Selatan.
2. Pengulangan Pemungutan Suara di TPS No. 2 Kelurahan Setu Ketjamatan Pasar Rebo Jakarta Timur oleh karena pada blanko surat suara dibubuhi nomor urut memilih, dan
3. Pemberian suara dua kali yang dilakukan oleh seorang di TPS 33 Kelurahan Krendang Ketjamatan Tambora Jakarta Barat.

3.11. Penghitungan Suara.

Penghitungan suara dari hasil pemungutan suara dilakukan dalam 4 tingkatan jaitu ditingkat TPS oleh KPPS, ditingkat Ketjamatan oleh PPS, ditingkat Kota oleh P.P. Kota, ditingkat DCI oleh Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta. Pada semua tingkatan penghitungan suara telah diundang dan hadir wakil-wakil Parpol/Golkar yang turut serta dalam Pemilu.

Penghitungan suara di TPS dilakukan sesaat setelah selesainya pemungutan suara bagi pemilih yang terakhir dengan dihadiri oleh beberapa orang bekas pemilih dan wakil dari seluruh Organisasi PARPOL/GOLKAR. Untuk keperluan kesaksian yang harus turut menanda tangani Berita Atjara diantara Wakil Organisasi tersebut telah diundi sebelumnya sebanyak 3 (tiga) orang. Didalam penghitungan suara ini KPPS mentjatat pada formulir-formulir Berita Atjara (Model K). Penghitungan suara yang telah ditentukan baik bentuk dan isinya setjara uniform oleh Lembaga Pemilihan Umum itu ternyata banjak sekali menimbulkan kesukaran-kesukaran tehnik dalam tertib pengisiannya oleh KPPS.

Kesukaran-kesukaran tersebut antara lain dikarenakan redaksi dari Berita Atjara beserta lampiran-lampirannya sangat rumit dan berbelit-belit (tedious), tidak ada perbedaan (warna) bentuk atau formatnya antara formulir untuk DPRD sebagaimana misalnya pembedaan warna pentjatatan penghitungan suara bagi hasil untuk DPR dengan hasil untuk blanko surat suara. Pula pada tiap bentuk formulir sangat banjak lampiran-lampirannya yang ternyata kurang praktis didalam penggunaan. Disamping itu para KPPS melihat bentuk formulir Berita Atjara dengan lampiran-lampirannya yang sesungguhnya (format aslinya) hanjalah pada saat-saat pemungutan suara; karena sebelumnya baik pada waktu santi-

adji maupun pada kesempatan lainnja tidak dapat diperlihatkan. Hal ini disebabkan karena formulir tersebut belum tersedia pada waktu santiadji diadakan. Penjampaian hasil pemungutan suara berupa surat-surat suara dan Berita Atjara pemungutan/penghitungan suara oleh KPPS dilakukan pada hari itu djuga kepada PPS. Kesukaran angkutan mengakibatkan ada beberapa TPS didaerah pinggiran dibawa dengan tangan sendiri dan disampaikan setelah djauh malam.

Pada penghitungan suara di PPS dilakukan sesudah semua kotak-kotak suara dari masing-masing TPS diterima oleh PPS. Oleh karena permintaan akan kebutuhan data-data jang mendesak, maka oleh PPS telah dilakukan penghitungan suara sementara dari Berita Atjara maupun dari tjatatan-tjatatan jang dikumpulkan.

Pada sidang PPS jang khusus diadakan untuk itu saksi-saksi dari Wakil PARPOL/GOLKAR turut diundang untuk menjaksikannja guna penge-sahan penghitungan suara untuk sedaerah Ketjamatan/Panitia Pemungutan Suara tersebut. Djumlah TPS untuk satu daerah pemungutan suara sangat besar (antara 300 s/d 400 buah), sehingga membutuhkan/memerlukan waktu jang banjak untuk melakukan penghitungan suara tersebut.

Didalam penghitungan suara oleh PPS tersebut antara lain didjumpai pula kesulitan-kesulitan berupa: tidak djelasnja tulisan atau tjatatan angka-angka jang dibuat oleh KPPS; tidak ada atau tidak djelasnja pemi-sahan antara angka hasil untuk DPR dengan hasil untuk DPRD; adapula jang hanja mentjatat untuk djumlah keseluruhan dan ada pula jang tanpa mengisi tjatatan sama sekali. Untuk itu oleh masing-masing PPS telah diadakan penertiban-penertiban baik berupa memanggil kembali KPPS atau pengetjekan penghitungan. PPS dalam melakukan penghitungan suara untuk keperluan penjadjian angka sementara menggunakan tjatatan on the spot. Oleh karenanja didalam djumlah angka sementara jang telah dilaporkan dengan angka jang diperhitungkan dengan Berita Atjara terdapat perbedaan-perbedaan. Tapi ternyata perbedaan tersebut tidak merupakan beda jang besar dan prinsipiell dan tidak mempengaruhi kepada komposisi djumlah kursi jang diperoleh hasil keseluruhan oleh masing-masing peserta. Penghitungan Suara di P.P. Kota adalah lebih baik dan lebih mudah dilakukan karena sifatnja merupakan rekapitulasi penghitungan suara dari masing-masing daerah pemungutan suara jang diambilkan dari rekapitulasi Berita Atjara (Model L) masing-masing PPS dalam wilajahnja. Jang didjumpai pada tingkat ini adalah berbagai salah djumlah dan inconsistencies. Pada tingkat ini tidak dilakukan pembagian kursi karena sebagaimana jang telah dikemukakan diatas pada tingkat P.P. Kota tidak mengadakan pemilihan untuk keanggotaan DPRD Tingkat II dan merupakan aparat pembantu

dari PPD DCI Djakarta. Setelah semua Berita Atjara dari masing-masing PP Kota diterima oleh PPD DCI Djakarta, maka pada tanggal 29 Djuli 1971 bertempat di Gedung DPRD-GR DCI Djakarta telah dilakukan rapat khusus untuk itu dengan dihadiri oleh seluruh pedjabat Pemerintahan, MUSPIDA, Pers dan organisasi PARPOL/GOLKAR dalam Daerah DCI Djakarta. Untuk saksi dari organisasi PARPOL/GOLKAR dilakukan pengundian ditempat sesuai dengan petundjuk jang ada dan turut menanda tangani dan mengesahkan pada Berita Atjara jang dibuat untuk ini. Oleh karena waktu dan keadaan jang memungkinkan, maka pembagian kursi untuk organisasi PARPOL/GOLKAR sesuai dengan hasil suara jang diperolehnya dapat dilakukan pada hari itu pula.

Dari hasil angka-angka jang diperoleh pada penghitungan suara tersebut terdapat perbedaan djumlah ketjil antara angka-angka jang pernah dilaporkan dalam pengumuman sementara baik jang pertama pada tanggal 4 Djuli 1971 maupun jang kedua pada tanggal 6 Djuli 1971. Sedangkan perbedaan tersebut tidak mempengaruhi untuk djumlah keseluruhan dalam penghitungan pembagian kursi bagi masing-masing organisasi PARPOL/GOLKAR. Patut dikemukakan pula, oleh Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta djuga dilakukan penghitungan suara melalui computer jang bahan dasarnya diambilkan dari tembusan Berita Atjara (Model K) masing-masing TPS. Namun oleh karena sebab-sebab sebagaimana telah dikemukakan diatas, dalam Berita Atjara KPPS tersebut terdapat beberapa kasus dimana formulir Model K tidak memuat angka-angka (data-data) jang sempurna sebagai konsumsi computer sehingga menghasilkan data-data jang terlambat dari jang diharapkan semula. Sebaliknya hasil itu sangat bermanfaat pula sebagai media checking untuk data-data dari Berita Atjara-Berita Atjara PPS, P.P. Kota dan rekapitulasi per Kelurahan. Dari hasil angka-angka/data-data penghitungan suara ini telah dapat diberikan angka-angka detail kepada instansi-instansi jang memerlukan. Disamping itu berbagai pertanjaan jang timbul baik oleh organisasi PARPOL/GOLKAR maupun media lainnya telah dapat diberikan pendjelasan-pendjelasan seperlunya melalui fasilitas dokumen-dokumen check dan recheck jang tersedia di Sekretariat PPD DCI Djakarta.

3. 12. Penetapan Tjalon Terpilih.

Segera setelah pembagian kursi ditentukan oleh masing-masing organisasi PARPOL/GOLKAR melalui rapat jang diadakan oleh Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta telah dimintakan penegasan tjalon-tjalon terpilih dari Daftar Tjalon Tetap menurut urutan dalam organisasinya masing-masing.

Pada prinsipnja semua tjalon sesuai dengan urutan didalam Daftar Tjalon Tetap, tetap diadjukan sebagai tjalon terpilih sesuai dengan djumlah kursi jang diperoleh oleh masing-masing organisasi. Namun demikian beberapa orang dari djumlah tjalon jang terpilih tersebut djuga mendjadi tjalon untuk tingkat pemilihan DPR Pusat. Mereka ini belum dapat menentukan sikapnja apakah menerima atau menolak dari salah satu lembaga tadi, dikarenakan penghitungan suara dan pembagian kursi untuk tingkat DPR Pusat baru dilakukan pada tanggal 7 Agustus 1971. Oleh karenanja kepada masing-masing tjalon terpilih sesuai dengan urutan tjalon dalam Daftar Tjalon Tetap tadi telah disampaikan surat pemberitahuan penetapan terpilih (Model S) dengan batas waktu selambat-lambatnja tanggal 21 Agustus 1971 telah memberikan djawaban menerima atau menolak ketentuan atas terpilihnja jang bersangkutan. Ternjata setelah masing-masing tjalon terpilih memasukkan surat pemberitahuan tersebut, hanja dua orang jang menolak untuk tjalon keanggotaan DPRD DCI Djakarta jaitu masing-masing dari PARMUSI dan PARKINDO, karena mereka menerima penetapan terpilihnja untuk keanggotaan DPR Pusat. Untuk penggantian kedua (2) tjalon tersebut telah diambilkan tjalon dari urutan nomor berikutnya dan telah pula memenuhi djawaban tentang penerimaannya sebagai terpilih sebagaimana tjalon-tjalon lainnja. Guna memenuhi ketentuan jang dimaksud dalam Undang-undang Pemilu No. 15 tahun 1969 pasal 25 ayat (2) sesuai dengan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Ketua Panitia Pemilihan Indonesia tanggal 27 Djuuli 1971 No. 101/22/71 maka dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No. 0715/III/2/1971 tanggal 4 Agustus 1971 atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia telah diangkat dan ditetapkan Panitia Pemeriksaan Tingkat I Daerah D.C.I. Djakarta dengan anggotanja terdiri dari :

1. Ketua merangkap anggota : *WIRJADI S.H.*
Kepala Direktorat VII/Chusus Politik D.C.I. Djakarta.
2. Wakil Ketua merangkap anggota : *A.K.B.P. Drs. JUNUSI JUSUF*
Kasi Intel Komdak Metro Djaya.
3. Sekretaris merangkap anggota : *SOETJIPTO WIROSARDJO-NO, M.Sc.*
Sekretaris PPD DCI Djakarta.
4. Anggota : *H. AJATULLAH SALEH.*
Wakil Ketua DPRD-GR DCI Djakarta.
5. Anggota : *MOEFFRENI MOE'MIN*
Anggota DPRD-GR DCI Djakarta.

Panitia Pemeriksa ini bertugas untuk mengadakan pemeriksaan terhadap surat-surat keterangan tjalon terpilih. Terhadap Panitia Pemeriksa ini telah dilakukan pelantikannya pada tanggal 26 Agustus 1971 bertempat diruang City-Hall DCI Djakarta. Disamping itu guna kelengkapan Panitia Pemeriksa djuga dibentuk sebuah Sekretariat Panitia Pemeriksa Tingkat I Daerah DCI Djakarta dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No. 0716/III/2/1971 tanggal 4 Agustus 1971 dengan pedjabatnja masing-masing :

1. *E. Pandjaitan S.H.* : Kepala Biro IV/Pengawasan.
2. *Burhanuddin Hs.* : Kepala Biro I/Penjelenggara.
3. *Gunarto S.H.* : Kepala Biro II/Administrasi
4. *Muchroddi Sutomo* : Kepala Bagian Keamanan.
5. *Oebed Soebhagio* : Bendaharawan PPD DCI Djakarta
6. *Farid Hakim* : Kepala Bagian Penyelenggara.
7. *Erny S.H.* : Kepala Bagian Pengawas
Keuangan.

Guna memudahkan pelaksanaan tugas-tugas Panitia Pemeriksa maka kepada organisasi PARPOL/GOLKAR dalam Daerah DCI Djakarta yang mempunyai tjalon yang telah ditetapkan sebagai tjalon terpilih, dengan Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No. 0761/III/2/1971 tanggal 23 Agustus 1971 telah dimintakan untuk segera menjampaikan surat tanda pengenalan diri dan surat keterangan domisili kepada Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta.

Dengan telah memenuhi kelengkapan-kelengkapan tersebut maka Panitia Pemeriksa dapat menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

Hasil kerdja Panitia Pemeriksa ini dituangkan dalam satu Berita Atjara yang dikeluarkan pada tanggal 16 September 1971 dan ditanda-tangani oleh semua anggotanja.

Daftar terpilih dan yang diangkat serta riwayat hidup dari masing-masing tjalon terpilih adalah seperti yang tertjantum dalam lampiran naskah ini.

Laporan Panitia Pemeriksa Tingkat I DCI Djakarta yang dituangkan dalam Berita Atjara tanggal 16 September 1971 telah disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta serta seluruh anggota PPD DCI Djakarta dalam rapat PPD DCI Djakarta yang terakhir tanggal 23 September 1971.

Sementara itu dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD DCI Djakarta No. 0805/III/2/1971 tanggal 7 September 1971 dan Lembaran Daerah Khusus Ibukota Djakarta No. 62 tahun

1971 telah ditetapkan dan disahkan tjalon-tjalon Anggota Terpilih sebagaimana tersebut dalam Berita Atjara Panitia Pemeriksa Tingkat I diatas.

Sesuai dengan pasal 18 ayat 3 Undang-undang No. 16 tahun 1969 maka oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta dengan Surat No. Ga3/1/11/1971 tanggal 23 September 1971 telah disampaikan daftar nama-nama tjalon terpilih untuk dapat dikeluarkan penetapannja oleh Mendagri. Disamping itu telah pula diadakan tjalon-tjalon untuk diangkat oleh Pangkowil Hankam untuk Golongan Karya ABRI dengan suratnja No. K/II/98/8/1971 tanggal 10 Agustus 1971 dan oleh Sekber Golkar DCI Djakarta untuk Golongan Karya Non ABRI dengan suratnja No. R/009/SGD/7/1971 tanggal 22 Djuli 1971.

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 10/Pd/tahun 1971 tanggal 10 Oktober 1971 telah ditetapkan dan disahkan tjalon-tjalon anggota terpilih dan tjalon-tjalon anggota jang diangkat untuk keanggotaan DPRD DCI Djakarta sedjumlah 40 orang.

Untuk dapat mengadakan pelantikan terhadap keanggotaan jang baru, maka kepada anggota DPRD-GR jang lama telah dilakukan pembubarannja dengan melalui sidang terachir pada tanggal 7 Oktober 1971 jang berlaku mulai tanggal 14 Oktober 1971.

Sesuai dengan djadwal jang telah ditetapkan, maka pada tanggal 14 Oktober 1971 bertempat digedung DPRD-GR DCI Djakarta telah dilakukan pengambilan sumpah dan peresmian keanggotaan dari Anggota-anggota DPRD DCI Djakarta tersebut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Djakarta dan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta atas nama Menteri Dalam Negeri.

Upatjara peresmian dan pengambilan sumpah tersebut dihadiri oleh seluruh anggota MUSPIDA DCI Djakarta, para pedjabat terras D.C.I. Djakarta, para pedjabat Pamongpradja wilajah, Instansi-instansi dan Wartawan baik dari Pers maupun TVRI dan RRI.

Pada kesempatan itu djuga oleh Gubernur Kepala Daerah telah diserahkan pimpinan sementara Ketua DPRD-DCI Djakarta jang baru kepada anggota jang tertua jaitu *Nj. Sjamsidar Moerdono* (54 tahun) dengan didampingi oleh seorang anggota jang termuda jaitu *Sdr. Ma'roef Amin B.A.* (28 tahun). Disamping itu, djuga telah diserahkan memori DPRD-GR DCI Djakarta jang lama jang memuat tjatatan kegiatan dan kenang-kenangan DPRD-GR dalam periode kerdjanja dari tahun 1966 – 1971.

Pada sidang Paripurna DPRD DCI Djakarta (jang baru) tanggal 5 Nopember 1971 telah dilakukan atjara Pemilihan Pimpinan DPRD DCI Djakarta dengan hasil :

- a. Ketua : *A. Wiratno Puspoatmodjo S.H.*
(dari GOLKAR ABRI/POLRI).
- b. Wakil Ketua : *M. Moeffreni Moe'min*
(dari GOLKAR)
- c. Wakil Ketua : *Drs. H.A. Sjatibi*
(dari N.U.).

Kemudian pada sidang Paripurna tanggal 9 Nopember 1971 telah dilangsungkan penjerahan pimpinan DPRD DCI Djakarta dari *Nj. Sjamsidar Moerdono* selaku pimpinan sementara kepada Sdr. *A. Wiratno Puspoatmodjo S.H.* pimpinan DPRD jang baru terpilih.

Djuga pada sidang tersebut sekaligus telah disahkan terbentuknja badan-badan perlengkapan Dewan jang meliputi 4 (empat) komisi jaitu:

- A. Pembangunan dan Kesra.
- B. Keuangan/Perpadjakan.
- C. Pembangunan, dan
- D. Ekonomi.

Dengan Surat Keputusan Mendagri/Ketua LPU No. 77/LPU/tahun 1971 tanggal 30 Oktober 1971, maka Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta telah dibubarkan. Sementara itu Sekretariat PPD DCI Djakarta, sambil menunggu penyelesaian administratif khususnya jang mengenai arsip dan dokumentasi lainnja jang perlu ditertibkan tetap dipekerdjakan. Keadaan ini diperkirakan berlangsung sampai dengan akhir tahun ini dengan tidak mengabaikan pelaksanaan dari Keputusan Mendagri tersebut diatas.

Untuk penyelesaian follow-up dari pengelolaan administratif ex. Sekretariat PPD DCI Djakarta saat ini sedang diadakan persiapan penyelesaian dengan Direktorat I/Pemerintahan DCI Djakarta.

Personalia dari ex. Sekretariat PPD DCI Djakarta sesuai dengan ketentuan dari Surat Keputusan Mendagri tersebut diatas jakni :

- a. Jang berasal dari tenaga diperbantukan baik dari ABRI maupun Instansi pemerintah sipil lainnja, segera akan dikembalikan keinduk kesatuan/kantor asalnja.
- b. Pegawai tenaga lepas sesuai dengan kewedjaksanaan Gubernur KDH DCI Djakarta telah diangkat dan ditetapkan sebagai pegawai daerah jang ditempatkan pada Kantor Sensus dan Statistik DCI Djakarta.
- c. Beberapa personil jang dianggap tjukup baik akan tetap ditempatkan pada ex. Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta untuk pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan administratif Sekretariat Pemilu DCI Djakarta.

3.13. Penerangan dan Publikasi

Set up kegiatan penerangan disesuaikan dengan kbidjaksanaan dan pola operasi Penerangan & Humas DCI Jakarta. Kegiatan itu meliputi empat face :

1. Penerangan langsung (face to face) jang dilakukan oleh djurupenerang-djurupenerang Wilayah Kota/Ketjamatan.
2. Penerangan melalui Pers & Publikasi lainnja diselenggarakan oleh unsur penerangan dari Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta dengan kerdja sama Djapen/Humas DCI.
3. Penerangan melalui TV-RI, RRI dan Radio non RRI jang dilakukan oleh aparat jang khusus ditugaskan untuk itu (umumnja terdiri dari unsur instansi-instansi jang bersangkutan).
4. Media penerangan lain : poster, slide, spanduk, wall-papers, mobil unit, reog penerangan, exposisi dsb.

Penerangan langsung dilakukan dalam 3 tahap: tahap pendahuluan jaitu meliputi kegiatan antara bulan Djanuari s/d Mei 1970 meliputi penerangan mengenai tudjuan Pemilu, dasar hukum; tahap ke-2 adalah tahap pendaftaran penduduk dan pemilih dimana penerangan dilakukan antara bulan Djuli s/d September 1970 meliputi penerangan tentang tata tjara Pendaftaran Penduduk dan Pemilih; tahap ke-3 adalah tahap kesiagaan pemilih; umumnja diisi dengan tata tjara pemungutan suara dan peragaan-peragaan. Sasaran penerangan adalah kepada unsur RT/RW, organisasi masjarakat, instansi-instansi Pemerintah/Swasta, kesatuan-kesatuan dsb.

Penerangan melalui Pers dilaksanakan dengan memberikan press-release, penjampaian pengumuman-pengumuman, instruksi-instruksi Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Jakarta press-interview dan press-konferensi; umumnja kegiatan jang terachir ini sudah ditampung sekaligus oleh kegiatan penerangan LPU/PPI dengan djadwal dan materi jang disesuaikan dengan aksen kegiatan saat tersebut.

Penerangan melalui RRI diisi khususnja melalui atjara-atjara siaran Programa Khusus/Ruang Tjeramah dengan materi berupa kegiatan suatu saat tertentu; fragmen/langen-swara, Programa, Obrolan Tukang Sado, Siaran Ibukota; Ruang Wanita dengan atjara tanja-djawab Pemilu, Slide dan Spot-announcements dengan aksen kegiatan saat tertentu, Warta Berita/Berita Kota dan Pengumuman-pengumuman.

Melalui Radio-radio non RRI dilakukan dengan menjampaikan pengu-muman-pengumuman, release, instruksi dan slides.

Melalui TV-RI diisi dengan Telop, wawantjara, sandiwara TV-RI, final festival kesenian Reog se-DCI, covering berita aktivitas PPD DCI Jakarta.

Melalui kegiatan penerangan lain, Humas PPD DCI Jakarta bekerdja sama dengan Panitia Pasanggiri Kesenian Reog se-DCI Jakarta menjelenggarakan festival Reog setjara marathon dari tingkat kedjuaraan wilajah sampai ketingkat kedjuaraan Daerah/DCI Jakarta, mulai tanggal 18 April 1971 s/d 23 Mei 1971. Pasanggiri jang diikuti 36 peserta Team Reog tersebut berthema „Mari Memilih” dengan uraian penerangan dan pendjelasan populair-humoritis tentang tata-tjara pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.

Penggunaan mobil unit, pola operasinja memberikan penerangan langsung ditengah-tengah masjarakat dengan memutar film Pemilu dan film hiburan, terutama di-Kelurahan-kelurahan daerah pinggiran. Kegiatan mobil unit terutama digunakan untuk memberikan tjeramah/penerangan tentang tatatjara pemungutan suara dan pembangunan pada umumnja. Sedang pada siang hari mobil unit dipergunakan untuk kegiatan penjelenggaraan EXPO PEMILU dengan maket dan flip-chart ditempat-tempat umum seperti di terminal-terminal Bus, kompleks Pasar, dan tempat-tempat jang ramai lalu-lintas pengundjungnja.

Chusus untuk kelurahan-kelurahan Pulau Seribu jang tidak mendapat kesempatan untuk menjaksikan Pasanggiri Reog dan Mobil Unit, telah dikirim Team Penerangan PPD DCI Jakarta dengan disertai oleh rombongan Reog djuara wilajah Jakarta Utara. Penerangan melalui media lain, telah dipasang 20 buah poster (billboard) jang tersebar diseluruh wilajah DCI Jakarta, terdiri dari 10 buah diusahakan oleh PPD DCI Jakarta, 4 buah oleh Humas LPU/PPI dan 6 buah oleh Bakopen Pemilu.

Wall papers dilaksanakan berupa pengumuman Daftar Tjalon Sementara, Tjalon Tetap dan Tjalon Terpilih. Disamping itu djuga disebarkan wall papers dari Humas LPU seri „nomor dan nama tanda gambar”, „mari menudju TPS” dan „hak pilih adalah hak manusia merdeka”.

Wall papers ini telah disebarkan dan ditempelkan ditempat-tempat umum melalui instansi diwilajah. Slides sebanyak 200 buah, terdiri dari 10 matjam telah disebarkan di 25 bioskop Ibukota, jang berisi antara lain seruan, petundjuk-petundjuk dan mengajak masjarakat untuk berpartisipasi dalam menghadapi Pemilu 1971.

Spanduk Pemilu telah dipasang di mobil unit dalam rangkaian kegiatan penerangan film Expo dan Pemilu. Kegiatan penerangan lain ialah memberikan tjeramah-tjeramah dan latihan peragaan Pemungutan Suara atas undangan Kantor-kantor/Perusahaan-perusahaan dan Instansi-instansi jang mengadakan TPS Kantor.

3.14. Dokumentasi dan Statistik.

Pada tiap Kelurahan/PPP sebagai dokumentasi tetap dipelihara dan diatur dengan sebaik-baiknya Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan (Model A) yang dijilid menurut lingkungan TPS dalam tiap Stofmap. Sedang Kartu Pemilih (Model A1) disusun didalam Kotak-kotak Kartu Pemilih dengan urutan per RT/RW. Pemeliharaan ini diusahakan sedemikian rupa agar tetap dapat dimanfaatkan setiap saat; antara lain untuk penggunaan dalam pembuktian diri seseorang untuk sesuatu keperluan. Dengan pedoman yang akan diberikan dalam pengelolaan dari daftar-daftar tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum yang akan datang yaitu dengan mengadakan perbaikan dan pentjataan terhadap mutasi seperlunya. Demikian juga dipelihara suatu daftar yang memuat alamat dan lokasi TPS, daftar nama anggota KPPS, jumlah Penduduk dan Pemilih tiap TPS, serta hasil penghitungan suara di tiap TPS untuk keanggotaan DPR dan DPRD Tingkat I D.C.I. Djakarta. Disamping itu juga dipersiapkan pula penjurusan statistik dari data-data tersebut diatas guna bahan informasi dan lain-lain kebutuhan yang diperlukan kemudian hari. Daftar nama-nama orang tidak berhak memilih baik yang diperoleh dari Laksus Kopkamtibda Djaya maupun daftar yang disusun oleh Pamong Pradja dengan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tetap dipelihara dan didokumentasikan sebaik-baiknya.

Pada tingkat Ketjamatan/PPS copy daftar yang tersebut diatas (yang ada di Kelurahan) juga dilakukan pemeliharaan dan penjurusan dengan tertib untuk maksud yang sama.

Disamping itu disimpan pula arsip dari Surat Keterangan Terdaftar sebagai pemilih untuk para Tjalon (Model D) diwilayah Ketjamatan yang bersangkutan. Berita Atjara-Berita Atjara jumlah penduduk dan pemilih dari tiap Kelurahan serta hasil penghitungan suara dari tiap TPS (Model K) dan arsip Berita-Atjara penghitungan suara di Ketjamatan (Model L) juga dilakukan penjinan dan pemeliharaan sebaik-baiknya guna dapat dimanfaatkan pada saat-saat bila diperlukan.

Sementara itu notulen-notulen/tjataan-tjataan dari rapat-rapat yang pernah diadakan oleh PPS pun dilakukan penghimpunan serta merupakan arsip yang berharga pada Kantor tersebut.

Pada tingkat PP. Kota copy dari daftar-daftar sebagaimana tersebut diatas (Kelurahan dan Ketjamatan) juga dilakukan pemeliharaan dan penjinan dengan sebaik-baiknya disamping arsip dari Berita Atjara Penghitungan Suara dari PP. Kota itu sendiri serta arsip dari formulir model E1 yaitu Surat Keterangan Tentang Kewarganegaraan Indonesia, umur, Agama dan Ketjakaan berbahasa Indonesia serta

menulis dan membuat huruf latin untuk tjalon jang pernah dikeluarkan oleh Walikota/PP. Kota setempat.

Demikian pula notulen-notulen serta tjatatan-tjatatan dari hasil rapat jang pernah diadakan oleh PP. Kota djuga disimpan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Pada tingkat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta djuga dipelihara dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya daftar-daftar sebagai-mana tersebut dibawah ini :

1. Daftar alamat dan lokasi Tempat Pemungutan Suara.
2. Berita Atjara djumlah penduduk dan pemilih per Kelurahan, Ketjamatan dan Kota.
3. Daftar nama orang jang tidak berhak memilih.
4. Daftar Tjalon-tjalon Organisasi PARPOL/GOLKAR untuk
• Pemilihan Keanggotaan DPRD DCI Djakarta serta berkas-berkas pentjalonan untuk masing-masing tjalon.
5. Berita Atjara Penghitungan Suara tiap TPS (Model K), PPS (Model L), PP. Kota (Model N) dan arsip Berita Atjara PPD DCI Djakarta sendiri (Model O).

Disamping itu djuga dipelihara jang merupakan arsip pada Sekretaris antara lain :

1. Surat-surat protes/keberatan tentang Daftar Pemilih maupun Daftar Tjalon.
2. Arsip laporan Progress Report Bulanan,
3. Notulen/tjatatan rapat-rapat,
4. Arsip press-release dan guntingan surat-surat kabar, serta
5. Arsip dokumentasi administratif lainnya berupa pedoman-pedoman, instruksi, Surat-surat Keputusan dan sebagainya.

Penjimpanan ini diatur menurut kelompok bidang masing-masing pada tempat rak/lemari jang khusus disediakan untuk itu. Untuk keperluan operasionil Pemilu berbagai matjam statistik jang penting, antara lain berupa djumlah penduduk, djumlah pemilih, djumlah TPS, Tjalon Sementara, Hasil Penghitungan Sementara, Keuangan dan Inventaris djuga diadakan serta Stroom Computer hasil list-print penghitungan suara per TPS dan summary-totals per Kelurahan, Ketjamatan, Walikota dan PPD DCI Djakarta menjadi bahan dokumentasi Pemilu 1971.

Disamping itu djuga diadakan pula pendokumentasian lainnya berupa foto-foto dari beberapa puntjak kegiatan baik dalam masa persiapan maupun dalam pelaksanaan itu sendiri.

3.15. K e a m a n a n ,

Keamanan pada tahap persiapan

Didalam Surat Keputusan Mendagri No. 5/1970 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan II pasal 6 menetapkan adanya Bagian keamanan pada Biro Penjelenggara dari Sekretariat PPD I yang bertugas :

- a. Mengumpulkan bahan tentang situasi keamanan,
- b. Membuat perkiraan keadaan tentang situasi keamanan (sebagai bahan dalam menentukan garis kebidjaksanaan dibidang pengamanan Pemilu).
- c. Menempuh kebidjaksanaan keamanan dalam bentuk-bentuk tertentu dibidang pengamanan Pemilu.

Untuk persiapan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan tersebut diatas telah diadakan beberapa rapat koordinatif. Pada tanggal 17 September 1970 bertempat di Laksus Pangkoptamtibda Djaya rapat yang dihadiri oleh unsur-unsur Keamanan Daerah (Kodam V/Djaya dengan para Dandim, Komdak Metro Djaya dengan Danwil, Mada Hansip VII Djaya dan Direktorat Keamanan Pemeringah DCI Djakarta) membahas dan merumuskan segi-segi Keamanan menjelang pelaksanaan Pemilu 1971 agar terdapat sinkronisasi didalam menentukan kebidjaksanaan dan tertijapainja koordinasi yang sebaik-baiknya didalam usaha untuk mentijptakan situasi keamanan yang baik.

Sebagai hasil pertemuan tersebut telah ditjapai kata sepakat tentang penegasan atas pembagian tugas pengamanan sesuai dengan ketentuan yang ada, jaitu :

- a. Pengamanan langsung yang didalam pelaksanaannya di DCI Djakarta diserahkan kepada Komdak Metro Djaya dengan dibantu oleh Mada Hansip.
- b. Pengamanan tidak langsung yang didalam pelaksanaannya di DCI Djakarta diserahkan kepada Laksus Pangkoptamtibda Djaya.

Sedangkan bagian keamanan pada Sekretariat PPD DCI Djakarta menampung persiapan-persiapan segi teknis Pemilu dalam bidang keamanan yang timbul akibat pelaksanaan Undang-undang Nomor 15/1969 dan P.P. No. 1/1970. Disamping itu PPD juga bertugas untuk menjusun staff-work sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk pegangan bagi petugas keamanan tidak langsung oleh ABRI, Laksus Pangkoptamtibda Djaya telah mengeluarkan R.O. No.002/PC/11/1970 yang memuat antara lain mengenai perkiraan keadaan, situasi dalam bidang keamanan dan ketertiban, situasi politik menjelang pelaksanaan Pemilu 1971 serta periode-periode pengamanan dan pen-

pendislokasian pasukan pada tempat-tempat yang dipakai untuk kegiatan penjelenggaraan Pemilu 1971.

Pengamanan preventif/Pembentukan aparatur.

Sesuai dengan pembagian tugas tersebut serta disatu pihak menjadari bahwa prinsip pengamanan Pemilu ternyata mempunyai scope yang luas dan pada pihak lain penjelenggaraan Pemilu 1971 merupakan proyek vital, maka penundjukan terhadap personil dalam rangka pembentukan aparatur pada semua tingkatan (PPD, PP Kota, P.P.S.) telah diteliti dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu pembentukan aparatur disemua tingkatan tersebut diisi oleh pedjabat fungsionil diwilajah masing-masing yang sudah dikenal baik oleh masyarakat setempat. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan terdjadinja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Pemilu yang tidak diinginkan serta memudahkan kontrol dalam palaksanaannya oleh aparat yang lebih atas. Disamping itu diadakan pula penelitian segi mental psychologis, riwayat perdjjuangan dan lain sebagainya melalui screening yang dilaksanakan oleh Team Screening DCI Djakarta pada tanggal 24 Nopember 1970 s/d 21 Desember 1970 berdasarkan Instruksi Gubernur KDH DCI Djakarta No. Bd.15/6/45/70. Begitu pula terhadap petugas-petugas KPPS yang anggota-anggotanja sebagian diambilkan dari unsur masyarakat penelitiannya dilakukan melalui clearance dari pihak Kepolisian (Contrasign pada surat penundjukan sebagai anggota KPPS yang bersangkutan).

Orang-orang yang tidak berhak memilih.

Sebagaimana disebutkan didalam pasal 2 Undang-undang No. 15 tahun 1969 dan pasal 23 P.P. No. 1/1970 memuat ketentuan tentang orang-orang yang tidak berhak memilih. Mereka itu ialah :

- a. Warganegara Republik Indonesia bekas anggota organisasi terlarang PKI termasuk ormasnja.
- b. Jang terlibat langsung (tidak langsung) dalam G.30.S./PKI.
- c. Anggota-anggota Organisasi terlarang lainnya.

Untuk pelaksanaan ketentuan itu telah disiapkan dua buah daftar orang-orang yang tidak berhak memilih, jaitu :

1. Satu Daftar yang diusulkan oleh 5 (lima) Wilajah Walikota berdasarkan tjatatan yang ada diwilajah masing-masing sebanyak 5.259 orang, daftar usulan mana telah mendapat pengesahan Mendagri dengan Surat Keputusan No.246/1970 tanggal 17 Oktober 1970.
2. Satu Daftar lainnya yang diberikan oleh Laksus Pangkopkam-tibda Djaya sebanyak 34.477 orang termasuk daftar yang dikirimkan Team Screening Departemen-Departemen.

Kesulitan jang dihadapi.

Berkenaan dengan adanya daftar orang jang tidak berhak memilih sedjumlah itu, maka perlu segera daftar-daftar tersebut disalin dan disampaikan ke Wilayah jang bersangkutan agar orang-orang jang tidak berhak memilih tidak didaftar dalam daftar pemilih (sebagai pemilih).

Dari daftar orang-orang jang tidak berhak memilih sebanyak itu ternyata tidak semua data-datanya lengkap. Disamping kesalahan ketik mengenai nama, tidak lengkapnya alamat jang bersangkutan, tidak tjotjoknja umur dengan orangnja, mutasi penduduk, djuga penjamptaan daftar jang tidak menurut wilayah (unit organisasi Pemilu). Hal ini menyebabkan load pekerdjaan mendjadi bertambah, disamping sulit mempedomani data-data jang kurang lengkap. Disamping itu, masalah ini djuga menyebabkan seringkali petugas dihadapkan kepada kenjataan-kenjataan rumit karena protes dari jang bersangkutan jang merasa dirinja tidak pernah terlibat G.30.S./PKI. Sampai pada saat-saat mendjelang Pemungutan Suara tanggal 3 Djuli 1971 masih terdjadi perobahan-perobahan tambahan-tambahan daftar orang-orang jang tidak berhak memilih. Hal ini disebabkan karena keterlambatan beberapa Departemen/Djawatan dan Perusahaan-perusahaan dalam mengirimkan daftar orang-orang jang tidak berhak memilih tersebut kepada Laksus Kopkamtibda Djaya. Misalnja daftar susulan orang-orang jang tidak berhak memilih dari Djawatan Pegadaian Negara, dari P.N. Sabang Merauke, dari Departemen Keuangan, dari Rumah Tahanan Glodok dan perobahan-perobahan daftar orang-orang jang tidak berhak memilih mendjadi berhak memilih, seperti jang terdjadi pada Karyawan Pabrik Bier PD Budjana Djaya, dlsb. Kasus jang agak berat bahkan hampir menyebabkan terdjadinja ketegangan-ketegangan dikantor-kantor Kelurahan, disebabkan oleh Instruksi Direksi P.N.K.A. Bandung tanggal 13 April 1971 No.2/1971 jang ditanda tangani oleh *Ir. Soemali* jang menganjurkan agar bekas anggota S.B.K.A. jang sekarang masih bekerdja di P.N.K.A. tidak mempergunakan hak pilihnja dalam Pemilu 1971 karena dapat mengakibatkan hilangnya hak kedudukan sebagai pegawai P.N.K.A. Hal ini menyebabkan sebanyak 818 orang karyawan Balai Besar Manggarai setjara beramai-ramai mendatangi Kantor Kelurahan, minta agar namanja ditjabut dari Daftar Pemilih. Sedangkan petugas Kelurahan berpegang pada ketentuan jang berlaku bahwa sepanjang orang-orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar Laksus dan daftar jang disiapkan Wilayah, maka selama itu pula orang-orang tersebut tetap didaftar sebagai pemilih (Pengumuman PPD DCI Djakarta No.0490/III/1/1971 tanggal 24 Mei 1971).

Achirnja dengan melalui berbagai matjam pendjelasan masalah tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan jang ada.

Pengamanan dalam masa Pentjalonan.

Pasal 14 ayat (2) U.U. No.15 tahun 1969 memuat ketentuan tentang orang jang tidak berhak untuk ditjalonkan, seperti halnja orang-orang jang tidak boleh didaftar sebagai pemilih jang diatur dalam pasal 2 U.U. No.15/1969 dan pasal 23 P.P. No.1/1970. Sebagai pelaksanaan daripada ketentuan itu telah dibentuk 2 (dua) Team Peneliti untuk meneliti persjaratan-persjaratan tjalon jang diadakan oleh PARPOL/GOLKAR jang bersangkutan. Kedua Team Peneliti tersebut ialah :

1. Panitia Peneliti segi Tehnis-Administratip pada Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta jang dibentuk dengan Surat Keputusan Mendagri/Ketua LPU No.74/LPU/1970 tanggal 31 Oktober 1970.
2. Team Peneliti Laksus jang bertugas meneliti segi-segi Politis-Ideologis dan dibentuk dengan Surat Keputusan Laksus Pangkopkamtibda Djaya No. Kep.-057/PC/1970 tanggal 2 September 1970.

Dari djumlah tjalon-tjalon sebanyak 479 orang jang diadakan oleh PARPOL/GOLKAR pada tingkat pertama, ternyata ada 23 orang jang dianggap kurang/tidak memenuhi kriteria/persjaratan penelitian Laksus karena alasan politis-ideologis dan 106 orang lainnja karena tidak memenuhi persjaratan tehnis-administratip termasuk jang mengundurkan diri. Sementara itu banjak persoalan-persoalan timbul didalam Partai Politik jang disebabkan masalah intern Partai maupun masalah pengadjuan tjalon-tjalon dalam menghadapi Pemilu 1971.

Seperti keritjuhan didalam tubuh N.U. sehingga terdjadinja pergeseran Pimpinan Wilayah DCI Djakarta dan ikut sertanja PB N.U. menangani sendiri setjara langsung agar tidak terdjadi perpetjahan lebih landjut.

Keruwetan didalam tubuh PARTAI MUSLIMIN INDONESIA Wilayah DCI Djakarta dimana terdapat dua Pimpinan Wilayah PARTAI MUSLIMIN INDONESIA antara kelompok *Naro* dan kelompok *Mintaredja*. Kedua-duanja mengadakan tjalonnja sendiri meskipun jang diakui sah oleh Pemerintah adalah kelompok *Mintaredja*.

Dan sampai pada saat menjelang pengadjuan tjalon-tjalon, kasus mengenai PARMUSI ini tidak terselesaikan bahkan Ketua Wilayahnja belum ditundjuk orangnja apalagi susunan pengurusnja.

Oleh karena itu PPD DCI Djakarta atas kesepakatan dengan Laksus Pangkopkamtibda Djaya, menghubungi Pimpinan Pusatnja melalui Sdr.

Agus Soedono Sekdjen GASBIINDO dan Tajlon PARMUSI untuk Anggota D.P.R. yang telah ditundjuk oleh Pimpinan PARMUSI untuk menyelesaikan masalah PARMUSI DCI Djakarta.

Nomor Urut Tjalon (Protes dan Keberatan).

Masalah lain yang timbul ialah dalam tubuh Partai MURBA, meskipun kasusnya tidak seberat PARMUSI maupun N.U. Ada sekelompok orang yang menamakan dirinya Pembela MURBA, Anggota SOBRI, telah mengirimkan surat kepada PPD DCI Djakarta tanggal 20 Maret 1971 No.203/KORD/71. Surat tersebut pada pokoknya mengajukan keberatan atas pentjalonan beberapa orang tjalon dari Partai MURBA berdasarkan alasan politis-ideologis serta tidak mengakui kepemimpinan Sdr. *Jusuf Bandjar* sebagai Ketua Komisariat Partai MURBA Daerah Djakarta Raya. Berhubung dengan itu telah dihubungi Dewan Pimpinan Pusat Partai MURBA cq. Pak *Sukarni* almarhum dan beliau membenarkan bahwa Sdr. *Jusuf Bandjar* adalah Ketua Partai MURBA Komisariat Djakarta Raya yang sah. Djuga diajukan keberatan-keberatan atas pentjalonan beberapa orang tjalon dari N.U. karena pertimbangan segi penggunaan keuangan dan dana setjara tidak bertanggung djawab.

Selanjutnya masalah yang tjukup rumit adalah penempatan nomor urut tjalon-tjalon dalam Daftar Tjalon Tetap. Dalam ketentuan Laksus Pangkoptibda Djaya yang tertjantum dalam suratnya No.B.079/4/PC/1971 tanggal 13 April 1971 didjelaskan bahwa tjalon-tjalon yang terkena penelitian Laksus Pangkoptibda Djaya harus ditjoret dari Daftar Tjalon atau ditempatkan pada urutan nomor yang paling bawah. Ketentuan ini menimbulkan protes-protes lisan maupun tertulis dari PARPOL baik kepada PPD DCI Djakarta maupun kealamat Laksus Pangkoptibda Djaya dengan alasan bahwa orang-orang yang termasuk klassifikasi tersebut adalah orang-orang yang dapat diterima dan berpengaruh dikalangan Partainya. Adapula dengan alasan bahwa mereka termasuk wakil dari Pimpinan Tjabang yang diharapkan mendapat dukungan suara dari tjabang-tjabang yang bersangkutan. Adapula bahwa orang tersebut adalah penundjang keuangan & logistik dari Partainya sehingga setjara psikologis sulit untuk tidak memasukkan atau mentjoret nama mereka dari Daftar Tjalon. Setelah melalui pemitjaraan-pemitjaraan dengan Laksus Pangkoptibda Djaya maupun konsultasi timbal balik antara Pimpinan Parpol dengan PPD DCI Djakarta dan Laksus Pangkoptibda Djaya serta perundingan-perundingan melalui rapat routine yang diadakan hampir setiap seminggu sekali oleh PPD DCI Djakarta dengan Pimpinan PARPOL/GOLKAR, maka ketentuan mengenai penempatan nama-nama tjalon yang terkena klassifikasi Laksus telah disesuaikan dengan perkembangan dan hasil pemitjaraan tersebut. Nama-nama

mereka tidak lagi ditjoret ataupun ditempatkan pada nomor paling bawah, melainkan ditempatkan misalnja dibawah nomor 10 dari Daftar Tjalon jang ada. Dengan demikian meskipun pada hakekatnja tjalon tersebut tidak akan terpilih namun penilaian masjarakat terhadap tjalon jang bersangkutan tidak terlalu dipengaruhi berkenaan dengan ke-luarnya Daftar Tjalon.

Pengamanan pada masa Kampanje.

Masa Kampanje sebagaimana disebutkan dalam Keppres No.68/1970 dan diatur dalam pasal 54 P.P. No.1/1970 diadakan selama 60 hari dan berakhir 7 hari sebelum Pemungutan Suara. Persisnja masa kampanje diadakan pada tanggal 27 April 1971 s/d 25 Djuni 1971. Satu minggu sebelum Pemungutan Suara, jaitu tanggal 28 Djuni s/d 3 Djuli 1971 adalah „Minggu Tenang”, saat-saat menantikan tanggal 3 Djuli 1971 dimana situasi dan kondisi sosial politik harus tetap terpelihara dengan baik (tenang dan tenteram).

Dalam menghadapi masa kampanje tersebut telah dirumuskan langkah-langkah kebidjaksanaan umum jang menjadi pedoman dalam pengamanan Pemilu, jaitu berupa pengaturan kampanje, penentuan tempat-tempat kampanje, jadwal waktu, prosedur perizinan dan pengawasan jalannya kampanje. Garis kebidjaksanaan umum kampanje tersebut pelaksanaannya di DCI Djakarta disesuaikan dengan kondisi DCI Djakarta. Oleh karenanya, penggunaan alat-alat peragaan kampanje sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 3 Keppres No. 68 tahun 1970 antara lain penempelan tanda-tanda gambar, penjebaran pamflet, plakat, pembuatan gapura-gapura, pemasangan spanduk-spanduk dan lain sebagainya diatur pelaksanaannya dengan memperhatikan faktor-faktor kebersihan dan keindahan kota. (S.K. Gubernur KDH/Ketua PPD DCI Djakarta No.0372/III/2/1971 tanggal 21 April 1971; Pengumuman No. 0405/III/1/1971 dan Surat PPD DCI Djakarta No. 0368/III/2/1971).

Dalam hubungan ini PPD DCI Djakarta telah menjediakan papan-papan penempelan Tanda Gambar PARPOL/GOLKAR sebanyak 20 buah diseluruh Djakarta ditempat-tempat umum jang strategis dan mudah dilihat. Tempat-tempat tersebut ialah: Terminal Bus Tjililitan, Kebon Pala, Terminal Bus Tandjung Priok, Djl. Sulawesi, Terminal Bus Grogol, Bunderan Blok M, Halte Bus Pelbak, Lapangan Banteng, Salemba, Pasar Tanah Abang, Pasar Baru, Pantjoran, Djl. Petogogan, Djl. Panglima Polim Blok A, Kramat Djati, Djl. Pemuda, Djl. Krapu, Djl. Djembatan Dua, Djl. Gn. Sahari Antjol dan depan Pertamina Tandjung Priok.

Disamping tempat-tempat penempelan Tanda Gambar tersebut djuga telah disediakan 5 (lima) buah panggung untuk pertundjukan dalam

rangka kampanye Pemilu yang dapat digunakan setjara bergantian sesuai dengan jadwal waktu.

Mengenai prosedur perizinan kampanye telah diatur dalam Instruksi KADAPOL METRO DJAYA No. 2 dan No. 3/1971 (terlampir). Adapun pengamanan dalam masa kampanye yaitu pengamanan fisik dilakukan setjara langsung oleh POLRI. Pelaksanaan kegiatan pengamanan umumnya khususnja yang bersifat preventif dilakukan dengan koordinasi antara PPD DCI Djakarta, Kepolisian, KODAM V DJAYA dan Direktorat VII/Chusus Politik DCI Djakarta. Kegiatan-Kegiatan itu meliputi antara lain penelitian terhadap thema kampanye, isi spanduk, plakat dan pamflet serta surat-surat selebaran lainnya. Djuga penelitian terhadap isi pidato dalam kampanye. Selandjutnja perlu dikemukakan, bahwa menjelang pelaksanaan kampanye pada tanggal 27 April 1971 bertempat di Gedung DPRD-GR DCI Djakarta, Laksus Pangkopkamtibda Djaya telah mengadakan appeal kepada Pimpinan PARPOL/GOLKAR tingkat DCI Djakarta agar dalam menjalankan kampanye tetap berpegang pada peraturan-peraturan yang ada serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Disamping itu PPD DCI Djakarta mengadakan rapat-rapat dengan Pimpinan PARPOL/GOLKAR setjara routine (dua minggu sekali ketjuali dalam masa kampanye) guna menampung keinginan Parpol/Golkar yang bersangkutan dan menerima saran-saran untuk penjemputan pelaksanaan atjara-atjara persiapan Pemilu 1971. Dengan demikian maka hubungan timbal-balik dan konsultasi dengan PARPOL/GOLKAR dapat terpelihara dengan baik. Sementara itu, mengingat kondisi setempat dan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban umum, kampanye yang bersifat terbuka dengan pengerahan massa dilapangan diizinkan sampai dengan djam 20.00 W.I.B.

Tjataan kedjadian. peringatan dan teguran.

Perlu dikemukakan pula bahwa dalam masa kampanye terdapat pelanggaran-pelanggaran ketjil, kedjadian-kedjadian dan sikap mental yang menjimpang dari ketentuan yang berlaku, misalnya: timbulnja masa-masa Golput yang menjebarkan pamflet di beberapa tempat diwilayah DCI Djakarta antara lain di Kebajoran, Tjempaka Putih, Djalan Thamrin dan lain-lain yang isinja antara lain tidak sependapat dengan tertib penyelenggaraan Pemilu 1971. Golput mengandjurkan kepada anggotanya untuk datang di TPS tetapi tidak memilih siapapun. Disamping itu terdapat pula selebaran-selebaran dari sekelompok orang yang menamakan dirinya Komite Penegak Kedaulatan Rakjat djuga selebaran-selebaran Komando Djihad. Terhadap aksi-aksi mereka terutama Golput telah dipanggil oleh KOMDAK METRO DJAYA untuk diberi nasehat-nasehat dan diminta pertanggungan djawab atas perbuatannya. LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA DJAYA telah mengambil langkah preventif de-

ngan melarang berdirinja organisasi tersebut di Djakarta. Pelanggaran-pelanggaran ketjil lainnja jang terdjadi pada umumnja berkisar pada penempelan tanda-tanda gambar, pamflet-pamflet jang tidak pada tempatnja, misalnja: pada rambu-rambu lalu-lintas, pada djembatan-djem-batan penjeberangan, pada pohon-pohon dan tiang-tiang listrik dipinggir djalan protokol, sehingga mengganggu ketertiban dan keindahan kota (Pengumuman Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD DCI Djakarta No. 0405/III/1/1971 dan Surat PPD DCI Djakarta No.0368/III/2/1971). Kepada Pimpinan PARPOL/GOLKAR jang bersangkutan telah diperi-ngatkan serta diminta untuk membersihkan sendiri tanda-tanda gambar tersebut. Apabila dalam djangka waktu 3 x 24 djam tidak dibersihkan, maka petugas P.P. Kota dan PPS/Ketjamatan akan mentjabut dan membersihkan tanda gambar tersebut.

Keamanan pada waktu Pemungutan Suara.

Mendjelang pelaksanaan Pemungutan Suara, telah diadakan persiap-an-persiapan konkrit baik pengamanan physik maupun pengendalian operasionil tehnis pemungutan suara. Pengamanan physik antara lain ialah :

- Pengamanan surat-surat suara dan kotak-kotak surat suara oleh Pagar Pradja dan Hansip.
- Pembersihan alat-alat peragaan kampanye dalam djarak radius 200 meter dari TPS (pasal 8 ayat 2 Keppres No. 68/1970).
- Pendislokasian pasukan diwilajah-wilajah Ketjamatan dan penempatan tenaga Hansip ditiap-tiap TPS (R.O. Pemilu Djaya No.002/PC/11/1970).

Perlu dikemukakan disini, bahwa dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah DCI Djakarta selaku KAMADA HANSIP VII DJAYA No. Kep-05/2/K/7/Set/1971 sedjumlah 16.580 orang tenaga Hansip telah di-serahkan dibawah perintah (B/P) kepada POLRI untuk pengamanan TPS-TPS. Khusus untuk pelaksanaan pengendalian operasionil tehnis Pe-mungutan Suara telah diadakan POSKO di Balai Kota d/a Operation Room DCI selama 24 djam terus menerus guna menerima laporan-laporan langsung dari Ketjamatan-ketjamatan mengenai djalannja Pemungutan Suara. POSKO di DCI Djakarta langsung dipimpin oleh Gubernur KDH/Ketua PPD DCI Djakarta.

Koordinasi Operasionil dengan alat-alat keamanan lainnja.

Didalam penggarisan kebidjaksanaan pengamanan Pemilu maupun didalam pelaksanaannja senantiasa dilakukan koordinasi dengan sebaik-baiknya dengan unsur MUSPIDA setempat. Misalnja: dalam memanfaatkan sistim Telekomunikasi jang dilakukan setjara gabungan dari masing-

masing unsur dan dikoordinir oleh KODAM V/DJAYA. Tugas pokoknya adalah penjelenggaraan pelajanan dan pemeliharaan sistim perhubungan keamanan Pemilu agar penjaluran-penjaluran berita mengenai pengamanan Pemilu tersebut dapat dilaksanakan dengan tjepat, tepat dan aman.

Dalam pendislokasian pasukan sampai ke Kantor-kantor Kelurahan, peralatan untuk tidur dan konsumsinja diatur bersama-sama Lurah dan Tjamat; begitu djuga dalam hal pertukaran berita, laporan, informasi dan sekaligus pemetjahan persoalannja, pengiriman laporannja dilakukan setjara bersama-sama. Dengan demikian terdapat sinkronisasi didalam isi dan mutu laporan. Sebaliknja Pagar Pradja dan Hansip yang melaksanakan tugas pengamanan membantu POLRI dapat melaksanakan kerdja sama yang baik sampai berachirnja tugas-tugas pelaksanaan Pemungutan Suara.

Usaha preventif dan tjatatan kedjadian.

Untuk melaksanakan pengamanan dalam Pemungutan Suara tanggal 3 Djuli 1971 yang merupakan klimaks dari seluruh kegiatan Pemilu, telah diatur pengamanan di TPS dengan 2 (dua) orang tenaga Hansip dan pengawasan oleh alat-alat keamanan disekitar TPS. Disamping itu pengaturan tata tertib pemberian suara mulai dari masuk lingkaran TPS sampai selesainja para pemilih menggunakan hak pilihnja masing-masing. Para pemilih sebelum masuk lingkaran TPS harus menundjukkan Surat Panggilan atau formulir Model A4 kepada Petugas Keamanan TPS. Tidak diperkenankan membawa sendjata api/tadjam maupun bahan peledak.

Untuk menanggulangi kemungkinan terdjadinja pelanggaran dalam Pemungutan Suara maupun gangguan-gangguan keamanan lainnja, telah dibentuk Peradilan Kilat ditiap-tiap Wilayah Walikota (S.K. Bersama Gubernur Kepala Daerah DCI Djakarta, Ketua Pengadilan Tinggi DCI Djakarta, Kepala Kedjaksaan Tinggi Djakarta, Kepala Daerah Kepolisian Metro Djaya tanggal 31 Maret 1971 No. :

1. 739/A/K/Bkd/71
2. 025/K/0112/PTU
3. Kep.-024/I.1/3/1971
4. Pol.6/I/SK/Dak Metro Djaya/71.

Perlu ditjatat disini bahwa kedjadian-kedjadian yang sifatnja mengganggu kelantjaran Pemungutan Suara dapat dikatakan hampir tidak ada. Dengan demikian seluruh kegiatan pelaksanaan Pemungutan Suara telah berdjalan dengan lantjar, aman dan tertib sehingga banjak TPS-TPS yang sudah selesai melaksanakan tugasnja djauh sebelum djam 14.00. W.I.B.

Keamanan setelah Pemungutan Suara.

A. Pengamanan Materiel.

Setelah selesainya seluruh kegiatan Pemungutan Suara kesibukan pengamanan beralih kepada:

- Pendjagaan keamanan terhadap kotak-kotak surat suara oleh Polri, Hansip dan Pagar Pradja.
- Pengawasan ketertiban pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
- Pengamanan terhadap peralatan yang dipergunakan untuk Pemungutan Suara.
- Pengamanan Inventarisasi Pemilu dari semua tingkatan.

B. Pengamanan Politis.

Untuk memelihara stabilitas politik di Ibukota serta untuk mendinginkan situasi dan menghilangkan salah pengertian yang sedikit banyak dalam masa-masa kampanye terasa naik, baik antara golongan dengan golongan maupun antara golongan dengan penguasa yang disebabkan oleh pengawasan yang ketat dari aparat pelaksana disemua tingkatan terhadap pelaksanaan teknis Pemilu, maka pada tanggal 8 Djuli 1971 bertempat di Aula KODAM V/ DJAYA telah diadakan rapat MUSPIDA dengan Pimpinan PARPOL/GOLKAR wilayah DCI Djakarta. Dalam forum ini terasa adanya saling pengertian yang mendalam terhadap tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga oleh karenanya baik Panglima maupun Pimpinan PARPOL/GOLKAR saling mengutarakan terima kasih atas kerdja sama yang baik selama ini. Masing-masing pihak berdjandji untuk memupuk kerdja-sama dan saling membantu memelihara stabilitas politik di Ibukota dalam melaksanakan hasil Pemilu 1971 dan pelaksanaan pembangunan dengan memelihara persatuan dan kerukunan warga-kota.

BAB IV

ADMINISTRASI.

4. 1. Bidang ke Tata-Usahaan.

Dalam rangka mentjapai normalisasi dan standardisasi surat dinas, filing dan proses pengolahan dokumen, maka PPD DCI Djakarta menggunakan pedoman dan standard yang berlaku untuk Pemerintah DCI Djakarta (vide Instruksi Gubernur KDH/DCI Djakarta No. Aa.4/1/5/1967 tanggal 7 Dj. uni 1967).

Sementara itu untuk ketertiban pembagian pekerdjaan maka telah dikeluarkan pedoman pembagian tugas pekerdjaan dan tanggung-djawab Sekretariat PPD DCI Djakarta, yang merupakan perintjian tugas lebih landjut dari Surat Keputusan Mendagri/Ketua LPU No.5 tahun 1970.

Pengiriman berbagai dokumen ke dan dari wilayah, umumnja dilakukan melalui kurir pada hari-hari yang telah ditentukan setjara periodik disamping petugas dari wilayah datang ke Sekretariat PPD DCI Djakarta guna mendapatkan/menjampaikan dokumen. Usaha-usaha tersebut diatas tadi ditempuh untuk memperlantjar djalannja „flow of document” ke dan dari wilayah maupun Lembaga Pemilihan Umum. Untuk load pekerdjaan yang bersifat operasionil, mendapat prioritas pertama dalam pengolahannja dari pada load pekerdjaan yang bersifat routine. Hal ini ditempuh mengingat kegiatan yang bersifat operasionil memerlukan processing yang segera dan khusus dan biasanja waktu yang tersedia sangat singkat dan terbatas oleh suatu djadwal yang fixed. Selandjutnja pengelolaan administratif Sekretariat djuga diarahkan agar semua dokumentasi dari hasil kegiatan Pemilu 1971 diwilajah DCI Djakarta dapat disimpan dengan tertib, agar kelak berguna dalam menghadapi penje-lenggaraan Pemilu pada masa-masa yang akan datang.

Pengalaman menundjukkan, bahwa dengan tidak adanja penertiban dibidang dokumentasi dan inventarisasi terhadap barang-barang pada masa Pemilu 1955 yang lalu diwilajah DCI Djakarta, maka telah mempersulit untuk mengadakan bahan perbandingan yang akan sangat bermanfaat dalam menghadapi kegiatan Pemilu yang akan datang.

Pada saat permulaan pembentukan Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta chususnja Sekretariat PPD DCI Djakarta, pada bulan Maret 1970 sampai bulan September 1971 keadaan peralatan kantor sangat menjedihkan.

Peralatan kantor yang digunakan saat itu, umumnya diperoleh dengan cara memindjam dari Pemerintah DCI Jakarta baik yang berupa alat tulis menulis, mesin tulis dan kendaraan serta fasilitas lainnya. Untuk tahap selanjutnya setjara berangsur-angsur Sekretariat PPD DCI Jakarta berusaha sekuatnya untuk memenuhi kebutuhan yang baik melalui pembelian-pembelian atas beban anggaran PPD DCI Jakarta maupun hasil dropping dari L.P.U.

Pada saat-saat menghadapi periode puntjak-puntjak kegiatan terutama dalam menghadapi kegiatan pentjalonan, kampanye, penghitungan suara, reproduksi dokumen yang penting, load pekerjaan demikian banyak sehingga peralatan kantor yang ada dirasakan sangat kurang. Disamping itu jumlah copy baik yang berupa Pedoman-pedoman, Instruksi, Petunjuk dari LPU diterima sangat terbatas dan lambat penjamaiannya hingga mengakibatkan harus dilakukan reproduksi setjara excessiye. Sebagai tjontoh:

- Petunjuk Mendagri/Ketua PPI No.11/PPI/1971 diterima 12 exemplar sedang kebutuhan adalah $\pm$ 10.000 exemplar.
- Pedoman Mendagri/Ketua PPI No.2/PPI/1971 diterima 7 exemplar sedang kebutuhan seharusnya $\pm$ 10.000 exemplar.

Dilain pihak anggaran yang tersedia untuk keperluan ongkos kantor adalah tidak realistis. Selama periode April 1970 s/d Maret 1971 ialah sebesar Rp. 1.035.000,— sedang pengeluaran yang sebenarnya meliputi anggaran sebesar Rp. 6.774.601,— atau 653,58% lebih besar dari yang diperkirakan LPU/PPI. Sekedar tjatatan: selama periode Maret 1970 s/d Oktober 1971 PPD DCI Jakarta telah menghabiskan :

— Kertas Stencil folio	3.452	rim
— Kertas Stencil double folio	245	rim
— Kertas HVS folio	174	rim
— Kertas HVS double folio	18	rim
— Kertas dorslag folio	30	rim
— Kertas dorslag double folio	6	rim
— Kertas folio bergaris	6	rim
— Kertas kraf/pembungkus (termasuk untuk wilayah/pembungkus B.A. di TPS-TPS)	187	rim
— Kertas Stencil folio koran (untuk dispensasi bagi petugas KPPS)	116	rim
— Karbon folio	70	doos
— Karbon double folio	17	doos
— Sheet folio	95	doos
— Sheet double folio	53	doos
— Tinta Stencil	407	tube

— Tinta Stempel (termasuk untuk wilajah/ . . .	1.017 botol
PPS (pendaftaran pemilih)	
— Tinta pulpen Parker	33 botol
— Koreksilak	47 botol
— Stofmap folio (termasuk untuk wilajah/ . . .	8.460 buah
PPS (Pendaftaran Pemilih)	
— Snelhechter map (s.d.a.)	37.723 buah
— Pita mesin tulis	59 rol
— Paper clips	206 doos
— Isi Ballpoint	5 lusin
— Hechmachine besar 13 mm	1 buah
— Hechmachine 24/6	22 buah
— Hechmachine No. 10	13 buah
— Hechmachine 13 mm	11 doos
— Hechmachine 24/6	137 doos
— Hechnetjes No. 10	169 doos
— Buku tulis kwarto	68 buah
— Pensil (termasuk untuk wilajah/	530 lusin
PPS pendaftaran pemilih)	
— Garisan kaju (s.d.a.)	6.280 buah
— Perforator	9 buah
— Lem	21 fles
— Sign pen	19 doos
— Stip/karet penghapus (s.d.a.)	525 lusin
— Spidol	5 set
— Amplop Dinas	6.320 buah
— Tali Rami (s.d.a.)	390 rol
— Bak stempel	15 buah

4. 2. Penjusunan dan Pengolahan Progress-Report.

Dalam situasi seperti tersebut diatas dimana anggaran yang tersedia untuk ongkos kantor sangat minim, PPD DCI Djakarta masih mampu setjara teratur menjusun Progress-Report sekali setiap bulan dan Progress-Report lainnja yang bersifat khusus disiapkan untuk suatu tudjuan tertentu seperti rapat kerdja yang dilakukan oleh LPU setjara periodik, santiadji-santiadji, rapat kerdja dengan Tjamat dan sebagainja. Umumnja, suatu progress-report disusun dan ditjetak dengan cover yang rapi, dijilid sebanjak 150 exemplar dengan tebal halaman antara 50 — 100 lembar dan didistribusikan kepada L.P.U./P.P.I., Anggota PPD DCI Djakarta, P.P. Kota sampai dengan PPS dan Instansi lain yang memerlukannja.

Disamping itu semua proceeding rapat PPD, rapat Parpol dan rapat staf lainnya direproduksi (roneo) dengan baik dalam bentuk notulen yang didistribusikan pula sampai ketinggian PPS/Ketjamatan.

Selain itu telah pula disiapkan dokumen-dokumen untuk keperluan khusus seperti :

- bahan santiadji untuk P.P. Kota & PPS sebanyak 150 exemplar/± 400 halaman.
- buku daftar alamat/lokasi TPS sebanyak 374 exemplar/± 400 hal.
- buku daftar nominatif personil/anggota PPD, PP Kota, PPS dan PPP sebanyak 150 exemplar/100 halaman dan
- publikasi-publikasi lainnya.

Adapun reproduksi surat-surat Keputusan, Petundjuk-petundjuk dan Pedoman-pedoman serta Instruksi Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD DCI Djakarta disamping reproduksi bahan-bahan dari LPU merupakan bahan volume pekerjaan yang sangat banyak baik ditingkat PPD, P.P. Kota maupun PPS.

4. 3. Administrasi Personil.

Umumnya formasi yang ditetapkan oleh LPU dalam Surat Edaran No. 1/14/1970 tanggal 19 Pebruari 1970 untuk tenaga-tenaga di Sekretariat PPD, P.P. Kota dan PPS sepenuhnya terisi, malahan untuk PPD dan beberapa P.P. Kota formasinya terpaksa dilampaui. Formasi Sekretariat yang ditetapkan dalam edaran tersebut adalah masing-masing untuk PPD I sebanyak 30 orang, PPD II (P.P. Kota) 20 orang dan PPS 5 orang; atas dasar pedoman formasi ini pula anggaran untuk pos-pos personil diotorisir.

Sebaliknya ketentuan yang menetapkan bahwa tenaga-tenaga di Sekretariat Panitia tersebut harus merupakan tenaga yang full-timer, dalam kenyataannya dalam banyak hal tidak dapat terpenuhi, baik ditingkat PPD apalagi P.P. Kota dan PPS.

Umumnya separoh dari tenaga-tenaga Sekretariatnya adalah tenaga-tenaga yang merangkap. Hal ini disebabkan karena bezetting personil dimasing-masing wilayah sudah sangat terbatas; juga rekrutment tenaga lepas/harian dalam prakteknya tidak mudah sebagaimana yang diharapkan, baik dalam arti kemampuan anggaran maupun kualifikasi personil yang dapat di rekrut.

Berikut ini disampaikan setjara resume daftar nominatif dari keadaan personil PPD DCI Djakarta :

No.	Tk. Panitia	Djumlah Anggota Panitia	Djumlah Anggota Sekreta- riat.	Djumlah	Keterangan
1.	P.P.D.	10	42	52	
2.	P.P. Kota	27	82	109	5 P.P. Kota
3.	P.P.S.	190	106	296	27 P.P.S.
4.	P.P.P.	935	289	1224	220 P.P.P.
	Djumlah	1162	519	1681	

Sedang untuk keperluan dokumentasi tentang personil ini telah pula dibuat buku yang khusus yang lebih terperinci. Dalam keadaan demikian, telah diusahakan untuk memperoleh data yang optimal dari seluruh personil yang ada dengan jalan menetapkan job description dari masing-masing tugas. Job description tersebut merupakan perintah lebih lanjut dari Surat Keputusan Mendagri No.5/1970 baik ditingkat PPD maupun PP Kota dan PPS. Pada saat menghadapi load pekerjaan yang meningkat, maka pekerjaan terpaksa dilembur dengan memperbanyak jumlah jam kerja sepanjang hal ini dimungkinkan dengan anggaran yang tersedia. Seperti pernah dialami dalam menghadapi kegiatan penghitungan suara, load pekerjaan demikian meningkatnya sehingga diperlukan bantuan tenaga sebanyak 6 orang tenaga Staf dari Kantor Sensus dan Statistik DCI Jakarta.

Sementara itu, administrasi yang menjangkut mutasi personil Pemilu akibat adanya penggantian pejabat organik maupun non-organik telah dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Sebegitu jauh stabilisasi aparatur baik ditingkat PPD maupun wilayah tetap dapat dipertahankan dan setjara keseluruhan telah dapat menundjang penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan tugas setjara keseluruhan.

Dalam usaha menciptakan iklim kerja yang sehat, telah pula pada batas-batas kemampuan anggaran, diadakan berbagai usaha seperti peningkatan fasilitas tempat kerja, kesedjahteraan, rekreasi bersama, pemberian insentif Pemilu 1971.

Dengan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. Jb. 17/2/70 tanggal 28 Agustus 1970, maka kepada para karyawan non-organik oleh Pemerintah DCI Jakarta telah pula diberikan

bantuan berupa beras, pakaian dinas dan penggantian biaya pengobatan sebesar 40%.

Dan terakhir dengan Nota Dinas PPD DCI Djakarta No. 0754/III/2/1971 tanggal 20 Agustus 1971 maka tenaga-tenaga non-organik Sekretariat PPD DCI yang memenuhi syarat, terhitung mulai tanggal 1 September 1971 diproses untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Otonom) Pemerintah DCI Djakarta sebanyak 18 orang, dan mereka per tanggal 1 Nopember 1971 telah diangkat sebagai Pegawai Pemerintah DCI Djakarta.

4. 4. Urusan Dalam.

Pada saat pertama dibentuknya Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta, Sekretariatnya menempati satu ruangan Blok E di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan 8-9 Djakarta. Dengan keadaan ruangan yang demikian itu dirasakan kurang memenuhi syarat untuk menampung seluruh kegiatan Sekretariat. Oleh karena itu mulai bulan April 1970, oleh Pemerintah Daerah telah diusahakan satu gedung khusus untuk Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta di Jalan Imam Bondjol No. 13 Djakarta.

Kebutuhan perlengkapan kantor semula disediakan oleh Pemerintah Daerah, yang merupakan barang-barang bekas dari Pemerintah DCI Djakarta dan KUPERDA DCI Djakarta, antara lain berupa :

-	Medja Kerdja	= 30 buah
-	Kursi Kerdja	= 40 buah
-	Kursi Tamu	= 1 stel
-	Almari	= 2 buah
-	Rak Arsip	= 5 buah
-	Filing Kabinet Kaju	= 2 buah

Baru pada bulan Djuli 1971 perlengkapan meubilair itu telah ditambah dan diperlengkapi dengan barang-barang baru yang lebih memenuhi syarat, diantaranya :

-	Medja Kerdja	= 15 buah
-	Kursi Kerdja	= 17 buah
-	Kursi/Medja Tamu	= 2 stel
-	Kursi/Medja Duduk	= 1 stel
-	Rak Arsip	= 1 buah
-	Almari	= 8 buah.

Dengan adanya penambahan barang-barang meubilair jang baru tersebut maka kelebihan medja/kursi itu telah diberikan kepada wilajah, masing-masing wilajah 1 PPS jaitu PPS/Ketj. Tjempaka Putih, PPS/Ketj. Kodja, PPS/Ketj. Tambora, PPS/Ketj. Mampang Prapatan dan PPS/Ketj. Kramatdjadi masing-masing 3 buah medja dan 3 buah kursi kerdja, sehubungan dengan penambahan ruangan baru untuk Kantor PPS di 5 Ketjamatan tersebut. Disamping itu untuk keperluan rapat, Sekretariat PPD DCI Djakarta mempunyai ruang sidang khusus jang dapat menampung 30 orang; sehingga penjelenggaraan rapat dengan wilajah (PP Kota & PPS) terpaksa memindjam ruangan di Balaikota DCI Djakarta.

Perlengkapan jang berupa mesin tulis dan mesin stencil Sekretariat PPD DCI Djakarta telah mempunyai 7 buah mesin tulis dan 2 buah mesin stencil.

Barang-barang tersebut berasal dari :

- | | | |
|----|-------------------------------|----------------------|
| a. | Djatah dari LPU | 2 buah Mesin Tulis |
| | | 1 buah Mesin Stencil |
| b. | Pembelian PPD
DCI Djakarta | 5 buah Mesin Tulis |
| | | 1 buah Mesin Stencil |

Tjatatn : (pada bulan Djuli 1971, Mesin Stencil pembelian PPD DCI Djakarta itu telah hilang karena ditjuri).

Barang-barang lain jang diperoleh sebagai djatah dari LPU untuk Sekretariat PPD DCI Djakarta berupa 1 buah mesin djumlah Oliveti dan 1 buah Mesin Hitung Facit.

Pada umumnja kantor-kantor wilajah (PP Kota, PPS dan PPP) terbagung lokasinja dengan kantor Pemerintah setempat jang menempati ruangan khusus disediakan untuk itu.

Untuk perlengkapan kantor baik jang berupa barang-barang meubilair maupun mesin-mesin tulis, semula adalah pindjaman dari kantor wilajah setempat.

Jang selandjutnja perlengkapan itu ditambah dengan barang-barang djatah dari LPU dan dari PPD DCI Djakarta.

Dari LPU perlengkapan itu berupa :

- | | | |
|----|--|-------------------------|
| a. | Untuk tiap PP Kota | 1 buah Mesin Tulis |
| | | 1 buah Mesin Hitung |
| | | 1 buah Mesin Djumlah |
| b. | Untuk tiap PPS | 1 buah Mesin Tulis |
| | | 1 buah Radio Transistor |
| | | 1 buah Megaphone |
| c. | PPP hanja menerima masing-masing sebuah Gambar Presiden R.I. | |

Sedangkan dari PPD DCI Djakarta telah diberikan barang-barang meubelair untuk tiap PP Kota dan PPS sebuah Almari buku dan untuk PPP masing-masing sebuah rak/lemari file.

Berdasarkan pengalaman Pemilu 1971, sangatlah dirasakan perlu adanya gudang yang cukup memenuhi syarat untuk setiap kantor PPD. Dalam kenyataannya barang-barang Pemilu dari djatah LPU yang disampaikan kewilayah, baik yang berupa mesin-mesin dan peralatan lainnya maupun yang berbentuk buku-buku dan formulir untuk sementara ditampung PPD dengan fasilitas pergudangan yang kurang memenuhi syarat. Disamping itu sangat diperlukan untuk penjinnaan arsip barang-barang stencilan dan dokumen PPD baik yang berbentuk buku maupun surat-surat.

Djuga logistik untuk keperluan routine kantor berupa kertas dan alat tulis kantor yang rata-rata setiap bulannya memerlukan lebih dari 100 rim kertas stencil folio, 25 tube tinta stencil, 7 rim kertas HVS double folio, 1 doos karbon double folio dan perlengkapan alat tulis kantor lainnya. Dalam hal adanya pengeluaran khusus seperti bantuan pemberian kertas stencil kepada PARPOL/GOLKAR dan reproduksi sedjumlah buku-buku baik yang berupa buku pedoman & petunjuk maupun stencilan lainnya, maka kebutuhan routine tersebut menjadi 3 x lipat, sehingga logistik keperluan kantor inipun membutuhkan tempat yang khusus pula.

Baru setelah 6 bulan pertama penjelenggaraan Urusan Dalam khususnya logistik-administratif dapat diadakan taksiran yang mendekati kebenaran khususnya untuk routine termasuk logistik penjelenggaraan rapat-rapat, processing dokumen, intensitas ekspedisi dan keperluan administratif lainnya. Penjelenggaraan rapat-rapat yang merupakan atjara routine telah diadakan ketentuan sebagai berikut :

- PP Kota diadakan pada pertengahan bulan
- PP Kota bersama PPS diadakan setiap akhir bulan
- Sedangkan untuk anggota PPD DCI Djakarta diadakan segera sesudah rapat PP Kota bersama PPS.
- Staf Sekretariat PPD, 1 minggu sekali untuk Kepala Biro/Bagian dan pada akhir bulan seluruh Staf PPD DCI Djakarta.

Disamping itu, pada periode pentjalonan sampai dengan kampanye telah diadakan rapat 12 kali dengan Pimpinan PARPOL/GOLKAR tingkat wilayah.

Kegiatan-kegiatan sesudah pemungutan suara 3 Djuli 1971, lebih diarahkan pada penertiban dokumen-dokumen dan inventarisasi. Penjinnaan dokumen yang berupa surat-surat dibundel dalam brief-order, sedangkan barang-barang lainnya stencil disusun sedemikian rupa sehingga tidak menjulitkan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

Untuk pengamanan dokumen-dokumen itu maka rak arsip diberi kuntji dan beberapa dokumen lainnja ditaaurh dalam gudang atau lemari jang terkuntji.

Mengingat arus volume surat menjurat jang besar baik dengan eselon bawah maupun sebaliknja, maka oleh PPD telah dikeluarkan ketentuan tentang prioritas pengiriman surat-surat jang dalam hal ini dibedakan atas 3 persoalan :

- a. persoalan sangat penting via tilpon
- b. persoalan penting via kurir
- c. persoalan biasa via ekspedisi

Disamping itu untuk lebih melantjarkan arus surat menjurat maka PPD telah mewajibkan PP Kota untuk mengirimkan kurir ke PPD 2 kali dalam seminggu untuk mengambil bahan-bahan/surat-surat keperluan PP Kota/PPS.

Dari pihak PPD sendiri djuga telah disediakan 1 (satu) kendaraan Jeep Toyota khusus untuk ekspedisi, sehingga surat-surat jang sifatnja penting untuk segera disampaikan kewilajah maupun instansi lainnja dapat diselesaikan dengan tjepat.

Berdasarkan pengalaman Pemilu tahun ini diharapkan LPU sudah bisa menjusun rentjana kegiatan operasional dan mekanisme Sekretariat jang lebih baik untuk Pemilu jang akan datang.

4. 5. K e u a n g a n.

Dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Sektor Khusus J/Pemilihan Umum No.68/1969 tanggal 8 Nopember 1969, Project Officer Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta diminta untuk menjusun rentjana anggaran biaja penyelenggaraan Pemilu 1971. Oleh Gubernur Kepala Daerah DCI Djakarta dengan Suratnja tanggal 18 Nopember 1969 No.Fa.1/24/32/1969 telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri rentjana anggaran biaja PPD DCI Djakarta sebesar Rp. 529.308.477,50.— (Limaratus duapuluh sembilan djuta tigaratus delapan ribu empatratus tudjuhpuhuluh tudjuh rupiah limapuluh sen), jang terdiri dari pos-pos pengeluaran untuk :

- a. Belandja Pegawai : Honorarium — upah
Tenaga lepas — uang
Lembur — uang si-
dang — uang premi

Rp. 64.318.562,50

b.	Belandja Barang	: Alat-alat kantor —sewa listrik — sewa air minum — perkakas kantor — kotak kartu pemilih — kotak surat suara — mesin tulis/hitung — kendaraan bermotor — perlengkapan pemungutan suara	Rp. 246.620.900,—
c.	Belandja Pemba-ngunan	: Pembuatan TPS—pembuatan garage—pembuatan ruangan ker-dja — pemasangan lis-trik — pemasangan til-pon—sewa gedung.	Rp. 171.382.000,—
d.	Belandja Peme-liharaan	: Bensin — service — ban luar/dalam — accu — reparasi ketjil — keuring/reparasi be-sar — oil — minyak rem — air accu — ac-cuзуur dll.	Rp. 41.421.515,—
e.	Biaja Angkutan	:	Rp. 2.210.000,—
f.	Belandja lain-lain	: Biaja konperensi ker-dja — coaching/santi-adji — keamanan.	Rp. 3.355.500,—
D j u m l a h			Rp. 529.308.477,50

Dengan budget tersebut untuk DCI Djakarta dengan pemilih jang saat persiapan itu diperkirakan sebanjak 2.530.565 (Dua djuta limaratus tigapuluh ribu limaratus enampuluh lima) djiwa akan menelan biaja per pemilih : $\frac{529.308.177,50}{2.530.565 \text{ djiwa}} = \text{Rp. } 209,16$ dibulatkan mendjadi Rp. 209,50.

Dibandingkan pada saat Pemilihan Umum pertama tahun 1955 – 1956 Pemda DCI memperoleh biaja Rp. 5.792.396,33 dengan djumlah pemilih sebanjak 951.130 maka biaja untuk tiap pemilih terbebani :

$$\frac{5.792.396,33}{951.130 \text{ djiwa}} = \text{Rp. 6,09}.$$

Selisih biaja per djiwa dalam dua saat pemilihan tersebut disebabkan karena situasi politik dan keuangan Negara, antara lain :

- a. Nilai uang pada waktu itu masih tinggi,
- b. Keadaan barang-barang masih rendah harganya,
- c. Gadjih/upah pegawai masih minim,
- d. Djumlah susunan Panitia/Wilajah lebih ketjil,
- e. Djumlah penduduk/pemilih sedikit,
- f. Situasi keamanan jang berbeda.

Dari djumlah rentjana anggaran jang diadjukan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta, dalam tahun 1969 telah diotorisir dengan SKO dalam bentuk uang muka kerdja jang diterima langsung dari Bendaharawan Sekretariat L.P.U. sebesar :

PENERIMAAN :

- a. Tanggal 2 Maret 1970 Rp. 2.000.000,—
- b. Tanggal 10 Maret 1970 Rp. 1.166.500,—

Djumlah : Rp. 3.166.500,—

Dari uang persediaan tersebut digunakan untuk :

PENGELUARAN :

- a. Honorarium Rp. 75.250,—
- b. Uang Sidang Rp. 2.000,—
- c. Biaja Perdjalan . . . Rp. 421.800,—
- d. Ongkos Kantor . . . Rp. 1.622.505,—
- e. Biaja Santiadji . . . Rp. 215.395,—
- f. Pemeliharaan Rp. 827.400,—

D j u m l a h : Rp. 3.164.350,—

Sisa — lebih : Rp. 2.150,—

Sisa lebih mana telah disetor ke Kas Negara tanggal 15 Djuni 1970 dengan bukti penerimaan No. 00397 – 1970.

Dalam tahun anggaran 1970/1971 Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta telah menerima SKO dari LPU, berturut-turut diterbitkan SPMU-nja :

PENERIMAAN :

a.	Spmu tanggal 6 Djuni 1970	Rp. 5.729.820,—
	No. 4818/2100	
b.	Spmu tanggal 18 Djuli 1970	Rp. 9.477.861,—
	No. 8561/2100	
c.	Spmu tanggal 20 Agst. 1970	Rp. 1.102.009,—
	No. 11369/2100	
d.	Spmu tanggal 9 Sept. 1970	Rp. 6.796.909,—
	No. 13847/2100	
e.	Spmu tanggal 24 Nop. 1970	Rp. 31.562.859,—
	No. 23174/2100	
f.	Spmu tanggal 29 Djan. 1971	Rp. 247.500,—
	No. 30879/2100	
g.	Spmu tanggal 26 Pebr. 1971	Rp. 3.570.000,—
	No. 34739/2100	
h.	Spmu tanggal 11 Maret 1971	Rp. 2.082.000,—
	No. 36631/2100	
D j u m l a h :		Rp. 60.569.158,—

Dan selama tahun anggaran 1970—1971 PPD DCI Djakarta memerlukan :

PENGELUARAN :

a.	Uang Sidang	Rp. 2.606.130,—
b.	Honorarium	Rp. 5.262.550,—
c.	Upah Tenaga Lepas/ Borongan	Rp. 3.715.189,—
d.	Alat-alat Kantor. . .	Rp. 6.774.601,—
e.	Uang Duka	Rp. 7.500,—
f.	Kesedjahteraan . . .	Rp. 831.662,90
g.	Biaya Perdjalan . . .	Rp. 2.036.035,—
h.	Pemeliharaan	Rp. 2.007.937,75
	Kendaraan	
i.	Uang Premi	Rp. 8.478.655,—
j.	Biaya Pengangkutan .	Rp. 600.850,—
k.	Santiadji/Penerangan	Rp. 2.691.135,—
l.	Pembuatan TPS. . .	Rp. 24.804.000,—
m.	Kotak Kartu Pilih	Rp. 750.000,—
D j u m l a h :		Rp. 60.566.245,65

Sisa lebih telah disetor ke Kas Negara
tanggal 22 Djuni 1971 dengan bukti
penerimaan No. 00559/1971.

= Rp. 2.912,35

Adapun Surat pertanggung jawaban (Spd) tahun anggaran 1969 dan tahun anggaran 1970 telah dikirimkan ke Kantor Bendahara Negara di Djakarta tanpa ada kesulitan dan teguran.

Mengenai Kas Stelsel, PPD DCI Jakarta menggunakan sistim tabelaris setjara praktis guna penjunusan baik laporan-laporan maupun Surat pertanggung jawaban, yang pada tiap tanggal 10 dari bulan berikutnya sudah harus dikirimkan ke Kantor Bendahara Negara. Sedang tempat penyimpanan uang berada di Bank Indonesia Djl. Thamrin Jakarta. Selain uang untuk dipertanggung jawabkan (uudp) (beban sementara) PPD DCI Jakarta memperoleh pula kredit belanda barang atas beban tetap, yang SKO nya disatukan dengan uang untuk dipertanggung jawabkan (beban sementara).

Sebagaimana lazunnya realisasi belandja barang jang pembajarannja dilaksanakan atas beban tetap, dilakukan oleh suatu team pembelian jang anggota-anggotanja ditundjuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD DCI Djakarta No. 434/III/2/1970 tanggal 27 April 1970. Adapun pengeluaran-pengeluaran beban tetap, ialah :

- | | | |
|-------|--|-----------------|
| a. | Pembuatan 663 buah Kotak Kartu Pemilih a Rp. 750,— jang tendernja djatuh pada CV. RIMBA KENTJANA Jakarta, Surat permintaan pembajarannya diadjudkan dengan Surat PPD DCI Jakarta tanggal 1 Agustus 1970 No.02/Bend-8/70 kepada Kantor Bendahara Negara Jakarta sebesar | Rp. 497.250,— |
| <hr/> | | |
| b. | Pembelian kendaraan bermotor: 25 Sepeda Motor Honda Type S-90 dan 3 buah Mobil Honda Sedan Type 360/1969 tendernja djatuh pada PT. MORI-NA INDAH Jakarta, dengan surat permintaan pembajaran PPD DCI Jakarta pada K.B.N. tanggal 14 September 1970 No.05/Bend-9/1970 sebesar | Rp. 5.400.000,— |
| <hr/> | | |
| c. | Pembelian Kotak Surat Suara tersedia biaja sebanjak Rp. 38.474.100,— Dalam pengadaan barang tersebut, tendernja djatuh pada 2 (dua) Pengusaha masing-masing : | |

- | | | | |
|---------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 1. | CV. BUDHY | sebanjak 12.000 | |
| | a Rp. 1550,— | | = Rp. 18.600.000,— |
| 2. | PD KABANA | sebanjak 6.000 | |
| | a Rp. 1550,— | | = Rp. 9.300.000,— |
| | | | <hr/> |
| D j u m l a h | | | = Rp. 27.900.000,— |

Karenanja dari penjadjian kredit tersebut masih terdapat sisa sebanjak Rp. 10.574,100,— jang kemudian di claim dengan surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD DCI Djakarta tanggal 27 Nopember 1970 No. 1016/III/2/1970 agar biaja tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembelian perkakas kantor PPD DCI Djakarta dan untuk tambahan ruangan 5 buah Kantor Ketjamatan (Kramat Djati — Mp. Prapatan — Tjempaka Putih — Kodja dan Tambora).

Kemudian oleh L.P.U. permintaan tersebut disetudjui sampai djumlah Rp. 12.965.000,— dengan suratnja tanggal 25 Djanuari 1971 Nomor 15/14/1971.

Dari sisa kredit tersebut diatas digunakan Rp. 7.386.250,— untuk pembelian perkakas Kantor PPD DCI Djakarta jang dikerdjakan oleh CV GOLDEN STAR Djakarta, sedang untuk tambahan ruangan 5 Kantor Ketjamatan tendemja djatuh pada Fa. PADASUKA sebanjak Rp. 5.250.000,— Surat Permintaan Pembajarannja telah diadjukan pada Kantor Bendahara Negara Djakarta masing-masing :

- Tanggal 12 Maret 1971 No. 0230/III/2/1971 dan
- Tanggal 16 Maret 1971 No. 0239/III/2/1971.

Untuk pembuatan TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk PPD DCI Djakarta disadjikan uang untuk dipertanggung djawabkan sebanjak Rp. 24.822.000,— a Rp. 3000,— untuk 8.274 TPS, sedang djumlah TPS menurut keadaan terachir bertambah mendjadi 8.300 TPS Umum, 16 TPS Gelandangan, 1 TPS Mobile (tidak termasuk TPS Kantor). Guna pembuatan TPS, PPD DCI Djakarta melimpahkan wewenangnja pada P.P. Kota (Djakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan dan Timur). Dalam tahun anggaran 1971 — 1972 dimana saat-saat terlaksananja Pemilu makin mendekat sedangkan djenis pengeluarannja bertambah ragamnja, PPD DCI Djakarta memperoleh uang untuk dipertanggung djawabkan untuk tahun anggaran 1971/1972, sebesar :

a. PENERIMAAN :	
Triwulan I/1971	Rp. 32.081.068,—
Bantuan Komunikasi . .	Rp. 5.000.000,—
Triwulan II/1971	Rp. 30.587.700,—
D j u m l a h :	Rp. 67.668.768,—

Kemudian dipergunakan untuk :

b. PENGELUARAN :

aa.	Uang sidang	Rp.	13.354.850,-
bb.	Honorarium	Rp.	23.288.900,-
cc.	UTL/Borongan	Rp.	3.922.461,-
dd.	Perjalanan/Inspeksi/ Kurir	Rp.	1.676.800,-
ee.	Penerangan/Santiadji	Rp.	6.226.930,-
ff.	Ongkos kantor :	Rp.	9.396.444,25
gg.	Uang duka	Rp.	15.000,-
hh.	Kesedjahteraan	Rp.	1.101.214,75
ii.	Pemeliharaan	Rp.	2.102.374,20
	kendaraan		
jj.	Perbaikan ruangan/ perkakas kantor	Rp.	3.445.000,-
kk.	Pengangkutan	Rp.	2.162.267,-
ll.	Komunikasi	Rp.	5.000.000,-
mm.	Perlengkapan T.P.S.	Rp.	116.260,-
nn.	Kotak Kartu Pemilih	Rp.	250.000,-
oo.	Pembuatan T.P.S.	Rp.	1.509.000,-
	D j u m l a h	:	Rp. 73.567.501,20
	Sisa kurang	:	Rp. 5.898.733,20

Dalam periode penjelenggaraan administrasi keuangan untuk triwulan I/71 jang menjangkut anggaran antara lain pembuatan TPS dan honorarium KPPS dan sebagainya, dialami sedikit kelambatan karena :

- a. terlambat dikirimkan surat pertanggungan djawab (spd) triwulan I/71 dari wilayah, dan
 - b. berlakunja Keputusan Presiden No.14/1971 dan Menteri Keuangan tanggal 2 Djuni 1971 No.402/MK/II/6/1971 jang menundjuk Bendaharawan sebagai penghitung, pemungut, penjeter dan pelapor Pajak Pendjualan (PPN) dan MPO. Hal ini berakibat tambahnja pengeluaran, sehingga karenanja harus diadakan pembetulan dalam pembukuan dan menghubungi kembali pihak-pihak jang mengadakan transaksi pendjualan barang-barang pada PPD, dan Panitia-panitia Tingkat Ketjamatan dan Kota.
- Hal ini tidak dapat dihindarkan karena KBN tidak akan menerima surat pertanggungan djawab (spd) sebelum isi keputusan dimaksud dilaksanakan oleh Bendaharawan menurut ketentuannja dan

uang untuk dipertanggung djawabkan (uudp) berikutnja tidak akan dikeluarkan. Namun hal ini dapat diatasi hingga terkirimnja surat pertanggungangan djawab triwulan I/71 ke Kantor Bendahara Negara, jang kemudian surat pertanggungangan djawab-surat pertanggungangan djawab bulan berikutnja s/d Desember 1971 telah dikirimkan ke Kantor Bendahara Negara. Dalam memenuhi Keputusan Presiden no.14/1971 dan Menteri Keuangan tgl. 2-6-71 no.402/MK/II/6/1971 Bendaharawan Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta dapat memperoleh hasil pungutan Padjak Pendjualan sebesar Rp. 103.803,10 dan M.P.O. sebesar Rp. 29.106,56 djumlah keseluruhan sebanjak Rp. 132.909,66 jang telah disetorkan ke Kas Negara Djakarta. Sementara itu perlu diketengahkan bahwa sepanjang pelaksanaan Pemilu PPD DCI Djakarta menggunakan biaja :

Beban Sementara :

Tahun anggaran 1969/1970	Rp. 3.164.350,—
Tahun anggaran 1970/1971	Rp. 60.566.245,65
Tahun anggaran 1971/1972	Rp. 67.668.768,—
dengan pengeluaran sebanjak	Rp. 73.567.501,20
D j u m l a h :	Rp. 137.298.096,85

Beban Tetap (Tahun anggaran 1970/1971) :

a. Kotak Kartu Pemilih : Rp. 497.250,—	
b. Kendaraan bermotor : Rp. 5.400.000,—	
c. Kotak Surat Suara : Rp. 27.900.000,—	
d. Perkakas Kantor : Rp. 7.386.250,—	
e. Tambahan ruangan : Rp. 5.250.000,—	
Kantor Ketjamatan	
	Rp. 46.433.500,—
D j u m l a h :	Rp. 183.731.596,85
Sisa kurang :	Rp. 2.147.970,35
Djumlah biaja jang disadjikan oleh LPU :	Rp. 181.583.626,50

Dari djumlah biaja penjelenggaraan Pemilu 1971 seperti tersebut diatas didaerah PPD DCI Djakarta jang mempunjai djumlah pemilih sebanjak

2.141.655 jiwa memakan biaya : $\frac{183.731.596,85}{2.141,655} = \text{Rp. } 85,79 \text{ per}$
 pemilih atau $\frac{183.731.596,85}{4.239.464} = \text{Rp. } 43,81 \text{ per jiwa (penduduk).}$

Adapun rentjana anggaran biaya Pemilu dari PPD DCI Djakarta sebesar Rp. 529.308.477,50 hanya memperoleh persetujuan dari LPU sebesar Rp. 181.583.626,50 atau 34,30%.

Sebaliknya diukur dengan jumlah anggota DPRD yang dipilih, maka biaya Pemilu 1971 adalah $\frac{\text{Rp. } 183.731.596,85}{40 (32 + 8)} = \text{Rp. } 4.593.289,92 \text{ per}$

wakil rakyat yang dipilih; suatu bukti bahwa demokrasi itu sungguh mahal harganya. Akhirnya proceeding Pemilu 1971 dapat pula dilaksanakan walaupun dengan anggaran yang serba terbatas dan kurang tertepat penjujurannya kedalam pos-pos dimana ternyata antara besarnya pos yang satu dan yang lainnya kurang realistis. Kesulitan dalam pembiayaan ini dapat sedikit tertolong dengan dikeluarkannya Surat Kawat tanggal 26 Juni 1971 No.121/14/1971 yang menyatakan bahwa penggeseran dari pos ke pos diperkenankan tanpa melampaui plafond yang telah ditetapkan. Adapun terjadinya sisa kurang sebesar Rp. 5.898.733,20 tersebut disebabkan karena tidak tersadikjan biaya-biaya pembungkusan surat-surat suara (2. rangkap) dan peralatan lainnya, biaya pembuatan daftar TAPOL yang tidak berhak memilih, pembuatan papan penerangan Pemilu ukuran besar dalam rangka Raker Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD Tk. I se Indonesia tanggal 15 Januari 1971 di Gedung Pola Djakarta.

Dari jumlah uang untuk dipertanggung jawabkan yang telah diterima sepanjang penyelenggaraan Pemilu sebanyak Rp. 183.731.596,85 ada sebagian yang disalurkan dalam bentuk uang untuk dipertanggung jawabkan pula ke Panitia-panitia Pemilihan Kota;

1.	Djakarta Pusat	sebanyak	Rp.	25.207.330,—
2.	Djakarta Barat	sebanyak	Rp.	16.903.595,—
3.	Djakarta Utara	sebanyak	Rp.	12.257.711,25
4.	Djakarta Selatan	sebanyak	Rp.	21.517.605,—
5.	Djakarta Timur	sebanyak	Rp.	16.019.800,—

D j u m l a h : Rp. 91.906.041,25

atau 49,52% yang kemudian di uang untuk dipertanggung jawabkan lagi ke PPS/Ketjamatan. Mengenai pemeriksaan keuangan, dengan Surat Gubernur Kepala Daerah DCI Djakarta tanggal 11 Maret 1971 No. 498/Instr/B/K/BKD/1971 oleh Inspektorat Pemeriksa Keuangan DCI Djakarta telah diadakan pemeriksaan keuangan baik pada PPD DCI

Djakarta maupun pada eselon bawahan (PP Kota + PPS); adapun hasil pemeriksaannya telah dilaporkan oleh Kepala Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan DCI Djakarta tanggal 7 April 1971 No.165/IV/Kep.IPPK/SK/1971 kepada GubernurKepala Daerah/Ketua PPD DCI Djakarta.

Patut diketengahkan disini bahwa PPD memperoleh biaja hanya sampai dengan triwulan ke II/1971, dimana menurut ketentuan dari LPU, PPD akan bertugas sampai dengan akhir bulan Oktober 1971.

Guna kelengkapan Pemilu dimasa depan, maka dengan pengalaman pelaksanaan Pemilu 1971 ini cukup perlu adanya perubahan yang sudah barang tentu dikaitkan dengan penghematan anggaran Negara, antara lain :

1. Inventarisasi barang-barang milik Panitia Pemilihan Umum supaya dapat terpelihara baik sampai dapat digunakan pada Pemilu berikutnya.
2. Pembuatan Kotak Surat Suara yang permanen dari bahan zinkplaat yang dapat terlipat untuk keperluan-keperluan Pemilu yang akan datang dan memudahkan penjinpanan.
3. Perlu terbentuknya Sekretariat Panitia Pemilihan yang permanen dengan bezetting personil setelah selesainya Pemilu seperlunya saja, guna pemeliharaan inventaris, dokumen dan pengembangan tehnik Pemilu selanjutnya.
4. Penjusunan anggaran keuangan yang lebih realistis, antara lain :
 - a. Pemberian honorarium pada para anggota PPP sebagaimana waktu Pemilu pertama tahun 1955 – 1956 yang walaupun jumlahnya kecil namun hal ini dapat memberikan gairah kerja.
 - b. Ongkos Kantor yang memadai dengan klasifikasi besarnya biaja menurut tingkatan kantor Panitia.
 - c. Adanya biaja lain-lain sebagai pos tjadangan untuk menampung pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga.

4.6. Rapat Dinas.

Dalam menghadapi mekanisme kerja antara PPD DCI Djakarta PP Kota dan PPS, maka saluran komunikasi disamping ditijptakan melalui laporan routine, juga diadakan rapat-rapat dinas yang diselenggarakan sebulan sekali, rapat dinas dengan PP Kota diadakan dua minggu sekali dan rapat dinas dengan PP Kota dan PPS diadakan sebulan sekali. Hal yang sama baik ditingkat PP Kota, PPS ditijptakan pula rapat dinas berkala sampai ketingkat Kelurahan. Rapat dinas yang bersifat teknis ini ternyata telah sangat efektif dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul setjara on the spot. Sementara itu instruksi-instruksi dapat dibe-

rikan setjara langsung dan usul-usul dapat ditampung sebagaimana mestinya. Dilain pihak problema jang dihadapi wilayah dapat segera dilaporkan dan mendapat pemetjahan segera. Disamping itu forum komunikasi jang berupa rapat besar antara PPD dengan aparatatur Pemilu sampai tingkat Kelurahan bahkan sampai tingkat RT/RW telah dilaksanakan pula. Pertemuan Besar RT/RW dalam rangka Pemilu diadakan pada waktu menghadapi permulaan penyelenggaraan Pemilu dan pada waktu menghadapi kegiatan Kampanje, dengan mengambil tempat di Sport Hall Senajan. Pada kesempatan tersebut hadir Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU beserta keseluruhan unsur MUSPIDA dan PARPOL/GOLKAR diwilajah DCI Djakarta. Sementara rapat routine dengan para Pimpinan PARPOL/GOLKAR Tingkat DCI Djakarta diadakan pula setjara berkala, chususnja dalam periode pentjalonan, kampanje, menjelang Pemungutan Suara, penghitungan suara dan penetapan tjalon terpilih. Disamping forum-forum tersebut, diadakan djuga pertemuan koordinatip antara PPD DCI Djakarta dengan unsur Kokamsung dan unsur Laksus Kopkamtib. Sedang Panitia Peneliti Daerah DCI Djakarta, sesuai dengan tugas jang dibebankan kepadanya telah pula mengadakan sidang-sidang routine untuk menjelesaikan tugas penelitian kepada para tjalon sementara untuk keanggotaan DPRD Tk. I D.C.I. Djakarta. Demikian pula Panitia Pemeriksa Tingkat I DCI Djakarta jang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD DCI Djakarta No.0715/III/2/1971 pada tanggal 4 September 1971 telah mulai mengadakan kegiatan-kegiatannja jang berupa rapat routine dan berachir pada tanggal 14 September 1971 dengan suatu hasil pemeriksaan jang dituangkan dalam Berita Atjara tanggal 16 September 1971.

BAB V

PERBEKALAN & PERHUBUNGAN

5.1. Umum.

Djenis-djenis perbekalan dan sarana perhubungan PPD DCI Djakarta pada garis besarnya dapat dibagi 3 (tiga) golongan barang yakni sebagai berikut :

- a. Barang-barang yang pengadaannya oleh LPU seperti :
 - Kendaraan bermotor roda empat
 - Mesin Tik, Mesin djumlah, Mesin Hitung, Mesin Stencil
 - Radio Transistor, Megaphone, Radio Microphone
 - Motor tempel, Kapal Inspeksi
 - Gambar Presiden, Poster-poster Pemilu serta berbagai bentuk/model formulir termasuk Surat Suara, Buku Bekal Pemilu serta Brusur-brusur Pedoman Pemilu.
- b. Barang-barang yang pengadaannya oleh PPD DCI Djakarta seperti :
 - Kendaraan beroda dua untuk PPS, PP.Kota dan PPD DCI Djakarta.
 - Kotak Kartu Pemilih, Kotak Surat Suara, Papan Kampanje PARPOL/GOLKAR.
 - Beberapa djenis formulir seperti Model A4, Model G, Model F (DAftar Tjalon Sementara/Tetap DPRD Tk. I); dan beberapa djenis barang yang dianggap urgent oleh PPD DCI Djakarta disesuaikan dengan tersedianja anggaran.
- c. Barang-barang yang pengadaannya atas beban Anggaran Pemerintah Daerah sebagai bantuan mensukseskan Pemilu diwilajah DCI Djakarta seperti :
 - Gedung dan fasilitas kantor (meubilair) untuk PPD DCI, PP.Kota dan PPS.
 - Pemasangan telpon-telpon baru bagi beberapa kantor Kelurahan yang belum ada fasilitas tersebut.
 - Wireless speaker untuk PPS/Ketjamatan dan Kelurahan
 - Pemasangan Radio Komunikasi untuk pengendalian Operasionil Pemilu bagi pedjabat-pedjabat PPD DCI dan pedjabat-pedjabat Pemerintah Daerah yang langsung mambantu kelantjaran Pemilu.
 - Penggunaan Radio Telephone khusus untuk Kepulauan Seribu.
 - Penerimaan dan pengadaan serta penjampaian barang tersebut diatas pada umumnja dapat dilaksanakan menurut kebutuhan walaupun disana-sini terdapat sedikit kekurangan dan kelambatan.

Semua peralatan perbekalan telah dapat dimanfaatkan pada waktunya khususnya sekitar pemungutan suara.

5.2. Kotak Kartu Pemilih dan Kotak Surat Suara.

Pengadaan berbagai perlengkapan Pemilu untuk PPD DCI Jakarta termasuk Kotak Kartu Pemilih dan Kotak Surat Suara dilaksanakan oleh suatu Panitia Pengadaan Perlengkapan Pemilu yang dibentuk oleh Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta tanggal 27 April 1970 No. 434/III/2/1970, melalui Tender terbatas pada Perusahaan yang berdomisili di Jakarta.

Untuk Pengadaan Kotak Kartu Pemilih telah ditunjuk CV. Rimba Kentjana guna menyiapkan sejumlah 1.663 (seribu enamratus enam puluh tiga) buah Kotak yang telah diselesaikan pada waktunya sesuai dengan kontrak yang diadakan.

Djumlah Pengadaan Kotak Kartu Pemilih tersebut sebenarnya jauh melebihi ketentuan LPU yang hanya menyediakan anggaran untuk sebanyak 663 buah yang praktis tidak dapat mentjukupi ketentuan yang riil diwilayah DCI Jakarta. Dalam ketentuan LPU untuk tiap Kelurahan disediakan 3 (tiga) buah Kotak yang dapat menampung 1500 Kartu Pemilih setiap kotaknya; sedang untuk wilayah DCI Jakarta rata-rata tiap Kelurahan mempunyai pemilihan sekitar 10.000 – 15.000 pemilihan. Oleh karena itu Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta telah mengambil kebidjaksanaan untuk pengadaan Kotak tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang riil; malahan jumlah 1.663 buah ternyata masih belum mentjukupi sehingga telah diadakan penambahan lagi sejumlah 500 buah Kotak Kartu Pemilih.

Pelaksanaan Pengadaan Kotak Surat Suara sebagaimana prosedur yang berlaku pada Pengadaan Kotak Kartu Pemilih telah ditunjuk 2 (dua) Perusahaan untuk menjediakannya yakni :

- PD. Kabana sebanyak 6.000 (enamribu) buah Kotak.
- CV. Budhy sebanyak 12.000 (duabelasribu) buah Kotak.

Djumlah Pengadaan tersebut didasarkan pula pada jumlah TPS yang ada dan kemungkinan penambahan TPS-TPS khusus (Mobile, Speedboat, Gelandangan dan sebagainya).

Pemborong tersebut diatas telah menyiapkan tepat pada waktunya sesuai dengan kontrak; demikian pula pengirimannya yang juga dilakukan oleh Pemborong yang bersangkutan. Pengiriman telah diatur sedemikian rupa sehingga kotak-kotak tersebut tidak disimpan terlalu lama di PPS/Ketjamatan maupun Kelurahan-Kelurahan mengingat kondisi diwilayah DCI Jakarta akan tempat/ruangan yang terbatas disamping pertimbangan segi pengamanannya.

Dengan adanya ketentaun LPU untuk mengadakan TPS-TPS di Unit-unit Kerdja maka untuk memenuhi kebutuhan Kotak Surat Suara telah diadakan penambahan Kotak Surat Suara yang dipesan pada PT. Jaya Interior sebanyak 1.000 (seribu) buah dan pada CV. Budhy sebanyak 600 (enamratus) buah dan sesuai dengan kontrak yang diadakan. Pemborong-pemborong tersebut telah menyelesaikannya tepat pada waktunya. Pengadaan tambahan Kotak Surat Suara tersebut didasarkan pada kebidaksanaan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta untuk sekedar membantu kantor-kantor/instansi-instansi yang mengadakan TPS di Unit-unit Kerdja.

Penjampaan Kotak Surat Suara sebelum Pemungutan Suara Umumnya tidak banyak kesulitan, tapi setelah pemungutan suara untuk pengangkutan kembali dari TPS ke TPS dan PP.Kota telah menimbulkan berbagai masalah terlebih lagi biaya untuk pengangkutan sangat terbatas sedang biaya untuk penyimpanan tidak tersedia. Masalah penyimpanan dan pengamanan khusus untuk kotak surat suara yang masih berisi surat-surat suara untuk PPD DCI Djakarta merupakan masalah yang pelik.

Sementara ini kotak-kotak tersebut tertumpuk diruangan-ruangan Kantor Walikota dan Ketjamatan yang mana sangat mengganggu kelantjaran tugas sehari-hari.

Untuk mengatasi masalah ini perlu adanya kebidaksanaan yang seragam dari LPU tentang pemanfaatan/penjimpanan lebih lanjut kotak-kotak surat suara tersebut.

Penggunaan kotak-kotak surat suara ex pemilu 1971 untuk Pemilu yang akan datang tidak mungkin lagi mengingat kerusakan-kerusakan setelah digunakan terlebih lagi bentuk dan bahan kotak tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan.

Untuk disimpan sangat memakan tempat/ruangan dan untuk digunakan lagi sangat tidak efficient mengingat bahannya dari kayu yang mudah dimakan rayap ketjuali kalau diadakan perawatan khusus dan tentu saja memerlukan pembiajaan yang tjukup besar. Khusus untuk DCI Djakarta kotak-kotak tersebut direntjanakan akan dimanfaatkan untuk keperluan warga kotak dalam memelihara kebersihan jaitu untuk bak-bak sampah yang akan disebarkan kepada RT/RW diwilayah DCI Djakarta.

Seperti dikemukakan diatas bahwa kotak-kotak surat suara pemilu 1971 baik bentuk maupun bahan banyak kelemahannya, alangkah baiknya pihak LPU untuk pemilu yang akan datang perlu mempertimbangkan bentuk dan bahan yang lain misalnja dari aluminium atau triplex/plywood yang bentuknja dapat dilipat sedemikian rupa sehingga dapat mudah disimpan tidak memakan tempat dan bahan-

nja jang tahan lama sehingga dapat dimanfaatkan untuk Pemilu-Pemilu selandjutnja.

5.3. Bilik pemberian suara dan perlengkapan lainnja.

Kebidjaksanaan PPD DCI Djakarta dalam hal pembuatan dan pelaksanaan pengadaan bilik pemberian suara serta perlengkapan TPS lainnja ialah menjerahkan pada PP.Kota dan PPS dengan berpedoman pada ketentuan jang dikeluarkan oleh Lembaga Pemilihan Umum (Pedoman Mendagri/Ketua PPI No.2/PP1/1971).

Disamping pedoman tersebut oleh PPD DCI Djakarta telah dikeluarkan djuga beberapa petundjuk praktis mengenai pembuatan bilik suara antara lain tentang bahan jang dipergunakan untuk dinding dipakai kain sedang rangkanya dari bambu atau kaju.

Walaupun petundjuk praktis pembuatan bilik suara telah dikeluarkan, tapi dalam praktek pelaksanaan masih ada hal-hal jang tidak seragam antar wilajah. Misalnja sebagian wilajah menggunakan kain blatju sebagai dinding bilik suara sedang wilajah lain menggunakan bahan gedek/kadjang.

Penggunaan bahan-bahan bilik suara ini jang tidak seragam antar wilajah pada umumnja disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Bagi PPS/Ketjamatan jang menggunakan bilik suara dari bahan kain, dalam penggunaan selandjutnja dari kain tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Walikota/Tjamat jang bersangkutan.

Dalam praktek kain tersebut banjak digunakan untuk bahan pakaian bagi fakir miskin, jatim piatu, djompo dengan djalan menjalurkannya pada Panti Asuhan, dan Jajasan-jajasan jang bergerak dibidang Sosial, dan sebagian diserahkan sebagai bantuan pada Hansip diwilajah.

Demikian pula halnja dengan bahan-bahan bekas perlengkapan seperti : Bambu/Kaju, bantalan dan paku/alat pentjoblos umumnja diserahkan kepada Lurah jang bersangkutan untuk mengatur penggunaan selandjutnja.

5.4. Barang-barang Tjetakan.

Sedjak dimulainja kegiatan Pendaftaran pemilih dan pendaftaran rumah tangga dalam rangka sensus penduduk, PPD DCI Djakarta telah menerima berbagai model/bentuk formulir-formulir dari LPU disamping beberapa matjam barang tjetakan jang diadakan oleh PPD DCI Djakarta sendiri.

Adapun perintjian serta djumlah masing-masing model adalah sebagai berikut :

– Model A	sedjumlah	1.216.000	lembar
– Model A1	sedjumlah	2.862.000	lembar
– Model AA	sedjumlah	2.232	lembar
– Model AA1	sedjumlah	10.452	lembar
– Model A2	sedjumlah	2.232	lembar
– Model A3	sedjumlah	18.452	lembar
– Model B	sedjumlah	1.350	lembar
– Model C	sedjumlah	35.700	lembar
– Model D	sedjumlah	35.200	lembar
– Model G	sedjumlah	35.700	lembar
– Model A4	sedjumlah	400.000	lembar
– Model E1	sedjumlah	5.500	lembar
– Model E2	sedjumlah	11.000	lembar
– Model E3	sedjumlah	11.000	lembar
– Model E4	sedjumlah	11.000	lembar
– Model E5	sedjumlah	4.500	lembar
– Model F	sedjumlah	10.000	lembar
– Model F1	sedjumlah	31.000	lembar
– Model H	sedjumlah	990	lembar
– Model H1	sedjumlah	42.355	lembar
– Model H2	sedjumlah	124.755	lembar
– Model H3	sedjumlah	550	lembar
– Model H4	sedjumlah	550	lembar
– Model H5	sedjumlah	990	lembar
– Model H6	sedjumlah	550	lembar
– Meterai/Zegel	sedjumlah	125.448	lembar
– Surat suara warna kuning	sedjumlah	2.412.500	lembar
– Surat suara warna putih	sedjumlah	2.412.500	lembar
– Model K hal. 1, 2, 3	sedjumlah	80.000	lembar
– Model K1	sedjumlah	110.000	lembar
– Model K2, K3	sedjumlah	70.000	lembar
– Model L	sedjumlah	25.000	lembar
– Model N	sedjumlah	3.500	lembar
– Model O	sedjumlah	200	lembar
– Model P	sedjumlah	85	expl.
– Model Q	sedjumlah	200	expl.
– Model S	sedjumlah	320	expl.

Chusus untuk model O, Q, S tidak dikirimkan ke wilayah karena sifat kegunaannya, sedangkan untuk model P bagi PPD DCI Djakarta dipakai sebagai bahan dokumentasi Pemilu 1971, karena model P dipergunakan oleh Daerah Pemilihan Tk. II (DCI Djakarta tidak ada daerah pemi-

lihan Tk. II), sedang untuk formulir-formulir lainnja telah dikirimkan tepat pada waktunya ke wilayah dalam lingkungan DCI Djakarta.

Untuk beberapa model tersebut diatas karena hal-hal jang khusus diwilayah DCI Djakarta telah ditambah sesuai dengan kebutuhan sebenarnja, seperti :

- Model A diadakan penambahan 15 % dari djatah
- Model A1 diadakan penambahan 15 % dari djatah
- Model A4 diadakan penambahan 200 % dari djatah
- Surat suara diadakan penambahan 30 % dari djatah

Penambahan tersebut dalam rangka penambahan keperluan TPS-TPS Kantor jang djumlahnja terus meningkat dan mentjapai djumlah 1.140 TPS.

Barang-barang tjetakan jang diadakan oleh PPD DCI Djakarta jakni sebagai berikut :

- | | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|
| – Model F2 | sedjumlah | 10.000 | lembar |
| – Model F3 | sedjumlah | 31.000 | lembar |
| – Model G | sedjumlah | 2.435.000 | lembar |

Disamping formulir-formulir tersebut diatas, PPD DCI Djakarta djuga telah menerima berbagai buku Pedoman Pemilu dari LPU, jakni sebagai berikut :

- | | | | |
|---|----------|--------|-------|
| – Buku Bekal Pemilu | sebanjak | 50 | buah |
| – Buku Undang-Undang/Peraturan Pemerintah | 5.046 | buah | |
| – Buku Penjelasan tentang Pemilu | 600 | buah | |
| – Poster Pemilu | sebanjak | 1.000 | buah |
| – Pedoman Mendagri No. 2 | sebanjak | 16.500 | buah |
| – Pedoman Mendagri No. 3 | sebanjak | 16.500 | buah |
| – Pedoman Mendagri No. 4 | sebanjak | 16.000 | buah |
| – Amanat Presiden mendjelang Pemungutan Suara | sebanjak | 11.000 | buah. |

Walaupun barang-barang tjetakan tersebut sudah dapat diterima dengan baik oleh PPD DCI Djakarta tapi untuk beberapa djenis formulir telah menimbulkan berbagai masalah, seperti :

- Kelambatan penjempaian Model H, terlebih lagi Model K (Berita Atjara Penghitungan Suara).
- Kekurangan djumlah formulir jang disediakan seperti Model A4, Model K, dan Model L.
- Ukuran dan djumlah jang dipakai dasar pengepakan tidak disesuaikan dengan luasnja lingkup wilayah kerdja (Ketjamatan/Walikota)
- Disana-sini terdapat formulir jang tertukar untuk satu daerah dengan daerah lain dan sedjumlah tertentu salah tjetak.

Hal-hal tersebut ini telah menimbulkan banjaknja energi jang diperlu-kan untuk mengepak kembali dokumen-dokumen Pemilu jang tidak sesuai dengan lingkup kerdja (TPS/Kelurahan) dalam waktu jang relatif singkat dengan tenaga di Ketjamatan jang sangat terbatas pula.

Demikian pula halnja dengan menghadapi kekurangan djumlah formulir jang disediakan sehingga berulang-ulang kali harus meminta tambahan formulir jang tjukup memakan waktu dan energi, sedang djadwal waktu penggunaan sudah sangat mendesak sekali.

Disamping itu djuga karena lambatnja penjampaian beberapa Model formulir seperti Model K (Berita Atjara Penghitungan Suara) untuk TPS, maka petundjuk tehnis setjara tertib tidak dapat diberikan pada saat santiadji. Akibatnja pengisian Berita Atjara tersebut banjak mengandung ketidak seragaman dan kekeliruan-kekeliruan.

Masalah-masalah tersebut diatas inilah jang perlu kita hindari pada Pemilu-pemilu jang akan datang.

— 5. 5. Kendaraan

Sedjak terbentuknja PPD DCI Djakarta pada bulan Pebruari 1970 sampai saat pemungutan suara 3 Djuli 1971; PPD DCI Djakarta telah menerima berbagai djenis kendaraan baik jang disediakan oleh LPU maupun jang diadakan sendiri oleh PPD DCI Djakarta.

Pada bulan Mei 1970 jaitu pada saat kegiatan Sekretariat mulai meningkat, maka untuk kelantjaran tugas pekerdjaan sehari-hari Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD DCI Djakarta telah mengambil kebidjaksanaan untuk mengadakan pembelian 4 buah sepeda Motor Honda 125cc. Kendaraan tersebut telah banjak membantu dalam tugas Sekretariat sehari-hari, karena kendaraan dari L.P.U. pada saat itu belum tersedia.

Baru pada awal bulan September 1970, PPD DCI Djakarta menerima kendaraan jang disediakan oleh LPU jaitu sedjumlah 7 (tudjuh) buah berupa Jeep merk Toyota jang penggunaannja oleh PPD DCI Djakarta sebanjak 2 (dua) buah dan 5 (lima) buah diserahkan kepada Sekretaris PP. Kota.

Kemudian pada achir bulan September 1970 PPD DCI Djakarta mengadakan pembelian kendaraan beroda dua untuk keperluan PPS sesuai dengan anggaran jang disediakan oleh LPU. Pelaksanaan pembelian kendaraan ini seperti halnja dengan pengadaan perlengkapan Pemilu lainnja jang dilaksanakan dengan djalan tender terbatas kepada Perusahaan di Djakarta. Jang ditundjuk untuk menjediakan kendaraan-kendaraan tersebut ialah PT. MORINA INDAH. Sesuai dengan kontrak

jang diadakan, pemborong tersebut telah menjediakan tepat pada waktunya sedjumlah 26 buah sepeda motor Honda 90 cc dan 3 buah mobil merk Honda 360 cc. Pembelian mobil Honda tersebut adalah merupakan kebidaksanaan Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD DCI Djakarta setelah memperoleh persetujuan dari L.P.U. untuk memenuhi akan kekurangan alat angkutan di Sekretariat PPD DCI Djakarta dan diambilkan dari sisa anggaran kendaraan PPS tersebut diatas. Sedang khusus untuk keperluan Kepulauan Seribu telah diserahkan kendaraan air berupa 5 (lima) buah Motor tempel merk JOHNSON jang diterima oleh PPD DCI Djakarta pada bulan Maret 1971 dari LPU.

Motor-motor tersebut tidak dilengkapi dengan bodynja (out board), sehingga untuk memanfaatkan motor-motor tersebut terpaksa harus berusaha mentjari pembiajaannya. Sangatlah beruntung masalah ini dapat diatasi sehingga motor-motor tersebut dapat mendjalankan fungsinya sebagaimana jang diharapkan. Dengan semakin meningkatnja pelaksanaan tugas sehari-hari ditingkat PPD DCI Djakarta jang praktis sangat memerlukan mobilitas jang tjukup tinggi, maka pada awal Maret 1971 PPD DCI Djakarta menerima tambahan 2 (dua) buah kendaraan djenis Jeep merk Toyota dari LPU sedang untuk Pimpinan PPD DCI Djakarta telah diterima sebuah kendaraan Station Wagon (Jeep Komando) merk Toyota. Dan pada achir bulan Maret 1971 untuk kelantjaran angkutan barang-barang Pemilu dan pengamanan operasional Pemilu telah diterima dari LPU 2 (dua) buah truck merk Toyota. Untuk kepentingan penerangan telah diterima pada achir Mei 1971 sebuah kendaraan Unit djenis Coaster Movie Bus jang dilengkapi dengan alat-alat untuk penerangan. Kendaraan tersebut karena waktu penerimaannya mendahului daerah-daerah lain maka masih dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Humas PPD DCI Djakarta.

(*Tjatanan* : disajangkan walaupun kendaraan tersebut telah dipelihara dan didjaga sebaik-baiknya masih mengalami kehilangan beberapa alat penerangan seperti TV merk Sanyo dan Tape Recorder merk Sony jang berada dalam mobil tersebut. Hal ini terdjadi pada malam tanggal 21 Djuli 1971 di Sekretariat PPD DCI Djakarta dimana kendaraan tersebut disimpan. Laporan kedjadian tersebut telah dilaporkan pada LPU dengan Surat PPD DCI Djakarta tanggal 21 Djuli 1971 No. 0693/III/3/1971).

Sesuai dengan Kawat Mendagri/Ketua LPU No. 293/11/1971 tanggal 22 Djuli 1971, maka mobil Unit tersebut diatas telah diserahkan kepada Djawatan Penerangan DCI Djakarta pada tanggal 5 Oktober 1971.

Dengan adanya ketentuan untuk mengadakan TPS-TPS di Unit Kerdja pada bulan Mei 1971, maka tugas pekerjaan ditingkat PP Kota dan PPD sangat meningkat sehingga oleh Pimpinan PPD DCI Djakarta diambil kebidjaksanaan untuk menambah fasilitas kendaraan. Untuk itu telah diadakan pembelian 5 (lima) buah Sepeda Motor Honda untuk PP Kota dan 1 (satu) buah untuk PPD DCI Djakarta; adapun pembelian tersebut diambilkan dari anggaran yang ada di PPD DCI Djakarta.

Selanjutnya pada tanggal 19 Juni 1971 PPD DCI Djakarta telah menerima penjerahan sebuah kapal jenis Inspeksi Type AE dengan nama KM ANTAREDA P.In.2.

Penjerahan tersebut dilaksanakan pada salah satu atjara H.U.T. Djakarta ke-444 di Tandjung Priok dimana Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD DCI Djakarta menerima penjerahan kapal tersebut dari Kepala Biro Angkutan L.P.U. Selanjutnya kapal tersebut diserahkan pada Ketua P.P. Kota/Walikota Djakarta Utara untuk mengatur penggunaannya sebagai alat angkutan Kepulauan Seribu.

Guna pemeliharaan dan perawatan kapal serta pembiajaan awak kapal tersebut, dengan Instruksi Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta tanggal 22 Juni 1971 No. 0614/III/3/1971 ditetapkan bahwa biaya-biaya tersebut dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah dan sekaligus kapal tersebut dimasukkan dalam Inventaris Kapal-Kapal Pemerintah Daerah.

Demikian pula halnya dengan kendaraan-kendaraan bermotor Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta.

Seluruh kendaraan tersebut dimasukkan kedalam Inventaris Pemerintah Daerah berikut pembiajaan perawatan dan pemeliharaannya sebagaimana diatur dalam Instruksi Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta tanggal 15 Pebruari 1971 No.0149/III/2/1971.

Disamping kendaraan-kendaraan bermotor dan kapal tersebut diatas, maka untuk Karyawan PPD DCI Djakarta dan Panitia Pemilihan Kota telah diadakan pembelian sepeda merk Phoenix sebanyak 6 (enam) buah (telah hilang satu buah) dan sepeda merk Numex sebanyak 13 (tiga belas) buah yang semuanya dapat dipergunakan dengan baik.

5. 6. Sarana perhubungan/penerangan.

Sebagai kelengkapan sarana perhubungan/penerangan PPD D.C.I. Djakarta pada bulan September 1970 telah menerima Transistor (Radio) merk Philips sebanyak 27 (duapuluh tujuh) buah yang penggunaannya diserahkan kepada P.P.S./Ketjamatan. Dan pada bulan Juni 1971

P.P.D. DCI Djakarta telah menerima pula Radio Mic/Community – Receiver sebanyak 32 (tigapuluh dua) buah dari LPU, jang penggunaannya untuk PP Kota dan PPD DCI Djakarta. Selanjutnya dalam rangka bantuan Pemerintah Daerah untuk mensukseskan Pemilu 1971, kepada P.P.S./Ketjamatan dan Kelurahan telah diserahkan Wireless Speaker; sedang dari LPU pada akhir bulan Desember telah diterima Megaphone sebanyak 27 (duapuluh tujuh) buah sebagian merk National dan sebagian merk Toa. Megaphone tersebut sesuai dengan perentjaan penggunaannya telah disampaikan pada P.P.S./Ketjamatan. Untuk keperluan Penerangan Pemilu dari LPU telah diterima 2 rol film peragaan Pemilu. Semua sarana perhubungan/penerangan tersebut umumnya telah dimanfaatkan dalam rangka mensukseskan Pemilu.

Mengenai masalah pemeliharaan dan penggunaan alat-alat tersebut diatas sesuai dengan kebidjaksanaan Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD DCI Djakarta diserahkan kepada PP Kota/Walikota dan PPS/Ketjamatan. Karena alat-alat tersebut semuanya dimasukkan sebagai inventaris Pemerintah Daerah, maka seluruh biaya pemeliharaan dibebankan pada Pemerintah Daerah.

5. 7. Perlengkapan Kantor.

Sedjak dibentuknya Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta telah dilakukan pembelian-pembelian perlengkapan-perengkapan Kantor oleh Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta jauh sebelum diterimanya perlengkapan-perengkapan kantor jang disediakan oleh LPU. Hal-hal ini ditempuh mengingat kebutuhan akan peralatan tersebut sudah mendesak berhubung kegiatan-kegiatan persiapan Pemilu sudah dimulai sedang untuk memindjam dari kantor-kantor/Instansi-instansi di daerah sangatlah sukar karena umumnya diperlukan oleh Kantor-kantor/Instansi itu sendiri.

Perlengkapan kantor jang dibeli oleh Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta jang menggunakan anggaran Pemilu jang tersedia pada waktu itu adalah berupa :

- Mesin tulis sebanyak 5 (lima) buah dan,
- Mesin Stencil folio merk Gestetner listrik/tangan 1 (satu) buah jang semuanya digunakan di Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta.

Perlengkapan Kantor tersebut diatas sangatlah membantu kelanjutan tugas pekerjaan Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta; terlebih pada waktu menjelang 5 Djuli 1970 saat pendaftaran pemilih & pendaftaran rumah tangga/penduduk.

Perlengkapan kantor jang disediakan oleh LPU karena pengadaannya

mengalami kelambatan, baru diterima pada bulan September 1970; alat-alat kantor tersebut adalah sebagai berikut :

- Mesin tulis „Remington” 6 buah, 1 buah untuk PPD DCI Djakarta dan 5 buah untuk PP Kota.
- Mesin Hitung „Facit” 6 buah, 1 buah untuk PPD DCI Djakarta dan 5 buah untuk PP Kota.
- Mesin Djumlah „Olivetti” 6 buah, 1 buah untuk PPD DCI Djakarta dan 5 buah untuk PP Kota.
- Mesin Stencil „Gestetner” 1 buah untuk PPD DCI Djakarta.

Sedang mesin tik untuk PPS/Ketjamatan baru diterima pada akhir bulan Desember 1970 sedjumlah 27 buah. Selanjutnja untuk keperluan kantor Panitia Pemilihan di wilayah D.C.I. Djakarta pada bulan April 1971 telah diterima dari L.P.U. sedjumlah 253 buah Gambar Presiden R.I., jang penggunaannja diperintji sebagai berikut :

- 1 (satu) buah ukuran besar untuk PPD DCI Djakarta,
- 32 (tigapuluh dua) buah ukuran sedang untuk P.P. Kota dan PPS,
- 220 (duaratus duapuluh) buah ukuran ketjil untuk PPP/Kelurahan.

Untuk pembungkus surat-surat suara dan Berita Atjara Penghitungan Suara sesuai dengan kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU No. 090/11/1971 telah disediakan alat-alat pembungkus sebagai berikut :

- Kertas pembungkus 90 x 120 cm. = 75.000 lembar
- Pembungkus Plastik sebanjak 27 x 500 lbr. = 13.500 lembar
- Tali pengikat sebanjak = .360 gulung.

Alat-alat pembungkus tersebut sesuai dengan kawat tersebut diatas telah disampaikan kepada PPS jang bersangkutan.

5. 8. Penambahan ruangan dan peralatan (meubilair) kantor.

Sesuai dengan hasil pemitjaraan antara Sekretaris PPD DCI Djakarta dengan Sekretaris Umum LPU, maka sisa anggaran Kotak Surat Suara telah disetudjui pemanfaatannja untuk penambahan ruangan dibeberapa PPS/Ketjamatan dan peralatan kantor (meubilair). Realisasi dari hasil pemitjaraan tersebut telah diadakan pembelian lemari rak sebanjak 40 buah dan lemari file sebanjak 220 buah, dengan perintjian penggunaan sebagai berikut :

- Lemari rak sebanjak 8 buah untuk PPD DCI Djakarta,
- Lemari rak sebanjak 5 buah untuk P.P. Kota,
- Filing Cabinet sebanjak 220 buah untuk PPP/Kelurahan.
- Lemari rak sebanjak 27 buah untuk PPS/Ketjamatan.

Sedang untuk PPD DCI Djakarta dari anggaran tersebut diatas telah diadakan perbaikan dan penambahan meubilair jang urgent bagi kantor tingkat PPD dan sebagai pelaksana telah ditundjuk Interior & Furniture „Ruang”.

Mengenai penambahan ruangan karena terbatasnya pembiayaan yang ada, maka telah diambil kebidaksanaan menambah ruangan di 5 (lima) Kantor PPS/Ketjamatan dengan lokasi-lokasi sebagai berikut :

- | | | | |
|----|------------------|--------|-------------------|
| 1. | DJAKARTA PUSAT | P.P.S. | Tjempaka Putih, |
| 2. | DJAKARTA UTARA | P.P.S. | K o d j a, |
| 3. | DJAKARTA BARAT | P.P.S. | T a m b o r a, |
| 4. | DJAKARTA SELATAN | P.P.S. | Mampang Prapatan, |
| 5. | DJAKARTA TIMUR | P.P.S. | Kramat Djati. |

Penambahan ruangan tersebut telah diselesaikan dengan baik oleh pemborong yang ditunjuk dan telah dimanfaatkan oleh masing-masing PPS. Sebaliknya karena persetudjuan penggunaan anggaran tersebut agak terlambat, maka anggaran untuk tambahan ruangan tersebut mengalami carry over (hangus); dan baru diotorisir kembali pada anggaran kwartal II tahun anggaran 1971/1972.

Guna kepentingan mensukseskan penerangan Pemilu, maka telah dipasang pula papan-papan penerangan sebanyak 10 buah yang tersebar di 5 (lima) wilayah DCI Jakarta. Kemudian dalam rangka membantu kampanye PARPOL/GOLKAR untuk penempelan tanda Gambar serta pengumuman-pengumuman maka oleh PPD DCI Jakarta telah dipasang pula papan kampanye sebanyak 20 (duapuluh) buah yang tersebar diwilayah DCI Jakarta.

Atas kerdja sama dengan Biro Humas LPU maka guna penerangan pada masyarakat telah dipasang pula tanda gambar PARPOL/GOLKAR berukuran besar tersebar diwilayah DCI Jakarta.

Selanjutnya pada bulan Djuni 1971 dari LPU telah diterima perlengkapan pakaian dinas untuk membantu petugas pengamanan Pemilu, yakni :

- | | | |
|---------------------------|----------|-----------|
| — Untuk Pagar Pradja | sebanyak | 390 stel, |
| — Untuk Hansip | sebanyak | 500 stel, |
| — Untuk Resimen Mahadjaja | sebanyak | 100 stel. |

Perlengkapan tersebut semuanya telah disalurkan kepada yang bersangkutan sehingga dapat digunakan mendjelang Pemungutan Suara.

5. 9. Sarana Komunikasi.

Sarana komunikasi diwilayah DCI Jakarta sampai dengan tingkat Kelurahan dapat dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan tilpon yang sudah terpasang di tiap Kantor Walikota, Ketjamatan dan Kelurahan termasuk Kepulauan Seribu. Dalam rangka pemasangan pesawat tilpon tersebut, PPD DCI Jakarta membantu membiayai pemasangan untuk

6 buah Kelurahan dan pemindahan untuk 1 buah Ketjamatan yang dibebankan pada anggaran Angkutan/Komunikasi.

Di PPD DCI Djakarta dipasang pula 2 buah tilpon masing-masing No. 53418 dan 54447.

Pada hari Pemungutan Suara semua sarana komunikasi yang ada dimanfaatkan untuk pengendalian operasional Pemilu termasuk Radio Telephone, hot-line untuk komunikasi antar penguasa daerah dan Radio Komunikasi yang dipasang oleh Pemerintah Daerah sejumlah 8 buah yaitu untuk :

- Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD DCI Djakarta,
- Wakil Gubernur KDH/Wakil Ketua PPD DCI Djakarta,
- Kepala Direktorat II/Keamanan,
- Kepala Direktorat VII/Chusus Politik,
- Sekretaris PPD DCI Djakarta,
- Aspri Wakil Kepala Daerah Bidang Keamanan,
- Kepala Biro II,
- Operation Room.

5.10. Angkutan

Pola angkutan di DCI Djakarta seluruhnya dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor/mobil sampai ketinggian Kelurahan. Oleh karena itu PPD DCI Djakarta dalam pelaksanaan tugasnya membutuhkan fasilitas kendaraan dengan intensitas pemakaian yang tinggi. Dalam hubungan ini, maka untuk alokasi alat-alat angkutan pada masa yang akan datang perlu dipertimbangkan setjara khusus baik jenis maupun jumlahnya dalam pendjataan peralatan tersebut.

Dalam hal pengiriman peralatan/barang-barang Pemilu dari PPD DCI Djakarta sampai ketinggian Kelurahan atau sebaliknya umumnya dapat diselenggarakan sendiri oleh aparaturnya Pemilu mengingat keadaan daerah yang relatif kompak dengan jaringan yang extensive. Hal ini dapat berpengaruh terhadap pola pertanggungjawaban biaya angkutan untuk Panitia-panitia Pemilu di Wilayah DCI Djakarta yang dalam banyak hal mungkin berbeda dengan daerah-daerah lain.

Dengan diterimanya 2 (dua) buah truck dari LPU, maka pengiriman barang-barang Pemilu ketinggian Wilayah telah dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat pada waktunya. Malahan dalam rangka membantu tugas pengamanan langsung Pemilu, dengan kebidaksanaan Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD DCI Djakarta telah diserahkan salah satu dari dua buah truck Pemilu itu kepada Pihak Kepolisian (Kondak Metro Jaya).

BAB VI

PENGAWASAN

6. 1. Umum.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.1/70 dan Keputusan Mendagri No.5/1970, Biro Pengawasan mengarahkan tugas pokok pada sasaran pengawasan terhadap :

- a. tehnis penjelenggaraan
- b. peralatan/perlengkapan
- c. k e u a n g a n.

Mekanisme dan bentuk penjelenggaraan pengawasan pada sub. a, b, c diatas dilakukan pada tingkat PPD DCI Djakarta, PP Kota dan PPS bekerdja sama dengan unsur-unsur pada Biro-biro Sekretariat PPD DCI Djakarta, maupun dengan unsur Staf PP Kota dan PPS. Pengawasan pada bidang-bidang tersebut terutama dimaksudkan agar tidak terdapat hambatan-hambatan pada sektor penjelenggara dan jadwal Pemilu, oleh karena itu pengawasan lebih bersifat preventip.

Pengawasan dokumen-dokumen, pertanggungan djawab dan daftar inventaris dilakukan dengan mengadakan pengetjekan on the spot setjara periodik baik oleh Biro Pengawasan maupun bersama-sama dengan unsur-unsur Staf PP Kota dan PPS.

6. 2. Pengawasan Tehnis.

Untuk meneliti hasil-hasil kegiatan aparat-aparat Pemilu terutama di-wilajah-wilajah PP Kota, PPS/Ketjamatan, Kelurahan dan sebagainya, dengan koordinasi dari Sekretaris PPD DCI Djakarta setjara periodik unsur-unsur Biro Pengawasan, Biro Penjelenggara, Biro Perbekalan, Biro Administrasi dan unsur-unsur Staf lainnja selalu mengadakan penindjauan setjara sektoral kewilajah-wilajah, antara lain :

- 6.2.1. Dengan Surat Tugas Sekretaris PPD DCI Djakarta tanggal 12 Oktober 1970 No.901/III/1/1970, pada tanggal 20 Oktober 1970 s/d 31. Oktober 1970 Biro Pengawasan bersama unsur-unsur Staf PPD DCI Djakarta telah mengadakan pengetjekan dan penelitian keseluruhan daerah Ketjamatan dan Kelurahan untuk mengetahui sampaj dimana kemadjuan jang ditjapai oleh aparat-aparat Pemilu. Pengawasan pada saat ini terutama untuk meneliti progress pendaftaran penduduk dan data-data

djumlah penduduk jang berhak memilih dan sebagainya. Seperti diketahui bahwa untuk menetapkan djumlah wakil pada tiap-tiap Lembaga Perwakilan perhitungannya harus didasarkan djumlah penduduk jang terdaftar. Sesuai dengan Instruksi Bersama Mendagri/Ketua LPU dan Kepala Biro Pusat Statistik tanggal 31 Maret 1970 No. 124 tahun 1970 pendaftaran

P.15/70

penduduk dan pendaftaran pemilih telah dilaksanakan dari tanggal 5 Djuli 1970 s/d tanggal 5 Agustus 1970. Berhubung dengan berbagai masalah jang timbul, pekerjaan tersebut diperpanjang sampai tanggal 31 Oktober 1970.

Dari hasil pengetjekan itu dapat diketahui setjara terperintji :

- a. Djumlah penduduk D.C.I. Djakarta.
- b. Djumlah penduduk jang berhak memilih.
- c. Djumlah penduduk jang tidak berhak didaftar sebagai pemilih.
- d. Djumlah penduduk jang tidak berhak untuk didaftar sebagai pemilih dan daftar dari djawatan-djawatan temjata tidak sesuai dengan daftar jang ada pada Laksus Pangkop-kamtibda Djaya.
- e. Data-data mengenai lokasi TPS-TPS bagi Tuna Karya, Rumah Sakit, Asrama, Pelabuhan.
- f. Daftar A, Berita Atjara, AA, AA1, Kartu A1 sudah hampir selesai.

- 6.2.2. Dengan Surat Tugas Sekretaris PPD DCI Djakarta No. 0107/III/2/1971 tanggal 9 Pebruari 1971, pada tanggal 27 Pebruari 1971 s/d 15 Maret 1971 unsur-unsur Staf Sekretariat PPD DCI Djakarta telah mengadakan penindjauan keseluruhan wilayah PP Kota, PPS/Ketjamatan dan PPP/Kelurahan. Pengawasan pada kesempatan ini terutama untuk meneliti proses penjelesaian daftar AA dan AA1, A2 dan A3 dan persiapan-persiapan/lapangan/pemungutan suara lainnya.

Dari hasil penindjauan itu dapat diketahui keadaan dan kegiatan diwilajah sebagai berikut :

1. Bahwa daftar AA dan AA1 (Berita Atjara—djumlah penduduk) daftar A2, A3 (Berita Atjara djumlah pemilih) telah selesai dibundel sesuai dengan instruksi jang ada.
2. Perbekalan dan alat-alat perlengkapan jang dikirim ke-masing-masing Ketjamatan sudah sampai kealamat jang bersangkutan, antara lain :

- Stempel-stempel, Radio, Megaphone, Mesin Tik, Lampu Petromak (untuk Ketjamatan jang belum ada penerangan listrik), kendaraan sepeda motor Honda dan sebagainya.
- 3. Bahwa pada tiap-tiap Kelurahan dapat diketahui tentang data-data perubahan penduduk, kartu pemilih jang belum ditanda tangani. Pada umumnja pada setiap kelurahan masih terdapat rata-rata antara 10 s/d 30 kartu pemilih jang belum ditanda tangani, akan tetapi djumlah itu tidak sampai mempengaruhi djumlah TPS jang telah direntjanakan.
- 4. Bahwa pada umumnja seluruh Kelurahan sudah mempersiapkan daftar-daftar petugas K.P.P.S.
- 5. Bahwa pada tiap Kelurahan sudah tersedia tempat-tempat penjinjman kotak suara jang keamanannja dapat dijamin.
- 6. Bahwa pada tiap-tiap kelurahan dapat diketahui djumlah terbanjak dari massa PARPOL/GOLKAR, satu dan lain hal untuk keperluan keamanan dan pengamanan.

Sehingga dapat diambil kesimpulan dari hasil pengetjekan tersebut diatas, bahwa pada bulan Maret 1971, program umum dan djadwal Pemilu diwilajah PPD DCI Djakarta berdjalan dengan lantjar dan telah siap menghadapi tahap berikutnya, jaitu masa kampanye.

- 6.2.3. Setelah tahap pentjalonan dan pengumuman daftar tjalon selesai jang telah diumumkan setjara resmi pada tanggal 20 April 1971, maka mulailah tahap masa kampanye jang dimulai dari tanggal 27 April 1971 s/d tanggal 25 Djuni 1971.

Untuk mengikuti djalannja situasi kampanye, maka unsur-unsur Biro Pengawasan bersama-sama dengan aparat-aparat Biro-biro lainnja dengan surat tugas Sekretaris PPD DCI Djakarta No. 0394/III/2/1971 tanggal 27 April 1971 telah mengadakan penindjauan setjara sektoral keberbagai wilajah dimana kampanye akan diadakan.

Pengawasan kampanye dilakukan bekerdja sama dengan unsur-unsur Keamanan/Alat Negara jang ditugaskan khusus untuk itu.

Pengamanan setjara langsung adalah dibawah koordinator Kadapol Metro Djaja (Kokamsung), dibantu oleh unsur intel.

Kegiatan Kampanye selalu diikuti dengan komunikasi sentral jang berada di Komdak Metro Djaya dan Kodam V/Djaya. Rekaman dengan tape-recorder dan data-data serta situasi

kampanje dibuat setiap hari dalam formulir isian tersendiri, baik oleh Staf Sekretariat maupun oleh petugas-petugas wilayah dan aparat Keamanan lainnja.

Sampai dengan satu bulan pertama dari masa kampanje maka kegiatan-kegiatan dari PARPOL/GOLKAR dalam rangka menggunakan kesempatan berkampanje itu, ternyata masih terbatas, Ketjuali Golongan Karya, P.N.I. dan N.U., Partai-partai Politik lainnja belum setjara penuh memanfaatkan kesempatan berkampanje tersebut.

Sebagian besar dari mereka kegiatannja terbatas pada penempelan-penempelan tanda-tanda gambar, andjangan ke Ranting-ranting, rapat intern, kundjungan dari rumah kerumah dan kampanje keliling dengan menggunakan mobil unit. Hanya Golongan Karya, PNI, NU jang menundjukkan kegiatan-kegiatan kampanje dengan mengerahkan massa setjara memadai.

Sebegitu djauh tidak terdapat kedjadian-kedjadian istimewa jang memerlukan perhatian khusus dalam rangka pelaksanaan kampanje ini.

Kelainan-kelainan terbatas pada ketidak tertiban dalam penempelan dan pemasangan tanda gambar.

Beberapa insiden terdjadi dibeberapa tempat, antara lain :

- a. Tanggal 16 Mei 1971 rombongan arak-arakan massa PNI di Tandjung Priok, telah dilempari orang jang tidak dikenal jang mengakibatkan rombongan jang menudju ke Tandjung Priok tersebut hampir menimbulkan keributan.

Hal ini disinjalir disebabkan karena sedjak dari kota (Gunung Sahari) dikalangan rombongan itu ada jang mengutjapkan teriakan-teriakan „Hidup Bung Karno“, „Hidup Gemut“ dsb. Mungkin ada sementara orang jang tidak senang mendengar teriakan itu dan tahu bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan jang ada, sehingga menimbulkan akibat tsb. diatas.

Kedjadian/teriakan-teriakan serupa terdjadi djuga oleh massa PNI pada tanggal 24 Mei 1971 di Rawamangun/By Pass tetapi tidak sampai terdjadi insiden.

- b. Pada tanggal 28 Mei 1971 rombongan massa kampanje N.U. telah berpapasan dengan rombongan massa Golkar di Tg. Priok dengan arah jang berlawanan. Karena djalanan

matjet dan kendaraan masing-masing tidak ada jang mau mengalah, hampir terdjadi insiden tetapi dapat segera teratasi.

Beberapa tjatatan lain jang perlu ditambahkan, adanja selebaran pamflet oleh apa jang menamakan dirinja Komando Djihad dan kelompok/ unsur-unsur perorangan, Mahasiswa jang menamakan dirinja Golongan Putih (Golput).

Selebaran-selebaran itu terdapat diberbagai tempat diwilajah DCI Djakarta, antara lain didaerah Kebajoran, Tjempaka Putih dan daerah-daerah lain tentang diadakannya Pemilu. Jang isinja antara lain : „Pemilu tidak bebas dan rahasia”, „Djika aku datang dibilik TPS aku tidak pilih siapa-siapa” dsb.

Sedjak tanggal 2 Djuli 1971 seluruh unsur Staf PPD DCI Djakarta, unsur-unsur Keamanan Kokamsung dan Komdak Metro Djaya, satuan-satuan Keamanan telah siap ditempat jang telah ditentukan dengan peralatan jang telah disediakan.

Pengawasan dan pengaturan operasionil keamanan dan pemungutan suara dilakukan lewat Operation Room DCI Djakarta, dimana Gubernur, unsur-unsur Kodam V/Djaya dan Komdak Metro Djaya selalu berada sedjak djam 18.00 W.I.B. tanggal 2 Djuli 1971 s/d tanggal 3 Djuli 1971.

Segala sesuatu jang menjangkut gangguan kelantjaran Pemilu dilaporkan langsung ke Operation Room.

Selama berlangsungnya pemungutan suara pada tanggal 3 Djuli 1971 tidak ada kedjadian jang menondjol selain dari beberapa persoalan ketjil diberbagai TPS; seperti diuraikan dibawah mengenai Peradilan Kilat.

Mengenai pengawasan terhadap penghitungan suara dapat dilaporkan bahwa penghitungan suara dilakukan diseluruh TPS jang dihadiri oleh anggota KPPS dan PARPOL/GOLKAR setelah pemungutan suara selesai. Didaerah pusat perkotaan penghitungan suara sudah dapat diselesaikan pada sekitar djam 17.00 W.I.B. sedang pada tempat pinggir kota baru selesai pada sekitar djam 22.00. W.I.B.

Pada umumnya tidak ada kedjadian-kedjadian jang dapat dikwalifisir sebagai melanggar ketentuan Undang-undang Pemilu selama penghitungan suara. Kotak Suara jang berisi Berita-berita Atjara Penghitungan Suara telah sampai pada tempat-tempat PPS sebelum djam 24.00 malam dengan pengawasan dan tenaga-tenaga keamanan.

Pada lewat tengah malam tanggal 4 Djuli 1971, sebagian dari Berita Atjara penghitungan suara telah dapat diambil oleh petugas-petugas

PPD DCI Jakarta. Dan pada tanggal 4 Djuli 1971 gambaran situasi umum dari hasil penghitungan suara untuk masing-masing Parpol telah dapat diketahui. Penghitungan Suara pada tiap-tiap PPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Hanya mengenai tjara-tjara pengisian Berita Atjara diberbagai TPS-TPS terdapat kekeliruan-kekeliruan, sehingga terdapat kesalahan/perbedaan angka didalam pendjumlahan-pendjumlahan.

Kesalahan-kesalahan tersebut akhirnya dapat diperbaiki, sehingga memenuhi persyaratan untuk satu Berita Atjara yang sah dan pihak-pihak PARPOL/GOLKAR ternyata menundjukkan rasa puas atas perbaikan-perbaikan tersebut.

Pada umumnya dijadwal penghitungan suara berdjalan tetap sesuai dengan rentjana.

Dengan selesainya penghitungan suara, maka tahap berikutnya adalah tahap penentuan jumlah kursi dan penetapan daftar tjalon terpilih. Untuk itu Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD DCI Jakarta dengan Surat Keputusan No.0175/III/2/71 tanggal 4 Agustus 1971 telah membentuk Panitia Pemeriksa terdiri dari 5 orang dibantu unsur-unsur PPD DCI Jakarta.

Tjatan lain dapat diketengahkan pula, dengan adanya :

- penambahan TPS
- penambahan biaya
- pemberian A4 dari Kelurahan ke Unit-unit Kantor.

menimbulkan kerepotan-kerepotan dikarenakan waktunya yang sangat sempit.

6.3. Pengawasan Keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD DCI Jakarta No.AB.2/1/5/1971, maka telah ditundjuk Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan DCI Jakarta sebagai aparat pemeriksa keuangan PPD DCI Jakarta, PP Kota, dan PPS/Ketjamatan. Oleh Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksa Keuangan DCI Jakarta telah diadakan pemeriksaan keuangan pada :

- a. PPD DCI Jakarta dari tanggal 24 Maret 1971 s/d tanggal 3 April 1971 dengan Surat Tugas No.498/Instr/B/K/BKD/1971 tanggal 11 Maret 1971.
- b. P.P. Kota Jakarta Utara dengan Surat Tugas No.308/VI/Kep.IPPK/1971 tanggal 2 Djuni 1971.
- c. P.P. Kota Jakarta Selatan dengan Surat Tugas No.270/VI/Kep.IPPK/1971 tanggal 12 Maret 1971.
- d. P.P. Kota Jakarta Barat dengan Surat Tugas No.308/VI/Kep.IPPK/1971 tanggal 2 Djuni 1971.

- e. P.P. Kota Djakarta Timur No.328/VI/Kep.IPPK/1971 tanggal 21 Djuli 1971.
- f. P.P. Kota Djakarta Pusat dengan Surat Tugas No.270/VI/Kep.IPPK/1971 tanggal 12 Maret 1971.

Hasil pemeriksaan keuangan tersebut tertjantum dalam Berita Atjara Pemeriksaan Keuangan No. 150/IV/Kep. IPPK/Sh/71 tanggal 27 Maret 1971 sebagaimana terlampir dalam buku ini. Adapun resume dari hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Administrasi Keuangan dan pembukuan adalah baik
- 2. Buku-buku dan kwitansi pertanggungan djawab keuangan tersimpan dalam file tersendiri.

6. 4. Pengawasan Barang.

Sedjak tanggal 10 Mei 1971 berbagai perlengkapan Pemilu telah tersedia dan mulai disampaikan ke Wilayah-wilayah baik pada tingkat PP Kota, PPS, sampai ketinggian Kelurahan.

Dari hasil penjetjekan sampai dengan awal Djuni 1971 keberbagai wilayah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Alat-alat inventaris pada PP Kota dan PPS disimpan dan diatur dalam satu file khusus.
- b. Alat-alat perlengkapan Pemilu sebagian besar sudah sampai kealamat penerima.:
 - 1. Kotak Suara untuk daerah Djakarta Utara, Timur, Barat, dan sebagian Djakarta Selatan dan Djakarta Pusat sudah sampai ke Kelurahan.
 - 2. Surat Suara sebanyak 4.825.000 lembar telah diterima dialamat PP Kota dengan ditambah kira-kira 30% untuk djatah TPS-TPS tambahan dan tjadangan.
 - 3. Surat Panggilan Model G.
 - 4. Kutipan daftar pemilih (Model A4).

Dalam menghadapi penjelenggaraan TPS di Unit-unit Kerdja, maka telah dikirimkan 600.000 lembar Model A4 sebagai tambahan dari jang disediakan.

Alat-alat perlengkapan baik ditingkat PPD DCI Djakarta maupun ditingkat PP Kota dan PPS diregister dalam buku inventaris. Pengawasan terhadap penggunaan barang inventaris melalui Updating Inventaris jang disusun oleh Biro Perbekalan dan diadakan checking berkala tentang kebenaran keadaannja. Barang-barang perbekalan seperti alat-alat kantor, kendaraan, formulir-formulir untuk keperluan Pemilu pendropannja tidak sekaligus. Namun demikian alat-alat perlengkapan

tersebut telah dapat dipergunakan pada waktunja. Alat-alat perlengkapan tersebut ketjuali Kotak-kotak Suara, masih dipergunakan dan dirawat baik.

Pengetjekan pengawasan terhadap penggunaan dan penjinjman serta perawatan barang-barang tersebut baik ditingkat PPD DCI Djakarta, PP Kota dan PPS tetap diadakan setjara periodik untuk mendjaga agar barang-barang tersebut tetap terpelihara untuk dapat dipergunakan dikemudian hari.

6.5. Peradilan Kilat.

Dengan Surat Keputusan Bersama antara Gubernur Kepala Daerah DCI Djakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Djakarta, Kepala Kedjaksanaan Tinggi Djakarta, Kepala Daerah Kepolisian Metro Djaya, No. 739/A/K/BKD/1971, No.025/K/0112/PTU, Kep.024/I/3/1971, Pol.6/1/SK/Dak Metro Djaya/1971 tanggal 31 Maret 1971, telah dibentuk Team Peradilan Kilat Pemilu DCI Djakarta jang bertugas untuk mengadili perkara-perkara pelanggaran atas ketentuan Undang-undang No.15/1969 tentang Pemilu di Pengadilan-pengadilan Negeri setempat atau ditempat jang disediakan untuk itu (Kantor Walikota, Ketjamatan). Untuk kelantjaran tugas Peradilan Kilat Pemilu tersebut, maka dengan surat tanggal 27 April 1971 No. 855/A/K/BKD/1971, Gubemur Kepala Daerah DCI Djakarta telah menginstruksikan kepada Walikota-walikota untuk mempersiapkan fasilitas sidang dan memberikan bantuan seperlunya untuk penjelenggaraan Peradilan tersebut. Disamping itu Pemerintah Daerah djuga telah memberikan bantuan keuangan sebesar Rp. 900.000,— bagi keperluan Peradilan Kilat tersebut (Instruksi Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD DCI No.0428/III/2/1971 tanggal 8 Mei 1971).

Peradilan Kilat tersebut bertugas sedjak tanggal 27 April 1971, saat dimulainja masa kampanye dan berachir tanggal 20 Djuli 1971 dengan tudjuan untuk mentjegah adanja gangguan-gangguan dan tindakan-tindakan pengamanan jang bersifat repressip terhadap kelantjaran djalannja Pemilu.

Beberapa saat sebelum, pada waktu, dan sesudah berlangsungnja pemu-ngutan suara tanggal 3 Djuli 1971, telah terdjadi beberapa pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Undang-undang No.15/1969 dan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Beberapa diantaranja dapat diselesaikan oleh aparat keamanan setempat karena persoal-annja tidak begitu menondjol dan tidak sampai mengganggu ketertiban umum chususnya mengenai pelaksanaan Pemilu itu sendiri.

Akan tetapi beberapa kedjadian terpaksa didjadikan perkara oleh karena hal tersebut njata-njata dapat mengganggu ketertiban umum. Pada

umumnja kedjadian-kedjadian pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Undang-undang No.15 tahun 1969 maupun ketentuan-ketentuan pidana lainnja khususnja didaerah PPD DCI Djakarta tidak begitu berarti, dan perkaraja boleh dikatakan relatif sangat ketjil. Beberapa kedjadian diwilajah DCI Djakarta dapat diuraikan sebagai berikut :

Kedjadian diwilajah Djakarta Barat :

1. Nama tersangka : *Kastari bin Tadjian* (Pemilih).
Ketentuan jang dilanggar : Undang-undang No.15/1969 Pasal 27 ayat (7) (mentjoblos 2 kali)
Penjelesaian : Sudah disidangkan tanggal 6 Djuli 1971. Dihukum 6 bulan pendjara.

2. Nama tersangka : *Djiman bin Ramin*
Pekerdjaan : Petugas K.P.P.S.
Ketentuan jang dilanggar : Undang-undang No.15/1969 Pasal 27 ayat 10. (memberi kesempatan mentjoblos 2 kali terhadap tjalon pemilih tersebut dalam sub. 1.).

Penjelesaian : Disidangkan tanggal 6 Djuli 1971. Didenda Rp. 1.000,— Subsidiair 2 Minggu kurungan.

Djakarta Selatan :

Ada 2 perkara, jaitu :

1. Nama tersangka : *Tjipi Sutjipto*
Kedjadian di : Kebajoran Lama
Melanggar : Undang-undang No.15/1969 Pasal 27 ayat (1) (membakar TPS).

Penjelesaian : Perkara tersebut sudah diputuskan tanggal 28 September 1971, dengan hukuman pendjara 2½ bulan potong tahanan sedangkan tuntutan Djaksa adalah 5 bulan.

Dalam pemeriksaan oleh Team dokter djiwa ternyata jang bersangkutan tidak gila, djadi perbuatan pembakaran TPS itu dilakukan dengan niat sengadja dengan pikiran sehat. Latar belakang pembakaran itu nampaknja bersifat politis jang mungkin didalangi pihak-pihak tertentu.

2. Nama tersangka : *Sutjipto bin Tuas*
 Kedadjian di : *T e b e t*
 Ketentuan jang dilanggar : Pasal 156 KUHP (menghina golongan lain, jaitu tersangka menjebutkan GOLKAR sama dengan PKI).
 Penjelesaian : Seharusnja akan disidangkan di Pengadilan Negeri Djakarta Selatan/Barat tgl. 16 Djuli 1971, akan tetapi kemudian ditarik dan di deponnir sesuai dengan instruksi Djaksa Agung dengan Kawat tgl. 8/9-1971 No.TROO/A/4/7/1 1971 berhubung karena suasananja sudah dianggap aman. Tersangkanya adalah anggota PNI.

Djakarta Pusat

Ada satu perkara jaitu :

1. Nama tersangka : 1. *Nawi bin Ipang Suparto*
 2. *Muhamad bin Jusuf*
 3. *Munawir bin Mardjan*
 Ketentuan jang dilanggar : Pasal 156 KUHP (menghina golongan lain jaitu menjebutkan GOLKAR sama dengan PKI)
 Penjelesaian : Seharusnja akan disidangkan akan tetapi di deponnir sesuai dengan Instruksi Djaksa Agung seperti diuraikan diatas.

Tjataan :

Ada beberapa perkara jang menjangkut Pemilu akan tetapi karena persoalannja dianggap tidak begitu perlu dimajukan ke Peradilan Kilat, maka perkara tersebut dikesampingkan.

BAB VII.

BEBERAPA POKOK-POKOK BAHAN PERBANDINGAN ANTARA PEMILU TAHUN 1955 DENGAN PEMILU TAHUN 1971.

7.1. Dasar Hukum.

Dilihat dari segi dasar hukum yang digunakan, maka Undang-undang Pemilu untuk tahun 1955 yaitu Undang-undang No.7 tahun 1953 pada tanggal 4 April 1953 telah disahkan oleh DPR dan pada tanggal 7 April 1953 di-undangkan. Jadi Undang-undang ini telah ada lebih kurang 2 tahun 5 bulan sebelum hari pemungutan suara. Sementara itu peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1954 yang disahkan pada tanggal 11 April 1954 diundangkan pada tanggal 12 April 1954.

Sedangkan pada Pemilu tahun 1971, Undang-undang Pemilu terdiri dari:

1. Undang-undang No.15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakyat.
2. Undang-undang No.16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 Desember 1969. Jadi Undang-undang ini telah ada 1 tahun 6 bulan 15 hari sebelum pemungutan suara. Peraturan Pelaksana dari Undang-undang Pemilu tahun 1971 yaitu Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.15 tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.16 tahun 1969 disamping Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum khusus di Irian Barat, Peraturan Pemerintah ini semuanya diundangkan pada tanggal 13 Januari 1970; kurang lebih sebulan setelah Undang-undang No.15 dan 16 tahun 1969 dikeluarkan.

Beberapa pasal sebagai bahan perbandingan antara Undang-undang No.7 tahun 1953 (Pemilu tahun 1955) dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1954 dengan Undang-undang No.15 tahun 1969 (Pemilu 1971) dan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1970 dikutip antara lain sbb.:

Tentang Hak Pilih

Undang-undang No.7 tahun 1953, Bab I, pasal 2 menyebutkan :

- „ (1) Seorang tidak diperkenankan menjalankan hak pilih, apabila ia :
- a. Tidak terdaftar dalam daftar pemilih.
 - b. Dengan putusan Pengadilan, yang tidak dapat dirubah lagi, sedang dalam keadaan dipetjat dari hak pilih.

- c. Dengan putusan Pengadilan, yang tidak dapat dirubah lagi, sedang mendjalani hukuman pendjara atau kurungan termasuk didalamnya kurungan pengganti.
- d. Njata-njata terganggu ingatannya"; dan

Pasal 3 menyebutkan :

- „ (1) Pemerintah mengadakan ketentuan-ketentuan khusus untuk memungkinkan pelaksanaan hak pilih bagi anggota-anggota Angkatan Perang dan Polisi yang pada hari dilakukan pemungutan suara sedang dalam mendjalankan tugas operasi atau tugas biasa diluar tempat kedudukannya dan apabila perlu dengan mengadakan dalam waktu sependek-pendeknya pemungutan suara susulan untuk mereka itu"; sedangkan

Undang-undang No. 15 tahun 1969, pasal 10 menyebutkan :

- „ (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, seorang Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar dalam Daftar Pemilih.
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam „Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./PKI” atau organisasi terlarang lainnya.
 - b. Njata-njata sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya.
 - c. Tidak sedang mendjalani pidana pendjara atau pidana kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, karena tindak pidana yang dikenakan antjaman pidana sekurang-kurangnya 5 tahun.
 - d. Tidak sedang ditjabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi.”

Dan pasal .11 menyebutkan :

„Anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih”.

Perbedaan prinsip dari kedua pasal tersebut pada Undang-undang Pemilu tahun 1955 pasal 2 ayat (1) c tidak menyebutkan masa antjaman hukumannya, sedangkan dalam Undang-undang Pemilu 1971 dalam pasal 10 ayat (2) c djelas menyebutkan masa antjaman hukuman *sekurang-kurangnya 5 tahun* dan pada Undang-undang Pemilu 1955 tidak terdapat orang-orang yang tidak berhak memilih karena menjadi organisasi terlarang P.K.I. dan lain-lainnya, sedangkan Undang-undang Pemilu 1971 tegas-tegas mentjantumkan dalam pasal 10 ayat (2) a.

Pada Undang-undang Pemilu 1955 dalam pasal 3 membenarkan anggota Angkatan Perang dan Polisi turut memilih, sedangkan Undang-undang Pemilu 1971 dalam pasal 11 menjatakan anggota ABRI tidak menggunakan hak memilihnya.

Tentang Daerah Pemilihan.

Undang-undang No.7 tahun 1953 Bab III pasal 15, membagi Wilayah Republik Indonesia menjadi 16 daerah pemilihan yang terdiri dari :

1. Daerah Pemilihan Djawa Timur,
2. " " Djawa Tengah,
3. " " Djawa Barat,
4. " " Djakarta Raya,
5. " " Sumatera Selatan,
6. " " Sumatera Tengah,
7. " " Sumatera Utara,
8. " " Kalimantan Barat,
9. " " Kalimantan Selatan,
10. " " Kalimantan Timur,
11. " " Sulawesi Utara – Tengah,
12. " " Sulawesi Tenggara – Selatan,
13. " " Maluku,
14. " " Sunda Ketjil Timur,
15. " " Sunda Ketjil Barat,
16. " " Irian Barat.

Sedangkan ; Undang-undang No. 15 tahun 1969 :

Bab II pasal 4 menyebutkan :

- „ (1) a. Untuk Pemilihan Anggota DPR, daerah pemilihan adalah Daerah Tk. I.
- b. Untuk Pemilihan Anggota DPRD I, daerah Tk. I merupakan satu daerah pemilihan.
- c. Untuk Pemilihan Anggota DPRD II, daerah Tk. II merupakan satu daerah pemilihan.”

Perbedaan ini dapat diketengahkan karena Pemilu tahun 1955 adalah untuk memilih anggota DPR dan Badan Konstituante, sedangkan Pemilu 1971 adalah untuk memilih sekaligus untuk anggota DPR, DPRD Tk. I dan DPRD Tk. II. Sedangkan keanggotaan MPR adalah

dari anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan utusan golongan Politik dan golongan Karya. Maka daerah pemilihan untuk anggota DPR terdapat sedjumlah 26 antara lain :

- | | | |
|-----|------------------|----------------------|
| 1. | Daerah Pemilihan | D.C.I. Djakarta, |
| 2. | „ „ | Djawa Barat, |
| 3. | „ „ | Djawa Tengah, |
| 4. | „ „ | D.I. Jogjakarta, |
| 5. | „ „ | Djawa Timur, |
| 6. | „ „ | Sumatera Selatan, |
| 7. | „ „ | Bengkulu, |
| 8. | „ „ | Lampung, |
| 9. | „ „ | Djambi, |
| 10. | „ „ | Riau, |
| 11. | „ „ | Sumatera Barat, |
| 12. | „ „ | Sumatera Utara, |
| 13. | „ „ | D.I. Atjeh, |
| 14. | „ „ | Kalimantan Barat, |
| 15. | „ „ | Kalimantan Tengah, |
| 16. | „ „ | Kalimantan Selatan, |
| 17. | „ „ | Kalimantan Timur, |
| 18. | „ „ | Sulawesi Utara, |
| 19. | „ „ | Sulawesi Tengah, |
| 20. | „ „ | Sulawesi Selatan, |
| 21. | „ „ | Sulawesi Tenggara, |
| 22. | „ „ | Bali, |
| 23. | „ „ | Nusa Tenggara Barat, |
| 24. | „ „ | Nusa Tenggara Timur, |
| 25. | „ „ | Maluku, |
| 26. | „ „ | Irian Barat, |

jang djuga merupakan daerah pemilihan untuk anggota DPRD Tingkat I. Pada Pemilu tahun 1955 sebagaimana dimaksud oleh Surat Edaran Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri, No. JB 2/9/4

Und.2/11/37/KDN

tanggal 23 April 1953, keenambelas daerah pemilihan tidak berarti semua daerah propinsi, karena ada beberapa daerah jang digabungkan atau ada pula beberapa daerah propinsi jang dipetjah untuk mendjadi suatu daerah pemilihan.

Tjontohnja :

1. Daerah Propinsi Djawa Timur, satu daerah pemilihan.
2. Daerah Propinsi Djawa Tengah bersama Daerah Istimewa Djogjakarta merupakan satu daerah pemilihan.
3. Daerah Propinsi Djawa Barat dengan memisahkan Kotapradja Djakarta Raya yang merupakan daerah pemilihan sendiri.
4. Daerah Propinsi Kalimantan dibagi dalam 3 daerah pemilihan jaitu :
 - Kalimantan Barat ,
 - Kalimantan Selatan dan
 - Kalimantan Timur,

masing-masing satu daerah pemilihan, sedangkan pada Pemilu tahun 1971 semua Daerah Tingkat I dan Daerah yang disamakan otomatis menjadi daerah pemilihan. Untuk pemilihan anggota DPRD Tingkat II yang mengadakan pemilihan sejumlah 276 ketjuali 5 dari daerah DCI Djakarta tidak mengadakan pemilihan tersebut karena merupakan daerah administratif yang disamakan dengan daerah Tingkat II lainnya.

Tentang Badan-badan Penyelenggara Pemilihan.

Undang-undang No.7 tahun 1953 Bab IV, pasal 17 menyebutkan :

„Untuk pemilihan anggota Konstituante dan DPR diadakan sebuah badan penyelenggara pemilihan :

1. Di Ibukota Indonesia atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Presiden dengan nama Panitia Pemilihan Indonesia.
2. Dalam tiap-tiap daerah pemilihan ditempat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dengan nama Panitia Pemilihan.
3. Dalam tiap-tiap Kabupaten ditempat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri dengan nama Panitia Pemilihan Kabupaten.
4. Dalam tiap-tiap daerah pemungutan suara ditempat kedudukan Tjamat dengan nama Panitia Pemungutan Suara.
5. Dalam tiap-tiap Desa ditempat kedudukan Kepala Desa dengan nama Panitia Pendaftaran Pemilih; sedangkan didalam :

Undang-undang No. 15 tahun 1969 Bab III, pasal 8 menyebutkan :

- „ (1). Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Pemerintah dibawah pimpinan Presiden.
- (3). Untuk melaksanakan Pemilihan Umum, Presiden membentuk sebuah Lembaga Pemilihan Umum dengan diketuai oleh Menteri Dalam Negeri, yang bertugas :
- a. Mengadakan perentjanaan dan persiapan untuk melaksanakan Pemilihan Umum.
 - b. Memimpin dan mengawasi Panitia-panitia termaksud dalam ayat (4).

- (4). Pada Lembaga Pemilihan Umum diadakan :
- a. Panitia Pemilihan Indonesia yang berkedudukan di Djakarta.
 - b. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang berkedudukan di Ibukota daerah Propinsi.
 - c. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang berkedudukan di Ibukota daerah Tingkat II.
 - d. Panitia Pemungutan Suara yang berkedudukan di Ibukota Ketjamatan dan
 - e. Panitia Pendaftaran Pemilih di tiap-tiap desa/atau daerah yang setingkat dengan desa ditempat kedudukan Lurah atau Kepala Desa/didaerah yang setingkat dengan desa."

Perbedaan yang prinsip terhadap Panitia Penyelenggara ini pada Pemilu tahun 1955 penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Ormas/Orpol. Sedangkan pada Pemilu tahun 1971 tegas disebutkan diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang No.15 tahun 1969 pasal 8 ayat 1, yang menyebutkan :

„Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Pemerintah dibawah pimpinan Presiden”.

Pada Pemilu 1971 disamping Panitia-panitia Penyelenggara yang ada sebagaimana juga pada Pemilu tahun 1955, khusus dibentuk suatu lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum. Panitia-panitia Penyelenggara untuk Tingkat PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) dan PP (Panitia Pemilihan) dalam pasal 20 dan 21 Undang-undang No.7 tahun 1953, masa jabatannya ditentukan selama 4 tahun. Sedangkan untuk Pemilu tahun 1971 Panitia-panitia Penyelenggara ini hanya bertugas dengan masa kerja selambat-lambatnya dalam jangka 1 tahun setelah pemungutan suara, diatur dalam Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1970. Dalam praktek Panitia-panitia tersebut dibubarkan 4 bulan setelah pemungutan suara (Oktober 1971).

Tentang Penetapan Jumlah Anggota.

Undang-undang No.7 tahun 1953 Bab V tentang Jumlah Penduduk WNI, penetapan jumlah anggota untuk seluruh Indonesia dan untuk masing-masing daerah pemilihan, pasal 32 menyebutkan :

„Untuk pemilihan anggota Konstituante ditetapkan (satu) orang wakil untuk 150.000 W.N.I. dan

Pasal 33 menyebutkan bahwa :

„Untuk 1 (satu) anggota DPR untuk 300.000 W.N.I.”

Sedangkan pada Undang-undang No.15 tahun 1969 (Pemilu tahun 1971), pada Bab VIII tentang Penetapan Hasil Pemilihan, pasal 23 menyebutkan :

„ (1) Untuk menetapkan hasil pemilihan bagi DPR, DPRD I dan DPRD II digunakan sistim perwakilan berimbang.

dan pasal 5 menyebutkan :

- „ (1) Jumlah anggota DPR yang dipilih bagi tiap daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan imbangannya jumlah penduduk yang terdapat dalam daerah pemilihan tersebut.
- (2) Hal yang termaktub dalam ayat (1) tidak mengurangi ketentuan bahwa :
- a. Jumlah wakil dalam tiap daerah pemilihan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Daerah tingkat II yang ada dalam daerah pemilihan yang bersangkutan.
 - b. Tiap Daerah tingkat II sekurang-kurangnya mempunyai seorang wakil.
- (5) Jumlah anggota DPRD yang dipilih ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1970 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang No.16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD, pasal 7 menyebutkan pada ayat (2): „ „Untuk sekurang-kurangnya tiap 400.000 orang penduduk mendapat seorang wakil.”

„Anggota DPRD adalah :

- a. Sekurang-kurangnya 40 dan sebanyak-banyaknya 75 orang bagi Daerah tingkat I dengan perhitungan sekurang-kurangnya untuk 200.000 orang penduduk mendapat seorang wakil, dan
- b. Sekurang-kurangnya 20 dan sebanyak-banyaknya 40 orang bagi Daerah tingkat II dengan perhitungan untuk sekurang-kurangnya 10.000 orang penduduk mendapat seorang wakil.

Kemudian Undang-undang No.16 tahun 1969 menyebutkan bahwa keanggotaan DPR, DPRD I dan DPRD II disamping yang dipilih melalui Pemilihan Umum, ada pula yang diangkat. Perbedaan prinsip yang dapat kita simpulkan, pada Pemilu 1955 jumlah anggota DPR ditentukan berdasarkan hasil jumlah bagi dengan perbandingan angka yang telah ditetapkan (yakni untuk Konstituante 150.000 dan untuk DPR 300.000). Jadi sistem yang dianut adalah sistim proporsional murni, tanpa mempertimbangkan adanya satuan (unit) administrasi pemerintahan yang ada.

Sedangkan pada Pemilu 1971 jumlah keanggotaan telah ditetapkan lebih dahulu (DPR 460 orang) yang dalam penetapan ini juga mengi-

ngat hasil bagi djumlah penduduk disamping perimbangan djumlah Daerah tingkat II jang ada. Dengan lain perkataan menggunakan sistim gabungan antara sistim district dan sistim proporsionil.

Tentang Pentjalonan.

Undang-undang No.7 tahun 1953, Bab VI pasal 36 menjebutkan :

- „ (1) Seorang tjalon jang dikemukakan sebagai orang-seorang dalam suatu daftar tjalon perseorangan jang selandjutnja disebut daftar-perseorangan atau bersama-sama tjalon-tjalon lain dalam suatu daftar tjalon kumpulan jang selandjutnja disebut daftar-kumpulan.
- (2) Satu daftar-kumpulan jang dikemukakan untuk suatu daerah-pemilihan tidak boleh memuat nama-nama tjalon jang djumlahnja melebihi djumlah anggota Konstituante atau djumlah anggota DPR jang boleh dipilih dalam daerah-pemilihan jang bersangkutan, ditambah sebanjak djumlah anggota jang sudah ditetapkan, tetapi tambahan itu tidak boleh melebihi djumlah 20.
- (3). Seorang tidak boleh ditjalonkan dalam lebih dari satu daftar dalam satu daerah-pemilihan.”

Sedangkan pasal 38 :

- „ (1) Seorang tjalon perseorangan atau tjalon pertama dari suatu daftar-kumpulan dikemukakan sebagai tjalon untuk suatu daerah-pemilihan oleh sedikit-dikitnja 200 orang pemilih jang namanja terdaftar dalam daftar pemilih dari daerah pemilihan itu.
Tjalon-tjalon selandjutnja dari daftar itu dikemukakan oleh sedikit-dikitnja 25 orang pemilih untuk tiap-tiap orang tjalon.”

Undang-undang No.15 tahun 1969 Bab V, pasal 14 menjebutkan :

„Anggota ABRI tidak menggunakan hak dipilih” dan

Pasal 15 :

- „ (1) Jang dapat mengajukan tjalon untuk Pemilihan Umum adalah organisasi jang memenuhi sjarat tersebut dalam pasal 17 dan/ atau Pasal 34 ayat (1).
- (2) Seorang dapat ditjalonkan untuk beberapa djenis badan perwakilan dalam satu masa Pemilihan Umum.

Untuk djelasnja pasal 17 berbunji :

- „ (2) Organisasi jang dapat mengajukan tjalon dalam Pemilihan Umum harus memenuhi sjarat sebagai berikut :
 - a. Bukan organisasi terlarang.

- b. Bagi Golongan Politik ialah Partai-partai Politik yang telah mendapat pengakuan berdasarkan Undang-undang tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekayaan”.

Dan pasal 34 :

- „ (1) Organisasi-organisasi Golongan Politik yang ada dan diakui serta organisasi-organisasi Golongan Karya yang sudah mempunyai perwakilan di DPRGR dan/atau di DPRDGR pada saat Pemilihan Umum diselenggarakan berdasarkan Undang-undang ini dapat ikut serta dalam Pemilihan Umum.”

Perbedaan yang prinsip pada Pemilu tahun 1955, tjalon dapat diadju-kan baik oleh orang-seorang, kumpulan dan organisasi politik/masjara-kat. Sebagai pendukung dari pentjalonan disyaratkan 200 orang pemilih, sedangkan pada Pemilu 1971 tjalon-tjalon hanya diadjukan oleh Orga-nisasi Politik dan Golongan Karya. Tjalon orang-seorang serta pendu-kung tjalon dari pemilih tidak ada.

Untuk Pemilu tahun 1971 tjalon-tjalon hanya diadjukan oleh organisasi Politik dan Golongan Karya sebagaimana yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden No.43 tahun 1970 tanggal 23 Mei 1970 sedjumlah 2 kali lipat dari djumlah anggota yang dapat dipilih untuk Lembaga Perwakilan yang telah ditentukan. Tjalon-tjalon diambilkan dari anggota-anggota atau orang yang bersimpati dengan organisasinja dan mendapat dukungan oleh organisasinja sendiri.

Penguatan terhadap pentjalonan ini hanya ditanda tangani oleh sedikit-dikitnja 2 orang pimpinan organisasi yang bersangkutan dan diadjukan untuk dan/atas nama organisasinja.

Undang-undang No.7 tahun 1953 Pasal 45 menyebutkan :

- „ (1) Surat Pentjalonan harus dilampiri :
- a. Surat Pernyataan dari tiap-tiap tjalon yang menyatakan kese-diaannya dan persetudjuannya termaksud dalam pasal 39.
 - c. Turunan surat ketetapan PPI tentang nama dan tanda gam-bar tersebut pada pasal 41 yang dapat diperoleh dengan pertjuma dari PPI.
- (2) Djika seorang yang ditjalonkan belum masuk dalam daftar pemilih, maka ia didaftarkan, meskipun waktu tersebut dalam pasal 12 sudah lampau.”

Pasal 46:

„Surat Pentjalonan harus disampaikan oleh salah seorang yang turut mengemukakannja kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten yang bersangkutan/atau wakilnja”; sedangkan :

Undang-undang No.16 tahun 1969.

„Pasal 19 :

- (1) Tata Tjara pentjalonan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Seorang tjalon diadjudkan dengan tjara mengisi surat isian (formulir).
 - b. Surat isian tersebut ditanda tangani oleh sekurang-kurangnya 2 orang anggota pimpinan organisasi masing-masing jang bersangkutan.
 - c. Surat isian jang dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) antara lain dilengkapi dengan :
 - (i) Nama dan Tanda Gambar organisasi jang dipergunakan sebagai lambang dalam Pemilihan Umum berikut surat pengesahan dari L.P.U.
 - (ii) Riwayat Hidup dan Riwayat Perdjuaan tjalon jang dikuatkan oleh sekurang-kurangnya 2 orang anggota pimpinan organisasi.
 - (iii) Surat Pernyataan dari tjalon tentang kesediaannya untuk ditjalonkan serta persetudjuannya mengenai tempat jang diberikan dalam tata urutan pada daftar tjalon.
- (2) Daftar tjalon dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi jang mengadjudkan tjalon termaksud.
- (4) Daftar tjalon seperti dimaksud pada ayat (2) hanya boleh memuat nama-nama tjalon sebanyak-banyaknya 2 x djumlah anggota jang terpilih.”

Perbedaan prinsip pada Pemilu tahun 1955, djika seorang ditjalonkan tetapi ia belum terdaftar dalam daftar pemilih dapat didaftarkan pada saatnja walaupun waktu pendaftaran telah lampau dan pengadjuan surat pentjalonan disampaikan oleh salah seorang pendukungnja; sedangkan pada Pemilu tahun 1971, bila tjalon jang diadjudkan belum terdaftar dalam daftar pemilih, maka ia dikeluarkan dari daftar tjalon, sementara pengadjuan tjalon-tjalon hanya boleh dilakukan oleh organisasi Golongan Politik/Golongan Karya seperti tersebut diatas.

Tentang Tata Tjara Pemberian Suara.

Undang-undang No.7 tahun 1953.

Pasal 66 menyebutkan :

- „(1) Pemilih memberikan suaranya kepada seorang tjalon, jang dikemukakan sebagai tjalon-perseorangan, atau jang dikemukakan dalam suatu daftar-kumpulan atau kepada suatu daftar-kumpulan jang namanja atau tanda gambarnya tertjantum dalam daftar tjalon tetap dari daerah-pemilihan pemilih itu.”

Pasal 67 :

- “ (2) Pemilih memberikan suara kepada suatu daftar dengan menu-
susuk tanda gambar daftar itu. Pemilih memberikan suara kepada
seorang tjalon dengan menulis nomor daftar dan nomor
serta nama dari tjalon itu dalam ruangan jang disediakan
untuk itu dalam surat suara. Untuk memudahkan pemilih
menulis nama tjalon jang dipilihnja, maka dalam tiap-tiap
ruangan pemungutan suara dipasang daftar tjalon tetap”;
sedangkan pada :

Undang-undang No. 15 tahun 1969 :

Pasal 21 :

- „ (6) Dalam pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II pemilih
memberikan suaranya dengan mentjoblos salah satu tanda gam-
bar organisasi jang dipilihnja jang terdapat dalam surat suara.”

Perbedaan prinsip pada Pemilu tahun 1955, pemilih dapat memilih
baik kepada tjalon-perseorangan, seorang tjalon dalam suatu daftar-
kumpulan atau kepada suatu daftar-kumpulan dengan tjara baik menu-
liskan nama tjalon pilihannja atau/maupun mentjoblos tanda gambar
organisasi/kumpulan; sedangkan pada Pemilu 1971 pemilih tidak memi-
lih tjalon orang-perorangan tetapi memilih kumpulan dari tjalon-tjalon
jang diadjukan organisasi dengan tjara mentjoblos tanda gambar orga-
nisasi tersebut.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954.

Pasal 45 ayat (4) alinea ke 2 menyebutkan :

„Didalam bilik tersebut tersedia tempat untuk menulis, alat penusuk
tanda gambar dan potlod.”

Alinea ke 3 :

„Diatas bilik-bilik itu dipasang daftar tjalon tetap sedemikian, hingga
pemilih jang hendak memberikan suaranya dengan mudah dapat mem-
batja nama-nama tjalon jang tertjantum dalam daftar itu.”

Sedangkan :

Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1970.

Pasal 65 ayat (3) alinea ke 2 berbunyi :

„Didalam tempat duduk itu dipasang daftar tjalon tetap sedemikian,
sehingga pemilih jang hendak memberikan suaranya dengan mudah
dapat mengetahui nama-nama tjalon jang tertjantum dalam daftar itu.”

Ayat (4) alinea ke 2 berbunyi :

„Didalam bilik tersebut tersedia alat pentjoblos tanda gambar.”

Perbedaan prinsip pada Pemilu tahun 1955, daftar tjalon tetap ditem-

pel/dipasang dalam bilik tempat memberikan suara; sedangkan pada Pemilu tahun 1971, daftar tersebut dipasang ditempat ruangan tunggu/ duduk pemilih diluar ruangan bilik pemberian suara. Dahulu, karena pemilih juga dapat menuliskan tjalon pilihannja maka potlod disediakan pula; sedangkan pada Pemilu tahun 1971 ini hanya disediakan alat pentjoblos sadja.

Tentang Tjalon jang diangkat.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954.

Bab VIII tentang pengangkatan-pengangkatan, Pasal 81 menyebutkan:

„ (1) Djika ternjata bahwa djumlah orang-orang jang ditetapkan mendjadi anggota belum mentjapai djumlah anggota jang ditetapkan untuk seluruh Indonesia, maka PPI menjampaikan kepada Pemerintah djumlah kekurangan anggota jang harus ditjukupi oleh Pemerintah dengan pengangkatan.”

Sedangkan :

Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970.

Beberapa pasal menyebutkan :

„Bila terdapat kekurangan wakil dari tjalon-tjalon jang diadjudkan oleh Organisasi untuk dipilih, dapat diadjudkan sebagai tjalon susulan, sedangkan untuk wakil jang diangkat telah ditetapkan untuk DPR sedjumlah 100 orang dan untuk DPRD 1/5 (seperlimes) dari anggota DPRD jang ditetapkan jang diambilkan dari unsur Golongan Karya ABRI dan Non-ABRI jang tidak turut dalam Pemilu.”

Tentang Pendjadwalan.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang No.7 tahun 1953, setiap pendjadwalan dalam tiap tahap kegiatan djelas-djelas disebutkan tanggal jang pasti; sedangkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1970 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang No.15 tahun 1969 hanya mentjantumkan djumlah hari dari tiap tahap kegiatan. Hal ini ditarik mulai tanggal pendaftaran pemilih dan/atau tanggal pemungutan suara. Pengaturan pendjadwalan ditetapkan dengan keputusan dari LPU/PPI.

7.2. Pemungutan Suara.

Untuk Pemilu tahun 1955 pemungutan suara diadakan 2 kali dengan tenggang waktu $\pm$ 3 bulan. Kedua pemungutan suara itu ditudjukan untuk memilih 2 djenis perwakilan, jaitu untuk Lembaga-Lembaga Perwakilan :

- a. D.P.R. tanggal 29 September 1955, dan
- b. Konstituante tanggal 15 Desember 1955.

Sedangkan untuk Pemilu tahun 1971 pemungutan suara diadakan untuk 3 jenis Perwakilan :

- a. D.P.R.
- b. D.P.R.D. Tingkat I.
- c. D.P.R.D. Tingkat II.

ketiganya sekaligus pada tanggal 3 Djuli 1971.

Pada umumnya penyelenggaraan pemungutan suara pada Pemilu tahun 1955 dengan Pemilu tahun 1971 tidak ada perbedaan yang prinsipiel. Sebaliknya pada Pemilu tahun 1955 persiapan-persiapan untuk pemungutan suara masih mempunyai tjukup waktu dibandingkan pada persiapan-persiapan pada Pemilu tahun 1971.

Hanya pada waktu itu (Pemilu tahun 1955) di beberapa daerah pemilihan situasi dan kondisi sangat banjak mempengaruhi kelantjaraan antara lain karena keamanan dalam negeri belum pulih seluruhnya.

Chusus di DCI Djakarta yang pada waktu itu merupakan Daerah Pemilihan Kotapradja Djakarta Raya, pelaksanaan pemungutan suara dapat berdjalan dengan baik sebagaimana djuga pada Pemilu 1971 yang baru lalu.

Pada Pemilu tahun 1955, pemungutan suara di TPS-TPS diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara (PPPS) dengan ketentuan: Untuk D.P.R.

- a. Tiap TPS meliputi antara 300 – 1000 pemilih.
- b. P.P.P.S.; untuk kurang dari 500 pemilih 3 s/d 5 orang;
untuk lebih dari 500 pemilih 5 s/d 11 orang.

Untuk Konstituante.

- a. Tiap TPS tidak melebihi 750 pemilih.
- b. P.P.P.S. sebanjak-banjaknja 7 orang.
- c. Bila suatu TPS melebihi 750 pemilih dengan petugas s/d 11 orang diadakan pemetjahan.

Dalam Pemilu 1971 ditetapkan :

- a. Tiap TPS meliputi antara 200 sampai 300 pemilih.
- b. Petugas Penyelenggara (KPPS) 3 s/d 7 orang.

Tjatatatan : Chusus untuk Daerah-Pemilihan DCI Djakarta menetapkan untuk keseragaman rata-rata tiap TPS 5 orang petugas (KPPS).

Proses pemberian suara oleh pemilih, dimulai dari menerima surat panggilan/pemberitahuan, mendatangi TPS yang telah ditentukan, kemudian menerima surat suara (untuk Pemilu tahun 1955 hanya satu surat

suara, untuk Pemilu 1971 3 (tiga) surat suara sekaligus), memilih tjalon dengan tjara menusuk tanda gambar atau menulis nama tjalon, kemudian memasukkan kedalam kotak suara yang tersedia; tiada perbedaan dengan pelaksanaan pemberian suara tahun 1971, ketjuali bahwa pada Pemilu tahun 1971 pemilih hanya menusuk/mentjoblos tanda gambar saja. Demikian pula halnya pemberian suara baik oleh orang-orang yang sakit, narapidana, nelajan-nelajan/awak kapal, para tuna dan sebagainya dilakukan sebagaimana dengan petundjuk-petundjuk yang ada yang pada azasnja tidak terdapat perbedaan yang berarti. Perbedaan yang prinsipiell dalam pemberian suara ini hanyalah: Anggota-anggota ABRI termasuk POLRI pada Pemilu 1955 turut memberikan suaranya, sedangkan pada Pemilu 1971 tidak dilakukan.

7.3. Panitia Pelaksana.

- a. Pada Pemilu tahun 1955 komposisi Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum lebih banyak diserahkan kepada unsur Parpol dan Ormas, sedangkan pada Panitia Penyelenggara Pemilu 1971 unsur Panitia digabungkan antara unsur Pemerintah dan unsur sosial politik.
- b. Susunan keanggotaan Panitia pada Pemilu 1955 Tingkat DCI (Kota-pradja Djakarta pada saat itu) : 11 orang
 Tingkat Kabupaten atau yang disamakan : 7 - 9 orang
 Tingkat Ketjamatan : 5 - 7 orang
 Tingkat Kelurahan : 3 - 5 orang
 T.P.S. (P.P.P.S.) : 7 orang.

Sedangkan pada Pemilu 1971 :

Untuk Daerah Tingkat I	:	10	orang
Untuk Daerah Tingkat II/jang disamakan (Chusus di Daerah DCI Djakarta merupakan Daerah Administratif ditetapkan 5 orang yang hanya dari unsur Pemerintah).	:	10	orang
Untuk Tingkat Ketjamatan	:	7	orang
Untuk Tingkat Kelurahan	:	5	orang
dan untuk TPS (KPPS)	:	5	orang.

Adapun djumlah satuan-satuan ke Panitia-an pada tiap eselon adalah sebagai berikut untuk Pemilu 1955 :

Untuk D.C.I. Djakarta	:	1
Untuk Kabupaten/jang disamakan	:	3
Untuk Ketjamatan	:	21

Untuk Kelurahan	: 139
Sedangkan untuk Pemilu tahun 1971 :	
Untuk Daerah Tingkat I	: 1
Untuk Daerah Tingkat II/jang disamakan	: 5
Untuk Ketjamatan	: 27
Untuk Kelurahan	: 220.

c. Panitia Pemilihan Kotapradja Djakarta pada Pemilu tahun 1955 terdiri dari 11 orang jang kesemuanja dari unsur Orpol/Ormas. Keanggotaan Panitia Pemilihan itu harus diambil dari aliran-aliran jang hidup dari daerah jang bersangkutan jang diajukan oleh Gubernur/Walikota kepada Menteri Kehakiman sedjumlah tjalon 2 (dua) kali sebanjak djabatan jang akan diisi. Susunan Panitia tersebut dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.JB.2/5/1 tanggal 25 Djanuari 1954 terdiri dari :

1. K e t u a : *Nj. S. Pudjobuntoro.*
2. Wakil Ketua : *M.J. Daulay*
3. A n g g o t a : *Mr. S. Djajadiningrat.*
4. " : *H. Moch. Saprin*
5. " : *Tabrani*
6. " : *Utarjo*
7. " : *Achmad Natakusuma*
8. " : *R. Moch. Ichsan* (tambahan dengan S.K. No.JB.2/17/3 tanggal 6 Oktober 1955).
9. " : *Abdul Rasjid* (tambahan S.K. No.Jb.2/25/19 tanggal 4 Oktober 1955).
10. " : *M. Hasan Wirjoseputro* (tambahan S.K. No.JB.2/17/3 tanggal 3 Oktober 1955).
11. " : *Sudarjo Sastrosastomo* (tambahan S.K. No.JB.2/25/20 tanggal 3 Oktober 1955).

Kemudian dengan Surat Keputusan No. JB.2/31/23 tanggal – bulan 7 tahun 1955 Anggota Mr. S. Djajadiningrat (No. 3) digantikan oleh Sadad Siswowidjojo.

Sedangkan Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta untuk Pemilu tahun 1971, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua L.P.U. No.6 tahun 1970 tanggal 19 Djanuari 1970 terdiri dari :

1. Ketua merangkap anggota : *Ali Sadikin*, Gubernur Kepala Daerah DCI Djakarta.

dan dengan Surat Keputusan Mendagri/Ketua LPU No.34/1970 tanggal 6 Pebruari 1970:

2. Wakil Ketua merangkap anggota : *A. Wiradinata*, Wakil Gubernur KDH DCI Jakarta
3. Anggota : *Djumadjitin S.H.*, Sekda D.C.I. Jakarta.
4. „ : *AKBP. Drs. Junusi Jusuf.* mewakili Komdak Metro Djaya.
5. „ : *Let. Kol. Eman Sjahban*, mewakili Kodam V/Djaya (kini Kolonel).
6. „ : *H. Ajatullah Saleh*, Wakil Ketua DPRD-GR DCI Jakarta, mewakili unsur Agama Islam
7. „ : *Alexander Wenas*, Wakil Ketua DPRD-GR DCI Jakarta, mewakili unsur Agama Kristen Katolik.
8. „ : *Drs. Moch. Djamin Ali*, Wakil Ketua DPRD-GR DCI Jakarta, mewakili unsur Nasionalis.
9. „ : *Harsono Radjakmangunsudarso*, Wakil Ketua DPRD-GR DCI Jakarta, mewakili unsur Golkar.
10. „ : *M. Moeffreni Moe'min*, Anggota DPRD-GR DCI Jakarta, mewakili unsur Golkar.

Tugas Panitia Pemilihan dalam Pemilu tahun 1955 adalah untuk membantu Panitia Pemilihan Indonesia dalam menjelenggarakan Pemilihan Umum untuk Keanggotaan DPR dan Konstituante dengan menjelenggarakan Pemilihan Umum didaerah pilihannya sendiri untuk tjalontjalon yang diadakan yang mewakili daerah pemilihan tersebut.

Sedangkan Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta dalam Pemilu tahun 1971 perintjian tugasnya dapat dilihat dari Keputusan Mendagri/Ketua LPU No.5/1970 tanggal 17 Djanuari 1970 pada Bab III pasal 3, tahun yang berbunyi :

„Tugas pokok Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I adalah:

- a. membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Indonesia (dalam hal ini Pemilihan untuk keanggotaan D.P.R.).
- b. mempersiapkan dan mengawasi penjelenggaraan Pemilihan Umum untuk pemilihan keanggotaan DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II.
- c. menjelenggarakan Pemilihan Umum untuk DPRD Tingkat I.”

Tjatanan : Oleh karena di Daerah Pemilihan DCI Jakarta tidak terdapat Daerah Otonom Tingkat II maka Pemilihan Umum untuk DPRD Tingkat II ditiadakan, sedangkan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II untuk Daerah DCI Jakarta disebut Panitia Pemilihan Kota dengan tugas membantu Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta untuk menjelenggarakan

Pemilihan Umum keanggotaan DPRD Tingkat I DKI Jakarta dan mengkoordinir Panitia-panitia serta aparat Pemilu dibawahnja.

Dalam garis besarnya kegiatan Panitia Pemilihan Daerah DKI Jakarta dapat dibagi dua bagian:

- a. yang menjangkut perentjanaan dan pelaksanaan politis.
- b. yang menjangkut perentjanaan dan pelaksanaan tehnik/administratif.

Untuk kegiatan tersebut (a) setiap tahap kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan diadakan rapat kerja Panitia Pemilihan Daerah DKI Jakarta untuk pembahasan masalah yang berhubungan dengan kebijaksanaan politis penyelenggaraan Pemilu di DKI Jakarta.

Sedangkan untuk kegiatan tersebut (b) disamping melaksanakan kegiatan-kegiatan tehnik administratif yang telah ditentukan oleh Undang-undang, Peraturan-peraturan, maupun petunjuk/instruksi dan lain sebagainya yang diberikan oleh Lembaga Pemilihan Umum, juga melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil sebagai tersebut (a) diatas.

Pada umumnya pelaksanaan tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah DKI Jakarta yang tersebut (a) diatas juga merupakan pelaksanaan ketentuan dari Undang-undang, Peraturan-peraturan, dan Instruksi-Instruksi dari LPU. Namun untuk kepentingan penyesuaian dengan situasi dan kondisi daerah, juga dikeluarkan beberapa ketentuan-ketentuan tingkat daerah, Instruksi-Instruksi dan Petunjuk-petunjuk guna lebih memperlancar penyelenggaraan Pemilu tsb.

7.4. Penduduk dan Pemilih.

Pada waktu Pemilu tahun 1955 jumlah Penduduk DKI Jakarta (WNI) tercatat 1.664.640 jiwa dan pemilih yang terdaftar sejumlah 951.130 jiwa. Sedangkan pada Pemilu tahun 1971 tercatat penduduk (WNI) sejumlah 4.550.481 jiwa dan pemilih sejumlah 2.140.591 jiwa.

Pada waktu Pemilu tahun 1955 untuk Pemilihan Keanggotaan D.P.R. terdapat suara yang sah sejumlah 767.124. Dari angka ini tercatat 90% dari pemilih yang terdaftar yang memberikan suaranya. Sedangkan untuk Pemilihan Anggota Konstituante terdaftar suara yang sah sejumlah 738.890 dengan 76% dari pemilih yang terdaftar datang memberikan suaranya.

Pada Pemilu untuk tahun 1971 untuk Pemilihan Keanggotaan DPR tercatat sejumlah 1.955.010 suara yang sah, yang berarti 87,99% dari pemilih yang terdaftar; dan untuk suara DPRD Tingkat I tercatat sejumlah 1.938.482 suara yang sah, yang berarti 87,25% dari pemilih yang terdaftar.

Dalam Pemilu tahun 1955 prosedur pendaftaran pemilih ialah dengan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah tiap penduduk dan men-

daftar mereka pada formulir Model A1 dan menjusun daftar pemilih pada formulir Model A.

Penjusunan daftar pemilih dilakukan semula perdesa/marga yang merupakan daftar induk; daftar tersebut kemudian dikutip sesuai dengan lingkungan TPS-nja (antara 500 s/d 1000 pemilih) guna pemungutan suara di TPS.

Djangka waktu pendaftaran pemilih sampai dengan penjusunan daftar pemilih tambahan, dimulai dari tanggal 1 Mei 1954 dan berakhir pada tanggal 30 Nopember 1954, djadi meliputi periode 7 bulan; sampai dengan penggunaan untuk keperluan pemungutan suara pada tanggal 29 September 1955 maka waktu yang digunakan meliputi tersedia lebih kurang 10 bulan, sehingga dengan tertib tjukup waktu untuk penjenggaraan Pemilu/pemungutan suara.

Pendaftaran Pemilih pada Pemilu tahun 1971 prosedur pendaftarannya sama dengan tjara-tjara pendaftaran penduduk dan pemilih untuk Pemilu tahun 1955 yakni petugas mengadakan kundjungan dari rumah kerumah untuk mendaftarkan penduduk dengan menggunakan formulir Model D (Sensus). Kemudian dari daftar ini ditjuplik/dikutip orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih kedalam daftar formulir Model A dan Kartu Model A1, kemudian menjusun dalam daftar pemilih menurut lingkungan TPS antara 200 s/d 300 pemilih yang akan digunakan untuk pemungutan suara pada tanggal 3 Djuli 1971.

Djangka waktu pendaftaran ini s/d pendaftaran pemilih tambahan dimulai tanggal 5 Djuli 1970 s/d 30 Oktober 1970 djadi lebih kurang 4 bulan, sedangkan penggunaan daftar tersebut sampai dengan pemungutan suara yakni tanggal 3 Djuli 1971 djadi lebih kurang 8 bulan.

Dari perbandingan kedua djadwal waktu tersebut antara kedua Pemilu diatas dapat diambil kesimpulan bahwa persiapan Pemilu untuk tahun 1955 lebih pandjang waktunya dibandingkan dengan pada Pemilu 1971. Patut ditjatat bahwa di DKI Djakarta, untuk pendaftaran penduduk/pemilih tahun 1971 ini dirasakan lebih praktis dan mudah dilakukan, oleh karena tingkat administrasi Pemerintahan Daerah chususnja dalam hal kependudukan telah diatur dengan baik; kewajiban memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk telah hampir merata dilaksanakan disemua wilayah.

Demikian pula petundjuk-petundjuk pelaksanaan pendaftaran pemilih ini pada tahun 1955 tjukup waktu untuk menjusunnja, sedangkan pada Pemilu tahun 1971 terasa bahwa pedoman disusun dalam keadaan terdesak dan banjak penjusunan redaksi yang sukar dipahami serta pertimbangan tehnik terhadap detail prosedur terasa kurang dapat disiapkan.

Kesulitan-kesulitan lainnja yang ditemui dalam Pemilu tahun 1955 maupun pada Pemilu tahun 1971 adalah :

1. Dalam hubungan hak pilih bagi mereka yang berumur kurang dari 17 tahun, mengenai masalah kawin dibawah umur dan rumusan „sudah pernah kawin/tjerai” yang harus dapat dibuktikan dengan keterangan yang sah. Rumusan perkawinan itu yang dimaksudkan dengan sudah ada pergaulan suami isteri setjara normal dan benar-benar sudah mendjalani hidup bersama yang bebas atau perlu pembuktian legalitas perkawinan menurut hukum/adat.
Penafsiran ini masih berbeda-beda.
2. Pembuktian status seorang Warga Indonesia turunan asing. Walaupun diakui Undang-undang dan Peraturan itu sudah tjukup banjak dan pasti, namun masih ada dari penduduk tersebut yang tidak dapat menundjukkan bukti-bukti tertulis, umumnja dari turunan warga negara Tjina dan Arab.
3. Penjusunan sistim pengabdjadan dalam daftar pemilih.
Karena masih ada sebagian besar penduduk yang mempergunakan lebih dari satu namanja baik berupa alias maupun gelar atau sebutan-sebutan lainnja, sehingga sukar menjusun sesuai dengan apa yang diharapkan dalam peraturan yang ada.
Tjontoh : seorang warga negara dari Tapanuli mempergunakan disamping nama ketjil djuga sebutan marga sedangkan sebutan sehari-hari lebih populer menggunakan sebutan marga tadi.
Sedangkan pada waktu didaftar sebagai pemilih dalam penjusunan abdjad nama ketjilnja yang didahulukan sesuai dengan pedoman yang ada.
4. Pembuktian untuk seorang yang telah terdaftar sebagai pemilih.
Tidak adanja pegangan yang berupa bukti tertulis bagi seorang yang pernah terdaftar, memungkinkan keritjuhan-keritjuhan yang tidak diharapkan seperti :
 - a. Yang tidak pernah terdaftar atau terlupakan didaftar dengan ber-sikeras menjatakan ia pernah didaftar.
 - b. Kemungkinan petugas sengadja tak melakukan pendaftaran karena dihubungkan dengan status kependudukan yang bersangkutan atau masalah yang menjangkut persjaratan sebagai pemilih.
5. Penjusunan daftar pemilih untuk satu desa dalam satu daftar pemilih sangat menjukarkan bagi pembuatan „turunan daftar pemilih”, susunan daftar desa itu harus dirombak, karena harus dikumpulkan nama-nama pemilih menurut lingkungan T.P.S.
Bukan sadja ini memerlukan tenaga dan banjak waktu, tetapi besar sekali kemungkinan kesalahan menjalin atau ketinggalan menjalin.

Sedangkan di Djakarta pembagian unit administrasi yang terketijl hanjalah sampai dengan desa/kelurahan. Sebaliknja didalam kenjata-annja dibawah satuan kelurahan masih terbagi lagi menurut RT dan RW. Berkenaan dengan itu untuk pelaksanaan pendaftaran pemilih DCI Djakarta telah ditempuh kebidjaksanaan praktis dengan tidak menjimpang dari ketentuan yang ada. Daftar pemilih langsung disusun dengan abdjad menurut lingkungan TPS, sedangkan TPS ini disesuaikan dengan antara 2 dan 3 RT (antara 200 sampai 300 pemilih).

Seperti diketahui RT inipun disesuaikan pula dengan Blok Sensus guna pendaftaran/pentjatjahan penduduk.

Barulah dari daftar TPS per TPS tadi dijadikan suatu daftar induk, per desa.

6. Adanja penduduk yang merupakan pendatang sementara dan tinggal di Djakarta sebagai buruh musiman sukar pula dikategorikan sebagai penduduk yang sah. Sebagaimana diketahui persyaratan legalitas untuk seorang penduduk DCI Djakarta ialah telah bertempat tinggal selama enam bulan terus menerus.

Sebaliknja mereka yang sudah tinggal bertahun-tahun namun tidak memiliki tempat tinggal tetap oleh karenanja tidak diakui sebagai penduduk yang sah. Padahal yang bersangkutan ia pasti berhak memilih, walaupun tidak memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Demikian pula buruh musiman seperti pekerdja suatu projek yang besar, mereka bekerdja dan tinggal lebih dari 6 bulan bahkan sampai beberapa tahun namun ia tidak terdaftar sebagai penduduk yang sah di DCI Djakarta, walaupun ia djuga mempunyai hak memilih.

7. Kesulitan lainnja adalah bahwa walaupun mereka sudah terdaftar sebagai pemilih di DCI Djakarta orang-orang yang berasal dari daerah lain disamping alasan politis psychologis djuga untuk mensukseskan Pemilu di daerah asalnja, baik atas kehendaknja sendiri maupun atas permintaan golongan maupun pejabat di daerah asalnja, menjelang pemungutan suara mereka beramai-ramai pulang kedaerah asalnja; hal ini mengakibatkan banjak mutasi dan oleh karenanja harus disisihkan tjukup tenaga serta waktu untuk pelajanannja.
8. Adanja sedjumlah orang yang semula tidak berhak didaftar sebagai pemilih sesuai dengan daftar yang diperoleh dari Laksus Kopkamtibda Djaya. Berdasarkan evaluasi pihak yang berwenang kemudian diputuskan pada saat menjelang pemungutan suara beberapa orang-orang yang tadinja tidak didaftar kemudian diperkenankan untuk didaftar. Demikian pula sebaliknja, setelah sedjumlah orang terdaftar sebagai pemilih atas instruksi dari pimpinan Djawatan/Kantornja

mereka belakangan beramai-ramai minta ditjoret dari daftar pemilih (tjontoh Pegawai P.N.K.A.).

9. Kesulitan lain jang walaupun tidak berarti namun merupakan gangguan pula yakni: formulir Model A telah terdjilid menurut buku sehingga pada waktu menjusun daftar terpaksa dipisah-pisahkan, demikian pula ukuran/format kartu pemilih Model A1 tidak sama ukuran besarnja sehingga penempatan dalam kotak kartu tidak sempurna.
10. Daerah-daerah pinggiran jang masih belum baik sarana maupun kelengkapan alat komunikasi dan lain sebagainya, djuga mendjadikan faktor pengganggu kelantjaran tugas ini, walaupun untuk daerah DCI Djakarta djumlah daerah ini tidak terlalu banjak.

7.5. Parpol dan Ormas jang turut Pemilu.

Pada Pemilu tahun 1955 tjalon-tjalon untuk keanggotaan DPR dan Konstituante diadjukan oleh Parpol, Ormas dan Perseorangan jang mendapat dukungan dari beberapa pemilih jang ditentukan.

Banjaknja Parpol, Ormas dan Perorangan jang turut mengadjukan tjalonnja dalam Pemilu 1955 tertjatat sedjumlah untuk Djakarta :

P a r p o l	:	20
Ormas	:	13
dan Perseorangan	:	6

Sedangkan untuk Pemilu tahun 1971 terdapat :

P a r p o l	:	9
G o l k a r	:	1

Parpol, Ormas dan Perseorangan jang turut dalam Pemilu tahun 1955 adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Partai Buruh | 13. B a p e r k i |
| 2. Partai Permai | 14. Persatuan Daya |
| 3. P a r i n d r a | 15. Laude IJE |
| 4. M u r b a | 16. HM. Daeng Djr. |
| 5. P a r k i n d o | 17. Kaligis WGJ |
| 6. S.K. I. | 18. PPD M.T. |
| 7. P. S. I. | 19. A. Andi Maga |
| 8. Pensiunan | 20. PKKSS |
| 9. K a t o l i k | 21. Biro Pantja Sila |
| 10. P R M | 22. P.P.P.R.I. |
| 11. N. U. | 23. A. Ch. J. Amalo |
| 12. Gerakan P.P. Sila | 24. P. R. I. |

25. P. Wanita Rakjat (I)
26. P.B. P.N.I.
27. P.S.I.I.
28. Partai Tani Indonesia
29. P. Wanita Rakjat (M)
30. Hadarijah M.
31. M a s j u m i
32. K.P.B. Bintang
33. P e r m a i
34. P. I. R. (H)
35. T j a t j o
36. K.P.R.S. Indonesia
37. M u t u n g
38. I P – K I
39. Gerakan Angkatan Muda
40. P P T I
41. P I R (W)
42. Gerakan Banteng R.I.
43. W a d j i j o
44. KP Lasiurang
45. R. Soedjono
46. R. Soeroto
47. Perikemanusiaan
48. Ali Chatmir
49. Prawiro Soebroto
50. Mr. M. Soelaiman
51. P a r k i s
52. Angkatan Baru Indonesia
53. B.P.B.
54. P. K. I.
55. Radja Keprabonan
56. Hadi Prabowo
57. Soekardi Kardi
58. K. Moh. Kusnun
59. S. Arjo Udojo
60. Partai Islam Indonesia
61. Ikrupins
62. Siswoatmodjo
63. R. Atmo saputro Dkk.
64. M. Nur Ahmad
65. Moh. Sajang
66. P a r i
67. A. Abd. Kertadiputra
68. R. St. Kawuk
69. G e r p i s
70. Sarbupri
71. Front Rakjat Tidak berpartai
72. A k u i
73. C.C. Pem. U.
74. P e r t i
75. Samsu Bahrnun
76. R. Husain
77. A. Tomo
78. J. Nasri
79. Mr. Jamin dkk.
80. P. Adat Rakjat
81. P. I. N.
82. P. Ked. Rakjat
83. M. Dipodirdjo
84. Grinda
85. P. Republik
86. R.K. Ps. Baru
87. Thung Sing Nio
88. Halimah Ishak
89. P. Rakjat Ds.
90. Nj. Kartowijono
91. Mangundiprodjo
92. Himpunan Kemanusiaan
93. Major Moekono
94. Achmad Ridwan
95. Sastrosoepardjo
96. P P B
97. A.S. Arifin
98. A. Ardinan
99. PRIM/Husain Dkk.
100. P a r k i
101. Gerakan Rakjat Indonesia
102. R. Odo Dkk.
103. P. Patriot Indonesia
104. A c o m a
105. Rengku Sumedap
106. D.E. Hogot Dkk.
107. P.N.I dan Gab.
108. Saruhun

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 109. G. Marpaung | 114. Zega Paododo Amaro |
| 110. Daulay Bgd. K.A. | 115. P.A.M.B.I. |
| 111. Margailan Purba | 116. Nusa Ina |
| 112. Kebaktian Rakjat | 117. H.K.I. |
| Simalungun | 118. M.T.K.A.A.M. |
| 113. T. Sjahrul | |

Dan pada Pemilu tahun 1971 Parpol Dan Golkar yang turut adalah :

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Partai Katolik | 6. Parkindo |
| 2. P.S.I.I. | 7. M u r b a |
| 3. N. U. | 8. P. N. I. |
| 4. Parmusi | 9. P e r t i |
| 5. Golongan Karya | 10. I P - K I |

7.6. Djumlah Tjalon.

Untuk Pemilu tahun 1955, djumlah tjalon untuk keanggotaan DPR adalah 250 orang dan dari Keturunan Asing (Golongan Minoritas) sedjumlah 17 orang.

Penetapan djumlah tjalon didasarkan pada perimbangan djumlah penduduk dari masing-masing daerah pemilihan. Untuk mendapatkan pembagian yang seimbang, terlebih dahulu ditetapkan suatu angka bilangan pembagi yang diperoleh dari hasil bagi djumlah penduduk seluruh Indonesia dengan bilangan 300.000 (tiga ratus ribu) (untuk Konstituante dengan bilangan 150.000). Sehingga untuk Daerah Pemilihan Djakarta Raya ditetapkan wakil yang dapat dipilih sebanyak 6 orang anggota. Demikian pula untuk Konstituante dengan dasar bilangan hasil bagi 150.000 (seratus limapuluh ribu) sehingga djumlah wakil sebanyak 2 x lipat dari djumlah anggota DPR, maka tjalon-tjalon yang diajukan baik oleh organisasi Parpol dan Ormas maupun perorangan akan memperebutkan sedjumlah kursi yang telah ditetapkan tadi. Sedangkan untuk Pemilu tahun 1971, tjalon untuk DPR dari Daerah Pemilihan D.C.I. Djakarta. :

— Sementara	:	132
— T e t a p	:	127
— Terpilih	:	9

Tjalon DPRD DCI Djakarta :

— Sementara	:	373
— T e t a p	:	363
— Terpilih	:	32

disamping itu untuk keanggotaan DPRD ada pula anggota yang diangkat sedjumlah 8 orang (1/5).

Penetapan jumlah calon anggota DPR didasarkan hasil bagi jumlah penduduk dengan 400.000 dengan memperhatikan ketentuan bahwa sekurang-kurangnya tiap daerah Tingkat II mempunyai seorang wakil.

Dengan dasar penetapan tersebut daerah DKI Jakarta ditetapkan 9 orang calon untuk keanggotaan DPR yang dimaksud.

Untuk DPRD Tingkat I DKI Jakarta ditetapkan sejumlah 40 orang anggotanya yang diantaranya $\frac{1}{5}$ adalah yang diangkat yakni 8 orang. Dengan demikian calon yang dipilih sejumlah 32 orang.

Angka penetapan untuk seorang calon terpilih diperoleh dari hasil bagi seluruh surat suara yang masuk yang sah dibagi dengan jumlah calon yang dapat dipilih (Kiesquotient).

7.7. Anggaran Belanja.

Anggaran Belanja Pemilu untuk tahun 1955 dibebankan pada anggaran 2 (dua) Kementerian yaitu: Kehakiman dan Dalam Negeri.

Anggaran ini disediakan untuk selama ± 4 tahun mulai dari April 1954 s/d September 1957 dengan jumlah sebesar Rp. 5.792.396,33 untuk Jakarta Raya.

Dari catatan yang diperoleh, biaya per kapita sebesar Rp. 6,09. Sedangkan untuk Pemilu tahun 1971 anggaran khusus disediakan dari LPU yang disadikikan untuk DKI Jakarta mulai triwulan IV/1969 (Anggaran 1969/1970) s/d triwulan II/1971 dengan jumlah sebesar Rp. 183.731.596,25 (terdiri dari beban sementara Rp. 137.298.096,85 dan beban tetap Rp. 46.433.500,—).

Menurut perhitungan, maka pembiajaan ini jatuh per kapita sebesar Rp. 43,81.

7.8. T. P. S.

Dalam Pemilu tahun 1955 ditetapkan untuk 1 TPS antara 300 — 1.000 pemilih. Untuk itu TPS diadakan sejumlah 3.012 buah.

Sedangkan pada Pemilu tahun 1971, 1 TPS ditetapkan antara 200 — 300 pemilih. Dan TPS di DKI Jakarta tertajat sejumlah 9.429 buah.

Dalam pembuatan TPS sebagaimana juga dalam Pemilu 1955, pada Pemilu tahun 1971 tidak terdapat perbedaan yang berarti. Jumlah TPS yang meningkat pada tahun 1971 dibandingkan pada Pemilu tahun 1955 dikarenakan disamping kenaikan jumlah penduduk/pemilih juga karena jumlah pemilih untuk 1 TPS diperketil. Dalam kebidaksanaan yang ditempuh di DKI Jakarta guna dapat memanfaatkan bekas-bekas TPS yang praktis dapat digunakan 1 hari saja, maka dinding TPS tidak dibuat dari bilik/bambu tetapi dibuat dari bahan kain/blatju yang setelah pemungutan suara kain blatju ini disumbangkan untuk keperluan anak

Jatim Piatu, Panti Asuhan serta Hansip/Wanra dan Badan Sosial lainnja.

Bahan pembuatan TPS walaupun dalam bentuk dan ukuran jang sama namun dibeberapa bagian wilayah diberi kewenangan sendiri-sendiri; ada jang membuat dari bambu, ada jang dari kayu dan hardboard.

Pada umumnja seluruh TPS jang digunakan memenuhi persyaratan ketentuan jang ditetapkan.

BAB VIII.

PENUTUP

8.1. Evaluasi Politik.

Dengan turut sertanja 90% dari warga kota jang terdaftar sebagai pemilih untuk datang ke TPS-TPS menggunakan hak pilihnja menunjukkan bahwa terdapat kesadaran rakjat untuk ikut serta dalam tanggung djawab bernegara.

Pemilu sebagai media pendidikan politik bagi rakjat ternyata telah berhasil untuk menggerakkan nurani mereka dalam mengudji kejakinan politik dan ideologi jang dipegangnja selama ini. Lepas dari segala dakwaan dan argumentasi harus diakui bahwa Golkar dengan program-pembangunan dan politik phragmatismenja ternyata telah dapat merebut mayoritas rakjat pemilih.

Untuk DCI Djakarta dapat diadjukan pendekatan bahwa pertentangan politik tidak menadjam sesudah Pemilu. Masalahnja kini ialah bagaimana memupuk situasi ini untuk memungkinkan pengikut sertaan semua kekuatan sosial politik dalam usaha pembangunan.

Sementara itu perlu diusahakan untuk memperkuat posisi control lembaga-lembaga perwakilan rakjat dalam rangka menghindarkan lahirnja berbagai bentuk frustrasi.

Pendidikan politik dan penanaman pengertian akan tugas-tugas dan tanggung djawab serta harkat sebagai wakil rakjat akan sangat berguna untuk mengembangkan kewadajiban para anggota lembaga perwakilan tersebut. Dengan tjara ini kemungkinan timbulnja frustrasi-frustrasi sedjauh mungkin dapat dihindarkan.

8.2. Aparatur Pemilu.

Tahap-tahap penjurusan aparatur, pendaftaran penduduk dan pemilih, pentjalonan, pembentukan TPS-TPS dan penundjukan anggota KPPS serta santiadji untuk mereka telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinja sesuai dengan djadwal jang ditetapkan.

Dibidang struktur organisasi, aparatur pelaksana Pemilu jang disusun berdasarkan Undang-undang No. 15 tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 dirasakan sudah tjukup efektif. Hanya eksistensi aparatur Pemilu sampai tingkat Kelurahan untuk Pemilu-Pemilu jang akan datang perlu dipertahankan dan disempurnakan untuk seluruh periode penjelenggaraan Pemilu.

Penjamarataan formasi personil untuk Sekretariat beberapa tingkatan Panitia perlu ditinjau kembali dalam mempersiapkan Pemilu jang akan

datang. Idealnya adalah kalau formasi itu ditetapkan sesuai dengan index volume kerja pada tiap tingkatan Panitia.

Untuk menjamin kontinuitas dan kelanjutan tugas dalam pelaksanaan Pemilu yang akan datang hendaknya mulai dari sekarang disediakan tenaga yang khusus dididik dan dikembangkan skill dan kariernya untuk penanggulangan teknis Pemilu.

Sejogjanja diambil dan dibina dari personil yang sekarang turut serta dan tenaga-tenaga yang ada sangkut pautnya dengan Sensus/Statistik dan Kependudukan.

Achirnya dapat dikemukakan disini, walaupun semula dalam Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1970 pasal 10 ayat 1 (b) dinjatakan bahwa Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dibubarkan dalam jangka waktu 1 tahun sesudah pemungutan suara; namun mengingat tidak banjak lagi hal-hal yang perlu dilakukan serta anggaran biaya yang telah tidak memungkinkan, maka dengan Surat Keputusan Mendagri/Ketua LPU No.77/LPU/tahun 1971 tanggal 30 Oktober 1971 telah dibubarkan Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta terhitung mulai tanggal 31 Oktober 1971. Demikian pula halnya dengan Panitia-panitia pada eselon bawah setjara berturut telah dilakukan pula pembubarannya yakni untuk :

- a. P.P. Kota dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD DCI Djakarta tanggal 1 Nopember 1971 No.0917/III/2/1971.
- b. Sekretariat P.P. Kota dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD DCI Djakarta tanggal 2 Nopember 1971 No. 0919/III/2/1971.
- c. P.P.S. dengan Surat Keputusan masing-masing :
 1. S.K. Walikota Djakarta Utara No.1063/IV/2/DU/71 tgl. 1 Nopember 1971.
 2. S.K. Walikota Djakarta Barat No.1190A/IV/DB/71 tgl. 13 Nopember 1971.
 3. S.K. Walikota Djakarta Selatan No.141/IV/2/DS/1971 tgl. 1 Nopember 1971.
 4. S.K. Walikota Djakarta Timur No.292/Sek/Pemilu/1971 tgl. 2 Nopember 1971.
 5. S.K. Walikota Djakarta Pusat masing-masing No.8993 s/d .8999/30/DP/1971 tgl. 1 Nopember 1971.
- d. Koordinator KPPS dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD DCI Djakarta tanggal 27 Oktober 1971 No.0918/III/2/1971.
- e. Panitia Pemeriksa Tingkat I DCI Djakarta dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD DCI Djakarta tanggal 26 Oktober 1971 No.0924/III/2/1971.

8.3. Penjelenggaraan.

Tahap-tahap pelaksanaan kampanye, penjelenggaraan pemungutan suara, penghitungan suara, penghitungan kursi, dan penetapan tjalon terpilih djuga telah dapat dilakukan dengan baik dan tepat waktunya sesuai dengan djadwal yang ditentukan.

Namun perlu mendapat perhatian untuk dibidang tehnis penjelenggaraan sangat dirasakan keperluan adanya pedoman-pedoman yang djelas singkat, lengkap (concise) terperintji serta dapat disampaikan tepat pada waktunya.

Sebaiknja pedoman ini telah tersusun dalam satu manual yang bisa dibagikan pada saat persiapan Pemilu diadakan.

Demikian pula dalam rangka pemberian santiadji/coaching yang dilakukan dalam rangka Pemilu 1971 yang lalu dirasakan kurang mengarah dan tidak tehnis sifatnja. Untuk itu perlu disiapkan pedoman santiadji yang menjangkut detail tehnis, isi dan penjelenggaraan syllabuses, djumlah djam yang diperlukan untuk tiap mata peladjaran dan diadakan testing/wash up untuk meneliti sampai dimana materi santiadji dime-ngerti oleh peserta.

Pendaftaran Penduduk dan Pemilih untuk Pemilu berikunja telah dapat dipastikan tidak bersamaan waktunya dengan Sensus Penduduk. Untuk itu perlu dipikirkan disatu pihak adanya sistim pendaftaran pemilih disamping pemeliharaan Daftar Pemilih yang ada, agar azas-azas kelengkapan dan ketelitian tetap terdjamin dan sederhana mungkin dan dilain pihak sistim pentjataan penduduk nasional setjara tertib, sehingga proses pendaftaran penduduk & pemilih untuk Pemilu menjadi murah.

Pengumuman daftar pemilih yang dilakukan pada masa yang lalu ternyata kurang efektif dalam mentjapai sasarannja chususnja untuk daerah-daerah perkotaan. Oleh karena itu perlu diatur suatu tjara agar pengumuman/penerangan itu benar-benar bisa sampai dan diketahui oleh yang bersangkutan untuk diteliti seperlunja. Misalnja dengan menjusun daftar tersebut per RT/RW atau per TPS, untuk diteruskan ke-pengurus RT/RW atau tjalon KPPS ditiap wilayah yang bersangkutan. Djarak waktu achir pendaftaran pemilih dengan pemungutan suara terlampau pandjang sehingga dalam tenggang waktu tersebut ditemukan kesulitan dan load pekerjaan dalam pengelolaan mutasi-mutasi pemilih, sedang pedoman terperintji dan anggaran untuk itu tidak disediakan.

Persjaraan dan penelitian atas dokumen pentjalonan perlu disederhanakan tanpa mengurangi arti dan manfaat dari persjaraan yang ditentukan dalam per Undang-undangan Pemilu. Yang perlu diperhatikan adalah keseragaman norma-norma, ketjepatan pelayanan dan pemanfaatan

informasi tentang tjalon oleh instansi yang bersangkutan. Pengaturan tata tertib, jangka waktu dan sopan santun kampanye yang telah lalu ternyata telah membawa pengaruh yang baik dalam suasana kampanye itu sendiri. Ketentuan ini hendaknya perlu diperhatikan dan dikembangkan sedangkan jangka waktu kampanye selama 60 hari kalau perlu masih dapat dipertimbangkan untuk dipersingkat lagi.

Staff work untuk menjusun ketentuan teknis dan pedoman-pedoman pemungutan suara, penghitungan suara, Berita-berita Atjara setjara fundamentil perlu disempurnakan dan diperbaiki baik dalam kualitas, materi, waktu keluarnya ketentuan-ketentuan serta konsistensi antar pedoman. Demikian pula penyelenggaraan pemungutan suara di TPS-TPS Unit kerdja hendaknya diatur dengan ketentuan yang lebih sempurna dan praktis untuk memudahkan pelaksanaan pemungutan suara ditempat-tempat Unit-unit Kerdja tersebut. Pengalaman pada masa yang lalu, keputusan untuk mengadakan TPS di Unit kerdja saatnya sudah sangat dekat dengan hari pemungutan suara.

Dalam kenyataan perlu diatur pula ketentuan tentang pengumuman angka-angka sementara. Hal ini disatu pihak untuk mentjegah kesimpang-siuran dalam keluarnya angka-angka dan tanggung djawab penerbitnya dan dilain pihak mentjegah dikeluarkannya angka-angka oleh instansi yang tidak competent sebelum hasil angka resmi/tetap diumumkan.

8.4. Administrasi.

Oleh karena Pemilu diadakan setjara routine 5 tahun sekali hendaknya mulai sekarang pedoman administratif yang lengkap dan seragam sudah harus ditetapkan.

Alat-alat kelengkapan kantor hendaknya mendapatkan perhatian, baik berupa alat-alat untuk persiapan maupun untuk pelaksanaannya.

Sebagai tjontoh kebutuhan akan mesin hitung sangat dirasakan terutama pada tingkat Desa dan Ketjamatan, jaitu untuk mengadakan penghitungan dan rekapitulasi bagi data-data yang diperlukan. Sebaiknya alat kelengkapan yang kurang bermanfaat langsung terhadap pelaksanaan Pemilu, yang disediakan oleh LPU seperti Radio (sekurang-kurangnya untuk DCI Djakarta) dapat diganti dengan alat kantor lainnya yang lebih diperlukan.

Biaja overhead dimasing-masing Panitia hendaknya disesuaikan dengan volume kerdja masing-masing. Disamping itu banyak pos mata anggaran yang tidak tersedia untuk satu kegiatan yang termasuk urgent seperti biaja penghitungan suara di PPS, PP Kota dan PPD Tk. I. Berdasarkan pengalaman Pemilu tahun ini sebaiknya diadakan post evaluasi terhadap kebutuhan dan penggunaan anggaran sesungguhnya menurut kebutuhan riil yang dihadapi.

Bahan-bahan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menjusun anggaran Pemilu yang akan datang.

Kenyataan berupa kelambatan dropping anggaran, pengaturan otorisasi yang djuah lebih awal dari jadwal penggunaannya serta penetapan berbagai jenis mata anggaran yang tidak mungkin dipedomani setjara ketat, perlu disertai dengan usaha preventip dan pendjelasan setjara menjeluruh pada tingkat LPU kepada Departemen Keuangan cq KBN agar resiko-resiko adanya carry over dan tanggapan yang keliru tentang sisa anggaran pada akhir tahun dapat dihindari

8.5. Perbekalan.

Masalah perbekalan pada umumnya, khususnya pengadaan barang kebutuhan Pemilu telah dapat dilaksanakan setjara tertib. Problem yang timbul dibidang ini ialah berupa kelambatan-kelambatan dalam penjam-paian, terpisah-pisahnja lampiran-lampiran dari suatu model, tidak seragam bentuk dan ukuran dari berbagai bentuk/model, warna-warna yang menentukan sesuai dengan model surat suara serta bentuk dan bahan dari alat-alat kelengkapan perlu mendapatkan perhatian dan peninjauan dengan seksama. Dalam penentuan plafond untuk alokasi alat perlengkapan, situasi dan kondisi dari sesuatu daerah hendaknya turut dipertimbangkan tanpa menjama-ratakan dengan daerah lainnja. Terutama pada daerah perkotaan sematjam Daerah DCI Djakarta ini alat kelengkapan yang disediakan perlu disesuaikan agar benar-benar bermanfaat penggunaannya. Hendaknya telah dipikirkan dalam meren-tjanakan anggaran agar alat kelengkapan yang merupakan inventaris dari Pemilu dapat terpelihara dengan baik; untuk ini agar dipertim-bangkan dan dipikirkan biaya exploitasi yang wajar.

8.6. Pengawasan.

Didalam pengawasan baik dibidang tehnik administratif dan sosial politik hendaknya dapat diatur ketentuan-ketentuan yang jelas dan terperintji tentang aktivitas-aktivitasnja setjara riel, disertai jadwal operasi pengawasan setjara seragam yang dapat dilakukan setjara serentak dan terarah terutama pada tiap pentahapan kegiatan.

Guna lebih intensip dalam mengadakan pengawasan sejogianja bahagian ini berada diluar Sekretariat Panitia dan dijabat oleh personil yang tjakap dan memahami bidang tugas dari masing-masing persoalan (pengawasan keuangan, pengawasan barang dan pengawasan tehnik Pemilu).

Achirnja dengan Surat Keputusan Mendagri/Ketua LPU tanggal 30 Oktober 1971 No.77/LPU/tahun 1971 maka seluruh PPD Tingkat I & II dibubarkan dan dengan demikian selesai pulalah tugas-tugas dari Panitia ini.

江蘇省

[illegible]

**PENILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I TAHUN 1971
DAERAH PEMILIHAN:
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

[illegible][illegible]

I N D E X

- I. Pola Dasar Pelaksanaan Pemilu**
- II. Undang-Undang No. 15/1969 & No. 16/1969
Peraturan Pemerintah No.1/1970 dan
Peraturan Pemerintah No.2/1970.**
- III. Pembentukan Aparatur Pemilu**
- IV. Pendaftaran Penduduk dan Pemilih**
- V. Pentjalonan dan Kampanje**
- VI. K e a m a n a n**
- VII. Persiapan Pemungutan Suara sampai dengan
Penetapan Daftar Tjalon Terpilih**
- VIII. Perbekalan dan Pengawasan**

I.
POLA DASAR
PELAKSANAAN PEMILU

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. POLA DASAR PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM	152
1. Pendahuluan	152
2. Landasan Pemilihan Umum	152
3. Aparat Pelaksanaan	157
4. Bagan/Schema Organisasi	161

BAB I.

POLA DASAR PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM

1. PENDAHULUAN.

Sebagaimana sama kita mengetahui bahwa sedjak kemerdekaan baru sekali kita melaksanakan Pemilihan Umum, yakni pada tahun 1955 guna membentuk *Parlemen* dan *Konstituante*.

Pemilihan Umum pada saat itu berlandaskan kepada U.U.D. 1950 sesuai dengan konstitusi yang berlaku pada ketika itu serta U.U. No. 7 Tahun 1953 sebagai ketentuan pelaksanaannya.

Pada zaman Pemerintahan Orde Lama, dimana sebenarnya sedjak Dekrit Presiden tertanggal 5 Djuli 1959 kita telah kembali kepada U.U.D. 45 yang berlandaskan kepada Pantja-Sila sebagai filsafah hidup bangsa dan Negara, namun oleh Pemerintahan pada saat itu pelaksanaan Pantja-Sila serta U.U.D. 45 tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Kendatipun didalam U.U.D. 45 itu pada dasarnya tidak dinjatakan setjara tegas mengenai Pemilihan Umum, sebagaimana halnya dengan apa yang tertjantum dalam U.U.D. 1950 diatas, namun *isi* serta *djiwa* baik dalam Pantja-Sila maupun dalam Pembukaan serta Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 45 itu mengharuskan kita untuk melaksanakan Pemilihan Umum sebagai *sarana* didalam rangka kita menegakkan demokrasi Pantja-Sila yang kita kehendaki, sesuai dengan perjuangannya Orde-Baru untuk melaksanakan Pantja-Sila serta U.U.D. 45 setjara *murni* dan *konsekwen*.

2. LANDASAN PEMILIHAN UMUM.

2.1. PANTJA-SILA.

Pantja-Sila sebagai landasan Idiil bangsa Indonesia, terutama Sila keempat yang berbunyi „Kerakjatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusjawaratan/Perwakilan” meletakkan *sendi* serta *dasar* demokrasi yang sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia, yakni musjawarah untuk mufakat, dengan Pemilihan Umum sebagai *saranannya*.

2.2. UNDANG-UNDANG DASAR 45.

Sesuai dengan sistim konstitusi dalam Pendjelasan autentik dari U.U.D.45, dimana Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 45, adalah merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang tertinggi yang mendjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundangan bahwa dalam Negara serta mentjerminkan djiwa dari Pantja-Sila, maka karena itu sebagai landasan kedua dari pelaksanaan Pemi-

lihan Umum adalah Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri. Ketentuan-ketentuan dalam U.U.D.45 yang berkenaan serta erat hubungannya dengan Pemilihan Umum-antara lain adalah :

a. **PEMBUKAAN.**

Antara lain tertjantum sebagai berikut:, „maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakjat dengan berdasar kepada: Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan *kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan*, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia”.

b. **Pasal 1 (2) :**

„Kedaulatan adalah ditangan rakjat dan dilakukan sepenuhnya oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat”.

- Pasal ini mengandung makna bahwa pada dasarnya Madjelis Permusjawaratan Rakjat adalah penjelenggara negara jang tertinggi. Madjelis ini dianggap sebagai pendjelmaan rakjat, jang memegang kedaulatan negara dan didalam mendjalankan tugasnya Madjelis mengangkat Presiden/Wakil Presiden sebagai Kepala Eksekutif dan Mandataris M.P.R.

c. **Pasal 2 (1) :**

„Madjelis Permusjawaratan Rakjat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan jang ditetapkan dengan Undang-Undang”.

- Adapun makna dari pasal 2 (1) ini ialah dengan maksud agar supaja seluruh lapisan masjarakat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunjai wakil dalam MPR sebagai Lembaga Tertinggi dari Negara, sehingga dengan demikian M.P.R. akan betul-betul dapat dianggap sebagai pendjelmaan rakjat.

d. **Pasal 5 (1) :**

„Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat.”

- Pasal ini menundjukkan bahwa Presiden berkewadajiban membuat Undang-Undang bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat sehingga dengan demikian Presiden ketjuali memegang kekuasaan eksekutif djuga mendjalankan kekuasaan legislatif dalam negara.

e. **Pasal 5 (2):**

„Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk mendjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinja”

- Pasal ini mewadjabkan Presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaan Undang-Undang.

f. **Pasal 18 :**

„Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan ketjil dengan bentuk susunan pemerintahannja ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar Permusjawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-daerah jang bersifat Istimewa”.

- Pasal 18 ini menundjukkan bahwa walaupun Negara Indonesia adalah merupakan suatu Negara Kesatuan (eenheidsstaat) Vide pasal 1 U.U.D.45, namun dibagi-bagi mendjadi daerah-daerah Propinsi serta daerah-daerah Propinsi ini dibagi pula mendjadi daerah-daerah jang lebih ketjil.

Karena didaerah-daerah pun pemerintahan dilaksanakan serta bersendi atas dasar permusjawaratan, sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, maka didaerah-daerah pun diadakan Badan-badan Perwakilan Rakjat sebagai manifestasi daripada sumber kedaulatan adalah ditangan rakjat.

Selain daripada itu pasal inipun menundjukkan bahwa Negara Republik Indonesia tetap menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa, seperti desa di Djawa dan Bali, Negeri di Minangkabau, dusun dan marga, didaerah Sumatera Selatan dan sebagainya jang mempunjai/struktur Pemerintahan jang *chas* jang tumbuh dan berakar sesuai dengan kultur serta struktur sosial daerah-daerah tersebut.

g. **Pasal 19 (1) :**

„Susunan Dewan Perwakilan Rakjat ditetapkan dengan Undang-undang.”

h. **Pasal 28 :**

„Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”. Pada dasarnya pasal ini menundjukkan mengenai hak-hak berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat dari masyarakat termasuk didalamnya Parpol dan ormas. Namun sebaliknya bahwa setiap individu dan golongan jang ada dalam masyarakat dituntut pula suatu kewadjaban untuk melaksanakan Pemilihan Umum selaku sarana dalam meletakkan sendi-sendi demokrasi Pantja-Sila.

2.3. KETETAPAN M.P.R.S.

Sesuai dengan susunan dan sumber perundang-undangan Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 45, maka setelah UUD. 45, sebagai landasan ketiga adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh M.P.R.(S).

Ketetapan-ketetapan khusus berkenaan dengan Pemilihan Umum ialah :

a. TAP No. XI/MPRS/1966, tanggal 5 Djuli 1966.

Tap ini berkenaan dengan Pemilihan Umum yang diktumnja sebagai berikut :

Pasal 1 :

Pemilihan Umum yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia, diselenggarakan dengan pungutan suara selambat-lambatnja pada tanggal 5 Djuli 1968.

Pasal 2 :

Undang-undang Pemilihan Umum dan Undang-undang Susunan MPR, DPR dan DPRD sudah harus selesai diundangkan selambat-lambatnja dalam djangka waktu 6 (enam) bulan sedjak tanggal penetapan Ketetapan ini.

Pasal 3:

Susunan DPR dan DPRD terdiri dari golongan Politik dan Karya.

Pasal 4 :

Menugaskan kepada Pemerintah untuk melaksanakan Ketetapan ini.

- Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum sebagaimana telah ditentukan oleh TAP ini, yakni selambat-lambatnja pada tanggal 5 Djuli 1968, setjara materiil tidak dapat dilaksanakan karena target waktu sebagaimana ditentukan oleh TAP ini tidak dapat tertjapai.

b. TAP No. XIII/MPRS/1966, tanggal 5 Djuli 1966.

TAP ini adalah erat hubungan dengan TAP No. XI/MPRS/1966 diatas ialah tentang salah satu Program Kabinet Ampera yang berbunji sebagai berikut :

„melaksanakan Pemilihan Umum dalam batas waktu seperti ditjantumkan dalam Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966, tanggal 5 Djuli 1966”.

c. TAP No. XXII/MPRS/1966, tanggal 5 Djuli 1966.

TAP ini khusus mengenai Kepartaian, keormasan dan Kekaryaan yang terdiri dari 1 pasal dan berbunji sebagai berikut :

„Pemerintah bersama-sama DPR-GR segera membuat Undang-Undang yang mengatur kepartaian, keormasan dan Kekaryaan, yang menudju kepada penjederhanaan”.

— TAP ini djelas menugaskan kepada Pemerintah dan DPR untuk menjusun RUU tentang kepartaian, keormasan dan kekaryaan di Indonesia jang menghendaki adanya penjederhanaan.

d. TAP No. XLI/MPRS/1968, tanggal 27 Maret 1968.

TAP ini khusus mengenai Tugas Pokok Kabinet Pembangunan, salah satu Tugas ialah berkenaan dengan Pemilihan Umum jang berbunji sebagai berikut :

„Melaksanakan Pemilihan Umum sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XLII/MPRS/1968”.

e. TAP No. XLII/MPRS/1968, tanggal 27 Maret 1968.

TAP ini pada dasarnya adalah merupakan TAP pengunduran waktu pelaksanaan Pemilihan Umum sebagaimana ditetapkan dalam TAP No. XI/MPRS/1966 selain daripada mentjantumkan perubahan-perubahan tentang hal-hal lainnja, jang selengkapnja berbunji sebagai berikut :

Pasal 1 :

Merubah diktum TAP MPRS No. XI/MPRS/1966 pasal 1 sehingga berbunji sebagai berikut :

Pemilihan Umum jang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia diselenggarakan dengan pungutan suara selambat-lambatnja pada 5 Djuli 1971.

Pasal 2 :

Merubah diktum TAP MPRS No. XI/MPRS/1966 pasal 2 sehingga berbunji sebagai berikut :

MPR hasil Pemilihan Umum pada bulan Maret 1973 bersidang untuk :

- a) Memilih Presiden dan Wakil Presiden
- b) Menetapkan garis-garis Besar Haluan Negara
- c) Menetapkan Rentjana Pola Pembangunan Tahun ke II.

Pasal 3 :

Tetap seperti bunji pasal 3 Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966, yakni: Susunan DPR dan DPRD terdiri dari golongan Politik dan Golongan Karya.

Pasal 4 :

Merubah diktum Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 pasal 4 sehingga berbunji sebagai berikut :

Menugaskan kepada Presiden/Mandataris MPRS untuk melaksanakan Ketetapan ini.

Pasal 5 :

Menambah pasal baru, jaitu pasal 5 pada diktum Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 jang berbunji sebagai berikut :
Ketetapan ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkan.

2.4. PAKET RUU :

Sebagai pelaksanaan daripada Ketetapan-ketetapan MPRS tersebut diatas maka sebagai landasan ke-empat, Pemerintah (batja: *Presiden*, Vide pasal 5 (1) UUD.45) menjampaikan Paket RUU berkenaan dengan Pemilihan Umum pada tanggal 24 Nopember 1966 kepada DPR jang terdiri dari :

- a) RUU tentang Pemilihan Umum guna membentuk Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat baik ditingkat Pusat maupun daerah jang nantinja akan mendjelma mendjadi MPR sebagai Lembaga Tertinggi di Negara kita.
- b) RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD I dan II.
RUU a dan b ini adalah sebagai pelaksanaan daripada TAP No. XI/MPRS/1966.
- c) RUU tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan.
Sedangkan RUU ini adalah sebagai pelaksanaan TAP No. XXII/MPRS/1966, dalam rangka penjederhanaan kepartaian.

3. APARAT PELAKSANA.

Sebagai konsekwensi daripada apa jang diuraikan setjara hierarchies mengenai landasan Pemilihan Umum diatas maka diperlukan suatu *organ* sebagai badan, baik dibidang *teknis* maupun *administratif* dalam rangka *merentjanakan*, *mempersiapkan* serta *melaksanakan* Pemilihan Umum tersebut.

Karena itu berdasarkan RUU tentang Pemilihan Umum jang materinja pada dasarnya tidak mendjadi persoalan lagi, maka organ ini terdiri atas :

a. Lembaga Pemilihan Umum.

Lembaga ini jang berkedudukan di Djakarta, diketuai oleh Menteri Dalam Negeri jang bertugas meliputi :

- mengadakan *perentjanaan* dan *persiapan* untuk melaksanakan Pemilihan Umum.
- memimpin dan mengawasi Panitia-panitia Pemilihan dari Tingkat Pusat sampai kedesa.
- *mengumpulkan* dan *mensistimatisasikan* bahan-bahan serta data-data tentang Pemilihan Umum.
- mengerdjakan hal-hal lain jang dipandang perlu untuk melaksanakan Pemilihan Umum.

b. Panitia Pemilihan Indonesia.

Panitia ini berkedudukan di Djakarta dan diketuai oleh Menteri Dalam Negeri.

- Tugas: 1) *merentjanakan* dan *mengawasi* penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk DPR.
- 2) *menjelenggarakan* Pemilihan Umum guna membentuk DPR.

c. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.

Panitia ini berkedudukan ditiap-tiap Ibu Kota Propinsi dan diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah.

- Tugas : 1) *Membantu* tugas-tugas Panitia Pemilihan Indonesia.
- 2) Mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum guna membentuk DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II.
- 3) Menjelenggarakan Pemilihan Umum guna membentuk DPRD Tingkat I.

d. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.

Panitia ini berkedudukan ditiap-tiap Ibu Kota Daerah Tingkat II dan diketuai oleh Bupati/Wali Kota Kepala Daerah setempat.

- Tugas : 1) *Membantu* tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
- 2) *Menjelenggarakan* Pemilihan Umum guna membentuk DPRD Tingkat II.

e. Panitia Pemungutan Suara.

Panitia ini berkedudukan ditiap-tiap Ibu Kota Ketjamatan dan diketuai oleh Tjamat selaku Kepala Ketjamatan setempat.

- Tugas : 1) *Membantu* tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.
- 2) *Menjelenggarakan Pemungutan Suara.*

Dalam menjelenggarakan tugasnja *Panitia Pemungutan Suara* dibantu oleh :

Panitia Pendaftaran Pemilih, dan *Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.*

f. Panitia Pendaftaran Pemilih.

Panitia ini berkedudukan ditiap-tiap *Desa* dan diketuai oleh Kepala Desa.

- Tugas : 1) *Membantu* tugas-tugas Panitia Pemungutan Suara.
- 2) Menjelenggarakan pendaftaran pemilih/pendaftaran penduduk.

g. Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara.

Panitia ini berkedudukan di Desa-desa (TPS-TPS) yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 orang dan diketuai oleh salah seorang dari anggota yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara.

- Tugas : 1) *Membantu* tugas-tugas Panitia Pemungutan Suara.
2) *Menjelenggarakan Pemungutan Suara.*
- Pemungutan Suara akan diikuti oleh pemilih $\pm 55\%$ dari jumlah penduduk.

3.1. Majelis Permusyawaratan Rakjat.

- MPR terdiri dari :

a) *Anggota DPR* 360 *dipilih* dan 100 *diangkat*

b) *Utusan Daerah* 79 *dipilih*

- Sistem pemilihan dilakukan oleh DPRD Tingkat I
- Vide pasal 8 (1) RUU Susunan & Kedudukan MPR, DPR, DPRD I/II, min. 2, max. 5 dengan *sjarat* sebagai berikut :
 - Dibawah 1 djuta = 2
 - 1 djuta s/d 5 djuta = 3
 - 5 djuta s/d 10 djuta = 4
 - 10 djuta keatas = 5

c) *Utusan Golongan Politik/Golongan Karya* 174 *dipilih*.

- Serta pembagiannya dapat diadakan melalui :
 - a) Proporsionil
 - b) Didjamin min. 1 anggota bagi Parpol yang kalah dalam Pemilu.
- Tjara pembagiannya sekiranya sudah ada konsensus, pertamanya hendaknja diberikan dulu kepada Parpol yang kalah dalam Pemilu.
- Sisanya baru dibagi setjara proporsionil kepada Parpol-parpol yang menang.

- d) *Utusan Golongan Karya ABRI + Golongan Karya.*
mendapat 207 *diangkat*.

3.2. Dewan Perwakilan Rakjat.

- Khusus untuk jumlah DPR telah ditetapkan sebanyak 460 orang terdiri dari :
 - a) *Dipilih* = 360
 - b) *Diangkat* = 100
- Anggota DPR terdiri dari :
 - a) *Golongan Politik*
 - b) *Golongan Karya.*
- Anggota DPR yang diangkat terdiri dari :
 - a) *Golkar ABRI*
 - b) *Golkar non ABRI.*

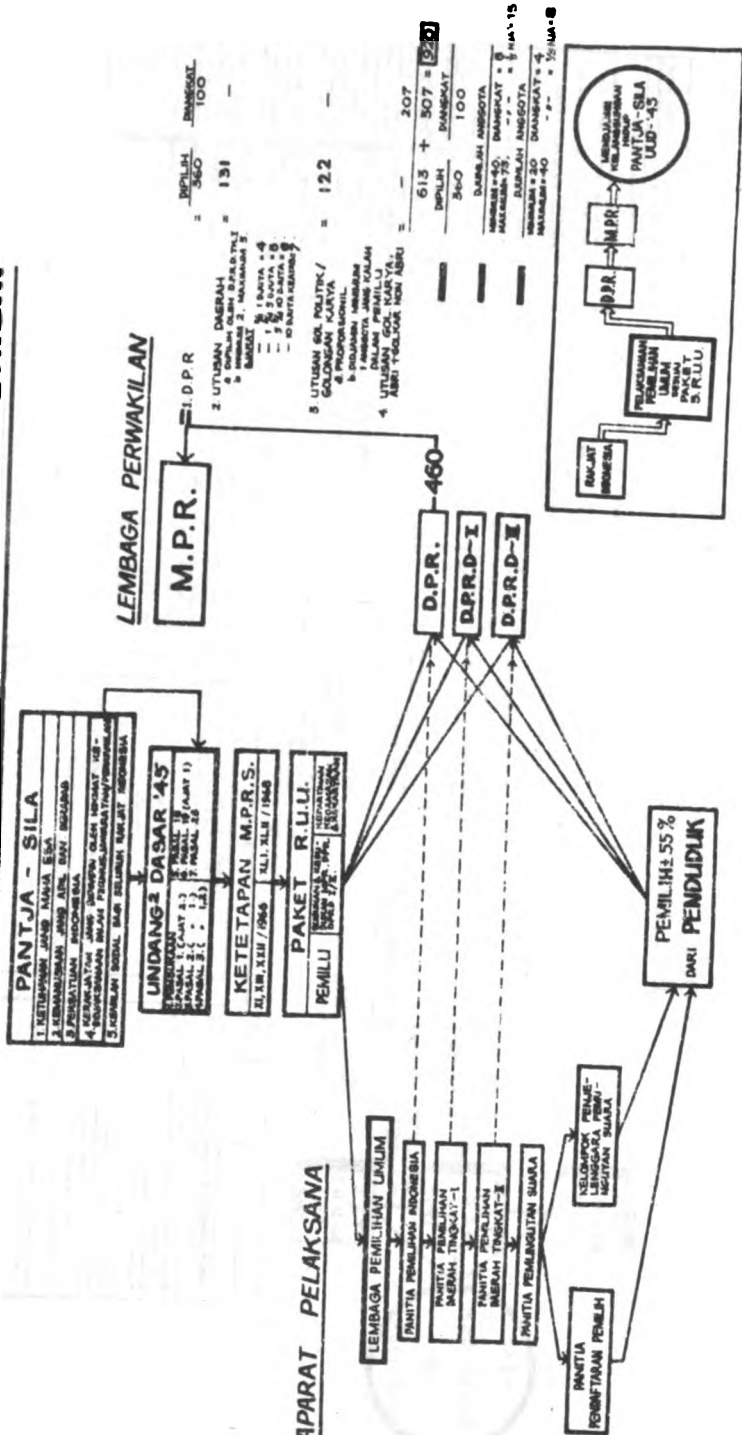
3.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I.

- Jumlah anggota DPRD I telah ditetapkan :
 - a) minimum = 40 – diangkat 8
 - b) maximum = 75 – diangkat (belum ada konsensus).
- Anggota DPRD I terdiri dari:
 - a) Golongan Politik
 - b) Golongan Karya.
- Anggota yang diangkat :
 - a) Golkar ABRI
 - b) Golkar non ABRI.

3.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

- Jumlah anggota DPRD II telah ditetapkan :
 - a) minimum = 20 – diangkat 4
 - b) maximum = 40 – diangkat (belum ada konsensus).
- Anggota DPRD II terdiri dari :
 - a) Golongan Politik
 - b) Golongan Karya.
- Anggota DPRD II yang diangkat :
 - a) Golkar ABRI
 - b) Golkar non ABRI.

APARAT PELAKSANA



PIMPINAN/ PELAKSANA :

PRESIDEN / MANDATARIS

Dr. PIMPINAN HARIAN

TUDJUAN

MELAKSANAKAN
PEMILIHAN UMUM
UNTUK



ANGGOTA DPR

PROVINSI	PEMILIH 1971	PEMILIH 1971	DJUMLAH
D.I. ATJEH	2.132.175	1.172.605	
SUMATERA UTARA	6.250.050	5.426.526	
SUMATERA BARAT	2.880.965	1.584.550	
RIAU	1.534.900	844.200	
D.JAMBI	984.267	541.347	
SUMATERA SELATAN	5.479.085	1.915.470	
LAMPUNG	5.253.128	1.789.219	
BENGKULU	545.686	500.127	
DJAWA BARAT	21.557.877	11.056.832	
D.G.I. DJAKARTA	4.601.027	2.350.565	
DJAWA TENGAH	23.726.695	12.499.681	
D.I. JOG-JAKARTA	2.743.272	1.508.600	
DJAWA TIMUR	26.875.407	14.780.374	
BALI	2.195.525	1.207.422	
NUS. TENG. BARAT	2.245.865	1.235.226	
NUS. TENG. TIMUR	2.443.969	1.344.185	
KALIMANTAN BARAT	2.057.926	1.120.889	
KALIMANTAN TENGAH	787.437	432.976	
KALIMANTAN SELATAN	1.023.251	1.002.708	
KALIMANTAN TIMUR	762.684	419.449	
SULAWESI UTARA	1.627.476	895.115	
SULAWESI TENGAH	927.635	510.119	
SULAWESI SELATAN	5.610.999	5.085.994	
SULAWESI TENGGARA	4.040.395	577.167	
MALUKU	980.833	539.915	
IRIAN BARAT	942.156	513.166	
DJAWA / MADURA	78.502.276	43.176.252	
LUAR DJAWA / MADURA	44.474.772	24.461.015	
DJUMLAH :	122.977.048	67.637.270	

[illegible]

PUSAT PENELITIAN INDONESIA 1

PNBUTIA PEMILIHAN DAERAH TM - I 20

PANITIA PEMILIHAN DAERAH TK- II 280

PAMITIA PEMUNGUTAN SUARA 8:105

NY

186.507	BUARA
---------	-------

PARTIA
PENDAPTARAN
PBMIL-114
49.456

**PEMILIHAN ANGGOTA D.P.R.
DAERAH PEMILIHAN TK I**

GOLONGAN POLITIK		DIPILIH	360
GOLONGAN KARYA			
ABRI-KARYANON MASAL		DIANGKAT	100

TIAP DAERAH TK I : 400.000 PENDUDUK / WAKIL

TIAP DAERAH TK I : MINIMAL DPT DJUMLAH SEBANYAK DJUMLAH KABUPATEN

TIAP DAERAH TK I : MINIMAL WAKIL

PERINTJIAN DJUMLAH ANGGOTA D.P.R.				
No	DAERAH	DJML KAB/KODWA	DJMLAH ANGGOTA TERPILIH	KET:
1	DIJATJEH	9	9	
2	SUMATERA UTARA	17	17	
3	SUMATERA BARAT	14	14	
4	RIAU	14	14	
5	DJAMBIL	10	10	
6	SUMATERA SELATAN	10	10	
7	LAMPUNG	10	10	
8	BENGKULU	10	10	
9	DJAWA BARAT	24	24	
10	D.C.I DJAKARTA	24	24	
11	DJAWA TENGAH	35	35	
12	D.I. JOGJAKARTA	35	35	
13	DJAWA TIMUR	37	37	
14	BALI	24	24	
15	NUSA TENGG BARAT	15	15	
16	NUSA TENGG TIMUR	15	15	
17	KALIMANTAN BARAT	15	15	
18	KALIMANTAN TENGAH	15	15	
19	KALIMANTAN SELATAN	10	10	
20	KALIMANTAN TIMUR	10	10	
21	SULAWESI UTARA	10	10	
22	SULAWESI TENGAH	10	10	
23	SULAWESI SELATAN	23	23	
24	SULAWESI TENGGARA	4	4	
25	MALUKU	4	4	
26	IRIAN BARAT	4	4	
DJUMLAH		281	360	

**DJUMLAH ANGGOTA M.P.R.
2 x DJUML D.P.R.=920**

TERDIRI DARI	DJUMLAH	KETERANGAN
1 ANGGOTA D.P.R.	460	100 DIANGKAT
2 UTUSAN DAERAH	131	DIPILIH D.P.R.D. I.
3 UTUSAN GOLPOLGOLKAR	122	SEIMBANG HASIL PEMILU
4 UTUSAN ABRI		
5 UTUSAN KARYANON } ABRI	207	207 DIANGKAT
		307 DIANGKAT (1/3DARI 920)

DJUMLAH UTUSAN DAERAH UNTUK M.P.R.		
DAERAH	DJUMLAH	KETERANGAN
1 DIJATJEH	5	
2 SUMATERA UTARA	3	
3 SUMATERA BARAT	3	
4 RIAU	3	
5 DJAMBIL	3	
6 SUMATERA SELATAN	3	
7 LAMPUNG	3	
8 BENGKULU	3	
9 DJAWA BARAT	7	
10 D.C.I DJAKARTA	7	
11 DJAWA TENGAH	10	
12 D.I. JOGJAKARTA	10	
13 DJAWA TIMUR	10	
14 BALI	10	
15 NUSA TENGG BARAT	5	
16 NUSA TENGG TIMUR	5	
17 KALIMANTAN BARAT	5	
18 KALIMANTAN TENGAH	5	
19 KALIMANTAN SELATAN	4	
20 KALIMANTAN TIMUR	4	
21 SULAWESI UTARA	4	
22 SULAWESI TENGAH	4	
23 SULAWESI SELATAN	4	
24 SULAWESI TENGGARA	4	
25 MALUKU	4	
26 IRIAN BARAT	4	
DJUMLAH		131

- a) 1 Djaja kebawah : 4 orang
1 s/d 5 Djaja : 5 orang
5 s/d 10 Djaja : 6 orang
10 Djaja keatas : 7 orang
- b) Dipilih oleh DPR tk I dari anggota DPRD tk I

BAGAN ORGANISASI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

UU No 13/1999
UU No 1/1999 No 12

PEMILIHAN ANGGARAN DPRD TK I

CONTOH: DUAWA TENGAH - DUM. PENDUK TH. 1971
22.726.653

25	GOLONGAN POLITIK	DIPILIH	60
	GOLONGAN KARYA		
	ABRI KARYA NON MASSAL	DIANGKAT	15

200.000 = 1. ORANG MAHAL

MAX →

PEMILIHAN ANGGARAN DPRD TK I LANTOH: KAB. K. RIAU DUM. PENDUK TH. 1971 225.582

25	GOLONGAN POLITIK	DIPILIH	20
	GOLONGAN KARYA		
	ABRI KARYA NON MASSAL	DIANGKAT	5

10.000 = 1. ORANG MAHAL

PARPOL/GOLKAR	DUM SUARA MASUK	QUOTUM	DUM KURS
1 NASIONALIS	2.400.000	2.400.000	12
2 AGAMA	2.400.000	2.400.000	12
3 SOSIALIS	1.200.000	1.200.000	6
4 PEMB. MATE	2.400.000	2.400.000	12
5 PEMB. SPR	1.800.000	1.800.000	9
6 KARYA LAIN	1.800.000	1.800.000	9
DUMLAH:	12.000.000	DUMLAH:	60

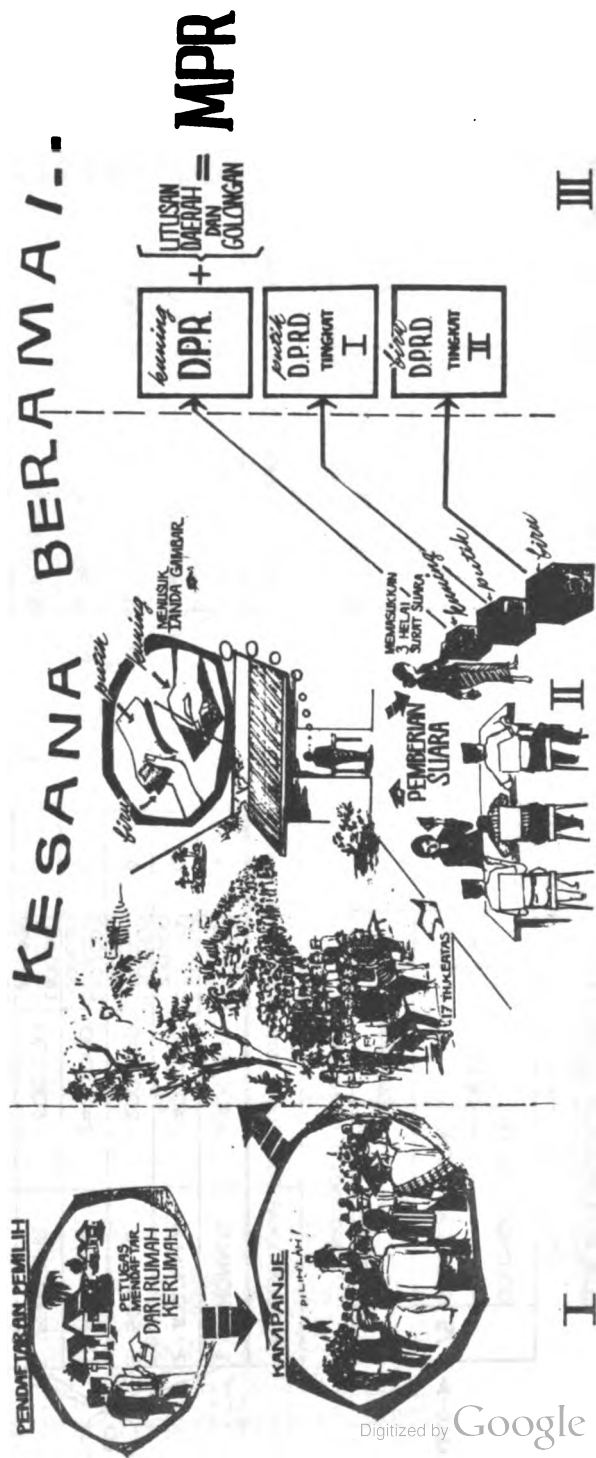
1 KURS 200.000 = 200.000

PENGABANGAN SUARA ANTAR ORGANISASI GOLONGAN
DAPAT DIPERHITUNGKAN

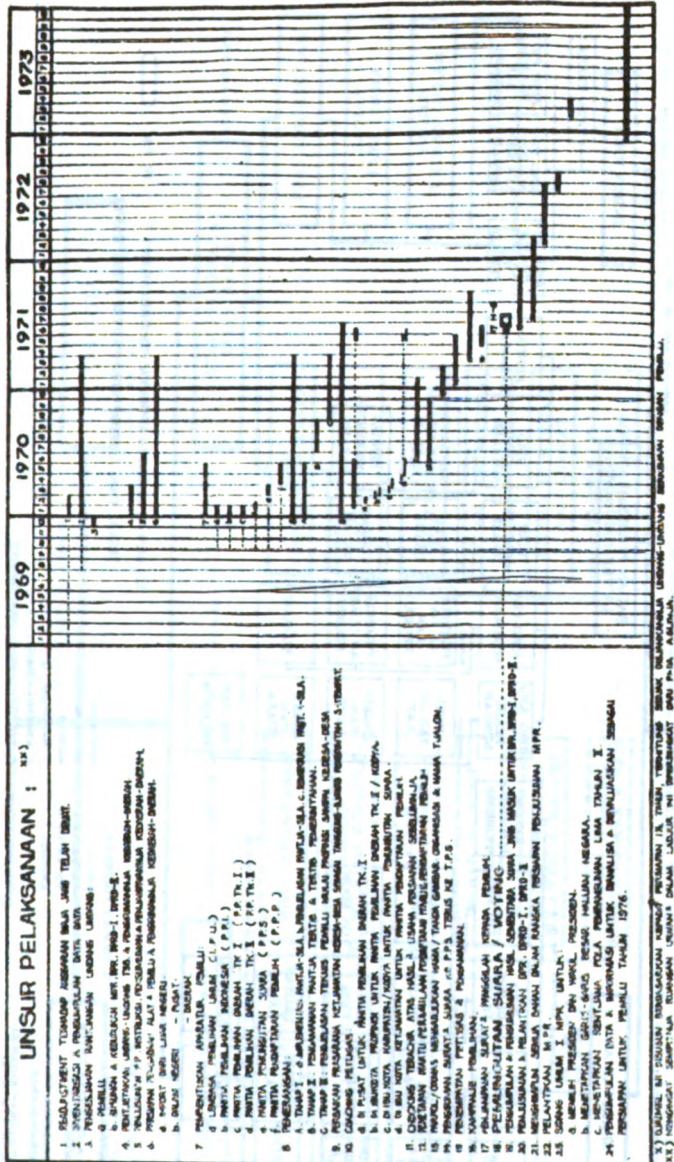
PARPOL/GOLKAR	DUM SUARA MASUK	QUOTUM	DUM KURS
1 NASIONALIS	19.500	19.500	3
2 AGAMA	32.500	32.500	5
3 SOSIALIS	13.000	13.000	2
4 PEMB. MATE	26.000	26.000	4
5 PEMB. SPR	19.500	19.500	3
6 KARYA LAIN	19.500	19.500	3
DUMLAH:	130.000	DUMLAH:	20

1 KURS 130.000 = 6.500

PEMILIHAN UMUM



DJADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM



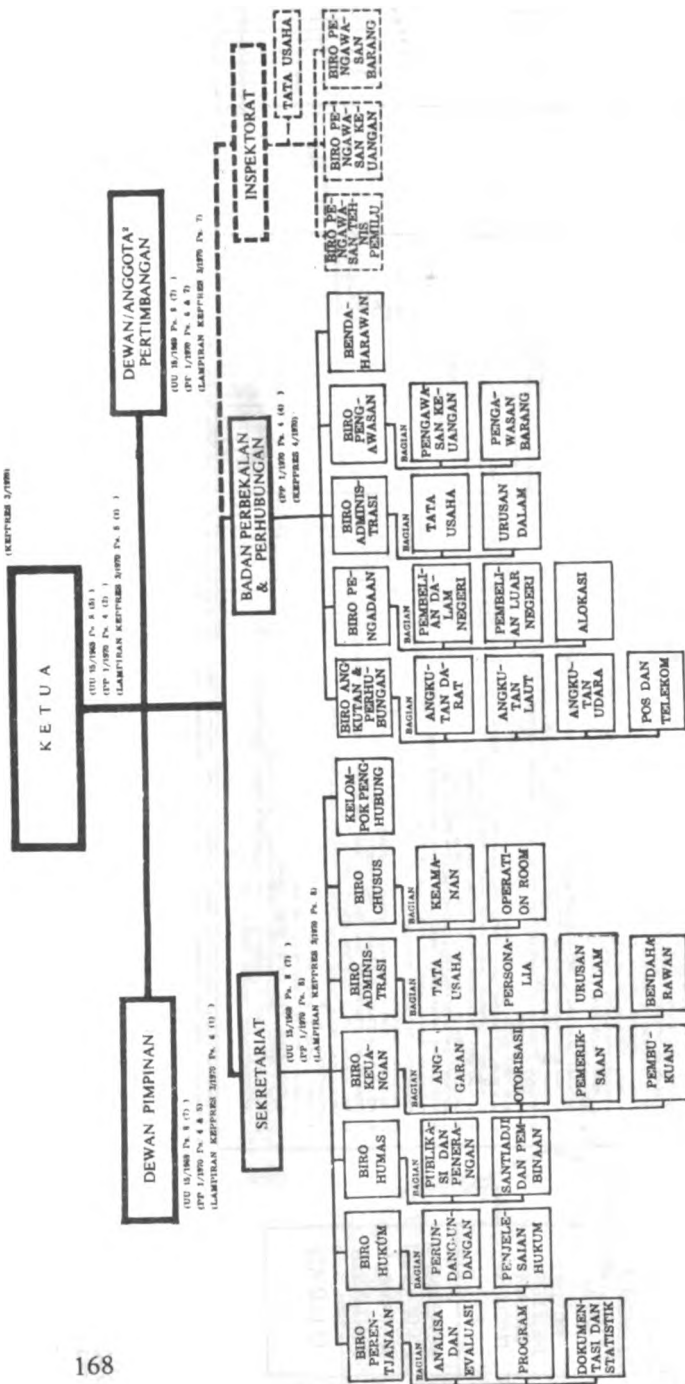
PRESIDEN/ MANDATARIS	LEMBAGA PEMILIHAN UMUM	KETUA, MENTERI DALAM NEGERI	KEMENANGAN ORDE-BARU BERDASARKAN PANTLA SILA DAN U.U.D'45
-------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--

PIMPINAN:

PELAKSANA:

SASARAN:

RECEIVED PARAL 20
J.F. 1/19/80
KLEINER 2/1/80



INTERVIEW

- TUGAS-TUGAS LEMBAGA PEMILIHAN UMUM :
1. MENGADAKAN PENDAFTARAN & PEMILIHAN UNTUK MELAKUKAKAN PEMILIHAN UMUM
 2. MEMINTA DAN MEMOJABI PANTAU PEMILIHAN DARI TK PUSAT SAMPAI KEDERAJAT-DAERAH
 3. MENGUMPULKAN & MEMERUMAHKAN BAHAN-BAHAN, SERTA DATA-DATA YG PEMILIHAN UMUM
 4. MENGHADAKAN HAL-HAL TARIK JANG DIPANDANG KEPADA PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM

III. DEWAN PTMPENAN :

7A

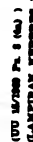
PWK. KETUA !
 PWK. KETUA !
 ANGGOTA

- MENTAORI
MENKEMHAKIMAN
MENPEN
1. MENTAORI
2. MENKEMHAKIMAN
3. MENPEN
4. MENTORU
5. MENKEMHAKIMAN
6. MENPEN
7. MENTORU

DEWI/AN/ANGGOTA-ANGGOTA PERTIMBANGAN :

BEREDIRI DARI UNSUR : GOL. POLITIK & GOL. LAKYA :

CU 15/1969 Pa. 8 (4a)
PP 1/1970 Pa. 9)



b. ANGGOTA JANG TERDIRI DARI UNSUR-UNSUR

II. TUGAS POKOK PANITIA PEMILIHAN INDONESIA :

1. MENENTUKAN DAN MENGAJARI PERJEN-
LANNAN PERILAH UMUM UNTUK DPR,
DPRD TE I DAN DPRD TE II
2. MENJELASKAN PERILAH UMUM UN-
TUK DPR.

III PROMEMORI:

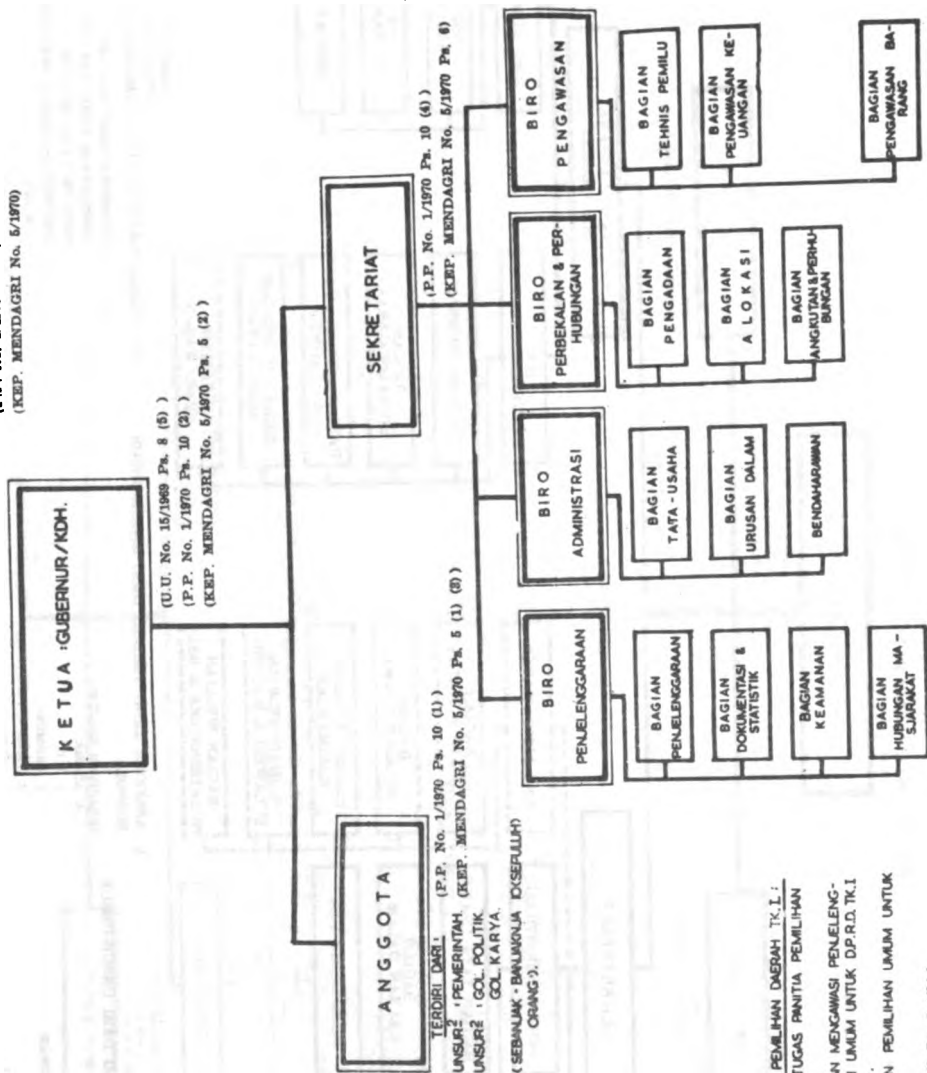
- COLOAN KARYA :**
1. COLOAN AERI
 2. COLOAN KARYA PERAGUNAN 'A'
 2. COLOAN KARYA PERAGUNAN 'B'
 4. COLOAN KARYA PERAGUNAN 'C'

1. NU.
 2. PARTUKE
 3. P.B.I.
 4. PERTI
 5. PARKINDO
 6. PARTAI KATOLIK
 7. NASIONAL/ROS.
 8. PARTAI MURBA
 9. P.N.I.
 10. I.P.K.I.

1. ANGGOTA JANG TERDIRI DARI UNSUR-UNSUR PEMERINTAH :
- | | |
|-----------|----------------------|
| KETUA | : MENDAGRI |
| WK. KETUA | : MEND. KEKAMAYAN |
| WK. KETUA | : MEND. PERH. |
| ANGGOTA | : 1. MENDAGRI |
| | 2. MEND. KEKAMAYAN |
| | 3. MEND. PERH. |
| | 4. MEND. KEUANGAN |
| | 5. MEND. PERUMBUHOAN |
| | 6. MEND. SANEHAN |
| | 7. MEND. LUAR NEGERI |
- 169

BAGAN ORGANISASI PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I.-

(U.U. No. 15/1960 Ph. 8 (4))
(P.P. No. 1/1970 Ph. 10)
(KEP. MENDAGRI No. 5/1970)



KETERANGAN :

1. TUGAS POKOK PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I. :
MELAKUKAKAN TUGAS-TUGAS PANITIA PEMILIHAN
INDONESIA.
2. MELAKUKAKAN DAN MENGEVALUASI PENJELANG-
GAN PEMILIHAN UMUM UNTUK D.P.R.D. T.K.I
DAN D.P.R.D. T.K.I.
3. MELAKUKAKAN PEMILIHAN UMUM UNTUK
D.P.R.D. T.K.I.

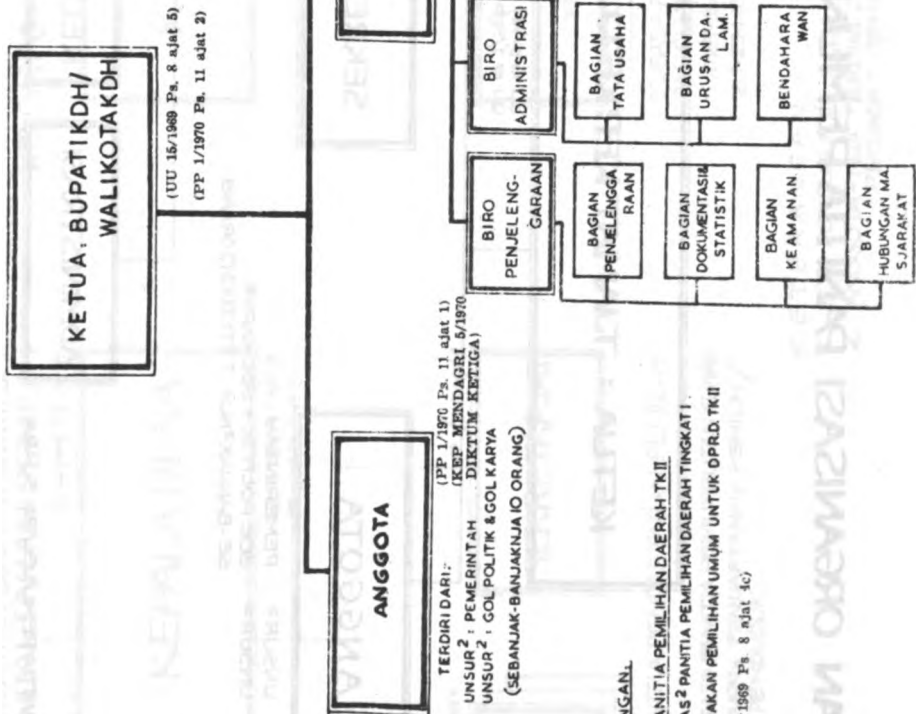
(U.U. No. 15/1960 Ph. 8 (4))

BAGAN ORGANISASI PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT II.

(UU 15/1969 Ps. 8 ayat 4a)

(PP 1/1970 Ps. 11)

(KEP MENDAGRI 5/1970 DIKTUM KEDUA)



KETERANGAN.

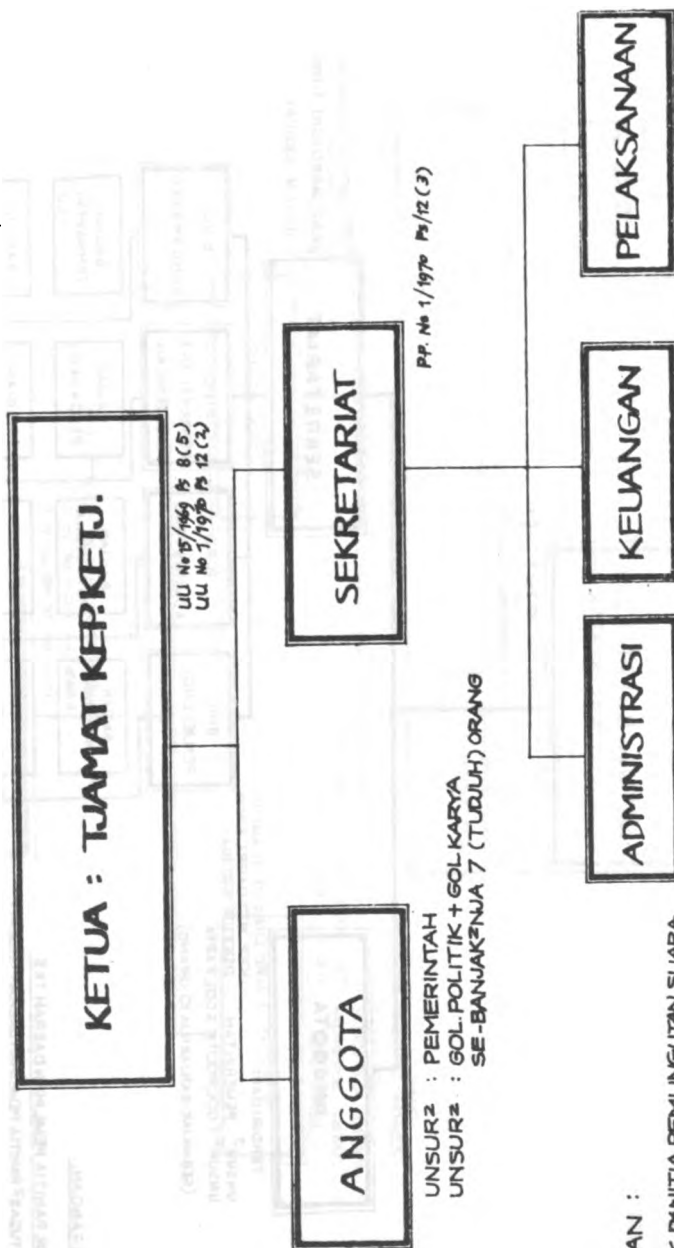
TUGAS POKOK PANITIA PEMILIHAN DAERAH TKII

1. MEMBANTU TUGAS 2 PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I.
2. MENJELANGGARAAN PEMILIHAN UMUM UNTUK DPRD TKII

(UU 15/1969 Ps. 8 ayat 4c)

BAGAN ORGANISASI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

UU No 5/1999 Ps 8 (4d)
UU No 1/1970 Ps 12



UNSUR 2 : PEMERINTAH
UNSUR 3 : GOL. POLITIK + GOL KARYA
SE-BANJAKENJA 7 (TUJUH) ORANG

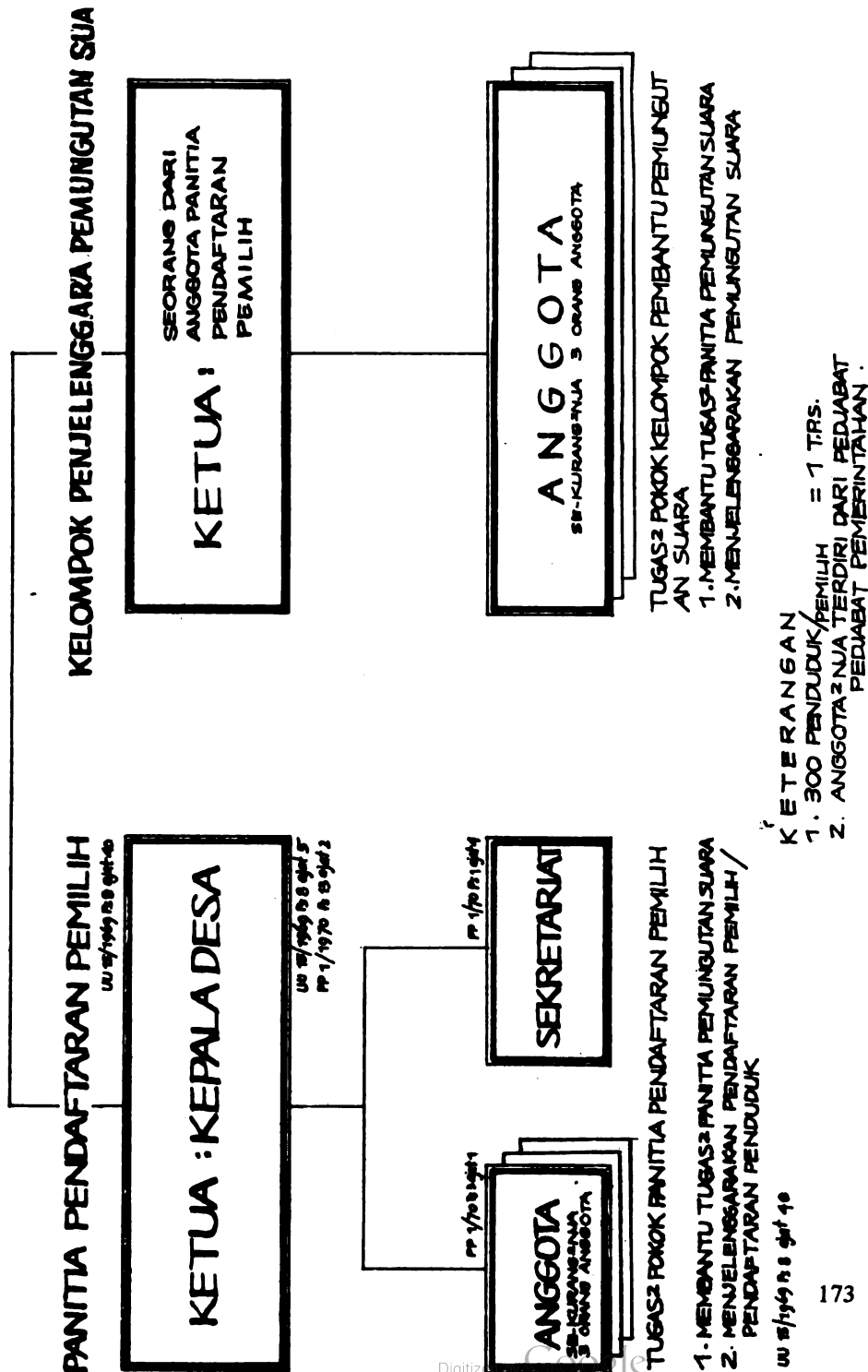
KETERANGAN :

TUGAS POKOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. MEMBANTU TUGAS PANITIA PEMILIHAN DAERAH TK II
2. MENJELASKAN PEMUNGUTAN SUARA

UU No 5/1999 Ps 8 (4d)

BAGAN ORGANISASI



II.

**UNDANG – UNDANG NOMOR
15 DAN 16 / TAHUN 1969
PERATURAN PEMERINTAH NO.1 DAN
PERATURAN PEMERINTAH NO.2 / TAHUN 1970.**

DAFTAR ISI

	Hal.
1. Undang-undang No. 15 tahun 1969.	177
2. Pendjelasan Undang-undang No. 15 tahun 1969 . . .	194
3. Undang-undang No. 16 tahun 1969	210
4. Pendjelasan Undang-undang No. 16 tahun 1969 . . .	232
5. Peraturan Pemerintah No. 1/tahun 1970	245
6. Pendjelasan Peraturan Pemerintah No. 1/tahun 1970 . .	309
7. Peraturan Pemerintah No. 2/tahun 1970	318
8. Pendjelasan Peraturan Pemerintah No. 2/tahun 1970 . .	339

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969
tentang
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN
PERMUSJAWARATAN/PERWAKILAN RAKJAT.
DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakjat atas dasar kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia perlu disusun Undang-undang Pemilihan Umum bagi Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, jang sesuai dengan tjita-tjita dan azas-azas demokrasi Pantja-Sila;
 - b. bahwa pemilihan umum bukan hanja sekedar bertudjuan untuk memilih wakil-wakil rakjat jang akan duduk dalam lembaga permusjawaratan/perwakilan sджа, melainkan merupakan suatu sarana untuk mentjapai kemenangan Orde Baru dalam mewujudkan penjusunan tata kehidupan jang didjiwai semangat Pantja-Sila/Undang-undang Dasar 1945;
- Mengingat :**
- 1. **Pembukaan Undang-undang Dasar, Pasal-pasal 1 ayat (2), 5 ayat (1) dan 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;**
 - 2. **Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara :**
 - a. Nomor XI/MPRS/1966;
 - b. Nomor XXI/MPRS/1966;
 - c. Nomor XXII/MPRS/1966;
 - d. Nomor XXV/MPRS/1966;
 - e. Nomor XLII/MPRS/1968;**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ;**

M e m u t u s k a n :

- Menetapkan :** **UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSJAWARATAN PERWAKILAN RAKJAT.**

B A B I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

- (1) Pemilihan umum untuk Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut D.P.R., Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I selanjutnya disebut D.P.R.D. I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II selanjutnya disebut D.P.R.D. II diselenggarakan setjara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Pemilihan umum jang diatur dalam Undang-undang ini adalah djuga untuk mengisi Madjelis Permusjawaratan Rakyat.

Pasal 2.

- (1) Warganegara Republik Indonesia bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanja atau jang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam „Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./P.K.I.” atau organisasi terlarang lainnja, tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih;
- (2) Organisasi-organisasi dilarang mentjalonkan orang jang tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih seperti jang dimaksud dalam ajat (1).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan ajat (2) mengakibatkan gugurnja tjalon jang bersangkutan.

Pasal 3.

Perentjanaan, penjelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan umum didasarkan atas azas-azas demokrasi jang didjiwai semangat Pantja-Sila/Undang-undang Dasar 1945.

B A B II.

DAERAH PEMILIHAN DAN DJUMLAH KURSI.

Pasal 4.

- (1)
 - a. Untuk pemilihan anggota D.P.R., daerah pemilihan adalah Daerah Tingkat I;
 - b. Untuk pemilihan anggota D.P.R.D. I, Daerah tingkat I merupakan 1 (satu) daerah pemilihan;
 - c. Untuk pemilihan anggota D.P.R.D. II, Daerah tingkat II merupakan 1 (satu) daerah pemilihan;
- (2) Warganegara Republik Indonesia jang berada diluar negeri dianggap

penduduk daerah pemilihan dimana berdiri gedung Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Pasal 5.

- (1) Jumlah anggota D.P.R. yang dipilih bagi tiap daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan imbangan jumlah penduduk yang terdapat dalam daerah pemilihan tersebut.
- (2) Hal yang termaktub dalam ayat (1) tidak mengurangi ketentuan bahwa :
 - a. jumlah wakil dalam tiap daerah pemilihan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Daerah Tingkat II, yang ada dalam daerah pemilihan yang bersangkutan ;
 - b. tiap Daerah Tingkat II sekurang-kurangnya mempunyai seorang wakil.
- (3) Untuk keperluan pemilihan umum Menteri Dalam Negeri dapat menetapkan pembagian Daerah Tingkat I yang belum terbagi dalam Daerah Tingkat II, dalam daerah-daerah administratif yang setingkat dengan Daerah Tingkat II.
- (4) Jumlah anggota dalam daerah pemilihan yang terbagi dalam daerah-daerah administratif seperti yang termaksud dalam ayat (3) ditetapkan 8 (delapan) anggota tanpa mengurangi jiwa ketentuan ayat (1) dan ayat (2) sub b.
- (5) Jumlah anggota D.P.R.D. yang dipilih ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 6.

Jumlah anggota D.P.R. yang dipilih dalam pemilihan umum di Djawa ditentukan seimbang dengan jumlah anggota yang dipilih diluar Djawa

B A B III.

PELAKSANAAN/PENJELENGGARAAN DAN ORGANISASI.

Pasal 7.

- (1) Pemungutan suara dalam pemilihan umum masing-masing untuk D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II dilakukan serentak setjara berturut-turut dalam satu hari.

- (2) Dalam keadaan seperti termaksud dalam pasal 30 dan pasal 31, pelaksanaan ayat (1) pasal ini untuk seluruh Indonesia diselesaikan dalam jangka waktu tiga bulan.

Pasal 8.

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan oleh Pemerintah dibawah pimpinan Presiden.
- (2) Dalam penyelenggaraan sehari-hari seorang pejabat dapat ditunjuk oleh Presiden untuk melaksanakan pimpinan pemilihan umum tersebut.
- (3) Untuk melaksanakan pemilihan umum Presiden membentuk sebuah Lembaga Pemilihan umum dengan diketuai Menteri Dalam Negeri, yang bertugas:
 - a. Mengadakan perentjanaan dan persiapan untuk melaksanakan pemilihan umum ;
 - b. Memimpin dan mengawasi Panitia-panitia termaksud dalam ayat (4) ;
 - c. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data-data tentang hasil pemilihan umum ;
 - d. Mengerdjakan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan pemilihan umum.
- (4) Pada Lembaga Pemilihan Umum diadakan :
 - a. Panitia Pemilihan Indonesia, yang berkedudukan di Djakarta, dengan tugas :
 - (i) merentjanakan dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum untuk D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II ;
 - (ii) menjelenggarakan pemilihan umum untuk D.P.R.
 - b. Panitia Pemilihan Daerah tingkat I, yang berkedudukan di Ibukota Daerah Propinsi, dengan tugas :
 - (i) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Indonesia ;
 - (ii) mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum untuk pemilihan anggota D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II ;
 - (iii) menjelenggarakan pemilihan umum untuk D.P.R.D. I.
 - c. Panitia Pemilihan Daerah tingkat II, yang berkedudukan di Ibukota Daerah tingkat II, dengan tugas :
 - (i) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;
 - (ii) menjelenggarakan pemilihan umum untuk D.P.R.D. II;

- d. Panitia Pemungutan Suara, yang berkedudukan di Ibukota Ketjamatan, dengan tugas :
 - (i) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah tingkat II;
 - (ii) menjelenggarakan pemungutan suara.
 - e. Panitia Pendaftaran Pemilih ditiap-tiap Desa/atau Daerah yang setingkat dengan Desa ditempat kedudukan Lurah atau Kepala Desa/daerah yang setingkat dengan Desa dengan tugas:
 - (i) membantu tugas-tugas Panitia Pemungutan Suara;
 - (ii) menjelenggarakan pendaftaran pemilih.
- (5) Menteri Dalam Negeri, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota/Kepala Daerah tingkat II, Tjamat/Kepala Ketjamatan dan Lurah/Kepala Desa/Daerah yang setingkat dengan Desa karena jabatannya, masing-masing menjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih.
 - (6)
 - a. Anggota-anggota Panitia Pemilihan Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri ;
 - b. Anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah tingkat I dan II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur/Kepala Daerah tingkat I;
 - c. Anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah tingkat II atas usul Tjamat.
 - (7) Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan dan sebuah Sekretariat.
 - (8) Presiden memberikan ketentuan terakhir apabila dalam Lembaga Pemilihan Umum mengenai suatu persoalan tidak terdapat keserasian.
 - (9) Dalam tugas operasionalnya Lembaga Pemilihan Umum adalah otonom dan administratif termasuk Departemen Dalam Negeri.
 - (10) Susunan, tata kerja, pembentukan dan hal-hal lain mengenai Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia-panitia tersebut dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B A B IV.

HAK MEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH.

Pasal 9.

Warganegara Republik Indonesia, jang pada waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum sudah genap berumur 17 tahun atau sudah kawin terlebih dulu mempunyai hak memilih.

Pasal 10.

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, seorang warganegara Republik Indonesia harus terdaftar dalam daftar pemilih.
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanja atau bukan seseorang jang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam „Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./P.K.I.” atau organisasi terlarang lainnja ;
 - b. njata-njata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannja;
 - c. tidak sedang mendjalani pidana pendjara atau pidana kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan jang tidak dapat diubah lagi, karena tindak pidana jang dikenakan antjaman pidana sekurang-kurangnya lima tahun.
 - d. tidak sedang ditjabut hak pilihnja berdasarkan keputusan Pengadilan jang tidak dapat diubah lagi.

Pasal 11.

Anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih.

Pasal 12.

- (1) Pemerintah memberitahukan kepada Lembaga Pemilihan Umum nama-nama orang bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanja atau jang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam „Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./P.K.I.” atau organisasi terlarang lainnja.

- (2) Menteri Kehakiman memberitahukan kepada Lembaga Pemilihan Umum tiap-tiap keputusan Pengadilan yang mengakibatkan seseorang ditjabut hak pilihnja.

Pasal 13.

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih termaksud dalam pasal 8 ayat (4).
- (2) Pemilih didaftar dalam satu daftar pemilih menurut Desa atau daerah yang setingkat dengan Desa, dimana ia bertempat tinggal.
- (3) Pemilih yang bertempat tinggal diluar negeri didaftar dalam daftar pemilih ditempat kedudukan Kepala Perwakilan Republik Indonesia dinegeri yang bersangkutan.
- (4) Seorang pemilih hanya dapat didaftar dalam satu daftar pemilih, dan jika seseorang pemilih mempunyai lebih dari satu tempat tinggal ia harus memilih satu diantaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang pasti. Apabila kemudian ternyata bahwa ia terdaftar dalam lebih satu daftar pemilih, maka ia tidak dapat mempergunakan hak memilihnja.
- (5) Setiap pemilih berkewajiban memberitahukan kepada Kepala Desanja atau Kepala daerah yang setingkat dengan Desa atau bagi mereka yang bertempat tinggal diluar negeri kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan, tentang segala hal yang dapat mengakibatkan perubahan pada daftar pemilih bagi dirinya sebagai pemilih.
- (6) Sesudah pendaftaran pemilih selesai dilakukan, Panitia Pendaftaran Pemilih mengumumkan daftar nama-nama pemilih tersebut, untuk kemungkinan usul penjemputaannya dari penduduk dalam daerah pendaftaran tersebut.
- (7) Tata-tjara pendaftaran pemilih diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B A B V.

HAK DIPILIH DAN PENTJALONAN.

Pasal 14.

Anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak dipilih.

Pasal 15.

- (1) Jang dapat mengadjudkan tjalon untuk pemilihan umum adalah organisasi jang memenuhi sjarat tersebut dalam pasal 17 dan/atau pasal 34 ayat (1).
- (2) Seorang dapat ditjalonkan untuk beberapa djenis badan perwakilan dalam satu masa pemilihan umum.

Pasal 16.

Seorang tjalon harus memenuhi sjarat-sjarat sebagai berikut :

- a. Warganegara Republik Indonesia jang berusia 21 tahun keatas serta bertaqwa kepada Tuhan Jang Maha Esa ;
- b. Dapat berbahasa Indonesia dan tjakap menulis dan membatja huruf Latin ;
- c. Setia kepada Pantja-Sila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, kepada Undang-undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat.
- d. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanja atau bukan seseorang jang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam „Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./P.K.I.” atau organisasi terlarang lainnja ;
- e. Tidak sedang ditjabut hak pilihnja berdasarkan keputusan Pengadilan jang tidak dapat diubah lagi.
- f. Tidak sedang mendjalani pidana pendjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan jang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana jang dikenakan antjaman pidana sekurang-kurangnya 5 tahun ;
- g. Njata-njata tidak sedang terganggu djiwa-/ingatannja ;
- h. Terdaftar dalam daftar pilih ;
- i. Ditjalonkan menurut pasal 15.

Pasal 17.

- (1) Untuk mendjadi tjalon dalam pemilihan umum seorang harus diadjudkan oleh sesuatu organisasi.

- (2) Organisasi yang dapat mengajukan tjalon dalam pemilihan umum harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Bukan organisasi terlarang.
 - b. Bagi golongan Politik ialah Partai-partai Politik yang telah mendapat pengakuan berdasarkan Undang-undang tentang Kepartaian, Keor-masan dan Kekaryaan ;
 - c. Bagi golongan Karya ialah organisasi golongan Karya yang telah mendapat pengakuan berdasarkan Undang-undang yang dimaksud pada huruf b.
- (3) Dalam mengajukan tjalon, organisasi yang bersangkutan menjampaikan keterangan-keterangan yang menjatakan bahwa syarat-syarat tersebut dalam pasal 15 dan pasal 16 telah dipenuhi.

Pasal 18.

- (1) Dalam mengajukan tjalon untuk pemilihan anggota D.P.R. dan D.P.R.D. organisasi yang bersangkutan mengajukan nama dan tanda gambar organisasi.
- (2) Dalam pemilihan umum tidak boleh digunakan tanda gambar yang sama atau mirip dengan :
- a. Lambang Negara Republik Indonesia.
 - b. Lambang Negara Asing;
 - c. Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih ;
 - d. Bendera Kebangsaan Negara Asing ;
 - e. Gambar perseorangan.
- (3) Tanda gambar - tanda gambar dalam pemilihan umum tidak boleh sama, mirip atau dapat menimbulkan keragu-raguan bagi para pemilih.
- (4) Apabila diadakan lebih dari satu tanda gambar yang sama, mirip atau dapat menimbulkan keragu-raguan untuk para pemilih, Lembaga Pemilihan Umum memutuskan tanda gambar mana dapat disahkan setelah mendengar pihak-pihak yang mengadjukannya.
- (5) Nama tjalon, nama organisasi dan tanda gambar organisasi yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum diumumkan dalam Berita Negara dan melalui media pengumuman lainnya setjara luas dan efektif.

- (6) Nama tjalon dan tanda gambar jang ditolak diberitahukan kepada jang berkepentingan serta kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan nama tjalon atau tanda gambar jang lain dalam djangka waktu jang ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 19.

- (1) Tata tjara pentjalonan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Seorang tjalon diadjukan dengan tjara mengisi surat isian (formulir).
 - b. Surat isian tersebut ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya dua orang anggota pimpinan organisasi masing-masing jang bersangkutan.
 - c. Surat isian jang dimaksud pada huruf a dan huruf b antara lain dilengkapi dengan :
 - (i) nama dan tanda gambar organisasi jang dipergunakan sebagai lambang dalam pemilihan umum berikut surat pengesahan dari Lembaga Pemilihan Umum ;
 - (ii) riwayat hidup dan riwayat perdjuaan tjalon jang dikuatkan oleh sekurang-kurangnya dua orang anggota pimpinan organisasi.
 - (iii) surat pernyataan dari tjalon tentang kesediaannya untuk ditjalonkan serta persetudjuannya mengenai tempat jang diberikan dalam tata urutan pada daftar tjalon.
- (2) Daftar tjalon dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi jang mengadakan tjalon termaksud.
- (3) Antara organisasi golongan Politik/Karya dapat diadakan penggabungan suaranya untuk diperhitungkan dalam pembagian kursi. Keinginan penggabungan suara itu harus dinjatakan oleh organisasi jang mengemukakan daftar tjalon didalam surat isian untuk pentjalonan dan djuga didalam daftar tjalon jang bersangkutan.
- (4) Daftar tjalon seperti dimaksud pada ayat (2) hanya boleh memuat nama-nama tjalon sebanjak-banjaknya dua kali djumlah anggota jang dipilih.
- (5) Tata-tjara pelaksanaan pentjalonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

B A B VI.
KAMPANJE PEMILIHAN.

Pasal 20.

- (1) Untuk penyelenggaraan pemilihan umum, dapat diadakan kampanye pemilihan.
- (2) Segala sesuatu mengenai penyelenggaraan kampanye pemilihan termasuk etika/tata krama dalam kampanye dan pembatasan waktu untuk kampanye diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B A B VII.

**PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN
SUARA.**

Pasal 21.

- (1) Pemungutan suara dalam daerah pemilihan diseluruh wilayah Indonesia untuk tiga djenis badan perwakilan dilakukan setjara serentak.
- (2) Pemungutan suara diluar negeri diadakan ditempat Perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan setjara serentak sesuai dengan pemungutan suara didalam negeri.
- (3) Panitia Pemungutan Suara menetapkan djumlah dan tempat pemungutan suara bagi daerah masing-masing sedemikian rupa, sehingga pemungutan suara dapat dilaksanakan setjara mudah dan lantjar.
- (4) Tempat pemungutan suara diatur sedemikian rupa, sehingga bagi setiap pemilih ada djaminan untuk dapat memberikan suara setjara bebas dan rahasia.
- (5) Untuk pemungutan suara dalam pemilihan umum masing-masing djenis badan perwakilan, dibuat surat suara jang bentuk, isi dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (6) Dalam pemilihan untuk D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II pemilih memberikan suaranya dengan mentjoblos salah satu tanda gambar organisasi jang dipilihnja jang terdapat dalam surat suara.

Pasal 22.

- (1) Segera setelah pemungutan suara berachir diadakan penghitungan suara ditempat pemungutan suara jang bersangkutan.

- (2) Para pemilih diperbolehkan hadir dan mengikuti jalannya penghitungan suara.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara, dan tata tjara penghitungan suara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

B A B VIII.

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN.

Pasal 23.

- (1) Untuk menetapkan hasil pemilihan bagi D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II digunakan sistim perwakilan berimbang.
- (2) Tata tjara pelaksanaan penetapan hasil pemilihan umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

B A B IX.

PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN DAN PEMBERI- TAHUAN KEPADA TERPILIH.

Pasal 24.

Pengumuman hasil pemilihan bagi D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II dan pemberitahuan kepada terpilih dilakukan oleh Lembaga Pemilihan Umum dengan tata tjara jang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B A B X.

PENGGANTIAN, PANITIA PEMERIKSAAN DAN PERMULAAN KEANGGOTAAN.

Pasal 25.

- (1) Penggantian bagi terpilih ditentukan menurut urutan penempatan dalam daftar tjalon.
- (2) Untuk tiap-tiap Badan Perwakilan Rakjat dibentuk Panitia Pemeriksaan jang bertugas menentukan tentang penerimaan seorang terpilih sebagai anggota dan permulaan keanggotaannya.
- (3) Hal-hal mengenai penggantian terpilih dan hal-hal jang berhubungan dengan Panitia Pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

B A B XI.

KETENTUAN PIDANA.

Pasal 26.

- (1) Barangsiapa dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun.
- (2) Barangsiapa meniru atau memalsu sesuatu surat, yang menurut suatu aturan dalam Undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan sesuatu perbuatan dalam pemilihan, dengan maksud untuk dipergunakan sendiri atau oleh orang lain sebagai surat sah dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dengan mengetahui bahwa sesuatu surat dimaksud dalam ayat (2) adalah tidak sah atau dipalsukan, mempergunakannya atau menjuruh orang lain mempergunakannya, sebagai surat yang sah dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 27.

- (1) Barangsiapa dengan sengaja mengatjaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalan pemilihan yang diselenggarakan menurut Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (2) Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut Undang-undang ini dengan sengaja dan dengan kekerasan atau dengan antjaman kekerasan menghalang-halangi seseorang akan melakukan haknya memilih dengan bebas dan tidak terganggu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut Undang-undang ini dengan pemberian atau djanji menjual seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya itu untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan tjara tertentu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang karena menerima suap berupa pemberian atau djanji berbuat sesuatu.

- (4) Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut Undang-undang ini melakukan sesuatu perbuatan tipu muslihat yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau orang lain daripada orang yang dimaksudkan oleh pemilih itu menjadi terpilih, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun.
- (5) Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam pemilihan menurut Undang-undang ini dengan mengaku dirinya sebagai orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (6) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (7) Barangsiapa memberikan suaranya lebih daripada yang ditetapkan dalam Undang-undang ini dalam satu pemilihan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (8) Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut Undang-undang ini dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan, atau melakukan sesuatu perbuatan tipu muslihat, yang menyebabkan hasil pemungutan suara itu menjadi lain daripada yang harus diperoleh dengan suara-suara yang diberikan dengan sah, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (9) Seorang madjikan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerdja untuk memberikan suaranya tanpa alasan bahwa pekerjaan daripada pekerdja itu tidak memungkinkannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan.
- (10) Seorang penjelenggara pemilihan umum yang melalaikan kewajibannya dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya seribu rupiah.

Pasal 28.

Tindak pidana yang termaksud dalam pasal 26 dan pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (8) adalah kejahatan.

Tindak pidana yang termaksud dalam pasal 27 ayat (9) dan ayat (10) adalah pelanggaran.

Pasal 29.

Dalam menjatuhkan pidana atas perbuatan-perbuatan tertjantum dalam pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) surat-surat yang dipergunakan dalam tindak pidana itu,

beserta benda-benda dan barang jang menurut sifatnja diperuntukkan guna meniru atau mamalsu surat-surat itu, dirampas dan dimusnahkan, djuga kalau surat-surat, benda-benda atau barang itu bukan kepunjaan terpidana.

B A B XII.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30.

Apabila disesuatu tempat didalam sesuatu daerah pemilihan sesudah diadakan penelitian dan pemeriksaan ternyata terdapat kekeliruan, kesalahan atau hal-hal lain jang mengakibatkan tidak dapat dilakukan penghitungan suara, maka Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II jang bersangkutan dengan mengingat ketentuan batas waktu jang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dengan dikuatkan oleh instansi Pemerintah Daerah setempat dapat mengadakan pemilihan ulangan ditempat jang bersangkutan.

Pasal 31.

Apabila disesuatu tempat didalam suatu Daerah Pemilihan pada waktu jang telah ditetapkan tidak dapat diselenggarakan pemilihan umum atau penjelegaraannja terhenti disebabkan oleh keadaan jang memaksa, maka sesudah keadaan memungkinkan, segera diadakan pemilihan susulan atau pemilihan ulangan ditempat jang bersangkutan dengan mengingat ketentuan batas-waktu jang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2).

B A B XIII.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan tidak mengurangi ketentuan jang tersebut dalam Undang-undang tentang Susunan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, Badan-badan Perwakilan Rakjat jang lain dibubarkan pada hari Badan-badan Perwakilan Rakjat jang baru mendjalankan tugas dan-wewenangnja.

Pasal 33

Setelah Lembaga Pemilihan Umum beserta aparaturnja dibentuk berdasarkan Undang-undang ini, maka Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum jang lama dibubarkan dan segala kekajaannja diserahkan kepada Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 34

- (1) Organisasi-organisasi golongan politik jang ada dan diakui serta organisasi-organisasi golongan Karya jang sudah mempunjai perwakilan di D.P.R dan/atau di D.P.R.G.R. pada saat pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan Undang-undang ini dapat ikut serta dalam pemilihan umum.
- (2). Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi golongan Karya jang akan diangkat.

B A B XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Segala sesuatu jang belum diatur didalam Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36.

Segala peraturan perundang-undangan jang bertentangan dengan Undang-undang ini dinjatakan tidak berlaku.

Pasal 37.

Undang-undang ini disebut Undang-undang Pemilihan Umum dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 17 Desember 1969.

Presiden Republik Indonesia.
ttd.

SOEHARTO

Djenderal T.N.I

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 17 Desember 1969.

Sekretaris Negara Republik Indonesia.

ttd.

ALAMSJAH

Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 58.

P E N D J E L A S A N
ATAS
UNDANG-UNDANG No. 15 TAHUN 1969

tentang

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN
PERMUSJAWARATAN/PERWAKILAN RAKJAT.

I. U M U M .

1. Dasar Pikiran.

Negara Republik Indonesia adalah negara jang berkedaualatan rakjat seperti tertjantum dalam Undang-undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan azas-azas Pantjasila terutama dasar kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebedjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan dibentuk lembaga-lembaga permusjawaratan/perwakilan rakjat jang harus membawakan suara hati nurani rakjat. Oleh karena itu maka tjara pengisian lembaga-lembaga tersebut jang sesuai dengan azas-azas demokrasi Pantjasila ialah dengan pelaksanaan pemilihan umum.

Pemilihan umum adalah sarana jang bersifat demokratis untuk membentuk sistim kekuasaan negara jang berkedaualatan rakjat dan permusjawaratan perwakilan jang digariskan oleh Undang-undang Dasar Negara jang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan jang lahir dari bawah menurut kehendak rakjat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakjat, oleh rakjat, menurut sistim permusjawaratan perwakilan.

Hanja kekuasaan negara jang demikian akan benar-benar memantjar kebawah sebagai kewibawaan jang mampu memelihara budi pekerti kemanusiaan jang luhur, serta tetap memegang teguh tjiri-tjiri moral rakjat jang luhur.

2. Tudjuan Pemilihan Umum.

Dalam mewujudkan penjusunan tata-kehidupan jang didjiwai semangat tjita-tjita Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia Proklamasi 17

Agustus 1945 sebagaimana tersebut dalam Pantja-Sila/Undang-undang Dasar 45, maka penjurusan tata-kehidupan itu harus dilakukan dengan jalan pemilihan umum.

Dengan demikian, diadakannya pemilihan umum itu tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan saja, dan juga tidak memilih wakil-wakil rakyat untuk menjusun negara baru dengan dasar falsafah negara baru, tetapi suatu pemilihan wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan, dan mengembangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945 guna memenuhi dan mengemban Amanat Penderitaan Rakyat.

Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus menjamin suksesnya perjuangan Orde Baru, yaitu tetap tegaknya Pantja-Sila dan dipertahankannya Undang-undang Dasar 1945.

3. Azas Pemilihan.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum, maka pemilihan umum anggota-anggota badan permusyawaratan/perwakilan rakyat yang diatur dengan Undang-undang ini didasarkan pada azas pemilihan yang bersifat umum, langsung, bebas dan rahasia.

Jang dimaksud dengan pemilihan yang bersifat:

a. Umum.

ialah bahwa pada dasarnya semua warganegara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu telah berusia 17 tahun atau telah kawin berhak ikut memilih didalam pemilihan, dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih.

Djadi pemilihan bersifat umum berarti pemilihan yang berlaku menjeluruh bagi setiap/semua warganegara, menurut persyaratan azasi (basic) tertentu, seperti tersebut diatas.

Persyaratan lain-lain, jang tehnik atau politis, tidaklah dihubungkan dengan adanya pemilihan, tetapi se-mata2 dihubungkan dengan praktek pelaksanaannya dan tujuan pemilihan serta fungsi badan/lembaga jang disusun.

b. **Langsung.**

Ialah bahwa rakyat memilih mempunyai hak untuk setjara langsung memberikan suaranya, menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.

c. **Bebas.**

Ialah bahwa tiap warganegara jang berhak memilih dalam menggunakan haknya didjamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.

d. **Rahasia.**

Ialah bahwa para memilih didjamin oleh peraturan, tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun, siapapun siapa jang dipilihnya.

Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).

4. **Sistim Pemilihan.**

Untuk pemilihan anggota DPR dan D.P.R.D. dipakai sistim perwakilan berimbang dengan stelsel daftar. Dengan demikian maka besarnya/kekuatan perwakilan organisasi dalam D.P.R. dan D.P.R.D. adalah sedjauh mungkin berimbang dengan besarnya dukungan dalam masyarakat memilih. Untuk mentjapai tujuan ini suatu organisasi jang namanya tjalannya disusun dalam sesuatu daftar tjalon mendapat jumlah kursi berdasarkan suatu bilangan Pembagi Pemilihan, ialah suatu-bilangan jang diperoleh dengan membagi jumlah seluruh suara jang masuk dengan jumlah kursi jang tersedia.

Sistim daftar.

Begitu pula sistim pemilihan umum menggambarkan adanya pengakuan terhadap stelsel organisasi yang ikut serta dalam kehidupan ketata-negaraan.

Tiap-tiap daerah tingkat II mendapat sekurang-kurangnya seorang wakil, yang ditetapkan berdasarkan sistim perwakilan berimbang yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. Penetapan jumlah anggota dalam pemilihan umum.

Dari jumlah anggota D.P.R. sebanyak 460, maka yang dipilih berdasarkan pemilihan umum adalah 360 dan yang diangkat adalah 100. Untuk menentukan besarnya wakil dalam tiap-tiap daerah pemilihan diwilayah Republik Indonesia, maka untuk pemilihan anggota D.P.R. daerah pemilihan adalah Daerah tingkat I. Untuk menentukan banyaknya wakil dalam tiap daerah pemilihan dipakai dasar perhitungan tiap-tiap sekurang-kurangnya 400.000 penduduk memperoleh seorang wakil, dengan ketentuan bahwa tiap-tiap daerah pemilihan mempunyai wakil sekurang-kurangnya sebanyak Daerah tingkat II yang terdapat dalam Daerah tingkat I tersebut, dan tiap-tiap Daerah tingkat II mempunyai sekurang-kurangnya seorang wakil.

Ketentuan-ketentuan selanjutnya tentang tjara pembagian jumlah 360 kursi kepada Daerah tingkat II – Daerah tingkat II diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6. Keseimbangan antara jumlah anggota D.P.R. yang dipilih di Djawa—dan diluar Djawa.

Undang-undang ini menentukan bahwa jumlah anggota D.P.R. yang dipilih dalam pemilihan umum di Djawa ditentukan seimbang dengan jumlah anggota yang dipilih diluar Djawa (pasal 6).

Untuk menentukan banyaknya wakil yang dipilih di tiap-tiap Daerah tingkat I dipakai dasar perhitungan tiap-tiap sekurang-kurangnya 400.000 penduduk dalam Daerah tingkat I memperoleh seorang wakil. Apabila dalam pemilihan umum dipergunakan dasar jumlah penduduk, maka jumlah wakil yang dipilih dari pulau Djawa akan banyak melebihi wakil dari luar Djawa. Mengingat luas dan potensinya daerah-daerah diluar Djawa yang jumlah penduduknya kurang dari pa-

da Djawa, maka perlu kiranya daerah luar Djawa tersebut mendapat perwakilan sesuai dengan kepentingannya daerah tersebut.

Karena itu dalam pasal 5 ayat (2) diadakan ketentuan bahwa:

- a. Jumlah wakil dalam tiap daerah pemilihan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Daerah tingkat II yang ada dalam daerah pemilihan yang bersangkutan.
- b. Tiap Daerah tingkat II sekurang-kurangnya mempunyai seorang wakil.

Dengan mengadakan kombinasi antara banyaknya penduduk di Daerah tingkat I dan jumlah wakil dalam tiap daerah pemilihan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Daerah tingkat II, yang ada dalam daerah pemilihan yang bersangkutan dan tiap Daerah tingkat II sekurang-kurangnya mempunyai seorang wakil, maka sedikit banyak akan terjamin keseimbangan antara wakil-wakil yang berasal dari pulau Djawa dengan luar Djawa.

7. Ketentuan peralihan mengenai pentjalonan.

Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara nomor XI/MPRS/1966 menentukan bahwa susunan D.P.R. dan D.P.R.D terdiri dari golongan politik dan karya.

Berhubung dengan itu dalam pasal 17 diadakan ketentuan bahwa seorang tjalon dalam pemilihan umum harus diadjudkan oleh sesuatu organisasi yang harus memenuhi syarat:

- a. bukan organisasi terlarang;
- b. bagi golongan Politik dan golongan Karya yang telah memperoleh pengakuan berdasarkan Undang-undang tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan.

Melihat peranan dari organisasi-organisasi baik golongan Politik maupun golongan Karya dalam kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan sekarang maka untuk pemilihan kali ini diadakan ketentuan pemilihan tersendiri jaitu: Organisasi-organisasi golongan Politik yang ada dan diakui serta organisasi-organisasi golongan Karya yang sudah mempunyai perwakilan di D.P.R.G.R. dan/atau D.P.R.D.G.R. pada saat pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan Undang-undang ini dapat ikut serta dalam pemilihan umum.

8. A.B.R.I.

Mengingat dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial yang harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal dan pengaman Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945 yang kuat dan sentosa, maka bagi ABRI diadakan ketentuan tersendiri.

Fungsi dan tujuan ABRI seperti tersebut diatas tidak akan tertjapai jika anggota ABRI berkelompok-kelompok, berlain-lainan pilihan dan pendukungnya terhadap golongan-golongan dalam masyarakat.

Karena itu maka anggota-anggota ABRI tidak menggunakan hak memilih dan hak dipilih, tetapi mempunyai wakil-wakilnya dalam lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat dengan melalui pengangkatan.

Duduknya ABRI dalam lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan melalui pengangkatan dimungkinkan oleh demokrasi Pantja-Sila yang menghendaki ikut sertanya segala kekuatan dalam masyarakat representatif dalam lembaga-lembaga tersebut.

9. G.30.S./P.K.I.

Demi tetap tegak berlangsungnya kemurnian kehidupan demokrasi berdasarkan Pantja-Sila/Undang-undang Dasar 1945 dan mengingat, tujuan pemilihan umum yang hendak ditjapai sebagaimana diuraikan diatas, maka hal memilih dan hak dipilih bagi bekas anggota G.30.S./PKI yang jelas anti demokrasi harus dibatalkan/ditjabut. Pembatalan/pentjabutan hak ikut serta dalam pemilihan umum bagi bekas anggota P.K.I. termasuk organisasi-organisasi massanya didasarkan atas pendirian, bahwa adalah suatu hak demokrasi untuk menyatakan bahwa suatu organisasi yang mempergunakan kekerasan sebagai suatu sarana untuk mentjapai tujuannya dan yang bertujuan menghantjurkan demokrasi itu sendiri tidak mempunyai hak hidup dalam suatu negara demokrasi, karena itu mereka tidak diperkenankan mengengjam hak-hak demokrasi yang hendak dihantjurkan sendiri. Karena itu pula mereka tidak diperkenankan ikut serta dalam pembentukan pemerintahan dan mempunyai perwakilan dalam pemerintahan.

Dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor XXV/MPRS/1966 Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) termasuk orga-

nisasi-organisasi massanya telah dibubarkan dan dinjatakan terlarang diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut paham atau ajaran Komunisme/Marxisme Leninisme, khususnya P.K.I. telah nyata-nyata tidak mengakui azas-azas demokrasi dan adalah musuh-musuh Pantja-Sila. Djelas sudah pengkhianatan orang-orang komunis Indonesia, yang telah dilakukan beberapa kali antara lain dalam kesatuan Front Demokrasi Rakyat di Madiun pada tahun 1948 dan Gerakan 30 September/P.K.I., terhadap perjuangan rakyat-Indonesia mempertahankan dan mengisi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas Pantja-Sila.

Penghapusan dan pentjabutan hak untuk memilih dan dipilih mereka itu adalah kewaspadaan kita yang tidak ingin dikhianati lagi, misalnya berupa gerilja politik dan ekonomi jika mereka ikut serta dalam pemilihan. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka dalam Undang-undang Pemilihan Umum ini warganegara Republik Indonesia bekas anggota organisasi terlarang P.K.I. termasuk organisasi massa—nya, atau yang terlibat langsung atau tak langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/P.K.I., atau organisasi terlarang lainnya tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

- (1) Tjukup djelas.
- (2) Undang-undang Dasar 1945 pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Majelis Permusjawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota D.P.R. ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan.
Oleh karena itu pemilihan umum yang diatur dengan Undang-undang ini, khususnya untuk anggota D.P.R. adalah juga untuk mengisi Majelis Permusjawaratan Rakyat.

Pasal 2.

- (1) Mengenai pentjabutan hak pilih baik yang berupa hak memilih, mau-

pun hak dipilih bagi bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia telah dijelaskan dalam Pendjelasan Umum.

Jang dimaksud dengan "terlibat setjara langsung" dalam G.30.S./P.K.I. ialah:

1. Mereka jang merentjanakan, turut merentjanakan, atau mengetahui adanya perentjanaaan Gerakan Kontra Revolusi itu, tetapi tidak melaporkan kepada pedjabat jang berwadajib.
2. Mereka jang dengan kesadaran akan tudjuannya, melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Gerakan Kontra Revolusi tersebut.

Jang dimaksud dengan "terlibat setjara tidak langsung" dalam G.30.S./P.K.I. ialah:

1. Mereka jang menundjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam utjapan-utjapan jang bersifat menjetudjui Gerakan Kontra Revolusi tersebut;
2. Mereka jang setjara sadar menundjukkan, baik dalam perbuatan atau dalam utjapan jang menentang usaha/gerakan penumpasan G.30.S./P.K.I'

Jang dimaksud dengan organisasi terlarang pasal ini ialah organisasi-organisasi jang tegas-tegas dinjatakan terlarang dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka jang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan telah mendapat amnesti atau abolisi atau grasi.

- (2) Tjukup djelas.
- (3) Apabila ternjata ada organisasi jang mentjalonkan orang jang dimaksud pada ayat (1), maka ini berakibat gugurnja tjalon, dan ini berarti tjalon tersebut tidak dapat diganti dengan tjalon lain. Tetapi apabila pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) baru diketahui setelah tjalon itu terpilih, maka ia diganti oleh tjalon berikut dalam urutan daftar tjalon jang bersangkutan.

Pasal 3.

Tjukup djelas.

Pasal 4.

Lihat pendjelasan pasal 21.

Pasal 5.

(1) dan (2) Telah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum.

(3) dan (4) Pembagian daerah tingkat I dalam daerah administratif untuk keperluan pemilihan umum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Daerah tingkat I jang belum terbagi dalam daerah tingkat II otonom ialah Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya. Karena perimbangan penduduk merupakan salah satu sjarat penetapan djumlah anggota dengan mengingat ketentuan bahwa tiap-tiap sekurang-kurangnya 400.000 penduduk memperoleh seorang wakil, maka daerah pemilihan termaksud dalam ayat (4) jang berpenduduk lebih dari 8 x 400.000 dapat memperoleh lebih dari 8 orang wakil.

Pasal 6.

Telah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum.

Pasal 7.

(1) Tjukup djelas.

(2) Pada prinsipnja pemunggutan suara untuk seluruh Indonesia diselenggarakan pada hari dan tanggal jang sama. Berhubung dengan adanya kemungkinan bahwa pemunggutan suara untuk suatu daerah tidak dapat diselenggarakan pada hari dan tanggal jang sudah ditentukan karena adanya kesukaran-kesukaran tehnik, keadaan daerah jang berbedabeda dan lain-lain, termasuk adanya kemungkinan pemunggutan suara ulangan/susulan, maka pemunggutan suara didaerah itu dapat dilaksanakan pada hari dan tanggal jang lain. Walaupun demikian pemunggutan suara untuk pemilihan umum bagi ketiga badan perwakilan diseluruh Indonesia harus sudah selesai dalam djangka waktu tiga bulan.

Pasal 8.

(1) Ketentuan ini sesuai dengan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara nomor XI/MPRS/1966, jang menugaskan kepada Pemerintah untuk melaksanakan ketetapan tentang pemilihan umum.

(2) Tjukup djelas.

(3) dan (4) Pada lembaga Pemilihan Umum diadakan Panitia-panitia jang ikut menjelenggarakan pemilihan umum disamping tugas lain jang disebut dalam ajat tersebut. Lembaga Pemilihan Umum menentukan kebidjaksanaannja tentang pelaksanaan pemilihan—umum, sedangkan penjelenggaraan pemilihan umum itu diserahkan kepada Panitia-panitia tersebut.

Dalam Panitia-panitia, baik di Pusat maupun di Daerah, diikutsertakan sebagai anggota kekuatan-kekuatan sosial jang pada pokoknja berupa organisasi partai Politik dan organisasi Golongan Karya.

(5) Jang dimaksud dengan daerah jang setingkat dengan Desa ialah antara lain Marga (di Sumatera), Temenggungan (di Kalimantan), Wana (di Sulawesi), Negerij (di Maluku dan Irian Barat).

Jang dimaksud dengan Kepala Ketjamatan antara lain di daerah Istimewa Jogjakarta ialah Asisten/Mantri Wilajah Pamong Pradja, di Maluku Bestuur Asisten dan di Bali Punggawa.

(6) Tjukup djelas.

(7) dan (8) Susunan dari Lembaga Pemilihan Umum, jang terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan dan sebuah Sekretariat, menggambarkan ikut-sertanja kekuatan-kekuatan sosial dalam pelaksanaan pemilihan umum, jang oleh M.P.R.S. ditugaskan kepada Pemerintah.

Maka dihimpunlah kekuatan-kekuatan sosial tersebut dalam Dewan Pertimbangan, jang atas permintaan atau atas prakarsa sendiri memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai per-

soalan-persoalan yang pokok sifatnja kepada Dewan Pimpinan yang terdiri dari anggota-anggota Pemerintah.

Pada hakekatnja, pertimbangan-pertimbangan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan Dewan Pimpinan dalam mengambil keputusan dan menggariskan kebidjaksanaan. Maka bergeraklah Dewan Pimpinan dan Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan bersama-sama dengan pertanggungan-djawab dibidang masing-masing untuk menghasilkan pemilihan umum yang demokratis. Dimana tidak dapat dihindarkan, bahwa mengenai persoalan pokok yang dibicarakan bersama tidak terdapat keserasian antara pertimbangan-pertimbangan yang diberikan dan keputusan serta kebidjaksanaan yang diambil oleh Dewan Pimpinan, maka persoalan tersebut diajukan kepada Presiden sebagai pemimpin tertinggi dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Dalam hal demikian, Ketua Lembaga Pemilihan Umum mempertanggung-djawabkan keputusan serta kebidjaksanaannya kepada Presiden dan melaporkan pertimbangan dari Dewan/anggota-anggota Pertimbangan. Setelah mendengar persoalan tersebut Presiden memberikan ketentuan terakhir terhadap keputusan/kebidjaksanaan dan pertimbangan yang bersangkutan. Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum dipimpin oleh Sekretaris Umum.

- (9) Agar supaya dalam pelaksanaan tugasnya ada keleluasaan bergerak tanpa terikat pada tugas-tugas departemen, maka kepada Lembaga Pemilihan Umum diberikan tugas yang bersifat otonom.

Hal demikian tidak mengurangi ketentuan, bahwa pada akhirnya Presidenlah yang memegang pimpinan tertinggi dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Dengan tidak mengurangi sifat otonom dari Lembaga Pemilihan Umum dan pula untuk dapat memudahkan dan melantarkan pelaksanaan tugasnya, maka administratif ia termasuk Departemen Dalam Negeri, yang dapat mengadakan penediaan dalam bidang keuangan, materiil dan personil.

- (10) Penentuan tugas/wewenang telah diatur dalam Undang-undang ini, sehingga susunan, tata kerdja, pembentukan dan hal-hal lain mengenai Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia-panitia tersebut dapat diserahkan pengaturannya kepada Peraturan Pemerintah.

Pasal 9.

Berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, maka warga-negara Republik Indonesia jang telah mentjapai umur 17 tahun, ternjata sudah mempunjai pertanggungan djawab politik terhadap Negara dan masjarakat, sehingga sewadarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnja dalam pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakjat.

Pasal 10.

- (1) Tjukup djelas.
(2) Jang dimaksud dengan pilih adalah hak memilih dan atau hak dipilih.

Pasal 11.

Telah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum.

Pasal 12.

- (1) Menteri Dalam negeri atau pedjabat jang ditundjuknja memberikan daftar nama orang-orang jang dimaksud dalam ajat ini.
Hal-hal lain tentang pemberitahuan nama-nama orang jang dimaksud diatas diatur oleh Pemerintah.
(2) Tjukup djelas.

Pasal 13.

Tjukup djelas.

Pasal 14.

Telah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum.

Pasal 15.

- (1) Tjukup djelas.
- (2) Berhubung tidak adanja persjaratan tempat tinggal bagi seorang tjalon maka seorang dapat ditjalonkan untuk beberapa djenis badan perwakilan dalam satu masa pemilihan umum misalnja untuk D.P.R. dengan D.P.R.D. I/D.P.R.D. II.

Pasal 16.

Tjukup djelas.

Pasal 17.

- (1) Tjukup djelas.
- (2) Ketentuan jang termaktub dalam ajat ini tidak mengurangi ketentuan jang dimaksud dalam pasal 15 ajat (1).
- (3) Tjukup djelas.

Pasal 18.

- (1) Tjukup djelas.
- (2) Tjukup djelas.
- (3) Tjukup djelas.
- (4) Dalam hal diadakan lebih dari satu tanda gambar jang sama, mirip atau dapat menimbulkan keragu-raguan untuk para pemilih, Lembaga Pemilihan memutuskan tanda gambar mana dapat disahkan setelah mendengar pihak-pihak jang mengadjukannya antara lain dengan memperhatikan pihak mana jang sudah lazim mempergunakan tanda gambar tersebut.
- (5) Tjukup djelas.
- (6) Tjukup djelas.

Pasal 19.

Tjukup djelas.

Pasal 20.

- (1) Tjukup djelas.
- (2) Untuk menghindarkan eksese kampanje pemilihan umum, maka perlu diadakan suatu tata krama kampanje dan pembatasan waktu untuk kampanje.

Pasal 21.

- (1) Tjukup djelas.
- (2) Ditempat kedudukan Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri dibentuk Panitia Pemunggutan Suara. Pemunggutan suara bagi warganegara Republik Indonesia jang bertempat tinggal diluar-negeri, dilakukan dengan persetujuan negara jang bersangkutan. Hasil pemunggutan suara warganegara Republik Indonesia diluar negeri-dihitung bersama-sama dengan hasil pemunggutan suara didalam negeri.
- (3) Tjukup djelas.
- (4) Tjukup djelas.
- (5) Tjukup djelas.
- (6) Tjukup djelas.

Pasal 22.

Tjukup djelas.

Pasal 23.

Telah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum.

Pasal 24.

Tjukup djelas.

Pasal 25.

Tjukup djelas.

Pasal 26.

Tjukup djelas.

Pasal 27.

Tjukup djelas.

Pasal 28.

Tjukup djelas.

Pasal 29

Tjukup djelas.

Pasal 30.

Tjukup djelas.

Pasal 31.

Tjukup djelas.

Pasal 32.

Tjukup djelas.

Pasal 33.

Tjukup djelas.

Pasal 34.

Tjukup djelas.

Pasal 35.

Tjukup djelas.

Pasal 36.

Tjukup djelas.

Pasal 37.

Tjukup djelas.

Tambahan Lembaran—Negara Republik Indonesia No. 2914.

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969

tentang

**SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN
RAKJAT, DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKJAT DAERAH.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan kedaulatan rakjat atas dasar kerakjatan seperti tertjantum dalam Pantja Sila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakjat itu diperlukan lembaga-lembaga permusjawaratan/perwakilan rakjat yang dibentuk dengan Pemilihan Umum;
- c. bahwa berhubung dengan itu dan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 19 ayat (1) Undang-undang Dasar dan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum jo nomor XLII/MPRS/1968 tentang perobahan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum, perlu segera dibentuk Undang-undang mengenai lembaga-lembaga tersebut.
- Mengingat** : 1. Pasal 1, pasal 2 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 19 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara :
- a. Nomor X/MPRS/1966;
- b. Nomor XI/MPRS/1966;
- c. Nomor XIX/MPRS/1966;

- d. Nomor XXII/MPRS/1966;
 - e. Nomor XLII/MPRS/1968;
3. Undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Anggota-anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat;
Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT, DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH.

B A B I.

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT.

1. SUSUNAN.

Pasal 1.

- (1) Madjelis Permusjawaratan Rakjat, selandjutnja disebut dengan singkatan M.P.R., terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan Utusan-utusan dari Daerah, Golongan Politik dan Golongan Karya.
- (2) Djumlah Anggota M.P.R. adalah dua kali lipat djumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakjat.
- (3) Anggota tambahan M.P.R. terdiri dari :
 - a. Utusan Daerah seperti tersebut dalam pasal 8;
 - b. Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya ditetapkan berdasarkan imbangan hasil Pemilihan Umum; Organisasi Golongan Politik/ Karya jang ikut Pemilihan Umum, tetapi tidak mendapat wakil di D.P.R. didjamin satu utusan di M.P.R. jang djumlah keseluruhannya tidak melebihi sepuluh orang utusan;

- c. Utusan Golongan Karya Angkatan Bersendjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata jang ditetapkan berdasarkan pengangkatan.
- (4) Djumlah anggota M.P.R. jang diangkat ditetapkan sebanjak sepertiga dari seluruh Anggota M.P.R. dan terdiri :
 - a. Anggota D.P.R. jang diangkat seperti tersebut dalam pasal 10 ayat (4) ;
 - b. Anggota tambahan M.P.R. dari Golongan Karya Angkatan Bersendjata seperti tersebut dalam ayat (3) huruf c jang pengangkatannja ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata ;
 - c. Anggota tambahan M.P.R. dari Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata seperti tersebut dalam ayat (3) huruf c diangkat oleh Presiden baik atas usul organisasi jang bersangkutan maupun atas prakarsa Presiden.
- (5) Djumlah Utusan Golongan Karya A.B.R.I. dan Golongan Karya bukan A.B.R.I. jang dimaksud dalam ayat (4) b dan c ditetapkan oleh Presiden.

2. KEANGGOTAAN.

Pasal 2.

- (1) Untuk dapat mendjadi anggota M.P.R. harus dipenuhi sjarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia jang telah berusia 21 tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Jang Maha Esa ;
 - b. Dapat berbahasa Indonesia dan tjakap menulis dan membatja huruf latin ;
 - c. Setia kepada Pantja-Sila sebagai Dasar dan ideologi Negara, kepada Undang-undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakjat ;
 - d. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanja atau bukan seseorang jang terlibat lang-

sung ataupun tak langsung dalam „Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./P.K.I.” atau organisasi terlarang lainnja ;

- e. Tidak sedang ditjabut hak pilihnja berdasarkan keputusan Pengadilan jang tidak dapat diubah lagi ;
 - f. Tidak sedang mendjalani pidana pendjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan jang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana jang dikenakan antjaman hukuman sekurang-kurangnja 5 tahun ;
 - g. Njata-njata tidak sedang terganggu djiwa/ingatannja.
- (2) Anggota M.P.R. harus bertempat tinggal didalam wilayah Republik Indonesia.
- (3) Keanggotaan M.P.R. diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3.

Masa djabatatan keanggotaan M.P.R. adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannja berachir.

Pasal 4.

- (1) Anggota M.P.R. berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
- a. meninggal dunia ;
 - b. atas permintaan sendiri setjara tertulis kepada Pimpinan M.P.R.;
 - c. bertempat tinggal diluar wilayah Negara Republik Indonesia ;
 - d. berhenti sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat ;
 - e. tidak memenuhi lagi sjarat-sjarat tersebut dalam pasal 2 ayat (1) berdasarkan keterangan jang berwadjib ;
 - f. dinjatakan melanggar sumpah/djandji sebagai anggota M.P.R. dengan keputusan M.P.R. ;
 - g. diganti menurut pasal 43 ;
 - h. terkena larangan perangkapan djabatatan menurut Bab V.

- (2) Anggota-anggota yang berhenti antar waktu menurut ayat (1) tempatnya diisi oleh :
 - a. tjalon dari organisasi yang bersangkutan ;
 - b. tjalon dari Pedjabat baik atas usul instansi/organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa pedjabat itu.
- (3) Anggota yang menggantikan antar waktu anggota lama, berhenti sebagai anggota pada saat anggota yang digantikannya itu seharusnya meletakkan djabatannya.
- (4) Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi lagi syarat pasal 2 ayat (1) huruf c, d, f dan karena alasan tersebut dalam pasal 4 ayat (1) huruf f adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 5.

Pemberhentian anggota M.P.R. diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 6.

- (1) Sebelum memangku djabatannya, anggota M.P.R. bersama-sama diambil sumpah/djandjinja menurut agamanya masing-masing oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna terbuka M.P.R.
- (2) Ketua M.P.R. atau anggota Pimpinan lainnya mengambil sumpah/djandji anggota M.P.R. yang belum diambil sumpah/djandji oleh Ketua Mahkamah Agung menurut ayat (1).

Pasal 7.

Bunyi sumpah/djandji dimaksud dalam pasal 6 adalah sebagai berikut :

„Saja bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Majelis Permusjawaratan Rakyat langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun djuga suatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya senantiasa akan mendjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakjat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pantja-Sila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturan-peraturan lain jang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memadjukan kesedjahteraan rakjat Indonesia dan bahwa saya akan setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia”.

3. UTUSAN DAERAH

Pasal 8.

- (1) Djumlah anggota tambahan M.P.R. jang berkedudukan sebagai Utusan Daerah adalah sekurang-kurangnya empat orang dan sebanjak-banjaknya tujuh orang untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Daerah Tingkat I jang berpenduduk kurang dari satu djuta orang mendapat empat orang utusan ;
 - b. Daerah Tingkat I jang berpenduduk satu djuta sampai lima djuta orang mendapat lima orang utusan ;
 - c. Daerah Tingkat I jang berpenduduk lima djuta sampai sepuluh djuta orang, mendapat enam orang utusan ;
 - d. Daerah Tingkat I jang berpenduduk sepuluh djuta keatas mendapat tujuh orang utusan .
- (2) Utusan Daerah termasuk Gubernur/Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat I.
- (3) Pelaksanaan ketentuan tersebut dalam ajat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- (4) Perhitungan djumlah Utusan Daerah dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat seperti termaktub dalam ajat (1), ditetapkan berdasarkan sensus terachir dengan memperhatikan perkembangan pada saat dilangsungkannya Pemilihan Umum.

4. PIMPINAN M.P.R.

Pasal 9.

- (1) Pimpinan M.P.R. terdiri atas seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua jang dipilih oleh dan diantara anggota M.P.R.
- (2) Tjara pemilihan anggota Pimpinan M.P.R. diatur dalam Peraturan Tata-Tertib M.P.R. jang dibuat oleh M.P.R. sendiri.
- (3) Selama Pimpinan M.P.R. belum ditetapkan, musjawarah-musjawarahnja untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota jang tertua usianja dan dibantu oleh anggota jang termuda usianja.

B A B II.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

5. SUSUNAN.

Pasal 10.

- (1) Dewan Perwakilan Rakjat selandjutnja disebut dengan singkatan D.P.R. terdiri dari anggota-anggota :
 - a. Golongan Politik ;
 - b. Golongan Karya ;
- (2) Pengisian keanggotaan D.P.R. dilakukan dengan tjara pemilihan umum dan pengangkatan.
- (3) Djumlah anggota D.P.R. ditetapkan sebanyak 460 (empat ratus enam-puluh) orang terdiri dari 360 (tigaratus enampuluh) orang dipilih dalam pemilihan umum dan 100 (seratus) orang diangkat.
- (4) Anggota D.P.R. jang diangkat dalam djumlah seperti tersebut dalam ajat (3), terdiri dari :
 - a. Golongan Karya Angkatan Bersendjata jang pengangkatannja ditetapkan atas usul Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata dan diresmikan dengan Keputusan Presiden.
 - b. Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata diangkat oleh Presiden baik atas usul organisasi jang bersangkutan maupun atas prakarsa Presidne
- (5) Djumlah anggota Golongan Karya A.B.R.I. dan Golongan Karya bukan A.B.R.I. jang dimaksud dalam ajat (4) ditetapkan oleh Presiden.

6. KEANGGOTAAN.

Pasal 11.

- (1) Untuk dapat mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat harus dipenuhi sjarat tersebut dalam pasal 2 ajat (1).

- (2) Anggota D.P.R. harus bertempat tinggal didalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Keanggotaan D.P.R. diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 12.

Masa keanggotaan D.P.R. adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.

Pasal 13.

- (1) Seorang Anggota D.P.R. berhenti antar waktu sebagai anggota karena sebab seperti yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan tempatnya diisi menurut tjara yang diatur dalam pasal 4 ayat (2).
- (2) Anggota yang menggantikan antar waktu anggota lama, berhenti sebagai anggota pada saat anggota yang digantikannya itu seharusnya meletakkan jabatan.
- (3) Ketentuan yang tersebut dalam pasal 4 ayat (4) dan pasal 5 berlaku juga bagi Anggota D.P.R.
- (4) Pemberhentian Anggota D.P.R. diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 14.

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota D.P.R. bersama-sama diambil sumpah/djandjinja menurut agamanya masing-masing oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna terbuka D.P.R.
- (2) Ketua D.P.R. atau Anggota Pimpinan lainnya mengambil sumpah/djandji anggota D.P.R. yang belum diambil sumpah/djandjinja oleh Ketua Mahkamah Agung menurut ayat (1).

Pasal 15.

Bunji sumpah/djandji dimaksud dalam pasal 14 adalah sebagai berikut :

„Saja bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya untuk mendjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakjat langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya senantiasa mendjundjung tinggi Amanat Penderitaan Rakjat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pantja-Sila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-undang Dasar 1945 dan segala Undang-undang serta peraturan-peraturan lain jang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kessedjahteraan Rakjat Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia”.

7. PIMPINAN D.P.R.

Pasal 16.

- (1) Pimpinan D.P.R. terdiri atas seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua jang dipilih oleh dan diantara anggota D.P.R.
- (2) Tjara pemilihan Pimpinan D.P.R. diatur dalam peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakjat jang dibuat oleh D.P.R. sendiri.
- (3) Selama Pimpinan D.P.R. belum ditetapkan, musjawarah-musjawarahnja untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota jang tertua usianja dan dibantu oleh anggota jang termuda usianja.

B A B III.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH TINGKAT I.

8. SUSUNAN.

Pasal 17.

- (1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat I, selanjutnya disebut dengan singkatan D.P.R.D. I, terdiri atas anggota :
 - a. Golongan Politik ;
 - b. Golongan Karya ;
- (2) Pengisian keanggotaan D.P.R.D. I dilakukan dengan tjara pemilihan umum dan pengangkatan.
- (3) Djumlah anggota D.P.R.D. I ditetapkan sekurang-kurangnya 40 (empat-puluh) dan sebanyak-banyaknya 75 (tudjuh puluh lima) orang anggota.
- (4) Djumlah anggota D.P.R.D. I jang diangkat ditetapkan sebanyak seperlima dari seluruh anggota D.P.R.D. I dan terdiri dari :
 - a. Golongan Karya Angkatan Bersendjata jang pengangkatannya ditetapkan atas usul Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata dan diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
 - b. Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, baik atas usul Organisasi jang bersangkutan maupun atas prakarsa Menteri Dalam Negeri.
- (5) Djumlah anggota Golongan Karya A.B.R.I. dan Golongan Karya bukan A.B.R.I. jang dimaksud dalam ajat (4) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (6) Anggota D.P.R.D. I mewakili Rakjat didalam wilayah tingkat I jang bersangkutan.

9. KEANGGOTAAN.

Pasal 18.

- (1) Untuk dapat menjadi anggota D.P.R.D. I harus dipenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 2 ayat (1).
- (2) Anggota D.P.R.D. I harus bertempat tinggal didalam wilayah Daerah tingkat I yang bersangkutan.
- (3) Keanggotaan D.P.R.D. I diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Pasal 19.

Masa keanggotaan D.P.R.D. I adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.

Pasal 20.

- (1) Seorang anggota D.P.R.D. I berhenti antar waktu sebagai anggota karena sebab-sebab seperti ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) dan tempatnya diisi menurut tjara yang diatur dalam pasal 4 ayat (2).
- (2) Anggota yang menggantikan antar waktu anggota lama, berhenti sebagai anggota pada saat anggota yang digantikan itu seharusnya meletakkan jabatannya.
- (3) Ketentuan tersebut dalam pasal 4 ayat (4) berlaku juga bagi anggota D.P.R.D. I.
- (4) Pemberhentian anggota D.P.R.D. I diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Pasal 21.

- (1) Sebelum memegang jabatannya, anggota D.P.R.D. I bersama-sama diambil sumpah/djandjinja menurut agamanya masing-masing oleh Kepala

Pengadilan atas nama Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna terbuka D.P.R.D. I.

- (2) Ketua D.P.R.D. I atau anggota Pimpinan lainnja mengambil sumpah/djandji anggota D.P.R.D. I jang belum diambil sumpah/djandjinja oleh Kepala Pengadilan atas nama Ketua Mahkamah Agung menurut ajat (1).

Pasal 22.

Bunji sumpah/djandji dimaksud dalam pasal 21 adalah sebagai berikut :

„Saja bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya, untuk mendjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat I langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tak langsung dari siapapun djuga suatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah atau berdjandji bahwa saya senantiasa akan mendjung tinggi Amanat Penderitaan Rakjat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pantja-Sila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta Peraturan-peraturan lain jang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memadjukan kesedjahteraan Rakjat Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara Republik Indonesia”.

10. PIMPINAN D.P.R.D. I.

Pasal 23.

- (1) Pimpinan D.P.R.D. I terdiri atas seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua jang dipilih oleh dan diantara anggota-anggota D.P.R.D. I.
- (2) Tjara pemilihan anggota Pimpinan D.P.R.D. I diatur dalam peraturan tata tertib jang dibuat oleh D.P.R.D. I sendiri.
- (3) Selama Pimpinan D.P.R.D.I belum ditetapkan musjawarah-musjawarahnja untuk sementara waktu dj dipimpin oleh anggota jang tertua usianja dan dibantu oleh anggota jang termuda usianja.

B A B IV.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH TINGKAT II.

11. SUSUNAN.

Pasal 24.

- (1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat II, selandjutnja disebut dengan singkatan D.P.R.D. II, terdiri dari anggota-anggota :
 - a. Golongan Politik ;
 - b. Golongan Karya ;
- (2) Pengisian keanggotaan D.P.R.D. II dilakukan dengan tjara pemilihan umum dan pengangkatan.
- (3) Djumlah anggota D.P.R.D. II ditetapkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dan sebanjak-banjaknja 40 (empat puluh) orang.
- (4) Djumlah anggota D.P.R.D. II jang diangkat ditetapkan sebanjak seperlima dari seluruh anggota D.P.R.D. II dan terdiri dari :
 - a. Golongan Karya Angkatan Bersendjata jang pengangkatannja ditetapkan atas usul Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata dan diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam-Negeri.
 - b. Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden baik atas usul organisasi jang bersangkutan maupun atas prakarsa Menteri Dalam Negeri.
- (5) Djumlah anggota Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya bukan ABRI jang dimaksud dalam ajat (4) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (6) Anggota D.P.R.D. II mewakili Rakjat didalam wilajah Daerah Tingkat II jang bersangkutan.

12. KEANGGOTAAN.

Pasal 25.

- (1) Untuk dapat mendjadi anggota D.P.R.D. II harus dapat dipenuhi sjarat-sjarat tersebut dalam pasal 2 ajat (1).
- (2) Anggota D.P.R.D. II harus bertempat tinggal didalam wilayah Daerah Tingkat II jang bersangkutan.
- (3) Keanggotaan D.P.R.D. II diresmikan dengan Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pasal 26.

Masa keanggotaan D.P.R.D. II adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berachir.

Pasal 27.

- (1) Seorang anggota D.P.R.D. II berhenti antar waktu sebagai anggota, karena sebab-sebab seperti ditentukan pada pasal 4 ajat (1) dan diganti dengan tjalon berikutnya menurut urutan jang tertjantum dalam daftar tjalon organisasi jang bersangkutan.
- (2) Anggota jang menggantikan antar waktu anggota lama berhenti sebagai anggota pada saat anggota jang digantikannya itu seharusnya meletakkan djabatannya.
- (3) Ketentuan jang tersebut dalam pasal 4 ajat (4) berlaku djuga untuk anggota D.P.R.D. II.
- (4) Pemberhentian anggota D.P.R.D. II diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 28.

- (1) Sebelum memangku djabatannya, anggota D.P.R.D. II bersama-sama

diambil sumpah/djandjinja menurut agamanja masing-masing oleh Kepala Pengadilan Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna terbuka D.P.R.D. II.

- (2) Ketua D.P.R.D. II atau anggota Pimpinan lainnja mengambil sumpah/djandji anggota D.P.R.D. II jang belum diambil sumpah/djandjinja oleh Kepala Pengadilan Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung menurut ajat (1).

Pasal 29.

Bunji sumpah/djandji dimaksud dalam pasal 28 adalah sebagai berikut :
„Saja bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya, untuk mendjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat II langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tiada memberikan atau mendjandjikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saya senantiasa akan mendjundjung tinggi Amanat Penderitaan Rakjat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pantja-Sila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-undang Dasar 1945 dan segala Undang-undang serta Peraturan-peraturan lain jang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga, memadjukan kesedjahteraan Rakjat Indonesia dan bahwa saya akan setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia”.

13. PIMPINAN D. P. R. D. II.

Pasal 30.

- (1) Pimpinan D.P.R.D. II terdiri dari seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua jang dipilih oleh dan diantara anggota D.P.R.D. II.
- (2) Tjara pemilihan anggota Pimpinan D.P.R.D. II, diatur dalam Peraturan

Tata-tertib jang dibuat oleh D.P.R.D. II sendiri.

- (3) Selama Pimpinan D.P.R.D. II belum ditetapkan, musjawarah-musjawarahnja untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota jang tertua usianja dan dibantu oleh anggota jang termuda usianja.

B A B V.

KEDUDUKAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN/ PERWAKILAN RAKJAT.

14. HAK-HAK BADAN PERMUSJAWARATAN/ PERWAKILAN RAKJAT.

Pasal 31.

Untuk dapat melaksanakan fungsinja, M.P.R. mempunyai hak-hak jang tertjantum dalam Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 32.

- (1) Untuk dapat melaksanakan fungsinja sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar 1945, D.P.R. mempunyai hak:
- a. Mengadjukan pertanjaan bagi masing-masing Anggota ;
 - b. Meminta keterangan (interpelasi);
 - c. Mengadakan penjelidikan (angket);
 - d. Mengadakan perobahan (amandemen);
 - e. Mengadjukan pernjjataan pendapat;
 - f. Mengadjukan/mengandjurkan seseorang djika ditentukan oleh sesuatu perundang-undangan.
- (2) Hak tersebut dalam ajat (1) huruf c diatur dengan Undang-undang.

Pasal 33.

Untuk dapat melaksanakan fungsinja, D.P.R.D. mempunyai hak-hak jang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

15. KEKEBALAN ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSJAWARATAN/PERWAKILAN RAKJAT.

Pasal 34.

Anggota-anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat tidak dapat dituntut dimuka Pengadilan karena pernyataan-pernyataan jang dikemukakan dalam rapat Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat, baik terbuka maupun tertutup, jang diajukan setjara lisan maupun tertulis kepada Pimpinan Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat atau kepada Pemerintah, ketjuali djika mereka mengumumkan apa jang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal jang dimaksud oleh ketentuan-ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara dalam buku Kedua Bab I K.U.H.P.

16. KEDUDUKAN PROTOKOLER/KEUANGAN.

Pasal 35.

Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan/anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat diatur oleh badan masing-masing tersebut bersama-sama dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Pasal 36.

Agar M.P.R./D.P.R. dapat melaksanakan tugas dan wewenangnja sesuai dengan sifat dan martabat M.P.R./D.P.R. dalam Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara disediakan bagian anggaran tersendiri.

17. PERATURAN TATA TERTIR.

Pasal 37.

Peraturan Tata Tertib dari masing-masing Badan Permusjawaratan/Perwakilan diatur sendiri oleh masing-masing badan tersebut.

18. RANGKAPAN DJABATAN.

Pasal 38.

- (1) Keanggotaan D.P.R. tidak dapat dirangkap dengan djabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Djaksa Agung, Ketua dan Hakim-hakim Anggota Mahkamah Agung, Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan djabatan lain jang tidak mungkin dirangkap jang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.

- (2) Pimpinan M.P.R. tidak dapat dirangkap dengan djabatan-djabatan tersebut dalam ajat (1).
- (3) Keanggotaan D.P.R. tidak boleh dirangkap dengan djabatan Keanggotaan D.P.R.D. I dan II dan ketentuan ini berlaku sebaliknya.

Pasal 39.

- (1)
 - a. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat, dibebaskan untuk sementara waktu dari djabatan organik selama menjadi anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat itu tanpa menghilangkan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.
 - b. Ketentuan mengenai pembebasan sementara dari djabatan organik bagi anggota Angkatan Bersendjata dalam Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat sebagaimana dimaksud dalam ajat ini diserahkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata.
- (2) Seorang pegawai negeri sipil yang ditjalonkan untuk keanggotaan sesuatu Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat, dibebaskan untuk sementara dari djabatan organik selama masa pentjalonan; setelah ia terpilih baginya berlaku ketentuan tersebut dalam ajat (1) a.

Pasal 40.

Selain djabatan-djabatan yang tersebut dalam pasal 38, keanggotaan D.P.R.D. tidak boleh dirangkap dengan :

- a. Djabatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau anggota Badan Pemerintah Harian dari Daerah yang bersangkutan atau Daerah yang lain;
- b. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang lain;
- c. Kepala Dinas Daerah, Sekretaris Daerah dan Pegawai yang bertanggungjawab tentang Keuangan pada Daerah yang bersangkutan.

Pasal 41.

Anggota D.P.R.D. tidak boleh melakukan pekerjaan tertentu yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan.

19. TINDAKAN KEPOLISIAN.

Pasal 42.

Bagi Anggota-anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat diadakan Undang-undang tersendiri mengenai pemanggilan, permintaan keterangan berhubung dengan suatu tindak pidana, penangkapan, penahanan, pengegeledahan dan penjiitaan.

B A B VI

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN.

20. HAK MENGGANTI.

Pasal 43.

- (1) Tiap Organisasi/Golongan yang dimaksud dalam Undang-undang ini berhak mengganti wakil-wakilnja dalam Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat dengan lebih dahulu bermusjawarah dengan Pimpinan Badan Permusjawaratan/Perwakilan yang bersangkutan.
- (2) Anggota pengganti yang tersebut dalam ayat (1), diambil dari orang yang bertempat tinggal didaerah pemilihan yang bersangkutan, yang memenuhi sjarat-sjarat termaktub dalam pasal 2 ayat (1).
- (3) Hak pengganti Utusan Daerah dalam M.P.R. ada pada D.P.R.D. I yang bersangkutan.

21. DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH TINGKAT III.

Pasal 44.

Bagi Badan Perwakilan Rakjat yang akan dibentuk untuk Daerah Tingkat III berlaku prinsip-prinsip dan azas-azas dalam Undang-undang ini.

B A B VII.

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.

Pasal 45.

Semua Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat yang telah ada sebelum Undang-undang ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan wewenangnja sampai Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang ini mulai menjalankan tugas dan wewenang.

Pasal 46.

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini, akan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 47.

Segala Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48.

Undang-undang ini dapat disebut „Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D., dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengun-

dangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di : Djakarta
pada tanggal: 17 Desember 1969.
Presiden Republik Indonesia.

ttd.

SOEHARTO.
Djenderal TNI.

Diundangkan di: Djakarta
pada tanggal: 17 Desember 1969.

Sekretaris Negara R.I.,
ttd.

ALAMSJAH.
(Major Djenderal T.N.I.)

Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 59.

P E N D J E L A S A N
atas
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969

tentang

**SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN
RAKJAT, DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAN DEWAN PERWAKIL-
AN RAKJAT DAERAH.**

I. U M U M.

1. SUSUNAN.

Susunan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah harus terbentuk atas dasar kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan.

Oleh karena itu maka susunan Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat tersebut harus mentjerminkan azas-azas demokrasi Pantja-Sila.

Azas-azas tersebut harus dapat disalurkan dalam wadah-wadah jang dalam sistim Negara Republik Indonesia merupakan Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat, baik jang bertingkat nasional maupun bertingkat daerah.

Badan-badan tersebut adalah Madjelis Permusjawaratan Rakjat sebagai pemegang kedaulatan rakjat serta pemegang kekuasaan tertinggi, Dewan Perwakilan Rakjat serta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebagai badan legislatif.

Disusunnja badan-badan ini bukan untuk menjusun dan membentuk atau mendirikan Negara baru dan djuga bukan untuk merubah Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 baik sebagian maupun keseluruhannja, tetapi untuk menegakkan, mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai jang diperdjoangkan Orde Baru.

2. KEANGGOTAAN.

Sebagai kenyataan pertumbuhan tata kehidupan masjarakat jang chas Indonesia, maka Masjarakat Indonesia telah mengelompokkan diri dalam Golongan Politik dan Golongan Karya.

Agar Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat mentjerminkan kehendak dan isi hati nurani rakjat Indonesia, maka susunan anggotanja harus mentjakup kedua golongan tersebut.

Hal demikian sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S. nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum jo. Ketetapan M.P.R.S. nomor XLII/MPRS/1968 - tentang Perubahan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum jang dalam pasal 3 menjebutkan bahwa susunan D.P.R. dan D.P.R.D. terdiri dari Golongan Politik dan Golongan Karya.

Telah mendjadi prinsip bahwa kedua golongan tersebut diatas adalah sama pentingnja.

Undang-undang Dasar 1945 sendiri tidak menentukan tjara pengisian badan-badan tersebut, mengingat pula situasi dan kondisi pada saat ini, maka pengisian dilakukan dengan djalan pemilihan dan pengangkatan.

Pemilihan umum adalah sarana jang bersifat demokratis untuk membentuk kekuasaan negara jang berkedaulatan rakjat dan musjawarah perwakilan jang digariskan oleh Undang-undang Dasar Negara.

Pengangkatan dimungkinkan oleh demokrasi Pantja-Sila jang menghendaki ikut-sertanja segala kekuatan representatif dalam badan-badan tersebut.

Pengisian dengan djalan pengangkatan dilakukan bagi Golongan Karya Angkatan Bersendjata dan sebagian Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata.

Golongan Karya Angkatan Bersendjata.

Mengingat Dwifungsi ABRI sebagai alat Negara dan kekuatan sosial jang harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat mendjadi pengawal dan pengaman Pantja-Sila/Undang-undang Dasar 1945 jang kuat dan sentausa, maka bagi ABRI diadakan ketentuan tersendiri.

Fungsi dan tudjuan ABRI seperti tersebut diatas tidak akan tertjapai djika anggota ABRI ikut serta dalam pemilihan umum, jang berarti bahwa anggota ABRI berkelompok-kelompok berlain-lain pilihan dan pendukungnja terhadap golongan-golongan dalam masjarakat.

Karena itu maka anggota-anggota ABRI tidak menggunakan hak memilih dan hak dipilih, tetapi mempunyai Wakil-wakilnja dalam Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat dengan melalui pengangkatan.

Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata.

Sebagian Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata jang karena sifat keanggotaan Organisasinja tidak ikut serta dalam pemilihan umum, tetapi merupakan kekuatan dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, keagamaan dan sebagai pionir jang tidak dapat diabaikan, setjara representatif perlu ada dalam Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat.

Perwakilan mereka itu diadakan melalui pengangkatan.

3. A. GOLONGAN POLITIK.

Anggota dari Golongan Politik, mewakili paham politik jang telah hidup setjara meluas dan mendalam dikalangan rakjat.

Dengan berpedoman dan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan, jang dimaksudkan dengan Golongan Politik ialah Partai Politik jang telah mendapat pengakuan berdasarkan Undang-undang tersebut.

Dalam Pemilihan Umum pertama jang dimaksud dengan Golongan Politik ialah organisasi Golongan Politik sebagaimana termaksud dalam pasal 34 Undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat.

Untuk menentukan siapa-siapa jang mendjadi Wakil/Utusan dalam Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat menurut Undang-undang ini digunakan hasil jang ditjapai dalam pemilihan umum.

3. B. GOLONGAN KARYA.

Golongan Karya sebagai subjek politik jang hidup dalam masyarakat, sudah sejogjanja mendapat perwakilan didalam Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat, dengan berpedoman dan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan, maka jang dimaksud dengan Golongan Karya adalah jang telah mendapat pengakuan berdasarkan Undang-undang tersebut.

Didalam pemilihan umum pertama jang dimaksud dengan Golongan Karya ialah Golongan Karya sebagaimana termaksud dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat. Sebagai dasar telah digariskan bahwa organisasi Golongan Karya ikut serta pemilihan umum supaya duduknja dalam Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat merupakan hasil pemilihan umum .

Dengan ikut serta pemilihan umum organisasi Golongan Karya dapat menjalankan/menentukan Wakil Golongannya.

Namun ada Golongan Karya yang tidak ikut pemilihan umum, ialah Golongan Karya Angkatan Bersendjata dan sebagian dari Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata. Perwakilan golongan ini dalam Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat dilakukan dengan pengangkatan.

Anggota Golongan Karya Angkatan Bersendjata dalam Badan Permusjawaratan/Perwakilan diangkat atas usul Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata.

Anggota-anggota Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata yang tidak ikut dalam pemilihan umum, dalam Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat diangkat atas usul organisasi yang bersangkutan atau atas prakarsa pejabat yang berwenang.

4. UTUSAN DAERAH.

Bagi Lembaga Permusjawaratan Rakjat Tertinggi yang tidak harus membawakan suara rakjat setjara langsung, tetapi djuga harus dapat membina keutuhan dan kesatuan Negara dan Bangsa Indonesia disamping anggota-anggotanya yang mentjakup dua Golongan tersebut diatas masih diperlukan tambahan keanggotaan, jaitu utusan Daerah.

Sesuai dengan namanja, maka Utusan Daerah adalah seorang yang diutus oleh Daerah, untuk mendjadi anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Oleh karena itu Utusan Daerah merupakan perutusan yang dianggap dapat membawakan kepentingan rakjat yang ada didaerah masing-masing disamping dianggap mengetahui dan mempunyai tindjauan yang menjeluruh mengenai persoalan Negara pada umumnya.

Masuknja Utusan Daerah dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat ialah dengan djalan dipilih oleh D.P.R.D. I.

Pemilihan oleh D.P.R.D. I tersebut sesungguhnya merupakan pemilihan yang demokratis pula, karena para anggota D.P.R.D. telah mendapat keper-tajaan Rakjat disebabkan keanggotaannya diperoleh dengan djalan dipilih dalam pemilihan umum.

5. PERSJARATAN ANGGOTA.

Anggota-anggota Badan Perwakilan harus terdiri dari Anggota yang benar-benar mempunyai martabat dan memenuhi sjarat-sjarat seperti tertjantum

dalam pasal 2, sehingga diharapkan dapat menjelenggarakan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

- (1) Haruslah diusahakan agar Utusan Daerah yang dipilih oleh Anggota D.P.R.D. I mentjerminkan djiwa dan isi hati nurani rakyat yang ada dan berkembang di daerah itu serta mentjerminkan juga kepentingan/kebutuhan daerah yang bersangkutan. Djadi Utusan-utusan Daerah seharusnya mentjerminkan juga kekuatan sosial-politik yang hidup dalam masyarakat di daerah masing-masing.
Walaupun Utusan Daerah itu kebetulan terpilih dari salah satu golongan yang ada dalam D.P.R.D. I tetapi ia bukan semata-mata mewakili golongannya, melainkan dalam hal ini ia mewakili daerahnya. Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Indonesia sedjak Proklamasi Kemerdekaan maka pengertian Utusan Golongan didalam M.P.R. ini adalah Utusan Golongan Karya (menurut penjelasan Undang-undang Dasar 1945) dan Utusan Golongan Politik (sesuai dengan perkembangan tersebut diatas). Hal ini sesuai pula dengan Ketetapan M.P.R.S. nomor XI/MPRS/1966 pasal 3 yang menentukan bahwa susunan D.P.R. dan D.P.R.D. terdiri dari Golongan Politik dan Golongan Karya.
- (2) Jumlah seluruh anggota Majelis Permusjawaratan Rakyat dua kali lipat jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengingat fungsi lembaga tersebut, sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-undang Dasar 1945.
- (3), (4), (5) Tjukup jelas.

Pasal 2.

- (1) Sub d :

Jang dimaksud dengan „terlibat setjara langsung” dalam G.30.S./PKI ialah :

1. Mereka yang merentjanakan, turut merentjanakan atau mengetahui adanya perentjanaan Gerakan Kontra Revolusi itu, tetapi tidak kepada pejabat yang berwajib.
2. Mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya, melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Gerakan Kontra Revolusi tersebut. Yang dimaksud dengan „terlibat setjara tidak langsung” dalam G.30.S/P.K.I. ialah :
 1. Mereka yang menundukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam utjapan-utjapan, yang bersifat menjetudjui Gerakan Kontra Revolusi tersebut.
 2. Mereka yang setjara sadar menundukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam utjapan, yang menentang usaha/Gerakan Penumpas - an G.30.S./P.K.I.

Yang dimaksud dengan organisasi yang terlarang dalam pasal ini ialah organisasi-organisasi yang tegas-tegas dinjatakan terlarang dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan telah mendapat amnesti atau abolisi atau grasi.

- (2) Ketentuan bertempat tinggal di Indonesia dipandang perlu, mengingat fungsinya yang harus selalu mengikuti dan mengetahui dari dekat dan langsung segala kehidupan di Indonesia.
- (3) Sesuai dengan kedudukan keanggotaan yang pada prinsipnya ditentukan dengan pemilihan umum, maka Peresmian dengan Keputusan Presiden adalah untuk mengatur kedudukan administrasi selanjutnya. Peresmian tidak setjara konstitutif menentukan dapat atau tidaknya seseorang menjadi anggota, tetapi memberikan status resmi kepadanya sebagai anggota. Bagi anggota tambahan M.P.R. Golongan Karya Angkatan Bersendjata dan Golongan Karya bukan Anggota Angkatan Bersendjata, pengangkatan anggota tersebut adalah peresmian yang dimaksud dalam ayat ini.

Pasal 3.

Perkembangan yang terdjadi selama lima tahun tjukup wadjar untuk dipakai sebagai dasar pembaharuan, dan sesuai pula dengan fungsi M.P.R. yang harus memilih Presiden dan Wakil Presiden setiap lima tahun sekali.

Pasal 4.

- (1) Tjukup djelas.
- (2) Jang dimaksud dengan organisasi adalah organisasi Golongan Politik/ Partai, organisasi Golongan Karya atau gabungan organisasi Golongan Karya.
Jang dimaksud dengan instansi adalah misalnja D.P.R.D. I dan bagi ABRI Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersendja ta.
Anggota jang berhentiantar waktu menurut ajat (1) pasal ini tempatnja diisi menurut ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi jang mendjadi anggota D.P.R. jang dipilih berdasarkan Pemilihan Umum tempatnja diisi oleh tjalon dari organisasi jang bersangkutan;
 - b. bagi Utusan Daerah tempatnja diisi oleh tjalon dari D.P.R.D. I jang bersangkutan ;
 - c. bagi Utusan jang berasal dari organisasi jang ikut dalam pemilihan umum tempatnja diisi oleh tjalon dari organisasi jang bersangkutan;
 - d. bagi anggota jang diangkat tempatnja diisi oleh tjalon dari Presiden baik atas usul organisasi/instansi jang bersangkutan maupun atas-prakarsa Presiden.
- (3) (4) Tjukup djelas.

Pasal 5.

Tjukup djelas.

Pasal 6.

Tjukup djelas.

Pasal 7.

Pada waktu pengambilan sumpah/djandji lazimnja dipakai kata-kata tertentu, sesuai dengan agama masing-masing jaitu, misalnja untuk penganut agama Islam didahului dengan kata „Demi Allah” dan untuk penganut agama Kristen/Katholik diachiri dengan kata-kata „Semoga Tuhan menolong saja”.

Pasal 8.

Dasar untuk menentukan djumlah Utusan Daerah jang terutama ialah kepentingan daerah dan kepentingan Rakjat didaerah, karena itu kepadatan penduduk merupakan dasar pertimbangan djuga untuk menentukan batas minimum dan maksimum djumlah anggota.

Gubernur/Kepala Daerah sebagai eksponen daerah jang mengetahui persoalan daerah sewadjaranja dipilih untuk mewakili daerahnja di M.P.R. sebagai Utusan Daerah.

Pasal 9.

Tjukup djelas.

Pasal 10.

Dari djumlah Anggota D.P.R. sebanyak 460, maka jang dipilih berdasarkan pemilihan umum adalah 360. Untuk menentukan besarnja wakil dalam tiap-tiap daerah pemilihan diwilajah Republik Indonesia, maka untuk pemilihan Anggota D.P.R. daerah pemilihan adalah Daerah Tingkat I. Untuk menentukan banjarknja wakil dalam tiap-tiap daerah pemilihan dipakai dasar perhitungan tiap-tiap sekurang-kurangnja 400.000 penduduk warga negara Indonesia memperoleh seorang wakil, dengan ketentuan bahwa tiap-tiap daerah pemilihan mempunyai wakil sekurang-kurangnja sebanyak Daerah Tingkat II jang terdapat dalam Daerah Tingkat I tersebut, dan tiap-tiap Daerah Tingkat II mempunyai sekurang-kurangnja seorang wakil. Ketentuan-ketentuan selandjutnja tentang tjara pembagian djumlah 360 kursi kepada Daerah-daerah Tingkat II diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11.

Tjukup djelas.

Pasal 12.

Tjukup djelas.

Pasal 13.

Tjukup djelas.

Pasal 14.

Tjukup djelas.

Pasal 15.

Tjukup djelas.

Pasal 16.

Tjukup djelas.

Pasal 17.

Djumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat I ditetapkan dengan perhitungan tiap-tiap sekurang-kurangnja 200.000 djiwa penduduk mendapat seorang wakil dalam D.P.R.D. I.

Oleh karena kepadatan penduduk tidak merata diseluruh wilajah Negara, maka perlu diadakan sjarat minimum dan maksimum agar dengan demikian daerah jang sedikit sekali penduduknja mempunyai wakil dalam D.P.R.D. I jang tjukup representatif untuk mendjamin terpeliharanja kepentingan umum diseluruh wilajah daerah jang bersangkutan setjara baik.

Pasal 18.

Tjukup djelas.

Pasal 19.

Tjukup djelas.

Pasal 20.

- (1) Anggota D.P.R.D. I jang berhenti antar waktu karena sebab-sebab seperti jang ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) tempatnja diisi menurut ketentuan sebagai berikut :
- a. bagi anggota jang dipilih tempatnja diisi oleh tjalon dari organisasi jang bersangkutan ;
 - b. bagi anggota jang diangkat tempatnja diisi oleh tjalon dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden baik atas usul instansi/organisasi jang bersangkutan maupun atas prakarsanja sendiri.
- (2), (3), (4) Tjukup djelas.

Pasal 21.

Tjukup djelas.

Pasal 22.

Tjukup djelas.

Pasal 23.

Tjukup djelas.

Pasal 24.

Djumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat II ditetapkan dengan perhitungan tiap-tiap sekurang-kurangnja 10.000 penduduk mendapat seorang wakil dalam D.P.R.D. II.

Oleh karena kepadatan penduduk tidak merata diseluruh wilajah Negara, maka perlu diadakan sjarat minimum dan maksimum agar dengan demikian Daerah yang sedikit sekali penduduknja mempunyai wakil dalam D.P.R.D. II yang tjukup representatif untuk mendjamin terpeliharanja kepentingan umum diseluruh wilajah daerah yang bersangkutan setjara baik.

Pasal 25.

Tjukup djelas.

Pasal 26.

Tjukup djelas.

Pasal 27.

Lihat pendjelasan pasal 20.

Pasal 28.

Tjukup djelas.

Pasal 29.

Tjukup djelas.

Pasal 30.

Tjukup djelas.

Pasal 31.

Tjukup djelas.

Pasal 32.

- (1) Fungsi D.P.R. berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 ialah :
- a. Membuat Undang-undang bersama dengan Pemerintah ;
 - b. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara bersama-sama Pemerintah.
 - c. Mengadakan pengawasan terhadap kbidjaksanaan Pemerintah.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas D.P.R. mempunyai hak-hak tersebut dalam pasal ini, yang penggunaannya tidak menimbulkan akibat hukum, sehingga dapat merubah sistim Pemerintahan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. „Hak interpelasi” adalah salah satu hak yang penting D.P.R. dalam menjalankan tugasnya mengawasi/mengoreksi tindakan Pemerintah. Hak interpelasi ini dapat diakhiri dengan suatu pernyataan pendapat yang pemakaiannya dilakukan dengan bidjaksana. Pernyataan pendapat yang tersebut dalam pasal 32 ayat (1) sub e dapat berbentuk memorandum, resolusi dan atau mosi.

Pasal 33.

Tjukup djelas.

Pasal 34.

Pasal ini mengatur kebebasan mengeluarkan pendapat yang memang sejog-janja harus dijamin dalam Negara Demokrasi. Namun demikian para anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat, wadjiw memegang teguh kode yang mengandung prinsip suatu hal yang harus dirahasiakan tidak boleh dibotjorkan. Yang dimaksud dengan rapat dalam pasal ini adalah rapat Parlementer, yang diadakan baik didalam maupun diluar gedung Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat, baik terbuka maupun tertutup.

Pasal 35.

Tjukup djelas.

Pasal 36.

Mengingat kedudukannya dan fungsinya maka adalah tepat bila M.P.R./D.P.R. mempunyai anggaran tersendiri. Penguasaan atas kredit-kreditnya yang disediakan dalam bagian anggaran yang termaksud dalam pasal ini, dilakukan dengan tjara seperti yang berlaku bagi suatu Departemen.

Pasal 37.

Dalam peraturan tata-tertib djuga diatur antara lain bahwa :

1. a. M.P.R. mengadakan sidang biasa sedikitnja sekali dalam lima tahun;
b. M.P.R. mengadakan persidangan istimewa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar 1945;
2. D.P.R. mengadakan sidang biasa sedikitnja sekali dalam setahun.
3. D.P.R.D. mengadakan sidang biasa sedikitnja sekali dalam setahun.

Pasal 38.

Djabatan keanggotaan Badan Perwakilan pada hakekatnja tidak dapat dirangkap dengan djabatan-djabatan tersebut dalam pasal ini.

Pasal 39.

- (1) Pegawai Negeri jang dimaksud dalam pasal ini adalah mereka jang diangkat oleh Pedjabat jang berwenang atas beban Anggaran Negara. Anggota M.P.R. jang berkedudukan sebagai anggota tambahan termaksud dalam pasal 1 ayat (3) jang tidak mendjalankan tugas setjara terus-menerus tidak termasuk dalam ketentuan ini.
- (2) Tjukup djelas.

Pasal 40.

Selain djabatan-djabatan jang termaksud dalam pasal 38, bagi anggota D.P.R.D. diadakan larangan perangkapan dengan djabatan jang bertanggung jawab mengenai Keuangan Daerah dari daerah jang bersangkutan dan larangan ini meliputi semua pedjabat jang bersangkutan dengan Keuangan Daerah termasuk Kepala Biro, Kepala Bagian jang bertugas di Biro/Bagian Keuangan dari daerah jang bersangkutan.

Pasal 41.

Jang dimaksud dengan pekerdjaan tertentu dalam pasal ini antara lain :

- a. menjadi Pengatjara (Advokaat) atau kuasa dalam perkara hukum, dalam mana daerah jang bersangkutan tersangkut ;
- b. ikut sertanja dalam penetapan atau pengesahan dari perhitungan jang berhubungan dengan kepentingan daerahnja jang dibuat oleh sesuatu badan dalam mana ia duduk sebagai anggota pengurusnja, ketjuali apabila hal ini mengenai perhitungan anggaran Keuangan Daerah jang bersangkutan;
- c. langsung atau tidak langsung turut serta dalam atau menjadi penanggung untuk sesuatu usaha menjelenggarakan pekerdjaan umum, pengangkutan atau berlaku sebagai rekanan (leveransir) guna kepentingan daerah ;
- d. melakukan pekerdjaan jang memberikan keuntungan baginja dalam hal-hal jang berhubungan langsung dengan daerah jang bersangkutan.

Apabila kepentingan daerah sangat memerlukan maka terhadap larangan-larangan tersebut dalam pasal ini, Kepala Daerah semufakat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat memberikan penjetjualian.

Pasal 42.

Pasal ini menginginkan agar supaya anggota-anggota M.P.R./D.P.R. dapat leluasa melakukan tugasnya sebagai anggota M.P.R./D.P.R. dengan sebaik-baiknya, dan mendapat djaminan hukum sebagaimana mestinya.

Pasal 43.

Musjawarah jang lebih bersifat konsultasi dengan Pimpinan Badan Permusjawaratan/Perwakilan dipandang perlu agar diperoleh pertimbangan jang seobjektif-objektifnja dan guna menghindari hal-hal jang bersifat subjektif dan sewenang-wenang. Karena Utusan Daerah dipilih oleh D.P.R.D. I, dan terutama berkedudukan sebagai Wakil Daerah, maka jang berhak untuk menggantikannya djuga adalah pada D.P.R.D. I jang bersangkutan.

Pasal 44.

Karena pembentukan Daerah Tingkat III masih dalam taraf pertumbuhan, maka ketentuan-ketentuan mengenai lembaga perwakilannya tidak dimasukkan dalam Undang-undang ini, tjukup djika prinsip-prinsip dan azas-azas jang diatur didalam Undang-undang ini dipakai sebagai pedoman selanjutnja.

Pasal 45.

Tjukup djelas.

Pasal 46.

Tjukup djelas.

Pasal 47.

Tjukup djelas.

Pasal 48.

Tjukup djelas.

Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2915.

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1970**

tentang

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN
1969, TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-
ANGGOTA BADAN PERMUSJAWARATAN/
PERWAKILAN RAKJAT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Undang-undang Pemilihan Umum tersebut;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang nomor 15 tahun 1969, tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat;
3. Undang-undang nomor 16 tahun 1969, tentang Susunan dan Kedudukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

M e m u t u s k a n :

- Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969, TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSJAWARATAN/PERWAKILAN RAKJAT.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :

- a. Undang-undang ialah Undang-undang nomor 15 tahun 1969, tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat;
- b. Pendaftar ialah anggota Panitia Pendaftaran Pemilih jang dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf e Undang-undang;
- c. Organisasi Golongan Politik dan Golongan Karya ialah organisasi-organisasi jang dimaksud dalam pasal 17 dan/atau pasal 34 Undang-undang dan jang mengajukan nama dan tanda-gambar untuk ikut dalam Pemilihan Umum

Pasal 2.

Apabila sesuatu waktu jang disebut dalam Peraturan Pemerintah ini djatuh pada hari libur, maka waktu itu diundurkan sampai tanggal hari kerdja berikutnya.

Pasal 3.

Pemerintah dapat mengubah waktu jang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini, apabila suatu atau beberapa pelaksanaan dalam pemilihan ternjata atau dapat diduga tidak dapat didjalankan pada waktu jang ditentukan.

B A B II

STRUKTUR ORGANISASI BADAN-BADAN PELAKSANAAN/ PENJELENGGARA PEMILIHAN UMUM

Pasal 4.

- (1) Lembaga Pemilihan Umum, jang terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan/ Anggota-anggota Pertimbangan dan sebuah Sekretariat, dibentuk dengan Keputusan Presiden.**
- (2) Menteri Dalam Negeri, selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melaksanakan pimpinan sehari-hari Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang.**
- (3) Presiden dapat menundjuk Menteri lain untuk mewakili Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Lembaga Pemilihan Umum dalam hal Menteri Dalam Negeri berhalangan melakukan tugasnja.**
- (4) Untuk kelantjaran/penjelenggaraan Pemilihan Umum, Presiden atau Ketua Lembaga Pemilihan Umum dengan persetujuan Presiden dapat membentuk badan-badan lain didalam Lembaga Pemilihan Umum.**
- (5) Dalam hal-hal jang dianggap perlu Lembaga Pemilihan Umum dapat menjerahkan wewenangnja kepada Panitia Pemilihan Indonesia.**

Pasal 5.

- (1) Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari :**
 - a. Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota, merangkap Ketua;**
 - b. Menteri Kehakiman sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua;**
 - c. Menteri Penerangan sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua;**
 - d. Menteri Keuangan sebagai Anggota;**
 - e. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata sebagai Anggota;**
 - f. Menteri Perhubungan sebagai Anggota;**

- g. Menteri Luar Negeri sebagai Anggota.
- (2) Tata-kerdja Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden

Pasal 6

- (1) Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan beberapa orang Anggota yang diambil dari golongan-golongan seperti yang dimaksud dalam pasal 34 Undang-undang.
- (2) Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 7

- (1) Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai persoalan-persoalan yang pokok sifatnya kepada Dewan Pimpinan, baik atas permintaan, maupun atas prakarsa sendiri.
- (2) Tata-kerdja Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8.

- (1) Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum dipimpin oleh Sekretaris Umum.
- (2) Susunan dan tata-kerdja Sekretariat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 9.

- (1) Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan kekuatan sosial politik, sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang anggota, termasuk Ketua dan Wakil-wakil Ketuanya, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Ketua, Wakil-wakil Ketua Dewan Pimpinan dan Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum masing-masing merangkap menjadi Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia.

- (3) Dalam waktu satu tahun setelah pemungutan suara diadakan, Panitia Pemilihan Indonesia dibubarkan.

Pasal 10.

- (1) a. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan kekuatan sosial politik, sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota, termasuk Ketua dan Wakil Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur/Kepala Daerah.
- b. Dalam jangka waktu satu tahun setelah pemungutan suara diadakan, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dibubarkan.
- (2) Gubernur/Kepala Daerah, karena jabatannya, menjadi anggota, merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
- (3) Menteri Dalam Negeri mengangkat dari antara anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seorang Wakil Ketua, atas usul Ketua.
- (4) Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri, atas usul Ketua Panitia.

Pasal 11.

- (1) a. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan kekuatan sosial politik, sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota, termasuk Ketua dan Wakil Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri, atas usul Gubernur/Kepala Daerah.
- b. Menteri Dalam Negeri dapat mendelegasikan wewenang tersebut kepada Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan, dan dalam hal demikian anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, termasuk Ketua dan Wakil Ketua, diangkat dan diberhentikan atas nama Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur/Kepala Daerah, atas usul Bupati/Walikota/Kepala Daerah.

- c. Dalam waktu satu tahun setelah pemungutan suara diadakan, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dibubarkan.
- (2) Bupati/Walikota/Kepala Daerah, karena jabatannya, menjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.
 - (3) Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Kepala Daerah atas usul Ketuanya.

Pasal 12.

- (1) Ketjuali untuk penjelenggaraan pemungutan suara seperti dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, Panitia Pemungutan Suara terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan kekuatan sosial politik sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota, termasuk Ketua dan Wakil Ketuanya, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah, atas usul Tjamat/Kepala Ketjamatan, untuk waktu yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Tjamat/Kepala Ketjamatan, karena jabatannya, menjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pemungutan Suara.
- (3) Sekretaris Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah, atas usul Ketuanya.

Pasal 13.

- (1) Panitia Pendaftaran Pemilihan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah, atas usul Tjamat/Kepala Ketjamatan, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Kepala Desa/Daerah setingkat Desa, karena jabatannya, menjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pendaftaran Pemilihan.
- (3) Bupati/Walikota/Kepala Daerah mengangkat diantara anggota Panitia Pendaftaran Pemilihan, seorang Wakil Ketua, atas usul Tjamat.

- (4) Sekretaris Panitia Pendaftaran Pemilih diangkat dan diberhentikan oleh Tjamat/Kepala Ketjamatan atas nama Bupati/Walikota/Kepala Daerah.

Pasal 14.

- (1) a. Untuk melaksanakan ketentuan dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) Undang-undang di Departemen Luar Negeri dibentuk Panitia Pemilihan untuk warga negara Indonesia diluar negeri, jang terdiri dari sekurang-kurangnja 3 (tiga) orang dan sebanjak-banjaknja 7 (tujuh) orang anggota, jang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri, atas usul Menteri Luar Negeri.
- b. Dalam waktu satu tahun setelah pemungutan suara diadakan Panitia ini dibubarkan.
- (2) Menteri Dalam Negeri mengangkat diantara anggota Panitia tersebut dalam ayat (1) pasal ini seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua atas usul Menteri Luar Negeri.
- (3) Sekretaris Panitia Pemilihan untuk warga negara Indonesia diluar negeri diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri, atas usul Menteri Luar Negeri.

Pasal 15.

- (1) Ditempat kedudukan Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Suara terdiri dari sekurang-kurangnja 3 (tiga) orang anggota, jang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Panitia Pemilihan untuk warga negara Indonesia diluar negeri, atas usul Kepala Perwakilan.
- (2) Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri mengangkat seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua diantara anggota Panitia Pemungutan Suara seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Sekretaris Panitia Pemungutan Suara untuk warga negara Indonesia diluar negeri diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Perwakilan jang bersangkutan.

Pasal 16.

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan untuk warga negara Indonesia diluar negeri, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun;
- b. tidak dapat menulis dan membuat huruf latin;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar ideologi Negara, kepada Undang-undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945, untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
- d. tidak terlibat, baik langsung, maupun tidak langsung, dalam Gerakan Kontra Revolusi G-30-S/PKI atau organisasi-organisasi terlarang lainnya;
- e. tidak dituntut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
- f. tidak menderita gangguan jiwa/ingatan;
- g. penduduk daerah pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 17.

Sebelum memegang jabatan, anggota-anggota Lembaga Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan untuk warga negara Indonesia diluar negeri, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih, mengucapkan sumpah/djandji menurut agama/kepercayaan masing-masing.

Pada waktu pengambilan sumpah/djandji untuk penganut agama Islam diawali dengan kata „Demi Allah” dan untuk penganut agama Kristen/Katholik diawali dengan kata „Semoga Tuhan menolong saya”.

Bunyi sumpah/djandji sebagai berikut :

„Saja bersumpah (menerangkan dengan sesungguhnya), bahwa saya untuk menjadi Anggota (Ketua/Wakil Ketua) Lembaga Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan untuk warga negara Indonesia diluar negeri, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun”.

„Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saya akan memegang rahasia yang menurut sifatnja atau menurut perintah harus saya rahasiakan”.

„Bahwa dalam mendjalankan tugas saya akan bekerdja dengan djudjur dan tjermat dan senantiasa akan mendahulukan kepentingan Negara Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Pasal 18.

Sumpah/djandji dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah ini diutjapkan dihadapan pedjabat atau Badan yang mengangkat anggota Badan Penyelenggara Pemilihan yang bersangkutan atau pedjabat yang diberi kuasa olehnya untuk itu.

B A B I I I

D A F T A R P E M I L I H

BAGIAN PERTAMA

TENTANG PENDAFTARAN PEMILIH.

Pasal 19.

Permulaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 20.

Pada waktu yang diumumkan oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih, pendaftar mendatangi rumah-rumah penduduk untuk menjatat dari penghuni rumah-rumah itu nama-nama pemilih serta keterangan-keterangan lain yang dimaksud dalam pasal 22 dan pasal 25 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 21.

- (1) Untuk tiap-tiap Desa/daerah setingkat Desa disusun dan dipelihara sebuah daftar pemilih, yang memuat nama-nama pemilih dari Desa itu.
- (2) Seorang pemilih hanya boleh didaftarkan satu kali dalam daftar pemilih. Jika seorang pemilih mempunyai tempat tinggal lebih dari satu, maka ia memilih satu diantara tempat tinggal itu, dimana ia terdaftar sebagai penduduk.

Pasal 22.

Dalam daftar pemilih dimuat keterangan-keterangan mengenai tiap-tiap pemilih, sebagai berikut :

- a. nama lengkap, termasuk gelar dan nama panggilan, jika ada;
- b. umur;
- c. belum/sudah/pernah kawin;
- d. jenis kelamin;
- e. alamat rumah;
- f. pekerjaan.

Pasal 23.

- (1) Warga negara Republik Indonesia bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi

G-30-S/PKI, antara lain yang termasuk kategori A, B dan C, yang dimaksud dalam pasal 4 Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban nomor KEP. 028/KOPKAM/10/1968, atau organisasi terlarang lainnya, tidak didaftar sebagai pemilih, ketjuali apabila berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan seseorang telah mendapat amnesti, abolisi atau grasi.

- (2) Untuk keperluan pendaftaran pemilih, Kepala Desa/daerah setingkat Desa memberikan daftar warga negara Republik Indonesia dimaksud ayat (1) pasal ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Tjamat/Kepala Ketjamatan, Bupati/Walikota/Kepala Daerah dan Gubernur/Kepala Daerah, yang oleh Gubernur/Kepala Daerah diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri, setelah diteliti oleh Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang bersangkutan.
- (3) Dengan memperhatikan hasil penelitian dari Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Menteri Dalam Negeri meneliti dan mengesahkan daftar-daftar tersebut dalam ayat (2) pasal ini dan selanjutnya mengirimkannya kepada Lembaga Pemilihan Umum.
- (4) Lembaga Pemilihan Umum meneruskan salinan daftar-daftar tersebut dalam ayat (2) pasal ini kepada Panitia-panitia Pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 24.

Pendaftaran pemilih berakhir setelah Daftar Tambahan disahkan seperti dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 25.

- (1) Selain dari bahan-bahan tersebut dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah ini, pendaftar mentjatat juga jumlah jiwa penduduk dari tiap-tiap keluarga. Jumlah ini diperoleh dari kepala keluarga atau dari salah seorang anggota keluarga itu.

- (2) Djika ada keragu-raguan, pendaftar meminta bantuan penduduk Desa jang dianggap mengetahuinja; setelah memperoleh keterangan-keterangan seperlunja, Panitia Pendaftaran Pemilih mengambil keputusan.

BAGIAN KEDUA

TENTANG DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Pasal 26.

- (1) Atas dasar bahan-bahan jang tersebut dalam pasal 22, 23 dan 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, selambat-lambatnja 30 hari sesudah tanggal jang ditetapkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, Panitia Pendaftaran Pemilih harus sudah menjusun Daftar Pemilih Sementara, jang memuat nama-nama pemilih jang disusun menurut abjad dan menurut bentuk seperti ditetapkan dalam lampiran Model A Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Seorang pemilih didaftarkan dengan nama lengkap; tjara menulis nama pemilih adalah sebagai berikut :
- a. nama pemilih ditulis lebih dahulu, kemudian disambung dengan nama keluarga/marga/suku, gelar dan sebagainya, demikian djuga apabila seorang pemilih mempunjai nama dewasa dan nama ketjil, maka nama dewasa ditulis lebih dahulu kemudian nama ketjil dan nama panggilan, djika ada, ditulis paling belakang;
 - b. wanita jang bersuami atau djanda jang masih memakai nama almarhum suaminya, namanja sendiri ditulis lebih dahulu dan nama suaminya ditulis dibelakang.
- (3) Daftar Pemilih Sementara dibubuhi tjap Kepala Desa/daerah setingkat Desa dan tanda tangan Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih serta sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnja.

Pasal 27.

- (1) Sehelai Daftar Pemilih Sementara dimaksud dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah ini, sehari sesudah selesai penjunjannja, diumumkan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih pada Kantor Kepala Desa/daerah jang setingkat Desa atau ruangan lain jang ditundjuk oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih. Sehelai Daftar Pemilih Sementara oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih segera dikirimkan kepada Panitia Pemungutan Suara.
- (2) Daftar dimaksud dalam ajat (1) pasal ini tidak boleh dibawa keluar ruangan, dan umum diberi kesempatan melihat daftar itu selama 30 (tiga puluh) hari, sedjak tanggal pengumumannja.
- (3) Dalam djangka waktu dimaksud dalam ajat (2) pasal ini, jang berkepentingan dapat mengajukan kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih usul-usul perubahan. Jang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pendaftaran Pemilih.

Panitia Pendaftaran Pemilih segera memberikan keputusan atas usul-usul perubahan itu. Djika usul itu dapat diterima oleh Panitia Pendaftaran Pemilih, segera dilakukan perubahan dan hal ini diberitahukan kepada pihak jang berkepentingan. Berhubung dengan keputusan itu, Daftar Pemilih Sementara diperbaiki seperlunja.
- (4) Perbaikan Daftar Pemilih Sementara tersebut dalam ajat (3) pasal ini oleh Ketua Pendaftaran Pemilih berangsur-angsur diteruskan kepada Panitia Pemungutan Suara, supaja perbaikan-perbaikan itu diadakan djuga pada Daftar Pemilih Sementara jang sudah dikirimkan kepadanya.
- (5) Djika usul itu tidak diterima, maka pihak jang bersangkutan dapat meminta perubahan dengan melalui Panitia Pendaftaran Pemilih kepada Panitia Pemungutan Suara, Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih meneruskan dengan berangsur-angsur pengaduan-pengaduan itu kepada Panitia Pemungutan Suara, guna mendapat keputusan.
- (6) Panitia Pemungutan Suara segera memberi keputusan atas pengaduan tersebut dalam ajat (5) pasal ini.

BAGIAN KETIGA
TENTANG DAFTAR PEMILIH

Pasal 28.

- (1) Panitia Pemungutan Suara selambat-lambatnja 15 (lima belas) hari sesudah djangka waktu tersebut dalam pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini berachir, mengesahkan Daftar Pemilih Sementara jang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, mendjadi Daftar Pemilih, dengan memperhatikan keputusan atas pengaduan-pengaduan dimaksud dalam pasal 27 ayat (6) Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Sesudah itu Ketua Panitia Pemungutan Suara mengirimkan sehelai salinan Daftar Pemilih jang sudah disahkan kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih jang bersangkutan, sehelai Daftar Pemilih aslinja disimpan di Kantor Panitia Pemungutan Suara.

BAGIAN KEEMPAT
TENTANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pasal 29.

- (1) Selama 10 (sepuluh) hari sesudah pengesahan Daftar Pemilih seperti dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, kepada pemilih jang namanja belum tertjatat dalam Daftar Pemilih, diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri dalam suatu Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Selambat-lambatnja 5 (lima) hari sesudah djangka waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Panitia Pendaftaran Pemilih sudah menjusun Daftar Pemilih Tambahan menurut bentuk dan tjara seperti dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah ini, serta sehelai

Daftar Pemilih Tambahan dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk disahkan.

Pasal 30.

Ketua Panitia Pemungutan Suara segera mengirimkan kembali sehelai Daftar Pemilih Tambahan yang sudah disahkan oleh Panitia Pemungutan Suara kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 31.

Panitia Pemungutan Suara menjampai kepada Panitia Pendaftaran Pemilih salinan Daftar Pemilih dan salinan Daftar Pemilih Tambahan sebanyak yang diperlukan untuk dipergunakan dalam pemungutan suara.

Pasal 32.

- (1) Selambat-lambatnja 15 (lima belas) hari sesudah waktu yang tersebut dalam pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, Ketua Panitia Pemungutan Suara harus sudah mengirim jumlah pemilih dalam daerah-pemungutan-suara-nja kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.
- (2) Selambat-lambatnja 15 (lima belas) hari sesudah waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II harus sudah mengirimkan jumlah pemilih dalam daerahnja kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
- (3) Selambat-lambatnja 7 (tudjuh) hari sesudah waktu tersebut dalam ayat (2) pasal ini, Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I harus sudah mengirim daftar jumlah pemilih dalam daerahnja kepada Panitia Pemilihan Indonesia, yang diperintji Daerah Tingkat II demi Daerah Tingkat II.
- (4) Selambat-lambatnja 7 (tudjuh) hari sesudah waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Ketua Panitia Pemilihan Indonesia harus sudah mengirim

djumlah pemilih seluruh Indonesia kepada Lembaga Pemilihan Umum yang diperintji sesuai dengan ayat (3) pasal ini.

BAGIAN KELIMA

TENTANG PEMELIHARAAN DAFTAR PEMILIH

Pasal 33.

- (1) Sampai pada waktu 14 (empat belas) hari sebelum pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara memelihara Daftar Pemilih dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah disahkan, dengan mengadakan perubahan yang diperlukan, berhubung dengan kepindahan tempat tinggal atau meninggalnya seorang pemilih yang telah terdaftar
Perubahan itu diadakan atas keterangan Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih yang bersangkutan atau apabila Panitia Pendaftaran Pemilih sudah bubar, dari Kepala Desa/daerah yang setingkat yang bersangkutan.
- (2) Dalam waktu 14 (empat belas) hari menjelang pemungutan suara tidak boleh lagi diadakan perubahan sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ketjuali untuk menghapus pemilih yang dapat dibuktikan tidak mempunyai hak untuk memilih.

BAGIAN KEENAM

TENTANG KETENTUAN CHUSUS BAGI PENGHUNI **ASRAMA BUKAN ANGGOTA ANGKATAN** **BERSENDJATA**

Pasal 34.

- (1) Yang dimaksud dengan Asrama dalam Bagian ini, ialah perumahan tempat tinggal anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dan keluarganya, yang tata-tertibnja diatur dan dipertanggung-djawabkan

kepada seorang Komandan.

- (2) Bagi keluarga anggota-anggota Angkatan Bersendjata dan orang-orang bukan anggota Angkatan Bersendjata yang bertempat tinggal dalam Asrama, keterangan-keterangan yang dimaksud dalam pasal 22 dan keterangan-keterangan tentang jumlah jiwa yang dimaksud dalam pasal 25 dapat diperoleh Panitia Pendaftaran Pemilih atas keterangan Komandan yang bertanggung-djawab atas Asrama itu.
- (3) Ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi penjurusan Daftar Pemilih Tambahan yang dimaksud pasal 29.

Pasal 35.

Komandan yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, mendapat dari Ketua Panitia Pemungutan Suara kutipan Daftar Pemilih dan Daftar Pemilih Tambahan mengenai orang-orang yang dimaksud dalam pasal tersebut.

BAGIAN KETUDJUH

TENTANG ORANG JANG DIRAWAT DALAM RUMAH SAKIT, NARA PIDANA DAN TAHANAN

Pasal 36.

- (1) Pemilih yang sedang dirawat dalam rumah sakit dan pemilih yang berada dalam Lembaga Pemasjarakatan sebagai nara pidana yang tidak sedang mendjalani pidana sebagai dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf c Undang-undang atau pemilih yang sedang berada dalam tahanan, didaftarkan dalam rumah sakit, Lembaga Pemasjarakatan atau rumah tahanan oleh pendaftar dari Desa dimana rumah sakit, Lembaga Pemasjarakatan atau rumah tahanan itu berada.
- (2) Pemilih, yang setelah didaftar sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang kemudian dikeluarkan dari rumah sakit, Lembaga Pemasjarakatan atau rumah tahanan, dapat meminta kutipan Daftar Pemilih kepada

Panitia Pendaftaran Pemilih jang bersangkutan; dengan memberikan kutipan Daftar Pemilih itu, pemilih boleh meminta kepada Panitia Pendaftaran Pemilih di Desa tempat kediamannja, supaja namanja di-tjatat dalam Daftar Pemilih ditempat itu.

- (3) Seorang pemilih jang sudah didaftarkan, kemudian masuk rumah sakit, Lembaga Pemasjarakatan atau rumah tahanan, meminta kutipan Daftar Pemilih mengenai dirinja dari tempat tinggalnja untuk dipergunakan pada pemungutan suara. Permintaan itu diadjukan dengan perantaraan Kepala Rumah Sakit, Kepala Lembaga Pemasjarakatan atau Kepala Rumah Tahanan, jang meneruskan permintaan itu kepada Ketua Pemungutan Suara dari tempat tinggalnja. Dalam hal tersebut diatas diadakan tjatatan dalam Daftar Pemilih jang bersangkutan, bahwa pemilih dimaksud tidak akan memberikan suara pada tempat pemberian suara dimana ia didaftarkan tjatatan mana dihapuskan pada saat pemilih jang bersangkutan mengembalikan kutipan itu.

BAGIAN KEDELAPAN

TENTANG PENDAFTARAN PEMILIH DILUAR NEGERI.

Pasal 37.

- (1) Pemilih jang berada diluar negeri mendaftarkan diri pada Panitia Pemungutan Suara jang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, jang bertindak sebagai Panitia Pendaftaran Pemilih dengan membawa surat-surat bukti jang diperlukan. Dalam hal ini berlaku ketentuan-ketentuan pasal 20 dan 22 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Penjusunan pemeliharaan Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan mengindahkan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah ini.

Perubahan-perubahan dalam Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambah-

an diadakan atas keterangan pemilih sendiri.

- (3) Djika pada Kantor Perwakilan Luar Negeri sudah tersedia daftar warga negara Republik Indonesia jang berada dalam wilayah Kantor Perwakilan itu, maka salinan daftar tersebut dapat dipergunakan untuk menjusun Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan.

B A B IV

PENETAPAN DJUMLAH PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA DAN PENETAPAN DJUMLAH ANGGOTA JANG DIPILIH

BAGIAN PERTAMA

TENTANG PENETAPAN DJUMLAH PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA

Pasal 38.

- (1) Sehari sesudah berachir djangka waktu tersebut dalam pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih memberitahukan djumlah penduduk warga negara Indonesia dalam desanja kepada Panitia Pemungutan Suara jang bersangkutan.
- (2) Selambat-lambatnja 15 (lima belas) hari sesudah waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Ketua Panitia Pemungutan Suara harus sudah memberitahukan djumlah penduduk warga negara Indonesia dalam daerah-pemungutan-suaranja kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.
- (3) Selambat-lambatnja 15 (lima belas) hari sesudah waktu tersebut dalam ayat (2) pasal ini, Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II harus sudah memberitahukan djumlah penduduk warga negara Indonesiadalam daerahnja kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
- (4) Selambat-lambatnja 7 (tudjuh) hari sesudah waktu tersebut dalam ayat (3) pasal ini, Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I harus sudah

memberitahukan djumlah penduduk warga negara Indonesia dalam daerahnja kepada Panitia Pemilihan Indonesia, jang diperintji Daerah Tingkat II demi Daerah Tingkat II.

- (5) Selambat-lambatnja 7 (tudjuh) hari sesudah waktu tersebut dalam ayat (4) pasal ini, Ketua Panitia Pemilihan Indonesia harus sudah memberitahukan djumlah seluruh penduduk warga negara Indonesia kepada Lembaga Pemilihan Umum, jang diperintji sesuai ayat (4) pasal ini.

BAGIAN KEDUA.

TENTANG PENETAPAN DJUMLAH ANGGOTA BADAN PERWAKILAN RAKJAT JANG DIPILIH

Pasal 39.

Selambat-lambatnja 15 (lima belas) hari sesudah waktu tersebut dalam pasal 38 ayat (5) Peraturan Pemerintah ini, Lembaga Pemilihan Umum menetapkan :

- a. djumlah anggota D.P.R. jang dipilih untuk tiap daerah pemilihan;
- b. djumlah anggota D.P.R.D. jang dipilih untuk Daerah Tingkat I;
- c. djumlah anggota D.P.R.D. jang dipilih untuk Daerah Tingkat II.

Pasal 40.

- (1) Penetapan djumlah anggota D.P.R. jang dipilih untuk daerah pemilihan diatur sesuai dengan pasal 7 Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1970, tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 16 tahun 1969, beserta pendjelasannja.
- (2) Penetapan djumlah anggota D.P.R.D. I dan II jang dipilih untuk masing-masing daerah pemilihan diatur sesuai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1970, tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 16 tahun 1969.

B A B V
P E N T J A L O N A N

BAGIAN PERTAMA.

TENTANG NAMA DAN TANDA GAMBAR

Pasal 41.

- (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah waktu yang ditetapkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, organisasi yang akan mengemukakan tjalon-tjalon untuk D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II mengajukan nama dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pasal 18 Undang-undang kepada Lembaga Pemilihan Umum.
- (2) Yang mengajukan nama dan tanda gambar organisasi untuk semua djenis pemilihan ialah pengurus besar organisasi.
- (3) Nama yang diajukan oleh organisasi itu adalah nama organisasi atau singkatan dari padanya.
- (4) Tanda gambar yang diajukan harus terang, sederhana dan hanya berwarna hitam dan putih.
Tanda gambar dalam persegi empat yang berukuran $2\frac{1}{2}$ sentimeter pandjang dan $2\frac{1}{2}$ sentimeter lebar dan gambarnya diatas kertas putih persegi pandjang yang berukuran 5 sentimeter pandjang dan $2\frac{1}{2}$ sentimeter lebar, sehingga dibawah gambar itu tersedia persegi empat kosong yang berukuran $2\frac{1}{2}$ sentimeter pandjang dan $2\frac{1}{2}$ sentimeter lebar.
Tanda gambar itu disampaikan kepada Lembaga Pemilihan Umum dalam rangkap 7.

Pasal 42.

- (1) Penolakan tanda gambar karena melanggar larangan tertjantum dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang segera diberitahukan oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum kepada pengirim tanda gambar itu.

- (2) Tanda gambar yang oleh Lembaga Pemilihan Umum dianggap sama atau mirip dengan tanda gambar yang sudah lazim dipakai oleh suatu organisasi tertentu, ditolak, dan penolakan itu segera diberitahukan oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum kepada pengirim tanda gambar itu.
- (3) Selama 20 (dua puluh) hari sesudah waktu tersebut dalam pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah ini berakhir, Lembaga Pemilihan Umum dapat mengadakan perundingan seperlunya dengan para pengirim tanda gambar.

Pasal 43.

- (1) Pemberitahuan tentang penolakan tanda gambar dikirimkan dengan surat terdaftar/tertjatat atau dengan setcepat-tcepatnya diterimakan langsung kepada pengirim atau wakilnya.
Dalam hal tersebut terakhir, pengirim atau wakilnya yang menerima surat pemberitahuan itu, memberikan surat tanda penerimaan.
Disamping pengiriman surat terdaftar/tertjatat itu, sedapat mungkin dikirimkan pemberitahuan dengan kawat.
- (2) Pengirim tanda gambar, yang tanda gambarnya ditolak, harus segera mengemukakan tanda gambar yang lain.

Pasal 44.

Nama dan tanda gambar atau tanda gambar yang mengganti nama dan tanda gambar yang ditolak harus sudah diterima oleh Lembaga Pemilihan Umum selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah waktu tersebut dalam pasal 42 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini berakhir.

Pasal 45.

- (1) 15 (lima belas) hari sesudah waktu tersebut dalam pasal 44 Peraturan Pemerintah ini berakhir, Lembaga Pemilihan Umum harus sudah selesai dengan penetapan nama dan tanda gambar dan sudah mengumumkan

nama dan tanda gambar yang telah ditetapkan itu dalam Berita-Negara. Lembaga Pemilihan Umum berusaha supaya pengumuman itu disusun dengan terang.

- (2) Pada surat penetapan sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditempelkan sehelai dari 7 (tujuh) helai tanda gambar yang diterima Lembaga Pemilihan Umum yang dibubuhi tjaap Lembaga serta tanda tangan Ketuanja yang sebagian meliputi persegi empat kosong dibawah tanda gambar dimaksud dalam pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Kepada pengirim nama dan tanda gambar oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum disampaikan salinan surat ketetapan sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal in.

BAGIAN KEDUA

TENTANG TJARA PENTJALONAN

Pasal 46.

- (1) Organisasi mengajukan tjalon-tjalon dengan mengisi formulir surat pentjalonan seperti tjontoh lampiran B pada Peraturan Pemerintah ini. Formulir itu dapat diminta pada tiap-tiap Kantor Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II mulai 15 (lima belas) hari sebelum tanggal permulaan pentjalonan seperti tersebut dalam pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah ini, pada tiap hari djam kerdja kantor Pemerintah.
- Surat pentjalonan tersebut dilampiri dengan Daftar Tjalon yang disusun seperti tjontoh lampiran B I Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Pengurus Besar/Pusat organisasi, yang telah menerima salinan surat ketetapan Lembaga Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah ini, membuat salinan dari salinan tersebut yang harus disahkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia.
- (3) Organisasi, yang memerlukan salinan dari salinan tersebut untuk dilampirkan pada surat pentjalonan sebagai dimaksud ayat (1), dapat

memintanja kepada pengurus Besar/pusat masing-masing.

- (4) Surat pentjalonan beserta lampiran-lampirannya dapat disampaikan mulai pada waktu 60 (enam puluh) hari sesudah waktu seperti tersebut dalam pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini berachir, selama 60 (enam puluh) hari, kepada :
- a. Panitia Pemilihan Indonesia, untuk pemilihan anggota D.P.R.;
 - b. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, untuk pemilihan anggota D.P.R.D.;
 - c. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, untuk pemilihan anggota D.P.R.D. II

Pasal 47.

- (1) Nama tjalon ditulis dengan tjara jang ditentukan untuk pengisian Daftar Pemilih.
- (2) Nama tjalon jang dikemukakan dalam daftar tjalon ditulis dalam urutan sebagaimana dikehendaki oleh organisasi jang mengemukakan daftar itu.
- (3) Organisasi dilarang mentjalonkan seseorang untuk lebih dari satu daerah pemilihan jang sedjenis.

Pasal 48.

Surat pentjalonan, jang harus dilampiri seperti jang ditentukan dalam pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1970, tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 16 tahun 1969, harus dilampiri pula;

- a. surat pernyataan kesediaan dan persetudjuan tjalon, termaksud dalam pasal 19 ayat (1) (iii) Undang-undang, menurut tjontoh lampiran C pada Peraturan Pemerintah ini;
- b. surat keterangan jang menjatakan, bahwa orang itu terdaftar dalam Daftar Pemilih/Daftar Tambahan dan boleh memilih, seperti tjontoh lampiran

D pada Peraturan Pemerintah ini;

- c. salinan dari salinan surat ketetapan Lembaga Pemilihan Umum tentang nama dan tanda gambar dimaksud pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah ini

Pasal 49.

- (1) Surat pentjalonan/daftar tjalon untuk Anggota M.P.R., D.P.R. diadjudikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Indonesia. Ketua Pemilihan Indonesia menjampaiakannya kepada Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban guna memperoleh penelitian sesuai pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1970, tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 16 tahun 1969.
- (2) Surat pentjalonan/daftar tjalon untuk Anggota D.P.R.D. I dan II diadjudikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I atau kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, yang selanjutnya meneruskan kepada Pelaksana Khusus KOPKAMTIB untuk penelitian.
- (3) Jika daftar tjalon memuat nama tjalon melebihi jumlah yang ditentukan dalam pasal 19 ayat (4) Undang-undang, maka daftar itu dikembalikan kepada organisasi yang bersangkutan, sehinggamemenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, dengan mengingat pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-undang.
- (4)
 - a. Seorang tjalon dikeluarkan dari daftar, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi anggota, atau jika tidak ada surat pernyataan dimaksud dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah ini.
 - b. Pengeluaran seorang tjalon dari daftar oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan, diberitahukan kepada organisasi yang mengirim daftar itu disertai alasannya, dan organisasi tersebut diberi kesempatan memperbaiki daftar tjalon itu.
- (5) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah waktu tersebut dalam pasal 46 ayat (4) Peraturan Pemerintah ini berachir, Panitia-panitia

Pemilihan harus sudah selesai dengan pemeriksaan surat-surat pentjalonan, termasuk pemilihan Panitia Peneliti Pusat/Daerah dimaksud pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 16 tahun 1969 dan sudah memberitahukan tentang daftar jang tidak memenuhi sjarat kepada organisasi jang bersangkutan.

- (6) Kesempatan untuk memperbaiki surat pentjalonan daftar tjalon dimaksud dalam ajat (4) pasal ini diadakan selama 30 (tiga puluh) hari sesudah waktu tersebut dalam ajat (4) itu berachir.

Pasal 50.

Surat pentjalonan ditolak apabila jang digunakan bukan formulir menurut pasal 46 ajat (1) Peraturan Pemerintah ini, atau jang diterima oleh Panitia Pemilihan masing-masing jang bersangkutan sesudah waktu jang bersangkutan sesudah waktu jang ditentukan dalam pasal 46 ajat (4) Peraturan Pemerintah ini.

BAGIAN KETIGA

TENTANG DAFTAR TJALON SEMENTARA

Pasal 51.

- (1) Selambat-lambatnja 15 (lima belas) hari sesudah kesempatan untuk memperbaiki surat pentjalonan dimaksud dalam pasal 49 ajat (5) Peraturan Pemerintah ini berachir, Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah tingkat II harus sudah selesai menjusun Daftar Tjalon Sementara.
- (2) Penjusunan Daftar Tjalon Sementara ialah seperti berikut :
 - a. tanda gambar jang diterima oleh masing-masing Panitia Pemilihan, setelah dihilangkan persegi empat jang ada dibawahnja, ditempelkan berdjadjar dalam beberapa barisan diatas sehelai kertas;
 - b. tanda gambar ditempelkan dari kiri-atas kekanan, menurut urutan

- nomor jang diperoleh dengan undian;
- c. diatas tanda gambar ditulis nomornja dan dibawah nomor itu ditjantumkan nama organisasi;
 - d. dibawah masing-masing tanda gambar ditjantumkan nama-nama tjalon menurut urutan dalam daftar tersebut dalam pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini; dibawah masing-masing nama ditulis dalam kurung nama kota tempat tinggalnja, ditjetak dengan huruf blok.
 - e. Daftar Tjalon Sementara ditanda tangani oleh Ketua dan lebih dari seperdua djumlah anggota Panitia Pemilihan jang bersangkutan.
- (3) Daftar Tjalon Sementara oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I segera diumumkan dalam daerah-pemilihannja sekurang-kurangnja dengan memuatkannya dalam satu harian jang diterbitkan ditempat kedudukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, atau djika harian jang dimaksud itu tidak ada, dengan memuatkannya dalam satu harian lain jang oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dianggap terbanjak dibatja dalam daerah itu, atau dengan tjara lain jang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I tersebut.
- (4) Selain daripada dengan tjara pengumuman tersebut dalam ayat (3) pasal ini, Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I berusaha supaja selemba dari harian itu atau selemba dari pengumuman dengan tjara lain dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dapat dilihat ditiap-tiap Kantor Pemungutan Suara oleh chalajak ramai

Pasal 52.

Selama 30 (tiga puluh) hari sesudah pengumuman Daftar Tjalon Sementara, setiap orang dapat mengemukakan keberatan atas Daftar Tjalon Sementara itu kepada Panitia Pemilihan jang bersangkutan. Panitia Pemilihan tersebut memberikan keputusan atas keberatan jang diadjukan itu.

BAGIAN KEEMPAT
TENTANG DAFTAR TJALON TETAP

Pasal 53.

- (1) Selambat-lambatnja 15 (lima belas) hari sesudah waktu tersebut dalam pasal 52 Peraturan Pemerintah ini berachir, Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Masing-masing sudah harus menjusun Daftar Tjalon Tetap untuk Daerah Pemilihan jang tersebut dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang.

Bilamana djumlah tjalon kurang dari pada djumlah anggota jang harus dipilih dalam daerah pemilihan itu, maka Panitia Pemilihan jang bersangkutan harus mengusahakan penambahan tjalon dengan mengingat pasal 5 ayat (2) Undang-undang.

- (2) Daftar Tjalon Tetap oleh masing-masing Ketua Panitia Pemilihan tersebut dalam ayat (1) pasal ini segera diumumkan dalam Berita-Negara/Lembaran Daerah dan diumumkan setjara luas seperti dimaksud dalam pasal 51 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Panitia-panitia Pemilihan masing-masing mengirimkan Daftar Tjalon Tetap jang tertjetak kepada tiap-tiap Panitia Pemungutan Suara dalam daerahnja sebanjak jang diperlukan.

B A B VI.

K A M P A N J E

Pasal 54.

- (1) Untuk memperoleh suara sebanjak-banjaknja dalam pemilihan umum, organisasi jang turut dalam pentjalonan seperti dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, dapat mengadakan kampanye pemilihan.

Pasal 55.

Dalam kampanye pemilihan dilarang mempersoalkan Pantja Sila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 56.

Dalam melaksanakan kampanye pemilihan dilarang memfitnah, menghina atau menyinggung kehormatan Pemerintah dan pedjabatnja, perorangan, golongan, organisasi atau negara asing, serta perbuatan-perbuatan lainnja yang bertentangan dengan etika/tata krama yang sesuai dengan Pantja Sila.

Pasal 57.

Kampanje pemilihan, jang berbentuk rapat-rapat untuk pengerahan massa disesuatu tempat guna memperoleh suara sebanjak-banjaknja dalam pemilihan, diadakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dan berachir 7 (tudjuh) hari sebelum pemungutan suara diadakan.

Pasal 58.

- (1) Organisasi jang mengadakan rapat-rapat untuk kampanje pemilihan harus memberitahukan kepada penguasa jang berwenang selambat-lambatnja 3 (tiga) hari sebelum rapat itu diadakan.
- (2) Bilamana penguasa tersebut mengetahui, bahwa pada waktu jang bersamaan akan diadakan beberapa rapat ditempat-tempat jang letaknja berbedaan dan ia berkejakinan bahwa keamanan tidak akan dapat terdjamin dengan baik, maka ia dapat menentukan waktu dan tempat lain untuk satu atau beberapa rapat itu.

Pasal 59.

- (1) Poster, surat selebaran, slide, slogan (sembojan), brosur dan jang serupa itu, jang dipergunakan dalam kampanye pemilihan, harus diberitahukan lebih dulu kepada penguasa jang dimaksud dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Segala matjam dan bentuk pertundjukan untuk kampanye pemilihan, harus djuga diberitahukan terlebih dahulu kepada penguasa jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini.

B A B VII.

TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN
SUARA

BAGIAN PERTAMA.

TENTANG PEMUNGUTAN SUARA.

Pasal 60.

- (1) Untuk menjelenggarakan pemungutan suara, pedjabat jang dimaksud dalam pasal 12 ajat (1) Peraturan Pemerintah ini menambah djumlah anggota Panitia Pemungutan Suara dengan sedapat-dapatnja mengambil anggota Panitia-panitia Pendaftaran Pemilih, untuk djangka waktu jang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pemungutan suara ditempat pemberian suara diselenggarakan dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, jang selama pemberian suara dilakukan, dihadiri oelh sekurang-kurangnya tiga orang anggota, jang merupakan Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara, disingkat K.P.P.S.
- (3) Ketua Panitia Pemungutan Suara menundjuk diantara anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara seorang Ketua untuk tiap-tiap Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara.

Pasal 61.

- (1) Pemungutan suara dilakukan selambat-lambatnya 105 (seratus lima) hari sesudah penjusunan Daftar Tjalon Tetap menurut pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini selesai, ditempat-tempat pemberian suara yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini. Pemberian suara oleh pemilih dimulai pada djam 08.00 dan ditutup pada djam 14.00.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, berhubung dengan keadaan setempat, dapat memperpanjang waktu itu dengan ketentuan, bahwa penghitungan suara dan pembuatan berita atjara pemungutan suara harus dapat diselesaikan pada hari itu djuga.

- (2) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II menetapkan tempat-tempat pemberian suara untuk tiap-tiap daerah pemungutan suara, dengan mengingat bahwa tiap pemilih yang akan memberikan suara tidak perlu bermalam dan bahwa tiap tempat pemberian suara dapat melajani sedjumlah pemilih dalam waktu tersebut dalam ayat (1) alinea terakhir pasal ini.
- (3) Nama tempat pemberian suara ialah nama Desa dimana pemungutan suara dilakukan.

Apabila pada satu Desa diadakan lebih dari satu tempat pemberian suara, maka tempat pemberian suara itu disebut dengan nama Desa itu dengan diberi tambahan angka Rumawi I, II dan seterusnya dan diterangkan wilayah masing-masing.

Pasal 62.

- (1) Untuk pemilihan D.P.R., Ketua Panitia Pemilihan Indonesia dan untuk pemilihan D.P.R.D. I, Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, menjampaikan surat-surat suara kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, sedjumlah yang sama dengan djumlah pemilih yang terdaftar dalam daerah yang bersangkutan, ditambah dengan sepuluh persen. Surat-surat suara itu disampaikan dalam keadaan terlipat, dengan tanda gambar disebelah dalam.

Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II menjampaikan surat suara tersebut kepada tiap-tiap Ketua Panitia Pemungutan Suara, sedjumlah yang sama dengan djumlah pemilih yang terdaftar dalam daerah Panitia Pemungutan Suara masing-masing, ditambah dengan sepuluh persen. Dan dipisah-pisahkan untuk tiap-tiap Tempat Pemberian Suara dalam bungkusan yang disegel dan diluarnja memuat keterangan Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II tentang djumlah isinja, yang dibubuhi tjap dan tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II itu.

- (2) Untuk pemilihan D.P.R.D. II, Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II menjampaikan surat-surat suara kepada tiap-tiap Ketua Panitia Pemungutan Suara, sedjumlah yang sama dengan djumlah pemilih yang terdaftar dalam daerah Panitia Pemungutan Suara masing-masing, ditambah dengan sepuluh persen. Dan dipisah-pisahkan untuk tiap-tiap Tempat Pemberian Suara dalam bungkusan yang disegel dan yang diluarnja memuat keterangan Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II tentang djumlah isinja, yang dibubuhi tjap dan tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II itu.

Pasal 63.

- (1) Djika berhubung dengan keadaan setempat Panitia Pemungutan Suara menurut perhitungan tidak dapat menerima surat-surat suara pada waktunja, sehingga tidak dapat mengadakan pemungutan suara pada waktu tersebut dalam pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, maka Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II menetapkan waktu pemberian siara untuk daerah pemungutan suara itu.

Apabila pada waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II tersebut diatas dalam daerah pemungutan suara yang bersangkutan ada satu Tempat Pemberian Suara atau lebih, yang tidak dapat mengadakan pemungutan suara pada waktunja, maka untuk Tempat/Tempat-tempat Pemberian Suara itu pemungutan suara diadakan setcepat mungkin.

- (2) Dalam menetapkan waktu-waktu dalam ayat (1) pasal ini harus diingat,

bahwa Ketua Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara harus mendapat kesempatan setjukupnja untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 67 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 64.

- (1) Surat suara untuk memberikan suara disusun seperti berikut :**
 - a. nama badan perwakilan jang dipilih.**
 - b. tahun diadakan pemilihan ;**
 - c. nama daerah pemungutan suara ;**
 - d. nama tempat pemberian suara ;**
 - e. nomor, nama dan tanda gambar organisasi masing-masing ;**
 - f. tanda jang mendjamin tidak adanya pemalsuan ;**
 - g. bagi pemilihan anggota D.P.R., djuga nama daerah pemilihan.**
- (2) Nama Daerah Pemungutan Suara dan nama Tempat Pemberian Suara diisi oleh Ketua Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara pada waktu seperti dimaksud pasal 69 ajat (3) Peraturan Pemerintah ini.**

Nomor, nama dan tanda gambar organisasi masing-masing ditempatkan menurut tjara jang ditetapkan dalam menjusun Daftar Tjalon Tetap.

Bentuk dan tempat dalam surat suara dari tanda jang mendjamin tidak ada pemalsuan dan tempatnja dalam surat suara ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 65.

- (1) Ditempat Pemberian Suara disediakan tempat untuk duduk Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara dan tempat untuk duduk bagi para pemilih, serta bilik-bilik untuk pemberian suara.**
- (2) Ditempat duduk Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara ditempatkan medja dan kursi sedemikian rupa, sehingga dapat mengawasi keluar**

masuknja pemilih, sedang perbuatan-perbuatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dapat dilihat oleh hadirin.

Dimuka tempat duduk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ditempatkan tiga buah kotak suara atau lebih sedemikian, sehingga dapat dilihat oleh hadirin pada rapat pemungutan suara itu.

- (3) Jang dibolehkan masuk kedalam tempat untuk duduk para pemilih ialah sejumlah pemilih jang sudah mentjatatkan diri untuk memberikan suara, supaja ketertiban dalam Tempat Pemberian Suara tidak terganggu. Didalam tempat duduk itu dipasang Daftar Tjalon Tetap sedemikian, sehingga pemilih jang hendak memberikan suaranya dengan mudah dapat mengetahui nama-nama tjalon jang tertjantum dalam daftar itu.
- (4) Bilik untuk memberikan suara diatur sedemikian, sehingga pemberian suara oleh pemilih dapat dilakukan dengan rahasia dan tidak terganggu tetapi pintu masuk bilik terbuka, sehingga pemilih terlihat dari tempat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Didalam bilik tersebut tersedia alat pentjoblos tanda gambar.

Pasal 66.

Kotak suara harus berbentuk sedemikian rupa hingga dapat dibuka dan ditutup dengan kuntji dan mempunjai tjelah jang tjukup besar untuk memasukkan sehelai surat suara, tetapi tidak mudah untuk mengambilnja kembali.

Pasal 67.

- (1) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sudah mengumumkan tempat dan waktu pemberian suara dan sudah menjampaiakan surat panggilan kepada pemilih-pemilih jang harus memberikan suara ditempat itu.

- (2) **Pemilih jang belum menerima surat panggilan diberi kesempatan meminta kepada Ketua Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara, selambat-lambatnja 1 x 24 djam sebelum pemungutan suara dilakukan.**

Pasal 68.

- (1) **Setelah rapat pemungutan suara dibuka, Ketua Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara memperlihatkan kepada hadirin bahwa kotak suara benar-benar kosong.**
- (2) **Selanjutnja Ketua Kelompok menguntji kotak suara itu dan sesudah itu memperlihatkan kepada hadirin bungkusan jang masih bersegel dan berisi surat-surat suara jang diterimanja dari Ketua Panitia Pemungutan Suara.**
- (3) **Setelah hadirin menjaksikan, bahwa bungkusan itu dan segelnja masih dalam keadaan utuh, Ketua Kelompok membukanja dan mentjotjokkan djumlah surat suara jang terdapat dalam bungkusan itu dengan djumlah jang tertulis dibagian luar bungkusan.**

Pasal 69.

- (1) **Setelah Ketua Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara melakukan perbuatan-perbuatan termaksud dalam pasal 68 Peraturan Pemerintah ini, Ketua Kelompok mempersilahkan para pemilih untuk memberikan suara.**
- (2) **Pemilih jang minta surat suara, dihadapan Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara menjebutkan namanja dengan suara jang terang serta menjerahkan surat panggilan seperti tersebut dalam pasal 67 Peraturan Pemerintah ini.**
- (3) **Ketua Kelompok memberikan kepada para pemilih, seorang demi seorang, 3 (tiga) helai surat suara jang berlainan warnanja, masing-masing untuk pemilihan anggota D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II, dalam ke-**

adaan terlipat setelah diisi dengan nama daerah pemungutan suara dan tempat pemberian suara serta dibubuhi tanda tangan oleh tiga orang anggota Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara disebelah luar surat suara.

Sesudah itu Ketua Kelompok memberikan tanda didalam kutipan atau salinan Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan yang sudah tersedia didepan tempat duduk Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara, jaitu dimuka nama tiap-tiap pemilih yang sudah menerima surat suara.

- (4) Pemilih yang telah menerima surat suara menudju langsung kebilik pemberian suara untuk memberikan suaranya.

Pasal 70.

- (1) Pemilih memberikan suaranya kepada suatu organisasi dengan mentjolos salah satu diantara tanda gambar yang tertjantum dalam masing-masing surat suara seperti dimaksud dalam pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Untuk memberikan suaranya, pemilih harus datang sendiri ditempat pemberian suara yang ditentukan menurut pasal 61 Peraturan Pemerintah ini.

Pemilih yang berada diluar negeri memberikan suaranya dalam rapat Panitia yang tersebut pada pasal 15 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 71.

- (1) Setelah pemilih memberikan suaranya dalam bilik pemberian suara, surat-surat suara yang telah dipergunakan itu dilipat kembali seperti semula.
- (2) Pemilih menudju ketempat kotak suara dan memperlihatkan surat-surat suaranya kepada Ketua Kelompok dalam keadaan terlipat.

- (3) Setelah Ketua Kelompok menjaksikan bahwa pada surat-surat suara itu betul terdapat tanda-tangan-tanda-tangan termaksud dalam pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, Ketua Kelompok mempersilahkan pemilih untuk memasukkan surat suaranya kedalam kotak suara.
- (4) Pemilih yang telah memberikan suara harus segera keluar dari Tempat Pemberian Suara.

Pasal 72.

Seorang pemilih yang keliru mengisi surat suaranya dapat satu kali meminta surat suara baru, setelah menjerahkan surat suara yang diisi keliru itu kepada Ketua Kelompok Pemungutan Suara. Surat suara yang dikembalikan itu oleh Ketua Kelompok diberi tanda, bahwa surat suara itu tidak terpakai lagi.

Pasal 73.

- (1) Segera setelah waktu pemberian suara termaksud dalam pasal 61 ayat (1) kalimat ketiga Peraturan Pemerintah ini berakhir, Ketua Kelompok mengumumkan hal itu kepada hadirin. Selandjutnja yang dibolehkan memberikan suaranya hanya pemilih yang pada saat itu sudah hadir menunggu gilirannya dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang namanya tertjatat dalam kutipan atau salinan Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan ditempat pemberian suara itu.
- (2) Dengan mengingat pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, Ketua memberi kesempatan kepada anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang namanya terdaftar dalam kutipan atau salinan Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan ditempat pemberian suara lain untuk memberikan suaranya ditempat pemberian suara itu.

Pasal 74.

- (1) Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara harus mengambil tindakan seperlunya, supaya pada waktu pelaksanaan pemungutan suara, diadakan pendjagaan sebaik-baiknya dalam hal ketertiban didalam Tempat Pemberian Suara, sehingga djalannya pemungutan suara berlangsung dengan tenang dan bebas dari sesuatu pengaruh atau paksaan.
- (2) Ketjuali mereka jang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, siapapun tidak dibolehkan membawa sesuatu sendjata kedalam ruangan pemungutan suara.
- (3) Hanya atas permintaan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, semata-mata untuk kepentingan pendjagaan ketertiban dalam tempat itu, alat-alat pendjaga keamanan jang bersendjata dibolehkan ditempatkan dalam Tempat Pemberian Suara.
- (4) Ketua Kelompok berhak mengeluarkan setiap orang jang mengganggu ketertiban didalam Tempat Pemberian Suara atau jang mentjoba mempengaruhi memilih.
- (5) Untuk mengadakan tindakan-tindakan dimaksud dalam ayat (1) dan (4) pasal ini, Ketua Kelompok dapat meminta bantuan dari pihak alat-alat pendjaga keamanan. Alat-alat pendjaga keamanan jang bersangkutan diwadjabkan memberikan bantuan jang diminta itu.

Pasal 75.

- (1) Djika ketertiban terganggu, sehingga djalannya pemungutan suara terganggu djuga, atau bilamana pemungutan suara diteruskan, tetapi tidak akan terdjamin sahnja pemungutan suara itu, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara segera memberhentikan pemungutan suara, menutup tjelah kotak suara dan menjegelnja.
- (2) Surat-surat suara jang belum terpakai atau jang dikembalikan dan

kutipan atau salinan Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan dan kuntji kotak dimasukkan kedalam bungkusang jang kemudian disegel oleh Ketua.

Kotak Suara dan bungkusang itu disimpan dikantor Panitia Pemungutan Suara atau dikantor Kepala Desa jang berdekatan.

- (3) Dari perbuatan-perbuatan jang telah dilakukan oleh Ketua, termaksud dalam ajat (1) dan (2) pasal ini, dibuat berita atjara jang ditanda-tangani oleh semua anggota Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara seperti dimaksud dalam pasal 60 ajat (2) Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 76.

- (1) Pemungutan Suara jang terhenti seperti termaksud dalam pasal 75 Peraturan Pemerintah ini dilandjutkan sedapat-dapatnja pada hari itu djuga atau hari berikutnja dan djika tidak mungkin, pada hari jang ditetapkan oleh Panitia Pemungutan Suara, satu dan lain bilamana pemungutan suara jang telah muali berdjalan itu dapat dipertanggung-djawabkan oleh Panitia Pemungutan Suara.
- (2) Bilamana pemungutan suara dimaksud dalam ajat (1) pasal ini tidak dapat dipertanggung-djawabkan, Panitia Pemungutan Suara menetapkan, bahwa pemungutan suara diulangi seluruhnja dan menetapkan serta mengumumkan hari pemungutan suara ulangan itu.
- (3) Bilamana berhubung dengan gangguan keamanan/ketertiban di Tempat Pemberian Suara, pemungutan suara tidak dapat dilakukan pada tanggal jang telah ditetapkan, maka Panitia Pemungutan Suara menetapkan dan mengumumkan hari pemungutan suara susulan.
- (4) Dalam menetapkan waktu untuk pemungutan suara dimaksud dalam ajat (1), (2) dan (3) dalam pasal ini, Panitia Pemungutan Suara memperhatikan waktu untuk mengirimkan Berita Atjara Penghitungan Suara kepada Panitia Pemilihan jang bersangkutan.

Pasal 77.

- (1) Ketentuan-ketentuan tentang penjelenggaraan pemungutan suara dimaksud dalam pasal 69, 70 dan 71 Peraturan Pemerintah ini berlaku juga untuk pemungutan suara landjutan, ulangan, susulan termaksud dalam pasal 76 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam hal pemungutan suara landjutan, Ketua Kelompok Penjelenggaraan Pemungutan Suara lebih dahulu membuka tjelah kotak suara jang disegel, tetapi tidak membuka kuntji kotak suara itu.
- (3) Dalam hal pemungutan suara ulangan, pada tiap-tiap surat suara jang telah dimasukkan dalam kotak suara, Kelompok Penjelenggaraan Pemungutan Suara memberi tanda bahwa surat suara itu tidak dipakai lagi.

Pasal 78.

Tiap-tiap madjikan berkewadajiban memberi kesempatan kepada karyawan-karyawannya jang berhak memilih, untuk memberikan suaranya. Kewadajiban itu tidak berlaku terhadap karyawan perusahaan/djawatan vital jang pada waktu pemungutan suara tidak mungkin meninggalkan pekerdjaannya berhubung dengan tugas itu.

Pasal 79.

Pemilih-pemilih, jang berhubung dengan pekerdjaannya, pada waktu pemungutan suara tidak dapat memberikan suara ditempat dimana ia seharusnya memberikan suara menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dapat memberikan suaranya pada Tempat Pemberian Suara lain dengan menundjukkan kutipan Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan mengenai namanya kepada Ketua Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara, dengan pengertian, bahwa Tempat Pemberian Suara itu : untuk pemilihan anggota D.P.R.D. I harus terletak dalam Daerah Tingkat I dan untuk pemilihan anggota D.P.R.D. II harus terletak dalam Daerah Tingkat II jang bersangkutan.

Pasal 80

- (1) Rumah Sakit, Lembaga Pemasjarakatan atau rumah tahanan merupakan Tempat Pemberian Suara dari Daerah Pemungutan Suara dimana Rumah Sakit, Lembaga Pemasjarakatan atau rumah tahanan itu berada untuk memilih-pemilih jang dirawat/ditahan ditempat itu.**
- (2) Memilih seperti dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, jang pada waktu diadakan pemungutan suara berada diluar daerah pilihannya, dapat memberikan suaranya pada tempat Pemberian Suara dalam tempat-tempat tersebut dalam ayat (1) pasal ini untuk daerah pemilihan itu, dengan memberikan kutipan Daftar Memilih/ Daftar Memilih Tambahan mengenai namanya kepada Ketua Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara dalam Rumah Sakit, Lembaga Pemasjarakatan atau rumah tahanan jang bersangkutan.**

BAGIAN KEDUA.

TENTANG PENGHITUNGAN SUARA.

Pasal 81.

- (1) Memilih-pemilih boleh hadir pada pembukaan surat-surat suara dan penghitungan suara, selama ketertiban dan pekerjaan-pekerjaan tidak terganggu karenanya.**
- (2) Pembukaan surat-surat suara jang penghitungan suara dilakukan sedemikian, hingga dapat diikuti oleh memilih-pemilih jang hadir.**
- (3) Memilih jang hadir boleh mengemukakan keberatan, jang seketika itu juga diputus oleh Kelompok Penjelenggara Pemungutan suara.**

Pasal 82.

- (1) Setelah waktu untuk pemberian suara berakhir, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mempersilahkan pemilih-pemilih yang hendak hadir pada penghitungan suara masuk kedalam tempat untuk duduk para pemilih mengingat jumlah dimaksud dalam pasal 65 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Ketua menetapkan dan mengumumkan kepada hadirin jumlah pemilih yang menurut tata-tatan dalam salinan atau kutipan Daftar Pemilih/ Daftar Pemilih Tambahan dimaksud dalam pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini telah memberikan suaranya, jumlah surat suara yang dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dan 77 Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Surat-surat suara yang dikembalikan dan surat-surat suara yang tidak dipergunakan, tiap-tiap matjam tersendiri, dimasukkan dalam bungkus-an.

Dibagian luar dari masing-masing bungkus-an itu ditulis keterangan tentang isi dan jumlahnya, dan ditanda-tangani oleh Ketua dan semua anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang hadir.

Pasal 83.

- (1) Setelah dilakukan perbuatan-perbuatan termaksud dalam pasal 82 dengan mengingat ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 74, 75 dan 76 Peraturan Pemerintah ini, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara segera membuka kotak suara.
- (2) Surat suara dikeluarkan dari kotak suara dan dihitung jumlahnya serta diumumkan jumlah itu kepada hadirin.
Ketua Kelompok memperlihatkan kepada hadirin, bahwa didalam kotak suara tidak ada surat suara yang tertinggal lagi, lalu menguntji lagi kotak itu.
- (3) Ketua bersama anggota-anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara segera membuka surat-suara satu demi satu dan menetapkan surat suara yang sah dan yang tidak sah.

Surat suara yang berlainan dari yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak sah. Demikian pula dinyatakan tidak sah, apabila terdapat pemberian suara berlainan dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ataupun dalam Peraturan Pemerintah ini.

Selain itu surat suara dinyatakan tidak sah, apabila :

- a. lebih dari satu tanda gambar ditjoblos ;
 - b. tidak terang gambar mana yang ditjoblos ;
 - c. pada surat suara ditulis nama pemilih, tanda tangan/tanda-tanda lain ataupun terdapat-terdapat lain oleh pemilih.
- (4) Jika suatu surat suara ditetapkan sah, diumumkan pula nama organisasi yang memperoleh suara dari surat suara itu. Jika suatu surat suara ditetapkan tidak sah, diumumkan pula alasannya.
 - (5) Surat-suara yang ditetapkan sah satu demi satu ditumpuk menurut organisasi yang memperoleh suara itu. Surat-suara yang ditetapkan tidak sah, disusun dalam satu tumpukan tersendiri.
 - (6) Sekurang-kurangnya dua orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara bertugas dalam terdapat terdapat penghitungan suara yang diberikan kepada sesuatu organisasi.
 - (7) Surat suara dalam tiap-tiap tumpukan termaksud dalam ayat (5) pasal ini dihitung dan disesuaikan dengan terdapat terdapat termaksud dalam ayat (6) pasal ini. Apabila jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap organisasi dari perhitungan termaksud dalam terdapat terdapat penghitungan suara tidak cocok dengan jumlah surat suara yang diperoleh dari penghitungan tiap-tiap tumpukan, maka diadakan penelitian dan/atau pengulangan dari tindakan-tindakan tersebut dalam ayat (3), (5) dan (6) pasal ini.
 - (8) Hasil penghitungan suara termaksud dalam ayat (7) pasal ini diumumkan oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara kepada hadirin.

Pasal 84.

Tiap-tiap tumpukan surat-surat suara yang sah maupun tidak sah menurut pasal 83 ayat (5) Peraturan Pemerintah ini, masing-masing menurut matjamnja, dijadikan satu bungkusan lalu disegel. Dibagian luar dari masing-masing bungkusan itu ditulis keterangan tentang isi dan djumlahnja dan ditanda tangani oleh Ketua dan semua anggota Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara yang hadir.

Pasal 85.

- (1) Dari pemungutan suara dan penghitungan suara segera dibuat Berita Atjara, yang ditanda tangani oleh semua anggota Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara yang hadir pada rapat pemungutan suara itu.

Berita Atjara itu disebut Berita Atjara Pemungutan Suara dan memuat :

- a. nama badan perwakilan untuk mana diadakan pemilihan ;
- b. tahun pemilihan ;
- c. nama daerah Tingkat II yang melingkungi Tempat Pemberian Suara ;
- d. nama daerah pemungutan suara itu ;
- e. nama Tempat Pemberian Suara itu ;
- f. hari dan tanggal pemberian suara ;
- g. nama Ketua dan Anggota-anggota Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara yang hadir pada rapat pemungutan suara ;
- h. djumlah surat suara yang diterima untuk pemungutan suara ;
- i. djumlah surat suara yang tidak terpakai ;
- j. djumlah surat suara yang dikembalikan karena tidak terpakai lagi sebagai yang dimaksud dalam pasal 72 ;
- k. djumlah surat suara yang tidak sah ;
- l. djumlah surat suara yang sah, yang kemudian diperintji sebagai berikut:
 - (i) djumlah suara yang sah yang diberikan kepada masing-masing organisasi Golongan Politik ;

(ii) djumlah suara jang sah jang diberikan kepada masing-masing organisasi Golongan Karya ;

m. bagi pemilihan anggota D.P.R. djuga nama daerah pemilihan.

- (2) Dalam Berita Atjara Pemungutan Suara itu dimuat djuga keberatan jang dikemukakan pemilih dan keputusan atas keberatan seperti jang dimaksud dalam pasal 88 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 86.

- (1) Dari Berita Atjara Pemungutan Suara jang dimaksud dalam pasal 85 Peraturan Pemerintah ini dibuat salinannja jang ditanda-tangani oleh semua anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara jang hadir.
- (2) Berita Atjara Pemungutan Suara dan salinannja, masing-masing tersendiri, dimasukkan kedalam sampul lalu disegel. Dibagian luar dari tiap-tiap sampul itu ditulis keterangan tentang isi dan djumlahnja dan di tanda-tangani oleh Ketua dan semua anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara jang hadir.

Pasal 87.

- (1) Berita Atjara Pemungutan Suara dan salinannja, bersama-sama surat-surat suara, baik jang berharga maupun jang tidak berharga atau jang tidak dipakai lagi ataupun jang diberi tanda tidak terpakai oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dimasukkan kedalam kotak suara, lalu dikuntjir dan disegel.

Dibagian luar dari kotak itu ditulis keterangan tentang isi dan djumlah bungkusan-bungkusan dan sampul-sampul didalamnya dan ditanda-tangani oleh Ketua dan semua anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara jang hadir.

- (2) Selambat-lambatnja satu hari setelah diadakan pemungutan suara, kotak suara jang berisi bungkusan-bungkusan dan sampul-sampul ter-

maksud dalam ayat (1) pasal ini oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara disampaikan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan dengan disertai surat pengantar yang memuat keterangan-keterangan seperti yang ditulis dibagian luar kotak.

Pasal 88.

- (1) Setelah menerima bungkusan-bungkusan dan sampul-sampul dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara seperti yang dimaksud dalam pasal 87 Peraturan Pemerintah ini, Ketua Panitia Pemungutan Suara segera mengadakan rapat penghitungan suara, yang dengan mengingat ketertiban dan keamanan setempat, dapat dihadiri oleh pemilih-pemilih yang membawa dan menundukkan surat keterangan/surat pengenalan yang dikeluarkan oleh Pimpinan organisasi di daerah pemungutan suara, yang turut serta dalam pemilihan umum.
- (2) Dalam rapat penghitungan suara itu Ketua Panitia Pemungutan Suara bersama-sama dengan semua anggota Panitia Pemungutan Suara yang hadir, membuka sampul-sampul dari semua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam daerah pemungutan suaranya yang berisi Berita Atjara Pemungutan Suara. Dari Berita Atjara-Berita Atjara Pemungutan Suara, diperintji menurut Tempat Pemberian Suara, Panitia Pemungutan Suara mengadakan penghitungan suara yang berdasarkan keterangan-keterangan yang dimaksud dalam pasal 85 kalimat kedua huruf h sampai dengan huruf l Peraturan Pemerintah ini. Sekurangkurangnja dua orang anggota Panitia Pemungutan Suara membuat tjatatan dari penghitungan suara ini, yang kemudian hasilnya ditjotjokkan yang satu dengan yang lain. Apabila pada tjatatan yang satu terdapat selisih mengenai djumlahnja dengan tjatatan yang lain, maka diadakan penelitian atau ulangan penghitungan suara.

Semua perbuatan Ketua dan anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara dalam rapat penghitungan suara itu harus dapat disaksikan, diikuti dan diteliti oleh semua orang yang diberi idzin untuk menghadiri rapat.

- (3) Orang yang diberi izin untuk menghadiri rapat penghitungan suara dapat menjatakan keberatan atas penghitungan suara itu, apabila tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang dan/atau Peraturan Pemerintah ini.

Ketua Panitia Pemungutan Suara seketika memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (4) Dari penghitungan suara dibuat Berita Atjara yang ditanda-tangani oleh Ketua dan semua anggota Panitia Pemungutan Suara yang hadir pada rapat penghitungan suara itu.

Berita Atjara itu disebut Berita Atjara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara dan memuat :

- a. seperti yang tersebut dalam pasal 85 kalimat kedua huruf a, b dan m Peraturan Pemerintah ini ;
- b. nama Daerah Tingkat II, yang melingkungi daerah pemungutan suara yang bersangkutan ;
- c. nama daerah pemungutan suara ;
- d. hari dan tanggal penghitungan suara ;
- e. nama Ketua dan anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara yang hadir pada rapat penghitungan suara ;
- f. jumlah-djumlah menurut perintjian seperti tersebut dalam pasal 85 kalimat kedua huruf h, i, j, k dan l Peraturan Pemerintah ini, untuk daerah pemungutan suara itu.

Dalam Berita Atjara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara itu dimuat juga keberatan yang dikemukakan dan keputusan atas keberatan itu seperti yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini.

Pasal 89.

Ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 86 dan pasal 87 Peraturan Pemerintah ini berlaku juga untuk penghitungan suara seperti

jang tersebut dalam pasal 88 Peraturan Pemerintah ini dengan pengertian bahwa :

- a. Berita Atjara Pemungutan Suara djabat Berita Atjara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara ;
- b. Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara djabat Panitia Pemungutan Suara ;
- c. Panitia Pemungutan Suara jang tersebut dalam pasal 87 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini djabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II jang bersangkutan.

Pasal 90.

- (1) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II mengadakan rapat penghitungan suara untuk daerah Tingkat II menurut ketentuan-ketentuan seperti jang dimaksud dalam pasal 88 dan 89 Peraturan Pemerintah ini, dengan penjesuaian, bahwa penghitungan suara ini adalah untuk daerah Tingkat II.

Dalam penjesuaian itu termasuk pengertian, bahwa Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II jang tersebut dalam pasal 89 huruf c Peraturan Pemerintah ini djabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.

- (2) Untuk pemilihan anggota D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II tidak dilaksanakan ketentuan-ketentuan jang tersebut dalam pasal 88 dan 89 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 91.

- (1) Bungkus-bungkus surat suara, jang diterima oleh Panitia Pemungutan Suara dari Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara dan kemudian disampaikan kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, tidak dibuka dalam rapat penghitungan suara jang diadakan oleh Panitia Pemungutan Suara maupun jang diadakan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, apabila tidak diperlukan untuk penelitian pada peng-

hitungan suara yang diadakan dengan mempergunakan keterangan-keterangan yang tersebut dalam Berita Atjara Pemungutan Suara dan Berita Atjara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara.

- (2) Setelah penghitungan suara untuk daerah Tingkat II seperti yang dimaksud dalam pasal 92 Peraturan Pemerintah ini selesai, bungkusan-bungkusan surat suara disimpan oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dan diperlakukan sebagai bungkusan-bungkusan surat-surat rahasia kedinasan sampai 6 (enam) bulan sesudah diadakan rapat pertama oleh badan perwakilan yang dibentuk dengan pemilihan umum dan telah menggunakan surat-surat suara itu.

Pasal 92.

- (1) Setelah menerima Berita Atjara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II, maka Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I segera mengadakan rapat penghitungan suara untuk Daerah Tingkat I, menurut ketentuan-ketentuan seperti yang dimaksud pada pasal 89, 90 dan 91 Peraturan Pemerintah ini dengan penyesuaian bahwa penghitungan suara ini adalah untuk Daerah Tingkat I.
- (2) Setelah dibuat Berita Atjara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I, maka Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I berdasarkan Berita Atjara tersebut membuat daftar penghitungan suara yang memuat :
 - a. jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap organisasi dalam Daerah Tingkat I, diperintji menurut tiap-tiap Daerah Tingkat II, serta terpisah organisasi Golongan Politik dari organisasi Golongan Karya; pada daftar ini dibubuhi nomor yang menunjukkan urutan besarnya jumlah suara :
 - (i) yang diperoleh tiap-tiap organisasi dalam tiap-tiap Daerah Tingkat II ;
 - (ii) yang diperoleh tiap-tiap organisasi dalam Daerah Tingkat I ;
 - b. jumlah suara yang diperoleh semua organisasi Golongan Politik maupun Golongan Karya dalam wilayah Daerah Tingkat II ;

- c. djumlah suara jang diperoleh semua organisasi Golongan Politik maupun Golongan Karya dalam wilayah Daerah Tingkat I.
- (3) Berita Atjara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I, demikian pula daftar penghitungan suara jang dimaksud dalam ajat (2) pasal ini, oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dibuat dalam rangkap 4 (empat) jang ditanda-tangani oleh Ketua dan semua anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I jang hadir pada rapat penghitungan suara untuk Daerah Tingkat I itu.

Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I menjampaikan Berita Atjara dan Daftar Penghitungan Suara masing-masing dua helai kepada Ketua Panitia Pemilihan Indonesia jang meneruskan satu helai kepada Lembaga Pemilihan Umum.

B A B VIII.

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

BAGIAN PERTAMA

TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UNTUK D.P.R.

Pasal 93.

- (1) Dari Daftar Penghitungan Suara seperti jang dimaksud pada pasal 92 ajat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan bilangan pembagi pemilihan dengan tjara membagi djumlah suara tersebut pada pasal 92 ajat (2) huruf c Peraturan Pemerintah ini dibagi dengan djumlah anggota D.P.R. jang dipilih dalam Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan jang bersangkutan, dibulatkan keatas.
- (2) Setelah ditetapkan bilangan Pembagi Pemilihan, maka ditetapkan djumlah wakil jang diperoleh tiap-tiap organisasi dengan tjara membagi djumlah suara jang diperoleh suatu organisasi dalam Daerah Tingkat I dengan Bilangan Pembagi Pemilihan tersebut dalam ajat (1) pasal ini.

- (3) Berdasarkan penghitungan tersebut dalam ayat (2) pasal ini disusun daftar jumlah wakil, yang memuat jumlah wakil yang diperoleh tiap-tiap organisasi dan memuat pula bilangan yang menunjukkan sisa-sisa dari hasil pembagian menurut penghitungan itu. Bilangan-bilangan ini adalah sisa-sisa suara bagi tiap-tiap organisasi, setelah penghitungan pembagian jumlah wakil tingkat pertama.

Bagi organisasi yang menyatakan bergabung dalam pembagian jumlah wakil seperti yang dimaksud pada pasal 19 ayat (3) Undang-undang, sisa suara dari organisasi yang mengadakan gabungan itu dikumpulkan dan jumlahnya ditetapkan sebagai jumlah sisa suara bagi gabungan organisasi yang bersangkutan.

- (4) Apabila dengan pembagian tingkat pertama seperti tersebut dalam ayat (2) belum semua jumlah wakil untuk suatu daerah pemilihan terbagi habis, maka sisa jumlah wakil itu dibagikan kepada organisasi yang menyatakan bergabung dalam pembagian jumlah wakil sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) Undang-undang dan memperoleh wakil sejumlah angka bulat dari hasil pembagian sisa suara bagi gabungan organisasi-organisasi tersebut dalam ayat (3) alinea 3 pasal ini dengan bilangan pembagi pemilihan, sedangkan bilangan sisa dari hasil pembagian itu merupakan suara sisa pula bagi gabungan organisasi itu.
- (5) Apabila dengan pembagian tingkat kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini masih ada jumlah wakil yang belum dibagikan, maka jumlah wakil sisa itu dibagikan satu demi satu berturut-turut, dimulai dengan organisasi yang mempunyai sisa suara yang terbanyak, dengan pengertian bahwa jumlah sisa suara dari organisasi-organisasi yang menyatakan bergabung merupakan satu bilangan suara sisa.

Pasal 94.

- (1) Djumlah wakil jang diperoleh suatu organisasi diberikan kepada daftar tjalon organisasi tersebut dalam Daerah Tingkat II, dimana organisasi itu memperoleh suara terbanjak pertama, dibandingkan dengan organisasi-organisasi lainnja, menurut daftar perhitungan suara jang dimaksud dalam pasal 92 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Apabila suatu organisasi jang memperoleh djumlah wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak memperoleh suara terbanjak disuatu Daerah Tingkat II manapun, maka djumlah wakil jang diperoleh organisasi itu diberikan kepada daftar tjalonnja di Daerah Tingkat II, dimana organisasi itu memperoleh suara terbanjak kedua, suara terbanjak ketiga dan seterusnya, sampai semua Daerah Tingkat II memperoleh perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang.
- (3) Apabila semua Daerah Tingkat II sudah mendapat perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang, maka djumlah wakil jang diperoleh suatu organisasi jang belum diberikan kepada daftar tjalonnja, diberikan satu demi satu kepada daftar tjalonnja di Daerah Tingkat II dimana organisasi itu memperoleh suatu terbanjak dibandingkan dengan di Daerah Tingkat II lainnja.
- (4) Apabila suatu organisasi tidak menjediakan daftar tjalon untuk suatu Daerah Tingkat II, sedangkan organisasi tersebut memperoleh djumlah wakil di Daerah Tingkat II itu, atau apabila djumlah wakil jang diperoleh suatu organisasi lebih banjak dari djumlah tjalon dalam daftar tjalonnja, maka organisasi itu dapat mengemukakan daftar tjalon susulan menurut ketentuan-ketentuan dalam BAB V Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 95.

- (1) Djumlah wakil jang diperoleh suatu organisasi dalam Daerah Tingkat II diisi oleh tjalon nomor 1 dan nomor berikutnya dari daftar tjalon organisasi bersangkutan.

- (2) Apabila seorang tjalon terpilih berhenti, atau mengundurkan diri maka tempatnja diisi oleh tjalon berikutnya dari daftar tjalon bersangkutan.
- (3) Apabila hal yang dimaksud ayat (2) pasal ini tidak dapat dilakukan karena semua tjalon sudah terpilih, berhenti atau mengundurkan diri, maka penggantiannya diajukan oleh organisasi yang mengajukan daftar tjalon bersangkutan.

Pasal 96

Pembagian jumlah wakil yang dimaksud pasal 93 Peraturan Pemerintah ini, dilakukan dalam suatu rapat terbuka untuk umum, selama dan sekedar ketertiban dan pekerjaan-pekerjaan tidak terganggu karenanya. Pembagian jumlah wakil itu dilakukan sedemikian sehingga dapat diikuti oleh hadirin.

Orang yang hadir boleh mengemukakan keberatan yang seketika itu juga diputus oleh Panitia Pemilihan Daerah yang bersangkutan.

BAGIAN KEDUA

TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UNTUK D.P.R.D.

Pasal 97.

Sesudah diadakan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 Peraturan Pemerintah ini dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 Peraturan Pemerintah ini, maka Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II menetapkan bilangan pembagian pemilihan untuk daerahnya masing-masing, yaitu bilangan bulat hasil bagi yang diperoleh dari pembagian jumlah suara yang diberikan dalam daerah pemi-

lihan jang bersangkutan dengan djumlah anggota D.P.R.D. jang dipilih dalam daerah pemilihan itu.

Pasal 98.

- (1) Suatu organisasi memperoleh djumlah wakil sedjumlah bilangan bulat dari hasil bagi jang diperoleh dari pembagian djumlah suara jang diperoleh organisasi itu dengan bilangan pembagi pemilihan.
- (2) Organisasi jang memperoleh djumlah suara kurang dari pada bilangan pembagi pemilihan, tidak mendapat wakil dalam pembagian djumlah wakil-wakil pertama.
- (3) Apabila dengan pembagian sebagaimana tersebut dalam ajat (1) dan (2) pasal ini semua djumlah wakil jang ditetapkan untuk suatu Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II belum terbagi habis, maka sisa djumlah wakil itu diberikan kepada gabungan organisasi menurut pasal 93 Peraturan Pemerintah ini sedjumlah bilangan bulat jang diperoleh dari pembagian djumlah sisa-sisa suara dari organisasi jang bergabung dengan bilangan pembagi pemilihan dimaksud dalam pasal 97 Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Apabila dengan pembagian menurut ajat (1), (2) dan (3) pasal ini semua djumlah wakil jang ditetapkan untuk suatu Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II belum djuga terbagi habis, maka djumlah-djumlah wakil itu dibagikan satu demi satu berturut-turut dimulai dengan organisasi-organisasi gabungan jang menundukkan sisa suara terbanjak, sehingga semua sisa djumlah wakil itu terbagi habis, dengan pengertian bahwa djumlah sisa suara dari organisasi-organisasi jang menjatakan bergabung merupakan satu bilangan suara sisa. Djika perlu diantara organisasi dan gabungan organisasi jang menundukkan sisa suara jang sama diadakan undian.
- (5) Djumlah-djumlah wakil jang diperoleh gabungan organisasi menurut pembagian tersebut dalam ajat (3) dan (4) pasal ini diberikan kepada salah satu organisasi dari gabungan itu berdasarkan persetudjuan jang bersangkutan.

Pasal 99.

- (1) Dari perhitungan suara dan pembagian djumlah wakil segera dibuat berita atjara jang ditanda-tangani oleh semua anggota Panitia Pemilihan Daerah jang bersangkutan jang hadir. Berita atjara itu disebut Berita Atjara Pembagian Kursi jang didalamnya atau dalam lampirannya memuat keterangan tentang :
- a. nama Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II.
 - b. nama Daerah-daerah Pemungutan Suara jang termasuk dalam lingkungan Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II.
 - c. hari dan tanggal penetapan hasil pemilihan itu.
 - d. nama semua anggota jang hadir pada rapat penetapan hasil pemilihan dengan disebutkan Ketuanya.
 - e. djumlah pemilih jang terdaftar dan djumlah suara jang diberikan dalam masing-masing Daerah Pemungutan Suara.
 - f. djumlah suara jang diberikan dalam Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II itu.
 - g. djumlah anggota D.P.R.D. jang ditetapkan untuk Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II itu.
 - h. pembagi pemilihan untuk Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II.
 - i. djumlah suara dalam daerah itu jang diberikan kepada masing-masing organisasi.
 - j. djumlah wakil jang diperoleh masing-masing organisasi sesudah pembagian kursi menurut ketentuan dalam pasal 98 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah ini.
 - k. djumlah wakil jang belum terbagi.
 - l. djumlah sisa suara dari tiap-tiap organisasi.
 - m. djumlah sisa suara dari tiap-tiap organisasi dalam suatu gabungan organisasi dan djumlah sisa suara, seluruhnya dalam gabungan organisasi-organisasi itu.
 - n. djumlah wakil sisa jang diperoleh gabungan organisasi-organisasi pa-

da pembagian menurut ketentuan dalam pasal 93 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini.

- o. djumlah wakil sisa jang masih belum terbagi sesudah pembagian menurut ketentuan pasal 98 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini.
 - p. djumlah sisa suara dari masing-masing gabungan organisasi-organisasi gabungan organisasi menurut ketentuan dalam pasal 93 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini.
 - q. djumlah wakil sisa jang diperoleh tiap-tiap organisasi/gabungan organisasi sesudah pembagian djumlah-djumlah wakil menurut ketentuan dalam pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah ini.
 - r. djumlah wakil seluruhnja jang diperoleh tiap-tiap organisasi dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 98 ayat (5) Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Keberatan jang dikemukakan seperti dimaksud dalam pasal 96 Peraturan Pemerintah ini dan keputusan atas keberatan itu dimuat dalam Berita Atjara.
 - (3) Berita Atjara Pembagian djumlah wakil tersebut disimpan oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.

Pasal 100.

- (1) Djika dalam rapat untuk menetapkan pembagian djumlah wakil, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II memutuskan untuk mengadakan pemungutan suara ulangan seperti dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang, maka rapat tersebut berlangsung terus, tetapi tidak menetapkan pembagian pemilihan.
- (2) Setelah Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II menerima Berita Atjara Pemungutan Suara dari pemungutan suara ulangan dimaksud dalam ayat (1), Panitia Pemilihan Daerah

mengadakan rapat terbuka untuk menetapkan pembagian pemilihan dan pembagian djumlah wakil menurut pasal 98 Peraturan Pemerintah ini.

- (3) Apabila dalam hasil pemungutan suara ulangan terdapat lagi hal-hal jang tidak dapat dipertanggung-djawabkan seperti dimaksud dalam pasal 31 Undang-undang, maka Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/ Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II memerintahkan untuk mengadakan pemungutan suara ulangan sekali lagi, sedang penetapan pembagian pemilihan dan pembagian djumlah wakil ditunda sampai rapat terbuka berikutnya.
- (4) Apabila dalam hasil pemungutan suara ulangan jang kedua dimaksud dalam ayat (3) pasal ini masih terdapat hal-hal jang tidak dapat dipertanggung-djawabkan, maka penetapan pembagian pemilihan dan pembagian djumlah wakil dilangsungkan tanpa mengikutsertakan hasil tersebut.
- (5) Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini dilaksanakan dengan mengingat batas waktu jang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang.

Pasal 101.

Dua lembar salinan Berita Atjara dimaksud dalam pasal 99 Peraturan Pemerintah ini, dimasukkan dalam sampul jang kemudian disegel dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, disampaikan :

- a. bagi pemilihan D.P.R.D. I, kepada Lembaga Pemilihan Umum dan Menteri Dalam Negeri.
- b. bagi pemilihan D.P.R.D. II, kepada Lembaga Pemilihan Umum, Menteri dalam Negeri dan Gubernur/Kepala Daerah jang bersangkutan.

Pasal 102.

Isi Berita Atjara, ketjuali keberatan-keberatan dimaksud dalam pasal

96 Peraturan Pemerintah ini, oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II diumumkan dalam daerahnja menurut tjara seperti jang ditentukan dalam pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 103.

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II jang dimaksud dalam pasal 97 Peraturan Pemerintah ini menetapkan untuk Daerah Pemilihannja tjalon-tjalon jang terpilih mendjadi anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 104 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 104.

- (1) Apabila suatu organisasi memperoleh djumlah wakil sama dengan djumlah tjalon organisasi itu, maka semua tjalon terpilih mendjadi anggota.
- (2) Apabila djumlah wakil jang diperoleh suatu organisasi kurang dari djumlah tjalon organisasi itu, maka jang terpilih ialah tjalon-tjalon sebanjak djumlah wakil jang diperoleh organisasi itu menurut urutannya dalam daftar tjalonnja.
- (3) Apabila suatu organisasi memperoleh djumlah wakil lebih dari djumlah tjalon organisasi itu, maka organisasi itu dapat menjampaiakan daftar tjalon susulan menurut ketentuan-ketentuan jang bersangkutan dalam Bab V Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 105.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 96 Peraturan Pemerintah ini dengan perubahan seperlunya berlaku untuk penetapan tjalon-tjalon jang terpilih.

B A B IX.

PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN DAN PEMBERITAHUAN KEPADA TERPILIH

Pasal 106.

Untuk pemilihan anggota D.P.R.

- (1) Panitia Pemilihan Indonesia membuat daftar dari tjalon-tjalon yang ditetapkan terpilih (selandjutnja disebut terpilih), dibagi menurut daerah pemilihan dan menurut Daerah Tingkat II serta diperintji menurut daftar/organisasi.**
- (2) Ketua Panitia tersebut mengumumkan daftar-daftar itu dalam Berita Negara dan menjampaikan kepada masing-masing Panitia Pemilihan Daerah bagian dari daftar yang mengenai daerah pemilihannya/daerahnya.**
- (3) Ketua Panitia Pemilihan Daerah mengumumkan bagian dari daftar itu dalam daerah pemilihan/daerahnya dengan tjara yang ditentukan dalam pasal 51 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah ini.**
- (4) Ketua Panitia Pemilihan Indonesia memberitahukan kepada Ketua Lembaga Pemilihan Umum jumlah dan nama-nama terpilih.**
- (5) Ketua Lembaga Pemilihan Umum memberitahukan kepada Pemerintah jumlah dan nama-nama terpilih.**

Pasal 107.

Untuk pemilihan anggota D.P.R.D.

- (1) Panitia Pemilihan Daerah membuat daftar dari tjalon-tjalon yang ditetapkan terpilih (selandjutnja disebut terpilih) diperintji menurut daftar/organisasi.**
- (2) Ketua Panitia Pemilihan Daerah mengumumkan daftar terpilih itu da-**

lam wilayahnya dengan tjara jang ditentukan dalam pasal 51 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah ini.

- (3) Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I memberitahukan djumlah nama-nama terpilih kepada :
 - a. Pemerintah Daerah jang bersangkutan;
 - b. Panitia Pemilihan Indonesia;
 - c. Lembaga Pemilihan Umum.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II memberitahukan djumlah nama-nama terpilih kepada :
 - a. Pemerintah Daerah jang bersangkutan;
 - b. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;
 - c. Panitia Pemilihan Indonesia;
 - d. Lembaga Pemilihan Umum.
- (5) Ketua Lembaga Pemilihan Umum memberitahukan kepada Pemerintah djumlah dan nama-nama terpilih.

Pasal 108.

- (1) Ketua Panitia Pemilihan Indonesia/Ketua Panitia Pemilihan Daerah memberitahukan penetapan terpilih kepada masing-masing terpilih dengan surat terdaftar, jang dialamatkan kepada alamat jang ditulis dalam surat pentjalonan, jang disampaikan kepada jang berhak menerima dengan tanda penerimaan.

Apabila karena keadaan penetapan tjalon-tjalon jang terpilih jang perlu dipertjepat, maka untuk menjampaikan surat kepada jang berhak menerima itu, Ketua Panitia Pemilihan Indonesia/Panitia Pemilihan Daerah dengan kawat meminta terpilih untuk menemui anggota Panitia Pemilihan Indonesia/Panitia Pemilihan Daerah jang ditundjuk untuk menjampaikan surat kepada jang berhak menerima tersebut ditempat jang ditentukan.

- (2) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah surat pemberitahuan terdaftar dikirimkan, jang ternjata dari tjap pos, atau dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah pemberitahuan kepada jang berhak menerima disampaikan, Panitia Pemilihan Indonesia/Panitia Pemilihan Daerah harus sudah menerima surat dari terpilih jang menjatakan ia menerima penetapan terpilihnja.
- (3) Djika seorang terpilih dalam lebih dari satu Badan Perwakilan, maka ia harus menjatakan untuk Badan Perwakilan mana ia menerima terpilihnja itu.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan Indonesia/Panitia Pemilihan Daerah segera memberitahukan kepada terpilih penerimaan pernjjataan dimaksud dalam ajat (2) pasal ini dengan mengulangi pokok isi pernjjataan. Pemberitahuan dilakukan dengan tjara jang ditentukan dalam ajat (1) kalimat pertama pasal ini.

B A B X.

PENGANTIAN TERPILIH.

Pasal 109.

- (1) Dalam waktu jang ditentukan dalam pasal 108 ajat (2) Peraturan Pemerintah ini, seorang tjalon jang dinjatakan terpilih harus sudah mengirimkan pernjjataan menerima penentanja kepada Panitia Pemilihan Indonesia/Panitia Pemilihan Daerah.
- (2) Apabila dalam waktu jang tersebut pada ajat (1) pasal ini Panitia Pemilihan Indonesia/Panitia Pemilihan Daerah belum menerima surat pernjjataan penerimaan, penetapan terpilih dari seorang terpilih, maka terpilih itu dianggap tidak menerima penetapan terpilihnja, anggapan ini harus dikuatkan dengan surat pernjjataan dari organisasi jang mengemukakan terpilih jang bersangkutan, sebagai tjalon, bahwa terpilih itu tidak menerima penetapan terpilihnja dengan disebutkan alasan-alasannya.

- (3) Alasan yang dianggap wajar dan dapat dibenarkan berdasarkan iktikad baik dari terpilih untuk tidak menerima penetapan terpilihnya adalah apabila terpilih bertempat tinggal diluar negeri bagi terpilih untuk D.P.R. atau tidak bertempat tinggal diwilayah daerah yang meliputi D.P.R.D. yang terpilih itu dinjatakan terpilih.

Pasal 110.

- (1) Apabila seorang terpilih tidak atau dianggap tidak menerima penetapan terpilihnya seperti dimaksud dalam pasal 109 ayat (2) peraturan Pemerintah ini, maka Panitia Pemilihan Indonesia/Panitia Pemilihan Daerah menggantinya dengan tjalon lain menurut urutan dalam daftar tjalon organisasi yang bersangkutan.
- (2) Apabila penggantian seperti tjara tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak mungkin, karena tidak ada lagi tjalon dalam daftar tersebut maka pimpinan organisasi yang bersangkutan mengemukakan tjalon baru untuk ditetapkan sebagai terpilih.

B A B XI

PANITIA PEMERIKSAAN

Pasal 111.

Untuk tiap-tiap Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakyat dibentuk Panitia Pemeriksaan yang berkedudukan ditempat kedudukan Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakyat yang bersangkutan, dengan tugas :

- a. menentukan seorang terpilih sebagai anggota setelah diperiksa dan dibenarkan surat-surat penetapan terpilihnya dan surat-surat keterangan yang menyatakan bahwa syarat-syarat seperti tersebut dalam pasal 16 Undang-undang dan pasal 38 Undang-undang No. 16 tahun 1969, tentang Su-

sunan dan Kedudukan M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D. dan jang dimaksud dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah ini sudah dipenuhi.

b. menentukan permulaan keanggotaan seorang terpilih.

Pasal 112.

- (1) Untuk dapat diangkat mendjadi anggota Panitia Pemeriksaan, seseorang harus memenuhi sjarat-sjarat seperti jang dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan M.P.R. terdiri dari 7 (tudjuh) orang, jang anggota-anggotanja diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, diantaranya seorang ditetapkan sebagai Ketua dan seorang sebagai Sekretaris.
- (3) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan D.P.R. terdiri dari sekurang-kurangnya 7 (tudjuh) orang, jang anggota-anggotanja diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, diantaranya seorang ditetapkan sebagai Ketua dan seorang sebagai Sekretaris.
- (4) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan D.P.R.D. I terdiri dari 5 (lima) orang, jang anggota-anggotanja diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri, diantaranya seorang ditetapkan sebagai Ketua dan seorang sebagai Sekretaris.
- (5) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan D.P.R.D. II terdiri dari 5 (lima) orang, jang anggota-anggotanja diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, diantaranya seorang ditetapkan sebagai Ketua dan seorang sebagai Sekretaris.

Pasal 113.

Panitia Pemeriksaan dibentuk 60 hari sebelum waktu pelantikan Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat jang bersangkutan dan dibubarkan 30 hari sesudah pelantikan itu.

Pasal 114.

Ketua, Sekretaris dan Anggota-anggota Panitia Pemeriksaan sebelum memangku djabatannya mengutjapkan sumpah dihadapan pedjabat yang mengangkatja menurut ketentuan seperti jang dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah ini.

B A B XII.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115.

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 116.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 Djanuari 1970

Presiden Republik Indonesia,

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 13 Djanuari 1970.

Sekretaris Negara R.I.

ttd

ALAMSJAH
(Major Djenderal T.N.I.)

Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1970 No.2.

ttd

SOEHARTO

Djenderal TNI.

P E N D J E L A S A N
atas
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1970

tentang
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN
PERMUSJAWARATAN/PERWAKILAN RAKJAT.

U M U M.

1. Dalam Undang-undang Pemilihan Umum dinjatakan dalam pasal-pasal jang bersangkutan bahwa tata-tjara pelaksanaan materinja diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Disamping ketentuan tersebut, djuga dalam pasal 35 Undang-undang Pemilihan Umum dinjatakan bahwa segala sesuatu jang belum diatur dalam Undang-undang itu diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Berhubung dengan itu, maka Peraturan Pemerintah ini mengatur :
 - a. pelaksanaan ketentuan jang dengan tegas telah dinjatakan dalam pasal-pasal jang bersangkutan;
 - b. pelaksanaan ketentuan selain tersebut huruf a jang untuk pelaksanaannya masih memerlukan pengaturan lebih landjut dengan mendasarkan pasal 35 Undang-undang sebagai landasan hukumnja.
4. Sesuai dengan jang dimaksud angka 3 huruf a, ketentuan-ketentuan jang menghendaki pengaturan pelaksanaannya lebih landjut sebagaimana dinjatakan pasalnya dalam Undang-undang adalah :
 - a. pasal 8 ayat (10) mengenai susunan, tata kerdja dan pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan II, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih dan hal-hal lain jang berhubungan dengan Panitia tersebut ;
 - b. pasal 19 ayat (7) mengenai tata-tjara pendaftaran pemilih ;
 - c. pasal 19 ayat (5) mengenai tata-tjara pelaksanaan pentjalonan ;
 - d. pasal 20 ayat (2) mengenai penjelenggaraan kampanye pemilihan termasuk etika/tata-krama dalam kampanye dan pembatasan waktu untuk kampanye ;
 - e. pasal 21 ayat (5) mengenai bentuk dan isi surat suara serta pelaksanaan pemungutan suara ;
 - f. pasal 22 ayat (3) mengenai tata-tjara pemungutan suara ;

- g. pasal 23 ayat (2) mengenai tata-tjara pelaksanaan penetapan hasil Pemilu ;
 - h. pasal 24 mengenai tata-tjara pengumuman hasil pemilihan dan pemberitahuan kepada terpilih ;
 - i. pasal 25 ayat (3) penggantian terpilih dan hal-hal yang berhubungan dengan Panitia Pemeriksaan.
5. Sesuai dengan ketentuan angka 3 huruf b, maka pengaturan-pengaturan ketentuan dalam Undang-undang yang tidak dengan tegas dinjatakan dalam pasalnja tetapi masih memerlukan pengaturan lebih lanjut untuk pelaksanaannja, adalah ketentuan mengenai :
 - a. hak untuk memilih dan dipilih dimaksud pasal 2 Undang-undang Pemilihan Umum ;
 - b. saat penyelenggaraan pemilihan umum ;
 - c. pelimpahan kewenangan oleh Lembaga Pemilihan Umum kepada Panitia Pemilihan Indonesia mengenai hal-hal yang dianggap perlu untuk penyelenggaraan pemilihan umum ;
 - d. penetapan jumlah anggota yang dipilih.
 6. Pengamanan pelaksanaan pemilihan umum yang menjamin suksesnja perjuangannya Orde Baru, tetap tegaknja Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945.
 7. Sesuai dengan pokok-pokok hal yang diatur dalam Undang-undang Pemilihan Umum, maka juga Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur pelaksanaan pemilihan Anggota D.P.R. dan D.P.R.D. I dan II sadja, sedangkan mengenai pengisian Anggota M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D. I dan II yang diangkat, termasuk pengisian Anggota tambahan M.P.R., pelaksanaannja diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 16 tahun 1969, tentang Susunan dan Kedudukan M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D.
 8. Dalam badan-badan pelaksana/penyelenggara pemilihan umum diikuti-sertakan pula unsur-unsur kekuatan sosial. Duduknja unsur-unsur kekuatan sosial tersebut dimaksudkan supaya bersama-sama dengan Pemerintah melaksanakan pemilihan umum. Lembaga Pemilihan Umum bertugas mengumpulkan data-data dan perentjanaan serta persiapan pelaksanaan pemilihan umum berikutnya, karena itu Lembaga Pemilihan Umum bersifat permanen. Tetapi Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih ditentukan untuk jangka waktu tertentu.

9. Penetapan djumlah Anggota D.P.R. jang dipilih untuk tiap Daerah Tingka I/daerah pemilihan ditentukan sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1970, tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D. serta penjelasannya.
10. Karena tudjuan pemilihan umum ini adalah tetap tegaknja Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945, maka dalam kampanye, Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945, tidak dibenarkan dipersoalkan lagi. Djuga harus dihindarkan hal-hal jang dapat menimbulkan pertentangan dan jang dapat mengakibatkan perpetjahan dalam masjarakat. Ketentuan dalam Bab VI dimaksudkan agar kampanye pemilihan umum dan pemilihan umum itu sendiri dapat berdjalan dengan tertib dan aman.
11. Dalam menjusun Panitia Pemeriksaan diambil sebagai pedoman susunan badan-badan pelaksana/penjelenggara pemilihan umum, jaitu terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan unsur-unsur kekuatan sosial.
12. Berhubung dengan situasi dan kondisi di IRIAN BARAT jang belum memungkinkan pelaksanaan pemilihan umum sepenuhnya atas dasar Peraturan Pemerintah ini, maka untuk pelaksanaan pemilihan umum dipropinsi itu perlu diadakan pengaturan setjara khusus.

Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia nomor 2919.

DAFTAR – PEMILIH **SEMENTARA/TETAP/TAMBAHAN**

Model A.

DESA :
KETJAMATAN :
KABUPATEN :
DAERAH PEMILIHAN :

PEMILIH

Nomor Urut	Nama Lengkap (termasuk nama panggilan)	Umur	Kawin (sudah/ pernah/ belum).	Lk. Pr.	Alamat Lengkap	Pekerjaan
1	2	3	4	4	5	7

Disahkan tanggal

Diumumkan tgl.

Panitia Pemungutan Suara

TJAP Kepala Desa,

Panitia Pendaftaran Pemilihan

K e t u a.

Tanda tangan :

Tjap (Panitia Pemungutan Suara

Ketjamatan).

1. Ketua,
2. Anggota,
3. Anggota,

**SURAT PENTJALONAN UNTUK ANGGOTA
DPR, DPRD I DAN DPRD II 1).**

Daftar tjalon kumpulan

1) dikemukakan untuk :

daerah-pemilihan

dengan memakai nama

dan tanda gambar Nr. 2)

Untuk pembagian kursi-kursi pertama digabungkan dengan daftar (daftar-
daftar) 1) jang memakai tanda gambar Nr. 2),

Nr. 2), ... 2)/

..... 3), ... 3)

..... 3)

jang dikemukakan oleh dkk. 4),

..... dkk. 4), ...

.....

.....

dengan perdjandjian, bahwa kursi jang diperoleh karena gabungan ini di-
berikan :

ke-1 kepada ke-2 kepada

Untuk pembagian kursi-kursi sisa gabungan dengan daftar (daftar-daftar) 1)

jang memakai tanda gambar

Nr. Nr.

.....

.....

..... 3)

jang dikemukakan oleh dkk. 4) ,
 dkk. 4)

 dkk. 4) 5) .
 19...

Pemilih pertama
 jang mengemukakan daftar tjalon

Nama :

Tanda tangan :

Keterangan tentang pengisian surat.

- 1) Ditjoret jang tidak diperlukan.
- 2) Dikosongkan apabila tanda gambar belum ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum.
- 3) Ditulis nama tjalon pertama dengan disertai dkk, apabila tanda gambar belum ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum.
- 4) Ditulis nama pemilih pertama jang mengemukakan tjalon, apabila tanda gambar belum ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum.
- 5) Tjap Panitia Pemungutan Suara atau Panitia Pemilihan untuk warga negara Indonesia diluar negeri jang memberikan surat pentjalonan ini.

DAFTAR TJALON KUMPULAN.

N a m a :

Tanda gambar No. :

Nomor Urut	Nama tjalon	Tempat kediaman	Tanda tangan

Lampiran C.

No. 1)

**SURAT PERNJATAAN KESEDIAAN DAN
PERSETUDJUAN TJALON.**

Jang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap :

menjatakan kesediaannya untuk ditjalonkan :

dalam daerah pemilihan :

oleh 2) dkk.

dan menjatakan persetudjuannya tentang tempat jang diberikan kepadanya
dalam urutan daftar.

..... 3), ...19... 4)

Jang menjatakan :

..... 5)

Keterangan atas Lampiran C.

- 1) Diisi nomor urutan tempat tjalon dalam daftar kumpulan.
- 2) Disebut partai atau organisasi dan namanja; atau djika ditjalonkan bukan oleh partai atau organisasi disebut nama pemilih pertama jang mentjalonkan.
- 3) Tempat kediaman tjalon.
- 4) Hari dan tanggal.
- 5) Tanda tangan tjalon jang menjatakan.

Lampiran D.

No. 1)

SURAT KETERANGAN.

Ketua Panitia Pemungutan Suara :

daerah-pemungutan suara
kabupaten
daerah-pemilihan
menerangkan, bahwa pemilih bernama
umur terdaftar dalam daftar pemilih
desa No.

....., ... 19...

Ketua tersebut,

Tjap Panitia

Pemungutan Suara.

Keterangan atas Lampiran D.

- 1) Diisi oleh pemilih dengan angka yang sama dengan angkanja dalam nomor urutan nama-nama yang mengemukakan tjalon.

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1970**

tentang

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKJAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKJAT DAERAH.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan pelaksanaan dan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota ta-anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat;
3. Undang-undang nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT, DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :

- a. Undang-undang ialah Undang-undang nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- b. M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D. ialah pengertian seperti dimaksud dalam Undang-undang;
- c. Organisasi Golongan Politik dan Golongan Karya ialah organisasi seperti dimaksud dalam pasal 17 dan/atau pasal 34 Undang-undang nomor 15 tahun 1969;
- d. Utusan Daerah ialah seorang jang diutus oleh Daerah atas hasil pemilihan oleh D.P.R.D. I jang bersangkutan untuk mendjadi Anggota M.P.R. jang bersangkutan membawakan kepentingan rakjat jang ada didaerahnja dan mengetahui serta mempunyai tindjauan jang menjeluruh mengenai persoalan Negara pada umumnja seperti dimaksud dalam Undang-undang.

B A B II

SUSUNAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT, DEWAN PERWA KILAN RAKJAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH BAGIAN I

SUSUNAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT

1. DJUMLAH ANGGOTA

Pasal 2.

- (1) Djumlah Anggota M.P.R. adalah dua kali djumlah Anggota D.P.R. jaitu sebanjak 260 (sembilan ratus dua puluh) orang terdiri dari :
- a. Anggota D.P.R. sebanjak 460 (empat ratus enam puluh) orang ;
 - b. Anggota tambahan Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya jang ditetapkan berdasarkan imbangan suara hasil pemilihan umum sebanjak 112 (seratus dua belas) orang, jaitu djumlah 920 (sembilan ratus dua puluh) orang Anggota M.P.R. dikurangi djumlah Anggota D.P.R. dimaksud huruf a, Anggota tambahan Utusan Golongan Karya dimaksud huruf c, Anggota tambahan Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya dimaksud huruf d dan Anggota tambahan Utusan Daerah dimaksud huruf e;
 - c. Anggota tambahan Utusan Golongan Karya Angkatan Bersendjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata jang diangkat sebanjak 207 (dua ratus tudjuh) orang, jaitu sepertiga dari djumlah 920 (sembilan ratus dua puluh) orang Anggota M.P.R. dikurangi 100 (seratus) orang djumlah Anggota M.P.R. berasal dari Anggota D.P.R. jang diangkat;
 - d. Anggota tambahan Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya jang iktu Pemilihan Umum tetapi tidak mendapat wakil di D.P.R. sebanjak 10 (sepuluh) orang jaitu djumlah maksimum menurut ketentuan pasal 1 ayat(3) huruf b Undang-undang, apabila berdasarkan hasil Pemilihan Umum djumlah organisasi jang ikut Pe-

milihan Umum tetapi tidak mendapat wakil di D.P.R. itu tidak kurang dari 10 (sepuluh) ;

- e. Anggota tambahan Utusan Daerah yang ditetapkan sekurang-kurangnya 4 (empat) dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I, dengan dasar perhitungan untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I yang berpenduduk :

kurang dari 1.000.000 (satu djuta) orang mendapat 4 (empat) orang utusan ;

1.000.000 (satu djuta) orang sampai 5.000.000 (lima djuta) orang mendapat 5 (lima) orang Utusan ;

5.000.000 (lima djuta) orang sampai 10.000.000 (sepuluh djuta) orang mendapat 6 (enam) orang Utusan ;

10.000.000 (sepuluh djuta) orang keatas mendapat 7 (tujuh) orang Utusan, berdjumlah 131 (seratus tiga puluh satu) orang dengan perintjian sebagai berikut :

Daerah Khusus Ibukota Djakarta	6	orang
Djawa Barat	7	orang
Djawa Tengah	7	orang
Daerah Istimewa Jogjakarta	5	orang
Djawa Timur	7	orang
Sumatera Selatan	5	orang
Bengkulu	4	orang
Lampung	5	orang
Djambi	4	orang
R i a u	5	orang
Sumatera Barat	5	orang

Sumatera Utara	7	orang
Daerah Istimewa Atjeh	6	orang
Kalimantan Barat	5	orang
Kalimantan Tengah	4	orang
Kalimantan Selatan	5	orang
Kalimantan Timur	4	orang
Sulawesi Utara	5	orang
Sulawesi Tengah	4	orang
Sulawesi Selatan	6	orang
Sulawesi Tenggara	4	orang
B a l i	5	orang
Nusa Tenggara Barat	5	orang
Nusa Tenggara Timur	5	orang
M a l u k u	4	orang
Irian Barat	4	orang

- (2) Perhitungan djumlah Utusan Daerah dimaksud ajat (1) huruf e pasal ini, didasarkan atas sensus terachir dan akan bertambah atau berkurang dengan memperhatikan perkembangan pada saat dilangsungkannya Pemilihan Umum.
- (3) Penambahan atau pengurangan djumlah Utusan Daerah dimaksud a—jat (2) pasal ini diatur oleh Presiden jang dapat melimpahkan kewenangannya kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Perubahan djumlah dimaksud ajat (1) huruf b pasal ini tergantung pada hasil perhitungan ajat (1) huruf d dan e.

2. ANGGOTA TAMBAHAN UTUSAN GOLONGAN POLITIK DAN GOLONGAN KARYA

Pasal 3.

- (1) Organisasi Golongan Politik dan Golongan Karya yang ikut Pemilihan Umum dan mendapat wakil di D.P.R., memperoleh tambahan Anggota berdasarkan imbang suara hasil Pemilihan Umum yang diperolehnya.
- (2) Jumlah Anggota tambahan Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah ini, menurut ketentuan ayat (1) pasal ini dibagi atas dasar perhitungan jumlah hasil Pemilihan Umum yang diperoleh organisasi bersangkutan dibagi jumlah hasil Pemilihan Umum keseluruhan organisasi yang ikut pemilihan dikalikan jumlah tambahan yang tersedia.
- (3) Dalam menentukan jumlah tambahan Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya dimaksud ayat (2) pasal ini, diadakan pembulatan keatas apabila hasil angka perhitungan berupa angka petjahan lebih dari setengah dan dihilangkan, apabila kurang dari setengah.
- (4) Djaminan 1 (satu) Utusan yang diberikan kepada organisasi Golongan Politik dan Golongan Karya yang ikut Pemilihan Umum tetap tidak mendapat wakil di D.P.R. dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah ini yang jumlah keseluruhannya tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) orang, ditentukan berdasarkan urutan suara terbanjak dari jumlah hasil keseluruhan daerah pemilihan.
- (5) Apabila suara yang diperoleh organisasi-organisasi dimaksud ayat (4) pasal ini sama banjaknya, maka djaminan 1 (satu) Utusan tersebut diberikan kepada organisasi yang mempunyai tjabang paling banjak terbesar di Daerah Tingkat I.
- (6) Apabila suara yang diperoleh organisasi-organisasi dimaksud ayat (4) pasal ini sama banjaknya, sedang organisasi-organisasi tersebut mempunyai tjabang yang sama tersebar di Daerah Tingkat I, maka djaminan 1 (satu)

Utusan diberikan kepada organisasi yang mempunyai jabatan paling banyak tersebar di Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

- (7) Apabila suara yang diperoleh organisasi-organisasi dimaksud ayat (4) pasal ini sama banyaknya dan sama-sama mempunyai jabatan yang tersebar di Daerah Tingkat I dan II setara seimbang pula, maka jaminan 1 (satu) Utusan diputuskan oleh Presiden.
- (8) Tjalon Utusan tambahan M.P.R. Golongan Politik dan Golongan Karya dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf b dan d Peraturan Pemerintah ini diusulkan oleh organisasi bersangkutan kepada Presiden, dari urutan dalam daftar tjalon yang telah disahkan.
- (9) Tata cara pengajuan tjalon Anggota tambahan Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya dimaksud pasal ini diatur lebih lanjut oleh Presiden yang dapat melimpahkan kewenangannya kepada Menteri Dalam Negeri.

3. ANGGOTA TAMBAHAN UTUSAN GOLONGAN KARYA ANGKATAN BERSENDJATA DAN GOLONGAN KARYA BUKAN ANGKATAN BERSENDJATA JANG DIANGKAT

Pasal 4.

- (1) Anggota tambahan yang diangkat terdiri dari Utusan Golongan Karya Angkatan Bersendjata dan Utusan Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata.
- (2) Imbangan jumlah Anggota tambahan Utusan Golongan Karya yang mewakili Angkatan Bersendjata adalah 3 (tiga) berbanding 1 (satu).

Pasal 5.

- (1) Golongan Karya Angkatan Bersendjata dimaksud pasal 4 ayat (1)

Peraturan Pemerintah ini meliputi :

- a. Angkatan Darat Republik Indonesia ;
 - b. Angkatan Laut Republik Indonesia ;
 - c. Angkatan Udara Republik Indonesia ;
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Tjalon Golongan Karya Angkatan Bersendjata dimaksud ajat (1) pasal ini diusulkan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata kepada Presiden.
 - (3) Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata dimaksud pasal 4 ajat (1) Peraturan Pemerintah ini ialah sebagian Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata jang tidak ikut Pemilihan Umum, tetapi merupakan kekuatan dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, keagamaan dan sebagai pionir.
 - (4) Tjalon dari Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata dimaksud ajat (3) pasal ini diusulkan oleh Gabungan Organisasi Golongan Karya/Sekretariat Bersama Golongan Karya kepada Presiden sekurang-kurangnya dua kali dan sebanjak-banjaknja empat kali djumlah Utusan jang ditetapkan.
 - (5) Presiden atas prakarsa sendiri dapat mengangkat Anggota tambahan Utusan Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata dimaksud ajat (3) diluar tjalon dimaksud ajat (4) pasal ini.
 - (6) Tata-tjara pengadjuan tjalon Anggota tambahan Utusan Golongan Karya Angkatan Bersendjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata jang diangkat dimaksud pasal ini diatur lebih landjut oleh Presiden jang dapat melimpahkan kewenangannja kepada Menteri Dalam Negeri.

4. ANGGOTA TAMBAHAN UTUSAN DAERAH

Pasal 6.

- (1) Utusan Daerah terdiri atas Gubernur Kepala Daerah dan eksponen-

eksponen Daerah yang dapat diambil dari Golongan Politik dan Golongan Karya baik yang berasal dari Anggota maupun bukan Anggota D.P.R.D.

- (2) Utusan Daerah dipilih oleh D.P.R.D. I dalam rapat paripurna terbuka.
- (3) Untuk penyelenggaraan pentjalonan dan pemilihan oleh D.P.R.D. I dibentuk Panitia Tehnis pelaksanaan.
- (4) Pentjalonan dan pemilihan Utusan Daerah diatur sebagai berikut :
 - a. Nama tjalon diadjudkan dalam rapat pleno terbuka D.P.R.D. I yang diadakan khusus untuk pentjalonan dan pemilihan Utusan Daerah ;
 - b. Tjalon yang diadjudkan harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota D.P.R.D. I ;
 - c. Djumlah tjalon yang diadjudkan untuk dipilih sebanyak-banyaknya dua kali djumlah Anggota tambahan Utusan Daerah yang ditetapkan bagi tiap-tiap Daerah Tingkat I ;
 - d. Panitia Tehnis dimaksud ayat (3) pasal ini mengadakan penelitian yang meliputi juga penelitian sjarat-sjarat dan ketentuan keanggotaan M.P.R. ;
 - e. Hasil penelitian disertai pendapat Panitia Tehnis dimuat dalam berita atjara dan diadjudkan dalam rapat paripurna terbuka dimaksud huruf a ayat ini;
 - f. Nama tjalon yang memenuhi sjarat-sjarat dan ketentuan dimaksud huruf d dan b ayat ini adalah tjalon yang dapat dipilih dalam rapat dimaksud huruf a ayat ini ;
 - g. Masing-masing Anggota D.P.R.D. I dalam rapat tersebut hanya memberikan suara untuk seorang tjalon ;
 - h. Tjalon yang mendapat suara terbanjak berturut-turut adalah tjalon terpilih ;
 - i. Hasil pemilihan Anggota tambahan Utusan Daerah dimuat dalam berita atjara dan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

- (5) Menteri Dalam Negeri mengatur lebih lanjut tentang tata-tjara pentja-lonan dan pemilihan Anggota tambahan Utusan Daerah dimaksud pasal ini.

BAGIAN II

SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

1. DJUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

Pasal 7.

- (1) Anggota D.P.R. adalah sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) orang terdiri dari :
- a. 360 (tiga ratus enam puluh) orang Anggota dari Golongan Politik dan Golongan Karya jang dipilih ;
 - b. 100 (seratus) orang Anggota dari Golongan Karya jang diangkat.
- (2) Djumlah Anggota dimaksud ajat (1) huruf a pasal ini dipilih dalam 26 (dua puluh enam) daerah pemilihan, jaitu sedjumlah Daerah Tingkat I, dengan perhitungan untuk sekurang-kurangnja 400.000 (empat ratus-ribu) orang penduduk mendapat seorang wakil.
- (3) Dengan memperhatikan ketentuan dimaksud pasal 5 dan 6 Undang-undang nomof 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat dan pendjelasannja, djumlah Anggota jang dipilih untuk tiap-tiap daerah pemilihan/ Daerah Tingkat I dimaksud ajat (2) pasal ini adalah sebagai berikut :

Daerah Khusus Ibukota Djakarta	11	orang
Djawa Barat	43	orang
Djawa Tengah	57	orang

Daerah Istimewa Jogjakarta	8	orang
Djawa Timur	64	orang
Lampung	6	orang
Sumatera Selatan	10	orang
R i a u	6	orang
D j a m b i	6	orang
Bengkulu	4	orang
Sumatera Barat	14	orang
Sumatera Utara	17	orang
Dacrah Istimewa Atjeh	9	orang
B a l i	8	orang
Nusa Tenggara Barat	6	orang
Nusa Tenggara Timur	12	orang
Kalimantan Timur	6	orang
Kalimantan Tengah	6	orang
Kalimantan Barat	7	orang
Kalimantan Selatan	10	orang
Sulawesi Utara	6	orang
Sulawesi Tengah	4	orang
Sulawesi Tenggara	4	orang
Sulawesi Selatan	23	orang
M a l u k u	4	orang
Irian Barat	9	orang

(4) Perhitungan djumlah Anggota D.P.R. dimaksud ajat (3) pasal ini

didasarkan atas sensus terachir dan akan bertambah atau berkurang dengan memperhatikan perkembangan pada saat dilangsungkan Pemilihan Umum.

- (5) Dalam menentukan djumlah Anggota D.P.R. dimaksud ajat (3) pasal ini, diadakan pembulatan keatas apabila hasil angka perhitungan berupa angka petjahan lebih dari setengah dan dihilangkan apabila kurang dari setengah.

2. ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT JANG DIANGKAT

Pasal 8.

- (1) Anggota D.P.R. jang diangkat terdiri dari Golongan Karya Angkatan Bersendjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata dimaksud pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Imbangan djumlah Anggota dari Golongan Karya jang mewakili Angkatan Bersendjata dan bukan Angkatan Bersendjata dimaksud ajat (1) pasal ini adalah 3 (tiga) berbanding 1 (satu), jaitu sebanjak 75 (tudjuh puluh lima) orang untuk Golongan Karya jang mewakili Angkatan Bersendjata dan 25 (dua puluh lima) orang untuk Golongan Karya jang mewakili bukan Angkatan Bersendjata.
- (3) Ketentuan dimaksud pasal 5 ajat (2) Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi pentjalonan Golongan Karya Angkatan Bersendjata dimaksud pasal ini.
- (4) Ketentuan dimaksud pasal 5 ajat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi pentjalonan Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata dimaksud pasal ini.

BAGIAN III

SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH

1. DJUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH TINGKAT I DAN II

Pasal 9.

- (1) Anggota D.P.R.D. adalah :**
 - a. Sekurang-kurangnja 40 (empat puluh) dan sebanyak-banyaknja 75 (tudjuh puluh lima) orang bagi Daerah Tingkat I dengan perhitungan sekurang-kurangnja untuk 200.000 (dua ratus ribu) orang penduduk mendapat seorang wakil; dan**
 - b. sekurang-kurangnja 20 (dua puluh) dan sebanyak-banyaknja 40 (empat puluh) orang bagi Daerah Tingkat II dengan perhitungan untuk sekurang-kurangnja 10.000 (sepuluh ribu) orang penduduk mendapat seorang wakil.**
- (2) Djumlah Anggota D.P.R.D. dimaksud ayat (1) terdiri dari :**
 - a. Anggota dari Golongan Politik dan Golongan Karya jang dipilih ;**
 - b. Anggota jang diangkat dari Golongan Karya.**
- (3) Djumlah Anggota D.P.R.D. adalah :**
 - a. Untuk Daerah Tingkat I Djawa Barat, Djawa Tengah dan Djawa Timur, masing-masing sebanyak 75 (tudjuh puluh lima) orang,**
 - b. Untuk Daerah Tingkat I selain disebut pada huruf a pasal ini, masing-masing sebanyak 40 (empat puluh) orang.**
- (4) Perhitungan djumlah Anggota D.P.R.D. I didasarkan atas sensus terakhir dan dapat berubah dengan memperhatikan perkembangan pada**

saat dilangsungkannya Pemilihan Umum.

- (5) Menteri Dalam Negeri menetapkan jumlah Anggota D.P.R.D. II dengan memperhatikan ketentuan dimaksud ayat (1) huruf b dan ayat (2) pasal ini.
- (6) Perubahan jumlah Anggota D.P.R.D. I dan II ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

2. ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH JANG DIANGKAT.

Pasal 10.

- (1) Anggota D.P.R.D. dari Golongan Karya jang diangkat terdiri dari Golongan Karya Angkatan Bersendjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata dimaksud pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Jumlah Anggota D.P.R.D. jang diangkat dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah ini adalah seperlima dari jumlah Anggota D.P.R.D. bersangkutan.
- (3) Dalam menentukan jumlah Anggota jang diangkat dimaksud ayat (2) pasal ini, diadakan pembulatan keatas apabila hasil bagi dari seperlima jumlah Anggota berupa angka petjahan lebih dari setengah dan hilangkan apabila kurang dari setengah.
- (4) Imbangan jumlah Anggota Golongan Karya jang mewakili Angkatan Bersendjata dan bukan Angkatan Bersendjata dimaksud ayat (1) pasal ini adalah 3 (tiga) berbanding 1 (satu).

Pasal 11.

- (1) Tjalon dari Golongan Karya Angkatan Bersendjata diusulkan oelh Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata atau pedjabat jang ditundjuknja kepada Menteri Dalam Negeri.

- (2) Tjalon dari Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata diusulkan oleh Gabungan Organisasi Golongan Karya/Sekretariat Bersama Golongan Karya kepada Menteri Dalam Negeri sekurang-kurangnya dua kali dan sebanjak-banjaknya empat kali djumlah jang ditetapkan.
- (3) Menteri Dalam Negeri atas prakarsa sendiri dapat mengangkat Anggota Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata diluar tjalon dimaksud ajat (2) pasal ini.

B A B III

KEANGGOTAAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT, DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH.

BAGIAN I

PERSJARATAN KEANGGOTAAN

1. SJARAT-SJARAT DAN KETENTUAN KEANGGOTAAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

Pasal 12.

- (1) Untuk mendjadi Anggota M.P.R. harus dipenuhi sjarat-sjarat dimaksud pasal 2 ajat (1) dan ketentuan keanggotaan dimaksud pasal 2 ajat (2) Undang-undang, sedang untuk mendjadi Anggota D.P.R. harus dipenuhi sjarat-sjarat dimaksud pasal 11 ajat (1) dan ketentuan keanggotaan dimaksud pasal 11 ajat (2) Undang-undang.
- (2) Untuk melaksanakan penelitian tjalon Anggota M.P.R./D.P.R. mengenai sjarat-sjarat dan ketentuan keanggotaan dimaksud ajat (1) pasal ini Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum dimaksud pasal 8 ajat (3) Undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusjawaratan Rakjat/Perwakilan Rakjat membentuk Panitia Penelitian Pusat, jang meneliti pula ada atau tidak adanya pemberian amnesti atau abolisi atau grasi.
- (3) Daftar riwayat hidup lengkap, surat keterangan tidak tersangkut G.30.S./P.K.I. tidak terlibat dalam pemberontakan dimaksud Keputusan Presiden nomor 449 tahun 1961 dan pemberontakan-pemberontakan lainnya, kesetiaan kepada Pantja-Sila sebagai dasar dan ideologi Negara serta kepada Undang-undang Dasar 1945, bagi tjalon Anggota M.P.R./D.P.R. harus diteliti pula oleh Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan-

an dan Ketertiban.

- (4) Ketentuan bagi anggota M.P.R./D.P.R. untuk bertempat tinggal didalam wilayah Republik Indonesia, dimaksud pasal 2 ayat (2) dan 11 ayat (2) Undang-undang, adalah wilayah dalam batas-batas pengertian setjara geografis.
- (5) Anggota M.P.R./D.P.R. jang pindah tempat-tinggal dan menetap diluar wilayah geografis Negara Republik Indonesia gugur keanggotaannja.

**SJARAT-SJARAT DAN KETENTUAN KEANGGOTAAN
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
TINGKAT I DAN II.**

Pasal 13.

- (1) Untuk mendjadi Anggota D.P.R.D. I harus dipenuhi sjarat-sjarat dimaksud pasal 18 ayat (1) dan ketentuan keanggotaan dimaksud pasal 18 ayat (2) Undang-undang.
- (2) Untuk mendjadi Anggota D.P.R.D. II harus dipenuhi sjarat-sjarat dimaksud pasal 25 ayat (1) dan ketentuan keanggotaan dimaksud pasal 25 ayat (2) Undang-undang.
- (3) Anggota D.P.R.D. I dan II jang pindah tempat tinggal dan menetap diluar wilayah Daerah Tingkat I dan II jang bersangkutan gugur keanggotaannja.
- (4) Untuk melakukan penelitian tjalon Anggota D.P.R.D. I dan II mengenai sjarat-sjarat dan ketentuan keanggotaan dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum dimaksud pasal 8 ayat (3) Undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat membentuk Panitia Penelitian Daerah, jang harus meneliti pula ada atau tidaknja pemberian amnesti atau abolisi atau grasi.
- (5) Ketentuan dimaksud pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi tjalon Anggota D.P.R.D. I dan II, dengan ketentuan bahwa penelitiannja dilakukan oleh Pelaksana Khusus Komando Operasi Pemilihan Keamanan dan Ketertiban.

BAGIAN II

PERESMIAN KEANGGOTAAN

Pasal 14.

- (1) Anggota M.P.R./D.P.R. diresmikan keanggotaannya dan pemberhentian-dengan Keputusan Presiden.
- (2) Anggota D.P.R.D. I diresmikan keanggotaannya dan pemberhentiannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (3) Anggota D.P.R.D. II diresmikan keanggotaannya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri dan diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Anggota D.P.R.D. I dan II yang diangkat seperti dimaksud pasal 17 ayat (4) huruf a dan pasal 24 ayat (4) huruf a Undang-undang, diresmikan keanggotaan dan pemberhentiannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Anggota D.P.R.D. I dan II yang diangkat seperti dimaksud pasal 17 ayat (4) huruf g dan pasal 24 ayat (4) huruf b Undang-undang, diresmikan keanggotaan dan pemberhentiannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (6) Tata-tjara peresmian keanggotaan dan pemberhentian Anggota M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D. dimaksud pasal ini diatur lebih lanjut oleh pedja-bat yang berwenang.

BAGIAN III

PENGAMBILAN SUMPAH/DJANDJI

Pasal 15.

- (1) Pengambilan sumpah/djandji keanggotaan M.P.R./D.P.R. bersama-sama dilakukan menurut agamanya masing-masing oleh Ketua Mahkamah Agung didalam rapat paripurna M.P.R./D.P.R.
- (2) Pengambilan sumpah/djandji keanggotaan D.P.R.D. I bersama-sama dilakukan oleh Kepala Pengadilan Tinggi atas nama Ketua Mahkamah Agung didalam rapat paripurna D.P.R.D. I.
- (3) Pengambilan sumpah/djandji keanggotaan D.P.R.D. II bersama-sama dilakukan oleh Kepala Pengadilan Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung didalam rapat paripurna D.P.R.D. II.

- (4) Di Daerah Tingkat I yang tidak/belum ada Pengadilan Tinggi, pengambilan sumpah/djandji keanggotaan D.P.R.D. I dilakukan oleh Kepala Pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (5) Di Daerah Tingkat II yang tidak/belum ada Pengadilan Negeri, pengambilan sumpah/djandji keanggotaan D.P.R.D. II dilakukan oleh Kepala Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

BAGIAN IV

MASA KEANGGOTAAN

Pasal 16.

- (1) Masa keanggotaan M.P.R., dan D.P.R. dan D.P.R.D. adalah lima tahun, dan mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.
- (2) Pada saat Anggota M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D. yang baru diambil sumpah/djandjinya oleh pejabat yang berwenang dimaksud pasal 15 Peraturan Pemerintah ini, maka badan permusyawaratan/perwakilan rakyat yang lama bubar, dan para Anggotanya diresmikan pemberhentiannya oleh pejabat yang berwenang.

BAGIAN V

PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU DAN PENGANTIANNYA

Pasal 17.

- (1) Anggota M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D. berhenti antar waktu karena sebab-sebab ketentuan pasal 4 ayat (1) pasal 20 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) Undang-undang.
- (2) Peresmian pemberhentian dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan keputusan pejabat yang berwenang dimaksud pasal 14 Peraturan Pemerintah ini dan memperhatikan ketentuan dimaksud pasal 4 ayat (4) Undang-undang.

Pasal 18.

- (1) Tjalon pengganti untuk mengisi lowongan keanggotaan antar waktu bagi Anggota Golongan Politik dan Golongan Karya yang dipilih :
 - a. Untuk M.P.R./D.P.R. diadjudkan oleh organisasi yang bersangkutan kepada Presiden melalui Pimpinan M.P.R./D.P.R.;
 - b. Untuk D.P.R.D. I dan II diadjudkan oleh organisasi yang bersangkutan melalui Pimpinan D.P.R.D. I dan II yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur Kepala Daerah;
 - c. Tjalon dimaksud ajat ini diambil dari urutan dalam daftar tjalon yang telah disahkan.
- (2) Tjalon pengganti untuk mengisi lowongan keanggotaan antar waktu bagi anggota tambahan Utusan Daerah dimaksud pasal 8 Undang-undang diadjudkan oleh D.P.R.D. I yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- (3) Tjalon pengganti untuk mengisi lowongan keanggotaan antar waktu Anggota M.P.R./D.P.R. yang diangkat diadjudkan melalui Pimpinan M.P.R./D.P.R. kepada Presiden :
 - a. bagi Golongan Karya Angkatan Bersendjata oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata;
 - b. bagi Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata oleh organisasi yang bersangkutan melalui Gabungan Organisasi Golongan Karya/Sekretariat Bersama Golongan Karya.
- (4) Tjalon pengganti untuk mengisi lowongan keanggotaan antar waktu Anggota D.P.R.D. I dan II yang diangkat diadjudkan melalui Pimpinan D.P.R.D. I dan II kepada Menteri Dalam Negeri :
 - a. bagi Golongan Karya Angkatan Bersendjata oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata;
 - b. bagi Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata oleh organisasi yang bersangkutan melalui Gabungan Organisasi Golongan Karya/Sekretariat Bersama Golongan Karya.
- (5) Pimpinan M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D. yang bersangkutan harus segera meneruskan tjalon pengganti yang diadjudkan tersebut kepada pejabat yang berwenang meresmikan.

Pasal 19.

- (1) Pemberhentian keanggotaan antar waktu M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D. mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dalam surat keputusan peresmian pemberhentiannya.
- (2) Selambat-lambatnya satu bulan setelah diterimanya surat keputusan peresmian keanggotaan oleh Anggota yang baru, maka pelantikan/pengambilan sumpah/djandji Anggota tersebut harus dilakukan.

BAGIAN VI

**PIMPINAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKJAT DAERAH**

Pasal 20.

- (1) Pimpinan M.P.R. terdiri dari seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua, yang meliputi Golongan Politik, Golongan Karya dan Utusan Daerah.
- (2) Pimpinan D.P.R. terdiri dari seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua, yang meliputi Golongan Politik dan Golongan Karya.
- (3) Pimpinan D.P.R.D. I dan II terdiri atas seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang meliputi Golongan Politik dan Golongan Karya.
- (4) Selama Pimpinan yang baru belum ditetapkan, musjawarah-musjawarah dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dibantu oleh Anggota yang termuda usianya.
- (5) Tata-tjara pemilihan Anggota Pimpinan D.P.R.D. I dan II ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib D.P.R.D. yang bersangkutan, yang ditetapkan berdasarkan pedoman dari Menteri Dalam Negeri.

B A B IV

RANGKAPAN DJABATAN

Pasal 21.

Untuk mendjadi Anggota M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D. Pegawai Negeri Sipil harus mendapat persetujuan dari dan dibebaskan untuk sementara waktu dari djabatan organiknja oleh Menteri atau pedjabat jang berwenang.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22.

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam peraturan pelaksanaan ini akan diatur lebih landjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 23.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 Djanuari 1970.

Presiden Republik Indonesia,
t.t.d.

SOEHARTO.

Djenderal T.N.I.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 13 Djanuari 1970.

Sekretaris Negara Republik Indonesia,
t.t.d.

ALAMSJAH

Major Djenderal TNI.

Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1970 No. 3.

P E N D J E L A S A N

atas

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1970

tentang

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MADJELIS
PERMUSJAWARATAN RAKJAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKJAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH.**

I. U M U M.

1. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 46 Undang-undang yang menjatakan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu segera mengadakan pengaturan-pengaturan lebih lanjut daripada ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Undang-undang.

Peraturan Pemerintah ini bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan tersebut, yaitu mengadakan pengaturan-pengaturan :

- a. pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang dengan tegas diperintahkan oleh Undang-undang untuk diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan Pemerintah ;
 - b. beberapa ketentuan dalam Undang-undang yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaannya ;
 - c. mengenai pelimpahan kewenangan kepada pejabat yang berwenang sehingga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan Undang-undang ;
 - d. yang berfungsi pengamanan pelaksanaan Undang-undang.
2. Pemilihan Umum merupakan sarana utama bagi Pemerintahan yang bersemdikan kedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakjatan dan permusjawaratan perwakilan.

Disamping itu pelaksanaan Undang-undang nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Madjelis Permusjawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dan pelaksanaan Undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakyat

harus pula mendjamin tegaknja Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945. Ini berarti harus pula terdjamin tegaknja Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan sistim pemerintahannja jang meletakkan tanggung-djawab tertinggi penjelenggaraan Pemerintahan Negara ditangan Presiden dibawah Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara jang tidak bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat, akan tetapi kedudukannja tergantung daripada Presiden. Hal jang demikian itu akan mendjamin stabilitas Pemerintahan. Djuga harus dapat mendjamin tertiptanja Garis-garis Besar Haluan Negara jang sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan demokrasi Pantjasila.

3. Dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang ditentukan bahwa utusan Daerah termasuk Gubernur Kepala Daerah dipilih oleh D.P.R.D. I. Pelaksanaan ketentuan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4. Disamping ketentuan dimaksud pasal 8 ayat (2) untuk kepentingan pelaksanaan dianggap perlu mengadakan pengaturan lebih lanjut dari beberapa ketentuan jang diatur dalam Undang-undang, jaitu antara lain:
 - a. Penentuan djumlah Anggota M.P.R. dari Golongan Politik dan Golongan Karya jang diangkat; Tambahan Anggota M.P.R. dari Golongan Politik dan Golongan Karya serta Utusan Daerah; Perbandingan antara djumlah Golongan Karya Angkatan Bersendjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata jang diangkat;
 - b. Penentuan djumlah Anggota D.P.R. untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I/daerah pemilihan jang dipilih dan perbandingan antara djumlah Golongan Karya Angkatan Bersendjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata jang diangkat ;
 - c. Penentuan djumlah Anggota D.P.R.D. I dan II jang dipilih dan perbandingan antara djumlah Golongan Karya Angkatan Bersendjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata jang diangkat;
 - d. Penentuan djumlah dan komposisi Pimpinan M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D. I dan II;
 - e. Tata-tjara pentjalonan Anggota/tambahan M.P.R. jang diangkat dan Utusan Daerah; Anggota D.P.R. dan D.P.R.D. I dan II jang diangkat termasuk pentjalonan penggantian Anggota antar waktu;
 - f. Tata-tjara penelitian tjalon Anggota M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D. I dan II;

- g. Pengaturan rangkapan djabatan keanggotaan D.P.R./djabatan Pimpinan M.P.R./D.P.R. dan ketentuan rangkapan djabatan bagi Anggota/Pimpinan D.P.R.D. I dan II;
- h. Pelimpahan kewenangan kepada pedjabat jang berwenang mengenai beberapa pengaturan dan ketentuan pelaksanaan Undang-undang, sehingga memungkinkan adanja fleksibilitas dalam penyelenggaraan-nja.

Oleh karena itu Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan tersebut diatas dan mengadakan pengelompokan ketentuan-ketentuan jang sedjenis.

II PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Tjukup djelas.

Pasal 2.

Ajat (1)

Huruf b Pembagian Anggota tambahan M.P.R. Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya sebanjak 112 (seratus dua belas) orang ditentukan menurut ketentuan pasal 3 ajat (2) dan (7) dengan perhitungan djumlah hasil pemilihan jang diperoleh organisasi jang ikut dalam Pemilihan Umum dan mendapat wakil di D.P.R. jang bersangkutan dibagi djumlah hasil pemilihan keseluruhan organisasi-organisasi jang ikut dalam Pemilihan Umum dan mendapat wakil di D.P.R., dikalikan djumlah tambahan Anggota jang tersedia, misalnja organisasi:

A	memperoleh wakil di D.P.R.	100
B	„ „ „	80.
C	„ „ „	75
D	„ „ „	60
E	„ „ „	25
F	„ „ „	10
G	„ „ „	10

maka A akan memperoleh tambahan wakil di M.P.R.

$$\text{sebanjak } \frac{100}{360} \times 112 = 31 \frac{1}{9} = 31$$

$$\text{B } \frac{80}{360} \times 112 = 24 \frac{8}{9} = 25$$

$$\text{C } \frac{75}{360} \times 112 = 23 \frac{1}{3} = 23$$

$$\text{D } \frac{60}{360} \times 112 = 18 \frac{2}{3} = 19$$

$$\text{E } \frac{25}{360} \times 112 = 7 \frac{28}{36} = 8$$

$$\text{F } \frac{10}{360} \times 112 = 3 \frac{2}{18} = 3$$

$$\text{G } \frac{10}{360} \times 112 = 3 \frac{2}{18} = 3$$

112

Ajat (1)

- d. Penentuan Anggota tambahan Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya dimaksud pasal 2 ajat (1) huruf d diatur menurut ketentuan pasal 3 ajat (3) sampai (7). Apabila organisasi yang kalah dimaksud pasal 2 ajat (1) huruf d kurang dari 10 (sepuluh), maka hal yang demikian akan menambah jumlah Anggota tambahan dimaksud pasal 2 ajat (1) huruf b.

Ajat (2).

Pengertian pada saat dilangsungkannya Pemilihan Umum yaitu pada saat diselenggarakannya Pemilihan Umum dengan dimulainya pendaftaran pemilihan, yang akan dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran rumah-tangga pada tahun 1970. Angka-angka sensus terakhir dimaksud dalam ayat ini adalah sensus tahun 1961 yang telah diproyeksikan sampai pertengahan tahun 1970.

Pasal 3.

Ajat (2).

Lihat pendjelasan pasal 2 ajat (1) huruf b.

Ajat (3).

Lihat pendjelasan pasal 2 ajat (1) huruf d.

Ajat (7).

Apabila tidak ada kemungkinan lagi untuk mengambil tjalon dari urutan dalam daftar tjalon, diambil dari luar daftar tjalon.

Ajat (8).

Dalam pengaturan tata-tjara pengadjuan tjalon akan diatur pula tenggang waktu pentjalonan.

Pasal 4.

Tjukup djelas.

Pasal 5.

Ajat (3).

Kata-kata „kekuatan” dalam ajat ini dimaksudkan unsur-unsur kemasjara-rakatan jang ada dalam bidang sosial, ekonomi, kebudajaan, keagamaan dan sebagai pionir.

Pasal 6.

Tjukup djelas.

Pasal 7.

Ajat (3).

Djumlah Anggota D.P.R. untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I/daerah pemilihan dengan memperhatikan pasal 5 dan 6 Undang-undang nomor '15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusjawatan/Perwakilan Rakjat beserta pendjelasannya ditentukan sebagai berikut :

- a. Pertama-tama tiap-tiap Daerah Tingkat I/daerah pemilihan mendapat wakil sebanjak djumlah Daerah Tingkat II jang ada didalam wilayah

Daerah Tingkat I/daerah pemilihan masing-masing, jang seluruhnja ber-djumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) orang.

- b. Sisi sebanyak 79 (tudjuh puluh sembilan) wakil, jaitu djumlah Anggota jang dipilih dimaksud pasal 7 ajat (1) dikurangi djumlah jang telah terbagi dimaksud huruf a diatas (360 – 281), diberikan kepada Daerah Tingkat I/daerah pemilihan jang berpenduduk lebih berdasarkan perhitungan 400.000 (empat ratus ribu) orang dikalikan djumlah Daerah Tingkat II jang ada didalam wilajah Daerah Tingkat I/daerah pemilihan tersebut, dengan perhitungan:

djumlah penduduk tiap-tiap Daerah Tingkat I/daerah pemilihan jang bersangkutan dibagi seluruh djumlah penduduk dari Daerah-daerah Tingkat I/daerah pemilihan jang berhak mendapat tambahan wakil, dikalikan sisa sebanyak 79 wakil.

Tjontoh :

a. D.C.I. Djakarta berpenduduk	5.692.000	orang
b. Djawa Barat	19.665.000	orang
c. Djawa Tengah	22.670.000	orang
d. D.I. Jogjakarta	2.761.000	orang
e. Djawa Timur	26.877.000	orang
f. Lampung	2.053.000	orang
	79.718.000	orang

Berdasarkan ketentuan huruf a diatas maka :

a; D.C.I. Djakarta mendapat wakil	5	orang
b. Djawa Barat	24	orang
c. Djawa Tengah	35	orang
d. D.I. Jogjakarta	5	orang
e. Djawa Timur	37	orang
f. Lampung	4	orang

Berdasarkan ketentuan huruf b diatas maka Daerah Tingkat I/daerah pemilihan tersebut a sampai dengan f berhak mendapat tambahan wakil masing-masing sebanyak :

$$a. \quad \frac{5.692.000}{79.718.000} \times 79 = 5,6 \text{ dibulatkan} = 6 \text{ orang}$$

- b. $\frac{19.665.000}{79.718.000} \times 79 = 19,4$ dibulatkan = 19 orang
- c. $\frac{22.670.000}{79.718.000} \times 79 = 22,4$ „ = 22 orang
- d. $\frac{2.761.000}{79.718.000} \times 79 = 2,7$ „ = 3 orang
- e. $\frac{26.877.000}{79.718.000} \times 79 = 26,6$ „ = 27 orang
- f. $\frac{2.053.000}{79.718.000} \times 79 = 2,0$ „ = 2 orang

Ajat (4).

Lihat pendjelasan pasal 2 ajat (2).

Pasal 8.

Tjukup djelas.

Pasal 9.

Ajat (4).

Lihat pendjelasan pasal 2 ajat (2).

Ajat (6).

Kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk merubah djumlah Anggota D.P.R.D. I dan II dimaksud ajat ini meliputi perubahan dimaksud pasal 9 ajat (4) dan kemungkinan perkembangan djumlah Daerah Tingkat I dan II jang ada.

Pasal 10 dan 11.

Tjukup djelas.

Pasal 12.

Ajat (3).

Kata-kata „dan pemberontakan-pemberontakan lainnja” dimaksudkan ialah Pemberontakan-pemberontakan jang tidak disebut dalam Keputusan Presiden nomor 449 tahun 1961.

Pasal 13.

Tjukup djelas.

Pasal 14.

Ajat (6).

Pedjabat jang berwenang dimaksud dalam ajat ini ialah Presiden jang dapat melimpahkan kewenangannja kepada Menteri Dalam Negeri bagi pengaturan tata-tjara peresmian keanggotaan dan pemberhentian M.P.R. dan D.P.R., dan Menteri Dalam Negeri bagi pengaturan tata-tjara peresmian keanggotaan dan pemberhentian Anggota D.P.R.D. I dan II.

Pasal 15.

Tjukup djelas.

Pasal 16.

Ajat (2).

Pedjabat jang berwenang dalam ajat ini ialah pedjabat jang berwenang mengangkat dan memberhentikan seperti ditentukan dalam pasal 14.

Peresmian pemberhentian sebagai Anggota D.P.R. berarti pula peresmian sebagai Anggota M.P.R. jang dinjatakan dalam Surat Keputusan pemberhentiannja.

Pasal 17.

Tjukup djelas.

Pasal 18.

Ajat (5)

Pedjabat jang berwenang dalam ajat ini ialah pedjabat jang berwenang meresmikan keanggotaan dan pemberhentian Anggota M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D. I dan II seperti ditentukan dalam pasal 14.

Pasal 19 dan 20.

Tjukup djelas.

Pasal 21.

Pedjabat jang berwenang memberikan persetudjuan dan membebaskan dimaksud dalam pasal ini ialah bagi :

- a. Pegawai Negeri Sipil (Pusat) oleh Menteri yang bersangkutan ;
- b. Pegawai Daerah oleh Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah ;
- c. Pegawai Badan/Lembaga Negara oleh Ketuanya masing-masing.

Pasal 22 dan 23.

Tjukup djelas.

Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2920.

III

PEMBENTUKAN APARATUR

PEMILU

DAFTAR ISI

Halaman

BAB III. PEMBENTUKAN APARATUR PEMILU.

1. Surat Keputusan Gubernur No.Ib.3/1/43/69 tanggal 10 April 1969 tentang Penundjukan Residen Teuku Akbar selaku Projek Officer untuk Persiapan Pemilihan Umum dalam Wilayah D.C.I. Djakarta	354
2. Surat Keputusan Gubernur No.Aa.18/3/53/69 tanggal 29 Desember 1969 tentang Pembentukan Sekretariat Pemilihan Umum dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta	356
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No.5 tahun 1970 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Tingkat II.	360
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.6/1970 tanggal 19 Djanuari 1970 tentang Pengangkatan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi mendjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I	374
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.34 tahun 1970 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta tanggal 6 Pebruari 1970	382
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.63/III/2/1970 tanggal 19 Maret 1970 tentang Santiadji/Coaching	385
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.108/tahun 1970 tanggal 23 Maret 1970 tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Djakarta	390
8. Pokok-pokok Kebidjaksanaan Dalam Pelaksanaan Penjusunan Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta dan Perangkat Kelengkapannja di-echelon-echelon Wilajah Administratip, Ketjamatan dan Kelurahan.	393
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.Aa.18/3/3/70 tanggal 14 April 1970 tentang	

	Halaman
Pembentukan Kembali Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta	397
10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.Aa.18/3/4/70 tanggal 14 April 1970 tentang Pembebasan Tugas Projek Officer Persiapan Pemilihan Umum dalam wilayah DCI Jakarta.	400
11. Instruksi Panitia Pemilihan Indonesia No. 2 tahun 1970 tanggal 16 April 1970 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II D.C.I. Jakarta Raya	402
12. Nota Dinas No. 465/III/2/1970 tanggal 15 Mei 1970 tentang Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II pada Kota Administratif di DCI Jakarta Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Ketjamatan dan Panitia Pendaftaran Pemilih di Kelurahan.	404
13. Nota Dinas No.511/III/2/1970 tanggal 21 Mei 1970 tentang Pedoman Pembagian Tugas Anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta	408
14. Surat Keputusan Gubernur No.539/III/2/1970 tanggal 29 Mei 1970 tentang Penundjukan Anggota Panitia Pemilihan Kota dalam Wilayah DCI Jakarta	410
15. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/ Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta No.551/III/2/1970 tanggal 27 Mei 1970 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kota dalam Wilayah DCI Jakarta	415
16. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/ Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta No.558/III/2/1970 tanggal 2 Djuni 1970 tentang Pembentukan Kembali Sekretariat Panitia Pemilihan Kota dalam Wilayah DCI Jakarta.	418
17. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/ Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta No.645/III/2/1970 tanggal 6 Djuni 1970 tentang Pengangkatan Petugas Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta	423

18.	Surat Keputusan Walikota Djakarta Pusat/ Daerah Khusus Ibukota Djakarta No.6208/30/ DP/1970 s/d No.6214/30/DP/1970 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Ketjamatan Gambir, Tn. Abang, Sawah Besar, Kemajoran, Senen, Tjempaka Putih dan Menteng tanggal 15 Djuni 1970	428
19.	Surat Keputusan Walikota Djakarta Utara/ Daerah Khusus Ibukota Djakarta No.212/IV/ 2/DU/1970 tanggal 1 Djuli 1970 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara di Wilajah Kota Djakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Djakarta.	456
20.	Surat Keputusan Walikota Djakarta Barat/ Daerah Khusus Ibukota Djakarta No. 67/IV/ DB/1970, tanggal 24 Djuni 1970 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Wilajah Kota Djakarta Barat Daerah Khusus Ibukota Djakarta	468
21.	Surat Keputusan Walikota Djakarta Timur/ Daerah Khusus Ibukota Djakarta No.330/V/ Sec.Pemilu/WDT/70, tanggal 26 Mei 1970 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemu- ngutan Suara Djatinegara (ditambah Ketjamat- an-Ketjamatan lainnja) Wilajah Kota Djakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Djakarta	473
22.	Surat Keputusan Walikota Djakarta Selatan/ Daerah Khusus Ibukota Djakarta No. 8/IV/2/ DS/70 tanggal 10 Djuli 1970 tentang Pengang- katan Anggota Panitia Pemungutan Suara Ketja- matan Tebet, Mampang Prapatan, Kebajoran Baru, Kebajoran Lama, Pasar Minggu dan Setia Budi, Kota Djakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Djakarta	480
23.	Surat Keputusan Walikota Djakarta Pusat/ Daerah Khusus Ibukota Djakarta No.3904/ 30/DP/1970 tanggal 5 Mei 1970 tentang Peng- angkatan para Lurah selaku Ketua Panitia Pen- daftaran Pemilih diwilajah Kelurahan masing- masing.	485

24.	Surat Keputusan Walikota Djakarta Utara/ Daerah Khusus Ibukota Djakarta No.213/IV/ 2/DU/1970 tanggal 1 Djuli 1970 tentang Pengangkatan Para Lurah selaku Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih diwilajah Kelurahan masing- masing.	497
25.	Surat Keputusan Walikota Djakarta Barat/ Daerah Khusus Ibukota Djakarta No. 87/IV/ DB/1970 tanggal 30 Djuni 1970 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pendaftaran Pemilih diwilajah Kelurahan Kota Djakarta Barat DCI Djakarta	507
26.	Surat Keputusan Walikota Djakarta Timur/ Daerah Khusus Ibukota Djakarta No. 1/Sec. Pemilu/I/WDT/70, No.2/Sec.Pemilu/II/WDT/70, No.3/Sec.Pemilu/III/WDT/70, No.4/Sec.Pemilu /IV/WDT/70, No.5/Sec.Pemilu/WDT/70 tanggal 1 Mei 1970 tentang Pengangkatan Para Lurah selaku Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih diwi- lajah Kelurahan masing-masing	523
27.	Surat Keputusan Walikota Djakarta Selatan/ Daerah Khusus Ibukota Djakarta No.6/IV/2 /DS/1970 tanggal 3 Djuli 1970 tentang Peng- angkatan Para Lurah selaku Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih dan Para Anggotanja diwi- lajah Kelurahan masing-masing	555
28.	Pembagian Tugas Pekerdjaan dan Tanggung Djawab Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta tanggal 27 Djuni 1970	565
29.	Tugas dan Kewajiban Tjamat dalam rangka Penjelenggaraan Pemilihan Umum	584
30.	Nota Dinas Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.588/III/2/1970 tanggal 8 Djuli 1970 tentang Petundjuk-petundjuk Tehnik dibidang Administrasi.	589
31.	Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem- baga Pemilihan Umum No.74/LPU/Tahun 1970 tanggal 31 Oktober 1970 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Peneliti Daerah D.C.I. Djakarta.	593
32.	Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/ Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta	

	No.0086/III/2/1971 tanggal 1 Pebruari 1971 tengang Penggantian Petugas Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta	597
33.	Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/ Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.0085/III/2/1971 tanggal 1 Pebruari 1971 tentang Penundjukan Lurah, Wakil Lurah, Babinsa dan Bimas di Kelurahan masing-masing dalam Wilayah DCI Djakarta selaku Koordinator KPPS	601
34.	Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/ Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.0529/III/2/1971 tanggal 10 Mei 1971 ten- tang Pengangkatan Petugas Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta	686
35.	Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/ Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No. 0715/III/2/1971 tanggal 4 Agustus 1971 tentang Pembentukan Anggota Panitia Pemerik- saan tingkat I Daerah DCI Djakarta	689
36.	Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/ Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.0716/III/2/1971 tanggal 4 Agustus 1971 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Peme- riksaan Tingkat I Daerah D.C.I. Djakarta . . .	696

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.**

No. Ib.3/I/43/69

tentang

**PENUNDUKAN RESIDEN TEUKU AKBAR SELAKU PROJECT
OFFICER UNTUK PERSIAPAN PEMILIHAN UMUM DALAM
WILAJAH DCI DJAKARTA.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA;

- Membatja** : Keputusan Presiden R.I. No. 315 Tahun 1968 tentang Rentjana Pembangunan Lima Tahun;
- Menimbang** : 1. Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum yang akan datang dalam wilayah DCI Djakarta, perlu menunjuk seorang Project Officer;
2. Bahwa Assisten Sekretaris Teuku Akbar dianggap memenuhi syarat untuk ditunjuk menjadi Project Officer Persiapan Pemilihan Umum dalam Wilayah DCI Djakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang No. 10 tahun 1964 tentang Penegasan Djakarta sebagai Ibukota Negara R.I.;
3. Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan D.C.I. Djakarta;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. SDX 22/1/6 tanggal 23 Maret 1969 tentang beberapa masalah dalam persiapan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : I. Menunjuk Assisten Sekretaris Daerah Teuku Akbar selaku Project Officer untuk persiapan Pemilihan Umum dalam Wilayah DCI Djakarta, dengan tugas menjumpai kan konsepsi-konsepsi kepada Gubernur Kepala Daerah dalam rangka persiapan pemilihan umum yang akan datang dalam wilayah DCI Djakarta.
- II. Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 10 April 1969.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA,**

ttd.

(ALI SADIKIN)

Major Djenderal KKO

**SALINAN Surat Keputusan ini
disampaikan kepada
Jth:**

1. Para Wakil Kepala Daerah.
 2. Para Wakil Pimpinan Dewan
 3. Para Anggota B.P.H.
 4. S e k d a
 5. Ketua Harian B.P.P.
 6. Para Kepala Inspektorat/Dirat/Biro
 7. Para Walikota
 8. Para Kepala Dinas/Kantor
 9. Para Tjamat.
-

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

No. Aa/18/3/53/69

tentang

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEMILIHAN UMUM DALAM
WILAJAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan umum, dianggap perlu membentuk Sekretariat untuk menampung dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pemilihan umum;
 2. Bahwa dalam hubungan pembentukan Sekretariat tersebut diatas, perlu diangkat dan ditetapkan petugas-petugas Sekretariat dimaksud;
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
 2. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 tentang Pemerintahan DCI Djakarta jo. Undang-undang No. 5 tahun 1969;
 3. Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri R.I. No.E1/Inst/69 tanggal 17 Oktober 1969 tentang Pembentukan Sekretariat pemilihan umum tingkat Daerah;
 4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta No. Ib. 3/1/4/1969 tanggal 10 April 1969 tentang Penunjukan Assisten Sekda Teuku Akbar selaku Project Officer untuk persiapan Pemilihan Umum Daerah Wilayah DCI Djakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- I. Membentuk Sekretariat Pemilihan Umum D.C.I. Djakarta yang merupakan perangkat administratif Proyek Pemilihan Umum D.C.I. Djakarta, dengan ketentuan sebagai berikut;
 1. Susunan keanggotaan Sekretariat Pemilihan Umum dimaksud adalah sebagai berikut;
KEPALA SEKRETARIAT : ILIK AMIR B.A.
(Staf Direktorat I).

dengan membawahi bagian-bagian ;

- a. Kepala Pendaftaran : BURHANUDDIN HS
- b. Kepala Pengolahan : Drs. G. HASIBUAN
(Staf Sekda)
- c. Kepala Penelitian dan : OMSJAH SINAGA
Penilaian (Staf Dirat I)
- d. Kepala Umum/Perleng- : GUNARTO S.H.
kapan dan Publikasi (Staf Dirat I)
- e. Kepala Keuangan : OEBED SOEBHAGIO
(Staf Dirat VI)
- f. Kepala Keamanan : MUCHRODJI
(Staf Dirat II)

Sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari Menteri Dalam Negeri, menetapkan tugas kewajiban Sekretariat tersebut sebagai berikut;

- a. menjelenggarakan administrasi pemilihan umum;
 - b. mengambil langkah-langkah persiapan untuk penyelenggaraan pemilihan umum, sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. mengadakan pengawasan terhadap persiapan penyelenggaraan pemilihan umum;
 - d. mempertanggung jawabkan segala kegiatan Sekretariat kepada Project Officer Pemilihan Umum DCI Jakarta;
- II. Sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari Menteri Dalam Negeri, membebaskan pembiajaan untuk keperluan kegiatan Sekretariat pada Anggaran keuangan Pemerintah DCI Jakarta;
- III. Hal-hal yang belum cukup diatur dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam surat keputusan ini, akan diatur kemudian dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- IV. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 29 Desember 1969

**GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA**

T.T.D.

(ALI SADIKIN)

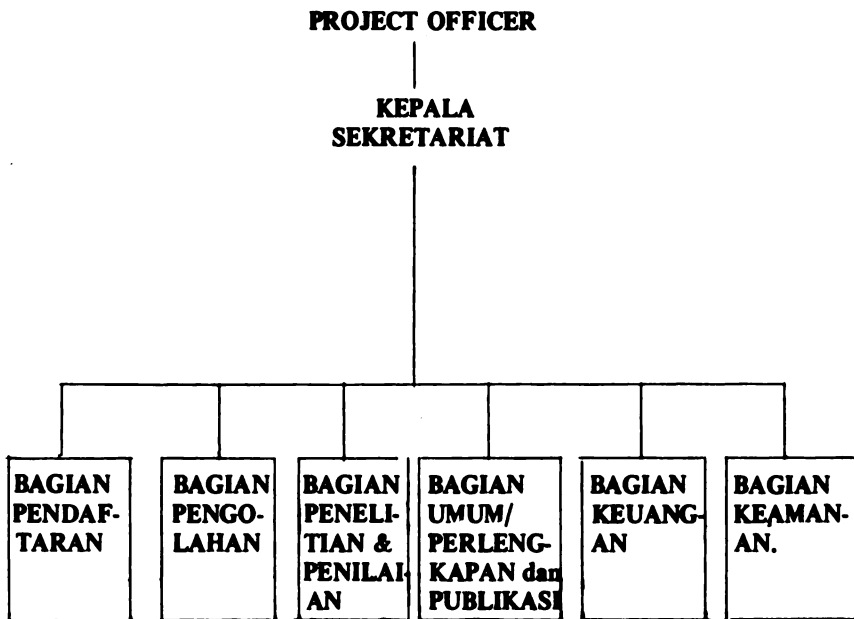
Major Djenderal KKo.

**SALINAN : Surat keputusan ini
disampaikan kepada
Jth.:**

- 1. Bapak Menteri Dalam Negeri**
 - 2. Para Wakil Kepala Daerah**
 - 3. Para Wakil Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta**
 - 4. Para Anggota B.P.H.**
 - 5. S e k d a / Ass. Sekda.**
 - 6. Ketua Harian BP-BPP.**
 - 7. Para Kepala Direktorat/Biro/Inspektorat.**
 - 8. Para Wali Kota**
 - 9. Para Kepala Dinas/Kantor/Djawatan**
 - 10. Para T j a m a t**
 - 11. Para L u r a h.**
-

Lampiran surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Chusus Ibukota Djakarta No. Aa.18/3/53/69
tanggal 29 Desember 1969.

**BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT PEMILIHAN UMUM D.C.I.
DJAKARTA.**



Djakarta, 29 Desember 1969
GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA

t.t.d.

(ALI SADIKIN)

Major Djenderal KKo.

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM**

Nomor 5 TAHUN 1970

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
DAN TINGKAT II**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** : a. bahwa guna pelaksanaan Pemilihan Umum dipandang perlu dengan segera membentuk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, masing-masing didaerah Khusus Ibukota Djakarta, Daerah Istimewa Jogjakarta, Propinsi Daerah Istimewa Atjeh serta Propinsi-Propinsi, dan didaerah-daerah Kabupaten serta Kotamadya seluruh Indonesia ;
- b. bahwa guna memperlantjar tugasnja perlu pula menetapkan susunan dan tata kerdjanja terutama untuk Panitia Pemilihan Daerah tingkat I ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 15 tahun 1969 ;
2. Undang-undang No. 16 tahun 1969 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970 ;
5. Keputusan Presiden No. 3 tahun 1970.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pemilihan Daerah tingkat I di Daerah Khusus Ibukota Djakarta, Daerah Istimewa Jogjakarta, Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, serta di Daerah-daerah Propinsi seluruh Indonesia, dengan susunan dan tata-kerdja sebagai tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Membentuk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II di Daerah-daerah Kabupaten dan Kotamadya seluruh Indonesia dengan susunan serta tata-kerdja yang akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah masing-masing selaku Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
- KETIGA** : Memberi wewenang kepada para Gubernur Kepala Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan Ketua dan Wakil Ketua serta para anggota Panitia Pemilihan Daerah tingkat II, atas nama Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Segala biaya untuk keperluan Panitia Pemilihan Daerah tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah tingkat II dibebankan pada mata anggaran 9a.3.1.250.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 17 Djanuari 1970.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

tttd.

(AMIRMACHMUD)

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 5 TAHUN 1970**

**SUSUNAN DAN TATA KERDJA PANITIA PEMILIHAN
DAERAH TINGKAT I.**

**B A B — I
PENGERTIAN**

Pasal 1.

- (1) Dalam Keputusan ini jang dimaksud dengan :
- a. **Ketua**, adalah Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
 - b. **Wakil Ketua**, adalah Wakil Ketua Pemilihan Daerah Tingkat I.
 - c. **Sekretaris**, adalah Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
 - d. **Anggota**, adalah Anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
 - e. **Personil**, adalah mereka jang diangkat dan/atau dipekerdjakan dalam Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
 - f. **Pegawai Negeri**, adalah Pegawai Negeri jang dimaksud dalam Undang-undang No. 18 tahun 1961.
- (2) Dalam pengertian :
- a. **Daerah Tingkat I**, termasuk Daerah Istimewa Jogjakarta, Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya.
 - b. **Gubernur Kepala Daerah**, termasuk Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

B A B – II

KEDUDUKAN

Pasal 2.

- (1) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I adalah suatu Panitia yang ada pada Lembaga Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Daerah Tingkat I sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum.**
- (2) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat I.**

B A B – III

TUGAS POKOK

Pasal 3.

Tugas pokok Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I adalah :

- a. Membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Indonesia ;**
- b. Mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum untuk pemilihan anggota D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II ;**
- c. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk D.P.R.D. I.**

B A B – IV

FUNGSI-FUNGSI

Pasal 4.

- (1) Perentjaan, yaitu merentjanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang perlu untuk penyelenggaraan pemilihan umum.**
- (2) Penyelenggaraan, yaitu memimpin dalam arti mengendalikan, mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia-panitia Pemilihan Daerah Tingkat II untuk menjamin kesatuan usaha dan kegiatan setjara efektif dan efisien.**

- (3) **Pengawasan**, jaitu mengawasi persiapan dan penjelenggaraan pemilihan umum didalam Daerah Tingkat I.

B A B – V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5.

- (1) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I terdiri dari 10 (sepuluh) orang anggota, termasuk Ketua dan Wakil Ketuanja, jang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah,
- (2) Gubernur Kepala Daerah karena djabatannja mendjadi Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
- (3) Anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I terdiri dari :
 - a. Unsur-unsur Pemerintah dengan berpedoman pada susunan Panitia Pemilihan Indonesia.
 - b. Unsur-unsur kekuatan sosial jang terdiri dari golongan politik dan golongan karya.
- (4) Wakil Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri dari antara anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I atas usul Ketuanja.

Pasal 6.

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris jang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Biro Penjelenggaraan.

- b. Biro Administrasi.
 - c. Biro Perbekalan & Perhubungan.
 - d. Biro Pengawasan.
- (3) Biro Penjelenggaraan terdiri dari :
- a. Bagian Penjelenggaraan.
 - b. Bagian Dokumentasi & Statistik.
 - c. Bagian Keamanan.
 - d. Bagian Hubungan Masyarakat.
- (4) Biro Administrasi terdiri dari :
- a. Bagian Tata Usaha.
 - b. Bagian Urusan Dalam.
 - c. Bendaharawan.
- (5) Biro Perbekalan & Perhubungan terdiri dari :
- a. Bagian Pengadaan.
 - b. Bagian Alokasi.
 - c. Bagian Angkutan & Perhubungan.
- (6) Biro Pengawasan terdiri dari :
- a. Bagian Pengawasan Tehnis Pemilihan Umum.
 - b. Bagian Pengawasan Keuangan.
 - c. Bagian Pengawasan Barang.

Pasal 7.

- (1) Biro-biro dan Bagian-bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh sejumlah personil yang diambil dari pegawai negeri baik sipil maupun ABRI.
- (2) Badan Organisasi Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I adalah sebagai tersebut dalam lampiran.

B A B – VI

PEMBAGIAN TUGAS

Pasal 8.

Tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I adalah satu keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan satu dan yang lain, oleh sebab itu pembagian tugas seperti dimaksud bab ini hanyalah penentuan pembidangan, yang dalam persiapan dan penjelenggaraannya harus dikoordinasikan dengan erat untuk mensukseskan pemilihan umum.

Pasal 9.

Persoalan-persoalan penjelenggaraan yang pokok sifatnya dimusyawarahkan dan diputuskan dalam Panitia Daerah Tingkat I, sedang pimpinan penjelenggaraannya diserahkan kepada Ketua.

Pasal 10.

Tugas Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I adalah :

- a. Memimpin kegiatan-kegiatan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
- b. Mengawasi kegiatan Panitia-panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.
- c. Mengadakan hubungan keluar.
- d. Menjelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang dipandang perlu untuk memperlancar penjelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia.

Pasal 11.

Tugas Wakil Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I adalah :

- a. **Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnja.**
- b. **Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.**

Pasal 12.

Anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I melaksanakan tugas-tugas jang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 13.

Bidang tugas Sekretariat adalah mempersiapkan dan menjelenggarakan segala sesuatu jang perlu untuk mensukseskan penjelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan kebidjaksanaan jang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 14.

Tugas Sekretaris adalah :

- a. **Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnja.**
- b. **Memimpin kegiatan-kegiatan Sekretariat.**
- c. **Mengarahkan, mengkordinasikan dan mengawasi Biro-Biro jang ada didalam Sekretariat.**

Pasal 15.

- (1) **Bidang tugas Biro Penjelenggaraan adalah merentjanakan dan menjelenggarakan segala sesuatu jang perlu untuk mendjamin kelantjaran penjelenggaraan pemilihan umum untuk D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II dalam Daerah Tingkat I.**
- (2) **Tugas Kepala Biro Penjelenggaraan adalah :**
 - a. **Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnja.**
 - b. **Memimpin kegiatan-kegiatan Biro Penjelenggaraan.**

- c. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada didalam Biro Penyelenggaraan.
- (3) Tugas Kepala Bagian Penyelenggaraan adalah :
- a. Mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan dan data-data yang diperlukan bagi penyelenggaraan pemilihan umum.
 - b. Menganalisa dan mengevaluasi bahan-bahan dan data-data yang telah terkumpul serta menentukan nilai bahan-bahan dan data-data tersebut.
 - c. Menjusun program penyelenggaraan pemilihan umum menurut ketentuan dari Panitia Pemilihan Indonesia serta kebidjaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua dan menjampaiakannya kepada pedjabat yang berwenang melalui djendjang djabatatan untuk diambil keputusan.
 - d. Menempa konsep yang telah disetudjui mendjadi program dan menjampaiakannya kepada pedjabat-pedjabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan.
 - e. Melakukan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum yang meliputi :
 - (i) Menjusun daftar djumlah penduduk dan pemilih setjara terpetintji menurut Daerah Tingkat II dan mengirimkannya kepada Panitia Pemilihan Indonesia menurut tjara dan waktu yang telah ditentukan.
 - (ii) Menerima surat-surat pentjalonan/daftar tjalon yang diadjudkan oleh Organisasi-organisasi yang mentjalonkan sesudah diteliti dan mendapat pengesjahan dari Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang bersangkutan.
 - (iii) Memeriksa surat-surat pentjalonan/daftar tjalon untuk pemilihan Anggota D.P.R.D. I setjara tehnik dan menjampaiakannya kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I untuk diputuskan.

Pasal 16.

- (1) Bidang tugas Biro Administrasi adalah menjelenggarakan segala urusan surat-menjurat yang menjadi tanggung jawab Sekretariat, menjelenggarakan administrasi personil, mentjatat dan memelihara barang-barang inventaris, menjelenggarakan urusan dalam, menjusun dan mengurus pembiajaan Panitia.
- (2) Tugas Kepala Biro Administrasi adalah :
 - a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnja.
 - b. Memimpin kegiatan-kegiatan Biro Administrasi.
 - c. Mengarahkan, mengkordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada didalam Biro Administrasi.
- (3) Tugas Kepala Bagian Tata-Usaha adalah :
 - a. Menerima surat-surat yang dialamatkan kepada Panitia dan mendistribusikannya kepada yang berkepentingan.
 - b. Menjelenggarakan segala urusan surat-menjurat yang menjadi tanggung jawab Sekretariat.
 - c. Menjusun dan mengurus pembiajaan Sekretariat.
 - d. Menjelenggarakan administrasi personil.
- (4) Tugas Kepala Bagian Urusan Dalam adalah :
 - a. Mentjatat dan memelihara barang-barang inventaris yang ada dan menjadi tanggung jawab Sekretariat.
 - b. Menjelenggarakan urusan rumah tangga Panitia.
- (5) Tugas Bendaharawan adalah :
 - a. Menerima, menjimpan dan mengeluarkan uang atau surat-surat berharga atas perintah Ordonator.
 - b. Mengurus pembukuan.
 - c. Menjusun pertanggungan jawab atas pengeluaran uang yang telah ditentukan.
 - d. Menjimpan bukti-bukti kas.

Pasal 17.

- (1) Bidang tugas Biro Perbekalan & Perhubungan adalah :
 - a. Mengurus penerimaan barang-barang dari Lembaga Pemilihan Umum.
 - b. Menjelenggarakan pengadaan barang2 yang menurut instruksi atau ketentuan Lembaga Pemilihan Umum diadakan didaerah.
 - c. Mengurus pengangkutan barang-barang yang menjadi tanggung jawab Panitia.

- d. Mengurus hubungan pos dan telekomunikasi.
- (2) Tugas Kepala Biro Angkutan & Perhubungan adalah :
 - a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya.
 - b. Memimpin kegiatan-kegiatan Biro Angkutan & Perhubungan.
 - c. Mengarahkan, mengkordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada didalam Biro Angkutan & Perhubungan.
- (3) Tugas Kepala Bagian Pengadaan adalah mengurus pengadaan barang-barang didalam Daerah Tingkat I menurut ketentuan Ketua Lembaga Pemilihan Umum dan menjerahkannya kepada Kepala Bagian Alokasi.
- (4) Tugas Kepala Bagian Alokasi adalah :
 - a. Mengurus penerimaan barang-barang dari Lembaga Pemilihan Umum dan Kepala Bagian Pengadaan Panitia.
 - b. Mengurus penjemputan dan pendistribusian barang-barang yang telah diterima kepada Panitia-panitia Pemilihan Daerah Tingkat II menurut prosedur yang telah ditentukan.
 - c. Menjelenggarakan administrasi barang.
- (5) Tugas Kepala Bagian Angkutan & Perhubungan adalah :
 - a. Mengangkut barang-barang melalui darat, laut dan udara serta menjerahkannya kepada yang berkepentingan menurut prosedur dan waktu yang telah ditentukan.
 - b. Mendjamin keselamatan barang-barang yang diangkut.
 - c. Mengurus hubungan pos dan telekomunikasi dengan menggunakan alat-alat pos dan telekomunikasi yang ada.

Pasal 18.

- (1) Bidang tugas Biro Pengawasan adalah mengawasi :
 - a. Persiapan dan penyelenggaraan pemilihan umum.
 - b. Pembelian barang-barang dan pengeluaran lain..
 - c. Penjemputan, pendistribusian dan penggunaan barang-barang yang menjadi tanggung jawab Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
- (2) Tugas Kepala Biro Pengawasan adalah :
 - a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya.
 - b. Memimpin kegiatan-kegiatan Biro Pengawasan.
 - c. Mengarahkan, mengkordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada didalam Biro Pengawasan.
- (3) Tugas Kepala Bagian Pengawasan Teknik Pemilihan Umum adalah :
 - a. Mengawasi persiapan dan penyelenggaraan pemilihan umum.

- b. Melaporkan hasil pengawasannya dan menjarankan tindakan2 yang perlu diambil kepada Sekretaris melalui djendjang jabatan untuk kemudian disampaikan atau disarankan kepada Ketua untuk diambil tindakan-tindakan perbaikan.
- (4) Tugas Kepala Bagian Pengawasan Keuangan adalah :
 - a. Mengawasi pembelian barang2 dan pengeluaran2 lainnya yang menjadi tanggung jawab Panitia.
 - b. Melaporkan hasil pengawasannya dan menjarankan tindakan2 yang perlu diambil kepada Sekretaris melalui djendjang jabatan untuk kemudian disampaikan kepada Ketua untuk diambil tindakan2 perbaikan.
- (5) Tugas Kepala Bagian Pengawasan Barang adalah :
 - a. Mengawasi penjinjmanan pendistribusian dan penggunaan barang-barang yang menjadi tanggung jawab Panitia.
 - b. Melaporkan hasil pengawasannya dan menjarankan tindakan-tindakan yang perlu diambil kepada Sekretaris melalui djendjang jabatan untuk kemudian disampaikan kepada Ketua untuk diambil tindakan-tindakan perbaikan.

B A B – VII

HUBUNGAN KERDJA

Pasal 19.

- (1) Dalam musjawarah Panitia dicitjarakan dan diputuskan pokok-pokok garis-garis kebidaksanaan penjelenggaraan sedang pimpinan penjelenggaraannya diserahkan kepada Ketua.
- (2) Keputusan-keputusan diambil dengan tjara musjawarah dan mufakat.
- (3) Apabila ada persoalan-persoalan yang tidak dapat diputuskan dengan tjara musjawarah dan mufakat, maka Ketua mengambil keputusan mengenai persoalan itu dan mempertanggung jawabkan keputusannya itu kepada Ketua Panitia Pemilihan Indonesia. Keputusan terakhir mengenai persoalan itu diambil oleh Ketua Panitia Pemilihan Indonesia.

Pasal 20.

Untuk mendjamin kesatuan usaha dan kegiatan dalam mensukseskan penjelenggaraan pemilihan umum, maka dalam merentjanakan, mempersiapkan dan menjelenggarakan kegiatan-kegiatan, wadib dipelihara kerdja sama yang serasi dan setjara otomatis antara pedjabat2 Sekretariat, dengan tidak terlam-

pau terikat pada formalitas jang tidak perlu tanpa mengabaikan tertib administrasi.

Pasal 21.

Untuk memperlantjar perentjanaan, persiapan dan penjelenggaraan pemilihan umum serta guna mempererat kerdja sama, Ketua mengadakan pengaturan tentang rapat-rapat kerdja.

Pasal 22.

Apabila dalam melaksanakan tugas timbul persoalan atau perbedaan pendapat antara pedjabat2 Sekretariat, segera diselesaikan melalui musjawarah antara pedjabat2 jang bersangkutan dan apabila tidak mungkin, maka segera disampaikan kepada Ketua untuk diambil keputusan.

Pasal 23.

- (1) Segala surat-surat jang dialamatkan kepada Panitia diurus oleh Sekretariat.
- (2) Apabila ada pedjabat didalam Panitia menerima surat jang menurut isinya bukan mendjadi urusannya, supaja dengan segera menjampaiakannya kepada pedjabat jang berkepentingan.
- (3) Ketentuan-ketentuan terperintji mengenai pengurusan surat-surat diatur tersendiri.

B A B – VIII

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 24.

Dalam melaksanakan tugasnja :

- a. Ketua bertanggung djawab kepada Ketua Panitia Pemilihan Indonesia.
- b. Sekretaris bertanggung djawab kepada Ketua.
- c. Kepala-kepala Biro dan Kepala-kepala Bagian bertanggung djawab kepada atasan langsungnja masing-masing.

Pasal 25.

Pelaksanaan terperintji mengenai ketentuan-ketentuan jang tersebut dalam tata-kerdja ini diatur dengan instruksi, perintah atau petundjuk jang akan dikeluarkan kemudian.

Pasal 26.

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam keputusan ini diatur dengan keputusan tersendiri.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM,**

t.t.d.

(AMIRMACHMUD)

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 6 TAHUN 1970.

MENTERI DALAM NEGERI.

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat sesuai pasal 8 ayat (5) Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 juncto pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970, perlu mengangkat Gubernur Kepala Daerah karena djabatannya menjadi Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I untuk Daerahnya masing-masing;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 1969 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 5 tahun 1970 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : mengangkat Gubernur/Kepala Daerah Propinsi tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran surat keputusan ini menjadi Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I sebagai yang tertjantum dalam ruang 4 daftar lampiran dimaksud ;

KEDUA : surat keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkannja dengan ketentuan bahwa akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinja, djika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada Tanggal : 19 Djanuari 1970.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

AMIRMACHMUD.

SALINAN dikirimkan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia di Djakarta.
2. Pimpinan M.P.R.S. di Djakarta,
3. Pimpinan D.P.R. - G.R. di Djakarta,
4. Pimpinan D.P.A. di Djakarta,
5. Ketua Badan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Para Menteri Kabinet Pembangunan di Djakarta,
7. Ketua Mahkamah Agung di Djakarta,
8. Djaksa Agung di Djakarta,
9. Panglima KOPKAMTIB Pusat di Djakarta,
10. Sekretaris Negara di Djakarta,
11. Kepala Biro Statistik di Djakarta,
12. Gubernur Bank Sentral di Djakarta,
13. Dewan Pimpinan Pusat/Wilajah Partai-partai Politik,
14. Ketua Sekretariat Bersama Golongan Karya Pusat di Djakarta,.

P E T I K A N surat keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan - untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

D A F T A R lampiran surat-keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal
19 Januari 1970 Nomor 6 tahun 1970.

No. Urut	D j a b a t a n	N a m a	Diangkat sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.	Muzakkir Wallad	A t j e h	
2.	Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.	Marah Halim	Sumatera Utara	
3.	Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat.	Prof. Drs. Harun Zain.	Sumatera Barat	
4.	Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau.	Artifin Achmad	R i a u	

**DAFTAR lampiran surat-keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal
19 Januari 1970 Nomor 6 tahun 1970.-**

No. Urut	D j a b a t a n	N a m a	Diangkat sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.	Keterangan
1	2	3	4	5
5.	Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djambi.	Muhd. Nur Atmadibrata	D j a m b i	
6.	Gubernur Kepala Da- erah Propinsi Sumatra Selatan.	Asnawi Mang- kualam	Sumatra Selatan	
7.	Pd. Gubernur/Penguasa Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu.	M. Ali Amin S.H.	B e n g k u l u	
8.	Gubernur Kepala Da- erah Propinsi Lampung	Zainal Abidin Pagar Alam	Lampung	
9.	Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya.	Ali S a d i - kin.	DCI Djakarta Raya.	

**D A F T A R lampiran surat-keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal
19 Dj Januari 1970 Nomor 6 tahun 1970.**

No. Urut	D j a b a t a n	N a m a	Diangkat sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.	Keterangan
1	2	3	4	5
10.	Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Barat	Moch. Soli- chin G.P.	Djawa Barat.	
11.	Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Tengah.	M u n a d i	Djawa Tengah	
12.	Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.	Paku Alam VIII	Daerah Istimewa Jogjakarta	
13.	Pd. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur.	Moh. N o o r	Djawa Timur	
14.	Gubernur Kepala Daerah Propinsi B a l i.	S u k a r m e n	B a l i	

**DAFTAR lampiran surat-keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal
19 Januari 1970 Nomor 6 tahun 1970.**

No. Urut.	D j a b a t a n	N a m a	Diangkat sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.	Keterangan
1	2	3	4	5
15.	Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.	Wastia Kusumah	Nusa Tenggara Barat	
16.	Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.	El Tari	Nusa Tenggara Timur	
17.	Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat.	Sumadi Bc. HK.	Kalimantan Barat	
18.	Pd. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.	H. J a m a n i	Kalimantan Selatan	

**DAFTAR lampiran surat-keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal
19 Djanuari 1970 Nomor 6 tahun 1970.**

No. Urut.	D j a b a t a n	N a m a	Diangkat sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.	Keterangan
1	2	3	4	5
19.	Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.	Ir. R. Syll- vanus.	Kalimantan Tengah	
20.	Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur.	A. Wahab Sjahrani	Kalimantan Timur	
21.	Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara.	H.V. Wo- rang.	Sulawesi Utara.	
22.	Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.	M. Jasin	Sulawesi Tengah	

**DAFTAR lampiran surat-keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal
19 Januari 1970 Nomor 6 tahun 1970.**

No.	Djabatan	Nama	Diangkat sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pe- milhan Daerah Tingkat I.	Keterangan
1	2	3	4	5
23.	Gubernur Kepala Dae- rah Propinsi Sulawesi Tenggara.	Eddy Sabara	Sulawesi Tenggara	
24.	Gubernur Kepala Dae- rah Propinsi Sulawesi Selatan.	Achmad Lamo	Sulawesi Selatan	
25.	Gubernur Kepala Dae- rah Propinsi Maluku.	Soemitro	Maluku	
26.	Gubernur Kepala Dae- rah Propinsi Irian Barat.	Frans Kassiepo	Irian Barat	

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

(AMIRMACHMUD)

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 34 TAHUN 1970
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 5 Tahun 1970 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Tingkat II dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1970 tentang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah menjadi Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I perlu segera mengangkat anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;
- b. bahwa berhubung dengan surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 19 Djanuari 1970 No. 06/RHS/BKD/1970 tentang Penundjukan Panitia Pemilihan, perlu mengangkat mereka yang diusulkan dalam surat tersebut sebagai anggota Panitia Pemilihan Daerah Khusus Ibukota Djakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 15 Tahun 1969.
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1969.
3. Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1970.
4. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1970.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 5 Tahun 1970.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1970.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat pedjabat-pedjabat yang namanya tertantum dalam ruang 2 daftar lampiran Keputusan ini, untuk disamping tugas jabatannya sehari-hari, masing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang tertantum dalam ruang 3 daftar lampiran Keputusan tersebut.
- KEDUA** : Memberi wewenang kepada Gubernur/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Khusus Ibukota Djakarta, untuk atas nama

Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik mereka yang tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini, sebagai anggota Panitia Pemilihan Daerah Khusus Ibukota Djakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pedjabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 6 Februari 1970

MENTERI DALAM NEGERI

t.t.d.

AMIR MACHMUD

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada :

1. Presiden Republik Indonesia di Djakarta,
2. Pimpinan M.P.R.S. di Djakarta,
3. Pimpinan D.P.R.-G.R. di Djakarta,
4. Pimpinan D.P.A. di Djakarta,
5. Ketua Badan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Para Menteri Pembangunan di Djakarta,
7. Ketua Mahkamah Agung di di Djakarta,
8. Djaksa Agung di Djakarta,
9. Kepala Biro Statistik di Djakarta,
10. Gubernur Bank Sentral di Djakarta,
11. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta,
12. MUSPIDA Daerah Khusus Ibukota Djakarta,
13. Para Walikota Kepala Daerah, Daerah Khusus Ibukota Djakarta,
14. Ketua Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik di Daerah Khusus Ibukota Djakarta,
15. Ketua Sekretariat Bersama Golongan Karya Daerah Khusus Ibukota Djakarta.

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 34 TAHUN 1970.**

No.	NAMA	Diangkat pada Panitia Pemilihan Daerah Chu- sus Ibukota Djakarta	Keterang- an
1	2	3	4
1.	Laksamana Muda (U) <i>A. Wiria- dinata. Wakil Kepala Daerah.</i>	Anggota merangkap Wakil Ketua	
2.	<i>Djumadjitin S.H.</i>	Anggota	
3.	Letnan Kolonel <i>Eman Sjahban</i>	Anggota	
4.	<i>A.K.B.P. Drs. Junusi Jusuf</i>	Anggota	
5.	<i>Drs. Moh. Djamin Ali</i>	Anggota	
6.	<i>H. Ajatullah Saleh</i>	Anggota	
7.	<i>Alexander Wenas</i>	Anggota	
8.	<i>Harsono Radjakmangun- sudarso</i>	Anggota	
9.	<i>M. Moeffreni Moe'min</i>	Anggota	

Djakarta, 6 Pebruari 1970
MENTERI DALAM NEGERI
t.t.d.
AMIR MACHMUD

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.**

INSTRUKSI

No. 63/III/2/1970.

**Dari : Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan
Daerah Khusus Ibukota Djakarta.**
Kepada : Sekretaris Pemilu D.C.I. Djakarta.

Bersama ini diinstruksikan agar Saudara segera menjiapkan dan melaksanakan Santiadji/coaching bagi para petugas Sekretariat Pemilu ditingkat Panitia Pemilihan Kota dan petugas Sekretariat termasuk para Tjamat jang akan ditundjuk sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara/Ketjamatan sesuai dengan bahan dan pedoman pelaksana Santiadji/coaching terlampir.

Djakarta, 19 Maret 1970.

**a.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH D.C.I. DJAKARTA**

t.t.d.

(A. WIRIADINATA)

**Laksamana Muda Udara
WAKIL KETUA.**

**PENJELENGGARA COACHING/SANTIADJI
PEMILIHAN UMUM DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | PENANGGUNG DJAWAB PELAKSANA | : | Soetjipto Wirosardjono M.Sc. |
| 2. | URUSAN NASKAH/REPRODUKSI/
DISTRIBUSI. | : | Drs. Max Sumaraw. |
| 3. | URUSAN PERLENGKAPAN | : | Nj. St. Saniah B.A. |
| 4. | URUSAN KEUANGAN | : | Oebed Soebhagio. |
| 5. | PENGHUBUNG SEKRETARIAT
DAN KELAS | : | 1. Ilik Amir B.A.
2. Gunarto S.H.
3. Burhanuddin Hs. |
| 6. | PEMBANTU-PEMBANTU | : | 1. Supardjono
2. Djahrowadi
3. Sudjana
4. Mukri (supir). |

Djakarta, 23 Maret 1970.

**PENJELENGGARA COACHING/SANTIADJI PEMILU
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
SEKRETARIAT PPD DCI DJAKARTA.**

**PEDOMAN PELAKSANAAN DAN BAHAN-BAHAN SANTIADJI
BAGI PETUGAS-PETUGAS SEKRETARIAT P.P. KOTA DAN P.P.S.
SELURUH D.C.I. DJAKARTA, DISELENGGARAKAN DI DJAKARTA
PADA TANGGAL 25 S/D 28 MARET 1970.**

I. TUDJUAN

1. Menanamkan dan memupuk kesiapan mental dan kesiagaan para petugas dalam melaksanakan pemilu.
2. Meningkatkan pengetahuan mengenai segala peraturan perundang-undangan tentang pemilu, termasuk kebidjaksanaan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua L.P.U./P.P.I. dan tjara-tjara pelaksanaan Pemilu.
3. Meningkatkan koordinasi diantara para Pelaksana pemilu di D.C.I. Djakarta.
4. Menjusun tenaga/Staf untuk melaksanakan kegiatan santiadji/coaching pemilu pada echelon pelaksana bawahan (P.P.P. dan K.P.P.S.).

II. BAHAN POKOK PELADJARAN DAN SUSUNAN PELADJARAN

A. Bahan Pokok Peladjaran.

1. Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilu, Anggota-anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat.
2. Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D.
3. Peraturan Pemerintah No. 1/1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969.
4. Peraturan Pemerintah No. 2/1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969.
5. Keputusan Presiden No. 3 tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia.
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1970 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
7. Kebidjaksanaan-kebidjaksanaan Menteri Dalam Negeri/Ketua L.P.U. (dalam konperensi atau briefing-briefing), kebidjaksanaan Gubernur Kepala Daerah/Ketua P.P.D. Tingkat I maupun bahan-bahan yang dipergunakan dalam santiadji/coaching para petugas-petugas P.P.D. Tingkat I.

B. Susunan Mata Peladjaran.

1. Landasan dasar kebidjaksanaan umum pemilu, jang diarahkan untuk :
 - pengamanan Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - meningkatkan stabilisasi politik untuk memantapkan pelaksanaan pembangunan.
 - meningkatkan kesadaran tanggung djawab bernegara.
2. Peraturan perundang-undangan pemilu.
3. Pola Operationil dan Program Pemilu.
4. Petundjuk tehnis praktis mengenai pendaftaran pemilih, pemungutan suara, pentjalonan, penghitungan suara dan penetapan hasil tjalon pemilih.
5. Tjara pengamanan pemilu.

III. PESERTA/PENGADJAR.

A. *Peserta santiadji akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah/Ketua P.P.D. Tingkat I atas usul dari para Walikota/Tjamat dan terdiri dari :*

1. Sekretaris P.P. Kota
2. Kepala Biro Penjelenggaraan/Perhubungan P.P.Kota.
3. Kepala Biro Perbekalan/Perhubungan P.P. Kota.
4. Tjamat.
5. Sekretaris P.P.S.

B. *Pengadjar.*

Para pengadjar santiadji akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah/Ketua P.P.D. tingkat I dan terdiri dari unsur-unsur pimpinan eksekutif Pemerintah D.C.I. Djakarta, unsur sekretariat P.P.D. Tingkat I dan unsur-unsur instansi lain jang dianggap perlu.

IV. PENJELENGGARA.

Penjelenggaraan santiadji/coaching ditugaskan kepada Sekretaris Pemilu D.C.I. Djakarta dengan dibantu petugas-petugas Sekretariat dan dibawah pengawasan wakil Gubernur Kepala Daerah Bidang Pemerintahan selaku Wakil Ketua P.P.D. tingkat I.

V. WAKTU DAN TEMPAT PENJELENGGARAAN.

Santiadji diselenggarakan mulai tanggal 25 s/d 28 Maret 1970 di Djakarta.

VI. PROGRAM SANTIADJI (lihat lampiran)

VII. BIAJA.

Pengeluaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan santiadji/coaching Pemilu ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Pemilu.

Djakarta, 19 Maret 1970

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

t.t.d.

(A. WIRIADINATA)

**Laksamana Muda Udara
Wakil Ketua.**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 108 TAHUN 1970
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I DJAKARTA**

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 5 tahun 1970 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Tingkat II dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1970 tentang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah menjadi Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu mengangkat Anggota-anggota/Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;
- b. bahwa berhubung dengan surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tertanggal 11 Maret 1970 No. 340/A/k/BDK/70 perlu segera mengangkat mereka yang diusulkan dalam surat tersebut sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 15 tahun 1969.
2. Undang-undang No. 16 tahun 1969.
3. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970.
4. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 5 tahun 1970.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1970.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat Sdr. SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc. sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jakarta.
- KEDUA** : Memberi wewenang kepada Gubernur/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jakarta untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik Sdr. SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc. tersebut sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 23 Maret 1970.

MENTERI DALAM NEGERI
tjap/ttd.
AMIR MACHMUD

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia di Djakarta,
 2. Pimpinan M.P.R.S. di Djakarta,
 3. Pimpinan D.P.R.-G.R. di Djakarta,
 4. Pimpinan D.P.A. di Djakarta,
 5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta,
 6. Para Menteri Kabinet Pembangunan,
 7. Ketua Mahkamah Agung di Djakarta,
 8. Djaksa Agung di Djakarta,
 9. Kepala Biro Statistik di Djakarta,
 10. Gubernur Bank Sentral di Djakarta,
 11. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta di Djakarta,
 12. Para Walikota dalam Daerah Khusus Ibukota Djakarta,
 13. MUSPIDA Daerah Khusus Ibukota Djakarta di Djakarta,
 14. Ketua Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik di Daerah Khusus Ibukota Djakarta.
 15. Ketua Sekretariat Bersama Golongan Karya Daerah Khusus Ibukota Djakarta.
-



Pelantikan Anggota P.P.D. DCI Djakarta.

**POKOK-POKOK KEBIDJAKSANAAN DALAM PELAKSANAAN
PENJUSUNAN PANITYA PEMILIHAN DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA DAN PERANGKAT KELENGKAP-
ANNJA DI ECHELON-ECHELON WILAJAH ADMINIS-
TRATIP, KETJAMATAN DAN KELURAHAN.**

1. PANITYA PEMILIHAN DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.

- 1.1. Pelaksanaan pembentukan Panitya Pemilihan Daerah Tingkat I diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 15 tahun 1969, Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 serta kebidjaksanaan dan petunjuk Menteri Dalam Negeri baik sebagai Ketua Panitya Pemilihan Indonesia maupun Ketua Sektor Khusus (J) Pemilu.
- 1.2. Mengingat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 pasal 10, ayat (1) a yang menetapkan, bahwa „Panitya Daerah Tingkat I terdiri dari unsur-unsur *Pemerintah* dan *kekuatan sosial politik* . . . ”; dan ayat (2) bahwa „*Gubernur/Kepala Daerah karena jabatannya*, menjadi anggota, merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I”, maka susunan Panitya Pemilihan Daerah Khusus Ibukota Djakarta yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Pebruari 1970 No. 34 tahun 1970 telah memenuhi ketentuan diatas, sebab didalamnja telah dimasukkan kedua unsur tersebut diatas.
Dalam hal ini Gubernur dan para eksekutif lainnja merupakan unsur Pemerintah, sedang anggota-anggota lainnja mewakili unsur kekuatan sosial politik (Islam, Nasionalis, Kristen/Katholik dan Karya).
- 1.3 Perlu diketahui, bahwa sehubungan dengan kebidjaksanaan/petunjuk Menteri Dalam Negeri yang disampaikan dalam rapat Kerdja Gubernur seluruh Indonesia tanggal 19 s/d 23 Djanuari 1970, maka susunan Panitya Pemilihan Daerah Khusus Ibukota Djakarta tersebut djuga merupakan hasil konsultasi dengan MUSPIDA.

2. WALIKOTA SEBAGAI PEMBANTU PANITYA PEMILIHAN DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.

- 2.1. Seperti diketahui alasan pembentukan Kota-kota Administratip di DCI Djakarta adalah untuk kepentingan dekonsentrasi tugas-tugas dan tanggung djawab baik urusan Pemerintah Pusat maupun Daerah. Kebidjaksanaan ini sama sekali tidak mengurangi sifat keutuhan otonomi dan integritas wilajah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Djakarta.

Oleh karena itu, bagi Kota-kota Administratip tersebut hanya berlaku satu kebidjaksanaan yang ditetapkan Gubernur/Kepala Daerah atau Pemerintah Daerah.

- 2.2. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 15 tahun 1969, maka untuk *keperluan pemilu* Menteri Dalam Negeri dapat mengadakan pembagian Daerah Tingkat I menjadi daerah-daerah administratif yang setingkat dengan Daerah Tingkat II (pasal 5 ayat 3). Menilik konteks serta jiwa ketentuan ini, dimaksudkan terutama untuk menentukan hitungan wakil-wakil tiap daerah pemilihan, yang sekurang-kurangnya sama dengan daerah Tingkat II.
- 2.3. Pelaksanaan kewenangan tersebut diatas oleh Menteri Dalam Negeri, tidak mempengaruhi atau merubah status Kota Administratip seperti dimaksudkan pada ad. 2.1. Pengertian ini sejalan dengan isi kebidjaksanaan Menteri Dalam Negeri untuk *tidak* mempertimbangkan usul-usul pembentukan Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, Kecamatan, Desa dan lain sebagainya sampai selesainya Pemilihan Umum 1971.
- 2.4. Selanjutnya, sehubungan dengan Undang-undang No. 15 tahun 1969 pasal 8 ayat 4 c yang memuat ketentuan, yaitu „Pada Lembaga Pemilihan Umum” diadakan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat II dengan Tugas :

- (i) Membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
- (ii) Menjenggarakan Pemilihan Umum untuk DPRD Tingkat II.

maka pelaksanaan ketentuan ini bagi kota-kota administratif di DKI Jakarta perlu dikaitkan dengan status yang dimiliki. Mengingat status yang ada sekarang, maka tugas dimaksud dalam ad (ii) diatas, tidak berlaku bagi kota-kota administratif disini. Dengan demikian Kota Administratip di DKI Jakarta hanya bertugas seperti ditentukan pada ad (i) diatas, yaitu membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I,

- 2.5 Adapun yang dimaksud dengan membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, meliputi : membantu mengendalikan, membantu mengkoordinir dan membantu mengawasi aparatur pemilu pada echelon-echelon dibawah dalam melaksanakan kebidjaksanaan/program operasional yang digariskan oleh Panitia Pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk kepentingan praktis serta menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas tersebut,

lebih tepat jika diserahkan kepada Walikota. Mengingat fungsi itu, maka nyata tiada urgensi untuk membentuk Panitia Pemilu ditingkat Kota.

- 2.6. Adapun mengenai ketentuan tentang penentuan wakil untuk daerah administratif bagi DPR, perlu *ditackle dan diselesaikan* nanti oleh Panitia Pemilihan DCI Djakarta dengan memperhatikan pertimbangan dibawah ini :

Keutuhan (entity) wilayah DCI Djakarta dalam arti sosial, politis dan teritorial harus dipertahankan. Oleh karena itu kelonggaran untuk mendapatkan satu wakil dari tiap Daerah Tingkat II (Kota Administratif) perlu diperhatikan dan diperhitungkan sebagai satu kesatuan wilayah yang menjeluruh serta tidak terpisah-pisah. Oleh karena itu, harus dijaga agar wakil-wakil tersebut tidak mewakili sesuatu bagian wilayah/kota tertentu dalam Daerah Khusus Ibukota Djakarta. Meskipun jumlah kota administratif itu akan mempengaruhi hitungan perwakilan yang diperoleh dan disediakan bagi DCI di DPR.

3. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KETJAMATAN.

- 3.1. Penyelenggaraan pemungutan suara harus dilakukan sedemikian rupa sehingga benar-benar dapat menjamin penggunaan hak pilih setjara umum, langsung, bebas dan rahasia. Untuk menjamin hal itu maka support dan kontrol dari masyarakat atau parpol/ormas sangat dibutuhkan.
- 3.2. Oleh karena itu wajar dan tepat jika disetiap Ketjamatan dibentuk Panitia Pemungutan Suara dengan mengikut sertakan setjara aktif unsur-unsur kekuatan sosial politik didalamnya. Mengenai jumlah dan susunannya disesuaikan dengan peraturan pemilu.

4. PANITIA PENDAFTARAN PEMILIH DI KELURAHAN.

- 4.1. Mengenai Panitia Pendaftaran Pemilih di Kelurahan menurut ketentuan terdiri sekurang-kurangnya tiga orang anggota termasuk Ketua, yang seluruhnya diambil dari pejabat Pemerintah.
- 4.2. Dalam hubungan ini, perlu diingatkan pada pengalaman ketika pelaksanaan pendaftaran penduduk DCI, ternyata RT/RW besar sekali peranan dan bantuannya. Oleh karena itu, bagi wilayah DCI sebaiknya saluran ini juga perlu digunakan setjara efektif baik dalam rangka sensus penduduk maupun pendaftaran pemilih nanti.

Pengikut sertaan RT/RW sebagai petugas pelaksana Pendaftaran pemilih sekaligus memungkinkan check and re-check data-data dari Kartu Keluarga, Kartu Sensus dan Kartu Pendaftaran Pemilih. Pelaksanaan tugas pendaftaran pemilih akan lebih lantjar djika sensus nanti dilakukan djuga setjara block system atau RT gewijs. Dengan demikian kegiatan sensus itu sekaligus dapat merintis kearah penertiban kembali RT jang sudah melampaui djumlah batas maximum 40 K.K.

- 4.3. Penertiban kembali RT/RW ini penting sekali artinja bagi kepentingan pengendalian dan pengawasan pendaftaran pemilih maupun penjelenggaraan pemungutan suara nanti.

Djakarta, 30 Maret 1970.

GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITYA
PEMILIHAN DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

t.t.d.

(ALI SADIKIN)

Major Djenderal KKo.

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA
PANITIA PEMILIHAN DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Nomor : Aa.18/3/3/70.

tentang

**PEMBENTUKAN KEMBALI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA PEMILIHAN
DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA;**

- Membatja kembali** : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 29 Desember 1969 No. Aa.18/3/53/69 tentang Pembentukan Sekretariat Pemilihan Umum dalam wilayah D.C.I. Djakarta.
- Menimbang** : 1. Bahwa dipandang perlu untuk menyesuaikan Sekretariat Pemilihan Umum dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta Tanggal 29 Desember 1969 No. Aa.18/3/53/69 dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1970;
2. Bahwa sehubungan dengan penjesuaian Sekretariat tersebut pada ad 1 diatas, maka perlu menarik Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 29 Desember 1969 No. Aa.18/3/53/69 tentang Pembentukan Sekretariat Pemilihan Umum dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 15 tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970;
2. Undang-undang No. 16 tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970;
3. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
4. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 jo Undang-undang No. 5 tahun 1969;
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1970;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1970 jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 34 tahun 1970;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- I. Menarik kembali Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 29 Desember 1969 No. Aa.18/3/53/69 tentang Pembentukan Sekretariat Pemilihan Umum dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta dengan pembagian tugas serta penunjukan pimpinan-pimpinan Biro sebagai berikut :**
 - a. Biro Penjelenggara : Burhanuddin Hs.**
 - b. Biro Administrasi : Goenarto S.H.**
 - c. Biro Perbekalan & Perhubungan : Drs. Max Sumaraw**
 - d. Biro Pengawasan : Petugasnja akan ditentukan kemudian.**
 - II. Sekretariat bertugas membantu Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta dalam mempersiapkan dan menjelenggarakan/melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pemilihan umum;**
 - III. Pembiajaan untuk keperluan Sekretariat ini dibebankan pada anggaran keuangan Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta;**
 - VI. Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki dan ditambah kemudian;**
 - V. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 14 April 1970.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH DCI DJAKARTA**

Tjap/t.t.d.

(ALI SADIKIN)

Major Djenderal KKo.

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada
Jth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga
Pemilihan Umum,
 2. Para Wakil Kepala Daerah,
 3. Para Wakil Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta,
 4. Para Anggota Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta,
 5. Para Anggota Muspida DCI Djakarta,
 6. Para Anggota BPH,
 7. Sekda/Assisten Sekda,
 8. Ketua Harian B.P.P.
 9. Para Kepala Direktorat/Biro/Inspektorat,
 10. Para Walikota,
 11. Para Kepala Dinas/Kantor/Djawatan,
 12. Jang bersangkutan,
 13. Para Tjamat,
 14. Para Lurah,
 15. Alas.
-

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA.**

Nomor : Aa.18/3/4/70.

tentang

**PEMBEBASAN TUGAS PROJECT OFFICER PERSIAPAN
PEMILIHAN UMUM DALAM WILAJAH DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

- Membatja kembali** : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 10 April 1969 No. Ib.3/1/43/69 tentang Penundjukan Residen Teuku Akbar selaku Projek Officer untuk Persiapan Pemilihan Umum dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta;
- Menimbang** : Bahwa sehubungan telah ditundjukanja seorang Sekretaris Panitia Pemilihan Umum Daerah Khusus Ibukota Djakarta sebagaimana tertjantum dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Maret 1970 No. 108 tahun 1970, perlu membebaskan Projek Officer untuk Persiapan Pemilihan Umum dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta tersebut diatas dari segala tugas-tugasnja;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 15 tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970;
2. Undang-undang No. 16 tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970;
3. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo Undang-undang No. 6 tahun 1969;
4. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 jo Undang-undang No. 5 tahun 1969;
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1970;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1970 jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 34 tahun 1970;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : I. Menarik kembali penugasan Residen Teuku Akbar selaku Projek Officer untuk Persiapan Pemilihan Umum dalam

wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta disertai utjapan terima kasih, dengan mentjabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 10 April 1969 No. Ib.3/1/43/69.

- II. Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki dan ditambah kemudian;
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 14 April 1970

GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA

t.t.d.

(ALI SADIKIN)

Major Djenderal KKo.

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada

- Jth. : 1. Para Wakil Kepala Daerah,
2. Para Wakil Pimpinan Dewan,
3. Para Anggota B.P.H.
4. Sekda/Assisten Sekda,
5. Ketua Harian B.P.P.
6. Para Kepala Direktorat/Biro/Inspektorat,
7. Para Walikota,
8. Para Kepala Dinas/Kantor/Djawatan,
9. Para Tjamat,
10. Jang bersangkutan,
11. Alas.
-

INSTRUKSI PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
NO. 2 TAHUN 1970
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT II
D.C.I. DJAKARTA RAYA.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa berhubungan dengan luas tugas yang dihadapi oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I D.C.I. Djakarta Raya dalam pemilihan umum, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II di Kotamadya Administratif untuk membantu tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 15 tahun 1969;
2. Undang-undang No. 16 tahun 1969;
3. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970;
4. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 5 tahun 1970.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** : Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I D.C.I. DJAKARTA RAYA.
- Untuk** :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II di tiap-tiap Kotamadya Administratif.
- KEDUA** : Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dimaksud Pertama bertugas membantu Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
- KETIGA** : Susunan serta Tata-kerdja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- KEEMPAT** : Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan berdjumlah sebanyak-banyaknya 10 orang anggota.

- KELIMA** : Segala biaya untuk keperluan Panitia Pemilihan Daerah
Tingkat II dibebankan pada mata anggaran 9A.3.1.250.
- KEENAM** : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 16 April 1970.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA,**

ttd,

AMIRMACHMUD.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA
Djl. Imam Bondjol No. 13
DJAKARTA.**

**NOTA DINAS
Nomor : 465/III/2/70.**

Dari : Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia
Pemilihan Daerah DCI Djakarta.

Kepada : 1. Para Walikota
2. Para Tjamat
3. Para Lurah.

Perihal : Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II pada Kota
Administratif di DCI Djakarta, Panitia Pemu-
ngutan Suara di Ketjamatan dan Panitia Pen-
daftaran Pemilih di Kelurahan.

Sehubungan dengan pokok-pokok Kebidjaksanaan Gubernur Kepala Daerah dalam pelaksanaan penjurusan Panitia Pemilihan Daerah Khusus Ibukota Djakarta dan perangkat kelengkapannya di eselon-eselon wilayah administratif, ketjamatan dan kelurahan tanggal 30 Maret 1970, bersama ini diminta perhatian para Walikota, Tjamat dan Lurah akan hal-hal jang berikut ini :

1. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.

- 1.1. Sebagai jang diutarakan dalam point. 2. dari Pokok-pokok kebidjaksanaan diatas, pada prinsipnja tugas-tugas dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dimaksud adalah.
 - a. membantu P.P.D. Tingkat I.
 - b. mengkoordinir/mengawasi aparatur pemilu pada eselon-eselon dibawah.
- 1.2. Dari surat Menteri Dalam Negeri/Ketua L.P.U. tanggal 26 Maret 1970 No. 9/11/1970 tentang Daerah Administratif Pemilihan, jang berupa djawaban terhadap pertanyaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku dan Atjeh, djelas dimaksudkan bahwa pasal 5 ayat (3) dari U.U. No. 15/1969 tersebut serta pendjelasannya berlaku

chusus untuk DCI Djakarta, dengan tugas pokoknja :

- a. membantu P.P.D. Tingkat I.
 - b. menjelenggarakan pemilihan D.P.R.D. II;
oleh karena DCI Djakarta tidak diadakan D.P.R.D. II, maka pelaksanaan jang dimaksud dalam ajat b. tersebut tidak dilakukan.
- 1.3. Dari Instruksi P.P.I. tanggal 16 April 1970 No. 2 tahun 1970 tentang Pembentukan P.P.D. Tingkat II pada kota administratif diwilajah DCI Djakarta, yakni didjelaskan bahwa pada Kota-kota Administratif tersebut dapat dibentuk P.P.D. Tingkat II dengan keanggotaan sebanyak-banjaknja 10 orang dan kesemuanja dari unsur pemerintah.
2. Dengan berpidjak kepada hal-hal tersebut 1. diatas, dapatlah diambil ketetapan :
- 2.1. Pada tiap wilajah kota administratif di DCI Djakarta dapat dibentuk Panitia Pemilihan jang setingkat dengan P.P.D. Tingkat II dengan sebutan :
Panitia Pemilihan Kota Djakarta, Pusat/Utara/Barat/Selatan/dan Timur (menurut wilajahnja).
 - 2.2. Oleh karena sifatnja merupakan „perwakilan” dari P.P.D. DCI Djakarta, kiranja tepatlah tugas kewadajiban P.P. Kota ini dibebani :
 - a. membantu pelaksanaan tugas-tugas P.P.D. DCI Djakarta dalam wilajahnja.
 - b. mengkoordinir, mengawasi dan meneliti pelaksanaan operasional pemilu pada eselon-eselon dibawah dalam wilajahnja.
 - 2.3. Karena tugas dan fungsi P.P. Kota dimaksud ad. 2.2. diatas sangat sederhana dan tidak membawakan tanggung djawab politis, kiranja susunan keanggotaan dapat pula dipenuhi sedjumlah unsur-unsur Muspida jang terdapat dalam wilajah tersebut dengan mempedomani kepada susunan/komposisi jang ada pada P.P.D. DCI Djakarta, jaitu terdiri dari :
 1. Walikota eksofficio : Anggota / Ketua
 2. Wakil Walikota : Anggota / Wakil Ketua
 3. Unsur dari Kodim : Anggota
 4. Unsur Komwil : Anggota
 5. Unsur Kedjaksanaan : Anggota,
 - 2.4. Chusus untuk Djakarta Utara, karena kondisi daerah/wilajahnja lebih banjak merupakan wilajah daerah maritim; dapatlah diisi sebanyak-banjaknja 6 orang terdiri dari :

1. Walikota eksofficio : Anggota / Ketua
2. Wakil Walikota : Anggota / Wakil Ketua
3. Unsur dari Kodim : Anggota
4. Unsur dari Komwil : Anggota
5. Unsur dari Kedjaksanaan : Anggota
6. Unsur dari Komando Daerah Angkatan Laut : Anggota.

3. Tentang Susunan P.P.S. di Ketjamatan.

Pada tingkat Ketjamatan, sebagaimana dimaksudkan dalam Instruksi P.P.I. No. 1 tahun 1970 tanggal 16 April 1970 dalam diktum pada bab kedua disebutkan :

- a. PPS terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dengan kekuatan sosial berdjumlah sebanjak-banjaknja 7 (tudjuh) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua.
- b. Kekuatan Sosial terdiri dari organisasi golongan Politik jang meliputi unsur-unsur agama, nasionalis dan organisasi golongan karya.
- c. Tjamat Kepala Ketjamatan karena djabatannja mendjadi anggota merangkap Ketua P.P.S.

Dengan demikian dapat disusun keanggotaan ini dengan mempedomani susunan P.P.D. DCI P.P. tingkat Kota terdiri dari unsur-unsur sbb.:

1. Tjamat eksofficio sebagai : Anggota/Ketua.
2. Wakil Tjamat sebagai : Anggota/Wakil Ketua.
3. Unsur Koramil sebagai : Anggota.
4. Unsur Komseko sebagai : Anggota.
5. Unsur Parpol (Nasionalis) sebagai : Anggota.
6. Unsur Parpol (Agama) sebagai : Anggota.
7. Unsur Golkar sebagai : Anggota.

dalam pelaksanaannja akan diatur demikian rupa sehingga dilihat setjara keseluruhan DCI Djakarta semua unsur Parpol terwakili.

Chususnja untuk Ketjamatan Pulau Seribu, mengingat Koramil tidak ada, diganti dengan unsur dari Komando Daerah Angkatan Laut level ketjamatan sebagai Anggota.

4. Tentang Susunan P.P.P. dan K.P.P.S. di Kelurahan

Pada tingkat kelurahan, sebagaimana dimaksudkan dalam Instruksi P.P.I. No. 1 tahun 1970 tanggal 16 April 1970 dalam diktum ketiga disebutkan :

- a. Panitia Pendaftaran Pemilih terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, berdjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota termasuk Ketua.
- b. Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara, terdiri dari unsur-unsur Pemerintah berdjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) sebanyak-banyaknya 7 (tudjuh) orang termasuk Ketua.
- c. Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara, sedapat-dapatnja terdiri dari anggota Panitia Pendaftaran Pemilih.
- d. Lurah, Kepala Desa karena djabatannya mendjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih.
 Dengan demikian dapat disusun keanggotaan dari Panitia Pendaftaran Pemilih dengan berpedoman pada susunan P.P.D. DCI. P.P. Kota dan P.P.S. sbb. :

1. Lurah eksofficio sebagai : Anggota / Ketua
2. Wakil Lurah sebagai : Anggota / Wakil Ketua
3. Babinsa sebagai : Anggota
4. Bimas sebagai : Anggota.

Demikian agar para Walikota, Tjamat dan Lurah dapat memakluminja dan melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya.

Djakarta, 15 Mei 1970

GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
 PEMILIHAN DAERAH DAERAH CHUSUS
 IBUKOTA DJAKARTA.

t.t.d.

(ALI SADIKIN)

Major Djenderal KKO.

TEMBUSAN :

1. Jth. Sekda.
2. Jth. Direktorat I/Pem.
3. Alas.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA**
Djalan Imam Bondjol No. 13 Djakarta

NOTA – DINAS

No. : 511/III/2/1970.

Berdasarkan pasal 12 dari Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 5 tahun – 1970 tentang Susunan dan Tata Kerdja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 34 tahun 1970 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta, maka dengan ini ditetapkan tentang Pedoman Pembagian Tugas Anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta sebagai berikut :

1. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Daerah Khusus Ibukota Djakarta sebagai penanggung djawab umum dalam hubungan keluar dan kedalam, bertugas :
 - a. memimpin kegiatan-kegiatan P.P.D. DCI Djakarta;
 - b. mengawasi kegiatan-kegiatan P.P. Kota diwilayah D.C.I. Djakarta;
 - c. menjelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang dipandang perlu untuk memperlantjar penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh L.P.U. dan P.P.I.
2. Wakil Gubernur Kepala Daerah/Wakil Ketua Panitia Pemilihan Daerah Daerah Khusus Ibukota Djakarta sebagai penanggung Djawab harian, bertugas :
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnja;
 - b. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan;
3. Anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah Daerah Khusus Ibukota karta lainnja, masing-masing adalah sebagai berikut :
 - a. Sdr. Djoemadjitin S.H., bertugas sebagai pengawas Sekretariat P.P.D. D.C.I. Djakarta;
 - b. Sdr. Letkol Eman Sjahban, bertugas sebagai penghubung antara P.P.D. D.C.I. Djakarta dengan Kodam V/Djaya dan mengkoordinir pengamanaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum diwilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta;
 - c. Sdr. A.K.B.P. Drs. Junusi Jusuf, bertugas sebagai penghubung antara P.P.D. D.C.I. Djakarta dengan Komdak VII/Djaya dan mengkoordinir

- pengamanan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum diwilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. Sdr. Drs. Moh. Djamin Ali untuk wilayah Jakarta Selatan;
 - e. Sdr. Alexander Wenas untuk wilayah Jakarta Pusat;
 - f. Sdr. Harsono Radjak Mangunsudarso untuk wilayah Jakarta Barat;
 - g. Sdr. M. Moeffreni Moe'min untuk wilayah Jakarta Utara;
 - h. Sdr. H. Ajatullah untuk wilayah Jakarta Timur.

Bertugas :

- 1. mengawasi kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum Tingkat Kota diwilayah masing-masing sebagai tersebut diatas.
- 2. melaksanakan tugas-tugas lainnja jang dipandang perlu jang berhubungan dengan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum Tingkat Kota diwilayah masing-masing sebagai tersebut diatas.

Djakarta, 21 Mei 1970

GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH D.C.I. DJAKARTA

Tjap/t.t.d.

(ALI SADIKIN)

Major Djenderal KKo.

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA
PANITIA PEMILIHAN DAERAH D.C.I. DJAKARTA**

No. : 539/III/2/1970.

tentang

**PENUNDUKAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KOTA DALAM
WILAJAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA PEMILIHAN
DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.**

- Membatja kembali** : 1. Surat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 26 Maret 1970 No.2/1970 perihal Daerah Administratif Pemilihan;
2. Pokok-pokok kebidjaksanaan dalam pelaksanaan penju-
sunan Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta dan
perangkat kelengkapannja diechelon-echelon wilayah Ad-
ministratif, Ketjamatan dan Kelurahan;
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka memperlantjar tugas jang dibeban-
kan pada Panitia Pemilihan Kota dalam wilayah D.C.I.
Djakarta perlu segera mengangkat anggota-anggota Pani-
tia Pemilihan Kota dalam wilayah D.C.I. Djakarta;
2. Bahwa berhubung dengan surat dari para Walikota
diwilajah D.C.I. Djakarta tentang Penundjukan Anggota
Panitia Pemilihan Kota, perlu mengangkat mereka jang
diusulkan dalam surat tersebut sebagai anggota Panitia
Pemilihan Kota diwilajah masing-masing;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 15 tahun 1969 jo. Peraturan Peme-
rintah No. 1 tahun 1970;
2. Undang-undang No. 16 tahun 1969 jo. Peraturan Peme-
rintah No. 2 tahun 1970;
3. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang
No. 5 tahun 1969;
4. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 jo. Undang-undang
No. 5 tahun 1969;
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun
1970 jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6
tahun 1970;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 34 tahun
1970;

7. Peraturan Daerah tentang Pembagian Wilayah Dalam Rangka Dekonsentrasi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Djakarta (L.D. tahun 1966 No. 4);
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 12 Agustus 1966 No. Ib.3/1/1/1966 tentang Pembentukan Kota Administratif, Ketjamatan dan Kelurahan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta yang telah diubah terakhir dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 Maret 1969 No. Ib.3/1/30/69 jo. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 April 1970 No. Aa.1/1/P/1970;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- I. Mengangkat mereka yang nama-namanya tertantum dalam lampiran surat keputusan ini selaku Anggota Panitia Pemilihan Kota wilayah Kota Djakarta Pusat, Djakarta Utara, Djakarta Barat, Djakarta Selatan dan Djakarta Timur masing-masing dalam jabatan dan kedudukan seperti yang tertantum dalam ladder II lampiran surat keputusan ini.
 - II. Panitia Pemilihan Kota bertugas membantu Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta.
 - III. Memberi wewenang kepada masing-masing Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Kota untuk atas nama Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta melantik wakil Ketua/Anggota-anggota masing-masing Panitia Pemilihan Kota diwilayah D.C.I. Djakarta sebagaimana tertantum dalam ladder II (dua) lampiran surat keputusan ini.
 - IV. Semua biaya untuk keperluan pelaksanaan tugas-tugas dalam ad. I dan II diatas, dibebankan pada mata anggaran 9A.3.1.250.
 - V. Hal-hal yang belum diatur atau terdapat kekeliruan akan diatur dan diperbaiki seperlunya dengan surat keputusan tersendiri.
 - VI. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 29 Mei 1970.

GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH D.C.I. DJAKARTA

t.t.d.

(ALI SADIKIN)

Major Djenderal K.Ko.

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini
disampaikan kepada :

- Jth. : 1. Bapak Menteri Dalam Negeri/Ketua,
Lembaga Pemilihan Umum,
2. Para Wakil Kepala Daerah,
3. Para Wakil Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta,
4. Para Anggota Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta,
5. Para Anggota Muspida DCI Djakarta,
6. Para Anggota B.P.H.,
7. Sekda/Assisten Sekda,
8. Ketua Harian B.P. — B.P.P.,
9. Para Kepala Direktorat/Biro/Inspektorat,
10. Para Walikota,
11. Para Kepala Dinas/Kantor/Djawatan,
12. Jang bersangkutan,
13. Para Tjamat,
14. Para Lurah,
15. Alas.

**DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH/KETUA PANITIA PEMILIHAN DA-
ERAH D.C.I. DJAKARTA.
TANGGAL : 29 MEI 1970 No. : 539/III/2/1970**

No.	NAMA	DJABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	LET. KOL. H.E. DJA- DJANG DJAJAAT- MADJA.	Anggota merangkap Ketua	WALIKOTA DJA- KARTA PUSAT.
2.	S. SILALAH M.A.	Anggota merangkap Wakil Ketua	sda.
3.	LET. KOL. A. FATAH	Anggota	sda.
4.	AKBP. Drs. PAMUDJI	Anggota	sda.
5.	HAMID HAMRAT S.H.	Anggota	sda.
1.	LET. KOL. (L) D. DWINANTO	Anggota merangkap Ketua	WALIKOTA DJA- KARTA UTARA.
2.	H.M. BARNAS	Anggota merangkap Wakil Ketua	sda.
3.	LET. KOL. INF. GOE- NAWAN	Anggota	sda.
4.	AKBP. Drs. BOBBY RACHMAN	Anggota	sda.
5.	LET. KOL. (L) HERRY SOEGITO	Anggota	sda.
6.	TEUKU AMIR HAM- ZAH S.H.	Anggota	sda.
1.	R. SOEDARJA	Anggota merangkap Ketua	WALIKOTA DJA- KARTA BARAT.
2.	SARIMIN	Anggota merangkap Wakil Ketua	sda.
3.	LET. KOL. OEMAR SJARIEF	Anggota	sda.

No.	NAMA	DJABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	AKBP. Drs. SOEBA-GJO	Anggota	WALIKOTA DJA-KARTA BARAT.
5.	K. KETAREN S.H.	Anggota	sda.
1.	H.M.E. RASMA	Anggota merangkap Ketua	WALIKOTA DJA-KARTA SELATAN.
2.	R. BAKA PERDANA-KESUMAH	Anggota merangkap Wakil Ketua	sda.
3.	LET. KOL. UMAR-GONO	Anggota	sda.
4.	AKBP. SOEWARNO HARJONO	Anggota	sda.
5.	CHAERUDDIN S.H.	Anggota	sda.
1.	ALAMSUD'DIN	Anggota merangkap Ketua	WALIKOTA DJA-KARTA TIMUR.
2.	H.M.A. TANUAT-MADJA	Anggota merangkap Wakil Ketua	sda.
3.	LET. KOL. BASRI AL-DJAWI	Anggota	sda.
4.	AKBP. HARJOGJO	Anggota	sda.
5.	KOL. (U) NURPRAPTO	Anggota	sda.
6.	M. SUTADI S.H.	Anggota	sda.

DJAKARTA, 29 MEI 1970
 GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
 PEMILIHAN DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA
 DJAKARTA.

t.t.d.

(ALI SADIKIN)

Major Djenderal KKo.

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
No. : 551/III/2/1970**

tentang

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KOTA DALAM WILAJAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA PEMILIHAN
DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA ;**

- Membatja kembali** : 1. Surat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 26 Maret 1970 No. 2/11/70 perihal Daerah Administratif Pemilihan;
2. Pokok kebidjaksanaan dalam Pelaksanaan Penjurusan Panitia Pemilihan Daerah Khusus Ibukota Djakarta dan Perangkat Kelengkapannya diechelon-echelon Wilayah Administratif, Ketjamatan dan Kelurahan;
- Menimbang** : Bahwa sebagai tindak landjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia tanggal 16 April 1970 No. 2 tahun 1970 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II D.C.I. Djakarta, perlu segera membentuk Panitia dimaksud dengan tugas dan kewadji-annja sebagaimana tertjantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 15 tahun 1969 jo. Peraturan Peme-rintah No. 1 tahun 1970;
2. Undang-undang No. 16 tahun 1969 jo. Praturan Peme-rintah No. 2 tahun 1970;
3. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
4. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 jo. Undang-undang No. 5 tahun 1969;
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1970 jo. Surat Keputusan Menteri Dlaam Negeri No. 6 th. 1970;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 34 tahun 1970;
7. Peraturan Daerah tentang Pembagian Wilayah Dalam

Rangka Dekonsentrasi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Djakarta (L.D. Tahun 1966 No. 4.);

8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 12 Agustus 1966 No. Ib.3/1/1/1966 tentang Pembentukan Kota Administratif, Ketjamatan dan Kelurahan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta jang telah dirubah terachir dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 Maret 1969 No. Ib.3/1/30/1969 jo. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 April 1970 No. Aa. 1/1/2/1970;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Membentuk Panitia Pemilihan Kota dalam wilayah DCI Djakarta untuk wilayah Djakarta Pusat, Djakarta Utara, Djakarta Barat, Djakarta Selatan dan Djakarta Timur jang susunan keanggotaannja masing-masing terdiri dari 5 (lima) orang anggota, ketjuali untuk wilayah Djakarta Utara jang terdiri dari 6 (enam) anggota terdiri dari unsur-unsur Pemerintahan, dengan susunan, tata kerdja serta tugas-tugasnja sebagai tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- II. Segala biaja untuk keperluan Panitia Pemilihan Kota ini dibebankan pada anggaran 9A.3.1.250.
- III. Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki dan ditambah dengan Surat Keputusan tersendiri.
- IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 27 Mei 1970

GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH D.C.I. DJAKARTA

Tjap/t.t.d.

(ALI SADIKIN)

Major Djenderal KKo.

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada

- Jth.:**
1. Bapak Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum,
 2. Para Wakil Kepala Daerah,
 3. Para Wakil Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta Djakarta,
 4. Para Anggota Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta,
 5. Para Anggota Muspida DCI Djakarta,
 6. Para Anggota B.P.H.,
 7. Sekda/Assisten Sekda,
 8. Ketua Harian B.P.P.,
 9. Para Kepala Direktorat/
Biro/Inspektorat,
 10. Para Walikota,
 11. Para Kepala Dinas/Kantor/
Djawatan,
 12. Para Tjamat,
 13. Para Lurah,
 14. Alas.
-

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH D.C.I. DJAKARTA**

Nomor : 558/III/2/1970.

tentang

**PEMBENTUKAN KEMBALI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KOTA DALAM WILAJAH D.C.I. DJAKARTA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA PEMILIHAN
DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA;**

- Membatja kembali** : Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 29 Desember 1969 No. Aa.18/3/52/69 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia di Tingkat Walikota dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Menimbang** : 1. Bahwa dipandang perlu untuk menyesuaikan Sekretariat Pemilu ditingkat Walikota dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 29 Desember 1969 No. Aa.18/3/52/69, dengan instruksi Panitia Pemilihan Indonesia tanggal 16 April 1970 No. 2 tahun 1970;
2. Bahwa sehubungan dengan penyesuaian Sekretariat tersebut pada ad. 1. diatas maka perlu mentjabut berlakunya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut diatas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 15 tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970;
2. Undang-undang No. 16 tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970;
3. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
4. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 jo. Undang-undang No. 5 tahun 1965.
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1970 jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1970;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 34 th. 1970;
7. Peraturan Daerah tentang Pembagian Wilayah Dalam

Rangka Dekonsentrasi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Djakarta (L.D. tahun 1966 No. 4);

8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 12 Agustus 1966 No. Ib.3/1/1/1966 tentang Pembentukan Kota Administratif, Ketjamatan dan Kelurahan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta yang telah diubah terakhir dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 Maret 1969 No. Ib.3/1/30/1969 jo. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 April 1970 No. Aa. 1/1/2/1970.

MEMUTUSKAN :

Dengan mentjabut berlakunya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 29 Desember 1969 No. Aa.18/3/52/69 tentang Pembentukan Sekretariat Pemilu ditingkat Walikota dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta;

- Menetapkan : I. Membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Kota diwilayah Kota Djakarta Pusat, Djakarta Utara, Djakarta Barat, Djakarta Selatan dan Djakarta Timur dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta, dengan susunan Anggota yang tertantum dalam daftar pada lampiran Surat Keputusan ini.
- II. Sekretariat Panitia Pemilihan Kota dimaksud ad. I bertugas membantu Panitia Pemilihan Kota diwilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta dalam mempersiapkan dan menjelenggarakan/melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pemilihan umum.
- III. Pembiajaan untuk keperluan pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kota dibebankan pada Anggaran Keuangan Panitia Pemilihan Kota diwilayah DCI Djakarta
- IV. Hal-hal yang belum diatur dan apabila terdapat kekeliruan akan diatur dan diperbaiki kembali dengan surat keputusan tersendiri.
- V. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 2 Djuni 1970

GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH D.C.I. DJAKARTA

t.t.d.

(ALI SADIKIN)

Major Djenderal KKo.

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini
disampaikan kepada

- Jth.:
1. Bapak Menteri Dalam Negeri/Ketua
Lembaga Pemilihan Umum,
 2. Para Wakil Kepala Daerah,
 3. Para Anggota Panitia Pemilihan
Daerah D.C.I. Djakarta,
 4. Para Wakil Pimpinan DPRD-GR DCI
Djakarta,
 5. Para Anggota B.P.H.,
 6. Sekda,
 7. Ketua Harian BP – BPP,
 8. Para Kepala Direktorat/Biro/
Inspektorat,
 9. Para Walikota,
 10. Para Kepala Dinas/Kantor/Djawatan,
 11. Para Tjamat,
 12. Para Lurah,
 13. Alas.

**LAMPIRAN : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua
Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta, tanggal
2 Juni 1970 No. 558/III/2/1970.**

No.	NAMA	DJABATAN	KETERANGAN
1.	2	3	4
1.	W.H. Manuputty	Sekretaris	DJAKARTA PUSAT
2.	Muchtar Hamid B.A.	Biro Penjeleng- garaan	
3.	Dra. Maemunah	Biro Administrasi	
4.	Chairan		
5.	A. Rianom B.A.	Biro Perbekalan & Perhubungan	
5.	A. Tartusi	Biro Pengawasan.	
1.	Moh. Amin S.H.	Sekretaris	DJAKARTA UTARA
2.	Goenawan Noor	Biro Penjeleng- garaan	
3.	Soehadi	Biro Administrasi	
4.	A.R. Sagala B.A.	Biro Perbekalan & Perhubungan	
5.	Dadang S.H.	Biro Pengawasan	
1.	Drs. Sjafei Joenoes	Sekretaris	DJAKARTA BARAT
2.	Oesman Effendi	Biro Penjeleng- garaan	
3.	Apan B.A.	Biro Administrasi	
4.	Kusnadi B.A.	Biro Perbekalan & Perhubungan	
5.	B. Doerachim	Biro Pengawasan	
5.	M. Oerip Marto- widjojo.		
1.	Soegeng B.A.	Sekretaris	DJAKARTA SELA- TAN
2.	Moekadi B.St.	Biro Penjeleng- garaan	
3.	Soekamto B.A.	Biro Administrasi	

No.	N A M A	DJABATAN	KETERANGAN
4.	Solichin	Biro Perbekalan & Perhubungan	DJAKARTA TIMUR.
5.	Tb. Rafiudin H.	Biro Pengawasan.	
1.	Drs. Sofjan Hakim	Sekretaris	
2.	Sipon	Biro Penjeleng- garaan	
3.	Sunarto	Biro Administrasi	
4.	Effendi	Biro Perbekalan & Perhubungan	
5.	Drs. Ramli Tajab.	Biro Pengawasan.	

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH D.C.I. DJAKARTA**

Tjap/t.t.d.

(ALI SADIKIN)

Major Djenderal KKo.

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA
PANITIA PEMILIHAN DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

Nomor : 645/III/2/70.

tentang

**PENGANGKATAN PETUGAS SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA PEMILIHAN
DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA;**

- Membatja** : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Djakarta, tanggal 29 Desember 1969 No. Aa. 18/3/53/69, tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah Daerah Khusus Ibukota Djakarta;
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kepentingan kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah Daerah Khusus Ibukota Djakarta, perlu mengangkat petugas-petugas yang akan membantu kegiatan-kegiatan pada Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah Daerah Khusus Ibukota Djakarta;
2. Bahwa yang tersebut nama-namanya dalam daftar lampiran surat keputusan ini dianggap tjakap dan mempunjai pengalaman untuk melaksanakan tugas yang dibebankan padanya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 15 tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. undang-undang No. 6 tahun 1969;
3. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1969 jo. Undang-undang No. 5 tahun 1969;
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 108 th. 1970;
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1970 jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1970;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 1/14/1970;
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 14 April 1970 No. Aa. 18/3/3/70 tentang

Pembentukan kembali Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Mengangkat nama-nama jang tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini ruang (2), jabatan ruang (3) terhitung mulai tanggal ruang (5), diangkat sebagai pegawai organik dan Non-organik/tenaga lepas ruang (4) diperbantukan pada Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- II. Gadjil/Honorarium, Upah tenaga lepas dan Uang lembur jang berkepentingan dibebankan pada mata anggaran 9 A.3.1.250;
- III. Hal-hal jang belum diatur atau bila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 6 Djuli 1970.

GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH D.C.I. DJAKARTA

tjap/t.t.d.

(ALI SADIKIN)

Major Djenderal KKO.

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada

- Jth.:
1. Panitia Pemilihan Indonesia (P.P.I.).
 2. Sekda/Assisten Sekda DCI Djakarta,
 3. Kepala Biro IV/Personalia DCI,
 4. Kepala Inspektorat Pengawasan Keuangan D.C.I. Djakarta,
 5. Para Kepala Direktorat/Biro dalam lingkungan DCI Djakarta,
 6. Para Kepala Dinas/Djawatan dalam lingkungan DCI Djakarta,
 7. Alas.

DAFTAR : Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 6 Djuli 1970 No. 645/III/2/1970.

No. Urut	Nama	Djabatan	Tenaga/Pegawai	Terhitung	Keterangan
			Organik/NonOrg	Mulai tanggal	
1	2	3	4	5	6
1.	Helios Koen- to S.H.	Kepala Biro Pe- ngawasan	Pegawai Organik	25 Mei 1970	
2.	R. Pandji Moerdi	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi	s.d.a.	1 Maret 1970	
3.	Soekadi S.H.	Kepala Bagian Alokasi, Biro Per- bekalan & Perhu- bungan	s.d.a.	6 April 1970	
4.	Muchrodji	Kepala Bagian Ke- amanan, Biro Pe- njelenggaraan	s.d.a.	25 April 1970	
5.	Herman Soe- marno	Kepala Bagian Humas, Biro Pe- njelenggaraan	s.d.a.	6 April 1970	
6.	Jerni B.Sc.	Anggota Bagian Tata Usaha, Biro Administrasi	s.d.a.	2 Mei 1970	
7.	Niek Rusmi- ni.	Anggota Bagian Humas, Biro Pe- njelenggaraan	s.d.a.	6 Mei 1970	
8.	Ketut Aswin	s.d.a.	s.d.a.	15 Mei 1970	
9.	Farid Hakim	Kepala Bagian Penyelenggaraan, Biro Penyelengga- raan	s.d.a.	24 April 1970	
10.	Supardjono	Anggota Bagian Penyelenggaraan Biro Penyelengga- raan	s.d.a.	1 Maret 1970	
11.	Sjamsuir Alamsjah	s.d.a.	s.d.a.	1 Mei 1970	

1	2	3	4	5	6
12.	Soepodo	Kepala Bagian Dokumentasi & Statistik, Biro Penjelenggaraan.	Pegawai Organik	3 Mei 1970	
13.	Kapt. Jusuf Facinar	Anggota Bagian Keamanan, Biro Penjelenggaraan	s.d.a.	6 Mei 1970	
14.	Soediman	Anggota Bagian Tata Usaha, Biro Administrasi.	s.d.a.	20 April 1970	
15.	Djahrowadi	Anggota Bagian Tata Usaha, Biro Administrasi	s.d.a.	1 Maret 1970	
16.	Sudjana	s.d.a.	s.d.a.	1 Maret 1970	
17.	Soepardi	Sopir pada Biro Perbekalan & Perhubungan.	s.d.a.	1 Maret 1970	
18.	Sumanang	Sopir pada Biro Administrasi	s.d.a.	1 Maret 1970	
19.	Erni S.H.	Kepala Bagian Pengawas Keuangan Biro Pengawasan.	Tenaga Non Organik	12 Mei 1970	
20.	Drs. F. Sahadi	Kepala Bagian Pengawas Technis Pemilu,* Biro Pengawas.	Pegawai Organik	1 Djuli 1970	
21.	Tugi Rahaju	Anggota Bagian Bendahara	Tenaga Non Organik		
22.	Atang Danakoem	Kepala Bagian Pengawas Barang ² Biro Pengawasan	s.d.a.	4 Djuni 1970	
23.	Isrin Kadir	Anggota Urusan Administrasi Personil. Biro Administrasi	s.d.a.	4 Djuni 1970	
24.	Sugijarto BBA.	Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Adminis	s.d.a.	5 Mei 1970	
25.	Basri	Anggota Bagian Urusan Dalam	s.d.a.	5 April 1970	
26.	Nurlin Suparjati	Angg. Bagian Dokumentasi dan Statistik.	s.d.a.	5 Maret 1970	

1	2	3	4	5	6
27.	HermanSurjadi	Anggota Bagian Bendahara. Biro Administrasi	Tenaga/Non Or-	4 Djuni 1970	
28.	Sjahrial Effeni	Anggota Bagian Angkutan	s.d.a.	1 April 1970	
29.	Soedarto	Anggota Bagian Pengadaan. Biro Perbekalan & Perhubungan.	s.d.a.	30 Maret 1970	
30.	Soematno	Anggota Bagian Alokasi. Biro Perbekalan & Perhubungan.	s.d.a.	8 April 1970	
31.	Idham Pranoto	s.d.a.	s.d.a.	7 Mei 1970	
32.	Achmad	Pelajan pada Biro Administrasi	s.d.a.	1 Maret 1970	
33.	Sarbini	s.d.a.	s.d.a.	1 Maret 1970	

Djakarta, 6 Djuli 1970
 GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
 PEMILIHAN DAERAH D.C.I. DJAKARTA

Tjap/t.t.d.

(ALI SADIKIN)

Major Djenderal KKo.

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA DJAKARTA PUSAT
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

No. : 6208/30/DP/1970.

tentang

**PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KETJAMATAN GAMBIR
KOTA DJAKARTA PUSAT
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

**WALIKOTA DJAKARTA PUSAT
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA :**

- Membatja kembali** : Formulir berita Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 14 April 1970 No. 14/11/1970 tentang pengangkatan Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pendaftaran Pemilih dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara ;
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970, perlu segera mengangkat anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara tingkat Ketjamatan GAMBIR Kota Djakarta Pusat jang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan kekuatan Sosial meliputi unsur-unsur agama, nasionalis dan karya ;
2. Bahwa berhubung dengan surat dari Tjamat GAMBIR wilayah Djakarta Pusat Daerah Chusus Ibukota Djakarta tanggal 15 Mei 1970 No. 1223/38/1/DP/1970 tentang usul penundjukkan anggota Panitia Pemungutan Suara, perlu mengangkat mereka jang diusulkan dalam surat tersebut sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana jang terlampir dalam surat keputusan ini ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang no. 15 tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970.
2. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo Undang-undang No. 6 tahun 1969 ;

3. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 jo Undang-undang No. 5 tahun 1969 ;
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1970 ;
5. Peraturan Daerah tentang Pembagian Wilayah Dalam Rangka Dekonsentrasi Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta (L.D. Tahun 1966 No. 4) ;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 12 Agustus 1966 No. Ib.3/1/1/1966 tentang Pembentukan Kota Administratif, Ketjamatan dan Kelurahan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta yang telah dirubah terakhir dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 Maret 1969 No. I.b.3/1/30/1969 jo Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 April 1970 No. Aa.1/1/2/1970.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- I. Mengangkat mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini selaku anggota Panitia Pemungutan Suara Ketjamatan GAMBIR Wilayah Djakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Djakarta.
 - II. Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut dari Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, menetapkan tugas dan kewajiban anggota Panitia Pemungutan Suara sbb :
 - (1) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tk. II.
 - (2) Menjelenggarakan Pemungutan Suara.
 - (3) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemungutan suara diwilayah masing-masing pada Gubernur Kepala Daerah/Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta melalui Walikota yang bersangkutan.
 - III. Hal-hal yang belum cukup diatur apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diatur dan diperbaiki kemudian dalam surat keputusan tersendiri.

IV. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : D j a k a r t a
Pada tanggal : 15 Djuni 1970

WALIKOTA DJAKARTA PUSAT DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA,

ttd.

(H. EDDY DJADJANG DJAJAATMADJA)

TEMBUSAN : Surat keputusan ini
disampaikan kepada Jth. :

- 1. Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.**
 - 2. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta.**
 - 3. Sekretaris Daerah.**
 - 4. Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta.**
 - 5. Kepala Direktorat I/Pemerintahan.**
 - 6. Para Tjamat.**
 - 7. Para Lurah.**
 - 8. Para jang bersangkutan.**
 - 9. A l a s.**
-

**LAMPIRAN : Surat Keputusan Walikota Djakarta Pusat
tanggal 15 Djuni 1970
No. 6208/30/DP/1970**

Nomor	N a m a	Djabatan dalam PPS	Keterangan
1.	D. Soenardi	Ketua	Tjamat Gambir
2.	Kartius Sinurat BA	Wk. Ketua	Wk. Tjamat Gambir
3.	Tugino Djojopra- noto	Anggota	Dan Ramil Gambir
4.	K. Bijono	Anggota	Komsekko 711 Gambir
5.	Helmy Rochman	Anggota	Wk. Gol. Demo- krasi Pembangun- an
6.	Oesman Tahlan	Anggota	Wk. Kelompok Spirituil.
7.	S.M. Saheti	Anggota	Wk. Golkar.

Djakarta, 15 Djuni 1970

**WALIKOTA DJAKARTA PUSAT DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA,**

ttd.

(H. EDDY DJADJANG DJAJAATMADJA)

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA DJAKARTA PUSAT
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

NO. : 6209/30/DP/1970.

tentang

**PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETJAMATAN TANAH ABANG KOTA DJAKARTA PUSAT
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

**WALIKOTA DJAKARTA PUSAT
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA :**

- Membatja kembali** : Formulir berita Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 14 April 1970 No. 14/11/1970 tentang pengangkatan Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pendaftaran Pemilih dan Kelompok Penjelenggaraan Pemungutan Suara ;
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970, perlu segera mengangkat anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara tingkat Ketjamatan Tanah Abang Kota Djakarta Pusat yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan kekuatan Sosial meliputi unsur-unsur agama, nasionalis dan karya ;
2. Bahwa berhubung dengan surat dari Tjamat Tanah Abang wilayah Djakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 15 Mei 1970 No. '0026V/Sek/TA/70 tentang usul penundjukkan anggota Panitia Pemungutan Suara, perlu mengangkat mereka yang diusulkan dalam surat tersebut sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 15 tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970.
2. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo Undang-undang No. 6 tahun 1969 ;

3. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 jo Undang-undang No. 5 tahun 1969 ;
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1970 ;
5. Peraturan Daerah tentang Pembagian Wilayah Dalam Rangka Dekonsentrasi Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta (L.D. Tahun 1966 No. 4) ;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta tanggal 12 Agustus 1966 No. Ib.3/1/1/1966 tentang Pembentukan Kota Administratif, Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta yang telah diroboh terakhir dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 Maret 1969 No. Ib.3/1/30/1969 jo Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 April 1970 No. Aa.1/1/2/1970.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : I. Mengangkat mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini selaku anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tanah Abang Wilayah Djakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Djakarta.
- II. Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut dari Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, menetapkan tugas dan kewajiban anggota Panitia Pemungutan Suara sbb :
- (1) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah tingkat II.
 - (2) menjelenggarakan Pemungutan suara.
 - (3) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemungutan suara di wilayah masing-masing pada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DKI Jakarta melalui Walikota yang bersangkutan.

III. Hal-hal jang belum tjukup diatur apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diatur dan diperbaiki kemudian dalam surat keputusan tersendiri.

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : D j a k a r t a
Pada tanggal : 15 Djuni 1970.

WALIKOTA DJAKARTA PUSAT DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

ttd.

(H. EDDY DJADJANG DJAJAATMADJA)

TEMBUSAN : Surat keputusan ini
disampaikan kepada Jth. :

1. Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
 2. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta.
 3. Sekretaris Daerah.
 4. Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta.
 5. Kepala Direktorat I/Pemerintahan.
 6. Para Tjamat.
 7. Para Lurah.
 8. Para Jang Bersangkutan.
 9. A l a s .
-

**LAMPIRAN : Surat Keputusan Walikota Djakarta Pusat
tanggal 15 Djuni 1970
No. : 6209/30/DP/1970**

Nomor	N a m a	Djabatan Dalam PPS	Keterangan
1.	Sobana Perjana	Ketua	Tjamat Tanah Abang
2.	S. Mustari	Wakil Ketua	Wk. Tjamat Ta- nah Abang.
3.	A. Rasjad	Anggota	Dan Ramil Ta- nah Abang.
4.	W. Parapat	Anggota	Komsekko 715 Tanah Abang
5.	Abd. Madjid H.A.M.	Anggota	Wk. Kelompok Persatuan.
6.	M. Hasan Patabuga	Anggota	Wk. Kelompok Demokrasi Pembangunan
7.	Zoebaidi Hanan	Anggota	Wakil Golkar

Djakarta, 15 Djuni 1970.

**WALIKOTA DJAKARTA PUSAT DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

ttd.

(H. EDDY DJADJANG DJAJAATMADJA)

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA DJAKARTA PUSAT
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

NO. : 6210/30/DP/1970.

tentang

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETJAMATAN SAWAH BESAR KOTA DJAKARTA PUSAT
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

**WALIKOTA DJAKARTA PUSAT
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA :**

- Membatja kembali** : Formulir berita Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 14 April 1970 No. 14/11/1970 tentang pengangkatan Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pendaftaran Pemilih dan Kelompok Penjelenggaraan Pemungutan Suara ;
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970, perlu segera mengangkat anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara tingkat Ketjamatan Sawah Besar Kota Djakarta Pusat yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan kekuatan Sosial meliputi unsur-unsur agama, nasionalis dan karya ;
2. Bahwa berhubung dengan surat dari Tjamat Sawah Besar wilayah Djakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 26 Mei 1970 No. 1322/30-PU/I/1970 tentang usul penundjukkan anggota Panitia Pemungutan Suara, perlu mengangkat mereka yang diusulkan dalam surat tersebut sebagai anggota Panitia Pemungutan suara sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 15 tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 ;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo Undang-undang No. 6 tahun 1969 ;
3. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 jo Undang-undang No. 5 tahun 1969 ;

4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1970 ;
5. Peraturan Daerah tentang Pembagian Wilayah Dalam Rangka Dekonsentrasi Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta (L.D. Tahun 1966 No. 4) ;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 12 Agustus 1966 No. Ib.3/1/1/1966 tentang Pembentukan Kota Administratif, Ketjamatan dan Kelurahan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta yang telah dirubah terachir dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 Maret 1969 No. I.b.3/1/30/1969 jo Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 April 1970 No. Aa. 1/1/2/1970.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- I. Mengangkat mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini selaku anggota Panitia Pemungutan Suara Ketjamatan Sawah Besar Wilayah Djakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Djakarta.
 - II. Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut dari Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, menetapkan tugas dan kewadajiban anggota Panitia Pemungutan Suara sbb :
 - (1) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tk. II.
 - (2) Menjelenggarakan Pemungutan suara.
 - (3) bertanggung djawab dalam penjelenggaraan pemungutan suara diwilayah masing-masing pada Gubernur Kepala Daerah/Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta melalui Walikota yang bersangkutan.
 - III. Hal-hal yang belum tjukup diatur apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diatur dan diperbaiki kemudian dalam surat keputusan tersendiri.

IV. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : D j a k a r t a
Pada tanggal : 15 Djuni 1970

WALIKOTA DJAKARTA PUSAT DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA,

ttd.

(H. EDDY DJADJANG DJAJAATMADJA)

TEMBUSAN : Surat keputusan ini
disampaikan kepada :

1. Jth. Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
 2. Jth. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta.
 3. Jth. Sekretaris Daerah.
 4. Jth. Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta.
 5. Jth. Kepala Direktorat I/Pemerintahan.
 6. Jth. Para Tjamat.
 7. Jth. Para Lurah.
 8. Jth. Para jang bersangkutan.
 9. A l a s.
-

**LAMPIRAN : Surat Keputusan Walikota Djakarta Pusat
tanggal 15 Djuni 1970
Nomor : 6210/30/DP/1970**

Nomor	N a m a	Djabatan Dalam PPS	Keterangan
1.	Srihadi BA	Ketua	Tjamat Sawah Besar
2.	Pardjoko BA	Wk. Ketua	Wk. Tjamat Sawah Besar
3.	Lettu Saleh Effendi	Anggota	Dan Ramil Sawah Besar
4.	Kompol Agha Maryun	Anggota	Kom Sekko Sawah Besar
5.	M. Nadi Hasan	Anggota	Dari Kelompok Persatuan
6.	M. Rawi Tambrin	Anggota	Dari Kelompok Demokrasi Pemba- ngunan.
7.	Nj. Laela Rochma	Anggota	Dari Golkar (Pertiwi)

Djakarta, 15 Djuni 1970.

**WALIKOTA DJAKARTA PUSAT DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA,**

ttd.

(H. EDDY DJADJANG DJAJAATMADJA)

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA DJAKARTA PUSAT
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

NO. : 6211/30/DP/1970

tentang

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETJAMATAN KEMAJORAN KOTA DJAKARTA PUSAT
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

**WALIKOTA DJAKARTA PUSAT
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

- Membatja kembali** : Formulir berita Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 14 April 1970 No. 14/11/1970 tentang pengangkatan Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pendaftaran Pemilih dan Kelompok Penjelenggaraan Pemungutan Suara ;
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970, perlu segera mengangkat anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara tingkat Ketjamatan Kemajoran Kota Djakarta Pusat yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan kekuatan Sosial meliputi unsur-unsur agama, nasionalis dan karya ;
2. Bahwa berhubung dengan surat dari Tjamat Kemajoran wilayah Djakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 16 Mei 1970 No. 969/08/1/DP/70 tentang usul penundjukkan anggota Panitia Pemungutan Suara, perlu mengangkat mereka yang diusulkan dalam surat tersebut sebagai anggota Panitia Pemungutan suara sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 15 tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 ;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo Undang-undang No. 6 tahun 1969 ;

3. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 jo Undang-undang No. 5 tahun 1969 ;
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1970 ;
5. Peraturan Daerah tentang Pembagian Wilayah Dalam Rangka Dekonsentrasi Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta (L.D. Tahun 1966 No. 4).;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 12 Agustus 1966 No. Ib.3/1/1/1966 tentang Pembentukan Kota Administratif, Ketjamatan dan Kelurahan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta yang telah dirubah terachir dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 Maret 1969 No.Ib.3/1/30/1969 jo Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 April 1970 No. Aa.1/1/2/1970.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- I. Mengangkat mereka jang nama-namanja tersebut dalam lampiran surat keputusan ini selaku anggota Panitia Pemungutan Suara Ketjamatan Kemajoran Wilayah Djakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Djakarta.
 - II. Sambil menunggu ketentuan lebih landjut dari Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, menetapkan tugas dan kewadjiban anggota Panitia Pemungutan Suara sbb :
 - (1) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tk. II.
 - (2) Menjelenggarakan Pemungutan suara.
 - (3). bertanggung djawab dalam penjelenggaraan pemungutan suara diwilajah masing-masing pada Gubernur Kepala Daerah/Panitia Pemilihan Daerah DCI Deakarta melalui Walikota jang bersangkutan.

- III. Hal-hal yang belum cukup diatur apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diatur dan diperbaiki kemudian dalam surat keputusan tersendiri.
- IV. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : D j a k a r t a
Pada tanggal : 15 Djuni 1970

WALIKOTA DJAKARTA PUSAT DAERAH
KHUSUS IBUKOTA DJAKARTA,

ttd.

(H. EDDY DJADJANG DJAJAATMADJA)

TEMBUSAN : Surat keputusan ini
disampaikan kepada :

1. Jth. Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
 2. Jth. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 3. Jth. Sekretaris Daerah.
 4. Jth. Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta.
 5. Jth. Kepala Direktorat I/Pemerintahan.
 6. Jth. Para Tjamat.
 7. Jth. Para Lurah.
 8. Jth. Para yang bersangkutan
 9. A l a s
-

**LAMPIRAN : Surat Keputusan Walikota Djakarta Pusat
tanggal 15 Djuni 1970.**

Nomor : 6211/30/DP/1970

Nomor	N a m a	Djabatan Dalam PPS	Keterangan
1.	Soenarjo	Ketua	Tjamat Kemajoran
2.	Djaidub Sinurat BA	Anggota	Wk. Tjamat Kemajoran
3.	I d r i s	Anggota	Dan Ramil Kemajoran
4.	Drs. T. Sama'oen	Anggota	Dan Sekko 713 Kemajoran
5.	Harun Al Rasjid	Anggota	Wk. dari Kelompok Persatuan
6.	R.S. Sukarto	Anggota	Wk. dari kelompok Demokrasi Pempa- ngunan.
7.	Djiman Prijo Utomo	Anggota	Wakil dari Golkar.

Djakarta, 15 Djuni 1970.

**WALIKOTA DJAKARTA PUSAT DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

ttd.

(H. EDDY DJADJANG DJAJAATMADJA).

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA DJAKARTA PUSAT
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

NO. : 6212/30/DP/1970

tentang

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETJAMATAN SENEN KOTA DJAKARTA PUSAT
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.**

**WALIKOTA DJAKARTA PUSAT DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA :**

- Membatja kembali** : Formulir berita Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 14 April, 1970 No.14/11/1970 tentang pengangkatan Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pendaftaran Pemilih dan Kelompok Penjelenggaraan Pemungutan Suara;
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1970, perlu segera mengangkat anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara tingkat Ketjamatan SENEN Kota Djakarta Pusat jang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan kekuatan Sosial meliputi unsur-unsur agama, nasionalis dan karya.
2. Bahwa berhubung dengan surat dari Tjamat SENEN wilajah Djakarta Pusat Daerah Chusus Ibukota Djakarta tanggal 19 Mei 1970 No.006/Up.1/RHS tentang usul penundjukan anggota Panitia Pemungutan Suara, perlu mengangkat mereka jang diusulkan dalam surat tersebut sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana jang terlampir dalam surat keputusan ini;
- Mengingat** : 1. Undang-undang no.15 tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1970;
2. Undang-undang No.18 tahun 1965 jo Undang-undang No.6 tahun 1969;
3. Penetapan Presiden No.2 tahun 1961 jo Undang-undang No.5 tahun 1969;
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1970;
5. Peraturan Daerah tentang Pembagian Wilajah Dalam

Rangka Dekonsentrasi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Djakarta (L.D. Tahun 1966 No.4).

6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 12 Agustus 1966 No.Ib.3/1/1/1966 tentang Pembentukan Kota Administratif, Ketjamatan dan Kelurahan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta jangt telah dirubah terachir dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 Maret 1969 No.I.b.3/1/30/1969 jo Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 April 1970 No.Aa.1/1/2/1970.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- I. Mengangkat mereka jang namanja tersebut dalam lampiran surat keputusan ini selaku anggota Panitia Pemungutan Suara Ketjamatan SENEN Wilayah Djakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Djakarta.
 - II. Sambil menunggu ketentuan lebih landjut dari Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, menetapkan tugas dan kewajiban anggota Panitia Pemungutan Suara sbb.:
 - (1) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tk. II.
 - (2) Menjelenggarakan Pemungutan Suara.
 - (3) bertanggung djawab dalam penyelenggaraan pemungutan suara diwilajah masing-masing pada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta melalui Walikota jang bersangkutan.
 - III. Hal-hal jang belum tjukup diatur apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diatur dan diperbaiki kemudian dalam surat keputusan tersendiri.

IV. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Djuni 1970.

WALIKOTA DJAKARTA PUSAT
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA,

Tjap/ttd.

(H. EDDY DJADJANG DJAJAATMADJA)

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini
disampaikan kepada Jth.:

1. Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
2. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta.
3. Sekretaris Daerah.
4. Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta.
5. Kepala Direktorat I/Pemerintahan.
6. Para Tjamat.
7. Para Lurah.
8. Para jang bersangkutan.
9. Alas.

**LAMPIRAN : Surat Keputusan Walikota Djakarta
Pusat tanggal 15 Djuni 1970.
No.6212/30/DP/1970.**

No.	N a m a	Djabatan Dalam PPS	Keterangan
1.	Kusnan B.A.	Ketua	Tjamat Senen
2.	M. Nasir Sartono	Wakil Ketua	Wk. Tjamat Senen
3.	A.J. Thomas	Anggota	Dan Ramil Senen
4.	P. Gono	Anggota	Perwakilan Kom- wil 71
5.	Drs. Abdul Djami Ghozaly	Anggota	Wk. Kelompok Persatuan
6.	E. Sutarlan	Anggota	Wk. Kelompok Demokrasi Pem- angunan.
7.	Drs. Abril Hamidy Daulay	Anggota	Wakil Golkar

Djakarta, 15 Djuni 1970.

**WALIKOTA DJAKARTA PUSAT
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Tjap/ttd.

(H. EDDY DJADJANG DJAJAATMADJA)

6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 12 Agustus 1966 No.Ib.3/1/1/1966 tentang Pembentukan Kota Administratif, Ketjamatan dan Kelurahan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta jang telah dirubah terachir dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 Maret 1969 No.Ib.3/1/30/1969 jo Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 April 1970 No.Aa.1/1/2/1970.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Mengangkat mereka jang namanja tersebut dalam lampiran surat keputusan ini selaku anggota Panitia Pemungutan Suara Ketjamatan Tjempaka Putih Wilayah Djakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Djakarta.
- II. Sambil menunggu ketentuan lebih landjut dari Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, menetapkan tugas dan kewadjiban anggota Panitia Pemungutan Suara sbb.:
- (1) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tk. II.
 - (2) Menjelenggarakan Pemungutan Suara.
 - (3) bertanggung djawab dalam penyelenggaraan pemungutan suara diwilajah masing-masing pada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta melalui Walikota jang bersangkutan.
- III. Hal-hal jang belum tjukup diatur apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diatur dan diperbaiki kemudian dalam surat keputusan tersendiri.

IV. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 15 Djuni 1970

WALIKOTA DJAKARTA PUSAT DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA,

Tjap/ttd.

(H. EDDY DJADJANG DJAJAATMADJA)

TEMBUSAN : Surat keputusan ini
disampaikan kepada Jth.:

1. Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
 2. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta.
 3. Sekretaris Daerah.
 4. Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta.
 5. Kepala Direktorat I/Pemerintahan.
 6. Para Tjamat.
 7. Para Lurah.
 8. Para Jang Bersangkutan.
 9. Alas.
-

LAMPIRAN : Surat Keputusan Walikota Jakarta
Pusat tanggal 15 Djuni 1970.
Nomor : 6213/30/DP/1970.

Nomor	N a m a	Djabatan Dalam PPS	Keterangan
1.	Ramidi Muchtar	Ketua	Tjamat Tjempaka Putih.
2.	Tb. Jusuf	Wk. Ketua	Wk. Tjamat Tjem- paka Putih.
3.	Sj. Sitonga	Anggota	Dan Ramil Tjem- paka Putih.
4.	M. Isro	Anggota	Perwakilan Kom- wil 71 Tjempaka Putih.
5.	Siradjuddin Chalil	Anggota	Wk. Kelompok Persatuan
6.	Nasir Arifin	Anggota	Wk. Kelompok Demokrasi Pemba- ngunan.
7.	H. Sahrudin	Anggota	Wk. Golkar.

Djakarta, 15 Djuni 1970.

WALIKOTA DJAKARTA PUSAT DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA,

Tjap/ttd.

(H. EDDY DJADJANG DJAJAATMADJA)

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA DJAKARTA PUSAT DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.**

No.:6214/30/DP/1970.

tentang

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETJAMATAN MENTENG KOTA DJAKARTA PUSAT
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

**WALIKOTA DJAKARTA PUSAT DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA :**

- Membajta kembali** : Formulir berita Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 14 April, 1970 No.14/11/1970 tentang pengangkatan Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pendaftaran Pilih dan Kelompok Penjelenggaraan Pemungutan Suara;
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1970, perlu segera mengangkat anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara tingkat Ketjamatan Menteng Kota Djakarta Pusat yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan kekuatan Sosial meliputi unsur-unsur agama, nasionalis dan karya;
2. Bahwa berhubung dengan surat dari Tjamat Menteng wilajah Djakarta Pusat Daerah Chusus Ibukota Djakarta tanggal 21 Mei 1970 No.194/2/1/1970 tentang usul penundjukan anggota Panitia Pemungutan Suara, perlu mengangkat mereka yang diusulkan dalam surat tersebut sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini;
- Mengingat** : 1. Undang-undang no.15 tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1970.
2. Undang-undang No.18 tahun 1965 jo Undang-undang No. 6 tahun 1969;
3. Penetapan Presiden No.2 tahun 1961 jo Undang-undang No. 5 tahun 1969;
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1970;

5. Peraturan Daerah tentang Pembagian Wilayah Dalam Rangka Dekonsentrasi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Djakarta (L.D. Tahun 1966 No.4);
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 12 Agustus 1966 No.Ib.3/1/1/1966 tentang Pembentukan Kota Administratif, Ketjamatan dan Kelurahan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta yang telah dirubah terakhir dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 Maret 1969 No.I.b.3/1/30/1969 jo Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 April 1970 No.Aa.1/1/2/1970.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini selaku anggota Panitia Pemungutan Suara Ketjamatan Menteng Wilayah Djakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Djakarta.
- II. Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut dari Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, menetapkan tugas dan kewajiban anggota Panitia Pemungutan Suara sbb.:
- (1) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tk. II.
 - (2) menjelenggarakan Pemungutan Suara.
 - (3) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemungutan suara diwilayah masing-masing pada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta melalui Walikota yang bersangkutan.
- III. Hal-hal yang belum cukup diatur apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diatur dan diperbaiki kemudian dalam surat keputusan tersendiri.

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta,
Pada tanggal : 15 Djuni 1970.

**WALIKOTA DJAKARTA PUSAT DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Tjap/ttd.

(H. EDDY DJADJANG DJAJAATMADJA)

**TEMBUSAN : Surat Keputusan ini
disampaikan kepada Jth.:**

1. Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
 2. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta.
 3. Sekretaris Daerah.
 4. Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta.
 5. Kepala Direktorat I/Pemerintahan.
 6. Para Tjamat.
 7. Para Lurah.
 8. Para jang bersangkutan.
 9. Alas.
-

**LAMPIRAN : Surat Keputusan Walikota
Djakarta Pusat tanggal 15
Djuni 1970.
Nomor: 6214/30/DP/1970.**

Nomor	N a m a	Djabatan Dalam PPS	Keterangan
1.	Drs. Soedjoko Tirtowidjojo	Ketua	Tjamat Menteng
2.	Ismail Ibrahim BA	Wk. Ketua	Wk. Tjamat Menteng
3.	Ibnu Saud	Anggota	Dan Ramil Menteng
4.	M. Soetadi	Anggota	Dan Sekko 714 Menteng
5.	Muh. Jusuf Abdullah	Anggota	Wk. dari Kelompok Persatuan
6.	Ishak Iskandar	Anggota	Wk. Dari Kelompok Demokrasi Pembangunan.
7.	M. Prijo Hartono	Anggota	Wk. dari Golkar

Djakarta, 15 Djuni 1970.

**WALIKOTA DJAKARTA PUSAT DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Tjap/ttd.

(H. EDDY DJADJANG DJAJAATMADJA)

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA/KETUA PANITIA PEMILIHAN KOTA
DJAKARTA U T A R A.
daerah khusus ibukota djakarta**

Nomor : 212/IV/2/DU/1970.

tentang

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DIWILAJAH
KOTA DJAKARTA UTARA, DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA.**

**WALI KOTA DJAKARTA UTARA, DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.**

- Membatja kembali** : Surat Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 14 April 1970 No. 14/11/70 tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pendaftaran Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- Menimbang** : Bahwa demi kelantjaran tugas Panitia Pemilihan Kota jang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta tanggal 27 Mei tahun 1970 No.551/III/2/1970 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kota Daerah Khusus Ibukota Djakarta, perlu segera membentuk Panitia Pemungutan Suara tingkat Ketjamatan diwilajah Kota Djakarta Utara dengan tugas dan kewadajibannja sebagaimana tertjantum dalam lampiran surat keputusan ini ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 15 tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970;
2. Undang-undang No. 16 tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970;
3. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
4. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 jo. Undang-undang No. 5 tahun 1969;
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1970;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.34 tahun 1970;

7. Peraturan Daerah tentang Pembagian Wilayah Dalam Rangka Dekonsentrasi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Djakarta (L.D. tahun 1966 No. 4);
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 12 Agustus 1966 No. Ib. 3/1/1/1966 tentang Pembentukan Kota Administratif, Ketjamatan dan Kelurahan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta yang telah dirubah terakhir dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 Maret 1969 No. Ib. 3/1/30/1969 jo. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 April 1970 No. Aa. 1/1/2/1970.

Menetapkan : I. Membentuk Panitia Pemungutan Suara dalam wilayah Kota Djakarta Utara masing-masing untuk wilayah Ketjamatan² Kepulauan Seribu, Pendjaringan, Tandjung Priuk dan Kodja dengan susunan dan tata kerdja sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

II. Tugas dan kewadajiban Panitia Pemungutan Suara tersebut pada ad. 1 diatas adalah sebagai berikut :

- (1) Membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Kota.
- (2) Mengkoordinir dan mengawasi Panitia Pendaftaran Pemilih.
- (3) Menjelenggarakan pemungutan suara dan mengkoordinir K.P.P.S. — K.P.P.S.
- (4) Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemungutan suara diwilayah masing-masing pada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI. Djakarta melalui Walikota/Ketua P.P. Kota yang bersangkutan.

III. Biaya penyelenggaraan Panitia Pemungutan Suara pada ad. 1 diatas dibebankan pada anggaran 9 A.3.1.250.

IV. Hal-hal yang belum tjukup diatur dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diatur dan diperbaiki dalam surat keputusan tersendiri.

V. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : D j a k a r t a
Pada tanggal : 1 Djuli 1970.

**WALI KOTA/KETUA PANITIA PEMILIHAN KOTA
DJAKARTA UTARA, DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA.**

ttd.

(D. DWINANTO)

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Jth. 1. Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
2. Gubernur K.D.H./Ketua PPD DCI. Djakarta.
3. Anggota Panitia Pemilihan Daerah DCI. Djakarta.
4. Sekda/Ass. Sekda.
5. Sekretaris PPD DCI. Djakarta.
6. Kepala Direktorat I/Pemerintahan.
7. Para Tjamat.
8. Para Lurah.
9. A l a s.
-

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA/KETUA PANITIA PEMILIHAN KOTA DJAKARTA UTARA.

TANGGAL : 1 Djuli 1970.

NOMOR : 212/IV/2/DU/1970.

No	N A M A	DJABATAN	KETERANGAN
1.	<u>LTN. (L) SU-DARMO.</u>	ANGGOTA MERANGKAP KETUA.	<u>TJAMAT KEPU-LAUAN SERIBU.</u>
2.	M. CHUSRO- RONI.	ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA.	WAKIL TJAMAT KEP. SERIBU.
3.	SERMA (L) HERMAN.	ANGGOTA.	ALRI
4.	AIP. I.D. DU- RIAT.	ANGGOTA.	POLRI
5.	M. A L I	ANGGOTA.	NASIONAL (PNI).
6.	HASBI	ANGGOTA.	AGAMA (N.U.).
7.	NJ. MARJATI	ANGGOTA.	SEKBER GOLKAR (PERTIWI).
8.	<u>SUKARDI.</u>	ANGGOTA MERANGKAP KETUA.	<u>TJAMAT PENDJA- RINGAN.</u>
9.	N.F.X. SIGI- RO B.A.	ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA.	WAKIL TJAMAT PENDJARINGAN.
10.	H. MEMED	ANGGOTA.	DAN SEKKO 722 PENDJARINGAN.
11.	SJAWAL.	ANGGOTA.	DAN RAMIL II PENDJARINGAN.
12.	G. TAROREH	ANGGOTA.	NASIONAL (PNI).
13.	ZAINUDDIN PATARI.	ANGGOTA.	AGAMA (PARMU- SI).
14.	NATA NEGA RA	ANGGOTA.	SEKBER GOLKAR
15.	<u>KUWADI.</u>	ANGGOTA MERANGKAP KETUA.	<u>TJAMAT TAN- DJUNG PRIUK.</u>
16.	SUHANDA	ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA	WAKIL TJAMAT TG. RIUK.
17.	LETDA ISMA- IL.	ANGGOTA.	DAN RAMIL TG. PRIUK.
18.	A.K.P. M. NURDIN.	ANGGOTA.	WAKIL DARI KOM- WIL 72 DU.
19.	ABD. RA- CHIM HASAN	ANGGOTA.	NASIONAL (PNI).

20.	D. RASJID.	ANGGOTA.	AGAMA (P.S.I.I.).
21.	KOSIM M.	ANGGOTA.	SEKBER GOLKAR (L.K.N.).
22.	DRS. HENNY SUNARJO.	ANGGOTA MERANG- KAP KETUA.	TJAMAT KODJA.
23.	HARUN AL RASJID B.A.	ANGGOTA MERANG- KAP WAKIL KETUA.	WAKIL TJAMAT KODJA.
24.	LETTU. M. JUNUS.	ANGGOTA.	DAN RAMIL KO- DJA.
25.	A.K.P. ARI- FIN BASJIR.	ANGGOTA.	DAN SEKKO 721 KODJA.
26.	ZAINUDDIN TB.	ANGGOTA.	AGAMA (N.U.).
27.	DEDDY BED.	ANGGOTA.	NASIONAL (P.N.I.)
28.	JOHANNES RATUPENU.	ANGGOTA.	SEKBER GOLKAR

WALI KOTA/KETUA PANITIA PEMILIHAN KOTA
DJAKARTA UTARA, DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA.

ttd.

(D. DWINANTO).

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA/KETUA PANITIA
PEMILIHAN KOTA DJAKARTA UTARA,
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.**

No. 212/IV/2/DU/1970.

tentang

**SUSUNAN DAN TATA KERDJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
WILAJAH KOTA DJAKARTA UTARA, DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA.**

B A B I

PENGERTIAN

Pasal 1.

- (1) Dalam keputusan ini jang dimaksud dengan :
 - a. Ketua adalah Ketua Panitia Pemungutan Suara.
 - b. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua Panitia Pemungutan Suara.
 - c. Sekretaris adalah Sekretaris Panitia Pemungutan Suara.
 - d. Anggota adalah Anggota Panitia Pemungutan Suara.
 - e. Personil adalah mereka jang diangkat dan/atau dipekerdjakan dalam Panitia Pemungutan Suara.
 - f. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri jang dimaksud dalam Undang-undang No. 18 tahun 1961.
- (2) Dalam pengertian Panitia Pemungutan Suara Kota Djakarta Utara D.C.I. Djakarta termasuk Ketjamatan2 Kepulauan Seribu, Pendjaringan, Tandang Priuk dan Kodja.

B A B II

KEDUDUKAN.

Pasal 2.

- (1) Panitia Pemungutan Suara adalah suatu Panitia jang ada pada Panitia Pemilihan Kota Djakarta Utara untuk membantu mengendalikan, membantu mengkoordinir dan mengawasi aparatur Pemilu pada echelon-echelon bawahan diwilajahnja dalam melaksanakan pendaftaran pemilih dan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemungutan Suara berkedudukan di Kantor Ketjamatan jang bersangkutan.

B A B III

TUGAS POKOK

Pasal 3.

Tugas pokok Panitia Pemungutan Suara adalah menjelenggarakan pemungutan suara.

B A B IV.

FUNGSI—FUNGSI

Pasal 4.

- (1) Perentjanaan jaitu merentjanakan dan mempersiapkan segala sesuatu jang perlu untuk menjelenggarakan pemungutan suara.
- (2) Penjelenggaraan, jaitu memimpin dalam arti mengendalikan, mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pendaftaran Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk mendjamin kesatuan usaha dan kegiatan setjara effectif dan efficien.
- (3) Pengawasan, jaitu mengawasi persiapan dan penyelenggaraan pendaftaran pemilih dan pemungutan suara didalam wilajah Ketjamatan masing-masing.

B A B V.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5.

- (1) Panitia Pemungutan Suara terdiri dari 7 orang anggota termasuk Ketua dan Wakil Ketua, jang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota/ Ketua Panitia Pemilihan Kota Djakarta Utara DCI. Djakarta atas usul Tjamat jang bersangkutan.
- (2) Tjamat karena djabatannja mendjadi Ketua Panitia Pemungutan Suara.
- (3) Anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan kekuatan Sosial.

Pasal 6.

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris jang diangkat dan diberhentikan

oleh Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Kota DCI. Djakarta atas usul Tjamat jang bersangkutan dan tidak merangkap sebagai anggota.

- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Bagian Administrasi,
 - b. Bagian Keuangan,
 - d. Bagian Pelaksanaan.

Pasal 7.

- (1) Masing-masing bagian dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh beberapa personil jang diambil dari Pegawai Negeri baik sipil maupun Militer.
- (2) Bagian Organisasi Panitia Pemungutan Suara adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran.

B A B VI.

PEMBAGIAN TUGAS

Pasal 8.

Tugas-tugas Panitia Pemungutan Suara adalah satu keseluruhan jang tidak dapat dipisahkan satu dan jang lain, oleh sebab itu pembagian tugas jang dimaksud dalam bab ini hanjalah penentuan pembedangan jang dalam persiapan dan penjeleenggaraannya harus dikoordinasikan dengan erat untuk mensukseskan pemungutan suara.

Pasal 9.

Persoalan-persoalan penjeleenggaraan jang pokok sifatnja dimusjawarahkan dan diputuskan dalam Panitia Pemungutan Suara, sedang pimpinan penjeleenggaraannya diserahkan kepada Ketua.

Pasal 10.

Tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara adalah :

- a. Memimpin kegiatan2 Panitia Pemungutan Suara.
- b. Mengawasi kegiatan2 Panitia Pendaftaran Pemilih dan Kelompok Penjeleenggara Pemungutan Suara ditingkat Kelurahan.
- c. Mengadakan hubungan keluar.
- d. Menjeleenggarakan kegiatan2 lain jang dipandang perlu untuk memperlantjar penjeleenggaraan pemilihan umum sesuai dengan kebidjaksana-

an jang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Kota.

Pasal 11.

Tugas Wakil Ketua Panitia Pemungutan Suara adalah :

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnja,
- b. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.

Pasal 12.

Anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara melaksanakan tugas-tugasnja jang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 13.

Bidang tugas Sekretariat adalah mempersiapkan dan menjelenggarakan segala sesuatu jang perlu untuk mensukseskan penjelenggaraan Pemungutan Suara sesuai dengan kebijaksanaan jang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 14.

Tugas Sekretaris adalah :

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnja.
- b. Memimpin Kegiatan-kegiatan Sekretariat.
- c. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi bagian2 jang ada dalam Sekretariat.

Pasal 15.

(1) Bidang tugas Bagian Pelaksanaan adalah :

- a. menjelenggarakan segala sesuatu jang perlu untuk mendjamin kelanjutan penjelenggaraan pemungutan suara untuk D.P.R. dan D.P.R.D. DCI. Djakarta.
- b. mengumpulkan dan mensistimatisasikan bahan dan data-data jang diperlukan bagi penjelenggaraan pendaftaran pemilih dan pemungutan suara.
- c. menganalisa dan menyelesaikan bahan dan data-data jang telah terkumpul untuk mensistimatisasikan bahan-bahan dan data-data tersebut.
- d. menjusun daftar djumlah pemilih setjara terperintji menurut T.P.S. dan mengirimkan daftar djumlahnja kepada Panitia Pemilihan Kota Djakarta Utara DCI. Djakarta menurut tjara dan waktu jang telah ditentukan.

- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya.
- (2) Tugas Kepala Bagian Pelaksanaan adalah :
 - a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya,
 - b. memimpin kegiatan-kegiatan bagian pelaksanaan,
 - c. mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan bagian pelaksanaan.

Pasal 16.

- (1) Bidang Tugas Administrasi adalah :
 - a. menjelenggarakan surat-menjurat yang menjadi tanggung jawab Sekretariat dan mendistribusikannya pada bagian-bagian lain.
 - b. menjelenggarakan administrasi personil.
 - c. mencatat dan memelihara barang2 inventaris dan menjelenggarakan urusan rumah tangga Panitia.
 - d. menyusun dan mengurus pembiajaan Sekretariat.
- (2) Tugas Kepala Bagian Administrasi :
 - a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya.
 - b. memimpin kegiatan2 Bagian Administrasi.
 - c. mengarahkan, mengkoordinasikan dan menyusun kegiatan2 yang ada dalam bagian Administrasi.

Pasal 17.

- (1) Bidang Tugas Bagian Keuangan :
 - a. menjelenggarakan segala urusan yang berhubungan dengan keuangan.
 - b. menerima, menjiatkan dan mengeluarkan uang.
 - c. mengurus pembukuan.
 - d. menyusun pertanggung jawaban atas pengeluaran uang yang telah diserahkan.
 - e. menjiatkan bukti-bukti kas.
- (2) Tugas Kepala Bagian Keuangan :
 - a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya.
 - b. menyusun kegiatan2 Bagian Keuangan.
 - c. mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan yang ada didalam bagian keuangan.

B A B VII

HUBUNGAN KERDJA

Pasal 18.

- (1) Dalam musjawarah Panitia dibitjarakan dan diputuskan pokok2 garis-garis kebidjaksanaan penjelenggaraan sedang penjelenggaraan diserahkan kepada Ketua.
- (2) Keputusan2 diambil dengan tjara musjawarah dan mufakat.
- (3) Apabila ada persoalan2 jang tidak dapat diputuskan dengan tjara musjawarah dan mufakat, maka Ketua mengambil keputusan mengenai persoalan itu dan mempertanggung djawabkan keputusannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kota Djakarta Utara DCI, Djakarta.

Pasal 19.

Untuk mendjamin kesatuan usaha dan kegiatan dalam mensukseskan penjelenggaraan pemilu, maka dalam merentjanakan, mempersiapkan dan menjelenggarakan kegiatan2, wadib dipelihara kerdja sama jang sesuai dan setjara otomatis antara pedjabat2 Sekretariat, dengan tidak terlampau terikat pada formalitas jang tidak perlu tanpa mengabaikan tertib administrasi.

Pasal 20.

Apabila dalam melaksanakan tugas timbul persoalan atau perbedaan pendapat antara pedjabat-pedjabat Sekretariat segera diselesaikan melalui musjawarah antara pedjabat2 jang bersangkutan dan apabila tidak mungkin, maka segera dimusjawarahkan kepada Ketua untuk diambil keputusan.

Pasal 21.

- (1) Segala surat-surat jang dialamatkan kepada Panitia diurus oleh Sekretariat.
- (2) Apabila ada pedjabat didalam Panitia menerima surat jang menurut isinya bukan mendjadi urusannya, supaja dengan segera menjampaiakannya pada pedjabat jang berkepentingan.
- (3) Ketentuan-ketentuan terperintji mengenai penjusunan surat2 diatur tersendiri.

BAB VIH.

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 22.

Dalam melaksanakan tugasnja :

- a. Ketua bertanggung djawab kepada Ketua Panitia Pemilihan Kota Djakarta Utara DCI. Djakarta.
- b. Sekretaris bertanggung djawab pada Ketua.
- c. Kepala-kepala Bagian bertanggung djawab pada Sekretaris.

Pasal 23.

Pelaksanaan terperintji mengenai ketentuan2 jang tersebut dalam tata kerdja ini diatur dengan instruksi, perintah dan petundjuk jang dikeluarkan kemudian.

Pasal 24.

Hal-hal lain jang belum diatur atau belum tjukup diatur dalam keputusan ini diatur keputusan tersendiri.

**WALI KOTA/KETUA PANITIA PEMILIHAN KOTA
DJAKARTA UTARA DCI DJAKARTA.**

ttd.

(D. DWINANTO).

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA/KETUA PANITIA PEMILIHAN
KOTA DJAKARTA BARAT DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.**

Nomor : 67/IV/DB/1970.

tentang

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DIWILAJAH KOTA DJAKARTA BARAT
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.**

**WALIKOTA/KETUA PANITIA PEMILIHAN KOTA DJAKARTA BARAT
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA :**

- Membatja kembali** : Surat Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 14 April 1970 No.14/11/1970 tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pendaftaran Pemilih dan Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara.
- Menimbang** : Bahwa demi kelantjaran Petugas Panitia Pemilihan Kota yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta tanggal 29 Mei 1970 No.539/III/2/1970 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kota Daerah Khusus Ibukota Djakarta, perlu segera membentuk Panitia Pemungutan Suara tingkat Ketjamatan diwilajah Kota Djakarta Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.15 tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1970;
2. Undang-undang No.16 tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1970;
3. Undang-undang No.18 tahun 1965 jo. Undang-undang No.6 tahun 1969;
4. Penetapan Presiden No.2 tahun 1961 jo. Undang-undang No.5 tahun 1969;
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1970 jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1970;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.34 tahun 1970;
7. Peraturan Daerah tentang Pembagian Wilayah Dalam Rangka Dekonsentrasi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Djakarta (L.D. tahun 1966 No.4);

8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 12 Agustus 1966 No.Ib.3/1/1/1966 tentang Pembentukan Kota Administratif, Ketjamatan dan Kelurahan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta jang telah dirubah terachir dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 Maret 1969 No.Ib.3/1/30/1969 jo. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 April 1970 No.Aa.1/1/2/1970;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Mengangkat mereka jang nama-namanja tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini selaku anggota Panitia Pemungutan Suara Ketjamatan :

TJENGKARENG, GROGOL PETAMBURAN, TAMAN SARI, TAMBORA, KEBON DJERUK wilayah Kota Djakarta Barat Daerah Khusus Ibukota Djakarta;

II. Sambil menunggu ketentuan lebih landjut dari Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, menetapkan tugas dan kewajiban anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut :

- (1) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Kota;
- (2) menjelenggarakan Pemungutan Suara;
- (3) bertanggung djawab dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara diwilajah masing-masing pada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta melalui Walikota/Ketua P.P. Kota Djakarta Barat;

III. Hal-hal jang belum tjukup diatur dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan diperbaiki kemudian dalam Surat Keputusan tersendiri;

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta,
Pada tanggal : 24 Djuni 1970.

WALIKOTA/KETUA PANITIA PEMILIHAN KOTA
DJAKARTA BARAT
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA,

Tjap/ttd.

(R. SOEDARJA)

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini
disampaikan kepada :

1. Jth. : Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum,
 2. „ : Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah
D.C.I. Djakarta,
 3. „ : Anggota Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta,
 4. „ : Sekda / Assisten Sekda,
 5. „ : Sekretaris P.P.D. DCI Djakarta,
 6. „ : Kepala Direktorat I / Pemerintahan,
 7. „ : Para Tjamat,
 8. „ : Para Lurah,
 9. : Jang bersangkutan,
 10. A l a s.
-

LAMPIRAN : Surat Keputusan Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Kota Jakarta Barat tanggal 24 Djuni 1970
No.67/IV/DB/1970.

471

No.	N a m a	Dijabatn dalam P.P.S.	K e t e r a n g a n
1.	R. Poerwardono	Anggota merangkap Ketua	Tjamat TJENGGARENG
2.	Husin Najjan	Anggota merangkap Wk. Ketua	Wakil Tjamat.
3.	Kamaluddin Sitepu	Anggota	Dan Setko 731
4.	W a s s a	Anggota	Dan Ramil
5.	M. Muhasjim	Anggota	N. U.
6.	Budiman B.B.A.	Anggota	P. N. I
7.	Djoearjah Poerwo	Anggota	Pertiwi
8.	Moh. Adiro'i	Anggota merangkap Ketua	Tjamat GROCOL PETAM- BURAN.
9.	Partasubita	Anggota merangkap Wk. Ketua	Wakil Tjamat
10.	Letda Endang Herdis	Anggota	Dan Ramil
11.	A.K.P. Ngadino	Anggota	Dan Setko 732
12.	M.S. Mochtar	Anggota	Kokarindagri
13.	Machmud S. Chaniago	Anggota	P. N. I.
14.	H. Asjathiry S.	Anggota	P. S. I. I.
15.	Soegianto B.A.	Anggota merangkap Ketua	Tjamat TAMAN SARI
16.	Sjahrin Lumbantoruan B.A.	Anggota merangkap Wk. Ketua	Wakil Tjamat
17.	B. Situmorang	Anggota	Komwil 73
18.	Lettu Moch. Ibin	Anggota	Dan Ramil
19.	Musjanip Ali	Anggota	N. U.
20.	Tjetyep Sutentri	Anggota	P. N. I.
21.	Sanusi	Anggota	Veteran R.I.

No.	N a m a	Diabatan dalam P.P.S.	K e t e r a n g a n
22.	H. Soekowati	Anggota merangkap Ketua	Tjamat TAMBORA
23.	Ganda Wirtaatmadja	Anggota merangkap Wk. Ketua	Wakil Tjamat
24.	Lettu Hasjin Ma'ruf	Anggota	Dan Ramil
25.	R.M. Soembogo	Anggota	Dan Sekko 733
26.	M. Tohri	Anggota	N. U.
27.	A. Mu'id	Anggota	P. N. I.
28.	M. Ischak Munir	Anggota	Veteran R.I.
29.	Drs. Zaenuddin	Anggota merangkap Ketua	Tjamat KEBON DJERUK
30.	Moersani	Anggota merangkap Wk. Ketua	Wakil Tjamat
31.	Lettu Kusmajadi	Anggota	Dan Ramil
32.	A.K.P. Basirun	Anggota	Dan Sekko 734
33.	Moch. Sidik	Anggota	N. U.
34.	Sutisman	Anggota	P. N. I.
35.	Chaeruddin	Anggota	M. K. G. R.

Djakarta, 24 Djuni 1970.

WALIKOTA/KETUA P.P. KOTA DIAKARTA BARAT
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DIAKARTA,

Tjap/ttd.

(R. SOEDARJA)

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA DJAKARTA TIMUR DAERAH
CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA**

No. : 330/V/SEC. pemilu/WDT/70.

tentang

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETJAMATAN-KETJAMATAN MATRAMAN, PULO GADUNG,
DJATINEGARA, KRAMAT DJATI, PASAR REBO, WILAJAH KOTA
DJAKARTA TIMUR DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.**

**WALIKOTA DJAKARTA TIMUR DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA.**

Membatja kembali : Formulir berita Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 14 April 1970 No. 14/11/70 tentang pengangkatan Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pendaftaran Pemilihan dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara;

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 perlu segera mengangkat anggota2 Panitia Pemungutan Suara tingkat Ketjamatan dalam Wilayah Kota Djakarta Timur jang terdiri dari unsur-unsur nasionalis dan karya;

2. Bahwa berhubung dengan surat para Tjamat dalam Wilayah Djakarta Timur Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta jaitu :

- 1: Tjamat Matraman tgl. 27-5-1970 No. 56/P.P.S./-Mtr/70.
2. Tjamat Pulo Gadung tgl. 26-5-1970 No. 27/PPS/PLG/70.
3. Tjamat Djatinegara tgl. 26-5-1970 No. 42/PPS /Dng/70.

4. Tjamat Kramatdjati tgl. 26-5-1970 No. 76/P-PS/Kerdjati/70.

5. Tjamat Pasar Rebo tgl. 27-5-1970 No. 1147/PPS/P.Rebo/70.

tentang usul penundjukan anggota Panitia Pemungutan Suara, perlu mengangkat mereka yang diusulkan dalam surat tersebut sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini ;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang No. 15 tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970.;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo Undang-undang No. 6 tahun 1969;
3. Peraturan Presiden No. 2 tahun 1961 jo Undang-undang No. 5 tahun 1969;
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1970;
5. Peraturan Daerah tentang Pembagian Wilayah Dalam Rangka Dekonsentrasi Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta (Lembaran Daerah Tahun 1966 No. 4);
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta tanggal 12 Agustus 1966 No. 1b.3/1/1966 tentang Pembentukan Kota Administratif, Ketjamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta yang telah dirubah terakhir dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta tanggal 1 Maret 1969 No. 1b.3/1/1960 jo Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta tanggal 1 April 1970 No. Aa.1/1/2/1970;
7. Nota Dinas Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta No. 465/III/2/70 tgl. 15 Mei 1970 tentang susunan Panitia Pemungutan Suara di Ketjamatan-Ketjamatan.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
- I Mengangkat mereka jang nama-namanja tersebut dalam lampiran surat keputusan ini selaku anggota Panitia Pemungutan Suara di Ketjamatan-ketjamatan Wilayah Djakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Djakarta.**
 - II. Sambil menunggu ketentuan lebih landjut dari Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, menetapkan tugas dan kewajiban anggota Panitia Pemungutan Suara (1).**
 - (1). membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah tingkat II**
 - (2). menjelenggarakan Pemungutan Suara.**
 - (3). bertanggung djawab dalam menjelenggarakan Pemungutan Suara diwilajah masing-masing pada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta melalui Wali Kota jang bersangkutan.**
 - III. Hal2 jang belum tjukup dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diatur dan diperbaiki kemudian dalam surat-keputusan tersendiri.**
 - IV. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 Djuni 1970.**

**DITETAPKAN DI : DJAKARTA.
PADA TANGGAL : 1 DJUNI 1970**

**WALIKOTA DJAKARTA TIMUR
DAERAH KHUSUS IBU KOTA
DJAKARTA'**

ttd.

(ALAMSUD'DIN)

TEMBUSAN : Surat keputusan ini disampaikan kepada

1. Jth. : Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
 2. „ : Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta.
 3. „ : Sekretaris Daerah.
 4. „ : Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta.
 5. „ : Kepala Direktorat I/Pemerintahan.
 6. „ : Para Tjamat.
 7. „ : Para Lurah.
 8. „ : Jang bersangkutan.
 9. A l a s.
-

LAMPIRAN : Surat Keputusan Walikota Djakarta Timur Tanggal 1 Juni 1970.
No. 330/V/Sec.Pemilu/WD/70.

Nomor Urut	N A M A	Djabatan dalam PPS.	Djabatan dalam pekerjaan sehari-hari.	Ketjamatan	Keterangan
296.	Poernomo	Ketua	Tjamat	Matraman	
297.	Marnan Suman- ti B.A.	Wakil Ketua	Wakil Tjamat	"	
298.	Lettu Zaka- ruddin	Anggota	Koramil	"	
299.	Kompol Tirajoh	Anggota	Komseko 751	"	
300.	M.L. Roslan Saleh	Anggota	Sekbergolkar	"	
301.	Urai Abubakar	Anggota	Perti	"	
302.	J.R. Susilo	Anggota	Katholik	"	
303.	Usman Lembah	Ketua	Tjamat	Pulo Gadung	
304.	Tabrani B.A.	Wakil Ketua	Wakil Tjamat	"	
305.	Letda Sarmali	Anggota	Koramil	"	
306.	Kompol Soe- janto	Anggota	Komseko	"	
307.	Koesmo	Anggota	Sekbergolkar	"	
308.	Soedarwali				
309.	Edi Djunaedi Midjan	Anggota Anggota	P.S.I.I. IP-KI	" "	

Nomor Urut	N A M A	Djabatan Dalam P.P.S.	Djabatan Dalam Pekerjaan sehari-hari	Kegiatan	Keterangan
310.	R. Ismaun Kartanegara BA.	Ketua	Tjamat	Djatinagara	
311.	Sukeryono	Wakil Ketua	Wakil Tjamat	"	
312.	Lettu Abd. Hadi	Anggota	Koramil	"	
313.	AKP. Sukotjo	Anggota	Komwil 75	"	
314.	Bastran	Anggota	Komsetko	"	
314.	Bastran	Anggota	Sekbergolkar	"	
315.	Moh. Ali	Anggota	N. U.	"	
316.	Setiawan	Anggota	Murba.	"	
317.	Moh. Zaini	Ketua	Tjamat	Kramat Djati	
318.	Chondir Rusanto B.Sc.	Wakil Ketua	Wakil Tjamat	"	
319.	Letda Abd. Chair	Anggota	Koramil	"	
320.	AKP. Dajoh	Anggota	Komsetko 754	"	
321.	H.M.P. Herman	Anggota	Sekbergolkar	"	
322.	Machruf Mustopa Azy	Anggota	Parmusi	"	
323.	Tjakrawidjaja	Anggota	Parkindo	"	
324.	Sjamsudin BA.	Ketua	Tjamat	Pasar Rebo	
325.	Kusnadi BA	Wakil Ketua	Wakil Tjamat	"	
326.	Lettu Baharuddin	Anggota	Koramil	"	

Nomor Urut	N A M A	Djabatan Dalam P.P.S.	Djabatan Dalam Peker- djaan sehari-hari	Ketjamatan	Keterangan
327.	Kompol J. Lino	Anggota	Komsektko 755	Pasar Rebo	
328.	M.L. Kaligis	Anggota	Sekbergolkar	"	
329.	Mathius John Bey BA.	Anggota	P. N. I.	"	
330.	Halim Kadar	Anggota	N. U.	"	

Djakarta, 1 Djuni 1970,
A/n. WALIKOTA DJAKARTA TMUR

Sekretaris

ttid.

(Drs. Sofjan Halim)

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA/KETUA PANITIA PEMILIHAN KOTA
DJAKARTA SELATAN
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

No. 8/IV/2/DS/70

tentang

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KETJAMATAN TEBET, MAMPANG PRAPATAN, KEBAJORAN BARU, KEBAJORAN LAMA, PASAR MINGGU DAN SETIABUDI, KOTA DJAKARTA SELATAN DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.

-
- Membatja kembali** : Formulir berita Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 14 April 1970 No. 14/II/70 tentang pengangkatan Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pendaftaran Pemilih dan Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara;
- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970, perlu segera mengangkat anggota2 Panitia Pemungutan Suara tingkat Ketjamatan Tebet, Mampang Prapatan, Kebajoran Baru, Kebajoran Lama, Pasar Minggu dan Setiabudi, Kota Djakarta Selatan jang terdiri dari unsur2 Pemerintah dan kekuatan sosial meliputi unsur2 Agama, nasionalis dan Karya;
 2. Berhubung dengan surat2 usul dari Tjamat jang bersangkutan diwilajah Kota Djakarta Selatan Daerah Chusus Ibukota Djakarta, tentang usul penundjukkan anggota Panitia Pemungutan Suara, perlu mengangkat mereka jang diusulkan dalam surat tsb. sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana jang terlampir dalam surat keputusan ini;
 3. Mendengar pertimbangan Muspida Djakarta Selatan pada musjawarah tanggal 3 Djuli 1970 dengan pimpinan Pemerintahan tingkat Ketjamatan wilajah Kota Djakarta Selatan;
 4. Konsultasi dengan pedjabat-pedjabat jang berwenang dalam penjusunan Komposisi Keanggotaan Pemungutan

Suara :

- Mengingat :**
1. Undang2 no. 15 tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970;
 2. Undang2 no. 18 tahun 1965 jo. undang2 No. 8 tahun 1969;
 3. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 jo. undang2 No. 5 tahun 1969;
 4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1970;
 5. Peraturan Daerah tentang **Pembagian Wilayah Dalam Rangka Dekonsentrasi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Djakarta** yang telah dirubah terakhir dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 Maret 1969 No. Ib. 3/1/30/1960 jo. surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 April 1970 No. Aa I/1/2/70.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- I. Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini selaku anggota Panitia Pemungutan Suara Ketjamatan Tebet, Mampang Prapatan, Kebajoran Baru, Kebajoran Lama, Pasar Minggu dan Setiabudi, Wilayah Kota Djakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Djakarta.
 - II. Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut dari Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, menetapkan tugas dan kewajiban anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut;
 - (1) membantu tugas2 Panitia Pemilihan Kota;
 - (2) menjelenggarakan Pemungutan Suara;
 - (3) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara diwilayah masing2 pada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta melalui Walikota yang bersangkutan.
 - III. Hal2 yang belum cukup diatur dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diatur dan

diperbaiki kemudian dalam surat Keputusan tersendiri.

- IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : D j a k a r t a.

Pada tanggal : 10 D j u l i 1970.

WALIKOTA/KETUA PANITIA PEMILIHAN KOTA
WALIKOTA/KETUA PANITIA PEMILIHAN KOTA
DJAKARTA SELATAN DAERAH CHUSUS IBUKOTA
D J A K A R T A ,

ttd.

(H.M.E. RASMA)

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Jth. Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
 2. „ Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta.
 3. „ Sekretaris Daerah.
 4. „ Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta.
 5. „ Kepala Direktorat I/Pemerintahan.
 6. „ Para T j a m a t.
 7. „ Para L u r a h.
 8. „ Jang bersangkutan.
 9. A l a s.
-

LAMPIRAN : Surat Keputusan Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Kota Djakarta Selatan tanggal 10 Djuli 1970
No.8/IV/2/DS/70.

483

No. Urut	N a m a	Djabatan dalam PPS.	K e t e r a n g a n
1.	Achmad Arsjad	Ketua/Anggota Wakil Ketua/Anggota Anggota idem idem idem idem	Kerjamatan Tebet
2.	R. Soeparman		
3.	KP.H.J. Mandagi		
4.	Leida Indun		
5.	Soeroso		
6.	Chaidir Anwar	Ketua/Anggota Wakil Ketua/Anggota Anggota idem idem idem idem	7 orang
7.	L.F. Tangkau		
8.	R.E. Sutiana		
9.	R. Soegito		
10.	Leida I.W. Tuaseja		
11.	KP. Soekardi	Ketua/Anggota Wakil Ketua/Anggota Anggota idem idem idem idem	8 orang
12.	Jusuf Hamdani		
13.	E. Ford Wagdi BA		
14.	Samsul Bahri		
15.	Soeharto		
16.	Ibrahim Amir	Ketua/Anggota Wakil Ketua/Anggota Anggota idem idem idem idem	Kerjamatan Kebajoran Baru
17.	Soewardi		
18.	Leida Sabdi Nasution		
19.	AKP. Jusuf Djajapawira		
20.	E.N. Lumbadi		
21.	Drs. H. Mochtar Sahly	idem	7 orang
22.	Achmad Nasution Gelar Beginda Mangaradja Muda BBA.		

No. Urut	N a m a	Diabatan dalam PPS.	K e t e r a n g a n
23.	T. Kusnadi	Ketua/Anggota	Kejiamatan Kebjsjoran Lama 7 orang
24.	Djunaidi Isa BA	Wakil Ketua/Anggota	
25.	AKP Soenarjo	Anggota	
26.	Lettu A.M. Bunjamin	idem	
27.	Abd. Madjid Nadji	idem	
28.	Susmanto	idem	Kejiamatan Ps. Minggu
29.	Moch. Slamet	idem	
30.	K.S. Padmanegara	Ketua/Anggota	
31.	Moh. Mansjur	Wakil Ketua/Anggota	
32.	KP. Drs. Sardiswoetomo	Anggota	
33.	Leida Bathaki Wahab	idem	7 orang
34.	Sam Sabarudin Rimon	idem	
35.	K.A. Mekkih	idem	
36.	Heru Harsojo	idem	
37.	Abdurachman	Ketua/Anggota	
38.	A. Hans Soehardho BA	Wakil Ketua/Anggota	Kejiamatan Setiabudi 7 orang
39.	AKP. Nurhalim	Anggota	
40.	Peltu Pudjarto	idem	
41.	P.K.S. Tomohardjo	idem	
42.	Ajsep Musa	idem	
43.	M. Kiswan	idem	

WALIKOTA/KETUA PANITIA PEMILIHAN KOTA
WILAJAH KOTA DJAKARTA SELATAN,

(H.M.E. RASMA)

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA DJAKARTA PUSAT
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Nomor : 3904/30/DP/1970,

tentang

**PENGANGKATAN PARA LURAH SELAKU KETUA PANITIA
PENDAFTARAN PEMILIH DIWILAJAH KELURAHAN
MASING-MASING.**

**WALIKOTA DJAKARTA PUSAT DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA;**

- Membatja** : Surat dari para Tjamat dalam wilayah Kota Djakarta Pusat, perihal usul penundjukan para Anggota Panitia Pendaftaran Pemilih;
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1970, perlu segera mengangkat para Lurah yang ada diwilayah Kota Djakarta Pusat selaku Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih Kelurahan masing-masing dengan para anggotanya untuk dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya :
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.15 tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1970;
2. Undang-undang No.18 tahun 1965 jo Undang-undang No.6 tahun 1969;
3. Penetapan Presiden No.2 tahun 1961 jo Undang-undang No.5 tahun 1969;
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1970;
5. Peraturan Daerah tentang Pembagian Wilayah Dalam Rangka Dekonsentrasi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Djakarta (L.D. tahun 1966 No.4);
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 12 Agustus 1966 No.1b/3/1/1/1966 tentang Pembentukan Kota Administratif, Ketjamatan dan Kelurahan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta yang telah diubah terakhir dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 Maret 1969 No.1b.3/1/30/1969 jo

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 April 1970 No.Aa.1/1/2/1970;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Mengangkat para Lurah dalam wilayah Kota Djakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Djakarta selaku Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih dan para anggotanya diwilayah masing-masing sebagimanaa tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

II. Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut dari Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum menetapkan tugas dan kewajiban Ketua dan anggota-anggotanya Panitia Pendaftaran Pemilihan sebagai berikut :

- (1) membantu tugas-tugas Panitia Pemungutan Suara,**
- (2) Menjelesaikan pendaftaran pemilih,**
- (3) bertanggung djawab dalam penjelenggaraan pendaftaran pemilih diwilayah masing-masing kepada Walikota melalui Tjamat.**

III. Hal-hal yang belum tjukup diatur dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan diperbaiki kemudian dengan surat keputusan tersendiri.

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 5 Mei 1970.**

**WALIKOTA DJAKARTA PUSAT DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.**

Tjap/ttd.

(H. EDDY DJADJANG DJAJAATMADJA)

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Jth.:

1. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta,
 2. Panitia Pemilihan Indonesia,
 3. Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta,
 4. Sekretaris Daerah,
 5. Kepala Direktorat I / Pemerintahan,
 6. Kepala Direktorat II / Keamanan & Ketertiban,
 7. Para Tjamat,
 8. Para Lurah,
 9. Alas.
-

PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA
KANTOR WALI KOTA DJAKARTA PUSAT
djl. pegangsaan barat no. 14.
DJL. PEGANGSAAN BARAT NO. 14.
DJAKARTA.

Djakarta, 29 Djuni 1970.

Nomor : : 13/IV/Sek/P/1970.

Lampiran : 1 (satu).

Prihal : Perbaikan lampiran surat Keputusan Walikota Pusat tgl. 5 Mei 1970 No. 3904/30/Dp/1970.

KEPADA

Jth. Bapak Gubernur/Ketua Panitia
Pemilihan Daerah DCI Djakarta
di -

DJAKARTA.

Bersama ini disampaikan dengan hormat lampiran surat Keputusan Walikota Djakarta Pusat tgl. 5 Mei 1970 No. 3904/30/DP/1970 tentang pengangkatan anggota PPP setelah disempurnakan/diresmikan dengan Neta Dinas Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta tgl. 29 Mei 1970 No. 536/III/1/1970.

**WALIKOTA/KETUA PANITIA
PEMILIHAN KOTA DJAKARTA
PUSAT,**

ttd.

(H. EDDY DJADJANG DJAJAATMADJA)

TEMBUSAN : disampaikan kepada Jth. :

1. **Panitia Pemilihan Indonesia.**
 2. **Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta.**
 3. **Sekretaris Daerah.**
 4. **Kepala Direktorat I/Pemerintahan.**
 5. **Kepala Direktorat II/Keamanan & Ketertiban.**
 6. **Para Tjamat.**
 7. **Para Lurah.**
 8. **Alas.**
-

Sesuai Nota Dinas PPD DCI Djakarta
tgl. 29 - 5 - 70 No. 536/III/1/70.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Walikota Djakarta Pusat
tanggal 5 Mei 1970 No. 3904/30/DP/1970.

NOMOR URUT.	N A M A	DIABATAN DALAM P.P.P.	KELURAHAN	KETJAMATAN	KETE- RANG- AN
1.	Moh. Ali Anwar	Ketua/Anggota	Tjideng	Gambir	
2.	A. Basjuni	WR; Ketua/Anggota	Tjideng	Gambir	
3.	Murman Miharja	Anggota	Tiideng	Gambir	
4.	Abd. Muthalib	Anggota	Tjideng	Gambir	
5.	Muhamad	Ketua/Anggota	Petodjo Utara	Gambir	
6.	Dudung Djelani	WR. Ketua/ Anggota	Petodjo Utara	Gambir	
7.	M. Rohim	Anggota	Petodjo Utara	Gambir	
8.	Eyi Mustopa	Anggota	Petodjo Utara	Gambir	
9.	M. Moh. Sjafei	Ketua/Anggota	Kebon Kelapa	Gambir	
10.	Moh. Ishaq	WR. Ketua/Anggota	Kebon Kelapa	Gambir	
11.	Djain S.	Anggota	Kebon Kelapa	Gambir	
12.	K. Udin	Anggota	Kebon Kelapa	Gambir	
13.	M. Rals	Ketua/Anggota	Gambir	Gambir	
14.	Moh. Ishaq	WR. Ketua/Anggota	Gambir	Gambir	
15.	Sangaji	Anggota	Gambir	Gambir	
16.	Suleman	Anggota	Gambir	Gambir	

NOMOR	NAMA	DIABATAN DALAM P.P.P.	KELURAHAN	KETJAMATAN	KETE- RANG- AN.
17.	Partolo	Ketua/Anggota	Petodjo Selatan	Gambr	
18.	Maulana Sanl	Wk. Ketua/Anggota	Petodjo Selatan	Gambr	
19.	Ach. Arjlad	Anggota	Petodjo Selatan	Gambr	
20.	Ady	Anggota	Petodjo Selatan	Gambr	
21.	S. Balim	Ketua/Anggota	Duri Pulo	Gambr	
22.	M. Sanl	Wk. Ketua/Anggota	Duri Pulo	Gambr	
23.	Bachrum	Anggota	Duri Pulo	Gambr	
24.	Sjarif	Anggota	Duri Pulo	Gambr	
25	M. Slah	Ketua/Anggota	Mangg. Dua Sel.	Sawah Besar	
26.	Timan Djojowardojo	Wk. Ketua/Anggota	Mangg. Dua Sel.	Sawah Besar.	
27.	Soekrimo	Anggota	Mangg. Dua Sel.	Sawah Besar.	
28.	Paidd	Anggota	Mangg. Dua Sel.	Sawah Besar.	
29.	M. Saleh	Ketua/Anggota	Karang Anjar	Sawah Besar.	
30.	Nawawi	Wk. Ketua/Anggota	Karang Anjar	Sawah Besar.	
31.	Supomo	Anggota	Karang Anjar	Sawah Besar	
32.	Sulaemi	Anggota	Karang Anjar	Sawah Besar.	
33.	Sutut	Ketua/Anggota	Pasar Baru	Sawah Besar.	
34	Waidjun	Wk. Ketua/Anggota	Pasar Baru	Sawah Besar.	
35.	Atye Endiam	Anggota	Pasar Baru	Sawah Besar.	
36.	Emon	Anggota	Pasar Baru	Sawah Besar	
37.	A. Hamid	Ketua/Anggota	Gunning Sahari Ut.	Sawah Besar.	

NOMOR URUT	N A M A	DJABATAN DALAM P.P.P.	KELURAHAN	KETJAMATAN	KETE- RANG- AN
38.	Muhali Abdulhalim	Wk. Ketua/Anggota	Gunung Sahari Ut.	Sawah Besar	
39.	Saman	Anggota	Gunung Sahari Ut.	Sawah Besar	
40.	Alwi al. Idrus	Anggota	Gunung Sahari Ut.	Sawah Besar	
41	M. Achmad	Ketua/Anggota	Kartini	Sawah Besar	
42.	S. A. Abdurachman	Wk. Ketua/Anggota	Kartini	Sawah Besar	
43.	Salwi	Anggota	Kartini	Sawah Besar	
44.	Amir	Anggota	Kartini	Sawah Besar	
45.	S. Misin	Ketua/Anggota	Kebon Kosong	Kemajoran	
46.	Musa.	Wk. Ketua/Anggota	Kebon Kosong	Kemajoran	
47.	Sutjipto	Anggota	Kebon Kosong	Kemajoran	
48.	Endang	Anggota	Kebon Kosong	Kemajoran	
49.	Achmad Mudasir	Ketua/Anggota	Gunung Sahari Sel.	Kemajoran	
50.	Siamet Sutarno	Wk. Ketua/Anggota	Gunung Sahari	Kemajoran	
51.	Karono	Anggota	Gunung Sahari	Kemajoran	
52.	Memen S.	Anggota	Gunung Sahari	Kemajoran	
53.	A. Husni	Ketua/Anggota	Kemajoran	Kemajoran	
54.	Muhik	Wk. Ketua/Anggota	Kemajoran	Kemajoran	
55.	Suparno	Anggota	Kemajoran	Kemajoran	
56.	Wastari	Anggota	Kemajoran	Kemajoran	
57.	Kuhadi	Ketua/Anggota	Harapan Mulia	Kemajoran	
58.	Sukardjo	Wk. Ketua/Anggota	Harapan Mulia	Kemajoran	
59.	Nasin	Anggota	Harapan Mulia	Kemajoran	

NOMOR URUT.	NAMA	DIABATAN DALAM P.P.P.	KELURAHAN	KETJAMATAN	KETE- RANG- AN.
60.	Barowj	Anggota	Harapan Mulia	Kemajoran	
61.	L Iskandar	Ketua/Anggota	Serdang	Kemajoran	
62.	Serdjono	Wk. Ketua/Anggota	Serdang	Kemajoran	
63.	Moh. Nasir	Anggota	Serdang	Kemajoran	
64.	Kosim Kusnadi	Anggota	Serdang	Kemajoran	
65.	Mochtar	Ketua/Anggota	Senen	Senen	
66.	Maulana	Wk. Ketua/Anggota	Senen	Senen	
67.	Nala	Anggota	Senen	Senen	
68.	Iskandar	Anggota	Senen	Senen	
69.	D. Sutopo	Ketua/Anggota	Kwiliang	Senen	
70.	Mujiiono K.	Wk. Ketua/Anggota	Kwiliang	Senen	
71.	Machmud H.	Anggota	Kwiliang	Senen	
72.	A. Nachrowi	Anggota	Kwiliang	Senen	
73.	Softan Muchtar	Ketua/Anggota	Kenari	Senen	
74.	Nuñ N.	Wk. Ketua/Anggota	Kenari	Senen	
75.	Daio	Anggota	Kenari	Senen	
76.	A. Hamzah	Anggota	Kenari	Senen	
77.	M. Sapto	Ketua/Anggota	Kramat	Senen	
78.	Habib Ilias	Wk. Ketua/Anggota	Kramat	Senen	
79.	Suari	Anggota	Kramat	Senen	
80.	S. Tadjri	Anggota	Kramat	Senen	

NOMOR URUT	N A M A	DIABATAN DALAM P.P.P.	KELURAHAN	KETJAMATAN	KETE- RANG- AN.
81.	D. Sunarjo	Ketua/Anggota	Paseban	Senen	
82.	Djunaide	Wk. Ketua/Anggota	Paseban	Senen	
83.	Sukatman	Anggota	Paseban	Senen	
84.	M. Kasdi	Anggota	Paseban	Senen	
85.	T. Muchtar	Ketua/Anggota	Bungur	Senen	
86.	Moh. Nasir.	Wk. Ketua/Anggota	Bungur	Senen	
87.	Sjahrudin Sjahri	Anggota	Bungur	Senen	
88.	B. Napitupulu	Anggota	Bungur	Senen	
89.	Torba	Ketua/Anggota	Tjempaka Putih	Tjempaka Putih	
90.	Asmawi S.	Wk. Ketua/Anggota	Tjempaka Putih	Tjempaka Putih	
91.	Sudjiono	Anggota	Tjempaka Putih	Tjempaka Putih	
92.	A. Rukman	Anggota	Tjempaka Putih	Tjempaka Putih	
93.	Muhajjim	Ketua/Anggota	Rawa Sari	Tjempaka Putih	
94.	Ibrahim Saleh	Wk. Ketua/Anggota	Rawa Sari	Tjempaka Putih	
95.	Supomo	Anggota	Rawa Sari	Tjempaka Putih	
96.	Paidi	Anggota	Rawa Sari	Tjempaka Putih	
97.	Moh. Junus	Ketua/Anggota	Djojar Baru	Tjempaka Putih	
98.	R. Radjiman	Wk. Ketua/Anggota	Djojar Baru	Tjempaka Putih	
99.	J. Mirta Anggota	Anggota	Djojar Baru	Tjempaka Putih	
100.	M. Jusuf	Anggota	Djojar Baru	Tjempaka Putih	
101.	Moh. Hanafi Ramli	Ketua/Anggota	Kampung Rawa	Tjempaka Putih	
102.	Djakarta Hasan	Wk. Ketua/Anggota	Kampung Rawa	Tjempaka Putih	

NOMOR URUT	NAMA	DIABATAN DALAM P.P.P.	KELURAHAN	KETJAMATAN	KETE- RANG- AN.
103.	Supomo	Anggota	Kampung Rawa	Tjempaka Putih	
104.	Moh. Arjied	Anggota	Kampung Rawa	Tjempaka Putih.	
105.	Sudirman	Ketua/Anggota	Galur	Tjempaka Putih	
106.	Dairullah M.	Wk. Ketua/Anggota	Galur	Tjempaka Putih.	
107.	A. Sukardi	Anggota	Galur	Tjempaka Putih	
108.	Machroni	Anggota	Galur	Tjempaka Putih.	
109.	Abdurechman	Ketua/Anggota	Tanah Tinggi	Tjempaka Putih	
110.	Alnan Djenan	Wk. Ketua/Anggota	Tanah Tinggi	Tjempaka Putih	
111.	M. Sanip	Anggota	Tanah Tinggi	Tjempaka Putih.	
112.	M. Mansur	Anggota	Tanah Tinggi	Tjempaka Putih	
113.	Zaenudin	Ketua/Anggota	Kebon Sirih	Menteng	
114.	Sukono	Wk. Ketua/Anggota	Kebon Sirih	Menteng	
115.	Asman S.	Anggota	Kebon Sirih	Menteng	
116.	Sutomo	Anggota	Kebon Sirih	Menteng	
117.	Sri Mubin BA	Ketua/Anggota	Gondangdia	Menteng	
118.	Gani Hidayat	Wk. Ketua/Anggota	Gondangdia	Menteng	
119.	Musbah	Anggota	Gondangdia	Menteng.	

NOMOR URUT	N A M A	DIABATAN DALAM P.P.P.	KELURAHAN	KETJAMATAN	KETERANGAN
120.	Iman Sudjud	Anggota	Tjikini	Menteng	
121.	Singgh	Ketua/Anggota	Tjikini	Menteng	
122.	Marsan Ali	Wakil Ketua/Anggota	Tjikini	Menteng	
123.	Abd. Gani	Anggota	Tjikini	Menteng	
124.	Rokib	Anggota	Tjikini	Menteng	

Djakarta, 5 Mei 1970,
WALIKOTA DJAKARTA PUSAT

ttd.

(H.E. DIADIANG DIAJAATMADIA)

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA/KETUA PANITIA PEMILIHAN KOTA
DJAKARTA UTARA DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

No. 213/IV/2/DU/1970.

tentang

**PENGANGKATAN PARA LURAH SELAKU KETUA PANITIA
PENDAFTARAN PEMILIH DIWILAJAH KELURAHAN
MASING-MASING.**

**WALIKOTA DJAKARTA UTARA DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA;**

- Membatja** : Surat dari Tjamat dalam wilayah Kota Djakarta Utara, perihal usul penundjukan para Anggota Panitia Pendaftaran Pemilih.
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1970, perlu segera mengangkat para Lurah jang ada diwilajah Kota Djakarta Utara selaku Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih Kelurahan masing-masing dengan para anggotanja untuk dapat melaksanakan tugas jang dibebankan kepadanya :
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.15 tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1970;
2. Undang-undang No.18 tahun 1965 jo Undang-undang No.6 tahun 1969;
3. Penetapan Presiden No.2 tahun 1961 jo Undang-undang No.5 tahun 1969;
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1970;
5. Peraturan Daerah tentang Pembagian Wilayah Dalam Rangka Dekonsentrasi Pemerintah Daerah Chusus Ibukota Djakarta (L.D. tahun 1966 No.4);
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta tanggal 12 Agustus 1966 No.Ib.3./1/1/1966 tentang Pembentukan Kota Administratif, Ketjamatan dan Kelurahan dalam wilayah Daerah Chusus Ibukota Djakarta jang telah diubah terachir dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta tanggal 1 Maret 1969 No.Ib.3/1/30/1969 jo Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta tanggal 1 April 1970 No.Aa.1/1/2/1970;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- I. Mengangkat Para Lurah dalam wilayah Kota Djakarta Utara Daerah Khusus Ibukota Djakarta selaku Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih dan para anggotanya diwilayah masing-masing sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.**
 - II. Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut dari Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum menetapkan tugas dan kewajiban Ketua dan anggota-anggota Panitia Pendaftaran Pemilih sebagai berikut :**
 - (1) membantu tugas-tugas Panitia Pemungutan Suara;**
 - (2) menjelenggarakan Pendaftaran Pemilih;**
 - (3) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendaftaran pemilih diwilayah masing-masing kepada Walikota melalui Tjamat.**
 - III. Hal-hal yang Belum cukup diatur dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan diperbaiki kemudian dengan Surat Keputusan tersendiri.**
 - IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di : Djakarta,
Pada tanggal : 1 Djuli 1970.

**WALIKOTA/KETUA PANITIA PEMILIHAN
KOTA DJAKARTA UTARA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA.**

Tjap/ttd.

(D. DWINANTO)

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada

- Jth : 1. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta;**
2. Panitia Pemilihan Indonesia;
3. Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta;
4. Sekretaris Daerah;
5. Kepala Direktorat I/Pemerintahan;
6. Kepala Direktorat II/Keamanan & Ketertiban;
7. Para Tjamat;
8. Para Lurah;
9. Alas.
-

LAMPIRAN : Surat Keputusan Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Kota Jakarta Utara.
Tanggal : 1 Juli 1970 – No.213/IV/2/DU/1970.

Nomor Urut	N A M A	DIABATAN DALAM PPP.	KELURAHAN	KETJAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	MOCH. SJARAF	Anggota merangkap Ketua	Pulau Panggang	Kepulauan Seribu	Lurah Pulau Panggang.
2.	Toha	Anggota merangkap Wakil Ketua	"	"	Staf Kelurahan
3.	Tjatja	Anggota	"	"	Staf Kelurahan
4.	Nachdji	Anggota	"	"	Staf Kelurahan
5.	HASAN SASTRA	Anggota merangkap Ketua	Pulau Kelapa	"	Lurah Pulau Kelapa.
6.	Asnawi	Anggota merangkap Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah
7.	Mardjuki	Anggota	"	"	BKR. P. Kelapa.
8.	Supada	Anggota	"	"	Guru S.D.
9.	HASBULLAH A.M.	Anggota merangkap Ketua	Pulau Tidung	"	Pulau Kelapa.
10.	Rachmat Sj.	Anggota merangkap Wakil Ketua	"	"	Lurah Pulau Tidung.
11.	M. Tojib	Anggota	"	"	Staf Kelurahan Guru S.D. Pulau Tidung.

1	2	3	4	5	6
12.	Nachrowi	Anggota	Pulau Tidung	Kepulauan Seribu	Staf Kelurahan.
13.	MARDJUKI S.	Anggota merangkap Ketua	Pulau U. Djawa	"	Lurah
14.	Munir	Anggota merangkap Wakil Ketua	"	"	Untung Djawa. Staf Kelurahan
15.	Nursin	Anggota	"	"	Kepala S.D. P. Untung Djawa
16.	Darjadi	Anggota	"	"	Guru S.D. P. U. Djawa.
17.	ATJEP SUKMA	Anggota merangkap Ketua	Pendjaringan	Pendjaringan	Lurah Pendjaringan.
18.	M. Salim	Anggota merangkap Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah
19.	M. Marsim	Anggota	"	"	Bimas
20.	Sudarta	Anggota	"	"	Babinsa.
21.	HS. ARSALI	Anggota merangkap Ketua	Pedjagalan	"	Lurah
22.	M. Sjafie	Anggota merangkap Wakil Ketua	"	"	Pedjagalan. Wakil Lurah
23.	Tjetjep Rosidi	Anggota	"	"	Bimas
24.	Sariman	Anggota	"	"	Babinsa.

1	2	3	4	5	6
25.	SAIDI	Anggota merangkap Ketua	Mangga dua Utara	Pendjaringan	Lurah Mangga- dua Utara. Wakil Lurah
26.	Sukirman	Anggota merangkap Wakil Ketua	"	"	
27.	H. Djukman	Anggota	"	"	Bimas
28.	M. Mursjid	Anggota	"	"	Babinsa.
29.	LEGIMAN	Anggota merangkap Ketua	Pademangan	"	Lurah Pademangan. Wakil Lurah
30.	Saman	Anggota merangkap Wakil Ketua	"	"	
31.	Sunomo	Anggota	"	"	Bimas
32.	Suroso	Anggota	"	"	Babinsa.
33.	A. ZAINUDDIN	Anggota merangkap Ketua	Sunter	Tandjung Priuk	Lurah Sunter. Wakil Lurah
34.	M. Muholih	Anggota merangkap Wakil Ketua	"	"	
35.	Warno	Anggota	"	"	Bimas
36.	Djaan	Anggota	"	"	Babinsa
37.	M. DALI	Anggota merangkap Ketua	Papango	"	Lurah Papango. Wakil Lurah
38.	E. Muchtaruddin	Anggota merangkap Wakil Ketua	"	"	
39.	Enting Dahroni	Anggota	"	"	Bimas
40.	Ojo Seno	Anggota	"	"	Babinsa.

1	2	3	4	5	6
41.	M. JACUB	Anggota merangkap Ketua	Sungai Bambu	Tandjung Priuk	Lurah Sungai Bambu. Wakil Lurah.
42.	Maidani	Anggota merangkap Wakil Ketua	"	"	
43.	Musfahani	Anggota	"	"	Bimas
44.	Tatang B.	Anggota	"	"	Babinsa.
45.	NATA SUDARMA	Anggota merangkap Ketua	Kebon Bawang	"	Lurah Kebon Bawang. Wakil Lurah
46.	M. Hasan	Anggota merangkap Wakil Ketua	"	"	
47.	Bambang S.	Anggota	"	"	Bimas
48.	Entjun	Anggota	"	"	Babinsa
49.	M. MARKADI	Anggota merangkap Ketua	Tandjung Priuk	"	Lurah Tandjung Priuk. Wakil Lurah
50.	Kadma	Anggota merangkap Wakil Ketua	"	"	
51.	Ngadiman	Anggota	"	"	Bimas
52.	A. Toasikal	Anggota	"	"	Babinsa.
53.	M.H. DASUKI	Anggota merangkap Ketua	Kodja Utara	Kodja	Lurah Kodja.
54.	Moch. Muchtar	Anggota merangkap Wakil Ketua	"	"	Staf Kelurahan
55.	A. Sitompul	Anggota	"	"	Bimas
56.	Zainuddin	Anggota	"	"	Babinsa.

1	2	3	4	5	6
57.	HASJIM	Anggota merangkap Ketua	Kalibaru	Kodja	Lurah Kalibaru.
58.	Tjetjep Suhardja	Anggota merangkap Wakil Ketua	"	"	Staf Kelurahan
59.	Mardi	Anggota	"	"	Bimas
60.	Matali	Anggota	"	"	Babinsa.
61.	DASTUM	Anggota merangkap Ketua	Tjilintjing	"	Lurah
62.	Mardjuki Sarmadi	Anggota merangkap Wakil Ketua	"	"	Tjilintjing. Wakil Lurah
63.	Sulaiman A.D.	Anggota	"	"	Bimas
64.	Sersan Sudjai	Anggota	"	"	Babinsa
65.	Aip-I. ENDJANG	Anggota merangkap Ketua	Semper	"	Lurah
66.	Rachman	Anggota merangkap Wakil Ketua	"	"	Semper. Staf Kelurahan
67.	Aip. II Endjam	Anggota	"	"	Bimas
68.	G. Atma Kesuma	Anggota	"	"	Babinsa
69.	AMIR DUDU	Anggota merangkap Ketua	Lagoa	"	Lurah
70.	M. Suwadi	Anggota merangkap Wakil Ketua	"	"	Lagoa. Staf Kelurahan
71.	Saimun A.	Anggota	"	"	Bimas
72.	Kartha	Anggota	"	"	Babinsa

1	2	3	4	5	6
73.	M. A. LUBIS	Anggota merangkap Ketua	Kodja Selatan	Kodja	Lurah Kodja Selatan. Wakil Lurah.
74.	Radi Rajana	Anggota merangkap Wakil Ketua	"	"	
75.	Karsono	Anggota	"	"	Bimas
76.	Sudja	Anggota	"	"	Babinsa
77.	O. SUTISNA	Anggota merangkap Ketua	Tugu	"	Lurah Tugu.
78.	M. Nurdin	Anggota merangkap Wakil Ketua	"	"	Staf Kelurahan
79.	Sjamsiar	Anggota	"	"	Bimas
80.	Ma'mun	Anggota	"	"	Babinsa.
81.	DJOKO SUTIKNO	Anggota merangkap Ketua	Rawa Badak	"	Lurah
82.	Mama	Anggota merangkap Wakil Ketua	"	"	Rawabadak Wakil Lurah
83.	Sanusi	Anggota	"	"	Bimas
84.	Soeroso	Anggota	"	"	Babinsa
85.	A. GANI	Anggota merangkap Ketua	Kelapa Gading	"	Lurah
86.	Zainal Abidin	Anggota merangkap Wakil Ketua	"	"	Kelapa Gading. Staf Kelurahan
87.	Bisri	Anggota	"	"	Bimas
88.	Seno	Anggota	"	"	Babinsa

1	2	3	4	5	6
89.	DIAMHARI	Anggota merangkap Ketua	Pangsaan	Kodja	Lurah Pangsaan. Staf Kelurahan
90.	Kohar	Anggota merangkap Wakil Ketua	"	"	Babinsa Babinsa
91.	Maan	Anggota	"	"	Babinsa
92.	Tambah	Anggota	"	"	Babinsa
93.	M.S. SOEBANDI	Anggota merangkap Ketua	Petungkangan	"	Lurah Petungkangan. Staf Kelurahan
94.	T. Mustafa	Anggota merangkap Wakil Ketua	"	"	Babinsa Babinsa.
95.	A. Wahid	Anggota	"	"	
96.	Naan	Anggota	"	"	

WALIKOTA/KETUA PANITIA PEMILIHAN KOTA
DJAKARTA UTARA.

Tjap/ttd.

(D. DWINANTO)

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA/KETUA
PANITYA PEMILIHAN KOTA DJAKARTA BARAT
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Nomor : 87/IV/DB/1970.

tentang

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PENDAFTARAN PEMILIH
DIWILAJAH KELURAHAN KOTA DJAKARTA BARAT
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.**

**WALIKOTA/KETUA PANITIA PEMILIHAN KOTA DJAKARTA
BARAT DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.**

- Membatja** : 1. Surat dari para Tjamat dalam Wilayah Kota Djakarta Barat perihal usul penundjukan para anggota Panitia Pendaftaran Pemilih.
2. Nota Dinas Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta tanggal 15 Mei 1970 No. 465/III/2/1970 perihal Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II pada Kota Administratif di Daerah Chusus Ibukota Djakarta, Panitia Pemungutan Suara di Ketjamatan dan Panitia Pendaftaran Pemilih di Kelurahan.
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 perlu segera mengangkat para Lurah/Wakil Lurah jang ada diwilajah Kota Djakarta Barat selaku Ketua/Wakil Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih Kelurahan masing-masing dengan para anggotanja, untuk dapat melaksanakan tugas jang dibebankan kepadanya.

- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 15 tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 ;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969 ;
3. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 jo. Undang-undang No. 5 tahun 1969 ;
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1970 ;
5. Peraturan Daerah tentang Pembagian Wilayah Dalam Rangka Dekonsentrasi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Djakarta (L.D. tahun 1966 No. 4) ;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 12 Agustus 1966 No. Ib-3/1/1/1966 tentang pembentukan Kota Administratif, Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta yang telah diubah terakhir dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 Maret 1969 No. Ib.3/1/30/1969 jo. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 April 1970 No. Aa.1/1/2/1970 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : 1. Menjabut Surat Keputusan Walikota Djakarta Barat Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 9 Mei 1970 No. 03/Pemilu/DB/1970 tentang Pengangkatan Para Lurah Selaku Ketua P.P.P. diwilayah Kelurahan masing-masing ;
- II. Mengangkat para Lurah/Wakil Lurah dalam wilayah Kota Djakarta Barat Daerah Khusus Ibukota Djakarta selaku Ketua/Wakil Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih dan para Anggotanja diwilayah masing-masing sebagai-

mana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ;

III. Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut dari Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum menetapkan tugas dan kewajiban Ketua dan anggota-anggota Panitia Pendaftaran Pemilih sebagai berikut :

- (1) membantu tugas-tugas Panitia Pemungutan Suara ;
- (2) menjelenggarakan pendaftaran pemilih ;
- (3) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendaftaran pemilih diwilayah masing-masing kepada Walikota melalui Tjamat ;

IV. Hal-hal yang belum cukup diatur dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan diperbaiki kemudian dengan Surat Keputusan tersendiri.

V. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 30 Juni 1970.

WALIKOTA/KETUA PANITIA PEMILIH-
AN KOTA DJAKARTA BARAT
DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,

(R. SOEDARJA).

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Jth :**
- 1. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta;**
 - 2. Panitia Pemilihan Indonesia ;**
 - 3. Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta ;**
 - 4. Sekretaris Daerah ;**
 - 5. Kepala Direktorat I/Pemerintahan ;**
 - 6. Kepala Direktorat II/Keamanan & Ketertiban ;**
 - 7. Para Tjamat ;**
 - 8. Para Lurah ;**
 - 9. Jang bersangkutan ;**
 - 10. A l a s .**

LAMPIRAN : Surat Keputusan Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Kota Djakarta Barat,
Tanggal 30 Juni 1970 – No. 87/IV/DB/1970.

Nomor Urut	N A M A	DIABATAN DALAM PPP.	KELURAHAN	KETJAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	H. Mitjang	Ketua merangkap Anggota	Benda	Tjengkareng	Lurah Benda.
2.	Muhamdja	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Staf Kelurahan
3.	Durdjana	Anggota	"	"	Babinsa
4.	Mardja	Anggota	"	"	Bimas
5.	H. Achmad Gaos	Ketua merangkap Anggota	Kamal	"	Lurah
6.	H. Nawawi	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Kamal.
7.	Arsa	Anggota	"	"	Wakil Lurah
8.	Maming	Anggota	"	"	Babinsa
9.	H. Muhaadh	Ketua merangkap Anggota	Tegalalur	"	Bimas
10.	Bani	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Lurah
11.	Masri	Anggota	"	"	Tegalalur.
12.	Suwoko	Anggota	"	"	Wakil Lurah
					Babinsa
					Bimas

1	2	3	4	5	6
29.	Dalung M. Dahlan	Ketua merangkap Anggota	Kedung	Kaliangke	Lurah Kedung. Wakil Lurah
30.	Dachlan	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	
31.	Jatiman	Anggota	"	"	Babinsa Bimas
32.	Rumanata	Anggota	"	"	Lurah
33.	Soekarna	Ketua merangkap Anggota	Grogol	Grogol/Petamburan	Grogol. Wakil Lurah
34.	Sugandi	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	
35.	A. Adar	Anggota	"	"	Babinsa
36.	Abubakar	Anggota	"	"	Bimas
37.	M. Saleh Djaja	Ketua merangkap Anggota	Djelambar	"	Lurah Djelambar. Wakil Lurah
38.	Arnali	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	
39.	Kasim	Anggota	"	"	Babinsa
40.	Slamet Hs.	Anggota	"	"	Bimas
41.	Komarudin Hasjim	Ketua merangkap Anggota	Tandjungduren	"	Lurah Tandjungduren. Wakil Lurah
42.	Mudjertimi	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	
43.	Rukman	Anggota	"	"	Babinsa
44.	Ibrahim	Anggota	"	"	Bimas

1	2	3	4	5	6
13.	A. Atmasaputra	Ketua merangkap Anggota	Pegadungan	Tjengkareng	Lurah Pegadungan. Wakil Lurah
14.	Mirda	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	
15.	Hamid	Anggota	"	"	Babinsa
16.	Sarbini	Anggota	"	"	Bimas
17.	H. Dali	Ketua merangkap Anggota	Kalideres	"	Lurah
18.	H. Musa	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Kalideres.
19.	Ruchdi	Anggota	"	"	Staf Lurah
20.	Llm Tio Lok	Anggota	"	"	Babinsa
21.	ABD. Hamid	Ketua merangkap Anggota	Tjengkareng	"	Bimas
22.	Muhamad Umar	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Lurah
23.	M. Noor	Anggota	"	"	Tjengkareng
24.	Siswandi	Anggota	"	"	Wakil Lurah
25.	Achmad Djapar	Ketua merangkap Anggota	Kapuk	"	Babinsa
26.	Asmat b Kidjo	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Bimas
27.	Oesman Leos	Anggota	"	"	Lurah
28.	E. Sulaeman	Anggota	"	"	Kapuk.

1	2	3	4	5	6
45.	E. Durahim	Ketua merangkap Anggota	Tomang	Grogol/Petamburan	Lurah Tomang.
46.	Mardjuki	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Wakil Lurah
47.	A. Jani	Anggota	"	"	Babinsa
48.	Sutikro	Anggota	"	"	Bimas
49.	Raskinsubandi	Ketua merangkap Anggota	Djati Pulo	"	Lurah
50.	Taufik Hidayat	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Djati Pulo. Wakil Lurah
51.	Kuswara	Anggota	"	"	Babinsa
52.	Amidi	Anggota	"	"	Bimas
53.	Moch. Machdi	Ketua merangkap Anggota	Kota Bambu	"	Lurah
54.	M. Namin	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Kota Bambu Wakil Lurah
55.	Moch. Hasan	Anggota	"	"	Babinsa
56.	Toha	Anggota	"	"	Bimas
57.	E. Machmud	Ketua merangkap Anggota	Silipi	"	Lurah
58.	Djumroni	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Silipi. Wakil Lurah
59.	Tukimin	Anggota	"	"	Babinsa
60.	M.H. Nasution	Anggota	"	"	Bimas

1	2	3	4	5	6
61.	Abotolib	Ketua merangkap Anggota	Palmerah	Grogol/Pet.	Lurah Palmerah. Wakil Lurah
62.	M.N. Nata	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	
63.	Mardjuki	Anggota	"	"	Babinsa Bimas
64.	H. Daslim	Anggota	"	"	Lurah
65.	M. Talkah	Ketua merangkap Anggota	Malaka	Tambora	Malaka. Wakil Lurah
66.	A. Kadir	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	
67.	Seka	Anggota	"	"	Babinsa Bimas
68.	Angrok Katamsi	Anggota	"	"	Lurah
69.	S. Sukama	Ketua merangkap Anggota	Pekodjan	"	Pekodjan Wakil Lurah
70.	D. Sutrisna	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	
71.	Asma	Anggota	"	"	Babinsa Bimas
72.	Abd. Hamid	Anggota	"	"	Lurah
73.	Omo	Ketua merangkap Anggota	Tambora	"	Tambora. Wakil Lurah
74.	Ali Rakum	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	
75.	Adroie*	Anggota	"	"	Babinsa Bimas
76.	Hadad	Anggota	"	"	

1	2	3	4	5	6
77.	A. Wahid Bernawi	Ketua merangkap Anggota	Djemabatan Lima "	Tambora "	Lurah Djemabatan Lima Wakil Lurah
78.	Husin Alhadi	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	
79.	Mamat Nip.	Anggota	"	"	Babinsa Bimas
80.	P. Sambudi	Anggota	"	"	Lurah
81.	D. Ibrahim	Ketua merangkap Anggota	Tanah Sareal	"	Tanah Sareal Wakil Lurah
82.	M. Saleh	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	
83.	Duloh Bafil	Anggota	"	"	Babinsa Bimas
84.	Sarikin	Anggota	"	"	Lurah
85.	Moch. Jahja	Ketua merangkap Anggota	Krendang	"	Krendang Wakil Lurah
86.	A. Muchtar	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	
87.	N. Djojana	Anggota	"	"	Babinsa Bimas
88.	Ajijm	Anggota	"	"	Lurah
89.	L. Gozali	Ketua merangkap Anggota	Duri	"	Duri.
90.	A. Maslim	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Wakil Lurah
91.	Muchasim	Anggota	"	"	Babinsa Bimas
92.	T. Muchtar	Anggota	"	"	

1	2	3	4	5	6
93.	M. Munani	Ketua merangkap Anggota	Angke	Tambora	Lurah Angke.
94.	A. Kurniadjaja	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Wakil Lurah
95.	Lijas	Anggota	"	"	Babinsa
96.	Djupri	Anggota	"	"	Bimas
97.	Dulladi	Ketua merangkap Anggota	Djembaran Besti	,	Lurah
98.	Suria Iskandar	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Djt. Besti. Wakil Lurah
99.	Udju Wiranta	Anggota	"	"	Babinsa
100.	Nalih	Anggota	"	"	Bimas
101.	D. Abd. Radjak	Ketua merangkap Anggota	Kali Baru	"	Lurah
102.	Sudadi	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Kali Baru. Wakil Lurah
103.	Burhan	Anggota	"	"	Babinsa
104.	Kasma	Anggota	"	"	Bimas
105.	R.S. Kamso	Ketua merangkap Anggota	Pinangia	Taman Sari	Lurah
106.	Supardi	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Pinangia. Wakil Lurah
107.	M. Bardja	Anggota	"	"	Babinsa
108.	Bachrudin	Anggota	"	"	Bimas

1	2	3	4	5	6
109.	Baik Djubaidi	Ketua merangkap Anggota	Glodok "	Taman Sari "	Lurah Glodok
110.	M. Saleh	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Wakil Lurah
111.	Odja	Anggota	"	"	Babinsa
112.	I. Ketut Sugiarta	Anggota	"	"	Bimas
113.	M. Suaeab Bastoni	Ketua merangkap Anggota	Mangga Besar	"	Lurah
114.	Achbab	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Mangga Besar. Wakil Lurah
115.	Sjamsudin	Anggota	"	"	Babinsa
116.	Dasuri Sadelii	Anggota	"	"	Bimas
117.	M. Saleh	Ketua merangkap Anggota	Tangki	"	Lurah
118.	Abd. Hamid	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Tangki. Wakil Lurah
119.	T. Soeganda	Anggota	"	"	Babinsa
120.	Chaidir	Anggota	"	"	Bimas
121.	Tb. Uteng Marlasaputra	Ketua merangkap Anggota	Keaungan	"	Lurah.
122.	Achmad Zainal	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Keaungan. Wakil Lurah
123.	M. Usman	Anggota	"	"	Babinsa
124.	M. Koendjar	Anggota	"	"	Bimas

1	2	3	4	5	6
125.	M. Saleh	Ketua merangkap Anggota	Krukut	Taman Sari	Lurah Krukut.
126.	A. Machbub	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Wakil Lurah
127.	Diatar	Anggota	"	"	Babinsa
128.	Gofur	Anggota	"	"	Bimas
129.	Sjahran Effendi	Ketua merangkap Anggota	Taman Sari	"	Lurah
130.	A. Sjoekoer	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Taman Sari Wakil Lurah
131.	O. Almadja	Anggota	"	"	Babinsa
132.	Ibrahim S.	Anggota	"	"	Bimas
133.	Ni'ing	Ketua merangkap Anggota	Maphar	"	Lurah
134.	Bunjamin	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Maphar. Wakil Lurah
135.	M. Jusuf	Anggota	"	"	Babinsa
136.	Asmadi	Anggota	"	"	Bimas
137.	Mardjuki	Ketua merangkap Anggota	Kembangan	"	Lurah
138.	Diamhuri	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Kembangan. Wakil Lurah
139.	Napis	Anggota	"	"	Babinsa
140.	Sarimin	Anggota	"	"	Bimas

1	2	3	4	5	6
141.	Sapri	Ketua merangkap Anggota	Kedoya	Kebon Djeruk	Lurah Kedoya.
142.	Maknun	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Wakil Lurah
143.	Sukarja	Anggota	"	"	Babinsa
144.	Saridjan	Anggota	"	"	Binas
145.	Satinin	Ketua merangkap Anggota	Duri	"	Lurah
146.	H. Nasir	Wakil Ketua Merangkap Anggota	"	"	Duri. Wakil Lurah
147.	S. Ojib	Anggota	"	"	Babinsa
148.	Pono	Anggota	"	"	Binas
149.	Mas'ud	Ketua merangkap Anggota	Meruja Ilir	"	Lurah
150.	Njaih	Wakil Ketua Merangkap Anggota	"	"	Meruja Ilir. Wakil Lurah
151.	Abd. Gani	Anggota	"	"	Babinsa
152.	Kasbi	Anggota	"	"	Binas
153.	Sana	Ketua merangkap Anggota	Meruja Udik	"	Lurah
154.	Damin	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Meruja Udik. Wakil Lurah
155.	Hasbullah	Anggota	"	"	Babinsa
156.	Sarwono	Anggota	"	"	Binas

1	2	3	4	5	6
157.	Abd. Gani	Ketua merangkap Anggota	Djoglo	Kebon Djeruk	Lurah Djoglo.
158.	Boim H. Geni	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Wakil Lurah
159.	M. Djaini	Anggota	"	"	Babinsa
160.	Soetrisno	Anggota	"	"	Bimas
161.	A. Kurniadjaja	Ketua merangkap Anggota	Sarengeng	"	Lurah
162.	Mu'imin	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Sarengeng. Wakil Lurah
163.	Basjar	Anggota	"	"	Beinsa
163.	Basjar	Anggota	"	"	Bimas
164.	Nait	Anggota	"	"	Lurah
165.	H. Mahfud	Ketua merangkap Anggota	Kebon Djeruk	"	Kebon Djeruk.
166.	M. Umar	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Wakil Lurah
167.	Kosasih	Anggota	"	"	Babinsa
168.	Kasman	Anggota	"	"	Bimas
169.	Umar Izic	Ketua merangkap Anggota	Sukabumi Ilir	"	Lurah
170.	Djarwanic	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Sukabumi Ilir Wakil Lurah
171.	Sjarif	Anggota	"	"	Babinsa
172.	Ading S.	Anggota	"	"	Bimas

1	2	3	4	5	6
173.	Muhadi	Ketua merangkap Anggota	Kelapa Dua	Kebon Djeruk	Lurah Kelapa Dua. Wakil Lurah.
174.	M. Djaja	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	
175.	Suchairi	Anggota	"	"	Babinsa
176.	Bandi	Anggota	"	"	Bimas
177.	M. Idris	Ketua merangkap Anggota	Sukaburni Udik	"	Lurah
178.	Adang	Wakil Ketua merangkap Anggota	"	"	Sukaburni Udik. Wakil Lurah
179.	Suwigirjo	Anggota	"	"	Babinsa
180.		Anggota	"	"	Bimas.

Djakarta, 30 Djuni 1970.
Walikota/Ketua P.P. Kota Djakarta Barat,
Ketua,
Tjap/trtd.

(R. SOEDARJA)

**PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA
WALIKOTA DJAKARTA TIMUR
Djalan Raya Djatinegara Timur 55
DJATINEGARA**

— dkr. —

No. : 1/Sec.Pemilu/I/WDT/70
Lampiran : 1 (rangkap 5).
Tentang : Pengangkatan Para Lurah selaku
Ketua Panitia Pendaftaran Pemi-
lih diwilajah Kelurahan masing-
masing.

**WALIKOTA DJAKARTA TIMUR DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA;**

- Membatja : Surat dari para Tjamat dalam Wilayah Kota Djakarta Timur,
perihal usul penundjukan para Anggota Panitia Pendaftaran
Pemilih jaitu ;
- a. Surat Tjamat Matraman tgl. 15-4-1970 No. 1099/PPP/70
 - b. Surat Tjamat Pulogadung tgl. 21-4-1970 No. 21/PPP/70
 - c. Surat Tjamat Djatinegara tgl. 29-4-1970 No.1175/PPP/70
 - d. Surat Tjamat Kramatdjati tgl. 15-4-1970 No. 30/PPP/70
 - e. Surat Tjamat Pasar Rebo tgl. 21-4-1970 No. 999/PPP/70.
- Menimbang : Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 13 ayat
(1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970, perlu
segera mengangkat para Lurah jang ada diwilajah Kota
Djakarta Timur selaku Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih
Kelurahan masing-masing dengan para anggotanja untuk
dapat melaksanakan tugas jang dibebankan kepadanya;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.15 tahun 1969 jo Peraturan Peme-
rintah No.1 tahun 1970.
2. Undang-undang No.18 tahun 1965 jo Undang-undang
No.6 tahun 1969;
3. Penetapan Presiden No.2 tahun 1961 jo Undang-undang
No.5 tahun 1969;

4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1970;
5. Peraturan Daerah tentang Pembagian Wilayah Dalam rangka Dekonsentrasi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Djakarta (Lembaran Daerah tahun 1966 No.4);
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 12 Agustus 1966 No.1b.3/1/1/1966 tentang Pembentukan Kota Administratif, Ketjamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta yang telah dirubah terakhir dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 April 1970 No.Aa./1/1/2/1970;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Mengangkat Para Lurah dalam Wilayah Kota Djakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Djakarta selaku Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih dan Anggotanya diwilayah masing-masing sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- II. Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut dari Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum menetapkan tugas dan kewajiban Ketua dan anggota-anggota Panitia Pendaftaran Pemilih sebagai berikut;
- (1). membantu tugas-tugas Panitia Pemungutan Suara,
 - (2). menjelenggarakan pendaftaran pemilih,
 - (3). bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendaftaran pemilih diwilayah masing-masing kepada Walikota melalui Tjamat.
- III. Hal-hal yang belum cukup diatur dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan diperbaiki kemudian dengan surat keputusan tersendiri.

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada Tanggal : 1 Mei 1970.

WALIKOTA DJAKARTA TIMUR
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

Tjap/ttd.

(ALAMSUD'DIN)

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini
disampaikan kepada :

1. Jth. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta;
 2. „ Panitia Pemilihan Indonesia;
 3. „ Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta;
 4. „ Sekretaris Daerah;
 5. „ Kepala Direktorat I/Pemerintahan;
 6. „ Kepala Direktorat II/Keamanan & Ketertiban;
 7. „ Para Tjamat;
 8. „ Para Lurah;
 9. „ Alas.
-

LAMPIRAN : Surat Keputusan Walikota Djakarta Timur Tanggal 1 Mei 1970.
 Nomor 1/Sec.Pemilu/1/WDI/1970.

1	2	3	4	5	6
Nomor Urut	N A M A	DJABATAN DALAM PPP.	KELURAHAN	KETJAMATAN	KETERANGAN
1.	Naisin	Ketua	Kebon Manggis	Matraman	Lurah
2.	M. Jusuf	Wakil Ketua	"	"	Kepala Lingkungan idem.
3.	D. Bijanto	Anggota	"	"	Babinsa
4.	Suhandi	Anggota	"	"	Bimas
5.	Suhadi	Anggota	"	"	
6.	M. Jusuf	Ketua	Pal Meriam	"	Lurah
7.	Tugiman	Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah
8.	Sumardi	Anggota	"	"	Kepala Lingkungan
9.	Rusmana	Anggota	"	"	Babinsa
10.	Peniran	Anggota	"	"	Bimas
11.	M. Tohir	Ketua	Kaju Manis	"	Lurah
12.	Hartono	Wakil Ketua	"	"	Kepala Lingkungan idem.
13.	Imang	Anggota	"	"	Babinsa
14.	Bunasir	Anggota	"	"	Bimas
15.	Ngadiman W.	Anggota	"	"	
16.	Achmad Semerudhi	Ketua	Utan Kaju	"	Lurah
17.	B.A. M. Jasim	Wakil Ketua	"	"	Kepala Lingkungan

1	2	3	4	5	6
18. M. Diansi	Anggota	Utari Kaju	Matraman	Kepala Lingkungan	
19. Asjari	Anggota	"	"	Babinsa	
20. Pardjan	Anggota	"	"	Bimas	
21. Sjuji	Ketua	Psangan Baru	"	Lurah	
22. Dalidio	Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah	
23. M.Toha	Anggota	"	"	Kepala Lingkungan	
24. Mahasjim	Anggota	"	"	Babinsa	
25. Soewadi	Anggota	"	"	Bimas	

Diakarta, 1 Mei 1970
A/n. WALIKOTA DIAKARTA TIMUR

u.b.

Sekretaris

Tjap/ttd.

(Drs. Sofjan Hakim)

PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
WALI KOTA DJAKARTA TIMUR
Djalan Raya Djatinegara Timur 55
DJATINEGARA

: dkr :

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA DJAKARTA TIMUR
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.

No. : 2/Sec. Pemilu /II/WDT/70
Lampiran : 1 (rangkap 9).
Tentang : Pengangkatan Para Lurah selaku
Ketua Panitia Pendaftaran Pemi-
lih diwilajah Kelurahan masing2.

WALI KOTA DJAKARTA TIMUR DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA.

- MEMBATJA** : Surat dari para Tjamat dalam Wilajah Kota Djakarta Timur, perihal usul penundjukan para Anggota Panitia Pendaftaran Pemilih jaitu ;
- a. Surat Tjamat Matraman tgl. 15-4-1970 No. 1099/PPP/70;
 - b. Surat Tjamat Pulogadung tgl. 21-4-1970 No. 21/PPP/70;
 - c. Surat Tjamat Djatinegara tgl. 29-4-1970 No. 1175/PPP/70;
 - d. Surat Tjamat Kramatdjati tgl. 15-4-1970 No. 30/PPP/70;
 - e. Surat Tjamat Pasar Rebo tgl. 21-4-1970 No. 999/PPP/70;
- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 13 ajat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970, perlu segera mengangkat para Lurah jang ada diwilajah Kota Djakarta Timur selaku Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih Kelurahan masing2 dengan para anggotanja untuk dapat melaksanakan tugas jang dibebankan kepadanya.

- MENGINGAT :**
1. Undang-undang No. 15 tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970;
 2. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
 3. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 jo. Undang2 No. 5 tahun 1969;
 4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1970;
 5. Peraturan Daerah tentang Pembagian Wilayah Dalam rangka Dekonstrasi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Djakarta (Lembaran Daerah tahun 1966 No. 4);
 6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 12 Agustus 1966 No. 1b. 3/1/1/1966 tentang Pembentukan Kota Administratif, Ketjamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta yang telah dirubah terakhir dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 April 1970 No. Aa./1/1/2/1970;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
- I. Mengangkat Para Lurah dalam Wilayah Kota Djakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Djakarta selaku Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih dan Anggotanya masing-masing sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
 - II. Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut dari Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum menetapkan tugas dan kewajiban Ketua dan anggota-anggota Panitia Pendaftaran Pemilih sebagai berikut:
 - (1). membantu tugas-tugas Panitia Pemungutan Suara,
 - (2). menjelenggarakan pendaftaran pemilih,
 - (3). bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendaftaran pemilih diwilayah masing-masing kepada Walikota melalui Tjamat.
 - III. Hal-hal yang belum tjukup diatur dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diatur

dan diperbaiki kemudian dengan surat keputusan tersendiri.

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : D J A K A R T A.

Pada tanggal : 1 M E I 1970.

WALIKOTA DJAKARTA TIMUR DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA,

tjap, ttd.

(ALAMSUD'DIN)

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Jth. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta,
 2. „ Panitia Pemilihan Indonesia,
 3. „ Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta,
 4. „ Sekretaris Daerah,
 5. „ Kepala Direktorat I/Pemerintahan,
 6. „ Kepala Direktorat II/Keamanan & Ketertiban,
 7. „ Para Tjamat,
 8. „ Para Lurah,
 9. A l a s.
-

LAMPIRAN : Surat Keputusan Walikota Djakarta Timur Tanggal 1 Mei 1970,
 Nomor 2/Sec.Pemilu/II/WDT/1970.

NOMOR URUT	N A M A	DJABATAN DALAM P.P.P.	KELURAHAN	KETJAMATAN	KETERANGAN
26.	Moediarjo	Ketua	Kayu Putih	Matraman	Lurah
27.	Nasar Leman	Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah
28.	Achir	Anggota	"	"	Peg. Kelurahan
29.	Bebinsa	Anggota	"	"	
30.	Bimas	Anggota	"	"	
31.	H. Arkin	Ketua	Rawa mangun	"	Lurah
32.	Idris Haga	Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah
33.	Munali	Anggota	"	"	Peg. Kelurahan
34.	Bebinsa	Anggota	"	"	
35.	Bimas	Anggota	"	"	
36.	R. Anwar	Ketua	Pisangan Timur	"	Lurah
37.	Abd. Chadir	Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah
38.	Sabeni	Anggota	"	"	Peg. Kelurahan
39.	Bebinsa	Anggota	"	"	
40.	Bimas	Anggota	"	"	
41.	H.S. Hidayat	Ketua	Djatinegara	"	Lurah
42.	M. Kusnadi	Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah
43.	Idris Saderi	Anggota	"	"	Peg. Kelurahan
44.	Bebinsa	Anggota	"	"	
45.	Bimas	Anggota	"	"	

NOMOR URUT	N A M A	DJABATAN DALAM P.P.P.	KELURAHAN	KETJAMATAN	KETERANGAN
46.	R. Ali Muchtar	Ketua	Djatinegara Timur	Matraman	Lurah
47.	S. Satoso	Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah
48.	Supena Jahja	Anggota	"	"	Peg. Kelurahan
49.	Bimas	Anggota	"	"	
50.	Babinsa	Anggota	"	"	
51.	Suwanda	Ketua	Pulo Gadung	"	Lurah
52.	Munasir	Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah
53.	Alwi	Anggota	"	"	Peg. Kelurahan
54.	Bimas	Anggota	"	"	
55.	Babinsa	Anggota	"	"	
56.	A. Marnat	Ketua	Rawa Rate	"	Lurah
57.	Tjarta	Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah
58.	Sutisna Amidjaja	Anggota	"	"	Kep. IPDAP Pl. Gd.
59.	Bimas	Anggota	"	"	
60.	Babinsa	Anggota	"	"	
61.	Mudjिताba	Ketua	Panggilingan	"	Lurah
62.	Gunawan	Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah
63.	Mansjuri	Anggota	"	"	Peg. Kelurahan
64.	Babinsa	Anggota	"	"	
65.	Bimas	Anggota	"	"	

NOMOR URUT	N A M A	DIABATAN DALAM P.P.P.	KELURAHAN	KETJAMATAN	KETERANGAN
66.	R. Ali Rachman	Ketua	Tjipinang	Matraman	Lurah
67.	A. Hamid	Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah
68.	R. Toha	Anggota	"	"	Peg. Kelurahan
69.	Babinsa	Anggota	"	"	
70.	Bumas	Anggota	"	"	

Djakarta, 1 Mei 1970

A/n. WALIKOTA DIAKARTA TIMUR

u.b.

Sekretaris,

Tjap/ttd.

(Drs. Sofjan Hakim)

**PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA
WALIKOTA DJAKARTA TIMUR
Djalan Raya Djatinegara Timur 55,
DJATINEGARA**
-----dkr.-----

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA DJAKARTA TIMUR
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.**

No. : 3/Sec. Pemilu/III/WDT/70
Lampiran : 1 (rangkap 12).
Tentang : Pengangkatan Para Lurah selaku
Ketua Panitia Pendaftaran Pemi-
lih diwilajah Kelurahan masing-
masing.

**WALIKOTA DJAKARTA TIMUR DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA.**

- Membatja** : Surat dari para Tjamat dalam Wilajah Kota Djakarta Timur,
perihal usul penundjukan para Anggota Panitia Pendaftaran
Pemilih jaitu ;
- a. Surat Tjamat Matraman tgl. 15-4-1970 No.1099/PPP/70
 - b. Surat Tjamat Pulogadung tgl. 21-4-1970 No.21/PPP/70
 - c. Surat Tjamat Djatinegara tgl. 29-4-1970 No.1175/PPP/70
 - d. Surat Tjamat Kramatdjati tgl. 15-4-1970 No. 30/PPP/70
 - e. Surat Tjamat Pasar Rebo tgl. 21-4-1970 No.999/PPP/
1970.
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 13 ayat
(1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1970, perlu
segera mengangkat para Lurah jang ada diwilajah Kota
Djakarta Timur selaku Ketua Panitia Pendaftaran Pemi-
lih Kelurahan masing-masing dengan para anggotanja untuk
dapat melaksanakan tugas jang dibebankan kepadanya;

- Mengingat** : 1. Undang-undang No.15 tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1970.
2. Undang-undang No.18 tahun 1969 jo Undang-undang No.6 tahun 1969;
3. Penetapan Presiden No.2 tahun 1961 jo Undang-undang No.5 tahun 1969;
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1970;
5. Peraturan Daerah tentang Pembagian Wilayah Dalam rangka Dekonsentrasi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Djakarta (Lembaran Daerah tahun 1966 No.4);
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 12 Agustus 1966 No.Ib.3/1/1/1966 tentang Pembentukan Kota Administratif, Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta yang telah diubah terakhir dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 April 1970 No.Aa./1/1/2/1970;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : I. Mengangkat Para Lurah dalam Wilayah Djakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Djakarta selaku Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih dan Anggotanya diwilayah masing-masing sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- II. Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut dari Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum menetapkan tugas dan kewajiban Ketua dan anggota-anggota Panitia Pendaftaran Pemilih sebagai berikut;
- (1). membantu tugas-tugas Panitia Pemungutan Suara,
 - (2). menjelenggarakan pendaftaran pemilih,
 - (3). bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendaftaran pemilih diwilayah masing-masing kepada Walikota melalui Tjamat.

- III. Hal-hal yang belum cukup diatur dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan diperbaiki kemudian dengan surat keputusan tersendiri.
- IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta,
Pada tanggal : 1 Mei 1970.

WALIKOTA DJAKARTA TIMUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

Tjap/ttd.

(ALAMSUD'DIN)

**LAMPIRAN : Surat Keputusan Walikota Djakarta Timur Tanggal 1 Mei 1970.
Nomor 3/Sec.Pemilu/III/WDI/1970.**

Nomor Urut	N A M A	DJABATAN DALAM PPP.	KELURAHAN	KETJAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
71.	Amsir Tole al. Saleh.	Ketua	Kampung Melaju	Diatinegara	Lurah
72.	Achmad Dali	Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah
73.	Ismail Asemi	Anggota	"	"	Peg. Kelurahan.
74.		Anggota	"	"	Babinisa
75.		Anggota	"	"	Bimas.
76.	Bachtiar A. Gani	Ketua	Bali Mester	"	Lurah
77.	Naang S.	Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah
78.	Moh. Saleh	Anggota	"	"	Ketua K.T.P.
79.		Anggota	"	"	Babinisa
80.		Anggota	"	"	Bimas.
81.	Bedjan Suprpto	Ketua	Bidaratjina	"	Lurah
82.	Munasik Edi Lek-sono	Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah
83.	Mursani	Anggota	"	"	Peg. Kelurahan
84.		Anggota	"	"	Babinisa
85.		Anggota	"	"	Bimas

1	2	3	4	5	6
86.	Zainuddin	Ketua	Tjipinang Tjempedak	Djatinegara	Lurah
87.	Abdullah	Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah
88.	Ramei Wahab	Anggota	"	"	Peg. Kelurahan
89.		Anggota	"	"	Babinsa
90.		Anggota	"	"	Bimas
91.	Rd. Effendi	Ketua	Rawabangke	"	Lurah
92.	Asari	Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah
93.	Mohd. Ali	Anggota	"	"	Peg. Kelurahan
94.	Sjarief	Anggota	"	"	Babinsa
95.	Djainul	Anggota	"	"	Bimas.
96.	M. Saleh Wahab	Ketua	Tjipinang Besar	"	Lurah
97.	Mohamad Mian	Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah
98.	Endim	Anggota	"	"	Peg. Kelurahan
99.		Anggota	"	"	Babinsa
100.		Anggota	"	"	Bimas
101.	H. Abdullah	Ketua	Tjipinang Muara	"	Lurah
102.	H. Moh. Idris	Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah
103.	Mardjuki	Anggota	"	"	Peg. Kelurahan
104.		Anggota	"	"	Babinsa
105.		Anggota	"	"	Bimas

1	2	3	4	5	6
106.	H. Hanapi	Ketua	Pondok Bambu	Djatiregara	Lurah
107.	Mutih b Said	Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah
108.	Zainuddin	Anggota	"	"	Peg. Kelurahan
109.	Muhammad	Anggota	"	"	Babinsa
110.	Bunan Nuri	Anggota	"	"	Bimas.
111.	M. Saleh Sabki	Ketua	Klender	"	Lurah
112.	M. Nasir b. Nasa	Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah
113.	Ramelan	Anggota	"	"	Peg. Kelurahan
114.	Hariono	Anggota	"	"	Babinsa
115.	Tukinin	Anggota	"	"	Bimas.
116.	Karim b. Tina	Ketua	Duren Sawit	"	Lurah
117.	Entiang W.B.	Wakil Ketua I	"	"	Wakil Lurah
118.	Supardi Sanga- ditaruna	Anggota	"	"	Peg. Kelurahan
119.	Djanhari	Anggota	"	"	Babinsa
120.	Djanil	Anggota	"	"	Bimas
121.	Endang Suberman	Ketua	Malaka	"	Lurah
122.	Kamih	Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah
123.	H. Antjim	Anggota	"	"	Peg. Kelurahan
124.	Mamat N.	Anggota	"	"	Babinsa
125.	Sjafrin	Anggota	"	"	Bimas

1	2	3	4	5	6
126. 127. 128. 129. 130.	Asan Dabug Sajuti Asmin	Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota	Pondok Kelapa " " " " "	Djatinegara " " " " "	Lurah Wakil Lurah Peg. Kelurahan Babinsa Bimas.

Djakarta, 1 Mei 1970.

A/n. WALIKOTA DJAKARTA TIMUR

u.b.

Sekretaris

ijap/ttd.

(Drs. Sofjan Hakim)

**PEMERINTAH DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA
WALIKOTA DJAKARTA TIMUR
Djalan Raya Djatinegara Timur 55,
DJATINEGARA
-----dkr.-----**

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA DJAKARTA TIMUR
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.**

**No. : 4/Sec.Pemilu/II/WDT/70
Lamp. : 1 (rangkap 9).
Tentang : Pengangkatan Para Lu-
rah selaku Ketua Panitia
Pendaftaran Pemilih di-
wilayah Kelurahan ma-
sing-masing.**

**WALIKOTA DJAKARTA TIMUR DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA;**

- Membatja : Surat dari para Tjamat dalam Wilayah Kota Djakarta Timur,
perihal usul penundjukan para Anggota Panitia Pendaftaran
Pemilih jaitu;**
- a. Surat Tjamat Matraman tgl. 15-4-1970 No. 1099/PPP/70
 - b. Surat Tjamat Pulogadung tgl. 21-4-1970 No. 21/PPP/70
 - c. Surat Tjamat Djatinegara tgl. 29-4-1970 No. 1175/PPP/70
 - d. Surat Tjamat Kramatdjati tgl. 15-4-1970 No.30/PPP/70
 - e. Surat Tjamat Pasar Rebo tgl. 21-4-1970 No. 999/PPP/70
- Menimbang : Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 13 ayat
(1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1970, perlu
segera mengangkat para Lurah jang ada diwilayah Kota
Djakarta Timur selaku Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih
Kelurahan masing-masing dengan para anggotanja untuk
dapat melaksanakan tugas jang dibebankan kepadanya;**
- Mengingat : 1. Undang-undang No.15 tahun 1969 jo Peraturan Peme-
rintah No.1 tahun 1970;**

2. Undang-undang No.18 tahun 1965 jo Undang-undang No.6 tahun 1969;
3. Penetapan Presiden No.2 tahun 1961 jo Undang-undang No.5 tahun 1969;
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1970;
5. Peraturan Daerah tentang Pembagian Wilayah Dalam rangka Dekonsentrasi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Djakarta (Lembaran Daerah tahun 1966 No.4);
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 12 Agustus 1966 No.1b.3/1/1/1966 tentang Pembentukan Kota Administratip, Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta yang telah dirubah terakhir dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 April 1970 No.Aa./1/1/2/1970;

MEMUTUSAKAN:

- Menetapkan : I. Mengangkat Para Lurah dalam Wilayah Kota Djakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Djakarta selaku Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih dan Anggotanya diwilayah masing-masing sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- II. Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut dari Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum menetapkan tugas dan kewajiban Ketua dan anggota-anggota Panitia Pendaftaran Pemilih sebagai berikut;
- (1). membantu tugas-tugas Panitia Pemungutan Suara,
 - (2). menjelenggarakan pendaftaran pemilih,
 - (3). bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendaftaran pemilih diwilayah masing-masing kepada Walikota melalui Tjamat.
- III. Hal-hal yang belum tjukup diatur dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan diperbaiki kemudian dengan surat keputusan tersendiri.

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta,
Pada tanggal : 1 Mei 1970.

WALIKOTA DJAKARTA TIMUR DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA,

Tjap/ttd.

(ALAMSUD'DIN)

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini
disampaikan kepada :

1. Jth. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta,
 2. Jth. Panitia Pemilihan Indonesia,
 3. „ Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta,
 4. „ Sekretaris Daerah,
 5. „ Kepala Direktorat I/Pemerintahan,
 6. „ Kepala Direktorat II/Keamanan & Ketertiban,
 7. „ Para Tjamat,
 8. „ Para Lurah,
 9. Alas.
-

LAMPIRAN : Surat Keputusan Walikota Djakarta Timur Tanggal 1 Mei 1970.
Nomor 4/Sec.Pemiliu/II/WDT/1970.

Nomor Urut	N A M A	DIABATAN DALAM PPP.	KELURAHAN	KETJAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	H.A. Bastari	Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota	Tjawang	KramatDjati	Lurah Wakil Lurah
2.	Abd. Salam		"	"	Babinsa
3.	Joel Samsun		"	"	Bimas
4.	Sertu Aban		"	"	
5.	Aiptu Marwi		"	"	
6.	H. Dj'iman	Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota	Tjipinang Melaju	"	Lurah Wakil Lurah
7.	Suparman		"	"	
8.	Sukardi		"	"	Babinsa
9.	Sertu M. Idris		"	"	Bimas
10.	Aipda Madi Alijas		"	"	
11.		Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota	Tjililitan	"	Lurah Wakil Lurah
11.	Ahmad May		"	"	
12.	H. Sarmada		"	"	
13.	Saib Samsun		"	"	Babinsa
14.	Sertu Madi		"	"	Bimas
15.	Aiptu Abd. Madjid		"	"	

1	2	3	4	5	6
16.	Z. Abidin	Ketua	Kramat Djati	Kramat Djati	Lurah
17.	Zaelani Jusuf	Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah
18.	A. Miril	Anggota	"	"	Babinsa
19.	Abon, Sertu	Anggota	"	"	Bimas
20.	S. Mawir, Aiptu	Anggota	"	"	
21.	Muhammad	Ketua	Batu Ampar	"	Lurah
22.	M. Muthji	Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah
23.	E. Karim	Anggota	"	"	Babinsa
24.	Sertu, Musa B.	Anggota	"	"	Bimas
25.	Aiptu, Durahim	Anggota	"	"	
26.	Abd. Wahid	Ketua	Bale Kambang	"	Lurah
27.	Rodjali	Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah
28.	Abdurachman	Anggota	"	"	Babinsa
29.	Sertu, Jakudi	Anggota	"	"	Bimas
30.	Aiptu, Entong Nari	Anggota	"	"	
31.	Mutoha	Ketua	Kebon Pala	"	Lurah
32.	H. Moh. Tojib	Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah
33.	Eddy Mursali	Anggota	"	"	Babinsa
34.	Serma, Njomo	Anggota	"	"	Bimas
35.	Aiptu, Moh. Sidik	Anggota	"	"	

1	2	3	4	5	6
36.	M. Nur	Ketua	Makasar	Kramat Djati	Lurah
37.	Mursid	Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah
38.	Sanusi	Anggota	"	"	Babinsa
39.	Serma, Slamet E.	Anggota	"	"	Bimas
40.	Aiptu, Saili	Anggota	"	"	
41.	M. Tabun	Ketua	Dukuh	"	Ketua
42.	Mahali	Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah
43.	M. Musa	Anggota	"	"	Babinsa
44.	Serma, Kuntet	Anggota	"	"	Bimas
45.	Aiptu, Ojo Nata	Anggota	"	"	
46.	A. Rodjali	Ketua	Tengah	"	Lurah
47.	Sanang	Wakil Ketua	"	"	Wakil Lurah
48.	Jacob D.	Anggota	"	"	
49.	Serma, Abdullah	Anggota	"	"	Babinsa
50.	Aiptu, Madji	Anggota	"	"	Bimas
51.	B. Mandat	Ketua	Halim Perdana Kesu-	"	Lurah
52.	U. Sjafirudin	Wakil Ketua	mah.	"	Wakil Lurah
53.		Anggota	"	"	
54.	Pasenggong	Anggota	"	"	Babinsa

**PEMERINTAH DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA
WALIKOTA DJAKARTA TIMUR**
Djalan Raya Djatinegara Timur 55,
DJATINEGARA
— dkr. —

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA DJAKARTA TIMUR
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.**

No. : 5/Sec.Pemilu/WDT/70
Lamp. : 1 (rangkap 18)
Tentang : Pengangkatan Para Lu-
rah selaku Ketua Panitia
Pendaftaran Pemilih di-
wilayah Kelurahan ma-
sing-masing.

**WALIKOTA DJAKARTA TIMUR DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA;**

- Membatja** : Surat dari para Tjamat dalam Wilayah Kota Djakarta Timur,
perihal usul penundjukan para Anggota Panitia Pendaftaran
Pemilih jaitu;
- a. Surat Tjamat Matraman tgl. 15-4-1970 No.1099/PPP/70
 - b. Surat Tjamat Pulogadung tgl. 21-4-1970 No.21/PPP/70
 - c. Surat Tjamat Djatinegara tgl. 29-4-1970 No.1175/PPP/70
 - d. Surat Tjamat Kramatdjati tgl. 15-4-1970 No.30/PPP/70
 - e. Surat Tjamat Pasar Rebo tgl. 21-4-1970 No.999/PPP/70
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 13 ayat
(1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1970, perlu
segera mengangkat para Lurah yang ada diwilayah Kota
Djakarta Timur selaku Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih
Kelurahan masing-masing dengan para anggotanya untuk
dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;

- Mengingat** : 1. Undang-undang No.155 tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah no.1 tahun 1970;
2. Undang-undang No.18 tahun 1965 jo Undang-undang No.6 tahun 1969;
3. Penetapan Presiden No.2 tahun 1961 jo Undang-undang No.5 tahun 1969;
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1970;
5. Peraturan Daerah tentang Pembagian Wilayah Dalam rangka Dekonsentrasi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Djakarta (Lembaran Daerah tahun 1966 No.4);
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 12 Agustus 1966 No.1b.3/1/1/1966 tentang Pembentukan Kota Administratif, Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta yang telah dirubah terakhir dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 April 1970 No.Aa./1/1/2/1970;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : I. Mengangkat Para Lurah dalam Wilayah Kota Djakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Djakarta selaku Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih dan Anggotanya diwilayah masing-masing sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- II. Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut dari Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum menetapkan tugas dan kewajiban Ketua dan anggota-anggota Panitia Pendaftaran Pemilih sebagai berikut ;
- (1). membantu tugas-tugas Panitia Pemungutan suara,
 - (2). menjelenggarakan pendaftaran pemilih,
 - (3). bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendaftaran pemilih diwilayah masing-masing kepada Walikota melalui Tjamat,
- III. Hal-hal yang belum cukup diatur dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan diperbaiki kemudian dengan surat keputusan tersendiri.

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta,
Pada Tanggal : 1 Mei 1970.

WALIKOTA DJAKARTA TIMUR DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.

Tjap/ttd.

(ALAMSUD'DIN)

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini
disampaikan kepada :

1. Jth. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta,
 2. „ Panitia Pemilihan Indonesia,
 3. „ Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta,
 4. „ Sekretaris Daerah,
 5. „ Kepala Direktorat I/Pemerintahan,
 6. „ Kepala Direktorat II/Keamanan & Ketertiban,
 7. „ Para Tjamat,
 8. „ Para Lurah,
 9. Alas.
-

LAMPIRAN : Surat Keputusan Walikota Jakarta Timur Tanggal 1 Mei 1970.
 Nomor : 5/Sec.Pemlu/V/1970.

Nomor Urut	N A M A	DIABATAN DALAM PPP.	KELURAHAN	KETJAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Abd. Gani	Ketua	Lobang Buaja	Pasar Rebo	Lurah
2.	Matidji	Wakil Ketua	"	"	Peg. Kelurahan
3.	Abd. Somad	Anggota	"	"	Peg. Kelurahan
4.		Anggota	"	"	Babinsa
5.		Anggota	"	"	Bimas.
6.	Ridwan	Ketua	Rambutan	"	Peg. Kelurahan
7.	Moh. Sani	Wakil Ketua	"	"	Peg. Kelurahan
8.	Lukammul Hakim	Anggota	"	"	Peg. K.T.P.
9.		Anggota	"	"	Babinsa
10.		Anggota	"	"	Bimas.
11.	H. Mohamad Nasir	Ketua	Susukan	"	"
12.	Suwardi	Wakil Ketua	"	"	Peg. Kelurahan
13.	Moh. Nasir	Anggota	"	"	Peg. Kelurahan
14.		Anggota	"	"	Babinsa
15.		Anggota	"	"	Bimas.

1	2	3	4	5	6
16.	M. Atam	Ketua	Gedong	Pasar Rebo	Lurah
17.	Mad. Hasan	Wakil Ketua	"	"	Peg. Kelurahan
18.	Dudung	Anggota	"	"	Peg. Kelurahan
19.		Anggota	"	"	Babinsa
20.		Anggota	"	"	Bimas.
21.	I. Saali	Ketua	Tjeger	"	Peg. Kelurahan
22.	Zainuddin	Wakil Ketua	"	"	Peg. Kelurahan
23.	Matnur	Anggota	"	"	Peg. Kelurahan
24.		Anggota	"	"	Babinsa
25.		Anggota	"	"	Bimas.
26.	Mugenih	Ketua	Setu	"	Peg. Kelurahan
27.	Gani T.	Wakil Ketua	"	"	Peg. Kelurahan
28.	Moh. Soleh	Anggota	"	"	Peg. K.T.P.
29.		Anggota	"	"	Babinsa
29.		Anggota	"	"	Bimas.
30.	Moh. Tohir	Ketua	Baru	"	Lurah
31.	Saam	Wakil Ketua	"	"	Djuru Tulis
32.	M. Ali	Anggota	"	"	Kep. Lingkungan
33.		Anggota	"	"	Babinsa
34.		Anggota	"	"	Bimas.

1	2	3	4	5	6
35.	B. Midias	Ketua	Tjidianjung	Pasar Rebo	Lurah
36.	H. Boman	Wakil Ketua	"	"	Peg. Kelurahan
37.	O. Arba	Anggota	"	"	Babinsa
38.		Anggota	"	"	Bimas.
39.		Anggota	"	"	
40.	Moh. Nur	Ketua	Kalisari	"	Lurah
41.	Sukatma	Wakil Ketua	"	"	Djuru Tulis
42.	Abd. Rachim	Anggota	"	"	Kep. Lingkungan
43.		Anggota	"	"	Babinsa
44.		Anggota	"	"	Bimas.
45.	Djohari	Ketua	Tjiratjas	"	Lurah
46.	Mihh	Wakil Ketua	"	"	Peg. Kelurahan
47.	M. Effendi	Anggota	"	"	Peg. Kelurahan
48.		Anggota	"	"	Babinsa
49.		Anggota	"	"	Bimas.
50.	M. Nawawi	Ketua	Pekajon	"	Lurah
51.	A. Rachman	Wakil Ketua	"	"	Djuru Tulis
52.	M. Mansur	Anggota	"	"	Peg. Kelurahan
53.		Anggota	"	"	Babinsa
54.		Anggota	"	"	Bimas.

1	2	3	4	5	6
55.	H. Hardjan	Ketua	Tjibubur	Pasar Rebo	Lurah
56.	M. Aly	Wakil Ketua	"	"	Peg. Kelurahan
57.	Naman	Anggota	"	"	Kep. Lingkungan
58.		Anggota	"	"	Babinsa
59.		Anggota	"	"	Bimas.
60.	Lisan	Ketua	Kelapa Dua Wetan	"	Lurah
61.	Asrinin	Wakil Ketua	"	"	Peg. Kelurahan
62.	Sitem	Anggota	"	"	Kep. Lingkungan
63.		Anggota	"	"	Babinsa
64.		Anggota	"	"	Bimas.
65.	Ajar	Ketua	Tipejung	"	Lurah
66.	Komper	Wakil Ketua	"	"	Peg. Kelurahan
67.	Tongdo	Anggota	"	"	Kep. Lingkungan
68.		Anggota	"	"	Babinsa
69.		Anggota	"	"	Bimas.
70.	Sakim	Ketua	Mundjul	"	Lurah
71.	Supardi	Wakil Ketua	"	"	Kep. Lingkungan
72.	Paris	Anggota	"	"	Peg. Kelurahan
73.		Anggota	"	"	Babinsa
74.		Anggota	"	"	Bimas.

1	2	3	4	5	6
75.	M. Kemino	Ketua	.Tjilangkap	Pasar Rebo	Lurah
76.	Wachjat	Wakil Ketua	"	"	Kep. Lingkungan
77.	Sumanta	Anggota	"	"	Peg. Kelurahan
78.		Anggota	"	"	Babinsa
79.		Anggota	"	"	Bimas.
80.	Samun	Ketua	Pd. Ranggon	"	Lurah
81.	Djawa Kadir	Wakil Ketua	"	"	Peg. Kelurahan
82.	Oleh	Anggota	"	"	Guru S.D.
83.		Anggota	"	"	Babinsa
84.		Anggota	"	"	Bimas.
85.	Keling	Ketua	Babu Apus	"	Lurah
86.	Sanwani	Wakil Ketua	"	"	Peg. Kelurahan
87.	Matwahim	Anggota	"	"	Peg. Kelurahan
88.		Anggota	"	"	Babinsa
89.		Anggota	"	"	Bimas.

Djakarta, 1 Mei 1970.
A/n. WALIKOTA DJAKARTA TIMUR

u.b.

Sekretaris

Tjap/ttd.

(Drs. Sofjan Hakim)

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA DJAKARTA SELATAN
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

No. 6/IV/2/DS/1970

tentang

**Pengangkatan Para Lurah selaku Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih
dan Para Anggotanya diwilajah Kelurahan masing-masing.**

**WALIKOTA DJAKARTA SELATAN DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA.**

- Membatja** : Surat dari para Tjamat dalam Wilayah Kota Djakarta Selatan, perihal usul penundjukan para anggota Panitia Pendaftaran Pemilih;
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 dan surat Nota Dinas Panitia Pemilihan Daerah Daerah Chusus Ibukota Djakarta tanggal 15 Mei 1970 No.465/III/2/70, perlu segera mengangkat para Lurah jang ada diwilajah Djakarta Selatan selaku Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih Kelurahan masing-masing dengan para anggotanja untuk dapat melaksanakan tugas jang dibebankan kepadanya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 15 tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah No. I tahun 1970;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo Undang-undang No. 6 tahun 1969;
3. Peraturan Presiden No. 2 tahun 1961 jo Undang-undang No. 5 tahun 1969;
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1970
5. Peraturan Daerah tentang Pembagian Wilayah dalam rangka Dekonsentrasi Pemerintah Daerah Chusus Ibukota Djakarta (L.D. tahun 1966 No. 4);
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta tanggal 12 Agustus 1966 No. I.b.3/1/1/1966 tentang pembentukan Kota Administratif Ketjamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Daerah Chusus Ibukota Djakarta jang telah dirubah terachir dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta tanggal 1 Maret 1969 No. I.b.3/1/30/1969 jo surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta tanggal 1 April 1970 No. Aa.1/1/2/70.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan* : I. Mengangkat para Lurah dalam wilayah Djakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Djakarta selaku Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih dan para anggotanya diwilayah masing-masing sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- II. Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut dari Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum menetapkan tugas dan kewajiban Ketua dan anggota-anggota Panitia Pendaftaran Pemilih sebagai berikut:
1. membantu tugas Panitia Pemungutan Suara,
 2. menjelenggarakan pendaftaran pemilih,
 3. bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendaftaran pemilih diwilayah masing-masing kepada Walikota melalui Tjamat.
- III. Hal-hal yang belum tjukup diatur dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diatur dan diperbaiki kemudian dengan surat keputusan tersendiri.
- IV. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta
pada tanggal : 3 Djuli 1970.

WALIKOTA DJAKARTA SELATAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

ttd.

(H.E. RASMA)

Tembusan:

Surat keputusan ini disampaikan kepada Jth.:

- | | |
|---|--|
| 1. Gubernur kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta, | 6. Kepala Direktorat II/Keamanan & Ketertiban, |
| 2. Panitia Pemilihan Indonesia, | 7. Para Tjamat, |
| 3. Panitia Pemilihan Daerah Daerah Khusus Ibukota Djakarta, | 8. Para Lurah, |
| 4. Sekretariat Daerah, | 9. Jang bersangkutan, |
| 5. Kepala Direktorat I/Pemerintahan, | 10. A l a s. |
-

LAMPIRAN : Surat Keputusan Walikota/Ketua Panitia
Pemilihan Kota Djakarta Selatan tanggal
3 Djuli 1970 No. 6/IV/2/DS/70.

No. Urut	Nama	Djabatan dalam PPP.	Keterangan
I.			<i>Ketjamatan</i>
1	<i>M.S. Littie</i>	Ketua/Anggota	<i>Tebet.</i>
2	<i>Basuki Muchtar</i>	Wakil Ketua/Anggota	Kelurahan
3	<i>Muslim</i>	Anggota	Manggarai.
4	<i>Atim</i>	id	
5	<i>Mardjuki</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan
6	<i>Sarno</i>	Wakil Ketua/Anggota	Manggarai
7	<i>Marnat Iming</i>	Anggota	Selatan.
8	<i>I j o k</i>	id	
9	<i>M. Zaini</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan
10	<i>Sjapri</i>	Wakil Ketua/Anggota	Bukit Duri.
11	<i>Bandi U.</i>	Anggota	
12	<i>M. Hatib</i>	id	
13	<i>M. Marsie</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan
14	<i>Abdurahim</i>	Wakil Ketua/Anggota	Menteng
15	<i>Darjani S.</i>	Anggota	Dalam.
16	<i>M. Tamri</i>	id	
17	<i>R. Supangat</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan
18	<i>Abdul Kadir</i>	Wakil Ketua/Anggota	Tebet Barat.
19	<i>Sukijo</i>	Anggota	
20	<i>Habibun</i>	id	
21	<i>Abuhasan</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan
22	<i>Taufik</i>	Wakil Ketua/Anggota	Tebet Timur.
23	<i>S a n a</i>	Anggota	
24	<i>Bunadji</i>	id	
25	<i>Achmad</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan
26	<i>H. Rais</i>	Wakil Ketua/Anggota	Kebon Baru.
27	<i>Muljono</i>	Anggota	
28	<i>T. Asmawi Djaja</i>	id	

No. Urut	Nama	Djabatan dalam PPP.	Keterangan
II.			<i>Ketjamatan Setiabudi.</i>
1	<i>Mas'ud</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Setiabudi.
2	<i>Moh. Yamin</i>	Wakil Ketua/Anggota	
3	<i>Misani</i>	Anggota	
4	<i>M. Arifin</i>	id	
5	<i>H.M. Ali</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Karet
6	<i>Mugeni Amat Husein</i>	Wakil Ketua/Anggota	
7	<i>Saleh</i>	Anggota	
8	<i>Supaad</i>	id	
9			
9	<i>M. Jusuf Ismail</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Karet Se- manggi.
10	<i>Hamdan AH.</i>	Wakil Ketua/Anggota	
11	<i>Hambari</i>	Anggota	
12	<i>M. Machmud</i>	id	
13	<i>A. Damiri</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Karet Ku- ningan.
14	<i>Mugeni Dul</i>	Wakil Ketua/Anggota	
15	<i>Machpud</i>	Anggota	
16	<i>M. Danu</i>	id	
17	<i>Mussaini H.M. Ali</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Kuningan Timur.
18	<i>M. Npis</i>	Wakil Ketua/Anggota	
19	<i>Suherman</i>	Anggota	
20	<i>Abdullah</i>	id	
21	<i>Rameli</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Menteng Atas.
22	<i>A. Nitididjaja</i>	Wakil Ketua/Anggota	
23	<i>Theo Kwokku</i>	Anggota	
24	<i>Djumadi</i>	id	
25	<i>Abdul Chalip</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Pasar Mang- gis.
26	<i>Suradi</i>	Wakil Ketua/Anggota	
27	<i>Sardi</i>	Anggota	
28	<i>N a n i S.</i>	id	

No. Urut	Nama	Djabatan Dalam PPP.	Keterangan
29	<i>I.H. Djaelani</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Guntur.
30	<i>Irwan Sjafie</i>	Wakil Ketua/Anggota	
31	<i>Toha Wiri</i>	Anggota	
32	<i>Subandi</i>	id	
III.			<i>Ketjamatan</i>
1	<i>Abd. Azis</i>	Ketua/Anggota	<i>Mp. Prapatan.</i>
2	<i>Abd. Salam</i>	Wakil Ketua/Anggota	Kelurahan
3	<i>Mhahad</i>	Anggota	Kuningan
4	<i>Djajani</i>	id	Barat.
5	<i>N.M. Matun</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Mp. Prapatan.
6	<i>M. Tumin</i>	Wakil Ketua/Anggota	
7	<i>E. Soetrisno</i>	Anggota	
8	<i>W a r a</i>	id	
9	<i>H. Moch. Napis</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Pela Mam- pang.
10	<i>M. Aseni</i>	Wakil Ketua/Anggota	
11	<i>Marno</i>	Anggota	
12	<i>Muchtar</i>	id	
13	<i>Moh. Tohir</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Tegal Parang.
14	<i>Abd. Somad</i>	Wakil Ketua/Anggota	
15	<i>Parnu</i>	Anggota	
16	<i>E b e n g</i>	id	
17	<i>H. Mchbub</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Bangka.
18	<i>A. Goffar</i>	Wakil Ketua/Anggota	
19	<i>Soepono</i>	Anggota	
20	<i>Tamsir</i>	id	
21	<i>Abd. Madjid</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Pantjoran.
22	<i>Murtado</i>	Wakil Ketua/Anggota	
23	<i>Sisman</i>	Anggota	
24	<i>Tamsir</i>	id	
25	<i>A. Aiem SY</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Durentiga.
26	<i>Asmawie</i>	Wakil Ketua/Anggota	
27	<i>Djakaria</i>	Anggota	
28	<i>Tarsan</i>	id	

No. Urut	Nama	Djabatan Dalam PPP.	Keterangan
29	<i>Mohd. Hasan</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Kalibata.
30	<i>Ajo Tarjono</i>	Wakil Ketua/Anggota	
31	<i>Amir Sulin</i>	Anggota	
32	<i>Mansjur</i>	id	
33	<i>Muhasjim</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Tjikoko.
34	<i>Misbah</i>	Wakil Ketua/Anggota	
35	<i>Bona L.</i>	Anggota	
36	<i>Jusuf N.</i>	id	
37	<i>Somadi Naserin</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Pangadegan.
38	<i>M. Husin Dulhasan</i>	Wakil Ketua/Anggota	
39	<i>Soewardi</i>	Anggota	
40	<i>E. Habri</i>	id	
41	<i>Muhasan</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Rawadjati.
42	<i>Abd. Wahid b. Aqid</i>	Wakil Ketua/Anggota	
43	<i>Soegiman</i>	Anggota	
44	<i>Iljas</i>	id	
IV.			<i>Ketjamatan</i>
1	<i>Hadji Radly</i>	Ketua/Anggota	<i>Ps. Minggu.</i>
2	<i>A.M. Naseh</i>	Wakil Ketua/Anggota	Kelurahan Pedjanten.
3	<i>Abd. Goni</i>	Anggota	
4	<i>Warsan</i>	id	
5	<i>Entong Saari</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Pasar Minggu
6	<i>Ashari</i>	Wakil Ketua/Anggota	
7	<i>Astari</i>	Anggota	
8	<i>A. Djaelani</i>	id	
9	<i>Mohamad Noer</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Tandjung Barat.
10	<i>M. Ali S.</i>	Wakil Ketua/Anggota	
11	<i>Legiman</i>	Anggota	
12	<i>M. Ali A.</i>	id	

No. Urut	Nama	Djabatan Dalam PPP.	Keterangan
13	<i>Hadji Muhamad</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Djatipadang.
14	<i>Mamat Jani</i>	Wakil Ketua/Anggota	
15	<i>A. Malik</i>	Anggota	
16	<i>M u m u h</i>	id	
17	<i>Hadji Asnawi</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Ragunan.
18	<i>Abdulhasan</i>	Wakil Ketua/Anggota	
19	<i>M.A. Lubis</i>	Anggota	
20	<i>A m a r</i>	id	
21	<i>E n d a</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Tjilandak.
22	<i>W a h j o</i>	Wakil Ketua/Anggota	
23	<i>Sugiri</i>	Anggota	
24	<i>T. A l l</i>	id	
25	<i>Muhamad Saaman</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Djakakarta.
26	<i>Misar A.L. Tonge</i>	Wakil Ketua/Anggota	
27	<i>O. Soetardjo</i>	Anggota	
28	<i>S a r a</i>	id	
29	<i>Musa bin Dul</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Lenteng Agung.
30	<i>Kaisin</i>	Wakil Ketua/Anggota	
31	<i>U h o</i>	Anggota	
32	<i>Herman R.</i>	id	
33	<i>Utud bin Saaman</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Serengseng Sawah.
34	<i>Hadji Dahlan</i>	Wakil Ketua/Anggota	
35	<i>Sahali</i>	Anggota	
36	<i>Ibrahim</i>	id	
37	<i>Endy Jamin</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Tjigandjar.
38	<i>Ratman Bondjing</i>	Wakil Ketua/Anggota	
39	<i>Engkon</i>	Anggota	
40	<i>U m a r</i>	id	
V. 1	<i>Asep Saefurridjal</i>	Ketua/Anggota	<i>Ketjamatan Kebj. Baru. Kelurahan Senajan.</i>
2	<i>Husin A. Rachman</i>	Wakil Ketua/Anggota	
3	<i>Wirza</i>	Anggota	
4	<i>Rochmani</i>	id	

No. Urut	Nama	Djabatan Dalam PPP.	Keterangan
5	<i>Malikien Moesa</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Rawa Barat.
6	<i>Tjuardi</i>	Wakil Ketua/Anggota	
7	<i>Mashar</i>	Anggota	
8	<i>Jusuf</i>	id	
9	<i>I. Sibromulisi</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Selong.
10	<i>Soffuan</i>	Wakil Ketua/Anggota	
11	<i>Djali</i>	Anggota	
12	<i>Sirad</i>	id	
13	<i>Bachruddin</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Gunung.
14	<i>E. Haris</i>	Wakil Ketua/Anggota	
15	<i>A z w a r</i>	Anggota	
16	<i>M a m a d</i>	id	
17	<i>H.M. Arief</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Kramat Pela.
18	<i>Hasan Tabrani</i>	Wakil Ketua/Anggota	
19	<i>Hartojo</i>	Anggota	
20	<i>Saaman</i>	id	
21	<i>Agus Abdillah</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Melawai.
22	<i>Sjahroni Muhammad</i>	Wakil Ketua/Anggota	
23	<i>Udju Ili Suparta</i>	Anggota	
24	<i>O.O. Hasbullah</i>	id	
25	<i>Abdillah Dul Baisan</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Petogogan.
26	<i>Achmad Madin</i>	Wakil Ketua/Anggota	
27	<i>E. Sutisna</i>	Anggota	
28	<i>Inang</i>	id	
29	<i>Maup H. Raisan</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Pulo.
30	<i>Abdul Karim H.M.</i>	Wakil Ketua/Anggota	
31	<i>Abd. Hamid</i>	Anggota	
32	<i>Sadju</i>	id	
33	<i>E. Rachmat</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Gandaria Utara.
34	<i>Mansjur</i>	Wakil Ketua/Anggota	
35	<i>G. Soeratman</i>	Anggota	
36	<i>S. O m o d</i>	id	

No. Urut	Nama	Djabatan Dalam PPP.	Keterangan
37	<i>Moch. A.R. Muttakin</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan
38	<i>Abd. Somad S.</i>	Wakil Ketua/Anggota	Tjipete
39	<i>T. Kusradi</i>	Anggota	Utara.
40	<i>A. Wasjim</i>	id	
VI.			<i>Ketjamatan</i>
1	<i>H. Muchtar Madinah</i>	Ketua/Anggota	<i>Kebj. Lama.</i>
2	<i>H. Hasjim</i>	Wakil Ketua/Anggota	Kelurahan
3	<i>H. Jasin</i>	Anggota	Grogol Utara.
4	<i>Sanusi</i>	id	
5	<i>H. Zawawi</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan
6	<i>M a w i</i>	Wakil Ketua/Anggota	Grogol
7	<i>Sumardja</i>	Anggota	Selatan.
8	<i>Abdillah</i>	id	
9	<i>H. Moh. Isa</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan
10	<i>Effendi</i>	Wakil Ketua/Anggota	Tjipulir.
11	<i>Daswar</i>	Anggota	
12	<i>Handang S.</i>	id	
13	<i>Mursjid</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan
14	<i>Nur Hakim</i>	Wakil Ketua/Anggota	Kebj. Lama.
15	<i>Sakum</i>	Anggota	
16	<i>Mundja</i>	id	
17	<i>Sanusi</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan
18	<i>Abd. Rasjid</i>	Wakil Ketua/Anggota	Pondok
19	<i>S a i r i</i>	Anggota	Pinang.
20	<i>Adjo Hasan</i>	id	
21	<i>Achmad</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan
22	<i>Achjat</i>	Wakil Ketua/Anggota	Gandaria
23	<i>A j a k</i>	Anggota	Selatan.
24	<i>Supandi</i>	id	
25	<i>Soe'en</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan
26	<i>Zakaria</i>	Wakil Ketua/Anggota	Tjipete
27	<i>A g u s</i>	Anggota	Selatan.
28	<i>Djufrihudin</i>	id	

No. Urut	Nama	Djabatan Dalam PPP.	Keterangan
29	<i>Rajim</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Tjilandak.
30	<i>Bahwanih</i>	Wakil Ketua/Anggota	
31	<i>Abd. Bungkar</i>	Anggota	
32	<i>Rasian</i>	id	
33	<i>H. Sjamdjah</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Lebak Bulus.
34	<i>H. Salam</i>	Wakil Ketua/Anggota	
35	<i>Ibrahim</i>	Anggota	
36	<i>Sambuaga</i>	id	
37	<i>A m a d</i>	Ketua/Anggota	Kelurahan Pondok Labuh.
38	<i>Zarkasih Aly</i>	Wakil Ketua/Anggota	
39	<i>Rojani</i>	Anggota	
40	<i>Ramelan</i>	id	

WALIKOTA/KETUA PANITIA PEMILIHAN KOTA
WILAJAH KOTA DJAKARTA SELATAN,

t.t.d.

(H.M.E. R A S M A)

**PEMBAGIAN TUGAS PEKERDJAAN DAN TANGGUNG DJAWAB
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

**SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
D. C. I. DJAKARTA**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 17 Djanuari 1970 No. 5/1970 jo. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta tanggal 14 April 1970 No. Aa.18/3/3/70, Sekretariat PPD DCI Djakarta dipimpin oleh seorang Sekretaris, terdiri dari 4 Biro jaitu :

- Biro Penjelenggaraan
- Biro Administrasi
- Biro Perbekalan & Perhubungan dan
- Biro Pengawasan.

Bidang tugas Sekretariat adalah mempersiapkan dan menjelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan kebidjaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua PPD-DCI Djakarta. Tugas-tugas Sekretariat adalah :

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnja,
- b. Memimpin kegiatan-kegiatan Sekretariat,
- c. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi Biro-biro yang ada didalam Sekretariat.

Sekretaris didalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab kepada Ketua P.P.D. D.C.I. Djakarta.

Untuk memberikan suatu gambaran mengenai tugas dan tanggung djawab dari masing-masing Biro yang ada didalam Sekretariat, serta untuk mengetahui sampai dimana djauhnya lingkungan tugas dan tanggung djawab yang dibebankan kepada para pegawai dari masing-masing Biro tersebut, maka perlu disusun suatu pembagian tugas pekerdjaan dan tanggung djawab Sekretariat PPD DCI Djakarta setjara djelas dan terperinci.

Perlu ditekankan disini, bahwa untuk mendjamin kesatuan usaha dan kegiatan dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka dalam merentjanakan, mempersiapkan dan menjelenggarakan kegiatan-kegiatan wadajib dipelihara kerdja sama yang serasi dan setjara otornatis antara pedjabat-pedjabat Sekretariat, dengan tidak terlampau terikat pada formalitas yang tidak perlu tanpa mengabaikan tertib administrasi. Djelaslah bahwa dengan adanya tugas pokok dari Sekretariat PPD DCI Djakarta, maka Biro Penjelenggaraan, Biro Administrasi, Biro Perbekalan & Perhubungan dan Biro Pengawasan haruslah bekerdja sama, sehingga terdjalin adanya suatu koordinasi yang baik.

Pembagian tugas pekerdjaan dan tanggung djawab Sekretariat PPD DCI Djakarta yang diuraikan didalam Bab I s/d Bab IV hanjalah merupakan penentuan pembidangan sadja untuk didjadikan pedoman bekerdja demi

**lantjarnja pekerdjaan, jang kesemuanja merupakan suatu kesatuan dan
mempunjai tugas bersama jaitu : Untuk mensukseskan Pemilihan Umum.**

Djakarta, 27 Djuni 1970.

BAB I

TUGAS DAN KEWADJIBAN BIRO PENJELENGGAAN

Tugas pokok Biro Penjelenggaraan adalah :

- Merentjanakan dan menjelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk mendjamin kelanjutan penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk D.P.R. dan D.P.R.D. dalam Wilayah D.C.I. Djakarta.

Biro Penjelenggaraan dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang mempunyai tugas :

1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya,
2. Memimpin kegiatan-kegiatan Biro Penjelenggaraan,
3. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada dalam Biro Penjelenggaraan.

Biro Penjelenggaraan membawahi Bagian-bagian yang terdiri dari :

- A. Bagian Penjelenggaraan
- B. Bagian Dokumentasi & Statistik
- C. Bagian Keamanan
- D. Bagian Hubungan Masyarakat.

A. Bagian Penjelenggaraan.

Bagian Penjelenggaraan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas :

1. Meneliti kembali dan mengolah data-data/bahan-bahan Pemilu yang masuk sebelum dikumpulkan, disusun/disistimatisasikan dan disimpan/dibukukan antara lain sebagai berikut :
 - Jumlah penduduk dan pemilih yang sudah terdaftar,
 - Daftar orang-orang yang tidak berhak memilih sebagai yang dimaksud dalam pasal 12 Undang-undang No. 15 tahun 1969 dan pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970.
2. Menjusun petunjuk-petunjuk lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebutuhannya.
3. Persiapan penyelenggaraan dan Santiadji untuk petugas Pemilu Kota/Ketjamatan.
4. Try out & Follow up.
5. Mengadakan checking-up dan memberi petunjuk-petunjuk kepada Panitia echelon bawahan untuk mengetahui persiapan-persiapan pelaksanaan Pemilu.
6. Mengetjek kesiagaan personil (perlengkapan, tugas-tugas dan lain-lainnya), untuk persiapan pendaftaran pemilih dan pemungutan suara.

7. Menjusun/mensistimatisasikan pendaftaran pemilih menurut umur dan kelamin dalam :
 - Kelurahan
 - Ketjamatan
 - Wilayah Kota dan
 - D.C.I. Djakarta.
8. Menjusun dan mensistimatisasikan Daftar Pentjalonan dan Tjalon D.P.R.D. Tingkat I.
9. Mengumpulkan dan menjusun data-data/bahan-bahan Kelompok Penjenggaran Pemungutan Suara (K.P.P.S.) menurut :
 - Kelurahan
 - Ketjamatan
 - Wilayah Kota dan
 - D.C.I. Djakarta.
10. Mengumpulkan dan menjusun daftar anggota/petugas P.P.P. dan P.P.S. serta K.P.P.S. menurut tingkat wilayah Kota.
11. Men-check peralatan dan perlengkapan untuk keperluan :
 - Pendaftaran Pemilih,
 - Pendaftaran Tjalon yang akan dipilih,
 - Pemungutan Suara,
 - Alat-alat komunikasi/Perhubungan,
 - Tempat-tempat yang vital perlu dilindungi/diamankan.
12. Meminta laporan berkala dari echelon bawahan tentang persiapan-persiapan Pemilihan Umum serta pelaksanaan setjara terperintji.
13. Sebelum Pemungutan Suara dilaksanakan, memeriksa/meneliti tempat-tempat Pemungutan Suara bersama Panitia Setempat (P.P.S.) dan K.P.P.S.
14. Menjusun petunjuk teknis pembuatan T.P.S. dan kelengkapannya.
15. Mengetjek persiapan semua T.P.S. (Tempat Pemungutan Suara), keuangan untuk melakukan pemungutan suara, sarana kerdja dan lain-lain sebagainya.
16. Pengetjekan tentang kesiagaan pemilih (penduduk) dan pemberitaan terachir serentak.
17. Pengetjekan keamanan sekitar Tempat Pemungutan Suara (T.P.S.).
18. Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro Penjenggaran atas segala aktivitas dan pengeluaran-pengeluaran/pembisajaan-pembisajaan dalam Bagian ini.

B. Bagian Dokumentasi & Statistik.

Bagian Dokumentasi & Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas :

1. Menabelkan (tabulation) daftar jumlah penduduk (W.N.I.) menurut Kelurahan, Kecamatan dan Wilayah Kota dan untuk seluruh D.C.I. Djakarta menurut kelamin.
2. Menabelkan (tabulation) daftar jumlah pemilih menurut kelamin, umur dan wilayah (Kelurahan dan Kecamatan, Kota dan D.C.I. Djakarta).
3. Menabelkan (tabulation) daftar orang-orang yang tidak berhak memilih menurut kelamin, umur dan wilayah Kota.
4. Menabelkan jumlah T.P.S. dan jumlah penduduk/pemilih per Wilayah (Kelurahan, Kecamatan, Kota dan D.C.I. Djakarta), cross-tabulasi.
5. Menjusun tabel-tabel lain yang diperlukan (jumlah petugas per Kecamatan dan lain-lain sebagainya).
6. Membuat grafik, chart, peta-peta yang berhubungan dengan data-data diatas dan diperlukan setiap saat oleh PPD DCI Sekretariat.
7. Menjinjkan data-data/bahan-bahan Pemilihan Umum setjara baik dan terjamin keamanannya.
8. Tidak diperbolehkan/dilarang memberikan kepada siapapun data-data yang ada pada Bagian terketjuali orang yang berwenang dan berhak.
9. Dilarang menjalin atau memperbanyak data-data/bahan-bahan Pemilihan Umum tanpa ada perintah dari atasannya.

C. Bagian Keamanan.

Bagian Keamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan dan merentjanakan technis kerdja/tugas keamanan setjara tepat dan tjepat serta bidjaksana dan rahasia dalam tindakan sebagai berikut :
 - Pengamanan Pendaftaran Pemilih,
 - Pengamanan tjalon yang turut memilih/Pemilu,
 - Pengamanan Kampanje,
 - Pengamanan Komunikasi/transportasi dan
 - Pengamanan tempat-tempat vital.
2. Menjusun petunjuk-petunjuk instruksi-instruksi dan lain sebagainya dalam rangka tindakan pengamanan.
3. Pengamanan pelaksana kampanje yang dilakukan oleh Parpol/Ormas/Golkar sesuai dengan petunjuk, ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

4. Menghubungi petugas keamanan yang telah ditetapkan/dibentuk serta mengadakan kerdja sama dengan keamanan lainnja setjara kompak dan tersusun.
5. Memerintji dalam bentuk program-program pelaksanaan atas policy Ketua Panitia dalam bidang keamanan Wilayah dan lingkungan dalam rangka Pemilu.
6. Dalam batas wewenang yang ada, mengambil tindakan dengan tjepat dan tepat dalam setiap kedjadian yang mengganggu/merusak kelantjaran persiapan pelaksanaan Pemilu, dengan koordinasi sebaik-baiknja dengan aparatur keamanan yang bersangkutan (Laksus Kopkamitbda, Komdak dll.).
7. Setiap anggota keamanan harus dapat menjesuaikan diri dengan situasi memilih, adat istiadat/kebiasaan umum yang berada dalam lingkungan tersebut.
8. Bagian Keamanan bertanggung djawab penuh untuk mentjiptakan keamanan setjara menjeluruh dalam Pemilu maupun sebelum Pemilu satu dan lain guna mendjamin konsentrasi pemikiran memilih atas penggunaan hak-hak demokrasinja setjara bertanggung djawab.

D. Bagian Hubungan Masyarakat (Humas).

Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunjai tugas :

1. Mengurus pengumuman-pengumuman keputusan dan atau kebidjaksanaan-kebidjaksanaan yang telah diambil atau ditetapkan oleh Ketua/Sekretaris P.P.D. D.C.I. Djakarta.
2. Mengurus segala sesuatu mengenai antara lain :
 - Mengumumkan/mempublisir Keputusan-keputusan Ketua/Sekretaris baik Pusat maupun Daerah Tk. I, sedjauh Keputusan-keputusan yang menjangkut kepentingan masyarakat dalam rangka persiapan/pelaksanaan Pemilihan Umum.
 - Memberikan penerangan seluas-luasnja setjara bertahap kepada masyarakat, tentang arti dan tudjuan Pemilihan Umum dalam Negara Demokrasi Pantjasila yang berdasarkan U.U.D. 1945, setjara menjeluruh sampai ke Rt.-2 dan RW.-2 dalam wilayah D.C.I. Djakarta.
 - Mendjelaskan persjaratan-persjaratan tertentu untuk yang berhak memilih dan dipilih serta lainnja sesuai dengan perundang-undangan Pemilu.
 - Penerangan tentang prosedur Pendaftaran Pemilih oleh Petugas-petugas Pemilu setempat, agar segala sesuatunja berdjalan setjara tertib/teratur.
 - Pemberitahuan/menghubungi Rumah-rumah Sakit/Mess-mess/Asra-

ma-asrama dan tempat penampungan lainnya guna memberi penjelasan tentang prosedur Pendaftaran Pemilih bagi orang-orang sakit dan tjjatid fisik.

- Bekerdja sama dengan Djapen D.C.I. Djakarta, T.V.-R.I., R.R.I., Laksus Pangkoptkamitbda untuk memperlantjar tugas-tugas Bagian Hubungan Masyarakat.
- Mengkoordinir dan mengadakan konperensi pers setjara periodik, guna penjebar-luasan pemberitaan-pemberitaan Pemilu jang perlu segera diketahui oleh Masyarakat.
- Untuk menjapai sasaran dan memudahkan penjebar luasan berita-berita Pemilu perlu ditjptakan kerdja sama jang sebaik-baiknja dengan :
 - Pers (Wartawan) - Mass Media Ibukota,
 - R.R.I. - T.V.-R.I. Pusat,
 - Para Pengusaha/O.P.S. Bioskop Ibukota.
- Dalam hubungan ini, untuk lebih memudahkan masyarakat menanggapi hal-hal jang perlu segera diketahui dalam menghadapi persiapan/pelaksanaan Pemilu, perlu pula diusahakan alat-alat penerangan/informasi seperti :
 - Press Release,
 - Penjebaran brossure-brossure,
 - Slide di Bioskop-bioskop,
 - Slide di T.V.-R.I.,
 - Papan-papan Reklame,
 - Spanduk-spanduk,
 - Film (Audio Visuil)
 - Dll. jang dirasa tepat dan perlu sesuai dengan kebutuhan.
- Mengadakan kontak-kontak langsung dengan Biro Penerangan/Humas L.P.U./P.P.I., guna mendapatkan bahan-bahan penerangan seperlu-nja, agar tertjpta informasi-informasi jang bentuknja uniform.
- Pengumuman seluas-luasanja melalui mass media jang ada atas tjalon-tjalon terpilih untuk para Anggota D.P.R.D. Tk. I.

BAB II

TUGAS DAN KEWADJIBAN BIRO ADMINISTRASI

Tugas Pokok Biro Administrasi adalah :

- a. Menjelenggarakan segala urusan surat-menjurat yang mendjadi tanggung djawab Sekretariat,
- b. Menjelenggarakan administrasi personil,
- c. Mentjatat dan memelihara barang-barang inventaris,
- d. Menjelenggarakan urusan dalam,
- e. Menjusun dan mengurus pembiajaan Panitia.

Biro Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Biro jang mempunyai tugas :

1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnja,
2. Memimpin kegiatan-kegiatan Biro Administrasi,
3. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian jang ada didalam Biro Administrasi.

Biro Administrasi membawahi Bagian-bagian jang terdiri dari :

- A. Bagian Tata Usaha,
- B. Bagian Urusan Dalam,
- C. Bagian Bendahara.

A. Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian jang mempunyai tugas :

1. Menerima surat-surat jang dialamatkan kepada Panitia dan mendistribusikannja kepada jang berkepentingan,
2. Menjelenggarakan segala urusan surat menjurat jang mendjadi tanggung djawab Sekretariat,
3. Menjusun dan mengurus pembiajaan Sekretariat,
4. Menjelenggarakan administrasi personil.

Ad. A.1. Menerima surat-surat dan mendistribusikannja.

- a. Surat masuk pertama-tama oleh agendaris ditjatat dalam Buku Agenda surat masuk. Dalam mentjatat di Buku Agenda ini harus diteliti tentang pokok surat itu dan diberi nomor surat masuk sesuai dengan code file jang telah ditentukan.
- b. Meneliti pokok-pokok surat dengan membagi menurut sifatnja: penting, segera atau rahasia.

Agendaris segera memberikan stempel penting, segera atau pun rahasia.

- c. Surat-surat yang bersifat penting dan rahasia segera diserahkan kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- d. Agendaris selalu harus merahasiakan segala surat-surat yang masuk ataupun keluar.
- e. Agendaris tidak berkewajiban merubah nomor surat tanpa seidzin Kepala Tata Usaha.
- f. Agendaris mengisi kolom-kolom stempel agenda sebagaimana yang telah diwajibkan dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Tata Usaha.
- g. Kepala Tata Usaha meneruskan surat itu kepada *Sekretaris* dan setelah diberi disposisi oleh Sekretaris selanjutnya surat itu didistribusikan kepada Biro-biro yang bersangkutan untuk diselesaikan.
- h. Apabila surat itu telah selesai diolah/didjawab oleh Kepala Biro maka segera dikembalikan kepada Kepala Tata Usaha untuk selanjutnya diserahkan ke Bagian Arsip untuk disimpan/ditik/roneo.

Ad. A.2. Menjelenggarakan segala urusan surat menjurat.

- a. Surat yang dikirim keluar sebagai surat jawaban atau surat Sekretariat sendiri yang dikirim keluar, pembuatan konsepnya adalah disentralisasi pada Sekretaris, maksudnya ialah agar konsep-konsep dari Kepala Biro itu disetujui terlebih dahulu oleh Sekretaris (diberi paraf) dan bilamana perlu diberikan perubahan-perubahan.
- b. Surat yang telah disetujui oleh Sekretaris dikembalikan kepada Biro yang bersangkutan.
- c. Kepala Biro meneruskan konsep yang telah jadi itu kepada Kepala Tata Usaha untuk dijadikan surat resmi.
- d. Kepala Tata Usaha memberikan tugas kepada Djuru Tik untuk membuat surat resmi dari konsep itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk. Khusus mengenai surat-surat *rahasia* maka harus diselesaikan sendiri oleh Kepala Tata Usaha.
- e. Selanjutnya Kepala Tata Usaha menjerahkan surat-surat itu kepada Kepala Biro yang bersangkutan untuk diparaf dan selanjutnya untuk dimintakan tanda tangan Sekretaris (surat-surat itu dimasukkan dalam map „Mohon Tanda Tangan“).
- f. Apabila surat itu telah ditanda tangani, maka Kepala Tata Usaha menjerahkan surat itu kepada Agendaris untuk diberi nomor dan dikirim keluar, sedangkan arsipnya (2 Helai) disimpan dengan petunjuk-petunjuk yang ada (1 helai diberikan pada Biro yang bersangkutan).

Chusus surat-surat rahasia diadakan nomor agenda tersendiri oleh Kepala Tata Usaha.

Untuk surat-surat yang akan ditanda-tangani Gubernur selaku Ketua Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta, surat itu diolah oleh Tata Usaha, kemudian diminta persetujuan/dicall kepada Kepala Biro, selanjutnya diparaf oleh Sekretaris baru disampaikan kepada Gubernur untuk ditanda tangani.

Tata Kerdja Kearsipan.

Untuk memudahkan tjara penjinpanan dan penemuan kembali apabila surat itu dibutuhkan, maka haruslah dilaksanakan code file sebagaimana petundjuk-petundjuk yang telah ditentukan.

Code file itu akan membantu memudahkan tjara pentjarian surat-surat yang diperlukan.

Berhubung penjinpanan arsip setjara sentralisasi pada Bagian Tata-Usaha, maka sangatlah penting penggunaan *Blanco disposisi*. Karena kemungkinan surat asli itu disimpan pada arsip Biro yang lain, maka blanco disposisi itu sebagai gantinya untuk disimpan diarsip Tata Usaha.

Ad. A.3. Menjusun dan mengurus pembiajaan Sekretariat.

Kepala Bagian Tata Usaha berkewajiban untuk menyusun dan mengurus pembiajaan Sekretariat. Untuk memperlantjar djalannya pkerdjaan kantor, maka Kepala Bagian Tata Usaha mengurus keperluan-keperluan kantor, misalnja : alat-alat tulis kantor (A.T.K.) pemeliharaan inventaris dan sebagainya.

Ad. A.4. Menjelenggarakan administrasi pesonil.

Kepala Bagian Tata Usaha menyusun Daftar Personil untuk pengelolaan dan mutasi/promosi setjara wadjar dalam lingkungan Sekretariat P.P.D. D.C.I. Djakarta, dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan Kepala-kepala Biro yang bersangkutan.

Disamping itu pengurusan personil sangatlah perlu untuk kepentingan yang bersangkutan sedjauh hal-hal yang menjangkut djaminan sosial para karyawan.

Kepala Bagian Tata-Usaha djuga menjelenggarakan administrasi personil untuk anggota dan Sekretariat Panitia-panitia Tingkat P.P.P., P.P.S., P.P. Kota, petugas sementara, serta security clearance untuk semua personil.

B. *Bagian Urusan Dalam.*

Kepala Bagian Urusan Dalam mempunyai tugas :

1. Menjatat dan memelihara barang-barang inventaris yang ada dan menjadi tanggung jawab Sekretariat.
2. Menjelenggarakan urusan rumah tangga Panitia.

Untuk menghindarkan kemungkinan hilangnya barang-barang inventaris, maka harus diadakan pembinaan inventaris dengan pentjataan setjara teliti, dan tekun dan pengawasan yang tjermat.

Sesuai dengan ketentuan dari Departemen Keuangan, maka terhadap barang-barang inventaris diadakan penggolongan atas dua bagian, jaitu masing-masing :

- Golongan A berlaku bagi mesin-mesin (tulis, hitung, kendaraan dan lain-lain).
- Golongan B berlaku bagi Meubilair.

Pengawasan hendaklah dilakukan minimal 3 bulan sekali dengan bekerdja sama dengan Biro Pengawasan, kemudian melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Sekretaris. Bagian Urusan Dalam membantu melajani kebutuhan Alat-alat Tulis Kantor (A.T.K.) dari Sekretariat, sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan.

C. *Bagian Bendahara.*

Kepala Bagian Bendahara mempunyai tugas :

1. Menerima, menjinpan dan mengeluarkan uang atau surat-surat berharga atas perintah Sekretaris.
2. Mengurus pembukuan.
3. Menjusun pertanggungan djawab atas pengeluaran uang yang telah ditentukan.
4. Menjinpan bukti-bukti kas.

Didalam mengeluarkan uang, Bendahara harus mempertimbangkan sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan. Untuk pembelian inventaris terutama kebutuhan A.T.K. yang diajukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha, harus diklassifikasikan kebutuhan-kebutuhan mana yang sekiranya mendesak dan perlu untuk segera disiapkan dan keperluan

lain jang masih bisa ditangguhkan. Dengan demikian dapatlah ditjegah terdjadinja pengeluaran-pengeluaran jang tidak perlu, untuk mendjamin agar pekerdjaan kantor berdjalan dengan lantjar.

BAB III

TUGAS DAN KEWADJIBAN BIRO PERBEKALAN & PERHUBUNGAN

Tugas Pokok Biro Perbekalan & Perhubungan adalah :

- a. Mengurus penerimaan barang-barang dari L.P.U.
- b. Mengadakan barang-barang yang diperlukan menurut jumlah, bentuk jenis dan kualitas yang direntjanakan oleh L.P.U.
- c. Mengangkut barang-barang tersebut ke P.P. Kota menurut waktu yang telah ditentukan dan menjerahkannya kepada yang bersangkutan.
- d. Mengurus hubungan Pos dan Telekomunikasi.

Biro Perbekalan & Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang mempunyai tugas :

1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya,
2. Memimpin kegiatan-kegiatan Biro Perbekalan & Perhubungan,
3. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian yang ada didalam Biro Perbekalan & Perhubungan,
4. Merentjanakan barang-barang mana yang diadakan setjara terpusat dan mana barang-barang yang diadakan setjara regional maupun lokal.

Biro Perbekalan & Perhubungan membawahi Bagian-bagian yang terdiri dari :

- A. Bagian Pengadaan,
- B. Bagian Alokasi,
- C. Bagian Angkutan & Perhubungan.

A. Bagian Pengadaan.

Bagian Pengadaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang mempunyai tugas :

- Merentjanakan pengadaan barang-barang yang pembuatannya diserahkan pada P.P.D. D.C.I. Djakarta dan menjerahkannya kepada Kepala Bagian Alokasi.
2. Melaksanakan penawaran/pembelian dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan petunjuk Lembaga Pemilihan Umum.
 3. Menjiapkan kelengkapan/sarana lainnya untuk kelantjaran penjelegaraan Pemilu.

B. Bagian Alokasi.

Bagian Alokasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang mempunyai tugas :

1. Mengurus penerimaan barang-barang dari L.P.U., dan Kepala Bagian Pengadaan Panitia.
2. Mengurus penjemputan dan pendistribusian barang-barang yang telah diterima kepada P.P. Kota menurut prosedur yang telah ditentukan.
3. Menjelenggarakan/menyelesaikan dengan baik administrasi barang-barang.
4. Mengawasi penjemputan & pendistribusian barang-barang.
5. Membuat laporan penerimaan & pengeluaran barang-barang kepada Kepala Biro Perbekalan & Perhubungan.
6. Membuat catatan dan memelihara barang-barang yang ada dan menjadi tanggung jawab Biro Perbekalan & perhubungan.

C. Bagian Angkutan & Perhubungan.

Bagian Angkutan & Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas :

1. Memimpin kegiatan-kegiatan Bagian Angkutan dan Perhubungan.
 2. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada didalam Bagian Angkutan & Perhubungan.
 3. Mengangkut barang-barang melalui darat, laut dan udara serta menjerahkannya kepada yang berkepentingan menurut prosedur dan waktu yang telah ditentukan.
 4. Mendjamin keselamatan barang-barang yang diangkut.
 5. Mengurus hubungan Pos dan Telekomunikasi dengan menggunakan alat-alat pos dan telekomunikasi yang ada setjara efektif dan efisien.
-

BAB IV

TUGAS DAN KEWADJIBAN BIRO PENGAWASAN

Tugas Pokok Biro Pengawasan adalah mengawasi :

- a. Persiapan dan penjelenggaraan Pemilihan Umum.
- b. Pembelian barang-barang dan pengeluaran lain.
- c. Penjimpnaan, pendistribusian dan penggunaan barang-barang jang menjadi tanggung djawab P.P.D. D.C.I. Djakarta.

Biro Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Biro jang mempunyai tugas :

1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnja.
2. Memimpin kegiatan-kegiatan Biro Pengawasan.
3. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan Bagian-bagian jang ada didalam Biro Pengawasan.

Biro Pengawasan membawahi Bagian-bagian jang terdiri dari :

- A. Bagian Pengawasan Tehnik, Pemilihan Umum,
- B. Bagian Pengawasan Keuangan,
- C. Bagian Pengawasan Barang.

A. Bagian Pengawasan Tehnik Pemilihan Umum.

Bagian Pengawasan Tehnik Pemilihan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian jang mempunyai tugas :

1. Mengawasi persiapan dan penjelenggaraan Pemilihan Umum, seperti :
 - kelantjaran dalam pendaftaran pemilih,
 - djumlah penempatan Kotak Suara,
 - kesiagaan personil,
 - pentjalonan jang memenuhi sjarat.Untuk kelantjaran, keluwesan serta terdjaminnja penjelenggaraan, mengawasi :
 - gangguan-gangguan karena kurang baiknja administrasi,
 - gangguan-gangguan karena soal-soal exteren baik jang disengadja/tidak disengadja.
 - gangguan-gangguan disekitar T.P.S.
2. Melaporkan hasil pengawasannja dan menjarankan tindakan-tindakan jang perlu diambil kepada Sekretaris melalui djendjang jabatan untuk kemudian disampaikan atau disarankan kepada Ketua untuk diambil tindakan-tindakan perbaikan.

3. Men-check pembagian Undang-undang, Peraturan-peraturan Pemerintah dan Instruksi-instruksi ke echelon-echelon bawahan.
4. Men-check persiapan pengadaan alat-alat/sarana-sarana Pemilu di echelon-echelon bawahan.
5. Men-check inventarisasi dan pengumpulan data-data pembentukan Panitia-panitia echelon bawahan.
6. Men-check pembentukan P.P. Kota, P.P.S. dan P.P.P. diwilajah D.C.I. Djakarta.
7. Mengawasi pengumuman dan penjampaian ke/penerimaan oleh echelon-echelon bawahan mengenai penjusunan/pengesahan Peraturan Pemerintah dan Instruksi.
8. Memeriksa penjampaian kepada/korespondensi Sekretariat P.P.D. DCI Djakarta hal : Daftar Nama vide pasal 12 ayat 1 Undang-undang No. 15 tahun 1969 dan sebagainya.
9. Mengawasi pelaksanaan penjelenggaraan penerangan tahap ke II jaitu mengenai pengamanan Pantja Tertib dan Tertib Pemerintahan.

B. Bagian Pengawasan Keuangan.

Bagian Pengawasan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian jang mempunyai tugas :

1. Mengawasi pembelian barang-barang dan pengeluaran-pengeluaran lainnja jang menjadi tanggung djawab Panitia, seperti :
 - rentjana (penggunaan uang) jang „corresponderend” dengan ketentuan dan petundjuk Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta.
 - pengadaan uang tepat pada waktunja,
 - pengeluaran-pengeluaran berdasarkan Surat Edaran L.P.U. tanggal 19 Pebruari 1970 No. 1/14/1970 untuk tingkat PPD I, PPD II., P.P.S. dan sebagainya.
2. Melaporkan hasil pengawasannja dan menjarankan tindakan-tindakan jang perlu diambil kepada Sekretaris melalui djendjang djabatan untuk kemudian disampaikan kepada Ketua untuk diambil tindakan-tindakan perbaikan.
3. Men-check pemasukan/pengeluaran/korespondensi hal keuangan.

C. Bagian Pengawasan Barang.

Bagian Pengawasan Barang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian jang mempunyai tugas :

1. Mengawasi penjimpanan, pendistribusian dan penggunaan barang-barang yang menjadi tanggung jawab Panitia, seperti :
 - kelengkapan dan pelaksanaan sarana, kartu pemilih, kotak surat suara, formulir pendaftaran pemilih, kelengkapan lainnya yang diterima dari P.P.I.
 - mengadakan pengecekan barang-barang sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk itu oleh Bendaharawan.
 2. Melaporkan hasil pengawasannya dan menjarankan tindakan-tindakan yang perlu diambil kepada Sekretaris melalui jajaran jabatan untuk kemudian disampaikan kepada Ketua untuk diambil tindakan-tindakan perbaikan.
 3. Men-check penjimpanan kelengkapan formulir-formulir pendaftaran pemilihan dan sebagainya.
 4. Memeriksa kelengkapan-kelengkapan lainnya yang diterima dari Panitia Pemilihan Indonesia (P.P.I.).
-

BAB V.

TATA TERTIB HUBUNGAN KERDJA ANTAR BIRO

1. Pembagian tugas pekerjaan dan tanggung jawab antar Biro itu hanyalah merupakan penentuan pembidangan, yang dalam pelaksanaannya harus dikordinir dengan erat untuk mensukseskan Pemilihan Umum. Demikian pula halnya dengan pembagian tugas pekerjaan dan tanggung jawab antar Bagian-bagian didalam masing-masing Biro yang ada didalam Sekretariat.
2. Harus ada kesadaran dari masing-masing Biro, bahwa Biro-biro itu merupakan satu kesatuan yang harus dapat bekerja sama, sebab antara Biro-biro terdapat hubungan yang saling kait-mengkait didalam menjalankan tugas pekerjaannya. Demikian pula halnya, bahwa tiap-tiap Bagian yang ada didalam lingkungan masing-masing Biro merupakan satu kesatuan tugas yang tak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.
3. Tiap-tiap Biro harus melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Demikian pula tiap-tiap Bagian didalam lingkungan masing-masing Biro harus melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
4. Kepala-kepala Biro didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala-kepala Bagian yang ada didalam lingkungan masing-masing Biro didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Biro masing-masing.
5. Persoalan-persoalan/kesulitan-kesulitan yang timbul hendaklah diselesaikan setjara musjawarah dengan semangat collegial.

Djakarta, 27 Djuni 1970.

PANITIA PEMILIHAN DAERAH D.C.I. DJAKARTA

Sekretaris,

ttd.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

TUGAS DAN KEWADJIBAN TJAMAT DALAM RANGKA PENJELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.

1. Tugas setjara umum.

Apabila Saudara-saudara mempelajari Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970 lebih mendalam, maka Saudara-saudara akan berkesimpulan bahwa titik-berat daripada kegiatan-kegiatan fisik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum jang akan datang itu terletak ditingkat Ketjamatan, atau dengan kata-kata lain tanggung djawab daripada kegiatan-kegiatan tersebut terletak diatas pundak Saudara-saudara.

Setjara umum tugas dan kewadjiban Tjamat dalam rangka penjelenggaraan Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

- a. mempersiapkan para petugas untuk mengikuti coaching jang diselenggarakan di Ibukota Kabupaten/Kotamadya;
- b. menjelenggarakan coaching di Ibukota Ketjamatan bagi Panitia Pendaftaran Pemilih;
- c. membantuk Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara;
- d. menjelenggarakan coaching di Ibukota Ketjamatan bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (K.P.P.S.);
- e. mengadakan pengawasan terhadap tugas-tugas Panitia Pendaftaran Pemilih;
- f. Panitia Pemungutan Suara mengesahkan Daftar Pemilih Sementara mendjadi Daftar Pemilih;
- g. mengirimkan Daftar Pemilih kepada Panitia Pendaftaran Pemilih jang bersangkutan.
- h. mengirimkan Daftar djumlah pemilih kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II;
- i. mengadakan pengawasan terhadap tugas-tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, baik sebelum, sedang dan sesudah Pemungutan Suara;
- j. mengadakan rapat penghitungan suara dan mengirimkan hasil serta berita atjaranja ke Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.

2. Persiapan-persiapan jang perlu dilakukan oleh Tjamat.

a. *Persiapan mental* .

- (1) Dalam menghadapi Pemilihan Umum jang akan datang perlu

ditempa kesiapan mental ideologis masyarakat, demikian pula tiap komponen bahkan terutama tiap petugas dari perangkat PEMILU di Ketjamatan sampai kedesa-desa, sehingga tidak ada keragu-raguan lagi terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum yang akan datang.

- (2) Perlu diarahkan kepada satu sasaran, yakni dengan melaksanakan Pemilihan Umum berarti kita telah mulai belajar disiplin terhadap pelaksanaan daripada salah satu sendi demokrasi.
- (3) Tujuan harus jelas dan tegas, bahwa dengan melaksanakan Pemilihan Umum tersebut berarti bertujuan menjelamatkan dan memenangkan Pantja Sila serta mempertahankan Undang-undang Dasar 1945.

b. *Persiapan fisik dan materiil :*

- (1) Mengadakan peninjauan setjara menjeluruh dan umum segala aspek diseluruh wilayah Ketjamatan dalam rangka meratakan jalan bagi penediaan "requirement" atau kebutuhan-kebutuhan persiapan pelaksanaan PEMILU yang akan datang.
- (2) Perlu dipelajari dengan teliti jadwal pelaksanaan operasional PEMILU yang telah ada yang telah disiapkan oleh perangkat PEMILU tingkat atasan dalam rangka persiapan fisik dan materiil tersebut.
- (3) Perentjaan dan penentuan aparat yang akan ditugaskan dalam rangka pemilihan umum hendaknja dilakukan setjara seksama, kwalitatif maupun kwantitatif.

Sekali lagi saja ulangi, bahwa kedudukan seorang Tjamat dan Kepala Desa adalah sangat penting, baik dalam tahap *persiapan* maupun *selama* dan *sesudah* pemungutan suara.

3. Penentuan prioritas kegiatan-kegiatan.

Untuk menentukan prioritas kegiatan bagi para Tjamat dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum yang akan datang, dalam *hal apa, oleh siapa, bilamana, dan dimana*, pada dasarnya telah saja uraikan tadi. Namun demikian kegiatan ini akan saja jelaskan setjara lebih terperinci sebagai berikut :

a. *Pembentukan Aparatur-aparatur Pemilihan Umum Tingkat Ketjamatan dan Desa.*

- (1) Segera setelah Saudara Tjamat dilantik selaku Ketua Panitia

Pemungutan Suara dalam bulan Maret 1970, hendaknja sudah mengadakan konsultasi dengan pihak instansi-instansi keamanan dan parpol/golkar dalam rangka persiapan penjurusan Anggota Panitia Suara.

- (2) Mengusulkan pengangkatan nama-nama tjalon Wakil Ketua, Sekretaris beserta Anggota Panitia kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah.
- (3) Melantik Wakil Ketua, Sekretaris beserta Anggota Panitia atas dasar delegasi wewenang dari Bupati/Walikota Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.
- (4) Sebelum tanggal 31 Mei 1970 telah mengusulkan nama-nama tjalon Wakil Ketua beserta anggota Panitia Pendaftaran Pemilih kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.
- (5) Mengangkat Sekretaris Panitia Pendaftaran Pemilih atas nama Bupati/Walikota Kepala Daerah.

b. *Santiadji (coaching).*

- (1) Sebelum tanggal 20 Mei 1970 telah mempersiapkan petugas-petugas jang akan mengikuti santiadji di Ibukota Kabupaten/Kotamadya.
- (2) Sebelum tanggal 25 April 1970 telah melakukan persiapan-persiapan guna melaksanakan santiadji di Ibukota Ketjamatan bagi petugas-petugas Panitia Pendaftaran Pemilih.
- (3) Paling lambat tanggal 25 Mei 1970 santiadji di Ibukota Ketjamatan sudah dapat diselenggarakan.

c. *Penjurusan Daftar W.N.I. jang tidak berhak memilih.*

- (1) Tjamat jang telah menerima daftar W.N.I. jang tidak berhak memilih dari *Kepala Desa* meneruskan daftar tersebut, kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah.
- (2) Kemudian paling lambat pada tanggal 5 Djuni 1970 Tjamat selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara menerima salinan daftar W.N.I. jang tidak berhak memilih dari *Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II* (jang menerimanja dari Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I) dan kemudian meneruskannja kepada Panitia Pendaftaran Pemilih.
Salinan daftar W.N.I. ini sudah harus diterima oleh Panitia Pendaftaran Pemilih pada tanggal 15 Djuni 1970.

d. *Pendaftaran Pemilih/Penduduk.*

- (1) Para Tjamat selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara memberikan petunjuk serta mengawasi pelaksanaan pendaftaran pemilih yang akan dimulai pada tanggal 5 Djuli 1970.
- (2) Paling lambat pada tanggal 5 Agustus 1970 para Tjamat/Ketua Panitia Pemungutan Suara telah menerima Daftar Pemilih Sementara.
- (3) Antara tanggal 6 Agustus 1970 s/d 5 September 1970 memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melihat sendiri Daftar Pemilih Sementara, serta dapat mengajukan usul-usul perubahan.
- (4) Menerima usul-usul perubahan tersebut dan musyawarahkan serta memutuskannya bersama anggota-anggota lainnya dari Panitia Pemungutan Suara.
- (5) Tanggal 6 Agustus 1970 telah menerima pemberitahuan jumlah penduduk W.N.I. dari Panitia Pendaftaran Pemilih.
- (6) Tanggal 21 Agustus 1970 telah memberitahukan jumlah penduduk W.N.I. tersebut kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.
- (7) Paling lambat tanggal 20 September 1970 mengesahkan Daftar Pemilih Sementara menjadi Daftar Pemilih.
- (8) Tanggal 21 September 1970 mengirimkan daftar Pemilih yang bersangkutan.
- (9) Paling lambat tanggal 20 Oktober 1970 telah mengirimkan Daftar Pemilih, termasuk Daftar Pemilih Tambahan (kalau ada) kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.

e. *Pentjalonan.*

Sesudah tanggal 18 Mei 1971 telah menerima Daftar Tjalon Tetap untuk DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II dari Panitia Pemilihan sebanyak yang diperlukan.

f. *Pemungutan Suara.*

- (1) Antara tanggal 1 Mei 1971 s/d 3 Mei 1971 telah membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang anggota dan Ketuanya ditunjuk oleh Tjamat/Ketua Panitia Pemungutan Suara.

Bagi Petugas KPPS ini diadakan santiadji ditempat kedudukan Panitia Pemungutan Suara/Ibukota Ketjamatan.

- (2) Tanggal 5 *Djuli* 1971 menjelenggarakan Pemungutan Suara untuk menjusun Anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II diseluruh Indonesia.
 - (3) Tanggal 6 *Djuli* 1971 telah menerima dari Ketua Kelompok Penjelenggaraan Pemungutn Suara kotak-kotak surat suara jang berisi surat suara dan berita atjara.
 - (4) Tanggal 13 Agustus 1971 mengadakan rapat Penghitungan Suara dan membuat Berita atjara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan suara serta menjampaikannja kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.
-

PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
DJL. IMAM BONDJOL 13 TELP. 53418
DJAKARTA.

NOTA – DINAS

No. : 588/III/2/1970.

KEPADA : PARA WALIKOTA/KETUA P.P. KOTA
PARA TJAMAT/KETUA PPS.
DIWILAJAH DCI DJAKARTA.

DARI : SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

PERIHAL : PETUNDJUK-PETUNDJUK TEHNIS DIBIDANG
ADMINISTRASI.

Sebagai salah satu tindak landjut dari hasil pertemuan/rapat para Sekretaris PP. Kota wilayah DCI Djakarta, pada tanggal 3 Djuni 1970, maka perlu diberikan petundjuk-petundjuk technis dibidang administratif kepada echelon-echelon dibawah, demi tertjapainja kelantjaran dan keseragaman dalam pekerdjaan.

A. Pembuatan Laporan.

Dalam membuat laporan yang bersifat umum (bulanan/triwulan) hendaknja diperhatikan hal-hal seperti berikut :

Pendahuluan :

- berisi hal-hal yang bersifat umum dan hal-hal yang perlu mendapat perhatian,
- uraian setjara singkat serta resume keseluruhan isi laporan.

I. BIRO PENJELENGGARA :

- berisi kegiatan-kegiatan yang menjangkut Biro Penjelenggara yang meliputi kegiatan-kegiatan Bagian-bagian penjelenggara, Documentasi & Statistik, Keamanan dan Hubungan Masyarakat.

- uraian setjara detail,
- dilengkapi dengan data-data jang diperlukan.

BIRO ADMINISTRASI :

- berisi kegiatan-kegiatan jang menjangkut Biro Administrasi, jang meliputi kegiatan-kegiatan Bagian-bagian Tata-Usaha, Urusan Dalam dan Keuangan.
- uraian setjara detail,
- dilengkapi dengan data-data jang diperlukan.

BIRO PERBEKALAN DAN PERHUBUNGAN :

- berisi kegiatan-kegiatan jang menjangkut Biro Perbekalan dan Perhubungan, jang meliputi kegiatan-kegiatan Bagian-bagian Pengadaan, Alokasi, Angkutan dan Perhubungan.
- uraian setjara detail,
- dilengkapi dengan data-data jang diperlukan.

BIRO PENGAWASAN :

- berisi kegiatan-kegiatan jang menjangkut Biro Pengawasan, jang meliputi kegiatan-kegiatan Bagian-bagian Pengawasan Technis Pemilu, Pengawasan Keuangan dan Pengadaan Barang.
- uraian setjara detail,
- dilengkapi dengan data-data jang diperlukan.

II. KESIMPULAN/SARAN.

- memuat hal-hal sebagai kesimpulan dari apa-apa jang telah dilaporkan setjara singkat sadja.
- memuat hal-hal sebagai saran-saran kepada atasan.

B. Standard bentuk surat.

Semua surat-surat jang bersifat kedinasan dibuat dalam bentuk kertas berukuran folio. Tidak dibenarkan pembuatan surat kedinasan dalam bentuk memo.

Selanjutnja mengenai kop surat, untuk surat-surat jang bersifat kedinasan ditulis ditengah-tengah (tjontoh kop surat PPD DCI Djakarta), atau dengan meletakkan/menulis kop surat disamping atas sebelah kiri.

C. Pemberian nomor surat.

Dalam pemberian nomor pada surat-surat perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Biro per Biro dengan nomor unit.
2. Untuk tingkat PPK dengan nomor code IV, PPS dengan nomor code V, dan PPP dengan nomor code VI.
3. Singkatan dari wilayah, PPS = KT. PPP = KL.
4. Tahun pembuatan surat.

Tjontoh :

1. Surat kesatu dari Biro Penjelenggara PPK Djakarta Pusat No. 1/IV/1/DP/1970.
2. PPS, hanya menggunakan code wilayah sadja, tidak menggunakan nomor unit, misal dari bagian pelaksanaan PPS Djatinegara No. 10/V/KT/1970.
3. PPP, menggunakan code wilayah sadja misal No. 8/VI/KL/1970.

D. Arsip.

Untuk penertiban arsip maka sebaiknya penjaluran arsip diatur setjara sentral di *Bagian Tata Usaha* mengingat ditingkat PPK, PPS dan PPP tidak begitu banyak surat-surat dan akan lebih memudahkan dalam hal mentjarinja.

Selanjutnja surat jang masuk setelah dipeladjari persoalannja agar disimpan dalam file jang terpisah-pisah masing-masing dalam map-map disusun sesuai dengan asal surat tersebut. Demikian djuga dengan surat keluar agar arsipnja disusun setjara terpisah/dimap tersendiri sesuai dengan peruntukannja.

E. Penanda tangan surat-surat.

Dalam usaha ketertiban dalam hal surat menjurat jang bersifat kedinasan hendaknja diperhatikan bahwa penanda tangan surat-surat keluar untuk tingkat PPK jang berhak adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris. Untuk tingkat PPS adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris. Untuk tingkat PPP ialah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris. Surat jang bersifat routine tjukup ditanda tangani oleh Sekretaris. Anggota-anggota Panitia Pemilihan Kota, PPS dan PPP terketjuali Ketua dan Wakil Ketua tidak dibenarkan menanda tangani surat jang bersifat kedinasan.

Demikian agar hal-hal tersebut diatas dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Djakarta, 8 Djuni 1970
**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH KHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA**

tjap/ttd,

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

Tembusan :

1. Sekda,
 2. Direktorat I/Pemerintahan,
 3. Alas.
-

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
No. 74/LPU/TAHUN 1970.
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PENELITI DAERAH
D.C.I. DJAKARTA.**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN
UMUM.**

Menimbang :

- a. bahwa untuk mengadakan penelitian mengenai sjarat-sjarat dan ketentuan keanggotaan terhadap tjalon-tjalon anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat I, perlu segera diangkat anggota-anggota Panitia Peneliti Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ajat (1) huruf b Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 49/LPU/Tahun 1970 ;
- b. bahwa pedjabat-pedjabat jang namanja tertjantum dalam ruang 2 daftar lampiran Keputusan ini dianggap tjakap dan memenuhi sjarat, untuk disamping tugas djabatannja sehari-hari, diangkat dalam kedudukan jang tertjantum dalam ruang 4 daftar lampiran keputusan tersebut.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 15 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2914);
2. Undang-undang No. 16 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2915);
3. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 No. 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2919);

4. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 No. 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2920);
5. Keputusan Presiden No. 39 tahun 1970;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 49/LPU/Tahun 1970.

Memperhatikan :

Usul Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta sebagaimana disampaikan dengan suratnya tanggal 24 Oktober 1970 No. 932/III/2/1970.

MEMUTUSKAN

PERTAMA :

Mengangkat pedjabat-pedjabat yang namanja tertjantung pada ruang 2 daftar Lampiran Keputusan ini, untuk disamping tugas djabatannja sehari-hari masing-masing dalam kedudukan yang tertjantung dalam ruang 4 daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik mereka yang tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini, sebagai anggota Panitia Peneliti Daerah D.C.I. Djakarta.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinja, djika dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Djakarta

Pada tanggal : 31 Oktober 1970.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

t.t.d.

AMIRMACHMUD.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. **Presiden Republik Indonesia di Djakarta.**
2. **Pimpinan M.P.R.S. di Djakarta,**
3. **Pimpinan D.P.R. - G.R. di Djakarta,**
4. **Pimpinan D.P.A. di Djakarta,**
5. **Ketua Badan Pengawas Keuangan di Bogor,**
6. **Ketua Mahkamah Agung di Djakarta,**
7. **Para Menteri Kabinet Pembangunan di Djakarta,**
8. **Djaksa Agung di Djakarta,**
9. **MUSPIDA D . C. I. Djakarta, di Djakarta,**
10. **Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta di Djakarta.**

**DAFTAR Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua
Lembaga Pemilihan Umum,
Nomor : 74/LPU/Tahun 1970.**

No.	N a m a	Djabatan	Diangkat pada Panitia Peneliti Daerah DCI Djakarta.
1	2	3	4
1.	Santosa Wiwoho S.H.	Sena Wira Djaksa Nrp. 665274 pa - da Kedjaksanaan Tinggi DCI Dja - karta.	Anggota merangkap Ketua
2.	Soetjipto Wiro- sardjono M.Sc.	Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta.	Anggota merangkap Sekretaris
3.	Major Inf. K. Simbolon.	Karo Binkar SU - 6 DAM V/DJAJA.	Anggota
4.	A.K.P. Soetris- no.	Staf Kasi Intel Komdak VII Djaja.	Anggota
5.	Djumadjitin SH.	Pd. Sekda D.C.I. Djakarta.	Anggota
6.	Drs. F.H. Hutasoit.	Kepala Direktorat II DCI Djakarta.	Anggota

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 31 Oktober 1970.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

t.t.d.

AMIRMACHMUD.

PANITIA PENELITIAN DAERAH TINGKAT I D.C.I. DJAKARTA

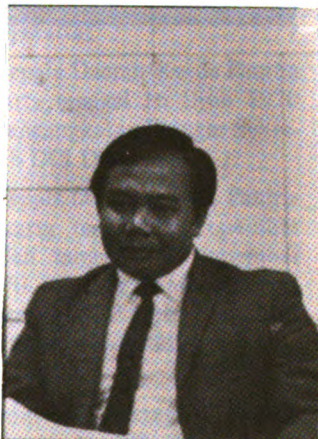


1. SANTOSA WIWOHO S.H.

Unsur dari Kedjaksaan Tinggi D.C.I.
Djakarta/Ketua merangkap Anggota
Panitia Penelitian Daerah D.C.I. Djakarta.

2. SOETJIPTO WIROSARDJONO, M.Sc.

Kepala Kantor Sensus & Statistik
D.C.I. Djakarta.
Sekretaris merangkap Anggota
Panitia Penelitian Daerah D.C.I. Djakarta.



3. K. SIMBOLON

Letkol. Inf. T.N.I./A.D.

Unsur Kodam V/Djaya/Laksus Kopkam-
tibda Djaya.
Anggota Panitia Penelitian Daerah D.C.I.
Djakarta.



4. DJUMADJITIN S.H.

**Sekretaris Daerah D.C.I. Djakarta/
Anggota Panitia Peneliti Daerah
D.C.I. Djakarta.**

5. Drs. F.H. HUTASOIT

**Kepala Direktorat II/Kamtib.
D.C.I. Djakarta/Anggota Panitia
Peneliti Daerah D.C.I. Djakarta.**



**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA
PANITIA PEMILIHAN DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

Nomor : 0086/III/2/1971.

tentang

**PENGGANTIAN PETUGAS SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA PEMILIHAN
DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA;**

- Membatja** Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia
Pemilihan Daerah DCI Djakarta tanggal 14 April 1970 No.
Aa.18/3/3/70 tentang Pembentukan Kembali Sekretariat
Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta;
- Membatja kembali** : 1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia
Pemilihan Daerah DCI Djakarta tanggal 16 Djuli 1970
No. 645/III/2/1970 tentang Pengangkatan Petugas Sekre-
tariat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia
Pemilihan Daerah DCI Djakarta tanggal 5 Nopember
1970 No. 960/III/2/1970 dan tanggal 18 Nopember
1970 No. 990/991/III/2/1970, tentang Pemberhentian
beberapa orang petugas Sekretariat Panitia Pemilihan
Daerah DCI Djakarta atas permohonan sendiri dari jang
bersangkutan;
3. Nota Dinas Kepala Biro Administrasi Sekretariat Panitia
Pemilihan Daerah DCI Djakarta tanggal 20 Djanuari
1971 tentang Penambahan tenaga pada Sekretariat Pani-
tia Pemilihan Daerah DCI Djakarta jang ternjata lowong
pada formasi Kepala Bagian Biro Pengawasan;
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan Sekre-
tariat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta jang
mendesak perlu mengangkat petugas-petugas jang akan
membantu kegiatan-kegiatan pada Sekretariat Panitia
Pemilihan Daerah DCI Djakarta;
2. Bahwa jang tersebut nama-namanja dalam daftar Lam-
piran Surat Keputusan ini dianggap tjakap dan mempu-

njai pengalaman untuk melaksanakan tugas jang dibebankan padanja ;

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 15 tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
3. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1969 jo. Undang-undang No. 5 tahun 1969;
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1970 jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1970;
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 108 tahun 1970;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 1/14/1970;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Mengangkat nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ruang (2), jabatan ruang (3), terhitung mulai tanggal ruang (5), diangkat sebagai pegawai Organik ruang (4) diperbantukan pada Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta.
II. Gadjihonorarium dan uang lembur jang berkepentingan dibebankan pada mata Anggaran 9A.3.1.250.
III. Hal-hal jang belum diatur/apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta,
Pada tanggal : 1 Pebruari 1970.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH D.C.I. DJAKARTA**

A.n.b.

(A. WIRIADINATA)

**Laksamana Muda Udara
WAKIL KEPALA DAERAH**

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini
disampaikan kepada

- Jth.:
1. Menteri Dalam Negeri/Ketua L.P.U.,
 2. Para Wakil Kepala Daerah,
 3. Para Wakil Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta,
 4. Para Anggota Panitia Pemilihan Daerah Daerah
Chusus Ibukota Djakarta,
 5. Para Anggota Muspida D.C.I. Djakarta,
 6. Para Anggota BPH D.C.I. Djakarta,
 7. Sekda/Assisten Sekda DCI Djakarta.
 8. Ketua Harian BP-BPP DCI Djakarta,
 9. Para Kepala Direktorat/Biro/Inspektorat
dalam lingkungan DCI Djakarta,
 10. Para Walikota,
 11. Para Kepala Dinas/Kantor/Djawatan dalam
lingkungan DCI Djakarta,
 12. Jang bersangkutan,
 13. Para Tjamat,
 14. Para Lurah,
 15. Arsip.
-

DAFTAR : Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tanggal 1 Pebruari 1971 Nomor 0086/III/2/1971.

No. Urut	Nama	Djabatan	Tenaga/Pegawai Terhitung		Keterangan
			Organik/NonOrg.	Mulai tanggal	
1	2	3	4	5	6
1.	H. Zega Letnan Udara Satu.	Kepala Bagian Pengawas Teknik Pemiluh Biro Pengawas Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta.	Pegawai Organik	2 Djanuari 1971	
2.	Achmad Letnan Udara Satu	Kepala Bagian Pengawas Barang Pemiluh Biro Pengawas an Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta.	s.d.a.	2 Djanuari 1971	
3.	Nunung Nurdjana BA.	Staf Biro Pengawas Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta.	Tenaga Non Organik	2 Djanuari 1971	
4.	R. Suhardja	Djuru Tik Biro Administrasi Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta.	s.d.a.	2 Djanuari 1971	

Djakarta, 1 Pebruari 1971.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH DCI DJAKARTA**

t.t.d.

WIRIADINATA

**Laksamana Muda Udara
WAKIL KEPALA DAERAH**

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

Nomor : 0085/III/2/1971

tentang

**PENUNDJUKAN LURAH, WAKIL LURAH, BABINSA DAN BIMAS
DIKELURAHAN MASING-MASING WILAJAH DCI DJAKARTA
SELAKU KOORDINATOR K.P.P.S.**

**SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA**

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA
PANITIA PEMILIHAN DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Nomor : 0085/III/2/ 1971

tentang

**PENUNDJUKAN LURAH, WAKIL LURAH, BABINSA DAN BIMAS
DIKELURAHAN MASING MASING DALAM WILAJAH DCI DJAKARTA
SELAKU KOORDINATOR K.P.P.S.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA:**

- Membatja kembali** : 1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 21 Djuli 1970 No. 42/LPU/1970, perihal djangka waktu pelaksanaan tugas Panitia Pendaftaran Pemilihan dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara ;
2. Nota Dinas Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta tanggal 26 Nopember 1970 No. 1012/III/1/1970 perihal Penundjukan para Lurah, Wakil Lurah, Babinsa, dan Bimas sebagai Koordinator K.P.P.S. dan T.P.S. ;
- Menimbang** : 1. Bahwa demi mendjamin kelantjaran penyelenggaraan pemungutan suara, dan melihat pula kondisi wilayah DCI Djakarta, dimana umumnja suatu P.P.S. meliputi rata2 300 s/d 400 T.P.S. ;
2. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, perlu mengangkat Lurah selaku Pembantu Tjamat/Ketua PPS dengan tugas mengkoordinir K.P.P.S./T.P.S. di Wilayah Kelurahan masing-masing ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 15 tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 ;

2. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969 ;
3. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1969 jo. Undang-undang No. 5 tahun 1969 ;
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1970;
5. Peraturan Daerah tentang Pembagian Wilayah Dalam Rangka Dekonsentrasi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Djakarta (L.D. tahun 1966 No. 4) ;.
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 12 Agustus 1966 No. 1b,3/1/1/1966 tentang Pembentukan Kota Administratif, Ketjamatan, Kelurahan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta yang telah dirubah terachir dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 1 Maret 1969 jo. Surat Keputusan Gubernur KDH DCI Djakarta tanggal 1 April 1970 No. Aa.1/1/2/1970 ;

M E M U T U S K A N ;

- Menetapkan : I. Mengangkat para Lurah, Wakil Lurah, Babinsa dan Bimas di Kelurahan masing2 dalam Wilayah DCI Djakarta seperti tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Pembantu Tjamat/Ketua PPS dengan tugas koordinator K.P.P.S./T.P.S. dalam persiapan dan penyelenggaraan pemungutan suara di TPS2 di Wilayah Kelurahan masing2.
- II. Apabila terdapat kekeliruan/kekurangan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki dan diteliti kemudian.

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 1 Pebruari 1971.

GOVERNOR HEAD OF REGION/KE-
TUA PENITIA PEMILIHAN DAERAH
D.C.I. DJAKARTA.

ttd.

(ALI SADIKIN)
Letnan Djenderal K K o.

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Jth. 1. Menteri Dalam Negeri/Ketua L.P.U.
2. Para Wakil Kepala Daerah.
3. Para Wakil Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta,
4. Para Anggota B.P.H. DCI Djakarta,
5. Sekda/Ass. Sekda DCI Djakarta,
6. Ketua Harian BP-BPP DCI Djakarta,
7. Para Kepala Direktorat/Biro/Inspektorat dalam lingkungan DCI Djakarta.
8. Para Walikota/Ketua P.P. Kota,
9. Para Kepala Dinas/Kantor/Djawatan dalam lingkungan DCI Djakarta,
10. Para Tjamat/Ketua P.P.S.,
11. Para Lurah.
12. Arsip.-

**DAFTAR : Lampiran Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Khusus Ibukota Dja-
karta.**

Tanggal : 1 Pebruari 1971.

Nomor : 0085/III/2/1971.

Nomor Urut.	N a m a	Djabatan dalam Pemilu	Instansi asal dan dari Unsur	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kel Tjideng. Moh. Ali Anwar	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Gambir.
2.	A. Basjumin	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
3.	Sunarto	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Bimas	
4.	Abd. Mo- tholib.	s.d.a.	Babinsa	
5.	Kel. Petodjo Utara. Muham- mad	Anggota merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Lurah (ex. ABRI)	Ketj. Gambir
6.	Dudung	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koodinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
7.	M. Rohim	Anggota Koodi- nator K.P.P.S.	Bimas	

Nomor Urut	N a m a	Djabatan dalam Pemilu	Instansi asal dan dari Unsur	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.
8.	Evi Mustapa Kel. Kebon Kelapa.	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s	Ketj. Gambir
9.	M. Moch. Sjafei	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Lurah (Veteran)	Ketj. Gambir
10.	Moh. Ishak	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lu- rah	
11.	Djasih. S	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s	
12.	Sjarief Kel. Gambir	s.d.a	Babinsa	
13.	M. Rais	Anggota/merang- kap Koodinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Gambir
14.	Moh. Ishak	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lu- rah	
15.	Sangadi	Anggota Kood- dinator K.P.P.S.	B i m a s	
16.	Sulaeman Kel. Petodjo Selatan.	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	

1	2	3	4	5
	Kel. Petodjo Selatan.			
17	Partolo	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Gambir
18.	Maulana Sani	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Kordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
19.	Ahmad Arsjad	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s	
20.	R. Junaedi	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	
	Kel. Duri Pulo.			
21.	S. Baim	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h (Golkar)	Ketj. Gambir
22.	M. Sani	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Kordinator K.P.P.S K.P.P.S.	Wakil Lurah	
23.	Bachrum	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B j m a s	
24.	Tisnawan	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	
	Kel. Mang- ga Dua Se- latan.			
25.	M. Sjah	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	Ket. Sawah Besar.

1	2	3	4	5
26.	Timan Djojo-wardojo	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	Ketj. Sawah Besar.
27.	Sukrisno	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
28.	P a i d i Kel. Karang Anjar.	Anggota Koordinator K.P.P.S.	B i m a s	
29.	M. Saleh	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Sawah Besar.
30.	Nawawi	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah (Veteran)	
31.	Soepomo	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
32.	Suhelmi	Anggota Koordinator K.P.P.S.	B i m a s	Ketj. Sawah Besar.
33.	Kel. Pasar Baru.			
33.	S u t a t	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	L u r a h	
34.	Waidjun	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
35.	Atje Endjam	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	

1	2	3	4	5
36.	E m a n Kel. Gunung Sahari Utara	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s	Ketj. Sawah Besar.
37.	A. Hamid	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Sawah Besar.
38.	M.Abd.	Anggota/merang- kap Wakil Ketua K.P.P.S.	Wakil Lurah	
39.	Saman	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s	
40.	Alwi al Kel. Kartini.	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	
41,	M. Achmad	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h (Golkar Mendagri).	Ketj. Sawah Besar.
42.	S.A. Abdu- rachman	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
43.	Salwi	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	
44.	Amin	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Binamas	
45.	Kel. Kebon Kosong.			
45.	S. Misin	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Kemajo- ran

1	2	3	4	5
46.	M u s a	Anggota/merang- kap Wakil Ketua K.P.P.S.	Wakil Lurah	Ketj. Kemajo- ran
47.	Sutjipto	Anggota Koor- dinator K.P.P.S	Babinsa	
48.	Endang	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s	
	Kel. Gunung Sahari Se- latan.			
49.	Achmad Mudasir	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Kema- joran
50.	Slamet Sutarno	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Ketua	
51.	Karono	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	
52.	Memem. S.	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s.	Ketj. Kema- joran
	Kel. Kema- joran.			
53.	A. Husni	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	
54.	Muh. Ik	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	

1	2	3	4	5
55.	Soeparno	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	Ketj. Kema- joran.
56.	Wastari	Anggota Koordinator K.P.P.S.	B i m a s	
	Kel. Hara- pan Mulia			
57.	Kuhadi	Anggota/merang- kap Ketua Koordinator K.P.P.S.	L u r a h (Golkar Mendagri).	Ketj. Kema- joran.
58.	Suhardjo	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
59.	Nasir	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
60.	Barowi	Anggota Koordinator K.P.P.S.	B i m a s.	
	Kel. Serdang.			
61.	I. Iskandar	Anggota/merang- kap Ketua Koordinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Kema- joran
62.	Sardjono. S.	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
63.	Moh. Nasir	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
64.	Kosim Kus-	Anggota Koordinator K.P.P.S.	B i m a s	

1	2	3	4	5
	Kel. Senen.			
65.	Muchtar	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Senen.
66.	Maulana	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
67.	Umang	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	
68.	Iskandar	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s	
	Kel. Kwitang.			
69.	D. Soetopo	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Senen.
70.	Muljono K.	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
71.	Machmud H.	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	
72.	A. Machrowi	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s	
	Kel. Kenari.			
73.	Sofjan	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Senen.
74.	Nuih N.	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koodinator K.P.P.S	Wakil Lurah	

1	2	3	4	5
75	Djojo	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	Ketj. Senen.
76.	A.Hamzah	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s	
	Kel. Kramat.			
77.	N. Saprie	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S	L u r a h	Ketj. Senen.
78.	Habib Iljas	Anggota/merang- kap Wakil Ketua K.P.P.S.	Wakil Lurah	
79.	Suarli	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	
80.	Tadjri	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s	
	Kel. Paseban.			
81.	D. Sunarjo	Anggota/merang- kap Ketu Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Senen.
82.	Djunaedi	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
83.	Suhatman	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	
84.	M. Kasdi	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s	
	Kel. Bungur.			
85.	T. Muchtar	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Senen.

1	2	3	4	5
86.	Muhammad Nasir	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	Ketj. Senen.
87.	Sjahrudin	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
88.	B. Napitupulu. Kel. Tjempaka Putih.	Anggota Koordinator K.P.P.S.	B i m a s	
89.	T o r b a	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Tjempaka Putih.
90.	Asnawi S.	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
91.	Sudijono	Anggota Koordinator K.P.P.S.	B i m a s	
92.	A. Rukman Kel. Rawa Sari.	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
93.	Muhasjim	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Tjempaka Putih.
94.	Ibrahim Saleh.	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	

1	2	3	4	5
95.	Supono	Anggota Koordinator K.P.P.S.	B i m a s	Ketj. Tjem- paka Putih.
96.	P a i d i	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
	Kel. Djohar Baru.			
97.	M. Junus	Anggota/merangkap Ketua K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Tjem- paka Putih.
98.	R. Radjiman	Anggota/merangkap Wakil Ketua K.P.P.S.	Wakil Lurah	
99.	J.Mirta	Anggota Koordinator K.P.P.S.	B i m a s	
100.	M. Jusuf	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	Ketj. Tjem- paka Putih.
	Kel. Kam- pung Rawa			
101.	Moh. Hanafi	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	L u r a h	
102.	Djakaria Hasan	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	Ketj. Tjem- paka Putih.
103.	Soepono	Anggota Koordinator K.P.P.S.	B i m a s	
104.	Moh. Arsjad	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
	Kel. Galur.			Ketj. Tjem- paka Putih.
105.	Sudirman	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	L u r a h	

1	2	3	4	5
106.	Daifullah	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	Ketj. Tjepa- ka Putih.
107.	A. Sukardi	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s	
108.	Tarmidi	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	
109.	Kel. Tanah Tinggi. R. Abdu- rachman	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Tjempa- ka Putih.
110.	Ainan Djenan	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
111.	M.Sanip	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s	
112.	M. Mansur	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	Ketj. Menteng
	Kel. Kebon Sirih.			
113.	Zaenudin	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	
114.	Sukono	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
115.	Ambar Soeroso	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	

1	2	3	4	5
116.	Sutomo Kel. Gondangdia.	Anggota Koordinator K.P.P.S.	B i m a s	Ketj. Menteng.
117.	Sri Mubin	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Menteng
118.	Gani Hidayat.	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
119.	Misbach	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
120.	J. Soedjoed Kel. Tjikini.	Anggota Koordinator K.P.P.S.	B i m a s	
121.	Singgih	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Menteng.
122.	Marsan Ali	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
123.	Abdul Gani	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
124.	Rokib Kel. Menteng.	Anggota Koordinator K.P.P.S.	B i m a s	
125.	Moh. Toha	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Menteng.

1	2	3	4	5
126.	M. Husni Amasir	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah (ex. N.U.)	Ketj. Menteng.
127.	M. Nasir	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	
128.	Hidajat	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s	
	Kel.. Pe- gangaan.			
129.	Soeparman K.	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Menteng.
130.	Sanwani	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
131.	Ali Arifin	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	
132.	Hamdani	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s	
	Kel. Kam- Pung Baru.			
133.	T. Ridha Sasmita	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S	L u r a h	Ketj. Tanah Abang.
134.	Moh. Sabar	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
135.	Koptu Achmad	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	

1	2	3	4	5
136	Sermana Kel. Kebon Katjang.	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Bimas	Ketj. Tanah Abang.
137	A. Hadi S.	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Tanah Abang.
138.	Moch. Adam	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
139.	A. Djaidi A.R.	Anggota Koor- dinator K.P.P.S	Babinsa	
140.	M. Rubaie Kel. Kebon Melati.	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s	
141	Dudung A. Hamid	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinatro K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Tanah Abang.
142.	Ali Simung	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
143.	Muchtar	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	
144.	Norta Kel. Petam- buran.	Anggota Koor dinator K.P.P.S.	B i m a s	
145.	A. Ajuhar.	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Tanah Abang.

1	2	3	4	5
146.	Moh. Hasan	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	Ketj. Tanah Abang
147.	Sjafie bin Ung	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	
148.	Soehirman	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s	
	Kel. Karet Tengsih.			
149.	O n o b	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Tanah Abang.
150.	Ali Abubakar	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
151.	M.Nur	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	
152.	Marsikin	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s	
	Kel. Bandung- ang Hilir.			
153.	A Latief Sulaeman	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Tanah Abang.
154.	Duffie	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
155.	Samari	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	

1	2	3	4	5
156.	Sarlie Kel. Glora.	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s	Ketj. Tanah Abang.
157.	Muchtar Saih	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Tanah Abang.
158.	Abdul Hamid	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
159.	M. Tojib	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	
160.	N anta Kel. Pulau Panggang.	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s	
161.	Moch. Sjaraf	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Pulau Seribu.
162.	T o h a	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Staf Kelu- rahan.	
163.	Tjatja	Anggota Koor- dinatro K.P.P.S.	Staf Kelu- rahan.	
164.	Nahdji Kel. Pulau Kelapa.	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Staf Kelu- rahan	
165.	Hasan Sastra	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Pualu Seribu

1	2	3	4	5
166.	Asnawi	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	Ketj. Pulau Seribu.
167.	Mardjuki Miran	Anggota Koordinator K.P.P.S.	B.K.R. Pulau Kelapa.	
168.	Supada	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Guru SD Pulau Kelapa	
	Kel. Pualu Tidung.			
169.	Hasbullah A.M.	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Pulau Seribu.
170.	Rachmat Sj.	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Staf Kelurahan	
171.	M. Tojib	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Guru SD Pulau Tidung.	
172.	Nachrowi	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Staf Kelurahan	
	Kel. Pulau Untung Djawa.			
173.	Mardjuki Saman	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Pulau Seribu.
174.	M u n i r	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Staf Kelurahan	

1	2	3	4	5
175.	Nursin	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Kepala SD P Untung Djawa.	Ketj. Pulau Seribu
176.	Kurdi Sugianto Kel. Pendjaringan.	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Staf Kelurahan	
177.	Atjep Sukma	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Pendjaringan.
178.	M. Salim	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
179.	M. Marsim	Anggota Koordinator K.P.P.S.	B i m a s	
180.	Sudarja Kel. Pedjagalan.	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
181.	HS. Arsali	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	L u r a h	
182.	M. Sjafeie	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
183.	Tjetjep Rosidi	Anggota Koordinator K.P.P.S.	B i m a s	Ketj. Pendjaringan.
184.	Serma Bosrif	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	

1	2	3	4	5
	Kel. Mang- ga Dua Utara.			
185.	S a i d i	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Pendja- ringen.
186.	Sukirman	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
187.	H. Djukman	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s	
188.	M. Nursjid	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	
	Kel. Pade- mangan.			
189.	Legiman	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Pendja- ringen
190.	Saman	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
191.	Sunomo	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s	
192.	Surono	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	
	Kel. Sunter.			
193.	A. Zainud- din.	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Tandjung Priok.

1	2	3	4	5
194.	M. Mutholib	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	Ketj. Tandjung Priok.
195.	Warno	Anggota Koordinator K.P.P.S.	B i m a s	
196.	Djaan	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
	Kel. Papanggo.			
197.	M. Dali	Anggota/merangkap Ketua Koordinator.K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Tandjung Priok.
198.	E Muchta-ruddin	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
199.	Enting Dahroni	Anggota Koordinator K.P.P.S.	B i m a s	
200.	Ojo Seno	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
	Kel. Sungani Bambu.			
201.	M. Jacob.	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Tandjung Priok.
202.	Matdani	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
203.	Musfhani	Anggota Koordinator K.P.P.S.	B i m a s	

1	2	3	4	5
204.	Sukir	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	Ketj. Tandjung Priok.
205.	Kel. Kebon Bawang.			
205.	Nata Sudarma	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Tandjung Priok.
206.	M. Hasan	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
207.	Bambang S.	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s	
208;	Entjum	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	
	Kel. Tan- djung Priok.			
209.	M. Markadi	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Tandjung Priok.
210;	Kadma	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
211.	Sudjiono	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s	
212.	A. Toasikal	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	

1	2	3	4	5
	Kel. Kodja Utara.			
213.	M.H. Dasuki.	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Kodja.
214.	Moch. Muchtar.	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
215.	A. Sitompul	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
216.	Zainuddin	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
	Kel. Kalibaru.			
217.	Hasjim	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Kodja.
218.	Tjetjep Suhardja	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
219.	Wiranta	Anggota Koordinator K.P.P.S.	B i m a s	
220.	Matali	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
	Kel. Tjilitan.			
221.	Rastum	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Kodja.

1	2	3	4	5
222.	Mardjuki Sarmadi.	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	Ketj. Kodja.
223.	Sulaiman A.D.	Anggota Koordinator K.P.P.S.	B i m a s	
224.	Sersan Sudjai Kel. Sempur.	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
225.	AIP. I. Endjang	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Kodja.
226.	Rachman	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
227.	AIP.II. Endjam.	Anggota Koordinator K.P.P.S.	B i m a s	
228.	G. Atma Kel. Lagoa.	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	Ketj. Kodja.
229.	Amir Dudu.	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	L u r a h	
230.	M. Suwadi.	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
231.	Sanum	Anggota Koordinator K.P.P.S	B i m a s	
232.	Kartha	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	

1	2	3	4	5
	Kel. Kodja Selatan.			
233.	M.A. Lubis	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Kodja.
234.	Radi Rajana	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
235.	Karsono	Anggota Koordinator K.P.P.S.	B i m a s	
236.	Sudja	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
	Kel. Tugu.			
237.	O. Sutisna	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Kodja.
238.	M. Nurdini	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Staf Kelurahan	
239.	Mardi	Anggota Koordinator K.P.P.S.	B i m a s	
240.	Ma'mun	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
	Kel. Rawa Badak.			
241.	Djoko Sutikno	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Kodja.

1	2	3	4	5
242.	A. Ganda brata	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordiantor K.P.P.S.	Staf Kelura- han.	Ketj. Kodja.
243.	Sanusil	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s	
244.	Soeroso	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	
	Kel. Kepala Gading.			
245.	A. Gani	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Kodja.
246.	Zainal Abidin	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Staf Kelu- rahan	
247.	Bisri	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s	
248.	Seno	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	Ketj. Kodja.
	Kel. Pegang- saan.			
249.	Djamhari	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	
250.	Abd. Kohar.	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Staf Kelura- han.	Ketj. Kodja.
251.	M i a n	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	

1	2	3	4	5
252.	Djumadi Kel. Petu- kangan.	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s	Ketj. Kodja.
253.	M.S. Soe- bandi	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Kodja.
254.	Sukirman	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Staf Kelura- han	
255.	Tamboh.	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s	
256.	N a n a Kel. Mang- garai.	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	
257.	M.S. Little	Anggota/merang- kap Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Tebet.
258.	Basuki Muchtar	Anggota/merang- kap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
259.	Muslim	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	B i m a s	
260.	A t i m	Anggota Koor- dinator K.P.P.S.	Babinsa	

1	2	3	4	5
	Kel. Mangarai Selatan.			
261.	A. Madjuki	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Tebet.
262.	Sarno	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
263.	Mamat Iming	Anggota Koordinator K.P.P.S.	B i m a s	
264.	I j o k	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
	Kel. Bukit Duri.			
265.	M. Zaini	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Tebet.
266.	Sjapri	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
267.	Bandi U.	Anggota Koordinator K.P.P.S.	B i m a s	
268.	M. Hatib	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
	Kel. Menteng Dalam.			
269.	M. Marsie	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	L u r a h	Ketj. Tebet.

1.	2.	3.	4.	5.
270.	Abdurachim	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S	Wakil Lurah	Ketj. Tebet
271.	Darjani S.	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
272.	M. Tamri Kel. Tebet Barat.	s.d.a.	Babinsa	
273.	R. Supangat	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Tebet
274.	Abdul Kadir	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
275.	Sukijo	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
276.	Habibun Kel. Tebet Timur.	s.d.a.	Babinsa	
277.	Abuhasan	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Tebet
278.	Taufik	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
279.	Sada	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
280.	Bunadji Kel. Kebon Baru.	s.d.a.	Babinsa	
281.	Achmad	Anggota merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Tebet
282.	H. Rais	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	

1	2	3	4	5
283.	Muljono	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	Ketj. Tebet.
284.	T. Asnawi Djaja Kel. Kuningan Barat.	s.d.a.	Babinsa	
285.	Abd. Azis	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	
286.	Abd. Haer	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	Ketj. Mampang Prapatan
287.	Mishad	Anggota/Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
288.	Djajani Kel. Mampang Prapatan.	s.d.a.	Babinsa	
289.	H.M. Matun	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Mampang Prapatan.
290.	M. Tumin	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
291.	E. Soetrisno	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
292.	Balja Kadir Kel. Pela Mampang.	s.d.a.	Babinsa	Ketj. Mampang Prapatan.
293.	H. Moch. Napis	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	
294.	M. Aseni	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	

1	2	3	4	5
295.	Marno	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	Ketj. Mampang Prapatan.
296.	Muchtar Kel. Tegal Parang.	s.d.a.	Babinsa	
297.	Moh. Tohir	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	
298.	Abd. Somad	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
299.	Parnu	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	Ketj. Mampang Prapatan.
300.	Ebeng Kel. Bangka.	s.d.a.	Babinsa	
301.	H. Machbub	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	
302.	H. Marullah	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
303.	Soempeno	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	Ketj. Mapang Prapatan.
304.	Achmat Kel. Pantjoran.	s.d.a.		
305.	Abd. Madjid	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	
306.	Murtado	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
307.	Sisman	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
308.	Tamsir	s.d.a.	Babinsa	

1	2	3	4	5
	Kel. Duren Tiga.			
309.	A. Aiem SY	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Mampang Prapatan
310.	Asmawie	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
311.	Djakaria	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
312.	Tarsan	s.d.a.		
	Kel. Kalibata.			
313.	Moh. Hasan	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Mampang Prapatan.
314.	Ajo Tarjono	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
315.	Amir Sulin	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
316.	Mansjur	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Tjikoko .			
317.	Muhasjim	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah Wakil Lurah	Ketj. Mampang Prapatan
318.	Misbah	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
319.	Bona L.	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
320.	Jusuf N.	S.d.a.	Babinsa	

1	2	3	4	5
	Kel. Pengadegan.			
321.	Somadi Naserin	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Mampang Prapatan
322.	M. Husin Dilhasen	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
323.	Soewardi	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
324.	E. Habri	s.d.a.		
	Kel. Rawadjati.			
325.	Muhasan	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Mampang Prapatan.
326.	Ojon Sjojfan	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
327.	Soegiman	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
328.	Iljas	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Senajan.			
329.	Asep Saefulridjal	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Kebajoran Baru.
330.	Husin A. Rahcman	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
331.	Wirza	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
332.	Rochmadi	s.d.a.		
	Kel. Rawabarat.			
333.	Malihoen Moesa	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Kebajoran Baru.

1	2	3	4	5
334.	Tjuardi	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	Ketj. Kebajo- ran Baru.
335.	Mashar	Anggota/Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
336.	Jusuf	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Selong.			
337.	I. Sibromulisi	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	
338.	Soffuan	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
339.	Djali	Anggota Koordina- tor K.P.P.S.	Bimas	Ketj. Kebajo- ran Baru.
340.	Sirad	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Gunung.			
341.	Bachrudin	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	
342.	E. Haris	Anggota/Merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
343.	Azwar	Anggota/Koordina- tor K.P.P.S.	Bimas	
344.	Mamad	s.d.a.		Ketj. Kebajo- ran Baru.
	Kel. Kramat Pela.			
345.	H.M. Arief	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	
346.	Hasan Tabrani	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
347.	Hartojo	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	

1	2	3	4	5
348.	Saaman Kel. Melawai.	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	Ketj. Keba- joran Baru
349.	Agus Abdillah	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	
350.	Sjahroni Muha- mad	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
351.	Udju Ili Su- parta	Anggota Koordina- tor K.P.P.S.	Bimas	
352.	O.O. Hasbul- lah. Kel. Petogogan.	s.d.a.	Babinsa	
353.	Abdillah Dul Baisan	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Kebajo- ran Baru.
354.	Achmad Madin	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
355.	E. Sutisma	Anggota Koordina- tor K.P.P.S.	Bimas	
356.	Inang Kel. Pulo.	s.d.a.	Babinsa	
357.	Maup H. Raisan	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	
358.	Abdul Karim	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	Ketj. Keba- joran Baru.
359.	Abd. Hamid	Anggota Koordina- tor K.P.P.S.	Bimas	
360.	Sadju	s.d.a.	Babinsa	

1	2	3	4	5
	Kel. Ganda- ria Utara.			
361.	E. Rachmat	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Kebajo- ran Baru.
362.	Mansjur	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
363.	G. Sodratman	Anggota Koordina- tor K.P.P.S.	Bimas	
364.	S. Omod.	s.d.a.	Babinsa (N.U.)	
	Kel. Tjipete Utara.			
365.	Moch. A.R. Mu- takin	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Kebajo- ran Baru.
366.	Abd. Somad	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
367.	T. Kusnadi	Anggota Koordina- tor K.P.P.S.	Bimas	
368.	A. Wasjim	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Grogol Utara.			
369.	H. Muchtar Ma- dinah	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Kebajo- ran Baru.
370.	H. Hasjim	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
371.	H. Jasin	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
372.	Sanusi	s.d.a.	Banbinsa	

1	2	3	4	5
	Kel. Grogol Selatan.			
373.	H. Zawawi	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Keba- joran Lama
374.	Mawi	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah (N.U.)	
374.	Mawi			
375.	Sumardja	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
376.	Abdillah	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Tjipulir.			
377.	H. Moh. Isa	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah (Muhamma- dijah).	Ketj. Keba- joran Lama.
378.	Effendi	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
379.	Daswar	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
380.	Handang S.	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Kebajo- ran Lama.			
381.	Mursjid	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Keba- joran Lama.
382.	Nur Hakim	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
3833	Sakum	Anggota/merangkap K.P.P.S.	Bimas	
384.	Mundja	s.d.a	Babinsa	

1	2	3	4	5
	Kel. Pondok Pinang.			
385.	Sanusi	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Keba- joran Lama.
386.	Abd. Rasjid	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
387.	Sairi	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
388.	Adjo Hasan	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Gandaria Selatan.			
389.	Achmad	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Keba- joran Lama.
390.	Achjat	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
391.	Ajak	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
392.	Supandi	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Tijipete Selatan.			
393.	Soeben	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Keba- joran Lama.
394.	Zakaria	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
395.	Agus	Anggota Koordina- tor K.P.P.S.	Bimas	
396.	Djufriludin	s.d.a.	Babinsa	

1	2	3	4	5
	Kel. Tiilandak.			
397.	Rajim	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Keba- joran Lama.
398.	Bahwanih	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
399.	Abd. Bungkar	Anggota/merangkap K.P.P.S.	Bimas	
400.	Rasian	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Lebak Bulus.			
401.	H. Sjamdjah	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Keba- joran Lama.
402.	H. Salam	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
403.	Ibrahim	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
404.	Sambuaga	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Pondok Labuh.			
405.	Amad	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Keba- joran Lama.
406.	Zarkasih Aly	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
407.	Rojani	Anggota/Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
408.	Ramelan	s.d.a.	Babinsa	

1	2	3	4	5
	Kel. Pedjaten.			
409.	H. Rally	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pasar Minggu.
410.	A.M. Naseh	Anggota/meerangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
411.	Abd. Goni	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
412.	Warsan	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Pasar Minggu.			
413.	Entong Saari	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pasar Minggu.
414.	Ashari	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
415.	Astari	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
416.	A. Djaelani	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Tandjung Barat.			
417.	Mohamad Nur	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pasar Minggu.
418.	M. Ali S.	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
419.	Legiman	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
420.	M. Ali A.	s.d.a.	Babinsa	

1	2	3	4	5
	Kel. Djati Padang.			
421.	H. Muhamad	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pasar Minggu.
422.	Mamat Jani	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
423.	A. Malik	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
424.	Mumuh	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Ragunan.			
425.	H. Asnawi	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pasar Minggu.
426.	Abdulhasan	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
427.	M.A. Lubis	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
428.	Amar	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Tjilandak.			
429.	Enda b. Muh	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pasar Minggu.
430.	Wahjo	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
431.	Sugiri	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
432.	T. Ali	s.d.a.	Babinsa	

1	2	3	4	5
	Kel. Djaga-karsa.			
433.	Muhamad Saaman	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pasar Minggu.
434.	Misar Al. Tonge	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
435.	O. Soetardjo	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
436.	Sara	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Lenteng Agung.			
437.	Musa bin Dul	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pasar Minggu.
438.	Kaisin	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
439.	Uho	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
440.	Herman R.	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Srengseng Sawah.			
441.	Utud bin Saaman	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pasar Minggu.
442.	Hadji Dahlan	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
443.	Sahali	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
444.	Ibrahim	s.d.a.	Babinsa	

1	2	3	4	5
	Kel. Tjigandjur.			
445.	Endy Jamin	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pasar Minggu.
446.	Raiman Bon- djing.	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
447.	Engkon	Anggota Koordina- tor K.P.P.S.	Bimas	
448.	Umar	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Setia Budi.			
449.	Mas'ud	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Setia Budi.
450.	Moh. Yamin	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
451.	Misani	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
452.	M. Ariefin	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Karet.			
453.	H.M. Ali	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah (PNI)	Ketj. Setia Budi.
454.	Mugeni Amat Husien	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah (PNI)	
455.	Saleh	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
456.	Supaad	s.d.a.		

1	2	3	4	5
	Kel. Karet Semanggi.			
457.	M. Jusuf Ismail	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Setia Budi.
458.	Hamdan AH.	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
459.	Hambari	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
460.	M. Machmud	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Karet Kuningan.			
461.	A. Damiri	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Setia Budi.
462.	Mugeni Dul	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
463.	Machpud	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
464.	M. Danu	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Kuningan Timur.			
465.	Mussaini H.M. Ali	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Setia Budi.
466.	M. Napis	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
467.	Suherman	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
468.	Abdullah	s.d.a.	Babinsa	

1	2	3	4	5
	Kel. Menteng Atas.			
469.	Rameli	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Setia Budi.
470.	A. Nitidjaja	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
471.	Theo Kwokku	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
472.	Djumadi	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Pasar Manggis.			
473.	Abdul Chalip	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Setia Budi.
474.	Suradi	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
475.	Sardi S.	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
476.	Nani S.	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Guntur.			
477.	I.H. Djaelani	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Setia Budi.
478.	Irwan Sjafei	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
479.	Toha Wiri	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
480.	Subandi	s.d.a.	Babinsa	

1	2	3	4	5
	Kel. Grogol.			
481.	Soekarna	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Grogol Petamburan.
482.	Sugandi	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
483.	Aiptu Abubakar	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
484.	Serma A. Adar	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Djelambar			
485.	M. Saleh Djaja	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Grogol Petamburan.
486.	Arnali	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
487.	Serda Kasim	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
488.	Aipda Slamet Hs.	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Tandjung Duren.			
489.	Komarudin Hasjim	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Grogol Petamburan.
490.	Mudjerimi	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
491.	Serda Rukman	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
492.	Aipda Ibrahim	s.d.a.	Bimas	

1	2	3	4	5
	Kel. Tomang.			
493.	E. Durachim	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Grogol Petamburan.
494.	Mardjuki	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
495.	Serma A. Jani	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
496.	Aiptu, Sutikno	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Djatipulo.			
497.	Raskim Subandi WA.	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Grogol Petamburan
498.	Taufik Hidajat	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
499.	Serda Kuswara	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
500.	Bripda Amidi	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Kota-bambu.			
501.	Moch. Machdi	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Grogol
502.	M. Namin	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
503.	Aiptu Toha	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
504.	Serma Moh. Hasan	s.d.a.	Babinsa	

1	2	3	4	5
	Kel. Slipi.			
505.	E. Machmud	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Grogol Petamburan
506.	Djumroni	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
507.	Koptu Tuki-min	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
508.	M.H. Nasution	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Palmerah.			
509.	Abutolib	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Grogol Petamburan
510.	M.N. Nata	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
511.	Aiptu M. Daslim	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
512.	Serda Mardjuki	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Kembangan.			
513.	Mardjuki	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Kebon Djeruk.
514.	Djamhuri	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
515.	Napis	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
516.	Sarimin	s.d.a.	Bimas	

1	2	3	4	5
	Kel. Kedoja.			
517.	Sapri	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Kebon Djeruk.
518.	Makmun	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
519.	Sukarija	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
520.	Saridjan	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Duri.			
521.	Sainin	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Kebon Djeruk.
522.	H. Nasir	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
523.	S. Ojob	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
524.	Pono	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Meruja Ilir.			
525.	Masud	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Kebon Djeruk.
526.	Njaih	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
527.	Abd. Gani	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
528.	Kasbi	s.d.a.	Bimas	

1	2	3	4	5
	Kel. Meruja Udik.			
529.	Sana	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Kebon Djeruk.
530.	Damin	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
531.	Hasbullah	Anggota Koordina- tor K.P.P.S.	Babinsa	
532.	Saadi	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Djoglo.			
533.	Abd. Gani	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Kebon Djeruk.
534.	Boim H. Goni	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
535.	M. Djaini	Anggota Koordina- tor K.P.P.S.	Babinsa	
536.	Soetrisno	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Sareng- seng.			
537.	Soetomo	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Kebon Djeruk.
538.	Muknim	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
539.	Basjar	Anggota Koordina- tor K.P.P.S.	Babinsa	
540.	Nait	s.d.a.	Bimas	

1	2	3	4	5
	Kel. Kebon Dj eruk.			
541.	H. Mahfud	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Kebon Djeruk.
542.	M. Umar	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
543.	Kosasih	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
544.	Kasiman	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Sukabumi Ilir.			
545.	Umar Izie	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Kebon Djeruk.
546.	Djarwanie	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
547.	Sjarif	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
548.	Ading	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Kelapa Dua.			
549.	Muhadi	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Kebon Djeruk.
550.	M. Djaja	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
551.	Suhairi	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
552.	Bandi	s.d.a.	Bimas	

1	2	3	4	5
	Kel. Sukabumi Udik.			
553.	Abdillah	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Kebon Djeruk.
554.	M. Idris	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
555.	Adang	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
556.	Soewignjo	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Benda.			
557.	H. Mitjang	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Tjeng- kareng.
558.	Muhandja	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
559.	Durdjana	Anggota Koordina- tor K.P.P.S.	Babinsa	
560.	Mardja	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Kamal.			
561.	H. Achmad Gaos	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Tjeng- kareng.
562.	H. Nawawi	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
563.	Arsa	Anggota Koordina- tor K.P.P.S.	Babinsa	
564.	Djaim	s.d.a.	Bimas	

1	2	3	4	5
	Kel. Tegal Alur.			
565.	H. Muhadiah bin Saeran	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Tjengkareng.
566.	Bani	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
567.	Masri Kasido	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
568.	Kasido	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Pegadungan.			
569.	Mirda	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Tjengkareng.
570.	Abubakar	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
571.	Hamid	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
572.	A. Rasjid	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Kalideres.			
573.	H. Djaelani??	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Tjengkareng
574.	H. Musa	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
575.	Ruchdi	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
576.	Lim Tio Lok	s.d.a.	Bimas	

1	2	3	4	5
	Kel. Tjengkareng.			
577.	Abd. Hamid	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Tjengkareng.
578.	Muchamad Umar	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
579.	M. Noer	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
580.	Siswadi	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Kapuk.			
581.	A. Djapar	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Tjengkareng.
582.	Asmad	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
583.	Oesman Leos	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
584.	E. Sulaeman	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Kedaung Kaliangke.			
585.	Dalung M. Dahlan	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Tjengkareng.
586.	Dachlan bin H. Soebah	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
587.	Jatiman	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
588.	Rumanta	s.d.a.	Bimas	

1	2	3	4	5
	Kel. Pinang-sia.			
589.	Achmad Chodir	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Taman Sari.
590.	Supandi	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
591.	M. Bardja	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
592.	Bachrudin	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Glodok.			
593.	Baiki Djubaidi	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Taman Sari.
594.	M. Saleh	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
595.	Odji	Anggota /merangkap tor K.P.P.S.	Babinsa	
596.	I. Ketut Su- giartha	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Mangga Besar.			
597.	M. Sueb Bas- toni	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Taman Sari.
598.	Achbab	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
599.	Sjamsudin	Anggota Koordina- tor K.P.P.S.	Babinsa	
600.	Basuki Sadeli	s.d.a.	Bimas	

1	2	3	4	5
	Kel. Tangki.			
601.	M. Saleh	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Taman Sari.
602.	Abd. Hamid	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
603.	T. Soeganda	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
604.	Chaidir	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Kea- gungan.			
605.	Tb. Uteng Mar- tasaputra	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Taman Sari.
606.	Achmad Zainal	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
607.	M. Usman	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
608.	Koenandjar	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Krukut.			
609.	M. Saleh	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Taman Sari.
610.	A, Machbub Thahir	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
611.	Djatar	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
612.	Gofur	s.d.a.	Bimas	

1	2	3	4	5
	Kel. Taman Sari.			
613.	B. Sjahran Effendy	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Taman Sari.
614.	A. Sjoekoer	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
615.	O. Atmadja	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
616.	Ibrahim S.	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Maphar.			
617.	Ni'ing	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Taman Sari.
618.	Bunjamin	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
619.	M. Jusuf	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
620.	Asmadi	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Malaka.			
621.	M. Talkah	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Tam-bora.
622.	A. Kadir	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
623.	Serma Seka	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
624.	Aiptu Angrok Katamsi	s.d.a.	Bimas	

1	2	3	4	5
	Kel. Pekodjan.			
625.	S. Sukana	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Tam- bora.
626.	D. Sutrisna	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
627.	Serma Asma	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
628.	Aiptu Abd. Hamid	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Tambora.			
629.	Omo	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Tam- bora.
630.	Ali Rakun	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
631.	Mamat	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
632.	Aiptu Hadad	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Djem- batan Lima			
633.	A. Wahid Ber- mawi	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Tam- bora
634.	Husin Alhadi	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
635.	Sertu Mamat N.	Anggota Koordina- tor K.P.P.S.	Babinsa	
636.	Aiptu P. Sam- budi	s.d.a.	Bimas	

1	2	3	4	5
	Kel. Tanah Sareal.			
637.	D. Ibrahim	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Tam- bora.
638.	M. Saleh	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
639.	Sertu Dulah Bavil	Anggota Koordina- tor K.P.P.S.	Babinsa	
640.	Brigpol Sarikin	s.d.a.	Bimas.	
	Kel. Keren- dang.			
641.	Moch. Jahja	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Tam- bora.
642.	A. Muchtar	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
643.	Serka N. Djo- hana	Anggota Koordina- tor K.P.P.S.	Babinsa	
644.	Aiptu Atjim	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Duri.			
645.	L. Gozali	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Tam- bora.
646.	A. Muslim	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
647.	Serka Mucha- sim	Anggota Koordina- tor K.P.P.S.	Babinsa	
648.	Aiptu A. Muchtar	s.d.a.	Bimas	

1	2	3	4	5
	Kel. Angke.			
649.	M. Muhani	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Tam- bora.
650.	A. Kurnia- djaja.	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
651.	Sertu Lijas	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
652.	Aiptu Djupri	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Djemba- tan Besi.			
653.	Dulhadi	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Tam- bora.
654.	Surja Iskan- dar	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
655.	Serma Udju Wiranta	Anggota Koordina- tor K.P.P.S.	Babinsa	
656.	Aiptu Nalih	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Kali Baru.			
657.	D. Abd. Radjak	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Tam- bora.
658.	Suda'i	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
659.	Serka Burhan	Anggota Koordina- tor K.P.P.S.	Babinsa	
660.	Aiptu Nalih	s.d.a.	Bimas	

1	2	3	4	5
	Kel. Kebon Manggis.			
661.	Naisin bin Simin	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Matraman.
662.	M. Jusuf	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
663.	Suhandi	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
664.	Suhadi	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Pal Meriam.			
665.	M. Jusuf b. Nursan	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Matraman.
666.	Tugiman	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
667.	E. Sumardi	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Kepala Lingkungan	
668.	Rostama	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Kaju Manis			
669.	M. Tohir	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Matraman.
670.	Hartono	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
671.	Bunasir	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
672.	Ngadimin W.	s.d.a.	Bimas	

1	2	3	4	5
	Kel. Utan Kaju.			
673.	Achmad Sumerudhi BA.	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Matraman.
674.	M. Jasin	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
675.	Asjari	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
676.	Kardjan	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Pisangan Baru.			
677.	Sajuti	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Matraman.
678.	Dalidjo	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
679.	Mahasjim	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
680.	Soewadi	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Kaju Putih.			
681.	Moediardjo	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pulo Gadung.
682.	Nasar Leman	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
683.	Serma Atori	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
684.	Aiptu A. Nasim.	s.d.a.	Bimas	

1	2	3	4	5
	Kel. Rawa- mangun.			
685.	H. Arkian BA.	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pulo Gadung.
686.	Idris Haga	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator	Wakil Lurah	
687.	Abdulrachim	Anggota Koordina- tor K.P.P.S.	Babinsa	
688.	Aiptu Sur- janto	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Pisang- an Timur.			
689.	R. Anwar	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pulo Gadung.
690.	Abdul Murad	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah kungan	
691.	Serma Bakri Hasan	Anggota Koordina- tor K.P.P.S.	Babinsa	
692.	Aiptu J. Mi- linan	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Djati- negara.			
693.	H.S. Hidajat	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah Wakil Lurah	Ketj. Pulo Gadung.
694.	M. Kusnadi	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
695.	Serma Suhata	Anggota Koordina- tor K.P.P.S.	Babinsa	
696.	Aiptu Supardi	s.d.a.	Bimas	

1	2	3	4	5
	Kel. Djatinegara Timur.			
697.	R. Ali Muchtar	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pulo Gadung.
698.	J. Santoso	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
699.	Serma Dulhalim.	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
700.	Abdulrachman	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Pulo Gadung.			
701.	Suwanda	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pulo Gadung.
702.	Munasir	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
703.	Serma, Abd. Halim	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
704.	Abdulrachman	s.d.a.	Bmas	
	Kel. Rawa Rate.			
705.	A. Mamat	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pulo Gadung
706.	Tjarta	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
707.	Serma Marut	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
708.	Aiptu Djuhdi	s.d.a.	Bimas	

1	2	3	4	5
	Kel. Penggilingan.			
709.	Mudjitaba	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pulo Gadung.
710.	Gunawan	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
711.	Sertu Madhi B.	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
712.	Aiptu Hanafi	s.d.a.	Bimas.	
	Kel. Tjipinang.			
713.	R. Alirachman	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pulo Gadung.
714.	A. Hamid	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
715.	Otang	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
716.	Aiptu Sinta	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Kampung Melaju.			
717.	Amsir Tole al. Saleh	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Djatinegara.
718.	Ahmad Dali	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
719.	Tasik Rukmana	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
720.	Sadji D.S.	s.d.a.	Bimas	

1	2	3	4	5
	Kel. Bali Mester.			
721.	Bachtiar A. Gani	Anggota/mernagkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Djati-negara.
722.	Naang	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
723.	S. Ngadri	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
724.	Muchajat	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Tjipinang Tjempedak.			
725.	Zainuddin	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Djati-negara.
726.	Abdullah	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
727.	Mamat K.	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
728.	Roni Z.	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Rawa-bangke.			
729.	Rd. Effendi	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Djati-negara.
730.	A. Sori	Anggots/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
731.	Sjarief	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
732.	Djainul	s.d.a.	Bimas	

1	2	3	4	5
	Kel. Tjipinang Besar.			
733.	M. Saleh Wahab	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Djati-negara.
734.	Mohamad Mian	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
735.	Ohim	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
736.	Hasan Gedat	s.d.a.	Bimas	
737.	Kel. Tjipinang Muara.			
737.	H. Abdullah	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Djati-negara.
738.	H. Moh. Idris	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
739.	H. Achmad Padli	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
740.	Masiran	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Pondok Bambu.			
741.	H. Hanafi	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Djati-negara.
742.	Mulih b Said	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
743.	Muhammad	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
744.	Bunan Nuri	s.d.a.	Bimas	

1	2	3	4	5
	Kel. Klender.			
745.	M. Saleh Sabekti	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Djati-negara.
746.	M. Nasir Nasa	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
747.	Harijono	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
748.	Tukimin	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Duren Sawit.			
749.	Karim b. Tira	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Djati-negara.
750.	Entjang WB.	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
751.	Djamhari	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
752.	Djamil	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Malaka.			
753.	Endang Suherman	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Djati-negara.
754.	Kamih	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
755.	Mamat N.	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
756.	Sjafirin	s.d.a.	Bimas	

1	2	3	4	5
	Kel. Pondok Kelapa.			
757.	Asan Dabung	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Djati- negara.
758.	Sajuti	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
759.	Ending Ali	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
760.	Abdul Muin	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Bidara Tjina.			
761.	B. Suprpto	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Djati- negara.
762.	Munasik Edi Laksono	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
763.	Iding	Anggota Koordina- tor K.P.P.S.	Babinsa	
764.	Suhud	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Tjawang.			
765.	H.A. Bastori	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Kra- mat Djati.
766.	Abd. Salam	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
767.	Sertu Haban H.	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
768.	Aiptu S. Mar- wi	s.d.a.	Bimas	

1	2	3	4	5
	Kel. Tjipinang Melaju.			
769.	H. Dja'man	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Kramat Djati.
770.	Suparman	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
771.	Sertu M. Idris	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
772.	Aipda Madji Alijas	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Tjililitan.			
773.	Ahmad May	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Kramat Djati.
774.	Sarmada	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
775.	Sertu Madji	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
776.	Abd. Madjid	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Kramat Djati.			
777.	Z. Abidin	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Kramat Djati.
778.	Zaelan Jusuf	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
779.	Haban HR	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
780.	S. Marwil	s.d.a.	Bimas	

1	2	3	4	5
	Kel. Batu Ampar.			
781.	Muhammad	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Kra- mat Djati.
782.	M. Muhja	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
783.	Sertu Musa B	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
784.	Durachim	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Bale Kambang.			
785.	Abd. Wahid	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Kra- mat Djati.
786.	Rodjali	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
787.	Sertu Jahudi	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
788.	Endang Mari	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Kebon Pala.			
789.	Mutoha	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Kra- mat Djati
790.	H. Moh. Tojib	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
791.	Serma Njono	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
792.	Aiptu Moh. Sidik	s.d.a.	Bimas	

1	2	3	4	5
	Kel. Makasar.			
793.	M. Nur	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Kra- mat Djati.
794.	Mursid	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
795.	Serma Sla- met E.	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
796.	Sagiman	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Dukuh.			
797.	M. Tabu	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Kra- mat Dj ati.
798.	Mahali	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
799.	Serma Kunta	Anggota Koordinator K.P.P.S	Babinsa	
800.	Aiptu Ojonata	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Tengah.			
801.	A. Rodjali	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Kra- mat Djati.
802.	Sanang	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
803.	Serma Abdul- lah	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
804.	Aiptu Madji	s.d.a.	Bimas	

1	2	3	4	5
	Kel. Halim Perdana Kesu- mah.			
805.	B. Mandat	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Kra- mat Djati.
806.	U. Sjarifudin	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
807.		Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
808.		s.d.a.	Bimas	
	Kel. Lubang Buaja.			
809.	Abd. Gani	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pasar Rebo.
810.	Matifji	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Djuru Tulis	
811.	A. Prapto	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
812.	Sjamsuri	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Rambutan.			
813.	Ridwan	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pasar Rebo.
814.	Moh. Sani	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
815.		Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
816.		s.d.a.	Bimas	

1	2	3	4	5
	Kel. Susukan.			
817.	Mohd. Nasir	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pasar Rebo.
818.	Suwardi	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Ketua	
819.	Noman	Anggota Koordina- tor K.P.P.S.	Babinsa	
820.	Sugima	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Gedong.			
821.	M. Atam	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pasar Rebo.
822.	Mohd. Hasan	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
823.	M. Kosim	Anggota Koordina- tor K.P.P.S.	Babinsa	
824.	Salimin Sis- wo S.	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Tjeger.			
825.	Saali	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pasar Rebo.
826.	Zainuddin	Anggota/merangkap Wakil Koordinator dinator K.P.P.S.	Djuru Tulis	
827.	Kotjang	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
828.	Abdullah	s.d.a.	Babinsa	

1	2	3	4	5
	Kel. Setu.			
829.	Mugenh	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pasar Rebo.
830.	Sani T.	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Djuru Tulis	
831.	Sadiono	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
832.	Mail	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Baru.			
833.	Moh. Tohir	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pasar Rebo.
834.	Saam	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Kep. Ling- kungan	
835.	A. Gani	Anggota Koordinator K.P.P.S. s.d.a.	Babinsa	
835.	A. Gani		Bimas	
836.	Alex Umasi		Bimas	
	Kel. Tjidjan- tung.			
837.	B. Midjan	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pasar Rebo.
838.	M. Boman	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Djuru Tulis	
839.	Atsip	Anggota Koordina- tor K.P.P.S.	Bimas	
840.	Atang	s.d.a.	Babinsa	

1	2	3	4	5
	Kel. Kali Sari.			
841.	Moh. Nur	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pasar Rebo.
842.	Sakatma	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
843.		Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
844.	Reto	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Tjiratjas.			
845.	Djohari	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pasar Rebo
846.	Niih	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
847.	Sugima	Anggota Koordina- tor K.P.P.S.	Bimas	
848.	Utjup	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Pekajon.			
849.	H. Nawawi	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pasar Rebo.
850.	Abd. Rachman	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
851.	Sarmo	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
852.	M. Nur	s.d.a.	Babinsa	

1	2	3	4	5
	Kel. Tjibubur.			
853.	A. Hardjan	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pasar Rebo.
854.	M. Ali	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
855.	Samingun	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Bimas	
856.	Rumanta	s.d.a.	Babinsa	
	Kel. Kelapa Dua Wetan.			
857.	Lisan	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pasar Rebo.
858.	Asmin	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
859.	Ibrahim	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
860.	Sandimin	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Tjipajung.			
861.	Ajar	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pasar Rebo.
862.	Komper	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
863.	Saaman	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
864.	Kotjang	s.d.a.	Bimas	

1	2	3	4	5
	Kel. Mundjul.			
865.	Sakim	Anggtoa/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pasar Rebo.
866.	Supardi	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
867.	Tamani	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
868.	Sandimin	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Tjilang- kap.			
869.	M. Kimin	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pasar Rebo.
870.	Wachjat	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
871.	Sumanta	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
872.	Afendi	s.d.a.	Bimas	
	Kel. Pondok Ranggon.			
873.	Samin	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pasar Rebo.
874.	Djawa Kadir	Anggota/merangkap Wakil KetuA Koor- dinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
875.	Miskat	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
876.	Efendi	s.d.a.	Bimas	

1	2	3	4	5
	Kel. Bambu Apus.			
877.	Keling	Anggota/merangkap Ketua Koordinator K.P.P.S.	Lurah	Ketj. Pasar Rebo.
878.	Sanwani	Anggota/merangkap Wakil Ketua Koordinator K.P.P.S.	Wakil Lurah	
879.	M. Sidik	Anggota Koordinator K.P.P.S.	Babinsa	
880.	Oeding	s.d.a	Bimas	

Djakarta, 1 Pebruari 1971.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH DCI DJAKARTA**

Tjap/ttd.

(ALI SADIKIN)

Letnan Djenderal K.K.O.

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
Nomor : 0529/III/2/1971.**

tentang

**PENGANGKATAN PETUGAS SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA PEMILIHAN
DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA ;**

- Membatja kembali** : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta tanggal 14 April 1970 No. Aa.18/3/3/70 tentang Pembentukan kembali Sekretariat-Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta yang mendesak, perlu mengangkat petugas-petugas yang akan membantu kegiatan-kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta;
2. Bahwa petugas-petugas tersebut nama-namanja dalam daftar lampiran Surat, Keputusan ini dianggap tjakap dan mempunyai pengalaman untuk melaksanakan tugas yang dibebankan padanja.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 10 tahun 1964;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
3. Undang-undang No. 2 tahun 1961;
4. Keputusan Presiden No. 2 tahun 1971 tentang Pembinaan Pemerintahan D.C.I. Djakarta Raya;
5. Undang-undang No. 15 tahun 1969 jo. P.P. No. 1 tahun 1970;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1970 jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 th. 1970;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.1/14/1970 tanggal 19 Pebruari 1970.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : I. Mengangkat para petugas yang nama-namanja tersebut

dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ruang (2), jabatan ruang (3) diangkat sebagai Liaison Officer/Non-Organik ruang (4), terhitung mulai tanggal ruang (5) pada Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta.

- II. Gadjil/Honorarium dan uang lembur yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran 9 A.3.1.250.
- III. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- W. Segala sesuatu akan diperbaiki/disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekurangan/kekeliruan tentang isi Surat Keputusan ini.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta,
Pada tanggal : 10 Mei 1971.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH D.C.I. JAKARTA**

A.n.b.

(A. WIRIADINATA)

Laksamana Muda Udara.
Pd. WAKIL KEPALA DAERAH.

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini
disampaikan kepada:

- Jth : 1. Panitia Pemilihan Indonesia,
 2. Sekda/Asisten Sekda D.C.I. Djakarta,
 3. Direktorat I/Pemerintahan,
 4. Kepala Biro IV/Personalia D.C.I. Djakarta,
 5. Kepala Biro I/s/d IV PPD D.C.I. Djakarta,
 6. Bendaharawan P.P.D. D.C.I. Djakarta,
 7. Yang bersangkutan,
 8. Arsip.

**LAMPIRAN : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/
Ketua Panitia Pemilihan Daerah Daerah Chu-
sus Ibukota Djakarta, No. 0529/III/2/1971
tanggal 10 Mei 1971.**

No.	Nama	Djabatan	Organik Non Organik	Keterangan
1.	Letnan Sarbini	Liasion Officer	Organik	Diangkat mulai tanggal 1 Mei 1971.
2.	Djoko Soedono	Staf Biro Perhubungan & Perbekalan.	Non Organik	19 April 1971.
3.	Winardi	Staf Biro Pengawasan	Non Organik	19 April 1971.
4.	Ramli	Sopir	Non Organik	16 April 1971.
5.	Slamet Mulhadi	Sopir	Non Organik	16 April 1971.
6.	Sarmin	Sopir	Non Organik	29 April 1971.
7.	Supri	Pesuruh	Non Organik	1 April 1971.
8.	Herpangi	Pesuruh	Non Organik	1 April 1971.
9.	Sudarmi	Pesuruh	Non Organik	1 April 1971.

**GEBURNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH D.C.I. DJAKARTA**

A.n.b.

t.t.d.

(A. WIRIADINATA)

Laksamana Muda Udara.
Pd. WAKIL KEPALA DAERAH. .

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Nomor : 0715/III/2/1971.

tentang

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMERIKSAAN TINGKAT I
DAERAH D.C.I. DJAKARTA.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA PEMILIHAN
DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA ;**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengadakan pemeriksaan mengenai sjarat-sjarat jang harus dipenuhi oleh seorang terpilih dan menentukan permulaan keanggotaan seorang terpilih, perlu segera diangkat anggota-anggota Panitia Pemeriksaan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1971;
2. Bahwa Pedjabat-pedjabat jang namanja tertjantum dalam ruang 2 Daftar Lampiran Surat Keputusan ini dianggap tjakap dan memenuhi sjarat untuk disamping tugas djabatannja sehari-hari, diangkat dalam kedudukan jang tertjantum dalam ruang 4 Daftar Lampiran Surat Keputusan ini.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.10 tahun 1964 tentang penegasan Djakarta sebagai Ibukota Negara R.I.;
2. Undang-undang No.18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No.6 tahun 1969;
3. Undang-undang No.2 tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Chusus Ibukota Djakarta;
4. Keputusan Presiden No.22 tahun 1971 tentang Pembinaan Pemerintah D.C.I. Djakarta Raya.
5. Undang-undang No.15 tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1970;
6. Undang-undang No.16 tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1970;
7. Radiogram Mendagri/Ketua P.P.I. tanggal 7 Djuli 1971 No.101/22/1971.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini mengangkat Pedjabat-pedjabat jang namanja tertjantum pada ruang 2 Daftar Lampiran Surat Keputusan ini, untuk disamping tugas djabatannja sehari-hari, masing-masing diangkat dalam kedudukan jang tertjantum dalam ruang 4 Daftar Lampiran Surat Keputusan ini.
- II. Pembiajaan untuk keperluan para Anggota Panitia Pemeriksaan Tingkat I Daerah D.C.I. Djakarta sebagaimana tersebut pada ad.I diatas dibebankan pada mata anggaran Pemilu 9A.5.1.260.
- III. Segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinja, djika dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Djakarta,
Pada tanggal : 4 Agustus 1971.

**Pd. GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH D.C.I. DJAKARTA.**

ttd.

(ALI SADIKIN)

Letnan Djenderal KKo.

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada

- Jth. :**
1. Menteri Dalam Negeri/Ketua P.P.I. ,
 2. Para Wakil Kepala Daerah DCI Djakarta,
 3. Para Wakil Pimpinan DPRD—GR DCI Djakarta,
 4. Ketua MUSPIDA DCI Djakarta,
 5. Para Anggota MUSPIDA DCI Djakarta,
 6. Para Anggota PPD DCI Djakarta,
 7. Para Anggota BPH DCI Djakarta,
 8. Sekda/Assisten Sekda DCI Djakarta,
 9. Ketua Harian BP—BPP DCI Djakarta,
 10. Para Kepala Direktorat/Biro/Inspektorat DCI Djakarta,
 11. Para Walikota/Ketua P.P. Kota,
 12. Para Kepala Dinas/Kantor/Djawatan DCI Djakarta,
 13. Jang bersangkutan,
 14. Pimpinan Parpol/Golkar DCI Djakarta,
 15. Para Tjamat/Ketua P.P.S.,
 16. Para Lurah.
 17. Arsip.
-

LAMPIRAN : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah
D.C.I. Djakarta, tanggal 4 Agustus 1971 No. 0715/III/2/1971.

Nomor Urut	N A M A	Dijabat	Diangkat pada Panitia Pemeriksaan Tingkat I Daerah D.C.I. Djakarta
1	2	3	4
1.	Wirjadi S.H.	Kepala Direktorat VII DCI Djakarta	Anggota merangkap Ketua
2.	AKBP Drs. Junusi Jusuf	Kasie Intel Komdak Metro Daya.	Anggota merangkap Wakil Ketua
3.	Soetjipto Wiro-sardjono, M.Sc.	Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta.	Anggota merangkap Sekretaris
4.	H. Ajatullah Saleh	Wakil Ketua DPRD-GR D.C.I. Djakarta	Anggota
5.	M. Moefreni Moemin	Anggota DPRD-GR D.C.I. Djakarta	Anggota

**Pd. GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH D.C.I. DJAKARTA**

t.t.d.

(ALI SADIKIN)
Letnan Djenderal KKO.

PANITIA PEMERIKSA TK. I D.C.I. DJAKARTA

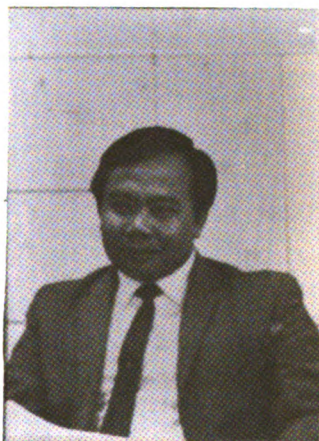


1. WIRJADI S.H.

Kepala Direktorat VII/Chusus
D.C.I. Djakarta.
Ketua Panitia Pemeriksa Daerah
D.C.I. Djakarta.

**2. SOETJIPTO WIROSARDJONO,
M.Sc.**

Kepala Kantor Sensus & Statistik
D.C.I. Djakarta.
Sekretaris Panitia Pemeriksa D.C.I.
Djakarta.



3. Drs. JUNUSI JUSUF, A.K.B.P.

Unsur dari Komdak Metro Djaya
Wakil Ketua Panitia Pemeriksa Daerah
D.C.I. Djakarta.



4. H. AJATULLAH SALEH,

**Wakil Ketua DPRD—GR D.C.I. Djakarta/
Anggota Panitia Pemeriksa Tingkat I
D.C.I. Djakarta.**

5. M. MOEFRENI MOE'MIN.

**Anggota DPRD—GR D.C.I. Djakarta /
Anggota Panitia Pemeriksa Tingkat I
D.C.I. Djakarta.**





Panitia Pemeriksa (Tjalon Terpilih) Tk. I D.C.I. Djakarta mengadakan sidang dan melaporkan kepada P.P.D. D.C.I. Djakarta tentang hasil pemeriksaan Tjalon-tjalon.

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Nomor : 0716/III/2/1971

tentang

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMERIKSAAN TINGKAT I
DAERAH D.C.I. DJAKARTA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA ;**

Membatja : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta tanggal 4 Agustus 1971 No.0715/III/2/1971 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemeriksaan Tingkat I Daerah D.C.I. Djakarta.

Menimbang : 1. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Pengangkatan Anggota Panitia Pemeriksaan Tingkat I Daerah D.C.I. Djakarta seperti tersebut diatas, perlu segera dibentuk Sekretariat pada Panitia Pemeriksaan Tingkat I Daerah D.C.I. Djakarta ;

2. Bahwa jang tersebut nama-namanja dalam ruang 2 dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini dianggap tjakap dan memenuhi sjarat untuk disamping tugas djabatannja sehari-hari, diangkat dalam kedudukan jang tertjantum dalam ruang 4 Daftar Lampiran Surat Keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 10 tahun 1964 tentang Penegasan Djakarta sebagai Ibukota Negara R.I. ;

2. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969 ;

3. Undang-undang No. 2 tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Chusus Ibukota Djakarta ;

4. Keputusan Presiden No. 22 tahun 1971 tentang Pembinaan Pemerintah D.C.I. Djakarta Raya ;

5. Undang-undang No. 15 tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 ;

6. Undang-undang No. 16 tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970.
7. Radiogram Mendagri/Ketua PPI tanggal 7 Djuli 1971 No. 101/22/1971.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini membentuk Sekretariat pada Panitia Pemeriksaan Tingkat I Daerah DCI Djakarta seperti diangkat dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No. 0715/III/2/1971 tanggal 4 Agustus 1971.
- II. Mengangkat mereka jang nama-namanja tertjantum dalam ruang 2 Daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Sekretariat Panitia Pemeriksaan Tingkat I Daerah DCI Djakarta.
 - III. Sekretariat dimaksud ad. II diatas bertugas membantu Panitia Pemeriksaan Tingkat I Daerah D.C.I. Djakarta dalam mempersiapkan dan menjelenggarakan/melaksanakan kegiatan2nja sehari-hari.
 - IV. Pembiajaan untuk keperluan Sekretariat Panitia Pemeriksaan Tingkat I Daerah DCI Djakarta dibebankan pada Anggaran 9A. 5.1.260.
 - V. Segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinja, djika dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : D j a k a r t a.

Pada tanggal : 4 Agustus 1971.

**Pd. GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH D.C.I. DJAKARTA**

ttd.

(ALI SADIKIN)

Letnan Djenderal KKo.

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Jth.
1. Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI,
 2. Para Wakil Kepala Daerah DCI Djakarta,
 3. Para Wakil Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta,
 4. Ketua Muspida DCI Djakarta,
 5. Para Anggota Muspida DCI Djakarta,
 6. Para Anggota BPH DCI Djakarta,
 7. Sekda/ Ass. Sekda DCI Djakarta,
 8. Ketua Harian BP—BPP DCI Djakarta,
 9. Para Kepala Direktorat/Biro/Inspektorat DCI Djakarta,
 10. Para Kepala Dinas/Kantor/Djawatan DCI Djakarta,
 11. Jang bersangkutan,
 12. A r s i p.

**LAMPIRAN : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/
Ketua Panitia Pemilihan Daerah D.C.I.
Djakarta, tanggal 4 Agustus 1971 No.
0716/III/2/1971.**

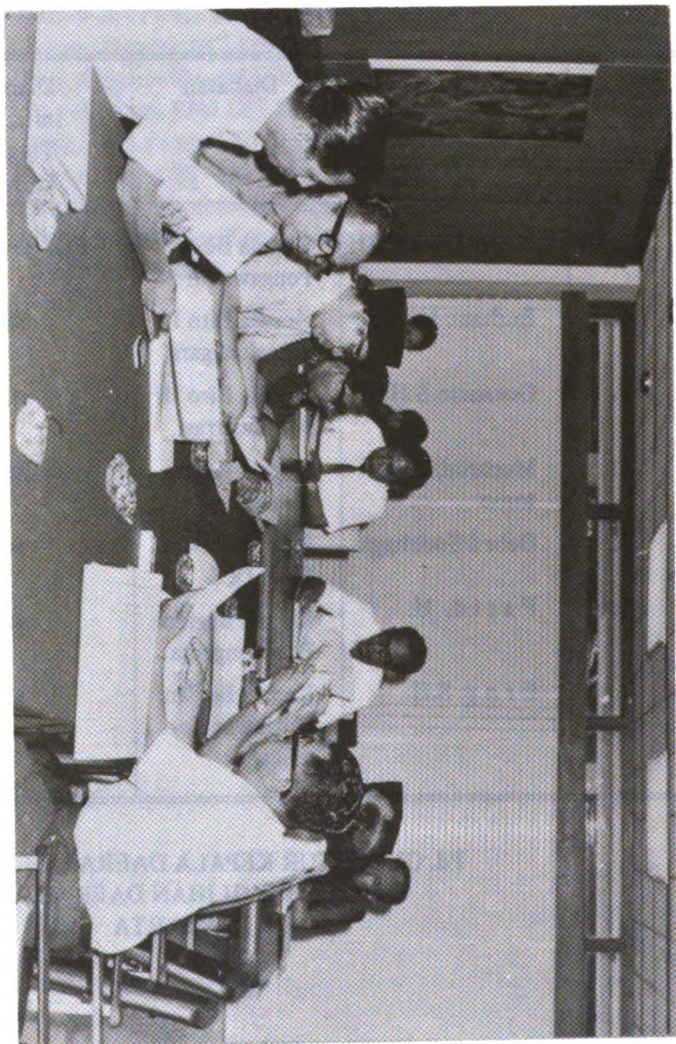
No. Urut	N a m a	Djabatan	Diangkat pada Pa- nitia Pemeriksaan Tingkat I Daerah DCI Djakarta.
1.	E. Pandjaitan S.H.	Kepala Biro IV/ Pengawasan	Staf Sekretariat
2.	Burhanuddin Hs.	Kepala Biro I/ Penjelenggara	sda
3.	Goenarto S.H.	Kepala Biro II/ Administrasi.	sda.
4.	Muchroddi Su- tomo	Kepala Bagian Keamanan	sda.
5.	Oebed Soebhagio	Bendaharawan PPD DCI	sda.
6.	F a r i d. H.	Kepala Bagian Penjelenggara	sda.
7.	E r n y S.H.	Kepala Bagian Pengawas Ke- uangan.	sda.

**Pd. GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
D.C.I. DJAKARTA**

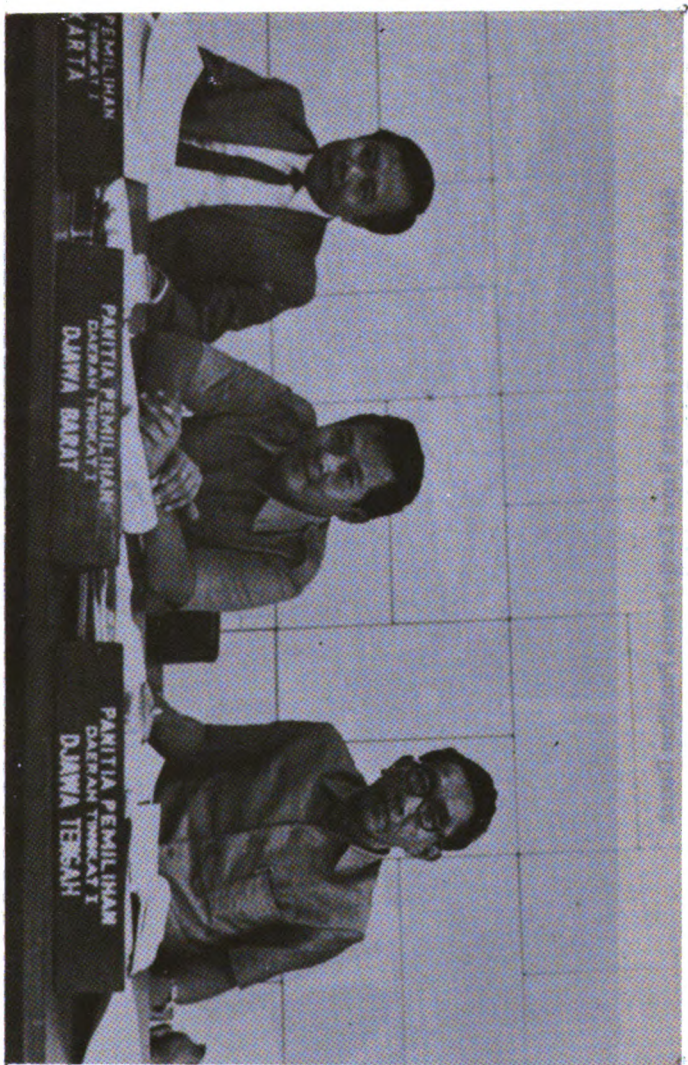
t.t.d.

(ALI SADIKIN)

Letnan Djenderal KKo.



Rapat kerja routine Panitia Pemilihan Daerah DKI Jakarta



Rapat Kerja Sekretaris P.P.D. TK. I Seluruh Indonesia.



**Salah satu Snapshot sewaktu Rapat Kerja Panitia Pemilihan Daerah
Tingkat I seluruh Indonesia.**

IV
PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PEMILIH

DAFTAR ISI

Halaman

BAB IV. PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PEMILIH

1. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri/
Ketua Lembaga Pemilihan Umum dan Kepala
Biro Pusat Statistik No. $\frac{124 \text{ tahun } 1970}{P. 15/70}$ tanggal
31 Maret 1970 tentang Penjelenggaraan Pendaftaran Pemilih dan Penduduk dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum serta Pendaftaran Rumah Tangga dalam rangka persiapan pelaksanaan Sensus Penduduk. 708
2. Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta No.520/III/1/1970 tanggal 23 Mei 1970 tentang Pembuktian Warga Negera Indonesia dengan lampiran-lampiran (3 lembar) 715
3. Nota Dinas Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta No.536/III/1/1970 tanggal 29 Mei 1970 tentang Pembentukan Kelompok Petugas Pendaftaran Sensus dan Pemilih 724
4. Nota Dinas Panitia Daerah DCI Jakarta No.547/III/1/1970 tanggal 1 Djuni 1970 tentang Petunjuk dalam Proses Pendaftaran 726
5. a. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No.24/L.P.U./1970 tanggal 8 Djuni 1970 tentang Waktu Pendaftaran Pemilih/Penduduk 731
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No.25/LPU/1970 tanggal 8 Djuni 1970 tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai tjara melakukan Pendaftaran Pemilih Penduduk 733
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No.26/LPU/1970 tanggal 8 Djuni 1970 tentang Pemberian Suara oleh Pemilih jang tjatjad badan dan penjampaian Surat Panggilan bagi pemilih jang tidak mempunyai tempat tinggal tetap 742

	Halaman
6. Pengumuman Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.636/III/2/1970 tentang Permulaan Pendaftaran Pemilih	744
7. Nota Dinas Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.648/III/1/1970 tanggal 4 Djuli 1970 tentang Dispensasi Keidja bagi Petugas Pendaftaran Pemilih/Penduduk	745
8. Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.654/III/1/1970 tanggal 8 Djuli 1970 tentang Pendaftaran Pemilih	747
9. Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.656/III/1/1970 tanggal 10 Djuli 1970 tentang Djumlah Penduduk dan Pemilih	749
10. Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.679/III/1/1970 tanggal 21 Djuli 1970 tentang Mutasi/Perpindahan Penduduk	751
11. Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.702/III/1/1970 tanggal 21 Djuli 1970 tentang Pengumuman Daftar Pemilihan Sementara.	753
12. Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.723/III/1/1970 tanggal 8 Agustus 1970 tentang Penjusunan Daftar Pemilih dengan lampiran (1)	754
13. Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.744/III/1/1970 tanggal 19 Agustus 1970 tentang Berita Atjara Djumlah Penduduk	757
14. Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.746/III/1/1970 tanggal 19 Agustus 1970 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pemilih	759
15. Petundjuk untuk Pendaftaran Penduduk dan Pemilih bagi jang tidak bertempat tinggal tetap tanggal 20 Agustus 1970	761
16. Nota Dinas Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.753/III/1/1970 tanggal 24 Agustus 1970 tentang Djumlah/Alamat T.P.S.	763
17. Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.804/III/1/1970 tanggal 9 September 1970 tentang Mutasi/Perpindahan Penduduk	765
	705

	Halaman
18. Nota Dinas Panitia Pemilihan Daerah No.826/III/1/1970 tanggal 15 September 1970 tentang Penandatanganan Kartu A.1	766
19. Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.853/III/1/1970 tanggal 21 September 1970 tentang Djadwal dan Tata Tjara Pendaftaran Para Tuna, Hotel/Losmen, Rumah Sakit, Rumah Pendjara	767
20. Tata Tjara Pendaftaran Sensus dan Pemilih untuk Para Tuna tanggal 1 Oktober 1970	773
21. Surat Tugas Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.901/III/1/1970 tanggal 12 Oktober 1970 tentang Penelitian dalam penjelesaian penandatanganan Kartu A.1; Daftar A, Berita Atjara, AA dan AA1, pada wilayah Ketjamatan/Kelurahan mulai tanggal 14 Oktober s/d 24 Oktober 1970	777
22. Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.914/III/2/1970 tanggal 17 Oktober 1970 tentang Djadwal Berita Atjara	778
23. Nota Dinas Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.940/III/1/1970 tanggal 27 Oktober 1970 tentang Penarikan/Pentjabutan Sisa Formulir-formulir jang tidak digunakan	779
24. Nota Dinas Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.948/III/1/1970 tanggal 30 Oktober 1970 tentang petundjuk-petundjuk penggunaan A.4	781
25. Surat Panitia Pemilihan Daerah No.958/III/1/1970 tanggal 5 Nopember 1970 tentang Daftar Pemilih Tambahan Model A.	784
26. Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.0060/III/1/1971 tanggal 25 Djanuari 1971 tentang Penjelesaian Pendaftaran para Tuna jang berhak memilih	785
27. Nota Dinas Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.0157/III/1/1971 tanggal 20 Pebruari 1971 tentang Thema dan kegiatan penerangan dan laporan penjelesaian Daftar A dan Daftar KPPS	786

	Halaman
28. Nota Dinas Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.0168/III/1/1971 tanggal 23 Pebru- ari 1971 tentang Pendaftaran Pemilih baru . . .	778
29. Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.0241/III/1/1971 tanggal 23 Pebruari 1971 tentang Penjelesaian Pendaftaran Para Tuna jang berhak memilih dengan lampiran 1	789
30. Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.0359/III/1/1971 tanggal 19 April 1971 ten- tang Pendaftaran Pemilih jang tertinggal . . .	792
31 a. Instruksi Gubernur Kepala Daerah/Ketua Pani- tia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.0384/ III/1/1971 tanggal 27 April 1971 tentang Pengadaan TPS di Kantor-kantor	793
b. Surat PPD DCI Djakarta No.0385/III/1/1971 tanggal 27 April 1971 tentang Pengadaan TPS di Kantor-kantor	795
c. Pedoman & Petundjuk untuk Pembuatan TPS di Kantor-kantor/Perusahaan-perusahaan wilajah DCI Djakarta No.0400/III/1/1971	797
32. Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.0443/III/1/1971 tanggal 12 Mei 1971 ten- tang Pedoman dan Petundjuk dalam Penggunaan Model A.4, bagi Karyawan Pemilih di TPS Chusus/Kantor	802
33. Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.0464/III/1/1971 tanggal 17 Mei 1971 tentang Penjelesaian Formulir A4 untuk Karyawan Pe- milih pada TPS Chusus/Kantor	804
34. Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.0508/III/1/1971 tanggal 31 Mei 1971 ten- tang Pelaksanaan hak pilih dengan penggunaan formulir A4	805
35. Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.0514/III/1/1971 tanggal 31 Mei 1971 ten- tang Pendaftaran Pemilih jang belum terdaftar .	806

**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM DAN
KEPALA BIRO PUSAT STATISTIK
124 TAHUN 1970
NOMOR P. 15/70**

TENTANG

**PENJELENGGARAAN PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENDUDUK
DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM
SERTA PENDAFTARAN RUMAH TANGGA DALAM RANGKA
PERSIAPAN PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK.**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
DAN KEPALA BIRO PUSAT STATISTIK.**

- Menimbang : a. bahwa data-data hasil tahap persiapan Sensus Penduduk dapat dimanfaatkan bagi keperluan persiapan penjeleenggaraan Pemilihan Umum dan untuk penentuan jumlah wakil-wakil dalam Badan Permusjawaratan/Perwakilan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pasal 20 jo pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 perlu diadakan pentjataan nama-nama pemilih serta keterangan-keterangan lainnja dan perlu diadakan pentjataan jumlah jiwa penduduk dari tiap-tiap rumah tangga;
- c. bahwa untuk melaksanakan apa jang diuraikan pada b diatas diperlukan terlebih dahulu keterangan-keterangan dasar jang akan diperoleh dari hasil kegiatan persiapan Sensus Penduduk tahun 1970 — 1971;
- d. bahwa untuk kelantjaran dan efisiensi kegiatan Pemilihan Umum disatu pihak dan Kegiatan Sensus Penduduk dilain pihak, maka perlu adanja pengaturan tentang koordinasi dan kerdja-sama jang djelas diantara kedua kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1960;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1968;
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 1969;
4. Undang-undang Nomor 16 tahun 1969;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1970;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1970.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI/ KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM DAN KEPALA BIRO PUSAT STATISTIK TENTANG PENJELENGGA- RAAN PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENDUDUK DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMI- LIHAN UMUM SERTA PENDAFTARAN RUMAH TANG- GA DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK.

- PERTAMA** : Kegiatan Pendaftaran Pemilih dan Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia oleh Panitia Pendaftaran Pemilih dimulai tanggal 5 Djuli 1970.
- KEDUA** : Kegiatan dalam rangka melaksanakan pembentukan Blok Sensus dan Pendaftaran Rumah Tangga oleh Biro Pusat Statistik mulai pada tanggal 5 Djuli 1970.
- KETIGA** : Pendaftaran Penduduk Warganegara Indonesia dalam rangka persiapan Pemilihan Umum serta Pendaftaran Rumah Tang- ga dalam rangka persiapan Sensus Penduduk, pelaksanaan- nya diintegrasikan dan dikerdjakan bersama-sama oleh petugas-petugas dari Panitia Pendaftaran Pemilih dan Kan- tor Sensus dan Statistik Daerah.
- KEEMPAT** : Penjusunan Daftar Pemilih dilakukan berdasarkan hasil kegiatan seperti dimaksud KETIGA diatas oleh Panitia Pendaftaran Pemilih.
- KELIMA** : Antara Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Kepala Kantor Sensus dan Statistik Daerah Tingkat I diadakan kerdja-sama dalam mengatur penjelenggaraan pendaftaran penduduk jang diintegrasikan dengan penju- sunan Daftar Pemilih.
- KEENAM** : Guna dapat memahami tata-tjara pekerdjaan pendaftaran penduduk dengan mempergunakan surat formulir Daftar D dari Biro Statistik, jang diintegrasikan dengan penjusunan Daftar Pemilih dengan mempergunakan surat formulir Model A dari Lembaga Pemilihan Umum, maka pada tiap- tiap Santiadji Panitia Pemilihan Daerah perlu diadakan latihan praktek dilapangan mengenai pengintegrasian kegiat- an ini.
- KETUDJUH** : Tata-tjara pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dimuat dalam Lampiran Keputusan Bersama ini.

KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dan/atau Kepala Biro Pusat Statistik.
Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,
Pada tanggal 31 Maret 1970.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

t.t.d.

AMIRMACHMUD

KEPALA BIRO PUSAT STATISTIK,

t.t.d.

M. ABDULMADJID

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM
NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM DAN KEPALA
BIRO PUSAT STATISTIK NOMOR 124 TAHUN 1970**
P. 15/70.

1. PENGERTIAN.

- a. Istilah Pendaftaran Penduduk jang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970, pengertiannya sama dengan „Pendaftaran Rumah Tangga” jang dimaksud dalam Sensus Penduduk oleh Biro Pusat Statistik.
- b. Pengertian „Penduduk” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970 adalah hanja Penduduk Warga Negara Indonesia, sedangkan pengertian „Penduduk” jang dimaksud dalam Sensus oleh Biro Pusat Statistik adalah baik Penduduk Warga Negara Indonesia maupun Penduduk Warga Negara Asing.
- c. Petugas adalah Warga Negara Indonesia jang mendapat surat pengangkatan sebagai petugas pendaftaran pemilih dan/atau petugas Sensus.

2. PENDAFTARAN PENDUDUK.

- a. Panitia Pendaftaran Pemilih dan aparaturnya Biro Pusat Statistik di daerah bertanggung-jawab atas kelantjaraan pelaksanaan Pendaftaran Penduduk jang bertempat tinggal tetap.
Hasil daripada pendaftaran ini diserahkan kepada Kepala Desa/Daerah setingkat Desa.
- b. Untuk keperluan Pendaftaran Penduduk ini dipergunakan Daftar D (Daftar jang telah dibuat untuk keperluan persiapan Sensus Penduduk 1971).
- c. Tjara pendaftaran penduduk bagi warga negara jang tidak bertempat tinggal tetap seperti para gelandangan dan suku-suku Bangsa jang terasing serta jang tjara hidupnya berpindah dari satu tempat ke tempat lain akan diatur lebih lanjut.

3. PENJUSUNAN DAFTAR PEMILIH.

- a. Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih bertanggung-jawab atas pekerjaan penjusunan Daftar Pemilih.
- b. Untuk penjusunan Daftar Pemilih dipergunakan formulir Model A (Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970).
- c. Petugas-petugas aang melakukan Pendaftaran Penduduk dan jang menjusun Daftar Pemilih mengatur langkah-langkahnya sebagai berikut:

- (1) Mendaftar Penduduk jang bertempat tinggal tetap dengan mempergunakan Daftar D dan membuatnja dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Selesai pendaftaran untuk seluruh wilayah kerdjanja, petugas membuat rekapitulasi dari Daftar D sehingga diperoleh angka djumlah penduduk Warga Negara Indonesia serta djumlah seluruh penduduk termasuk penduduk Warga Negara Asing jang bertempat tinggal tetap dalam wilayah kerdjanja.
- (3) Selandjutnja petugas Panitia Pendaftaran Pemilih menjalinnja serta menjusunnja setjara abdjad kedalam formulir Model A (Daftar Pemilih).
- (4) Penjusunan Daftar Pemilih bagi penduduk jang tidak bertempat tinggal tetap (gelandangan, suku-suku Bangsa terasing dan lain sebagainya), tata-tjara pelaksanaannja akan diatur lebih landjut.

4. PEMBENTUKAN BLOK SENSUS DAN TEMPAT PEMBERIAN SUARA (T.P.S.).

- a. Pembentukan Blok Sensus adalah sepenuhnya tugas Biro Pusat Statistik dan dilakukan oleh aparaturnja didaerah. Sebagaimana telah ditetapkan oleh Biro Pusat Statistik tiap Blok Sensus terdiri dari 60 s/d 125 Rumah Tangga untuk daerah-daerah Pedesaan di Djawa – Madura dan antara 30 s/d 70 Rumah Tangga untuk daerah-daerah kota Djawa-Madura.
Diperkirakan, bahwa satu blok Sensus atau penggabungan dari 2 a 3 Blok Sensus jang berdekatan letaknja akan meliputi 200 s/d 300 pemilih.
- b. Penetapan wilayah T.P.S. dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970.
Apabila memenuhi ketentuan-ketentuan jang berlaku, maka hasil blok Sensus tersebut dapat dipergunakan sebagai penetapan wilayah T.P.S.

5. LATIHAN BAGI PETUGAS.

Untuk penjelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan penjusunan Daftar Pemilih akan diadakan latihan praktis petugas-petugas didesa, sehingga mereka akan mengerti dan menguasai tugasnja:

- a. Tjara melakukan Pendaftaran Penduduk jang bertempat tinggal tetap dan pembentukan Blok Sensus akan diberikan oleh Instruktur-instruktur Biro Pusat Statistik didaerah.
- b. Tjara menjusun Daftar Pemilih akan diberikan oleh Panitia Pemilihan Daerah.

6. PEMBIAJAAN.

- a. Biaya pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ditanggung bersama oleh Lembaga Pemilihan Umum dan Biro Pusat Statistik dan akan ditetapkan lebih lanjut.
- b. Biaya pelaksanaan penjurusan Daftar Pemilih ditanggung oleh Lembaga Pemilihan Umum.
- c. Biaya Pendaftaran Penduduk serta penjurusan Daftar Pemilih bagi Warga Negara yang tidak bertempat tinggal tetap akan diatur lebih lanjut.

Djakarta, 31 Maret 1970

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

t.t.d.

AMIRMACHMUD

KEPALA BIRO PUSAT STATISTIK,

t.t.d.

M. ABDULMADJID

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
Djalan Imam Bondjol No. 13
DJAKARTA**

Nomor : 520/III/1/70
Lamp. : 3 (tiga)
Perihal : Pembuktian W.N.I.
(turunan Asing) untuk
pendaftaran dalam daftar
Pemilih.

Jakarta, 23 Mei 1970

KEPADA
JTH. 1. PARA WALIKOTA/KETUA
PP. KOTA,
2. PARA TJAMAT/KETUA PPS.
3. PARA LURAH/KETUA PPP
SE D.C.I. di
D J A K A R T A .

Sambil menunggu ketentuan dari L.P.U./P.P.I.; guna pegangan oleh petugas pendaftaran dalam melaksanakan pendaftaran pemilih bagi warga Negara Indonesia (turunan Asing); dapat dijadikan dasar, *bukti-bukti*:

1. Jang dimaksudkan dalam Surat Menteri Kehakiman R.I. tanggal 5-1-1970 J.A. 2/1/9 jaitu :
 - a. formulir C (pasal 12 (1) huruf a s/d j P.P. No. 20/1959).
 - b. formulir D (pasal 12 (1) huruf k P.P. No. 20/1959 jo. pasal 16 P.P. No. 5/1961.
 - c. Surat Keputusan Presiden jang memberikan perwarga Negara (Naturalisasi).
 - d. Surat pernyataan keterangan melepaskan kewarga-negaraan R.R.T.
 - e. Putusan Hakim.
2. Ketentuan/persyaratan untuk memperoleh K.T.P. tersebut dalam Surat Kepala Kantor Urusan Penduduk DCI Jakarta tanggal 25/9-1968 No. 1088/IX/KUP 68. (Untuk djelasnja salinan terlampir).

Persyaratan tentang umur yang dimaksudkan 17 tahun dalam pasal 9 U.U. No. 15/1969; dapat diambil batas terakhir dari pendaftaran pemilih yakni 4 Oktober 1970, (dengan arti kata lain bila usianya genap 17 tahun pada tanggal „4 Oktober 1970” walaupun pada waktu didaftarkan antara tanggal 5/7 – s/d 4/10 ini masih kurang dari 17 tahun; dapat didaftarkan sebagai calon pemilih pada Daftar Pemilih.

Demikian agar maklum.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Sekretaris,

Tjap/ttd.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

TEMBUSAN:

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
2. Sekda,
3. Direktorat I / Pemerintahan,
4. Biro V D.C.I.
5. Kantor Urusan Penduduk DCI,
6. Kantor Urusan Sensus & Statistik DCI,
7. A l a s .

SALINAN

DEPARTEMEN KEHAKIMAN

Nomor : J.A. 2/1/9 Djakarta, 5 Djanuari 1967.
Lampiran : -2-
Perihal : Prosedur penggantian Nama
berdasarkan Kep. Pres. Kab. No.
No. 127/u/Kep/12/1966.-

Kepada
Jth. Semua Bupati/KDH atau
Walikota/KDH
diseluruh
INDONESIA

SURAT EDARAN

- I. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 dalam mana Kepala Daerah atau Pedjabat yang ditundjuknja; atas nama Menteri Kehakiman memberikan tanda penerimaan atas surat pernyataan ganti nama, maka guna mentjapai kelantjaran pekerdjaan dan keberesan administrasi dan untuk keseragaman dalam prosedur tersebut bersama ini disampaikan:
 - a. Tjontoh formulir surat pernyataan penggantian nama yang seragam bagi pemohon.
 - b. Salinan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966.
- II. Beberapa pendjelasan guna mendjadi pedoman dalam melaksanakan prosedur penggantian nama tersebut ialah:
 1. Guna memenuhi Bab. II. pasal 2 ayat 3 Keputusan Presidium Kabinet tersebut, mengenai surat bukti kewarganegaraan maka pada setiap surat pernyataan yang dimaksud diatas, **dilampirkan salinan surat bukti kewarganegaraan R.I. yang telah disesuaikan dengan aslinja oleh petugas yang bersangkutan, umpamanja:**
 - formulir C (pasal 12 ayat 1 huruf a sampai dengan j. P.P. No. 20 tahun 1959).

- formulir D (pasal 12 ayat 1 huruf k P.P. No. 20 tahun 1959 jo. pasal IV ayat 2, pasal 16 P.P. No. 5 tahun 1961).
 - Surat Keputusan Presiden jang memberikan kewarganegaraan (Naturalisasi).
 - Surat pernyataan keterangan melepaskan Kewarganegaraan R.R.T.
 - Putusan Hakim.
2. Djika formulir diperlukan oleh Walikota, maka formulir disesuaikan dengan kebutuhannya, antara lain sebagai tjontoh:
- kata-kata dalam kalimat pertama „laki-laki/wanita” diganti dengan kata-kata „Wali anak-anak tersebut dibawah ini”.
 - sub e dapat dihapuskan seluruhnja.
 - sub f antara kata-kata „anak” dan „jang” ditambahkan kata-kata „jang ada dibawah perwaliannya”.
 - dalam kolom nama lama dan nama baru kata-kata „pemohon” dan „istri” dapat dihapuskan.

MENTERI KEHAKIMAN,

t.t.d.

(PROF. OEMAR SENO ADJI S.H.).

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Sekretaris Presidium Kabinet Ampera.

KUTIPAN DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 20 TH. 1959

TENTANG

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUDJUAN
PERDJANDJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK
RAKJAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN
(UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 1958,
LEMBARAN NEGARA 1958 NO. 5).**

(LEMBARAN NEGARA No. 32/1959)

BAB II

Tentang Warganegara Republik Indonesia yang dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkoknja, administrasi dan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 12

- (1). Warganegara Republik Indonesia keturunan Tionghoa yang dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkoknja, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Penukaran Nota antara Perdana Menteri Republik Indonesia dan Perdana Menteri Republik Rakjat Tiongkok tertanggal Peking, 3 Djuni 1955 ialah mereka yang pada waktu perdjandjian mulai berlaku:
 - a. sudah pernah bersumpah atau berdjandji setia kepada Republik Indonesia sebagai anggota sesuatu badan resmi;
 - b. Anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia atau telah dihentikan dengan hormat sebagai demikian;
 - c. Anggauta Polisi Republik Indonesia atau telah dihentikan dengan hormat sebagai demikian;
 - d. seorang veteran;
 - e. pegawai negeri atau telah dihentikan sebagai pegawai negeri Republik Indonesia dengan berhak menerima pensiun;
 - f. pegawai daerah otonom atau telah dihentikan sebagai pegawai daerah otonom Republik Indonesia dengan berhak menerima pensiun;
 - g. sudah lebih dari satu kali mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam lapangan politik, dan setelah mewakili Pemerintah

Republik Indonesia tidak pernah mewakili Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok;

- h. sudah lebih dari satu kali mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam lapangan ekonomi, dan setelah mewakili Pemerintah Republik Indonesia tidak pernah mewakili Pemerintah Rakjat Tiongkok;**
 - i. sudah lebih dari satu kali mewakili Republik Indonesia dalam lapangan kebudajaan atau keolahragaan jang bersifat perlombaan antar negara, dan setelah mewakili Republik Indonesia tidak pernah mewakili Republik Rakjat Tiongkok;**
 - j. petani, jang menurut pendapat Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman dan Menteri Agraria tjara hidupnja dan pergaulannja dengan masjarakat Indonesia aseli menundjukkan bahwa ia sebetulnja anak pribumi.**
-

PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
(DIREKTORAT I/PEMERINTAHAN)
KANTOR URUSAN PENDUDUK D.C.I. DJAKARTA
Djalan Kebon Sirih No. 22
DJAKARTA

Nomor : 1088/IX/KUP/68. Djakarta, 25 September 1968.
Lampiran : 1 (satu) tjontoh.
Pokok Surat : Sjarat-sjarat, tjara dan petundjuk
jang perlu diperhatikan oleh Lurah
pada waktu memberikan K.T.P. baru
kepada penduduk WNI keturunan Asing.

Kepada Jth.:

1. Sdr. Walikota Djakarta Utara, Djakarta Barat, Djakarta Pusat, Djakarta Selatan dan Djakarta Timur;
 2. Sdr. Para Tjamat dalam wilajah DCI Djakarta;
 3. Sdr. Para Lurah dalam wilajah DCI Djakarta;
- di

D J A K A R T A .

SURAT EDARAN

Bersama ini dipermaklumkan dengan hormat, bahwa mulai tanggal **Oktober 1968** akan dimulai pelaksanaan penggantian/penukaran Kartu Tanda Penduduk (KTP) jang lama dengan KTP jang baru bagi penduduk WNI dan Indonesia lainnja, maka untuk ketertiban dan kelantjaran pelaksanaan pengeluaran KTP – WNI tersebut, dibawah ini kami sampaikan sjarat-sjarat, tjara dan petundjuk-petundjuk jang diperhatikan oleh Lurah, sesuai dengan Pedoman jang dimuat dalam Buku Perta No. 1/DI/1968, sebagai berikut:

I. Sjarat-sjarat untuk memberikan K.T.P. baru kepada penduduk W.N.I.

- A. Setiap penduduk W.N.I. harus memiliki „Surat Tanda Kewarganegaraan” (Surat W.N.I.) dari Pengadilan Negeri dan/atau dari instansi lain jang berwenang.

B. Matjam/djenis Surat-surat W.N.I. yang harus dimiliki oleh penduduk W.N.I. adalah:

1. W.N.I. melalui „Perdjandjian R.I. – R.R.T.” (P.P. No. 20/1959 tentang perdjandjian Dwikewarganegaraan), terbagi dalam:
 - W.N.I. formulir I
 - W.N.I. formulir II
 - W.N.I. formulir III
 - W.N.I. formulir IV
 - W.N.I. formulir V
 - W.N.I. formulir VI
 - W.N.I. formulir D
 - W.N.I. formulir C
2. Mendjadi W.N.I. dengan djalan **Pewarganegaraan (naturalisasi)** dengan surat keputusan Presiden R.I.
3. Surat-surat W.N.I. lainnja yang dikeluarkan/diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri.

C. Penduduk W.N.I. yang memiliki formulir I, II, III, IV, formulir D dan formulir C, dapat langsung diberikan KTP baru oleh Lurah, setelah surat-surat W.N.I. diperiksa/diteliti dengan tjermat.

Tjataan:

Lurah supaja mentjatat/menulis **nomor, tanggal, model formulir** (form. I, II dst.) dimana dikeluarkan dari surat W.N.I. pada kolom 17 (keterangan) dari Kartu Keluarga.

D. Khusus kepada penduduk W.N.I. yang memiliki surat-surat W.N.I.:

- W.N.I. formulir V
- W.N.I. formulir VI
- W.N.I. dengan djalan **Pewarganegaraan (naturalisasi)**, berbentuk surat keputusan Presiden R.I.
- W.N.I. lainnja yang masih memiliki surat-surat/dokumen-dokumen Asing.
- Mereka yang diragukan kewarganegaraannya;

karena mereka tadinja adalah **Orang Asing** yang masih memiliki dokumen-dokumen Asing, agar Lurah **memerintah** penduduk yang bersangkutan untuk **datang menghadap di KANTOR URUSAN PENDUDUK DCI DJAKARTA** di Djalan Kebon Sirih No. 22 untuk diperiksa dan dilakukan pentjabutan/penghapusan dari daftar-daftar Pendaftaran Orang Asing.

Tjatatatan:

Setelah mendapat/dibubuhi tjatatatan „ditjabat karena mendjadi W.N.I.” dari Kantor Urusan Penduduk, Kantor Imigrasi dan Komdak VII/Djaya jang dapat dilihat pada bagian belakang (dibalik) surat W.N.I. jang bersangkutan dan dilengkapi dengan suatu surat **Keterangan** dikeluarkan oleh Kantor Urusan Penduduk (tjontoh surat keterangan W.N.I. terlampir), maka berdasarkan „Surat Tjatatatan” dan „Surat Keterangan” itu, **Lurah baru** mengeluarkan/memberikan **Kartu Tanda Penduduk baru**.

- E. Bagi penduduk W.N.I. jang telah Ganti Nama Tjina mendjadi Indonesia, supaja dalam Kartu Keluarga dan K.T.P. dipakai/ditulis nama Indonesia.

Tjatatatan:

Nomor, tanggal, tempat dikeluarkan Surat Keterangan Ganti Nama supaja Lurah mentjatat pada kolom 17 (keterangan) dari Kartu Keluarga.

II. Mengenai Kebangsaan:

- a. **Kebangsaan** seorang W.N.I. jang harus ditulis dalam **K.T.P. baru** adalah **Kebangsaan Indonesia**.
- b. **Kebangsaan** seorang W.N.I. jang harus ditulis dalam **Kartu Keluarga** (kolom 8) harus lengkap ditulis **Kebangsaan dan keturunan** (tjontoh W.N.I. keturunan Tjina).

III. Tjara mengeluarkan K.T.P. baru kepada penduduk W.N.I. dan Indonesia lainnja :

- a. Setiap penggantian/pembaharuan KTP lama dengan jang baru bagi penduduk WNI dan Indonesia lainnja **harus disertai dan didasarkan** atas **KARTU KELUARGA** dari Kepala Keluarga jang bersangkutan.
- b. **Bagi Penduduk lama:**
Harus menundjukkan KTP lama jang pernah dimiliki (KTP lama supaja ditjabat dan disimpan di Kantor Kelurahan) dan ditukar dengan KTP baru.
 - **Bagi pendatang baru/penduduk baru:**
Harus menundjukkan „Surat Keterangan Pindah” dari tempat asalnja.

IV. Lain-lain.

Djika Lurah menemui sesuatu kesulitan mengenai kewarganegaraan seseorang penduduk atau penduduk yang bersangkutan tidak dapat membuktikan kebangsaannya (kebangsaannya diragukan), agar segera memerintahkan yang bersangkutan untuk datang ke Kantor Urusan Penduduk DCI Djakarta, untuk diteliti/diperiksa kewarganegaraannya oleh Kantor Urusan Penduduk bersama Pedjabat-pedjabat Imigrasi yang diperbantukan/ditempatkan di Kantor Urusan Penduduk.

Demikianlah agar sjarat-sjarat dan petundjuk-petundjuk seperti diuraikan diatas mendapat perhatian sepenuhnya guna dijadikan pedoman bagi para Lurah dalam penertiban pemberian Kartu Tanda Penduduk.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, terlebih dahulu diutjapkan banjak-banjak terima kasih.

DIREKTORAT I/PEMERINTAHAN
Kepala Urusan Penduduk D.C.I. Djakarta.

t.t.d.

(ST. BACHTIAR).

TEMBUSAN kepada Jth.:

1. Pd. Sekda / Ass. Sekda,
2. Kepala Direktorat I/Pemerintahan,
3. Kepala Biro V/P.U.H.,
4. Kepala Dirat VI/Kuangan.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13 – DJAKARTA

NOTA DINAS

No.: 536/III/I/1970.

**KEPADA : JTH. 1. PARA WALIKOTA/KETUA PP. KOTA
2. PARA TJAMAT/KETUA PPS.
3. PARA LURAH/KETUA PPP.
SE D.C.I. DJAKARTA.**

**DARI : SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.**

**PERIHAL : PEMBENTUKAN KELOMPOK PETUGAS
PENDAFTAR SENSUS DAN PEMILIH.**

Berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dan Kepala Biro Pusat Statistik No. 124 tahun 1970
P. 15/1970

tanggal 31 Maret 1970; tersebut pada diktum KETIGA bahwa Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih oleh P.P.P. dan Kantor Sensus Statistik, maka dengan ini diinstruksikan kepada Saudara segera membentuk Kelompok-kelompok Petugas Pendaftar dimaksud dalam wilayah masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kelompok Petugas Pendaftar untuk tiap satu lingkungan RW berjumlah 3 s/d 5 orang jaitu satu orang untuk tiap TPS yang diambil dari:
 - Pegawai Negeri/A.B.R.I.
 - Pengurus R.T. dan R.W. yang menurut pertimbangan P.P.P. dan P.P.S. dapat melakukan tugas dimaksud.
2. Kelompok Petugas Pendaftar tersebut melakukan pendaftaran rumah tangga (Sensus) dalam daftar model D pada R.T. tersebut dengan memperhatikan pembentukan Blok Sensus yang telah ditetapkan. Hasil dari pendaftaran ini dipindahkan kedalam Daftar Pemilih (formulir model A) dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 22 dan 33 PP No. 1 tahun 1970 jo. Pasal 9, 10, 11, 12, dan 13 Undang-undang No. 15 tahun 1969 dan Surat Panitia Pemilihan Daerah

D.C.I. Djakarta tanggal 23 Mei 1970 No. 520/III/1/1970 tentang pembuktian W.N.I. turunan Asing; jang harus memperhatikan lingkungan TPS (persjaratan Pemilih 200 – 300 orang) dengan kemungkinan 2 a 3 R.T. (Blok Sensus) mendjadi satu lingkungan TPS dengan kemungkinan satu R.W. terdapat 3 a 4 TPS. Tegasnja Petugas Pendaftar Sensus adalah djuga sekaligus Pendaftar Pemilih/Pemilu.

3. Pendaftaran ini dimulai serentak pada tanggal 5 Djuli 1970 dan selandju tnja supaja mengikuti djadwal jang telah ditentukan.
4. Laporan pelaksanaan ini serta daftar nama-nama petugas dimaksud, hendaknja dapat disampaikan kepada kami dalam waktu singkat.

Demikian agar Saudara maklum.—

Djakarta, 29 Mei 1970

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,

t.t.d.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

TEMBUSAN:

1. Panitia Pemilihan Indonesia (P.P.I.),
2. Sekda DCI Djakarta,
3. Direktorat I/Pemerintahan,
4. Kantor Sensus & Statistik,
5. A l a s .

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13 – DJAKARTA

PETUNJUK DALAM PROSES PENDAFTARAN

No. 547/III/I/1970.

A. P.P.P. dan Petugas Pendaftar :

1. Bentuk Kelompok Petugas Pendaftar untuk satu lingkungan R.W. 3 s/d 5 orang; dengan tugas rangkap :
 - a. menjatjah penduduk, dengan model D Sensus.
 - b. mengutip dari daftar model D Sensus kedalam Daftar Pemilih (model A) dan Kartu Pemilih (model A.1.).
2. Tetapkan tiap 1 orang petugas pendaftar, mendaftar 1 Rt. per 1 Rt untuk satu lingkungan T.P.S. dengan menetapkan 1 T.P.S. terdiri 2 a 3 Rt (perhatikan persjaraan djumlah pemilih: 200 – 300 orang).
3. Tetapkan T.P.S. pada alamat jang pasti dalam lingkungan salah satu dari Rt jang memenuhi persjaraan, aman, mudah dihubungi dan tidak mengganggu lalu-lintas dan lain sebagainya.

4. Proses Pendaftaran.

Tjontoh: 1 R.W. terdiri 9 Rt. dengan petugas 3 orang.

- Petugas ke I. mendaftar untuk Rt. 001, 002 dan 003 jaitu
T.P.S. No.
- Petugas ke II. mendaftar untuk Rt. 004, 005 dan 006 jaitu
T.P.S. No.
- Petugas ke III. mendaftar untuk Rt. 007, 008 dan 009 jaitu
T.P.S. No.
- Lengkapi petugas dengan alat-alat dan „Surat Tugas”

Pertama :

5/7 – 14/7 : Daftarliah semua penduduk dengan daftar model D Sensus dengan djelas dan lengkap. Diperkirakan untuk 1 Rt. selesai dalam 2 a 3 hari (Petugas Pendaftar akan dapat menjelesaikan ke 3 Rt. tersebut antara 6 s/d 10 hari).

Kedua :

15/7 – 24/7 : Kutip nama-nama penduduk yang memenuhi persyaratan dari model D Sensus dan pindahkan kedalam Daftar Pemilih (model A) dan Kartu Pemilih (model A.1). (Ini dapat dilakukan di kantor P.P.P. atau di rumah petugas masing-masing). Pengutipan untuk Daftar Pemilih harus diperhatikan syarat-syarat antara lain :

- kata-kata tetap/tambahan tjoret.
- Usia, 17 tahun keatas per 4 Oktober 1970 atau kurang, tapi telah/ pernah nikah (kawin).
- Warga Negara Indonesia.
- Bukan bekas anggota organisasi terlarang P.K.I. dan ormasnja atau yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan G.30.S./P.K.I. atau organisasi terlarang lainnja (Pasal 10 (2 a U.U. 15/69); tjtjokkan dengan daftar yang telah diterima P.P.P. dari Laksus Pangkopkamtibda jaitu Daftar Nama orang-orang yang tidak berhak memilih yang telah disahkan.
- Tidak sedang terganggu djiwa/ingatannja (ajat b).
- Tidak mendjalani pidana penjara atau kurungan dengan antjaman hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun (ajat c).
- Tidak sedang ditjabut hak pilihnja atas keputusan Pengadilan (ajat d). (Diperkirakan pengutipan ini akan selesai dalam waktu 7–10 hari).
- Pengisian Kartu model A.1. dilakukan di rumah/kantor petugas berdasarkan isian model A untuk selandjutnja dikirim kerumah tangga yang bersangkutan.
- Kartu model A.1. disampaikan pada masing-masing rumah tangga untuk dibubuhi tanda tangan/tjap 3 djari tengah kiri.
- Setelahnja dikumpulkan kembali oleh petugas yang bersangkutan dalam tempo 2 (dua) hari.

25/7 – 30/7 : – Menjusun Daftar Pemilih „Sementara” (model A) menurut abdjad dalam rangkap 2 (dua) dan didjilid TPS per TPS dan pada tiap kulit (halaman muka) dituliskan nama Kelurahan dan No. TPS

jang bersangkutan dengan angka Romawi menurut urutan se-Kelurahan.

Tjontoh:

Kelurahan TPS No. 1 dst.nja.

- Dalam menuliskan nama pemilih pada Daftar Pemilih dan Kartu Pemilih harus diperhatikan: nama lebih dahulu baru disambung dengan gelar, nama keluarga/marga/suku dan lain sebagainya.
- Djika wanita jang menggunakan nama suaminya, dituliskan dibelakang namanja (Pasal 26) (2) P.P. No. 1/1970). (Diperkirakan penjurusan abjad ini selesai dalam 3—5 hari).

Ketiga

31/7 — 4/8

- :
- :
- Daftar Pemilih model A dan Kartu Pemilih model A.1., diteliti dan diperiksa oleh P.P.P. (tjotjokkan dengan model D Sensus jang telah diberi tanda tiap nama jang didaftar, periksa daftar orang jang tidak berhak memilih jang telah disahkan, periksa dari Kartu Kepala Keluarga jang ada di Kelurahan dan atau album K.T.P.) Diperkirakan penelitian ini oleh P.P.P. selesai dalam 3 a 5 hari; dengan ditentukan tiap anggota P.P.P. meneliti 5—10 Daftar (T.P.S.).

Keempat

5/8

- :
- :
- Semua daftar ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota P.P.P. (bukan petugas) pada halaman jang pertama dan terakhir serta mentjantumkan tanggal 5 Agustus 1970.
 - Asli Daftar Pemilih „Sementara” dikirimkan ke P.P.S./Ketjamatan dan jang satu lagi diumumkan untuk dapat dilihat oleh penduduk.
 - Mengirimkan laporan djumlah penduduk W.N.I. ke P.P.S.

Kelima

5/8 — 4/9

- :
- :
- Perhatikan sjarat-sjarat selama dalam pengumuman ini.
 - Keamanan Daftar harus terdjamin.
 - Perobahan-perobahan langsung dilakukan pada daftar A dan Kartu A.1.; dengan mentjatat pada kertas/formulir lain kemudian mengirimkan ke

PPS setjara berangsur (sekali 4 a 5 hari) termasuk susulan bagi jang belum terdaftar.

- Keenam :**
- 18/9 – 28/9 : – **Penerimaan** pendaftaran pemilih dalam Daftar Tambahan dan Kartu Pemilih (A.1.).
 - 29/9 – 3/10 : – Pengisian dan penjusunan sama dengan tjara pada Daftar Sementara.
 - Sehelai dikirimkan ke P.P.S.
 - 4/10 – 1970 : – **Pendaftaran berachir**; Kartu A.1. disusun dalam Kotak dengan urutan per R.t./R.w.

B. P.P.S./Ketjamatan:

- 5/8 – 19/8 : – Melaporkan djumlah penduduk W.N.I. ke P.P. Kota.
- 4/9 – 18/9 : – Meneliti dan mengesahkan Daftar Pemilih Sementara mendjadi Daftar (Tetap) Pemilih (perhatikan susunan dan perobahan-perobahan jang dilaporkan oleh P.P.P. selama antara 5/8 – 4/9) dan tjoret kata-kata sementara.
- 3/10 – 4/10 : – Meneliti dan mengesahkan Daftar Tambahan.
- 4/10 – 17/10 : – Melaporkan djumlah pemilih dalam daerahnja ke P.P. Kota.
- 19/9 – 31/12 : – **Menjalin** Daftar (Tetap) Pemilih dan Daftar Pemilih Tambahan jang telah disahkan rangkap 4, untuk:
 - 1. asli untuk P.P.P./Kelurahan,
 - 2. arsip P.P.S./Ketjamatan,
 - 3. 2 (dua) buah lagi untuk T.P.S. (sementara disimpan di P.P.S. s/d mendjelang waktu pemungutan suara.)

Dengan memperhatikan :

- perubahan-perubahan
- susulan
- nomor urut pemilih
- Daftar **Tetap**; supaya ditjoret kata-kata **Sementara** dan **Tambahan**.
- Daftar **Tambahan**; ditjoret kata-kata **Sementara** dan **Tetap**.

Djakarta, 1 Djuni 1970.

PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA

Sekretaris,
t.t.d.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

Lambang Negara.

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 24/LPU/1970**

tentang

WAKTU PENDAFTARAN PEMILIH/PENDUDUK

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970 perlu ditetapkan waktu permulaan pendaftaran pemilih/penduduk.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1969;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1969;
3. Pasal 19, 24, 26 ayat (1), 27, 28 dan 29 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970;
4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dan Kepala Biro Pusat Statistik No. 124 tahun 1970.
- P. 15/70.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Permulaan waktu pendaftaran pemilih/penduduk dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum 1971 ditetapkan tanggal 5 Djuli 1970.
- KEDUA** : Djangka waktu pendaftaran pemilih/penduduk berlangsung dari tanggal 5 Djuli sampai dengan tanggal 6 Oktober 1970, jaitu sampai dengan selesai disahkannya Daftar Pemilih Tambahan.
- Selama djangka waktu tersebut pelaksanaan pendaftaran pemilih dibagi dalam tiga tahap kegiatan:
- a. Tahap pertama berlangsung dari tanggal 5 Djuli 1970 sampai dengan tanggal 5 Agustus 1970, jaitu saat dimulainya pendaftaran pemilih/penduduk sampai dengan penjurusan Daftar Pemilih Sementara.
 - b. Tahap kedua berlangsung dari tanggal 6 Agustus 1970

sampai dengan tanggal 20 September 1970, jaitu saat diumumkannja Daftar Pemilih Sementara sampai dengan disahkannya mendjadi Daftar Pemilih.

- c. Tahap ketiga berlangsung dari tanggal 21 September 1970, sampai dengan tanggal 6 Oktober 1970, jaitu saat diberikannya kesempatan bagi pemilih jang belum tertjatat untuk mendaftarkan diri dalam Daftar Pemilih Tambahan sampai dengan disahkannya Daftar Pemilih Tambahan tersebut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinja djika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Djakarta,
Pada tanggal : 8 Djuni 1970

**MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN
UMUM**

ttd/tjap.

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NO. 25/LPU/1970.**

TENTANG

**KETENTUAN LEBIH LANDJUT MENGENAI TJARA
MELAKUKAN PENDAFTARAN PEMILIH/PENDUDUK**

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

- Menimbang : bahwa dalam rangka penjelenggaraan Pemilihan Umum perlu diberi pedoman lebih lanjut tentang tjara-tjara melakukan pendaftaran pemilih.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 15 tahun 1969;
2. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970;
3. Undang-undang No. 62 tahun 1958;
4. Surat Edaran Menteri Kehakiman 1 Djuli 1969 No. DTC/9/11;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dan Kepala Biro Pusat Statistik No. 124 tahun 1970
P. 15/70.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 24/LPU/1970.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETENTUAN LEBIH LANDJUT MENGENAI TJARA MELAKUKAN PENDAFTARAN PEMILIH/PENDUDUK.

BAB I

UMUM

Pasal 1

- (1) Selambat-lambatnja 7 (tudjuh) hari sebelum pendaf-taran pemilih dimulai, Panitia Pendaftaran Pemilih mengadakan pengumuman dengan tjara jang lazim

dipergunakan bahwa dalam desa/daerah setingkat desa jang mendjadi wilajah kerdjanja akan diadakan pendaftaran pemilih.

- (2) Selama djangka waktu pendaftaran pemilih sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 24/LPU /1970, *pendaftar mendatangi rumah-rumah penduduk* untuk mentjatat dari penghuni rumah-rumah itu nama-nama pemilih serta keterangan-keterangan lain sesuai petunjuk pengisian surat-surat formulir Model A dan A1 lampiran surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 107 tahun 1970.

Pasal 2

- (1) Jang dapat didaftar sebagai pemilih adalah Warga Negara Indonesia jang pada waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum jaitu selama djangka waktu dimaksud pasal 1 ayat (2) sudah genap berusia 17 tahun atau sudah kawin terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal menghadapi ketiadaan/kekurangan bukti-bukti mengenai tanggal kelahiran seseorang, maka sebagai *langkah kebidjaksanaan* pendaftar dapat membenarkan pernyataan seseorang bahwa ia telah berusia 17 tahun pada waktu pendaftaran pemilih, apabila *menurut kejakinan pendaftar* pernyataan itu diberikan setjara bersungguh-sungguh dan dengan maksud baik.

Pasal 3

- (1) Pendaftar diwadjabkan memperoleh keterangan-keterangan mengenai seorang Pemilih *dari pemilih* jang bersangkutan sendiri.
- (2) Apabila pemilih tidak ada dirumah, keterangan-keterangan tentang dirinja *tidak ditjatat*. Pendaftar meninggalkan pesan kepada Kepala Rumah Tangga atau wakilnja, bahwa Pendaftar akan datang sekali lagi atau supaja pemilih mendaftarkan diri ditempat dan waktu jang ditentukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih.

Pasal 4

- (1) Djika keadaan tidak memungkinkan pemilih didaftar dengan mendatangi rumahnja, maka *Panitia Pemungutan Suara* dapat menentukan Pendaftaran bagi Pemilih tersebut dengan djalan pemberitahuan setjara langsung ataupun tidak langsung agar pemilih mendaftarkan diri pada waktu dan tempat jang ditentukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih.
- (2) Ketentuan jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia jang:
 - a. bertempat tinggal diatas perahu atau rakit.
 - b. tidak mempunjai tempat tinggal tetap.

Pasal 5

- (1) Pendaftar bertanja kepada Kepala Rumah Tangga atau wakilnja, apakah dirumah itu ada warga negara Indonesia jang berhak memilih didalam pemilihan umum Anggota Badan Perwakilan/Permusjawaratan Rakjat.
- (2) Apabila ada jang berhak memilih, setelah memberi keterangan seperlunja, Pendaftar melandjutkan pertanjaan jang berguna untuk mengisi Kartu Pemilih. Setelah Kartu Pemilih selesai diisi, pemilih jang bersangkutan menandatangani atau membubuhkan tjap djari pada Kartu Pemilih tersebut.

Apabila tidak ada jang berhak memilih, Pendaftar meninggalkan rumah itu.

BAB II

PENDAFTARAN PEMILIH/PENDUDUK DIRUMAH KEDIAMAN PERWAKILAN NEGARA ASING

Pasal 6

- (1) Dengan seizin Kepala Perwakilan Negara Asing jang bersangkutan Pendaftar mendatangi rumah-rumah kediaman Kepala Perwakilan Negara Asing dan Anggota-anggota Stafnja untuk melakukan pendaftaran pendu-

duk dan pendaftaran pemilih bagi Warga Negara Indonesia jang bertempat tinggal/menginap dirumah kediaman tersebut.

- (2) Menteri Luar Negeri mengumumkan hal ini kepada Kepala-kepala Perwakilan Negara Asing.

BAB III

PENDAFTARAN PEMILIH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA JANG BERTEMPAT TINGGAL DIATAS PERAHU/RAKIT

Pasal 7

Pemilih/Penduduk jang bertempat tinggal diatas perahu atau rakit mendaftarkan diri pada Panitia Pendaftaran Pemilih dari Desa/daerah setingkat dengan Desa dimana ia mendjadi penduduknja atau pada Panitia Pendaftaran Pemilih jang wilayah kerdjanja meliputi pelabuhan pangkalan dari prahu/rakit pemilih tersebut.

BAB IV

PENDAFTARAN PEMILIH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA JANG TIDAK MEMPUNJAI TEMPAT TINGGAL TETAP

Pasal 8

- (1) Pendaftaran Pemilih bagi pemilih jang tidak mempunjai tempat tinggal tetap, dilakukan pada saat terachir mendjelang berachirnja pendaftaran pemilih.
- (2) Pemilih dikumpulkan pada satu atau beberapa tempat, sehingga merupakan satu atau beberapa rumah tangga khusus.

BAB V

PENDAFTARAN PEMILIH/PENDUDUK BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN ASING

Pasal 9

Apabila didalam rumah itu berdiam/bertempat tinggal orang jang menjatakan bahwa dia adalah warga negara Indonesia melalui permohonan pewarga-negaraan (naturalisasi) ia dapat didaftar setelah memperlihatkan surat bukti kewarganegaraannya, jaitu Keputusan Presiden jang mengabulkan permohonan pewarganegaraannya.

Pasal 10

Apabila disuatu rumah Pendaftar mendjumpai orang Indonesia, akan tetapi dahulu masuk golongan Eropah, maka ditanyakan apakah jang bersangkutan mendjadi warga negara Belanda, atau telah dipersamakan setjara resmi dengan orang Eropah, maka ditentukan pedoman sebagai berikut:

- a. Apabila jang bersangkutan dinaturalisir mendjadi Warga Negara Belanda, ia bukan Warga Negara Indonesia.
- b. Apabila jang bersangkutan dipersamakan dengan orang Eropah sebelum Djuli 1893 ia bukan warga negara Indonesia.
- c. Apabila ia memberi keterangan seperti diatas, tetapi menjatakan diri mendjadi warga negara Indonesia, harus menundjukkan surat bukti memilih kewarganegaraan Indonesia.

Pasal 11

Apabila disuatu rumah Pendaftar mendjumpai orang jang dahulu orang Belanda (asal atau turunan orang Belanda), tetapi mengaku Warga Negara Indonesia, maka jang bersangkutan harus menundjukkan surat bukti memilih kewarganegaraan Indonesia.

Pasal 12

- (1) Apabila disuatu rumah pendaftar mendjumpai orang asal atau turunan asing lain (Arab, Tjina bukan RRT. dan lain-lain) jang mengaku Warga Negara Indonesia, maka pendaftar perlu memperoleh keterangan apakah orang itu lahir di Indonesia ataukah tidak menolak kewarga-negaraan Indonesia.
Ia dapat didaftar sebagai pemilih apabila ia lahir di Indonesia dan tidak menolak kewarganegaraan Indonesia serta menundjukkan salah satu keterangan seperti tersebut dibawah ini:
 - a. Keputusan pengangkatan mendjadi pegawai negeri;
 - b. Idjazah sekolah jang diakui Pemerintah Indonesia;
 - c. Kartu keanggotaan D.P.R.—G.R./D.P.R.D.—G.R.;
 - d. Kartu Penduduk;
 - e. Lain-lain surat keterangan dimana ditjantumkan bahwa ia Warga Negara Indonesia.
- (2) Apabila ia menjatakan keturunan Tjina RRT, maka bukti jang harus ditundjukkan adalah:
 - a. Salah satu formulir I/IA sampai dengan VI/VI A;
 - b. Formulir C atau D berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1961.

Pasal 13

Didaftar djuga sebagai pemilih:

- (1) Isteri dari orang-orang termaksud pada pasal 9. pasal 10 huruf c dan pasal 12 ayat (1).
- (2) Anak-anak dari:
 - a. Orang-orang jang termaksud pada pasal 9 jang tanggal keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan ajahnja belum genap berumur 18 tahun;
 - b. Orang-orang jang termaksud pada pasal 10 huruf c dan pasal 12 ayat (1) jang pada tanggal 27 Desember 1949 belum genap berumur 18 tahun atau dilahirkan sesudah tanggal tersebut;

Pasal 14

- (1) Isteri dari pemegang salah satu formulir I/IA sampai dengan VI/VIA sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) a, dapat didaftar sebagai pemilih apabila ia sendiri dapat memperlihatkan formulir tersebut.
- (2) Anak dari pemegang salah satu formulir I/IA sampai VI/VIA yang pada tanggal 20 *Djanuari 1960* belum genap berumur 18 tahun dan belum kawin dan pada waktu genap berumur 18 tahun *tidak memilih kewarganegaraan R.R.T.* dapat didaftar sebagai pemilih.
- (3) Isteri dari pemegang formulir C dan D sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) b, yang kawin *sebelum 20 Djanuari 1960* dapat didaftar sebagai pemilih ketjuali apabila namanja tidak tertjantum dalam formulir suaminja.
Apabila perkawinan dilangsungkan sesudah tanggal 20 Djanuari 1960 isteri tersebut dapat didaftar sebagai pemilih apabila dapat memperlihatkan bukti kewarganegaraan tersendiri.
- (4) Anak dari pemegang formulir C dan D yang memenuhi sjarat sebagai pemilih dapat didaftar sebagai pemilih.

Pasal 15

Wanita asing yang mendjadi isteri Warga Negara Indonesia dapat didaftar sebagai pemilih apabila dapat memperlihatkan bukti surat tjatatan pemjataan keterangan memperoleh kewarganegaraan Indonesia dari Pengadilan Negeri/Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 16

Selain bukti-bukti kewarganegaraan Indonesia yang tertjantum dalam pasal 9 sampai dengan pasal 15, yang merupakan djuga bukti kewarganegaraan Indonesia adalah surat keterangan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman tanggal 1 Djuli 1969 No. DTC/9/11.

Pasal 17

- (1) Apabila formulir yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a dan b tersebut hilang, orang yang bersangkutan dapat minta salinan formulir tersebut kepada Instansi/Pengadilan yang berwenang.
- (2) Orang yang formulirnya hilang seperti dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas dapat didaftar sebagai pemilih dengan menambah tanda tanya (?) pada kolom Keterangan pada formulir Kartu Pemilih Model A1 dan pada ladjur 8 formulir Model A.
- (3) Apabila sebelum Daftar Pemilih Tambahan disahkan orang yang bersangkutan tidak dapat menundukkan salinan formulir namanja ditjoret sebagai pemilih.

Pasal 18

- (1) Selain Warga Negara Indonesia turunan Tjina R.R.T. dimaksud pasal 12 ayat (2), orang-orang tersebut pada pasal 9 s/d pasal 15 yang disangsikan oleh Pendaftar karena tidak dapat menundukkan keterangan/bukti yang diperlukan, dapat juga didaftar dengan menambah tanda tanya (?) pada kolom keterangan formulir Model A1 dan ladjur 8 formulir Model A.
- (2) Apabila sebelum Daftar Pemilih Tambahan disahkan, mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak dapat menundukkan keterangan/bukti yang diperlukan tersebut, namanja ditjoret sebagai pemilih.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Djakarta,
Pada tanggal : 8 Djuni 1970.

**MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

Tjap/t.t.d.

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 26/LPU/1970.**

**Lambang
Negara**

TENTANG

**PEMBERIAN SUARA OLEH PEMILIH JANG TJATJAD BADAN
DAN PENJAMPAIAN SURAT PANGGILAN BAGI PEMILIH
JANG TIDAK MEMPUNJAI TEMPAT TINGGAL TETAP**

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengusahakan terdjaminnja hak memilih bagi Warga Negara Indonesia jang memenuhi persjaratan sebagai pemilih, perlu diatur tjara pemberian suara bagi pemilih jang tjatjad badan ;
 - b. bahwa perlu diadakan pengatutan khusus mengenai penjampaian surat panggilan bagi pemilih jang tidak mempunjai tempat tinggal tetap.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang No.15 tahun 1969.
 - 2. Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1970.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pemilih jang tidak dapat memberikan suara karena tjatjad badan, (buta, tidak dapat menggunakan kedua tangannja), sehingga tidak dapat mentjoblos tanda gambar, oleh ketua Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara diberikan bantuan setelah pemilih tersebut menyatakan keinginannja tjalon/organisasi mana jang hendak dipilihnja dengan disaksikan oleh dua orang anggota Pemungutan Suara lainnja.

KEDUA : Surat panggilan jang dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1970 bagi pemilih-pemilih jang tidak mempunjai tempat tinggal tetap dilakukan dengan djalan menjampaiannja kepada mereka disuatu atau beberapa tempat dimana mereka terlebih dahulu telah dikumpulkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 8 Djuni 1970.**

**MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd./tjap

AMIRMACHMUD

PENGUMUMAN
Nomor: 636/III/2/70.

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta selaku Ketua Panitia Pemilihan D.C.I. Djakarta menjerukan kepada seluruh masyarakat Ibukota agar dalam menghadapi pelaksanaan Pendaftaran Pemilih/Sensus yang akan dimulai pada tanggal 5 Djuli 1970:

- membantu kelantjaran pelaksanaan para petugas pendaftaran yang akan mendatangi rumah-rumah mulai pada hari Minggu tanggal 5 Djuli 1970 s/d 8 Agustus 1970.
- agar tidak menimbulkan keragu-raguan kepada setiap petugas pendaftar diberikan tanda pengenalan dan surat tugas yang ditandatangani oleh Pejabat tingkat Wilayah.
- suksesnya tugas Pemilihan Umum sebagai tugas Nasional ini bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah, melainkan juga terletak pada adanya support dan partisipasi yang bertanggung jawab dari seluruh masyarakat.

**GOVERNOR HEAD OF REGION/CHIEF
ELECTIONS REGION DCI
DJAKARTA.**

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418 – DJAKARTA.

NOTA DINAS

No.: 648/III/1/1970

**KEPADA : 1. SDR. PARA WALIKOTA/KETUA
PANITIA PEMILIHAN KOTA.
2. SDR. PARA TJAMAT/KETUA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA.**

**DARI : PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DCI DJAKARTA.**

**PERIHAL : DISPENSASI KERDJA BAGI PETUGAS
PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENDUDUK.**

Untuk para petugas Pendaftaran Pemilih dan Penduduk yang memerlukan surat Dispensasi Kerdja pada kantornja telah kami berikan berupa blanco formulir yang ditanda tangani oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI kepada Sekretariat Panitia Pemilihan Kota/PP. Kota untuk diteruskan kepada PPS/Panitia Pemungutan Suara yang memerlukan.

Untuk tidak merugikan tugas-tugas pokok pada kantor asalnja kiranja pemberian surat permintaan Dispensasi Kerdja tersebut dapat diatur sedemikian rupa, sehingga pekerjaan pendaftaran dapat pula terlaksana dengan baik.

Permintaan Dispensasi tersebut dapat diatur, umpamanja:

phase I : antara tanggal 5/7 s/d 15/7 – 1970 dimintakan sepenuh hari, karena kegiatan Pendaftaran ini dilakukan kerumah-rumah penduduk.

phase II : Untuk phase ini tjukup setengah (1/2) hari sadja umpamanja sesudah djam 12.00 atau djam 13.00 dari tanggal 16/7 s/d 5/8 – 1970, karena tugasnja merupakan pengutipan nama-nama dari daftar D Sensus ke-Daftar A

dan kartu A 1 sadja, jang dapat dilakukan dikantor PPP/PPS atau ditempat jang ditentukan oleh Panitia Pendaftar/Panitia Pemungutan Suara.

. Demikian agar Saudara maklum.

Djakarta, 4 Djuli 1970.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,

t.t.d.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.).

TEMBUSAN:

1. Sekda DCI Djakarta.
2. Dirat I/Pem.
3. Djapen DCI Djakarta.
4. Arsip.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA**

**Djalan Imam Bondjol No. 13 – JAKARTA
Telp.: No. 53418**

Nomor : 654/III/1/1970.
Lampiran : —
Perihal : PENDAFTARAN PEMILIH.

Djakarta, 8 Djuli 1970.

Kepada Jth.:

1. Sdr. Para Walikota/Ketua PP Kota
2. Sdr. Para Tjamat/Ketua P.P.S.
3. Sdr. Para Lurah/Ketua P.P.P.
se-D.C.I. Djakarta
di

DJAKARTA.—

Untuk lebih menertibkan pendaftaran penduduk dan pemilih, bersama ini kami minta agar para petugas pendaftar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pendaftaran, terlebih dahulu para petugas meneliti nama-nama penduduk yang tertjantum dalam Kartu Keluarga, untuk selanjutnya menandakan kepada Kepala Keluarga/Wakil, apakah masih ada nama-nama lain yang belum tertjantum dalam Kartu Keluarga (pendatang baru, kelahiran baru dan peladjar-peladjar yang bepergian untuk sementara), untuk ditjatakan djuga namanja dalam formulir D; atau anggota keluarga yang ada dikartu keluarga, pada saat ini sedang bepergian untuk waktu yang lama atau pindah, agar tidak terdaftar di 2 (dua) tempat.
2. Hendaknja semua warga kota, baik tamu, pendatang baru, atau seseorang yang sedang bepergian untuk sementara waktu (s/d tanggal 6 Oktober 1970) tidak ada yang ketinggalan dari pendaftaran sensus dan pemilih.

3. Hendaknja kepada penduduk jang telah terdaftar, bila hendak bepergian untuk waktu jang lama (s/d pemungutan suara 5 Djuli 1971 j.a.d.) atau pindah, supaja terlebih dahulu meminta kutipan Daftar Pemilih jang bersangkutan kepada P.P.S. setempat.

Demikianlah agar mendjadi maklum.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,
t.t.d.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

TEMBUSAN:

1. Panitia Pemilihan Indonesia/L.P.U.,
2. Sekda DCI Djakarta,
3. Direktorat I/Pemerintahan DCI Djakarta,
4. Kantor Urusan Penduduk DCI Djakarta,
5. Arsip.—

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA
Djalan Imam Bondjol No. 13 – DJAKARTA**

Nomor : 656/III/1/1970.
Lamp. : 1 (satu).
Perihal : Laporan djumlah
Penduduk dan Pemilih.

Djakarta, 10 Djuli 1970.

Kepada
Jth. Para Walikota/Ketua Panitia
Pemilihan Kota.
Para Tjamat/Ketua P.P.S.
Para Lurah/Ketua P.P.P.
se-D.C.I. Djakarta
di

DJAKARTA.

Untuk keseragaman dalam menjampaikan laporan rekapitulasi dari djumlah penduduk dan Pemilih hasil pendaftaran, bersama ini disampaikan tjontoh daftar dimaksud untuk digunakan seperlunja.

Demikian agar maklum.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,
t.t.d.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.).

TEMBUSAN:

1. Sekda.
2. Direktorat I/Pemerintahan.
3. Kantor Urusan Penduduk.
4. Djawatan Penerangan DCI.
5. Kantor Statistik DCI.
6. Arsip.

PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH KHUSUS IBUKOTA

DJAKARTA

Djalan Imam Bondjol No. 13 – DJAKARTA

Telp. No. 53418.

Nomor : 679/III/I/1970.

Djakarta, 21 Djuli 1970.

Lampiran : —.—

Perihal : Mutasi/Perpindahan Penduduk
selama masa Pendaftaran
Penduduk/Pemilih.

Kepada Jth.:

1. PARA WALIKOTA/KETUA PP KOTA
2. PARA TJAMAT/KETUA P.P.S.
3. PARA LURAH/KETUA P.P.P.
se-D.C.I. DJAKARTA
di

DJAKARTA.—

Sambil merunggu petundjuk/ketentuan selandjutnja dari Lembaga Pemilihan Umum (L.P.U.) dan P.P.I., tentang adanja mutasi/perpindahan penduduk selama masa pendaftaran penduduk/pemilih dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Bagi penduduk jang pindah antara tanggal 5 Djuli s/d 5 Agustus 1970 (masa pendaftaran), diberikan keterangan pada „Surat Keterangan Pindah” oleh Lurah/Ketua P.P.P. sebagaimana lazimnja sesuai dengan ketentuan jang berlaku, dengan mentjoret/menghapuskan pada Daftar Pemilih Sementara (Model A) dan Kartu Pemilih (Model A.1) dan jang bersangkutan diingatkan supaya mendaftarkan kembali ditempatnja jang baru (ditjantumkan setjara tertulis dalam surat pindah tersebut).
2. Penduduk jang pindah antara tanggal 5 Agustus s/d 5 September 1970 (masa pengumuman); disamping memberikan surat pindah tersebut Ad.I, djuga memberitahukan pula pada Tjamat/Ketua P.P.S., untuk mengadakan pentjoretan/penghapusan pada Daftar Pemilih Sementara jang ada pada P.P.S. jang bersangkutan.

3. Bagi penduduk yang pindah sesudah Daftar Pemilih (Model A) disahkan oleh P.P.S. dan seterusnya, maka surat Keterangan pindah/mutasi dari yang bersangkutan diberikan oleh P.P.S./Tjamat dengan menggunakan kutipan Daftar Pemilih (sesuai dengan Lampiran D Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970), dan pada Daftar Pemilih (Model A) „tidak” ditjoret/dihapuskan, hanya diberi tjatatan pada kolom „keterangan” dan pada keterangan Kartu Pemilih A.I yang bersangkutan.
4. Bagi penduduk pindahan dari Luar Daerah dalam masa pendaftaran antara 5 Djuli s/d 5 Agustus 1970, bila yang bersangkutan membawa surat keterangan pindah dari daerah asalnya, dapat didaftar sebagaimana mestinya.
5. Bila mereka membawa kutipan Daftar Pemilih sebagai dimaksud dalam Lampiran D Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970, tidak perlu diadakan pendaftaran pada Daftar Model A tapi tjukup didaftarkan pada „Buku Tjatatatan” untuk keperluan tersebut dan kutipan ini tetap dipegang oleh yang bersangkutan sampai pada waktu pemungutan Suara (5 Djuli 1971) untuk langsung ditukarkan dengan surat suara pada waktunya.

Demikian agar saudara maklum.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
D.C.I. DJAKARTA**

Sekretaris,
t.t.d.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.).

TEMBUSAN:

1. Panitia Pemilihan Indonesia (P.P.I.)
2. Sekda D.C.I. Djakarta,
3. Direktorat I/Pemerintahan,
4. Kantor Urusan Penduduk D.C.I. Djakarta,
5. Kantor Sensus & Statistik D.C.I. Djakarta.
6. Arsip.—

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13. Tilp.: 53418 – DJAKARTA

Nomor : 702/III/1/1970

Djakarta, 29 Djuli 1970.

Lamp. : — —

Perihal : Pengumuman Daftar Pemilih
Sementara ditiap-tiap P.P.P./
Kelurahan.

Kepada

Jth. Semua PP Kota, PPS, PPP.
se-DCI Djakarta
di

DJAKARTA.-

Untuk memenuhi pasal 27 P.P. No. 1/1970 jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua L.P.U. tanggal 8 Djuni 1970 No. 24/LPU/1970, tentang Pengumuman Daftar Pemilih Sementara ditiap-tiap PPP/Kelurahan; untuk keseragaman maka pengumuman dimaksud supaya dilakukan melalui rapat dengan para Rt/Rw setjara serentak pada tanggal 5 dan atau 6 Agustus 1970.

Masa pengumuman ini berlangsung selama 30 hari dimulai tanggal 6 Agustus 1970 dan berakhir tanggal 5 September 1970.

Demikianlah agar maklum dan kami harapkan laporan pelaksanaannya.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,
t.t.d.

TEMBUSAN :

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

- Jth.:
1. Panitia Pemilihan Indonesia (P.P.I.),
 2. Kodam V Djaja,
 3. Komdak VII Djaja,
 4. Kedjaksan Tinggi,
 5. Sekretaris Daerah,
 6. Dir.I/Pemerintahan,
 7. Dir. II/Kamtib.,
 8. Arsip.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13. Telp.: 53418 – JAKARTA

Nomor : 723/III/1/1970
Lamp. : —
Perihal : Penjurusan Daftar
Pemilih.—

Jakarta, 8 Agustus 1970.

KEPADA

- Jth. 1. PARA WALIKOTA/KETUA
PP. KOTA.
2. PARA TJAMAT/KETUA P.P.S.
3. PARA LURAH/KETUA P.P.P.
se-DCI. JAKARTA
-

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 21 (1) P.P. No. 1/1970, dan Petundjuk Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia tanggal 27 Djuli 1970 No. 1 tahun 1970 serta Petundjuk P.P.D. DCI tanggal 1 Djuni 1970 No. 547/III/1/1970, tentang Penjurusan Daftar Pemilih dan Kartu Pemilih, dengan ini didjelaskan lagi sebagai berikut:

- I. Pendaftaran penduduk dilakukan dengan daftar Model D (Sensus).
- II. 1. Pendaftaran Pemilih dikutip dari daftar Model D (Sensus) dan dimasukkan kedalam Daftar Model A (Pemilu) dan Kartu A.1.
2. Susunlah nama-nama Pemilih tadi dengan abjad per-TPS dalam rangkap 2 (dua), sehelai dikirimkan ke P.P.S. dan sehelai lagi untuk diumumkan.
3. Selama masa pengumuman ini (6/8 s/d 5/9 – 1970) perubahan-perubahan/perbaikan-perbaikan langsung dilakukan pada daftar dimaksud.
4. Bila adanja pendaftaran baru (penduduk yang belum terdaftar) agar terlebih dahulu didaftar pada Model D (Sensus) tersendiri dan Daftar D (Sensus) ini digabungkan dengan Daftar D (Sensus) rumah tangga yang terdahulu, djika ia bertempat tinggal pada rumah tangga yang telah pernah didaftar sebelumnya.

5. Kutip nama jang bersangkutan dan masukkan ke Daftar A dan Kartu A.1. jang baru; daftar ini tidak digabungkan dengan Daftar A jang sedang diumumkan, akan tetapi dimasukkan dalam Daftar A tambahan nantinja.
6. Selesai masa pengumuman ini, P.P.P. membuat Daftar Pemilih A se-Kelurahan (mengambil bahan-bahannja dari Daftar A per T.P.S tadi) dengan memperhatikan perbaikan-perbaikan dan perobahan-perobahan jang terdapat dan disusun menurut abjad, dengan nomor urut terus se-Kelurahan serta nomor seri T.P.S. dan nomor Pemilih dari Daftar A per T.P.S. tadi (lihat Tjontoh terlampir).
7. Pada sudut sebelah kanan bawah dari Kartu A.1. dibubuhi T.P.S. No. (dengan angka Rumawi) dan disusun menurut abjad per T.P.S. dengan memperhatikan urutan R.T. dan R.W.nja. Hendaknja antara R.T., R.W. dan T.P.S. diberi tanda pemisah untuk memudahkan dalam mentjahari kembali kelaknja.

Demikianlah agar maklum.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,
t.t.d.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

TEMBUSAN:

1. Panitia Pemilihan Indonesia.
2. Sekretaris Daerah D.C.I. Djakarta.
3. Direktorat I.
4. Arsip.

**TJONTOH PENJUSUNAN NO. URUT UNTUK
DAFTAR A SE-KELURAHAN**

1/I/1
2/I/2
3/I/3
4/II/1
5/II/2
6/II/3
7/II/4
8/III/1
9/III/2
10/III/3

dst

Keterangan:

- 1 : Nomorurut djalan terus
- 1 : Nomor T.P.S.
- 1 : Nomorurut jang ada didaftar A
per T.P.S.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418 – DJAKARTA

Nomor : 744/III/1/1970

Djakarta, 19 Agustus 1970.

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Berita Atjara djumlah
Penduduk W.N.I. dan Pemilih.

Kepada Jth.

1. Para Walikota/Ketua PP Kota,
 2. Para Tjamat/Ketua PPS,
 3. Para Lurah/Ketua PPP,
- di

DJAKARTA.—

Disampaikan kepada Saudara djadwal serta pendjelasan tentang pengisian (pengiriman Berita Atjara djumlah penduduk WNI (ulangi hanya W.N.I.) dan pemilih (model AA + AA.1 dan A.2 + A.3) untuk dipedomani seperlunja.

Diharapkan agar target waktu dalam djadwal dimaksud ditepati dengan semestinja, sesuai dengan instruksi dari L.P.U.

Demikian agar maklum.

PANITIA PEMILIHAN DAERAH

D.C.I. DJAKARTA

A.n. Sekretaris,

Kepala Biro Penjelenggara

t.t.d.

(BURHANUDDIN HS)

TEMBUSAN:

- Jth.: 1. Panitia Pemilihan Indonesia
2. Sekda DCI Djakarta,
3. Direktorat I/Pemerintahan,
4. Arsip.—

**PETUNDUK TENTANG PENGISIAN FORMULIR
BERITA ATJARA
(MODEL AA + AA.1 DAN A.2 + A.3).**

**A. Berita Atjara tentang Perhitungan djumlah djiwa penduduk W.N.I.
(model AA dan AA.1).**

19/8 – 26/8 – 1. PPP membuat rangkap 6 untuk model AA dan 12 untuk model AA.1., 5 set (1 hal. AA dan 2 hal. AA.1 = 1 set) diteruskan ke PPS dan 1 set arsip PPP.

26/8 – 30/8 – 2. PPS membuat rangkap 5 (rekapitulasi se Ketjamat-an) 4 set dengan dilampirkan 4 set jang dari PPP diteruskan ke PP Kota dan 1 set + 1 set jang dari PPP arsip PPS.

31/8 – 4/9 – 3. PP Kota membuat rangkap 4 (rekapitulasi se Walikota), 3 set dengan dilampirkan 3 set jang dari PPP dan 3 set dari PPS diteruskan ke PPD DCI dan 1 set arsip PP Kota.

**B. Berita Atjara tentang Penghitungan djumlah pemilih jang terdaftar
(model A.2. dan A.3.)**

Prosedure sama seperti diatas.

6/10 – 10/10 – 1. PPP mengirimkan ke PPS,

11/10 – 20/10 – 2. PPS mengirimkan ke PP Kota,

21/10 – 30/10 – 3. PP Kota mengirimkan ke PPD DCI.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418 – DJAKARTA

Nomor : 746/III/1/1970

Djakarta, 19 Agustus 1970

Lamp. : —.—

Perihal : Pendaftaran Penduduk
dan Pemilih.—

KEPADA

- Jth. 1. Pemilik/Penguasa/Pimpinan Hotel,
Losmen, Rumah Penginapan dan
sebagainja,
2. Pimpinan Lembaga Bina Tuna-
Warga (Rumah Penderita, Rumah
Tahanan),
3. Pimpinan Rumah Sakit, Rumah
Bersalin dan sebagainja,
4. Penguasa Pelabuhan Tanjung
Priok, Pasar Ikan dan Kemajoran,
di

DJAKARTA

Untuk memenuhi ketentuan pasal 10 dan 13 U.U. No. 15/1969
jo pasal 34 P.P. No. 1/1970 dan Keputusan Mendagri/Ketua Lembaga
Pemilihan Umum No. 25/LPU/70 tanggal 8 Djuni 1970 tentang pendaftaran
penduduk dan pemilih, kepada orang-orang yang berada pada:

- Hotel-hotel, Losmen, Rumah Penginapan dan sebagainja,
- Lembaga Pemasjarakatan dan Rumah Tahanan,
- Rumah Sakit, Bersalin dan sebagainja,
- Crew kapal, perahu-perahu dan sebagainja,

jang karena sifat pekerdjaannja tidak bertempat tinggal tetap, maka akan
dilakukan pendaftaran setjara serentak pada awal Oktober 1970.

Untuk keperluan pelaksanaan pendaftaran ini dengan baik, dimintakan perhatian dan bantuan Saudara agar dapat menundukkan/menugaskan pegawai/karyawan Saudara sekurang-kurangnya 3 orang untuk tiap unit yang akan bertugas melakukan pendaftaran dimaksud.

Daftar nama-nama untuk tjalon petugas tersebut diharapkan telah dapat disampaikan kepada masing-masing Walikota/Panitia Pemilihan Kota setempat dengan tembusan kepada kami dan sebelumnja akan diberikan santiadji/coaching seperlunja dalam melaksanakan tugas dimaksud.

Atas perhatiannja kami utjapkan terima kasih.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH DCI DJAKARTA**

t.t.d.

(A. WIRIADINATA) Wk.
Laksamana Muda Udara

TEMBUSAN:

- Jth. 1. Panitia Pemilihan Indonesia,
2. Sekretaris Daerah,
3. Kodam V Djaya,
4. Komdak VII Djaya,
5. Kodau V,
6. Kodaeral III,
7. Kedjaksanaan Tinggi,
8. Direktorat Bina Tuna Warga,
9. Direktorat I/Pemerintahan,
10. Direktorat II/Kamtib,
11. Direktorat III/Kesra,
12. Dinas Kesehatan Kota DCI,
13. Humas DCI,
14. O.P.S. Perhotelan DCI,
15. Arsip.—

PETUNJUK UNTUK PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PEMILIH BAGI JANG TIDAK BERTEMPAT TINGGAL TETAP.

- I. UNTUK :**
- Hotel-hotel, Losmen, Penginapan dan sebagainya,
 - Rumah Sakit, Rumah Bersalin dan sebagainya,
 - Lembaga Bina Warga (Rumah Pendjara), Rumah tahanan,
 - Kapal-kapal, perahu, rakit dan sebagainya.

1. Agar ditundjuk pegawai/karyawan dari masing-masing unit tersebut sekurang-kurangnya 2 orang untuk menjadi petugas pendaftar; sebelumnja kepada para pegawai/karyawan tersebut diberikan latihan seperlunja dalam tjara melakukan pendaftaran dimaksud.
2. Pendaftaran dilakukan pada tanggal 1 s/d 3 Oktober 1970 dengan daftar Model D Sensus (Rumah tangga khusus) setjara serentak.
3. Pendaftaran dilakukan terhadap orang-orang jang njata-njata belum terdaftar didaerah asalnja atau ditempat lain sebelumnja.
4. Kutipan nama-nama dari Daftar D (Sensus) tersebut kedalam Daftar A dan Kartu A.1. dengan memperhatikan persjaraan-persjaraan jang telah ditentukan antara lain pembuktian surat keterangan (tertulis) tentang tidak terlibatnja dalam G.30.S dari Instansi jang berwadjib dari tempat asalnja.
Pada kolom keterangan diisi RT Khusus, Hotel/losmen dsb.
5. Bagi pemilih jang diperkirakan tidak akan berada ditempat ia terdaftar, pada saat pemungutan suara nanti; dapat diberikan kutipan Daftar Pemilih (Model D Pemilu) jang dapat diperoleh dari PPS setempat.

II. UNTUK PARA TUNA WISMA :

1. Pada tanggal 1 Oktober 1970 mulai djam 24.00 para tuna wisma dikumpulkan dibeberapa tempat dan didaftar dengan Daftar Model D (Sensus) dan A.1. kemudian diserahkan oleh Kodim.
2. Setelah didaftar mereka dibubarkan dengan diberitahukan bahwa selambat-lambatnja 3 hari sebelum pemungutan suara mereka sudah harus berkumpul kembali ditempat tersebut guna mengambil surat panggilan.

3. Kutipan nama-nama jang memenuhi persjaratan kedalam Daftar A dan Kartu A.1., dan pada kolom keterangan dibubuhi: „**Tuna Wisma**”.
4. Pelaksanaan pendaftaran ini dilakukan setjara serentak dengan dibantu oleh alat-alat negara untuk pengamanan. Petugas pendaftar diambilkan dari tenaga-tenaga jang ada pada Kelurahan/P.P.P. dan Ketjamatan/P.P.S. dengan pengawasan dari masing-masing P.P. Kota.

Djakarta, 20 Agustus 1970.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,
t.t.d.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA
Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418
DJAKARTA**

**NOTA – DINAS
No. 753/III/1/1970**

**Kepada : Jth. – Sdr. Para Walikota/Ketua PP Kota
 – Sdr. Para Tjamat/Ketua P.P.S.
 – Sdr. Para Lurah/Ketua P.P.P.
 se Daerah Chusus Ibukota Djakarta.**

Dari : Sekretaris P.P.D. DCI Djakarta.

**Perihal : Djumlah/Alamat Tempat
Pemungutan Suara (T.P.S.).**

Sesuai dengan hasil rapat Para Sekretaris P.P. Kota dan Para Ketua P.P.S. ke-IV sewilajah DCI Djakarta tanggal 18 Djuli 1970, maka pembajaran uang premi pendaftaran pemilih dilaksanakan berdasarkan djumlah TPS masing-masing wilajah.

Sehubungan dengan ini pembajaran dimaksud telah dilaksanakan berdasarkan djumlah TPS masing-masing wilajah jang pernah dilaporkan/disampaikan kepada kami bulan Desember 1969 jang lalu.

Setelah dilakukan pembajaran atas dasar tersebut diatas ternyata beberapa wilajah/Ketjamatan mengajukan claim dengan alasan djumlah TPS jang ada dalam wilajah jang bersangkutan tidak sesuai dengan uang jang tersedia.

Untuk ini dimintakan perhatian Saudara, agar segera mengirimkan kepada kami djumlah TPS berikut alamat jang konkrit dalam wilajah Saudara masing-masing selambat-lambatnja pada achir bulan Agustus 1970 ini telah kami terima.

Djumlah dan alamat TPS jang fixed, disamping untuk memenuhi claim jang pernah diadjukan oleh Saudara djuga akan kami gunakan untuk mengadjukan permohonan biaja pembuatan TPS kepada L.P.U. pada anggaran triwulan ke-III jang akan datang.

Sekiranja Saudara tidak/belum mengirimkan djumlah dan alamat TPS jang konkrit dalam wilayah Saudara pada achir bulan Agustus jang akan datang, kami terpaksa mendasarkan perhitungan biaja selandjutnja sesuai dengan djumlah & alamat TPS jang sudah Saudara kirimkan kepada kami (keadaan Desember 1969).

Demikian agar Saudara maklum.

Djakarta, 24 Agustus 1970.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,

t.t.d.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

TEMBUSAN:

1. Sekda,
2. Direktorat I/Pem,
3. Direktorat II/Kamtib,
4. Alas.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA
Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418
DJAKARTA**

Nomor : 804/III/1/1970. Djakarta, 9 September 1970.
Lampiran : —
Perihal : Mutasi/perpindahan penduduk
selama masa pendaftaran
penduduk dan pemilih.

Kepada Jth.

1. Para Walikota/Ketua PP KOTA,
2. Para Tjamat/Ketua PPS,
3. Para Lurah/Ketua PPP
se D.C.I. Djakarta,
di

DJAKARTA.—

Menghubungi surat kami tanggal 21 Djuli 1970, No. 679/III/1/1970 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan, sementara menunggu pendropan formulir model D dari Lembaga Pemilihan Umum, maka bagi penduduk yang berpindah tempat dapat dibuatkan „Surat Keterangan” jang isi dan bentuknja sesuai dengan formulir tersebut.

Demikian agar Saudara maklum.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,
t.t.d.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

TEMBUSAN:

- Jth. 1. Sekretaris Daerah,
2. Direktorat I/Pem,
3. Direktorat II/Kamtib,
4. Kantor Urusan Penduduk DCI,
5. Arsip.—

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA
Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418
DJAKARTA**

NOTA – DINAS

No. 826/III/1/1970.

**Kepada : Jth. Para Walikota/Ketua PP Kota,
Para Tjamat/Ketua P.P.S.
Para Lurah/Ketua P.P.P.
se D.C.I. Djakarta.**

**Dari : Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah
Daerah Chusus Ibukota Djakarta.**

Perihal : Penanda-tanganan Kartu A.1.

Dengan adanja beberapa Kelurahan jang sampai saat ini belum selesai dengan penanda-tanganan Kartu A.1. (Kartu Kuning), agar para tjalon pilih tidak kehilangan hak pilihnja; bersama ini dimintakan perhatian Saudara supaja Kartu A.1. (Kartu Kuning) dimaksud sudah harus selesai ditanda tangani oleh jang bersangkutan selambat-lambatnja sebelum tanggal 5 Oktober 1970 jang akan datang.

Demikian agar Saudara maklum.

Djakarta, 15 September 1970.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
D.C.I. DJAKARTA**

Sekretaris,
t.t.d.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

TEMBUSAN:

- Jth. 1. Sekretaris Daerah,
2. Direktorat I/Pemerintahan,
3. Arsip.—**

**DJADWAL DAN TATA TJARA PENDAFTARAN PARA TUNA,
HOTEL/LOSMEN, RUMAH SAKIT, RUMAH PENDJARA
DAN SEBAGAINJA.**

No. 853/III/1/1970

A. DJADWAL :

- 25/9 s/d 16/9—1970 : — Santiadji/coaching untuk seluruh para petugas pendaftaran, dilaksanakan dan dikoordinir oleh masing-masing PP. Kota dikelima wilayah.
- 29/9 s/d 30/9—1970 : — Mempersiapkan semua perlengkapan untuk pendaftaran; formulir D, A dan Kartu A.1 serta Kartu Tanda Terdaftar para tuna dimasing-masing wilayah Kota/Ketjamatan dan sebagainya.
- 29/9 s/d 30/9—1970 : — Pengumuman/pemberitahuan setjara serentak via mass media, Radio, Radio Amatir, selebaran dan sebagainya mendjelaskan bahwa akan diadakan pendaftaran penduduk/pemilih, khusus untuk para tuna, orang jang bertempat tinggal di Hotel/Losmen, Rumah Sakit, Rumah Pendjara, Rakit/Perahu dan orang jang tidak mempunjai tempat tinggal lainnja jang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1970.

B. TATA-TJARA PENDAFTARAN :

- Para Tuna : — Tanggal 1 Oktober 1970 djam 22.00 wib. para petugas pendaftar telah siap/stand by, dibantu oleh petugas dari masing-masing Ketjamatan, Keamanan setempat, masing-masing berada ditempat-tempat pengumpulan para tuna.
- : — Formulir/kelengkapan lainnja sudah tersedia dan siap untuk digunakan/diisi.

- : — Djam 24.00 wib. para tuna jang telah terkumpul setjara teratur, diminta berbaris/ antri satu persatu untuk mendatangi medja-medja para petugas pendaftaran untuk didaftar namanja sesuai dengan ketentuan jang berlaku.
 - : — Para petugas mentjatat nama, umur, djenis kelamin, alamat dan sebagainja bagi seluruh para tuna termasuk semua anggota keluarganja jang belum pernah didaftar sebelumnya ditempat lain pada Daftar model „D” Sensus dan Kartu A.1.
 - : — Untuk jang memenuhi persjaratan ketentuan tentang tjalon pemilih, bagi mereka diberikan „Kartu Tanda Terdaftar” dengan tjatatan mereka harus kembali ketempat jang sama atau tempat lain jang ditentukan pada waktu seminggu sebelum diadakan pemungutan suara (5 Djuli 1971).
 - : — Kartu A.1. para tuna ini selandjutnja disampaikan kepada Kodim setempat selaku P.U. Laksus Kopkamtibda untuk mendapatkan penelitian dan pengesahan sesuai dengan prosedur jang berlaku.
- **Hotel-hotel/Losmen :** — Pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1970 s/d 3 Oktober 1970 jang dilakukan oleh petugas-petugas pendaftar dari Hotel/Losmen jbs. atau petugas lain jang ditundjuk PP Kota/PPS.
- : — Jang didaftar adalah para penghuni tetap, para tamu jang belum pernah didaftar ditempat asalnja sebelumnya.
 - : — Khusus bagi para tamu jang didaftar tetapi akan bepergian ketempat lain sesudah selesai pendaftaran diberikan **Surat Keterangan** sebagaimana dimaksudkan dalam lampiran I (P.P. No. 1/1970), kalau jang bersangkutan

pada pemungutan suara nantinja kemungkinan sedang berada didaerah lain.

(Bagi para tamu jang pada pemungutan suara nantinja diperkirakan berada di Djakarta lagi (tempat terdaftar) tidak perlu diberikan Surat Keterangan seperti dimaksud).

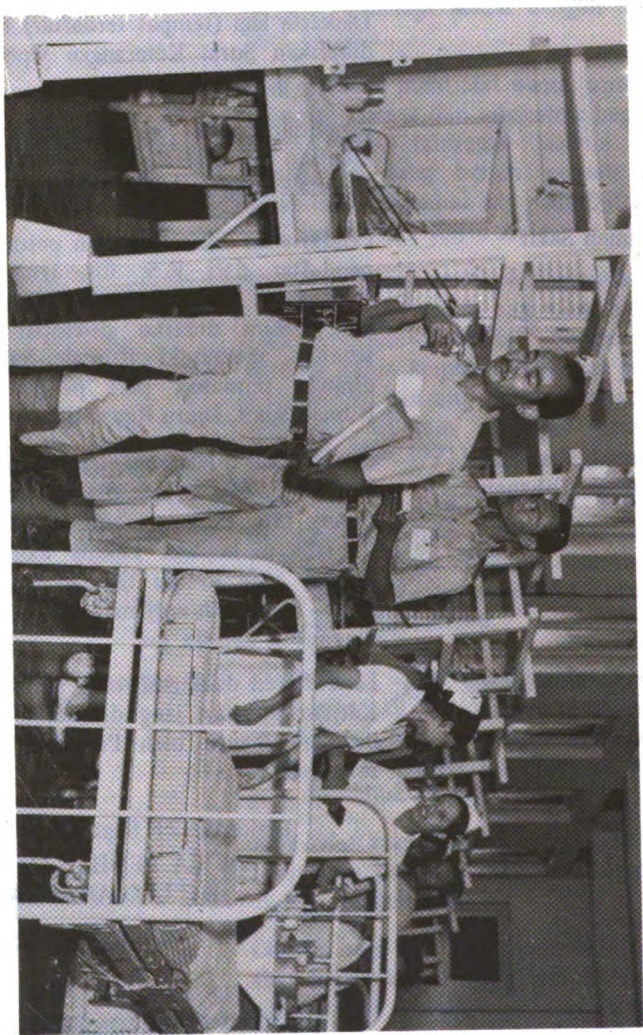
- : - Penelitian daftar nama-nama orang jang terdaftar di Hotel-hotel/Losmen diserahkan kepada P.P.S./Ketjamatan setempat.
- **Rumah Sakit** : - Pendaftaran dilakukan oleh petugas-petugas pendaftar dari R.S. jbs. jang diangkat/ditugaskan. Jang terdaftar adalah para pasien jang belum terdaftar ditempat tinggalnja sebelum memasuki Rumah Sakit untuk dirawat termasuk para penghuni asrama Rumah Sakit, Djuru Rawat dsb.
- **Rumah Pendjara/
Rumah Tahanan.** : - Pendaftaran dilakukan oleh petugas-petugas Rumah Pendjara jang diangkat/ditugaskan. Orang jang berhak memilih, penelitiannja diserahkan kepada Laksus Kopkamtibda, setelah pada kolom tjatatan ditjantumkan masa hukuman/antjaman hukuman jang dikenakan kepada jbs.
- **Orang-orang jang
tinggal di rakit/
perahu.** : - Pendaftaran dilakukan oleh petugas-petugas Ketjamatan/atau jang ditundjuk oleh PPS dengan dibantu oleh Penguasa Pelabuhan setempat.

Djakarta, 21 September 1970.

PANITIA PEMILIHAN DAERAH
D.C.I. DJAKARTA

Sekretaris,
t.t.d.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)



Pendaftaran Pemilih yang sedang dirawat di Rumah Sakit.



Pendaftaran Pemilih para tahanan/nara-pidana.



Pendaftaran Pemilih para awak kapal.

TATA TJARA PENDAFTARAN SENSUS DAN PEMILIH UNTUK PARA TUNA PADA TANGGAL 1 OKTOBER 1970

PELAKSANA

- Pendaftaran langsung dilakukan oleh Petugas-petugas yang ditugaskan oleh P.P.S.
- Pengawasan/koordinator oleh P.P. Kota setempat.
- Kumpulkan para tuna pada suatu tempat yang telah ditentukan dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan antara lain: Keamanan, tertib, terang dan terlindung bila hujan, umpama gedung-gedung, stasion dan sebagainya.
- Tentukan petugas pendaftaran sebanyak yang diperlukan dengan membagi 2 petugas:
 1. Pendaftar sensus dengan Model D (Sensus)
 2. Pendaftar dengan Kartu Pemilih Model A.1.
- Pelaksanaan pengisian Model D dan Kartu Pemilih Model A.1. dilaksanakan sekaligus bersama saat itu juga.
- Pengisian model D dilakukan **tidak** berumah tangga tetapi setjara berurutan terus (seperti halnya mendaftar rumah-rumah tangga khusus (asrama, Penjara, Rumah Sakit dlsb.).
- ± 3 hari sebelum tanggal 1 Oktober 1970 supaya diadakan pengumuman-pengumuman seperlunya (mobil unit, wall paper, edaran ke RT atau pemberitahuan langsung).

PROSES PENDAFTARAN (Djam 24.00 s/d 05.00)

- Pada tiap satu medja ditempatkan 2 orang petugas (untuk ini adakanlah medja dan petugas setjukupnja untuk mempertjepat pendaftaran).
- Petugas pertama mendaftar dengan Daftar Model D (Sensus) dan sesudahnja didaftar dengan Kartu Pemilih (Model A.1.) oleh petugas kedua dan langsung ditanda tangani oleh jbs. (persyaratan pemilih supaya tetap diperhatikan antara lain: umur, kebangsaan dsb).

- Sebelumnja supaja telah dibagi-bagi kedalam kelompok-kelompok, para tuna jang telah dikumpulkan tadi masing-masing kelompok untuk setiap medja pendaftar.
- Setiap jang telah didaftar diberikan „Surat Tanda Terdaftar” (tjukup kertas stencil) sadja lalu dipisahkan dan dibubarkan setelah pendaftaran selesai keseluruhannja (untuk mentjegah pendaftaran sampai 2 kali).
- Setelah selesai pendaftaran, sebelum mereka dibubarkan beritahukan kepada jbs. bahwa selama 1 minggu sebelum pemungutan Suara (tanggal 28/6—71 s/d 4/7—71) mereka berkumpul kembali ditempat jang sama untuk menerima surat panggilan untuk pemberian suara atau disuruh datang pada Kantor PPS/Ketjamatan setempat.
- Telitilah nama-nama jbs. pada Daftar pasal 12 (orang-orang jang tidak berhak memilih) sebagaimana mestinja.
- Setelahnja susunlah nama-nama jang berhak memilih dan masukkan kedalam Daftar Pemilih A (Tambahan).
- Pada kolom alamat: dapat dituliskan alamat saat pendaftaran dilakukan dan kolom keterangan: dituliskan „husus para tuna”.
- Tentukanlah T.P.S. untuk jbs. jang terdekat dari alamat pendaftaran dan djika memerlukan dapat dibuatkan T.P.S. khusus untuk ini.
- Selambat-lambatnja tanggal 5 Oktober 1970 laporan djumlah penduduk dan pemilih dari para tuna ini telah disampaikan pada PPD DCI Djakarta.

Djakarta, 29 Agustus 1970.

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
DAERAH D.C.I. DJAKARTA

P.P.S. KETJAMATAN

.....

No.:

TANDA TERDAFTAR

N a m a : Umur th/lk/pr.

A l a m a t :

Keterangan :

Djakarta, ... 1970.

A.n. P.P.S. Ketjamatan

.....

Petugas,



Pendaftaran Pemilih para Tuna.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA
Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418
DJAKARTA**

**SURAT – TUGAS
No.: 901/III/1/1970.**

Ditugaskan kepada nama-nama jang tersebut pada lampiran Surat ini untuk:

**„Meneliti dalam penjelesaian penanda tangan „KARTU A-1”,
Daftar A, Berita Atjara AA dan AA-1 pada Wilajah-wilajah/
Ketjamatan-ketjamatan/Kelurahan-kelurahan dalam masing-masing
kolom, mulai tanggal 14 Oktober 1970 sampai dengan tanggal
24 Oktober 1970”.**

Agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Djakarta, 12 Oktober 1970.
**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**
Sekretaris,
t.t.d.
(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

TEMBUSAN JTH.:

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
2. Sekda,
3. Direktorat I,
4. Direktorat II,
5. Para Walikota/PP. Kota,
6. Para Tjamat/PPS,
7. Para Lurah/PPP,
8. Bendaharawan PPD DCI,
9. Arsip.—

**Pembagian Tugas Penelitian KARTU A-1, DAFTAR A,
BERITA ATJARA AA + AA1 Dikelurahan-kelurahan/
Ketjamatan-ketjamatan dalam Wilayah DCI Djakarta;
Tanggal 14 Oktober s/d 24 Oktober 1970.**

No.	N a m a	Djabatan	Wilajah	Kendaraan	Keterangan
I.	Soetjipto Wiro- sardjono M.Sc	Sekretaris	Koordinator untuk ke 5 wilajah	B-5247 M	Penindjau Penelitian diikuti oleh PPS setempat. 1 hari mi- nimum 2 Kehurahan
	Goenarto S.H.	Karo. Adm.			
	Obed Soehagio	Bendaharawan			
II.	Burhanuddin Hs.	Karo. Penje- lenggaraan	Djak. Selatan -Ketj. Setia Budi/Kelu- rahan ² nja. -Ketj. Pasar Minggu dan Kelurahan- kelurahannja.	B-1138 F	
	Nurlin S.	Staf PPD.DCI			
III.	Drs. Max Sumaraw	Karo Perbe- kalan	Djak. Selatan -Ketj. Tebet/ Kelurahan- kelurahannja. Djak. Timur -Ketj. Matra- man dan Ke- lurahan ² nja.	B-9124 G	
	Sjahrial Effendy	Staf PPD.DCI			
IV.	Muchrodji	Kep. Bag. Keamanan	Djak. Pusat -Ketj. Senen/ Kelurahan- kelurahannja. -Ketj. Tjemp. Putih/Kelu- rahan ² nja.	B-5863 M	
	Idham Pranoto	Staf PPD.DCI			

No.	N a m a	Djabatan	Wilajah	Kendaraan	Keterangan
V.	Drs. F. Sahadi	Kep. Bag. Pengawasan	Djak. Timur – Ketj. Kr. Djati /Kehurahan- keurahannja.	B–4101 Z	
	Sjamsuir Alamsjah	Staf PPD.DCI	– Ketj. Pl. Ga- dung/Kehu- rahan ² nja.		
VI.	Faried Hakim	Kep. Bag. Penjelenggaraan	Djak. Barat – Ketj. Grogol/ Kehurahan- keurahannja.	B–9148 G	
	Rusmini B.A	Staf PPD.DCI	Djak. Utara – Ketj. Kodja/ – Kehurahan- keurahannja.		

Djakarta, 12 Oktober 1970.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418 – DJAKARTA

Nomor : 914/III/2/1970. Djakarta, 17 Oktober 1970.
Lampiran : —.—
Perihal : Djadwal Berita Atjara
Model A.2. + A.3.
(Djumlah pemilih).

Kepada Jth.
Sekretaris PP. Kota Djakarta Timur
Djl. Raya Djatinegara Timur 55
di

DJAKARTA.—

Mendjawab Surat Saudara No. 272/III/DT/70 tanggal 10 Oktober 1970 perihal perpandjangan waktu pendaftaran pemilih, maka sesuai dengan keputusan dalam Rapat Para Sekretaris P.P. Kota ke-X tanggal 17 Oktober 1970, bersama ini kami beritahukan bahwa djadwal waktu pengiriman Berita Atjara tentang penghitungan djumlah pemilih jang terdaftar (model A.2. + A.3.) sebagai jang dimaksud dalam surat kami tanggal 19 Agustus 1970 No. 744/III/1/1970, maka ditetapkan mendjadi sebagai berikut :

31/10 s/d 5/11/70 — P.P.P. mengirimkan ke P.P.S.
6/11 s/d 10/11/70 — P.P.S. mengirimkan ke PP Kota
11/11 s/d 15/11/70 — P.P. Kota mengirimkan ke P.P.D.
D.C.I. Djakarta.

Diharapkan agar target waktu dalam djadwal dimaksud ditepati dengan semestinja.

Demikian agar maklum.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

A.n. Sekretaris,
t.t.d.

(BURHANUDDIN. Hs.)

TEMBUSAN:

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
2. Sekretaris Daerah,
3. Direktorat I/Pemerintahan,
4. P.P. Kota,
5. P.P.S.,
7. Arsip.—

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA
Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418
DJAKARTA**

NOTA - DINAS

No. 940/III/1/1970.

Kepada : Jth. Para Walikota/Ketua P.P. Kota
Para Para Tjamat/Ketua P.P.S.
Para Lurah/Ketua P.P.P.
se D.C.I. Djakarta.

Dari : Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah
Daerah Chusus Ibukota Djakarta.

Perihal : Penarikan/pentjabutan formulir-formulir,
Kartu-kartu jang masih ditangan para Petugas.

Dengan berachirnja tahap terachir masa pendaftaran pemilih pada tanggal 30 Oktober 1970 jang akan datang, sesuai dengan Surat Keputusan Mendagri/Ketua L.P.U., tanggal 26 September 1970 No. 53/LPU/Tahun 1970, bersama ini diminta agar semua formulir-formulir Model D, A, Kartu A.1. dan Surat Tugas/Dispensasi dan sebagainya, jang sampai saat ini masih ada ditangan para petugas pendaftar pemilih, selambat-lambatnja tanggal 30 Oktober 1970 supaja segera ditarik kembali.

Demikian agar mendapat perhatian saudara seperhunja.

Djakarta, 27 Oktober 1970.
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
Sekretaris,
t.t.d.
(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

TEMBUSAN:

1. B.P.H./Pemerintahan,
2. Sekda,
3. Direktorat I/Pemerintahan,
4. Direktorat II/Kamtib,
5. Arsip.-

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA
Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418
DJAKARTA**

NOTA – DINAS

No.: 948/III/1/1970

**Kepada : Jth. 1. Para Walikota/Ketua P.P. Kota,
2. Para Tjamat/Ketua P.P.S.
3. Para Lurah/Ketua P.P.P.
se D.C.I. Djakarta.**

**Dari : Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah
Daerah Chusus Ibukota Djakarta.**

**Perihal : Petundjuk-petundjuk tentang
Penggunaan Model A4.—**

Sehubungan dengan surat kami tanggal 21 Oktober 1970 No. 927/III/1/1970, dan petundjuk-petundjuk kami lainnja tentang penggunaan Model A4 (kutipan daftar pemilih/daftar pemilih tambahan), sesuai dengan keputusan/hasil rapat kerdja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia pada tanggal 26 Oktober s/d 28 Oktober 1970 jang baru lalu maka dengan ini perlu dipertegas tjara-tjara penggunaan formulir Model A4 dimaksud sebagai berikut:

1. Pada azasnja setiap orang/Pemilih jang karena sifat tugasnja dan jang pindah tempat tinggal, diberikan kutipan daftar pemilih dengan menggunakan formulir Model A4.
2. Formulir dimaksud dikeluarkan oleh Lurah/Ketua PPP atas nama Tjamat/Ketua PPS setempat dalam rangkap 3 (tiga).
3. Perlu diingat bahwa pemeliharaan daftar pemilih sebagai dimaksud dalam pasal 33 PP No. 1/1970 ialah dimulai dari tanggal 31 Oktober 1970 s/d 20 Djuli 1971 (14 hari sebelum 5 Djuli 1971). Maka mutasi-mutasi hanja dapat dilakukan dalam djangka waktu tersebut diatas, ketjuali untuk menghapus Pemilih jang dapat dibuktikan tidak mempunjai hak untuk memilih.
4. Bagi seorang pemilih jang telah terdaftar dalam daftar pemilih bila hendak pindah kedaerah lain diluar daerah Kelurahan jang bersangkutan diberikan formulir A4 dengan menghapus atau mentjoret namanja pada daftar A dan A1 kemudian jang bersangkutan mendaftarkan dirinja ditempat jang baru sebagaimana seorang pemilih jang dari semula sudah mendjadi penduduk Kelurahan tersebut.

Sebaliknya demikian pula penduduk yang datang dari luar daerah Kelurahan tersebut dengan membawa kutipan daftar pemilih Model A4 harus didaftar sebagai pemilih pada daftar A dan A1 dengan memperhatikan jangka waktu yang tersebut pada angka 3, dari formulir A4 tersebut (pindahan) disimpan pada Kelurahan yang bersangkutan.

Dengan kata lain seseorang yang datang karena pindah pada tanggal 21 Juni 1971 atau sesudahnya tidak lagi dimasukkan dalam daftar A dan A1, tapi menggunakan formulir A4 tersebut langsung di T.P.S. yang ditentukan.

5. Orang/Pemilih yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memberikan suaranya pada tanggal 5 Juli 1971 di T.P.S. yang ditentukan maka dapat diberikan formulir A4 guna melakukan pemberian suaranya pada tanggal 5 Juli 1971 di T.P.S. yang ditentukan, yang berdekatan dengan tempat tugasnya.

Sebaliknya orang/pemilih yang membawa formulir A4 karena sifat tugas pekerjaannya dari daerah lain dapat langsung memberikan suaranya pada T.P.S. yang ditunjuk/ditentukan dimana ia dapat memberikan suaranya, dengan memperhatikan jangka waktu tersebut diatas pada angka 3 dan ketentuan dalam pasal 79 PP No. 1 Th. 1970. Dengan kata lain jika ia datang dari daerah luar daerah pemilihan Djakarta antara tanggal 21 Juni 1971 s/d 5 Juli 1971, maka ia hanya dapat memberikan suara untuk pemilihan anggota D.P.R. saja, tapi bila ia datang masih dalam lingkungan daerah pemilihan Djakarta, maka ia dapat memberikan suaranya untuk pemilihan Anggota D.P.R.D. Djakarta dan D.P.R.

Jika ia datang sebelum tanggal 21 Juni 1971 sebaiknya ia memindahkan daftar pemilihnya ke Kelurahan yang baru, sebagaimana yang tersebut diangka 4.

6. Bila penempatan pemilih yang karena pindah tersebut tidak mungkin pada suatu T.P.S. dalam lingkungan tempat ia terdaftar (karena telah lebih 300 pemilih) dapat dimasukkan pada T.P.S. lain yang terdekat dan memungkinkan. Demikian agar saudara maklum.

Djakarta, 30 Oktober 1970.

PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

TEMBUSAN:

Sekretaris,

t.t.d.

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
2. B.P.H./Bidang Pemerintahan, (SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)
3. Sekda,
4. Direktorat I/Pemerintahan,
5. Kantor Urusan Penduduk,
6. Kantor Sensus & Statistik,
7. Arsip.—

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**
Djahan Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418
DJAKARTA

Nomor : 958/III/1/1970. Djakarta, 5 Nopember 1970.
Lampiran : —.—
Perihal : Daftar Pemilih tambahan
Model A; bagi orang jang
masih diragukan Hak Pilihnja.

Kepada Jth.:

Sdr. Para Walikota/Ketua P.P. Kota
Sdr. Para Tjamat/Ketua P.P.S.
Sdr. Para Lurah/Ketua P.P.P.
se D.C.I. Djakarta
di

DJAKARTA.—

Sesuai dengan hasil raker P.P.D. Tingkat I se Indonesia jang baru lalu, dengan ini diberitahukan bahwa penjelesaian pendaftaran kedalam Daftar A bagi orang-orang jang masih diragukan dan kini telah terdaftar pada Kartu A1 sebagaimana dimaksud dalam Surat Kawat Mendagri/Ketua L.P.U. No. SDP.X.23/1/13 tanggal 10 Djuli 1970; setelah mendapat penelitian dan pengesahan dari Mendagri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum; dapat dilakukan walaupun tanggal berachirnja pendaftaran pemilih (tanggal 30 Oktober 1970) telah lampau.

Demikianlah agar Saudara maklum.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,
t.t.d.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

TEMBUSAN:

- Jth. 1. B.P.H./Bidang Pemerintahan,
2. Sekda,
3. Direktorat I/Pemerintahan,
4. Direktorat II,
5. Arsip.—

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA
Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418
DJAKARTA**

Nomor : 0060/III/1/1971. Djakarta, 25 Djanuari 1971.
Lampiran : —.—
Perihal : Penjelesaian Pendaftaran
Para Tuna jang berhak Memilih.

Kepada Jth.

1. Para Walikota/Ketua P.P. Kota.
2. Para Tjamat/Ketua P.P.S.
se D.C.I. Djakarta
di

DJAKARTA.—

Untuk dapat menetapkan tjalon pemilih jang konkrit didaerah D.C.I. Djakarta antara lain para tuna jang telah didaftar oleh Saudara pada tanggal 1 Oktober 1970 jang lalu telah diadjukan kepada Kodim setempat guna penelitiannja.

Untuk ini kami harapkan laporan jang pasti dari Saudara, hasil penelitian tersebut.

Demikian agar Saudara maklum.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,
t.t.d.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

TEMBUSAN:

- Jth.
1. Panitia Pemilihan Indonesia,
 2. Laksusda Djaya (vide Radiogram
No. 052/P.C/10/1970 Tgl. 28 Okt. 1970)
 3. B.P.H./Bidang Pemerintahan,
 4. Sekda DCI Djakarta,
 5. Direktorat I, II, III,
 6. Arsip.—

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA**
Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418
DJAKARTA

NOTA – DINAS
No.: 0157/III/1/1971.

Kepada : Jth. Para Walikota/Ketua P.P. Kota,
Jth. Para Tjamat/Ketua P.P.S.,
se-D.C.I. Djakarta.

Dari : Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah
Daerah Khusus Ibukota Djakarta.

Perihal : Thema dan Kegiatan Penerangan dan Laporan
penyelesaian Daftar A dan Daftar KPPS.

Dalam rangka peningkatan kegiatan operasional Pemilihan Umum menjelang Pemungutan Suara yang akan datang dengan ini kami mintakan perhatian Saudara-saudara sebagai berikut:

1. Penerangan kepada umum mengenai teknis penyelenggaraan Pemungutan Suara agar diadakan di Kelurahan-kelurahan, sesuai dengan Nota Dinas kami No. 0065/III/1/1970 tanggal 25 Djanuari 1970 dan harus berachir selambat-lambatnja achir bulan Maret 1971.
2. Segera menyelesaikan penjalinan Daftar A rangkap 4 untuk TPS-TPS, sesuai dengan surat kami no. 723/III/1/1971 tanggal 8 Agustus 1971, agar selambat-lambatnja achir bulan Maret 1971 telah selesai.
3. Inventarisasi tempat-tempat/lapangan yang dapat digunakan untuk kampanye diharapkan achir bulan Pebruari 1971 telah kami terima, vide surat kami tanggal 26 Djanuari 1971 No. 0064/III/1/1971.

4. Pembentukan K.P.P.S. akan dilakukan pada bulan Mei 1971, maka tjalon-tjalon untuk itu diharapkan pada bulan April jang akan datang telah diadjudkan.

Demikian agar mendjadi maklum.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,

t. t. d.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

TEMBUSAN:

- Jth. 1. Panitia Pemilihan Indonesia,
2. B.P.H./Bidang Pemerintahan,
3. Sekda,
4. Direktorat I,
5. Direktorat II,
6. Direktorat VII,
7. Arsip.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA
Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418
DJAKARTA**

**NOTA — DINAS
No. 0168/III/1/1971.**

Kepada : 1. Para Walikota/Ketua P.P. Kota.
2. Para Tjamat/Ketua P.P.S.
se-DCI Djakarta.

Dari : Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah
Daerah Chusus Ibukota Djakarta.

Perihal : Pendaftaran Pemilih baru.

Sesuai dengan ketentuan djadwal pendaftaran pemilih jang sudah berachir tanggal 30 Oktober 1970 jang lahu dengan ini di Instruksikan kepada Saudara untuk tidak menerima/mengadakan pendaftaran baru, ketjuali bagi mereka pendatang dari luar daerah dengan membawa Surat Keterangan pindah (Model A4) dan bagi mereka pendatang dari Luar Negeri jang tidak menggunakan A4, melainkan dengan Surat Keterangan dari Perwakilan jang berada di Luar Negeri tersebut, sebagaimana jang dimaksud dalam Surat Kawat Mendagri/Ketua L.P.U. No. 14/2/1971 tanggal 10Pebruari 1971.

Kepada mereka ini dapat dilakukan pendaftaran sebagaimana mestinja.
Demikian agar maklum adanja.

Djakarta, 23 Pebruari 1971.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,

t.t.d.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA
Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418
DJAKARTA**

Nomor : 0241/III/1/1971 Djakarta, 17 Maret 1971.
Lampiran : 1 (satu).
Perihal : Penyelesaian pendaftaran
para tuna jang berhak memilih.

Kepada Jth.
Para Walikota/Ketua P.P. Kota,
Para Tjamat/Ketua P.P.S.
se-D.C.I. Djakarta
di

DJAKARTA.-

Sehubungan dengan surat kami tanggal 25 Djanuari 1971 No. 0060/III/1/1971, perihal tersebut diatas, bersama ini kami harapkan penjelesaiannya dengan segera dan diharapkan pada achir bulan Maret 1971 ini telah tersusun dengan baik.

Untuk memudahkan Saudara dalam menghubungi KODIM setempat; terlampir kami sampaikan salinan Radiogram Laksusda Djaya tanggal 28 Oktober 1970 No. 052/P.C./10/70. Kemudian laporannya kami harapkan.

Demikian agar Saudara maklum.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

A.n. Sekretaris,
Kepala Biro Penjelenggara,
t.t.d.,
(BURHANUDDIN Hs.)

TEMBUSAN:

- Jth. 1. Panitia Pemilihan Indonesia,
2. Laksusda Djaya,
3. B.P.H. Bidang Pemerintahan,
4. Sekda DCI Djakarta,
5. Dir. I, II, III dan VII,
6. Arsip.

**PELAKSANA CHUSUS PANGLIMA KOMANDO OPERASI
PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
DAERAH DJAKARTA RAJA DAN SEKITARNJA**

RADIOGRAM

DARI (:) LAKSUS PANGKOPKAMTIB/DJAJA TTK
UNTUK (:) DAN DIM 0501 s/d 0505 DJAJA TTK
TINDASAN (:) (1) KETUA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
 TTK
 (2) PANGKOPKAMTIB Cq. K.G-1 TTK
 (3) LAKSUS PANGKOPKAMTIB WIL
 DJAWA MADURA TTK
 (4) PANGDAERAL - III TTK
 (5) PANGKODAU - V TTK
 (6) DAN DIM 0506 dan 0507 TTK
 (7) PANGDAK VII/DJAJA TTK
 (8) ASS-1, 5 dan 6 LAKSUS PANGKOPKAMTIB/
 DJAJA TTK
 (9) KETUA PEMILIHAN DCI/DJAJA TTK

KLASIFIKASI (:) „KILAT”
NOMOR (:) Rdg-052/PC/10/1970 TANGGAL 28 OKTOBER
 1970 TTK

AAA TTK PADA TGL 1 OKTOBER 1970 PANITIA PEMILU DCI
 DJAJA TELAH MELAKUKAN PENDAFTARAN PEMILIH
 UNTUK PEMILU JAD KMA TERHADAP PARA
 TUNA-TUNA (WISMA KMA KARYA DLL-NJA) KMA
 DIDAERAH IBUKOTA JANG MELIPUTI DJUMLAH
 ± 9000 ORANG TTK

BBB TTK SEBELUMNJA MENDAPATKAN HAK MEMILIH HARUS
 DILAKUKAN SCREENING TERLEBIH DAHULU
 (POLITICAL CLEARANCE) TTK

CCC TTK DIPERINTAHKAN KEPADA PARA DAN DIM KMA
 UNTUK MELAKUKAN SCREENING DENGAN BAHAN-
 BAHAN JANG ADA TERHADAP PARA TUNA-TUNA
 TSB DIATAS TTK

DDD TTK **APABILA TERDAPAT FAKTA-FAKTA PARA TUNA
JANG TERLIBAT LANGSUNG MAUPUN TIDAK
LANGSUNG DENGAN KEGIATAN-KEGIATAN G-30-S/
PKI KMA SUPAJA DILAPORKAN KEPADA LAKSUS
PANGKOPKAMTIB/DJAJA Cq.ASS-1 TTK**

EEE TTK **HASIL PENELITIAN HARAP SUPAJA DILAPORKAN
PADA PERTENGAHAN BULAN NOPEMBER 1970
KEPADA LAKSUS PANGKOPKAMTIB/DJAJA TTK**

**UMP LAKSUS PANGKOPKAMTIB/DJAJA
KRM TTK HBS (X)**

PENGIRIM **(:)**

NAMA **(:) G.H. MANTIK**

PANGKAT/DJAB **(:) BRIGDJEN TNI/A.M. LAKSUS
PANGKOPKAMTIB/DJAJA**

TANDA TANGAN **(:) ttd.**

AGENDA :
Tanggal **: 1 Nopember 1970**
Nomor **: 1423/III/2/1970**

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA
Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418
DJAKARTA**

Nomor : 0359/III/1/1971. Djakarta, 19 April 1971.
Lampiran : —.—
Perihal : Pendaftaran pemilih
 jang tertinggal.

Kepada
Jth. Sdr. Walikota/P.P. Kota
Tjamat/P.P.S.
Se-DCI DJAKARTA

Sesuai dengan usul/pertanyaan jang disampaikan oleh saudara dalam rapat dinas Sekretariat jang baru lalu; perihal tersebut diatas; dengan ini dapat ditempuh suatu kebidjaksanaan guna memungkinkan didaftarnya orang-orang jang belum atau tertinggal kedalam Daftar Pemilih Tambahan sebagai kelanjutan penjelesaian tehnik-administratif dengan ketentuan sebagai berikut:

1. harus ada pernyataan tertulis dari jang bersangkutan (djika meliputi sekelompok dari suatu instansi atau keluarga dari A.B.R.I.; setjara kolektif dari instansi jang bersangkutan) dengan menjebutkan alasan-alasan tidak terdaftarnya jang bersangkutan pada masa pendaftaran jang lalu.
2. jang bersangkutan harus dapat membuktikan benar-benar sudah terdaftar sebagai penduduk DCI s/d 6 Oktober 1970.
3. jang bersangkutan harus datang sendiri kekantor Ketjamatan untuk mendaftarkan dirinja dan sekaligus menandatangani Kartu A.1.
4. Kesempatan ini dibuka s/d tanggal 30 Mei 1971.

Demikian agar saudara maklum.

PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
Sekretaris,
t.t.d.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.).

TEMBUSAN:

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
2. Sekda DCI Djakarta,
3. B.P.H./Bidang Pemerintahan,
4. Direktorat I/Pemerintahan,
5. Direktorat VII/Chusus Politik,
6. Arsip.

PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
Djl. Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418
D J A K A R T A .

INSTRUKSI

No. 0384/III/I/71.

- D a r i** : Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Daerah Khusus Ibukota Djakarta.
- Kepada** : Semua Pimpinan Kantor2/Perusahaan2 Daerah dalam lingkungan D.C.I. Djakarta.
- Perihal** : Pengadaan T.P.S. di Kantor-kantor.
-

Sehubungan dengan Surat Edaran kami tanggal 17 April 1971 No. 0353/III/1/1971, perihal tersebut diatas dengan ini :

DIINSTRUKSIKAN

1. Kepada Sekda, semua Kepala Direktorat/Biro, Kepala Kantor, Dinas, Djawatan, Pimpinan Perusahaan2 Daerah (termasuk Perusahaan yang bekerdja sama/joint) yang berada dalam lingkungan Pemerintahan Daerah D.C.I. Djakarta, untuk mengadakan T.P.S. (Tempat Pemungutan Suara) di Kantornja masing-masing guna melayani para karyawan dalam melaksanakan Pemungutan Suara pada tanggal 3 Djuli 1971.
2. Kantor2/Perusahaan2 yang mempunyai karyawan sebagai pemilih sedjumlah 100 (seratus) orang keatas harus menjediakan T.P.S. sekurang-kurangnya sebuah dan selandjutnja disesuaikan dengan ketentuan dari L.P.U. untuk antara 200 - 300 pemilih 1 buah T.P.S.
3. Kantor2/Perusahaan2 yang mempunyai karyawan kurang dari 100 (seratus) orang pemilih diadakan penggabungan antar kantor/Perusahaan dalam lingkungan Pemerintah DCI Djakarta lainnja yang terdekat.
4. Ketentuan-ketentuan yang tertjantum dalam Surat Edaran kami tanggal 17 April 1971 No. 9353/III/1/1971 tersebut diberlakukan pula guna pelaksanaan Instruksi ini.
5. Kepada para Walikota/Ketua P.P. Kota dalam wilayah DCI Djakarta, diinstruksikan untuk mengkoordinir pelaksanaan ini.

6. Agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Djakarta, 27 April 1971.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH D.C.I. DJAKARTA**

(ALI SADIKIN)

Letnan Djenderal KKo.

T e m b u s a n :

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
 2. Laksus Kopkamtibda Djaya,
 3. Komdak Metro Djaya.
 4. Sekda DCI Djakarta,
 5. Direktorat I/Pemerintahan,
 6. Direktorat VI/Chusus Politik,
 7. Para Walikota/P.P. Kota,
 8. Para Tjamat/P.P.S.,
 9. Para Lurah/Koordinator K.P.P.S.
 10. A r s i p.
-

**Djalan Imam Bondjol No. 13 Djakarta.
Telepon No. 53418**

di—

Demikian agar maklum dan perhatiannja.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH D.C.I. DJAKARTA**

Tjap/t.t.d.

(ALI SADIKIN)
Letnan Djenderal KKo.

Tembusan :

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
 2. Laksus Kopkamtibda Djaya,
 3. Komdak Metro Djaya,
 4. B.P.H. Bidang Pemerintahan,
 5. Sekda DCI Djakarta,
 6. Direktorat I/Pemerintahan,
 7. Direktorat VII/Chusus Politik,
 8. Semua Walikota/P.P. Kota,
 9. Semua Tjamat/P.P.S.
 10. Semua Lurah/Koordinator K.P.P.S.
 11. A r s i p.
-

**PEDOMAN & PETUNJUK UNTUK PEMBUATAN T.P.S.
DIKANTOR-KANTOR/PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
DIWILAJAH D.C.I. DJAKARTA**

Nomor : 0400/III/1/1971.

- I. Sesuai dengan Pedoman Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia dalam Kawatnja tanggal 14 April 1971 No.56/22/1971, maka untuk kelantjaran tugas-tugas pekerdjaan karyawan pada kantor-kantor/perusahaan-perusahaan swasta masa Pelita ini, Gubernur Kepala Daerah selaku Ketua Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta telah menetapkan bahwa disetiap- kantor baik Pemerintah maupun Swasta dan di Perusahaan-perusahaan jang Berada diwilajah D.C.I. Djakarta diadakan TPS-TPS untuk keperluan pemungutan suara bagi para karyawan dalam Pemilihan Umum 1971.
- II. Tata-tertib penjelenggaraan pemungutan suara di TPS-TPS jang diadakan di Kantor-kantor Pemerintah/Swasta dan di Perusahaan-perusahaan sepenuhnya mengikuti ketentuan penjelenggaraan pemungutan suara dan tata susunan TPS sebagaimana diatur dalam Pedoman Mendagri/Ketua P.P.I. No. 2/PPI/1971 tanggal 12 Maret 1971.
Dengan demikian djaminan akan adanya penjelenggaraan pemungutan suara setjara umum, langsung, bebas dan rahasia tetap ditegakkan.
- III. Bagi Kantor-kantor/Perusahaan jang mempunyai karyawan memilih sedjumlah 100 (seratus) orang keatas harus mengadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) TPS. Selandjutnja pengadaan TPS di Kantor-kantor djumlahnja disesuaikan dengan ketentuan dari Lembaga Pemilihan Umum; jaitu untuk 200 – 300 pemilih 1 (satu) buah TPS. Bagi Kantor-kantor/Perusahaan jang mempunyai karyawan pemilih kurang dari 100 (seratus) orang dapat digabungkan dengan Kantor/Perusahaan lainnja jang terdekat.
- IV. T.P.S. dapat diadakan :
 - a. Dilapangan terbuka,
 - b. Didalam bangunan/ruangan.

Ketentuan tentang bentuk dan susunan TPS baik jang dilapangan terbuka maupun jang didalam bangunan/ruangan diatur dalam Pedoman Menteri Daalm Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia No.2/PPI/ 1971 tanggal 12 Maret 1971 seperti terlampir dalam Pedoman ini.

Bilik pemberian suara kerangkaanya dibuat dari bambu/kayu dan dindingnya dibuat dari kain (blatju, drill, jeans dsb.) yang tidak tembus mata. Kain-kain ini digunakan sedemikian rupa sehingga kelak setelah selesai pemungutan suara dapat digunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas, pembuatan TPS dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat asal syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pedoman Menteri Dalam Negeri itu dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Untuk alat penusuk dan alasnya Pedoman pembuatannya bersama ini dilampirkan pula.

- V. 1. Untuk tanda bukti diri sebagai pemilih, tiap-tiap karyawan harus memiliki : *Kutipan Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan (Model A4)*.
 2. Untuk ini setiap Instansi dapat memperoleh Blanko Model A4 tersebut dari Kantor-kantor PPS/Ketjamatan sedjumlah karyawan yang ada dilingkungan Instansinya (dengan ditambah marge 10%).
 3. Blanko ini hendaknja diisi oleh Instansi dengan *Nama, Umur, dan Alamat* seluruh pegawainya.
 4. Setelah diisi seperlunya Blanko tersebut dibagikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk selandjutnja dimintakan legalisasi dan pengisian selandjutnja dari Lurah yang bersangkutan (dapat djuga dilakukan setjara kolektif oleh Kantor/Djawatan/Perusahaan yang bersangkutan dengan menghubungi Walikota/P.P. Kota setempat untuk penyelesaian A4 tersebut).
 5. 3 (tiga) hari sampai 1 (satu) minggu sebelum hari pemungutan suara hendaknja diadakan penelitian kembali pada setiap karyawan apakah yang bersangkutan telah menjelesaikan surat A4 nya di Kelurahan yang bersangkutan.
- VI. Disamping itu untuk tiap-tiap TPS didalam Kantor hendaknja disusun pula daftar nama pegawai (menurut abjad) dalam satu Daftar Pemilih (Model A) yang blankonja dapat diperoleh pula dari Kantor-kantor PPS/Ketjamatan setempat.
- Daftar ini berfungsi sebagai „Absen” bagi pemilih-pemilih yang akan menggunakan hak pilihnja di TPS tersebut.
- Pembuatan Daftar Nama dalam Pemilih Model A ini disiapkan dalam rangkap 3 (tiga) jaitu :
- 1 (satu) exemplar untuk TPS yang bersangkutan (Kantor/Instansi yang bersangkutan)

- 1 (satu) exemplar untuk PPS/Ketjamatan dan
- 1 (satu) exemplar untuk Kelurahan.

VII. Tenaga-tenaga penjelenggara pemungutan suara (Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara/KPPS) hendaknja diambil dari dan diantara pegawai-pegawai dilingkungan Instansi jang bersangkutan. Mereka itu terdiri dari seorang Ketua dan 4 (empat) orang Anggota jang tugasnja menjelenggarakan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara. Untuk itu tenaga-tenaga tersebut akan memperoleh latihan seperlunja dari PPS/Ketjamatan setempat bersama-sama dengan unsur-unsur KPPS dari TPS-TPS lainnja dalam lingkungan Ketjamatan jang bersangkutan. Hendaknja nama-nama mereka segera Saudara tetapkan dan kirimkan ke PPS.

Disamping itu diperlukan 2 (dua) orang tenaga pengaman untuk tiap 1 (satu) TPS jang terdiri dari unsur Hansip/Wanra.

Apabila dari lingkungan kantor/Instansi jang bersangkutan terdapat Anggota Hansip/Wanra, maka untuk tenaga pengaman tersebut diambilkan dari Instansi itu sendiri. Dalam hal tidak terdapat unsur Hansip/Wanra tersebut, tenaga pengaman dapat dimintakan ke PPS jang bersangkutan.

VIII. Adapun perlengkapan tiap-tiap TPS terdiri dari :

1. Dua buah Kotak Suara jang tutupnja masing-masing berwarna putih (untuk pemilihan Keanggotaan DPRD) dan kuning (untuk pemilihan Keanggotaan DPR).
2. Dua bungkus Surat Suara jang masing-masing berisi 330 (tiga ratus tiga puluh) lembar Surat Suara jang berwarna kuning dan 330 (tiga ratus tiga puluh) lembar Surat Suara jang berwarna putih. Surat-surat Suara ini akan diperoleh dari PPS/Ketjamatan setempat.
3. Daftar Pemilih (Model A) jang berisi Daftar nama dari pegawai-pegawai dalam lingkungan Instansi tersebut jang akan menggunakan hak pilihnja di T.P.S. itu.
4. Bilik Pemberian Suara sebanjak 1 — 3 buah jang ketentuannja seperti tersebut dalam Pedoman Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia No.2/PPI/1971 tanggal 12 Maret 1971.
5. Alat pentjoblos dan alasnja sedjumlah sama dengan djumlah bilik suara jang disediakan.
6. Papan tempat menempel Daftar Tjalon Tetap Keanggotaan DPR dan DPRD jang akan dipilih.

7. Papan Tempat Penghitungan Suara.
 8. Medja dan kursi K.P.P.S. setjukupnja.
 9. Bangku-bangku/Kursi-kursi tempat menunggu pemilih dengan kapasitas untuk ± 25 (dua puluh lima) orang.
 10. Blanko Berita Atjara Penjelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
 11. Tali-tali pengikat Surat-surat Suara (jang telah selesai dihitung), kertas-kertas pembungkus surat suara, lak dan lem, label-label dan sebagainya.
 12. Tambang pembatas lingkungan tempat pemungutan suara.
 13. Teks Pidato Pembukaan Ketua K.P.P.S., teks Amanat Presiden Republik Indonesia untuk dibatjakan Ketua K.P.P.S. pada pembukaan Rapat Pemungutan Suara.
 14. Tanda-tanda pengenalan untuk Ketua K.P.P.S., Anggota KPPS dan Petugas-petugas Keamanan TPS berupa ban lengan masing-masing berwarna kuning berhuruf hitam dan berwarna merah berhuruf putih.
 15. Alat-alat tulis-menulis berupa kapur tulis, alat penghapus, kertas, pensil, atau ballpoint, map dan sebagainya.
- IX. Pada azasnja biaja pembuatan TPS di Kantor dibebankan pada Instansi jang bersangkutan.
- Sebagai gambaran biaja itu meliputi :
- a. Pembuatan dua buah Kotak Surat Suara lengkap dengan kuntjinja a Rp. 1.550,— Rp. 3.100,—
(Keputusan Mendagri/Ketua LPU No.106/th.1970)
 - b. Biaja pembuatan bilik pemberian suara dan perlengkapan penyelenggaraan lainnja Rp. 3.000,—
(Radiogram Mendagri/Ketua LPU No.75/15/1970 tanggal 24 April 1970).
 - c. Uang Sidang petugas KPPS 5 (lima) orang
a Rp. 40,— untuk 1 x sidang (1 bulan a 4 x sidang) Rp. 800,—
(Surat Edaran Mendagri/Ketua LPU No.1/14/1970 tanggal 19 Pebruari 1970).
-
- Djumlah biaja 1 (satu) TPS seluruhnja : Rp. 6.900,—

Perintjian lebih lanjut tentang masalah ini serta pengaturan penjelenggaraannya dapat dibitjarkan dengan Tjamat/Ketua PPS setempat.

- X. Apabila sesuatu Kantor/Djawatan/Perusahaan mengalami kesulitan karena sesuatu hal dalam pembuatan/pengaturan T.P.S. tersebut; dapat segera menghubungi kami i.c. Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta untuk penyelesaian selanjutnja,

Djakarta, 29 April 1971.

Pd. GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH D.C.I. DJAKARTA

ttd.

(ALI SADIKIN)

Letnan Djenderal KKo.

Noot :

Untuk pengawasan dalam penghitungan suara agar dari organisasi Parpol & Golkar dimintakan wakilnja masing-masing seorang dari unsur-unsur Nasionalis, Agama dan Golkar untuk setiap T.P.S. jang ada.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418 – DJAKARTA

Nomor : 0443/III/1/1971.

Djakarta, 12 Mei 1971.

Lampiran : —.—

Perihal : Pedoman dan Petunjuk
dalam penggunaan Model
A4 bagi Karyawan pemilih
di T.P.S. khusus/Kantor.

Kepada Jth.:

1. Para Walikota/Ketua P.P. Kota
2. Para Tjamat/Ketua P.P.S.
se D.C.I. Djakarta
di

DJAKARTA.—

Untuk melengkapi pendjelasan yang dimaksud dalam surat kami no. 0400/III/1/1971 tertanggal 29 April 1971 pada point V dan VI dapat ditegaskan lagi sebagai berikut:

I. Penggunaan Model A4.

1. Oleh Kantor/Instansi yang mengadakan T.P.S. khusus/kantor ditempatnja masing-masing, untuk para karyawan pemilih dimintakan formulir Model A4 (kutipan daftar pemilih) masing-masing dalam rangkap 3 (tiga) kepada P.P.S./P.P. Kota setempat dimana kantor itu berada.
2. Tiap karyawan pemilih mengisi formulir Model A4 dalam rangkap 3 (tiga) dan oleh kantor/instansinja setjara kolektip atau dimintakan masing-masing karyawannja untuk melegalisasikan formulir Model A4 tersebut kepada Tjamat/Ketua P.P.S. dan Lurah tempat ia tinggal.
3. Satu helai lembaran asli dipegang oleh karyawan/pemilih tersebut guna pemberian suara di T.P.S. khusus/kantor; lembaran ke 2 (dua) bert arsip pada kantor P.P.S./Ketjamatan dimana karyawan tersebut bertempat tinggal dan lembaran ke 3 (tiga) merupakan arsip bagi kantor Kelurahan yang mengeluarkan Model A4 tersebut.

4. Oleh Lurah dan P.P.S./Ketjamatan nama karyawan pemilih jang telah diberikan Model A4 tersebut dihapuskan dari Daftar Pemilih jang ada dan pada kolom keterangan dibubuhi tjatatan seperlunja.

II. Penggunaan Daftar Model A.

1. Oleh Instansi/Kantor jang bersangkutan disusun daftar nama karyawan pemilih menurut abjad sesuai dengan nama jang tertjantum pada formulir Model A4 (lembaran asli) dalam rangkap 3 (tiga).
2. Lembaran pertama digunakan untuk keperluan pemungutan suara pada T.P.S. khusus/kantor jang bersangkutan lembaran ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) diserahkan kepada P.P.S./Ketjamatan dan Kelurahan dimana instansi/kantor itu berada.
3. Oleh Kelurahan dan P.P.S./Ketjamatan daftar Model A dari T.P.S khusus/kantor tersebut disusun setjara khusus pula menurut masing-masing instansi/kantor.

Demikian agar Saudara maklum dan seperlunja.

PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

A.n. Sekretaris,
t.t.d.

(BURHANUDDIN Hs.)

TEMBUSAN:

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
2. B.P.H. Bidang Pemerintahan,
3. Sekda DCI Djakarta,
4. Direktorat I/Pemerintahan,
5. Direktorat VII/Chusus Politik,
6. Djapen D.C.I.,
7. Seluruh Djawatan-djawatan/Kantor-kantor/Dinas-dinas/
Perusahaan-perusahaan dalam D.C.I. Djakarta,
8. Arsip.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA
Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418
DJAKARTA**

Nomor : 0464/III/1/1971. Djakarta, 17 Mei 1971.
Lampiran : —.—
Perihal : Penjelesaian formulir A.4
 untuk karyawan pemilih
 pada TPS Chusus/Kantor.

Kepada Jth.

1. Para Walikota/Ketua P.P. Kota
 2. Para Tjamat/Ketua P.P.S.
 3. Para Lurah/Koordinator KPPS
- di

DJAKARTA.—

Sehubungan dengan ketentuan diadakannya T.P.S-T.P.S. Chusus/Kantor diwilayah D.C.I. Djakarta, guna mempertjepat penjelesaian pemberian formulir A.4 untuk para karyawan pemilih dari Instansi/Kantor/Perusahaan yang bersangkutan, maka bersama ini kami minta dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan prioritas terhadap penjelesaian masalah tersebut.

Hendaknja formulir A.4. yang disampaikan setjara kolektif oleh Instansi/Kantor/Perusahaan tersebut kepada Saudara meskipun yang disampaikan setjara perorangan dapat diselesaikan oleh Saudara sebaik-baiknya dan setjepat-tjepatnja dan meneruskan kepada Tjamat/Ketua P.P.S. atau Lurah masing-masing dimana karyawan tersebut bertempat tinggal.

Penanda tangan/legalisasi formulir A.4. tersebut dapat dilakukan oleh Tjamat/Ketua P.P.S. atau Wakil atau Sekretaris dan demikian pula ditingkat Kelurahan oleh Lurah atau Wakil Lurah masing-masing guna mempertjepatnja.

Demikianlah agar Saudara maklum.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
Sekretaris,
t.t.d.**

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

TEMBUSAN:

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
2. Sekda DCI Djakarta,
3. B.P.H. Bidang Pemerintahan,
4. Direktorat I/Pemerintahan,
5. Direktorat VII/Chusus Politik,
6. Arsip.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA
Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418
DJAKARTA**

Nomor : 0508/III/1/1971.

Djakarta, 31 Mei 1971.

Lampiran : —.—

Perihal : Pelaksanaan Hak Pilih dengan
menggunakan formulir A4.

Kepada Jth.

1. Para Walikota/Ketua PP. Kota,
2. Para Tjamat/Ketua P.P.S.
3. Para Lurah/Koordinator KPPS.
se-DCI Djakarta
di

DJAKARTA.—

Guna mendjamin hak pilih seseorang dalam pemungutan suara nantinja untuk mensukseskan Pemilu; bagi mereka jang karena sesuatu sebab (sakit, ditahan alat-alat Negara dan sebagainya), pada masa penjempaian surat-surat panggilan kerumah, dan mereka jang akan menggunakan hak pilihnja di Kantor, kiranja dapat ditempuh djalan sebagai berikut:

- Surat panggilan untuk seseorang jang kebetulan tidak berada ditempatnja pada waktu penjempaiannja oleh petugas dengan formulir A4 jang diserahkan kepada keluarga jang bersangkutan untuk meneruskannja kepada jang berkepentingan, agar bisa menggunakan hak pilihnja pada tempat jang baru (Rumah Sakit, pendjara, asrama dan sebagainya).
- Surat panggilan untuk mereka jang akan menggunakan hak pilihnja di Kantor-kantor, disampaikan melalui Kantor masing-masing.

Demikianlah agar Saudara maklum.

PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

Sekretaris,

t.t.d.

TEMBUSAN:

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
2. Sekda DCI Djakarta,
3. B.P.H. Bidang Pemerintahan,
4. Direktorat I/Pemerintahan,
5. Direktorat VII/Chusus Politik,
6. Arsip.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

**Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418
DJAKARTA**

Nomor : 0514/III/1/1971. Djakarta, 31 Mei 1971.
Lampiran : —.—
Perihal : Pendaftaran Pemilih
 jang belum terdaftar.

Kepada Jth.
Para Walikota/Ketua P.P. Kota,
Para Tjamat/Ketua P.P.S.
se DCI Djakarta,
di

DJAKARTA.—

Guna memberikan kesempatan kepada masjarakat jang belum didaftar pada masa pendaftaran pemilih, maka perlu dikeluarkan petundjuk-petundjuk sebagai berikut:

1. Bagi mereka jang belum pernah didaftar dalam masa pendaftaran pemilih dikarenakan sifat tugasnja (pelaut, pedagang keliling dan sebagainya) diberikan kesempatan untuk didaftar kembali dengan batas waktu selambat-lambatnja s/d tanggal 15 Djuni 1971.
2. Dalam pendaftaran ulangan ini perlu diperhatikan apakah seseorang itu benar-benar belum terdaftar disuatu daerah pemilihan, karena sebab-sebab jang bisa diterima.
Tidak terlibatnja jang bersangkutan dalam G.30.S/PKI.

Demikianlah, agar Saudara maklum.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**
Sekretaris,
t.t.d.

TEMBUSAN: (SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.).

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
2. Sekda DCI Djakarta,
3. B.P.H./Bidang Pemerintahan,
4. Direktorat I/Pemerintahan,
5. Direktorat VII/Chusus Politik,
6. Arsip.

V
PENTJALONAN
DAN
KAMPANJE

DAFTAR ISI

BAB V.	Halaman
1 Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.1026/III/1/1970 tanggal 28 Nopember 1970 tentang Surat-surat yang diperlukan tjalon sebagai lampiran pentjalonan	811
2. Keppres No.40/th.1970 tentang Tata Tjara Pentjalonan untuk Pemilihan Anggota DPR, DPRD I, DPRD II	813
3. Pedoman Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No.56/LPU/Tahun 1970, tanggal 3 Oktober 1970, tentang Tata-Tjara Pengadjuan tjalon-tjalon bagi Anggota-anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II serta kegiatan landjutannja	817
4. Keppres No.67/Th.1970, tanggal 27 Oktober 1970 tentang Pembebasan Pegawai Negeri Organik yang djadi Tjalon.	824
5. Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.1007/III/2/1970 tanggal 25 Nopember 1970 tentang Pemberian Surat Keterangan guna Keperluan Pentjalonan	828
6. Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.1030/III/1/1970 tanggal 10 Desember 1970 tentang Petundjuk tentang tjara Pentjalonan	829
7. Instruksi Kadapol Metro Djaya No. Pol.18/Sektor/Inst/Komdak Metro Djaya/1970 tanggal 12 Desember 1970 tentang Pemberian Prioritas surat keterangan guna keperluan Pentjalonan	839
8. Surat Kepala Dinas Kesehatan DCI Djakarta No.3253/UM/70 tanggal 22 Desember 1970 tentang Surat Keterangan Kesehatan Djiwa untuk para Tjalon Anggota DPRD DCI Djakarta	841
9. Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.1078/III/1/1970 tanggal 31 Desember 1970 tentang Surat Keterangan Kesehatan Djiwa dan tidak terlibat G.30.S./P.K.I. untuk Para Tjalon Anggota DPRD DCI Djakarta.	842
10. Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.0031/III/1/1971 tanggal 18 Djanuari 1971 tentang Formulir Pentjalonan	844
11. Surat Mendagri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No.200/U/1970 tanggal 17 Nopember 1970 tentang Persetujuan dari Pedjabat yang berwenang bagi pegawai negeri Sipil yang ditjalonkan untuk keanggotaan sesuatu Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakyat	846

	Halaman
12. Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.0047/III/1/1971 tanggal 21 Djanuari 1971 tentang Hasil Sementara Penelitian Daftar Tjalon	849
13. Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.0245/III/1/1971 tanggal 17 Maret 1971 tentang Pentjalonan	852
14. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.0225/III/2/1971 tanggal 14 Maret 1971 tentang Pengesahan Daftar Tjalon Sementara untuk Keanggotaan DPRD Tingkat I DCI Djakarta	853
15. Berita Atjara Hasil Penelitian Panitia Peneliti Daerah DCI Djakarta tanggal 15 April 1971 berikut Lampirannja	856
16. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Djakarta No. 0347/III/2/1971 tanggal 20 April 1971 tentang Pengesahan Daftar Tjalon Tetap, untuk Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat I Daerah Khusus Ibukota (L.D. No.36/1971)	888
17. Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.0378/III/2/71 tanggal 24 April 1971 tentang Daftar Tjalon Tetap Anggota DPRD DCI Djakarta	892
18. Sambutan Gubernur Kepala Daerah pada Pertemuan Antar Aparat Pemilihan Daerah, Badan Pengaman Pemilu dan PARPOL/GOLKAR tanggal 3 Maret 1971	894
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 1970 tanggal 27 Oktober 1970 tentang Penjelenggaraan Kampanje Pemilihan Umum	901
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No.39/LPU/Tahun 1971 tanggal 22 April 1971 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden R.I. No.68/Tahun 1970 tentang Penjelenggaraan Kampanje Pemilihan Umum	905
21. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah DCI Djakarta No. Da.3/1/38/1970 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 68/1970 Khususnja tentang larangan penggunaan Gedung-gedung Pemerintah dan Tempat Ibadah untuk melakukan Kampanje Pemilihan Umum	914
22. Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.1062/III/1/1970 tanggal 26 Desember 1970 tentang Inventarisasi tempat untuk berkampanje	917

	Halaman
23. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No. 0372/III/2/1971 tanggal 21 April 1971 tentang Tata Tertib, Djadwal waktu dan Tempat Kampanje bagi Partai Politik/Golongan Karya jang turut dalam Pemilihan Umum 1971 diwilajah DCI Djakarta	919
24. Djadwal dan Tempat Kampanje Pemilihan Umum 1971 bagi PARPOL/GOLKAR diwilajah DCI Djakarta	927
25. Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.0368/III/2/1971 tanggal 17 April 1971 tentang Kampanje Pemilihan Umum	947
26. Instruksi Kadapol Metro Djaya No. Pol.3/1/Inst/Dak-METRO DJAYA/1971 tanggal 1 Pebruari 1971 tentang Pedjabat jang diberi wewenang menandatangani dan tata-tjara memberi Surat Keterangan dalam rangka Kampanje Pemilihan Umum	949
27. Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No. 0285/III/1/1971, tanggal 29 Maret 1971 tentang Daftar Sementara Tempat-tempat Kampanje (berikut lampiran)	955
28. Pengumuman Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No. 0405/III/1/1971 tanggal 3 Mei 1971 tentang Pemasangan/Penempelan Tanda Gambar, Slogan, Brosur dan sebagainya	973
29. Surat Tugas Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No. 0394/III/2/1971 tanggal 27 April 1971 tentang Penindjauan dan Pengawasan Djalannja Kampanje Pemilu 1971 oleh PARPOL/GOLKAR dalam wilajah DCI Djakarta	975

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA
Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418
DJAKARTA**

Nomor : 1026/III/1/1970. Djakarta, 28 Nopember 1970.
Lampiran : —.—
Perihal : Surat-surat jang diperlukan
tjalon sebagai lampiran
pentjalonan.

Kepada Jth.
Jth. Sdr. Walikota/Ketua PP. Kota,
Sdr. Tjamat/Ketua P.P.S.
se-DCI Djakarta
di

DJAKARTA.—

Sesuai dengan keputusan Presiden No. 40 tahun 1970 tentang Tata tjara Pentjalonan untuk pemilihan anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II jo. Pedoman Mendagri/Ketua LPU No. 56/LPU/1970 tentang Tata tjara pengadjuan tjalon-tjalon bagi anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II serta kegiatan-kegiatan landjutannja; guna bahan pegangan Saudara dalam memberikan pelajanan terhadap tjalon-tjalon jang memerlukan surat-surat keterangan guna lampiran dalam surat pentjalonannja; bersama ini kami djelaskan sebagai berikut:

1. Surat keterangan jang dimaksud telah tertera dalam formulir-formulir Model D jaitu tentang terdaftarnja tjalon dalam daftar Pemilih dan Model E1 tentang keterangan kewarga negaraan, umur, agama/kepertjajaan dan ketjakapan berbahasa Indonesia dengan menulis serta membatja huruf latin.
2. Formulir ini masing-masing dibuat dalam rangkap 5 Model D oleh PPS dan Model E1 oleh Walikota jang bersangkutan dengan pengertian 4 halaman untuk tjalon jang bersangkutan dengan 1 halaman untuk arsip pada Kantor Saudara, untuk tiap djenis perwakilan.

3. Pemberian keterangan pada formulir-formulir dimaksud dilakukan oleh Saudara-saudara dengan kejakinan setelah melihat kepada bukti-bukti yang ada.
4. Diingatkan pula bahwa pentjalonan tidak dapat diadjukan untuk lebih dari satu daerah pemilihan, dengan kata lain ia hanya dapat ditjalonkan untuk satu DPRD I dan satu DPR, maka pemberian formulir tersebut sebanjak-banjaknja 3 x 5 halaman = 15 halaman.
5. Dalam penanda tanganan surat-surat tersebut, dapat dilakukan oleh Ketua, bila Ketua berhalangan oleh Wakil Ketua atau Sekretaris Panitia masing-masing tingkat Panitia (Tjamat, Walikota).
6. Bila terdapat hal-hal yang masih diragukan Saudara-saudara untuk pemberian pendjelasan, dapat selandjutnja dimintakan kepada PPD DCI Djakarta atau Humas L.P.U.

Demikian agar Saudara maklum.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,
t.t.d.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.).

TEMBUSAN :

- Jth. 1. Lembaga Pemilihan Umum,
 2. B.P.H./Pemerintahan,
 3. Sekda,
 4. Direktorat I/Pemerintahan,
 5. Arsip.

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1970**

**TENTANG
TATA-TJARA PENTJALONAN UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA-
ANGGOTA D.P.R., D.P.R.D. I DAN D.P.R.D. II.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan kelantjaran pelaksanaan pemilihan umum perlu mengatur lebih lanjut pentjalonan untuk pemilihan Anggota-anggota D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II sebagaimana diatur dalam bab V Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970;
- b. bahwa menurut ketentuan yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 15 tahun 1969, tiap Daerah Tingkat II sekurang-kurangnya mempunyai seorang wakil dalam D.P.R.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut a dan b diatas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Tata-Tjara Pentjalonan untuk pemilihan Anggota-anggota D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 tahun 1969;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1970.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA-TJARA PENTJALONAN UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA-ANGGOTA D.P.R., D.P.R.D. I DAN D.P.R.D. II.

Pasal 1

- (1) Dalam mengumumkan nama dan tanda gambar organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 Lembaga Pemilihan Umum menjusun urutan nomor penempatannya berdasarkan pengundian;
- (2) Urutan nomor seperti tersebut pada 1 diatas berlaku untuk pemilihan umum Anggota-anggota D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II dan semua daerah pemilihan.

Pasal 2

Tingkatan Organisasi yang mengajukan tjalon-tjalon sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 diatur sebagai berikut :

- a. untuk pemilihan Anggota D.P.R. adalah Pengurus Besar/ Pusat Organisasi.
- b. untuk pemilihan Anggota D.P.R.D. I adalah Pengurus organisasi di Daerah Tingkat I;
- c. untuk pemilihan Anggota D.P.R.D. II adalah Pengurus organisasi di Daerah Tingkat II.

Pasal 3

- (1). Untuk Pemilihan Anggota D.P.R. :
 - a. dengan tidak mengurangi ketentuan seperti yang dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970, nama tjalon diajukan oleh Pengurus Besar/Pusat Organisasi untuk tiap daerah pemilihan dengan menyebutkan untuk Daerah Tingkat II mana nama tjalon itu diajukan.

- b. nama tjalon itu perlu mendapat persetujuan lebih dahulu dari Pengurus organisasi di Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan surat persetujuan yang ditanda tangani oleh sekurang-kurangnya dua orang anggota Pengurus tersebut dan diketahui oleh Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (2) Untuk pemilihan Anggota D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II, nama tjalon diadjudkan untuk daerah pemilihan masing-masing dan menurut ketentuan yang dimaksud dalam pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970.

Pasal 4

Dalam penjurusan Daftar Tjalon Sementara/Daftar Tjalon Tetap yang dimaksud dalam pasal 51 dan pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 untuk pemilihan Anggota D.P.R. disebutkan juga untuk Daerah Tingkat II mana nama itu diadjudkan.

Pasal 5

- (1) Dalam mengadakan tjalon-tjalon untuk pemilihan Anggota-anggota D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II dipergunakan surat-surat formulir sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
- (2) Surat-surat formulir tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat diperoleh dari :
- a. Kantor Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dimana Kantor Panitia Pemilihan Indonesia berada atau langsung dari Kantor Panitia Pemilihan Indonesia untuk tjalon anggota D.P.R.
 - b. Kantor Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dimana Kantor Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I berada atau langsung dari Kantor Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, untuk tjalon anggota D.P.R.D. I.
 - c. Kantor Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II untuk tjalon anggota D.P.R.D. II.

Pasal 6

Pengaturan pentjalonan jang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini tidak mengurangi ketentuan tentang penelitian tjalon seperti dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1970.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 Mei 1970

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

**PEDOMAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

No. 56/LPU/TAHUN 1970

TENTANG

**TATA TJARA PENGADJUAN TJALON-TJALON
BAGI ANGGOTA-ANGGOTA DPR, DPRD I DAN DPRD II
SERTA KEGIATAN-KEGIATAN LANDJUTANNJA.**

Untuk ketertiban mengenai tata-tjara pengadjuan tjalon-tjalon bagi anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II, dipandang perlu memberikan PEDOMAN lebih landjut sebagai berikut:

I. TINGKAT ORGANISASI JANG MENGADJUKAN TJALON

1. Tjalon bagi anggota D.P.R.

- (1) Untuk pemilihan anggota D.P.R., surat pentjalonan dan lampiran-lampirannja diadjukan oleh masing-masing Pengurus Besar Parpol/Sekber Golkar (Pusat) kepada Panitia Pemilihan Indonesia.
- (2) Pada Lampiran Daftar Tjalon Model B2 ditulis nama-nama tjalon bagi tiap-tiap Daerah Pemilihan dengan menjebutkan untuk Daerah Tingkat II mana ia ditjalonkan.
- (3) Nama-nama tjalon sebagaimana dimaksud punt (2) diatas terlebih dahulu harus mendapat „persetudjuan” dari sekurang-kurangnja 2 (dua) orang Pengurus Parpol/Sekber Golkar Daerah Tingkat II berikut stempel Parpol/Sekber Golkar tersebut serta „diketahui” oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II jang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari satu Pengurus Parpol/Sekber Golkar di Daerah Tingkat II jang setingkat maka jang memberikan „persetudjuan” sebagaimana dimaksud punt (3) diatas adalah Pengurus Parpol/Sekber Golkar jang berdomisili di Ibukota Kabupaten jang bersangkutan dan/atau ditentukan oleh Organisasi jang lebih tinggi tingkatannja pengurus mana jang berhak memberikan „persetudjuan”.

2. Tjalon bagi anggota D.P.R.D. I.

Untuk pemilihan anggota D.P.R.D. I surat pentjalonan dan lampiran-lampirannja diadjukan oleh masing-masing Pengurus Parpol/Sekber Golkar di Daerah Tingkat I kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.

3. Tjalon bagi anggota D.P.R.D. II.

- (1). Untuk pemilihan anggota D.P.R.D. II surat pentjalonan dan lampiran-lampirannya diadjukan oleh masing-masing Pengurus Parpol/Sekber Golkar di Daerah Tingkat II kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.
- (2). Dalam hal terdapat lebih dari satu Pengurus Parpol/Sekber Golkar sebagaimana dimaksud angka Romawi I angka 1 punt (4) PEDOMAN ini, maka surat pentjalonan dan lampiran-lampirannya diadjukan oleh Pengurus Parpol/Sekber Golkar yang berdomisili di Ibukota Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan/atau ditentukan oleh Organisasi yang lebih tinggi tingkatannya, pengurus mana yang berhak mengajukan tjalon.

Djadwal waktu pengadjuan tjalon sebagaimana dimaksud angka 1, 2 dan 3 diatas ialah tanggal 15 Nopember 1970 sampai dengan 13 Djanuari 1971.

II. PENGAMBILAN FORMULIR-FORMULIR PENTJALONAN DAN LAMPIRAN-LAMPIRANNJA.

Formulir-formulir mengenai pantjalonan dan lampiran-lampirannya dapat diperoleh dari:

- (1). Kantor Panitia Pemilihan Indonesia, djalan Matraman Raya No. 40 Djakarta untuk tjalon anggota D.P.R.;
- (2). Kantor Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dimana Kantor Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I berada atau langsung dari Kantor Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I untuk tjalon anggota D.P.R.D. I;
- (3). Kantor Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II untuk tjalon anggota D.P.R.D. II.

Djadwal waktu pengambilan formulir-formulir diatas, ialah tanggal 31 Oktober 1970 sampai dengan 14 Nopember 1970.

III. TATA TJARA PENGADJUAN TJALON.

1. Tata-tjara pengadjuan tjalon untuk pemilihan anggota D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II ditetapkan sebagai berikut:
 - (1). Seorang tjalon diadjukan dengan tjara mengisi Surat Pentjalonan Model B dan Daftar Tjalon Model B1.
 - (2). Surat Pentjalonan Model B ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Pengurus Parpol/Sekber

Golkar dan Daftar Tjalon Model B1 ditanda-tangani oleh pengurus Parpol/Sekber Golkar yang bersangkutan.

(3). Surat Pentjalonan/Daftar Tjalon sebagaimana dimaksud punt (1) dan (2) diatas harus dilampiri dengan :

- a. Salinan dari salinan Surat Ketetapan Lembaga Pemilihan Umum tentang nama dan tanda gambar bagi Organisasi yang bersangkutan yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia.
- b. Surat Keterangan Kelahiran/Umur tjalon yang diadjukan yang dibuat/disahkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- c. Riwayat hidup dan riwayat perjuangn tjalon yang dibuat oleh tjalon dan dikuatkan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pengurus Parpol/Sekber Golkar Daerah Tingkat II/ Daerah Tingkat I/Pusat.
- d. Surat Keterangan tidak terlibat G.30.S./PKI yang dikeluarkan oleh Komandan Resort POLRI.
- e. Surat Pernyataan Kesetiaan tjalon terhadap Pantja Sila, Undang-undang Dasar 45 dan Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat oleh tjalon.
- f. Surat Keterangan tentang ketjakaan tjalon berbahasa Indonesia dan menulis membatja huruf latin yang dibuat/disahkan oleh Kepala Kantor/Dinas Inspeksi Pendidikan dan Kebudayaan.
- g. Surat Pernyataan dari tjalon tentang kesediaannya untuk ditjalonkan serta persetudjuannya mengenai tempat/nomor baginja dalam Daftar Tjalon (Lampiran Model C).
- h. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa tjalon tersebut telah terdaftar dalam Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan dan boleh memilih (Lampiran Model D).
- i. Surat Pernyataan tidak terlibat dalam pemberontakan dimaksud KEPPRES No. 449/1961 dan/atau pemberontakan-pemberontakan lainnya yang dibuat oleh tjalon.
- j. Surat Keterangan mengenai tidak sedang ditjabut hak pilihnya sebagaimana dimaksud pasal 16 huruf e Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 dan tidak sedang mendjalani pidana pendjara/kurungan karena melakukan tindak pidana yang antjaman pidana sekurang-kurangnya 5 tahun yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, Pengadilan, Kedjaksan atau Kepolisian yang bersangkutan.

- k. Surat Keterangan kesehatan jiwa yang menerangkan bahwa tjalon njata-njata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya yang dibuat oleh Dokter Pemerintah/Rumah Sakit Pemerintah.
2. Nama Tjalon ditulis dengan tjara seperti ditentukan untuk pengisian Daftar Pemilih.
3. Daftar Tjalon Model B1 diatas hanya boleh memuat nama-nama tjalon sebanyak dua kali djumlah anggota yang dipilih dari Daerah Pemilihan.
4. Antara Parpol-parpol dan Parpol dengan Sekber Golkar dapat diadakan penggabungan suara untuk diperhitungkan dalam pembagian kursi.
Keinginan penggabungan suara ini harus sudah dinjatakan oleh Organisasi yang mengajukan tjalon dalam Surat Pentjalonan Model B.
5. Surat pentjalonan dan lampiran-lampiranannya sebagaimana dimaksud angka Romawi III angka 1 punt (1), (2) dan (3) masing-masing dibuat bagi:
 - a. tjalon-tjalon anggota D.P.R. sebanyak 4 (empat) rangkap yang perintjiannya sebagai berikut:
3 eksemplar untuk Panitia Pemilihan Indonesia, dengan tjatatan 1 eksemplar untuk Panitia Pemilihan Indonesia, 1 eksemplar untuk KOPKAMTIB dan 1 eksemplar untuk Panitia Peneliti Pusat, 1 eksemplar untuk Organisasi yang mengajukan.
 - b. tjalon-tjalon anggota D.P.R.D. I sebanyak 4 (empat) rangkap yang perintjiannya sebagai berikut:
3 eksemplar untuk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, dengan tjatatan 1 eksemplar untuk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang bersangkutan, 1 eksemplar untuk LAKSUS KOPKAMTIB dan 1 eksemplar untuk Panitia Peneliti Daerah Tingkat I, 1 eksemplar untuk Organisasi yang mengajukan.
 - c. tjalon-tjalon anggota D.P.R.D. II sebanyak 4 (empat) rangkap yang perintjiannya sebagai berikut:
3 eksemplar untuk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, dengan tjatatan 1 eksemplar untuk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang bersangkutan, 1 eksemplar untuk LAKSUS KOPKAMTIB dan 1 eksemplar untuk Panitia Peneliti Daerah Tingkat II, 1 eksemplar untuk Organisasi yang mengajukan.

IV. PENELITIAN TJALON.

1. Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II memeriksa surat-surat pentjalonan, apakah pentjalonan tersebut sudah melampirkan syarat-syarat sebagaimana tertjantum dalam angka Romawi III angka 1 PEDOMAN ini.
2. Pentjalonan dan/atau tjalon yang belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud angka 1 diatas oleh Ketua Panitia Pemilihan yang bersangkutan dikembalikan kepada Organisasi yang mengajukan dengan disertai alasan pengembalian dan petunjuk untuk memperbaikinja.
3. Dalam waktu yang singkat perbaikan pentjalonan dan/atau tjalon sebagaimana dimaksud angka 2 diatas oleh Organisasi yang bersangkutan harus sudah dikirimkan kepada Panitia Pemilihan yang bersangkutan.
4. Panitia Peneliti Pusat/Daerah meneliti:
 - a. syarat-syarat pentjalonan sebagaimana dimaksud angka Romawi III angka 1 PEDOMAN ini;
 - b. syarat-syarat tjalon seperti ditentukan dalam pasal 16 Undang-undang No. 15 Tahun 1969 terutama huruf-huruf a, b, c, f, g, h dan i.
5. Hasil Penelitian Panitia Peneliti Pusat/Daerah disampaikan oleh Ketua Panitia Peneliti Pusat/Daerah kepada Panitia Pemilihan yang bersangkutan.
6. Apabila dalam melaksanakan tugasnya diantara anggota-anggota Panitia Peneliti Pusat/Daerah tidak diperoleh kata mufakat, maka persoalannya oleh Ketuanya disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan yang bersangkutan untuk mendapat keputusan.
7. Hasil penelitian Panitia Peneliti Pusat/Daerah sebagaimana dimaksud angka 5 diatas oleh Ketua Panitia Pemilihan yang bersangkutan disampaikan kepada KOPKAMTIB/LAKSUSKOPKAMTIB untuk mendapat penelitian sesuai dengan pasal 49 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970.
8. Setelah diadakan penelitian oleh KOPKAMTIB/LAKSUSKOPKAMTIB, hasilnya dikembalikan kepada Panitia Pemilihan yang bersangkutan.
9. Ketua Panitia Pemilihan yang bersangkutan:
 - a. berdasarkan hasil-hasil penelitian KOPKAMTIB/LAKSUSKOPKAMTIB mengeluarkan tjalon-tjalon yang tidak memenuhi syarat-syarat dari Daftar Tjalon.

- b. memberitahukan kepada organisasi yang mengajukan Daftar Tjalon atas tjalon-tjalonnja yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dan memberikan kesempatan untuk mengajukan nama tjalon yang lain dalam batas waktu dari tanggal 29 Djanuari 1971 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 1971.

V. PENJUSUNAN DAFTAR TJALON SEMENTARA DAN PENGUMUMANNJA.

1. Mulai tanggal 28 Pebruari 1971 sampai dengan tanggal 14 Maret 1971 Panitia-panitia Pemilihan menjusun Daftar Tjalon Sementara untuk pemilihan anggota DPR, DPRD I dan DPRD II didaerahnja masing-masing.
2. Daftar Tjalon Sementara disusun seperti dimaksud pasal 51 ayat (2) huruf a sampai dengan e Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970.
3. Daftar Tjalon Sementara bagi tjalon anggota DPR, DPRD I sebagaimana dimaksud angka 1 diatas oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I segera diumumkan dalam daerah pemilihannja dengan tjara:
 - a. dimuat dalam suatu harian yang diterbitkan ditempat kedudukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
 - b. djika harian dimaksud huruf a diatas tidak ada, dimuat dalam suatu harian lain yang oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dianggap terbanjak dibatja dalam daerah itu;
 - c. atau dengan tjara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I tersebut.
4. Daftar Tjalon Sementara bagi anggota DPRD II dengan tjara yang sama dengan angka 3 diatas oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II diumumkan di Daerah Tingkat II-nja masing-masing.

VI. ORGANISASI MENGADJUKAN KEBERATAN.

1. Setelah Daftar Tjalon Sementara diumumkan sebagaimana dimaksud angka Romawi V angka 3 PEDOMAN ini, maka dari tanggal 15 Maret 1971 sampai dengan 13 April 1971 Parpol/Sekber Golkar yang mengajukan tjalon diberi kesempatan untuk mengajukan keberatannja atas Daftar Tjalon Sementara tersebut.
2. Panitia-panitia Pemilihan yang bersangkutan atas keberatan yang diadjukan oleh Parpol/Sekber Golkar sebagaimana dimaksud angka 1 diatas memberikan keputusanja.

VII. PENJUSUNAN DAFTAR TJALON TETAP DAN PENGUMUMANNJA.

1. Setelah proses sebagaimana dimaksud angka Romawi VI angka 1 dan 2 telah dilaksanakan maka dari tanggal 14 April 1971 sampai dengan tanggal 28 April 1971 Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II telah menjusun Daftar Tjalon Tetap untuk pemilihan anggota DPR, DPRD I dan DPRD II didaerahnja masing-masing.
2. Daftar Tjalon Tetap sebagaimana dimaksud angka 1 diatas oleh Ketua Panitia Pemilihan Indonesia untuk pemilihan anggota DPR diumumkan dalam Berita Negara dan untuk Pemilihan Anggota DPRD I dan DPRD II oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II diumumkan dalam Lembaran daerah masing-masing.

VIII. PENGIRIMAN DAFTAR TJALON TETAP.

Panitia-panitia Pemilihan masing-masing mengirimkan Daftar Tjalon Tetap jang tertjetak kepada tiap-tiap Panitia Pemungutan Suara dalam daerahnja sebanjak jang diperlukan.

Djadwal waktu pengiriman Daftar Tjalon Tetap ke Panitia-panitia Pemungutan Suara dimulai tanggal 29 April 1971.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 3 Oktober 1970.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

t.t.d.

AMIRMACHMUD.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 1970

TENTANG

**TATA TJARA PEMBEBASAN UNTUK SEMENTARA DARI DJABATAN
ORGANIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAMA
PENTJALONAN UNTUK KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSJAWARATAN/PERWAKILAN RAKJAT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa perlu diatur tata tjara pembebasan sementara dari djabatan organik bagi Pegawai Negeri Sipil selama pentjalonan untuk keanggotaan Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 1969.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 18 tahun 1961 ;
3. Undang-undang Nomor 16 tahun 1969 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1952 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1970 ;
6. Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1970.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TATATJARA PEMBEBASAN UNTUK SEMENTARA DARI DJABATAN ORGANIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAMA PENTJALONAN UNTUK KEANGGOTAAN BADAN PERMUSJAWARATAN/PERWAKILAN RAKJAT.

Pasal 1.

- (1) Seorang Pegawai Negeri Sipil yang oleh organisasi golongan politik/karya ditjalankan untuk pemilihan Anggota Badan Permusjawaratan/Badan Perwakilan Rakjat sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 1969, dibebaskan untuk sementara dari jabatan organiknja, dengan ketentuan tidak dirugikan hak-haknja sebagai Pegawai Negeri, jaitu :**
 - a. tetap mempunyai status sebagai Pegawai Negeri ;**
 - b. tetap memperoleh hak-hak dan penghasilan yang sah sebagai Pegawai Negeri Sipil.**
- (2) Pembebasan untuk sementara dimaksud ayat (1) pasal ini dimulai sedjak pengumuman Daftar Tjalon Tetap sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 dan berakhir setelah Pemungutan Suara selesai.**
- (3) Setelah Pemungutan Suara selesai, Pegawai yang bersangkutan dikembalikan pada jabatan semula.**

Pasal 2.

Pembebasan untuk sementara dari jabatan organik tersebut dilakukan dengan Surat Keputusan oleh Pejabat yang berwenang, yakni bagi :

- a. Pegawai Negeri Sipil (Pusat) oleh Menteri yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunduknja.
- b. Pegawai Daerah oleh Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunduknja.
- c. Pegawai Badan/Lembaga-lembaga Negara Tertinggi dan Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen oleh Ketuanja masing-masing atau Pejabat yang ditunduknja.

Pasal 3.

- (1) Organisasi Golongan Politik/Karya yang mentjalankan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk pemilihan Anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat, wadajib memberitahukan setjara tertulis penetapan pentjalonan tersebut kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini.
- (2) Pemberitahuan tersebut disampaikan pada waktu Pegawai Negeri Sipil yang Bersangkutan diadjudkan mendjadi tjalon dan sudah menjatakan kesediaannja untuk ditjalonkan sebagaimana dalam pasal 19 ayat (1) huruf c sub (iii) Undang-undang Nomor 15 tahun 1960.

Pasal 4.

- (1) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang ditjalonkan terpilih mendjadi Anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 1969 berlaku baginja.
- (2) Pembebasan tugas untuk sementara waktu dari djabatan organik sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5.

**Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.**

Ditetapkan di Djakarta

**Pada tanggal 27 Oktober 1970
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

t.t.d.

S O E H A R T O

DJENDERAL T.N.I.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp.: 53418 – JAKARTA

Nomor : 1007/III/2/1970. Jakarta, 25 Nopember 1970.
Lampiran : —.—
Perihal : Pemberian Surat Keterangan
guna keperluan pentjalonan.

Kepada Jth.
Jth. 1. Para Walikota/Ketua PP.Kota,
2. Para Tjamat/Ketua P.P.S.
3. Para Lurah/Ketua P.P.P.
se-DCI Jakarta
di

DJAKARTA.—

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Pemilihan Umum, maka pengadjuan seorang tjalon disyaratkan harus dilengkapi dengan Surat-surat Keterangan tentang diri tjalon yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Mengingat batas waktu pengadjuan tjalon tersebut sangat terbatas, maka dengan ini di-instruksikan agar Saudara memberi pelajaran sebaik-baiknya serta menginstruksikan kepada echelon bawahan Saudara sampai dengan RT/RW agar mempertjepat pemberian Surat-surat Keterangan yang diperlukan tersebut.

Sebagai salah satu bantuan dari Pemerintah Daerah, maka terhadap para tjalon yang memerlukan pelajaran Kantor-kantor Pemerintah Daerah (Lurah, Tjamat, Walikota) dalam hubungan pentjalonan, dapat diketjualikan persjaraan biaja yang berlaku jaitu dengan membebaskan sama sekali dari pungutan-pungutan/biaja-biaja administrasi/pelajaran.

Demikian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
D.C.I. JAKARTA,

t.t.d.

(ALI SADIKIN)

Letnan Djenderal KKO.

TEMBUSAN:

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
2. Komdak VII/Djaya,
3. Kodam V/Djaya,
4. B.P.H./Bidang Pemerintahan,
5. Sekda DCI Jakarta,
6. Direktorat I/Pemerintahan,
7. Direktorat II/Kamtib.
8. Arsip.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA
Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418
DJAKARTA**

Nomor : 1030/III/1/1970. Djakarta, 10 Desember 1970.
Lampiran : —.—
Perihal : Petundjuk tentang
tjara pentjalonan.—

Kepada Jth.
Para Pengurus Organisasi
PARPOL/GOLKAR
di

DJAKARTA.—

Guna memudahkan para tjalon jang akan diadjudkan untuk turut dalam Pemilihan Umum dalam tahun 1971 jang akan datang, oleh masing-masing Organisasi PARPOL/GOLKAR untuk keanggotaan D.P.R. dan D.P.R.D. bersama ini dapat diikuti petundjuk-petundjuk jang kami uraikan sebagai berikut :

I. ORGANISASI.

Organisasi masing-masing mengadakan tjalon-tjalonnja dengan mengisi formulir jang disediakan (dengan diketik) dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan:

1. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta.
2. 1 (satu) rangkap untuk Team Peneliti Laksusda.
3. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Peneliti Daerah DCI Djakarta.
4. 1 (satu) rangkap untuk Arsip Organisasi, jang berupa :
Model B jaitu Surat Pentjalonan untuk djenis tingkatan Perwakilan.
 - a. Pada kolom **Daerah Perwakilan**: diisi dengan kata-kata DCI Djakarta.
 - b. Pada kolom **Nama**: Nama Organisasi sesuai dengan jang telah ditentukan L.P.U. (Nama dan tanda gambar; djika nama disingkat djuga disingkat).
 - c. Bila mengadakan penggabungan suara dengan organisasi lain supaja dinjatakan pada kolom jang tersedia.
 - d. Pada kolom **Nomor tanda gambar**: diisi dengan nomor jang telah ditentukan oleh L.P.U.
 - e. Surat pentjalonan ini supaja ditanda tangani sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang anggota Pengurus Organisasi jang bersangkutan dengan menjabutkan nama lengkap dan djabatan dalam kepengurusan organisasi tersebut.

- f. Pada tempat yang tersedia ditempelkan tanda gambar organisasi yang telah disahkan oleh L.P.U.

Model B1 yaitu Daftar Tjalon yang diadjudkan sesuai dengan urutan yang telah ditentukan oleh masing-masing organisasi.

- a. Bila pada formulir tersebut tidak dapat memuat nama-nama tjalon, dapat dilandjutkan kepada formulir lainnya dengan dibubuhi tanda sebagai kelanjutan dari daftar yang pertama.
- b. Pada kolom **Tingkatan Perwakilan**: dibubuhi kata-kata DCI Djakarta, kolom organisasi dibubuhi nama setjara lengkap/penuh.
- c. Pada kolom **Tanda gambar**: dibubuhi nomor tanda gambar yang disahkan oleh L.P.U.
- d. Pada kolom **nama**: diisi dengan nama organisasi seperti yang ditulis pada formulir B (jika nama disingkat juga disingkat).
- e. Pada kolom **Nama lengkap Tjalon**: diisi sesuai dengan nama Tjalon yang terdaftar pada Daftar Pemilih/Tambahan.
- f. Pada kolom tempat kediaman tjukup disebutkan Wilayah Kota saja seperti, DjakartaPusat, Djakarta Utara, Djakarta Barat, Djakarta Selatan atau Djakarta Timur.

II. PERORANGAN (TJALON)

Untuk persjaraan tjalon sekurang-kurangnya harus memiliki 9 (sembilan) matjam surat keterangan yang merupakan lampiran dalam pentjalonan oleh organisasi yang bersangkutan.

Formulir tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.a. Model C yaitu surat pernyataan kesediaan dan persetujuan tjalon guna ditjalonkan oleh organisasi.
- b. Pada kolom **Nomor**: diisi dengan nomor urutan sesuai dengan urutan tjalon pada daftar Model B1.
- c. Pada kolom **Nama lengkap**: diisi nama tjalon sesuai dengan urutan nama yang terdaftar dalam Daftar Pemilih/Tambahan.
- d. Pada kolom **Perwakilan**: diisi dengan D.C.I. Djakarta.
- e. Pada kolom **Organisasi**: diisi sesuai dengan nama organisasi yang disahkan oleh L.P.U.

Tjalon harus meyakinkan diri atas kesediaannya untuk ditjalonkan serta urutan tempat yang disediakan oleh organisasi masing-masing.

- 2.a. Formulir model D yaitu surat keterangan tentang terdaftar si tjalon dalam Daftar Pemilih/Tambahan yang dikeluarkan oleh PPS/Ketjamatan.
- b. Pada kolom **Nomor Sisi atas**: diisi dengan Nomor urut Tjalon sesuai dengan daftar Model B1.

- c. Pada kolom **Nomor**: diisi dengan Nomor Agenda PPS/Ketjamatan.
 - d. Pada kolom **Daerah Pemungutan Suara**: diisi nama PPS/Ketjamatan yang bersangkutan.
 - e. Pada kolom **Daerah Tingkat II**: diisi dengan Wilayah Kota (Pusat, Utara, Barat, Selatan dan Timur).
 - f. Pada kolom **Daerah Tingkat I**: diisi dengan DCI Djakarta.
(Untuk mempertjepat dan memudahkan sebaiknja formulir ini telah diisi oleh tjalon ketjuali kolom Nomor Agenda dan kolom tanda tangan PPS/Ketjamatan dikosongkan, formulir ini dibawa langsung oleh tjalon ke PPS/Ketjamatan yang bersangkutan).
3. Model E1, jaitu surat keterangan tentang Kewarganegaraan, kelahiran/ Umur, Agama/Kepertjajaan dan ketjakapan berbahasa Indonesia dan menulis serta membuatja huruf latin yang dikeluarkan oleh Walikota setempat.
Sebaiknja formulir ini telah diisi oleh tjalon dan langsung membawanja ke kantor Walikota setempat dengan disertai surat-surat yang dapat membuktikan terhadap kebenaran isi dari formulir Model E1 antara lain, berupa :
- Kartu Penduduk,
 - Legitimasi Bewijs,
 - Rijbewijs,
 - Idjazah terachir dan lain-lain.
4. Model E2 jaitu surat Pernyataan Setia kepada Pantjasila dan Undang-undang Dasar 45 yang diisi dan ditanda tangani sendiri oleh tjalon.
5. Model E3 jaitu Surat Keterangan tentang tidak ditjabut hak pilihnja dan tidak mendjalani pidana pendjara atau kurungan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, Kedjaksaan atau Kepolisian.
Formulir ini langsung dibawakan kesalah satu dari Kantor yang tersebut diatas disertai dengan surat-surat yang antara lain berupa:
Keterangan Kelakuan Baik dari Pamong Pradja yang bersangkutan (Lurah, Tjamat).
6. Model E4 jaitu Surat Pernyataan terlibat/tidak dalam Pemberontakan, yang diisi dan ditanda tangani sendiri oleh tjalon.
7. Model E5 jaitu Daftar Riwayat Hidup dan Riwayat Perdjuaan yang diisi oleh tjalon dengan penguatan sekurang-kurangnja 2 (dua) orang anggota Pengurus yang bersangkutan. Bila tidak tjukup halaman yang tersedia dapat dibuatkan pada lembaran kertas lain yang dilampirkan pada Model ini dengan diberi tanda seperlunja (gunakan kertas ukuran folio).

8. Surat Keterangan tentang tidak terlibat G.30.S./PKI yang dikeluarkan oleh Kepolisian sebagaimana prosedur yang telah ditentukan oleh instansi tersebut.
 9. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah. Sebaiknya oleh organisasi masing-masing diberikan surat keterangan untuk para tjalon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar tjalon yang diajukan oleh organisasi yang bersangkutan. Untuk memudahkannya dalam mengurus surat-surat yang diperlukan tadi, mengingat waktu yang sangat terbatas dalam masa pengaduan Pentjalonan hendaknya diuruskan mana yang lebih dulu memungkinkan.
- III. Untuk menghindari kelambatan dalam mengurus surat-surat pentjalonan tersebut dengan instansi Pemerintah hendaknya para tjalon dalam mengurus surat-surat tersebut membawa serta:
1. Kartu Tanda Penduduk atau Legitimasi Bewijs lainnya (Kartu Pegawai, Paspor dan sebagainya).
 2. Surat Keterangan dari Parpol/Golkar yang mentjalonkan bahwa yang bersangkutan benar ditjalonkan untuk DPR/DPRD.
 3. Kutipan Daftar Pemilih (Model D).
 4. Izin terakhir atau salinan yang disahkan (untuk pembuktian bahwa yang bersangkutan dapat membuat, menulis huruf latin dan seterusnya).

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Sekretaris,
t.t.d.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

TEMBUSAN :

- Jth. 1. Panitia Pemilihan Indonesia,
2. B.P.H./Bidang Pemerintahan,
3. Sekda DCI Jakarta,
4. Direktorat I/Pemerintahan,
5. Panitia Peneliti Daerah DCI Jakarta,
6. Para Walikota/P.P. Kota,
7. Para Tjamat/P.P.S.,
8. Arsip.

**SURAT PENTJALONAN
UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA D.P.R./D.P.R.D. I/D.P.R.D. II**

Pentjalonan ini dikemukakan untuk pemilihan Anggota DEWAN PERWAKILAN RAKJAT/DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH TINGKAT I/DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH TINGKAT II ¹⁾ ;

- a. Daerah Pemilihan : ²⁾ ;
 b. N a m a : ³⁾ ;
 c. Nomor Tanda Gambar : ⁴⁾ ;

jang gambarnya tertjantum pada sudut
kiri bawah surat pentjalonan ini.

Dalam hal ada keinginan penggabungan suara, sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 tahun 1970, maka pembagian jumlah wakil dalam penetapan hasil pemilihan seperti dimaksud pasal 93 dan pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 dilaksanakan sebagai berikut, jaitu pentjalonan ini digabungkan dengan pentjalonan untuk pemilihan Anggota D.P.R./D.P.R.D. I/D.P.R.D. II Daerah Pemilihan
²⁾, jang memakai :

1. Nama ³⁾, dan Tanda Gambar No. ⁴⁾,
2. Nama ³⁾, dan Tanda Gambar No. ⁴⁾,
3. Nama ³⁾, dan Tanda Gambar No. ⁴⁾,
4. Nama ³⁾, dan Tanda Gambar No. ⁴⁾,

dengan perdjandjian, bahwa wakil jang diperoleh karena gabungan ini diberikan :

- ke-1 kepada ³⁾, jang tersebut diatas,
 ke-2 kepada ³⁾, jang tersebut diatas,
 ke-3 kepada ³⁾, jang tersebut diatas,
 ke-4 kepada ³⁾, jang tersebut diatas,

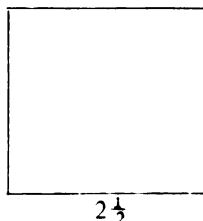
Pernyataan penggabungan ini disebutkan juga dalam Surat Pentjalonan organisasi-organisasi jang bersangkutan.

Surat Pentjalonan ini dilampiri Daftar Tjalon (Model B I) serta surat-surat/ formulir-formulir sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal 46 dan 48 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970.

..... 19

Tanda Gambar

Jang mengemukakan pentjalonan ini :



PENGURUS PUSAT)
DAERAH TK I) 1) ⁵⁾
DAERAH TK II)

2 ½ cm

Alamat lengkap :

Atas nama Pengurus tersebut,

..... 6) ⁶⁾

..... 7) ⁷⁾

..... 8) ⁸⁾

Keterangan tentang pengisian surat :

- 1) Ditjoret jang tidak diperlukan.
- 2) Untuk D.P.R.D. I/ D.P.R.D. II ditulis nama Daerah Tingkat I/II.
- 3) Ditulis „nama organisasi” jang ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum, seperti jang dimaksud dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970.
- 4) Ditulis „nomor” tanda gambar jang ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum seperti jang dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1970.
- 5) Ditulis nama lengkap organisasi Partai Politik/Golongan Karya dan dibubuhi tjap organisasi.
- 6) Ditulis dengan tinta atau pen ballpoint tanda tangan anggota Pengurus Organisasi.
- 7) Ditulis nama lengkap anggota Pengurus Organisasi jang tanda tangannya tertjantum diatas.
- 8) Ditulis djabatan dalam Pengurus tersebut pada keterangan⁵⁾ dari anggota Pengurus Organisasi jang namanja tertjantum diatas.

**DAFTAR TJALON
ORGANISASI GOLONGAN POLITIK/ORGANISASI
GOLONGAN KARYA**

Lampiran Surat Pentjalonan Model B untuk pemilihan Anggota DEWAN PERWAKILAN RAKJAT/DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH TINGKAT I/DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH TINGKAT II ¹⁾ ²⁾ jang dikemukakan oleh organisasi : ³⁾, dengan Tanda Gambar :

Nomor ⁴⁾, Nama ⁵⁾

NOMOR URUT	NAMA LENGKAP TJALON	TEMPAT KEDIAMAN (Nama Ibukota Daerah Tingkat II)	TANDA- TANGAN
1	2	3	4

(Bersambung ke Landjutan Daftar Tjalon)

..... 19

PUSAT) ¹⁾
PENGURUS DAERAH TK.I) ³⁾
DAERAH TK.II)

(Tjap Organisasi) KETUA,
(.....)

Pada Daftar Tjalon ini dilampirkan Daftar Nama-nama Tjalon untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat bagi tiap Daerah Tingkat II mana ia ditjalonkan sebagaimana dimaksud dictum KETIGA angka 1 huruf a dan b Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 1970, jang disetudjui oleh Pengurus Organisasi di Daerah Tingkat II dan diketahui oleh Kepala Daerah Tingkat II jang bersangkutan.

Keterangan tentang pengisian daftar-daftar :

- 1) Ditjoret jang tidak diperlukan.
- 2) Untuk D.P.R. ditulis nama daerah pemilihan, untuk D.P.R.D. I/II ditulis nama Daerah Tingkat I/II.
- 3) Ditulis nama lengkap organisasi Partai Politik/Golongan Karya.
- 4) Ditulis „nomor” tanda gambar seperti jang ditulis pada Model B.
- 5) Ditulis „nama” organisasi seperti jang ditulis pada Model B.
- 6) Pada ruang 1 ditulis nomor berurut nama tjalon sebagaimana dikehendaki oleh Organisasi jang mengemukakan tjalon.
Pada ruang 2 ditulis nama tjalon menurut tjara jang ditentukan untuk menulis nama pemilih dalam Daftar Pemilih.
Pada ruang 3 ditulis nama ibukota Daerah Tingkat II jang meliputi tempat kediaman Tjalon jang tertjantum dalam Daftar Pemilih.
Pada ruang 4 dibubuhkan tanda-tangan tjalon jang didahului dengan menuliskan nomor urut seperti pada ruang 1.
Apabila ruang jang tersedia pada daftar ini tidak tjukup untuk menuliskan nama-nama tjalon jang dikemukakan, maka dapat dilandjutkan pada lembaran lain dengan diatas disebutkan „LANDJUTAN”.

No. : ¹⁾

**SURAT PERNJATAAN
KESEDIAAN DAN PERSETUDJUAN TJALON**

Jang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap : ²⁾
menjatakan kesediaannya ditjalonkan untuk pemilihan Anggota : DEWAN
PERWAKILAN RAKJAT/DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
TINGKAT I/DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH TINGKAT II³⁾
dalam Daerah Pemilihan ⁴⁾
oleh : ⁵⁾
dan menjatakan persetudjuannya tentang tempat jang diberikan kepadanya
dalam tata urutan pada Daftar Tjalon Organisasi.

.....⁶⁾, ... 19 ⁷⁾

Jang menjatakan :

.....⁸⁾

(.....)⁹⁾

Keterangan tentang pengisian surat :

- 1) Diisi nomor urut tempat tjalon dalam Daftar Tjalon.
- 2) Ditulis sama seperti tjara menulis nama dalam Daftar Pemilih.
- 3) Ditjoret jang tidak diperlukan.
- 4) Untuk D.P.R.D. I ditulis nama Daerah Tingkat I dan untuk D.P.R.D. II ditulis nama Daerah Tingkat II jang bersangkutan.
- 5) Disebut nama Organisasi jang mengemukakan ia menjadi tjalon.
- 6) Nama Ibukota Daerah Tingkat II tempat kediaman tjalon.
- 7) Hari, bulan dan tahun.
- 8) Tanda tangan tjalon jang menjatakan.
- 9) Nama lengkap seperti ditulis pada keterangan²⁾ diatas.

No. : ¹⁾

SURAT KETERANGAN

No. : ²⁾

Tentang

**TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Daerah Pemungutan Suara :

Daerah Tingkat II :

Daerah Tingkat I :

Menerangkan, bahwa Pemilih bernama

.....

berumur tahun, terdaftar dalam Daftar Pemilih/Daftar

Pemilih Tambahan, desa no.

..... 19

Panitia Pemungutan Suara

Ketua,

(.....)

Tjap

Panitia Pemungutan Suara

Keterangan Pengisian Surat :

- 1) Diisi sesuai angka jang sama dengan angka nomor penempatannya dalam Daftar Tjalon Organisasi.
- 2) Diisi dengan nomor agenda surat keluar Panitia Pemungutan Suara.

**KOMANDO DAERAH KEPOLISIAN METROPOLITAN
DJAKARTA RAYA**

„SANGAT KILAT”

**INSTRUKSI KEPALA DAERAH KEPOLISIAN METROPOLITAN
DJAKARTA RAYA**

No. Pol.: 18/SEKR/INSTR/KOMDAK METRO DJAYA/70.

TENTANG

**PEMBERIAN PRIORITAS SURAT KETERANGAN GUNA
KEPERLUAN PENTJALONAN**

**KOMANDO DAERAH KEPOLISIAN METROPOLITAN
DJAKARTA RAYA;**

Menimbang :

Bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan UU. No. 15/tahun 1969, dan dengan makin mendesaknja djangka waktu masa pentjalonan (tanggal 15 Nopember 1970 s/d tanggal 13 Djanuari 1971), dianggap perlu memberikan prioritas pelajanan dalam pemberian surat keterangan guna keperluan para tjalon.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 15 tahun 1969.
2. Surat edaran Gubernur Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Djakarta kepada para Walikota tanggal 25 Nopember 1970, No. 1007/III/2/1970.
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Djakarta kepada Kadapol Metro Djaya tanggal 5 Desember 1970, No. 1021/III/2/1970.

Menginstruksikan :

Kepada : 1. Kasi Intel.
2. Dan Wil 76.
3. Dan Wil 71 s/d 75.

Untuk :

1. Tersebut 1 dan 2, agar memberikan prioritas pelayanan dan mempertcepat pemberian Surat Keterangan guna keperluan para tjalon.
2. Tersebut 3, agar Mempertcepat penjaluran ke Komdak Metro Djaya Cq. Kasi Intel, setiap permintaan Surat Keterangan yang diperlukan untuk pentjalonan.
3. Dalam hubungan dengan pentjalonan dapat diketjualikan persjaratan biaja yang berlaku, jaitu dengan membebaskan biaja-biaja administrasi/ pelayanan.

Instruksi ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan mulai berlaku sedjak saat/tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 12 Desember 1970.

**KEPALA DAERAH KEPOLISIAN
METROPOLITAN DJAKARTA RAYA**

t. t. d.

Drs. WIDODO BUDIDARMO

Brigadir Djenderal Polisi

**KEPADA :
DISTRIBUSI „A”**

DINAS KESEHATAN DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
Djalan Kesehatan No. 10 Tilp. 49431/49432 – DJAKARTA

Nomor : 3253/UM/70. Djakarta, 22 Desember 1970.
Lampiran : —.—
Perihal : Surat keterangan kesehatan
djiwa untuk para tjalon Anggota
DPRD DCI Djakarta.

Kepada Jth.
Sdr. Kepala Biro Penjelenggara
Panitia Pemilihan Daerah
D.C.I. Djakarta
Djalan Imam Bondjol 13
di

DJAKARTA. —

Menarik surat Saudara tanggal 17 Desember 1970 No. 1053/III/1/1970 mengenai hal tersebut pada pokok surat ini, bersama ini diberitahukan bahwa para tjalon Anggota DPRD DCI Djakarta dimaksud dapat diperiksa kesehatan djiwanja di Bagian Penyakit Djiwa, Pusat Kesehatan Gambir, d/a: Djalan K. Tjaringin No. 7 Djakarta.

Diminta perhatian Saudara supaya pengiriman tjalon Anggota DPRD DCI Djakarta ketempat pemeriksaan tersebut dapat diatur sedemikian rupa, sehingga pemeriksaan dapat berdjalan dengan tertib dan lantjar.

Demikianlah agar dimaklumi.

A.N. KEPALA DINAS KESEHATAN
DCI DJAKARTA,
t.t.d.

(dr. Oh Lay Hien M.P.H.)

Wakil Kepala

TEMBUSAN: disampaikan kepada Jth.

1. Sdr. Kepala Bagian Penyakit Djiwa
Pusat Kesehatan Ketjamatan Gambir.
2. Kepala Pusat Kesehatan Ketjamatan Gambir.
3. Kepala Suku Dinas Kesehatan Djakarta Pusat.

Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp.: 53418 – DJAKARTA

Kepada Jth.

D.C.I. DJAKARTA.

a. Surat Keterangan Kesehatan jiwa/ingatan.

b. Surat Keterangan tentang tidak terlibat G.30.S/P.K.I.

Digitized by Google

menentukan dan menjediakan fasilitas dan prioritas untuk memenuhi persjaratan ini.

Bila terdapat seorang tjalon dari anggota Saudara jang telah terlandjur memiliki Surat Keterangan tersebut dari instansi Kepolisian bawahan (Komwil, Komsekko) dari KADAPOL METRO DJAYA serta tjalon jang berstatus pegawai Negeri jang telah memperoleh surat keterangan tidak terlibat G.30.S/PKI dari Team Secreening instansi/kantornja; surat-surat tersebut dapat diadjukan oleh jang bersangkutan untuk dimintakan legalisasi (Countersign) dari KADAPOL METRO DJAYA.

Demikianlah agar Saudara maklum.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,

t.t.d.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.).

Tembusan :

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
2. Laksus Kopkamtibda Djaya,
3. KADAPOL Metro Djaya,
4. Sekda DCI Djakarta,
5. BPH/Bidang Pemerintahan,
6. Direktorat I, II, III, DCI Djakarta,
7. Dinas Kesehatan DCI Djakarta,
8. Arsip.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418 – DJAKARTA

Nomor : 0031/III/1/1971.

Djakarta, 18 Djanuari 1971.

Lampiran : —.—

Perihal : Formulir Pentjalonan.

Kepada Jth.

Para Pimpinan Wilajah

1. Partai Politik Katolik,
 2. „ P.S.I.I.,
 3. „ N.U.,
 4. „ Muslimin Indonesia,
 5. Sek. Ber. Golongan Karya,
 6. Partai Politik Parkindo,
 7. „ Murba,
 8. „ P.N.I.,
 9. „ PERTI,
 10. „ IP-KI,
- di

DJAKARTA.—

Sehubungan dengan djadwal masa pentjalonan guna penjelesaian formulir-formulir sebagai lampiran dari pentjalonan, didalam surat Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua L.P.U. No. 6/11/1971 tanggal 2 Djanuari 1971 dapat diserahkan/disusulkan kepada P.P.D. D.C.I. Djakarta selambat-lambatnja pada tanggal 13 Pebruari 1971, dengan ini kami harapkan perhatian Saudara-saudara sebagai berikut:

1. Pada prinsipnja penjerahan formulir-formulir pentjalonan beserta lampirannja dapat diselesaikan setjepat mungkin;
2. Penundaan waktu dimaksudkan diatas, terutama ditudjukan bagi tjalon-tjalon dan proses pentjalonan yang berada didaerah-daerah diluar Djakarta mengingat faktor-faktor komunikasi dan kondisi yang sukar sehingga memerlukan waktu yang tjukup;

3. Untuk D.C.I. Djakarta, kiranya penjelesaian ini dapat dilakukan dengan segera tanpa kesukaran, karena keadaan kondisi daerah tjukup memungkinkan dalam waktu jang tidak terlalu lama;
4. Bila dalam penjelesaian sesuatu keterangan jang diperlukan sebagai lampiran dari pentjalonan ini memerlukan bantuan dari Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta, Panitia akan dengan senang hati melakukannya pada batas-batas jang memungkinkan.

Oleh karenanja perhatian serta pengertian Saudara-saudara guna kelantjaran penjelesaian dalam pentjalonan ini sangat diharapkan.

Kami akan sangat gembira apabila kelengkapan formulir-formulir pentjalonan dapat Saudara adjukan setcepat mungkin.

Atas perhatian Saudara, kami utjapkan banjak terima kasih.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,
t.t.d.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

TEMBUSAN :

- Jth. 1. Panitia Pemilihan Indonesia,
2. Panitia Peneliti Daerah D.C.I. Djakarta,
3. B.P.H./Bidang Pemerintahan,
4. Sekda D.C.I. Djakarta,
5. Direktorat I/Pemerintahan D.C.I. Djakarta,
6. Direktorat II/Kamtib D.C.I. Djakarta,
7. Arsip.

Lambang Negara
Telp. 82213 – 82216 – 82731

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
Djalan Matraman Raya Nomor 40
D J A K A R T A

Djakarta, 17 Nopember 1970.

No. 200/11/1970

KEPADA

LAMPIRAN 1.-

JTH. Saudara :

PERIHAL Persetudjuan dari pedjabat
jang berwenang bagi pegawai
Negeri sipil jang ditjalonkan
untuk keanggotaan sesuatu Badan
Permusjawatan/Perwakilan Rakjat.

1. Semua Menteri Kabinet Pembangunan.
2. Semua Ketua Badan/Lembaga-lembaga Negara Tertinggi dan Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen.

Berhubung dengan sudah tiba saatnja masa pentjalonan untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakjat, kami mohon perhatian saudara atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi pegawai negeri sipil jang akan ditjalonkan, peraturan perundangan pemilihan umum antara lain menetapkan :

a. **Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970 :**

„Untuk mendjadi anggota MPR, DPR dan DPRD, pegawai negeri sipil harus mendapat persetudjuan dari dan dibebaskan untuk sementara waktu dari djabatan organiknja oleh Menteri atau pedjabat jang berwenang”.

b. **Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 16 tahun 1969 :**

„Seorang pegawai negeri sipil jang ditjalonkan untuk keanggotaan sesuatu Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat, dibebaskan untuk sementara dari djabatan organik selama masa pentjalonan; setelah ia terpilih baginja berlaku ketentuan tersebut dalam ayat (1) a”, jaitu : „Seorang pegawai negeri sipil jang mendjadi anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat, dibebaskan untuk sementara waktu dari djabatan organiknja selama mendjadi anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat itu tanpa menghilangkanan statusnja

sebagai pegawai negeri sipil”.

2. Dari ketentuan-ketentuan tersebut kiranya dapat disimpulkan bahwa dalam masa pentjalonan ada dua tahap tindakan dari pedjabat yang berwenang terhadap pegawai negeri sipil dalam lingkungannya yang ditjalonkan untuk keanggotaan sesuatu Badan Permusjawaratan Rakjat jaitu persetudjuan dan pembebasan untuk sementara dari djabatan organik selama masa pentjalonan.
3. Khusus mengenai masa pentjalonan, peraturan perundangan pemilihan umum menetapkan djadwal waktu sebagai berikut :
 - a. pasal 46 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 jo djadwal waktu operasional penjelenggaraan pemilihan umum 1971 yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum menentukan bahwa penjampaian surat pentjalonan oleh organisasi yang akan ikut serta dalam pemilihan umum kepada Panitia Pemilihan yang bersangkutan dilakukan dari tanggal 15 Nopember 1970 sampai dengan tanggal 13 Djanuari 1971; dalam djangka waktu inilah dibutuhkan persetudjuan dari pedjabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil yang ditjalonkan ;
 - b. pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden No. 67 tahun 1970 menetapkan bahwa pembebasan untuk sementara dimulai sedjak pengumuman daftar tjalon tetap berachir setelah pemungutan suara selesai “(29 April 1971 sampai dengan 5 Djuli 1971).
4. Meskipun Keputusan Presiden No. 67 tahun 1970 tentang Tata-tjara pembebasan untuk sementara dari djabatan organik bagi pegawai negeri sipil selama pentjalonan untuk keanggotaan Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat, tidak mengatur tatatjara pemberian persetudjuan oleh pedjabat yang berwenang, namun pasal 2 Keputusan Presiden tersebut dihubungkan dengan pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970 merupakan dasar bagi penentuan pedjabat yang berwenang memberikan persetudjuan tersebut, jaitu bagi :
 - a. pegawai negeri sipil (Pusat) oleh Menteri yang bersangkutan atau Pedjabat yang ditundjuknja;
 - b. pegawai daerah oleh Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah atau Pedjabat yang ditundjuk;
 - c. pegawai Badan/Lembaga-lembaga Negara Tertinggi dan Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen oleh Ketuanja masing-masing atau Pedjabat yang ditundjuknja.

5. Mengingat persetujuan tersebut merupakan syarat yang mutlak harus dipenuhi oleh seorang pegawai negeri sipil yang ditjalankan yang harus dilampirkan pada surat pentjalonan, kami sangat mengharapkan bantuan saudara untuk :
- a. segera menundjuk pedjabat-pedjabat di Pusat maupun Daerah yang diberi wewenang untuk mengeluarkan surat keterangan/keputusan tentang persetujuan/pembebasan sementara dari jabatan organiknya;
 - b. memberikan prioritas utama bagi penyelesaian permohonan persetujuan bagi pegawai negeri sipil dilingkungan saudara yang ditjalankan oleh sesuatu organisasi untuk keanggotaan Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat, sehingga dijadwal waktu tersebut dalam alinea ke 3 sub a surat ini dapat dipenuhi.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas bantuan saudara kami mengutjapkan banjak berima kasih.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

tjap & ttd.

AMIRMACHMUD

Tembusan dikirimkan kepada :

1. Semua Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia,
2. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah seluruh Indonesia,
1 dan 2 berhubungan dengan pentjalonan pegawai daerah untuk keanggotaan Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH KHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp.: 53418 – DJAKARTA

Nomor : 0047/III/1/1971.

Djakarta, 21 Djanuari 1971.

Lampiran : —.—

Perihal : Hasil sementara
Penelitian Daftar Tjalon.

Kepada Jth.

Para Pimpinan Wilayah

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Partai Politik | Katolik. |
| 2. „ | P.S.I.I. |
| 3. „ | N.U. |
| 4. „ | Muslimin Indonesia. |
| 5. Sek. Ber. | Golkar. |
| 6. Partai Politik | Parkindo. |
| 7. „ | Murba. |
| 8. „ | P.N.I. |
| 9. „ | Perti |
| 10. „ | IP-KI. |
- di

DJAKARTA. —

Berdasarkan laporan sementara dari hasil penelitian atas formulir-formulir Pentjalonan jang telah dilakukan oleh Panitia Peneliti Daerah D.C.I. Djakarta diperoleh kesan umum tentang kekurangan-kekurangan dan atau ketidak lengkapan jang setjara umum ditemui dalam berkas pentjalonan dari Papol/Golkar tersebut.

Berkenaan dengan itu, bersama ini kami minta dengan hormat perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum berkas formulir Pentjalonan untuk masing-masing tjalon diadjudkan kepada P.P.D. D.C.I. Djakarta, hendaknja terlebih dahulu diteliti kelengkapan dan kebenarannja (Validity) oleh pimpinan Papol/Golkar dan atau aparatatur Pemilu Partai-partai tersebut (Bapilu Papu, Lapunu, Kapu dan sebagainya).
2. Khusus mengenai surat keterangan tidak terlibat G.30.S/PKI jang dikeluarkan oleh Kepolisian, maka sesuai dengan instruksi Kadapol Metro Djaya No. Pol. 18/Sekr/Instr/Komdak Metro Djaya/70 tanggal 12 Desember 1970

maka instansi yang mengeluarkan surat tersebut adalah Komdak Metro Djaja cq. Kasi Intel (untuk wilayah DCI Djakarta) dan Komwil 76 untuk wilayah Tangerang. Bagi tjalon-tjalon yang sudah memperoleh surat keterangan tidak terlibat G.30.S/PKI dari Instansi Kepolisian tingkat yang lebih rendah (Komwil, Komseko) perlu dimintakan legalisasi dari Komdak VII Djaja dengan **melampirkan riwayat hidup (formulir E 5) sebanyak 6 lembar dan pas-foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 lembar** (yaitu 4 lembar untuk ditempelkan pada copy yang disampaikan kepada PPD DCI, 1 copy untuk Kepolisian dan 1 copy untuk arsip).

Untuk ini kiranya akan lebih tjepat pengurusannya apabila dilakukan setjara berkelompok (kolektif) untuk tjalon-tjalon dari suatu Parpol/Golkar.

3. Surat keterangan Dokter tentang kesehatan djiwa tjalon, sesuai dengan Kawat Menteri Kesehatan No. 848/P. Kes/c/70 dan 28/11/71 tanggal 28 Nopember 1970 dan 15 Djanuari 1971 dapat diberikan **oleh Dokter Umum Pemerintah.**

Bagi tjalon yang telah memperoleh surat keterangan tentang kesehatan djiwa tersebut dari Dokter Umum (bukan Pemerintah) dapat memintakan Legalisasi surat Keterangan itu dari Dokter pemerintah atau dari D.K.K. DCI Djakarta cq. Bagian Penyakit Djiwa Pusat Kota, Gambir Djl. K. Tjaringan No. 7 Djakarta. surat keterangan tersebut harus setjara explicit menyebutkan tentang hasil peneliti kesehatan djiwa tjalon untuk keperluan Pentjalonan Anggota D.P.R./D.P.R.D.

4. Pada hampir semua berkas pentjalonan untuk tjalon-tjalon yang asal dari pegawai Negeri Sipil, diutamakan bahwa persjaraan izin dari instansi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dengan pasal 39 U.U. No. 16 tahun 1969 dan pasal 21 P.P. No. 2 tahun 1970. Untuk ini kepada semua Menteri dan Ketua Badan Lembaga tertinggi dan Lembaga Pemerintah non Departemen telah dikirimkan surat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 200/11/70 tanggal 17 Nopember 1970. Kepada Parpol/Golkar diminta agar segera menjampaikan surat pemberitahuan setjara resmi tentang pentjalonan seseorang pegawai negeri kepada Kepala dari instansi dimana tjalon bekerdja.

Djawaban/persetudjuan atas pemberitahuan pentjalonan tersebut dapat dianggap sebagai idjin dari instansi itu untuk pentjalonan pegawainya.

5. Bagi Parpol/Golkar yang sampai saat ini baru menjampaikan daftar pentjalonan B dan B1, disamping perlu memperhatikan hal-hal tersebut diatas, hendaknya dalam melengkapi sjarat-sjara pentjalonan nanti djuga bisa dilengkapi penanda tangan formulir pentjalonan tersebut oleh tjalon-tjalon yang bersangkutan. Demikian kiranya dengan petunjuk-petunjuk tersebut diatas, yang disimpulkan dari hasil penelitian formulir

pentjalonan-pentjalonan jang sudah masuk, dapat digunakan sebagai pedoman untuk melengkapi persjaratan-persjaratan administratif pentjalonan jang diperlukan sesuai dengan ketentuan jang ada.

Atas perhatian Saudara kami mengutjapkan terima kasih.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA
PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA.**

u.b.

Sekretaris,

t.t.d.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.).

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp.: 53418 – DJAKARTA

Nomor : 0245/III/1/1971.
Lampiran : —.
Perihal : Pentjalonan.

Djakarta, 17 Maret 1971.

Kepada Jth.
Pimpinan Wilayah Parpol / Golkar
.....
di

DJAKARTA.—

Sehubungan dengan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 131/11/1971, tanggal 6 Maret 1971; bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa kesempatan untuk melengkapi formulir pentjalonan dari tjalon sementara masih diberikan waktu sampai dengan tanggal 31 Maret 1971.

Tjalon-tjalon sementara yang telah memasukkan kelengkapan formulir pentjalonannya tetapi masih ada yang belum sempurna, seperti salinan tanpa pengesahan, fotocopy, formulir yang dikeluarkan/ditandatangani oleh pejabat yang tidak ditentukan dalam pedoman LPU, dimasukkan dalam daftar tjalon sementara dan kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan menjempurnakannya sampai dengan tanggal 31 Maret 1971 dengan tjatatan bahwa apabila yang bersangkutan pada tanggal tersebut tidak juga menjempurnakan formulir itu, ditjoret dan tidak dimasukkan dalam daftar tjalon tetap.

Demikian agar Saudara maklum.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

A.n. Sekretaris,
Kepala Biro Penjelenggara
t.t.d.

(BURHANUDDIN Hs)

TEMBUSAN:

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
2. Sekda,
3. BPH/Bidang Pemerintahan,
4. Direktorat I/Pemerintahan,
5. Direktorat VII,
6. Djapen DCI,
7. Arsip.

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH/
KETUA PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Nomor: 0225/III/2/1971

tentang

**PENGESAHAN DAFTAR TJALON SEMENTARA, UNTUK
KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
DAERAH TINGKAT I D.C.I. DJAKARTA.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA PEMILIHAN
DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA:**

Menimbang :

Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 51 ayat (1), (2), (3), (4) dan pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970, perlu segera mengesahkan Daftar Tjalon Sementara untuk pemilihan ke Anggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat I D.C.I. Djakarta;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 10 tahun 1964 tentang Penegasan Djakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
3. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1961 jo. Undang-undang No. 5 tahun 1969;
4. Undang-undang No. 15 tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970;
5. Undang-undang No. 16 tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1970 jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1970;

Mendengar :

1. Hasil penelitian Panitia Peneliti Daerah D.C.I. Djakarta.
2. Hasil penelitian Team Peneliti Laksus Kopkamtibda Djaya.
3. Hasil rapat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta tanggal 12 Maret 1971.

Memutuskan :

Menetapkan :

1. Mengesahkan nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini

- sebagai Tjalon Sementara untuk pemilihan ke Anggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat I D.C.I. Djakarta.
- II. Kepada setiap orang dalam Daerah D.C.I. Djakarta, dapat mengemukakan keberatannja atas Daftar Tjalon Sementara itu kepada Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta dalam djangka waktu 30 (tigapuluh) hari, terhitung mulai tanggal dikeluarkannja surat keputusan ini.
 - III. Segala sesuatunja akan diperbaiki/disempurnakan sebagaimana mestinja, apabila ternjata dikemudian hari terdapat kekurangan/kekeliruan tentang isi surat keputusan ini.
 - IV. Mengumumkan Daftar Tjalon Sementara sebagaimana dimaksud dalam ad.I diatas dimasing-masing Kantor Sekretariat P.P.D., P.P. Kota, P.P.S. dan ditempat-tempat lain dalam wilajah D.C.I. Djakarta, sesuai dengan pasal 51 P.P. No. 1 tahun 1970.
 - V. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta,
pada tanggal : 14 Maret 1971.

GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
t.t.d.

TEMBUSAN Surat Keputusan
ini disampaikan kepada :

(ALI SADIKIN)

Letnan Djenderal KKo.

- Jth. 1. Menteri Dalam Negeri/Ketua L.P.U.
2. Para Wakil Kepala Daerah DCI Djakarta,
3. Para Wakil Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta,
4. Ketua Muspida DCI Djakarta,
5. Para Anggota Muspida DCI Djakarta,
6. Para Anggota PPD. DCI Djakarta,
7. Para Anggota BPH. DCI Djakarta,
8. Sekda/Ass. Sekda DCI Djakarta,
9. Ketua Harian BP-BPP. DCI Djakarta,
10. Para Kepala Direktorat/Biro/Inspektorat DCI Djakarta,
11. Para Walikota,
12. Para Kepala Dinas/Kantor/Djawatan DCI Djakarta,
13. Jang bersangkutan,
14. Organisasi Parpol/Golkar DCI Djakarta,
15. Para Tjamat,
16. Para Lurah,
17. Arsip.

Figure 1

[illegible]

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418 – DJAKARTA

**BERITA ATJARA
HASIL PENELITIAN PANITIA PENELITI DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Pada hari ini, Kamis tanggal 15 April 1971, kami Panitia Peneliti Daerah Daerah Chusus Ibukota Djakarta, jang terdiri dari:

1. SANTOSA WIWOHO S.H.
Anggota merangkap Ketua
2. SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.
Anggota merangkap Sekretaris.
3. Major Inf. K. SIMBOLON
Anggota
4. A.K.P. SOETRISNO
Anggota
5. DJUMADJITIN S.H.
Anggota
6. Drs. F. H. HUTASOIT
Anggota

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 31 Oktober 1970 No. 74/LPU/Tahun 1970, telah melakukan penelitian terhadap Tjalon-tjalon Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat I Daerah Chusus Ibukota Djakarta jang diadjukan oleh Partai Politik dan Golongan Karya jang turut Pemilihan Umum 1971 di Daerah Pemilihan Daerah Chusus Ibukota Djakarta, dengan hasil sebagai berikut:

I. DARI PARTAI KATOLIK

Djumlah Tjalon 24 (duapuluh empat) orang. Kesemuanja Tjalon (24 orang Tjalon) telah memenuhi persjaratan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang dan/atau Peraturan jang berlaku.

II. DARI PARTAI SJARIKAT ISLAM INDONESIA

Djumlah Tjalon 27 (duapuluh tudjuh) orang. Kesemuanja Tjalon (27 orang Tjalon) telah memenuhi persjaratan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang dan/atau Peraturan jang berlaku.

III. DARI PARTAI NAHDLATUL ULAMA

Djumlah Tjalon 33 (tigapuluh tiga) orang. Seorang Tjalon bernama: Ma'mun Amin (Tjalon Nomor 19 dari Daftar Tjalon Sementara atas kehendaknja sendiri telah mengundurkan diri dari pentjalonan).

Dengan demikian hanja 32 (tigapuluh dua) orang Tjalon jang memenuhi persjaratan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang dan/atau Peraturan jang berlaku.

IV. DARI PARTAI MUSLIMIN INDONESIA

Djumlah Tjalon 31 (tigapuluh satu) orang. Dua orang Tjalon masing-masing bernama: Rusjdi Hamka (Tjalon Nomor 14 dari Daftar Tjalon Sementara) dan Dra. Maftuchah Jusuf (Tjalon Nomor 18 dari Daftar Tjalon Sementara) atas kehendaknja sendiri telah mengundurkan diri dari pentjalonan. Dengan demikian hanja 29 (duapuluh sembilan) orang Tjalon jang memenuhi persjaratan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang dan/atau Peraturan jang berlaku.

V. DARI GOLONGAN KARYA

Djumlah Tjalon 64 (enampuluh empat) orang. Dua orang Tjalon bernama: Eman Sulaiman Makil (Tjalon Nomor 28 dari Daftar Tjalon Sementara) dan Nara Loedji (Tjalon Nomor 58 dari Daftar Tjalon Sementara) masing-masing telah menarik diri dan diganti dengan Ferry Kodirun dan Sihombing Daniel Pangihutan.

Tjalon Drs. B. Bedjo (Nomor 6 dari Daftar Tjalon Sementara) ditarik pentjalonannja oleh Pimpinan Sekber Golkar dan diganti dengan Nj. Chairani Hidajat. Dengan demikian sedjumlah 64 (enampuluh empat) orang Tjalon jang diadjukan memenuhi persjaratan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang dan/atau Peraturan jang berlaku.

VI. DARI PARTAI KRISTEN INDONESIA (PARKINDO)

Djumlah Tjalon 19 (sembilan belas) orang. Kesemuanja Tjalon (19 orang Tjalon) telah memenuhi persjaratan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang dan/atau Peraturan jang berlaku.

VII. DARI PARTAI MURBA

Djumlah Tjalon 24 (duapuluh empat) orang. Dua orang Tjalon masing-masing bernama: Djajusman K. (Tjalon Nomor 6 dari Daftar Tjalon Sementara) dan Moch. Alie Rachman (Tjalon Nomor 18 dari Daftar Tjalon Sementara) atas kehendaknja sendiri telah mengundurkan diri dari pentjalonan. Seorang Tjalon bernama: Drs. Mansjur B. Lubis

(Tjalon Nomor 13 dari Daftar Tjalon Sementara) ditiadakan, karena tidak memenuhi persyaratan administrasi. Seorang Tjalon bernama: Kilap bin Sairi (Tjalon Nomor 12 dari Daftar Tjalon Sementara) telah meninggal dunia, dan sebagai penggantinya adalah seorang Tjalon bernama: Dj. S. M. Manullang. Dengan demikian hanya 21 (duapuluh satu) orang Tjalon yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang dan/atau Peraturan yang berlaku.

VIII. DARI PARTAI NASIONAL INDONESIA

Djumlah Tjalon 58 (limapuluh delapan) orang. Dua orang Tjalon masing-masing bernama: Soeharto Ady (Tjalon Nomor 32 dari Daftar Tjalon Sementara) dan A. Nitididjaja (Tjalon Nomor 34 dari Daftar Tjalon Sementara) atas kehendaknya sendiri telah mengundurkan diri dari pentjalonan. Dengan demikian hanya 56 (limapuluh enam) orang Tjalon yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang dan/atau Peraturan yang berlaku.

IX. DARI PARTAI ISLAM PERTI

Djumlah Tjalon 38 (tigapuluh delapan) orang. Seorang Tjalon bernama: Sumadi A.P. (Tjalon Nomor 4 dari Daftar Tjalon Sementara) atas kehendaknya sendiri telah mengundurkan diri dari pentjalonan. Seorang Tjalon bernama: Burhanuddin M. Noor (Tjalon Nomor 13 dari Daftar Tjalon Sementara) ditiadakan, karena tidak memenuhi persyaratan izin Instansi dari Tjalon yang bersangkutan; dan sebagai penggantinya adalah seorang Tjalon bernama: M. Sjihabuddin. Dengan demikian ada 37 (tigapuluh tujuh) orang Tjalon yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang dan/atau Peraturan yang berlaku.

X. DARI PARTAI IP-KI

Djumlah Tjalon 55 (limapuluh lima) orang. Seorang Tjalon bernama: Agus Soedarno (Tjalon Nomor 35 dari Daftar Tjalon Sementara) ditiadakan, karena tidak memenuhi persyaratan izin Instansi dari Tjalon yang bersangkutan. Dengan demikian hanya 54 (limapuluh empat) orang Tjalon yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang dan/atau Peraturan yang berlaku.

Hasil Penelitian tersebut diatas merupakan hasil penelitian terakhir, setelah melalui phase penelitian untuk Daftar Tjalon Sementara. Dengan demikian terhadap Tjalon-tjalon yang dinjatakan sebagai telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang dan/atau Peraturan yang berlaku, dapat ditjantumkan dalam Daftar Tjalon Tetap untuk Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Daerah Khusus Ibukota Djakarta.

Hasil penelitian setjara terperintji, dengan menjebutkan nama-nama Tjalon keseluruhan dengan nomor urutannja, tertjantum dalam lampiran Berita Atjara ini, dengan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Peneliti Daerah Daerah Khusus Ibukota Djakarta.

Demikianlah Berita Atjara ini dibuat dengan sebenarnja, dengan mengingat sumpah djabatan masing-masing.

Ketua/Anggota, t.t.d. (SANTOSA WIWOHO S.H.)	Sekretaris/Anggota, t.t.d. (SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)
---	---

Anggota, t.t.d. (Maj. Inf. K. SIMBOLON)	Anggota, t.t.d. (A.K.P. SOETRISNO)
---	--

Anggota, t.t.d. (DJUMADJITIN S.H.)	Anggota, t.t.d. (Drs. F. H. HUTASOIT)
--	---

**R E S U M E : HASIL PENELITIAN TJALON ANGGOTA
D.P.R.D. DCI DIAKARTA
PARTAI KATOLIK**

NOMOR		DAFTAR TJALON SEMENTARA	NOMOR		DAFTAR TJALON TETAP	KETERANGAN
Urut	Tjalon	Nama Lengkap	Urut	Tjalon	Nama Lengkap	
1.	1.	Drs. M.B. Samosir	1.	1.	Drs. M.B. Samosir	
2.	2.	F. Notosoedirjo	2.	2.	F. Notosoedirjo	
3.	3.	Willebrord Djarubung Tambunan	3.	3.	Willebrord Djarubung Tambunan	
4.	4.	Wowor Wilhelmus	4.	4.	Wowor Wilhelmus	
5.	5.	Adelbertus	5.	5.	Adelbertus	
6.	6.	Drs. Leobaldus Pauner	6.	6.	Drs. Leobaldus Pauner	
7.	7.	R. Franciscus Katidjan S.H.	7.	7.	R. Franciscus Katidjan S.H.	
8.	8.	Petrus Mau Hajong	8.	8.	Petrus Mau Hajong	
9.	9.	Blantran De Rozari	9.	9.	Blantran De Rozari	
10.	10.	Antonius	10.	10.	Antonius	
11.	11.	Soeradi A. W.J. Dokter	11.	11.	Soeradi A.W.J. Dokter	
12.	12.	Widisiswojo R. Ch. J.	12.	12.	Widisiswojo R.Ch.J.	
		Drs. Henry Handjoko			Drs. Henry Handjoko	
		Dewanto			Dewanto	
		Drs. John Antonius			Drs. John Antonius	
		Situmorang			Situmorang	

NOMOR	DAFTAR TJALON SEMENTARA		NOMOR	DAFTAR TJALON TETAP		KETERA- NGAN
	Urut	Tjalon	Urut	Tjalon	Nama Lengkap	
13.	13.	Jacob Frederik Willy Romein	13.	13.	Jacob Frederik Willy Romein	
14.	14.	M.P. Purwanto D.W.	14.	14.	M.P. Purwanto D.W.	
15.	15.	Drs. A. Dasoeki Sandiwanbroto	15.	15.	Drs. A. Dasoeki Sandiwanbroto	
16.	16.	Emanuel Rinal Widjosujono	16.	16.	Emanuel Rinal Widjosujono	
17.	17.	Paul Steven Lodo	17.	17.	Paul Steven Lodo	
18.	18.	Piet Bolly	18.	18.	Piet Bolly	
19.	19.	T.J. Parija	19.	19.	T.J. Parija	
20.	20.	P.C. Hadiprastowo S.H.	20.	20.	P.C. Hadiprastowo S.H.	
21.	21.	Max Gerry Sihite	21.	21.	Max Gerry Sihite	
22.	22.	Mangoensoediro Selsus Roosmin	22.	22.	Mangoensoediro Selsus Roosmin	
23.	23.	Drs. Franciscus Jusuf Sumandar	23.	23.	Drs. Franciscus Jusuf Sumandar	
24.	24.	H. Sambudi Kashono	24.	24.	H. Sambudi Kashono	

Djakarta, 20 April 1971,

PANITIA PENELITI DAERAH
D.C.I. DIAKARTA

Ketua,

ttid.

Sekretaris,

ttid.

(SANTOSA WIWOHO S.H.)

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

**RESUME : HASIL PENELITIAN TJALON ANGGOTA
D.P.R.D. DCI DIAKARTA
PARTAI SUKSES INDONESIA**

NOMOR		DAFTAR TJALON SEMENTARA	NOMOR		DAFTAR TJALON TETAP	KETERA- NGAN
Urut	Tjalon	Nama Lengkap	Urut	Tjalon	Nama Lengkap	
1.	1.	Soedja'i Natikusumah	1.	1.	Soedja'i Natikusumah	
2.	2.	Muhammad Ali Rakip	2.	2.	Muhammad Ali Rakip	
3.	3.	Ahmad Dainuri Tjokroaminoto	3.	3.	Ahmad Dainuri Tjokroaminoto	
4.	4.	M. Kardiman Wiratmadja	4.	4.	M. Kardiman Wiratmadja	
5.	5.	Mohamad Sarta Sarkawi Hadji	5.	5.	Mohamad Sarta Sarkawi Hadji	
6.	6.	Ajeng Zakaria B.A.	6.	6.	Drs. Achmad Djazuli	
7.	7.	M. Saleh Said Bc. Hk.	7.	7.	Ajeng Zakaria B.A.	
8.	8.	Andi Mukarram Chairil Akbar B.A.	8.	8.	M. Saleh Said Bc. Hk.	
9.	9.	Nj. Mas Intan Muis	9.	9.	Andi Mukarram Chairil Akbar B.A.	
10.	10.	Dudy Alimistri	10.	10.	Nj. Mas Intan Muis	
11.	11.	M. Idris Pulung	11.	11.	Dudy Alimistri	
12.	12.	Hamdani Achmad	12.	12.	M. Idris Pulung	
13.	13.	Duljaja	13.	13.	Hamdani Achmad	
14.	14.	Sajudin Natadisastra	14.	14.	Duljaja	
15.	15.	K.H.M. Nawawi	15.	15.	Sajudin Natadisastra	
16.	16.	Alimuddin Firdaus Dg. Mannassa B.A.	16.	16.	K.H.M. Nawawi	

NOMOR		DAFTAR TIALON SEMENTARA	NOMOR		DAFTAR TIALON TETAP	KETERA- NGAN
Urut	Tjalon	Nama Lengkap	Urut	Tjalon	Nama Lengkap	
17.	17.	M. Maksoemoeddin	17.	17.	Alimuddin Firdaus Dg. Mannassa B.A.	
18.	18.	Lili Sarpili	18.	18.	M. Maksoemoeddin	
19.	19.	Sanusi Prijatna	19.	19.	Lili Sarpili	
20.	20.	Muh. Nur	20.	20.	Sanusi Prijatna	
21.	21.	M. Muchsin Bin Marga	21.	21.	Muh. Nur	
22.	22.	Achmad Rafei	22.	22.	M. Muchsin Bin Marga	
23.	23.	Moh. Thoim Zaruki	23.	23.	Achmad Rafei	
24.	24.	Abdul Hakim	24.	24.	Moh. Thoim Zaruki	
25.	25.	Muhajar S.	25.	25.	Abdul Hakim	
26.	26.	Jusuf Mohamad Nabun	26.	26.	Muhajar S.	
27.	27.	Drs. Achmad Djazuli	27.	27.	Jusuf Mohamad Nabun	

Diakarta, 20 April 1971.

PANITIA PENELITIAN DAERAH
D.C.I. DJAKARTA

Ketua,

titd.

(SANTOSA WIWOHO S.H.)

Sekretaris,

titd.

(SOETIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

**R E S U M E : HASIL PENELITIAN TJALON ANGGOTA
D.P.R.D. DCI DIJAKARTA
PARTAI NAHDATUL ULAMA**

NOMOR		DAFTAR TJALON SEMENTARA	NOMOR		DAFTAR TJALON TETAP	KETERA- NGAN
Urut	Tjalon	Nama Lengkap	Urut	Tjalon	Nama Lengkap	
1.	1.	Ali Dimung	1.	1.	Drs. H. A. Sjathbi	Keputusan Laksuda Djaya.
2.	2.	Hasbullah Amin	2.	2.	Masrafah Z.A. Noeh	
3.	3.	Drs. H. A. Sjathbi	3.	3.	Muhasjim N.	
4.	4.	Masrafah Z.A. Noeh Nj.	4.	4.	H. Abd. Maadjid Tojib	
5.	5.	H. Abd. Maadjid Tojib	5.	5.	Moh. Jusuf Abdullah	
6.	6.	Moh. Jusuf Abdullah	6.	6.	Hasbullah Amin	
7.	7.	Jus Rusli B.A.	7.	7.	H.S. Moertadji	
8.	8.	Muhasjim N.	8.	8.	Ma'ruf Amin B.A.	
9.	9.	Abdul Halim	9.	9.	Siddikul Madani	
10.	10.	Moh. Sidik bin Djaanah	10.	10.	Muhamad Alie	
11.	11.	Siddikul Madani	11.	11.	Ishak Jacub	
12.	12.	Ma'ruf Amin B.A.	12.	12.	Muzni Siddiq	
13.	13.	M. Masjkur Djunaedi	13.	13.	Ali Dimung	
14.	14.	Ishak Jacub	14.	14.	H. Sariani (Ibu Thaha Ma'roef)	
15.	15.	H. Sariani (Ibu Thaha Ma'roef)	15.	15.	Sjarif Kosasih Sjartin	
16.	16.	Mohamad Alie	16.	16.	Jus Rusli B.A.	
17.	17.	Mohamad Sahal Ma'mun	17.	17.	Mohamad Sahal Ma'mun	
18.	18.	Muzni Siddiq	18.	18.	Moh. Sidik bin Djaanah	

NOMOR		DAFTAR TJALON SEMENTARA		NOMOR		DAFTAR TJALON TETAP		KETERA- NGAN
Urut	Tjalon	Nama Lengkap		Urut	Tjalon	Nama Lengkap		
19.	19.	Maimun Amin		19.	19.	M. Masjukur Djunaedi		Tjalon Se- mentara No 19 mengun- durkan diri atas permir- taan sendiri.
20.	20.	H.A.C. Taufiq Gandhawidjaja		20.	20.	Achmad Ridwan Moh. Noer		
21.	21.	Achmad Ridwan Moh. Noer		21.	21.	Abdullah Zainuddin Hadji		
22.	22.	Abdullah Zainuddin Hadji		22.	22.	Abdul Halim		
23.	23.	Sulaiman SB. Ismaja BA.		23.	23.	Sulaiman SB. Ismaja BA.		
24.	24.	Sjarif Kossasih Sjairin		24.	24.	H.A.C. Taufiq Gandhawidjaja		
25.	25.	Abdul Rasjad bin Abdul Sjukur		25.	25.	Achmad Alwi S.H.		
26.	26.	Achmad Mugni		26.	26.	Fadlun Amir		
27.	27.	Moh. Siafe'ie		27.	27.	Achmad Mugni		
28.	28.	Isa Latif Hadji		28.	28.	Moh. Siafe'ie		
29.	29.	Fadlun Amir		29.	29.	R.A. Rasjid		
30.	30.	R.A. Rasjid		30.	30.	Tengku Muhammad Hasan B.A.		
31.	31.	Tengku Muhammad Hasan B.A.		31.	31.	Isa Latif Hadji		
32.	32.	Achmad Alwi S.H.		32.	32.	Abdul Rasjad bin Abdul Sjukur		
33.	33.	H.S. Moertadji						

Ketua,
ttd.
(SANTOSA WIWOHO S.H.)

Djakarta, 20 April 1971.
PANITIA PENELITI DAERAH
D.C.I. DJAKARTA
Sekretaris,
ttd.
(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

**RESUME : HASIL PENELITIAN TJALON ANGGOTA
D.P.R.D. DCI DIAKARTA
PARTAI MUSLIMIN INDONESIA**

NOMOR		DAFTAR TJALON SEMENTARA	NOMOR		DAFTAR TJALON TETAP	KETERA- NGAN
Urut	Tjalon	Nama Lengkap	Urut	Tjalon	Nama Lengkap	
1.	1.	Zainal Arifin Datuk	1.	1.	Zainal Arifin Datuk	Keputusan Laksuda Djaya idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem
2.	2.	Agus Salim	2.	2.	Agus Salim	
3.	3.	Hartono Mardjono S.H.	3.	3.	Hartono Mardjono S.H.	
4.	4.	Machlan Basran B.A.	4.	4.	Machlan Basran B.A.	
5.	5.	M. Joenoes Rachman	5.	5.	M. Joenoes Rachman	
6.	6.	Anwar Ali Akbar	6.	6.	Anwar Ali Akbar	
7.	7.	Abdul Rahim Madjid	7.	7.	Nj. Aisjah Gazali Sjahlän	
8.	8.	Moeharni Djasoem	8.	8.	Abdul Rahim Madjid	
9.	9.	H.S.S. Djäm'an	9.	9.	Moeharni Djasoem	
10.	10.	H. Gazali Thaib	10.	10.	Harun Al Rasjid	
11.	11.	Soleha Thabrani	11.	11.	H. Hamidullah	
12.	12.	M.H. Usman Ibrahim	12.	12.	Abdul Rachman Tji' Agoes	
13.	13.	Hadji Fachrudin Shaleh	13.	13.	H.S.S. Djäm'an	
14.	14.	Rusdi Hamka	14.	14.	H. Gazali Thaib	
15.	15.	Aisjah Gazali	15.	15.	Soleha Thabrani	
16.	16.	Nj. Rohana H. Zainal Abidin	16.	16.	M.H. Usman Ibrahim	
		Ahmad				

NOMOR		DAFTAR TJALON SEMENTARA	NOMOR		DAFTAR TJALON TETAP	KETERA- NGAN
Urut	Tjalon	Nama Lengkap	Urut	Tjalon	Nama Lengkap	
17.	17.	Nj. Rukajah Maksom	17.	17.	Hadji Fachruddin Shaleh	Keputusan Laksusda Djaya
18.	18.	Dra. Maftuchah Jusuf	18.	18.	Darwis L.	
19.	19.	Mohammad Sani	19.	19.	Aisjah Gazali	
20.	20.	Mohammad Ali Jaslin Drs.	20.	20.	Nj. Rohana H. Zainal Abidin Ahmad	
21.	21.	Drs. Hamzah Ya'cub	21.	21.	Mohammad Jatim Jakin	Keputusan Laksusda Djaya
22.	22.	Nizar Malin Sutan	22.	22.	Nj. Rukajah Maksom	
23.	23.	Siti Nurdjannah	23.	23.	Mohammad Sani	
24.	24.	Harun Al Rasjid	24.	24.	Mohammad Ali Jaslin Drs.	
25.	25.	H. Hamidullah	25.	25.	Andi Ibrahim	Keputusan Laksusda Djaya
26.	26.	Nj. Aisjah Gazali Sjahan	26.	26.	Drs. Hamzah Ya'cub	
27.	27.	Abdul Rachman Tji' Agoes	27.	27.	Nizar Malin Sutan	
28.	28.	Darwis L.	28.	28.	Siti Nurdjannah	
29.	29.	Mohammad Jatim Jakin	29.	29.	Abd. Majid H.A.M.	Tjalon Se- mentara No.

NOMOR		DAFTAR TJALON SEMENTARA	NOMOR		DAFTAR TJALON TETAP	KETERA- NGAN
Urut	Tjalon	Nama Lengkap	Urut	Tjalon	Nama Lengkap	
30.	30.	Andi Ibrahim				14 dan 18 mengundur- kan diri da- ri pentjalon- an atas per- mintaan sen- diri.
31.	31.	Abd. Madjid H.A.M.				

Djakarta, 20 April 1971.

PANITIA PENELITIAN DAERAH
D.C.I. DJAKARTA

Ketua,

tttd.

(SANTOSA WIWOHO S.H.)

Sekretaris,

tttd.

(SOETIPTO WIROSARDJONO, M.Sc.)

**R E S U M E : HASIL PENELITIAN TJALON ANGCOTA
D.P.R.D. DCI DIAKARTA
COLONGAN KARYA**

NOMOR		DAFTAR TJALON SEMENTARA	NOMOR		DAFTAR TJALON TETAP	KETERA- NGAN
Urut	Tjalon	Nama Lengkap	Urut	Tjalon	Nama Lengkap	
1.	1.	Nj. Hudingsih Wirjadi	1.	1.	Nj. Hudingsih Wirjadi	Tjalon Se- mentara No. 6 ditarik pen- tjalonannya oleh Pimpin- an Golkar dan sebagai peng- ganti adalah Tjalon Tetap No. 13.
2.	2.	Pinantun Hutasoit	2.	2.	F.M.T. Radiagukguk	
3.	3.	Effendi Jusuf S.H.	3.	3.	Pinantun Hutasoit	
4.	4.	Pintor Simandjuntak	4.	4.	Effendi Jusuf S.H.	
5.	5.	Roberto Bangun	5.	5.	Kafrawi	
6.	6.	B. Bedjo, Drs.	6.	6.	Roberto Bangun	
7.	77.	Hadji Sa'ali S.H.	7.	7.	H. Mochtar Zakaria S.H.	
8.	8.	F.M.T. Radiagukguk	8.	8.	Hadji Sa'ali S.H.	
9.	9.	Arifin Tobing	9.	9.	Henry Siregar	
10.	10.	Nj. Moerdono Sjamsidar	10.	10.	Arifin Tobing	
11.	11.	I. Made Suwinda S.H.	11.	11.	Drs. Soedjoko	
12.	12.	Hasanudin Anis	12.	12.	Nj. Moerdono Sjamsidar	
13.	13.	H. Mochtar Zakaria S.H.	13.	13.	Nj. Chaerani Hidayat	
14.	14.	Bing Slamet bin Raden Achmad	14.	14.	I Made Suwinda S.H.	
15.	15.	Nj. Aju Sukrati Harun Kabir	15.	15.	Hasanudin Anis	
16.	16.	Abdul Chak Tieppy Harro	16.	16.	Pintor Simandjuntak	
17.	17.	Rd. Mandjan Al Martowissastro	17.	17.	Nj. Siti Djohara Baka Perdana- kusumah Hadji	
18.	18.	Kafrawi	18.	18.	Mulia Budiman Dauruk	
19.	19.	Drs. Soedjoko	19.	19.	Nj. Hotma Harahap	

NOMOR		DAFTAR TJALON SEMENTARA	NOMOR		DAFTAR TJALON TETAP	KETERA- NGAN	
Urut	Tjalon	Nama Lengkap	Urut	Tjalon	Nama Lengkap		
20.	20.	Drs. Jacomien Martha Risjacehu T. Rhany Soelaiman	20.	20.	Abdul Chak Tjeppy Harro Raden Mandijan Al Mar-to- wisastro		
21.	21.		21.	21.			
22.	22.	Nj. Nen Arbeno Natakusumah Abubakar Kaba	22.	22.	Ferry Kodirun Sitombing Daniel Panghutan T. Rhany Soelaiman		
23.	23.		23.	23.			
24.	24.	Aminuddin Ramadi S.H. Siti Chadidjah	24.	24.	Bing Slamet bin Raden Achmad Nj. Siti Chatidjah Junusi Joeseofi		
25.	25.		25.	25.			
26.	26.	Nj. Herdini Bojek Soerjanto Siti Djohara Hadji	26.	26.	Abubakar Kaba Aminuddin Ramadi S.H.	Tjalon Se- mentara No. 28 menarik diri diganti oleh Tjalon No. 22.	
27.	27.		27.	27.			
28.	28.	Eman Sulaiman Makil Mohamad Ch. Moeslimin	28.	28.	Nj. Herdini Bojek Soerjanto Mochamad Moeslimin Prawiro- wijoto		
29.	29.		29.	29.			
30.	30.	Drs. Heru Suparto	30.	30.	Marten Luther Kaligis Drs. Heru Suparto		
31.	31.		31.	31.			
32.	32.	Mansjur Achmad Marten Luther Kaligis	32.	32.	Mansjur Achmad Sjofjan Sjaf'eie		
33.	33.		33.	33.			
34.	34.	Drs. Achmad Zainal Mohamad Toha	34.	34.	Achmad Zainal Mohamad Toha		
35.	35.		35.	35.			
36.	36.	Turino Djunaidy Drs. Jajat Prijatna	36.	36.	Turino Djunaidy Drs. Jajat Prijatna		
37.	37.		37.	37.			
38.	38.	Sjarif Usman Wahjono Magiono S.H.	38.	38.	Sjarif Usman Wahjono Magiono S.H.		
39.	39.		39.	39.			
40.	40.	A.K. Sukri Hadjat	40.	40.			

NOMOR		DAFTAR TJALON SEMENTARA	NOMOR		DAFTAR TJALON TETAP	KETERA- NGAN
Urut	Tjalon	Nama Lengkap	Urut	Tjalon	Nama Lengkap	
41.	41.	Siti Chamsinah Dahlan	41.	41.	A.K. Sukri Hadjat	Tjalon Se- mentara No. 58 menarik diri dan di- ganti oleh Tjalon Tetap No. 23.
42.	42.	Nj. Nursidah (Ida)	42.	42.	Siti Chamsinah Dahlan	
43.	43.	Jan Mangagi Sinaga	43.	43.	Drs. Jacomien Martha Rijsacahu	
44.	44.	Anwar Habib	44.	44.	Jan Mangagi Sinaga	
45.	45.	Soehadi	45.	45.	Anwar Habib	
46.	46.	Muslim Effendy	46.	46.	Muslim Effendy	
47.	47.	Djadja S. Kartakusumah	47.	47.	Soehadi	
48.	48.	Nj. Moestadjab (Persia bin Tarti)	48.	48.	Nj. Nen Arbeno Natakusumah	
49.	49.	Suwondho	49.	49.	Djadja S. Kartakusumah	
50.	50.	Drs. Muchsin Ridjan	50.	50.	Nj. Aju Sukrati Harun Kabir	
51.	51.	Nj. Hotma Harahap	51.	51.	Nj. Moestadjab (Persia bin Tarti)	
52.	52.	Tigor Hutagalung	52.	52.	Suwondho	
53.	53.	Nj. T. Mira Fatimah Soemantoro	53.	53.	Drs. Muchsin Ridjan	
54.	54.	Astiel Soe'in Datuk Bagindo	54.	54.	Tigor Hutagalung	
55.	55.	Karundeng Willem	55.	55.	Nj. T. Mira Fatimah Soemantoro	
56.	56.	Jacob Sofijan	56.	56.	Nj. Nursidah (Ida)	
57.	57.	Henry Napitupulu	57.	57.	Astiel Soe'in Datuk Bagindo	
58.	58.	Nara Loedji	58.	58.	Karundeng Willem	
59.	59.	Nj. Poppie Andjar Asmara	59.	59.	Jacob Sofijan	
60.	60.	N. Surjana Marthakusumah	60.	60.	Henry Napitupulu	
61.	61.	Hadji Tengku Gusri Baleo	61.	61.	Nj. Poppie Andjar Asmara	
62.	62.	Henry Siregar	62.	62.	Nj. Surjana Marthakusumah	

NOMOR		DAFTAR TJALON SEMENTARA	NOMOR		DAFTAR TJALON TETAP	KETERA- NGAN
Urut	Tjalon	Nama Lengkap	Urut	Tjalon	Nama Lengkap	
63.	63	Mulja Budiman Dauruk	63.	63.	Hadji Tengku Gusni Baleo	
64.	64.	Gofar Bain	64.	64.	Gofar Bain	

K e t u a ,

ttid.

((SANTOSA WIWOHO S.H.)

Djakarta, 20 April 1971.

PANITIA PENELITIAN DAERAH
D.C.I. DJAKARTA

Sekretaris,

ttid.

((SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

**R E S U M E : HASIL PENELITIAN TJALON ANGGOTA
D.P.R.D. DKI JAKARTA
PARTAI KRISTEN INDONESIA**

NOMOR		DAFTAR TJALON SEMENTARA	NOMOR		DAFTAR TJALON TETAP	KETERA- NGAN
Urut	Tjalon	Nama Lengkap	Urut	Tjalon	Nama Lengkap	
1.	1.	Simatupang T.A.M. Drs.	1.	1.	Simatupang T.A.M. Drs.	Keputusan Laksuda Djaya.
2.	2.	Parulian Silalahi	2.	2.	Parulian Silalahi	
3.	3.	Raden Dosodiwirjo	3.	3.	Raden Dosodiwirjo	
4.	4.	Mariefje Kairupan	4.	4.	Mariefje Kairupan	
5.	5.	Pendeta Coenraad Charles	5.	5.	Tiop Harun Sitorus	
6.	6.	Tjakrawidjaja	6.	66.	Pendeta Kainama Coenraad Charles	
7.	7.	Drs. Ec. Anton Lesiangi	7.	7.	Tjakrawidjaja	Keputusan Laksuda Djaya.
8.	8.	Cerhard Mayer Siagian B.A.	8.	8.	Drs. Ec. Anton Lesiangi	
9.	9.	Alfred Siahaan	9.	9.	Cerhard Mayer Siagian B.A.	
10.	10.	Albert M. Panggabean	10.	10.	Ajfred Siahaan	
11.	11.	Arnold Bangun Tua Napitupulu	11.	11.	Albert M. Panggabean	
12.	12.	Na'aso Mendrofa	12.	12.	Arnold Bangun Tua Napitupulu	
13.	13.	Keesia Boru Hutagalung	13.	13.	Na'aso Mendrofa	
14.	14.	Nn. Aleida Leni Lumenta	14.	14.	Keesia Boru Hutagalung	
15.	15.	Pinonda Siregar	15.	15.	Nn. Aleida Leni Lumenta	
16.	16.	Daniel Ridolof Gah	16.	16.	Pinonda Siregar	
17.	17.	Nj. W. Wuwungan Roring (Mien)	17.	17.	Daniel Ridolof Gah	

NOMOR		DAFTAR TJALON SEMENTARA	NOMOR		DAFTAR TJALON TETAP	KETERA- NGAN
Urut	Tjalon	Nama Lengkap	Urut	Tjalon	Nama Lengkap	
18.	18.	Wesley Hermalin Saragih	18.	18.	Nj. W. Wuwungan Roring (Mien)	
19.	19.	Tiop Harun Sitorus	19.	19.	Wesley Hermalin Saragih	

Djakarta, 20 April 1971.

PANITIA PENELITI DAERAH
D.C.I. DIAKARTA

Ketua,

ttd.

(SANTOSA WIWOHO S.H.)

Sekretaris,

ttd.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO, M.Sc.)

**RESUME : HASIL PENELITIAN TJALON ANGGOTA
D.P.R.D. DCI DIJAKARTA
PARTAI MURBA**

875

NOMOR		DAFTAR TJALON SEMENTARA	NOMOR		DAFTAR TJALON TETAP	KETERA- NGAN
Urut	Tjalon	Nama Lengkap	Urut	Tjalon	Nama Lengkap	
1.	1.	Jusuf Bandjar	1.	1.	Jusuf Bandjar	Tjalon Se- mentara No. 6 dan No. 18 mengundur- kan diri. Tjalon Se- mentara No. 13, ditforet dari Daftar Tjalon, kare- na tidak me- enuhi per- syaratan ad- ministrasi.
2.	2.	Sukardi	2.	2.	Sukardi	
3.	3.	W. Tjatronata	3.	3.	Pahit Prawira	
4.	4.	S. Soetrisno Hadi	4.	4.	Belasar Siagian	
5.	5.	Belasar Siagian	5.	5.	W. Tjatronata	
6.	6.	Djajusman K.	6.	6.	Boris Situmorang	
7.	7.	Nj. Harini Sukirna	7.	7.	S. Soetrisno Hadi	
8.	8.	Gindo Thalib	8.	8.	Djonggi Saur Malum Manullang	
9.	9.	Boris Situmorang	9.	9.	Mangandar Butar-Butar B.A.	
10.	10.	Pahit Prawira	10.	10.	Amin Kosim	
11.	11.	A. Djamaluddin Sjafie'ie	11.	11.	Nj. Harini Sukirna	
12.	12.	Kilap Bin Sairi	12.	12.	Amin Soleh Djaja	
13.	13.	Drs. Mansur b. Lubis	13.	13.	Moh. Said Jusuf	
14.	14.	Mangandar Butar-Butar B.A.	14.	14.	A. Djamaluddin Sjafie'ie	
15.	15.	Tjejep Winata bin Tatang Winata.	15.	15.	Gindo Thalib	
16.	16.	Amirsjah	16.	16.	Midja	
17.	17.	Moh. Sjaid Jusuf	17.	17.	Tjejep Winata bin Tatang Winata	

NOMOR		DAFTAR TJALON SEMENTARA	NOMOR		DAFTAR TJALON TETAP	KETERA- NGAN
Urut	Tjalon	Nama Lengkap	Urut	Tjalon	Nama Lengkap	
18.	18.	Moh. Alie Rachman	18.	18.	Boetoto Basar	Tjalon Se- mentara No. 12 meninggal dunia dan di- ganti oleh Tja- lon Tetap No. 8.
19.	19.	Midja	19.	19.	Amirsjah	
20.	20.	M.H. David Napitupulu	20.	20.	M.H. David Napitupulu	
21.	21.	Radek Handoko	21.	21.	Radek Handoko	
22.	22.	Boetoto Basar				
23.	23.	Amin Soleh Djaja				Perubahan Nomor Urut lainnya atas permintaan Parpol yang bersangkutan.
24.	24.	Amin Kosim				

Djakarta, 20 April 1971.

PANITIA PENELITI DAERAH
D.C.I. DIAKARTA

. Ketua,

ttid.

(SANTOSA WIWOHO S.H.)

Sekretaris,

ttid.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO, M.Sc.)

**RESUME : HASIL PENELITIAN TJALON ANGGOTA
D.P.R.D. DCI DIAKARTA
PARTAI NASIONAL INDONESIA**

NOMOR		DAFTAR TJALON SEMENTARA	NOMOR		DAFTAR TJALON TETAP	KETERA- NGAN
Urut	Tjalon	Nama Lengkap	Urut	Tjalon	Nama Lengkap	
1.	1.	Drs. Jusuf Merukh	1.	1.	Drs. Jusuf Merukh	
2.	2.	Jonathan Bhisma Manoppo	2.	2.	Jonathan Bhisma Manoppo	
3.	3.	Andjar Siswojo Ir.	3.	3.	Andjar Siswojo Ir.	
4.	4.	Kurbiana Haliman	4.	4.	Kurbiana Haliman	
5.	5.	Tandjung A.G.	5.	5.	Tandjung A.G.	
6.	6.	Achmad Irsad	6.	6.	Achmad Irsad	
7.	7.	R. Hartojo Surjokuntoro	7.	7.	R. Hartojo Surjokuntoro	
8.	8.	Tohmiddullah M.T.	8.	8.	Tohmiddullah M.T.	
9.	9.	Ojet Ratma	9.	9.	Ojet Ratma	
10.	10.	Nj. Sriyati Slamet	10.	10.	Nj. Sriyati Slamet	
11.	11.	Mochamad Hasan Potabuga	11.	11.	Mochamad Hasan Potabuga	
12.	12.	Prhadi Soeparto	12.	12.	Prhadi Soeparto	
13.	13.	Tjetjep Sutenfri	13.	13.	Tjetjep Sutenfri	
14.	14.	Suiman	14.	14.	Suiman	
15.	15.	R. Soekardjo	15.	15.	R. Soekardjo	
16.	16.	Katamin Hadisutopo Drs.	16.	16.	Katamin Hadisutopo Drs.	
17.	17.	Poltak Sitorus	17.	17.	Drs. Poltak Sitorus	
18.	18.	Sri Ekonomi Djaksa	18.	18.	Nj. Sri Ekonomi Djaksa	

NOMOR		DAFTAR TJALON SEMENTARA	NOMOR		DAFTAR TJALON TETAP	KETERA- NGAN
Urut	Tjalon	Nama Lengkap	Urut	Tjalon	Nama Lengkap	
19.	19.	Zainudin bin Saleh	19.	19	Zainudin bin Saleh	Tjalon Se- mentara No. 32 mengun- durkan diri.
20.	20.	Muhamad Amin R.	20.	20.	Muhamad Amin R.	
21.	21.	Muntarech	21.	21.	Muntarech	
22.	22.	Effendi M.H.	22.	22.	Effendi M.H.	
23.	23.	Suwanda A.	23.	23.	Suwanda A.	
24.	24.	Bambang Sudharto	24.	24.	Bambang Sudharto	
25.	25.	Abdul Madio	25.	25.	Abdul Madio	
26.	26.	Manne Slamet	26.	26.	Manne Slamet	
27.	27.	Soerachman	27.	27.	Soerachman	
28.	28.	Ilias Tirtodihardjo	28.	28.	Ilias Tirtodihardjo	
29.	29.	Tata Goenadisastira	29.	29.	Tata Goenadisastira	
30.	30.	Sjamsudin M.A. (Tjek Din)	30.	30.	Sjamsudin M.A. (Tjek Din)	
31.	31.	Machruf Hasan	31.	31.	Machruf Hasan	
32.	32.	Soeharto Ady	32.	32.	Marwan Adam	
33.	33.	Nj. Ika Surtika Ratma (Ibu Ojet)	33.	33.	Nj. Ika Surtika Ratma (Ibu Ojet)	
34.	34.	A. Nittidjaia	34.	34.	Soekarto R.S.	
35.	35.	Soekarto R.S.	35.	35.	F.X. Soetarto	
36.	36.	F.X. Soetarto	36.	36.	Drs. Soetoto Ronggo	
37.	37.	Drs. Acetoto Ronggo Saputro	37.	37.	Saputro	
38.	38.	Samsul Bahri	38.	38.	Samsul Bahri	
					Eddy Moehamad Joesoef	
					Hidajat	

NOMOR		DAFTAR TJALON SEMENTARA	NOMOR		DAFTAR TJALON TETAP	KETERA- NGAN
Urut	Tjalon	Nama Lengkap	Urut	Tjalon	Nama Lengkap	
39.	39.	Eddy Mochamad Joesoef Hidayat	39.	39.	Abdulmajid Gunawan R.	Keterangan Nomor 32 Keputusan Laksuda Daya.
40.	40.	Abdul Majid Gunawan R.	40.	40.	O.P. Simorangkir Drs.	
41.	41.	O.P. Simorangkir Drs.	41.	41.	Soemarto bin Madijani	
42.	42.	Soemarto bin Madijani	42.	42.	Muhammad Hain Mahadin B.Sc.	
43.	43.	Muhammad Hain Mahadin B.Sc.	43.	43.	Suparno	
44.	44.	Suparno	44.	44.	Sudiasmadi Darmosugondo	
45.	45.	Sudiasmadi Darmosugondo	45.	45.	Roeslan Alias Roeslan Hidayat	
46.	46.	Roeslan Alias Roeslan Hidayat	46.	46.	Aloysius Eddy Pangin	
47.	47.	Aloysius Eddy Pangin	47.	47.	Hery Sudarjo	
48.	48.	Hery Sudarjo	48.	48.	Gustaaf Taroreh	
49.	49.	Gustaaf Taroreh	49.	49.	Nj. Woro Hartati Soetamtoro	
50.	50.	Nj. Woro Hartati Soetamtoro	50.	50.	Raden Hasan bin Raden Haji Hanan	
51.	51.	Raden Hasan bin Raden Haji Hanan	51.	51.	Soetojo Mangoenredo	
52.	52.	Soetojo Mangoenredo	52.	52.	Eddy Tugino	
53.	53.	Eddy Tugino	53.	53.	Pratomo B.A.	
54.	54.	Pratomo B.A.	54.	54.	Drs. Moh. Djamin Ali	
55.	55.	Drs. Moh. Djamin Ali	55.	55.	Rudy Sukarno	
56.	56.	Marwan Adam	56.	56.	Drs. Mahaga	

NOMOR		DAFTAR TJALON SEMENTARA	NOMOR		DAFTAR TJALON TETAP	KETERA- NGAN
Urut	Tjalon	Nama Lengkap	Urut	Tjalon	Nama Lengkap	
57.	57.	Rudy Sukarno				
58.	58.	Drs. Mahaga				

K e t u a,

ttid.

(SANTOSA WIWOHO S.H.)

Djakarta, 20 April 1971.

PANITIA PENELITIAN DAERAH
D.C.I. DJAKARTA

Sekretaris,

ttid.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO, M.Sc.)

**RESUME : HASIL PENELITIAN TJALON ANGGOTA
D.P.R.D. DCI DIAKARTA
PARTAI ISLAM PERTI**

881

NOMOR		DAFTAR TJALON SEMENTARA	NOMOR		DAFTAR TJALON TETAP	KETERA- NGAN
Urut	Tjalon	Nama Lengkap	Urut	Tjalon	Nama Lengkap	
1.	1.	Hasan Basri	1.	1.	Hadji Mahasan	Tjalon Se- mentara No. 4 mengundur- kan diri atas permintaan sendiri, dan selaku peng- ganti Tjalon Tetap No. 12.
2.	2.	Saud Rachman B.Sc.	2.	2.	Hasan Basri	
3.	3.	A.A. Wahab	3.	3.	Saud Rahmani B.Sc.	
4.	4.	Sumadi A.P.	4.	4.	A.A. Wahab	
5.	5.	Hajdaruddin Abdulmajid Pagar dewa	5.	5.	Muchlis Listo	
6.	6.	Ibu Alia Munabari	6.	6.	Ibu Alia Munabari	
7.	7.	Hadji Mahasan	7.	7.	Anang Sarmada	
8.	8.	Anang Sarmada	8.	8.	Moh. Ali Saliman	
9.	9.	Moh. Ali Saliman	9.	9.	Ariefshah	
10.	10.	Ariefshah	10.	10.	Uray Abubakar	
11.	11.	Uray Abubakar	11.	11.	Hajdaruddin Abdulmajid Pagar dewa	
12.	12.	Muchlis Listo	12.	12.	M. Sthabuddin	
13.	13.	Burhanuddin M. Noor	13.	13.	Muhammad Busta Mukti M.A.	
14.	14.	Muhammad Busta Mukti M.A.	14.	14.	Nahadjar Siregar	
15.	15.	Nahadjar Siregar	15.	15.	A.K.S. Ranasetipta	
16.	16.	A.K.S. Ranasetipta	16.	16.	Din Ramli Ruhuunussa B.A.	

NOMOR		DAFTAR TJALON SEMENTARA		NOMOR		DAFTAR TJALON TETAP		KETERA- NGAN
Urut	Tjalon	Nama Lengkap		Urut	Tjalon	Nama Lengkap		
17.	17.	Din Ramli Ruhnussa B.A.		17.	17.	Nurhillauddin		
18.	18.	Nur Hillauddin		18.	18.	Drs. R. Junus Rachman		
19.	19.	Drs. Junus Rachman		19.	19.	Abdullah Achmad		
20.	20.	Abdullah Achmad		20.	20.	Sjarief Husin B.A.		
21.	21.	Sjarief Husin B.A.		21.	21.	Achmad Kurdi Hamzah		
22.	22.	Achmad Kurdi Hamzah		22.	22.	Aburaerah Saleh		
23.	23.	Aburaerah Saleh		23.	23.	Rachman Sadili B.A.		
24.	24.	Rachman Sadili B.A.		24.	24.	Daud Harris Anwar		
25.	25.	Daud Harris Anwar		25.	25.	S. Karim D.T.		
26.	26.	S. Karim D.T.		26.	26.	Abd. Halim Rachman		
27.	27.	Abd. Halim Rachman		27.	27.	A. Rojani B. A.		
28.	28.	A. Rojani B. A.		28.	28.	Hadji Sulaiman Hamzah		
29.	29.	Hadji Sulaiman Hamzah		29.	29.	Achmad Hilmany Ishak		
30.	30.	Achmad Hilmany Ishak		30.	30.	Lalu Muhammad Imam Sjaf'ie		
31.	31.	Lalu Muhammad Imam Sjaf'ie		31.	31.	Ahmad Isa Saad		
32.	32.	Ahmad Isa Saad		32.	32.	M. Sjarif Loebis		
33.	33.	M. Sjarif Loebis		33.	33.	Mas Admoprawiro		
34.	34.	Mas Admoprawiro		34.	34.	M.A. Otto bin Wala		
35.	35.	M.A. Otto bin Wala		35.	35.	Omang Komaruddin A.F.		
36.	36.	Omang Komaruddin A.F.		36.	36.	H. Alijudin Hasan Sjuritaga		

NOMOR		DAFTAR TJALON SEMENTARA	NOMOR		DAFTAR TJALON TETAP	KETERA- NGAN
Urut	Tjalon	Nama Lengkap	Urut	Tjalon	Nama Lengkap	
37.	37.	H. Alijuddin Hasan Sjuralaga	37.	37.	Muhammad Saleh Tare	
38.	38.	Muhammad Saleh Tare				

Djakarta, 20 April 1971.

PANITIA PENELITIAN DAERAH
D.C.I. DJAKARTA

K e t u a,

ttid.

(SANTOSA WIWOHO S.H.)

Sekretaris,

ttid.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO, M.Sc.)

**R E S U M E : HASIL PENELITIAN TJALON ANGGOTA
D.P.R.D. DCI DJAKARTA
PARTAI IP-KI**

NOMOR		DAFTAR TJALON SEMENTARA	NOMOR		DAFTAR TJALON TETAP	KETERA- NGAN
Urut	Tjalon	Nama Lengkap	Urut	Tjalon	Nama Lengkap	
1.	1.	Erwin Baharuddin	1.	1.	Erwin Baharuddin	Tjalon Se- mentara No. 35 ditijoret dari penja- lonan kare- na tidak memperoleh idjin Instansi.
2.	2.	Abdullah Effendi	2.	2.	Abdullah Effendi	
3.	3.	J.L.L. Taulu	3.	3.	J.L.L. Taulu	
4.	4.	Indra Zahari	4.	4.	Indra Zahari	Perubahan No- mor urut atas pemintan Partai jps.
5.	5.	R. Rustob L. Tobing	5.	5.	R. Rustob L. Tobing	
6.	6.	M. Umar Hutapea	6.	6.	M. Umar Hutapea	
7.	7.	Asmuni	7.	7.	Linom Tjik Agus S.H.	Perubahan No- mor urut atas pemintan Partai jps.
8.	8.	Bagindo Sihombing B.A.	8.	8.	Hadji Mohamad Duardja	
9.	9.	Abdul Rachman Jani	9.	9.	M. Achjar Arief	
10.	10.	Pahala T. Tampubolon	10.	10.	Sarn Sabarudin Rimon	Perubahan No- mor urut atas pemintan Partai jps.
11.	11.	M. Rawi Thambrin	11.	11.	Bagindo Sihombing B.A.	
12.	12.	Ramdani Saetan	12.	12.	Abdul Rachman Jani	
13.	13.	Badrus Hasan	13.	13.	Pahala T. Tampubolon	Perubahan No- mor urut atas pemintan Partai jps.
14.	14.	Totong Basie	14.	14.	M. Rawi Thambrin	
15.	15.	Effendi Saperin	15.	15.	Hadji Bustarni	
16.	16.	R. Suryanata	16.	16.	Soepoe	Perubahan No- mor urut atas pemintan Partai jps.
17.	17.	Ali Djunaidi	17.	17.	Asmuni	

NOMOR		DAFTAR TJALON SEMENTARA	NOMOR		DAFTAR TJALON TETAP	KETERA- NGAN
Urut	Tjalon	Nama Lengkap	Urut	Tjalon	Nama Lengkap	
18.	18.	Chuck Zacharias	18.	18.	Badrus Hasan	Keterangan nomor 10 Keputusan Laksusda Djaya.
19.	19.	Zainuddin Chandra	19.	19.	Totong Basrie	
20.	20.	Hadji Mohamed Duardja	20.	20.	Effendi Saperin	
21.	21.	Hadji Bustam	21.	21.	R. Suriyanata	
22.	22.	Linom Tjik Agus S.H.	22.	22.	Chuck Zacharias Edison Malesy	
23.	23.	Muchamad Djoli	23.	23.	Ali Djunaidi	
24.	24.	Abdul Satar	24.	24.	Zainuddin Chandra	
25.	25.	Aru Susasri Nasution	25.	25.	Ramdani Saeran	
26.	26.	Achmad Nasution	26.	26.	Muchamad Djoli	
27.	27.	Willem Lampus	27.	27.	Abdul Satar	
28.	28.	Dain Harun	28.	28.	Aru Susasri Nasution	
29.	29.	Idris Soedirman	29.	29.	Achmad Nasution	
30.	30.	Drs. Noor Achari	30.	30.	H. Effendi A.	
31.	31.	Hasany Shanora	31.	31.	Dain Harun	
32.	32.	Drs. Ek. Ibrahim Abdur- rachim Effendi	32.	32.	Idris Soedirman	
33.	33.	Chan Patimura	33.	33.	Drs. Noor Achari	
34.	34.	Slamet S. B.Sc.	34.	34.	Hasany Shanora	
35.	35.	Agus Soedarno	35.	35.	Drs.Ek. Ibrahim Abdur- rachim Effendi	
36.	36.	Firman Sinaga	36.	36.	Chan Patimura	

NOMOR		DAFTAR TJALON SEMENTARA	NOMOR		DAFTAR TJALON TETAP	KETERA- NGAN
Urut	Tjalon	Nama Lengkap	Urut	Tjalon	Nama Lengkap	
37.	37.	Brisih Sinaga	37.	37.	Firman Sinaga	
38.	38.	Wagimin Saring	38.	38.	Brisih Sinaga	
39.	39.	Rd. S. Pietro	39.	39.	Wagimin Saring	
40.	40.	Soepoe	40.	40.	Rd. S. Pietro	
41.	41.	Baginda Bustami	41.	41.	Slamet S. B.Sc.	
42.	42.	Mohd. Nurdin Bin Sjech Ibrahim	42.	42.	Baginda Bustami	
43.	43.	Sardjono	43.	43.	Mohd. Nurdin Bin Sjech Ibrahim	
44.	44.	Denny Sjamsuddin	44.	44.	Sardjono	
45.	45.	M. Achjar Arief	45.	45.	Denny Sjamsuddin	
46.	46.	Drs. Sahat Maruli Asi Siregar	46.	46.	Marodjahan Simandjuntak	
47.	47.	Juadia Matondang	47.	47.	Drs. Sahat Maruli Asi Siregar	
48.	48.	Marodjahan Simandjuntak	48.	48.	Juadia Matondang	
49.	49.	M.E. Sambas Kartawidjaja	49.	49.	M.E. Sambas Kartawidjaja	
50.	50.	R. Hadi Soeprapto	50.	50.	R. Hadi Soeprapto	

NOMOR	DAFTAR TJALON SEMENTARA		NOMOR		DAFTAR TJALON TETAP	KETERA- NGAN
	Urut	Tjalon	Nama Lengkap	Urut	Tjalon	Nama Lengkap
51.	51.	H. Effendi A.	51.	51.	Willem Lampus	
52.	52.	Jimmy Thema Soeradinata	52.	52.	J.S. Thema	
53.	53.	Sam Sabaruddin Rimon	53.	53.	Achmad B.	
			54.	54.	Harold Sondakh	

Djakarta, 20 April 1971.

PANITIA PENELITIAN DAERAH
D.C.I. DJAKARTA

Ketua,

Sekretaris,

ttd.

ttd.

((SANTOSA WIWOHO S.H.))

((SOETJIPTO WIROSARDJONO, M.Sc.))

**LEMBARAN DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

1971

No. 36

No. 0347/III/2/1971.

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH, DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

tentang

**PENGESAHAN DAFTAR TJALON TETAP, UNTUK KEANGGOTAAN
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH TINGKAT I
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA PEMILIHAN
DAERAH, DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA;**

- Membatja kembali** : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Daerah Chusus Ibukota Djakarta tanggal 14 Maret 1971 No. 0225/III/2/1971 tentang Pengesahan Daftar Tjalon Sementara untuk Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Tingkat I Daerah Chusus Ibukota Djakarta;
- Menimbang** : Bahwa sebagai tindak landjut ketentuan pasal 52 ajat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970, perlu segera mengesahkan Daftar Tjalon Tetap untuk pemilihan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat I Daerah Chusus Ibukota Djakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 10 Tahun 1964 tentang Penegasan Djakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969;

3. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1961 jo. Undang-undang No. 5 Tahun 1969;
4. Undang-undang No. 15 Tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970;
5. Undang-undang No. 16 Tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah No. Tahun 1970;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1970 jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1970;

Mendengar : 1. Hasil penelitian Panitia Peneliti Daerah Daerah Khusus Ibukota Djakarta;

2. Hasil penelitian Team Peneliti Laksus Kopkamtibda Djaya;

3. Hasil Rapat Panitia Pemilihan Daerah Daerah Khusus Ibukota Djakarta, tanggal 20 April 1971.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Mengesahkan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tjalon Tetap untuk pemilihan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Daerah Khusus Ibukota Djakarta.

II. Segala sesuatu akan diperbaiki/disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekurangan/kekeliruan tentang isi Surat Keputusan ini.

III. Mengumumkan Daftar Tjalon Tetap sebagaimana dimaksud dalam ad. I diatas dimasing-masing Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah, Panitia Pemilihan Kota, Panitia Pemungutan Suara, dan ditempat-tempat lain dalam Wilayah Ibukota Djakarta sesuai dengan ketentuan pasal 51 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970.

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Djakarta,
Pada tanggal : 20 April 1971.**

**GOVERNOR HEAD OF REGION/CHIEF
REGIONAL ELECTION COMMITTEE
REGIONAL SPECIAL CAPITAL CITY OF JAKARTA,**

ttd.

(ALI SADIKIN)

Letnan Jenderal KKO.

Djakarta, 25 April 1971,

**Pd. SEKRETARIS DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA.**

ttd.

DJUMADJITIN S.H.

11-11-2013

[illegible]

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH KHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13 Tlp.: 53418 – DJAKARTA

Nomor : 0378/III/2/1971. Jakarta, 24 April 1971.
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Daftar Tjalon Tetap
Anggota DPRD DCI Jakarta.

Kepada Jth.:

Pimpinan Wilayah Papol/Golkar
Wilayah D.C.I. Jakarta
di

DJAKARTA.-

Bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Jakarta setelah mempertimbangkan :

1. Usul-usul/Protes-protes/Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Papol/Golkar Tingkat DCI Jakarta serta perorangan dan organisasi lainnya terhadap Daftar Tjalon Sementara Anggota DPRD Tingkat I DCI Jakarta yang telah diumumkan dari tanggal 14 Maret s/d 13 April 1971 yang lalu.
2. Hasil penelitian kembali terhadap persyaratan-persyaratan teknis administratif dari tiap-tiap Tjalon, baik yang namanya telah tertantum maupun yang belum dalam Daftar Tjalon Sementara, oleh Panitia Peneliti Daerah DCI Jakarta sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang ada.
3. Hasil penelitian kembali terhadap persyaratan politis ideologis dari Tjalon-tjalon yang namanya tertantum maupun belum dalam Daftar Tjalon Sementara oleh Team Peneliti Laksusda Djaya sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kopkamtib; telah memutuskan susunan Daftar Tjalon Tetap sebagaimana tertantum dalam lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta tanggal 20 April 1971 No. 0347/III/2/1971 yang bersama ini kami lampirkan.

Sesuai dengan jadwal, Daftar Tjalon Tetap tersebut telah disahkan pada tanggal 20 April 1971 dan sedjak itu tidak dapat menampung usul-usul perobahan lagi.

Demikian untuk Saudara ketahui.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH D.C.I. DJAKARTA**

t.t.d.

(ALI SADIKIN)
Letnan Djenderal KKo.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri/Ketua L.P.U.
 2. Laksus Pangkoptibda Djaya,
 3. Kadapol Metro Djaya,
 4. Kepala Direktorat I/Pemerintahan,
 5. Kepala Direktorat VII,
 6. Arsip.
-

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418 – JAKARTA

**SAMBUTAN : Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia
Pemilihan Daerah D.C.I. Jakarta pada
upatjara pengesahan Daftar Tjalon
Tetap untuk Pemilihan Keanggotaan
D.P.R.D. Tingkat I D.C.I. Jakarta
tanggal 20 April 1971 di City-Hall
DCI Jakarta.**

Saudara-saudara Para Anggota PPD DCI Jakarta,

Saudara-saudara Panitia Peneliti,

Dan Para Hadirin yang kami hormati,

Hari ini merupakan satu langkah penyelesaian dari satu tahap dalam persiapan Pemilihan Umum, yaitu dengan telah disahkannya Daftar Tjalon Tetap untuk Keanggotaan DPRD Tingkat I DCI Jakarta.

Dapat berhasilnya disusun Daftar Tjalon Tetap ini merupakan usaha-usaha yang maksimal yang telah dilakukan antara aparatatur Pemilu dan pengertian yang baik dengan semua pihak termasuk usaha dari Team Peneliti Laksus Kopkamtibda Djaya, Panitia Peneliti Daerah DCI Jakarta, para Parpol/Golkar wilayah DCI Jakarta serta masyarakat umum/penduduk DCI Jakarta. Penyelesaian tahap pentjalonan telah dapat ditjapai dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada serta dijadwal yang telah ditetapkan. Keadaan seperti ini sungguh membesarkan hati dan merupakan tanda-tanda baik serta usaha-usaha dari keseluruhan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum 1971. Untuk itu kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sepenuhnya serta kesungguhan dan ketetapan hati para aparat Pemilu dalam menyelesaikan sebagian dari tugas operasional Pemilu ini kami utjapkan terima kasih.

Saudara-saudara sekalian,

Tahap berikutnya dari persiapan Pemilu ini yaitu masa kampanye dan Pemungutan Suara akan merupakan tugas-tugas yang lebih berat yang harus kita hadapi. Oleh karena tahap tersebut merupakan puntjak dari seluruh kegiatan dalam penyelenggara Pemilihan Umum, baik dilihat dari kepentingan pihak Partai Politik dan Golkar, maupun dari masyarakat pemilih sendiri. Oleh

karena itu kegiatan-kegiatan berikut ini harus lebih diintensifkan. Kami selaku pimpinan Pemerintahan Daerah dan pimpinan Panitia Pemilihan Daerah ingin mengulangi untuk sekian kalinya pesan kepada seluruh Partai Politik dan Golkar serta masyarakat pemilih di daerah DCI Jakarta untuk setjara tertib melaksanakan tahapan-tahapan berikutnya itu sedemikian rupa, sehingga suhu dan stabilitas politik yang hingga sampai saat ini telah dapat kita pertahankan dengan baik, supaya tetap diusahakan agar terjamin kemantapannya hingga selesai Pemungutan Suara nanti.

Sebagaimana diketahui masa kampanye akan dimulai pada tanggal 27 April 1971 yang akan datang dimulai jam 00.00 dan akan berakhir tanggal 25 Juni 1971 jam 24.00. Selama 60 hari tersebut semua Parpol dan Golkar mendapat kesempatan yang sama untuk menggunakan waktu tersebut untuk berkampanye baik dalam bentuk kampanye langsung rapat-rapat, pertunjukan-pertunjukan, pawai maupun berbentuk tulisan seperti pamflet-pamflet, spanduk-spanduk dan visualisasi lainnya. Untuk itu agar ketertiban dan keamanan serta kebersihan dan keindahan perlu pula diperhatikan, persjaraan-persjaraan untuk berkampanye sebagaimana yang ditetapkan baik dalam perundang-undangan, peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan lainnya harus ditaati dan mendapat pengawasan seperlunya. Ketentuan tersebut tidak mengurangi bantuan Pemerintah Daerah yang dapat diberikan dalam batas yang memungkinkan kepada para Parpol dan Golkar yang turut Pemilu ini.

Kepada masyarakat/penduduk DCI Jakarta pun kami serukan agar turut bersama-sama mensukseskan Pemilu ini, yaitu agar tujuan untuk mentjapai sasaran tetap tegaknya Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mewujudkan tjita-tjita perjuangan Orde Baru dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

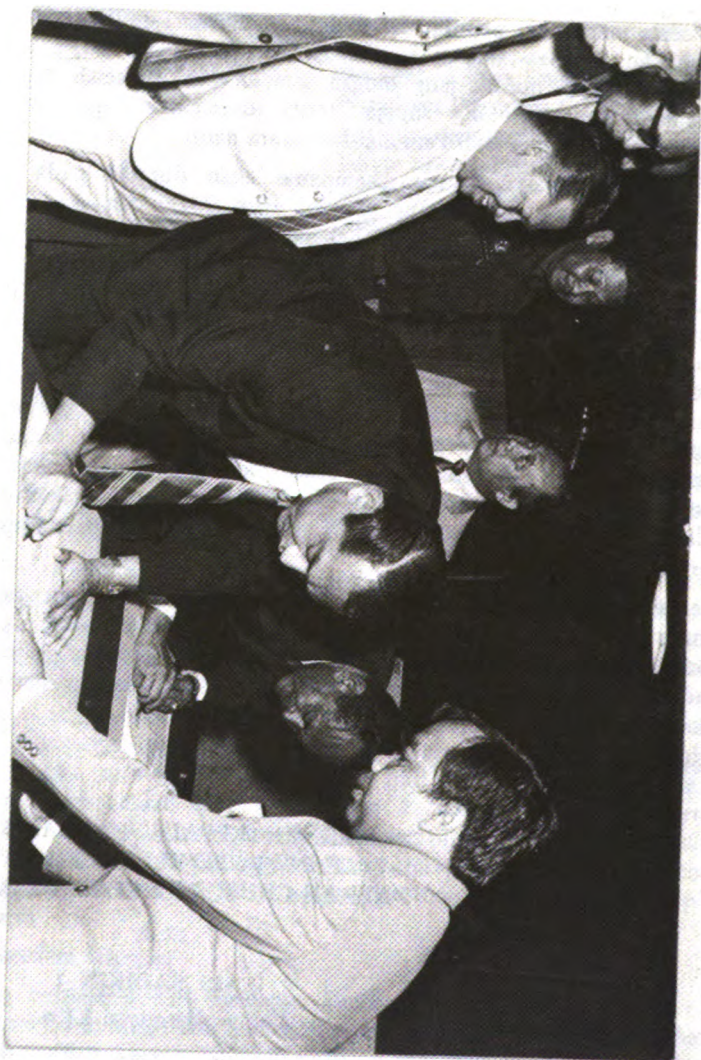
Sekian dan terima kasih.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

t.t.d.

(ALI SADIKN)

Letnan Djenderal KKo.



Upajara penanda-tanganan Daftar Tjalon Tetap oleh Ketua P.P.D. Tingkat I D.C.I. Djakarta.



**Para Anggota P.P.D. D.C.I. Djakarta membubuhkan tanda tangan
pada Daftar Tjalon Tetap.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA**

**SAMBUTAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
PADA PERTEMUAN ANTAR APARAT PE-
MILIHAN DAERAH BADAN PENGAMAN
PEMILU DAN PARPOL/GOLKAR TANGGAL
3 MARET 1971.**

Saudara Pimpinan Partai Politik, Golongan Karya,
Saudara Panglima Daerah Militer V/Djaja, Wakilnja,
Saudara Panglima Daerah Kepolisian VII/Djakarta, Wakilnja,
Saudara-saudara sekalian,

Pagi hari ini adalah hari kesempatan jang kedua dimana antara Panitia Pemilihan Umum Daerah dan Saudara-saudara Pimpinan Parpol/Golkar, bertemu dalam satu medja untuk membitjarkan pelaksanaan Pemilihan Umum, dan kali ini ditambah kehadirannja unsur-unsur Badan Pengamanan Pemilu Daerah Djakarta.

Sedjak pertemuan kita jang lalu banjak sudah kita kerdjakan dalam kita menghadapi PEMILU tahun 1971 jang akan datang. Banjak sudah energie kita tjurahkan untuk kelantjaran persiapan jang perlu kita adakan. Komunikasi dalam bentuknja pertemuan dan atau konsultasi antar aparat PEMILU dengan Parpol/Golkar antar aparat PEMILU dengan Badan Pengaman PEMILU tidak pernah mengalami kesulitan. Pendek kata sampai saat ini nampak kelantjaran segala sesuatunja. Untuk kesemua ini kami selaku Ketua Panitia Pemilihan Daerah menjatakan terima kasih kami sedalam-dalamnja atas pentjurahan tenaga jang telah Saudara-saudara berikan.

Saudara-saudara sekalian,

Saat ini kita berada dalam fase pentjalonan dan sementara menunggu pengumuman resmi tentang tjalon-tjalon kita untuk anggota D.P.R. dan D.P.R.D. dari Lembaga Pemilihan Umum setjara luas dan effectief. Untuk kemudian kita memasuki fase kampanye. Segala sesuatu mengenai penyelenggaraan kampanye baik etika/tata krama, pembatasan waktu telah diatur oleh Pemerintah dan nanti akan dikemukakan oleh pemitjara-pemitjara jang akan menjusul.

Namun setjara umum hingga saat ini masa kampanye Pemilihan Umum belum dimulai. Panitia Pemilihan Daerah mengharapkan agar partai politik/golkar sudah mengadakan rapat-rapat intern baik untuk kesiap siagaan dirinja maupun untuk mempersiapkan massa anggautanja untuk terdjun dalam gelanggang Pemilihan Umum.

Menggembirakan sekali bahwa didalam Daerah Pemilihan Djakarta Raya usaha-usaha untuk menghindarkan agar suhu politik masa dekat Pemilihan Umum ini diredakan/didinginkan, telah sedemikian djauhnya sehingga jang muntjul dipermukaan bukannya pertentangan politik/ideologi melainkan ketjenderungan sikap untuk:

- menjatukan suara (stembus accord) seperti diusulkan oleh Partai KATHOLIK dengan P.N.I.
- mempersatukan kekuatan-kekuatan partai politik dalam satu wadah untuk mentjapai „tata permainan jang baik”,

semuanja ini menggambarkan bahwa ideologi atau politik sudah tidak ditampikan kedepan melainkan keinginan untuk berada dalam satu medja kerdja.

Suasana jang demikian inilah, jang tidak sadja diharapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah, tidak sadja diharapkan oleh Pemerintah Daerah tetapi djuga segenap peserta jang ambil bagian dalam Pemilihan Umum, jaitu Rakjat sendiri.

Saudara-saudara sekalian,

Seperti telah disampaikan dalam progress repport Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta Raya didepan briefing masalah pentjalonan tanggal 15 Djanuari jang lalu maka baik administratif maupun keamanan dan apalagi politis sama sekali sudah siap untuk digerakkan dan memasuki hari Pemilihan Umum.

Selisih-selisih pendapat terutama jang terdjadi antara partai-partai politik dengan Panitia Pemilihan Daerah setelah pertemuan bulan Desember jang lalu, telah bisa diatasi berkat adanya saling pengertian saling kesediaan untuk tidak mempertentangkan persoalan-persoalan jang tidak prinsip, karena lahirmja kesadaran bahwa untuk penjelenggaraan Pemilihan Umum itu harus ditebus dengan dana dan tenaga seluruh nation jang tidak ketjil.

Kesadaran inilah jang telah membimbing kita sekalian sehingga tidak terlalu pagi untuk berkejakinan bahwa dalam masa kampanye maupun pada hari Pemilihan Umum nanti didaerah Ibukota akan terdjamin ketertiban, ketenangan dan keamanan.

Saudara-saudara sekalian,

Keinginan untuk tertjiptanja suasana jang tetap harmonis antara kekuatan-kekuatan sosial politik disatu pihak, keinginan daripada pemerintah agar penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat berdjalan lantjar dipihak jang lain mendorong suatu sikap untuk memberikan fasilitas atau sarana jang sekalipun ketjil/tak berarti, namun betapapun ia terasa diperlukan dalam waktu dekat mendjelang Pemilihan Umum, sebuah mobil/kendaraan bermotor diserahkan hari ini kepada parpol/golkar kiranja tergolong dalam pengertian fasilitas atau sarana diatas.

Pemberian kendaraan bermotor kepada partai-partai politik dan golongan karya ini adalah sedjalan dengan kebidaksanaan Pemerintah Pusat beberapa bulan jang lalu, jang djuga telah memberikan kendaraan bermotor kepada partai dan golongan karya ditingkat pusat. Pemberian ini mungkin ketjil bagi sesuatu kekuatan sosial politik, tetapi bagi Pemerintah dalam satu djumlah jang besar barang tentu merupakan satu djumlah jang tjukup berat.

Ia bisa ditafsirkan sebagai suatu hadiah. Tetapi harus diingat dipihak jang lain ia bisa ditafsirkan bahwa itu adalah menundjukkan dan ingin menggugah demokrasi jang mahal harganja. Ia bisa berupa hadiah, tetapi bisa pula merupakan satu sarana untuk menggugah tekad bersama membangkitkan semangat djuang mendirikan satu Negara jang demokratis.

Tidak bisa diartikan lain. Satu kerangka demokrasi jang sudah mendjadi ikrar bersama disaat kita mendirikan Negara ini memang harus ditebus dengan harga jang mahal.

Inilah kehendak itu. Terserah kepada kesediaan kita masing-masing mengartikannja pemberian ini.

Saudara-saudara sekalian,

Marilah kita isi kemerdekaan ini dengan semangat jang ditundjukkan oleh hikmah daripada penyelenggaraan Pemilihan Umum ini. Betapa besar korbanan jang harus diberikan oleh rakjat untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum ini.

Maka itu terdjadi kewadajiban kita bersama untuk tetap bersatu hati dan bersatu tekad sekalipun nanti dalam Pemilihan Umum kita bisa tidak bersatu dalam menusuk tanda gambar.

Sekian dan terima kasih.

GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA,
t. t. d.
(ALI SADIKIN)
Letnan Djenderal KKo.

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 1970
TENTANG
PENJELENGGARAAN KAMPANJE PEMILIHAN UMUM**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai penjeleenggaraan kampanye pemilihan sebagaimana dimaksud BAB VI Undang-undang No. 15 tahun 1969, BAB VI Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 dan BAB VII Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1970.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang No. 15 tahun 1969 (L.N. R.I. Tahun 1969 No. 58 dan T.L.N. R.I. No. 2914);
3. Undang-Undang No. 5/Pnps. tahun 1963;
4. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 (L.N. R.I. tahun 1970 No. 2 dan T.L.N. R.I. No. 2919);
5. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1970 (L.N. R.I. tahun 1970 No. 4 dan T.L.N. R.I. No. 2921);

Memutuskan :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENJELENGGARAAN KAMPANJE PEMILIHAN UMUM.**

Pasal 1

Jang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dengan :

- (1) Organisasi ialah Organisasi Golongan Politik dan Golongan Karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) dan pasal 3 (1) Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1970.
- (2) Kesatuan Masyarakat ialah Kesatuan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1970.

- (3) Kampanje Pemilihan Umum ialah segala kegiatan Organisasi serta anggota-anggotanya dan kesatuan Masyarakat serta anggota-anggotanya untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya dengan bentuk antara lain:
 - a. rapat-rapat umum;
 - b. pawai dan demonstrasi;
 - c. keramaian umum, pesta umum dan pertemuan umum;
 - d. penjiaran melalui R.R.I./T.V. R.I.;
 - e. penjebaran kepada umum dan/atau penempelan ditempat-tempat umum poster, plakat, surat-surat selebaran, slide, spanduk, slogan, sembojan, brosur, tulisan-tulisan, lukisan-lukisan dan penggunaan mass-media serta kegiatan penjebaran alat peragaan lainnya;
 - f. segala matjam dan bentuk pertundjukan umum.
- (4) Penguasa jang berwenang ialah serendah-rendahnya Kepala Kepolisian Tingkat Ketjamatan dan dalam hal disuatu wilayah belum ada Kantor Kepolisian ialah Kepala Pemerintahan tingkat Ketjamatan.

Pasal 2

Djangka waktu untuk kampanje pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan Presiden ini adalah 60 (enam puluh) hari dan berachir 7 (tudjuh) hari sebelum pemungutan suara diadakan.

Pasal 3

Setelah nama dan tanda gambar Organisasi diumumkan dalam Berita Negara, Organisasi dapat:

- a. memasangnya didepan Kantor Organisasi jang bersangkutan baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah;
- b. memuatkannya dalam surat-surat kabar atau penerbitan-penerbitan lainnya jang telah mendapat idzin penerbitan;
- c. menjebarkannya kepada anggota-anggotanya.

Pasal 4

Mereka jang tidak diberi hak dipilih menurut ketentuan Undang-Undang atau jang hak dipilihnya telah ditjabut oleh Keputusan Pengadilan jang tidak dapat diubah lagi atau jang terkena ketentuan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dilarang:

- a. hadir dan ikut aktif dalam kegiatan kampanje;
- b. hadir dan diperkenalkan atau diperlihatkan setjara menjolok kepada umum dalam kampanje.

Pasal 5

Anggota-anggota Badan-badan Pelaksana/Penjelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam BAB II Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 tidak dibenarkan ikut serta mengadakan kegiatan kampanye pemilihan umum.

Pasal 6

- (1) Setiap kali Organisasi akan menjelenggarakan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden ini, selambat-lambatnja 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) djam sebelumnja wadajib memberitahukan maksudnja setjara tertulis kepada Penguasa jang berwenang.
- (2) Kampanje pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden ini dapat diselenggarakan setelah Organisasi memperoleh surat keterangan dari Penguasa jang berwenang sebagai tanda bahwa Organisasi jang bersangkutan telah memberitahukan maksudnja.
- (3) Dalam mengeluarkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini Penguasa jang berwenang memperhatikan ketentuan jang tertjantum dalam pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970.
- (4) Menteri Penerangan mengatur lebih landjut penggunaan Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia dalam rangka kampanje pemilihan umum.

Pasal 7

Ketjuali petugas keamanan semua jang menghadiri kampanje pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) huruf a, b, c dan f Keputusan Presiden ini dilarang membawa segala matjam bentuk sendjata dan/atau alat peledak.

Pasal 8

- (1) Untuk mendjaga ketertiban, Kepala Pemerintahan tingkat Ketjamatan dapat mengeluarkan ketentuan umum tentang penempatan alat-alat peraga kampanje sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) huruf e Keputusan Presiden ini.
- (2) Selambat-lambatnja 3 (tiga) hari setelah djangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan Presiden ini semua alat peraga kampanje pemilihan umum sebagaimana tertjantum dalam ayat (1) pasal ini dalam djarak radius dua ratus meter dari tempat Pemungutan Suara sudah dihapus dan dihilangkan oleh Organisasi jang bersangkutan.

Pasal 9

Gedung-gedung Pemerintah dan tempat-tempat ibadah dilarang dipergunakan untuk kampanye pemilihan umum.

Pasal 10

Gedung yang mempunyai status hukum sebagai wilayah Negara Republik Indonesia diluar Negeri dapat dipergunakan sebagai tempat kampanye pemilihan umum dengan idzin Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan.

Pasal 11

Penguasa yang berwenang membubarkan, menghentikan atau mengambil tindakan lain terhadap kampanye yang diadakan oleh sesuatu Organisasi, apabila ternyata tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

- a. pasal-pasal Keputusan Presiden ini;
- b. pasal 55 dan 56 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970.

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih landjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 27 Oktober 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

No. 39/LPU/TAHUN 1971

TENTANG

**PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 1970
TENTANG PENJELENGGARAAN KAMPANJE PEMILIHAN UMUM.**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM**

Menimbang :

Bahwa dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan kampanye pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 tahun 1970 tentang penyelenggaraan kampanye pemilihan umum;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 15 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2914);
2. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 No. 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2919);
3. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 No. 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2921);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 tahun 1970.

Memutuskan :

Menetapkan :

**PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 1970 TENTANG PENJELENGGARAAN KAMPANJE
PEMILIHAN UMUM.**

Pasal 1

Dalam penyelenggaraan kampanye pemilihan oleh Organisasi dimaksud Keputusan Presiden No. 68 tahun 1970 pasal 1 ayat (3) baik berupa utjapan, tulisan, maupun penjampaian maksud kampanye dalam bentuk

apapun dan alat peraga audio-visuil lain, harus diutamakan thema suatu kebulatan, bahwa ikut sertanja dalam Pemilihan Umum adalah suatu tekad dari Organisasi dalam mengamalkan suatu konsensus jang sudah mendjadi konsensus Nasional jaitu:

- a. mendjamin keutuhan, kesatuan dan persatuan Bangsa jang timbul atas dasar landasan Pantja Sila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. mendjamin suksesnja perdjuaan Orde Baru jaitu tetap tegaknja Pantja Sila dan dipertahankannja Undang-undang Dasar 1945.
- c. bersama-sama Organisasi lain mewujudkan penjusunan tata kehidupan jang didjiwai semangat tjita-tjita Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. memenuhi isi hati nurani rakjat dalam melanjutkan perdjuaan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan jang bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945 guna memenuhi dan mengemban Amanat Penderitaan Rakjat;
- e. melaksanakan hasil-hasil Sidang M.P.R.S. dan segala Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. serta segala peraturan-perundangan jang berlaku;
- f. usaha melaksanakan strategi dan program Nasional jang haluannja telah digariskan oleh M.P.R.S. serta program Nasional itu tidak lain adalah Pantja Krida Kabinet Pembangunan;
- g. memelihara dan memantapkan stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik;
- h. mewujudkan kehidupan sosial jang harmonis, tertib dan aman;
- i. mewujudkan kehidupan demokrasi jang:
 1. memadukan kebebasan dan tanggung-djawab terhadap kepentingan umum, terhadap Bangsa dan Negara;
 2. tumbuh diatas landasan Pantja Sila dan Undang-undang Dasar 1945;
 3. mendjamin semua kepentingan golongan dalam masjarakat;
 4. mendukung, mengarahkan dan mengamankan Pembangunan.

Pasal 2

Kampanje jang diselenggarakan oleh Organisasi dimaksud Keputusan Presiden No. 68 tahun 1970 pasal 1 ayat (3) baik berupa utjapan, tulisan maupun penjampaian maksud kampanje dalam bentuk apapun dan alat peraga audio-visuil lain, adalah merupakan:

- a. penerangan dan pendjelasan bagi masjarakat bahwa:
 1. Pantja Sila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah sudah mendjadi milik Bangsa Indonesia dan ukuran mawas diri dalam melaksanakan koreksi total dan prinsipiil.
 2. Pantja Sila adalah:
 - (i) dasar, falsafah dan ideologi Negara R.I.;
 - (ii) landasan perdjuaan dan ideologi Bangsa Indonesia;

- (iii) moralitas dan kepribadian Bangsa Indonesia;
 - (iv) kompas perjalanannya, dasar dan arah dari pada tjita-tjita Bangsa Indonesia;
 - (v) alat pemersatu Bangsa Indonesia dan pedoman bagi penyelesaian masalah Nasional.
3. tatanan seluruh kehidupan Rakjat, Bangsa dan Negara serta kekuatan Bangsa perlu disusun dan diletakkan kembali kepada kemurnian pelaksanaan Pantja Sila dan Undang-undang Dasar 1945, sehingga tertjapai ketahanan Nasional.
 4. penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah sebagai suatu wahana untuk memantapkan Demokrasi Pantja Sila dalam rangka pelaksanaan Pantja Krida Kabinet Pembangunan.
 5. semua penduduk pemilih yang tergabung maupun tidak tergabung dalam organisasi-organisasi partai politik, golongan karya dan massa lainnya adalah anggota dari suatu keluarga besar Bangsa Indonesia yang diikat dalam perjuangannya dan tjita-tjita Bangsa yang satu dan yang bernaung didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: ke-Tuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - b. bimbingan dan adakan kepada seluruh penduduk pemilih untuk mensukseskan tahap-tahap Pembangunan yang telah dirintis oleh Pembangunan Lima Tahun yang ke-I sekarang ini.
 - c. penjelasan mengenai tata dan tjara Organisasi melaksanakan program Nasional yang mendukung/memperkuat dan menjamin pelaksanaan Pantja Krida Kabinet Pembangunan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kampanye oleh masing-masing Organisasi diusahakan selalu dalam kewaspadaan dan dihindari agar:

- a. tidak merupakan peluang bagi tampilnya kembali ex P.K.I. dan pendukung-pendukung gelapnya.
- b. tidak merupakan peluang bagi tampilnya kembali bagi kegiatan dan kekuatan Orde Lama;
- c. tidak merupakan peluang bagi masuknya subversi asing;
- d. tidak merupakan peluang dan penunggangannya oleh suatu golongan yang bermaksud merongrong Pantja Sila dengan menariknya kearah ekstrimitas;

- e. tidak merupakan peluang dan penunggangannya oleh suatu golongan yang ingin berusaha menarik keuntungan bagi golongannya sendiri;
- f. tidak merupakan arena pertentangan dari organisasi dan anggota masyarakat, baik psikis maupun fisik.
- g. tidak merupakan kesempatan bagi suatu golongan untuk menarik keuntungan bagi golongannya sendiri dengan menondjolkan pribadi almarhum Dr. Ir. Soekarno sebagai Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia;

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan kampanye pemilihan oleh Organisasi yang bersangkutan, maka dalam rangka mengamalkan Pantja Sila dan Undang-undang Dasar 1945 dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 15 tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 serta Keputusan Presiden No. 68 tahun 1970, dilarang untuk:

- a. mengadakan segala macam kegiatan, uttapan, tulisan, gambaran, dan lukisan yang mengandung serta memberikan kesan orang banyak yang melihat dan mendengar bahwa semua kegiatan, uttapan, tulisan, gambaran dan lukisan dimaksud bersifat dan bermaksud meniadakan dan atau mendiskreditkan Pantja Sila dan Undang-undang Dasar 1945 baik keseluruhan maupun sebagian dengan jalan:
 - 1. memperbandingkan Pantja Sila dengan tuduhan lebih merendahkan Pantja Sila sebagai landasan dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia dengan suatu ideologi lain atau Negara lain;
 - 2. memperbandingkan Undang-undang Dasar 1945 dengan Undang-undang Dasar lain yang telah pernah berlaku diwilayah dan bagi Republik Indonesia;
 - 3. mempropagandakan Ideologi lain daripada Pantja Sila.
- b. mengadakan penafsiran terhadap Pantja Sila serta pembukaan dan batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 dengan penafsiran lain yang berbeda dengan:
 - 1. Pendjelasan tentang Undang-undang Dasar Negara Indonesia, bahwa:
 - (i) Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis;
 - (ii) Negara:
 - (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diterima aliran pengertian Negara persatuan negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya;

Negara mengatasi segala faham-faham golongan/perseorangan, Negara menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya;

- (b) hendaknja mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat;
- (c) jang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakjatan dan permusjawaratan perwakilan.

Sistim Negara jang terbentuk harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan atas permusjawaratan perwakilan;.

- (d) berdasarkan atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab. Undang-undang Dasar harus mengandung inti jang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penjelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan jang luhur dan memegang teguh tjita-tjita moral rakyat jang luhur.

- (iii) Undang-undang Dasar mentjiptakan pokok-pokok pikiran jang terkandung dalam „pembukaan” dalam pasal-pasalnja dan pokok-pokok pikiran ini mewujudkan tjita-tjita hukum jang menguasai hukum dasar Negara, Undang-undang Dasar mentjiptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnja.

2. Ketetapan M.P.R.S. No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia, dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia (lampiran), jang menyebutkan antara lain bahwa: Pantja Sila: sumber dari segala sumber hukum adalah pandangan hidup, kesadaran dan tjita-tjita hukum serta tjita-tjita moral jang meliputi suasana kedjiwaan dan watak dari Rakyat Negara jang bersangkutan.

Sumber dari tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan tjita-tjita hukum serta tjita-tjita moral jang meliputi suasana kedjiwaan serta watak dari Bangsa Indonesia ialah tjita-tjita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan keagamaan sebagai pengedjawantahan daripada Budi Nurani Manusia.

Adapun perwujudan sumber daripada segala sumber hukum bagi Republik Indonesia itu adalah:

- (i) Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
- (ii) Dekrit 5 Juli 1959.
- (iii) Undang-undang Dasar Proklamasi.
- (iv) Surat Perintah 11 Maret 1966.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan kampanye pemilihan oleh Organisasi yang bersangkutan maka dalam rangka usaha penyelenggaraan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, dilarang untuk setjara umum mengadakan segala kegiatan, utjapan, tulisan, gambaran dan lukisan yang dapat memberikan kesan pada orang banyak bahwa kegiatan, utjapan, tulisan, gambaran dan lukisan tersebut dapat dirasakan dan mengandung maksud:

- a. sebagai usaha:
 1. mendjelekkan atau menghina suatu agama, menghina Tuhan, Nabi dan Kitab Sutji masing-masing agama.
 2. anti agama lain.
 3. mengaburkan dan atau memberikan ketidak pastian djaminan akan kebebasan mendjalankan dan menganut agama.
- b. intimidasi tekanan atau antjaman dari suatu kelompok dan atau golongan terhadap kelompok dan golongan lain.
- c. yang berakibat merusak dan mengganggu persatuan dan kesatuan Nasional.
- d. yang berakibat dapat menimbulkan perasaan kesukuan dan atau anti kesukuan, berdasarkan kedaerahan serta rasialisme.
- e. mengadakan suatu penilaian dan atau mendjelek-djelekkan:
 1. terhadap Organisasi lain,
 2. dengan memperbandingkan Organisasi dengan Organisasi lain,
 3. terhadap pandji-pandji, bendera, vandel dan tanda gambar dari suatu Organisasi.
- f. mengadakan suatu usaha dan penilaian memperketjil serta meremehkan terhadap:
 1. kebidjaksanaan Pemerintah,
 2. pedjabat Pemerintah baik sipil maupun militer dan diri serta perseorangan dari pedjabat dimaksud.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan kampanye pemilihan oleh Organisasi yang bersangkutan, dilarang untuk:

1. mengadakan utjapan, tulisan, gambaran dan lukisan yang memberi kesan bahwa utjapan, tulisan, gambaran dan lukisan tersebut mengandung maksud dan dirasakan sebagai suatu perasaan permusuhan, kebentjiaan, penghinaan dan menjinggung kehormatan terhadap:
 - a. Presiden/Kepala Negara sebagaimana dimaksud dalam Buku Kedua Bab II pasal 134, 136 dan 137 K.U.H.P.

- b. Lembaga Negara dari Negara Republik Indonesia dan atau pejabat-pejabatnya sebagaimana dimaksud dalam Buku Kedua Bab V pasal 154 dan 155 K.U.H.P. serta Buku Kedua Bab VIII pasal 207 dan 208 K.U.H.P.; serta Buku Kedua Bab XVI pasal 316 K.U.H.P.
 - c. Golongan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Buku Kedua Bab V pasal 156 dan 157 K.U.H.P.
 - d. Perorangan (individu) sebagaimana dimaksud pada Buku Kedua Bab XVI pasal 310 dan 315 K.U.H.P.
 - e. Kepala Negara dan Wakil Negara dari Negara sahabat sebagaimana dimaksud dalam Buku Kedua Bab III pasal 142, 143 dan 144 K.U.H.P.
2. Setjara umum menjampaikan dan atau menjiarkan suatu maksud dan perasaan permusuhan, kebentjiaan, penghinaan dan menjinggung kehormatan dalam bentuk utjapan, tulisan, gambaran dan lukisan sebagaimana dimaksud pada angka 1 pasal ini.

Pasal 7

Djangka waktu kampanye pemilihan umum dimaksud pada pasal 2 Keputusan Presiden No. 68 tahun 1970 ialah pada hari tanggal 27 April 1971 djam 00.00 W.I. dan berachir pada tanggal 25 Djuni 1971 djam 24.00 W.I.

Pasal 8

- (1) Penjelenggaraan kampanye pemilihan umum berbentuk rapat, keramaian, pesta, pertemuan dan pertundjukan yang bersifat umum oleh Organisasi yang bersangkutan baru dapat diadakan sesudah dipenuhi persjaraan dari ketentuan dimaksud pada pasal 6 Keputusan Presiden No. 68 tahun 1970, jaitu:
 - a. pemberitahuan tertulis kepada penguasa yang berwenang tentang akan diadakan kampanye;
 - b. ada keterangan dari penguasa yang berwenang yang mengizinkan diadakan kampanye oleh Organisasi yang bersangkutan.
- (2) Kampanye sebagai dimaksud dalam ajat (1) tersebut diatas penjelenggaraannya dilarang untuk:
 - a. bersamaan waktunya pada satu tempat;
 - b. didalam suatu bangunan yang berdekatan dalam djarak 500 (lima ratus) meter;
 - c. ditempat terbuka yang berdekatan dalam djarak 1 (satu) kilometer.
- (3) Penjelenggaraan kampanye pemilihan umum berbentuk pawai dan atau demonstrasi dalam arti pengumpulan massa oleh Organisasi yang bersangkutan baru dapat diadakan sesudah dipenuhi persjaraan dari

ketentuan dimaksud pada pasal 6 Keputusan Presiden No. 68 tahun 1970, jaitu:

- a. pemberitahuan tertulis kepada penguasa yang berwenang tentang akan diadakan pawai dan atau demonstrasi dalam arti pengumpulan massa kampanye pemilihan;
- b. ada keterangan dari penguasa yang berwenang yang mengizinkan diadakan pawai dan atau demonstrasi dalam arti pengumpulan massa kampanye pemilihan;
dan penjelenggaraannya oleh masing-masing Organisasi pada hari dan tanggal yang tidak bersamaan.

Pasal 9

- (1) Penguasa yang berwenang ialah serendah-rendahnya Kepala Kepolisian Tingkat Ketjamatan dan dalam hal suatu wilayah belum ada Kantor Kepolisian ialah Kepala Pemerintahan tingkat Ketjamatan.
- (2) Penguasa dimaksud (1) diatas untuk wilayahnya dapat menetapkan:
 - a. tempat-tempat umum yang disediakan bagi pemasangan dan pemantjangan alat peraga kampanye pemilihan yang berupa: tanda-tanda gambar, poster, plakat, tulisan dan papan-papan gambar masing-masing Organisasi yang bersangkutan.
 - b. Tata-tjara pemasangan alat peraga kampanye pemilihan oleh Organisasi yang bersangkutan yang berupa spanduk, poster, plakat, lukisan, papan-papan gambar dan slides, pada tempat-tempat hiburan dan atau rekreasi serta didalam bangunan/gedung-gedung hiburan.
 - c. tata-tjara memanggil dan atau mengumpulkan orang bagi keperluan rapat, keramaian, pesta, pertemuan dan pertundjukan yang bersifat umum.

Pasal 10

Pemasangan dan atau pemantjangan alat peraga pemilihan berupa selebaran, spanduk, plakat, lukisan, papan-papan gambar oleh Organisasi yang bersangkutan pada bangunan, halaman dan atau pekarangan milik perseorangan harus sepengetahuan dan seizin dari penghuni dan atau pemilik bangunan, halaman atau pekarangan dimaksud.

Pasal 11

Penyelenggaraan kampanye pemilihan oleh Organisasi yang bersangkutan dalam bentuk siaran dimaksud Keputusan Presiden No. 68 tahun 1970 pasal 1 ayat (3) huruf d diadakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Menteri Penerangan dengan Surat-surat Keputusan Menteri

Penerangan tanggal 11 Djanuari 1971 Nomor 04/KEP/MENPEN/1971 tentang ketentuan-ketentuan siaran kampanye pemilihan umum melalui siaran T.V.-R.I. dan Nomor 05/KEP/MENPEN/1971 tentang ketentuan-ketentuan siaran kampanye pemilihan umum melalui siaran R.R.I.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan : Djakarta
Pada tanggal : 22 April 1971.**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

t.t.d.

AMIRMACHMUD

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

No. Da.3/1/38/1970.

tentang

**PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 1970 CHUSUSNJA TENTANG LARANGAN
PENGUNAAN GEDUNG-GEDUNG PEMERINTAH DAN TEMPAT
IBADAH UNTUK MELAKUKAN KAMPANJE PEMILIHAN UMUM**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

Menimbang :

1. Bahwa dipandang perlu untuk melaksanakan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 1970, tentang Penjelenggaraan Kampanje Pemilihan Umum;
2. Bahwa untuk mendjaga ketertiban pelaksanaan kampanje Pemilihan Umum di Wilayah Daerah Chusus Ibukota Djakarta, maka perlu melaksanakan larangan penggunaan Gedung-gedung Pemerintah dan Tempat-tempat Ibadah untuk kampanje Pemilihan Umum;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 10 Tahun 1964 tentang Penegasan Djakarta sebagai Ibukota Negara R.I.;
2. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah jo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969;
3. Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Chusus Ibukota Djakarta jo. Undang-undang No. 5 Tahun 1969;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 1970 tentang Penjelenggaraan Kampanje Pemilihan Umum;

Mendengar :

Pertimbangan MUSPIDA Daerah Chusus Ibukota Djakarta;

Memutuskan :

Menetapkan :

**LARANGAN PENGUNAAN GEDUNG-GEDUNG PEMERINTAH DAN
TEMPAT-TEMPAT IBADAH UNTUK KAMPANJE PEMILIHAN UMUM
DIWILAJAH DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA.**

Pasal 1.

Penguasa yang berwenang memberikan izin Kampanje Pemilihan Umum, diwajibkan memperingatkan Organisasi-organisasi yang mengajukan permohonan izin Kampanje untuk menggunakan Gedung-gedung Pemerintah dan Tempat-tempat Ibadah.

Pasal 2.

Dilarang menggunakan Gedung-gedung Pemerintah dan Tempat-tempat Ibadah untuk melakukan Kampanje Pemilihan Umum.

Pasal 3.

Semua unsur MUSPIDA agar mengamankan pelaksanaan larangan ini.

Pasal 4.

Penguasa-penguasa Gedung-gedung Pemerintah dan Tempat-tempat Ibadah dilarang memberikan izin/memindjamkan/memberikan Gedung-gedung Pemerintah dan/atau tempat-tempat Ibadah untuk mempergunakan sebagai tempat untuk melakukan Kampanje Pemilihan Umum.

Pasal 5.

Barang siapa tidak mentaati perintah/larangan/peringatan yang dikeluarkan oleh yang tersebut dalam pasal 3 keputusan ini, maka penguasa berwenang membubarkan, menghentikan atau mengambil tindakan dan dapat dituntut berdasarkan Pasal 216 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 6.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 28 Nopember 1970.

**GOVERNOR HEAD OF THE SPECIAL REGION OF
JAKARTA,**
t.t.d.

(ALI SADIKIN)

Letnan Jenderal KKo.

**SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan
kepada Jth.:**

1. Presiden R.I.
2. Menteri Dalam Negeri (5x),
3. Inspektur Djenderal Dalam Negeri (2x),
4. Para Wakil Kepala Daerah,
5. Para Wakil Pimpinan DPRD-GR,
6. Pangdam V Djaja,
7. Ka Dak Metro Djaja,
8. Pangdaeral III,
9. Pangkodau V,
10. Djaksa Tinggi DCI Djakarta,
11. Ketua Pengadilan Negeri Djakarta,
12. Para Anggota B.P.H.,
13. Sekda,
14. Ketua BP. BPP.
15. Para Kepala Inspektorat/Direktorat/Biro,
16. Para Walikota,
17. Para Kepala Dinas/Kantor Dalam lingkungan Pemerintah
DCI Djakarta,
18. Djapen/Humas DCI Djakarta.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418 – DJAKARTA

Nomor : 1062/III/1/1970. Djakarta, 26 Desember 1970.
Lampiran : —.
Perihal : Inventarisasi tempat
untuk ber-Kampanje.

Kepada Jth.

1. Para WALIKOTA/KETUA P.P. KOTA
2. Para TJAMAT/KETUA P.P.S.
se DCI Djakarta
di

DJAKARTA.—

Sehubungan dengan Keputusan Presiden No. 68 tahun 1970 tentang penjelenggaraan Kampanje Pemilihan Umum dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta No. Da.3/1/38/1970 tanggal 28 Nopember 1970 tentang Pelarangan penggunaan gedung-gedung Pemerintah dan tempat Ibadah untuk melakukan Kampanje Pemilihan Umum, agar para Parpol dan Golkar yang akan menjelenggarakan Kampanje Pemilihan Umum tersebut pada waktunja tersedia tempat-tempat/lapangan-lapangan yang diperuntukkan, kiranya diharapkan agar Saudara dapat segera menjampaikan kepada kami Daftar inventaris tempat-tempat dimaksud dengan mengisi daftar isian terlampir.

Sebagaimana diketahui, masa Kampanje tersebut akan dimulai dari tanggal 29 April 1971 dan berakhir pada tanggal 27 Djuni 1971, diharapkan sebelumnja sudah ada konsultasi setempat antara Parpol/Golkar, instansi Pemerintah lainnja dengan Saudara untuk menentukan giliran masing-masing Parpol/Golkar untuk menggunakan tempat kampanje tersebut.

Daftar inventarisasi dari dijadwal penggunaan tempat-tempat tersebut hendaknya sudah kami terima selambat-lambatnja tanggal 15 Djanuari 1971 yang akan datang.

Demikianlah agar dimaklumi.

PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

TEMBUSAN:

- Jth. 1. Panitia Pemilihan
Indonesia,
2. B.P.H./Bidang Pemerintahan,
3. Sekda DCI Djakarta,
4. Direktorat I/Pemerintahan,
5. Arsip.

Sekretaris,

t.t.d.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.).

P.P.S. Kecamatan :
 Wilayah :

**DAFTAR dan DIADWAL: Penggunaan tempat-tempat/lapangan
 untuk Kampanye oleh Parpol-parpol/Golkar.**

No.	Denis tempat/ lapangan	Alamat ter- letak di	Tanggal dan jadwal penggunaan oleh masing-masing Parpol/Colkar *)										Keterangan
			Kato- lik	PSII	N.U.	Par- musi	Gol- kar	Par- Kindo	Mur- ba	PNI	PERTI	IPKI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													*) Kalau belum dapat diisi, diso- songkan dulu, kalau mungkin usulkan tanggal kongkrit atas konsultasi de- ngan parpol in- stansi pemerin- tah setempat.

Dibuat rangkap 6, masing-masing untuk :

1. P.P. Kota
2. P.P.D. D.C.I.,
3. Laksus Kopkamtibda Djaya,
4. Direktorat I/Pemerintahan,
5. Direktorat II/Kamtib D.C.I.,
6. Arsip.

Djakarta, ... 1971.

P.P.S. Kecamatan

Ketua,

(.....)

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA
PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

No.: 0372/III/2/1971.

TENTANG

**TATA TERTIB, DJADWAL, WAKTU DAN TEMPAT KAMPANJE
BAGI PARTAI POLITIK/GOLONGAN KARYA JANG TURUT
DALAM PEMILIHAN UMUM 1971 DIWILAJAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA PEMILIHAN
DAERAH/DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.**

Menimbang :

1. Bahwa sebagai tindak landjut dari Surat Keputusan Presiden R.I. No. 68 Tahun 1970 tentang Penjelenggaraan Kampanje Pemilihan Umum, dipandang perlu untuk menetapkan kebidjaksanaan tentang tata tertib, djadwal waktu dan tempat kampanje bagi partai politik/Golongan Karya jang turut dalam Pemilihan Umum 1971 diwilajah DCI Djakarta;
2. Bahwa untuk maksud tersebut pada ad. 1 perhu diambil kebidjaksanaan mengenai bentuk dan sarana Kampanje djangka waktu dan tempat kampanje, pemberitahuan kampanje, larangan-larangan dan ketentuan pidana kampanje.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 10 Tahun 1964 tentang Penegasan Djakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969 tentang pentjabutan Undang-undang No. 18 Tahun 1965;
3. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Chusus Ibukota Djakarta jo. Undang-undang No. 5 Tahun 1969 tentang pentjabutan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961;
4. Undang-undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat jo. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat;

5. Surat Keputusan Presiden R.I. No. 68 Tahun 1970 tentang Penjelenggaraan Kampanje Pemilihan Umum;
6. Surat Keputusan Presiden R.I. No. 19 Tahun 1969 tentang pembentukan komando Operasi pemulihan Keamanan dan ketertiban/Kopkamtib.;
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 5 Tahun 1970 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Tingkat II jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1970;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah No. Da.3/1/38/1970 tanggal 28 Nopember 1970 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1970, chususnja tentang Larangan Penggunaan Gedung-gedung Pemerintah dan Tempat Ibadah untuk melakukan Kampanje Pemilihan Umum;
9. Pola Kebidjaksanaan Kopkamtib mengenai Pengamanan Pemilu tahun 1971 No. Kep. 008/Kopkam/2/1970;
10. R.O. Laksus Pangkopkamtib Djaya No. R.O-002-2/P.C./11/1970;
11. Instruksi Kadapol Metro Djaya No. Pol.3/1/Instr/Dak-Metro Djaya/1971 tanggal 1 Pebruari 1971 tentang Pedjabat-pedjabat jang diberi Wewenang Menandatangani Dan Tata Tjara Memberi Surat Keterangan Dalam Rangka Kampanje Pemilihan Umum.

Mendengar :

Rapat Koordinasi Pengamanan Pemilu pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 1971;

Memutuskan :

Menetapkan :

**TATA TERTIB, DJADWAL WAKTU DAN TEMPAT KAMPANJE
BAGI PARTAI POLITIK/GOLONGAN KARYA JANG TURUT
DALAM PEMILIHAN UMUM 1971 DI WILAJAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.**

BENTUK DAN SARANA KAMPANJE

Pasal 1.

- (1) Dengan menundjuk Pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden No. 68 Tahun 1970, Kampanje Pemilihan Umum ialah segala kegiatan organisasi serta anggota-anggotanja dan untuk memperoleh suara sebanjak-banjaknja dengan bentuk antara lain:

- a. Rapat-rapat Umum,
 - b. Pawai dan Demonstrasi,
 - c. Keramaian umum, pesta umum dan pertemuan umum,
 - d. Penjarian melalui RRI/TV-RI khusus untuk tingkat Pimpinan Pusat,
 - e. Penyebaran, Pemasangan atau penempelan ditempat-tempat umum, poster, plakat, surat-surat selebaran, slide, spanduk, slogan, sembojan, brosur, tulisan-tulisan, lukisan-lukisan dan penggunaan mass-media serta kegiatan penyebaran alat peraga lainnya.
 - f. Pemasangan gapura-gapura di tempat-tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum, kebersihan dan keindahan kota.
 - g. Pemasangan bendera-bendera, umbul-umbul, lambang-lambang/ simbol-simbol organisasi Partai Politik/Golongan Karya.
- (2). Dalam masa kampanye selama 60 (enam puluh) hari semua Organisasi Partai Politik dan Golongan Karya dapat mengadakan kegiatan-kegiatan seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini yang pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan ketertiban umum, kelantjaran lalu-lintas, keserasian, keindahan dan kebersihan kota serta dengan tidak merusak sarana kota yang telah ada.
 - (3). Penempelan tanda-tanda gambar Partai Politik/Golongan Karya dalam masa berkampanye, dapat dilakukan ditempat-tempat sebagai berikut:
 - a. Tempat-tempat yang ditunjuk atau disediakan oleh Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Kota atau Tjamat/Ketua Panitia Pemungutan Suara setempat.
 - b. Tempat-tempat orang lain atas ijin pemilik/penguasanya.
 - c. Tempat-tempat lain sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum, keindahan dan kebersihan kota.
 - (4). Dalam masa kampanye terutama pada rapat-rapat umum, dapat dilepaskan balon-balon tanda gambar Partai Politik/Golongan Karya yang bersangkutan, penyebaran pamflet/tanda gambar, seruan-seruan dan sebagainya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang tertera dalam pasal 9 Keppres 68/70 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta Nomor: Da.3/1/38/1970, serta pasal 5 ayat (b) Instruksi Kadapol Metro Djaya No. Pol.: 3/1/Instr/Dak. Metro Djaya/1971.
 - (5). Dengan menunjuk pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 68/1970 maka untuk menjaga ketertiban umum Tjamat/Ketua Panitia Pemungutan Suara dapat mengeluarkan ketentuan tentang penempatan alat-alat peragaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 3 huruf (e) Keputusan Presiden Nomor 68/1970.

- (6). Selambat-lambatnja 3 (tiga) hari setelah djangka waktu kampanye Pemilihan Umum Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 68/1970 selesai maka kepada Organisasi Partai Politik dan Golongan Karya jang bersangkutan diwajibkan untuk membersihkan semua alat peraga kampanye Pemilihan Umum jang dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 68/1970 dalam djarak radius 200 (dua ratus) meter dari tempat Pemungutan Suara (T.P.S.). Apabila organisasi jang bersangkutan tidak/belum membersihkan pada saat jang telah ditetapkan itu, Tjamat/Ketua PPS. wadajib membersihkan semua alat peraga kampanye tersebut.
- (7). Dalam masa kampanye apabila Partai Politik/Golongan Karya akan mengadakan pawai, maka jang bersangkutan harus memberitahukan kepada Komdak Metro Djaya dengan memberitahukan Route-route pawai jang akan dilalui, bentuk-bentuk peralatan-peralatan jang dipertundjukkan/dibawa dalam pawai tersebut serta matjam dan djumlah peserta pawai.

DJANGKA WAKTU DAN TEMPAT KAMPANJE.

Pasal 2.

- (1). Djangka waktu untuk kampanye Pemilihan Umum ialah 60 (enam puluh) hari dan berachir 7 (tudjuh) hari sebelum pemungutan suara jaitu dimulai dari tanggal 27 April 1971 sampai dengan 25 Djuni 1971.
- (2). Tempat dan waktu kampanye ditetapkan bergilir jaitu untuk satu wilayah Walikota pada hari jang sama dapat berkampanje 2 (dua) Organisasi Partai Politik/Golongan Karya, pada tempat jang telah disediakan.
- (3). Ketentuan tentang tempat, pembagian waktu dan djadwal kampanye tersebut ditetapkan seperti tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- (4). Organisasi Politik/Golongan Karya dapat mengajukan tempat lain untuk kampanye Pemilihan Umum jang tidak terdapat dalam daftar jang tertjantum dalam lampiran pada Surat Keputusan ini kepada Ketua Panitia Pemilihan Kota (Walikota) setempat. Ketua Panitia Pemilihan Kota (Walikota) dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat dapat memberikan persetudjuan atau penolakannja terhadap tempat jang diadakan oleh Parpol/Golkar tersebut. Dalam hal terdjadi penolakan, Walikota dapat menundjuk tempat lain sebagai gantinya jang dapat disetudjui oleh organisasi jang bersangkutan.

- (5). Apabila didalam penyelenggaraan Kampanje tidak terdapat persesuaian/ keserasian antara Partai Politik/Golongan Karya dalam penentuan tempat dan waktu kegiatan kampanje atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Kampanje Pemilihan Umum di Wilayah-wilayah maka keputusan terakhir diberikan oleh Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Kota setempat.
- (6). Kampanje Pemilihan Umum oleh Partai Politik dan Golongan Karya yang berupa Rapat-rapat Umum, pawai dan demonstrasi, keramaian umum, pesta umum dan pertemuan umum dilapangan terbuka dapat diadakan pada siang hari.
- (7). Kampanje Pemilihan Umum oleh Partai Politik dan Golongan Karya yang berupa rapat umum, keramaian umum, pesta umum dan pertemuan umum ditempat tertutup dapat diadakan baik siang maupun malam hari.
- (8). Pada tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kampanje Pemilihan Umum yang berupa rapat-rapat umum, keramaian umum, pesta umum dan pertunjukan umum ditempat terbuka dapat diadakan pada malam hari sampai dengan jam 20.00 WIB.

PEMBERITAHUAN KAMPANJE

Pasal 3.

- (1). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang telah ada, maka organisasi Politik/Golongan Karya yang akan melakukan kampanje Pemilihan Umum dalam waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam harus mengajukan pemberitahuan kepada Kadapol Metro Djaya/Komando Keamanan Langsung, dengan disertai keterangan-keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Instruksi Kadapol Metro Djaya No. Pol. 3/I//Inst/Dak. Metro Djaya/1971, yaitu :
 - a. Daftar Susunan Pengurus Organisasi.
 - b. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga.
 - c. Daftar Susunan Panitia Penyelenggara serta penanggung jawab.
 - d. Atjara.
 - e. Keterangan mengenai alat-alat peraga yang dipergunakan seperti spanduk-spanduk, slide, tanda gambar, serta tulisan-tulisan yang tertera dalam spanduk, poster, pamflet, selebaran dan lain-lain.
 - f. Pembitahuan-pembitahuan untuk rapat/pertemuan.
 - g. Route pawai bila mengadakan pawai.
 - h. Pelaku-pelaku dalam pertunjukan umum.
 - i. Surat izin penggunaan tempat (lapangan, gedung) yang dipergunakan apabila tempat tersebut milik perorangan dari pemilik/pengurus/ instansi yang bersangkutan.

- (2). Penjampaian Daftar Susunan Pengurus Organisasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disampaikan oleh Organisasi Politik/Golongan Karya sekali (een malig) sadja jang berlaku untuk selama periode kampanye kepada Pemerintah Daerah dan aparatur keamanan melalui PPD DCI Djakarta.
- (3). Kesempatan untuk berkampanje bagi para Organisasi Politik dan Golongan Karya di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Djakarta diatur setjara kolektif oleh PPD DCI Djakarta dan diteruskan kepada pimpinan Wilayahnja.
Kesempatan ini berlaku untuk selama berkampanje jaitu 60 (enampuluh) hari sebagai dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) bagi Organisasi Partai Politik dan Golongan Karya jang bersangkutan termasuk Tjabang dan Ranting-rantingnja.

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 4.

- (1). Dengan menundjuk pasal 5 Keputusan Presiden No. 68/1970 maka Anggota-anggota Badan-badan Pelaksana/Penjelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Bab II Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970 tidak dibenarkan ikut serta kegiatan Kampanje Pemilihan Umum, adalah:
 - a. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Pemilihan Umum.
 - b. Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum dan Anggota-anggota Sekretaris Lembaga Pemilihan Umum.
 - c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Daerah Daerah Khusus Ibukota Djakarta, Panitia Pemilihan Kota, Panitia Pemungutan Suara dan Koordinator Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
 - d. Sekretaris dan Anggota Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Daerah Khusus Ibukota Djakarta, Panitia Pemilihan Kota, Panitia Pemungutan Suara dan Koordinator Kelompok Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara.
- (2). Ketjuali petugas Keamanan, semua jang menghadiri kampanje Pemilihan Umum sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) huruf a, b, c, dan f Keputusan Presiden No. 68/1970 dilarang:
 1. Berpakaian Seragam setjara demonstratif.
 2. Mengadakan pasukan pengamanan sendiri diluar pengamanan jang dilakukan oleh ABRI.
 3. Membawa segala matjam bentuk sendjata dan atau alat peledak.

- (3). Dengan menundjuk pasal 9 Keputusan Presiden No. 68/1970 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah/ Daerah Khusus Ibukota Djakarta Nomor: Da.3/1/38/1970 gedung-gedung Pemerintah dan Tempat-tempat Ibadah dilarang dipergunakan untuk tempat kampanye Pemilihan Umum.
Larangan-larangan jang termaktub dalam pasal 55, 56, Peraturan Pemerintah Nomor 1 serta pasal 4, 5, 7, 9, Keputusan Presiden nomor 68/1970 termasuk dalam ketentuan ini.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 5.

Atas pelanggaran terhadap ketentuan jang disebut dalam Surat Keputusan ini, maka Penguasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 untuk ini ditundjuk Kadapol Komdak Metro Djaya atau pedjabat jang ditundjuk berwenang membubarkan, menghentikan atau mengambil tindakan dan dapat dituntut berdasarkan Pasal 216 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. pasal 27 Undang-undang Nomor 15/1969.

PENUTUP

Pasal 6.

- (1). Hal-hal lain jang belum tjukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih landjut setjara tersendiri oleh Gubernur Kepala Daerah/ Ketua PPD DCI Djakarta.
- (2). Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 21 April 1971.

GOVERNUR KEPALA DAERAH/KETUA
PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA,

t.t.d.

(ALI SADIKIN)

Letnan Djenderal KKo.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Jth.:

1. **Menteri Dalam Negeri/Ketua L.P.U.**
2. **Menteri Hankam,**
3. **Para Wakil Kepala Daerah DCI Djakarta,**
4. **Para Wakil Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta,**
5. **Para Anggota Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta,**
6. **Para Anggota Muspida DCI Djakarta,**
7. **Para Anggota B.P.H.**
8. **Sekda/Ass. Sekda,**
9. **Ketua BP. BPP.**
10. **Para Kepala Inspektorat/Direktorat/Biro.**
11. **Para Walikota.**
12. **Para Kepala Dinas/Kantor dalam lingkungan DCI Djakarta,**
13. **Para Pimpinan Parpol dan Golongan Karya di Wilayah DCI Djakarta,**
14. **Para Tjamat.**
15. **Para Lurah.**

**DJADWAL DAN TEMPAT-TEMPAT KAMPANJE PEMILIHAN UMUM 1971
BAGI PARPOL/GOLKAR DI WILAJAH D.C.I. DJAKARTA**

WILAJAH Ketjamatan	27-4-71	28-4-71	29-4-71	30-4-71	1-5-71	2-5-71
DJAKARTA PUSAT						
1. G a m b i r	Parmusi + P.S.I.I.	P.N.I. + Murba	Parkindo+ Katolik	IP - KI Golkar	N.U. + Perti	Parmusi + P.S.I.I.
2. Sawah Besar	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	Parmusi
3. Kemajoran	Parmusi	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	P.S.I.I.
4. S e n e n	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	Parmusi
5. Tjemp. Putih	Parmusi	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	P.S.I.I.
6. Menteng	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	Parmusi
7. Tanah Abang	Parmusi	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	P.S.I.I.
DJAKARTA UTARA						
1. Pulau Seribu	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi	Murba
2. Pendjaringan	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.
3. Tandjung Priok	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi	Murba
4. Kodja	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.
DJAKARTA BARAT						
1. Tjengkareng	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo
2. Gr. Petamburan	Parkindo	Golkar	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik
3. Tamansari	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo
4. Tambora	Katolik + Parkindo	IP - KI + Golkar	N.U. Perti	Parmusi P.S.I.I.	P.N.I. + Murba	Parkindo + Katolik
5. Kebon Djeruk	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo
DJAKARTA SELATAN						
1. T e b e t	IP - KI	N.U.	Parmusi	P.N.I.	Katolik	Golkar
2. Setiabudi	Golkar	Perti	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	IP - KI
3. Mp. Prapatan	IP - KI	N.U.	Parmusi	P.N.I.	Katolik	Golkar
4. Pasar Minggu	Golkar	Perti	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	IP - KI
5. Kebajoran Lama	IP - KI	N.U.	Parmusi	P.N.I.	Katolik	Golkar
6. Kebajoran Baru	Golkar	Perti	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	IP - KI

WILAJAH Ketjamatan	27-4-71	28-4-71	29-4-71	30-4-71	1-5-71	2-5-71
DJAKARTA TIMUR						
1. Matraman	N.U.	Parmusi	P.N.I.	Katolik	IP - KI	Perti
2. Pulo Gadung	Perti	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	Golkar	N.U.
3. Djatinegara	N.U. + Perti	Parmusi + P.S.I.I.	P.N.I. + Murba	Katolik + Parkindo	IP - KI + Golkar	N.U. + Perti
4. Kramat Djati	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.
5. Pasar Rebo	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo	Golkar	Perti

WILAJAH Ketjamatan	3-5-71	4-5-71	5-5-71	6-5-71	7-5-71	8-5-71
DJAKARTA PUSAT						
1. G a m b i r	P.N.I. Murba	Katolik + Parkindo	IP - KI + Golkar	N.U. + Perti	Parmusi + P.S.I.I.	P.N.I. + Murba
2. Sawah Besar	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	P.S.I.I.	Murba
3. Kemajoran	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	Parmusi	P.N.I.
4. S e n e n	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	P.S.I.I.	Murba
5. Tjemp. Putih	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	Parmusi	P.N.I.
6. Menteng	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	P.S.I.I.	Murba
7. Tanah Abang	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	Parmusi	P.N.I.
DJAKARTA UTARA						
1. Pulau Seribu	Parkindo	Golkar	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik
2. Pendjaringan	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo
3. Tandjung Priok	Parkindo	Golkar	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik
4. K o d j a	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo
DJAKARTA BARAT						
1. Tjengkareng	Golkar	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI
2. Gr. Petamburan	IP - KI	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo	Golkar
3. Tamansari	Golkar	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI
4. Tambora	IP - KI + Golkar	N.U. + Perti	Parmusi + P.S.I.I.	P.N.I. + Murba	Katolik + Parkindo	IP - KI + Golkar
5. Kebon Djeruk	Golkar	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI
DJAKARTA SELATAN						
1. T e b e t	Perti	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	IP - KI	N.U.
2. Setiabudi	N.U.	Parmusi	P.N.I.	Katolik	Golkar	Perti
3. Mp. Prapatan	Perti	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	IP - KI	N.U.
4. Pasar Minggu	N.U.	Parmusi	P.N.I.	Katolik	Golkar	Perti
5. Kebajoran Lama	Perti	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	IP - KI	N.U.
6. Kebajoran Baru	N.U.	Parmusi	P.N.I.	Katolik	Golkar	Perti

WILAJAH Ketjamatan	3-5-71	4-5-71	5-5-71	6-5-71	7-5-71	8-5-71
DJAKARTA TIMUR						
1. Matraman	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	Golkar	N.U.	Parmusi
2. Pulo Gadung	Parmusi	P.N.I.	Katolik	IP - KI	Perti	P.S.I.I.
3. Djatinegara	Parmusi + P.S.I.I.	P.N.I. + Murba	Katolik + Parkindo	IP - KI + Golkar	N.U. + Perti	Parmusi + P.S.I.I.
4. Kramat Djati	Parmusi	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	P.S.I.I.
5. Pasar Rebo	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi

WILAJAH Ketjamatan	9-5-71	10-5-71	11-5-71	12-5-71	13-5-71	14-5-71
DJAKARTA PUSAT						
1. G a m b i r	Katolik + Parkindo	IP - KI + Golkar	N.U. + Perti	Parmusi + P.S.I.I.	P.N.I. + Murba	Katolik + Parkindo
2. Sawah Besar	Parkindo	Golkar	Perti	Parmusi	P.N.I.	Katolik
3. Kemajoran	Katolik	IP - KI	N.U.	P.S.I.I.	Murba	Parkindo
4. S e n e n	Parkindo	Golkar	Perti	Parmusi	P.N.I.	Katolik
5. Tjemp. Putih	Katolik	IP - KI	N.U.	P.S.I.I.	Murba	Parkindo
6. Menteng	Parkindo	Golkar	Perti	Parmusi	P.N.I.	Katolik
7. - Tanah Abang	Katolik	IP - KI	N.U.	P.S.I.I.	Murba	Parkindo
DJAKARTA UTARA						
1. Kepulauan Seribu	IP - KI	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo	Golkar
2. Pendjaringan	Golkar	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI
3. Tandjung Priok	IP - KI	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo	Golkar
4. K o d j a	Golkar	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI
DJAKARTA BARAT						
1. Tjengkareng	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo	Golkar	Perti
2. Gr. Petamburan	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.
3. Tamansari	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo	Golkar	Perti
4. Tambora	N.U. + Perti	Parmusi + P.S.I.	P.N.I. + Murba	Katolik Parkindo	IP - KI Golkar	N.U. + Perti
5. Kebon Djeruk	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo	Golkar	Perti
DJAKARTA SELATAN						
1. T e b e t	Parmusi	P.N.I.	Katolik	Golkar	Perti	P.S.I.I.
2. Setia Budi	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	IP-KI	N.U.	Parmusi
3. Mampang Prapatan	Parmusi	P.N.I.	Katolik	Golkar	Perti	P.S.I.I.
4. Pasar Minggu	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	IP-KI	N.U.	Parmusi
5. Kebajoran Lama	Parmusi	P.N.I.	Katolik	Golkar	Perti	P.S.I.I.
6. Kebajoran Baru	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	IP - KI	N.U.	Parmusi

WILAJAH Ketjamatan	9-5-71	10-5-71	11-5-71	12-5-71	13-5-71	14-5-71
DJAKARTA TIMUR						
1. Matraman	P.N.I.	Katolik	IP - KI	Perti	P.S.I.I.	Murba
2. Pulo Gadung	Murba	Parkindo	Golkar	N.U.	Parmusi	P.N.I.
3. Djatinegara	P.N.I.+ Murba	Katolik + Parkindo	IP - KI + Golkar	N.U. + Perti	P.S.I.I. + Parmusi	P.N.I. + Murba
4. Kramat Djati	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi	Murba
5. Pasar Rebo	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.

WILAJAH Ketjamatan	15-5-71	16-5-71	17-5-71	18-5-71	19-5-71	20-5-71
DJAKARTA PUSAT						
1. G a m b i r	IP - KI + Golkar	N.U.+ Perti	Parmusi + P.S.I.I.	P.N.I. + Murba	Katolik + Parkindo	IP - KI + Golkar
2. Sawah Besar	IP - KI	N.U.	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	Golkar
3. Kemajoran	Golkar	Perti	Parmusi	P.N.I.	Katolik	IP - KI
4. S e n e n	IP - KI	N.U.	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	Golkar
5. Tjempaka Putih	Golkar	Perti	Parmusi	P.N.I.	Katolik	IP - KI
6. Menteng	IP - KI	N.U.	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	Golkar
7. Tanah Abang	Golkar	Perti	Parmusi	P.N.I.	Katolik	IP - KI
DJAKARTA UTARA						
1. Kepulauan Seribu	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.
2. Pendjaringan	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo	Golkar	Perti
3. Tandjung Priok	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.
4. K o d j a	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo	Golkar	Perti
DJAKARTA BARAT						
1. Tjengkareng	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi
2. Gr. Petamburan	Parmusi	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	P.S.I.I.
3. Taman Sari	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi
4. Tambora	Parmusi + P.S.I.I.	Murba + P.N.I.	Katolik + Parkindo	IP - KI + Golkar	N.U. + Perti	P.S.I.I. + Parmusi
5. Kebon Djeruk	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi
DJAKARTA SELATAN						
1. T e b e t	Murba	Parkindo	IP - KI	N.U.	Parmusi	P.N.I.
2. Setiabudi	P.N.I.	Katolik	Golkar	Perti	P.S.I.I.	Murba
3. Mampang Prapatan	Murba	Parkindo	IP - KI	N.U.	Parmusi	P.N.I.
4. Pasar Minggu	P.N.I.	Katolik	Golkar	Perti	P.S.I.I.	Murba
5. Kebajoran Lama	Murba	Parkindo	IP - KI	N.U.	Parmusi	P.N.I.
6. Kebajoran Baru	P.N.I.	Katolik	Golkar	Perti	P.S.I.I.	Murba

WILAJAH Ketjamatan	15-5-71	16-5-71	17-5-71	18-5-71	19-5-71	20-5-71
DJAKARTA TIMUR						
1. Matraman	Parkindo	Golkar	N.U.	Parmusi	P.N.I.	Katolik
2. Pulo Gadung	Katolik	IP - KI	Perti	P.S.I.I.	Murba	Parkindo
3. Djatinegara	Katolik + Parkindo	IP - KI + Golkar	N.U.+ Perti	Parmusi + P.S.I.I.	P.N.I. + Murba	Katolik Parkindo
4. Kramat Djati	Parkindo	Golkar	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik
5. Pasar Rebo	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo

WILAJAH Ketjamatan	21-5-71	22-5-71	23-5-71	24-5-71	25-5-71	26-5-71
DJAKARTA PUSAT						
1. G a m b i r	N.U. + Perti	Parmusi + P.S.I.I.	P.N.I. + Murba	Katolik + Parkindo	IP - KI + Golkar	N.U. + Perti
2. Sawah Besar	Perti	Parmusi	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.
3. Kemajoran	N.U.	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	Golkar	Perti
4. S e n e n	Perti	Parmusi	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.
5. Tjempaka Putih	N.U.	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	Golkar	Perti
6. Menteng	Perti	Parmusi	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.
7. Tanah Abang	N.U.	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	Golkar	Perti
DJAKARTA UTARA						
1. Kepulauan Seribu	Parmusi	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	P.S.I.I.
2. Pendjaringan	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi
3. Tandjung Priok	Parmusi	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	P.S.I.I.
4. K o d j a	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi
DJAKARTA BARAT						
1. Tjengkareng	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.
2. Gr. Petamburan	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi	Murba
3. Taman Sari	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.
4. Tambora	P.N.I. + Murba	Katolik + Parkindo	IP - KI + Golkar	N.U. + Perti	Parmusi + P.S.I.I.	P.N.I. + Murba
5. Kebon Djeruk	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.
DJAKARTA SELATAN						
1. T e b e t	Katolik	Golkar	Perti	P.S.I.I.	Murba	Parkindo
2. Setiabudi	Parkindo	IP - KI	N.U.	Parmusi	P.N.I.	Katolik
3. Mampang Prapatan	Katolik	Golkar	Perti	P.S.I.I.	Murba	Parkindo
4. Pasar Minggu	Parkindo	IP - KI	N.U.	Parmusi	P.N.I.	Katolik
5. Kebajoran Lama	Katolik	Golkar	Perti	P.S.I.I.	Murba	Parkindo
6. Kebajoran Baru	Parkindo	IP - KI	N.U.	Parmusi	P.N.I.	Katolik

WILAJAH Ketjamatan	21-5-71	22-5-71	23-5-71	24-5-71	25-5-71	26-5-71
DJAKARTA TIMUR						
1. Matraman	IP - KI	Perti	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	Golkar
2. Pulo Gadung	Golkar	N.U.	Parmusi	P.N.I.	Katolik	IP - KI
3. Djatinegara	Golkar + IP - KI	Perti + N.U.	P.S.I.I. + Parmusi	P.N.I. + Murba	Parkindo + Katolik	Golkar + IP - KI
4. Kramat Djati	IP - KI	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo	Golkar
5. Pasar Rebo	Golkar	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI

WILAJAH Ketjamatan	27-5-71	28-5-71	29-5-71	30-5-71	31-5-71	1-6-71
DJAKARTA PUSAT						
1. Gambir	Parmusi + P.S.I.I.	P.N.I.+ Murba	Katolik + Parkindo	IP - KI + Golkar	N.U. + Perti	Parmusi + P.S.I.I.
2. Sawah Besar	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	Parmusi
3. Kemajoran	Parmusi	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	P.S.I.I.
4. Senen	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	Parmusi
5. Tjempaka Putih	Parmusi	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	P.S.I.I.
6. Menteng	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	Parmusi
7. Tanah Abang	Parmusi	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	P.S.I.I.
DJAKARTA UTARA						
1. Pulau Seribu	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi	Murba
2. Pendjaringan	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.
3. Tandjung Priok	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi	Murba
4. K o d j a	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.
DJAKARTA BARAT						
1. Tjengkareng	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo
2. Gr. Petamburan	Parkindo	Golkar	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik
3. Taman Sari	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo
4. Tambora	Katolik + Parkindo	IP - KI + Golkar	N.U. + Perti	Parmusi + P.S.I.I.	P.N.I. + Murba	Katolik + Parkindo
5. Kebon Djeruk	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo
DJAKARTA SELATAN						
1. Te b e t	IP - KI	N.U.	Parmusi	P.N.I.	Katolik	Golkar
2. Setiabudi	Golkar	Perti	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	IP - KI
3. Mampang Prapatan	IP - KI	N.U.	Parmusi	P.N.I.	Katolik	Golkar
4. Pasar Minggu	Golkar	Perti	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	IP - KI
5. Kebajoran Lama	IP - KI	N.U.	Parmusi	P.N.I.	Katolik	Golkar
6. Kebajoran Baru	Golkar	Perti	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	IP - KI

WILAJAH Ketjamatan	27-5-71	28-5-71	29-5-71	30-5-71	31-5-71	1-6-71
DJAKARTA TIMUR						
1. Matraman	N.U.	Parmusi	P.N.I.	Katolik	IP - KI	Perti
2. Pulo Gadung	Perti	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	Golkar	N.U.
3. Djatinegara	Perti + N.U.	P.S.I.I. + Parmusi	Murba + P.N.I.	Parkindo + Katolik	IP - KI + Golkar	N.U. + Perti
4. Kramat Djati	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.
5. Pasar Rebo	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo	Golkar	Perti

WILAJAH Ketjamatan	2-6-71	3-6-71	4-6-71	5-6-71	6-6-71	7-6-71
DJAKARTA PUSAT						
1. G a m b i r	P.N.I. + Murba	Katolik + Parkindo	IP - KI + Golkar	N.U. + Perti	Parmusi + P.S.I.I.	P.N.I. + Murba
2. Sawah Besar	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	P.S.I.I.	Murba
3. Kemajoran	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	Parmusi	P.N.I.
4. S e n e n	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	P.S.I.I.	Murba
5. Tjempaka Putih	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	Parmusi	P.N.I.
6. Menteng	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	P.S.I.I.	Murba
7. Tanah Abang	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	Parmusi	P.N.I.
DJAKARTA UTARA						
1. Pulau Seribu	Parkindo	Golkar	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik
2. Pendjaringan	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo
3. Tandjung Priok	Parkindo	Golkar	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik
4. K o d j a	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo
DJAKARTA BARAT						
1. Tjengkareng	Golkar	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI
2. Gr. Petamburan	IP - KI	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo	Golkar
3. Taman Sari	Golkar	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI
4. Tambora	IP - KI + Golkar	N.U. + Perti	Parmusi + P.S.I.I.	Murba + P.N.I.	Katolik + Parkindo	IP - KI + Golkar
5. Kebon Djeruk	Golkar	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI
DJAKARTA SELATAN						
1. T e b e t	Perti	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	IP - KI	N.U.
2. Setiabudi	N.U.	Parmusi	P.N.I.	Katolik	Golkar	Perti
3. Mampang Prapatan	Perti	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	IP - KI	N.U.
4. Pasar Minggu	N.U.	Parmusi	P.N.I.	Katolik	Golkar	Perti
5. Kebajoran Lama	Perti	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	IP - KI	N.U.
6. Kebajoran Baru	N.U.	Parmusi	P.N.I.	Katolik	Golkar	Perti

WILAJAH Ketjamatan	2-6-71	3-6-71	4-6-71	5-6-71	6-6-71	7-6-71
DJAKARTA TIMUR						
1. Matraman	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	Golkar	N.U.	Parmusi
2. Pulo Gadung	Parmusi	P.N.I.	Katolik	IP - KI	Perti	P.S.I.I.
3. Djatinegara	Parmusi + P.S.I.I.	Murba + P.N.I.	Parkindo + Katolik	Golkar + IP - KI	Perti + N.U.	Parmusi + P.S.I.I.
4. Kramat Djati	Parmusi	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	P.S.I.I.
5. Pasar Rebo	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi

WILAJAH Ketjamatan	8-6-71	9-6-71	10-6-71	11-6-71	12-6-71	13-6-71
DJAKARTA PUSAT						
1. G a m b i r	Katolik + Parkindo	IP - KI + Golkar	N.U. + Perti	Parmusi + P.S.I.I.	P.N.I. + Murba	Katolik + Parkindo
2. Sawah Besar	Parkindo	Golkar	Perti	Parmusi	P.N.I.	Katolik
3. Kemajoran	Katolik	IP - KI	N.U.	P.S.I.I.	Murba	Parkindo
4. S c n e n	Parkindo	Golkar	Perti	Parmusi	P.N.I.	Katolik
5. Tjempaka Putih	Katolik	IP - KI	N.U.	P.S.I.I.	Murba	Parkindo
6. Menteng	Parkindo	Golkar	Perti	Parmusi	P.N.I.	Katolik
7. Tanah Abang	Katolik	IP - KI	N.U.	P.S.I.I.	Murba	Parkindo
DJAKARTA UTARA						
1. Pulau Seribu	IP - KI	N.U.	Parmusi	Golkar	Parkindo	Murba
2. Pendjaringan	Golkar	Perti	P.S.I.I.	IP - KI	Katolik	P.N.I.
3. Tandjung Priok	IP - KI	N.U.	Parmusi	Golkar	Parkindo	Murba
4. K o d j a	Golkar	Perti	P.S.I.I.	IP - KI	Katolik	P.N.I.
DJAKARTA BARAT						
1. Tjengkareng	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo	Golkar	Perti
2. Gr. Petamburan	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.
3. Taman Sari	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo	Golkar	Perti
4. Tambora	N.U. + Perti	Parmusi + P.S.I.I.	Murba + P.N.I.	Parkindo + Katolik	Golkar + IP - KI	Perti + N.U.
5. Kebon Djeruk	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo	Golkar	Perti
DJAKARTA SELATAN						
1. T e b e t	Parmusi	P.N.I.	Katolik	Golkar	Perti	P.S.I.I.
2. Setiabudi	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	IP - KI	N.U.	Parmusi
3. Mampang Prapatan	Parmusi	P.N.I.	Katolik	Golkar	Perti	P.S.I.I.
4. Pasar Minggu	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	IP - KI	N.U.	Parmusi
5. Kebjoran Lama	Parmusi	P.N.I.	Katolik	Golkar	Perti	P.S.I.I.
6. Kebjoran Baru	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	IP - KI	N.U.	Parmusi

WILAJAH Ketjamatan	8-6-71	9-6-71	10-6-71	11-6-71	12-6-71	13-6-71
DJAKARTA TIMUR						
1. Matraman	P.N.I.	Katolik	IP - KI	Perti	P.S.I.I.	Murba
2. Pulo Gadung	Murba	Parkindo	Golkar	N.U.	Parmusi	P.N.I.
3. Djatinegara	P.N.I. + Murba	Katolik + Parkindo	IP - KI + Golkar	Perti + N.U.	Parmusi + P.S.I.I.	P.N.I.+ Murba
4. Kramat Djati	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi	Murba
5. Pasar Rebo	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.

WILAJAH Ketjamatan	14-6-71	15-6-71	16-6-71	17-6-71	18-6-71	19-6-71
DJAKARTA PUSAT						
1. G a m b i r	IP - KI + Golkar	N.U. + Perti	Parmusi + P.S.I.I.	P.N.I. + Murba	Katolik + Parkindo	IP - KI + Golkar
2. Sawah Besar	IP - KI	N.U.	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	Golkar
3. Kemajoran	Golkar	Perti	Parmusi	P.N.I.	Katolik	IP - KI
4. S e n e n	IP - KI	N.U.	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	Golkar
5. Tjempaka Putih	Golkar	Perti	Parmusi	P.N.I.	Katolik	IP - KI
6. Menteng	IP - KI	N.U.	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	Golkar
7. Tanah Abang	Golkar	Perti	Parmusi	P.N.I.	Katolik	IP - KI
DJAKARTA UTARA						
1. Kepulauan Seribu	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.
2. Pendjaringan	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo	Golkar	Perti
3. Tandjung Priok	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.
4. K o d j a	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo	Golkar	Perti
DJAKARTA BARAT						
1. Tjengkareng	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi
2. Gr. Petamburan	Parmusi	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	P.S.I.I.
3. Taman Sari	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi
4. Tambora	P.S.I.I. + Parmusi	Murba + P.N.I.	Parkindo + Katolik	Golkar + IP - KI	Perti + N.U.	P.S.I.I. + Parmusi
5. Kebon Djeruk	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	P.S.I.I.
DJAKARTA SELATAN						
1. T e b e t	Murba	Parkindo	IP - KI	N.U.	Parmusi	P.N.I.
2. Setiabudi	P.N.I.	Katolik	Golkar	Perti	P.S.I.I.	Murba
3. Mampang Prapatan	Murba	Parkindo	IP - KI	N.U.	Parmusi	P.N.I.
4. Pasar Minggu	P.N.I.	Katolik	Golkar	Perti	P.S.I.I.	Murba
5. Kebajoran Lama	Murba	Parkindo	IP - KI	N.U.	Parmusi	P.N.I.
6. Kebajoran Baru	P.N.I.	Katolik	Golkar	Perti	P.S.I.I.	Murba

WILAJAH Ketjamatan	14-6-71	15-6-71	16-6-71	17-6-71	18-6-71	19-6-71
DJAKARTA TIMUR						
1. Matraman	Parkindo	Golkar	N.U.	Parmusi	P.N.I.	Katolik
2. Pulo Gadung	Katolik	IP - KI	Perti	P.S.I.I.	Murba	Parkindo
3. Djatinegara	Parkindo + Katolik	Golkar + IP - KI	N.U. + Perti	P.S.I.I. + Parmusi	Murba + P.N.I.	Parkindo + Katolik
4. Kramat Djati	Parkindo	Golkar	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik
5. Pasar Rebo	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo

WILAJAH Ketjamatan	20-6-71	21-6-71	22-6-71	23-6-71	24-6-71	25-6-71
DJAKARTA PUSAT						
1. G a m b i r	N.U. + Perti	Parmusi P.S.I.I.	P.N.I.+ Murba	Katolik + Parkindo	IP - KI + Golkar	N.U. + Perti
2. Sawah Besar	Perti	Parmusi	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.
3. Kemajoran	N.U.	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	Golkar	Perti
4. S e n e n	Perti	Parmusi	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.
5. Tjempaka Putih	N.U.	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	Golkar	Perti
6. M e n t e n g	Perti	Parmusi	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.
7. Tanah Abang	N.U.	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	Golkar	Perti
DJAKARTA UTARA						
1. Kepulauan Seribu	Parmusi	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	P.S.I.I.
2. Pendjaringan	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi
3. Tandjung Priok	Parmusi	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	P.S.I.I.
4. K o d j a	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi
DJAKARTA BARAT						
1. Tjengkareng	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.
2. Gr. Petamburan	P.N.I.	Katolik	IP - KI	N.U.	Parmusi	Murba
3. Taman Sari	Murba	Parkindo	Golkar	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.
4. T a m b o r a	Murba + P.N.I.	Parkindo + Katolik	Golkar + IP - KI	Perti + N.U.	P.S.I.I. + Parmusi	P.N.I. + Murba
5. Kebon Djeruk	P.N.I.	Parkindo	Golkar	Perti	Parmusi	Murba
DJAKARTA SELATAN						
1. T e b e t	Katolik	Golkar	Perti	P.S.I.I.	Murba	Parkindo
2. Setiabudi	Parkindo	IP - KI	N.U.	Parmusi	P.N.I.	Katolik
3. Mampang Prapatan	Katolik	Golkar	Perti	P.S.I.I.	Murba	Parkindo
4. Pasar Minggu	Parkindo	IP - KI	N.U.	Parmusi	P.N.I.	Katolik
5. Kebajoran Lama	Katolik	Golkar	Perti	P.S.I.I.	Murba	Parkindo
6. Kebajoran Baru	Parkindo	IP - KI	N.U.	Parmusi	P.N.I.	Katolik

WILAJAH Ketjamatan	20-6-71	21-6-71	22-6-71	23-6-71	24-6-71	25-6-71
DJAKARTA TIMUR						
1. Matraman	IP - KI	Perti	P.S.I.I.	Murba	Parkindo	Golkar
2. Pulo Gadung	Golkar	N.U.	Parmusi	P.N.I.	Katolik	IP - KI
3. Djatinegara	Golkar + IP - KI	Perti + N.U.	P.S.I.I. + Parmusi	P.N.I. + Murba	Parkindo + Katolik	Golkar IP - KI
4. Kramat Djati	IP - KI	N.U.	Parmusi	Murba	Parkindo	Golkar
5. Pasar Rebo	Golkar	Perti	P.S.I.I.	P.N.I.	Katolik	IP - KI

Djakarta, 26 April 1971.-
**PANITYA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA.**

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13 Telp.: 53418 – JAKARTA

Nomor : 0368/III/2/1971.

Djakarta, 17 April 1971.

Lampiran : —.

Perihal : Kampanje Pemilihan Umum.

Kepada Jth.

**PIMPINAN PARPOL/GOLKAR
TINGKAT I D.C.I. JAKARTA
di**

DJAKARTA.—

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang tertantum dalam Keppres No. 68 tahun 1970, tentang Penjelenggaraan Kampanje Pemilihan Umum dan Instruksi Kadapol Metro Djaya No. Pol/3/I/Inst/Dak Metro Djaya/1971 tentang Pedjabat-pedjabat yang diberi Wewenang Menanda tangani Dan Tata Tjara Memberi Surat Keterangan Dalam Rangka Kampanje Pemilihan Umum, maka dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa Pemerintah DCI Djakarta memberikan kesempatan yang seluas-luasnja kepada semua Parpol/Golkar untuk memanfaatkan kesempatan berkampanje tersebut dengan sebaik-baiknya.

Dalam hubungan ini kepada Pimpinan Parpol dan Golkar Tingkat DCI Djakarta diberikan kesempatan untuk menjelenggarakan kampanje dengan jalan disamping sebagaimana telah ditetapkan dalam Keppres No. 68 tahun 1970 juga dengan pemasangan gapura-gapura, bendera-bendera, umbul-umbul, lambang-lambang organisasi Partai Politik/Golongan Karya dan berbagai bentuk visualisasi lainnya disepanjang pinggir-pinggir jalan dan jalur tengah jalan. Pemasangan tersebut hendaknya memperhatikan faktor ketertiban umum, kelantjaran lalu lintas, keindahan kota serta tidak merusak sarana kota yang telah ada.

Ketentuan tentang kampanye Pemilihan Umum di DCI Djakarta setjara terperintji akan segera dikeluarkan.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
D.C.I. DJAKARTA**

t.t.d.

**(ALI SADIKIN)
Letnan Djenderal KKo.**

TEMBUSAN:

- Jth.**
- 1. Menteri Dalam Negeri/Ketua L.P.U.**
 - 2. Laksus Pangkopkamtibda Djaya,**
 - 3. Kadapol Metro Djaya,**
 - 4. Kepala Direktorat II,**
 - 5. Kepala Direktorat IV,**
 - 6. Kepala Direktorat VII,**
 - 7. Kepala Djapen DCI Djakarta,**
 - 8. Kepala Dinas Pertamanan,**
 - 9. Kepala Dinas Tata Kota,**
 - 10. Kepala Dinas Pekerdjaan Umum,**
 - 11. Para Walikota/Ketua P.P. Kota,**
 - 12. Para Tjamat/Ketua P.P.S.,**
 - 13. Arsip.**

**KOMANDO DAERAH KEPOLISIAN METROPOLITAN
DJAKARTA RAYA**

**INSTRUKSI KEPALA DAERAH KEPOLISIAN METROPOLITAN
DJAKARTA RAYA**

No. Pol. : 3/1/Instr/Dak Metro Djaya/1971

TENTANG :

PEDJABAT-2 JANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI DAN TATA TJARA MEMBERI SURAT KETERANGAN DALAM RANGKA KAMPANJE PEMILIHAN UMUM.

KEPALA DAERAH KEPOLISIAN METROPOLITAN DJAKARTA RAYA

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka Pemilihan Umum jang dimaksud dengan penguasa jang berwenang menurut Keputusan Presiden No. 68 tahun 1970, ialah Kepolisian Republik Indonesia (se-rendah2-nja Kepala Kepolisian Ketjamatan Sektor).

2. Bahwa perlu adanja keseragaman dalam pelaksanaan pemberian Surat Keterangan sebagai tanda bahwa organisasi jang bersangkutan telah memberitahukan maksudnja kepada penguasa jang berwenang.

3. Bahwa perlu dikeluarkan ketentuan jang mengatur tentang tata-tjara pemberian Surat Keterangan tersebut kepada organisasi jang akan mengadakan kampanye pemilihan umum selama masa kampanye dari tanggal 29 April s/d 27 Djuli 1971.

**Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 tahun 1961, tgl. 30-6-1961.
2. Undang-undang No. 5/Pnps/tahun 1963.
3. Keputusan Presiden No. 68 tahun 1970.**

MEMUTUSKAN :

- 1. Menundjuk pedjabat2 jang diberi wewenang untuk menanda tangani dan menetapkan tata-tjara pemberian Surat Keterangan dalam rangka kampanye Pemilihan Umum, sebagai tanda bahwa organisasi jang bersangkutan telah memberitahukan tentang maksudnja kepada penguasa jang berwenang jang selandjutnja disebut "Surat Keterangan".**

Pasal 1.

Berdasarkan pasal I ayat (4) Keputusan Presiden No. 68 tahun 1970, pedjabat Kepolisian Republik Indonesia (serendah2nya Kepala Kepolisian Ketjamatan/Sektor) jang diberi wewenang untuk mengeluarkan "Surat Keterangan" kepada organisasi jang akan mengadakan kampanye Pemilihan Umum, sesuai dengan tingkatan komando adalah sebagai berikut :

1. Pada tingkat Komdak — Kepala Seksi P.K.N. a.n. Kadapol
2. Pada tingkat Komwil — Kepala Bag. I/a.n. Dan Wil.
3. Pada tingkat Komsekko — Komandan Seksi Kota.
4. Pada tingkat Detasemen — Komandan Detasemen.

Pasal 2.

(1). Surat pemberitahuan oleh organisasi (organisasi politik dan golongan Karya sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) dan pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden No. 43 tahun 1970). tiap akan mengadakan kampanye Pemilihan Umum dalam bentuk2.

- a. rapat2 umum.
- b. pawai
- c. keramaian umum, pesta umum dan pertemuan umum.
- d. pertunjukan umum dll.

disampaikan kepada pedjabat2 sebagai mana dimaksud dalam pasal 1. diatas diatur sbb. :

- a. Bila diadakan oleh ranting/anak tjabang suatu organisasi didalam daerah Komando Seksi Kota kepada Komando Seksi Kota dengan tembusan kepada Komwil/Komdak Metro Djaya.
- b. Bila diadakan oleh suatu organisasi didalam daerah Komando Wilayah dengan tembusan kepada Komdak Metro Djaya.
- c. Bila diadakan oleh Pimpinan Daerah dalam Daerah Komando Metro Djaya kepada Kepala Daerah Kepolisian Metro Djaya dengan tembusan kepada Komwil/Komsekko jang bersangkutan.

2). Untuk organisasi jang melakukan kegiatan2 bukan dalam rangka kampanye Pemilu tetap berlaku ketentuan2 tersebut dalam Undang2 No. 5/Pns/1963. (Vide Instruksi Kadapol No. Pol. 2/1/Instr/Dak Metro Djaya/1971);

Pasal 3.

1). Organisasi yang akan mengadakan kampanye pemilihan umum selambatnya 3 x 24 jam kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatas menjampaikan surat pemberitahuan disertai dengan keterangan selengkap-lengkap mengenai :

- a. Daftar susunan Pengurus Organisasi.
- b. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga.
- c. Daftar susunan Panitia Penyelenggara serta penanggung jawab.
- d. Aturan.
- e. Keterangan mengenai alat-alat peraga yang dipergunakan seperti spanduk-spanduk, poster-poster, selebaran-selebaran, slogan-slogan, slide, tanda gambar, serta tulisan-tulisan yang tertera dalam spanduk, poster, pamflet, selebaran dll.
- f. Pembijaksanaan-pembijaksanaan untuk rapat/pertemuan umum.
- g. Route pawai bila mengadakan pawai.
- h. Pelaku-pelaku dalam pertunjukan umum.
- i. Surat ijin penggunaan tempat (lapangan, gedung) yang dipergunakan dari pemilik/pengurus/Pemerintah setempat.

2). Pemberitahuan untuk kedua kali dan selanjutnya hanya menjampaikan surat pemberitahuan sebagaimana diatas dengan lampiran-lampiran tersebut punt c, d, e, f, g, h, dan i, diatas.

3). Sesudah organisasi yang bersangkutan memperoleh "Surat Keterangan" baru dapat dimulai dengan penyelenggaraan kampanye pemilu ditempat yang telah ditentukan.

Pasal 4.

Pejabat sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Instruksi ini menerima surat pemberitahuan dari organisasi yang akan mengadakan kampanye pemilu berkewajiban :

- 1). Segera memberikan kepada organisasi yang bersangkutan "Surat Keterangan" sebagai tanda bahwa organisasi yang bersangkutan telah memberitahukan tentang maksudnya kepada POLRI, dalam bentuk "Surat Keterangan" sebagaimana contoh terlampir.

- 2). Mengatur waktu dan tempat, sehingga tidak terjadi 2 organisasi atau lebih mengadakan kampanye Pemilu pada waktu yang bersamaan dan tempat yang sama/berdekatan atau route yang bersilang sesuatu tempat serta menolak setiap bentuk kampanye (rapat-rapat, pertemuan-pertemuan dengan pengerahan massa yang bersifat ditempat terbuka) yang diadakan pada malam hari.
- 3). Bila merupakan suatu pawai agar menjampai route pawai tersebut kepada Dan Senoplatas.
- 4). Segera sesudah dikeluarkan "Surat Keterangan" Kepada Organisasi yang akan mengadakan kampanye Pemilu, maka harus dilaporkan oleh :
 - a. Dan Sekko/Dan Den Pol Kepada Dan Wil/Kadapol.
 - b. Dan Wil kepada Kadapol.

Pasal 5.

Bila dipergunakan alat-alat peraga dalam kampanye Pemilu perlu diperhatikan oleh organisasi yang bersangkutan sbb. :

1 a. Spanduk/poster

- Untuk tempat pemasangan diperlukan rekomendasi dari Pemerintah setempat.
- Tidak dipasang terlalu rendah ditempat-tempat yang dapat mengganggu keamanan lalu-lintas.
- No. "Surat Keterangan" disebutkan pada sudut kanan spanduk/poster-poster.
- sesudah selesai agar segera diturunkan.

b. Pamflet-pamflet dan selebaran-selebaran lain/tanda-tanda gambar.

- tidak ditempel pada benda milik orang lain tanpa seijin pemilik,
- tidak ditempel ditempat-tempat yang dapat menyinggung perasaan perseorangan maupun golongan, djembatan penyeberangan, tempat-tempat ibadah, gedung-gedung Pemerintah.
- tidak dipasang/ditempel pada suatu tempat yang sudah ada tanda-tanda gambar/dll yang mengakibatkan tanda-tanda gambar yang dimaksud tertutup/tidak kelihatan.

- tidak disebarkan sedemikian rupa sehingga mengganggu lalu lintas.
 - tidak diedarkan pada rumah-rumah penduduk dengan memungut uang.
2. Selambat-lambatnja 3 (tiga) hari sebelum djangka waktu kampanye Pemilu berakhir (tanggal 24 Djuni 1971) semua alat peraga kampanye Pemilu dalam djarak radius 200 m dari TPS sudah dihapus/diturunkan oleh jang bersangkutan.

Pasal 6.

Penanggung djawab diharuskan memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dalam "Surat Keterangan"

Pasal 7.

1. Pedjabat tersebut pada pasal 1, harus memelihara administrasi jang baik dan rapih mengenai :
 - a. Pengeluaran "Surat Keterangan".
 - b. Penjimpanan/perjusunan kartu organisasi jang mengadakan kampanye Pemilu (tjontoh terlampir).
2. 2 x 24 djam sesudah kampanye Pemilu oleh suatu organisasi dalam daerahnja, maka semua kegiatan dari organisasi harus segera dilaporkan oleh :
 - a. Dan Sekko/Dan Den Pol. kepada Dan Wil/Kadapol.
 - b. Dan Wil kepada Kadapol.
3. Pedjabat tersebut diatas sesuai dengan hierarchie supaja melaporkan setjara periodik tiap-tiap minggu djumlah dan nama-nama organisasi jang telah diberi "Surat Keterangan"

Pasal 8.

"Surat Keterangan" jang dikeluarkan dalam rangka kampanye Pemilu ini tidak dikenakan biaja administrasi.

Pasal 9.

Instruksi ini mulai berlaku sedjak dikeluarkan.

DIKELUARKAN DI : D J A K A R T A
PADA TANGGAL : 1 PEBRUARI 1971

KEPALA DAERAH KEPOLISIAN METROPOLITAN
DJAKARTA RAYA

tjap/ttd

(Drs. WIDODO BUDIDARMO)
Brigadir Djenderal Polisi

Kepada :

Distribusi "A"

Tembusan :

KAPOLRI-----

Sesuai dengan jang asli
KEPALA SEKSI TATA USAHA

ttd

DJAJUSMAN RANASUDIRDJA

A.K.B.P.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13 Tlp.: 53418 – DJAKARTA

Nomor : 0285/III/1/1971.

Djakarta, 29 Maret 1971.

Lampiran : 1 (satu) expl.

Perihal : Daftar Sementara
Tempat-tempat Kampanje.

**KEPADA JTH.:
PIMPINAN WILAJAH PARTAI/
GOLKAR DCI DJAKARTA
di**

DJAKARTA.—

Bersama ini disampaikan Daftar Sementara tempat/lapangan-lapangan untuk ber-kampanje yang masih merupakan konsep untuk seperlunya.

Kami akan sangat gembira apabila Saudara juga menjampaikan konsep jadwal waktu penggunaan tempat-tempat/lapangan untuk ber-kampanje kepada kami.

Untuk dapat segera dijadikan keputusan, diharapkan saran-saran/usul-usul dari Saudara disampaikan pada kami selambat-lambatnja pada tanggal 5 April 1971 yang akan datang.

Demikian agar Saudara maklum.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,

t.t.d.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

TEMBUSAN:

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
2. Sekda DCI Djakarta,
3. BPH/Bidang Pemerintahan,
4. Direktorat I/Pemerintahan,
5. Direktorat II/Kamtib,
6. Direktorat VII/Chusus Politik,
7. Arsip.

SEMENTARA

DAFTAR
TEMPAT-TEMPAT/LAPANGAN UNTUK KAMPANJE PARA
PARPOL/GOLKAR DI WILAJAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DAERAH / DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
DJALAN IMAM BONDJOL 13
DJAKARTA.

Rekapitulasi Sementara: Tempat-tempat/lapangan untuk berkampanje oleh Parpol/Golkar se wilajah DCI Djakarta.

No. Urut	Wilajah	Ketjamatan	Banyaknya tempat/lapangan untuk kampanje	Djumlah	Keterangan
I.	DJAKARTA PUSAT	1. Gambir 2. Sawah besar 3. Kemajoran 4. Tjemp. Putih 5. Menteng 6. Tanah Abang 7. Senen	9 buah 2 " 10 " 17 " 6 " 15 " — "	59 buah	
II.	DJAKARTA UTARA	1. Kep. Seribu 2. Pendjaringan 3. Tg. Priok 4. Kodja	4 buah 9 " 6 " 5 "	24 buah	
III.	DJAKARTA BARAT	1. Grogol/Petamburan 2. Tambora 3. Tamansari 4. Kb. Djeruk 5. Tjengkareng	22 buah 20 " 2 " 3 " 8 "	55 buah	
IV.	DJAKARTA SELATAN	1. Tebet 2. Setiabudi 3. Mp. Prapatan 4. Pa. Minggu 5. Kb. Baru 6. Kb. Lama	11 buah 19 " 8 " 10 " 36 " 30 "	114 buah	
V.	DJAKARTA TIMUR	1. Matraman 2. P. Gadung 3. Kr. Djati 4. Pa. Rebo 5. Djatinegara	3 buah 24 " 1 " 10 " 4 "	42 buah	
	D J U M L A H	27 Ketjamatan		294 buah	

Djakarta, 26 Maret 1971.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,

t.t.d.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

**DAFTAR: Tempat/Lapangan Untuk Kampanje Parpol/Gol-
kar Wilajah Kota Djakarta Pusat.**

No.	KETJAMATAN	DJENIS/TEMPAT LAPANGAN	A L A M A T	KET.
1	2	3	4	5
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	GAMBIR	1. Lap. Petodjo VII 2. Lap. Tjilamaja 3. Lap. Kota Baru 4. Lap. Sudut Djl.Musi Djl. Biak 5. Lap. Duri Djl. Raya 6. Lap. Djl. Setiakawan 7. Taman Tanah Abang III 8. Prapatan Djl.Sembodja. 9. Djalan Pintu Air	Djl. Biak Djl. Tjilamaja Djl. Kota Baru Djl. Musi/Djl.Biak Djl. Ketapang Udjung Djl. Belakang Lap.Bola Djl. Taman Tanah Abang III Djl. Balikpapan I Dekat Rel K.A.	
10. 11.	SAWAH BESAR	1. Lap. Banteng 2. Lap. Industri Yaya (Lancer).	Djl. Lap. Banteng Djl. Radjawali Selatan	
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.	KEMAJORAN	1. Lap. Komsekko 2. Lap. Kantor Rw. 017 3. Lap. Gardu Asam 4. Lap. Bunderan 5. Lap. Mundu Rw. 06 6. Lap. P.Lumumba Dalam 7. Lap. Bola Rw. 015 8. Lap. Komplek Lis- trik 9. Lap. Sumadji Rw. 09 10. Rw. 011	Djl. Gn. Sahari Selatan Kel. H. Mulja Kel. Kemajoran Kebon Kosong Kel. Serdang Kel. Gn. Sahari Sela- tan Kel. Harapan Mulja Kel. Serdang Kel. Harapan Mulja Kel. Kemajoran	
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.	TJEMPAKA PUTIH	1. Lap. Bola DCI Pusat 2. Lap. Komp. Sekneg. 3. Lap. Ps. Tjempaka Putih 4. Lapangan 5. Lap. Komplek DITKUAD 6. Lap. P.N. Garam 7. Lap. Djl. Pramuka 8. Lap. Kramat Djaya 9. Lap. Kaju Awet 10. Lap. Kaju Awet 11. Lap. Kawi-2 Sawah 12. Lapangan 13. Lap. Projek Sentiong 14. Lap. Kp. Rawa Sela- tan.	Tjempaka Putih Rt./Rw. 06 Rw. 04 Dekat Gedung Taspen Tjemp.Putih Rw. 02 Tjemp.Putih Rt.0014/ 011 Rawasari Rw. 03 Rawasari Rt. 0018/05 Djohar Baru Rt.001/01 Rt. 0019 Rw. 05 Rt. 007 Rw. 05 Rt. 004 Rw. 02 Rt. 0016 Rw. 06 Rt. 004 Rw. 05	

1	2	3	4	5
36.	MENTENG	15. Sepandjang Hal Djen. Suprpto	Dekat Kantor Kelurahan Galur	
37.		16. Lap. Pandawa	Rt. 0012/02	
38.		17. Lapangan Siap	Rt. 008/02	
39.		1. Lap. Univ. Pantjasila	Djl. Borobudur	
40.		2. Gedung Sekolah SD Theresia	Djl. Theresia	
41.		3. Lap. Persidja	Djl. HOS. Tjokroaminoto	
42.		4. Gedung PSKD	Djl. Dr.S. Ratulangi	
43.		5. Gedung Bioskop Menteng	Djl. HOS. Tjokroaminoto	
44.		6. Bioskop Megaria	Djl. Diponegoro	
45.	TANAH ABANG	1. Lap. Komplek DKA.	Djatibaru Gg.2/03	
46.		2. Lap. Bola Alwatan	Rt. 0010/03	
47.		3. Lap. Parkir Kartika Plaza	Kb. Katjang Gg. 12	
48.		4. Lap. Kopro Bandjir	Djl. Tg. Karang	
49.		5. Kb. Kosong	Kb. Melati Rw. 06	
50.		6. Kb. Kosong	Gg. H.Muala Rt. 005/02	
51.		7. Kb. Kosong	Gg. Mesjid Lama	
52.		8. Kb. Kosong LAN	Rt. 0015/03	
53.		9. Lap. Bola Budisila	Gg. H.M. Tohir Rt.14/04	
54.		10. Lap. Bola	Pedjompongan	
55.		11. Lap. Bola	Rt.0021/05	
56.		12. Lap. Bola	Karet Kubur Blakang Sekolah Dasar	
57.		13. Bekas Tampungan Sampah	Djl. Karet Kubur	
58.		14. Gedung Han Tju Bu	Pedjompongan	
59.		15. Lap. Pos Hansip	Pendjernihan	
			Gelora	
			Gelora	

KETJAMATAN SENEN: Tidak ada lapangan terbuka yang dipergunakan untuk kampanye.-

DJAKARTA, 26 MARET 1971.

PANITIA PEMILIHAN KOTA DJAKARTA UTARA
Djalan Laksda Jos Soedarso No. 29 Tandjung Priuk
Telp. 290151 - 290152 - 290153.

**DAFTAR: Alamat tempat-tempat/lapangan-lapangan
 untuk Kampanje dalam rangka Pemilu ta-
 hun 1971, di Wilajah: Djakarta Utara.**

No.	KETJAMATAN	TEMPAT/LAPANGAN	GEDUNG	KET.
1	2	3	4	5
I.	KEPULAUAN SERIBU			
	Kelurahan Pulau Panggang	Lapangan Dermaga		
	Kelurahan Pulau Tidung	Halaman Sekolah		
	Kelurahan Pulau Kelapa	Lapangan Sekolah		
	Kelurahan Pulau Untung Jawa	Lapangan depan Kelurahan		
II	PENDJARINGAN			
	Kelurahan Pendja- ringan	1. Lapangan Bola Djl. Muara Baru 2. Lapangan Bola Djl. Tanah Pasir 3. Lapangan Kosong Djl. Tanah Pasir Rt. 11/08.		
	Kelurahan Pedja- galan	1. Lapangan Bola Mazda, Teluk Gong Rw. 09 2. Kaveling Teluk Gong Rw. 08		
	Kelurahan Mangga Dua Utara	1. Lapangan Bola R.E. Martadinata Rw. 07/03 2. Lapangan Bola Putera Bahari Djl. Lodan Djapat Rw. 01/03. 3. Tanah Kosong di Rw. 08/03 Djl. R.E. Martadinata	1. Gedung PT, Sinar Pasar Ikan Djl. Krapu No. 5 2. Gedung PT. Pab. Radio Galindra Djl. Pantjamarga Djem. Baru Rw.07/ 03 3. Gedung PT.Pabrik Sabun Sinar An- tjol (B29) Kp. Ban- dan Rw. 02/03.	

1	2	3	4	5
	Kelurahan Pade- mangan	1. Lapangan J.P.M.I.		
III.	TANDJUNG PRIUK			
	Kelurahan Tandjung	1. Lap. di RW. 015/ 01 2. Bioskop Margaria		
	Kelurahan Sungai Bambu	1. Lap. Segi Tiga Djl. Gorontalo Rw. 01.		
	Kelurahan Kebon Bawang	1. Komplek Rawa Badak Panggung Kanak-kanak.		
	Kelurahan Sunter	1. Lap. Depan Kelu- rahan Sunter Bendungan Dem- pet.		
	Kelurahan Sungai Bambu	2. Lap. Belakang Kantor Kelurahan S. Bambu.		
IV.	K O D J A			
	Kelurahan Kodja Utara	1. Lap. P.K.D. Djl. Djampea Tg. Priuk. 2. J.U.K.S. Tg. Priuk		
	Kelurahan Rawa Badak	1. Lap. L.L.A.D.R. Djl. Jos Soedarso Tg. Priuk		
	Kelurahan Tugu	1. Dilapangan Kramat Djaja		
	Kelurahan Kelapa Gading	1. Disamping Kelu- rahan		

**DAFTAR : Tempat-tempat Kampanje Pemilihan Umum
yang terdapat dalam tiap-tiap Ketjamatan/
P.P.S. diseluruh wilayah Djakarta Barat.**

No.	KETJAMATAN	KELURAHAN	TEMPAT KAMPANJE	KETE- RANGAN
1	2	3	4	5
I	<u>GROGOL</u> <u>PETAMBURAN</u>	1. Grogol	1. Lapangan Sepak bola Rw. 02 Grogol 2. Lapangan Djln. Nur- din III Rw. 07 Grogol 3. Lapangan Djl. Dr. Nurdin Raya No. 7	Lapangan ter- buka. " "
		2. Djelambar	1. Lap. Komplek BPU Pesing Rw. 01 2. Hal. Ktr. Kelurahan Djelambar Rw. 06 3. Hal. SD. Djelambar I Rw. 08 4. Hal. SD. Djelambar II Rw. 010	Halaman
		3. Td. Duren	1. Hal. Samping SMP Neg., SD. Td. Duren Rw. 03 2. Pansun Phase VIII samping SD Baru Rw. 01/02 3. Hal. Comp. Pro. Bandjir Rw. 07 4. Hal. Phase IV/V Djln. Tg. Duren II Rw. 03	
		4. Djatipulo	1. Halaman SD Tomang Antjak Rw. 01 2. Lapangan SKT Rt. 001/04	Lap. Halaman SD. Lap. Sepak Bola.
		5. Kotabambu	1. Lap. Bola Djatipulo Rw. 05 Pdk. Bandung 2. Lap. Kotabambu Rt. 004/06 Rw. 011 Kotabambu	Lap. Sepak Bola.

1	2	3	4	5
II.	T A M B O R A	6. Slipi Pe- tamburan	1 Djl. KS Tubun III Lap. Brimob. Rw. 06	Lap. Sepak Bola.
		7. Palmerah	1. Lapangan PCS Rt. 002 2. Lap. Asrama Kom- sekko 732 3. Lap. Tanah Dit- djora Kemanggisan Ilir Rw. 04	Lap. Sepak Bola. sda. Halaman
		8. Tomang	1. Lap. Sumber Taka- ri Rw. 01 2. SD Pulo Matjan Rt. 05 3. Plansun Gelong Baru Rw. 04 4. Halaman Trisakti Barat Rw. 08	Lap. Taman Kanak-kanak Halaman SD.
		1. Pekodjan	1. Djl. Mesdjid Peko- djan Rw. 01-Rw.03 2. Djl. Bandengan Utara Rw. 010 - Rw. 012	
		2. Malaka	Djl. Nelajan Barat Rw. 03	
		3. Kerendang	1. Djl. L. Rw. 02 2. Djl. M. Rw. 05	
		4. Tambora	Djl. Tambora Rw.03	
		5. Djembatan Lima	1. Djl. Gudang Ban- dung Rw. 08 2. Djl. Terate II	
		6. Duri	1. Gg. Tjahaja Djl. K.H.Mansjur 2. Depan B.K.I.A. Djl. K.H.Mansjur	
		7. Tanah Sareal	1. Djl. Tavip Rw.011 2. Djl. Songsi Rw. 04 3. Djembatan Ledeng Rw. 07	
		8. A n g k e	Djl. H.Djamhari (depan SD).	

1	2	3	4	5
		9. Djembatan Besi	1. Djl. Prof. Latumeten Rw. 01 2. Lap. Tanah Sareal Rw. 03 3. Duri Bangkit Rw. 09	
		10. Kali Baru	1. Lapangan Persima 2. Lapangan Kalibaru Rw. 08 3. Lapangan Persima I Rw. 01.	
III.	TAMAN SARI	1. Taman SARI	Lapangan Bola Taman Sari Djl. Mangga Besar VIII.	
		2. Mangga Besar	Lapangan Bola Petak Singkiang	
IV.	KEBON DJERUK	1. Kebon Djeruk	Lapangan Olahraga Keb. Djeruk Rt. 004/01	
		2. Srengseng	Lapangan Olahraga Srengseng Rt. 003/01.	
		3. Sukabumi Udik	Lapangan Olahraga Sukabumi Udik Rt. 001/03.	
V.	TJENGKARENG	1. Benda	Bulak Kober Rt. 009/Rw. 01 (lapangan).	
		2. Kamal	Lapangan Bola Porkam Kebon 200 Rt. 009/02	
		3. Tegal Alur	Lapangan Bola Porta Mentjeng.	
		4. Pegadungan	Lapangan Bola Madja Pegadungan	
		5. Kalideres	Lapangan Bola PS Kader Rt. 002/01	

1	2	3	4	5
		6. Tjengkareng 7. K a p u k 8. Kedaung Kaliangke	Lapangan Bola P. Ganefo Rt. 006/02 Lapangan Bola Kapuk Belakang SD Kapuk Rt. 003/03. Lap. Papanda- jan Kedaung Kaliangke Rt. 004/04.	

**DAFTAR : Penggunaan Tempat-tempat/Lapangan
untuk kampanye oleh Parpol/Golkar
diwilayah Djakarta Selatan.**

No.	KETJAMATAN	DJENIS TEMPAT/ LAPANGAN	ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5
I.	TEBET	1. Lapangan Bola Manggarai 2. Lap. Pramuka Manggarai 3. Lap. Bawah Manggarai 4. Lap. Mesdjid Manggarai 5. Lap. Ros. Kp. Melaju Barat 6. Lapangan Bola Bank Indonesia 7. Lapangan Bola SMA 17 Agust. 8. Lapangan ARSU 9. Lapangan Bola PS.Pt. Tebet Timur 10. Lap. Valleyhall Tebet Utara Dalam 11. Lapangan Honda DCI	Rw. 01 Manggarai Rw. 01 Manggarai Rw. 09 Manggarai Rw. 010 Manggarai Bukitduri Djl. Complek Bank Kel. Mentang Dlm. Djl. Tebet Utara Kel. Tebet Utara Kel. Tebet Barat Kel. Tebet Timur Kel. Tebet Timur Djl. Asem Baris Kel. Kebon Baru	
II.	SETIABUDI	1. Lap. SMA Negeri III/SMP Sumbang-sih 2. Lap. Pingg. Tanggul 3. Ged. Sek. Pattimura/Taman Harapan 4. Lap. Kampung Batak 5. Lap. H. Tjokong Pdr. 6. Madrasah H. Achmad. 7. Ged. Bioskop Kemuning (Karet) 8. Lapangan Bola B.N.I.	Djl. Setiabudi II Djl. Set. Tengah Setiabudi Setiabudi Timur Djl. Setiabudi Raja Gg. H. Tjokong Rt. 001/Rw. 013 Kel. Karet Djl. Karet Depan Rt. 008/Rw. 03 Kel Karet	

1	2	3	4	5
		9. Madrasah H. Dim- jati & H.Sjafei 10. Lap. Rt. 0010/ Rw. 03 11. Madrasah H. Sjakur Chairi 12. Lap. Keb. Obat 13. Lap. Tang. Prah 14. Lap. Pb. "MASSA" 15. Ged. Bioskop "GEMBIRA" 16. Tanah Kosong Kb. Sawo 17. Ged. Bioskop Pemandian 18. Lapangan Garnizun 19. Lap. Bola Basket	Rw. 07 Kel. Karet Kuningan Kel. Kuningan Timur Kuningan Timur Rw. 02 Mentas Rw. 02 Djl. Tk. Prah Mentas Rw. 02 Djl. Kawi Guntur Djl. Bogor Lama Djl. Dr. Sahardjo Djl. Garnizun Karet Semanggi Djl. Karet Depan	
III.	MAMPANG PRAPATAN	1. Lap. Bola Indopla- no Duren Tiga 2. Lap. Bola "BATA" 3. Lap. Kelana Putra 4. Lap. PUTRA DJA- YA 5. Lap. Bola PERSI- TA 6. Lap. Bola FTIKP 7. Lap. Bola A.U.R.I. 8. Lap. Bola "BELALANG"	Komp. P.L.N. Kel. Duren III Depan Taman Pah- lawan Kel. Duren III Pela Rw. 08 Kel. Pela Komp. Kodam V/ Djaya Pela Kel. Tegal Parang Kel. Nangka Kel. Pantjoran Kel. Rawadjati	
IV.	PASAR MINGGU	1. Lapangan P.M.D. 2. Lap. P.S.P.P. 3. Lap. O.R. depan rumah H. Riduan 4. Lap. O.R. depan Kantor Ketjamatan 5. Lap. O.R. sebelah Mdr. Nurul Huda 6. Lap. O.R. dekat KÖBER 7. Lap. SD. Djagakar- sa 8. Lap. depan Kelu- rahan.	Pedjaten Pasarminggu Djatipadang Ragunan Tjilandak Djagakarsa Lenteng Agung	

1	2	3	4	5
		9. Lap. SMP. Fil 41 10. Lap. SMP. Pertanian	Srengseng Sawah Tjigandjur	
V.	KEBAJARAN BARU	1. Lap. Plansun 2. - "- 3. - "- 4. - "- 5. - "- 6. - "- 7. - "- 8. - "- 9. - "- 10. - "- 11. - "- 12. Lapangan 13. Lapangan 14. Taman Prg. 15. MABAK 16. Pasar Melawai 17. Gedung BENJAMIN 18. Plansun 19. Plansun 20. Lapangan 21. Halaman 22. Ged. Madrasah 23. Lapangan 24. - "- 25. - "- 26. - "- 27. - "- 28. - "- 29. - "- 30. - "- 31. - "- 32. Birun Karya 33. Lapangan 34. Ged. Bioskop Mulia 35. Ged. Bioskop PURI 36. Univ. Muham madijah	Djl. Turi Blok S Djl. Bakti I Djl. Surjo Blok S Djl. Balitung Blok R Djl. Mulawarman Djl. Sriwidjaja Djl. Hanglekir V Djl. Pakubuwono VI Djl. Sinabung II Djl. Hang Tuah III Djl. Dempo II Djl. K.H.Dachlan Djl. Pang.Polim Raya Djl. Kjai Madja Djl. Trunodjojo Djl. St. Hasannudin Djl. Iskandersjah Djl. Tirtajasa Rw.04 Djl. Widjaja IX/ Rw. 05 Djl. Tjililin Djl. Pulo Raya IV Djl. Pete II Djl. Djembatan Seltn. Djl. Darmawangsa Raya Djl. Brawidjaja IV Gandaria Rt.003/06 Gandaria Rt.0010/07 Compl. Al. Rw.09 Djl. H.Madjid Rw.02 Gg. Kirai Rt.0011/01 Gg. Kirai Rt. 002/04 Rt. 005/03 Gg. Meadjud Rt.005/03 Djl. Kiai Madja Djl. Barito II Djl. Limau II	

1	2	3	4	5
VI.	KEBAJORAN LAMA	1. Lap. Bola Kbn. Nanas 2. Lap. Bola Projek TVRI 3. Plansun Kapling Djuragan 4. Lap. Madrasah Tamlil Islam 5. Lap. SD. Gang Kubur 6. Lap. SESCOAL 7. Lap. Gg. Pandjang 8. Lap. Bola A. Jani 9. Lap. Sp. Bola 10. Lap. Madrasah Al Haeriah 11. Lap. Kb. Karet 12. Lap. Madrasah Nurul Huda 13. Lapangan AD. 14. Lap. Otorita 15. Lap. PGAN 16. Lap. Pontjol 17. Lap. Margaguna 18. Lap. Deplu 19. Lap. A.L. 20. Lap. Djl. Asem 21. Lap. PDK. 22. Lap. Bola BAT. 23. Lap. RS. Fatma- wati 24. Lap. Gaharu 25. Gdng. Bioekop Gaharu 26. Gdng. Wisma BDN 27. Lap. SD. Lebak Bulus 28. Lap. Bola AL. 29. Lap. Kb. Karet 30. Lap. Besar Pd. Labu	Grogol Utara Rt. 0014/02 Grogol Utara Rt. 0010/01 Grogol Utara Rt. 003/07 Grogol Selatan Rt. 005/07 Grogol Selatan Rt. 005/07 Tjipulir Rt. 0011/06 Tjipulir Rt. 006/05 Keb. Lama 0011/05 Pd. Pinang 0010/01 " 009/01 " 008/02 " 001/07 " 002/08 " 0012/03 " 004/08 Gandaria Sel. 004/04 " 0013/02 " 005/03 " 001/01 Tjipete Sel. 0011/05 " 002/04 " 007/02 Tjilandak 009/02 " 0014/01 " 0014/01 " " Lebak Bulus 0010/01 " 004/03 " 001/01 Pondok Labu.	

970

1	2	3	4
		23. Lapangan Rt. 003/01. 24. Lapangan Rt. 007/03 depan S.D.	) Kel. Penggilingan)
III.	KRAMAT DJATI	25. Lapangan Olah raga Ketj. Kramat Djati.	(dipusatkan disatu tempat). Tambahan akan menjusul.
IV.	PASAR REBO	26. Lapangan belakang kantor Kel. Pekajon.	
		27. Lapangan dekat kantor Kel. Tjibubur.	
		28. Lapangan sebelah kantor Pondok Ranggon.	
		29. Lapangan dekat kantor Kelurahan Tjipajung.	
		30. Lapangan dekat kantor Kelurahan Tjeger.	
		31. Lapangan S.D. Bambu Apus.	
		32. Lapangan sebelah S.D. Setu.	
		33. Lapangan kantor Kelurahan Kalisari.	
		34. Lapangan djalan desa Kp. Baru Rt. 002/02.	
		35. Lapangan djalan Kelurahan Tjijantung. (bulak-endon).	
V.	DJATINEGARA	_____	Akan menjusul daftar-nja, belum diterima.

**DAFTAR : Inventarisasi tempat untuk berkampanje
para Parpol/Golkar dalam Ketjamatan
Djatinegara.**

No.	ALAMAT TEMPAT UNTUK BERKAMPANJE	KETERANGAN
1.	Lapangan Djenderal Urip Sumohardjo	Djl. Matraman Raja depan Kantor Pos Djatinegara.
2.	Lapangan belakang Pendjara Tjipinang	Tjipinang Kelurahan Tjipinang Besar.
3.	Kapling Tjawang	
4.	Lapangan Kelender	

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13 Telp.: 53418 – JAKARTA

PENGUMUMAN

No. 0405/III/1/1971.

Berkenaan dengan penyelenggaraan kampanye Pemilu di DCI Jakarta oleh PARPOL/GOLKAR yang telah diadakan sedjak tanggal 27 April 1971 ternyata masih terdapat penjiplangan-penjiplangan dari ketentuan yang telah digariskan oleh Gubernur/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta maka dengan ini dirasa perlu untuk penegasan-penegasan sebagai berikut:

- 1. Pemasangan/Penempelan tanda-tanda gambar, slogan, brosur dan sebagainya harus mengikuti ketentuan bahwa pelaksanaannya tidak mengganggu ketertiban dan keindahan kota serta tidak merusak prasarana yang ada.
Berkenaan dengan itu maka penempelan, pemasangan-pemasangan tanda gambar PARPOL/GOLKAR, slogan, brosur dan sebagainya pada pohon-pohon, peneduh, rambu-rambu jalan, tiang-tiang listrik, jembatan penyebrangan, viaduct, dan ditempat-tempat lainnya yang mengganggu kebersihan dan keindahan kota **dilarang**.
Kepada PARPOL/GOLKAR yang telah terlandjur memasang tanda-tanda gambar pada tempat-tempat tersebut diatas diminta untuk dalam waktu 2 x 24 jam membersihkannya sendiri setjara tertib. Apabila dalam waktu tersebut diatas penempelan tanda gambar/slogan ditempat tersebut diatas belum dilaksanakan, maka Pemerintah DCI Jakarta akan melaksanakan pembersihan itu demi kebersihan dan keindahan kota serta ketertiban umum.
- 2. Pemasangan tanda gambar/slogan/brosur dirumah-rumah, kantor, halaman, pagar, dan milik perorangan/perusahaan swasta lainnya harus atas idjin dari pemilik yang bersangkutan. Apabila pemasangan/penempelan itu tidak seidjin pemiliknya maka yang bersangkutan dapat membersihkannya sendiri atau meminta PARPOL/GOLKAR yang bersangkutan membersihkan penempelan/pemasangan atau meminta kepada alat Negara setempat untuk membersihkannya. Bagi perusahaan-perusahaan/kantor-kantor yang menginginkan penempelan tanda gambar/slogan PARPOL/GOLKAR dilingkungan kantor/perusahaannya setjara tertib dapat menjediakan papan khusus untuk penempelan itu dihalaman atau dilingkungannya (seperti misalnja yang dilakukan oleh Otorita Project Senen).

- 3. Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta telah menjediakan papan setjukupnja untuk tempat penempelan tanda gambar dan slogan PARPOL/GOLKAR dalam rangka kampanye ini disetiap wilayah.

Papan-papan itu telah ditempatkan:

DJAKARTA PUSAT.

- Prapatan Salemba didekat R.S. St. Carolus.
- Lapangan Banteng didekat terminal bis.

DJAKARTA UTARA.

- Prapatan Djl. Kodja didekat Pintu IX.
- Terminal bis didepan stasiun kereta api Tandjung Priuk.

DJAKARTA BARAT.

- Terminal bis Grogol.
- Harmoni.

DJAKARTA SELATAN.

- Djl. Hang Tuah; prapatan djurusan Kebajoran Lama.
- Blok M didekat pembangunan bioskop baru didepan Apotik RADJAPHARMA.

DJAKARTA TIMUR.

- Prapatan Kebon Pala didekat KODIM 0505.
- Prapatan Tjililitan.

PARPOL/GOLKAR diminta untuk memanfaatkan sebaik-baiknya papan-papan tersebut diatas untuk menempelkan tanda gambar dan brosur dalam kampanye Pemilu ini.

Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinja.

Djakarta, 3 Mei 1971.

Pd. GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DCI DJAKARTA,
t.t.d.

(ALI SADIKN)
Letnan Djenderal KKO.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA
Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp.: 53418 – JAKARTA**

**SURAT – TUGAS
Nomor: 0394/III/2/1971.**

Ditugaskan kepada nama-nama yang tertantum dalam lampiran surat tugas ini untuk:

Menindjau dan mengawasi jalannya Kampanje Pemilu 1971 oleh Parnpol dan Golkar dalam wilayah D.C.I. Jakarta.

Demikian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Djakarta, 27 April 1971.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**Sekretaris,
t.t.d.**

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.).

TEMBUSAN:

1. Sekda,
2. Direktorat I/Pemerintahan,
3. Direktorat VII/Chusus Politik,
4. P.P. Kota se-DCI,
5. Bendaharawan PPD DCI,
6. Arsip.

Nomor Urut	NAMA PETUGAS DAN WILAJAH TEMPAT BERTUGAS					TANGGAL PENUGASAN	KETERANGAN
	DKT. PUSAT	DKT. UTARA	DKT. BARAT	DKT. SELATAN	DKT. TIMUR		
1.	E.Pandjaitan S.H. Farid Hakim	Burhanuddin Hs. Oebed Soebhagio	Drs. Max Sumaraw Soemardi	Muchroddji S Soegijarto BBA	Goenarto S.H. Soemarno	27 April s/d 8 Mei 1971	Koordinator untuk kelima wilayah . Soetjipto Wirosoardjono M.Sc. Pembantu : Burhanuddin Hs. Muchroddji S.
2.	Burhanuddin Hs. Oebed Soebhagio	Drs. Max Sumaraw Soemardi	Muchroddji S. Soegijarto BBA	Goenarto S.H. Soemarno	E.Pandjaitan S.H. Farid Hakim	9 Mei s/d 20 Mei 1971	
3.	Drs. Max Sumaraw Soemardi	Muchroddji S. Soegijarto BBA	Goenarto S.H. Soemarno	E.Pandjaitan S.H. Farid Hakim	Burhanuddin Hs Oebed Soebhagio	21 Mei s/d 11 Juni 1971	
4.	Muchroddji S. Soegijarto BBA	Goenarto S.H. Soemarno	E.Pandjaitan S.H. Farid Hakim	Burhanuddin Hs. Oebed Soebhagio	Drs. Max Sumaraw Soemardi	2 Juni s/d 13 Juni 1971	
5.	Goenarto S.H. Soemarno	E.Pandjaitan S.H. Farid Hakim	Burhanuddin Hs. Oebed Soebhagio	Drs. Max Sumaraw Soemardi	Muchroddji S. Soegijarto BBA	14 Juni s/d 25 Juni 1971	

Djakarta, 27 April 1971.

PANTIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CRUSUS IBUKOTA DIJAKARTA

Sekretaris,

t.t.d.

(SOETJIPTO WIROSAARDJONO M.Sc.).

VI
KEAMANAN

DAFTAR ISI

BAB VI. KEAMANAN	Halaman
1. Nota Dinas Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.0975/III/1/1970 tanggal 12 Nopem- ber 1970 tentang Daftar Nama-nama orang jang tidak berhak memilih	980
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.246/1970 tanggal 17 Oktober 1970 tentang Pengesahan Daftar-daftar Warga Negara R.I. jang tidak dapat didaftar sebagai Pemilih	981
3. Nota Dinas Panitia Pemilihan Daerah DCI No. 0043/III/2/1971 tanggal 20 Djanuari 1971 tentang Pengamanan Papan-papan Pemilu Milik Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta.	990
4. Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.0064/III/1/1971 tanggal 26 Djanuari 1971 tentang Pengamanan/Keamanan Dalam meng- hadapi Kampanje dan Pemungutan Suara	991
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah selaku Kepala Markas Daerah Hansip/Wanra VII Djaya No.KEP.05-2/K/VII/1971 tanggal 23 Pe- bruari 1971 tentang Pemberian tenaga dibawah perintah (B/P) Kepada POLRI dalam rangka Pelaksanaan Pengamanan Pemilu	992
6. Instruksi Pelaksanaan Pemilu Djaya No.001-1/ R.O./4/1971 tanggal 13 April 1971	994
7. Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.0506/III/1/1971 tanggal 31 Mei 1971 tentang Katagori dibawah Pengawasan.	1006
8. Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.0548/III/1/1971 tanggal 8 Djanuari 1971 tentang Pembebasan 184 Karyawan P.N.Sabang Merauke dari Daftar Laksus	1008
9. Nota Dinas Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.0630/III/1/1971 tanggal 20 Djuni 1971 tentang Penghapusan Alat peraga Kam- panje pada Djarak Radius 200 meter dari TPS	1012

	Halaman
10. Nota Dinas Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.0631/III/1/1971 tanggal 26 Djuni 1971 perihal Penghapusan Alat Peraga Kampanje pada Djarak 200 meter dari TPS (jang ditunjukkan kepada Pimpinan Parpol/Golkar dalam wilayah DCI Djakarta	1014
11. S.O.P. Laporan tentang Djalannja Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS-TPS diwilayah DCI Djakarta tanggal 30 Djuni 1971 . . .	1016
12. Tugas Pagar Pradja sebagai penghubung antara Kelurahan dan Ketjamatan.	1022
13. Nota Dinas Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.0668/III/1/1971 tanggal 5 Djuli 1971 perihal Penghapusan Alat Peraga Kampanje . .	1024
14. Hasil Keputusan Rapat Kerdja Aparatur Pemilu se-DCI Djakarta jang diadakan pada tanggal 5 dan 6 Djanuari 1971 di Puntjak (berikut lampiran)	1026

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp.: 53418 – DJAKARTA

NOTA – DINAS

No. 975/III/1/1970.

**Kepada : Jth. Para Walikota/Ketua P.P. Kota,
Para Tjamat/Ketua P.P.S.,
Para Lurah/Ketua P.P.P.,
se DCI Djakarta.**

**Dari : Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah
DCI Djakarta.**

**Perihal : Daftar Nama-nama orang jang
tidak berhak memilih.**

Bersama ini diberitahukan, bahwa daftar nama-nama orang jang tidak berhak memilih jang oleh Saudara pernah disampaikan ke P.P.D. DCI jang selandjutnja oleh kami diteruskan ke Laksu Kopkamtibda dan Menteri Dalam Negeri untuk diteliti dan disahkan; maka dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 246 Tahun 1970 tanggal 17 Oktober 1970 jang salinannja kami lampirkan bersama ini, daftar tersebut telah disahkan sebagai orang-orang jang tidak berhak memilih.

Menunggu penjelesaian daftar-daftar tersebut jang kini sedang disalin, maka daftar-daftar jang ada pada Saudara (Arsip), dapat dipakai sebagai pedoman dengan membubuhkan keterangan pada „Kolom keterangan” kartu-kartu A1 jang bersangkutan sebagai orang-orang jang tidak berhak memilih tanpa memasukkan nama-namanja kedalam Daftar Model A.

Kartu-kartu tersebut dipisahkan tersendiri dan disimpan sebagai arsip pada tempat-tempat jang terpelihara baik sebagai dokumen selandjutnja.

Demikianlah agar Saudara maklum.

Djakarta, 12 Nopember 1970.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,

t.t.d.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

TEMBUSAN: (tanpa lampiran)

1. B.P.H./Bidang Pemerintahan
2. Sekda DCI Djakarta,
3. Dir. I/Pemerintahan,
4. Dir. II/Kamtib,
5. Arsip.

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR: 246 Tahun 1970**

tentang

**PENGESAHAN DAFTAR-DAFTAR WARGA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA JANG TIDAK DAPAT
DIDAFTAR SEBAGAI PEMILIH.**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

Bahwa setelah diadakan penelitian dengan seksama daftar-daftar Warga Negara Republik Indonesia jang tidak dapat didaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 15 tahun 1969 jo. pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 perlu mengesahkan daftar-daftar tersebut.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 15 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2914).
2. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 No. 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2919).
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1970.

Memperhatikan :

Hasil penelitian daftar-daftar Warga Negara Republik Indonesia jang tidak dapat didaftar sebagai pemilih oleh Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan daftar-daftar Warga Negara Republik Indonesia jang tidak dapat didaftar sebagai pemilih.

Pertama :

Mengesahkan daftar-daftar Warga Negara Republik Indonesia yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih sebagaimana tersebut dalam Berita Atjara yang mendjadi lampiran keputusan ini.

Kedua :

Menjampaikan daftar-daftar tersebut kepada Lembaga Pemilihan Umum.

Ketiga :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini berikut lampirannja akan diadakan perubahan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : D j a k a r t a .
Pada tanggal : 17 Oktober 1970.

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

AMIRMACHMUD.

**LAMPIRAN I Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 246 tahun
1970.**

B E R I T A – A T J A R A

Nomor : 246 tahun 1970.

Perihal :

**PENGESAHAN DAFTAR-DAFTAR WARGA NEGARA REPUBLIK
INDONESIA JANG TIDAK DAPAT DIDAFSTAR SEBAGAI PEMILIH
DI DAERAH TINGKAT I D.C.I. DJAKARTA RAYA**

Pada hari ini SABTU, tanggal tujuh belas OKTOBER seribu sembilan ratus
tujuh puluh, kami

: AMIRMACHMUD
Nama : AMIRMACHMUD
DJABATAN : MENTERI DALAM NEGERI

Berdasarkan :

1. Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No.15 tahun 1969;
2. Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1970;
3. Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB Nomor KEP. 031/KOPKAM/9/1970
Tanggal 19 September 1970.

Telah melakukan penelitian terhadap daftar-daftar Warga Negara Republik
Indonesia jang tidak dapat didaftar sebagai pemilih dari Daerah Tingkat I
D.C.I. DJAKARTA RAYA jang telah diteliti oleh PANGKOPKAMTIB dan
atas dasar penelitian tersebut mengesahkan sebagai berikut :

Djuklah seluruhnja : 14.884 (empat belas ribu delapan ratus delapan puluh
empat) orang jang meliputi :

1. Daftar kolektif terdiri dari 5 (lima) Kotamadya sedjumlah 5.259. orang.
2. Daftar kolektif P.N./Djawatan-djawatan sedjumlah 9.625. orang.

Demikianlah Berita Atjara ini kami buat dengan sebenarnja mengingat
sumpah djabatan.

Djakarta, 17 Oktober 1970
MENTERI DALAM NEGERI

Tjap/ttd.
AMIRMACHMUD

Lampiran II

**Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 246 tahun 1970.**

BERITA - ATJARA

Nomor: 246 tahun 1970.

Lampiran:

**PENGESAHAN DAFTAR-DAFTAR WARGA NEGARA REPUBLIK
INDONESIA JANG TIDAK DAPAT DIDAFSTAR SEBAGAI PEMILIH
DI DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA DJAKARTA PUSAT.**

**Pada hari ini SABTU, tanggal tudjuh belas OKTOBER seribu sembilan ratus
tudjuh puluh, kami :**

Nama	:	AMIR MACHMUD
DJABATAN	:	MENTERI DALAM NEGERI

Berdasarkan :

- 1. Pasal 12 ajat (1) Undang-Undang No. 15 tahun 1969;**
- 2. Pasal 23 ajat (3) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970;**
- 3. Surat Keputusan Nomor PANGKOPKAMTIB KEP-031/KOPKAM/9/1970
Tanggal 19 September 1970.**

**Telah melakukan penelitian terhadap daftar-daftar Warga Negara Republik
Indonesia jang tidak didaftar sebagai pemilih dari Daerah Tingkat II
KOTAMADYA DJAKARTA PUSAT jang telah diteliti oleh PANGKOP-
KAMTIB dan atas dasar penelitian tersebut mengesahkan sebagai berikut:
Djumlah seluruhnja: 1.528 (seribu lima ratus duapuluh delapan) orang
jang meliputi:**

**Daftar Kolektif KOTAMADYA DJAKARTA PUSAT
menurut tjatatan termasuk jang meninggal-dunia.
sedjumlah 1.528 orang.**

**Demikianlah Berita Atjara ini kami buat dengan sebenarnja mengingat
sumpah djabatan.**

Djakarta, 17 Oktober 1970.

MENTERI DALAM NEGERI

t.t.d.

(AMIRMACHMUD).

LAMPIRAN II Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 246 tahun 1970

BERITA — ATJARA

Nomor: 246 tahun 1970.

Perihal:

**PENGESAHAN DAFTAR-DAFTAR WARGA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA JANG TIDAK DAPAT
DIDAFTAR SEBAGAI PEMILIH
DI DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA DJAKARTA UTARA**

Pada hari ini SABTU, tanggal tudjuh belas OKTOBER seribu sembilan ratus tudjuh puluh, kami:

Nama : AMIRMACHMUD
Djabatan : MENTERI DALAM NEGERI

Berdasarkan:

1. Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 15 tahun 1969;
2. Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970;
3. Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB Nomor KEP.031/KOPKAM/9/1970 tanggal 19 September 1970.

Telah melakukan penelitian terhadap daftar-daftar Warga Negara Republik Indonesia jang tidak dapat didaftar sebagai pemilih dari Daerah TINGKAT II KOTAMADYA DJAKARTA UTARA jang telah diteliti oleh PANGKOP-KAMTIB dan atas dasar penelitian tersebut mengesahkan sebagai berikut:

Djumlah seluruhnja: 509 (lima ratus sembilan) orang jang meliputi:
Daftar Kolektif KOTAMADYA DJAKARTA UTARA
menurut tjatatan termasuk jang meninggal dunia
sedjumlah 509 orang.

Demikianlah Berita Atjara ini kami buat dengan sebenarnja mengingat sumpah djabatan.

Djakarta, 17 Oktober 1970.
MENTERI DALAM NEGERI,
t.t.d.
AMIRMACHMUD.

LAMPIRAN II Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 246 tahun 1970

BERITA - ATJARA

Nomor: 246 tahun 1970.

Perihal:

**PENGESAHAN DAFTAR-DAFTAR WARGA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA JANG TIDAK DAPAT
DIDAFTAR SEBAGAI PEMILIH
DI DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA DJAKARTA BARAT**

Pada hari ini SABTU, tanggal tudjuh belas OKTOBER seribu sembilan ratus tudjuh puluh, kami:

Nama : AMIRMACHMUD
Djabatan : MENTERI DALAM NEGERI

Berdasarkan:

1. Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 15 tahun 1969;
2. Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970;
3. Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB Nomor KEP.031/KOPKAM/9/1970 tanggal 19 September 1970.

Telah melakukan penelitian terhadap daftar-daftar Warga Negara Republik Indonesia jang tidak dapat didaftar sebagai pemilih dari Daerah TINGKAT II KOTAMADYA DJAKARTA BARAT jang telah diteliti oleh PANGKOPKAM-TIB dan atas dasar penelitian tersebut mengesahkan sebagai berikut:

Djumlah seluruhnja: 911 (sembilan ratus sebelas) orang jang meliputi:
Daftar kolektif KOTAMADYA DJAKARTA BARAT
menurut tjatatan termasuk jang meninggal dunia
sedjumlah 911 orang.

Demikianlah Berita Atjara ini kami buat dengan sebenarnja mengingat sumpah djabatan.

Djakarta, 17 Oktober 1970.
MENTERI DALAM NEGERI
t.t.d.
AMIRMACHMUD.

LAMPIRAN II Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 246 tahun 1970

BERITA — ATJARA

Nomor: 246 tahun 1970.

Perihal:

**PENGESAHAN DAFTAR-DAFTAR WARGA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA JANG TIDAK DAPAT
DIDAFTAR SEBAGAI PEMILIH
DIDAERAH TINGKAT II KOTAMADYA DJAKARTA SELATAN**

Pada hari ini SABTU, tanggal tujuh belas OKTOBER seribu sembilan ratus tujuh puluh, kami:

Nama : AMIRMACHMUD
Djabatan : MENTERI DALAM NEGERI

Berdasarkan :

1. Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 15 tahun 1969;
2. Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970;
3. Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB Nomor KEP.031/KOPKAM/9/1970 tanggal 19 September 1970.

Telah melakukan penelitian terhadap daftar-daftar Warga Negara Republik Indonesia jang tidak dapat didaftar sebagai pemilih dari Daerah TINGKAT II KOTAMADYA DJAKARTA SELATAN jang telah diteliti oleh PANGKOPKAMTIB dan atas dasar penelitian tersebut mengesahkan sebagai berikut:

Djumlah seluruhnja: 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) orang jang meliputi:

Daftar Kolektif KOTAMADYA DJAKARTA SELATAN
menurut tjatatan termasuk jang meninggal dunia
sedjumlah 1.170 orang.

Demikianlah Berita Atjara ini kami buat dengan sebenarnja mengingat sumpah djabatan.

Djakarta, 17 Oktober 1970.
MENTERI DALAM NEGERI,
t.t.d.
AMIRMACHMUD.

LAMPIRAN II Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 246 tahun 1970

BERITA — ATJARA

Nomor: 246 tahun 1970.

Perihal:

**PENGESAHAN DAFTAR-DAFTAR WARGA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA JANG TIDAK DAPAT
DIDAFTAR SEBAGAI PEMILIH
DI DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA DJAKARTA TIMUR**

Pada hari ini SABTU, tanggal tudjuh belas OKTOBER seribu sembilan ratus tudjuh puluh, kami:

Nama : AMIRMACHMUD
Djabatan : Menteri dalam negeri

Berdasarkan:

1. Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 15 tahun 1969;
2. Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1970;
3. Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB Nomor KEP.031/KOPKAM/9/1970 tanggal 19 September 1970.

Telah melakukan penelitian terhadap daftar-daftar Warga Negara Republik Indonesia jang tidak dapat didaftar sebagai pemilih dari Daerah TINGKAT II KOTAMADYA DJAKARTA TIMUR jang telah diteliti oleh PANGKOPKAM-TIB dan atas dasar penelitian tersebut mengesahkan sebagai berikut:

Djumlah seluruhnja: 1.216 (seribu dua ratus enam belas) orang jang meliputi:

Daftar Kolektif Kotamadya DJAKARTA TIMUR
menurut tjatatan termasuk jang meninggal dunia
sedjumlah 1.216 orang.

Demikianlah Berita Atjara ini kami buat dengan sebenarnja mengingat sumpah djabatan.

Djakarta, 17 Oktober 1970.
MENTERI DALAM NEGERI,
t.t.d.
AMIRMACHMUD.

**LAMPIRAN II Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 246 tahun
1970.**

B E R I T A – A T J A R A

Nomor : 246 tahun 1970.

Perihal :

**PENGESAHAN DAFTAR-DAFTAR WARGA NEGARA REPUBLIK
INDONESIA JANG TIDAK DAPAT DIDAFSTAR SEBAGAI PEMILIH
DI D.C.I. DJAKARTA RAYA PADA P.N./DJAWATAN-DJAWATAN.**

**Pada hari ini SABTU, tanggal tujuh belas OKTOBER seribu sembilan ratus
tujuh puluh, kami :**

**Nama : AMIRMACHMUD
DJABATAN : MENTERI DALAM NEGERI.**

Berdasarkan :

- 1. Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No.15 tahun 1969;**
- 2. Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1970;**
- 3. Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB Nomor KEP.031/KOPKAM/9/1970
Tanggal 19 September 1970.**

**Telah melakukan penelitian terhadap daftar-daftar Warga Negara Republik
Indonesia jang tidak dapat didaftar sebagai pemilih dari P.N.-P.N./Djawatan-
djawatan di Daerah Tingkat I D.C.I. Djakarta Raya jang telah diteliti oleh
PANGKOPKAMTIB dan atas dasar penelitian tersebut mengesahkan sebagai
berikut :**

**Djumlah seluruhnja : 9.625. (sembilan ribu enam ratus dua puluh lima)
orang jang meliputi :**

**Daftar Kolektif P.N.-P.N./Djawatan-djawatan
di Daerah Tingkat I D.C.I. Djakarta Raya. sedjumlah 9.625. orang.**

**Demikianlah Berita Atjara ini kami buat dengan sebenarnja mengingat
sumpah djabatan.**

**Djakarta, 17 Oktober 1970.
MENTERI DALAM NEGERI
Tjap/ttd.
AMIRMACHMUD**

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp.: 53418 – DJAKARTA

NOTA – DINAS

No.: 0043/III/2/1971.

**Dari : Panitia Pemilihan Daerah
Daerah Khusus Ibukota Djakarta.**

**Kepada : Semua Walikota/Ketua PP. Kota se-DCI Djakarta;
Semua Tjamat/Ketua PPS se-DCI Djakarta.**

**Perihal : Pengamanan Papan-papan Pemilu
milik PPD DCI Djakarta.**

Berdasarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No. 1064/III/2/1970 tanggal 24 Desember 1970 yang ditunjukkan kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta, tentang pemasangan papan-papan penerangan Pemilu di beberapa tempat strategis di Ibukota, serta memperkuat pemberitahuan lisan kami pada Rapat Kerdja di Puntjak tanggal 5 dan 6 Djanuari 1971 yang lalu, bersama ini diminta agar Saudara:

Turut mengawasi dan mengamankan papan-papan penerangan Pemilu milik PPD DCI Djakarta yang dipasang di beberapa tempat strategis di Ibukota (lihat lampiran), sehingga papan-papan tersebut tetap terpantjang pada tempatnja dalam keadaan baik.

Demikian kiranja pengawasan dapat dilakukan sebaik-baiknya.

Djakarta, 20 Djanuari 1971.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,

t.t.d.

TEMBUSAN:

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
2. Laksusda Djaya,
3. Kadapol Metro Djaya,
4. BPH./Bidang Pemerintahan,
5. Sekda DCI Djakarta,
6. Dir. I/Pemerintahan,
7. Dir. II/Kamtib DCI Djakarta,
8. Arsip.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp.: 53418 – DJAKARTA

Nomor : 0064/III/1/1971. Djakarta, 26 Djanuari 1971.
Lampiran : —.—
Perihal : Pengamanan/Keamanan dalam
menghadapi Kampanje dan
Pemungutan Suara.

Kepada Jth.

1. Para Walikota/Ketua PP. Kota,
2. Para Tjamat/Ketua P.P.S.
se DCI Djakarta
di

DJAKARTA.—

Dari laporan para pendjabat diwilajah jang kami terima, diketahui bahwa instansi-instansi jang ada diwilajah kini sedang menjusun rentjana ketentuan-ketentuan jang berhubungan dengan Pengamanan dan Keamanan dalam menghadapi Kampanje dan Pemungutan Suara jang akan datang.

Untuk tidak terdjadinja kesimpang-siuran dalam pelaksanaan kelak, hendaknja dalam menjusun rentjana itu, Saudara melaksanakan keputusan-keputusan jang akan dikeluarkan baik oleh Laksusda Djaya, Kadapol Metro Djaya, dan PPD DCI Djakarta sendiri jang kini dalam persiapan untuk itu dan segera akan disampaikan pada waktunya.

Demikian agar Saudara maklum.

PANITIA PEMILIHAN DAERAH/
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
Sekretaris,
t.t.d.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

TEMBUSAN:

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
2. Laksusda Djaya,
3. Kadapol Metro Djaya,
4. B.P.H. Bidang Pemerintahan,
5. Sekda DCI Djakarta,
6. Direktorat I/Pemerintahan,
7. Direktorat II/Kamtib
8. Arsip.

**DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN
MARKAS DAERAH HANSIP/WANRA VII
DJAKARTA RAYA**

SURAT – KEPUTUSAN

No. KEP 05-2/K/VII/2/1971.

tentang

**PEMBERIAN TENAGA DIBAWAH PERINTAH (B/P) KEPADA
P.O.L.R.I. DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMANAN
PEMILU**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA RAYA**

selaku

KEPALA MARKAS DAERAH HANSIP/WANRA VII DJAYA

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka pengamanan PEMILU, maka tenaga-tenaga Hansip/ Wanra pun sangat diperlukan dalam membantu ABRI dan POLRI, dalam rangka pengamanan langsung maupun tidak langsung;
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengerahkan tenaga-tenaga Hansip/ Wanra didaerah Djakarta Raya guna memenuhi permintaan tenaga pengamanan PEMILU.

Mengingat :

1. Surat Keputusan MEN HANKAM/PANGAB No. Kep. A/323/1967 tanggal 9 Nopember 1967 tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil;
2. Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB Nomor: Kep. 008/KOPKAMTIB/ 2/1970 tanggal 20 Pebruari 1970 tentang Pola Kebidjaksanaan pengamanan Pemilu tahun 1971;
3. Rentjana Operasi PEMILU dari LAKSUS PANGKOPKAMTIB/DJAYA Nomor: R.O-002-2/PC/11/1970 tanggal 7 Nopember 1970 tentang kebutuhan tenaga Hansip/Wanra;
4. Surat LAKSUS PANGKOPKAMTIB DJAYA No. R.054-2/PC/11/70, tanggal 23 Nopember 1970, tentang bantuan tenaga Hansip/Wanra dalam rangka pelaksanaan pengamanan Pemilu kepada POLRI.

Memutuskan :

- UNTUK :**
1. Menjerahkan tenaga-tenaga Hansip/Wanra guna membantu pelaksanaan pengamanan Pemilu tahun 1971 sebanyak 16.580 anggota.
 2. Tenaga Hansip/Wanra tersebut disediakan masing-masing dari:
 - 1). MARES 71 DJAYA PUSAT 4.756 orang.
 - 2). MARES 72 DJAYA UTARA 2.062 orang.
 - 3). MARES 73 DJAYA BARAT 3.020 orang.
 - 4). MARES 74 DJAYA SELATAN 3.946 orang.
 - 5). MARES 75 DJAYA TIMUR 2.788 orang.
 3. Tenaga Hansip/Wanra seperti tersebut titik 2 diatas dari tiap-tiap Mares dikoordinasikan oleh Kepolisian Wilayah.
 4. Tiap-tiap Mares supaya mempersiapkan sesuatu dalam Penjerahan tenaga-tenaga Hansip/Wanra tersebut titik 2 diatas kepada KADAPOL METRO DJAYA sebagaimana mestinya.
 5. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Tjataan:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 23 Pebruari 1971.

**GOVERNOR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA RAYA
selaku
KEPALA MARKAS DAERAH HANSIP/WANRA VII
JAKARTA RAYA
t.t.d.**

(ALI SADIKIN)

Letnan Jenderal KKO.

TEMBUSAN:

1. PANGKOPKAMTIB DJAYA;
2. PANGKOWILHAN II/DJAWA MADURA;
3. PANGDAM V/DJAYA;
4. PANGDAERAL-3;
5. PANGKODAU-5;
6. KADAPOL METRO DJAYA;
7. GOVERNOR KDCI DJAYA;
8. KAPUSWANKAMRA;
9. ASS TERR LAKSUS DJAYA;
10. ASS TERR REGIONAL;
11. ASS OPS REGIONAL;
12. ARSIP.

**PEMERINTAH DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA**

„RAHASIA”

Copy Nomor :
Pemerintah Daerah : DCI DJAYA
P o s k o : Balai Kota Merdeka
Selatan No. 8
Tanggal/Waktu : Djanuari 1971.

INSTRUKSI : Pelaksanaan Pemilu Djaya.
Nomor : 001-1/R.O/4/1971.
Peta : Djakarta Raya
Skala : 1 : 50.000

I. PENDAHULUAN:

1. Dasar:

- (a) Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966;
- (b) Ketetapan MPRS No. XLII/MPRS/1968;
- (c) Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat;
- (d) Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah;
- (e) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat;
- (f) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

2. Tudjuan:

Terlaksananja Penjelenggaraan Pemilu 1971 dengan aman, tertib, bersih, djudjur, jang mendjamin kemenangan Orde Baru dan tetap tegaknja Pantja Sila UUD'45.

3. Ruang Lingkup:

- (a) Wilayah Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya.
- (b) Dimulai sedjak persiapan, pelaksanaan dan Tahap Rehabilitasi.

4. Organisasi Tugas:

(Lihat Annex I)

II. SITUASI:

1. Musuh:

(Lihat R.O.2/PC/11/1970).

2. Pasukan sendiri:

(idem).

3. Pasukan Lawan:

(idem).

4. Aparat Kita:

(a) P.P.D. DCI Djakarta;

(b) P.P. Kota;

(c) P.P.S.;

(d) K.P.P.S.;

III. PRA ANGGAPAN:

1. Situasi Ipoleksosbud dan Agama masih tetap dalam periode peralihan, diduga menghadapi persiapan-persiapan Pemilu Tahun 1971 akan menimbulkan gejala-gejala yang makin rawan kearah instabilitas Politik.
2. Sisa-sisa G.30.S/PKI, subversi dan golongan ekstrim masih tetap merupakan bahaya latent. (Lihat annex No. 1).
3. Pemilu Tahun 1971 tetap akan dilaksanakan pada waktunya dengan tertib, aman, lancar dan sukses dalam arti tetap tegaknya Pantja Sila dan UUD'45.

IV. TUGAS POKOK:

Panitia Pemilihan Daerah DCI Djaya melaksanakan teknis administratif Pemilu dengan tertib sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

V. PELAKSANAAN:

1. Konsep Operasi:

Tahap kesatu: (Phase pendaftaran pemilih) Pasal 2 Undang-undang No. 15 Tahun 1969 dan pasal 23 PP. No. 1 Tahun 1970:

(a) Pengamanan Penjaminan Daftar A dan Kartu-kartu A1.

(b) Pengiriman Daftar Pemilih.

(c) Pengamanan orang-orang yang dilarang didaftar dalam daftar pemilih. (Orang-orang yang tidak berhak memilih);

- (d) Pengamanan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap. (Lihat Annex No. 2);

Tahap kedua: (phase pendjumlahan penduduk dan anggota-anggota keluarga yang berhak memilih);

Phase ini adalah berupa pengamanan pengiriman daftar djumlah penduduk dari Desa/Kelurahan, Ketjamatan, Walikota, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Lembaga Pemilihan Umum.

Tahap ketiga: (phase pentjalonan);

- (a) Penelitian orang-orang yang tidak berhak untuk dipilih (pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 15 Tahun 1969);
- (b) Mengawasi atau mengamankan Daftar Tjalon Sementara yang ditempelkan ditempat-tempat Pengumuman Kantor Pemungutan Suara (30 hari) Pasal 51 ayat (4) dan Pasal 52 PP. No. 1 tahun 1970 (Lihat Annex No. 2).

Tahap keempat: (phase kampanye) tanggal 27 April s/d 25 Djuni 1971.

- (a) Penentuan tempat-tempat kampanye;
- (b) Penentuan Djadwal Kampanje;
- (c) Persjaraan-persjaraan kampanje;
- (d) Bantuan medis selama kampanje, sesuai instruksi Gubernur No. 0286/III/1/1971.

Tahap kelima: Pelaksanaan Pemilu tanggal: 3 Djuli 1971.

Pengamanan bagi tehnik pelaksanaan Pemilu:

- (i) Panggilan-panggilan pemilih;
- (ii) T.P.S. ;
- (iii) Pengolahan/pengangkutan hasil Pemilu;

2. Operasi:

- (a). Pengamanan intern terhadap:
- (i) Sarana-sarana Pemilu;
- (ii) Peningkatan kesiapan mental aparat pelaksana operasional Pemilu;
- (iii) Latihan-latihan pelaksanaan tehnik Pemilu;
- (iv) Penerangan-penerangan pada masjarakat;
- (v) Koordinasi dengan kesatuan-kesatuan pengamanan langsung/tidak langsung.
- (b). Lihat Annex 2.

VI. INSTRUKSI KOORDINASI:

1. Peralihan dari tahap-ketahap ditentukan dengan Perintah setjara lisan maupun tertulis oleh GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA PEMILIHAN DAERAH DCI Djakarta.

2. Didalam pelaksanaan supaya diusahakan adanya kerdja sama antara Aparat Pemilu DCI dengan POLRI, ke-3 Unsur Angkatan jang mentjerminkan adanya Integrasi Koordinasi Sinkronisasi Simplifikasi (Kiss) antara Aparat;
3. Para Walikota/PP. Kota, Tjamat/Ketua PPS, Lurah/Koordinator KPPS supaya mengikuti perkembangan dan mengadakan Koordinasi dengan aparat-aparat keamanan diwilajahnja masing-masing dengan tjara jang sebaik-baiknja;
4. Rentjana Pelaksanaan Tehnis Administratif Pemilu ini segera dilaksanakan dan pelaksanaan selandjutnja atas perintah;
5. Bila terdjadi perkembangan diluar kemampuan para Walikota, Tjamat, Lurah, agar diatasi dengan memusyawarahkan dengan Unsur-unsur MUSPIDA setempat;

VII. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK:

1. Rentjana dukungan Logistik Pemilu tahun 1971 (lihat Annex terlampir No. 3);
2. Hal-hal lain jang tidak tertjantum dalam annex logistik dibebankan dari kemampuan routine Wilajah masing-masing.

VIII. KOMANDO DAN PERHUBUNGAN:

1. Lihat R.O-2/PC/11/1970 No. R.O.A/II/1/1971 Komdak Metro Djaya. Posko Balai Kota Merdeka Selatan 8.
2. **Perhubungan:**
 - a. Pergunakan segala perhubungan jang ada;
 - b. Djaringan-djaringan hubungan Telekomunikasi (lihat Annex terlampir No. 4);
 - c. Pergunakan Perhubungan (Kurir apabila sangat diperlukan).

Djakarta, 13 April 1971.

**PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA/PANITIA PEMILIHAN DAERAH/
t.t.d.**

(A. WIRIADINATA)

**Laksamana Muda Udara
WAKIL KEPALA DAERAH**

ANNEX No. 1.

PERKIRAAN KEADAAN.

Telah tertangkap sebagian besar Group Comitee P.K.I. Djakarta Raya Pimpinan SISWOJO alias SARDJONO.

Mereka telah mentjapai tahap:

- a). Pembentukan Organisasi Comitee Djaya jang baru dengan pimpinan kolektif 5 orang.
- b). Membentuk Comitee-Comitee Kota lengkap dengan Personalianja.
- c). Persiapan Triko dalam rangka „Pembentukan Pelaksanaan Taktik PERDJUTA”.
- d). Pembentukan Group-group Simpatisanja baik menurut asal daerah pelariannja maupun menurut bidang tugasnja.
- e). Pembinaan dibidang-bidang a.l.:
 - (i) Perburuhan.
 - (ii) Mahasiswa/Pemuda/Peladjar (MPP)
 - (iii) Gelandangan/Ukang betja dan lain-lain.
 - (iv) Pertanian/Tani.
 - (v) Usaha-usaha Produktif
 - (vi) Kebudayaan.
 - (vii) Mass-media.
 - (viii) Front Pembebasan Nasional Progressif.
 - (ix) Group-group Pelarian.
 - (x) Aksi-aksi Massa.
 - (xi) Perdjuta.
 - (xii) Group-group di Kedubes Negara-negara Sosialis.

Systeem Organisasi Group tersebut adalah berlapis dengan menggunakan sisa-sisa Kader jang belum tertangkap.

Situasi POLEKSOSBUD masih memungkinkan mereka untuk melakukan usaha-usaha perongrongan terhadap Pemerintah.

MATJAM-MATJAM GOLONGAN EXTREEM.

A. 1. Golongan EXTREEM Agama.

Issue-issue.

- (a) Masalah Korupsi
- (b) Masalah Dwi Fungsi
- (c) Masalah Rule of Law
- (d) dsb.

Sarana: Pidato-pidato, Tjeramah-tjeramah, Chotbah.

2. Membangkitkan semangat Djihad Umat Islam dalam masjarakat terutama digolongan mudanja.

3. Memperketijl peranan dari Pantjasila dan U.U.D.'45.

B. Golongan EXTREEM ORLA.

Tetap melakukan Konsolidasi.

C. Subversi.

(a) Kegiatan Kedutaan Besar Asing

(b) Imigrant gelap

(c) Melalui Joint-Venture, Travel Bureau dan Tourisme.

D. Politik.

1. Perpetjahan P.N.I., IPKI., PARMUSI, P.W.I. dsb.

2. Adanja Komitee-komitee Aksi Pemilu dari Partai-partai.

E. Ekonomi.

1. Penjelundupan.

2. Kegagalan Projek Bimas.

F. SOSBUD.

(a) Pertentangan Agama

(b) Pengangguran

(c) Buruh Betjak

(d) Gang-gang Pemuda

(e) Pengaruh Film/Gambar Porno

(f) Gandja, Morfin, Heroin

(g) Masalah Tapol Golongan C.

G. Aksi-aksi Mahasiswa.

H. Hankam.

KESIMPULAN

POLITIK.

Akan terasa makin meningkatnja ketegangan-ketegangan dibidang Politik sebagai akibat:

(a). Peningkatan Kampanje Pemilu oleh masing-masing Partai.

(b). Golongan jang tidak setudju dengan U.U. Pemilu atau jang tidak diikut sertakan dalam Pemilu akan tetap mempengaruhi situasi.

(c). Adanja rivalitas dalam ber-Kampanje dari masing-masing Parpol.

EMOSI DAN PENUNGGANGAN DARI SISA-SISA G.30.S/P.K.I. ATAU GOLONGAN EXTREEM LAINNJA.

KEAMANAN

I. Konsep Operasi

Pentahapan pelaksanaan:

- (a) Tahap I (Persiapan dan penjurusan)
Tanggal 1 Djanuari 1971 s/d 4 Djuli 1971.
- (b) Tahap II (Pelaksanaan Pemilu)
Tanggal 3 Djuli 1971.
- (c) Tahap III (Konsolidasi)
Tanggal 4 Djuli 1971 s/d 30 Nopember 1971.

II. Matjam Operasi

- 1. Operasi Intell
- 2. Operasi Territorial
- 3. Operasi Tempur (A.B.R.I.)

III. Penempatan Pasukan

Pasukan langsung (Polri/Hansip/Wanra), penempatannya disesuaikan dengan jumlah T.P.S. di daerah yang meliputi 8268 T.P.S. (KADAPOL/HANSIP).

IV. Tugas Pasukan-pasukan Langsung

- (a) Tindakan pengamanan fisik dan tindakan refresief terhadap tempat-tempat pengumpulan dan perhitungan suara dan route-route perjalan/pengangkutan Kotak-kotak Suara ke KODYA dan seterusnya.
- (b) Pengawasan.

V. Penanggung Jawab Keamanan

Para DANDIM 0501 s/d 0505 Djaya.

VI. Administrasi dan Logistik

Mengenai ini dipikul oleh Kesatuannya masing-masing.

VII. Komando dan Perhubungan

- (a) Telekom, Radio, Kurir.
- (b) Posko.
 - (i) Laksus Pangkopkamtib/Djaya bertempat di MAKODAM V/Djaya tilpon: 46875, 43369, 48425, 51818.
 - (ii) KOGAR IBUKOTA: Tilpon: 48703, 49070, 48004.

KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN:

(a) G.30.S/P.K.I.

- (i) Sabotase
- (ii) Psywar, issue-issue
- (iii) Intimidasi terhadap rakjat
- (iv) Peningkatan Aksi,
- (v) Memberikan Penerangan-penerangan jang salah
- (vi) Dalih tidak puas dengan Pemilu.

(b) EXTREEM

Orla

- Mendiskriditkan Pemerintah/ABRI.
- Aksi-aksi lainnja jang paralel dengan usaha G.30.S/PKI.

(c) Agama

- Kegiatan akan diarahkan kepada Agama sebagai thema dan menggunakan Pantjasila sebagai taktik.
- Melakukan intimidasi kepada Rakjat.

(d) Subversi

- mengambil keuntungan dari situasi.
- Subversi anti Pemerintah.

HAMBATAN

- Pengatjauan Pendaftaran
- Masa transisi sesudah Pemilu.

Mungkin timbul ketegangan-ketegangan atau clash fisik setjara terbatas.

Djakarta, 8 April 1971.

**KEPALA BAGIAN KEAMANAN
P.P.D. - D.C.I.
DJAKARTA**

ANNEX : 2.

POKOK-POKOK KEGIATAN JANG TELAH, SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGAMANAN KAMPANJE, PEMUNGUTAN SUARA DAN KEAMANAN PEMILIHAN UMUM

Pelaksanaan persiapan pengamanan Pemilu telah diadakan sedjak phase persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum dimulai.

Phase-phase tersebut ialah:

- I. Phase Pendaftaran Pemilih.
- II. Phase Pendjumlahan Penduduk dan Anggota-anggota Keluarga jang berhak memilih.
- III. Phase Pentjalonan.
- IV. Phase Kampanje.
- V. Phase Pemungutan Suara.

I. PHASE PENDAFTARAN PEMILIH:

Pengamanan dalam phase pendaftaran pemilih dititik beratkan pada:

1. **Orang-orang jang dilarang didaftar dalam Daftar Pemilih.** (Jang tidak berhak memilih).

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 U.U. No. 15 Tahun 1969 dan pasal 23 P.P. No. 1 Tahun 1970 ialah:

- a. Warga Negara Republik Indonesia, **bekas anggota** organisasi terlarang PKI, termasuk Ormasnja.
- b. Jang terlibat langsung (tidak langsung) dalam G.30.S/PKI.
- c. Anggota-anggota Organisasi terlarang lainnja.

Untuk ini ada 2 (dua) Daftar orang-orang jang tidak berhak memilih jaitu:

1. Daftar jang disampaikan oleh 5 (lima) Wilayah berdjumlah 5.259 (lima ribu duaratus limapuluh sembilan) orang, daftar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 246/1970 tanggal 17 Oktober 1970.
 2. Daftar jang diberikan oleh Laksus meliputi sedjumlah 34.477 (tigapuluh empat ribu empat ratus tudjuhpuh tudjuh) orang.
2. **Pengamanan Penjimpanan Daftar A dan Kartu-kartu A1.**
(Daftar Pemilih jang ada di Kantor-kantor Kelurahan jang selama ini pengamanan/pendjagaan dilakukan oleh Pagar Pradja dan Hansip setempat).

3. Pengiriman Daftar Pemilih dari Kantor-kantor Kelurahan (Desa) kepada P.P.S./Ketjamatan.
4. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap.
5. Periode penampungan protes dan keberatan-keberatan atas pengumuman Daftar Pemilih Sementara (karena nama yang bersangkutan tidak tertjantum dalam Daftar Pemilih atau sebaliknya yang mestinja tidak berhak memilih namanja ada tertjantum dalam Daftar Pemilih Sementara).

II. PHASE PENDJUMLAHAN PENDUDUK:

Pengamanan dalam phase pendjumlahan penduduk dan anggota yang dipilih, jaitu pengamanan pengiriman daftar djumlah penduduk tersebut dari Desa/Kelurahan, Ketjamatan, Walikota, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Lembaga Pemilihan Umum.

III. PHASE PENTJALONAN:

Pengamanan dalam phase pentjalonan dititik beratkan pada:

- a. Orang-orang yang **tidak berhak untuk dipilih** seperti halnya orang-orang yang tidak boleh didaftar sebagai pemilih (Pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 15 Tahun 1969).
- b. Untuk ini dibentuk 2 (dua) Team di DCI untuk meneliti persjaraan-persjaraan tjalon ialah:
 - Panitia Peneliti segi-segi tehnis administratif di Panitia Pemilihan Daerah/Daerah Khusus Ibukota Djakarta dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU tanggal 31 Oktober 1970 No. 74/LPU/1970.
 - Team Peneliti Laksus yang bertugas meneliti segi-segi politis-ideologis dengan Surat Keputusan Laksus Pangkopkamtibda Djaya No. Kep-057/PC/9/1970 tanggal 2 September 1970.
- c. Mengawasi/mengamankan tjalon dan Daftar Tjalon Sementara yang ditempelkan pada tempat-tempat pengumuman yang ditempatkan di Kantor-kantor Pemungutan Suara (30 hari) Pasal 51 ayat (4) dan Pasal 52 P.P. No. 1 Tahun 1970.

Dalam segi pengamanan ini maka sampai dengan tanggal 31 Maret 1971, dari tjalon-tjalon yang diadjukan oleh Parpol/Golkar sebanyak 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) orang; yang terkena penelitian Laksus sebanyak 23 (duapuluh tiga) orang karena alasan politik ideologis, dan 106 (seratus enam) orang karena tidak memenuhi persjaraan tehnis-administratif/termasuk yang mengundurkan diri.

IV. PHASE KAMPANJE:

1. Dalam menghadapi Kampanje dan Pemungutan Suara yang merupakan klimaks dari kegiatan-kegiatan Pemilu maka Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta dengan Panitia Pemilihan Kota dan Panitia Pemungutan Suara se-DCI Djakarta telah mengadakan pertemuan di Puntjak pada tanggal 5 Januari 1971 s/d 6 Januari 1971 untuk **merumuskan** langkah-langkah kebidaksanaan yang akan ditempuh dalam rangka menghadapi pengamanan dalam masa Kampanje dan Pemungutan Suara dan Penjelenggaraan Pemilu pada umumnya.
Hasil perumusan tersebut antara lain telah dituangkan kedalam Instruksi Kadapol Metro Djaya No. Pol. 3/I/Instr/Dak.Metro Djaya/1971 tanggal 1 Februari 1971.
2. Masa Kampanje akan dimulai tanggal 29 April 1971 selama 60 (enampuluh) hari, sebagai dimaksud dalam Pasal 54 P.P. No. 1 Tahun 1970 dan Keputusan Presiden No. 68 Tahun 1970.
3. Pada masa Kampanje ini dimana segala tjara dan daja akan dilakukan oleh Parpol/Golkar untuk menarik massa, simpatisan sebanjak-banjaknya; sedikit banjak akan mempengaruhi situasi dan keadaan kehidupan masyarakat/penduduk sehari-hari baik dibidang ekonomi, politik dan sarana-sarana lainnya.
4. Tempat-tempat untuk berkampanje baik lapangan terbuka maupun tempat-tempat tertutup (gedung-gedung yang bukan tempat-tempat ibadah dan bukan milik Pemerintah) telah disiapkan sebagaimana daftar terlampir.
Dari hasil rapat dengan Parpol/Golkar Wilayah DCI Djakarta tanggal 1 April 1971, para Parpol/Golkar mengusulkan agar diperkenankan untuk menambah tempat-tempat Kampanje yang mereka inginkan; (daftar usulan ditunggu sampai tanggal 7 April 1971).
5. Usul-usul lainnya dari para Parpol/Golkar tersebut antara lain:
 - a. Agar Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta menjediakan panggung terbuka dimasing-masing Wilayah untuk dipakai berkampanje setjara bergilir bagi Parpol/Golkar yang bersifat pertunjukan, baik dilakukan siang hari maupun malam hari, (mungkin ini dapat diharapkan sebagai pengganti Kampanje pada malam hari ditempat terbuka yang mengerahkan massa yang berdasarkan Instruksi Kadapol Metro Djaya No. Pol.3/I/Instr/Dak.Metro Djaya/1971 dilarang).

- b. Agar diperkenankan berkampanje keliling dengan menggunakan mobil-mobil unit penerangan (dipindjamkan setjara bergilir kepada Parpol/Golkar dari Djawatan Penerangan dan lain sebagainya).**
- c. Agar dalam melakukan Kampanje Parpol/Golkar diperkenankan mengadakan pengamanan kedalam, membantu ABRI (PPD DCI mengharapkan agar tidak dilakukan setjara demonstratif, misalnja dengan badju seragam dan sebagainya).**

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp. : 53418 – DJAKARTA

Nomor : 0506/III/1/1971.

Djakarta, 31 Mei 1971.

Lampiran : 2 (dua) helai.

Perihal : Katagori dibawah pengawasan.

Kepada Jth.

Sdr. Walikota/Ketua P.P. Kota

Djakarta Barat,

Djl. Fatahillah,

di

DJAKARTA.—

Sehubungan dengan surat pertanjaan dari Tjamat/Ketua P.P.S. Ketjamatan Taman Sari tanggal 5 Maret 1971 No. $\frac{477}{3}$ /V/KT/3/1971, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka sesuai dengan pendjelasan dari Laksus Pangkopkamtibda Djaya dengan suratnja No. B-132/PC/5/1971 tanggal 26 Mei 1971 adalah sebagai berikut:

- a. Djika didalam Daftar orang-orang jang tidak berhak memilih jang telah disampaikan kepada Saudara, terdapat tjatatan-tjatatan/Katagori dibawah pengawasan, jang dimaksud adalah: bahwa oknum tersebut masih tetap diikuti tingkah laku landjutan dari jang bersangkutan jang kemungkinan dapat memberi petundjuk-petundjuk baru tentang ketertibannja, jang sewaktu-waktu dapat dijadikan dasar untuk penilaian/herklasifikasi.
- b. Bahwa diantara jang bersangkutan masih ada jang bertugas sebagai Pengurus RT dan RW masalahnja terletak dibidang administrasi personil, serta penindakannja sesuai dengan Keputusan Pangkopkamtib No. KEP-028/Kopkam/10/1968 tentang dasar kebijaksanaan Penertiban/Pembersihan Personil Aparatur Pemerintah/Negara tanggal 18 Oktober 1968 – Pasal 4, 5, 6 dan 7.
- c. Sebagai tjontoh dapat dikemukakan, bahwa mereka jang termasuk klasifikasi C.3., dikenakan penindakan berupa pengawasan dan indoktrinasi (santiadji) hal mana mengandung arti, bahwa jang bersangkutan tidak harus dipetjat dari djabatannja.

- d. Adapun ketentuan mengenai apakah seseorang dapat didaftar atau tidak sebagai pemilih telah kami jelaskan melalui surat kami No. 0490/III/1/1971 tanggal 24 Mei 1971 jaitu pendjelasan terhadap Instruksi Direksi P.N.K.A. Bandung, jang telah kami sampaikan djuga kepada Saudara.

Demikianlah pendjelasan kami tersebut dan selandjutnja bersama ini disampaikan kutipan pasal 4, 5, 6 dan 7 Keputusan Pangkopkamtib tersebut diatas untuk perhatian Saudara seperlunja.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

**Sekretaris,
t.t.d.**

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

TEMBUSAN:

1. Sekda DCI Djakarta,
2. Direktorat I/Pemerintahan,
3. Direktorat II/Kamtib,
4. Direktorat VII/Chusus Politik,
5. Para Walikota/Ketua P.P. Kota,
6. Para Tjamat/Ketua P.P.S.,
7. Arsip.—

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp.: 53418 – DJAKARTA

Nomor : 0548/III/1/1971. Djakarta, 8 Djuni 1971.
Lampiran : satu exemplar.
Hal : Pembebasan 184 Karyawan
PN Sabang Merauke dari daftar Laksus.

Kepada Jth.
Para Walikota/Ketua PP. Kota,
Para Tjamat/Ketua PPS,
Para Lurah/Koordinator KPSS se-DCI
di

DJAKARTA. –

Segera!

Bersama ini diberitahukan bahwa sebanjak 184 orang karyawan PN Sabang Merauke jang tadinja termasuk dalam daftar Laksus, jang berarti dimasukkan dalam katagori orang-orang jang tidak berhak memilih, berdasarkan surat dari Laksus Pangkopkamtibda Djaya No. B.099-1/PC/4/1971 tanggal 30 April 1971 telah diperbaiki kembali dan karyawan-karyawan tersebut adalah orang-orang jang berhak memilih.

Sehubungan dengan itu, maka dalam waktu dekat ini, ialah sebelum batas waktu tanggal 15 Djuni 1971, akan datang kepada Saudara utusan dari PN Sabang Merauke jang membawa lampiran daftar nama-nama karyawan tersebut, untuk mengurus pemasukan dalam daftar pemilih tambahan, sekaligus dengan pengurusan kartu A.4 setjara kolektif, karena orang-orang tersebut akan menggunakan hak pilihnja di TPS kantor ditempat mereka bekerdja.

Berhubung dengan itu sambil menunggu salinan daftar nama-nama 184 karyawan PN Sabang Merauke jang kini sedang kami kerdjakan dan akan segera kami kirimkan kepada Saudara, hendaknja kedatangan utusan dari PN Sabang Merauke jang membawa daftar nama-nama jang dimaksud dari Laksus, dilajani sebagaimana mestinja dan orang-orang tersebut didaftar sebagai pemilih tambahan sependjang jang bersangkutan benar bertempat tinggal diwilajah Saudara.

Untuk kelengkapan bagi Saudara, bersama ini kami lampirkan salinan surat dari Laksus tersebut diatas untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,
t.t.d.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

TEMBUSAN:

1. Sekda,
2. Dir. I, II dan VII
3. Direksi PN Sabang Merauke
4. Arsip.

1008

KUTIPAN
KEPUTUSAN PANGLIMA KOMANDO OPERASI
PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

NOMOR: KEP-028/KOPKAM/10/68

tentang

DASAR KEBIDJAKSANAAN PENERTIBAN/PEMBERSIHAN
PERSONIL APARATUR PEMERINTAH/NEGARA.

BAB II

SASARAN KLASIFIKASI DAN PENINDAKAN

Pasal 3.

Sasaran keputusan ini ialah semua Personil Sipil dan Anggota ABRI pada Departemen, Lembaga Pemerintah/Negara yang terlibat dalam gerakan pengkhianatan G.30.S/PKI, termasuk kegiatan-kegiatan yang mendahuluinya dan kegiatan-kegiatan lanjutannya.

Pasal 4.

Mereka yang terlibat dalam gerakan pengkhianatan G.30.S/PKI, diklasifikasikan dalam:

A. NJATA-NJATA TERLIBAT SETJARA LANGSUNG, ialah mereka:

1. Yang merentjanakan, turut merentjanakan, membantu merentjanakan atau mengetahui adanya perentjanaan gerakan pengkhianatan, tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwajib.
2. Yang dengan kesadaran akan tujuan gerakan itu, melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan gerakan tersebut yaitu:
 - a. Pelaku utama, ialah mengatur operasi beserta kegiatan fisik lainnya (pentjulikan, pembunuhan, penjusunan benda bergerak).
 - b. Pelaku, ialah pelaksanaan gerakan dalam operasi fisik beserta kegiatan fisik tersebut 2.a.
 - c. Orang yang ikut serta (doolnomer) ialah yang ikut serta, dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi fisik tersebut 2.a.

B. NJATA-NJATA TERLIBAT SETJARA LANGSUNG, ialah mereka yang setelah mengetahui adanya gerakan pengkhianatan serta kegiatan lanjutannya, menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan-perbuatan maupun dalam utjapan-utjapan, yang bersifat menjetudjui gerakan tersebut atau menentang usaha/gerakan penumpasan gerakan pengkhianatan tersebut.

C. TERDAPAT PETUNJUK ATAU DAPAT DIDUGA TERLIBAT SETJARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, ialah mereka:

1. Jang mendjadi anggota bekas partai terlarang PKI atau pengurus-pengurus organisasi massa jang seazas/berlindung dibawah bekas partai tersebut beserta aktivitasnja.
2. Jang mendjadi anggota biasa dari organisasi massa terlarang jang azasnja bernaung/berlindung dibawah bekas partai PKI dan mereka jang menurut anteseden jang ada, pernah terlibat dalam „Peristiwa Madiun“, jang telah terdjadi gerakan penghianatan itu tidak setjara tegas menentangnja menurut kondisi dan kemampuan jang wadjar.

Pasal 5.

1. Penindakan terhadap personil jang terlibat itu dapat dibagi dalam:
 - Penindakan (represif) jang meliputi:
 - a. Penindakan administratif, jaitu:
 - 1). Pemberhentian dengan tidak hormat,
 - 2). Pembatasan kesempatan dalam djabatatan atau kedudukan tertentu dengan mengindahkan segala peraturan jang berlaku tentang ini.
 - 3). Retooling sesuai dengan INPRES No. 5 tahun 1962.
 - Pentjegahan (prefentip), jang meliputi:
 - a. Indoktrinasi.
 - b. Penelitian mental.
 - 2. Tindakan-tindakan penyelesaian administratif dalam rangka peraturan-peraturan Kepegawaian diatur berdasarkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan kepegawaian jang berlaku bagi masing-masing golongan pegawai/anggota ABRI:
 - a. Bagi anggota ABRI menurut petundjuk/keputusan Departemen Pertahanan Keamanan.
 - b. Bagi pegawai negeri menurut petundjuk/keputusan kantor Urusan Pegawai.

Pasal 6.

Penetapan berbagai matjam penindakan itu ialah sebagai berikut:

1. terhadap mereka jang termasuk klasifikasi tersebut dalam pasal 4 huruf A dikenakan penindakan dalam bidang hukum pidana dan penindakan administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sedangkan selama dalam proses mereka ditahan tentang:
2. terhadap mereka jang termasuk klasifikasi tersebut dalam pasal 4 huruf B dikenakan penindakan administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat.

3. terhadap mereka yang termasuk klasifikasi tersebut dalam pasal 4 huruf C dapat dikenakan penindakan berupa:
 - a. terhadap mereka yang termasuk klasifikasi tersebut dalam pasal 4 huruf C.1. dikenakan penindakan berupa pemberhentian tidak dengan hormat.
 - b. terhadap mereka yang termasuk dalam klasifikasi tersebut dalam pasal 4 huruf C.2. dikenakan penindakan berupa pembatasan kesempatan dalam jabatan atau kedudukan atau retooling dengan diberikan indoktrinasi.

Pasal 7.

1. Terhadap mereka yang termasuk klasifikasi yang tersebut dalam pasal 4 huruf C.2. dengan keputusan Menteri, Kepala Badan/Lembaga Pemerintah/Negara, atau Pedjabat yang ditundukkan, dapat dilaksanakan penjimpangan dari penindakan tersebut dalam pasal 6 huruf 3.4. apabila kepentingan dinas, djabatan atau tugas-tugas negara tertentu memerlukanja serta sepanjang kepentingan keamanan dan ketertiban umum terganggu karenanja.
2. Mereka yang akan dikenakan penjimpangan yang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini harus bersedia,
 - a. mengakui setjara tertulis kesalahannja telah menjadi anggota ormas terlarang, yang telah dinjatakan bernaung/berlindung/seazas dengan PKI.
 - b. Mengutuk penghianatan perbuatan G.30.S/PKI.
 - c. Berdjandji/bersumpah tidak akan memasuki sesuatu organisasi terlarang dan akan setia dan membela Pantjasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Negara R.I.
3. Sebelum mengambil tindakan penjimpangan yang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, Menteri/Kepala Badan/Lembaga Pemerintah/Negara yang bersangkutan atau pedjabat yang ditunduknja meminta pertimbangan terlebih dahulu ditingkat pusat kepada PANGKOPKAMTIB, didaerah-daerah kepada LAKSUS- PANGKOPKAMTIB yang bersangkutan dan sesudahnja melaporkan pelaksanaannja.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp.: 53418 – DJAKARTA

NOTA – DINAS

No. 0630/III/1/1971.

**Kepada : 1. Para Tjamat/Ketua P.P.S.
2. Para Lurah/Koordinator K.P.P.S.
se-DCI Djakarta.**

**Dari : Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah
Daerah Khusus Ibukota Djakarta.**

**Perihal : Penghapusan alat peraga kampanye
pada djarak radius 200 M dari T.P.S.**

- I. Menundjuk Pengumuman Menteri Dalam Negeri/Ketua L.P.U. No. 3/LPU/1971 tanggal 23 Djuni 1971 tentang Larangan melakukan kampanye Pemilihan Umum dalam waktu 1 (satu) minggu mendjelang saat pelaksanaan Pemilihan Umum, maka dengan ini diberitahukan bahwa semua alat peraga kampanye dalam djarak radius 200 M dari T.P.S. jang telah terpasang, selambat-lambatnja pada hari Senin tanggal 28 Djuni 1971 djam 24.00 waktu setempat sudah harus dihapus dan dihilangkan oleh organisasi-organisasi jang bersangkutan.
- II. Jang dimaksud dengan alat peraga kampanye adalah segala bentuk tanda gambar Parpol/Golkar jang turut serta dalam Pemilu 1971, Poster-poster, Plakat-plakat, Lukisan-lukisan, Spanduk-spanduk, Tulisan-tulisan, Papan-papan tanda gambar serta segala bentuk visualisasi kampanye Pemilu.
- III. Apabila sampai saat jang ditetapkan dalam I organisasi-organisasi Parpol/Golkar jang bersangkutan belum/tidak menghapus dan menghilangkan alat peraga kampanye tersebut, Tjamat/Ketua PPS berwenang dan berkewajiban untuk menghapus dan menghilangkannja dengan tertib. Untuk itu Tjamat/Ketua PPS dapat menugaskan Lurah dan anggota-anggota KPPS serta aparatur tingkat Ketjamatan/Kelurahan lainnja untuk melaksanakan tugas tersebut.

- IV. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap penghapusan alat peraga tersebut para Tjamat/Ketua PPS dan Lurah/Koordinator KPPS supaya bekerdja sama dengan aparaturnya keamanan tingkat wilayah setempat (Koramil dan Komsekko serta Babinsa dan Binamas).
- V. Agar ketentuan tersebut diatas dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Djakarta, 26 Djuni 1971.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

**Sekretaris,
t.t.d.**

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

TEMBUSAN :

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
2. Laksus Kopkamtibda Djaya,
3. Kadapol Metro Djaya,
4. B.P.H./Bidang Pemerintahan,
5. Sekda DCI Djakarta,
6. Direktorat I/Pemerintahan,
7. Direktorat II/Kamtib D.C.I.,
8. Direktorat VII/Chusus Politik,
9. Para Walikota/Ketua P.P. Kota,
10. Komwil, Kodim,
11. Komsekko, Koramil,
12. Arsip.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp.: 53418 – DJAKARTA

NOTA – DINAS

No. 0631/III/1/1971.

**Kepada : Jth. Para Pimpinan Parpol/Golkar
di Wilayah DCI Djakarta.**

**Dari : Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah
Daerah Chusus Ibukota Djakarta.**

**Perihal : Penghapusan alat peraga kampanye pada
djarak radius 200 M dari T.P.S.**

- I. Menundjuk Pengumuman Menteri Dalam Negeri/Ketua L.P.U. No. 3/LPU/1971 tanggal 23 Djuni 1971 tentang larangan melakukan kampanye Pemilihan Umum dalam waktu 1 (satu) minggu mendjelang saat pelaksanaan Pemilihan Umum, maka dengan ini diberitahukan bahwa semua alat peraga kampanye dalam djarak radius 200 M dari T.P.S. jang telah terpasang, selambat-lambatnja pada hari Senin tanggal 28 Djuni 1971 djam 24.00 waktu setempat sudah harus dihapus dan dihilangkan oleh organisasi-organisasi jang bersangkutan.
- II. Jang dimaksud dengan alat peraga kampanye adalah segala bentuk tanda gambar Parpol/Golkar jang turut serta dalam Pemilu 1971, Poster-poster, Plakat-plakat, Lukisan-lukisan, Spanduk-spanduk, Tulisan-tulisan, Papan-papan tanda gambar serta segala bentuk visualisasi kampanye Pemilu.
- III. Apabila sampai saat jang ditetapkan dalam ad I organisasi-organisasi Parpol/Golkar jang bersangkutan belum/tidak menghapus dan menghilangkan alat peraga kampanye tersebut, Tjamat/Ketua PPS berwenang dan berkewadajiban untuk menghapus dan menghilangkannja dengan tertib. Untuk itu Tjamat/Ketua PPS dapat menugaskan Lurah dan Anggota-anggota KPPS serta aparatur tingkat Ketjamatan/Kelurahan lainnja untuk melaksanakan tugas tersebut.

- IV. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap penghapusan alat peraga tersebut para Tjamat/Ketua PPS dan Lurah/Koordinator KPPS supaya bekerdja sama dengan aparatur keamanan tingkat wilayah setempat (Koramil dan Komsekko serta Babinsa dan Binamas).
- V. Agar ketentuan tersebut diatas dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Djakarta, 26 Djuni 1971.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,

t.t.d.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

TEMBUSAN:

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
2. Laksus Kopkamtibda Djaya,
3. Kadapol Metro Djaya,
4. B.P.H./Bidang Pemerintahan,
5. Sekda DCI Djakarta,
6. Direktorat I/Pemerintahan,
7. Direktorat II/Kamtib D.C.I.,
8. Direktorat VII/Chusus Politik,
9. Para Walikota/Ketua P.P. Kota,
10. Komwil, Kodim,
11. Komsekko, Koramil,
12. Arsip.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH KHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp.: 53418 – DJAKARTA

**S.O.P. : Laporan tentang djalannja Pemungutan Suara
dan Penghitungan Suara di TPS-TPS diwilajah
D.C.I. Djakarta.**

I. UMUM.

Dalam rangka pengendalian operasionil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS-TPS, maka pada hari Sabtu tanggal 3 Djuli 1971 Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta bersama-sama dengan seluruh Anggota P.P.D. D.C.I. Djakarta dan Staf yang berhubungan dengan tugas penjelenggaraan Pemilihan Umum mengadakan sistim operasi pengendalian dan komunikasi yang berpusat di Operation Room D.C.I. Djakarta. Ditempat tersebut akan diterima laporan-laporan tentang djalannja Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS-TPS dari seluruh wilayah (Walikota, Ketjamatan, Kelurahan dan TPS-TPS) melalui sistim yang ditetapkan dalam S.O.P. ini. Demikian pula petundjuk-petundjuk, keputusan-keputusan dan tindakan yang perlu diambil pada hari Pemungutan Suara tersebut ditetapkan di Operation Room itu untuk setjara langsung diteruskan ke TPS-TPS/Instansi yang bersangkutan.

II. TUDJUAN.

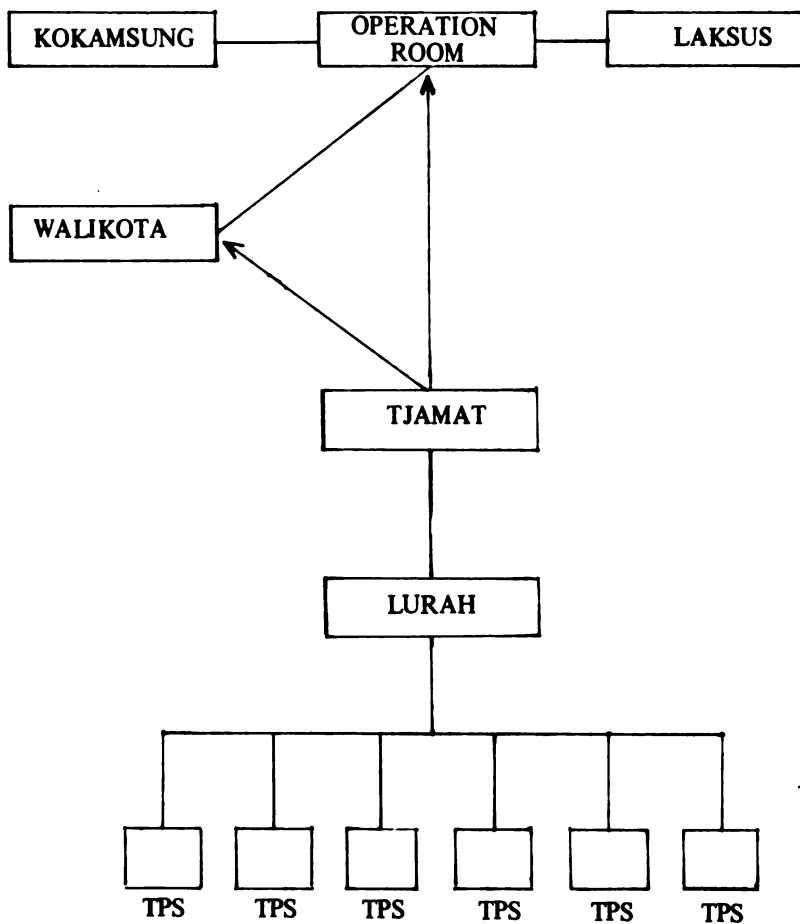
Mekanisme laporan yang tertera dalam S.O.P. ini bertudjuan untuk:

1. Mengetahui setjara tjemat proceeding djalannja Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara disetiap T.P.S.
2. Memberikan petundjuk-petundjuk, keputusan dan tindakan yang diperlukan kewilajah-wilajah dan Instansi yang berkepentingan untuk mendjamin kelantjaran djalannja Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
3. Mengadakan pengendalian djalannja Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS-TPS.

III. LINGKUP.

1. Laporan disampaikan melalui saluran aparatur Pemerintahan Wilayah di D.C.I. Djakarta.

Setjara terperintji saluran djalannja laporan adalah sebagai berikut:



2. Instruksi, petundjuk dan keputusan dari PPD DCI Djakarta untuk kelantjaran djalannja Pemihu di TPS-TPS dilaksanakan melalui djendjang saluran jang sama dengan arah sebaliknja.
3. Hal-hal jang perlu dilaporkan meliptui masalah-masalah sebagai berikut :

- a. Apakah Rapat Pemungutan Suara telah dilaksanakan ditiap TPS pada djam jang ditetapkan.
 - b. Apakah proses djalannja Pemungutan Suara di TPS-TPS lantjar.
 - c. Apakah ada masalah-masalah keamanan dan ketertiban setjara khusus ada kesulitan dalam mentrapkan petundjuk-petundjuk jang telah digariskan dalam rangka Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
 - d. Apakah ada kekurangan dalam peralatan-peralatan/keperluan TPS-TPS.
 - e. Apakah ada masalah tentang pengangkutan hasil-hasil Penghitungan Suara dari TPS ke Ketjamatan-ketjamatan dan atau penjampaian peralatan dari Ketjamatan/Kelurahan ke TPS-TPS.
 - f. Bagaimana dengan kehadiran Wakil-wakil Parpol/Golkar untuk menjaksikan Penghitungan Suara.
 - g. Apakah ada masalah-masalah lain jang perlu dilaporkan.
4. Disamping laporan melalui saluran seperti tersebut diatas, komunikasi untuk keperluan koordinasi harus tetap diadakan dengan unsur-unsur Kepolisian dan Kodam V/Djaya. Hubungan tersebut diadakan oleh masing-masing tingkatan aparatuer pemerintahan wilajah dengan aparatuer keamanan tingkat wilajah jang bersangkutan (Lurah, Tjamat, Walikota, Gubernur/KDH berturut-turut masing-masing harus mengadakan hubungan/koordinasi dengan Babinsa, Koramil, Kodim dan Kodam V/Djaya serta dengan Binamas, Komsekko, Komwil dan Komdak Metro Djaya). Hasil hubungan koordinasi tersebut merupakan pula bahan laporan dan dasar instruksi serta pedoman jang disampaikan melalui saluran seperti tersebut diatas.
 5. Dalam hal-hal jang menjangkut pengisian tehnis pelaksanaan dan pengamanan dimana pedoman-pedomannja telah ada/ditetapkan Tjamat/Ketua PPS dapat mengambil kebidjaksanaan pelaksanaan setempat. Diluar masalah tersebut Tjamat/Ketua PPS harus melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta dan Walikota/Ketua PP. Kota untuk meminta keputusan.

IV. PROSEDURE.

1. Ditiap Kantor Kelurahan, Ketjamatan, Walikota dan PPD DCI Djakarta disediakan satu „buku laporan” jang khusus disiapkan untuk Hari „H” (tanggal 3 Djuli 1971) tersebut. Buku laporan tersebut memuat kolom-kolom sebagai berikut:

Laporan: Tentang djalannja Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS-TPS.

No. Urut Laporan	Djam diterima laporan	Ketjamatan/Kelurahan	Situ asi			Keterang-an
			Lantjar	Gangguan	Katjau	

2. Pengisian buku laporan tersebut dilakukan setjara tertib oleh masing-masing tingkat pemerintahan **segera** setelah/pada saat menerima laporan dari echelon bawahnja dan atau menerima instruksi dari echelon diatasnja.
3. Laporan dari TPS-TPS ke Kelurahan-kelurahan disampaikan oleh kurir-kurir jang terdiri dari unsur-unsur Pagar Pradja dan Staf Kelurahan/Ketjamatan jang ditugaskan sebagai penghubung antara beberapa TPS tertentu (5—10 TPS) dengan Kantor Kelurahan (vide adanja satu orang unsur Polisi untuk mengkoordinir pengamanan langsung terhadap beberapa TPS).
Laporan ini dilakukan **setjara langsung** (menghadap) atau lewat Tilpon.
4. Laporan dari Kelurahan ke Ketjamatan dilakukan melalui Tilpon dan atau kurir. Demikian pula instruksi/pedoman.
5. Laporan dari Ketjamatan ke Operation Room dilakukan **setjara langsung** (untuk short cut) melalui Tilpon. Laporan jang sama segera disampaikan pula kekantor Walikota setelah laporan ke Operation Room disampaikan.
6. Periodesitas laporan diatur seperti sebagai berikut:

Periodesitas Laporan

Laporan Gelombang ke:	D j a m	Isi Laporan
I.	08.00—09.00	1. Tentang pelaksanaan rapat pemungutan suara. 2. Tentang peralatan/keperluan TPS. 3. Lain-lain.
II.	11.00—12.00	1. Kelantjaran djalannja pemungutan suara. 2. Tentang masalah keamanan & Ketertiban di TPS dan sekitarnya. 3. Kesulitan jang timbul tentang pentrapan petundjuk-petundjuk jang digariskan. 4. Lain-lain.
III.	14.00—15.00	1. Kelantjaran djalannja pemungutan suara. 2. Tentang masalah keamanan & ketertiban di TPS dan sekitarnya. 3. Kesulitan jang timbul tentang pentrapan petundjuk-petundjuk jang digariskan. 4. Kehadiran Wakil Parpol/Golkar menjaksikan penghitungan suara. 5. Lain-lain.
IV.	17.00—18.00	1. Kelantjaran djalannja pemungutan suara. 2. Masalah pengangkutan hasil pemungutan suara ke TPS. 3. Lain-lain.
V.	19.00—20.00	1. Tentang masalah keamanan ketertiban. 2. Kesulitan jang timbul dalam pentrapan petundjuk-petundjuk jang digariskan. 3. Masalah pengangkutan hasil pemungutan suara ke P.P.S. 4. Lain-lain.
VI.	21.00—22.00	1. Tentang masalah keamanan & ketertiban. 2. Kesulitan jang timbul dalam pentrapan petundjuk-petundjuk jang digariskan. 3. Masalah pengangkutan hasil pemungutan suara ke P.P.S. 4. Lain-lain.

7. Seluruh aparatur Pemilu tingkat Kelurahan, Kecamatan, Walikota dan PPD DCI Jakarta pada hari „H” tanggal 3 Djuli 1971 dikonsinjir dikantor masing-masing sampai djam 00.00 W.I.B. tanggal 4 Djuli 1971.
8. Khusus untuk pengambilan Berita Atjara Model K beserta lampirannya Model K1, K2 dan K3 dari PPS dimasing-masing Kecamatan, maka petugas PPD DCI Jakarta dengan Surat Tugas pada ± djam 22.00 W.I.B. akan mengambil salinan yang disediakan untuk PPD DCI Jakarta untuk diolah dengan computer.
Untuk itu agar Berita Atjara tersebut beserta lampiran-lampirannya sebelumnya telah disiapkan dan disusun menurut Kelurahan dan nomor urut T.P.S.

V. LAIN-LAIN.

1. Hubungan Tilpon ke Operation Room dapat dilakukan dengan memutar nomor-nomor sebagai berikut:
 - Operation Room Tilpon No. 42061–42062–49691.
 - Biro II Tilpon No. 48854–48858.
 - Kantor Sensus Tilpon No. 40084.
 & Statistik.Apabila tidak berhasil menghubungi dengan nomor-nomor tersebut supaya memutar nomor Sekretariat PPD DCI Jakarta Tilpon Nomor: 54447 dan 53418.
Untuk selanjutnya laporan tersebut diteruskan ke Operation Room.
2. Pada tingkat PPD DCI Jakarta telah disediakan fasilitas komunikasi yang dapat mendjamin adanya hubungan langsung antara Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta dengan Pangdam V/Djaya dan Kadapol Metro Djaya.

Djakarta, 30 Djuni 1971.

**Pd. GUBERNUR KEPALA DAERAH/
KETUA PANITIA PEMILIHAN DAERAH
D.C.I. DJAKARTA
t.t.d.**

**(A. WIRIADINATA)
Laksamana Muda Udara
WAKIL KEPALA DAERAH**

TUGAS PAGAR PRADJA SEBAGAI PENGHUBUNG ANTARA KELURAHAN DAN KETJAMATAN.

Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 3 Djuli, sampai selesainja Penghitungan Suara dan pengiriman Kotak-kotak Surat Suara, Pagar Pradja di Wilayah DCI Djakarta diberikan tugas sebagai berikut :

I. MULAI PEMUNGUTAN SUARA:

- a. Pagar Pradja ditugaskan sebagai penghubung antara KPPS (dan Petugas Keamanan TPS) dengan Lurah/Koordinator KPPS dan Tjamat/Ketua PPS.
- b. Apabila diperlukan, dalam hal-hal jang sangat mendesak Pagar Pradja djuga merupakan tenaga penghubung (kurir) antara Tjamat dengan Posko Balai Kota d/a Operation Room DCI Djakarta Djl. Merdeka Selatan No. 8—9 Djakarta.
- c. Melaporkan segala sesuatu jang terdjadi di TPS kepada Lurah dan Tjamat.
Lurah berdasarkan laporan Pagar Pradja tersebut meneruskan keterangan/informasi dalam bentuk laporan kepada Tjamat sesuai dengan S.O.P. jang telah ditetapkan.
Selanjutnja Tjamat meneruskan laporan tersebut kepada Posko Balai Kota d/a Operation Room DCI Djl. Merdeka Selatan 8—9 Djakarta Tilp. 49691.
- d. Laporan tersebut disampaikan melalui Tilpon, kurir, alat-alat perhubungan jang ada.
- e. Prinsip penjampaian isi laporan tersebut ialah: tjepat, tepat, ringkas, aman dan mentjapai sasaran.

II. SELESAI PEMUNGUTAN SUARA:

- a. Selesai Pemungutan Suara, Pagar Pradja sebagai penghubung harus melaporkan djalannja Pemungutan Suara di TPS-TPS setjara keseluruhan kepada Lurah. Kemudian Lurah menjampaiannja kepada Tjamat; dan Tjamat meneruskan laporan tersebut kepada Posko Balai Kota d/a Operation Room DCI Djakarta Djl. Merdeka Selatan 8—9 Djakarta Tilpon No. 49691 dengan tjara-tjara jang ditetapkan dalam S.O.P.
- b. Segera melaporkan pula bahwa penghitungan suara akan dimulai dan melaporkan berapa orang dari utusan Organisasi Parpol/Golkar jang mengirimkan Wakilnja untuk menjaksikan Penghitungan Suara.

- c. Wakil-wakil Organisasi Parpol/Golkar mana saja yang ikut memeriksa Kartu Suara dalam rangka meneliti Surat-surat Suara yang sah berdasarkan hasil undian yang dilakukan oleh Ketua KPPS.

III. SELESAI PENGHITUNGAN SUARA:

- a. Bersama-sama dengan unsur Kepolisian/keamanan setempat, mengawal pengiriman Kotak-kotak yang berisi Surat-surat Suara dari TPS ke Ketjamatan dan menjaga (mengamankan) Kotak-kotak Surat Suara tersebut dalam penjimpanannya selama di Kantor Ketjamatan.
- b. Mengadakan pengawalan pengiriman Berita Atjara hasil penghitungan suara yang pengambilannya ke Ketjamatan-ketjamatan akan dilakukan oleh Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta.
- c. Bahwa pada prinsipnya Tjamat/Ketua PPS bertanggung jawab dan mengkoordinir pengaturan pengawalan dan penjimpanan Kotak-kotak Surat Suara tersebut sampai ada ketentuan penggunaannya oleh Ketua PPD DCI Djakarta.

IV. HASIL PENGHITUNGAN SUARA:

- a. Segera melaporkan kepada Tjamat/Ketua PPS hasil penghitungan suara tiap TPS dalam daerah Ketjamatan tersebut dengan tjatatan-tjatatan yang dibuatnya sendiri meliputi djumlah suara yang diperoleh oleh Parpol/Golkar di tiap T.P.S.
- b. Tjamat/Ketua PPS melaporkan per-tilpon kepada Posko Balai Kota d/a Operation Room DCI Djl. Merdeka Selatan No. 8-9 Tilpon 49691 mengenai hasil penghitungan suara setelah semua laporan-laporan dari TPS-TPS diwilajahnya diperoleh dari aparatur wilajahnya (Lurah, Pagar Pradja).

V. KEDJADIAN-KEDJADIAN:

Setiap djam Tjamat sendiri harus melaporkan segala sesuatu mengenai situasi pemungutan suara/penghitungan suara dan peristiwa lainnya dalam wilayah, langsung kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta.

Djakarta, 30 Djuni 1971.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

**Sekretaris,
t.t.d.**

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.).

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH KHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp.: 53418 – DJAKARTA

NOTA – DINAS

No.: 0668/III/1/1971.

Kepada : Jth. 1. Pimpinan Parpol/Golkar Tk. DCI Djakarta,
2. Dinas Kebersihan DCI Djakarta,
3. Dinas Pertamanan DCI Djakarta,
4. Dinas D.P.U. DCI Djakarta,
5. Para Walikota/Ketua P.P. Kota,
6. Para Tjamat/Ketua P.P.S.
7. Para Lurah/Koordinator K.P.P.S.
se-D.C.I. Djakarta.

**Dari : Pd. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia
Pemilihan Daerah/Daerah Khusus Ibukota Djakarta.**

Perihal : Penghapusan Alat Peraga Kampanje.

- I. Menundjuk Pengumuman Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU No. 6/LPU/1971 tanggal 2 Djuli 1971 tentang keharusan menghapuskan/membersihkan alat peraga Pemilu, setelah selesainja Pemungutan Suara, maka dengan ini diberitahukan bahwa semua alat peraga Pemilihan Umum berupa tanda-tanda gambar, poster-poster, plakat-plakat, lukisan-lukisan, spanduk-spanduk, slide-slide, papan-papan tanda gambar dan benda-benda peraga lainnja jang telah terpasang/terpantjang baik ditempat-tempat umum, bangunan-bangunan/gedung-gedung hiburan atau rekreasi maupun dihalaman-halaman harus sudah dibersihkan/dihapus oleh masing-masing Organisasi peserta Pemilihan Umum jang bersangkutan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Djuli 1971.
- II. Pelaksanaan ketentuan tersebut untuk wilayah DCI Djakarta agar sudah mulai dilakukan oleh Parpol/Golkar jang bersangkutan sedjak dikeluarkannya Nota Dinas ini dan harus sudah selesai pada tanggal 10 Djuli 1971.
Apabila sampai dengan tanggal 9 Djuli 1971 Parpol/Golkar jang bersangkutan belum melaksanakan ketentuan tersebut, maka kepada para Walikota/Ketua P.P. Kota, Para Tjamat/Ketua P.P.S. dan para Lurah/Koordinator KPPS diinstruksikan untuk melaksanakan pembersihan/penghapusan itu dengan mempergunakan aparaturnya ketertiban/kebersihan dan atau Pagar Pradja setempat.

- III. Terhadap papan-papan/poster-poster yang dipasang oleh L.P.U./Bakopen Pemilu dan PPD DCI Djakarta, pelaksanaan penghapusan gambar-gambar/poster-poster yang tertera dipapan-papan yang telah terpasang itu dilakukan oleh Sekretariat PPD DCI Djakarta. Penghapusan itu dilakukan tanpa mentjabut papan yang telah terpasang karena akan dipergunakan untuk poster-poster Sensus Penduduk 1971 dan poster Keluarga Berentjana.
- IV. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap penghapusan alat peraga baik oleh Parpol/Golkar yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya Kantor Walikota, Ketjamatan dan Kelurahan supaya bekerdja sama dengan aparaturnya Keamanan tingkat wilayah setempat (Kodim, Koramil, Babinsa dan Komwil, Komsekko dan Binamas).
- V. Agar ketentuan tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Djakarta, 5 Djuli 1971.

**Pd. GUBERNUR KEPALA DAERAH/
KETUA PANITIA PEMILIHAN DAERAH
D.C.I. DJAKARTA**

t.t.d.

(ALI SADIKIN)

Letnan Djenderal KKo.

TEMBUSAN:

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
2. Laksus Kopkamtibda Djaya,
3. Kadapol Metro Djaya,
4. B.P.H./Bidang Pemerintahan,
5. Sekda DCI Djakarta,
6. Direktorat I/Pemerintahan.
7. Direktorat II/Kamtib DCI Djakarta,
8. Direktorat VII/Chusus Politik,
9. Komwil, Kodim,
10. Komsekko, Koramil,
11. Arsip.

**HASIL RAPAT KERDJA APARATUR PEMILU SE-D.C.I. DJAKARTA
TANGGAL 5 DAN 6 DJANUARI 1971 DI PUNTJAK**

**SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA**

I. U M U M

Untuk mendjamin tertib pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, baik pada tahap persiapan maupun pelaksanaan dan sesudahnja, maka oleh P.P.D. DCI Djakarta telah disusun program kerdja sesuai dengan tahapan-tahapan kegiatan serta jadwal waktu jang ditetapkan.

Sementara itu intensitas kegiatan lebih banjak ditekankan pada tahap persiapan ini. Sebagaimana ditekankan dalam amanat Mendagri/Ketua L.P.U. pada Konperensi Kerdja Gubernur Seluruh Indonesia pada tahun jang lalu, sukses tidaknja penyelenggaraan Pemilu ini akan banjak tergantung dari matang atau tidaknja persiapan serta kesiapan para aparatur dari atas sampai dengan terbawah.

Kepada seluruh aparat Pemilu baik pada tingkatan Sekretariat P.P.D. DCI Djakarta maupun pada Panitia echelon bawah, perlu setjara routine diadakan briefing-briefing/latihan untuk dapat mendjamin ketjepatan serta kelintjahan mereka dalam melakukan tugasnja.

Briefing tersebut diselenggarakan dengan pengarahen agar segala persiapan jang dilakukan saat ini baik jang menjangkut segi administratif maupun technis dapat mendjamin terselenggaranja Pemilu dengan sebaik-baiknya.

Pemilu jang akan diadakan adalah salah satu alat sarana Demokrasi Pantjasila dalam rangka menegakkan tanggung djawab, ke-djudjuran serta kesadaran untuk dapat hidup didalam Negara jang berkedaulatan rakjat berdasarkan Pantjasila.

Dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu 1971 nanti perlu kita mempunjai perkiraan-perkiraan serta analisa politis jang akan timbul di Ibukota jang merupakan pusat kegiatan politik Nasional dalam rangka Pemilu.

Hal ini sangat penting agar langkah-langkah jang kita ambil tidak terlalu menjimpang dari sasaran dan telah dapat diperhitungkan dengan semua pertimbangan.

Telah kita ketahui bahwa dewasa ini di DCI Djakarta telah nampak kegiatan dari Parpol dengan bentuk dan tjara masing-masing baik politis maupun organisatoris jang kesemuanja ditudjukan untuk persiapan menghadapi Pemilu.

Kemungkinan adanja ekses berupa ketegangan-ketegangan diperbagai kehiduapn sosial mendjelang Pemilu oleh karenanja dapat sadja, timbul karena kepentingan jang sama dari masing-masing Parpol/

Gokar untuk mempengaruhi/menarik simpati massa.

Untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu yang menjadi tanggung jawab kita bersama, maka sasaran yang terutama adalah dapat terpeliharanya ketertiban dan keamanan khususnya dalam masa kampanye dan pemungutan suara.

II. KEAMANAN DALAM MASA KAMPANJE.

2.1. Keamanan dan Pengamanan Para Tjalon.

Setelah selesaija pentjalonan dan disusun daftar masing-masing tjalon dari golongan yang ikut dalam Pemilu maka yang diperhatikan oleh Petugas Keamanan ialah :

- a. Mengawasi/mengamankan **daftar tjalon sementara** yang ditempelkan pada tempat pengumuman di-setiap Kantor Pemungutan Suara (30 hari) — Pasal 51 ayat 4 dan Pasal 52 P.P. No. 1 Tahun 1970.
- b. Petugas keamanan harus mengetahui tempat tinggal dan sedjauh mungkin mengenal pemimpin Partai Politik, Golkar didaerahnja masing-masing. Terutama terhadap tjalon-tjalon yang diadakan oleh organisasi yang bersangkutan, sedjauh mungkin pedjabat/petugas keamanan berusaha untuk dapat melindungi para tjalon dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan, baik setjara langsung maupun tidak langsung.
- c. Mentjegah kemungkinan timbulnja benterokan-benterokan antara golongan yang satu dengan yang lain, terutama yang menguasai massa.
- d. Menjelesaikan dan mendekatkan masing-masing pihak yang karena perbedaan pendapat mengenai sesuatu masalah telah membawa ekses ketegangan yang tidak diingini dengan inisiatif mengadakan musjawarah dengan yang bersangkutan.
- e. Menenal daerahnja dengan baik, dalam arti mengetahui imbangen kekuatan sosial politik yang ada didaerahnja.
- f. Mengawasi/mengamankan **daftar tjalon tetap** yang ditempelkan pada tempat pemungutan suara, disetiap Kantor Pemungutan Suara Pasal 53 ayat 2 P.P. No. 1 Tahun 1970.

2.2. Keamanan dan Pengamanan alat Peraga untuk keperluan Kampanje.

Dengan menundjuk Pasal 59 P.P. No. 1 Tahun 1970, maka bila-mana dalam kampanje Pemilu dipasang spanduk, poster, selogan, selebaran-selebaran atau alat peraga lainnja harus diadakan izin khusus kepada Komdak Metro Djaya melalui Pemerintah DCI Djakarta, Direktorat II/Keamanan & Ketertiban. Namun demikian, tjara pemasangan, penjebaran, penempelan dan sebagai-nja harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk Spanduk.

- pemasangan harus memperlihatkan keindahan, keserasian dan kebersihan — Konsultasi Suku Dinas P.U. setempat.
- tidak dipasang terlalu rendah sehingga mengganggu keamanan lalu lintas.
- pada sudut kanan atas spanduk jang akan dipasang harus disebutkan nomor izin dari Kepolisian dan pada sudut kiri bawah harus disebutkan nama organisasi jang bersangkutan.
- Apabila pemasangan spanduk tersebut tidak memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan maka aparat pengamanan wilayah berhak untuk menurunkan.
- sesudah selesai harus diturunkan sendiri.

b. Untuk Poster, Pamplet dan selebaran-selebaran lainnja.

- tidak ditempel pada benda milik orang lain, tanpa seizin jang bersangkutan.
- tidak ditempel pada tempat-tempat jang dapat menjinggung perasaan perorangan maupun golongan.
- tetap memperhatikan segi-segi keindahan, keserasian, kebersihan dan tata-susila.

c. Untuk Tanda Gambar.

- pemasangan tanda gambar harus memperhatikan segi-segi keindahan, keserasian dan kebersihan.
- (Suku Dinas P.U. dan Suku Dinas Kebersihan).
- dilarang menempel/memasang tanda gambar pada pekarangan orang lain tanpa seizin jang bersangkutan.
- dilarang menempel/memasang tanda gambar pada suatu tempat jang sudah ada tanda gambar lain golongan jang

mengakibatkan tanda gambar yang dimaksud tertutup/tidak kelihatan karenanya.

- dilarang menempel/memasang tanda gambar pada tempat yang dapat menyinggung perasaan perorangan/golongan.
- dilarang menempel/memasang tanda gambar pada djembatan-djembatan penjeberangan, tempat-tempat ibadah, Gedung-gedung Pemerintah.
- dilarang mengedarkan tanda-tanda gambar pada rumah-rumah penduduk dengan memungut uang.

Selambat-lambatnja 3 (tiga) hari sebelum djangka waktu kampanye Pemilu berachir (10 hari sebelum pemungutan suara) semua alat peraga kampanye Pemilu dalam djarak radius 200 M (dua ratus meter) dari tempat pemungutan suara (TPS) sudah dihapuskan dan dihilangkan oleh organisasi yang bersangkutan.

Djika tidak aparaturnya Pemerintah akan mengadakan pembersihan seperlunya.

2.3. **Technis Penjelenggaraan Kampanje.**

1. **Tempat.**

Tempat penyelenggaraan kampanje dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Tempat terbuka (exterior).
- b. Tempat tertutup (dalam ruang/gedung).

Penggunaan tempat-tempat tersebut diatas, dalam rangka penyelenggaraan kampanje Pemilu, tidak diperkenankan dalam waktu yang sama oleh 2 (dua) atau lebih PARPOL/GOLKAR atas satu tempat (lokasi) yang sama, sesuai dengan djiwa pasal 58 (2) P.P. No. 1 Tahun 1970 jo. Keppres No. 68 Tahun 1970.

2. **Waktu.**

- a. Pelaksanaan kampanje ditempat terbuka diadakan hanya pada siang hari.
- b. Ketentuan tentang dapat tidaknya pelaksanaan kampanje ditempat tertutup (dalam ruang/gedung) untuk diadakan pada malam hari, akan ditetapkan berdasarkan ketentuan umum dari LPU dan evaluasi keamanan oleh Laksus

Kopkamtibda DCI Djakarta.

3. Tata tertib.

Tanpa mengurangi isi dan jiwa Bab VI (tentang kampanye) pasal 54 s/d 59 P.P. No. 1/70 jo. Keppres No. 68/70, maka PARPOL/GOLKAR yang akan mengadakan kampanye harus pula memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan kampanye hendaknya sedapat mungkin mengusahakan agar tidak mengikut sertakan anak-anak dalam kampanye.
- b. Apabila menggunakan pengeras suara dan alat-alat perlengkapan lainnya, hendaknya sedapat mungkin diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu ketertiban umum.

2.4. Keamanan dan Pengamanan menjelang dan pada saat kampanye berlangsung.

Djangka waktu untuk kampanye Pemilu adalah 60 (enam puluh) hari dan berakhir 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara diadakan.

Dengan demikian masa kampanye tersebut adalah mulai dari tanggal 29 April s/d 27 Djuni 71. Kampanye Pemilu dapat diselenggarakan setelah Organisasi memperoleh surat keterangan bahwa pemberitahuan untuk berkampanye telah diketahui oleh Instansi yang berwenang.

Surat pemberitahuan tersebut harus diajukan sekurang-kurangnya 3 x 24 jam sebelum kampanye dimulai dengan menyebutkan : hari, tanggal, jam, tempat, penanggung jawab, pemitjara, dan lain-lain yang aslinya ditunjukkan pada instansi Polri setempat dengan tembusan pada organ Pemilu yang bersangkutan.

Surat pemberitahuan tersebut diajukan oleh pimpinan organisasi Parpol/Golkar tingkat wilayah, dan berlaku untuk keseluruhan organisasi tersebut.

Tempat yang diizinkan untuk penggunaan kampanye (rapat-rapat umum terbuka), ditentukan oleh Pemerintah setempat dengan keterangan tertulis atau bila pada tempat-tempat seseorang atau golongan disertai dengan izin dari pemilik/pengurus. Kampanye/

Rapat Umum dengan pengerahan massa yang bersifat terbuka dilarang diadakan **pada malam hari**.

Semua yang menghadiri kampanye Pemilu dilarang membawa segala matjam bentuk sendjata dan/atau alat peledak, ketjuali petugas keamanan.

Anggota Panitia dan Badan-badan Penyelenggara Pemilu tidak diperkenankan untuk turut berkampanje. Mereka yang tidak diberi hak pilih menurut ketentuan Undang-Undang atau yang hak pilihnja telah ditjabut oleh Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi atau yang terkena ketentuan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dilarang hadir dan ikut aktif dalam kegiatan kampanje dan dilarang hadir dan diperkenalkan atau diperlihatkan setjara menjolok kepada umum dalam kampanje. Dalam kampanje Pemilu dilarang mempersoalkan Pantjasila dan UUD 1945, dilarang memfitnah, menghina atau menjinggung kehormatan Pemerintah dan pedjabatnja, perorangan, golongan, organisasi atau negara asing serta perbuatan-perbuatan lainnja yang bertentangan dengan etika/tatakrama yang sesuai dengan Pantjasila.

Dilarang menggunakan Gedung-gedung Pemerintah dan tempat-tempat Ibadah untuk melakukan Kampanje Pemilu. Penguasa-penguasa Gedung Pemerintah dan tempat-tempat Ibadah dilarang memberikan izin/memindjamkan/memberikan Gedung-gedung Pemerintah dan/atau tempat-tempat Ibadah untuk mempergunakan sebagai tempat untuk melakukan Kampanje Pemilu. Dalam penyelenggaraan Kampanje, maka penggunaan alat dan sarana penerangan baik yang penggunaannja dan ditangan Pemerintah maupun yang ada dilingkungan masyarakat, harus diarahkan dan dikonsentrasikan untuk mentjapai tudjuan Pemerintah. Sehubungan dengan Pasal 58 ayat 2 P.P. No. 1 Tahun 1970 penguasa/petugas Keamanan dapat membatalkan/menangguhkan atau membubarkan suatu rapat umum yang diperkirakan akan menimbulkan terdjadinja gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Pembatalan, pembubaran dan penangguhan rapat Umum diberikan kepada yang bersangkutan baik lisan maupun dengan tulisan.

Pengamanan dalam masa kampanje ini hanja dilakukan oleh

petugas-petugas dari instansi yang berwenang; tidak dibenarkan adanya petugas keamanan yang berasal dari organisasi dan atau mantel organisasi sesuatu golongan yang turut dalam Pemilu.

III. KEAMANAN DALAM PEMUNGUTAN SUARA

3.1. Aparatur dan Mekanisme Aparatur Pemungutan Suara.

Untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam rangka pemungutan suara, maka perlu diadakan persiapan/penertiban seperlunya terhadap aparaturnya Pemungutan Suara dan mekanisme kerjanya. Dalam hubungan ini, maka status Lurah setelah pembebasan PPP, perlu ditetapkan sebagai Koordinator KPPS di wilayahnya masing-masing melalui surat Keputusan LPU/PPD DCI Djakarta, mengingat arti pentingnya kedudukan Lurah sebagai echelon terbawah dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah.

Sementara itu, mengingat lingkup kerjanya maka jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ada 5 orang yang terdiri dari seorang diambil dari bekas pendaftar pemilih, 4 orang dari unsur Rt/Rw.

Tjalon anggota KPPS diusulkan oleh Lurah yang bersangkutan. Apabila diharuskan, maka screening dan atau permintaan surat Keterangan G.30.S/PKI untuk anggota-anggota KPPS supaya diberikan dispensasi.

1. Dalam menghadapi pemungutan suara, penjalinan daftar pemilih hendaknya sudah harus selesai pada tanggal 1 Mei 1971 dengan pertimbangan agar supaya anggota-anggota KPPS sudah dapat menguasai daftar pemilih yang akan digunakan pada TPS dimana mereka bertugas.
2. Masalah pemberian nomor urut daftar pemilih menurut abjad Kelurahan dan TPS.
3. Pemeliharaan terus menerus terhadap administrasi mutasi pemilih, penanda tangan kartu Pemilih dan penjaminan dokumen-dokumen pemilihan umum setjara teratur.
4. Setelah Raker hendaknya laporan-laporan tentang pelaksanaan persiapan pemungutan suara dilakukan setjara periodik sebulan sekali dan setjara insidentil bagi peristiwa-peristiwa yang

penting.

5. Pemasangan telepon untuk kelurahan2 yang belum ada pesawat telepon akan diusahakan menurut prioritas dari Kelurahan yang dirasakan sangat memerlukannya dengan pertimbangan dari Direktorat I/Pemerintahan.

3.2. **Technis Penyelenggaraan Pemungutan Suara.**

1. **Tempat Pemungutan Suara (TPS)**

- a. Tempat pemungutan suara sedapat mungkin diusahakan ditempat yang tertutup/dalam ruangan (interior).
- b. Tanpa mengurangi isi dan maksud pasal 65 (3) P.P. No.1/1970, maka tiap2 Tempat Pemungutan Suara (TPS) disediakan/diusahakan tempat duduk maksimal untuk 25 orang pemilih.
- c. Dengan memperhatikan ketentuan2 dalam pasal 65 (4) , pasal 66 ,pasal 68, pasal 69, pasal 70 dan pasal 71, P.P. No.1/1970, maka pemilih selama dalam proses pemberian suara tidak diperkenankan merokok (sedjak pemilih yang bersangkutan meninggalkan tempat pemberian suara).

2. **Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).**

- a. Pembagian kerdja antara anggota KPPS dapatlah diatur sebagai berikut :
 - 1(satu) orang memeriksa dan meneliti surat panggilan .
 - 2(dua) orang memegang, memeriksa/mentjotjokan serta memberi tanda pada dua daftar pemilih.
 - 1(satu) orang membagikan blanko surat suara.
 - 1(satu) orang mengawasi pelaksanaan pemberian suara.
- b. Pelaksanaan pembagian kerdja diatas disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat.

3. **Peralatan**

Alat2 perlengkapan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemungutan suara di TPS adalah sebagai berikut :

- a. 3(tiga) buah meja untuk petugas KPPS.
- b. 5(lima) buah kursi untuk KPPS.
- c. Tempat duduk (kursi/bangku) untuk 25 orang.
- d. 1(satu) papan tulis untuk penghitungan suara
- e. 1(satu) papan tulis untuk penempelan tanda gambar
- f. Kapur tulis.

- g. alat penghapus.
- h. tali, tonggak dan paku.
- i. bilik TPS.
- j. alat penusuk surat suara, dan bantalannya.
- k. 2(dua) buah kotak suara.
- l. tanda gambar Parpol/Golkar.
- m. daftar tjalon.
- n. blanko surat suara.
- o. daftar pemilih.
- p. blanko Berita Atjara pemungutan Suara.
- q. blanko Berita Atjara penghitungan Suara.
- r. tanda pengenalan untuk KPPS dan keamanan.
- s. papan nama TPS.

3.3. Keamanan Wilayah

Situasi dan kondisi Wilayah masing2 benar2 hendaknja dikuasai sepenuhnya oleh masing2 pedjabat setempat.

Hendaknja para Pedjabat telah dapat membuat estimate tentang keadaan situasi keamanan jang diperkirakan dengan memperhitungkan kekuatan-kekuatan sosial politik serta pengalaman-pengalaman dari waktu jang lampau didaerahnja masing-masing.

Terutama pada saat dilaksanakannya pemungutan suara (voting) tanggal 3 Djuli 1971 jang akan datang itu; besar kemungkinan seluruh pemilih berhasrat penuh untuk semuanya serentak datang ke TPS2; sehingga keadaan rumah2, tempat2 perusahaan dan sebagainya akan ditinggalkan, sementara mereka ke-TPS2 tersebut.

Untuk mentjegah hal2 jang tidak diharapkan kemungkinan2 jang akan terdjadi, seperti pentjurian, kebakaran dan lain sebagainya hendaknja dapat diatur pengamanan sebelumnya; sehingga kekhawatiran untuk ini dapat dihindari dan pelaksanaan pemungutan suara dapat pula berlangsung terus dengan baik.

3.4. Keamanan Peralatan untuk dan setelah selesai pemungutan suara.

Penempatan TPS2 hendaknja dilakukan sedemikian rupa sehingga praktisnja berada pada tempat2 jang strategis, aman, mudah ditjapai dan dapat mendjamin ketertiban.

Dua hari sebelum pemungutan suara petugas keamanan harus sudah mengadakan pendjagaan terus menerus pada tiap2 TPS. Mengadakan pengawasan disekitar tempat2 tersebut agar tidak terdjadi gangguan2 seperti pengrusakan TPS, pengrusakan tanda Gambar, pengrusakan Daftar Tjalon Tetap dan peralatan lainnja.

Meneliti perlengkapan peralatan Panitia seperti medja tulis dan kursi, bangku untuk tempat duduk pemilih; djuga alat pentjoblosan, Kotak2 Suara dan lain sebagainya.

Ketentuan tentang pengamanan Kotak Suara, Surat Suara dan lain sebagainya akan diatur lebih landjut setjara terperintji agar terhadap dokumen-dokumen ini dapat didjamin keamanannya dan penggunaannya sebagai jang telah ditetapkan. Pengaturan medja dan kursi petugas dan tempat2 Kotak Suara harus demikian rupa hingga terlihat oleh umum.

Hadirin dan petugas Keamanan menjaksikan bahwa kotak2 suara jang dibuka sebelum pemungutan suara dimulai benar2 dalam keadaan kosong.

Petugas Keamanan ikut menjaksikan bahwa bungkus surat2 suara masih dalam keadaan tersegel.

Bila tidak terdapat ketjotjokan dari djumlah surat suara tersebut dibuatkan laporan dalam Berita Atjara jang tersedia untuk itu.

Djumlah surat suara harus tjotjok dengan djumlah jang tertulis diluar. Petugas Keamanan harus menjaksikan/melihat bahwa surat-surat jang diserahkan oleh Ketua Kelompok kepada pemilih dibubuhi tanda tangan se-kurang2nja 3(tiga) orang Anggota KPPS.

Begitu pula ketika surat suara jang sudah ditjoblos oleh pemilih dalam TPS dan akan dimasukkan oleh pemilih kedalam kotak suara disaksikan pula bahwa benar surat suara jang tadi. Oleh karenanja sebelum pemilih memasukkan kedalam surat suara harus memperlihatkan dahulu kepada Ketua Kelompok dan ikut disaksikan petugas keamanan, dalam keadaan terlipat seperti semula. Dan sesudah itu baru dimasukkan kedalam Kotak Suara oleh pemilih jang bersangkutan. Pemilih jang telah mentjoblos tanda gambar dan memasukkan Surat Suara pada Kotak Suara harus segera meninggalkan tempat

tersebut.

Semua peralatan yang telah dipergunakan untuk pemungutan suara hendaknya dapat diselamatkan dan diamankan seperlunya; dengan disertai pertanggungan jawab setjara tertulis.

3.5. Keamanan Pemilih.

Pemilih harus membawa Surat Panggilan dan Kartu tanda penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya seperti rijbewijs, pasport dan sebagainya untuk pergi ke TPS.

Ditempat pemberian Suara disediakan tempat untuk duduk serta bilik-bilik untuk pemberian suara.

Ditempat duduk KPPS ditempatkan meja dan kursi sedemikian rupa, sehingga dapat mengawasi keluar masuknya pemilih, sedang perbuatan KPPS dapat dilihat oleh hadirin.

Dimuka tempat duduk KPPS ditempatkan 2(dua) buah kotak suara sehingga dapat dilihat oleh hadirin pada rapat pemungutan suara itu.

Pada saat pemilih sudah mulai berdatangan, petugas keamanan mengatur agar para pemilih antri dengan sebaik-baiknya.

Petugas Keamanan perlu meneliti :

- apakah pemilih membawa surat panggilan ?
- apakah membawa KTP atau tanda pengenal lainnya ?
- apakah ada yang membawa senjata api/senjata tajam, bahan peledak dan sebagainya.

Selanjutnya :

Apakah pemilih betul terdaftar sebagai pemilih ditempat tersebut ?

Apakah surat panggilan tjojok dengan nama yang tersebut dalam KTP atau tanda pengenal lainnya, atau apakah pemilih memiliki surat formulir Model A.4. Petugas Keamanan melarang orang-orang yang tidak berkepentingan berada ditempat TPS. Petugas Keamanan mengawasi tata tertib yang berlaku dalam pelaksanaan pemungutan suara agar berjalan dengan tertib sesuai dengan peraturan.

Mengadakan tindakan preventive maupun repressive terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan mengganggu kelancaran jalannya pemungutan suara dan penghitungan surat suara. Menjaga jalannya pemungutan suara agar berlangsung dengan tenang dan bebas dari sesuatu pengaruh ataupun paksaan. Petugas Keamanan wajib memberikan bantuan pengamanan-

baik diminta maupun tidak diminta oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Para pemilih yang datang ke TPS dilarang membawa senjata api/senjata tajam, ketjuali petugas keamanan yang bertugas khusus untuk itu.

Pemilih untuk memberikan suaranya harus datang sendiri ke TPS dan tidak boleh diwakilkan.

IV. KEAMANAN DAN PENGAMANAN SETJARA UMUM.

Dalam rangka menghadapi pelaksanaan Pemilu, masalah keamanan perlu mendapatkan perhatian/pemikiran yang serius dari tiap aparat Pemilu, dalam hal ini bekerja sama dengan unsur2 Hankam selaku penanggung jawab utama bidang ini.

Masalah keamanan Pemilu khususnya mempunyai sektor dan pembidangan yang sangat luas, tergantung dari sudut mana ini dilihat dan dapat dibagi dalam beberapa sektor diantaranya ;

- a. Pengamanan Technis Pemilu,
- b. Pengamanan Politis,
- c. Pengamanan Physic.

a. Pengamanan Technis Pemilu.

Hal ini perlu menjadi bahan pemikiran bersama mengingat bahwa persiapan dan pelaksanaan Pemilu nantinya apabila teknis pelaksanaan diabaikan ataupun tidak dikuasai oleh aparat pelaksana, maka hasilnya jelas tidak sebagaimana yang kita harapkan antara lain :

- Koordinasi dan peningkatan (up-grade) pengetahuan teknis , ketrampilan aparat pelaksana, merupakan modal utama untuk suksesnya Pemilu yang akan datang.
- Para petugas harus ditempa dengan pengetahuan teknis yang tjukup. Bekal pengetahuan teknis yang tjukup, praktis akan menjamin suksesnya pelaksanaan Pemilu itu sendiri.

b. Pengamanan Politis.

Sesuai dengan perkembangan kehidupan politik dinegara kita ,maka dalam menghadapi Pemilu nantinya adalah beralasan sekali, kalau kita memperhitungkan adanya beberapa kemungkinan yang bila dan mungkin terjadi berupa usaha2 guna

mengatjaukan djalannja Pemilu.

- Kemungkinan pengatjauan oleh unsur2 sisa G.30.S/PKI jang menginginkan baik duduknja orang2 ex PKI atau simpatis - annja serta organisasi terlarang lainnja dalam Lembaga2 Perwakilan nantinja, maupun sebagai rangkaian untuk menggagalkan program Pemerintah pada umumnja.
- Kemungkinan permainan tjurang, sogok, paksaan, dan lain2 dalam pelaksanaan pemungutan suara jang bertudjuan politis, jang menjimpang dari rule of the games.
- Dan banjak kemungkinan2 lainnja dengan maksud jang sama jaitu mengatjaukan atau menggagalkan Pemilu itu, dan sebagainya.

c. Pengamanan Physic.

Faktor ini lebih banjak menjangkut soal keamanan para pelaksana/petugas Pemilu itu sendiri.

V. PENGAMANAN SETELAH PEMUNGUTAN SUARA.

- a. Pengamanan seluruh peralatan jang digunakan dalam pemilu.
- b. Pengamanan/surat2 suara, daftar pemilih, dokumen2 pemilu dan lainnja.
- c. Pengamanan pengiriman surat2 suara melalui djendjang administrasi- nja masing2.
- d. Penjelesaian perkara2 pidana jang terdjadi dalam rangka pemilu.

VI. PENUTUP.

Demikian pokok2 persoalan jang telah dibahas setjara seksama dan telah dirumuskan dan didjadikan pedoman untuk pedjabat/aparat Pemilu diwilajah DCI Djakarta dalam melaksanakan tugas2 operasionil Pemilu jang akan datang.

Hal-hal jang perlu diperhatikan, setjara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Aparatur Pemilu akan berusaha sekeras-kerasnja agar mereka jang berhak memilih, dapat dan sadar menggunakan hak pilihnja. Mereka jang terdaftar sebagai pemilih akan diusahakan seluruhnja/sebanjak mungkin menggunakan hak pilihnja dalam pemungutan suara.
2. Aparatur Pemilu berusaha dengan sekuat tenaga dan penuh kesadaran dapat menegakkan wibawa dan integritas dirinja dengan djalan menundjukkan kemampuan untuk menjelenggarakan Pemilu i- ni setjara tertib aman dan bersih.

3. Aparatur Pemilu DCI Djakarta menjadari sepenuhnya akan pentingnja kerdja sama sebaik-baiknja dengan aparatur Pemerintah tingkat wilajah lainnja, chususnja unsur A.B.R.I. termasuk Polri dalam mendjamin keamanan penjelenggaraan Pemilu.

Puntjak, 6 Djanuari 1971.
Pimpinan Rapat Kerdja,

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc).-

VII
PERSIAPAN
PEMUNGUTAN SUARA
SAMPAI DENGAN
PENETAPAN DAFTAR
TJALON TERPILIH

DAFTAR ISI

BAB VII.

Halaman

PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA SAMPAI DENGAN PENETAPAN DAFTAR TAJALON TERPILIH

1. Surat Gubernur KDH DCI Jakarta No.3554/a/Sek/69 tanggal 13 Nopember 1969 tentang Usaha-usaha Persiapan kearah Persiapan Operasionil Pemilu	1046
2. Pedoman dan Petunjuk untuk pembuatan TPS No.0304/III/1/1971 tanggal 7 April 1971.	1055
3. Pedoman dan Petunjuk untuk Pembentukan Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara (K.P.P.S.) No.0305/III/1/1971 tanggal 7 April 1971.	1058
4. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD DCI Jakarta No.0353/III/1/1971 tanggal 17 April 1971 tentang Pengadaan TPS di Kantor-kantor	1061
5. Surat PPD DCI Jakarta No.0360/III/1/1971 tanggal 17 April 1971 tentang Pemilihan Umum 1971 di DCI Jakarta.	1062
6. Surat PPD DCI Jakarta No.0464/III/1/1971 tanggal 17 Mei 1971 tentang Penjelesaian formulir A.4. untuk karya- wan Pemilih pada TPS Khusus/Kantor	1064
7. Surat PPD DCI Jakarta No.0465/III/1/1971 tentang Te- naga K.P.P.S.	1065
8. Surat PPD DCI Jakarta No.0468/III/1/1971 tanggal 17 Mei 1971 tentang Pelaksanaan Hak Pilih para Pasien Rumah Sakit/Rumah Bersalin/Klinik dll.	1066
9. Surat PPD DCI Jakarta No.0468a/III/1/1971 tanggal 17 Mei 1971 tentang Pelaksanaan Hak Pilih Nara Pidana dan Tahanan	1068
10. Surat PPD DCI Jakarta No.0512/III/1/1971 tanggal 31 Mei 1971 tentang TPS di Terminal Bus dalam wilayah DCI Jakarta	1070
11. Instruksi Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD DCI Jakarta No.0515/III/1/1971 tanggal 1 Djuni 1971 tentang Penjele- saian Pengisian formulir A.4.	1071
12a. Pedoman Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia No.2/PPI/Tahun 1971 tentang Tata Susunan Tem- pat Pemungutan Suara	1073
b. Pedoman Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia No.3/PPI/tahun 1971 tentang Tata Tjara Penje- lenggaraan Pemungutan Suara	1079
	1043

	Halaman
c. Petundjuk Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI No.11/PPI/ Tahun 1971; tentang Tata Tjara Mentjoblos tanda gambar Organisasi dalam Surat Suara oleh Pemilih	1094
13. Surat PPD DCI Djakarta No.0516/III/1/1971 tentang Pedoman Pembungkusan dan Pengiriman Surat Suara dan Penghitungan Suara	1097
14. Surat PPD DCI Djakarta No.0517/III/1/1971 tanggal 31 Mei 1971 tentang Penghitungan Suara	1101
15. Surat PPD DCI Djakarta No.0523/III/1/1971 tanggal 27 Mei 1971 tentang Exposisi Flips Chart/Market Pemilu. . . .	1103
16. Surat PPD DCI Djakarta No.0525/III/1/1971 tentang TPS- TPS di Kapal	1105
17. Surat PPD DCI Djakarta No.551/III/1/1971 tanggal 8 Djuni 1971 tentang Peralatan untuk TPS Kantor	1107
18. Nota Dinas PPD DCI Djakarta No.0555/III/1/1971 tanggal 8 Djuni 1971, tentang Berita Atjara Hasil Pemungutan Suara/ Penghitungan Suara dimasing-masing TPS.	1108
19. Surat PPD DCI Djakarta No.0578/III/1/1971 tanggal 15 Djuni 1971 tentang Petundjuk Tata Tjara Pengisian/Pembuatan Berita Atjara Pemungutan Suara/Penghitungan Suara	1110
20. Surat PPD DCI Djakarta No.0594/III/1/1971 tanggal 17 Djuni 1971 tentang Penjampaian Berita Atjara Pemungutan/ Penghitungan Suara	1115
21. Nota Dinas PPD DCI Djakarta No.0620/III/1/1971 tanggal 24 Djuni 1971 tentang Pembubuhan Tjap/Stempel Surat Panggilan (Model G) dan Pembungkus Surat Suara	1117
22. Pedoman PPD DCI Djakarta No.0622/III/1/1971 tanggal 24 Djuni 1971 tentang Tata Tertib untuk Wakil dari Organisasi Parpol/Golkar yang ditundjuk untuk mengikuti/ menjaksikan Penghitungan Suara di TPS	1118
23. Pengumuman Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD DCI Djakarta No.0634/III/1/1971 tanggal 28 Djuni 1971	1122
24. Nota Dinas PPD DCI Djakarta No.0629/III/1/1971 tanggal 25 Djuni 1971 tentang Tugas-tugas yang perlu dilaksanakan oleh KPPS	1122
25. Tjataan Penghitungan Suara dan Hasil Pembagian Kursi untuk DPRD Tingkat I Djakarta tanggal 29 Djuli 1971 . . .	1132
26. Hasil Pemungutan Suara untuk Keanggotaan DPR, DPRD untuk Daerah Pemilihan DCI Djakarta dan Wilajah Pemi-	

	Halaman
lihan Luar Negeri tanggal 30 Agustus 1971	1141
27. Resume : Riwayat Hidup Tjalon-tjalon dipilih untuk Keanggotaan DPRD Tingkat I DCI Djakarta. . .	1147
Daftar : Klasifikasi umur Tjalon-tjalon yang dipilih untuk Keanggotaan DPRD Tingkat I DCI Djakarta. . .	1152
28. Resume : Riwayat Hidup Tjalon yang diangkat untuk Keanggotaan DPRD Tingkat I DCI Djakarta . . .	1153
Daftar : Klasifikasi umur Tjalon-tjalon yang diangkat untuk Keanggotaan DPRD Tingkat I DCI Djakarta	1154
29. Suara Pers dalam Pemilu 1971.	1156
30. Daftar Tjalon Sementara, Tetap dan Terpilih	1167
31. Berita Atjara Hasil Pemeriksaan Panitia Pemeriksa Daerah Tingkat I DCI Djakarta tanggal 16 September 1971 . . .	1170
32. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD DCI Djakarta No.0805/III/2/1971 tentang Penetapan Daftar Tjalon Terpilih untuk Keanggotaan DPRD Tingkat I DCI Djakarta	1173

**PEMERINTAH DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA
Medan Merdeka Selatan No. 8 - 9
D J A K A R T A**

Nomor : 3554 a/Sek/69
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Usaha-usaha Persiapan
Kearah Kesiapan Opera-
sionil Pemilu.-

Djakarta, 13 Nopember 1969.-

Kepada Jth.
Para W a l i k o t a
se D . C . I . Djakarta.-

A M A T S E G E R A .

Bersama ini disampaikan salinan Instruksi Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Sektor Khusus J/Pemilu tanggal 8 Nopember No. 18 tahun 1969.

Sesuai dengan instruksi tersebut diatas pada Bagian Ketiga ayat 3, hendaknja segera Saudara :

1. Menentukan tempat T.P.S. setepat mungkin
 - a. mudah ditjapai dari segala djurusan,
 - b. aman dan dekat dari komunikasi jang ada.
2. Menjusun daftar tempat Pemungutan Suara (T.P.S) menurut urutan se Kelurahan dengan rekapitulasinja per Ketjamatan dan Kota.
3. Memberi nomor urut TPS se-Kelurahan menurut tjontoh sebagai berikut :

tjontoh : No. 1/01/1/I/D.P.

Angka pertama = Nomor T.P.S.
Angka kedua = Nomor R.W.
Angka ketiga = Nomor Kelurahan
Angka keempat = Ketjamatan

Angka D.P. = Djakarta Pusat (sesuai dengan kota-masing2)

dengan kata lain, setiap Kelurahan diberi nomor baru kembali.

4. Sebagai dasar perhitungan, tiap TPS diperkirakan untuk $\pm$ 300 pemilih dengan tjtatan, penduduk yang saat ini berusia $\pm$ 15 tahun supaya turut dihitung, karena pada waktu Pemilu (tahun 1971) telah mentjapai usia 17 tahun dan berhak turut memilih.
5. Untuk memudahkan pelaksanaan ad. 4 diatas, supaya dipergunakan Kartu Keluarga yang ada di Kelurahan.

Demikian agar Saudara maklum dan diharapkan daftar dimaksud (dalam rangkap 2) selambat-lambatnja achir bulan Nopember 1969 telah kami terima.

**Tembusan : disertai lampiran
disampaikan kepada:**

1. Para T j a m a t.
2. Para L u r a h.-

**A.n GUBERNUR KEPALA DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.
PROJECT OFFICER PEMILU DCI
DJAKARTA**

ttd.

(TEUKU AKBAR).-

INSTRUKSI :

**MENTERI DALAM NEGERI SELAKU KETUA SEKTOR CHUSU J/
PEMILIHAN UMUM**

No. 18 Tahun 1969

TENTANG :

**USAHA-USAHA PERSIAPAN KEARAH KESIAPAN OPERASIONIL
PEMILIHAN UMUM.**

**MENTERI DALAM NEGERI SELAKU KETUA SEKTOR CHUSUS J/
PEMILIHAN UMUM.**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa berhubung pelaksanaan Pemilihan Umum seperti diatur dalam Ketetapan M.P.R.S. No. XLII/MPRS/1968 sudah dekat waktunya dan untuk menghadapi hal tersebut, dari mulai sekarang sudah harus ditingkatkan usaha setjara intensif kearah tertiptanja stabilisasi politik sebagai prakondisi mutlak bagi kelantjaran dan suksesnja pelaksanaan Pemilihan Umum, disamping usaha meningkatkan tata administrasi pemerintahan jang efektif dan efisien jang mampu menghilangkan kelemahan, kesimpang-siuran dan birokrasi jang berlebih-lebihan;
 - b. bahwa untuk keperluan dimaksud huruf a diatas, dari sekarang para Gubernur Kepala Daerah sudah harus melakukan kegiatan-kegiatan sebagai persiapan kearah kesiapan operasionil dan melakukan usaha-usaha pembinaan kearah kesiapan mental ideologi dikalangan masjarakat.

MEMPERHATIKAN: 1. Amanat Bapak Presiden R.I. pada Pembukaan Koperensi-Kerdja Para Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia tanggal 14 Oktober 1969, jang

a.l menegaskan bahwa ‘Pelaksanaan Pemilihan Umum nanti harus dapat kita laksanakan sedemikian rupa, sehingga tetap terdjamin dipertahankannya Pantja Sila dan Undang-undang Dasar 1945, tidak akan mengganggu kelanjutan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun dan sekali gus menudju penjederhanaan struktur politik serta untuk lebih memperkuat stabilisasi politik’ ;

2. Uraian Menteri Dalam Negeri pada Konperensi-Kerdja Para Gubernur Kepala Daerah tanggal 14 Oktober 1969;
3. Tanggapan Kelompok-kelompok Gubernur Kepala Daerah dalam Konperensi-Kerdja Para Gubernur Kepala Daerah pada tanggal 18 Oktober 1969.

MENGINGAT

- : 1. Ketetapan M.P.R.S. No. XLI/MPRS/1968 tentang tugas Pokok Kabinet Pembangunan ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XLII/MPRS/1968 tentang Perubahan Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum;
3. Surat Keputusan Presiden R.I. No. 18 tahun 1969 tentang Pengendalian Operasionil Pembangunan Lima Tahun 1969/1973;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada semua Gubernur Kepala Daerah diseluruh Indonesia untuk :

PERTAMA

Dibidang TERTIB-POLITIK, dalam rangka mewujudkan prakondisi yang dapat mendjamin tertip-tanja stabilisasi politik pada waktu sebelum, selama dan setelah Pemilihan Umum, agar ;

1. Membina seluruh kegiatan politik untuk senantiasa berada diatas landasan Pantja Sila dan Mukadimah dengan segala pasal-pasal Undang-

undang Dasar 1945, selalu berpidjak diatas Garis Haluan Negara seperti jang dirumuskan dalam berbagai Ketetapan M.P.R.S. dan Program-program Pemerintah jang sudah ditetapkan.

2. Mentjegah setiap kegiatan dan aktivitas-aktivitas kekuatan² sosial-politik dalam masjarakat jang akan mendjurus keluar dari landasan dan tudjuan perdjuaan berdasarkan Pantja Sila serta mengarahkannja kepada kegiatan-kegiatan jang didasarkan kepada program (program-oriented).
3. Membina, menghimpun dan mengarahkan semua kekuatan sosial-politik kearah suksesnja Pemilihan Umum jang akan datang, dimana Pantja Sila tetap dapat berdiri dengan kokoh dan kuat.
4. Setjara struktural, dan prosedural, perlu dimantapkan garis hubungan Kepala Daerah sebagai Kepala Pemerintahan di Daerah sampai kebawah kepada Lurah-lurah/Aparat Desa melalui perangkat Sipil dengan melaksanakan setjara murni dan konsekwen semua kewenangan menurut tertib pemerintahan jang berlaku.
5. Memperteguh garis hubungan Horisontal dengan Muspida, dan lain², djuga kebawah sampai ke Koramil² melalui perangkat Militer agar koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dapat dilaksanakan setjara mantap dalam menjerasikan usaha-usaha di bidang security dan prosperity.
6. Mendjaga agar garis hubungan antara organ eksekutif dan organ legislatif Daerah senantiasa dalam suasana saling pengertian jang mendalam.
7. Memantapkan proses pengintegrasian Pemerintah dan Rakjat dengan mempererat garis hubungan dengan Parpol/Ormas/Golkar, sehingga dapat di arahkan kepada kegiatan² jang menudju tertijptanja stabilisasi politik dan ekonomi.

Dalam hal ini Corps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri, demikian juga PERTIWI, hendaknya benar-benar ditempa dan dibina sehingga mampu sebagai pengaman Pantjasila dan U.U.D. '45.

8. Untuk memantapkan kesiapan mental-ideologis dalam menghadapi Pemilihan Umum yang akan datang, perlu ditegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab dalam mensukseskan Pemilihan Umum cukup berat, karena itu kita semua terlebih dahulu harus mempunyai kesiapan mental yang positif, tidak ada keragu-raguan, apalagi sampai ada misunderstanding.
9. Dalam pembinaan kesiapan mental-ideologis untuk menghadapi Pemilihan Umum, tujuan harus jelas dan tegas yaitu menjelamatkan dan memenangkan Pantja Sila dan mempertahankan Undang-undang Dasar 1945.
Untuk itu, tiap komponen bahkan tiap personalia dari perangkat Lembaga Pemilihan Umum dari Pusat sampai ke Desa harus benar-benar dijamin kesetiaannya terhadap Pantja Sila dan Undang-undang Dasar 1945, dan Pemilihan Umum sebagai alat untuk mewujudkan kehidupan Demokrasi yang sehat, harus terlaksana dan berproses serta hasilnya tetap berada dalam landasan falsafah Pantja Sila.

K E D U A : Bidang PERSIAPAN FISIK PEMILU Agar :

1. Meninjau setjara umum dan menjeluruh segala aspek di daerah masing-masing dan menjusun perkiraan keadaan dalam tahun 1971 dalam rangka meratakan jalan bagi pelaksanaan Pemilihan Umum dan bagi penediaan requirement bagi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum.
2. Selambat-lambatnya pada akhir Nopember 1969, rantjangan Anggaran Belanja Untuk Pemilihan Umum bagi tiap-tiap Propinsi yang disusun seminimal mungkin sudah harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

3. Perentjanaan dan penentuan aparatur jang akan ditugaskan dalam rangka Pemilihan Umum hendaknya dilakukan setjara seksama. kwalitatif maupun kwantitatif, Kedudukan seorang Tjamat dan Lurah Desa adalah penting sekali baik dalam masa persiapan maupun pada waktu dan sesudah pemungutan suara.

K E T I G A : Dibidang TEHNIS PEMILU, agar.

1. Menguasai sebaik-baiknya garis-garis besar rentjana Pemilihan Umum seperti jang tertera dalam Rantjangan Undang2 Pemilihan Umum, jang sebagian sudah divisualisasikan dalam bentuk bagan beserta pendjelasan-pendjelasan tertulis jang sudah diserahkan kepada para Gubernur Kepala Daerah diwaktu Konprensi-Kerdja jang lalu.
2. Mempeladjadi dan melaksanakan ketentuan2 dalam Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1969 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara Tahun 1969/1970, sepanjang jang menjangkut pembiajaan Pemilihan Umum.
3. Supaja menjusun Daftar TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (T.P.S.) dari tiap2 Propinsi, dengan ketentuan agar daftar dimaksud dibuat per Desa (atau jang disamakan) menurut tjontoh terlampir dan banjaknya T.P.S. pada prinsipnja ditentukan berdasarkan perhitungan bahwa tiap2 200 sampai 300 Pemilih disediakan 1 (satu) T.P.S.
4. Bila dasar perhitungan dimaksud angka 3 diatas tidak dapat karena situasi dan kondisi setempat. maka penjimpangannya diserahkan kepada kebidjaksanaan Gubernur Kepala Daerah, dengan tjatatan agar hal tersebut sedjauh mungkin dihindarkan.
5. Daftar2 dimaksud angka 3 diatas, supaja disertai dengan daftar rekapitulasinja berturut-turut per-Ketjamatan, Kabupaten Propinsi dan kesemuanja daftar tersebut sudah diserahkan kepada Sekretariat

Sektor Khusus J/Pemilihan Umum di Djakarta
selambat-lambatnja tanggal 31 Desember 1969.

6. Setjara phisik hendaknja segala saran ditiap-tiap daerah sampai ketempat-tempat pemungutan suara (TPS) dapat memberikan djaminan komunikasi jang tjepat dan aman.
7. Pelaksanaan penjurusan daftar sesuai dengan pasal 23 Rantjangan Peraturan Pemerintah tentang Rantjangan Undang2 Pemilihan Umum, harus sudah dapat dimulai dari sekarang.

K E E M A T : Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini setjara periodik tiap bulan kepada Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Sektor Khusus J/Pemilihan Umum.-

Ditetapkan di : Djakarta,
Pada tanggal : 8 Nopember 1969.

**MENTERI DALAM NEGERI SELAKU KETUA SEKTOR
CHUSUS J/PEMILIHAN UMUM,**

ttd.

AMIR MACHMUD

**LAMPIRAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI SELAKU
KETUA SEKTOR CHUSUS J/PEMILIHAN UMUM No. 18/1969-
TANGGAL 8 NOPEMBER 1969.**

DAFTAR TEMPAT2 PEMUNGUTAN SUARA PER-DESA.

PROPINSI :

KABUPATEN/KOTAMADYA :

K E T J A M A T A N :

**DESA(ATAU JANG DISAMA-
KAN).** :

Nomor	Letak T.P.S.	Banjaknja	Keterangan
1/01/1/I/DP.	Djalan Sehat Rt. 001/Rw. 01	1	
2/01/1/I/DP.	Djalan Batu Rt. 008/Rw.01	1	
3/02/1/I/DP.	d. s. t. nja		
dst.	dst.		

.....1969.
.....

Tanda tangan

(Nama Terang).

**PANTIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA
DJALAN IMAM BONDJOL NO. 13 TILPON 53418
D J A K A R T A**

**PEDOMAN & PETUNDJUK UNTUK
PEMBUATAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA (T.P.S.).**

Nomor : 0304/III/1/1971.-

Untuk merealisir Instruksi Mendagri/Ketua Sektor Khusus J No. 18 tahun 1969 tanggal 8 Nopember 1969 tentang Persiapan dan Kesiapan dalam rangka operasionil Pemilu tahun 1971 dan Pedoman Mendagri/Ketua P.P.I. No. 2/PPI/Th.1971 tanggal 12 Maret 1971 tentang Tata Susunan T.P.S., untuk pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu Tahun 1971 di-DCI Djakarta ditetapkan kebidjaksanaan sebagai berikut :

1. Untuk tiap2 200 – 300 pemilih disediakan sebuah TPS dengan memperhatikan batas2 lingkungan Blok Sensus/RT untuk masing2 T.P.S.
2. T.P.S. dapat diadakan :
 - a. – dilapangan terbuka,
 - b. – didalam bangunan, dan
 - c. – khusus/mobile.
 - Ketentuan tersebut ad. a dan b. diatur dalam pedoman Mendagri/Ketua P.P.I. No. 2/PPI/Th.1971.
 - Ketentuan ad. c. ialah untuk :
 - para tahanan pada Kantor2 POLRI (Komsekko, Komwil, Komdak, dan MABAK).
 - para tahanan di R.T.M. dan sebagainya.
 - untuk tiap Wilayah Komwil disediakan sedikitnja 1 (satu) buah T.P.S. mobile untuk melajani pemilih2 dalam tahanan di Komsekko2 dalam bawahan Komwil tersebut dan di Komwil itu sendiri; sedangkan tempat-tempat tahanan lainnja seperti Komdak, Mabak, dan RTM, dimasukkan kedalam TPS mobile untuk wilayah Komwil dimana Kantor2 tersebut berada.
 - untuk para awak2 kapal/nelayan dan sebagainya jang tidak dapat turun kedarat (karena dikarantina, belum boleh masuk pelabuhan dan sebagainya) disediakan TPS Mobile pada motor-boat (speed-

boat) untuk melajani tersebut; sedjumlah kebutuhan jang diperlu-
kan sesuai dengan banjaknja pemilih.

3. Pada tiap TPS dapat disediakan se-banjak2nja 3 (tiga) buah Bilik Pemberian Suara.

4. **Bentuk dan Susunan TPS :**

a. Bentuk dan Susunan TPS diatur dalam Pedoman Mendagri/Ketua P.P.I. No. 2/PPI/Th.1971 tanggal 12 Maret 1971.

b. Bilik Pemberian Suara dibuat dari bambu/kayu dan dindingnja ditutup dengan kain (blatju, driiljeans dan sebagainya) jang tidak tembus mata.

— Kain2 ini digunakan sedemikian rupa, hingga kelak selesai pemungutan suara dapat digunakan/dimanfaatkan untuk keperluan lainnja (seperti : pakaian Hansip, Gordyen pintu/djendela Kantor dan sebagainya).

5. Pembuatan TPS supaya disesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi setempat, dengan memperhatikan sjarat-sjarat minimal jang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pedoman Mendagri/Ketua PPI No. 2/PPI/Th.1971 tersebut.

6. Sebagai petundjuk pembuatan bilik pemberian suara dan alas serta alat penusuk; bersama ini dilampirkan schema tehnik dan pedoman seperlunja.

Djakarta, 7 April 1971.

PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

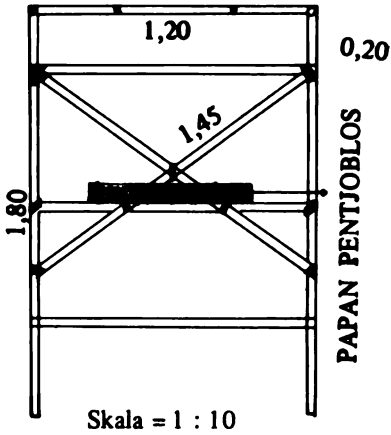
Sekretaris,

ttd.

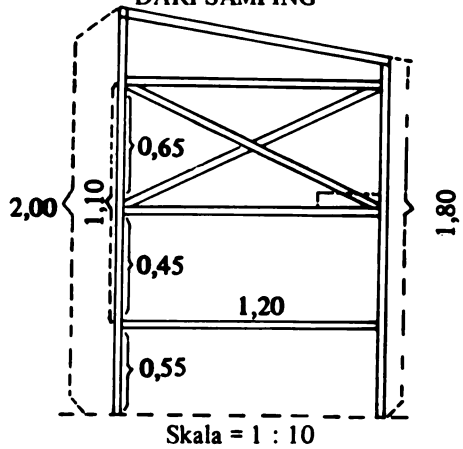
(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc).

**PEDOMAN : PEMBUATAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA.**

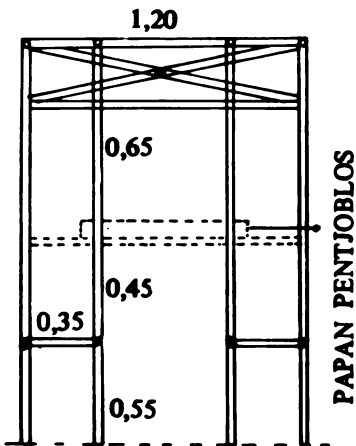
DARI BELAKANG



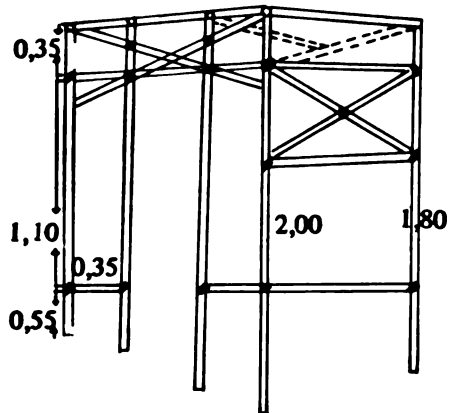
DARI SAMPING



DARI DEPAN



BANGUNAN T.P.S.



**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
DJALAN IMAM BONDJOL NO. 13 TILPON 53418
D J A K A R T A**

**PEDOMAN & PETUNJUK UNTUK PEMBENTUKAN
KELOMPOK PENJELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA (K.P.P.S.)**

Nomor: 0305/III/1/1971.

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam jadwal pelaksanaan operasional pemilu, maka dalam bulan Mei 1971 yang akan datang para anggota K.P.P.S. untuk tiap TPS di daerah DCI Jakarta harus telah terbentuk/tersusun.

Pedoman umum pembentukan K.P.P.S. tersebut adalah sebagaimana diatur dalam:

- a. PP. No.1 Tahun 1970 Pasal 60 jo. UU.No. 15 Tahun 1969 Pasal 8 ayat (4) dan (11),
- b. Surat Kawat/Telex Mendagri/Ketua LPU No. 14/11/1970 tanggal 14 April 1970 tentang keanggotaan KPPS, (ayat c).
- c. Instruksi PPI No. 1 Tahun 1970 tentang susunan P.P.S., P.P.P. dan K.P.P.S.
- d. Keputusan Mendagri/Ketua LPU no. 42/LPU/1970 tentang: Djangka Waktu Pelaksanaan Tugas PPP dan K.P.P.S.,
- e. Pedoman Mendagri/Ketua LPU No. 3/LPU/1970 tanggal 5 Maret 1970.

Berkenaan dengan makin dekatnya jadwal penjeleenggaraan Pemungutan Suara itu, maka perlu disusun pedoman/petunjuk untuk pembentukan KPPS dimaksud sebagai berikut:

I. PEMBENTUKAN:

- a. Antara tanggal 1 Mei 1971 s/d 31 Mei 1971 seluruh anggota KPPS untuk masing2 TPS harus telah tersusun/terbentuk.

- b. Ketua dan Anggota2 KPPS diangkat dan diberhentikan oleh masing2 Walikota didalam wilayahnja, atas usul Tjamat i.c. Lu-
rah jang bersangkutan.
- c. Pelantikan dan pengambilan sumpah para anggota KPPS di-
lakukan oleh Tjamat atas nama masing2 Walikota jang bersang-
kutan.-

II. SUSUNAN/SJARAT-SJARAT:

- a. Keanggotaan KPPS ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang sebagai anggota.
- b. Keanggotaan KPPS dari Unsur2 Pemerintah (termasuk jang da-
pat disamakan) antara lain:
 - 1. Para Karyawan/Pegawai Negeri
 - 2. Para Karyawan Perusahaan2 Negara/Daerah
 - 3. Para Guru Sekolah Negeri (termasuk jang bersubsidi).
 - 4. Para Anggota ABRI **jang tidak bertugas** di-Kesatuannja; **dengan ketentuan** pada waktu bertugas di TPS tidak meng-
gunakan uniform/seragam kesatuannja.
 - 5. Para Pengurus RT/RW; jang tidak menjadi anggota dari salah satu Organisasi Parpol sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dasar RT/RW DCI Djakarta dalam SK. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 23 Pebruari 1966 No. Ib.3/2/14/1966; bahwa RT/RW adalah sebagai alat pembantu Pemerintah jang bukan Pegawai Pemerintah.
- c. Persyaratan2 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 16 P.P. No. 1 Tahun 1970 supaja benar2 diperhatikan; dan untuk ini sepenuh-
nja dilimpahkan wewenang penentuannja kepada unsur2 Mus-
pida masing2 wilayah:
 - untuk tingkat Ketjamatan; dengan Koramil dan Komsekko.
 - untuk tingkat Walikota; dengan Kodim, Komwil dan Kedjak-
saan.
- d. Diutamakan eksponen para ex petugas pendaftar pemilih jang lalu.

III. TUGAS K.P.P.S.

- a. Antara tanggal 1 Djuni 1971 s/d. 10 Djuni 1971 semua anggota KPPS mengikuti Santiadji/Coaching jang dilakukan oleh ma-

sing-masing PPS/Ketjamatan jang bersangkutan untuk 1 (satu) hari **dengan penekanan** dalam soal peragaan pelaksanaan pemungutan suara dan tugas-tugas jang harus dilakukan oleh KPPS pada hari pemungutan suara.

- b. Antara tanggal 10 Djuni 1971 s/d 20 Djuni 1971 meneliti dan mempersiapkan Daftar Pemilih Tambahan.
- c. Antara tanggal 21 Djuni 1971 s/d. 30 Djuni 1971 membuat dan menjampaiakan surat2 panggilan.
- d. Sehari sebelum hari pemungutan suara telah mempersiapkan peralatan2 jang diperlukan untuk pemungutan suara.
- e. Melaksanakan semua ketentuan2 jang diatur dalam Pedoman Mendagri/Ketua LPU No. 3 Tahun 1971.
- f. Mempertanggung djawabkan segala tugas kewajibannja kepada PPS melalui koordinator KPPS/Kelurahan masing-masing.

IV. HONOR/UPAH K.P.P.S.

- Untuk para anggota Koordinator KPPS/Kelurahan tidak diberikan honor/upah tersebut.
- Untuk anggota KPPS diberikan uang sidang sebagaimana diatur dalam Surat Edaran LPU no. 1/14/1970 tanggal 19 Pebruari 1970 sebesar @ Rp. 40,- untuk sebanjak-banjaknja 4 x sidang.

V. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN:

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam ketentuan peraturan per-Undang2an jang ada, sesuai dengan tanggung dajwab PPS dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagai dimaksud dalam pasal 21 (3) UU. No. 15 Tahun 1969, dapat diadakan dan ditetapkan oleh PPS masing-masing setelah mengadakan konsultasi jang sempurna dengan P.P. kota masing-masing.

Djakarta, 7 April 1971.-

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
Sekretaris,**

ttd.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M. Sc).-

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**
Djalan Imam Bondjol No. 13, Tilpon 53418
DJAKARTA.

Kepada Jth:
Semua Pimpinan Kantor-kantor/
Perusahaan (Pemerintah/Swasta)
di
D.C.I. DJAKARTA.

SURAT – EDARAN

No.: 0353/III/1/1971.

- I. Sesuai dengan pedoman dari Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia dalam Kawatnja tanggal 14 April 1971 No.56/22/1971 maka untuk kelantjaran tugas-tugas pekerdjaan para karyawan pada Kantor-kantor/Perusahaan masing-masing serta tidak hilangnya jam kerdja yang sangat berharga dalam masa Pelita ini, bagi Kantor-kantor/Perusahaan di Wilayah DCI Djakarta dapat mengadakan T.P.S. dikantor masing-masing setjara tersendiri. Permintaan Kantor/Perusahaan untuk mengadakan T.P.S. dikantor-kantor itu dapat diajukan kepada Tjamat/Ketua P.P.S. setempat.
- II. Biaya pembuatan T.P.S. serta petugas K.P.P.S. tersebut dibebankan kepada masing-masing Kantor/Perusahaan dengan petunjuk dan bimbingan teknis oleh PPD DCI Djakarta c/q Tjamat/Ketua P.P.S. setempat. Detail tentang masalah ini dapat dibitjarkan dengan Tjamat/Ketua P.P.S.
- III. Para Karyawan yang terdaftar sebagai pemilih, oleh Kantor/Perusahaan masing-masing, setjara kolektif dimintakan kutipan Daftar Pemilih (Model A4) kepada Tjamat/Ketua P.P.S. setempat untuk digunakan dalam pemungutan suara pada T.P.S. di Kantor/Perusahaan masing-masing.
- IV. Untuk pelaksanaan ini diharapkan semua pimpinan Kantor/Perusahaan dimaksud segera menghubungi para Tjamat/Ketua P.P.S. selambat-lambatnja sampai akhir bulan Mei 1971.

Djakarta, 17 April 1971.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH D.C.I. DJAKARTA**

Tembusan :

1. Panitia Pemilihan Indonesia
2. Semua Walikota/P.P.Kota,
3. Semua Tjamat/P.P.S.,
4. Semua Lurah/Koordinator
K.P.P.S.

ttd.

(ALI SADIKIN)

Letnan Djenderal KKo.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA
DJALAN IMAM BONDJOL No. 13 TILPON 53418
D J A K A R T A .**

Nomor : 0360/III/1/1971. Djakarta, 17 April 1971.
Lampiran : -,-
Perihal : **PEMILIHAN UMUM** Kepada Jth. :
1971 DI D.C.I. **SAUDARA KEPALA KANTOR**
DJAKARTA. **URUSAN PENDUDUK DAERAH**
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA,
di —

D J A K A R T A .

Dari beberapa wargakota, kami mendapatkan pertanjaan sekitar pemungutan suara dalam Pemilu 1971 jang akan datang dihubungkan dengan persjaraan harus memiliki kartu Tanda Penduduk (K.T.P.).

Untuk tidak memberikan gambaran jang keliru; persjaraan K.T.P. dihubungkan dengan hak pilih seseorang dalam Pemilu jang akan datang adalah tidak benar.

Jang benar adalah bahwa **salah satu** tjara untuk penelitian/pembuktian kebenaran diri seseorang pemilih dapat dilakukan melalui K.T.P. disamping identitas lainnja seperti Kartu Keluarga, Rijbewijs, Paspor, Legitimasi dan sebagainya.

Oleh karenanja diharapkan dari pihak Saudara dapat pula memberikan penjelasan jang serupa, guna tidak membingungkan masjarakat umumnja, pemilih chususnja.

Demikianlah agar Saudara maklum.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,
ttd.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

TEMBUSAN :

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
 2. Sekda DCI Djakarta,
 3. BPH/Bidang Pemerintahan,
 4. Direktorat I/Pemerintahan,
 5. Direktorat VII/Chusus Politik,
 6. Djapen DCI, Humas DCI, Pers,
 7. Walikota/P.P. Kota,
 8. Tjamat/Ketua P.P.S.
 9. Lurah/Koordinator KPPS,
 10. A r s i p .
-

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**
Djalan Imam Bondjol No. 13, Djakarta.

No. : 0464/III/1/1971.

Djakarta, 17 Mei 1971.

Lampiran : —

Perihal : Penjelesaian formulir
A.4. Untuk Karyawan
Pemilih pada TPS Chu-
sus/Kantor.

Kepada
Para Walikota/Ketua P.P.Kota
Para Tjamat/Ketua P.P.S.
Para Lurah/Koordinator K.P.P.S.
di

DJAKARTA

Sehubungan dengan ketentuan diadakannya TPS Chusus/Kantor diwilayah DCI Djakarta, guna mempertjepat penjelesaian pemberian formulir A4 untuk para karyawan pemilih dari Instansi/Kantor/Perusahaan yang bersangkutan, maka bersama ini kami minta dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan prioritas terhadap penjelesaian masalah tersebut.

Hendaknja formulir A.4. yang disampaikan setjara kolektif oleh Instansi/Kantor/Perusahaan tersebut kepada Saudara meskipun yang disampaikan setjara perorangan dapat diselesaikan oleh Saudara sebaik-baiknya dan setjepat-tjepatnja dan meneruskan kepada Tjamat/Ketua P.P.S. atau Lurah masing-masing dimana karyawan tersebut bertempat tinggal.

Penanda tangan/legalisasi formulir A.4. tersebut dapat dilakukan oleh Tjamat/Ketua P.P.S. atau Wakil atau Sekretaris dan demikian pula ditingkat Kelurahan oleh Lurah atau Wakil Lurah masing-masing guna mempertjepatnja.

Demikian agar Saudara maklum.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,

Tembusan :

ttd.

1. Panitia Pemilihan Indonesia, (SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)
2. Sekda DCI Djakarta,
3. B.P.H. Bidang Pemerintahan,
4. Direktorat I/Pemerintahan,
5. Direktorat VII/Chusus Politik,
6. A r s i p.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13, Djakarta

Telepon No. 53418.

Nomor : 0465/III/1/1971.

Lampiran : —

Perihal : Tenaga K.P.P.S.

Djakarta, 15 Mei 1971.

Kepada :

Jth.: Para Walikota/Ketua P.P.Kota
Para Tjamat/Ketua P.P.S.
se - D.C.I. Djakarta
di

DJAKARTA.

Dalam rangka pembentukan KPPS-KPPS dimasing-masing Kelurahan didjumpai masalah tentang karyawan dari sesuatu Kantor atau Perusahaan jang telah ditundjuk untuk mendjadi anggota K.P.P.S. sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.15 tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1970 diwadjabkan pula oleh Pimpinannja guna memberikan suara pada TPS-TPS Chusus/Kantor pada waktu pemungutan suara nanti.

Untuk menjelesaikan masalah itu kiranja dapat ditempuh salah satu dari djalan jang sebaik-baiknja:

- a. Diberikan pendjelasan sebaik-baiknja kepada Pimpinan Kantor/Perusahaan itu bahwa tugas karyawan tersebut sebagai petugas KPPS tidak kalah pentingnja dalam rangka mensukseskan Pemilu ini dan ia dapat memberikan suaranya pada T.P.S. dimana ia bertugas, dengan dispensasi dari Gubernur Kepala Daerah/Ketua Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta.
- b. Bila karena sesuatu sebab, Instansi tersebut berketetapan agar para karyawannja harus memberikan suaranya pada TPS Chusus/Kantor, diusahakanlah pengganti keanggotaan KPPS tersebut dari unsur lain.

Demikianlah agar Saudara maklum.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Tembusan :

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
 2. Sekda D.C.I. Djakarta,
 3. B.P.H. Bidang Pemerintahan,
 4. Direktorat I/Pemerintahan,
 5. Direktorat VII/Chusus Politik,
 6. A r s i p.
-

Sekretaris,

ttd.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13 Djakarta

Telepon No.53418

=====

No. : 0468/III/1/1971. Djakarta, 17 Mei 1971.
Lampiran : --
Perihal : Pelaksanaan Hak Pilih Kepada Jth.
Para Pasien Rumah Sa- Para Pimpinan/Penanggung Jawab
kit/Rumah Bersalin/ Rumah Sakit/Rumah Bersalin/Klinik
Klinik dan lain-lain.- dan lain2 di-Wilajah DCI Djakarta
di-

D J A K A R T A

Dengan mendekatnja waktu Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Umum 1971, guna memenuhi hak pilih bagi Para Pasien Rumah Sakit/Rumah Bersalin/Klinik d.l.l. sebagaimana dimaksud dalam Undang2 No. 15 tahun 1969 pasal 13 ayat (5) jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 pasal 36 ayat 1, 2, dan 3, hendaknja pengurusan kutipan Daftar Pilih/Tambahan dapat diselesaikan pada waktunja.

Bantuan dan perhatian Saudara untuk itu dengan menghubungi para Panitia setempat dimana jang bersangkutan tinggal (berdomicili) akan dapat mendjamin terlaksananja hak Pemungutan Suara jang bersangkutan dengan sebaik-baiknya.

Demikian agar Saudara maklum.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,

ttd.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc)

Tembusan:

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
2. Departemen Kesehatan R.I. di Djakarta,
3. B.P.H. Bidang Pemerintahan,
4. Sekda DCI Djakarta,
5. Dinas Kesehatan Kota (D.K.K.),
6. Direktorat I/Pemerintahan,
7. Direktorat VII/Chusus Politik,
8. Para Walikota/Ketua P.P. Kota,
9. Para Tjamat/Ketua P.P.S.
10. A r s i p.-

Djalan Imam Bondjol No. 13 Djakarta
Telepon No. 53418

DJAKARTA .

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

Tembusan :

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
 2. B.P.H. Bidang Pemerintahan,
 3. Sekda DCI Djakarta,
 4. Direktorat I/Pemerintahan,
 5. Direktorat VII/Chusus Politik,
 6. Para Walikota/Ketua P.P. Kota,
 7. Para Tjamat/Ketua P.P.S.
 8. A r s i p.
-

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA**
Djalan Imam Bondjol No. 13, Tilpon 53418
D J A K A R T A

Nomor : 0512/III/1/1971.

Djakarta, 31 Mei 1971,

Lampiran : —

Perihal : TPS di Terminal
Bus dalam wilayah
DCI Djakarta.

Kepada Jth.:
Sdr. Kepala D.L.L.D. DCI
Djakarta,
di
Djakarta.

Guna memberi kesempatan kepada pemilih yang sedang bepergian karena sesuatu kepentingannya pada waktu pemungutan suara, maka diminta dengan hormat agar Saudara dapat menjediakan TPS-TPS Khusus di Terminal-terminal Bus dalam Wilayah DCI Djakarta, disamping dapat pula menampung suara dari orang-orang yang pulang pergi dari luar kota dan telah memiliki formulir A4 yang memungkinkan mereka untuk menggunakan hak pilihnya di Terminal Bus dimaksud.

Diminta agar Saudara segera menghubungi masing-masing Walikota/Ketua P.P.Kota guna penyelesaian teknis pengadaan TPS-TPS dimaksud selambat-lambatnya s/d tanggal 15 Djuni 1971 yang akan datang.

Demikianlah agar Saudara maklum.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,

ttd.

Tembusan :

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
2. B.P.H./Bidang Pemerinthaan,
3. Sekda DCI Djakarta,
4. Direktorat I/Pemerintahan,
5. Direktorat III/Kesra,
6. Direktorat VII/Chusus Politik,
7. A r s i p.

PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Djln. Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418
D J A K A R T A .

I N S T R U K S I

No. 0515/III/1/1971

D a r i : Pd. Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD DCI Jakarta.
K e p a d a : Jth. — Para Walikota/Ketua P.P. Kota.
— Para Tjamat/Ketua P.P.S.
— Para Lurah/Ketua P.P.P.
se — DCI Jakarta.
Perihal : Penyelesaian pengisian formulir A.4.

Dengan makin mendekatnja waktu pemungutan suara, maka guna melantjarkan djalannja Pemilu nantinja bersama ini diinstruksikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Penyelesaian formulir A.4. bagi perorangan/Organisasi/Instansi/Kantor dan Unit kerdja lainnja jang membutuhkan harus diberikan prioritas utama agar dapat diselesaikan selambat2nja pada tanggal 30 Djuni 1971.
2. Untuk maksud tsb. mulai tanggal 1 Djuni 1971 agar kantor2 Lurah/Tjamat dibuka selama 24 djam terus-menerus dan setiap saat harus selalu ada seorang pedjabat jang kompeten tentang masalah Pemilu jang berada di Kantor tsb. (Wakil Tjamat/Lurah/Wk. Lurah/Sekretaris PPS/Ketua KPPS), chususnja untuk melajani permintaan A.4.
3. Penanda tangan/Pengesahan formulir A.4. dapat djuga dilakukan oleh Tjamat/Wakil Tjamat/Sekretaris PPS dengan mengirimkan 1 (satu) rangkap arsip formulir A.4. ke Kelurahan dimana jbs. terdaftar.

4. Pelajanan pemberian pengisian formulir A.4. tidak dibenarkan memungut bajaran.

Dikeluarkan di : D j a k a r t a .

Pada tanggal : 1 Djuni 1971.

**Pd. GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH DCI DJAKARTA.**

t.t.d.

(ALI SADIKIN)

Letnan Djenderal K.K.O.

TEMBUSAN :

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
 2. BPH/Bidang Pemerintahan,
 3. Sekda DCI,
 4. Direktorat I/Pem,
 5. Direktorat VII/Chusus Politik,
 6. A r s i p.
-

**PEDOMAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
NOMOR : 2/PPI/TAHUN 1971
TENTANG
TATA SUSUNAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Untuk kelanjutan pelaksanaan tugas-tugas K.P.P.S. dan ketertiban penyelenggaraan pemberian suara oleh para pemilih, maka perlu diatur tata susunan Tempat Pemungutan Suara sebagaimana tersebut dibawah ini :

I. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (T.P.S.)

1. TPS dapat diadakan di :
 - a. tempat terbuka (lapangan, halaman dan sebagainya) ;
 - b. didalam bangunan (sekolah, balai desa dan sebagainya).
2. Jika diadakan dilapangan terbuka, maka diperlukan :
 - a. perlindungan terhadap panas matahari/hudjan, khusus untuk tempat pimpinan Rapat, bilik pemberian suara, kotak-kotak suara dan tempat duduk para pemilih jang dapat berupa kadjang, gedeg, lajar dan lain sebagainya ;
 - b. pembatasan/tanda batas TPS dengan menggunakan tali-tambang, bambu, papan kaju dan lain sebagainya ;
Pembatasan/tanda batas ini bertudjuan agar mudah diketahui oleh setiap orang dan bahwa orang tidak boleh masuk keruangan TPS jang berbatas itu tanpa izin Ketua K.P.P.S.
3. Jika diadakan didalam bangunan, maka diperlukan :
 - a. pembatasan/tanda batas TPS dengan menggunakan tali-tambang, papan-kaju dan lain sebagainya, apabila ruangan dalam bangunan itu sangat luas (lebih dari jang dibutuhkan untuk ukuran luas TPS) ;
 - b. pembatasan/tanda batas TPS dengan menggunakan dinding-dinding ruangan, apabila ruangan dalam bangunan itu seluas jang diperlukan untuk T.P.S.

II. BENTUK SUSUNAN DAN UKURAN.

1. Bentuk.

- a. TPS adalah tempat penyelenggaraan Rapat Pemungutan Suara,

jang didalamnja terdapat :

- (1) Tempat untuk KPPS.
- (2) Tempat untuk para pemilih
- (3) Bilik/bilik-bilik pemberian suara
- (4) Tempat untuk kotak-kotak suara.

- b. Ditempat untuk KPPS disediakan medja dan tempat duduk bagi Pimpinan Rapat.
- c. Ditempat untuk para pemilih disediakan tempat duduk tjukup untuk menampung sekurang-kurangnya 25 pemilih sekaligus dan tempat untuk memasang Daftar-daftar Tjalon Tetap DPR, DPRD I dan DPRD II.
- d. Bilik pemberian suara dibuat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - (1) ber dinding jang dibuat dari papan/kaju/gedeg/kain, kadjang dan lain sebagainya dan berpintu satu jang mengarah ketempat duduk KPPS (pimpinan Rapat) ;
 - (2) pintu bilik pemberian suara tidak memakai daun pintu tetapi ditutup dengan kain tirai (gordijn) jang tidak dapat ditembus oleh penglihatan mata atau didepan pintu dipasang papan/kaju/gedeg (sckatsel) jang fungsinya seperti kain tirai diatas dan pemasangannya sedemikian rupa sehingga suara tidak terganggu ;
 - (3) didalam bilik pemberian suara dipasang papan/medja untuk menempatkan alat pentjoblos surat suara dan landasannya;
 - (4) djumlah bilik pemberian suara ditiap TPS sekurang-kurangnya satu dan sebanjak-banjaknja tiga disesuaikan dengan djumlah pemilih jang dilajani;
- e. Ditempat kotak-kotak suara disediakan tempat ketinggian jang dapat berupa kursi atau bangku dari bambu/kaju untuk menempatkan kotak-kotak suara dan dibuat sedemikian rupa sehingga letak tjelah (lobang untuk memasukkan surat suara) pada kotak suara setinggi siku pemilih berdiri.

1. Susunan dan Ukuran

- a. Tempat Pimpinan Rapat jang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) tempat duduk/kursi dan 1 (satu) medja, diletakkan lebih kurang pada djarak 5 meter dari bagian depan bilik pemberian suara.

- b. Tempat untuk duduk para pemilih diatur dekat pintu masuk TPS, sekurang-kurangnya pada jarak 1,50 meter dari bilik pemberian suara dan sekurang-kurangnya 2,50 meter dari tempat duduk Pimpinan Rapat.
- c. Bilik pemberian suara terletak sekurang-kurangnya pada jarak 1 m dari tanda batas TPS dan bila bilik pemberian suara dijumlahnya lebih dari satu disuatu TPS, maka antara bilik yang satu dengan yang lainnya berjarak sekurang-kurangnya 1.00 meter. Pintu bilik pemberian suara mengarah kepada tempat duduk Pimpinan Rapat.
- d. Kotak Suara ketiga-tiganya diletakkan didekat pintu keluar, berdjar berurut-turut berwarna kuning, putih dan biru, dan yang berwarna kuning terdekat dengan bilik pemberian suara.
- e. Kotak Suara yang berwarna biru diletakkan pada jarak 2.00 atau 3.00 meter dari meja Pimpinan Rapat agar Ketua KPPS dapat menjaksikan pemilih memasukkan surat suara-surat suara kedalam kotak-kotak suara.
- f. Tempat untuk memasang Daftar-daftar Tjalon Tetap diletakkan didekat tempat duduk pemilih sedemikian rupa, sehingga pemilih dapat melihatnya tanpa mengganggu ketertiban jalannya pemungutan suara.
- g. (1) Bilik pemberian suara berukuran sekurang-kurangnya panjang 1,50 meter, lebar 1,00 meter, tinggi dinding 2,00 meter dan lebar pintu 0,75 meter.
- (2) Kain tirai pada pintu bilik pemberian suara berukuran selebar pintu dan dipasang setinggi-tingginya 60 cm dari atas tanah/lantai, dengan maksud supaya badan pemilih mulai ujung siku sampai kepala tidak dapat dilihat.
- (3) Apabila yang dipasang dimuka pintu bilik pemberian suara adalah papan/kayu/gedeg, maka ukuran lebarnya sekurang-kurangnya $1\frac{1}{2}$ kali lebar pintu bilik.
- (4) Papan/meja untuk menempatkan alat pentjoblos surat suara beserta landasannya/bantalannya berukuran sekurang-kurangnya panjang 50 cm, lebar 30 cm dan tinggi 75 cm.
- h. Tata-susunan Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan pedoman dasar, sedangkan jarak-djarak/ukuran-ukuran sebagaimana tersebut dalam angka 2 huruf a sampai dengan g diatas didalam kenyataan penjelenggaraannya

dapat diadakan penjesuaian dengan memperhatikan situasi/kondisi/kemungkinan setempat.

- III. Untuk lebih djelasnja mengenai hal-hal jang telah ditentukan dalam Bab-bab I dan II diatas dapat dilihat pada gambar/bagan tertjantum pada lampiran-lampiran I dan II Pedoman ini.

Djakarta, 12 Maret 1971

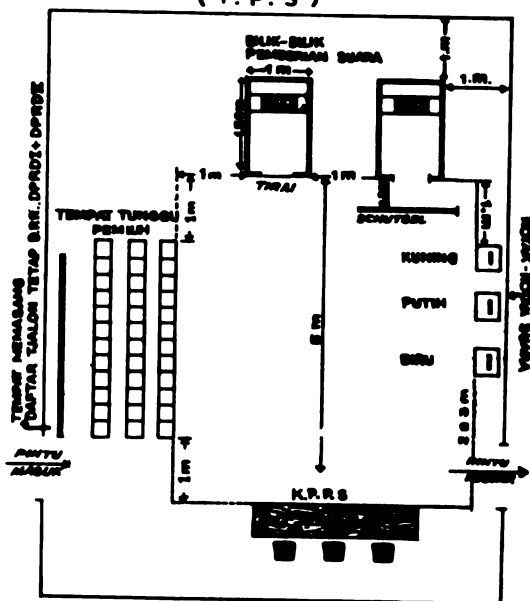
**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA**

ttd.

(AMIRMACHMUD)

Lampiran ke-I **PEDOMAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
NOMOR: 2/PPI/TAHUN 1971.**

GAMBAR / BAGAN :
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
(T . P . S)



Keterangan:

Djarak-djarak / ukuran-ukuran
yang tertantum dalam gambar
/bagan ini ialah djarak/ukuran
minimal yang dalam penjeleng-
garaanja tidak boleh dikurangi.

Djakarta, 12 Maret 1971

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA**

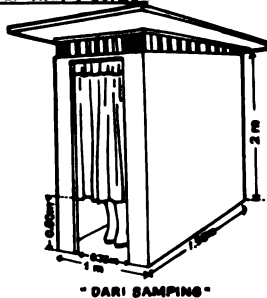
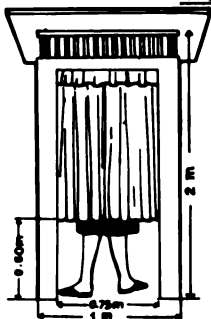


AMIRMACHMUD

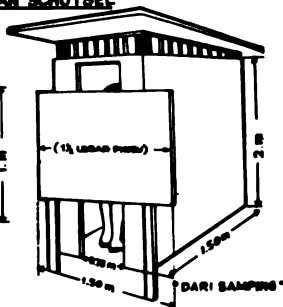
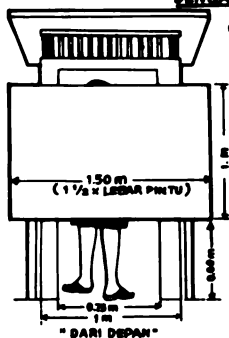
Lampiran ke-II **PEDOMAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA**
NOMOR: 2/PPI/TAHUN 1971

BENTUK BILIK (BILIK 2) PEMBERIAN SUARA

DENGAN TIRAI / GORDEN



DENGAN SCHUTSEL



Djakarta, 12 Maret 1971

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA**



AMIRMACHMUD

**PEDOMAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA**

NOMOR: 3/PPI/TAHUN 1971.

TENTANG

TATA TJARA PENJELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA

Untuk ketertiban dan kelantjaran penjelenggaraan pemungutan suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), maka perlu diatur tata-tjara dan tata-kerdjaja pemungutan suara sebagaimana tersebut dibawah ini:

I. PEMBENTUKAN KELOMPOK PENJELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS).

1. Susunan.

- a. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang ketentuan lebih landjut mengenai susunan Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pendaftaran Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, KPPS terdiri dari unsur Pemerintah dan berdjumlah sekurang-kurangnja tiga sebanjak-banjaknja tudjuh orang termasuk Ketua.
- b. Anggota dan Ketua KPPS diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah atas usul Tjamat/Kepala Ketjamatan.
Bupati/Walikota Kepala Daerah menjerahkan wewenang pelantikan dan pengambilan sumpah Ketua dan Anggota KPPS kepada Tjamat/Kepala Ketjamatan.
- c. Sesuai dengan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970, maka untuk dapat diangkat sebagai anggota KPPS harus memenuhi sjarat-sjarat sebagai berikut:

- (1) Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun.
- (2) Tjapak menulis dan membatja huruf Latin.
- (3) Setia kepada Pantjasila sebagai Dasar Ideologi Negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat.
- (4) Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./PKI atau Organisasi-organisasi terlarang lainnya.
- (5) Tidak ditjabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi.
- (6) Tidak njata-njata terganggu djiwa/ingatannya.
- (7) Penduduk Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

2. Masa Kerdja.

- a. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum nomor 42/LPU/Tahun 1970 tentang jangka waktu pelaksanaan tugas Panitia Pendaftaran Pemilihan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, KPPS melakukan tugasnya selama 1 (satu) bulan, sedjak 20 (dua puluh) hari sebelum sampai dengan 10 (sepuluh) hari sesudah dilakukan pemungutan suara.
- b. Santiadji KPPS dilakukan segera setelah pelantikan dan diikuti oleh tiap Ketua seorang anggota KPPS selama 2 (dua) hari.

II. TUGAS.

1. Umum.

KPPS mempunyai tugas menjelenggarakan pemungutan suara dalam wilayah kerjanya untuk satu TPS dan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengumumkan tempat dan waktu pemungutan suara.
- b. Menjampaikan surat panggilan untuk memberikan suara.
- c. Menjiapkan TPS dengan segala perlengkapannya.
- d. Bersama-sama dengan petugas keamanan mengatur pemeli-

haraan ketertiban dan pendjagaan keamanan.

- e. Menjelenggarakan rapat pemungutan suara termasuk kegiatan-kegiatan persiapan sebelumnya.

2. Kegiatan sebelum pemungutan suara.

Ketua dan setiap anggota KPPS wajib mengetahui dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Peraturan-peraturan, instruksi-instruksi dan pedoman-pedoman yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemungutan suara.
- b. Persiapan TPS dengan segala perlengkapannya berdasarkan Pedoman Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia Nomor 2/PPI/Tahun 1971.
- c. Penjimpnan dengan baik Daftar Pemilih Tetap/Tambahan untuk TPS yang diterima dari PPS.
- d. Penjimpnan dengan baik kotak-kotak suara yang berisi bungkusan-bungkusan surat suara, formulir-formulir Berita Atjara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara berikut lampiran-lampirannya, alat pentjoblos dan bantalan/landasannya, alat tulis menulis, lem, segel (meterai Lambang Pemilu), benang/tali untuk pengikat bungkusan-bungkusan, amplop besar dan kertas untuk pembungkus.
- e. Penjimpnan dengan baik Daftar Tjalon Tetap DPR, DPRD-I dan DPRD-II.
- f. Penjediaan papan/karton nama TPS dan tanda-tanda lainnya (tulisan bilik suara, tanda panah masuk dan lain sebagainya).
- g. Pengumuman tentang tempat dan waktu pemungutan suara kepada para pemilih dengan tjara yang praktis dan lazim dilaksanakan setempat, umpamanya melalui RT., dipasang papan pengumuman, siaran melalui petugas keliling dan sebagainya selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari pemungutan suara.
- h. Penjampaian surat panggilan untuk memberikan suara kepada para pemilih yang namanya tertjantum dalam Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud huruf c diatas (dengan bukti tanda terima dari pemilih) selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari pemungutan suara.

- i. Penentuan nomor-nomor bagi anggota-anggota KPPS dalam rangka melaksanakan tugas, dimulai dengan Ketua diberi Nomor 1.

3. Kegiatan pada hari Pemungutan Suara.

Pada hari pemungutan suara antara Ketua dan masing-masing anggota KPPS diadakan pembagian tugas sebagai berikut:

(a) Ketua.

- (1) Sebelum jam 08.00 waktu setempat melakukan pemeriksaan dan penelitian apakah segala sesuatu yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemungutan suara sudah siap dan tersedia.
- (2) Menentukan tugas bagi anggota-anggota KPPS dan tempatnya masing-masing di TPS, yakni:
 - (a) apabila KPPS beranggotakan 3 orang, maka anggota nomor 2 dan nomor 3 duduk mendampingi Ketua dimedja pimpinan rapat pemungutan suara.
Untuk melajani para pemilih dipintu masuk TPS, Ketua dapat minta bantuan dari petugas yang diperbantukan kepada KPPS (Hansip, Pramuka dan lain sebagainya), dengan ketentuan petugas tersebut berada diluar TPS.
 - (b) Apabila KPPS beranggotakan 4 orang, maka anggota nomor 4 ditempatkan dipintu masuk dengan tugas melajani para pemilih yang akan masuk diruang TPS.
 - (c) apabila KPPS beranggotakan 5 orang, maka anggota nomor 5 ditempatkan didekat kotak-kotak suara untuk menjaksikan dan membantu para pemilih yang akan memasukkan surat-surat suara kedalam kotak-kotak suara.
 - (d) apabila KPPS beranggotakan 6 orang, maka anggota nomor 6 ditempatkan dimedja rapat pemungutan suara untuk mendampingi Ketua.

- (e) apabila KPPS beranggotakan 7 orang, maka anggota nomor 7 dapat ditugaskan membantu anggota nomor 4 ataupun tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
Untuk djelasnja dapat dilihat pada bagan yang terlampir pada Pedoman ini.
- (3) Melakukan pemeriksaan bersama petugas keamanan mengenai persiapan untuk menghadapi segala kemungkinan.
 - (4) Menentukan saatnja para pemilih boleh memasuki TPS dan duduk ditempat duduk untuk para pemilih.
 - (5) Tepat djam 08.00 waktu setempat membuka rapat pemungutan suara dengan kata pengantar singkat dan seperlunja, dilandjutkan dengan membatjakan amanat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
 - (6) Memerintahkan kepada 2 orang anggota untuk membuka kotak suara satu demi satu dan mengeluarkan segala isinja yang diterima dari PPS serta diletakkan diatas medja pimpinan setjara teratur.
 - (7) Memerintahkan kepada 2 anggota untuk memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak-kotak suara sudah kosong semuanya. Setelah itu ia memerintahkan untuk menutup kembali dan menguntjinja, kemudian diletakkan ditempat untuk kotak-kotak suara dan menjimpan anak-anak kuntjinja.
 - (8) Memperlihatkan kepada para pemilih bahwa bungkus-bungkusan surat suara masih dalam keadaan disegel dan tidak rusak.
 - (9) Dengan dibantu 2 orang anggota membuka bungkus-bungkusan surat suara tersebut serta dengan disaksikan oleh para pemilih yang hadir menghitung surat-surat suara yang ada dan ditjotjokkan apakah djumlah tersebut sesuai dengan djumlah yang tertulis dibagian luar bungkus.

Dalam keadaan djumlah surat suara ternjata tidak tjok dengan jang tertulis dibagian luar bungkusuan tersebut, maka hal ini ditjatat dalam Berita Atjara Pemungutan Suara.

Apabila selisih djumlah surat suara tersebut mengakibatkan tidak dapat dilangsungkan pemungutan suara pada hari itu, karena djumlah surat suara tidak tjukup untuk melajani para pemilih, maka Ketua mengumumkan penundaan pemungutan suara sampai ada ketentuan lebih landjut.

Kemudian segera melaporkan hal tersebut kepada Ketua PPS sambil minta ketentuan kapan pemungutan di TPS-nja dapat diadakan.

- (10) Memberikan pendjelasan kepada para pemilih tentang tjara-tjara pemberian suara sesuai dengan naskah tertulis jang sudah dipersiapkan.
- (11) Menanda-tangani surat-surat suara jang sudah diisi nama Daerah Pemungutan Suara, nama TPS dan ditanda-tangani oleh anggota-anggota nomor 2 dan nomor 3 sebanjak pemilih jang sudah hadir dalam TPS.
- (12) Mempersilahkan para pemilih untuk memberikan suara satu demi satu dengan memanggil nomor sesuai dengan urutan nomor kehadirannja jang telah ditjatat pada surat panggilan ataupun surat formulir Model A4 oleh petugas pada saat pemilih memasuki TPS dan menerima surat panggilan/surat formulir Model A4 jang diserahkan oleh pemilih.
- (13) Memberikan kepada pemilih 3 (tiga) helai surat suara jang berlainan warnanja, masing-masing untuk pemilihan anggota DPR, DPRD-I dan DPRD-II sebagaimana dimaksud ajat (11) diatas dalam keadaan terlipat.
- (14) Memberi tanda dimuka nama pemilih dalam kutipan atau salinan Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan bagi tiap-tiap pemilih jang sudah menjerahkan surat panggilan dan menerima surat-surat suara.

- (15) Menjaksikan bahwa surat-surat suara jang akan dimasukkan kedalam kotak-kotak suara oleh pemilih adalah surat-surat suara jang sudah ditandai tangani sebagaimana dimaksud ajat (11) diatas, kemudian mempersilahkan pemilih untuk memasukkan surat-surat suara kedalam kotak-kotak suara.
- (16) Mengganti surat suara jang oleh pemilih dikembalikan, karena ternjata:
- (a) rusak atau tjatjat sebelum ditjoblos.
 - (b) menurut pemilih keliru mentjoblosnja.
- Memberi tanda pada surat suara jang dikembalikan tersebut, bahwa surat itu tidak terpakai lagi.
- (17) Memberi bantuan kepada para pemilih jang tidak mungkin dapat mentjoblos dan memasukkan surat-surat suara kedalam kotak suara sendiri (tuna netra atau tjatjad badan) dengan didampingi seorang anggota jang bertindak djuga sebagai saksi.
- (18) Mengatur giliran untuk memberikan suara bagi anggota KPS dan petugas keamanan jang bukan ABRI dan bagi dirinja sendiri (Ketua) setelah seluruh pemilih jang bukan anggota KPPS dan petugas keamanan memberikan suaranya.
- (19) Menutup rapat pemungutan suara pada djam 14.00 waktu setempat atau setelah seluruh pemilih jang terdaftar dalam Daftar Pemilih, Daftar Pemilih Tambahan untuk TPS jang bersangkutan sudah selesai memberikan suaranya, walaupun belum djam 14.00.
- (20) Memberikan kesempatan kepada para pemilih jang sudah hadir menunggu gilirannya baik ditempat untuk para pemilih maupun diluar TPS sebelum djam 14.00 waktu setempat untuk memberi-

kan suaranya sampai selesai.

(b) Anggota nomor 2.

- (1) Mendampingi/membantu Ketua dalam melakukan tugas sebagaimana tersebut dalam huruf a ayat (1) dan (3) diatas,
- (2) Membuka kotak-kotak suara satu demi satu mengeluarkan segala isinya serta meletakkan diatas meja pimpinan setjara teratur atas perintah Ketua bersama anggota nomor 3, apabila KPPS beranggota 3 atau 4 orang.
- (3) Atas perintah Ketua memperlihatkan kepada para pemilih jang hadir bahwa kotak-kotak suara sudah kosong semuanya, setelah itu menutup kembali dan menguntjinja, kemudian meletakkannya ditempat untuk kotak-kotak suara dan menjerahkan anak-anak kuntjinja kepada ketua.
Kegiatan ini dilakukan bersama-sama anggota nomor 3, apabila KPPS beranggotakan 3 atau 4 orang.
- (4) Bersama anggota nomor 3 membantu kegiatan Ketua sebagaimana tersebut dalam huruf a ayat (9) diatas.
- (5) Mengisi nama Daerah Pemungutan Suara pada surat suara dan membubuhkan tanda-tanggannya pada ruang jang tersedia.
- (6) Membantu kegiatan Ketua sebagaimana tersebut dalam huruf a ayat (14), (16) dan (17) diatas.

(c) Anggota nomor 3.

- (1) Mendampingi/membantu Ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam huruf a ayat (1) dan (3) diatas.
- (2) Bersama-sama anggota nomor 2 melakukan kegiatan sebagaimana tersebut dalam huruf b ayat (2) diatas.
- (3) Melakukan kegiatan sebagaimana tersebut dalam huruf

b ayat (3) diatas bersama anggota nomor 2, apabila KPPS beranggotakan 3 atau 4 orang, bersama anggota nomor 5 apabila KPPS beranggota 5,6 atau 7 orang.

- (4) Melakukan kegiatan bersama anggota nomor 2 sebagaimana tersebut dalam huruf b ayat (4) diatas.
- (5) Mengisi nama Tempat Pemungutan Suara pada surat suara dan membubuhkan tanda-tangannja pada ruang jang tersedia.
- (6) Menjusun surat panggilan jang diterima dari anggota nomor 2 setelah dimuka nama pemilih dalam kutipan atau salinan Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan diberi tanda sebagaimana tersebut dalam huruf a ayat (14) diatas.

d. Anggota nomor 4.

- (1) Mendjelaskan dan mengatur para pemilih jang akan memasuki TPS sebagai berikut:
 - (a) supaya para pemilih sebelum memasuki TPS berdjadjar setjara teratur.
 - (b) supaya para pemilih menjerahkan surat panggilan kepadanja (anggota nomor 4) untuk dibubuhi nomor urut kehadirannja.
- (2) Memberi nomor urut pada surat panggilan dimulai dengan nomor 1, 2 dan seterusnya sesuai dengan urutan masuknja pemilih ke TPS.
- (3) Mengatur ketertiban pemilih jang menunggu giliran memberikan suara ditempat untuk duduk para pemilih.

e. Anggota nomor 5.

- (1) Atas perintah Ketua bersama anggota nomor 3 melakukan kegiatan sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat (2) dan (3) diatas.
- (2) Membantu Ketua untuk melakukan kegiatan sebagai-

mana tersebut dalam huruf a ayat (15) diatas.

- (3). Mempersilahkan kepada para pemilih jang sudah memasukan surat-surat suaranya kedalam kotak-kotak suara untuk segera meninggalkan TPS.

f. Anggota nomor 6.

- (1). Menjiapkan surat-surat suara jang telah diisi nama Daerah Pemungutan Suara, nama Tempat Pemungutan Suara dan dibubuhi tanda-tangan Ketua dan anggota-anggota nomor 2 dan 3 untuk diberikan oleh Ketua kepada para pemilih jang akan memberikan suaranya.
- (2). Membantu Ketua dalam melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam huruf a ayat (16) diatas, apabila KPPS beranggota 6 atau 7 orang.
- (3). Membantu Ketua membuat tjatatan/daftar dalam hal ada pemilih/pemilih-pemilih menggunakan surat formulir Model A4.

g. Anggota nomor 7.

- (1). Membantu melaksanakan kegiatan anggota nomor 4.
- (2). Melakukan kegiatan-kegiatan jang belum dilakukan oleh anggota-anggota nomor 2, 3, 5 dan 6 atas perintah Ketua.

III. WEWENANG KETUA KPPS.

- (1). Mengeluarkan dari TPS setiap orang jang mengganggu djalannya rapat pemungutan suara atau jang mentjoba mempengaruhi pemilih.
- (2). Minta untuk ditempatkan petugas keamanan djika perlu jang bersendjata didalam TPS, bila suatu ketika dipandang perlu untuk kepentingan pendjagaan ketertiban dalam tempat itu.
- (3). Memberhentikan pemungutan suara, apabila djalannya pemungutan suara terganggu, sehingga tidak akan terdjamin sahnya pemungutan suara dan menutup tjelah kotak suara dan menjegelnja.

IV. PROSES PEMBERIAN SUARA

Dengan memperhatikan tugas Ketua dan anggota-anggota KPPS sebagaimana tersebut dalam Bab II Pedoman ini, maka tugas Ketua dan anggota-anggota KPPS melajani para pemilih dalam memberikan suaranya.

1. Kegiatan pemilih.

- a. Menjerahkan surat panggilan/formulir Model A4 kepada petugas dipintu masuk (anggota nomor 4) ketika memasuki TPS untuk dibubuhi nomor urut kehadirannya.
- b. Duduk ditempat untuk duduk para pemilih berdjadjar menurut nomor urut kehadirannya.
- c. Mendengarkan dan mengikuti Ketua dalam melakukan kegiatannya sebagaimana tersebut dalam Bab II angka 3 huruf a ayat (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) Pedoman ini.
- d. Menjerahkan surat panggilan kepada Ketua KPPS dan minta surat-surat suara kepada Ketua dengan menyebutkan namanya dengan suara jang keras dan terang sesuai dengan jang tertulis pada surat panggilan tersebut.
- d. Menerima dalam keadaan terlipat surat-surat suara untuk pemilihan anggota DPR, DPRD-I dan DPRD-II ketjuali untuk Daerah Pemilihan DCI Djakarta hanja untuk DPR dan DPRD I dan untuk pemilihan di Luar Negeri hanja DPR sadja.
Chusus bagi pemilih jang menggunakan formulir Model A4, menerima surat-surat suara sesuai dengan haknya.
- f. Langsung masuk kebilik pemberian suara untuk memberikan suara.
- g. Membuka tiap surat suara lebar-lebar hingga tidak dalam keadaan terlipat sama sekali dan memeriksa surat-surat suara tersebut apakah tidak rusak dan bila ternyata rusak minta ganti surat suara baru.
- h. Meletakkan surat suara jang sudah ia jakinkan tidak rusak bagian jang ada tanda-tanda gambar diatas bantalan/landasan jang tersedia.

- i. Mentjoblos/menusuk salah satu tanda gambar organisasi yang dipilihnya dengan menggunakan alat pentjoblos yang tersedia.
- j. Melipat kembali tiap surat suara yang sudah ditjoblos/ditusuk dalam keadaan seperti semula.
- k. Keluar dari bilik pemberian suara dan memperlihatkan bagian surat suaranya dalam keadaan terlipat kepada Ketua KPPS/Anggota nomor 5 yang ada tanda-tangan Ketua dan 2 anggota KPPS.
- l. Memasukkan surat-surat suara kedalam kotak-kotak suara masing-masing yang tersedia setelah dipersilahkan oleh Ketua/anggota nomor 5.
- m. Langsung keluar dari TPS.

Untuk djelasnja dapat dilihat pada bagan terlampir.

2. Pemilih yang keliru mentjoblos/menusuk surat suara.

Pemilih yang keliru mentjoblos surat suaranya hanya dapat satu kali meminta surat suara baru dengan djalan:

- a. Mengembalikan surat suara yang keliru ditjoblos dalam keadaan terlipat kepada Ketua KPPS dengan maksud untuk minta surat suara yang baru.
- b. Menerima surat suara baru dan menudju kebilik pemberian suara kembali untuk memberikan suaranya.

3. Pemberian suara oleh pemilih tuna netra dan tjatjad badan.

Bagi pemilih yang tidak dapat mentjoblos sendiri salah satu tanda gambar dalam surat suara karena tjatjad badan (buta, kedua belah tangan tidak ada dan lain sebagainya), pemberian suaranya dilakukan sebagai berikut:

- a. Setelah menerima surat-surat suara sebagaimana disebutkan dalam angka 1 huruf d diatas, maka pemilih dibantu oleh Ketua dan anggota nomor 2 menudju bilik pemberian suara memberikan suaranya.
- b. Didalam bilik ia menjatakan tanda gambar dari organisasi mana yang hendak dipilihnya kepada Ketua KPPS dengan

suara terang dan dapat terdengar oleh Ketua dan anggota nomor 2, tetapi tidak mungkin terdengar oleh para hadirin lainnya serta minta kepada Ketua untuk membantu menjoblosnja.

- c. Setelah surat-surat suara ditjoblos oleh Ketua ia minta bantuan Ketua/Anggota nomor 2 untuk memasukkan surat-surat suara kedalam kotak-kotak suara.

V. PEMUNGUTAN SUARA LANDJUTAN; ULANGAN DAN SUSULAN.

1. Pemungutan suara landjutan.

Pemungutan suara yang tidak dapat diteruskan atau apabila diteruskan tidak akan terdjamin sahnya pemungutan suara karena adanya gangguan ketertiban, maka oleh Ketua KPPS dihentikan dan selandjutnja dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menutup tjelah kotak-kotak suara dan menjegelnja.
- b. Menghitung surat-surat suara yang belum terpakai dan diumumkan kepada para pemilih serta ditjatat, dan membungkusnja bersama kutipan/salinan Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan dan anak-anak kuntji kotak suara kemudian menjegelnja.
- c. Membuat Berita Atjara tentang penghentian pemungutan suara sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b diatas dan ditanda tangani oleh Ketua dan semua anggota KPPS yang hadir.
- d. Memberitahukan kepada para pemilih yang belum memberikan suaranya, bahwa pemungutan suara dilandjutkan pada hari itu djuga atau hari berikutnya dan djika ini tidak mungkin pada hari yang ditetapkan oleh PPS.

2. Pemungutan suara ulangan.

Pemungutan suara yang terhenti karena ketertiban terganggu dan tidak dapat dipertanggung djawabkan, maka dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengerdjakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam angka 1 huruf a, b dan c diatas.

- b. Ketua KPPS melaporkan dan menjampaikan Berita Atjara - penghentian pemungutan suara kepada Ketua PPS tentang penghentian pemungutan suara.
- c. Ketua PPS menetapkan dan mengumumkan hari pemungutan suara ulangan.
- d. Selambat-lambatnja 3 hari sebelum hari pemungutan suara ulangan sebagaimana ditetapkan oleh Ketua PPS, Ketua KPPS mengumumkan tanggal, waktu dan tempat diadakanja pemungutan suara ulangan.

3. Pemungutan suara susulan.

Pemungutan suara jang tidak dapat dilaksanakan pada tanggal jang ditetapkan berhubung dengan keadaan setempat surat-surat suara tidak dapat diterima pada waktunja atau berhubung dengan adanja gangguan keamanan/ketertiban ditempat Pemberian Suara, maka dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara jang tidak dapat dilaksanakan pada tanggal jang ditetapkan disebabkan karena gangguan keamanan/ketertiban ditempat pemungutan suara, maka tanggal dan waktu pemungutan suara susulan ditetapkan oleh Ketua PPS.
- b. Pemungutan suara jang tidak dapat dilaksanakan pada tanggal jang telah ditetapkan disebabkan karena surat-surat suara tidak dapat diterima di PPS pada waktunja, maka tanggal dan waktu pemungutan suara susulan ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.
- c. Selambat-lambatnja 3 hari sebelum hari pemungutan suara susulan Ketua KPPS mengumumkan tanggal, waktu dan tempat diadakannja pemungutan suara susulan tersebut.
- d. Selandjutnja Ketua dan anggota-anggota KPPS melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab II Pedoman ini.

VI. PEMUNGUTAN SUARA DIRUMAH SAKIT, DIRUMAH TAHANAN ATAU LEMBAGA PEMASJARAKATAN.

1. Di Rumah Sakit, di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasjarakatan dapat diadakan TPS-TPS yang menjalani pemilih-pemilih yang sedang dirawat/ditahan.
2. Pemilih yang dilayani di TPS-TPS Rumah Sakit, Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasjarakatan mempergunakan formulir Model A4 yang berlaku sebagai surat panggilan untuk memberikan suara. Formulir Model A4 tersebut didapatkan dari PPS dimana pemilih tersebut terdaftar melalui Kepala-kepala Rumah sakit, Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasjarakatan masing-masing.
3. Tata-tjara pemungutan suara di TPS-TPS Rumah Sakit, Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasjarakatan sama dengan tata-tjara pemungutan suara di TPS-TPS sebagaimana tersebut dalam Bab I, II, III dan IV Pedoman ini.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 9 Maret 1971.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA**
Tjap. ttd.
AMIRMACHMUD

**PETUNDJUK MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
NOMOR : 11/PPI TAHUN 1971
TENTANG
TATA-TJARA MENTJOBLOS TANDA GAMBAR ORGANISASI
DALAM SURAT SUARA OLEH PEMILIH**

Untuk memberikan kemantapan bagi para Pemilih mengenai tjara memberikan suara dalam pemilihan anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dengan mentjoblos salah satu tanda gambar Organisasi jang dipilihnja jang terdapat dalam Surat Suara, maka perlu diberikan petundjuk-petundjuk sebagai berikut :

1. a. Setelah Pemilih menerima Surat Suara dari Ketua KPPS, maka dihadapan Ketua KPPS ia segera mengamati/meneliti Surat-surat Suara tersebut dengan membukanya lebar-lebar dari lipatan untuk melihat adanja kerusakan pada Surat Suara, misalnja robek, berlobang, ada tanda tangan, tjatatan-tjatatan atau tulisan-tulisan lain Ketjuali tanda-tangan Ketua dan dua Anggota KPPS jang bersangkutan pada bagian jang ditentukan.

Apabila ia menjatakan adanja hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Surat Suara tersebut harus segera dikembalikan kepada Ketua KPPS dan ia minta Surat Suara lain untuk gantinya.

- b. Walaupun pada waktu pembukaan rapat Pemungutan Suara Ketua KPPS setjara umum sudah mendjelaskan mengenai tata-tjara mentjoblos tanda gambar, tapi apabila Ketua KPPS memandang perlu dapat memberi petundjuk lagi kepada seorang pemilih, terutama Ketua KPPS memintakan perhatian kepada pemilih djangan sampai salah mentjoblos, karena hal ini akan mengakibatkan hilangnya suara jang ia berikan.

Surat Suara jang didalam bilik pemberian suara oleh pemilih sudah dibuka lebar-lebar dari keadaan terlipat, bagian/halaman jang ada 10 (sepuluh) tanda gambarnja diletakkan diatas bantalan/landasan jang tersedia didalam bilik pemberian suara.

- c. Pemilih memperhatikan dengan tenang 10 tanda gambar jang terben-tang diatas bantalan/landasan itu dan memilih salah satu diantara 10 tanda gambar jang ia inginkan.

- d. Tanda gambar yang dipilih itu ditjoblos dengan menggunakan alat pentjoblos sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 37/LPU Tahun 1971 dan yang tersedia didalam bilik. Dalam mentjoblos tanda gambar supaya ujung alat pentjoblos benar-benar masuk kedalam bantal-an/landasan sampai tandas kebawah.
- e. Setelah alat pentjoblos diangkat, Pemilih memeriksa hasilnya apakah terlihat nyata lobang bekas tjoblosan pada Surat Suara.
Jika belum terlihat nyata maka pentjoblosannya dapat diulangi ditempat yang sama.
- f. Apabila setelah mentjoblos Pemilih menjabari, bahwa tanda gambar yang ditjoblos ternyata bukan yang ia inginkan, maka Surat Suara itu dilipat kembali lalu dikembalikan kepada Ketua KPPS dan minta ganti dengan menjabarkan :
"Minta ganti Surat Suara karena keliru mentjoblos".
Setelah menerima Surat Suara baru sebagai gantinya yang keliru ditjoblos, Pemilih masuk kembali kedalam bilik pemberian suara dan mentjoblos lagi. Yang kedua kali ini harus sekali gus betul, jangan sampai keliru lagi, karena keliru untuk kedua kalinya tidak diberi ganti Surat Suara lagi.

2. Mentjoblos/menusuk tanda gambar dalam Surat Suara :

a. Yang betul

Mentjoblos **hanya satu tanda gambar** diantara 10 tanda gambar organisasi, dalam pengertian mentjoblos dalam ruang persegi panjang yang berukuran 5 X 6 cm yang memuat nomor nama dan tanda gambar organisasi.

Apabila dalam mentjoblos tanda gambar organisasi sebagaimana dimaksud diatas tertjoblos pula lembaran bagian Surat Suara yang tidak memuat tanda gambar Organisasi (karena Surat Suara oleh pemilih tidak/dibuka lebar2 sebagaimana mestinya), maka pentjoblosan tetap dinjabarkan betul (suara tetap dinjabarkan sjah).

b. Yang tidak betul

1. Tidak mentjoblos **tanda gambar organisasi** dalam pengertian tidak memberikan tjoblosan dalam ruang yang berukuran 5 X 6 cm satupun djuga.
2. Mentjoblos **lebih dari satu tanda gambar organisasi**.

3. Mentjoblos pada batas antara persegi pandjang jang berukuran 5 X 6 cm satu dan jang lain sehingga menimbulkan keraguan tanda gambar organisasi mana jang dipilih.
 4. Mentjoblos bagian Surat Suara jang diluar 10 tanda gambar organisasi.
 5. Mentjoblos tanda gambar organisasi pada Surat Suara jang tidak terbuka lebar-lebar, jaitu masih sedikit terlipat sehingga berakibat tanda gambar lain ikut tertjoblos (walaupun hal ini tidak disengadja).
 6. Membubuhkan nama orang/pemilih, tulisan², tjatatan², tanda tangan, atau tanda-tanda lain didalam Surat Suara jang tidak ditentukan oleh peraturan-perundangan.
3. Hal-hal jang menjangkut tjara-tjara pemberian Suara sebagaimana tertjantum dalam Pedoman Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia No. 3/PPI/1971 disesuaikan dengan petunjuk² ini supaya didjelaskan kepada para Pemilih oleh Petugas-petugas Penjelenggara Pemungutan Suara sebelum diadakan pemungutan suara dan apabila perlu, djuga pada saat² selama pemungutan Suara berlangsung.

Ditetapkan di : D j a k a r t a

Pada tanggal : 27 Mei 1971.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

ttd.

AMIRMACHMUD

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
Djl. Imam Bondjol No. 13 Tlp. 53418
D J A K A R T A .**

**P E D O M A N : PEMBUNGKUSAN DAN PENGIRIMAN SURAT SUA-
RA DAN PERALATAN LAINNJA UNTUK KEPERLU-
AN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN
SUARA.**

NOMOR : 0516/III/1/1971.

Sebagai pelaksanaan dari Pedoman Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia No. 4/PPI/1971 tanggal 10 Maret 1971 dan Instruksi dengan Surat Kawat No. 80/22/1971 tanggal 21 Mei 1971, dengan ini diberi petundjuk dan pedoman bagi Saudara dalam tata tjara pembungkusan dan pengiriman Surat-Surat Suara serta peralatan lainnja guna keperluan Pemungutan Suara di TPS2 pada waktunja.

UNTUK PENGIRIMAN :

1. Oleh P.P. Kota Surat Suara jang telah diterima diperintji menurut djumlah pilih per-TPS ditambah tjadangan 10% menurut djenis Surat Suara masing-masing.
2. Surat-surat Suara tersebut dibungkus/dimasukkan dalam sampul kemudian diikat dan diberi segel Pemilu. Pada sampul ~~bebelah~~ luar diberi keterangan/tjataan djumlah isi masing-masing sampul dan dibubuhi tanda tangan serta tjap diatas segel oleh Ketua P.P. Kota masing2.
3. Formulir Berita Atjara beserta lampiran2 dan alat2 pentjoblos (paku) serta bantalannja dimasukkan dalam sampul/dibungkus kemudian diikat dan diberi segel pemilu. Pada sampul luarnja diberi keterangan tentang djenis isinja, dan dibubuhi tanda tangan serta tjap diatas segel tersebut oleh Ketua P.P. Kota masing2.
4. Tiap2 sampul tersebut masing2 dimasukkan kedalam kantong plastik dan diikat.

5. Sampul jang berisi tersebut diatas beserta daftar tjalon tetap untuk DPR dan DPRD DCI Djakarta dan Peralatan lainnja jang diperlukan seperti : Kertas2 untuk tjatatan, kapur tulis dan lain2 sebagainja dibungkus mendjadi satu dan diikat, kemudian disampaikan pada masing2 P.P.S./Ketjamatan.
6. Oleh P.P.S./Ketjamatan semua peralatan jang diterima dari P.P. Kota tersebut dimasukkan kedalam Kotak2 Suara menurut TPS masing2 dengan memperhatikan djadwal waktu, disampaikan kepada masing2 Ketua KPPS/Koordinator KPPS (Lurah) jang bersangkutan.

UNTUK PENGIRIMAN KEMBALI SETELAH PEMUNGUTAN SUARA.

Oleh K.P.P.S.

1. Surat2 Suara setelah Pemungutan Suara/Penghitungan Suara masing2 dimasukkan dalam sampul/dibungkus tersendiri jaitu :
 - a. Jang dikembalikan karena keliru ditjoblos/rusak.
 - b. Jang tidak dipakai.
 - c. Jang tidak berisi Surat Suara jang tidak sjah dan
 - d. Jang berisi Surat Suara jang sjah, masing2 dipisahkan menurut suara jang diberikan kepada masing-masing Organisasi.
2. Sampul2 jang berisi Surat Suara sebagaimana dimaksud ad. 1. diatas dibungkus untuk tiap Djenis Badan Perwakilan (D.P.R. dan D.P.R.D.).
3. Berita Atjara beserta lampiran2-nja dibuat rangkap 4 (empat) dan masing-masing dimasukkan dalam sampul surat dengan alamat :
 - a. untuk P.P.S./Ketjamatan
 - b. untuk P.P. Kota
 - c. untuk PPD DCI Djakarta dan,
 - d. untuk Panitia Pemilihan Indonesia,
4. Semua peralatan lainnja jang telah digunakan dibungkus pula dalam satu bungkus dan diikat serta diluar dibubuhi keterangan tentang isinja.
5. Semua sampul2 dan bungkus setelah ditutup/dilem dibubuhi segel Pemilu dan dimasukkan kedalam kotak Suara.

6. Kotak Suara yang berisikan tersebut dalam ad. 5 dikuntji dan dibubuhi segel pada tjeleh/lubang memasukkan Surat Suara dan tutup Kotak Suara pada tempat kuntji (slot).
Pada tiap kotak suara dibubuhi keterangan/tjatatatan tentang isi dalam Kotak tersebut, dengan ditanda tangani oleh semua Anggota KPPS.
7. Kotak2 Suara yang berisikan Surat2 Suara tersebut disampaikan oleh Ketua K.P.P.S. kepada P.P.S. disertai pengawalan guna keamanan/ketertiban dokumentasi tersebut.
Penjerahan kotak2 dimaksud disertai dengan bukti tanda penerimaan.

PENGHITUNGAN SUARA OLEH P.P.S.

1. Setelah semua kotak2 suara yang berisi surat2 suara disampaikan oleh masing2 K.P.P.S./T.P.S. dalam wilayah P.P.S./Ketjamatan yang bersangkutan sesuai dengan djadwal waktu P.P.S. segera bersidang untuk melakukan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia No. 4/PPI/1971 tanggal 10 Maret 1971.
2. P.P.S. melakukan penghitungan suara dengan mengambil dasar dari Berita Atjara pemungutan suara/penghitungan suara K.P.P.S. masing2. Untuk ini P.P.S. membuka kotak suara dan mengambil hanya Berita Atjara K.P.P.S. yang alamatnja untuk P.P.S. dan Berita Atjara lainnja oleh P.P.S. segera disampaikan kepada alamat masing2, untuk segera dipersiapkan pula penghitungannja.
Selainnja tetap berada didalam kotak suara tersebut, ketjuali bila hasil penghitungan dari Berita Atjara tersebut terdapat kekeliruan/keragu-raguan dapat dilakukan pembukaan bungkus surat2 suara pada kotak tsb.
3. Selesai pelaksanaan penghitungan suara oleh P.P.S. dibuatkan kedalam Berita Atjara penghitungan suara dalam rangkap empat dan masing2 dimasukkan kedalam sampul dengan alamat :
 - a. Panitia Pemilihan Indonesia,
 - b. P.P.D. DCI Djakarta,
 - c. P.P. Kota yang bersangkutan dan
 - d. Arsip untuk P.P.S./Ketjamatan.
 dengan ditutup dan dibubuhi segel Pemilu pada masing2 sampul.
4. Kotak Suara tersebut sesuai dengan djadwal waktu disampaikan kepada P.P. Kota masing2.

PENGHITUNGAN SUARA OLEH P.P. KOTA.

Hal jang sama sebagaimana dilakukan oleh P.P.S./Ketjamatan maka oleh P.P. Kota dilakukan pula penghitungan suara setelah semua Berita Atjara dari P.P.S. diterima dengan memperhatikan djadwal waktu jang ditetapkan. Hasil penghitungan ini disampaikan kepada P.P.D. DCI Djakarta.

Demikian agar pedoman ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,

ttd.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

di

TEMBUSAN :

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
2. BPH/Bidang Pemerintahan,
3. Sekda DCI,
4. Direktorat I/Pemerintahan,
5. Direktorat VII/Chusus Politik,
6. Para Walikota/Ketua PP. Kota,) Vide surat kami tanggal 8/4-71
7. Para Tjamat/Ketua PPS,) No. 0318/III/2/1971
8. A r s i p.

Megaphone, Cassette Recorde dan Lagu2.

IV. PERSIAPAN DI WILAJAH

Guna terselenggaranja penerangan tersebut dengan baik, kami harapkan agar Saudara mempersiapkan tempat2 tersebut diatas dan laporan dari Saudara diharapkan dalam waktu singkat.

Demikian agar maklum.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,

ttd.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO)

TEMBUSAN :

1. Panitia Pemilihan Indonesia
 2. Komdak Metro Djaya,
 3. B.P.H./Bidang Pemerintahan,
 4. Sekda DCI,
 5. Djapen DCI,
 6. Humas DCI Djakarta,
 7. Direktorat I/Pemerintahan,
 8. Direktorat VII/Chusus Politik,
 9. A r s i p.
-

PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Djl. Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418
DAKART A .

Nomor : 0525/III/1/1971. D Jakarta, 3 D juni 1971.

Lampiran : -

Perihal : TPS2 di Kapal.

Kepada Jth.

Para Direksi Perusahaan Pelajaran
Nasional/Asing,
di

DAKART A .

Guna mendjamin hak pilih setiap orang, khususnya bagi orang2 jang karena sifat pekerjaannya, pada waktu pemungutan suara nantinya sedang berada ditempat tugas (dilaut dsb), maka untuk menampung suara mereka diberikan kesempatan untuk membuat TPS2 di Kapal2, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pembuatan TPS dibebankan kepada Perusahaan/kapal itu sendiri.
2. Petugas2 TPS (K.P.P.S.) kapal diambil dari staf/crew kapal sendiri sesuai dengan ketentuan jang ada sebanyak 5 orang, dan dilantik/disumpah serta diberi santiadji dan petundjuk seperlunya sebelum keberangkatan kapal tsb. oleh PPS jbs. atau jang diberi kuasa oleh P.P.S.
3. Untuk membuat 1 (satu) T.P.S. setidak-tidaknja terdapat sedjumlah, minimal 100 orang karyawan pemilih.
4. Bagi para awak kapal jang sudah pernah terdaftar didaerah asalnya, pada waktu memberikan suaranya di TPS kapal menggunakan formulir A.4. jang dikeluarkan oleh Kelurahan dimana jang bersangkutan terdaftar tadinja.
5. Kapal2 jang sedang berlajar dianggap suatu bagian daerah negara Indonesia pada Lautan bebas, dan domicilinja adalah tempat kedudukan Kantor Pusat Perusahaan Pelajaran tsb.
6. Hasil penghitungan suara disampaikan segera pada kesempatan

pertama kepada PPD DCI Djakarta melalui P.P.S. (Ketjamatan) setempat.

Untuk mempertjepat laporan melalui Radio/Telefoni disampaikan kepada PPD DCI Djakarta melalui Sahbandar/Port Authority Tanjung Priok atau Perusahaan jbs.

7. Hasil penghitungan ini disampaikan dalam penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan DCI Djakarta sebagaimana hasil2 penghitungan untuk warga negara Indonesia jang ada diluar negeri.
8. Bagi awak kapal jang benar2 belum terdaftar disuatu daerah pemilihan, karena sebab2 jang bisa diterima, dapat didaftar baru selama jang bersangkutan diketahui tidak pernah terlibat dalam Gerakan G.30.S/PKI.
9. Pendaftaran baru ini berlaku sampai dengan tanggal 15 Djuni 1971 j.a.d.
10. Untuk penjelesaian tehnis selandjutnja dapat menghubungi Walikota/PP. Kota Djakarta Utara.

Demikian agar Saudara maklum.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
Sekretaris,**

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc)

TEMBUSAN :

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
 2. Panitia Pemilihan Luar Negeri,
 3. BPH/Bidang Pemerintahan,
 4. Sekda DCI,
 5. Direktorat I/Pem,
 6. Direktorat VII/Chusus Politik,
 8. Port Administrator Tg. Priok,
 8. Para Walikota/Ketua PP. Kota,
 9. A r s i p.
-

=====

Semua Instansi/Kantor dan Perusahaan2 yang mengadakan T.P.S. Kantor, di -

- Kotak Surat Suara,
- Surat Suara,
- Berita Atjara,
- Meterai/Zegel Pemilu,
- Amanat Bapak Presiden.

Digitized by Google

PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS

IBUKOTA DJAKARTA

Djalan Imam Bondjol No. 13 Djakarta

Telepon No. 53418

=====

NOTA – DINAS

No. : 0555/III/1/'71.

Kepada : Jth. Para Tjamat/Ketua P.P.S. se DCI Djakarta.
Dari : Pd. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah
D.C.I. Djakarta.
Perihal : Berita Atjara Hasil Pemungutan Suara/Penghitungan suara
dimasing-masing T.P.S.
S i f a t : P e n t i n g .
Tembusan : 1. B.P.H./Bidang Pemerintahan,
2. Sekda DCI Djakarta,
3. Direktorat I/Pemerintahan,
4. Direktorat VII/Chusus & Statistik D.C.I. Djakarta,
5. Kepala Kantor Sensus & Statistik D.C.I. Djakarta,
6. Para Walikota/Ketua P.P. Kota,
7. A r s i p .

Sehubungan dengan Pedoman kami No. 0516/III/1/1971 tanggal 1 Dju-
ni 1971, Pengiriman Berita Atjara Pemungutan Suara/Penghitungan Suara
jang dibuat oleh K.P.P.S. dimasing-masing T.P.S. tersebut dalam halaman
2 item 3, maka Berita Atjara tersebut selambat-lambatnja pada djam 24.00
W.I.B. (malam) tanggal 3 Djuli 1971 tersebut jang dialamatkan untuk :

1. Panitia Pemilihan Daerah D.C.I..Djakarta,
2. Panitia Pemilihan Indonesia,

akan diambil langsung oleh para petugas P.P.D. D.C.I. Djakarta pada kantor
Saudara masing-masing.

Berita Atjara tersebut diperlukan segera untuk diolah melalui computer
disamping prosedur pelaksanaan penghitungan Suara pada tingkat P.P.S.
dan P.P. Kota tetap sebagaimana biasa.

Demikian agar mendjadikan perhatian Saudara.

Djakarta, 8 Djuni 1971.

**Pd. GUBERNUR KEPALA DAERAH/ KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH D.C.I. DJAKARTA**

t.t.d.

(ALI SADIKIN)

Letnan Djenderal KKo.

PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
DJALAN IMAM BONDJOL NO. 13 TILPON 53418
D J A K A R T A

PETUNJUK TATA-TJARA PENGISIAN/PEMBUATAN
BERITA ATJARA PEMUNGUTAN SUARA/PENGHITUNGAN SUARA

Nomor : 0578/III/1/1971.

I. UNTUK DI TPS OLEH KPPS (MODEL K, K1, K2, K3).

1. Berita Atjara Model K dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing2 untuk PPI, PPD DCI, PP. Kota, dan PPS/Ketjamatan jang bersangkutan. Pembuatan Berita Atjara ini dilakukan terachir sesudah penghitungan suara selesai. Formulir ini ditanda tangani oleh semua anggota KPPS dan saksi2 Wakil dari organisasi Parpol/Golkar.

2. Pengisian Tjataan penghitungan suara (Model K1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) sebagai lampiran masing2 jang tersebut dalam ad. 1. Pada kolom perintah (kolom 3) dari masing2 organisasi Parpol/Golkar (jang terdapat 3 barisan) pada tiap kotak dari barisan tersebut dapat memuat tjataan penghitungan (dengan memberi goresan tjontoh : **HU**, **HU**) sedjumlah 10 kali goresan, sehingga djumlah kesamping dapat memuat untuk 100 hitungan suara, demikian pula untuk barisan kedua dan ketiga.

Bila perhitungan ini melebihi dari kolom jang tersedia dilandjutkan pada halaman belakang dari formulir (Model K) tsb. jang sedjadjar menurut kolom organisasi Parpol/Golkar jang bersangkutan. Tjataan penghitungan ini dipisahkan untuk djenis masing2 surat suara jaitu DPR sendiri dan DPRD Tk. I sendiri dengan mentjoret sebutan djenis lembaga jang tidak ditjatat dalam halaman jang bersangkutan. Formulir ini ditanda tangani oleh semua anggota KPPS.

3. Tjataan pernnyataan keberatan2 pemilih (Model K2) djuga dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk lampiran formulir Model K tersebut ad. 1. Hendaknja didalam mentjatat persoalan didjelaskan untuk djenis masing2 (DPR atau DPRD Tk. I.).

4. Tjataan kedjadian2 (Model K3) djuga dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk lampiran Model K tersebut ad. 1.

Untuk point 3 dan 4 bila memerlukan lebih dari satu halaman dapat

disambung pada halaman berikutnya dengan formulir Model yang sama dan membubuhi nomor halaman sambungan tersebut.

Formulir ini (Model K2 dan K3) cukup ditanda tangani oleh Ketua KPPS saja.

Masing2 Berita Acara (Model K) beserta lampiran2nya (K1, K2, dan K3) dimasukkan dalam amplop/sampul dengan alamat sebagaimana tersebut diatas tadi.

II. UNTUK DI PPS (MODEL L, L1, L2, L3 dan L4).

1. Berita Acara penghitungan suara untuk daerah pemungutan suara (seluruh TPS dalam Kecamatan yang bersangkutan) dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing2 dengan alamat untuk PPI, PPD, DCI Jakarta, PP. Kota yang bersangkutan dan arsip PPS sendiri. Pembuatan Berita Acara ini dilakukan terakhir sesudah penghitungan suara selesai.

Formulir ini ditanda tangani oleh semua anggota PPS dan saksi2 Wakil dari organisasi Parpol/Golkar,

2. Daftar jumlah surat suara (Model L1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) sebagai lampiran ad. II. 1.

Formulir ini diisi sebagai rekapitulasi dari Berita Acara dan catatan penghitungan dari masing2 TPS (KPPS).

Penghitungan untuk DPR dan DPRD Tk. I dimuatkan dalam kolom2 yang tersedia dan bila lembaran ini tidak dapat memuat catatan keseluruhan dapat disambung pada halaman lain dari Model yang sama dengan membubuhi nomor halamannya.

Formulir ini cukup ditanda tangani oleh Ketua PPS saja.

3. Catatan penghitungan suara (Model L2) dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk lampiran tersebut ad. II. 1 dan masing2 dipisah menurut jenis surat suara (DPR sendiri dan DPRD. Tk. I sendiri). Untuk itu salah satu sebutan dari Lembaga yang tidak digunakan supaya ditjoret. Bila halaman ini tidak dapat memuat catatan penghitungan suara dapat dilanjutkan pada lembaran berikutnya dengan Model yang sama serta dibubuhi nomor halaman sambungannya.

Bila dalam membuat catatan penghitungan ini memerlukan penghitungan dari surat suara (karena meragukan) maka pada kolom keterangan dibubuhi catatan seperlunya dan pada bungkusan surat suara yang telah dibuka tadi dibubuhi tanda "S.S."

Formulir ini cukup ditanda tangani oleh Ketua PPS saja.

4. Tjataan pernjjataan keberatan (Model L3) dibuat dalam rangkap 4 (empat) sebagai lampiran tersebut ad. II. 1.
Setiap persoalan harus dijelaskan menurut djenis jang mendjadi persoalan (DPR, DPRD Tk. I). Formulir ini tjukup ditanda tangani oleh Ketua PPS sadja.
5. Tjataan kedjadian2 (Model L4) djuga dibuat dalam rangkap 4 (empat) sebagai lampiran tersebut ad.II.1.Formulir ini tjukup ditanda tangani oleh Ketua PPS sadja.
Untuk tsb. angka 4 dan 5 bila tidak mentjukupi pada halaman jang tersedia dapat dilandjutkan pada halaman jang lain (Model jang sama) dengan membubuhi nomor pada halaman tersebut.

III. UNTUK DI PP. KOTA (MODEL N, N1, N2, N3, N4, N5).

1. Berita Atjara penghitungan suara (Model N) dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk masing2 LPU, PPI, PPD. Tk. I dan arsip. Pembuatan Berita Atjara ini dilakukan terachir setelah penghitungan suara selesai. Formulir ini ditanda tangani oleh semua anggota dan saksi-saksi Wakil dari Organisasi Parpol/Golkar.
2. Daftar djumlah surat suara (Model N1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) sebagai lampiran tsb. ad. III. 1.
Formulir ini diisi sebagai rekapitulasi dari Berita Atjara dari tjataan penghitungan masing2 PPS/Ketjamatan.
Penghitungan untuk DPR dan DPRD Tk. I dimuatkan dalam kolom2 jang tersedia dan bila lembaran ini tidak dapat memuat tjataan keseluruhan, dapat disambung dengan halaman lain dari Model jang sama dengan membubuhi nomor halamannya.
Formulir ini tjukup ditanda tangani oleh Ketua PP. Kota sadja.
3. Tjataan penghitungan suara (Model N2) dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk lampiran ad. III. 1. dan masing2 dipisah menurut djenis surat suara (DPR sendiri dan DPRD Tk. I. sendiri). Untuk itu salah satu sebutan dari Lembaga jang tidak disebutkan supaja ditjoret.
Bila halaman ini tidak dapat memuat tjataan penghitungan suara dapat dilandjutkan pada halaman berikutnja, dengan Model jang sama serta dibubuhi sambungan nomor halamannya.
Bila dalam membuat tjataan penghitungan ini memerlukan surat suara (karena meragukan) maka pada kolom keterangan dibubuhi tjataan seperlunja dan pada bungkusan surat suara jang telah dibuka tadi

dibubuhi tanda "S.S."

Formulir ini tjukup ditanda tangani oleh Ketua PP. Kota sadja.

4. Tjataan pernjjataan keberatan (Model N3) dibuat dalam rangkap 4 (empat) sebagai lampiran tsb. ad. III. 1. Setiap persoalan harus di-djelaskan menurut djenis jang mendjadi persoalan (DPR, DPRD Tk. I.). Formulir ini tjukup ditanda tangani oleh Ketua P.P. Kota sadja.

5. Tjataan kedjadian (Model N4) djuga dibuat dalam rangkap 4 (empat) sebagai lampiran tsb. ad. III. 1.

Formulir ini tjukup ditanda tangani oleh Ketua P.P. Kota sadja. Untuk tsb. angka 4 dan 5 bila tidak mentjukupi pada halaman jang tersedia dapat dilandjutkan pada halaman jang lain (Model jang sama) dengan membubuhi nomor pada halaman sambungan itu.

6. Daftar hasil penghitungan suara (Model N5) sebenarnja digunakan untuk Daerah Tingkat II jang menjelenggarakan Pemilihan untuk keanggotaan DPRD Tk. II. Untuk itu bagi para P.P. Kota sebagai dokumentasi pendataan dapat diisi pada bagian kolom jang tersedia dalam I (dibawah kotak2 tanda gambar). Sedangkan jang tersebut dalam II tidak perlu diisi.

Formulir ini tjukup ditanda tangani oleh Ketua PP. Kota sadja.

IV. UNTUK DI PPD DCI DJAKARTA (MODEL O, O1, O2, O3, O4

1. Berita Atjara penghitungan suara (Model O) pengisiannja sama sebagaimana jang dilakukan oleh PP. Kota (Bab. III).
2. Daftar djumlah surat suara (Model O1) pengisiannja sama sebagaimana jang dilakukan oleh PP. Kota (Bab. III).
3. Tjataan penghitungan suara (Model O2) pengisiannja sama sebagaimana jang dilakukan oleh PP. Kota (Bab. III).
4. Tjataan pernjjataan keberatan (Model O3) dan tjataan kedjadian-kedjadian (Model O4) pengisiannja sama sebagaimana jang dilakukan oleh P.P. Kota (Bab. III).
5. Daftar hasil penghitungan suara (Model O5) diisi djumlah suara jang diperoleh organisasi Parpol/Golkar menurut hasil penghitungan PP. Kota (Model N.5).

Untuk pemilihan anggota DPRD Tk. I DCI Djakarta langsung diada-kan pembagian kursi dengan membagi djumlah suara jang diperoleh masing2 organisasi dengan angka Bilangan Pembagi Pemilihan

(BPP/Kiesquotient) yang diperoleh dari hasil bagi jumlah Surat Suara sah yang masuk dari seluruh organisasi Parpol/Golkar dengan jumlah kursi yang tersedia (..... : 32=BPP).

6. Untuk tata-tatan penghitungan suara bagi pemilihan keanggotaan DPR dalam daerah Pemilihan DCI Jakarta cukup diisi pada bagian kolom yang tersedia dalam I, yang selanjutnya penetapan pembagian kursi dilakukan oleh PPI.

Demikianlah petunjuk Tata-Tjara Pengisian/Pembuatan Berita Acara Pemungutan Suara/Penghitungan Suara ini dapat dipedomani dan dipergunakan seperlunya.

Djakarta, 15 Djuni 1971

PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH KHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA.

Sekretaris

tjap/ttd.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc).

Djalan Imam Bondjol No. 13 Djakarta
Telepon No. 53418

DJAKARTA.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

TEMBUSAN :

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
 2. BPH/Bidang Pemerintahan,
 3. Sekda DCI Djakarta,
 4. Direktorat I/Pemerintahan,
 5. Direktorat VII/Chusus Politik,
 6. A r s i p.
-

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
Djl. Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418
D J A K A R T A .**

NOTA - DINAS

No. 0620/III/1/1971

Dari : Sekretaris PPD DCI Djakarta.
Kepada : 1. Para Walikota/Ketua PP. Kota,
 2. Para Tjamat/Ketua PPS,
 se - DCI Djakarta.
Perihal : Pembubuhan tjap/stempel Surat Panggilan (Model G) dan Pembungkus Surat Suara.

Sehubungan dengan Surat Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No. 0558/III/1/1971 tanggal 9 Djuni 1971, untuk mempertjepat penjelesaian pembubuhan stempel/tjap pada Surat Panggilan (Model G) dapat djuga didelegir kepada Lurah/koordinator KPPS masing2 dan pembubuhan tjap/stempel PP. Kota untuk pembungkusan Surat2 Suara dapat didelegir kepada Tjamat/Ketua PPS setempat.

Demikian agar maklum.

Djakarta, 24 D j u n i 1971.
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
Sekretaris,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
 2. BPH/Bidang Pemerintahan,
 3. Sekda DCI Djakarta,
 4. Direktorat I/Pemerintahan
 5. Direktorat VII/Chusus Politik,
 6. Para Lurah/Koordinator KPPS,
 7. A r s i p.
- (SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc).**

PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
DJALAN IMAM BONDJOL NO. 13 TILPON 53418
D J A K A R T A

PEDOMAN : Tata-tertib untuk Wakil dari Organisasi Parpol/Golkar yang ditundjuk untuk mengikuti/menjaksikan penghitungan suara di TPS.

Nomor : 0622/III/1/1971.

Sebagai realisasi Surat Mendagri/Ketua LPU No. 184/II/71 tanggal 6 April 1971 dan Surat PPD DCI No. 0517/III/1/1971 tanggal 31 Mei 1971, guna kelantjaran djalannja penghitungan suara dengan ini diberikan pedoman dan petundjuk seperlunja sebagai berikut :

1. Pada tiap TPS dapat dihadiri oleh se-banjak2nja 3 (tiga) orang Wakil dari masing2 Parpol/Golkar yang turut dalam Pemilu 1971, guna turut menjaksikan penghitungan suara.
2. Wakil dari Parpol/Golkar dimaksud harus membawa mandat tertulis dari pimpinan organisasi masing2.
3. Untuk saksi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 PP. No. 1 Th. 1970 dan Pedoman Mendagri No. 4/PPI/1971, ditetapkan 3 (tiga) orang Wakil dari seluruh Wakil2 Parpol/Golkar.
4. Penetapan 3 (tiga) orang saksi dari 3 (tiga) Organisasi (Parpol/Golkar) diantaranya Wakil2 Organisasi peserta pemilihan umum yang hadir dilakukan dengan tjara undian yang dilakukan sebagai berikut :
 - a). disediakan kertas2 yang berukuran minimal 1/12 (seperduabelas) kertas folio sebanyak Organisasi2 Parpol/Golkar yang diwakili dalam Rapat Penghitungan Suara.
 - b). pada tiap helai kertas tersebut ditulis angka sesuai dengan nomor tanda gambar organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas.
 - c). kertas2 dalam keadaan tergulung dimasukkan dalam kotak/wadah lain dan sebagainja lalu diaduk-aduk/dikotjok.
 - d). tiga orang diantara hadirin diminta mengambil kertas2 undian dari kotak/wadah lain tersebut masing2 satu helai.

- e). tiga angka jang ditarik dalam undian itu masing2 menentukan organisasi mana jang ditetapkan mendjadi saksi.
5. Surat mandat hanja berlaku untuk mengikuti penghitungan suara dan untuk masing2 utusan hanja berlaku di satu TPS jang telah di-tundjuk/ditetapkan dalam surat mandat.

Djakarta, 24 Djuni 1971.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,

ttd.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA
DJALAN IMAM BONDJOL NO. 13 TILPON 53418
D J A K A R T A .**

**PENGUMUMAN GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH D.C.I. DJAKARTA
NOMOR : 0634/III/1/1971.**

Berkenaan dengan makin dekatnja hari Pemungutan Suara tanggal 3 Djuli 1971, maka dengan ini kami serukan kepada seluruh warga kota untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi hari bersedjarah tersebut.

Kepada semua warganegara Indonesia jang berhak untuk memilih diharapkan untuk mempergunakan hak pilihnja setjara bertanggung djawab dan penuh kesadaran. Dalam satu dua hari ini akan disampaikan kepada Saudara2 jang berhak memilih Surat Panggilan untuk menggunakan hak pilih itu di-TPS-TPS jang telah ditentukan melalui Kelompok Penjelenggara Pemungutan Suara diwilajah masing2. Apabila dalam tempo sampai dengan tanggal 30 Djuni 1971 ada diantara Saudara2 jang belum menerima Surat Panggilan diharapkan dengan sangat untuk menanjakannja ke RT/RW setempat atau langsung ke Kelurahan/Ketjamatan. Surat Panggilan tersebut akan dipergunakan sebagai tanda bukti diri untuk mempergunakan hak pilih di TPS jang bersangkutan jang kelak akan diteliti di TPS dengan tanda bukti diri (legitimasi bewijs) lainnja seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Pegawai, Rijbewijs, Paspor, dan sebagainja.

Sementara itu pada hari Pemungutan Suara tanggal 3 Djuli 1971 diharapkan kegiatan serta perhatian warga kota akan terpusat pada event pemberian suara di-TPS2.

Oleh karenanja kiranja akan sangat bermanfaat apabila keperluan se-hari2 pada hari Pemungutan Suara itu dapat disiapkan sebelumnja serta atjara2 kegiatan disesuaikan dengan kondisi tersebut diatas.

Selanjutnja kami berkejakinan bahwa hari Pemungutan Suara di Djakarta akan dapat dilampaui dengan tertib, tenang dan relax serta kehidupan Kota akan berdjalan sebagaimana mestinja.

Selaku Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta, kami mendjamin bahwa

Pemungutan Suara tanggal 3 Djuli 1971 akan dapat dilaksanakan dengan baik dan aman.

Sarana-sarana komunikasi transport dan aparatur keamanan lainnja telah di-siapkan untuk keperluan itu sebagaimana mestinja.

Oleh karenanja setiap warga-kota didjamin untuk dapat mempergunakan hak pilihnja masing2 dengan sebaik-baiknya.

Djakarta, 28 Djuni 1971

**Pd. GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH DCI DJAKARTA.**

tjap/t.t.d.

ALI SADIKIN
Letnan Djenderal KKo.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA
DJALAN IMAM BONDJOL No. 13 TILPON 53418
D J A K A R T A**

NOTA – DINAS

Nomor : 0629/III/1/71.

D a r i : Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta.
Kepada : Para Tjamat/Ketua P.P.S. se-DCI Djakarta,
Perihal : Tugas-tugas jang perlu dilaksanakan oleh K.P.P.S.

Untuk lebih memantapkan KPPS dalam melaksanakan tugasnja pada waktu pemungutan suara, maka perlu diadakan usaha2 sebagai berikut :

1. Mendjelang Pemungutan Suara supaja Saudara memberikan directiven kembali kepada KPPS tentang tata-tjara pemungutan suara/penghitungan suara setjara lebih efektif.
2. Teks Pidato jang akan dibatjakan oleh KPPS pada waktu Pemungutan Suara adalah berupa :
 - a. Amanat Bapak Presiden Republik Indonesia.
 - b. Pesan Bapak Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta kepada Warga Kota.
 - c. Pidato Ketua KPPS tentang tehnis pemungutan suara.
3. Usahakan agar KPPS pada waktu tersebut tidak memberikan pidato, sambutan ataupun komentar2 lainnja selain jang tersebut pada ad.2 diatas.

Demikian agar maklum.

Djakarta, 25 Djuni 1971.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Sekretaris,

ttd.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.).

TEMBUSAN :

1. BPH/Bidang Pemerintahan,
 2. Sekda DCI Djakarta,
 3. Direktorat I/Pemerintahan,
 4. Direktorat VII/Chusus Politik,
 5. Kepala Kantor Sensus & Statistik DCI Djakarta,
 6. A r s i p.
-

LAMBANG KEPRESIDENAN

AMANAT MENDJELANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 1971

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air;

Assalamu'alaikum wr. wb.;

Sebentar lagi — 3 Djuli 1971 — Insja Allah, kita akan melaksanakan Pemilihan Umum.

Pelaksanaan Pemilihan Umum ini adalah kehendak kita semua, kehendak seluruh Bangsa Indonesia, jang telah kita tetapkan bersama melalui wakil-wakil kita jang duduk di M.P.R.S.

Telah lama kita menanti-nantikan hari jang sangat penting ini. Undang-undang mengenai Pemilihan Umum ini kita siapkan 3 tahun; jang hendaknja merupakan pertanda bahwa kita memikirkan dengan penuh kesungguhan dan segala kebidjaksanaan untuk melaksanakan Pemilihan Umum itu pada kondisi dan kebutuhan perdjooangan Bangsa kita pada tahap dewasa ini. Dalam waktu 1½ tahun Pemerintah — Lembaga Pemilihan Umum — melakukan persiapan-persiapan penjelenggaraan Pemilihan Umum itu berdasarkan perundang-undangan jang berlaku.

Untuk apa kita melaksanakan Pemilihan Umum itu?

Saja pertjaja saudara-saudara semua telah mengetahui. Tetapi mendjelang saat-saat jang penting ini, saja ingin mengingatkan kembali pada beberapa hal jang pokok.

Tudjuan setjara langsung dari Pemilihan Umum adalah memilih wakil-wakil Rakjat jang nanti akan duduk dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat II, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakjat. Pemilihan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat itu sekaligus kita lakukan dalam rangka pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat; ialah Lembaga Negara tertinggi dalam kehidupan rumah tangga keluarga besar kita semuanya, rumah tangga seluruh Bangsa Indonesia ini.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat itu akan menentukan haluan Negara, jang merupakan pokok-pokok program rentjana kerdja Nasional kita dimasa-masa jang akan datang.

Dewan Perwakilan Rakyat yang berkedudukan di Ibukota Negara kita — bersama-sama Pemerintah — akan menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menentukan rentjana-rentjana kerdja setiap tahun, bersama-sama Pemerintah menentukan Undang-undang, mengawasi pelaksanaan tugas

Pemerintah dan sebagainya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II pada dasarnya akan menentukan pengurusan rumah tangga Daerah, Tingkat Propinsi maupun Kabupaten.

Melalui Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat itulah kita sebenarnya menentukan nasib sendiri kita, mengurus rumah tangga kita sendiri. Dan itulah inti daripada demokrasi yang kita anut. Sebab itu, melaksanakan Pemilihan Umum berarti juga melaksanakan bagian yang terpenting daripada demokrasi itu.

Melalui Pemilihan Umum inilah kita memilih wakil-wakil kita sendiri yang nanti akan menentukan masa depan kita semua.

Masa depan kita itu harus lebih baik dari masa sekarang. Masa depan itu — sebagian — terletak pada pilihan-pilihan saudara-saudara sendiri dalam pelaksanaan Pemilihan Umum ini. Satu pilihan yang hasilnya nanti tidak dapat diroboh lagi.

Saja serukan dan mengharapkan, agar saudara-saudara semua dengan perasaan tenteram, bebas tanpa paksaan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, memilih wakil-wakil Rakyat yang benar-benar saudara-saudara pertjajai.

Apa yang kita lakukan bersama besok pagi adalah tugas Nasional yang sangat besar. Besok pagi Bangsa Indonesia akan menantjapkan satu tonggak sedjarah baru, satu tonggak baru daripada perdjalanannya Orde-Baru; yang harus berarti memperkuat pelaksanaan Pantja Sila dan Undang-undang Dasar 1945 serta memperhebat pelaksanaan Pembangunan selandjutnja.

Kepada setiap petugas Pemilihan Umum terutama para Penjelenggara Pemungutan Suara, saya instruksikan : , Laksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung djawab; laksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang telah diberikan; sehingga hak pilih itu dapat dilaksanakan setjara bebas, rahasia dan dengan perasaan tenteram, pemungutan suara dapat berdjalan lantjar”.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air;

Dengan mengutjapkan Bismillah, saja mengadjak saudara-saudara semua melaksanakan hak memilih pada tanggal 3 Djuli 1971 ini.

Semoga Tuhan Jang Maha Esa memberkahi kita semua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Djakarta, 2 Djuli 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI

P E S A N :
GOVERNOR HEAD OF SPECIAL CAPITAL JAKARTA
TO ALL VOTERS IN THE TPS-TPS OF THE CAPITAL

Saudara-saudara sekalian Wargakota Jakarta,

Hari ini tanggal 3 Juli kita sampai pada hari pemungutan suara setelah beberapa bulan kita persiapkan. Hari ini Saudara-saudara akan menjatuhkan pilihan Saudara masing-masing.

Untuk dapat ikut memilih anggota-anggota DPR dan DPRD Tk. I Jakarta Raya ini, Saudara-saudara mendapat dua surat suara. Pada kedua surat-surat suara yang Saudara terima terdapat 10 tanda gambar dengan nomor urut 1 sampai 10. Kepada tanda gambar itulah, Saudara-saudara harus menjatuhkan pilihannya. Saudara-saudara berhak memilih 1 diantaranya, mana yang paling tepat, paling sesuai dengan hati-nurani Saudara-saudara sendiri.

Setelah Saudara-saudara dapat menjatuhkan pilihan, maka tanda gambar tersebut harus Saudara tusuk atau tjoblos. Dalam menusuk atau mentjoblos tanda gambar itu ada hal-hal yang Saudara-saudara harus perhatikan.

Jaitu, supaya penusukan atau pentjoblosan itu, tepat jatuh ditengah-tengah tanda gambar yang Saudara-saudara pilih. Jangan terlalu kepinggir, dan jangan sampai jatuh diluar tanda gambar. Sebab kalau demikian, surat suara Saudara akan tidak sah. Artinya, tak dapat dihitung sebagai hasil suara. Dan itu tentu merugikan. Baik untuk Saudara sendiri yang telah dengan derih payah datang dan mentjoblos di TPS, maupun untuk hasil PEMILU itu pula.

Harus dijaga pula, agar yang benar-benar tertjoblos itu hanya 1 tanda gambar saja, jaitu yang Saudara pilih. Jangan sampai ada tanda gambar lain ikut tertusuk. Untuk menghindari kejadian ini, maka diwaktu Saudara akan menusuk, surat suara itu Saudara buka, Saudara kembangkan seluruhnya. Sehingga 10 tanda gambar itu dapat jelas kelihatan.

Jangan sama sekali menusuk dengan tjara dilipat. Sebab ini akan mengakibatkan tertusuknya tanda gambar lain dari yang Saudara telah pilih. Bila hal itu terjadi, surat suara itupun tidak sah pula.

Karenanya Saudara-saudara untuk sahnja surat suara Saudara-saudara itu, ikutilah petunjuk-petunjuk petugas TPS.

Achirnja saja serukan sepenuh hati kepada Saudara-saudara untuk menggunakan hak pilih Saudara-saudara, djanganlah datang ditempat ini (TPS) untuk tidak menusuk.

Saudara-saudara sekalian, nah itulah pesan-pesan saja. Dan saja utjapkan selamat bagi Saudara-saudara sekalian.

Djakarta, 23 Djuni 1971.

**Pd. GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA**

ttd.

ALI SADIKIN

Letnan Djenderal KKo.

PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Dj. Imam Bondjol No. 13 Telp. 53418
D J A K A R T A .

T e k s : Pidato Penjelenggaraan Pemungutan Suara.

Saudara-Saudara Jth.

Hari ini tepat jam 08.00 pagi penyelenggaraan untuk pemungutan suara kita mulai. Sebelum pelaksanaannya akan bersama-sama kita saksikan alat-alat dan blanko2 surat suara serta penjelasan singkat dari tata tjara Saudara-saudara untuk memberikan suaranya.

Disini tersedia 2 buah kotak suara yang pada tutupnya masing-masing berwarna kuning dan putih lengkap dengan gemboknya (kuntji) nya.

Mari kita periksa bersama-sama masing-masing kotak ini. (Dibuka dan diperlihatkan keadaan didalamnya dari kedua kotak setjara berurutan). Dime-dja ini tersedia 3 bungkus; masing-masing dalam keadaan utuh dan disegel jaitu :

- (Diatungkan kepada Pemilih) — 1 bungkus yang berisi blanko surat suara untuk pemilihan anggota D.P.R. dengan warna kuning.
- (Diatungkan kepada Pemilih) — 1 bungkus yang berisi blanko surat suara untuk pemilihan anggota D.P.R.D. tk. I. Djakarta, dengan warna putih.
- (Diatungkan kepada Pemilih) — 1 bungkus yang berisi blanko Berita Atjara Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Marilah masing-masing bungkus ini kita buka dan saksikan isinya. (Tiap bungkus diperlihatkan keadaan utuhnya/segelnya dan lalu dibacakan keterangan isi yang tertulis pada kulit pembungkusnja, kemudian dibuka lalu dihitung dengan suara keras untuk dapat didengar oleh massa Pemilih yang hadir).

Saudara-saudara Jth.

Kepada Saudara-saudara setjara bergiliran akan diberikan 2 helai blanko

surat-suara ini jang terdiri dari 1 berwarna kuning dan 1 berwarna putih. Sebelum Saudara masuk kebilik pemberian suara; periksalah lebih dahulu ke-2 blanko surat-suara ini apakah dalam keadaan baik, tidak ada tjtjadnja dan sebagainja. Setelah itu Saudara dapat masuk kedalam bilik Pemberian Suara; disana alat untuk penusuk (pentjoblos) dengan bantalannya.

Didalam "Bilik" tersebut Saudara buka lipatan surat suara ini dan menetapkan pilihan Saudara dengan menusuk/mentjoblos pada salah satu dari gambar tersebut. **Penusukan/pentjoblosan harus tepat ditengah-tengah tanda-gambar dan benar2 tembus.** Lakukanlah hal jang sama terhadap ke-2 surat suara itu. (Ditekan dan diulang).

Tanda gambar jang mana masing-masing dari ke-2 surat suara itu jang akan Saudara tusuk/tjoblos, terserah menurut pilihannya masing-masing dan inilah jang dimaksudkan "bebas" maka Saudara-saudara pun bebas untuk menentukan pilihannya sendiri-sendiri.

Djangan Saudara bubuhi tulisan-tulisan atau tanda-tanda lainnja karena nanti akan berakibat tidak sah suara-suara itu. Demikian pula kalau penusukan/tjoblosan jang tidak djelas atau tidak tepat ditengah-tengahnja tanda gambar akan berakibat tidak sah pula.

Bila Saudara keliru atau salah dalam memberikan suara ini; Saudara boleh minta tukar surat-suara tersebut hanja 1 X sadja kepada kami.

Setelah itu lipatlah kembali tiap-tiap surat suara tersebut, makaSaudara boleh keluar dari bilik dan menudju ke kotak suara itu.

Sebelum Saudara memasukkan surat suara tersebut kedalam kotak-suara itu; perlihatkan lebih dahulu kepada kami atau petugas K.P.P.S. jang ada disitu (dekat kotak-suara) bahagian jang ada tanda tangan panitia.

Setelah diberikan persetudjuan, barulah masing-masing surat-suara dimasukkan kedalam kotak suara tersebut sesuai dengan warnanja; jang kuning kedalam kotak jang kuning dan jang putih kedalam kotak jang putih.

Sesudahnja dipersilahkan Saudara keluar tempat ini dan boleh menunggu diluar sampai pada waktu nanti kita melakukan penghitungan hasil dari pemberian suara dari Saudara-saudara tadi.

Apakah ada jang akan bertanja lagi; (ditunggu beberapa detik) kalau sudah djelas marilah kita mulai dengan pemilihan jang pertama.

Terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.



Sdr. Soetipio Wiroardjono M.Sc., Sekretaris P.P.D. D.C.I. Jakarta sedang mengumumkan hasil-hasil Pemilihan D.P.R.D. D.C.I. Jakarta.

**DAFTAR DIUMILAH SURAT SUARA JANG DIPERKUNAKAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA
DITEMPAT-TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM WILAJAH DAERAH TINGKAT I
DIAKARTA.**

NO. MOR	NAMA DAERAH TINGKAT II DALAM WILAJAH DAERAH TINGKAT I.	DIUMILAH SURAT SUARA														DIUMILAH SURAT SUARA TERIMA OLEH KPPS UNTUK PEM. SUARA.	DIUMILAH SURAT SUARA TERDAFTAR DALAM DA- FTAR PEMILIH
		JANG TIDAK TERPAKAI UNTUK PEMUNGUTAN SUARA DI T.P.S.				JANG DIKEMBALIKAN KARENA RUSAK/KEILURU DITROBLOS OLEH PEMILIH				JANG TERPAKAI DAN BERISI SUARA JANG SAH				JANG TERPAKAI DAN BERISI SUARA JANG TIDAK SAH			
		DPR	DPRI	DPRII	DPR	DPRI	DPRII	DPR	DPRI	DPRII	DPR	DPRI	DPRII				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	DIAKARTA PUSAT	177.906	175.358	-	6.138	5.850	-	596.693	595.318	-	16.509	14.823	-	1.588.595	680.338		
2.	DIAKARTA UTARA	87.823	90.815	-	3.485	3.271	-	269.624	270.143	-	8.564	7.008	-	740.733	310.994		
3.	DIAKARTA BARAT	79.460	81.610	-	3.098	3.094	-	344.690	345.285	-	12.896	11.827	-	881.960	388.496		
4.	DIAKARTA SELATAN	137.350	138.756	-	3.642	3.398	-	417.251	417.524	-	11.558	10.683	-	1.140.092	486.246		
5.	DIAKARTA TIMUR	91.533	92.045	-	2.962	3.180	-	310.398	310.212	-	6.883	6.218	-	823.431	355.658		
6.	LUAR NEGERI	-	-	-	-	-	-	16.354	-	-	-	-	-	16.354	-		
DIUMILAH BESAR/DIJALAN (Dalam Daerah Tk.I)		594.072	578.584	-	19.325	18.723	-	1.955.010	1.938.482	-	56.410	50.559	-	5.191.165	2.221.732		

Diakarta, 29 Dhuhi 1971,
KETUA PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
DIAKARTA
td
AL-SADIKIN
Letnan Jenderal KKO.

1133

**Dispute between
Government &
Parliament
(pg. 1).**

md

Letras Djendral Kko.

**TABULAN PENGUNTUNGAN SUARA DAERAH TINGKAT I
UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA : D.P.R.D. I.**

NO-MOR	NAMA DAERAH TINGKAT II DALAM WILAYAH DAERAH TINGKAT I	DIJUALAH SUARA JANG SAH DIPEROLEH OLEH TIAP-TIAP ORGANISASI										DIJUALAH SUARA JANG SAH JANG DIPEROLEH SEMUA ORGANISASI DALAM DAERAH TINGKAT I	KETEK-RANGAN
		1 KATOLIK	2 P.S.I.I.	3 N. U.	4 PARMISI	5 GOLKAR	6 PARINDO	7 MURBA	8 P.N.L.	9 PERTI	10 IP-KI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	DIAKARTA PUSAT	22.741	15.868	124.296	54.750	275.312	23.115	2.065	69.467	3.679	4.025	595.318	
2.	DIAKARTA UTARA	4.224	9.721	55.567	14.839	140.438	7.156	637	34.463	1.423	1.675	270.143	
3.	DIAKARTA BARAT	11.503	14.625	76.753	23.656	164.001	9.528	1.203	39.727	1.715	2.574	345.285	
4.	DIAKARTA SELATAN	8.191	9.722	119.297	34.802	177.471	9.462	1.003	51.706	2.562	2.808	417.524	
5.	DIAKARTA TIMUR	7.413	5.490	87.025	21.050	147.136	7.419	750	29.665	1.931	2.333	310.212	
DIJUALAH BESAR/DIJALAN (Dalam Daerah Tingkat I)		54.072	55.426	463.438	149.097	904.358	56.680	5.658	225.028	11.310	13.415	1.938.482	

Dibaca: 29 Dhuh 1971.
KETUA PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I.
DI K A R T A

At
A U S A D I K I N
Lema Dendani K.Ko.

**DAFTAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAERAH TINGKAT I
UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA D.P.R. DAERAH PEMILIHAN DIKARTAJA.**

NO. MOR	NAMA DAERAH TINGKAT II.	DIDIMILAH SUARA JANG DIPEROLEH ORGANISASI-ORGANISASI										DIDIMILAH SUARA- RAJANG DIPER- OLEH SEMUA ORGANISASI DALAM TIAP DAERAH TING- KAT I.
		1 PARTAI KATOLIK	2 PARTAI SIARIKAT ISLAM INDONESIA	3 PARTAI NABIDATUL ULAMA	4 PARTAI MUSULIMIN INDONESIA	5 GOLONGAN KARYA	6 PARTAI KRISTEN INDONESIA	7 PARTAI MURBA	8 PARTAI NASIONAL INDONESIA	9 PARTAI ISLAM PERTI	10 PARTAI IP-KI	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1.	DIKARTAJA PUSAT	22.751 (6)	16.059 (7)	123.883 (2)	54.840 (4)	276.246 (1)	23.134 (5)	21.35 (10)	69.961 (3)	3.684 (9)	4.000 (8)	596.693
2.	DIKARTAJA UTARA	4.270 (7)	9.718 (5)	55.163 (2)	14.825 (4)	140.370 (1)	7.136 (6)	636 (10)	34.494 (3)	1.406 (9)	1.606 (8)	269.624
3.	DIKARTAJA BARAT	11.504 (6)	14.686 (5)	76.657 (2)	23.598 (4)	163.898 (1)	9.285 (7)	1.247 (10)	39.752 (3)	1.734 (9)	2.329 (8)	344.690
4.	DIKARTAJA SELATAN	8.233 (7)	9.795 (5)	119.183 (2)	34.843 (4)	177.735 (1)	9.489 (6)	995 (10)	51.603 (3)	2.562 (9)	2.793 (8)	417.351
5.	DIKARTAJA TIMUR	7.419 (6)	5.512 (7)	86.636 (2)	21.010 (4)	147.518 (1)	7.490 (5)	824 (10)	29.770 (3)	1.942 (9)	2.277 (8)	310.398
6.	LUAR NEGERI	2.173 (2)	611 (7)	1.281 (6)	1.619 (4)	6.642 (1)	1.596 (5)	140 (9)	1.955 (3)	128 (10)	209 (8)	16.354
DIDIMILAH SUARA DA- LAH WILAJAH DA- RAH TT. II.		56.370 (7)	56.381 (6)	462.803 (2)	150.735 (4)	912.409 (1)	58.130 (5)	5.977 (10)	227.535 (3)	11.456 (9)	13.214 (8)	1.955.010

Dikartaj, 29 Duli 1971.
KETUA PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
DIKARTAJA

td.
ALI SAIDIKIN
Lrtan Dpendral Kko.

**DAFTAR HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAERAH TINGKAT I
UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA : D.P.R.D. DIKAKARTA.**

NO. MOR	NAMA DAERAH TK. II.	DIJUALAH SUARA JANG DIPEROLEH ORGANISAS-ORGANISASI										DIJUALAH SUARA JANG DIPEROLEH SEMUA ORGANISASI DALAM TIAP DAERAH TINGKAT II.
		1 PARTAI KATOLIK	2 PARTAI SHARIFATWANDALTE ISLAM	3 PARTAI WANDALTE ULAMA	4 PARTAI MUSLIMIN INDONESIA	5 COLONGAN KARVA	6 PARTAI KRISTEN INDONESIA	7 PARTAI MURBA	8 PARTAI NASIONAL INDONESIA	9 PARTAI ISLAM PERTI	10 PARTAI IP-KI	
1.	DIKAKARTA PUSAT	22.741 (6)	15.868 (7)	124.296 (2)	54.750 (4)	275.312 (1)	23.115 (5)	2.065 (10)	69.467 (3)	3.679 (9)	4.025 (8)	595.318
2.	DIKAKARTA UTARA	4.324 (7)	9.721 (5)	55.567 (2)	14.839 (4)	140.438 (1)	7.156 (6)	637 (10)	34.463 (3)	1.423 (9)	1.675 (8)	270.143
3.	DIKAKARTA BARAT	11.503 (6)	14.625 (5)	76.753 (2)	23.656 (4)	164.001 (1)	9.528 (7)	1.203 (10)	39.727 (3)	1.715 (9)	2.574 (8)	345.285
4.	DIKAKARTA SELATAN	8.191 (7)	9.722 (5)	196.797 (2)	34.802 (4)	177.471 (1)	9.462 (6)	1.003 (10)	51.706 (3)	2.862 (9)	2.808 (8)	417.524
5.	DIKAKARTA TIMUR	7.413 (6)	5.490 (7)	87.025 (2)	21.050 (4)	147.136 (1)	7.419 (5)	750 (10)	29.665 (3)	1.931 (9)	2.333 (8)	310.212
DIJUALAH SUARA DALAM WILAJAH DAERAH TK. II.		54.072 (7)	55.426 (6)	463.438 (4)	149.097 (1)	904.338 (5)	56.680 (3)	5.658 (10)	225.028 (3)	11.310 (9)	13.415 (8)	1.938.482

II. UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKAT DAERAH TINGKAT DIKAKARTA.

1. Diumlah anggota DPRD I jang dipilih : 32 (tisarupuh dua) : Diumlah suara jang diperoleh semua.
2. Bilangan Pembagi Pemilhan : organisasi dalam Daerah Tingkat I = 1.938.482

$$\text{Diumlah anggota DPRD I jang dipilih } 32 = 60577,56 = 60578.$$

KETERANGAN : 1) Ditet nama Badan Perwakilan dan Daerah jns. Dikla lembaga ini sudah pernah diuji.
Untuk hindarkan digunakan lembaga lain jang dilaesnya diteliti "...LAWPIRAN V
LANDUTAN" dan dibutuhkan nomor halamanja.

Dikakarta, 29 Dnuil 1971.
**KETUA PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
DIKAKARTA**

AL-SADIKIN
td.
Lectura Dendral K.G.

DAFTAR PERHITUNGAN PEMBAGIAN KURS

$$\text{BILANGAN PEMBAGI PEMILIHAN (B.P.P.)} = \frac{1.938,462}{32} = 60,577,56 \text{ dibulatkan keatas} = 60,578$$

ORGANISASI-ORGANISASI YANG MENGADAKAN PENGABDIAN SUARA : 8.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

Digitized by Google

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	PARTAI KRISTEN INDONESIA (PARKINDO).	56.680	—	56.680	—	—	—	—	56.680	1	1	1	
7.	MURBA	5.658	—	5.658	—	—	—	—	5.658	10	—	—	
8.	P.N.I.	225.028	3	43.294	—	—	—	—	43.294	5	1	4	
9.	PARTAI ISLAM PERTI	11.310	—	11.310	—	—	—	—	11.310	9	—	—	
10.	PARTAI IP-KI	13.415	—	13.415	—	—	—	—	13.415	8	—	—	
DIUMILAH KURSI JANG DIBAGIKAN		—	26	—	—	—	—	—	—	—	6	32	
DIUMILAH SISA KURSI JANG BELUM TERBAGI		—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

KETERANGAN :

- 1) Hasil diuji pada surat Organisasi Jang bernomor tertera Organisasi-organisasi Jang menjabarkan gubugan surat.
- 2) Hasil diuji pada surat Organisasi Jang berhuruf mempersembahkan surat persetujuan antara Organisasi-organisasi Jang berhuruf.
- 3) Diuji dan surat Organisasi Jang berhuruf dalam butir 7, tidak diberikan dan surat Jang diuji dalam butir 6.
- 4) Sama dengan 2).

Dibaca, 29 Desember 1971.

PANTIA PENGILIRAN DAERAH TINGKAT I

KETUA,

td.

ALI SADIQIN

Lectur Diklatasi KKG.

**REKAPITULASI : Hasil Penghitungan Suara untuk Keanggotaan DPR
Daerah Pemilihan DKI Jakarta.**

No. Urut	Wilayah	Jumlah Suara yang diperoleh masing-masing Partai/Colekar :										Jumlah	Kete- megan.
		KATOLIK	P.S.I.I.	N. U.	PARMUSI	COLKAR	PARKINDO	MURBA	P.N.I.	PERITI	IP-KI		
1.	DIKARAYA PUSAT	22751	16059	123883	54840	276246	23134	2135	69961	3664	4000	596693	
2.	DIAKARTA UTARA	4270	9718	55163	14825	140370	7136	636	34494	1406	1606	269624	
3.	DIAKARTA BARAT	11504	14686	76657	23598	163898	9285	1247	39752	1734	2329	344690	
4.	DIAKARTA SELATAN	8253	9795	119183	34843	177735	9489	995	51603	2562	2793	417251	
5.	DIAKARTA TIMUR	7419	5512	86636	21010	147518	7490	824	29770	1942	2277	310398	
6.	LUAR NEGERI	2174	612	1286	1631	6670	1599	140	1958	128	209	16407	Tersangkut jumlah 4 Perwakilan di Luar Ne- geri pada tgl. 8-8-1971.
DIJUALAH BESAR		56371	56382	462808	150747	912437	58133	5977	227538	11456	13214	1955063	

Djakarta, 30 Agustus 1971.
PANITIA PEMILIHAN DAERAH DKI DIAKARTA
Secretaris,

td.
(SOETJIPTO WIROSARDIONO H.Sc.)

**REKAPTULASI : HASIL PENGHITUNGAN SUARA UNTUK KEANGGOTAAN DPRD I.
DAERAH PEMILIHAN : DKI JAKARTA.**

NOMOR URUT	WILAJAH	DIUMLAH SUARA JANG DIPEROLEH TIAP-TIAP PARPOL/ GOLKAR										DIUMLAH	KETE- RANGAN
		KATOLIK	P.S.I.	N. U.	PARMUSI	GOLKAR	PARKINDO	MURBA	P.N.I.	PERTI	IP-KI		
1.	DIAKARTA PUSAT	22.741	15.868	124.296	54.730	275.312	23.115	2.065	69.467	3.679	4.025	595.318	
2.	DIAKARTA UTARA	4.224	9.721	55.567	14.839	140.438	7.156	637	34.463	1.423	675	270.143	
3.	DIAKARTA BARAT	11.503	14.625	76.753	23.656	164.001	9.528	1.203	39.727	715	2.574	345.285	
4.	DIAKARTA SELA- TAN	8.191	9.722	119.797	34.802	177.471	9.462	1.003	51.706	2.562	2.808	417.524	
5.	DIAKARTA TIMUR	7.413	5.490	87.025	21.050	147.136	7.419	750	29.665	1.931	2.333	310.212	
D J U M L A H		54.072	55.426	463.438	149.097	904.358	56.680	5.658	225.028	11.310	13.415	1.938.482	

Jakarta, 30 Agustus 1971,
PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH KHUSUS
IBUKOTA DIAKARTA
Sekretaris,

ttd.
(SOETJIPTO WIROSARDIONO M.Sc.)

**HASIL : PENGHITUNGAN SUARA UNTUK KEANGGOTAAN
D.P.R.D. I DKI JAKARTA.**

NO- MOR	WILAJAH KETIAMATAN	DIJUALAH SUARA JANG DIPEROLEH TIAP-TIAP PARPOL/COLKAR											DIJUALAH
		KATOLIK	PS.II	N. U.	PARMUSI	COLKAR	PARKINDI	MURBA	P.N.I.	PERTI	IP-KI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	DIAKARTA PUSAT	5.561	2.748	14.862	8.053	57.868	4.915	276	9.960	446	560	105.249	
	1. Gembir	4.550	1.615	13.319	3.775	37.639	2.869	334	8.413	339	501	73.534	
	2. Sawah Besar	2.124	1.470	17.007	5.899	36.698	2.401	217	13.324	434	439	80.013	
	3. Kemajoran	3.941	2.049	17.540	8.749	37.452	4.568	295	7.679	647	579	83.499	
	4. Senen	1.695	1.735	18.486	6.807	33.411	2.081	311	9.642	740	539	75.467	
	5. Tempata Putih	2.600	1.791	17.005	6.029	32.139	3.765	354	6.700	476	631	71.490	
	6. Menteng	2.270	4.460	26.077	15.438	40.015	2.516	278	13.749	597	756	106.246	
	7. Tanah Abang												
	D J U M L A H :	22.741	15.868	124.296	54.750	275.312	23.115	2.065	69.467	3.679	4.025	595.318	
II.	DIAKARTA UTARA	2	35	1.838	31	2.200	8	2	11	3	12	4.312	
	1. Kepulauan Seribu	2.071	2.390	14.016	4.545	47.819	1.624	271	9.318	450	594	83.098	
	2. Pendurungan	1.138	3.534	13.217	4.028	43.625	3.359	166	10.579	424	453	80.513	
	3. Tandang Priok	1.013	3.782	26.496	6.235	46.794	2.165	128	14.535	546	616	102.400	
	4. Kodja												
	D J U M L A H :	4.224	9.721	58.567	14.839	140.438	7.156	637	34.463	1.423	1.675	270.143	
III.	DIAKARTA BARAT	212	632	12.179	1.642	21.000	420	63	1.934	126	412	38.640	
	1. Tengkering	4.251	3.371	23.325	9.336	44.051	3.687	296	16.900	634	978	106.829	
	2. Grogol Petamburan	4.783	1.904	10.819	5.185	37.696	3.367	190	8.547	356	328	73.175	
	3. Tamanari												
	D J U M L A H :												
	4. Tambora												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4. Tambora 5. Kebon Dyeruk	2.205 52	7.911 807	21.623 8.807	6.403 1.090	46.740 14.514	1.932 122	293 361	11.181 1.145	506 93	525 331	99.319 27.322
	D J U M L A H :	11.503	14.625	76.753	23.656	164.001	9.528	1.203	39.727	1.715	2.574	345.285
IV.	DI AKARTA SELATAN											
	1. Te bet 2. Steabodi 3. Mampang Prapatan 4. Pasar Minggu 5. Kebajolan Lama 6. Kelogoran Baru	1.611 1.505 630 276 938 3.231	1.911 2.637 989 995 1.584 1.606	23.628 28.256 18.538 10.593 21.652 17.130	8.004 9.314 3.775 2.151 5.210 6.348	32.593 31.463 19.289 26.418 29.645 30.063	2.157 2.485 656 292 1.002 2.870	188 264 91 88 139 233	10.313 14.572 4.818 1.503 7.133 13.367	683 741 368 119 270 381	526 653 325 359 362 583	81.614 91.890 49.479 42.704 67.935 83.812
	D J U M L A H :	8.191	9.722	119.797	34.802	177.471	9.462	1.003	51.706	2.562	2.808	417.524
V.	DI AKARTA TIMUR											
	1. Matraman 2. Pulau Gadung 3. Duitingara 4. Kamatidjati 5. Pasar Rebo	1.706 1.414 3.288 851 154	1.370 1.321 1.465 870 464	16.057 21.762 34.818 10.579 3.809	5.564 4.819 6.081 2.864 1.722	27.067 31.351 35.756 28.606 24.356	1.437 1.844 2.789 1.134 215	265 182 187 78 38	8.745 7.949 9.018 2.684 269	605 437 523 208 158	467 687 703 225 224	63.283 71.766 94.655 48.099 32.409
	D J U M L A H :	7.413	5.490	87.025	21.050	147.136	7.419	750	29.665	1.931	2.333	310.212

Djakarta, 30 Agustus 1971.
**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA DI AKARTA**
 Sekretaris,

td.
(SOETJIPTO WIRASARDJONO M.Sc.)

**BARU : PENGHITUNGAN SUARA UNTUK KEANGGOTAAN D.P.R.
D.C.I. DIAKARTA**

WILAYAH		DITUNJAH SUARA JANG DIPEROLEH TIAP-TIAP ORGANISASI :											DITUNJAH
NOMOR	KET/AMATAN	KATOLIK	P.S.L.L	N. U.	PARMUSE	GOLKAR	PARKINDO	MURBA	P.N.L	PERTI	IP-KI		
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. DIAKARTA PUSAT													
1.	Gambir	5.560	2.719	14.875	7.990	58.375	4.840	292	10.070	437	552	105.710	
2.	Kawah Besar	4.564	1.611	13.268	3.785	37.786	2.857	339	8.438	333	484	73.465	
3.	Kempelen	2.140	1.478	16.947	5.852	36.872	2.387	218	13.317	453	450	80.114	
4.	Senen	3.919	2.115	17.406	8.810	37.387	4.610	302	7.702	647	562	83.460	
5.	Tropika Putih	1.692	1.711	18.534	6.802	33.438	2.138	320	9.718	727	564	75.644	
6.	Merentang	2.589	1.820	16.941	6.115	32.318	3.749	386	6.990	485	657	72.050	
7.	Tanah Abang	2.287	4.605	25.912	15.486	40.070	2.553	278	13.726	602	731	106.250	
DITUNJAH :		22.751	16.059	123.883	54.840	276.246	23.134	2.135	69.961	3.684	4.000	596.693	
II. DIAKARTA UTARA													
1.	Kepulauan Seribu	2	27	1.688	31	2.260	6	4	13	5	11	4.047	
2.	Penditerangan	2.071	2.443	13.946	4.572	47.923	1.613	276	9.337	437	569	83.187	
3.	Tandjung Priok	1.142	3.514	13.222	4.017	43.597	3.356	166	10.601	423	451	80.489	
4.	Kedua	1.055	3.734	26.307	6.205	46.590	2.161	190	14.543	541	575	101.901	
DITUNJAH :		4.270	9.718	55.163	14.825	140.370	7.136	636	34.494	1.406	1.606	269.624	
III. DIAKARTA BARAT													
1.	Tengah	223	630	12.127	1.640	20.777	397	57	1.979	116	407	38.333	
2.	Grand Puncak	4.216	3.475	23.596	9.524	44.184	3.505	334	17.011	667	763	107.075	
3. Tawanan													

3. Tanamari	4.823	1.880	10.816	5.152	37.790	3.356	199	8.523	341	319	73.199
4. Tambora	2.187	7.885	21.404	6.367	46.726	1.909	301	11.084	525	546	98.934
5. Kebon Dyeruk	55	816	8.714	1.115	14.421	118	356	1.155	85	294	27.129
D J U M L A H :	11.504	14.686	76.657	23.598	163.898	9.285	1.247	39.752	1.734	23.39	344.680

IV. DIAKARTA SELATAN											
1. Tebet	1.622	1.902	23.537	8.026	32.788	2.167	196	10.343	717	538	81.838
2. Setia Budi	1.536	2.646	28.191	9.242	31.397	2.483	248	14.458	727	645	91.573
3. Mpr. Panyuan	634	982	18.424	3.831	19.265	668	86	4.875	365	328	49.458
4. Pasar Minggu	285	991	10.542	2.149	26.367	307	92	1.517	109	342	42.701
5. Kelurahan Lina	945	1.607	21.369	5.184	29.698	1.002	153	6.939	258	347	67.502
6. Kelurahan Baru	3.231	1.667	17.120	6.411	38.220	2.860	220	13.471	386	593	84.179
D J U M L A H :	8.253	9.795	119.183	34.843	177.735	9.489	995	51.603	2.562	2.793	417.251

V. DIAKARTA TIMUR											
1. Matraman	1.719	1.376	16.011	5.527	27.066	1.444	285	8.748	616	457	63.249
2. Pulogadung	1.405	1.318	21.676	4.873	31.680	1.907	212	8.003	443	661	72.178
3. Duren Tiga	3.293	1.473	34.621	6.084	35.718	2.800	198	9.062	521	716	94.486
4. Kramadiga	840	881	10.575	2.819	28.713	1.132	89	2.691	201	224	48.165
5. Pasar Rebo	162	464	3.753	1.707	24.341	207	40	1.266	161	219	32.320
D J U M L A H :	7.419	5.512	86.636	21.010	147.518	7.490	824	29.770	1.942	2.277	310.398

Djakarta, 30 Agustus 1971.
 PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA DIJAKARTA
 Sekretaris,
 ttd.
 (SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

PANTIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH KRISTUS IBUKOTA JAKARTA
Dit. Insm. Beresid No. 13 Tlp. 53418
J A K A R T A

HASIL PENGHITUNGAN SUARA UNTUK KEANGGOTAAN
D.P.R. WILAYAH PEMILIHAN LUAR Negeri.

NOMOR URUT	KOTA/WILAYAH TEMPAT PENGUNGUTAN SUARA	HASIL PENGUNGUTAN SUARA JANG DIPEROLEH MASING-MASING PARTAI/COLAKAR										DITUNJAH SUARA
		KATOLIK	P.S.LL	N. U.	PARMUS	COLAKAR	PARMUSO	MARBA	P.N.L.	PERTI	IP-KI	
1.	CANBERA	50	9	16	34	176	59	7	53	3	5	412
2.	TOKYO/CORIE	53	23	32	89	289	58	7	90	4	8	648
3.	HONGKONG	20	2	6	2	249	33	2	27	0	2	343
4.	BANGKOK/TAIPEH	27	7	13	6	166	33	3	19	0	0	274
5.	NOUMEA	18	80	121	113	389	22	10	354	17	30	1.154
6.	MANILLA	27	8	3	8	317	201	4	32	2	29	631
7.	RANGOON	4	0	00	0	29	2	1	3	0	0	39
8.	NEW DELHI/INDIA	3	2	6	6	39	1	0	10	0	4	71
9.	ISLAMABAD/PAKISTAN	1	0	2	7	41	0	0	4	0	0	55
10.	KUALALUMPUR	655	174	272	398	1.369	50	6	224	26	20	3.154
11.	SINGAPORE	63	22	157	88	1.187	89	3	55	11	17	1.692
12.	CAIRO	1	2	68	114	33	2	3	2	3	1	229
13.	DIEDDAH	0	26	288	220	27	0	0	6	6	1	574
14.	DAE-ES-SALAM	0	1	0	4	45	0	0	1	0	0	16
15.	WINA	22	0	0	8	10	16	4	13	0	2	110
16.	BRUSSEL	95	2	0	7	74	27	3	26	0	0	234
17.	LONDON	17	3	8	22	82	13	0	16	2	4	167
18.	ROMA	24	3	1	3	25	10	1	19	0	0	86
19.	DEEN HAG/AMSTERDAM	483	46	52	136	554	534	22	190	6	9	2.032
20.	PARIS	31	5	6	18	115	13	3	33	1	3	228
21. BORN												

21.	BONN	234	4	15	31	272	139	13	99	0	7	814
22.	STOCKHOLM	5	2	3	3	19	11	1	34	1	2	71
23.	BERN	28	0	2	5	68	14	0	25	0	1	143
24.	PRAGA	2	2	5	10	44	8	13	21	1	6	112
25.	MOSCOW	9	3	4	12	61	9	4	35	1	1	139
26.	BEOGRAD	7	1	3	5	46	5	4	14	0	1	86
27.	WASHINGTON	3	3	8	32	137	33	0	59	0	6	307
28.	CANADA	4	0	1	5	47	35	0	14	0	3	146
29.	RIO DE JANEIRO	44	2	0	1	21	14	1	13	1	0	97
30.	PANAMA	11	150	151	184	124	17	5	351	41	33	1.067
31.	WELLINGTON	16	0	2	13	16	12	0	7	0	1	67
32.	NEW YORK	20	6	8	13	121	32	2	17	0	1	220
33.	SAN FRANCISCO	31	2	2	3	35	35	5	22	0	1	136
34.	HAMBURG	72	6	6	18	164	39	7	47	1	7	367
35.	TEHERAN	0	0	0	0	18	0	1	4	0	0	23
36.	LAO-LAIN T.P.S. JANG											
37.	DEBTUNG TOL. 22-7-1971	35	15	20	41	238	25	5	36	1	4	410
	TABARAN SUARA PER											
	ROB DARI LYMA, LIBANON											
	DAN YAMAN VIDE EKAWAT											
	EX CALIBO NO. 013/BU/1-	0	0	4	7	0	2	0	0	0	0	13
38.	CA/71 TOL. 21 DEJUL 1971.											
	SIARA DARI KADOU-CD											
	NABRY DAN BUDROS AL-											
	BES JANG DEBTUNG TOL.	1	1	1	5	28	1	0	3	0	0	40
	9 AGUSTUS 1971.											
D J U M L A H :		2.174	612	1.286	1.631	6.670	1.599	140	1.958	128	209	16.407

DIKARTAKA, 31 AGUSTUS 1971.
PANTIA PERILIHAN DAERAH/DAERAH CRUSUS
IBUKOTA DIKARTAKA
Sawitara,
td.
(SRETJPTO VIRROKARDIONO M.Sc.)

**RESUME : DAFTAR RIWAYAT HIDUP TIALON-TIALON TERDAHULU
ANGGOTA DENGAN PERAKHIRAN RABULI DAERAH
TINGKAT I D.C.I. DIKARTIKA.**

NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	PARTAI/ GOLKAR	NO. URUT TIALON	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT RUMAH	DIENIS KEJAMIN	AGAMA	KAWIN/ TIDAK KAWIN	PEKER- DIAAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	DIABATAN DALAM ORGANISASI	KETE- RANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Drs. M.B. SAMOSIR	KATOLIK	1	Tapanuli 1-11-1939	Dj. Dr. Muwardi VI/ 504 Grogol, Dikarta.	Laki-laki	Rum Ka- toik	Tidak ka- win	Anggota DPRD D.C.I. Dikarta.	Serdjana lengkap Sospol.	Ketua Komda Katolik D.C.I. Dikarta.	
2.	SUDIAT NATAKUSU- MAH	P.S.I.I.	1	Tasikmalaja 14-11-1926	Dakuh Pinget Gg. 4, 0015705 Tanah Abang.	Laki-laki	Islam	Kawin	s.d.a.	H.I.S.	Ketua wilayah PSII D.C.I. Dikarta.	
3.	Drs. H.A. SIATIBI	N. U.	1	Tangerang 17-12-1935	Dj. Jos Sudarso, Lorong 100/48, Tandjung Priok.	Laki-laki	Islam	Kawin	s.d.a.	Serdjana I.A.I.N wv.	Ket. Kolaborasi N.U. wv. D.C.I. Dikarta.	
4.	MASIRAFAH Z.A. NOER Nj.	N.U.	2	Dikarta 8-7-1940	Dj.an Prapanjti II/5 Kelurahan Baru.	Peremp.	Islam	Kawin	s.d.a.	S.M.A. KI. II	Sekretaris wv. Muslimat D.C.I.	
5.	MUHASIM N.	N.U.	3	Dikarta 12-2-1939	Dj. Melati IV, Rt.006/02 Tengkereng.	Laki-laki	Islam	Kawin	Kep. PCAN I.A.I.N Tk. III. IV tahun.			
6.	H. ABD. MAJID TOJIB.	N.U.	4	Dikarta 10-12-1937	Kuningan Timur Rt.001/04 Dikarta	Laki-laki	Islam	Kawin	Pedagog	S.M.A. 3th.	Sekretaris N.U. D.C.I. Dikarta.	
7.	MOH. JUSUF ABDUL- LAH	N.U.	5	Dikarta 28-4-1928	Dj. Talang 14 B. Rt.001/03 Dikarta.	Laki-laki	Islam	Kawin	Adjudan Negara Mentri KESRA.	S.M.P.	Ket. I.G.P.A. N.S.O.R. D.C.I. Dikarta.	

8. HASBULLAH AMIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	HASBULLAH AMIN	N.U.	6	Djakarta 2-7-1939	Djil. Dewi Surtika No. 87, Djakarta.	Laki-laki	Islam	Kawin	Direktur CV. HASTI	S.M.A. C.	Ketua Utama GP. ANSOR DCL.	
9.	MUHAMMAD ALIE	N.U.	7	Djakarta 22-6-1924	Klender Selatan 33, Djakarta.	Laki-laki	Islam	Kawin	Pedagog	H.L.S.	Ketua I N.U. Tjah Djatid-gara.	
10.	MARUF AMIN B.A.	N.U.	8	Tangerang 11-3-1943	Gg. 27/41 Djil. Deil. Tandjung Ploek.	Laki-laki	Islam	Kawin	Dinas Penerangan Agama	Sardjana Muda	Wk. Ketu wil. DCL Djakarta.	
11.	AGUS SALIM	PARMUSI	2	Pangkalan Brandan 3-8-1927	Djil. Timah A. 12, Galur, Djakarta.	Laki-laki	Islam	Kawin	Pet. Dtl. Peningkatan Agama Dep. Agama	Fak. Ekonomi Tk. III	Ket. II PP. Iktan Karyawan Muhammadiyah.	
12.	HARTONO MARDJO-NO S.H.	PARMUSI	3	Tegal 17-7-1937	Djil. Hidup Baru 008/07 Gandara Utara Djakarta.	Laki-laki	Islam	Kawin	Peg. PT. Pengolahan Tupperware	Sardjana Hukum U.I.	Ket. PARMUSI Tjah. Keloporan Baru.	
13.	NJ. HUDININGSIH WIRJADI	GOLKAR	1	Purbolinggo 22-12-1933	Tebet Timur Dalam I/No. 11 A. Djakarta.	Peremp.	Islam	Kawin	Perati Karika Chandra Kirana	B. I English	Ketua Sekai Politik K. Chandra P.D. V.	
14.	F.M.T. RADJAGUK-GUK	GOLKAR	32	Maara Tapanuli Utara 23-1-41	Djil. Tjideg Barai No. 113, Djakarta.	Laki-laki	Protestan	Tidak Kawin	Peg. Dep. Peningkatan Rukun.	Fakultas Ekonomi U. I.	Sekretaris Utama Golkar DCL Djakarta.	
15.	PINANTUN HUTASOT GOLKAR		3	Siborong-borong 29-7-1935	Djil. Kamp. Melaju Kejil III/24 Djatidgana	Laki-laki	Kristen	Kawin	Angg. DPR-D. D.C.L. Djakarta.	S.M.A.	Ketua Sekter Golkar DCL	

16. EPPENDI JUSUF S.H.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	EFFENDI JUSUF S.H.	GOLKAR	4	Djakarta 14-3-1942	Dj. Let. Djén. Suprapto K. 20 Djakarta.	Laki-laki	Islam	Kawin	Anggota DPRD-GR. DCL Djakarta	Sardjana Hu- kum U.I.	Sekretaris Sektor Golkar.	
17.	KA.FRA.WI	GOLKAR	5	Medan 4-4-1919	Kamp. Kepu Gg. VI/218 Kelurahan Bungur.	Laki-laki	Islam	Kawin	Pemilihan Lantikol, CPM (manduani)	Sekret-School DCL Djaaya.	Kino Hankam DCL Djaaya.	
18.	ROBERTO BANGUN	GOLKAR	6	Kabanglabe 5-9-1939	Dj. Karet Tengin Gg. H. Latif I Rt.009/06, Djakarta.	Laki-laki	Kristen	Kawin	Wirawan	Fak. Publika- tik Tk. III	Anggota Pengu- ru Sektor Golkar.	
19.	H. MOCHTAR ZAKA- RIA S.H.	GOLKAR	7	Bina 25-4-1930	Hangektir I/VII Kebajoran Baru.	Laki-laki	Islam	Kawin	Kep. Biro DM. dan E. Pem. DCL Djakarta.	Sardjana Hu- kum Djaabaja.	-	
20.	HADJI SAYALI S.H.	GOLKAR	8	Djakarta 1-7-1930	Dj. Kamat Raja 44, Djakarta.	Laki-laki	Islam	Kawin	Biro Hukum statif Muda Hampir VII	Sardjana Hu- kum Jengap.	Sekt. I Kiro- Hankam Sek- ter Golkar.	
21.	HENRY SIREGAR	GOLKAR	9	Tapenuli 27-4-1926	Dj. Panglima Polim 87, Djakarta.	Laki-laki	Protestan	Kawin	Anggota DPRD DCL	Fak. Hukum Tk. I.	Ketua Sektor Golkar DCL	
22.	ARIFIN TOBING	GOLKAR	10	Medan 26-3-1923	Dj. Kadi 37, Pav. Djakarta.	Laki-laki	Islam	Kawin	DPH, Sektor Golkar Pusat.	MULO	DPH, Sektor Golkar Pusat.	
23.	DMS. SOEDIOKO	GOLKAR	11	Gresik 7-5-1927	Kompl. Perumahan Dep. Pembudayaan Pangozan Djakarta.	Laki-laki	Islam	Kawin	Dep. Perin- dustaan	Sardjana Ekonomi U.I.	Anggota Kongo- ro.	
24.	NI. SAMSIDAR MORRADO	GOLKAR	12	Bengkalis 1-1-1917	Dj. Bonang 7, Djakarta.	Petemp.	Islam	Kawin	Anggota DPRD-GR DCL.	SCKP/GOS- VO	Bendahari I Purwati Pusat.	

25. NI. CHAERANI HIDAYAT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.	NI CHAERANI HIDJAJAT	GOLKAR	13	Djakarta 21-3-1928	Dj. Madjapahit No.9A, Djakarta.	Peremp.	Islam	Kawin	-	Kweek School Kl. II	Angg. Darna Perini (Peng- ru Pusat Perini)	
26.	I MADE SUMINDA SH.	GOLKAR	14	Semerinda 25-10-1940	Dj. Prati Asuhan 36, Bidaratjina	Laki-laki	Hindu	Kawin	Angg. DPR- D. DCL	Sardjana Hu- kum U. Au- langs.	Angg. Persada- Djakarta.	
27.	HASANUDDIN ANIS	GOLKAR	15	Bengkulu 27-7-1939	Dj. H. Samanhudi 63, Pw. Rt.007/05	Laki-laki	Islam	Kawin	Dagang.	Akademik Pim- pian Nisag Un- djalbeja Tx.III	Angg. Biro In- forman Bagpu Sektor Golkar DCL	
28.	PARULIAN SILALAH	PARKINDO	2	Pangkalan 25-5-1939	Gg. Buntit I Rt.007/ 02 Map. Prapatn.	Laki-laki	Protestan	Kawin	Wartawan	Peng. Tungg Publistik Tk. II.	Sekretaris DPD Parkindo DCL	
29.	DRS. JUSUF MERUKH	P.N.L.	1	Pulau Roti 10-6-1934	Dj. Darmawansa II/A /2 Kebajoran Baru.	Laki-laki	s.d.a.	Kawin	Dir. Djen. Agraria Dep. Kerjasama Dalam Ne- geri.	Sardjana Fak. Ket. Kerjasama Untag.	Ket. I DPD PNI DKI Djaja-	
30.	JONATHAN BISMA MANOPPO	P.N.L.	2	Djakarta 11-10-1928	Kel. Rawasari Rt.008/ 04 Tjempaka Putih	Laki-laki	Islam	Kawin	Ket. Jaja- san Pendidid- an Pantje- sila. Djakarta.	S.M.A.C 1954	Ket. IV DPD PNI DKI Djaja.	
31.	ANDJAR SISWOJO IR	P.N.L.	3	Tuban 27-4-1932	Kompl. Perumahan Bappenas Tomang Rt.013/07	Laki-laki	Islam	Kawin	Peg. Bappe- nas.	Sardjana Fak. Pertanian Gama.	Ket. IV Ket. Dep. Ekubang DPD PNI DKI Djaja.	

32. KURBANAWA HALIMAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	KURMANA BALIKAN	P.N.I.	4	L.R. Rizman (Nobando) 18-1957	Kongsi Persebooks BIII/37 B To Prik.	Laki-laki	Islam	Keruh	Ing. Dya, Tumpang Koro- dho.	S.M.A. C	Pengajaran P.N.I. To Prik.	

Diponegoro, 23 Agustus 1971.
PANTIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH KRUSUD INUKOTA DIKALAMTA
Sekretaris,
td.
(SERTIFIKAT WIRASADJONO M.Sc.)

**DAFTAR : KLASIFIKASI UMUR TJALON-TJALON TERPILIH
KEANGGOTAAN DPRD TK. I. D.C.I. DJAKARTA.**

NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	PARTAI	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR (tahun)	KETE- RANGAN
1.	NJ. SJAMSIDAR MOERD- NO	GOLKAR	Bengkalis, 1-1-1917	54 tahun	
2.	KAFAWI	GOLKAR	Madura, 4-4-1919	52 tahun	
3.	ARIFIN TOBING	GOLKAR	Medan, 26-3-1923	48 tahun	
4.	MUHAMAD ALIE	N. U.	Djakarta, 22-6-1924	47 tahun	
5.	HENRY SIREGAR	GOLKAR	Tapanuli, 27-4-1926	45 tahun	
6.	SUDJA'T NATAKUSUMAH	P.S.I.I.	Tasikmalaja, 14-11-1926	45 tahun	
7.	DRS. SOEDJOKO	GOLKAR	Gresik, 7-5-1927	44 tahun	
8.	AGUS SALIM	PARMUSI	P. Brandan, 3-8-1927	44 tahun	
9.	NJ. CHAERANI HIDAJAT	GOLKAR	Djakarta, 21-3-1928	43 tahun	
10.	MOH. JUSUF ABDULLAH	N. U.	Djakarta, 28-4-1928	43 tahun	
11.	JONATHAN BISMA MA - NOPPO	P.N.I.	Djakarta, 11-10-1928	43 tahun	
12.	H. MOCHTAR ZAKARIA S.H.	GOLKAR	Bima, 25-4-1930	41 tahun	
13.	H. SA'ALI S.H.	GOLKAR	Djakarta 1-7-1930	41 tahun	
14.	ANDJAR SISWOJO IR.	P.N.I.	Tuban, 27-4-1932	39 tahun	
15.	NJ. HUDININGSIH WIRJADI	GOLKAR	Purbolinggo, 22-12-1933	38 tahun	
16.	DRS. JUSUF MERUKH	P.N.I.	Pulau Roti, 10-6-1934	37 tahun	
17.	PINANTUN HUTASOIT	GOLKAR	Siborong-borong, 29-7-1935	36 tahun	
18.	DRS. H.A. SJATIBI	N. U.	Tangerang, 17-2-1935	36 tahun	
19.	H. ABD. MADJID TOJIB	N. U.	Djakarta, 10-2-1937	34 tahun	
20.	HARTONO MARDJONO SH	PARMUSI	Tegal, 17-7-1937	34 tahun	
21.	KURBIANA HALIMAN	P.N.I.	Lb. Rukam, 18-8-1937	34 tahun	
22.	MUHASJIM N.	N. U.	Djakarta, 12-2-1939	32 tahun	
23.	PARULIAN SILALAH	PARKINDO	Pangukuran, 25-5-1939	32 tahun	
24.	HASBULLAH AMIN	N. U.	Djakarta, 2-7-1939	32 tahun	
25.	HASSANUDIN ANIS	GOLKAR	Bengkulu, 27-7-1939	32 tahun	
26.	ROBERTO BANGUN	GOLKAR	Kabandjahe, 5-9-1939	32 tahun	
27.	DRS. M.B. SAMOSIR	KATOLIK	Tapanuli, 1-11-1939	32 tahun	
28.	MASJRAFAH Z.A. NOEH NJ.	N. U.	Djakarta, 8-7-1940	31 tahun	
29.	I MADE SUWINDA S.H.	GOLKAR	Samarinda, 25-10-1940	31 tahun	
30.	F.M.T. RADJAGUKGUK	GOLKAR	Tapanuli Utara, 23-1-1941	30 tahun	
31.	EFFENDI JUSUF S.H.	GOLKAR	Djakarta, 14-3-1942	29 tahun	
32.	MA'ROEF AMIN B.A.	N. U.	Tangerang, 11-3-1943	28 tahun	

Djakarta, 23 Agustus 1971.

PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

Sekretaris,

ttd.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

R E S U M E : Riwayat Hidup Tabungdon diangkat untuk Keanggotaan D.P.R.D. Tingkat I Daerah Cirebon Ibadat Dikerta.

No. Urut	Nama Lengkap	Tempat dan Tanggal Lahir	Alamat Rumah	Disela Kelemban	Agama	Kawin/ tidak kawin	Pendidikan	Pendidikan Tinggi	Dibaca dan O-ment	Ket- ragaan
1.	Dr. Med. J.W. SUWARNNO	Solo 6 Mei 1941	Dj. Tebet Timur Baya No. 23 Dikerta.	laki-laki	Roma Katolik	Tidak kawin	Dokter	Dokter, lulusan Fak. Kedokteran Uthr. Indonesia.	W. IRI	
2.	M. MOEFFRENI MOEWIN	Rangkasbitung 12 Feb. 1921.	Dj. Jund/Adiwastika SH No. 29. Dikerta.	laki-laki	Islam	Kawin	Aang. DPRD-GR DCI Dikerta.	AMS (selama) Pendidikan Per- wira Peta.	W. IRI	
3.	R. GUNAWAN BUDIPRA- WITO, LETNYAN KOLOMEL.	Mediam 27-12- 1924.	Dj. Raduwati SH IX/29, Dikerta.	laki-laki	Islam	Kawin	WAAS-3/PEBS Kodam V/Djaya.	MULO hama 1942/43.	-	
4.	KOESTAMTO WIRIODA- HARDIO MAJLALUT (C) NRP 2333/P.	Sembaja 20 Mei 1935	Dj. Aspin Bader No. 10A, Kempli Aji Dremeng/ Tjuning, Dikerta.	laki-laki	Islam	Kawin	PWA HUKBAR Daerah 3/Aang. DPRD-GR DCI.	31 Pendidikan IKIP TE. IV.	-	
5.	LET. KOL. BAMBANG GUL- NAWAN WIBISONO NRP. 21702B.	Kutoarjo 14 Maret 1929	Dj. Tempatan III/I, Hengpan Mulu Dikerta.	laki-laki	Islam	Kawin	Karyawan ABRI Daerah DCI Aang. DPRD-GR, DCI Dikerta.	S.M.A. C (nama)	Pemb. Uta- ma Bidang Sempit DPR	
6.	ETIE ANANG SUDJANA KOLOMEL INF. NRP 11465	Medjalele 17. Oktober 1920.	Dj. Koeshtan Baya No. 3, Dikerta.	laki-laki	Islam	Kawin	Aang. DPRD-GR DCI Dikerta.	Sekolah Para di Richmond, Syd- ney dt. 1944.	Pemb. Uta- ma Bidang Sempit DPR	
7.	A. WIRATNO RIUSOATNO- DDO, KOMISARIS BESAR POLISI	Klaten, 14 Djuil 1923.	Dj. Widjaja XVI/168Ro. Bntu.	laki-laki	Katolik	Kawin	Post/Aang. DPRD-GR DCI Dikerta.	Sardjana Hikmah I PK. UI.	Aang. Pengk- 45 DCI Dik- erta.	
8.	DR. MUHAMMAD USMAN WIRADIMADDA, LET. KOL. TITULER (U)	Bandung, 4 Ok- tober 1929	Dj. Raduwati No. 2, Penga- lan Udan Udan Halim Per- dantuwana, Dikerta.	laki-laki	Islam	Kawin	Kep. Dinas Rochad Ko- dam V/Djaya.	Sardjana Hikmah LALIN.	Direkt. Uag. Pendidikan pd. Prodi- dan Tinggi Dikerta.	

Dikerta, 8 September 1971 P.P.D. DCI.

**DAFTAR : KLASIFIKASI UMUR TALON-TALON JANG DIANGKAT
UNTUK KEANGGOTAAN D.P.R.D. TINGKAT I D.C.I.
DIAKARTA.**

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT/TGL. LAHIR	UMUR/tahun	KETE- RANGAN
1.	ETJE ANANG SUDJANA KOLONEL INF. NRP. 11465	Medjela, 17 Oktober 1920.	51 tahun	
2.	M. MOEFFRENI MOEMIN	Rangkesbitung, 12 Februari 1921.	50 tahun	
3.	A. WIRATNO PUSPOATMODJO S.H. KOMISARIS BESAR POLISI.	Klaten, 14 Dyuhi 1923.	48 tahun	
4.	R. GUNAWAN BUDIPRAWITO LETNAN KOLONEL.	Madium, 27 Desember 1924.	47 tahun	
5.	LETNAN KOLONEL BAMBANG GUNAWAN WIBISONO	Kutoarjo, 14 Maret 1929	43 tahun	
6.	Drs. MUHAMMAD USMAN WIRADI- MADJA LET.KOL. TTT (U).	Bandung, 4 Oktober 1929	42 tahun	
7.	KOESTAMTO WIRJODIHARDJO MAJ.LAUT (C) NRP. 2333/P.	Surbaja, 20 Mei 1935.	36 tahun	
8.	Dr. Med. J.W. SUWARTO	Solo, 6 Mei 1941.	30 tahun	

Djakarta, 8 September 1971
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA DIJAKARTA.
Sekretaris,
ttd.
(SOETJIPTO WIROSARDIONO M.Sc.)

UNTUK KEMERIAHAN SIAJIA

KEITH HARVEY POUNDING MEETS BOB DOLAN

enklaturon Malween Pambani. Inqilabon (1979) qalabon shb

Unruh Avenue DFR-1 (1 Jarv Rulph: 32 over

Donlan, Amanda 01N9-9C1 Jmo ... 22

(LET ME KNOW HOW YOU FEEL)

Data hasil pemilihan untuk D.P.R. & D.P.R.D. D.C.I. Djakarta.

SUARA PERS DALAM PEMILU TAHUN 1971.

Menghadapi Pemilihan Umum didalam suatu negara demokrasi adalah wadjar apabila surat2 kabar menjatakan sikap politiknya jang dituangkan dalam tadjuk2 rentjana, ulasan dan podjok. Surat kabar memberikan dukungan terhadap tjalon jang disokongnja atau terhadap siapa jang menurut hematnja patut didukungnja. Demikian sebaliknya surat2 kabar memberikan suara tidak setuju baik dalam pemberitaan maupun dalam tadjuk rentjana dan podjok korannya terhadap hal2 jang menurut hematnja kurang wadjar.

Hal ini menunjukkan bahwa surat kabar mempunyai kewajiban moral buat membimbing pematjanja kemana mesti memilih. Pada umumnya surat kabar di Indonesia tidak bersikap netral dengan hanya menjerahkan demikian saja kepada pematjanja, tetapi hampir semua surat kabar memberikan bimbingan, pendjelasan dan pengarahan kepada sidang pematjanja dengan sikap politik jang didukungnja.

Pada umumnya surat2 kabar di Indonesia mempersoalkan dalam ruangan tadjuk rentjana tentang perlunya memperjuangkan terus Demokrasi, menegakkan hak2 Azasi sebagai suatu persjaraan untuk melanjutkan usaha pembangunan. Tetapi sedjauh itu surat2 kabar di Indonesia tidak ada keinginan untuk mempersoalkan tentang "tjara pemilu diselenggarakan" seperti apa jang disangsikan oleh sementara pihak bahwa penyelenggaraan Pemilu 3 Djuli 1971" ada ketjurangan, tidak bebas dan rahasia dsb".

Sebagai gambaran jang mendekati "Suara Pers" pada umumnya, dapatlah diikuti dalam tjukilan tadjuk2 rentjana, ulasan dan penempatan pemberitaannya bagi beberapa surat kabar jang terbit di Ibukota tentang Pemilu baik pada waktu penyelenggaraannya maupun tahap2 persiapan sebelumnya.

1. T a d j u k .

ANGKATAN BERSENDJATA

Djakarta, 4 Djuli 1971.

PEMILU TELAH BERDJALAN DENGAN LANTJAR DAN TERTIB

Hari Sabtu j.l. rakjat berdujun2 telah menudju kekotak suara. Pada umumnya Pemilu telah berdjalan dengan lantjar, tertib, aman dan tentram. Sesuai dengan prinsip2 langsung, umum, bebas dan rahasia. Kita wadajib bersjukur bahwa pemilihan umum tahun 1971 telah sukses, dalam artikata

semua telah berdjalan setjara wadjar, praktis tanpa gangguan² serta aral melintang.

Semua itu adalah tentu karena besarnya kesadaran rakjat. Oleh karena itu sewadarnjalalah kalau kita menjampaiakan terima kasih sebesar²nja kepada rakjat pada umumnja, jang telah mendengarkan seruan² jang berwadjib untuk mematuhi peraturan² demi keselamatan rakjat. Kesadaran rakjat jang tinggi ini, hendaknja djuga menggugah kesadaran para pemimpinnja.

PELOPOR BARU

Djakarta, 3 Djuli 1971.

SELAMAT TUNAIKAN HAK PILIH

Besok tanggal 3 Djuli. Tanggal dimana kita menunaikan hak pilih. Tanpa ketjuali, bagi setiap jang punja hak pilih akan melakukan kewadjiban memberikan suaranya. Dengan djalan menusuk tanda gambar jang telah mendjadi pilihannja. Bebas, rahasia dan demokratis. Segala petundjuk dan pedoman tentang tjara bagaimana melakukan hak pilih, rasanja sudah tjukup dapat dimengerti. Hingga menurutinja setjara seksama tenang dan tertib. Sehingga Pemilu jang kita laksanakan sekarang sebagai salah satu tuntutan rakjat berdjalan setjara teratur, tertib, demokratis, tanpa gangguan apapun djuga. Rasanja kita wadjib bersjukur terhadap Tuhan.

API PANTJASILA

Djakarta, 2 Djuli 1971.

HARI KE KOTAK SUARA

Setelah melalui persiapan beberapa tahun, masa kampanye dua bulan dan suasana tenang tudjuh hari, maka achirnja besok hari Sabtu tanggal 3 Djuli 1971 Pemilihan Umum jang kedua semendjak Kemerdekaan Nasional kita perdjuaangkan seperempat abad jl. akan dilaksanakan. Djarak antara Pemilu jang pertama pada tahun 1955 dan Pemilu jang kedua besok, memang tjukup pandjang. Praktis memakan lebih dari separoh usia Negara Kesatuan kita dewasa ini.

Tetapi sekalipun terlambat, sangat terlambat kalau akan ditilik menurut spel-regelsnja suatu tatatjara kehidupan bernegara jang benar² demokratis. Kita rakjat Indonesia seluruhnja pada hakekatnja sangat bergembira bahwa tahun ini djuga berkesempatan untuk menjatakan pendapat dan

keinginannya sebagai bangsa yang merdeka, diperoleh kembali dalam suatu pemberian dan pemungutan suara yang langsung, umum, bebas dan rahasia.

2. Berita dan Komentar.

PEDOMAN

Djakarta, 5 Djuli 1971.

PRESIDEN GEMBIRA LIHAT KESADARAN RAKJAT

Presiden Soeharto menyatakan kegembiraannya melihat kesadaran rakyat Indonesia yang tinggi dalam memenuhi hak dan kewajibannya melaksanakan tugas nasional, mendatangi tempat2 pemungutan suara. "Apa yang saya lihat dan saksikan bagi saya sangat menggembirakan dimana pelaksanaan pemungutan suara berdjalan dengan lantjar" -- demikian kesan2 Kepala Negara setelah melakukan penindjauan dan melihat djalannya Pemilu diberbagai tempat di Ibukota.

ANGKATAN BERSENDJATA

Djakarta, 5 Djuli 1971.

MENPEN MALAYSIA: PEMILU R.I. JANG TERBAIK LANTJAR TANPA PAKSAAN.

Hasil pemilihan umum yang baru selesai itu memberikan harapan besar kepada Indonesia khususnja dan Asia pada umumnya, demikian kesan Menteri Penerangan Malaysia Tan Sri Chazali Shafei yang telah menjaksikan pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

"Kalau ada orang berpendapat bahwa the best news" adalah apabila ada kekatjauan dan kerusuhan. Sedang pemilihan umum di Indonesia ini bagi saya merupakan berita yang terbaik, karena telah berdjalan lantjar dan tertib tanpa kekatjauan.

ANGAKATAN BERSENDJATA

Djakarta, 10 Djuli 1971.

KETUA MPRS A.H. NASUTION: PEMILU BERDJALAN MENURUT ISI TAP-2 MPRS.

Ketua MPRS Djenderal Abdul Haris Nasution menyatakan, pemungutan suara tanggal 3 Djuli jl. berlangsung sesuai dengan ketetapan2 MPRS, jaitu

langsung, umum, bebas dan rahasia.

Djika ada berita2 penekanan, paksaan, intimidasi dan lain2nja, maka sebaiknya hal tersebut dilokalisir, dibawa ke Pengadilan djika bersifat kriminil, dan ke Lembaga Legislatif atau Eksekutif djika masalahnja bersifat pelanggaran administratif dan disiplin.

3. Tentang hasil2 Pemilu.

PEDOMAN (kolom)

Djakarta, 13 Djuli 1971.

NU BELUM BENARKAN HASIL2 PEMILU

Partai2 Nahdlatul Ulama (NU) belum dapat membenarkan kesimpulan yang telah diambil dan diumumkan mengenai hasil2 Pemilu sekarang ini, hingga ada penyelesaian terhadap pelanggaran2 tsb. diatas.

Demikian pernyataan PBNU yang ditanda tangani oleh Sekdjen H. Jusuf Hasjim.

ANGKATAN BERSENDJATA (editorial)

Djakarta, 12 Djuli 1971.

PEMIKIRAN JANG KEDALUARSA

Golongan muda dalam PBNU kemarin telah memanggil suatu konferensi pers bagi wartawan dalam dan luar negeri. Mereka mengeluarkan suatu pernyataan 7 pasal yang menjimpulkan bahwa NU belum dapat membenarkan hasil sementara pemungutan suara, hingga ada penyelesaian terhadap pelanggaran.

KOMPAS (tadjuk)

Djakarta, 9 Djuli 1971.

HASIL PEMILU TETAP SJAH

Apakah hasil pemilihan umum 3 Djuli 1971 akan digugat ?

Tadinja, sudah tak memikirkan soal itu sebab kenjataanja menurut laporan, pemilu 3 Djuli umumnya berdjalan dengan tertib dan lantjar.

Karena adanja berbagai protes, chususnja dari NU dan PNI timbul pertanyaan, apakah hasil pemilu akan digugat kesjahannja? Menurut hemat kita tidak.

Memang benar, NU dan PNI mengajukan protes, kritik dan laporan tentang berjalannya Pemilu yang kurang wajar disana-sini. Tetapi protes dan kritik itu menurut hemat kita tidak akan sampai pada sikap mempe-soalkan sah tidaknya Pemilu 3 Djuli.

Apakah sikap mereka itu tertjela? Menurut hemat kita tidak. Begitulah selalu prosesnya politik. Lagi pula kitapun, mengakui adanya fungsi idiiil dalam protes2 itu. Jakni mengkoreksi yang kurang lurus. Menumbuhkan keberanian politik.

Sebaliknya jangan sampai kita memperoleh gambaran salah. Biarpun ada protes dan protes itu beralasan, hasil pemilu 3 Djuli tetap berlaku. Dan protes politik akan dikembangkan menurut hasil2 itu. Maka jangan hanya terpaku pada yang sudah terdjadi sehingga bisa ketinggalan.

ANGAKTAN BERSENDJATA (kolom)

Djakarta, 14 Djuli 1971.

PRESIDEN SOEHARTO: TAK ADA ALASAN MERAGUKAN SAHNJA PEMILU.

Presiden Soeharto menegaskan, bahwa sahnja hasil2 Pemilu yang baru lalu tidak boleh dipersoalkan atau diganggu gugat karena pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku yang disusun setjara demokratis oleh wakil2 rakyat di DPR.

Ditegaskan oleh Presiden, tidak ada alasan atau dasar apapun djuga yang meragukan sahnja Pemilu.

PEDOMAN (kolom).

Djakarta, 9 Djuli 1971.

PEMILU SAH TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT

Menteri Dalam Negeri Amir Machmud menegaskan hari Djum'at bahwa pemilihan umum yang baru lalu ini sah menurut hukum dan peraturan2 yang berlaku, sehingga karenanya tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun.

4. Tentang Golput.

INDONESIA RAYA (kolom).

Djakarta, 25 Djuni 1971.

GOLPUT: PEMILIHAN UMUM BUKAN SASARAN UTAMA

Golongan Putih di Djakarta mengatakan bahwa sasaran utama gerakan-nya bukan peristiwa pemilihan umum itu sendiri, melainkan lebih ditekankan pada mendidik orang menjadi kreatif. Jaitu mendidik orang untuk tidak hanya terpukau kepada alternatif2 yang ada, melainkan selalu berusaha mencari alternatif2 lain yang lebih baik, demikian penjelasan dari Waluya DS. Dikatakannya selanjutnya bahwa perhatian mereka pada pemungutan suara tanggal 3 Djuli jad. terbatas hanya pada segi pendidikannya saja. Seperti membuat orang menjadi takut dengan memakai intimidasi bukan merupakan pendidikan yang baik. Ini membuat orang menjadi takut memiliki pendapat sendiri, suatu hal yang berlawanan sekali dengan tujuan menciptakan manusia kreatif.

Menurut Golput dengan atau tanpa pemilihan umum yang sekarang atau 10 tahun lagi, hanya ada kekuatan efektif yang banyak menentukan nasib negara ini, yakni Angkatan Bersenjata. Kemauan baik dan keterbukaan sikap dari kekuatan inilah yang akan banyak menentukan wajah bangsa ini dikemudian hari. Kelompok manapun yang menang dalam pemilihan umum tahun ini tidak akan mengubah setjara berarti kenyataan itu.

API PANTJASILA (kolom)

Djakarta, 7 Djuni 1971.

GOLPUT NEGATIF

Golongan Putih yang memproklamirkan diri dan mengajak rakyat untuk tidak memilih dalam pemilihan umum bukan saja naif tapi juga sudah merupakan satu gerakan yang negatif dan destruktif, demikian pernyataan Ketua Umum Generasi Pembangunan Indonesia Hary Malonda.

Setjara pribadi orang boleh saja tidak memilih, tetapi kalau menghasut massa untuk tidak memilih itu namanya mengatjau. Sebenarnya masih banyak kegiatan yang produktif dan positif bagi orang2 yang tergabung dalam Golput, kalau memang benar mereka mau mengabdikan kepada bangsa dan negara.

ANGKATAN BERSENDJATA (kolom)

Djakarta, 8 Djuni 1971.

MENDAGRI AMIRMACHMUD: GOLPUT AKAN DITINDAK

Menteri Dalam Negeri Amir Machmud mengatakan kepada wartawan bahwa apa jang menamakan dirinja Golongan Putih (Golput) mengganggu kestabilan politik, sebab itu akan ditindak tegas. Pendjelasan Mendagri ini diberikan ketika ditanja pendapatnja tentang Golput.

PEDOMAN (kolom)

Djakarta, 11 Djuni 1971.

ALI SADIKIN TENTANG GOLPUT.

Adanja golongan Putih sebagai golongan moralis di Ibukota dihargai sekali dan baik, -- demikian Pd. Gubernur KDCI Ali Sadikin. Tetapi ikutnja mereka dalam kegiatan2 jang mempengaruhi masjarakat agar mengikuti sikap dan pendirian mereka, itu sudah menjalahi sembojan mereka mendjadi penonton jang baik.

Tjara jang dilakukan Golput menempelkan plakat2, selebaran2 didjalan2 umum sudah berarti ikut kegiatan politik. Bukan gerakan moralis lagi karena ikut terdjn dalam kampanje untuk kepentingan golongannja.

ANGAKATAN BERSENDJATA (kolom)

Djakarta, 12 Djuni 1971.

KEGIATAN GOLPUT DAPAT TIMBULKAN KEGONTJANGAN

Kadapol Metro Djaya Brigdjen. Pol. Drs. Widodo Boedidarmo mengatakan bahwa tindakan "Golput" dengan menempelkan tanda2 gambar tidak sjah dan mengadakan komunikasi dengan subjek Pemilu lainnja adalah merupakan kegiatan politik jang tidak menguntungkan pengamanan dan suksesnja Pemilu.

Kegiatan2 jang dilakukan oleh Golput tsb. dapat menimbulkan kegontjangan2 jang dapat mengganggu kestabilan keadaan jang djustru harus dipelihara bersama. Maka adalah kewadjiban bagi Polri untuk mengambil tindakan bagi tiap usaha jang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum.

5. Tentang Djihad dalam Pemilu.

INDONESIA RAYA (Tadjuk rentjana)

Djakarta, 28 Djuni 1971.

DJIHAD DAN DJIHAD.

Beberapa waktu jang lalu soal djihad djadi ramai dibitjarakan. Setelah seorang pemimpin partai mengeluarkan pernjjataan, bahwa partainja akan melakukan djihad djika tak menerima baik hasil pemilihan umum, maka Presiden Soeharto memberikan djawaban bahwa djihad jang demikian akan dibalas pula dengan djihad oleh ABRI bersama rakjat.

Rupanja kaget sendiri melihat akibat pernjjataan hendak berdjihad mereka, maka berbagai pemimpin partai lalu memberikan arti kata Arab itu jang tidak selalu berarti satu peperangan, kata mereka. Akan tetapi baik pula diingat bahwa perang djihad djuga termasuk dalam makna perkataan ini. Ketika Darul Islam dahulu melakukan pembrontakan, maka perang djihad merupakan salah satu sembojan mereka jang kuat. Karena dalam perang djihad didjandjikan sjorga bagi mereka jang tewas melakukan perang demikian.

Dalam memanasnja suhu pemilihan umum baik kiranja orang berhati-hati memakai istilah2 jang punja konotasi kepertjajaan agama.

Salah salah pakai bisa menimbulkan emosi dan kefanatikan agama, jang dapat membawa bentjana. Moga2 dengan ketegasan sambutan jang diberikan Presiden Soeharto, maka mereka jang tjoba2 hendak main dengan api djihad bisa sadar kembali.

API PANTJASILA (kolom)

Djakarta, 28 Mei 1971.

KOMANDO DJIHAD SABOT PEMILU

Apa jang menamakan dirinja Komando Djihad beberapa hari jl. telah menjebarkan pamlet gelap jang distencil hampir satu setengah folio tsb. berhasil disita oleh alat2 keamanan Ibukoa. Pamlet itu antara lain berisi hasutan kepada masjarakat untuk memboikot Pemilihan Umum.

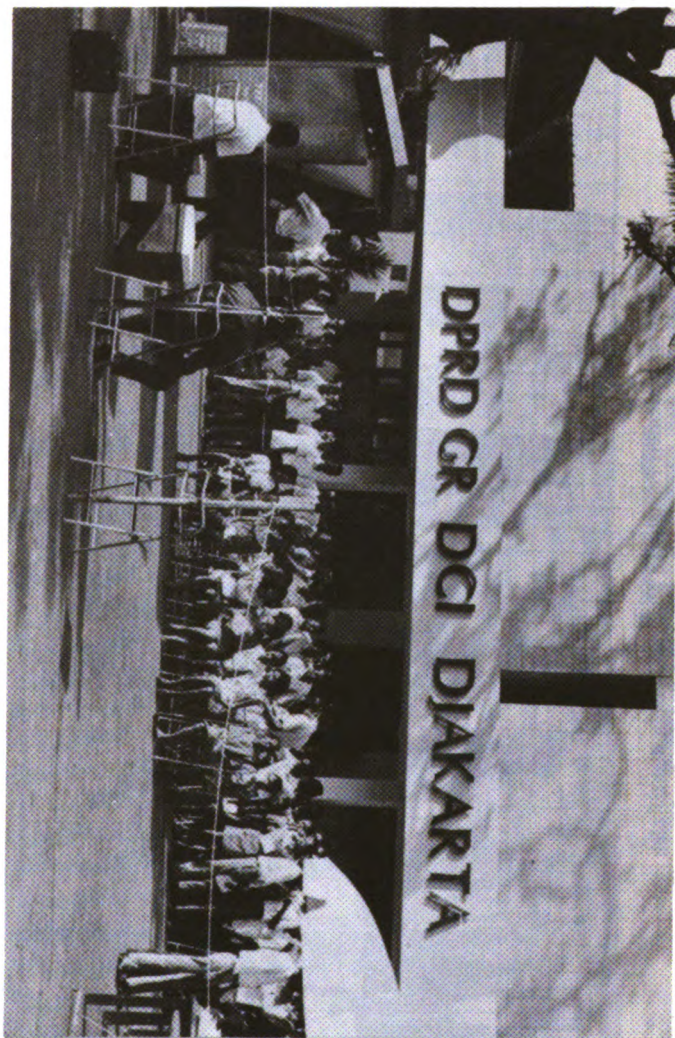
INDONESIA RAYA (kolom)

Djakarta, 11 Djuni 1971.

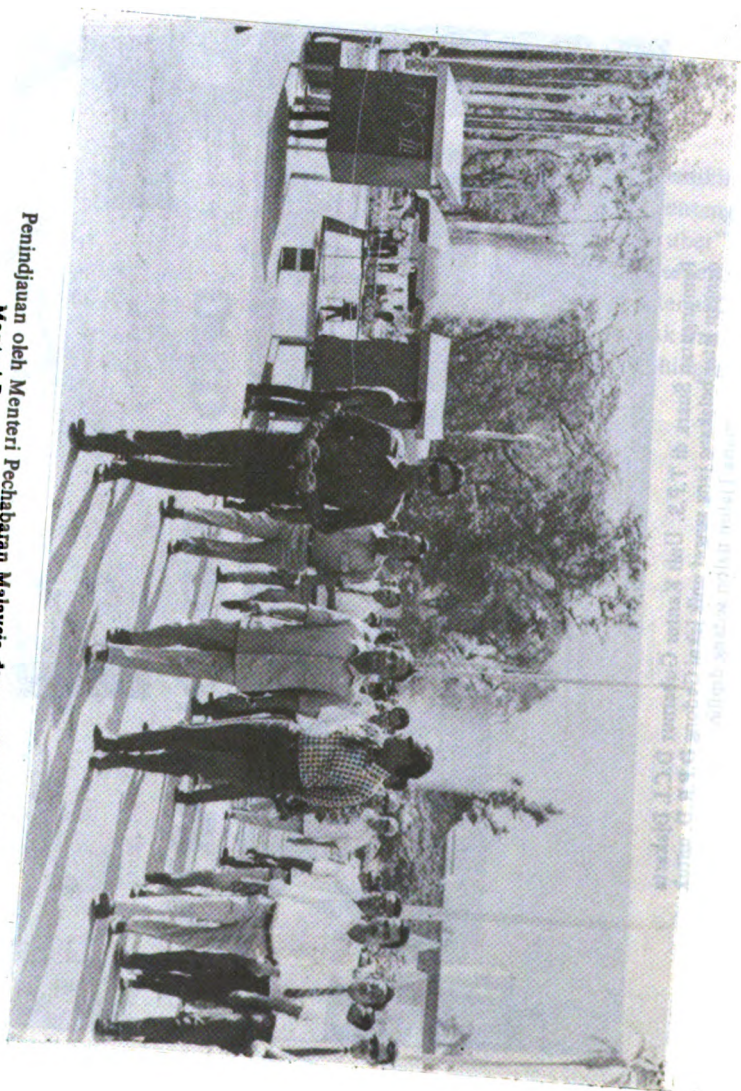
**ALI SADIKIN: JANG MAU DJIHAD2AN PERGI
KEHUTAN SADJA.**

Memberikan ulasan mengenai djihad, Gubernur KDCI Ali Sadikin menegaskan bahwa: Djika memang masih ada orang jang berfikiran tentang djihad2an “silahkan orang itu pergi ke hutan, kalau perlu nanti kita uber”. Tetapi diingatkan, hendaknja djangan membawa2 rakjat, karena hal seperti itu dapat menimbulkan korban pada rakjat, sedangkan orang jang berteriak2 djihad biasanja senang2 dikota. Disesalkan masih adanja orang jang tidak mau beladjar dari sedjarah dimana sudah 25 th. kita hidup seperti itu, hingga rakjat dan ABRI sudah muak.

Djakarta, 13 September 1971.



Pemungutan Suara di T.P.S. Unit Kantor Gubernur D.C.I. Diakarta dengan latar belakang jang sangat unik yakni Gedung D.P.R.D. untuk mana Tjalon-tjalon sedang dipilih.



Peninjauan oleh Menteri Pecharan Malaysia dengan diantar oleh
Menteri Penerangan R.I. ke T.P.S.-T.P.S.

三、

Year	Number of cases	Number of deaths	Number of cases per 100,000 population	Number of deaths per 100,000 population
1990	1,000	100	10.0	1.0
1991	1,100	110	11.0	1.1
1992	1,200	120	12.0	1.2
1993	1,300	130	13.0	1.3
1994	1,400	140	14.0	1.4
1995	1,500	150	15.0	1.5
1996	1,600	160	16.0	1.6
1997	1,700	170	17.0	1.7
1998	1,800	180	18.0	1.8
1999	1,900	190	19.0	1.9
2000	2,000	200	20.0	2.0
2001	2,100	210	21.0	2.1
2002	2,200	220	22.0	2.2
2003	2,300	230	23.0	2.3
2004	2,400	240	24.0	2.4
2005	2,500	250	25.0	2.5
2006	2,600	260	26.0	2.6
2007	2,700	270	27.0	2.7
2008	2,800	280	28.0	2.8
2009	2,900	290	29.0	2.9
2010	3,000	300	30.0	3.0
2011	3,100	310	31.0	3.1
2012	3,200	320	32.0	3.2
2013	3,300	330	33.0	3.3
2014	3,400	340	34.0	3.4
2015	3,500	350	35.0	3.5
2016	3,600	360	36.0	3.6
2017	3,700	370	37.0	3.7
2018	3,800	380	38.0	3.8
2019	3,900	390	39.0	3.9
2020	4,000	400	40.0	4.0

FORGETTING LITTLE THINGS

[illegible]

.....

● ● ● ● ●

1. **Subject:** [Blank]
 2. **Section:** [Blank]
 3. **Page:** [Blank]
 4. **Date:** [Blank]
 5. **Time:** [Blank]

BERITA ATJARA
HASIL PEMERIKSAAN PANITIA PEMERIKSAAN DAERAH
TINGKAT I D.C.I. DJAKARTA.

Pada hari ini, Kamis tanggal 16 September 1971, kami Panitia Pemeriksaan Daerah Tingkat I D.C.I. Djakarta, jang terdiri dari :

1. **WIRJADI S.H.**
Anggota merangkap Ketua
2. **AKBP Drs. JUNUSI JUSUF**
Anggota merangkap Wakil Ketua
3. **SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.**
Anggota merangkap Sekretaris
4. **H. AJATULLAH SALEH**
Anggota
5. **MOEFFRENI MOE'MIN**
Anggota

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta No.0715/III/2/1971 tanggal 4 Agustus 1971, telah melakukan pemeriksaan terhadap tjalon-tjalon jang dinjatakan terpilih untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat I DCI Djakarta tahun 1971 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta No.0805/III/2/1971 tentang Penetapan Daftar Tjalon Terpilih untuk Keanggotaan DPRD DCI Djakarta, dengan hasil sebagai berikut:

I. Dari Partai Katolik.

Djumlah tjalon terpilih 1 (satu) orang. Tjalon terpilih tersebut telah memenuhi persjaraan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang dan/atau Peraturan jang berlaku.

II. Dari Partai Sjarikat Islam Indonesia.

Djumlah tjalon terpilih 1 (satu) orang. Tjalon terpilih tersebut telah memenuhi persjaraan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang dan/atau Peraturan jang berlaku.

III. Dari Partai Nahdlatul Ulama.

Djumlah tjalon terpilih 8 (delapan). orang. Kesemuanja tjalon terpilih telah memenuhi persjaraan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang dan/atau Peraturan jang berlaku.

IV. Dari Partai Muslimin Indonesia.

Djumlah tjalon terpilih 2 (dua) orang. Seorang tjalon terpilih bernama Zainal Arifin Datuk tidak menerima penetapan terpilihnja karena ia menerima penetapan terpilihnja untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat tahun 1971. Sebagai penggantinya adalah tjalon jang namanja tertjantum nomor 3 dalam Daftar Tjalon Tetap, jaitu : Hartono Mardjono S.H. Kedua tjalon terpilih telah memenuhi persjaraan sebagaimana ditentukan oleh Undang2 dan/atau Peraturan jang berlaku.

V. Dari Golongan Karya.

Djumlah tjalon terpilih 15 (lima belas) orang. Kesemuanja tjalon terpilih telah memenuhi persjaraan sebagaimana ditentukan oleh Undang2 dan/atau Peraturan jang berlaku.

VI. Dari Partai Kristen Indonesia (Parkindo).

Djumlah tjalon terpilih 1 (satu) orang. Tjalon terpilih tersebut bernama: Simatupang T.A.M.Drs. tidak menerima penetapan terpilihnja karena ia menerima penetapan terpilihnja untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat tahun 1971. Sebagai penggantinya adalah tjalon jang namanja tertjantum nomor 2 dalam Daftar Tjalon Tetap, jaitu : Parulian Silalahi. Tjalon terpilih pengganti ini telah memenuhi persjaraan sebagaimana ditentukan oleh Undang2 dan/atau Peraturan jang berlaku.

VII. Dari P.N.I.

Djumlah tjalon terpilih 4 (empat) orang. Kesemuanja tjalon terpilih telah memenuhi persjaraan sebagaimana ditentukan oleh Undang2 dan/atau Peraturan jang berlaku.

----- Hasil pemeriksaan tersebut diatas merupakan hasil pemeriksaan terachir. Dengan demikian sedjumlah 32 (tiga puluh dua) orang tjalon jang telah dinjatakan terpilih untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat I DCI Djakarta telah memenuhi persjaraan sebagaimana ditentukan oleh Undang2 dan/atau Peraturan jang berlaku dan Pedoman Kerdja Panitia Pemeriksa jang tertjantum dalam Kawat Mendagri/Ketua PPI No. No. 101/22/71 tanggal 27 Djuli 1971.

----- Demikianlah Berita Atjara ini dibuat dengan sebenarnja dengan mengingat sumpah djabatan masing-masing.

Ketua/Anggota,

Sekretaris/Anggota,

ttd.

ttd.

(W I R J A D I S.H.)

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc).

Wakil Ketua/Anggota,

Anggota,

ttd.

ttd,

(AKBP Drs. JUNUS JUSUF)

(H. AJATULLAH SALEH)

Anggota,

ttd,

(.M MOEFFRENI MOE'MIN)

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH D.C.I. DJAKARTA**

Nomor : 0805/III/2/1971.

tentang

**PENETAPAN DAFTAR TJALON TERPILIH UNTUK KEANGGOTAAN
DPRD TK. I. DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA;**

- Menimbang** : Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 107 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 jo pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) P.P. No. 1 tahun 1970 perlu segera menetapkan Daftar Tjalon Terpilih untuk Keanggotaan DPRD Tingkat I Daerah Khusus Ibukota Djakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 10 tahun 1964 tentang Penegasan Djakarta sebagai Ibukota Negara R.I. ;
2. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang No. 6 tahun 1969.;
3. Undang-Undang No. 2 PNPS tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Djakarta ;
4. Keputusan Presiden No. 22 tahun 1971 tentang Pembinaan Pemerintah D.C.I. Djakarta Raya ;
5. Undang-Undang No. 15 tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 ;
6. Undang-undang No. 16 tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970 ;
7. Radiogram Mendagri/Ketua PPI tanggal 7 Djuli 1971 No. 101/22/1971.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- I Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Tjalon Terpilih untuk Keanggotaan D.P.R.D. Tingkat I Daerah D.C.I. Djakarta.**
- II. Segala sesuatu akan diperbaiki/disempurnakan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekurangan/kekeliruan tentang isi Surat Keputusan ini.**
- III. Mengumumkan Daftar Tjalon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam ad. I diatas dimasing-masing Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah, P.P. Kota, P.P.S. dan ditempat-tempat lain dalam Wilayah D.C.I. Djakarta sesuai dengan ketentuan pasal 51 P.P. No. 1 tahun 1970.**
- IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di : D j a k a r t a .

Pada tanggal : 7 September 1971.

**Pd. GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH D.C.I. DJAKARTA**

ttd.

(ALI SADIKIN)
Letnan Jenderal KKO.

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Jth.
1. Menteri Dalam Negeri/Ketua P.P.I.,
 2. Para Wakil Kepala Daerah DCI Jakarta,
 3. Para Wakil Pemimpin DPRD—GR DCI Jakarta,
 4. Ketua Muspida DCI Jakarta,
 5. Para Anggota Muspida DCI Jakarta,
 6. Para Anggota PPD DCI Jakarta,
 7. Para Anggota BPH DCI Jakarta,
 8. Sekda/Ass. Sekda DCI Jakarta,
 9. Ketua Harian BP—BPP DCI Jakarta,
 10. Para Kepala Direktorat/Biro/Inspektorat DCI Jakarta,
 11. Para Walikota,
 12. Para Kepala Dinas/Kantor/Djawatan DCI Jakarta,
 13. Jang bersangkutan,
 14. Pimpinan Parpol/Golkar DCI Jakarta,
 15. Para Tjamat,
 16. Para Lurah,
 17. Arsip .-
-

**LAMPIRAN : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia
Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta.
Nomor 0805/III/2/1971 tanggal 7 September 1971.**

Nomor Urut	Nama Tjalon Terpilih	Nomor Urut	Nama Organisasi	Keterangan
1.	Drs. M.B. SAMOSIR	1		
2.	SOEDIA'I NATAKUSUMAH	1	Partai Katolik	
3.	Drs. H.A. SIATIBI	1	Partai Sjarikat Islam Indonesia	
4.	MASJRAFAH Z.A. NOEH Nj.	2	Partai Nahdlatul Ulama	
5.	MUHASJIM	33	s.d.a.	
6.	H. ABD. MADJID TOJIB	4	s.d.a.	
7.	MOH. JUSUF ABDULLAH	5	s.d.a.	
8.	HASBULLAH AMIN	6	s.d.a.	
9.	MUHAMAD ALIE	7	s.d.a.	
10.	MA'ROEF AMIN B.A.	8	s.d.a.	
11.	AGUS SALIM	2	Partai Muslimin Indonesia	
12.	HARTONO MARDJONO S.H.	3	s.d.a.	
13.	NJ. HUDININGSIH WIRJADI	1		
14.	F.M.T. RADJAGUKGUK	2	Golongan Karya	
15.	PINANTUN HUTASOIT	3	s.d.a.	
16.	EFFENDI JUSUF S.H.	4	s.d.a.	
17.	KAFRAWI	5	s.d.a.	
18.	ROBERTO BANGUN	6	s.d.a.	

Nomor Urut	Nama Tjalon Terpilih	Nomor Urut	Nama Organisasi	Keterangan
19.	H. MOCHTAR ZAKARIA S.H.	7	Golongan Karya s.d.a.	
20.	HADJI SA'ALI S.H.	8		
21.	HENRY SIREGAR	9		
22.	ARIFIN TOBING	10		
23.	Drs. SOEDJOKO	11		
24.	NJ. MOERDJONO SJAMSIDAR	12		
25.	NJ. CHAERONI HIDAJAT	13		
26.	I. MADE SUWINDA S.H.	14		
27.	HASSANUDDIN ANIS	15		
28.	PARULIAN SILALAH	2		
29.	Drs. JUSUF MERUKH	1	Partai Kristen Indonesia	
30.	JONATHAN BISMA MANOPPO	2	Partai Nasional Indonesia	
31.	ANDJAR SISWOJO Ir.	3	s.d.a.	
32.	KURBIANA HALIMAN	4	s.d.a.	

Pd. GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH D.C.I. DIAKARTA

titd.

(ALI SADIKIN)

Letnan Djenderal KKo.

VIII
PERBEKALAN
DAN
PENGAWASAN

DAFTAR ISI

BAB VIII.

Halaman

PERBEKALAN DAN PENGAWASAN.

1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD DCI Jakarta No. 434/III/2/1970 tanggal 27 April 1970 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Kelengkapan Pemilu.	1183
2. Surat PPD DCI Jakarta No. 563/III/3/1970 tanggal 5 Juni 1970 tentang Penawaran Kotak Kartu Pemilih dan Kotak Kartu Suara.	1186
3. Tata-tertib dalam memilih Surat Penawaran untuk memborong pembuatan Kotak Kartu Pemilih tanggal 15 Juni 1970.	1189
4. Surat PPD DCI Jakarta No. 741/III/3/1970 tanggal 18 Agustus 1970 tentang Penawaran Kotak Surat Suara.	1190
5. Pedoman, Petunjuk khusus untuk tender Kotak Surat Suara PPD DCI tanggal 14 September 1970	1192
6. Surat PPD DCI Jakarta No. 752/III/3/1970, tanggal 22 Agustus 1970, Penawaran kendaraan beroda dua/beroda empat	1196
7. Pedoman serta tata-tertib tender borongan bangunan dan perlengkapan PPD DCI Jakarta tanggal 12 Februari 1971	1200
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta No. 911/III/3/1970 tanggal 17 Oktober 1970 tentang Penggunaan Kendaraan Dinas untuk kegiatan Pemilu di Wilayah	1204
9. Instruksi Gubernur KDH/Ketua PPD DCI Jakarta No. 0149/III/2/71 tanggal 15 Februari 1971 tentang Kendaraan Dinas Pemilu DCI Jakarta	1206
10. Instruksi Gubernur KDH/Ketua PPD DCI Jakarta No. 0614/III/3/1971 tanggal 27 Juni 1971 tentang Kapal Motor Pemilu DCI Jakarta	1208
11. Instruksi Gubernur KDH/Ketua PPD DCI Jakarta No. 0684/III/3/1971 tanggal 15 Juni 1971 tentang Penggunaan Kendaraan Dinas untuk kegiatan Pemilu di Wilayah	1209
12. Instruksi Gubernur KDH/Ketua PPD DCI Jakarta No. 0783/III/3/1971 tanggal 31 Agustus 1971 tentang Inventarisasi alat-alat motor, alat-alat telekomunikasi, meubulair	1212
13. Daftar Inventarisasi Barang Perlengkapan PPD DCI Jakarta	1214
	1181

	Halaman
14. Surat Tugas PPD DCI Djakarta No. 0107/III/2/1971, tanggal 9 Pebruari 1971 tentang Pengetjekan Model A1, AA, AA1, A2 dan A3, Pengetjekan peralatan/perbekalan, pengetjekan pertanggungan djawab keuangan dan hal-hal lain jang dianggap perlu	1223
15. Beberapa laporan Hasil Pengetjekan/Pengawasan di Wilayah .	1226
16. S.K. Gubernur KDH DCI. No. Ab.2/1/5/1970 tanggal 2 Nopember 1970 tentang Penundjukan Badan Pengawasan Keuangan Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta	1228
17. Surat Inspektorat Pengawasan Dan Pemeriksaan Keuangan DCI Djakarta No. 165/VI/Kep. IPPK/SK/71 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Administrasi Keuangan PPD DCI Djakarta (Lampiran Berita Atjara No.150/IV/Kep. IPPK/SK/1971)	1241

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA
PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA.**

No. 434/III/2/70.

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN PERLENGKAPAN PENJELENG-
GARAAN PEMILIHAN UMUM DI WILAJAH DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA PEMILIHAN
DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

- Menimbang** : Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Maret 1970 No. 106 tahun 1970 tentang kotak kartu Pilih dan kotak surat suara, perlu segera membentuk Panitia Pengadaan alat-alat perlengkapan dimaksud guna penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan tugas dan kewajibannya seperti tersebut dalam surat keputusan ini.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 15 tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1970.;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. undang-undang No. 6 tahun 1969.
3. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 jo. undang-undang No. 5 tahun 1969 ;
4. Keputusan Presiden No. 3 tahun 1970 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1970 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 34 tahun 1970 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 108 tahun 1970 ;

8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta tanggal 14 April 1970 No. Aa. 18/3/1970 tentang Pembentukan kembali Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
- I. Membentuk Panitia Pengadaan Perlengkapan guna penje-
lenggaraan Pemilihan Umum di Wilayah DCI Jakarta sebagai
berikut :
 1. Susunan keanggotaan Panitia Pengadaan Perlengkapan
dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Ketua/Anggota	: Soetjipto Wirosardjono M. Sc.
b. Sekretaris/Anggota	: Drs, Max Sumaraw.
c. Anggota	: 1. Burhanuddin Hs. 2. Gunarto S.H. 3. Muchroddi 4. Djisman Sitorus B.A. 5. R. Pandji Muradi.
 2. Tugas dan kewajiban Panitia tersebut adalah sebagai be-
rikut :
 - a. Mengadakan penawaran umum/terbatas pada pengu-
saha yang berdomisili diwilayah DCI Jakarta.
 - b. Meneliti dan menundjuk Perusahaan jang bonafide
untuk mengajukan pesanan alat-alat jang diperlukan
untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - c. Melaporkan segala kegiatan jang telah diselenggarakan
kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta.
 - II. Membebaskan biaya kegiatan Panitia tersebut pada Anggaran
keuangan Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta.
 - III. Hal-hal jang belum diatur dan apabila terdapat kekeliruan
dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian dan
diperbaiki dengan surat keputusan tersendiri.
 - IV. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : D j a k a r t a.
Pada tanggal : 27 April 1970.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

Tjap/ttd.

(ALI SADIKIN)

Major Djenderal KKo.

TEMBUSAN :

1. Jth. Panitia Pemilihan Indonesia
2. Jth. Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta.
3. Jth. Sekda/Ass. Sekda.
4. Jth. Sekretariat PPD DCI Djakarta.
4. Jth. Direktorat I/Pemerintahan
5. Jth. Sekretariat PPD DCI Djakarta.
6. A l a s .

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
DJL. IMAM BONDJOL 13 TELP. 53418
D J A K A R T A .**

Nomor	: 563/III/3/1970.	Djakarta, 5 Djuni 1970.
Lamp.	: 1 (satu) lbr.	
Perihal	: Penawaran Kotak Kartu Pemilih.	

KEPADA JTH.

DI

D J A K A R T A .

- A. 1. Dalam rangka pelaksanaan pendaftaran pemilih diwilayah DCI Djakarta diperlukan Kotak Kartu Pemilih sebanyak 1.663 (seribu enam ratus enam puluh tiga) buah.
Sehubungan dengan itu maka para pengusaha yang berdomisili di Djakarta dan sanggup memborong pembuatan Kotak tersebut dapat mengajukan permohonan/penawaran harga.
2. Para Pengusaha yang berminat mengajukan penawaran harus memenuhi ketentuan2 seperti tersebut pada bagian B dan C.
3. Bentuk, ukuran dan bahan yang dipakai adalah seperti disebut dalam lampiran I.
4. Pembuatan Kotak Kartu Pemilih sebanyak 1.663 buah harus selesai dan diserahkan kepada Sekretariat PPD DCI Djakarta cq. Biro Perbekalan 30 hari sesudah penanda tanganan kontrak
5. Biaja pembuatan Kotak Kartu Pemilih dibebankan kepada anggaran Pemilu.
- B, 1. Pengadjuan penawaran harga dihitung harga tiap satu kotak dengan menjebutkan bahan2 yang dipakai sampai barang2 ter-

- sebut diserahkan digudang/ditempat Sekretariat PPD DCI Djakarta.
2. Surat penawaran dibuat diatas kertas bermeterai Rp. 25, jang ditanda tangani oleh Direksi Perusahaan atau Kuasa penuh perusahaan jang dikuatkan oleh Notaris.
 3. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan Kotak Kartu Pemilih DCI Djakarta dimasukkan didalam amplop tertutup rapi dan dilak.
 4. Pada sampul penawaran tidak diperkenankan diberi tanda/tulisan apapun.
 5. Surat penawaran dimasukkan dalam kotak jang telah disediakan dialamat Djalan Imam Bondjol 13 Djakarta.
- C.
1. Pengusaha jang hendak mengajukan penawaran harus bersedia mengisi formulir jang disediakan oleh Panitia rangkap 3 (tiga) dan dapat diambil di Djalan Imam Bondjol 13 Djakarta.
 2. Formulir jang telah diisi oleh Perusahaan dilampirkan mendjadi satu pada surat penawaran didalam amplop surat penawaran.
 3. Panitia hanja meneliti/memilih surat2 jang ada dalam Kotak penawaran dan memenuhi ketentuan2 pengadjuan surat penawaran.
 4. Penentuan pilihan dilakukan atas dasar sjarat2 technis, mutu, waktu penjelesaian, harga, bonafiditas dan lain2 ketentuan jang paling menguntungkan bagi Instansi Pemerintah.
 5. Bila dianggap perlu Panitia dapat mengirimkan wakilnja untuk mengadakan penindjauan ke perusahaan, pabrik atau gudang dari pengusaha jang bersangkutan untuk menilai bonafiditasnja.
 6. Pemasukan surat2 penawaran dapat dilakukan pada waktu djam kerdja dan ditutup tanggal 14 Djuni 1970.
 7. Penawaran pembuatan Kotak Kartu Pemilih jang memenuhi akan dipanggil setelah 3 hari tanggal penutupan penawaran.

**PANITIA PENGADAAN PERLENGKAPAN
PENJELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DIWILAJAH DCI DJAKARTA**

Ketua,
ttd.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

**FORMULIR JANG HARUS DIISI SEHUBUNGAN
DENGAN PENAWARAN UMUM PENJELENGGARAAN
PEMBUATAN KOTAK KARTU PEMILIH DAN
KOTAK SURAT SUARA.**

1. Nama Perusahaan :
2. Tanggal dan No. Akte Pendirian
Perusahaan :
3. Nama Direksi/Kuasa Direksi :
4. Alamat Perusahaan :
 - a. Kantor : Telp. No.
 - b. Tempat Kegiatan : Telp. No.
 - c. Gudang : Telp. No.
5. a. Idzin Perusahaan :
- b. Idzin Pemborong DCI Djakarta :
- c. Pekerdjaan borongan jang telah
 pernah dilakukan (lampiran sa-
 linan kontrak).
6. Bank Relasi/garansi :
7. Lampiran daftar/djumlah alat-alat
 mesin jang dipakai dalam pembuat-
 an kotak dimaksud :
- 8; Kapasitas produksi sehari/sebulan :
9. Djumlah tenaga kerdja jang diper-
 gunakan. :
10. lain-lain :

Djakarta, ...1970.

Diisi Oleh :
Direksi/Kuasa Direksi Perusahaan,

.

(.....)

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/
DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA
DJALAN IMAM BONDJOL 13
TELEPON 53418**

**TATA TERTIB DALAM MEMILIH SURAT PENAWARAN
UNTUK MEMBORONG PEMBUATAN KOTAK KARTU
PEMILIH.**

1. Panitia melakukan tugasnja setelah Ketua menetapkan bahwa djumlah Anggota jang hadir tjukup/memenuhi sjarat.
2. Untuk Surat Penawaran sebelum dibuka terlebih dahulu harus disaksikan oleh semua Anggota Panitia jang hadir.
3. Kotak Surat Penawaran dibuka oleh Ketua atau salah satu diantara Anggota jang hadir jang ditundjuk oleh Panitia.
4. Semua Surat Penawaran jang ada didalam Kotak Surat Penawaran ditjatat dan jang tidak memenuhi sjarat penawaran tidak dipertimbangkan.
5. Surat-surat penawaran jang memenuhi sjarat penawaran disusun dalam daftar model B. II. dan selandjutnja diadjukan pada sidang Panitia untuk mendapatkan penetapan.
6. Pengusaha jang surat penawarannja terpilih oleh Panitia segera diadakan panggilan untuk merundingkan pelaksanaannja.
7. Pedoman Panitia dalam mengambil Keputusan ialah : sjarat-sjarat penawaran dan formulir jang telah disampaikan pada Panitia.

Djakarta, 15 Djuni 1970.

**PANITIA PENGADAAN PERLENGKAPAN
PENJELENGGARAAN PEMILU DCI
DJAKARTA**

**Ketua,
tjap/ttd.**

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
JALAN IMAM BONDIJOL 13 JAKARTA
TELEPON 53148.**

Nomor : 741/III/3/1970.
Lampiran : —
Perihal : PENAWARAN
KOTAK SUARA.

Djakarta, 18 Agustus 1970.

Kepada Jth.:

di

DJAKARTA.

- A. 1. Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum diwilayah DCI Djakarta diperlukan KOTAK SUARA sebanyak 16.000 buah. Sehubungan dengan itu maka para pengusaha yang berdomisili di Djakarta dan sanggup memborong pembuatan Kotak tersebut dapat mengajukan permohonan/penawaran harga.
2. Para Pengusaha yang berminat mengajukan penawaran harus memenuhi ketentuan-ketentuan seperti tersebut pada Bagian B dan C.
3. Bentuk ukuran dan bahan yang dipakai adalah seperti disebut dalam lampiran I.
4. Pembuatan Kotak Surat Suara sebanyak 16.000 buah harus selesai dan diserahkan kepada Sekretariat PPD DCI Djakarta cq Biro Perbekalan & Perhubungan 4 bulan sesudah penanda tangan kontrak.
5. Biaya pembuatan Kotak Surat Suara dibebankan kepada Anggaran Pemilu.
- B. 1. Pengaduan penawaran harga dihitung harga tiap satu Kotak dengan menjebutkan bahan-bahan yang dipakai sampai barang tersebut diserahkan digudang/ditempat Sekretariat PPD DCI Djakarta di Djakarta.
2. Surat penawaran dibuat diatas kertas bermeterai Rp. 25, jang

- ditanda tangani oleh Direksi Perusahaan atau Kuasa Penuh perusahaan yang dikuatkan oleh Notaris.
3. Surat Penawaran ditunjukkan kepada Panitia Pengadaan Kotak Surat Suara DCI Djakarta dimasukkan didalam amplop tertutup rapi dan dilak.
 4. Pada sampul penawaran tidak diperkenankan diberi tanda/tulisan apapun.
 5. Surat Penawaran dimasukkan dalam Kotak yang telah disediakan dialamat Djalan Imam Bondjol 13 Djakarta.
- C.
1. Pengusaha yang hendak mengajukan penawaran harus bersedia mengisi formulir yang disediakan oleh Panitia rangkap 3 (tiga) dan dapat diambil di Djalan Imam Bondjol 13 Djakarta.
 2. Formulir yang telah diisi oleh Perusahaan dilampirkan menjadi satu pada surat penawaran didalam amplop surat penawaran.
 3. Panitia hanya meneliti/memilih surat-surat yang ada dalam Kotak penawaran dan memenuhi ketentuan-ketentuan pengajuan surat penawaran.
 4. Penentuan pilihan dilakukan atas dasar syarat-syarat teknis, mutu, waktu penyerahan harga, bonafiditas dan lain-lain ketentuan yang paling menguntungkan bagi Instansi Pemerintah.
 5. Bila dianggap perlu Panitia dapat mengirimkan wakilnya untuk mengadakan peninjauan ke Perusahaan, pabrik atau gudang dari pengusaha yang bersangkutan untuk menilai bonafiditasnya.
 6. Pemasukan surat-surat penawaran dapat dilakukan pada waktu jam kerja dan ditutup tanggal 10 September 1970.
 7. Penawaran pembuatan Kotak Surat Suara yang memenuhi syarat akan dipanggil setelah 7 hari tanggal penutupan penawaran.

PANITIA PENGADAAN PERLENGKAPAN
PENJELANGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DIWILAJAH DCI DJAKARTA.

KETUA,

ttd.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

PANITIA PEMILIHAN DAERAH/
DAERAH KHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA
DJALAN IMAM BONDJOL 13
TELEPON 53418

**PEDOMAN PETUNJUK-PETUNJUK KHUSUS
UNTUK TENDER KOTAK SUARA P.P.D. I
D.C.I. DJAKARTA**

Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan yang diputuskan dalam rapat Panitia Pengadaan Perlengkapan pada tanggal 12 September 1970 maka dibawah ini disusun ketentuan-ketentuan untuk menertibkan penyelenggaraan Tender Kotak Suara sebagai berikut :

Pedoman penyelenggaraan Tender Kotak Suara terhadap perusahaan-perusahaan bonafide yang berdomisili di Djakarta.

Pedoman-pedoman dan petunjuk-petunjuk administratif untuk Tender Kotak Suara.

1. Perusahaan Berdomisili di Djakarta (Pabrik Perusahaan/Kantor harus lengkap).
2. Bonafiditas Perusahaan harus dilengkapi dengan surat-surat/asli/foto copy.
3. Setelah diadakan penjelidikan/penelitian oleh Team Pengadaan harus dapat dijamin bahwa Perusahaan tersebut :
 - a. Perusahaan Nasional bonafide baik ditinjau dari segi likwiditas maupun solvabilitasnja.
 - b. Diperkirakan mampu untuk membeli Kotak-kotak Suara seluruhnja setelah Pemilu selesai, dan harus ada pernyataan dari Perusahaan tersebut kesanggupan untuk membeli kembali Kotak Suara dimana perlu.
 - c. Adanja kesanggupan dari Perusahaan/pengusaha bonafide dengan biayanya sendiri untuk meng-assuransikan Kotak Suara yang sudah djadi, hingga dapat dijamin bahwa Kotak Suara yang sudah selesai dan dapat dipakai/dipergunakan dengan baik pada waktu pemilihan umum dilaksanakan.
 - d. Adanja Kesanggupan dari Perusahaan/pengusaha bonafide untuk menjeridakan digudang dan menyimpan digudang mereka semua Kotak Suara yang sudah djadi dengan biaya ditanggung oleh Pengusaha/Perusahaan yang bersangkutan.

- e. Perusahaan harus dapat membuktikan sanggup memberikan voor-financiering sebesar 20 sampai 30% dalam mengerdjakan borongan tersebut.
- f. Pelaksanaan pekerdjaan harus dilakukan dengan satu time/schedule yang rigit hingga memudahkan pengawasan baik dalam pelaksanaan pekerdjaan maupun dalam dropping pembiajaan, satu dan lain hal sangat erat hubungannja dengan waktu pembuatan/pengerdjaan yang tjukup terbatas.

4. Kwalitas dan mutu kaju.

- a. Kaju meranti klas I (Export quality) atau kaju djati.
- b. Harus mampu mendjamin bahwa Kotak Suara yang dibikin, akan tahan tekanan udara panas dan kelembaban hingga tidak akan merusak mutu surat suara yang dimasukkan kedalamnja.
- c. Lobang Surat Suara harus dibuat sedemikian rupa hingga dapat didjamin bahwa surat suara yang masuk tidak akan mudah keluar kembali ketjuali melalui kuntji pengamanannja.

5. Sjarat-sjarat lain.

- a. Kantor tempat domisili dan workshop perusahaan harus tjukup mejakinkan bahwa perusahaan tersebut akan mampu melaksanakan tugasnja sebaik-baiknya.
- b. Pekerdjaan hendaknja dilakukan setjara masinal dan dengan alat-alat yang tjukup up to date.
- c. Mentjantumkan daftar-daftar mesin serut dan sebagainja yang tjukup dapat dipertanggung djawabkan dalam pembuatan Kotak-kotak Suara.
- d. Djumlah dan mutu Pegawai/pekerdja yang digunakan hendaknja tjukup mejakinkan bahwa pekerdjaan akan berdjalan sesuai dengan schedule dan atau work Schedule yang dibuat oleh Perusahaan tersebut.
- e. Tidak mengsubkontraktorkan pembuatan Kotak Suara dengan dalih apapun.

6. Sjarat Bank/Notaris :

- I. a. Dari salah satu Bank asing.
- b. Dari beberapa Bank Pemerintah.
- II. a. Akte Notaris.

7. Sjarat-sjarat djaminan Perusahaan :

Sebagai djaminan untuk berlangsungnja pekerdjaan borongan tersebut, maka fihak pemborong harus menundjukkan djaminan berupa bank garansi/barang-barang bergerak maupun tidak bergerak atau surat-surat berharga lainnja jang bernilai sama dengan harga djumlah borongan Kotak Suara.

Demikianlah beberapa pedoman tersebut diatas, kiranja untuk pelaksanaan tender Kotak Suara terlaksana dengan sebaik-baiknja dan teliti.

K e t u a ,

tjap/ttd.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

SEKRETARIS PANITIA
PENGADAAN PERLENGKAPAN
PENJELENGGARAAN PEMILU

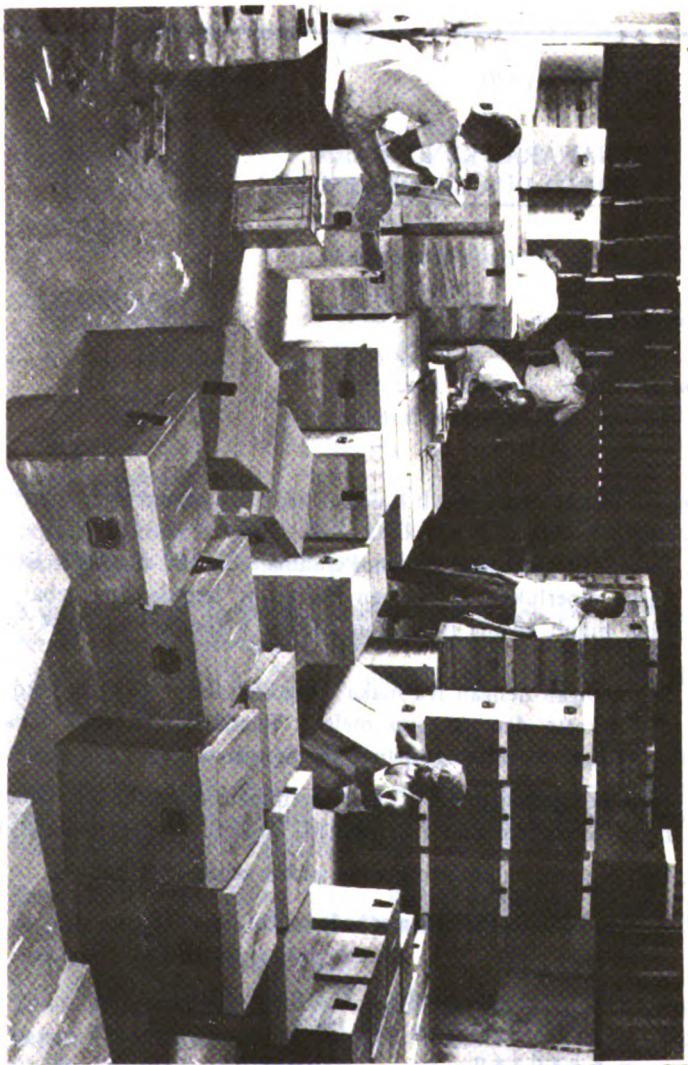
D.C.I.

tjap/ttd.

(Drs. Max Sumaraw)

Anggota :

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. Burhanuddin Hs. | (ttd.) |
| 2. Gunarto S.H. | (ttd.) |
| 3. Muchrodji | (ttd.) |
| 4. Djisman Sitorus BA. | (ttd.) |
| 5. R. Pandji Muradi | (ttd.) |



Pembuatan Kotak Surat Suara dikerjakan serta diawasi dengan sebaik mungkin.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DJALAN IMAM BONDJOL 13 JAKARTA
TELEPON NO. 53418**

Nomor : 752/III/3/1970

Djakarta, 22 Agustus 1970

Lamp. : -

Prihal : **PENAWARAN KENDARAAN
BERODA DUA/BERODA EMPAT.**

KEPADA JTH

.....
.....

DI

D J A K A R T A . -

- A. 1. Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum diwilayah DKI Jakarta diperlukan Kendaraan Bermotor beroda dua sebanyak 26 (dua puluh enam) buah dan beroda 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) buah.

Sehubungan dengan itu maka Pengusaha/Importir yang berdomisili di Jakarta dan sanggup melever kendaraan tersebut dapat mengajukan permohonan/penawaran harga.

2. Para Pengusaha/Importir yang berminat mengajukan penawaran harga harus memenuhi ketentuan2 seperti tersebut pada B dan C.
3. Djenis, merk, tahun pembuatan adalah sebagai berikut :

a. **Kendaraan beroda dua/sepeda motor.**

- D j e n i s : Sepeda Motor.
- Merk/Type/Cylinder : H o n d a 90 CC.
- Tahun Pembuatan : 1969
- K e a d a a n : 100% baru
Lengkap dan Original

- Ready Stock.
- Harga Satuan : Tidak termasuk penyelesaian nomor Bewijs/surat2 lainnja.
(Disebutkan djangka waktu harga tsb. dapat dipertahankan).
 - W a r n a : B i r u

b. Kendaraan beroda empat

- D j e n i s : Station Wagon.
- Merk/Type/Cylinder : H o n d a 360 CC.
- Tahun pembuatan : 1969/1970
- Keadaan : 100% baru
Lengkap dan originil
Ready stock.
- Harga Satuan : Tidak termasuk penyelesaian nomor Bewijs/Surat2 lainnja.
(Sebutkan djangka waktu harga tsb. dapat dipertahankan).
- W a r n a : B i r u

4. Penjerahan barang sebanyak tersebut diatas harus selesai diserahkan kepada Sekretariat PPD DCI Djakarta cq. Biro Perbekalan & Perhubungan 14 hari sesudah penanda tangan Kontrak.
5. Biaya pembelian kendaraan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pemilu Kredit Triwulan II 1970/1971 S.K.O. tanggal 29 Djuli 1970 No.D.15.3.OR.2.2. dan diambil pada Kantor Bendahara Negara Djakarta.
1. Pengadjuan penawaran harga dihitung harga setiap motor dengan menjebutkan merk, djenis, tahun pembuatan dan keterangan lainnja tidak termasuk ongkos2 penyelesaian surat2, sampai digudang/ Sekretariat PPD DCI Djakarta.
2. Surat Penawaran dibuat diatas kertas bermetrai Rp. 25,— jang ditanda tangani oleh Direksi Perusahaan atau Kuasa Penuh Perusahaan jang dikuatkan oleh Notaris.
3. Surat Penawaran ditudjukan kepada Panitia Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu DCI Djakarta dimasukkan didalam amplop tertutup rapih dan di lak.

4. Pada sampul penawaran tidak diperkenankan diberi tanda tulisan apapun.
 5. Surat Penawaran dimasukkan dalam kotak yang telah disediakan dialamat Djalan Iman Bondjol 13 Djakarta.
- C.
1. Pengusaha yang hendak mengajukan penawaran harus bersedia mengisi formulir yang disediakan oleh Panitia rangkap 3 (tiga) dan dapat diambil di Djalan Iman Bondjol 13 Djakarta.
 2. Formulir yang telah diisi oleh Perusahaan dilampirkan menjadi satu pada surat penawaran didalam amplop surat penawaran
 3. Panitia hanya meneliti/memilih surat2 yang ada dalam Kotak Penawaran dan memenuhi ketentuan2 pengajuan surat penawaran.
 4. Penentuan pilihan dilakukan atas dasar syarat2 teknis, mutu penjerahan, harga, bonafiditas dan lain2 ketentuan yang paling menguntungkan bagi Instansi Pemerintah.
 5. Bila dianggap perlu Panitia dapat mengirimkan wakilnya untuk mengadakan peninjauan ke Perusahaan/bengkel atau gudang dari Pengusaha yang bersangkutan untuk menilai bonafiditasnya.
 6. Pemasukan surat2 penawaran dapat dilakukan pada waktu jam kerja dan ditutup tanggal 31 Agustus 1970.
 7. Penawaran yang memenuhi syarat akan dipanggil setelah 3 (tiga) hari tanggal penutupan penawaran.

**PANITIA PENGADAAN PERLENGKAPAN
PENJELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DIWILAJAH DCI DJAKARTA**

Ketua,

ttd/tjap.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

**FORMULIR JANG HARUS DIISI SEHUBUNGAN
DENGAN PENAWARAN UMUM PENJELENGGARAAN
PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR**

1. Nama Perusahaan :
2. Tanggal dan No. Akte Pendirian Perusahaan :
3. Nama Direksi/Kuasa Direksi :
4. Alamat Perusahaan :
 - a. Kantor : Telp.....
 - b. Tempat Kegiatan : Telp.....
 - c. Gudang : Telp.....
5. Idzin Perusahaan :
6. Bank Relasi/Garansi :
7. Dan lain-lain :

Djakarta, 1970.

Diisi oleh :

Direksi/Kuasa Direksi Perusahaan,

(.....).

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA
DJALAN IMAM BONDJOL 13 TELEPON 53418**

**PEDOMAN SERTA TATA TERTIB TENDER BORONGAN
BANGUNAN DAN PERLENGKAPAN PPD DCI DJAKARTA**

Sehubungan dengan kesimpulan² dalam rapat Panitia Pengadaan Perlengkapan Pemilu DCI Jakarta tanggal 12 Pebruari 1971, ; maka dibawah ini disusun pedoman serta tata tertib penyelenggaraan tender borongan bangunan dan perlengkapan PPD DCI Jakarta.

Pedoman dan tata tertib adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan/Pemborong jang dapat mengajukan permohonan adalah perusahaan jang berdomisili di Jakarta.
2. Perusahaan/Pemborong harus mempunjai Kantor jang tjukup mejakinkan beserta tenaga² ahli dibidang bangunan disamping tenaga-tenaga administrasi.
3. Bonafiditas perusahaan harus dapat dibuktikan baik dengan surat-surat asli/foto copy maupun dari hasil² pekerdjaan/pengalaman jang telah diselesaikan serta keterangan keterangan lain baik Bank Relasi, pelunasan fiscal terachir dan lain-lain keterangan.
4. Perusahaan/Pemborong harus dapat membuktikan sanggup memberikan voorfinanciering sebesar 20 % sampai 30 % dari harga borongan.
5. Sebagai djaminan untuk berlangsungnja pekerdjaan borongan tersebut harus menundjukan djaminan berupa :
 - Bank Garansi,
 - Barang² bergerak/tidak bergerak atau surat² berharga lainnja jang bernilai sama dengan harga borongan.
6. Persjaratan technis dan administratif kedua-duanja harus dapat dipenuhi,

apabila salah satu tidak dapat dipenuhi Panitia dapat membatalkan penundjukan.

7. Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.

Djakarta, 12 Pebruari 1971
**PANITIA PENGADAAN PERLENGKAPAN
PEMILU DCI DJAKARTA**

Ketua,
ttd.

Sekretaris,
ttd.

(Soetjipto Wirosardjono MSc.)

(Drs. Max Sumaraw)

A n g g o t a

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1. Burhanuddin Hs | (ttd.) |
| 2. Gunarto S.H. | (ttd.) |
| 3. Muchrodji | (ttd.) |
| 4. R. Pandji Muradi | (ttd.) |
| 5. Djisman Sitorus BA | (ttd.) |

**FORMULIR JANG HARUS DIISI
SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN PEKERDJAAN BORONGAN
PEMILU DCI DJAKARTA**

1. NAMA PERUSAHAAN :
2. TANGGAL DAN NO. AKTE :
- PENDIRIAN PERUSAHAAN :
3. NAMA DIREKSI/KUASA DIREK- :
- SI
4. ALAMAT PERUSAHAAN :
- a. KANTOR : TELP. No.
- b. TEMPAT KEGIATAN : TELP. No.
- c. GUDANG : TELP. No.
- 5.a. IDZIN PERUSAHAAN :
- b. IDZIN PEMBR.DCI DJAKARTA:
- c. PEKERDJAAN BORONGAN :
- JANG TELAH PERNAH DI- :
- KERDJAKAN (LAMPIRKAN :
- SALINAN KONTRAK :
6. BANK RELASI/GARANSI :
7. LAMPIRAN DAFTAR/DJUMLAH :
- ALAT2 MESIN JANG DIPAKAI :
- DALAM PEKERDJAAN BORONG :
- AN :
- :

8. DJUMLAH TENAGA KERDJA :
JANG DIPERGUNAKAN :
9. LAIN-LAIN :

Djakarta,..... 1971.

DIISI OLEH :

DIREKSI/KUASA DIREKSI PER-
USAHAAN,

(.....)

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA
DJALAN IMAM BONDJOL 13 TELEPON 53418**

**INSTRUKSI
No. : 911/III/3/ 70**

D a r i : Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah
D.C.I. Djakarta.

K e p a d a : 1. Sekretaris P.P.D. DCI Djakarta,
2. Para Walikota/Ketua PP Kota se DCI Djakarta,
3. Para Tjamat/Ketua PPS se DCI Djakarta.

Perihal : Penggunaan Kendaraan Dinas untuk kegiatan Pemilu
di wilayah.

Sehubungan dengan telah diterimanja kendaraan-kendaraan Dinas berupa jeep 7 (tudjuh) buah dari L.P.U., dan Honda Mobil 3 (tiga) buah serta Honda Motor 30 (tiga puluh) buah yang pengadaannya dilaksanakan oleh PPD DCI Djakarta, maka demi untuk kelantjaran tugas-tugas dan ketertiban penggunaannja dengan ini diinstruksikan sebagai berikut :

- I. Penggunaan kendaraan tersebut hanja untuk melajani kegiatan-kegiatan Sekretariat PPD DCI Djakarta, Sekretariat P.P. Kota dan Sekretariat P.P.S.
- II. Penanggung djawab/houder kendaraan tersebut sebagai mana tertjantum dalam daftar lampiran instruksi ini.

Demikian agar instruksi ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

Djakarta, 17 Oktober 1970.
GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH DCI DJAKARTA

tjap/ttd.

Tembusan :

- Jth. 1. Sekda DCI Djakarta**
2. Direktorat I/Perme-
rintahan,
3. Perlengkapan DCI,
4. A r s i p.

(ALI SADIKIN)

Letnan Djenderal KKO

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA
DJALAN IMAM BONDJOL 13 TELEPON 53418**

INSTRUKSI

No. : 0149/III/2/71

D a r i : Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Daerah Khusus Ibukota Djakarta.

K e p a d a : 1. Kepala Direktorat VI/Kuangan.
2. Para Walikota.
3. Para Tjamat.

Perihal : Kendaraan Dinas Pemilu DCI Djakarta.

Lampiran : 1 (satu) daftar.

Sehubungan dengan telah diterimanja semua djatah kendaraan Dinas Pemilu dari L.P.U. berupa Mobil dan Sepeda Motor dan jang pada hakekatnja djuga mendjadi milik Pemerintah Daerah, dengan ini diinstruksikan kepada Saudara agar semua kendaraan Dinas tersebut dapat dimasukkan dalam daftar inventaris Pemerintah Daerah berikut perawatan/pemeliharaannja.

Adapun djumlah dan djenis kendaraan tersebut sebagaimana tertera dalam daftar terlampir.

Agar instruksi ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

Djakarta, 15 Pebruari 1971.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH DCI DJAKARTA**

tjap/ttd.

(ALI SADIKIN)

Letnan Djenderal KKO

Tembusan :

- 1. Lembaga Pemilihan Umum,**
- 2. Sekda DCI Djakarta,**
- 3. Direktorat I/Pemerintahan,**
- 4. A r s i p .**

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH/DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA**
Djalan Imam Bondjol No. 13 Djakarta
Telepon No. 53418.

=====

I N S T R U K S I
No.: 0614/III/3/71

D a r i : Pd. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta.

Kepada : 1. Kepala Direktorat VI/Keuangan,
2. Kepala Biro III (U.p. Kepala Bagian Perlengkapan),
3. Walikota Djakarta Utara,
4. Tjamat Kepulauan Seribu,

Perihal : Kapal Motor Pemilu D.C.I. Djakarta.

Lampiran : 1 (satu) Salinan Naskah Serah Terima.

Sehubungan dengan diterimanja sebuah Kapal Motor dengan nama "ANTAREDJA P.IN 2" dari L.P.U. jang telah diserahkan kepada Pemerintah D.C.I. Djakarta, dengan ini diinstruksikan kepada Saudara agar supaja kapal tersebut dimasukkan dalam Inventaris Kapal2 Pemerintah DCI Djakarta berikut perawatan/pemeliharaan serta pembiajaan awak kapal tersebut.

Adapun keterangan mengenai kapal tersebut sebagaimana tertera dalam Salinan Naskah Serah Terima terlampir.

Demikian agar dilaksanakan sebaik-baiknya.-

Djakarta, 23 Djuni 1971.
Pd. GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PA-
NITIA PEMILIHAN DAERAH DCI DJAKARTA

ttd
(ALI SADIKIN)
Letnan Djendral KKO

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418
D J A K A R T A**

I N S T R U K S I

No. 0684/III/3/1971.

- Kepada** : 1. Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta.
2. Para Walikota/Ketua PP. Kota se-DCI Djakarta.
- D a r i** : Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah
DCI Djakarta.
- Perihal** : Penggunaan Kendaraan Dinas untuk kegiatan Pemilu di-
Wilajah.
-

Sehubungan dengan penambahan Kendaraan Dinas Sepeda Motor "Honda" 90. cc (enam buah) oleh Panitia Pemilihan Daerah DCI Djakarta, maka demi untuk kelantjaran tugas & ketertiban penggunaannya, dengan ini di-instruksikan sebagai berikut:

- I. Penggunaan Sepeda Motor tersebut hanja untuk melajani kegiatan Sekretariat PPD DCI, Sekretariat PP. Kota.
- II. Penanggung Jawab/Houder Kendaraan tersebut sebagaimana tertjantum dalam lampiran Instruksi ini.

Demikian agar Instruksi ini dilaksanakan se-baik2nja.

Djakarta, 15 Djuli 1971.-
Pd. GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PA-
NITIA PEMILIHAN DAERAH D.C.I. DJAKARTA
A.n.b.

A. WIRIADINATA

Tembusan:

Laksamana Muda Udara

1. Sekda DCI
 2. Direktorat I/Pemerintahan,
 3. Perlengkapan DCI,
 4. A r s i p
-

LAMPIRAN : Instruksi Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia
Pemilihan Daerah DCI Djakarta No. 0684/III/3/
71 tanggal 15 Djuhi 1971.

No.	Pemegang/Houder	K E T E R A N G A N				
		DIABATAN	DJENIS MERK	NO. RANGKA	NO. MESIN	NO. POLISI
1	2	3	4	5	6	7
1.	SUMARDI	Kepala Humas PPD DCI Djakarta	Sepeada Motor Honda 90 cc	139836	146867	B-1475.EE
2.	SUNARDI B.St.	Kepala Bagian Pe- njenenggara PP Ko- ta Djakarta Pusat.	sda.	149375	155392	B-2373.EE
3.	SJAFRIL KUSIAR B.St.	Kepala Bagian Do- cumentasi & Statis- tik PP Kota Djakar- ta Utara.	sda.	149083	146854	B-1474.EE
4.	MUKADI HADI- WIDJAJA B.St.	Kepala Biro Penje- lenggara PP Kota Djakarta Selatan.	sda.	139697	146719	B-1393.EE
5.	BAMBANG WA- HONO B.St.	Kepala Bagian Do- cumentasi & Statis- tik PP. Kota Dja- karta Timur.	sda.	149316	155391	B-1473.EE

6. SUTEDJO B.St.

1	2	3	4	5	6	7
6.	SUTEDJO B.St.	Kepala Bagian Penje- lenggara PP. Kota Jakarta Barat	Sepeda Motor Honda 90 cc.	149380	155345	B-8030.X

Djakarta, 15 Djuli 1971.

Pd. GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH D.C.I DJAKARTA

A.n.b.

ttid.

(A. WIRIADINATA)

Laksamana Muda Udara.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
DJL. IMAM BONDJOL 13 TELP. 53418
D J A K A R T A.-**

I N S T R U K S I

NO: 0783/III/3/71.-

- DARI : PD. GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH DCI DJAKARTA**
- KEPADA : 1. KEPALA DIREKTORAT VI/KEUANGAN DCI DJA-
KARTA
2. KEPALA BIRO III (UP. KEPALA BAGIAN PERLENG-
KAPAN DCI).
3. SEMUA WALIKOTA/KETUA P.P. KOTA
4. SEMUA TJAMAT/KETUA P.P.S.
5. SEMUA LURAH/KOORDINATOR K.P.P.S.**
- PERIHAL : INVENTARIS ALAT2 KANTOR, ALAT2 TELEKOMU-
NIKASI, MEUBELAIR.**
- LAMPIRAN : 1 (SATU) DAFTAR INVENTARIS PEMILU 1971.**
-

Untuk mendjamin tertibnja pemeliharaan semua Inventaris Pemilu 1971 jang tersebar diwilajah pemerintah DCI Djakarta, maka dengan ini diinstruksikan kepada Saudara agar semua Inventaris Pemilu jang tersebut dalam Daftar terlampir dimasukkan sebagai Inventaris Pemerintah DCI Djakarta berikut pembiajaan, perawatan/pemeliharaannya. Semua Inventaris tersebut hendaknja dipelihara dan dirawat sebaik-baiknja agar supaja dapat dimanfaatkan untuk Pemilu jang akan datang.

Demikian agar Instruksi ini dilaksanakan se-baik2nja.

Djakarta, 31 Agustus 1971.
Pd. GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH DCI DJAKARTA

Tjap/t.t.d.

(ALI SADIKIN)

Letnan Djenderal KKO.

T e m b u s a n :

1. Panitia Pemilihan Indonesia/P.P.I./L.P.U.
 2. Badan Perbekalan & Perhubungan L.P.U.
 3. Sekda DCI Djakarta,
 4. Direktorat I/Pemerintahan,
 5. A r s i p.
-

DAFTAR : INVENTARISASI "KENDARAAN"
PANTIA PEMERINTAH DAERAH DKI JAKARTA

No	URAIAN/PEMAKAI	DJUMLAH	NO. POLISI	M E R K	NO. RANGEA	NO. MESIN	TAHUN/TYPER	KEDAAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	W.H. Kerna PPD DCI Djakarta (Laka.Md.U. A. Windaesna)	1 (satu)	B. 9157 DD	Toyota	PJ.55-20011	TC. 317662	1970/Sl. Wagon	Baik
2.	Schreiner PPD DCI Djakarta (Geopjeo Windaesna M.Sc.)	1 (satu)	B. 1706 EE	Mazda	STR. 65904	TC. 313990	1970/ Sedan	Baik
3.	Karo Pasdikangera PPD DCI (Berhamsid H.)	1 (satu)	B. 1138 P.	Toyota	PJ. 40-04943	P. 317160	1970/Jump Land Cr.	Baik
4.	Karo Administrasi PPD DCI (Gocarno S.H.)	1 (satu)	B. 1240 N.	Honda	N. 360-134998	No. 360-E-13-45998	1969 / Sedan	Baik
5.	Karo Perik. & Perikub. PPD DCI (Drs. Max Smerwer)	1 (satu)	B. 4819 DD	Toyota	PJ. 40-90818	P. 329379	1970/Jump Land Cr	Baik
6.	Karo Pengawasan PPD DCI (E. Pandjaitan S.H.)	1 (satu)	B. 9148 G	Honda	N. 360-1346238	N. 360 E-1346238	1969 / Sedan	Baik
7.	Kabang Kemasnan PPD DCI (Macirodi Soemno)	1 (satu)	B. 9124 G	Honda	N. 360-1359118	N. 360E-1359118	1969 / Sedan	Baik
8.	Bendaharawan PPD DCI Djakarta (Oetod Subhagjo)	1 (satu)	B. 4820 DD	Toyota	PJ.40-90882	P. 329380	1970/Jump Land Cr	Baik
9.	Schreiner PPD DCI Djakarta	1 (satu)	B. 5247 M	Toyota	PJ.40-04942	P. 317324	1970/Jump Land Cr	Baik
10.	Biro Perikub. & Perikubangan PPD DCI Djakarta	1 (satu)	B. 9485 DD	Toyota	BA-100-16133	P. 318040	1970/Truck Toyota	Baik
11.	Kabang T.U. PPD DCI (Suprijono)	1 (satu)	B. 4233 P.	Honda CB	CB-125-4019444	CB-125 E-4018189	1969/Motor 125 CC	Baik
12.	Kabang Un. Dulan PPD DCI (Superto B.M.A.)	1 (satu)	B. 4252 P.	Honda	CB-125-4019493	CB-125 E-4019567	1969/Motor 125 CC	Baik
13.	Kabang Espedisi PPD DCI (Suzanto)	1 (satu)	B. 4251 P.	Honda	CB-125E-1901	CB-125 E-4019603	1969/Motor 125 CC	Baik
14.	Staf Dir. Perikub. & Perikub. (Spartal Effendi)	1 (satu)	B. 4254 P.	Honda	CB-125-9402	CB-125 E-4019640	1969/Motor 125 CC	Baik
15.	Kabang Humas PPD DCI (Sumardi)	1 (satu)	B. 1475 EE	Honda	139836	14467	1971/Motor 90 Z	Baik
16.	Staf. PP. Ek. Djakarta Pusat (W.H. Mananary)	1 (satu)	B. 1319 P.	Toyota	PJ.40-05072	P-317439	1970/Land Cr	Baik

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	Sekr. PP. Kota Djakarta Utara (1 orang)		B. 1303 P.	Toyota	PJ.40-84851	P-317489	1970 / s.d.a.	Balk
18.	Sekr. PP. Kota Djakarta Barat (Drs. Sjafri Jusuf)	1 (orang)	B. 1442 P.	Toyota	PJ.40-85608	P-317437	1970 / s.d.a.	Balk
19.	Sekr. PP. Kota Djark. Selatan (Supang B.A.)	1 (orang)	B. 1302 P.	Toyota	PJ.40-85805	P-317116	1970 / s.d.a.	Balk
20.	Sekr. PP. Kota Djakarta Timur (Drs. Soefjan Halim)	1 (orang)	B. 4709 R.	Toyota	PJ.40-84899	P-317285	1970 / s.d.a.	Balk
21.	Kabag. K.U. PPS. Menteng (Sudarmo)	1 (orang)	B. 1947 L.	Honda	S.90-871302	S.908-74032	1969/Motor 90 CC	Balk
22.	Sekret. PPS Gambir (Anang Sudjana)	1 (orang)	B. 3807 P.	Honda	S.90-891497	S.908-702979	1969/Motor 90 CC	Balk
23.	Wd. Ketua PPS. Tanah Abang (Muzari B.A.)	1 (orang)	B. 1262 G.	Honda	S.90-871364	S.908-702997	1969/Motor 90 CC	Balk
24.	Sekr. PPS Sayah Baru (Harshap B.A.)	1 (orang)	B. 9496 L.	Honda	S.90-8713028	S.908-704444	1969/Motor 90 CC	Balk
25.	Wd. Ketua PPS Kemajoran (D. Sumart B.A.)	1 (orang)	B. 5608 N.	Honda	S.90-8911367	S.908-703943	1969/Motor 90 CC	Balk
26.	Sekr. PPS Tjempaka Putih (T.B. Junt)	1 (orang)	B. 9483 L.	Honda	S.90-8911500	S.908-704441	1969/Motor 90 CC	Balk
27.	Wd. Ketua PPS Senen (H. Nur Seroeni)	1 (orang)	B. 6428 L.	Honda	S.90-887970	S.908-704130	1969/Motor 90 CC	Balk
28.	Kabag. Pendidikan PP. Kota (Drs. Puast Suwardi)	1 (orang)	B. 2373 EE	Honda	149275	155992	1971/Motor 90 s	Balk
29.	Wd. Sekr. PPS Tj. Priok (Seroeni)	1 (orang)	B. 1274 S.	Honda	S.90-887128	S.908-703748	1969/Motor 90 CC	Balk
30.	Sekr. PPS. Kodya (M. Harun Al Rapiid B.A.)	1 (orang)	B. 1356 A.	Honda	S.90-887112	S.908-703838	1969/Motor 90 CC	Balk
31.	Sekret. PPS Penjaringan (A.S. Supro)	1 (orang)	B. 6884 H.	Honda	S.90-872933	S.908-704464	1969/Motor 90 CC	Balk
32.	Kabag. Doc. & Statistik Djakarta Utara (Sjefrie Kuntar B.Sc.)	1 (orang)	B. 1474 EE	Honda	149083	146854	1970/Motor 90 Z	Balk
33.	Sekr. PPS Taman Sari (M. Jones)	1 (orang)	B. 9267 L.	Honda	S.90-888400	S.908-703750	1969/Motor 90 CC	Balk
34.	Sekr. PPS Tambora (Ganda Wiradimarga)	1 (orang)	B. 492 L.	Honda	S.90-891491	S.908-704486	1969/Motor 90 CC	Balk

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	Sdr. PPS Grogol Pemasukan (J. Jacob)	1 (satu)	B. 5704 C.	Honda	S.90-877243	S.90E-704460	1969/Motor 90 CC	Balk
36.	Sdr. PPS Ekson Djerek (Masjid)	1 (satu)	B. 6390 B.	Honda	S.90-891904	S.90E-704447	1969/Motor 90 CC	Balk
37.	Sdr. PPS Tynggahang (Sumat)	1 (satu)	B. 4918 HL	Honda	S.90-873004	S.90E-703761	1969/Motor 90 CC	Balk
38.	Kabag. Pengawasan Djakarta Barat (Sondjo)	1 (satu)	B. 6011 PP	Honda	149380	153345	1971/Motor 90 CC	Balk
39.	Sdr. PPS Seichud (Muzak Harang)	1 (satu)	B. 9412 L.	Honda	S.90-891949	S.90E-703800	1969/Motor 90 CC	Balk
40.	Sdr. PPS Tibet (T.L. Dahlan AI)	1 (satu)	B. 6081 D.	Honda	S.90-891882	S.90E-703790	1969/Motor 90 CC	Balk
41.	Sdr. PPS Mampung Proporan (Sijafuddin)	1 (satu)	B. 488 L.	Honda	S.90-891965	S.90E-703944	1969/Motor 90 CC	Balk
42.	Sdr. PPS Puar Mingo (Husaini)	1 (satu)	B. 4080 H	Honda	S.90-888419	S.90E-704430	1969/Motor 90 CC	Balk
43.	Sdr. PPS Kabinjara Baru (M.L. Rohadi)	1 (satu)	B. 9246 L.	Honda	S.90-887971	S.90E-703387	1969/Motor 90 CC	Balk
44.	Sdr. PPS Kabinjara Lama (Tugan Hari Sulisno)	1 (satu)	B. 4302 HL	Honda	S.90-870307	S.90E-704465	1969/Motor 90 CC	Balk
45.	Kabag. Pengawasan Djakarta Selatan (Mubadi B.St.)	1 (satu)	B. 2393 EE	Honda	139697	146715	1971/Motor 90 Z	Balk
46.	Wakil. Ketua PPS Marusan (Maman Sumartu B.A.)	1 (satu)	B. 5163 N.	Honda	S.90-870779	S.90E-705499	1969/Motor 90 CC	Balk
47.	Sdr. PPS Djajingara (Karyono)	1 (satu)	B. 3960 P.	Honda	S.90-872905	S.90E-702818	1969/Motor 90 CC	Balk
48.	Sdr. PPS Palo Gudang (Tahiri B.A.)	1 (satu)	B. 8844 L.	Honda	S.90-891360	S.90E-703948	1969/Motor 90 CC	Balk
49.	Sdr. PPS Erwan Djaji (Badi A.B. B.A.)	1 (satu)	B. 4228 E.	Honda	S.90-891490	S.90E-704455	1969/Motor 90 CC	Balk
50.	Sdr. PPS Puar Nabo (Kusudi B.A.)	1 (satu)	B. 5442 B.	Honda	S.90-873068	S.90E-704458	1969/Motor 90 CC	Balk
51.	Kabag. Doc. & Statistik Djakarta Timur (Samsung Widono)	1 (satu)	B. 1473	Honda	149316	155191	1971/Motor 90 Z	Balk

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52.	P.P.S. Pulau Seribu Djakarta Utara (Mener Tempel)	5 (lima)	B. -	Johanes	-	-	40 P.K.	Baik
53.	PP. Kota Djakarta Utara (Kupel)	1 (satu)	PUN-2 Km. ANTARE- DUA	Mitsubishi	Bodja	-	AE70-250 PKL	Baik
54.	PPD DCI Djakarta (Humas PPD DCI)	1 (satu)	B. 4114 BE	Toyota	Rmb-011787	5R.1259673	1970/Micro-Commer Movie Bus.	Baik
55.	PPD DCI / PP. EO. DCI	19 (sembilan belas)	-	Plasid/ Nunox	-	-	Sepeda tali-tali	18 buah baik 1 rusak.

BIBLIOTEKA & PERHUBUNGAN
PANTIA PEMILIHAN DAERAH
D.C.I DJAKARTA.

**DAFTAR : INVENTARISASI "ALAT-ALAT TELEKOMUNIKASI"
PADA PEMERINTAH DAERAH DKI JAKARTA**

No.	NAMA BARANG	DJUMLAH	MERK	NOMOR	T Y P E	KEADAAN	PEMAKAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wireless	1 (satu)	T.O.A.	WT - 401	AC/DC	Baik	P.P.D. DCI	Lengkap dengan mic.
2.	Tape - Recorder	1 (satu)	Philips	-	Cassett	Baik	P.P.D. DCI	-
3.	Amplifier	1 (satu)	-	-	-	Baik	P.P.D. DCI	-
4.	Tuusel Photo	1 (satu)	-	-	-	Baik	P.P.D. DCI	-
5.	Loudspecker 8"	4 (empat)	-	-	Body kaju	Baik	P.P.D. DCI	-
6.	Alphphone	1 (satu) set	-	-	AC/DC	Baik	P.P.D. DCI	-
7.	Film Pemulu	1 (satu) rol	-	-	16 mm.	Baik	P.P.D. DCI	-
8.	Telepon	3 (tiga)	Siemens	-	Otomat.	Baik	P.P.D. DCI	-
9.	Radio Community Receiver	32 (tiga puluh dua) buah	Philips	-	Transistor	Baik	PPD DCI/PP Ko.	Saluran dua nomor.
10.	Radio Transistor 4 band	1 (satu)	Philips	480610	R.L. 486.	Baik	PPS. Kertj. Pasar Rebo	-
11.	Radio Transistor 4 band	1 (satu)	Philips	480608	R.L. 486.	Baik	PPS. Kertj. Matraman	-
12.	Radio Transistor 4 band	1 (satu)	Philips	480607	R.L. 486.	Baik	PPS. Kertj. P. Gadung	-
13.	Radio Transistor 4 band	1 (satu)	Philips	480612	R.L. 486.	Baik	PPS. Kertj. Djatinegara	-
14.	Radio Transistor 4 band	1 (satu)	Philips	480611	R.L. 486.	Baik	PPS. Kertj. Kramat Djati	-
15.	Radio Transistor 4 band	1 (satu)	Philips	480286	R.L. 486.	Baik	PPS. Kertj. Tambora	-
16.	Radio Transistor 4 band	1 (satu)	Philips	480285	R.L. 486.	Baik	PPS. Kertj. Taman Sari	-
17.	Radio Transistor 4 band	1 (satu)	Philips	480288	R.L. 486.	Baik	PPS. Kertj. Kebon Djuruk	-
18.	Radio Transistor 4 band	1 (satu)	Philips	480323	R.L. 486.	Baik	PPS. Kertj. Grogol Petamb	-
19.	Radio Transistor 4 band	1 (satu)	Philips	480322	R.L. 486.	Baik	PPS. Kertj. Tyngklareng	-
20.	Radio Transistor 4 band	1 (satu)	Philips	480283	R.L. 486.	Baik	PPS. Kertj. Tandjung Priuk	-
21.	Radio Transistor 4 band	1 (satu)	Philips	480609	R.L. 486.	Baik	PPS. Kertj. Kodja	-
22.	Radio Transistor 4 band	1 (satu)	Philips	480287	R.L. 486.	Baik	PPS. Kertj. Pendjaringan	-
23.	Radio Transistor 4 band	1 (satu)	Philips	484354	R.L. 486.	Baik	PPS. Kertj. Menteng	-
24.	Radio Transistor 4 band	1 (satu)	Philips	482224	R.L. 486.	Baik	PPS. Kertj. Gambar	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Radio Transistor 4 band	1 (baru)	Philips	401073	R.L. 406.	Baik	PPS. Kej. Tanah Abang	
26.	Radio Transistor 4 band	1 (baru)	Philips	404353	R.L. 406.	Baik	PPS. Kej. Sawah Besar	
27.	Radio Transistor 4 band	1 (baru)	Philips	402120	R.L. 406.	Baik	PPS. Kej. Kembangan	
28.	Radio Transistor 4 band	1 (baru)	Philips	400319	R.L. 406.	Baik	PPS. Kej. Jember	
29.	Radio Transistor 4 band	1 (baru)	Philips	400320	R.L. 406.	Baik	PPS. Kej. Bekasi	
30.	Radio Transistor 4 band	1 (baru)	Philips	400170	R.L. 406.	Baik	PPS. Kej. Tuban	
31.	Radio Transistor 4 band	1 (baru)	Philips	400324	R.L. 406.	Baik	PPS. Kej. Kabupaten Lingsar	
32.	Radio Transistor 4 band	1 (baru)	Philips	402120	R.L. 406.	Baik	PPS. Kej. Sidenreng	
33.	Radio Transistor 4 band	1 (baru)	Philips	400355	R.L. 406.	Baik	PPS. Kej. Mangrove	
34.	Radio Transistor 4 band	1 (baru)	Philips	401114	R.L. 406.	Baik	PPS. Kej. Ponorogo	
35.	Radio Transistor 4 band	1 (baru)	Philips	400321	R.L. 406	Baik	PPS. Kej. Kabupaten Bera	
36.	Microphone	27 (diperoleh terdahul) baik	TOA/ NATIONAL	208A	W.D.	Baik	Sekolah PPS/Kepulauan S-DCI Jakarta (27 buah Kembangan).	

BERSIKAP & PERHUBUNGAN PAMITIA
PENGELIHAN DARI DOKUMENTASI

**DAFTAR : INVENTARIS ALAT-ALAT KANTOR/MEUBILAIR
PANITIA PEMILIHAN DAERAH DKI JAKARTA**

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	M E R K	NOMOR	T Y P E	UKURAN	KEADAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mesin Tulis	1 (satu)	Underwood	104760	20	-	Baik	PPD DCI Djakarta
2.	Mesin Tulis	1 (satu)	Underwood	8704464	27	-	Baik	PPD DCI Djakarta
3.	Mesin Tulis	1 (satu)	Royal	PPE 168666732	17	-	Baik	PPD DCI Djakarta
4.	Mesin Tulis	1 (satu)	Olympia	2298082	7	-	Baik	PPD DCI Djakarta
5.	Mesin Tulis	1 (satu)	Royal	6001 - 1200	-	-	Baik	PPD DCI Djakarta
6.	Mesin Tulis	1 (satu)	Remington	236489	27	-	Baik	PPD DCI Djakarta
7.	Mesin Tulis	1 (satu)	Remington	236548	27	-	Baik	PPD DCI Djakarta
8.	Mesin Tulis	1 (satu)	Optima	372250	16	-	Baik	PPD DCI Djakarta Timur
9.	Mesin Tulis	1 (satu)	Remington	234001	27	-	Baik	PPD DCI Djakarta
10.	Mesin Tulis	1 (satu)	Remington	235560	27	-	Baik	PPD DCI Djakarta Barat
11.	Mesin Tulis	1 (satu)	Remington	256554	27	-	Baik	PPD DCI Djakarta Utara
12.	Mesin Tulis	1 (satu)	Remington	23468	27	-	Baik	PPD DCI Djakarta Pusat
13.	Mesin Hitung	1 (satu)	Pacit	2369998	CL 13	-	Baik	PPD DCI Djakarta Selatan
14.	Mesin Hitung	1 (satu)	Pacit	2369877	CL 13	-	Baik	PPD DCI Djakarta
15.	Mesin Hitung	1 (satu)	Pacit	2369867	CL 13	-	Baik	PPD DCI Djakarta Timur
16.	Mesin Hitung	1 (satu)	Pacit	2369999	CL 13	-	Baik	PPD DCI Djakarta Barat
17.	Mesin Hitung	1 (satu)	Pacit	2363070	CL 13	-	Baik	PPD DCI Djakarta Utara
18.	Mesin Hitung	1 (satu)	Pacit	269709	CL 13	-	Baik	PPD DCI Djakarta Pusat
19.	Mesin Djumlah	1 (satu)	Olivetti	427494	SP 20	-	Baik	PPD DCI Djakarta Selatan
20.	Mesin Djumlah	1 (satu)	Olivetti	427101	SP 20	-	Baik	PPD DCI Djakarta
21.	Mesin Djumlah	1 (satu)	Olivetti	4273110	SP 20	-	Baik	PPD DCI Djakarta Timur
22.	Mesin Djumlah	1 (satu)	Olivetti	427115	SP 20	-	Baik	PPD DCI Djakarta Barat
23.	Mesin Djumlah	1 (satu)	Olivetti	427306	SP 20	-	Baik	PPD DCI Djakarta Utara
24.	Mesin Djumlah	1 (satu)	Olivetti	427397	SP 20	-	Baik	PPD DCI Djakarta Pusat
25.	Mesin Stensiel Folio	1 (satu)	Genetzer	3B. 5905	Comest	Folio	Baik	PPD DCI Djakarta Selatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Main Special Poto	1 (satu)	Generator	27A. 0023	Tangan	Potlo	Baik	PPD DCI Djakarta
26.	Hochschule	1 (satu)	Max Stapler	-	HD, JLS	-	Baik	PPD DCI Djakarta
27.	Djam dending	1 (satu)	Seiko	-	-	-	Baik	PPD DCI Djakarta
28.	Meja tulis	31 (tiga puluh satu) buah	-	-	Biro	-	Baik	PPD DCI Djakarta
29.	Meja Tulis	3 (tiga)	-	-	Pelari Djok	-	Baik	PPD DCI Djakarta
30.	Meja Siding	5 (lima)	-	-	-	-	Baik	PPD DCI Djakarta
31.	Kursi Tulis	3 (tiga) set	-	-	Djok	-	Baik	PPD DCI Djakarta
32.	Kursi Kerdja	16 (enam belas)	-	-	Djok lisan	-	Baik	PPD DCI Djakarta
33.	Kursi Kerdja	10 (sepuluh)	-	-	Das tangan	-	Baik	PPD DCI Djakarta
34.	Kursi Formilux	5 (lima)	-	-	Pipa Union	-	Baik	PPD DCI Djakarta
35.	Kursi Mena	4 (empat)	-	-	Djok Merah	-	Baik	PPD DCI Djakarta
36.	Meja Tulis	3 (tiga)	-	-	Biro	-	Baik	PPS. Mampang Prapatan
37.	Kursi Kerdja	3 (tiga)	-	-	Das tangan	-	Baik	PPS. Kerj. Mampang Prapatan
38.	Meja + Kursi Kerdja	3 x 3 (tiga + tiga)	-	-	Biro + 2 tangan	-	Baik	PPS. Kerj. Tembakua Putih
39.	Meja + Kursi Kerdja	3 x 3 (tiga + tiga)	-	-	Biro + 2 tangan	-	Baik	PPS. Kerj. Tumbora
40.	Meja + Kursi Kerdja	3 x 3 (tiga + tiga)	-	-	Biro + 2 tangan	-	Baik	PPS. Kerj. Kodja
41.	Meja + Kursi Kerdja	3 x 3 (tiga + tiga)	-	-	Biro + 2 tangan	-	Baik	PPS. Kerj. Kramet Djati
42.	Meja + Kursi Kerdja	3 x 3 (tiga + tiga)	-	-	Das placo	-	Baik	PPD DCI Djakarta
43.	Almari (Kape Djati)	8 (delapan)	-	-	Das placo	-	Baik	Seluruh PPS/Kerj. se DCI Djakarta.
44.	Almari (Kape Djati)	27 (dua puluh tujuh)	-	-	Das placo	-	Baik	Seluruh PP. Kota se DCI
45.	Almari (Kape Djati)	5 (lima)	-	-	Das placo	-	Baik	PPD DCI Djakarta
46.	Rak Arap Besar	2 (dua)	-	-	-	-	Baik	PPD DCI Djakarta
47.	Rak Arap Seding	2 (dua)	-	-	-	-	Baik	PPD DCI Djakarta
48.	Rak Arap Kerdja	4 (empat)	-	-	-	-	Baik	PPD DCI Djakarta
49.	Piling Kabinet	2 (dua)	-	-	-	-	Baik	PPD DCI Djakarta
50.	Papan Tulis	4 (empat)	-	-	-	-	Baik	PPD DCI Djakarta
51.	Carpet/Tilet permadani	4 (empat)	-	-	-	-	Baik	PPD DCI Djakarta
52.	Velvet	2 (dua)	-	-	-	-	Baik	PPD DCI Djakarta
53.	Papan programman	1 (satu)	-	-	-	-	Baik	PPD DCI Djakarta

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54.	Photo Presiden	233 (dua ratus lima puluh tiga)	-	-	-	-	Baik	PPS dan Ketersihan ex DCI Djakarta
55.	Pemadam Kebakaran	3 (tiga)	-	-	-	-	Baik	PPD DCI Djakarta
56.	Fan / Kipas Angin	5 (lima)	-	-	-	-	Baik	PPD DCI Djakarta
57.	Gambar Garuda	1 (satu)	-	-	-	-	Baik	PPD DCI Djakarta
58.	Kepa Washbasin	2 (dua)	-	-	-	-	Baik	PPD DCI Djakarta
59.	Trafo	1 (satu)	-	-	-	-	Baik	PPD DCI Djakarta
BANGUNAN								
1.	Kantor PPD DCI Djakarta Dj. Imam Bonjol 13	1 (satu)	-	-	Bertingkat	-	Baik	Manajemen Pemada. DCI
2.	Kantor PPS Kerjasama Mampang Prapatan	1 (satu)	-	-	Permanen	7 - 7 m.	Baik	Ruang sidang
3.	Kantor PPS Kerjasama Kramat Djati	1 (satu)	-	-	Permanen	7 - 7 m.	Baik	Ruang sidang
4.	Kantor Kerjasama/PPS Tambora	1 (satu)	-	-	Permanen	7 - 7 m.	Baik	Ruang sidang
5.	Kantor Kerjasama/ Tjempaka Putih	1 (satu)	-	-	Permanen	7 - 7 m.	Baik	Ruang sidang
6.	Almari untuk PPS/ Kebudayaan	220 (dua ratus dua puluh)	-	-	Permanen	175x80x60	Baik	

**BIRO PEREKALAN & PERHUBUNGAN PANITIA
PEMILIHAN DAERAH DCI DJAKARTA**

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Djalan Imam Bondjol No. 13

Tilpon No. 53418.

DJAKARTA.

SURAT - TUGAS

No.: 0107/III/2/1971.-

Dengan ini ditugaskan kepada nama-nama jang tersebut pada Surat lampiran ini untuk mengadakan penindjauan/penelitian ke Wilayah-Wilayah guna meneliti:

1. Apakah pengutipan Kartu A1 Pemilih ke-Daftar AA, AA1, A2, dan A3 sudah selesai dan dibundel seperti di-instruksikan.
2. Apakah alamat TPS jang telah dikirim ke-PPD. DCI sudah konkrit/ positif dan/atau tidak akan berubah lagi serta pada umumnya satu TPS meliputi beberapa RT sadja/RW dan lain sebagainya dalam Wilayah termaksud.
3. Apakah peralatan/perbekalan masih ada/sudah diterima dan digunakan dengan semestinja seperti:
 - a. R a d i o
 - b. Mesin-Tulis
 - c. Megaphone
 - d. Mobil/Motor.
4. Apakah pertanggungan djawab keuangan tertib atau tidak.
5. Berapa djumlah tjalon anggota DPRD/DPR jang telah dilajani.
6. Apakah tempat2 penjinpanan Kotak Suara sudah dipersiapkan.
7. Dan hal-hal lain jang dianggap perlu.

Penindjauan ini dimulai pada tanggal 22 Pebruari 1971 s/d. tanggal 5 Maret 1971 (selama 10 hari).- .

Demikian agar dilaksanakan sebaik-baiknya.-

Djakarta, 9 Pebruari 1971.-
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

Sekretaris,
ttd.
(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc)

TEMBUSAN:

1. Panitia Pemilihan Indonesia,
 2. Sekda DCI Djakarta,
 3. Direktorat I/Pemerintahan,
 4. Direktorat II/Kamtib,
 5. Para Walikota/PP. Kota,
 6. Para Tjamat/Ketua PPS,
 7. Para Lurah/Ketua PPP,
 8. Bendaharawan PPD. DCI Djakarta,
 9. A r s i p.-
-

LAMPIRAN : Pemberian Tugas Penelitian/Pemeriksaan ke P.P. Kota sampai dengan eselon bawahanja dalam Wilayah DCI Jakarta, dari Tgl. 22 Februari 1971 s/d Tgl. 5 Maret 1971.

1225

No. Urut	N a m a	Dibatan	Wilajah	Kendaraan	Keterangan
1.	Soetjipto Wirosardjono M.Sc.	Sekretaris	Koordinator untuk 5 Wilajah.	B.5247-M	
2.	Gunarto S.H.	Kep. Biro II.			
3.	Oebed Subhagio	Bendaharawan			
4.	Burhanuddin Hs.	Kep. Biro I	Djakarta Utara	B.1138-F	
5.	Djathrowadi	Staf Biro II	Djakarta Barat	B.9124-G	
6.	Dra. Max Sumaraw	Kep. Biro III			
7.	Soedarto	Staf Biro III	Djakarta Timur	B.5863-M	
8.	Muchroddi	Kabag.Keamanan			
9.	B a s r i	Staf Biro II	Djakarta Selatan	B.9148-G	
10.	E. Pandjaitan S.H.	Kep. Biro IV			
11.	Sjamsur Alamjah	Staf Biro IV	Djakarta Pusat	B.4101-Z	
12.	R. Pandji Murti	Kabag. Tata Usaha			
13.	Soekadi S.H.	Kabag. Alokasi			

Djakarta, 9 Pebruari

Djakarta, 9 Pebruari 1971.

PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

Sekretaris,

tttd.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
Djl. Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418
D J A K A R T A

**LAPORAN : Hasil Penelitian ke-Wilayah Djakarta
Selatan dan Djakarta Barat berdasar-
kan Surat Tugas No. 0107/III/2/1971.**

Sedjak achir bulan Pebruari 1971, Biro IV/Pengawasan telah mengadakan penindjauan dan penelitian ke-Wilayah Djakarta Selatan dan Djakarta Barat untuk mengetahui sampai dimana kemadjuan2 jang ada diwilayah tersebut, terutama ditingkat Kelurahan, dalam rangka persiapan Pemilihan Umum jang akan datang.-

Berhubung karena di-kedua Wilayah tersebut djumlah Kelurahan tjukup banyak, jaitu 111 (seratus sebelas) Kelurahan, sedangkan waktu, dan keadaan tjuatja tidak mengizinkan, maka jang dapat diteliti hanja beberapa Kelurahan dari tiap2 Ketjamatan, dan diutamakan menindjau Kelurahan jang kurang baik administrasinja.-

Dari hasil penelitian dapatlah diutarakan setjara singkat hasil2 penelitian tersebut sebagai berikut:

- A. — Pada umumnja Daftar AA dan AA1 (Berita Atjara Djumlah Penduduk) telah selesai dibundel dan disimpan dalam tempat khusus untuk itu.
- Daftar A2 dan A3 (Berita Atjara Djumlah Pemilih), telah selesai dibundel sesuai dengan Instruksi jang ada.
- Perbekalan2 jang dikirimkan ke-masing2 Ketjamatan sudah sampai kealamat jang bersangkutan seperti:
- Stempel, radio, megaphone, mesin tik, lampu petromax (untuk Ketjamatan jang belum ada penerangan listrik) kendaraan Honda dan sebagainya.

B. — PERUBAHAN PENDUDUK/PEMILIH.

Pada tiap2 Kelurahan masih terdapat sedjumlah Kartu Pemilih (Formulir A1) jang belum ditanda tangani.

Djumlah Kartu Pemilih jang belum ditanda tangani pada masing2 Kelurahan ada sekitar antara 10 s/d 30 lembar (orang) akan tetapi ada beberapa Kelurahan jang djumlahnja melebihi 200 buah. Djumlah tersebut tidak akan mempengaruhi djumlah TPS.

Masih banjak Kartu2 tersebut belum ditanda tangani, walaupun sudah diusahakan pemanggilannja, terutama disebabkan susahnja menemui jang bersangkutan dialamatnja.

Hal ini disebabkan karena kebanyakan diantaranya terdiri dari buruh2 lepas dan tidak mempunjai pekerjaan tetap.

C. — PEMBUATAN K.P.P.S.

Pada umumnja masing2 Kelurahan sudah mempersiapkan dan sedang menjusun Daftar2 petugas2 K.P.P.S., dan malahan beberapa Kelurahan sudah memiliki Daftar lengkap petugas K.P.P.S. (5 orang).

D. — PERUBAHAN T.P.S.

Djumlah T.P.S. se-waktu2 dapat berubah. Hal ini disebabkan beberapa Kelurahan Daftar TPS jang telah dikirimkan ke P.P.D. DCI belum lengkap.

E. — KEAMANAN TPS/PENJIMPANAN KOTAK SUARA.

Keamanan tempat2 TPS, dan tempat penjempanan Kotak Suara, pada umumnja dapat dijamin dan telah dipersiapkan.

F. — KELURAHAN/SARAN-SARAN.

Hampir setiap Kelurahan mengeluh, dan mohon perhatian PPD agar petugas2 di Kelurahan dapat diberikan alat kendaraan sepeda, dan biaja2 lainnja.

Hal ini dapat dimengerti karena kebanyakan Kelurahan2 tersebut hanya dapat ditjapai dengan kendaraan ketjil (sepeda).

G. – ALAT PENTJOBLOS.

Diminta supaya alat pentjoblos dan bantalan dibuat sedemikian rupa sehingga tanda gambar jang ditjoblos djelas, dengan demikian tidak meragukan petugas2.

Demikian garis besar hasil penelitian Biro Pengawasan.

Djakarta, 19 Maret 1971.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Kepala Biro Pengawasan/IV,

t.t.d.

(E. PANDJAITAN S.H.)

LAPORAN SITUASI KAMPANJE

Tanggal 27 April s/d 3 Mei 1971

U m u m.

Masa kampanye yang seharusnya mulai tanggal 27 April 1971, baru dimulai pada tanggal 28 April 1971. Sebenarnya kampanye itu sendiri sudah dilakukan oleh Parpol/Golkar jauh sebelum tanggal 27 April 1971, walaupun tidak setajara menjolok dimuka umum.

Pada pokoknya, kampanye dalam masa periode minggu pertama berjalan adem2 saja dan berjalan aman.

Parpol2/Golkar yang sudah memulai kampanye adalah (1). Partai N.U. didaerah (lapangan Pasar Minggu) dan Kebajoran Lama, Tg. Priok, Tjengkareng dan lain-lain. (2). Golongan Karya di Gelora Senajan.

Partai2 lainnya juga sudah mengadakan kampanye, akan tetapi belum setajara terbuka. Pada umumnya kampanye dalam babak pertama ini terutama berkisar pada penempelan/pemasangan tanda gambar/slogan tersebut ditempat-tempat yang agak ramai, seperti pada tiang2 listrik, pohon kayu dan sebagainya.

Sangat disayangkan adanya penempelan2 tanda gambar partai politik tertentu pada rambu2 jalan, sehingga tempo2 sukar bagi pengemudi mobil melihat rambu/tanda lalu-lintas.

Sebaiknya dibuat pemberitahuan melalui Press-Release di surat2 kabar dan sebagainya agar penempelan2 tanda gambar itu tidak menimbulkan gangguan pada rambu2 jalan.

Tanda2 gambar ini juga sedikit banyak akan mengganggu kebersihan kota.

Keamanan.

Keamanan pada umumnya adalah baik, baik kriminal maupun politis. Dibeberapa tempat terjadi perpejahan2 antara lain di daerah Kebajoran Lama, Pasar Minggu, Tg. Priok dan sebagainya.

Perpejahan itu pada umumnya berkisar pada penempelan2 tanda2 gambar saja.

Keributan2 pada masa kampanye di lapangan terbuka pada umumnya amansaja.

Kampanje malam hari.

Kampanje pada malam hari tanpa idjin pada umumnja dilakukan ditempat2/ rumah pribadi dengan camuflage selamatan, pesta2 dan lain-lain jang serupa itu, dimana dalam kesempatan itu tokoh2 Parpol/Golkat memberi tjeramah jang mendjurus pada kampanje untuk memenangkan golongannja.

Kegiatan P.K.I./G.30.S.

Kegiatan P.K.I./G.30.S., dalam masa kampanje babak pertama ini sepanjang pengetjekan belum nampak. Akan tetapi ada kabar2 bahwa kegiatan sisa2 P.K.I., terutama ex S.B.K.A./P.N.K.A. di daerah Manggarai mulai melakukan kegiatan-kegiatan.

Pengusutan tentang berita tersebut sedang dalam pengetjekan.

Ada info bahwa kedutaan-kedutaan tertentu, terutama kedutaan-kedutaan blok Komunis ikut aktif setjara sembunji dalam kegiatan Pemilu ini. Pengawasan untuk itu sedang diteliti.

Demikianlah situasi masa kampanje sampai saat ini.-

Djakarta, 3 Mei 1971.-

Kepala Biro Pengawasan PPD
DCI Djakarta,

(E. PANDJAITAN S.H.)

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**
Djalan Imam Bondjol No. 13 Tilp. 53418
D J A K A R T A .

L A P O R A N

- A.
1. Pada tgl. 12 Djuni 1971, kami telah menemui Kolonel Naja Iskandar Wakas Kodam V/Djaya, dan dalam kesempatan tersebut telah mengadakan pertemuan dengan perwira Proyek Pemilu antara lain Kolonel Jusuf Diponegoro, Let. Kol. Sarwani, Kapten Sihlahi, dsb.
 2. Pada pertemuan itu pihak Laksus/Kodam V/Djaya meminta agar unsur PPD DCI Jakarta ikut dalam Team Keamanan Pemilu jang tugasnja akan diatur dalam 3 team; masing2 team A, B, dan C, Unsur PPD (kami sendiri) duduk dalam kelompok team B sebagai Ketua Team B, tugasnja antara lain:
 1. Mengadakan pengetjekan setjara umum ketempat2 TPS umum dan kantor dsb.
 2. Membuat laporan kepada Panglima dari hasil pengetjekan.
 3. Laporan pertama setjara singkat dan disampaikan pada tgl. 19 Djuni 1971.
Dalam Team B ini duduk antara lain beberapa perwira menengah Kodam V/Djaya.
 4. Team Kelompok B akan mendatangi beberapa tempat kantor, Ketjamatan dsb. dan hasilnja akan dilaporkan.
- B. Hasil pengetjekan.
- Objek Pengetjekan : Djakarta Selatan
- Hasil Pengetjekan :
- a. 1. Ketjamatan Pasar Minggu.
Kotak Suara telah sampai langsung dialamat Kelurahan2

Surat Suara, model G dan lain-lain telah siap di Ketjamatan.

2. **Tenaga K.P.P.S./Keamanan**, sudah Coach dan sudah dilantik. Tenaga Keamanan telah disiapkan yang terdiri dari unsur2 Hansip Polri.

b. 1. Ketjamatan Kebajoran Baru.

Kotak Suara sudah sampai di Kantor Ketjamatan, belum dikirim ke Kelurahan akan dikirim secepatnya.

Kotak Suara dan perlengkapan lain masih disimpan di Ketjamatan dengan pertimbangan bahwa kotak2 Suara itu akan dikirim bersama2 dengan Surat Suara yang akan dilakukakan dan dimasukkan dalam kotak Suara sekaligus.

2. **Tenaga K.P.P.S./Keamanan**, sudah di Coach dan sudah dilantik, Tenaga Hansip sudah disiapkan, bilik2 T.P.S. sedang disiapkan.

3. Ketjamatan Kebajoran Lama.

i d e m dengan Kebajoran Baru.

4. Ketjamatan Mampang.

1. Kotak Suara sudah sampai di kantor Ketjamatan, akan dikirim ke Kelurahan bersama-sama dengan surat Suara dan perlengkapan2 lain.

2. **Tenaga K.P.P.S./Keamanan**, sudah dicoach, dan sudah dilantik (hari ini tgl. 16 Djuni 1971.)
Tenaga Keamanan untuk tiap2 T.P.S. sudah disiapkan, Bilik2 T.P.S. sedang disiapkan.

5. Ketjamatan Setia Budi.

1. Kotak Suara beserta surat2 lainnya sudah sampai di kantor Ketjamatan, dan akan dikirim bersama2 ke Kelurahan bersama2 dengan surat2 Suara dan surat2 lain secepatnya.
2. **Tenaga K.P.P.S./Keamanan**, sudah dicoach dan sudah di-

lantik Tenaga Keamanan untuk T.P.S.2 sudah disiapkan.

6. Ketjamatan Tebet.

1. Kotak Suara sudah sampai di Kantor Ketjamatan, dan sebagian sudah sampai di Kelurahan dan akan dikirim ke-Kelurahan ber-sama2 dengan surat2 lainnja.

2. Tenaga KPPS/Keamanan.

Sudah dicoach tapi belum dilantik diharapkan sebelum tanggal 20 Djuni 1971 sudah akan dilantik.

Tenaga Keamanan sudah disiapkan diseluruh Kelurahan.

Tjataan:

1. Kotak2 Suara untuk T.P.S. jang berdjumlah 98 buah belum dikirim.
2. Kotak Suara 10% dari djatah agar dapat disediakan jang akan disimpan di P.P. Kota sebagai tjadangan.
3. Emplop untuk Berita2 Atjara agar dapat dikirimkan.

Kesimpulan Sementara:

- Untuk seluruh wilayah Djakarta Selatan, persiapan2 penjelenggaraan telah hampir selesai.
- Situasi didaerah tersebut berdjalan aman.

Demikian laporan ini diperbuat.

Djakarta, 16 Djuni 1971.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH DA-
ERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Kepala Biro IV/Pengawasan,

t.t.d.

(E.PANDJAITAN S.H.)

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Jalan Imam Bondjol No. 13 Telp. 53418
D J A K A R T A.**

=====

**LAPORAN HASIL PENGETJEKAN
T.P.S. UMUM/KANTOR**

- I. Objek Pengetjeakan : a. T.P.S. Umum di Wilayah Jakarta Pusat.
b. T.P.S. Kantor/Swasta
a. Departemen Keuangan
b. R.S.U.P.
c. Bank Negara Indonesia
(B.N.I. 1946);

II. Hasil Pengetjeakan:
T.P.S. Umum

a. **Ketjamatan Gambir.**

aa. **Kotak Surat Suara.**

Kotak Surat Suara sudah dikirimkan keseluruhan Kelurahan dengan alat2 perlengkapan lain ketjuatli Surat Suara jang akan dikirim mendjelang Pemilu.

bb. **K.P.P.S.**

K.P.P.S. sudah dicoach akan tetapi belum disumpah Diharapkan K.P.P.S. sudah dapat dilantik sekitar tgl. 20 - 6 - 1971.

cc. **T.P.S. Kantor.**

Djumlah T.P.S. Kantor adalah 185 buah.
Djumlah T.P.S. pada laporan 10 Djuni 1971 adalah 142 buah.

dd. **Daftar A.**

Daftar A sudah disiapkan.

b. **Ketjamatan Sawah Besar.**

aa. **Kotak Surat Suara.**

Kotak Surat Suara beserta perlengkapan lainnja sudah sampai di Kelurahan. Surat Suara akan dikirim dalam waktu dekat ini, Kotak Surat Suara untuk T.P.S. Kantor belum diterima.

bb. **K.P.P.S.**

K.P.P.S. sudah dicoach, akan tetapi belum dilantik. Pelantikan diusahakan pada sekitar tgl. 20/6/1971.

cc. **T.P.S. Kantor.**

Djumlah T.P.S. Kantor ada sedjumlah 63 buah.

dd. **Daftar A.**

Daftar A untuk T.P.S. Umum dan Kantor sudah disiapkan.

III. T.P.S. Kantor.

a. Departemen Keuangan.

aa. Djumlah T.P.S. adalah 65 buah. Djumlah ini sudah termasuk unit-unit T.P.S. Kantor Padjak, Bea Tjukai, Asuransi dsb.

bb. **K.P.P.S.**

K.P.P.S. sudah dicoach dan sudah dilantik.

cc. **Daftar A.**

Daftar A sudah selesai.

dd. **Kotak Surat Suara.**

Kotak Surat Suara sudah disediakan dan bilik2 suara sudah mulai dibuat;

Tjatatatan:

Dilaporkan bahwa ada kurang lebih 300 Karyawan Departemen Ke-

uangan khusus diwilayah DCI Djakarta jang termasuk dalam daftar Laksus dalam katagori C, ternyata oleh Kelurahan diberi Daftar A, Penjelesaian sudah diteruskan ke Laksus.

b. R.S.U.P.

aa. Djumlah T.P.S. adalah 21 buah dan kemungkinan bertambah sampai dengan 1 Djuli 1971.
Laporan sebelumnja berdjumlah 14 buah.

bb. **K.P.P.S.**
K.P.P.S. sudah dicoach dan sudah dilantik.

cc. **Daftar A.**
Daftar A sudah disiapkan.

dd. **Kotak Surat Suara.**
Karena penambahan djumlah T.P.S. dari 14 menjadi 21, maka djumlah Kotak Surat Suara harus ditambah.
R.S.U.P. nampaknja agak ruwet karena djumlah T.P.S. jang resmi baru dapat diketahui pada tgl. 1/7/1971.
Hal tersebut disebabkan karena pasien2 jang sudah sembuh dan dapat keluar dari R.S.U.P. sebelum tgl. 1/7/1971 akan menggunakan hak pilihnja di T.P.S. Kelurahan, sedangkan pasien jang belum sembuh sampai dengan tgl. 1 Djuli 1971 akan mempergunakan hak pilih di T.P.S. R.S.U.P.

ee. **Daftar A4.**
Sebagian Daftar A4 Karyawan belum dapat diselesaikan terutama dari Katjamatan Kaboran Baru dan Setia Budi. Penjelesaiannja sedang dalam pelaksanaan.
Kedua Tjamat jang bersangkutan telah menolak memberikan A4 tsb. dengan alasan terlalu banyak.

Tjatatatan :

T.P.S.-T.P.S. Kantor di B.N.I., Bank Bumi Daya sudah dalam keadaan siap baik perlengkapan maupun penyelenggaraannya.

Djakarta, 19 Djuni 1971.

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA**

Kepala Biro IV/Pengawasan,

ttd.

(E. Pandjaitan S.H.)

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH D.C.I. DJAKARTA**

No. Ab. 2/1/5/1970

tentang

**PENUNDUKUN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN PANITIA PEMI-
LIHAN DAERAH, DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA PEMILIHAN DAERAH
D.C.I. DJAKARTA**

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam penggunaan keuangan Panitia Pemilihan Daerah, perlu adanya pertanggung jawaban yang sebaik-baiknya dan terpisah dari pada pertanggung jawaban Anggaran Pemerintah D.C.I. Djakarta;
 2. Bahwa pemakaian uang tersebut harus dilakukan sehemat mungkin, tjermat dan dipergunakan setjara efisien;
 3. Bahwa pelaksanaan ad. 1. dan ad. 2 diatas, dianggap perlu adanya satu Badan Pengawas untuk melakukan tugas pengawasan dan bimbingan terhadap penggunaan uang Panitia Pemilihan Daerah;
 4. Bahwa Sdr. Kepala Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah DCI Djakarta sesuai dengan Jabatannya dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk mendjabat **Kepala Pengawasan Keuangan Pemilihan Daerah ;**
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 ;
 2. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-Undang No. 6 tahun 1969 ;
 3. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 jo. Undang-Undang No. 5 tahun 1969 ;
 4. Keputusan Presiden No. 33 tahun 1969 ;
 5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1970 jo.
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1970 ;
 6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 34 tahun 1970 ;

7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 17 Pebruari 1970 No. Fe. 18/1/9/ 1970, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan ralat dari Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 25 Pebruari 1970.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Mengangkat Sdr. Kepala Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah DCI Jakarta dengan bagian2 jang dibawahinja in ex officio (karena djabatan) sebagai Badan Pengawas Keuangan dari Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Jakarta.
- II. Segala sesuatu jang berhubungan dengan pengawasan dilaporkan langsung kepada Gubernur/KDH DCI Jakarta selaku Ketua Panitia Pemilihan Daerah DCI Jakarta.
- III. Pembiajaan khusus untuk pengawasan dalam pemilihan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Daerah D.C.I. Jakarta.
- IV. Hal-hal jang belum tjukup diatur dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat ini akan diatur dan diperbaiki kemudian dengan Surat Keputusan tersendiri.
- V. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : D j a k a r t a.

Pada tanggal : 2 Nopember 1970.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA**

t.t.d.

ALI SADIKIN

Letnan Djenderal KKO

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada Jth. :

1. Menteri Dalam Negeri (5X)
 2. Inspektur Djendral Dalam Negeri (2X)
 3. Lembaga Pemilihan Umum
 4. Para Wakil Kepala Daerah
 5. Para Wakil Pimpinan Dewan
 6. Para Anggota B.P.H.
 7. S e k d a
 8. Panitia Pemilihan Umum Tingkat DCI Djakarta
 9. Pimpinan Harian BP. BPP.
 10. Para Kepala Direktorat/Inspektorat/Biro
 11. Para Walikota
 12. Para Kep. Dinas/Kantor/Instansi dalam lingkungan Pem. DCI Djakarta.
 13. Para Tjamat/Lurah.
 14. Perusahaan2 Daerah DCI Djakarta.
-

**PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA
D J A K A R T A
Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan**

No. : 165/IV/Kep. IPPK/Sk/71. Djakarta, 7 April 1971.
Lamp. :
Hal : Laporan hasil pemeriksaan Kepada Jth.
 Administrasi Keuangan Pa- Bapak Gubernur Kepala Daerah
 nitya Pemilihan Daerah – Chusus Ibukota Djakarta,
 D.C.I. Djakarta. di –

D J A K A R T A .

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Administrasi Keuangan Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta yang dilakukan dari tanggal 12 Maret s/d. 31 Maret 1971. Pemeriksaan kami ini hanya sampai dengan tanggal 28 Februari 1971 sadja dengan keadaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Djumlah uang yang disediakan oleh Lembaga Pemilihan Umum kepada Panitia Pemilihan Daerah D.C.I. (P.P.D. D.C.I.) berdasarkan SKO Menteri Keuangan R.I. sebesar ----- Rp. 104.940.508,50.
2. Dari djumlah anggaran tersebut pengelolaannya dibagi dua jaitu :
 - a. Untuk belandja Beban Sementara dimana uangnya langsung diserahkan kepada Bendaharawan P.P.D. D.C.I. dalam bentuk S.p.m.u. Giro dan penggunaannya harus dipertanggung djawabkan kemudian.
 - b. Untuk Belandja Beban Tetap. Pelaksanaan pembeliannya diserahkan kepada P.P.D., sedangkan uang/S.p.m.u. Gironja harus diambil sendiri oleh leveransirnja (langsung dibajarkan oleh K.B.N. kepada pemborong/leveransir).
3. Sampai dengan tanggal 28 Pebruari 1971 uang yang sudah ditjairkan untuk belandja Beban Sementara sebesar --- Rp. 54.916.958,-. Selain uang yang diterima dari K.B.N. dengan Otorisasi djuga memeriksa uang tunai lainnja dari :

- a. Uang muka dari L.P.U. sebesar Rp. 3.166.500,-
 - b. Pinjaman dari Pemerintah DCI „ Rp. 2.090.000,-
- Djadi uang jang diterima seluruhnja
berdjumlah Rp. 60.173.458,- (Rp. 54.916.958,- + Rp. 3.166.500,- +
+ Rp. 2.090.000,-).
4. Uang jang telah digunakan sampai dengan 28 Februari 1971 sebesar
Rp. 32.349.955,65 dan sisanja sebesar ----- Rp. 27.823.502,35
disimpan dalam Brandkast dan di B.N.I. 1946 Tjabang Gambir.
 5. Administrasi Keuangan P.P.D. D.C.I. dilaksanakan dengan tjukup
baik dan sederhana dimana buku2 jang digunakan hanja Buku Ta-
belaris dan Buku Bank tetapi tidak ada Buku Kas Harian.

Saran – Saran.

1. Perlu dibuat Buku Kas Harian, agar dengan demiklan mempermudah
pengawasan penggunaan uang setiap saat.
2. Penerimaan2 dan Pengeluaran2 seharusnja disertai dengan bukti2
dan dibukukan.
3. S.p.m.u.2 jang langsung diberikan oleh K.B.N. kepada leveransir
supaja tembusannja dimintakan.
4. Penerimaan2 jang bukan tunai, sebaiknja tidak dibukukan dalam
penerimaan Kas tetapi sebagai tjatatan sadja.

Tjatatatan.

Keempat Saran2 ini telah dibitjarakan dengan Sekretaris P.P.D. D.C.I.
dan telah dilaksanakan mulai 1 April 1971.

Demikianlah laporan kami ini dan pemeriksaan ke Wilayah2 masih
sedang kami laksanakan.

Kepala Inspektorat Pengawasan dan Peme-
riksaan Keuangan Pem. DCI. Djakarta,
t.t.d.

TEMBUSAN :

1. Lembaga Pemilihan Umum.
 2. Panitia Pemilihan Daerah
DCI. Djakarta.
 3. A r s i p.
-

(Drs. B.P. Hoetapea).
Akuntan, Reg. Negara A-12

PEMERINTAH D.C.I. DJAKARTA
Inspektorat Pengawasan dan Peme-
riksaan Keuangan

BERITA-ATJARA No.: 150/IV/Kep. IPPK/Sh/71
Pemeriksaan Kas Pada:

Panitya Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta.

Pada hari Sabtu tanggal: 27 Maret 1971 **jang bertanda tangan**
dibawah ini:

- 1. Mochtar Zakaria S.H.**
- 2. Damsuki Sembada**
- 3. Budimanto Muliodihardjo.**

Petugas2 dari Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Ke-
uangan D.C.I. Djakarta dengan Surat Perintah Inspektorat Penga-
wasan dan Pemeriksaan Keuangan D.C.I. Djakarta No. 270/III/
Kep. IPPK/71. Tanggal 12 Maret 1971, telah melakukan
PEMERIKSAAN KAS pada:

Bendaharawan Panitya Pemilihan Daerah D.C.I. Djakarta, dengan
keadaan sbb.:

Uang tunai dalam kas Rp. 702.382,50

Keadaan menurut Buku Kas:

- 1. Saldo kas tanggal : 1 Maret 1971 Rp. 25.733.502,50**
- 2. Penerimaan2 tgl. : 1 s/d 3 - 3 - 1971 :**
 - a S.P.M.U. 34739 Rp. 3.570.000,--**
 - b. " 36631 Rp. 2.082.200,--**

-----Rp. 5.652.200,--

-----Rp. 31.385.702,50

- 3. Pengeluaran2 tgl. : 1 s/d 3 - 3 - '71.**

a. Honorarium	Rp. 1.223.250,-	
b. Uang sidang	" 523.055,-	
c. Perdjalan	" 159.000,-	
d. Ongkos kantor	" 160.975,-	
e. U.T.L.	" 751.525,30	
f. Kendaraan	" 108.035,-	
g. Kesedjahteraan	" 129.840,-	
	<u> </u>	Rp. 3.055.680,-

4. Saldo Kas tanggal : 27 Maret 1971 Rp. 28.330.022,50

Selisih/kurang . . . Rp. 27.627.640,00

TJATATAN :

Selisih (~~lebih~~/kurang) sebesar Rp. 27.627.640,— tersebut diatas, disebabkan adanya :

I. Uang disimpan di Bank

- a) B.N.I. 1946 Tjabang Gambir Saldo per 10/2-71 Rp. 25.929.706,—
- b) B.I. Saldo per 17 Maret 1971 „ 3.238,—

- II. Kwitansi-kwitansi yang belum dibukukan** „ 1.704.565,—
-
- Rp. 27.637.509,—**

Kelebihan sebesar Rp. 9.869,—

Demikianlah Berita Atjara ini dibuat dengan sebenarnja dan ditanda tangani oleh para pemeriksa serta bendaharawan/Kepala : Direktorat/Biro/Dinas seperti tersebut diatas.

DJAKARTA, 27 Maret 1971.

Pemeriksa :

ttd.

Jang diperiksa,
Bendaharawan/Pemegang Kas,
ttd.
(Oebed Soebhagio)

1. Mochtar Zakaria S.H.

ttd.

2. Damsuki Sembada

ttd.

3. Budimanto M.

Mengetahui dan menjetudjui
Sekretaris P.P.D. D.C.I. Djakarta,

ttd.

(SOETJIPTO WIROSARDJONO M.Sc.)

KEADAAN KEUANGAN.

Dari hasil pemeriksaan kami pada Sekretariat Panitia Pemilihan D.C.I. Djakarta dapatlah kami beri gambaran tentang keluar masuknya uang Kas pada Sekretariat P.P.D. - D.C.I. Djakarta s/d 28 Pebruari 1971 sbb.:

Penerimaan	Rp.	60.173.458,-
Pengeluaran	Rp.	<u>32.349.955,65</u>

Sisa Kas per 28 Pebr. 1971 Rp. 27.823.502,35

A. Penerimaan sedjumlah Rp. 60.173.458,- terdiri dari:

1. - Uang muka dari L.P.U.	Rp.	3.166.500,-
2. Pindjaman dari Pem.DCI	Rp.	2.090.000,-
3. S.P.M.U.	Rp.	<u>54.916.958,-</u>
		Rp. 60.173.458,-

TJATATAN Pindjaman dari Pemerintah D.C.I. sampai saat ini belum dibajarkan kembali, tetapi sudah ditjadangkan sebesar itu, (Rp. 2.090.000,-) dan uangnja disimpan oleh Bendaharawan Sekretariat P.P.D. - D.C.I. dan belum termasuk dalam Berita Atjara Kas opname Kami. (Lihat lampiran Berita-Atjara No. 150/IV/Kep. IPPK/Sk./71).

B. Djumlah pengeluaran sebesar Rp. 32.349.955,65 ini dapat diperintji s.b.b.:

a. Disetor ke Kas Negara	Rp.	2.150,-
b. Honorarium	"	4.051.600,-
c. Uang Sidang	"	2.085.075,-
d. Biaja Perdjalan	"	2.056.185,-
e. Ongkos Kantor	"	6.213.363,-
f. U.T.L.	"	2.777.714,-
g. Pemeliharaan Kendaraan	"	1.341.787,75
h. Kesedjahteraan	"	613.005,40
i. Uang Premi	"	8.478.655,-
j. Biaja Angkutan	"	597.750,50
k. " Santiadji	"	2.547.770,-
l. Pembelian Kendaraan	"	827.400,-
m. Uang duka	"	7.500,-
n. Kotak memilih	"	<u>750.000,-</u>
	Rp.	32.349.955,65

Dari djumlah Rp. 32.349.995,65 djumlah sebesar Rp. 21.281.335,- di-drop ke Wilajah dengan perintjian s.b.b.:

LAMPIRAN III:

REGISTER PENUTUP KAS

SALDO-KAS :

Terdiri dari :

1)	Lembaran uang kertas	Rp.	10.000,-	-	lb.	Rp.	-
	" " "	"	5.000,-	18	"	"	90.000,-
	" " "	"	1.000,-	132	"	Rp.	132.000,-
	" " "	"	500,-	72	"	"	36.000,-
	" " "	"	100,-	1	"	"	100,-
	" " "	"	50,-	1	"	"	50,-
	" " "	"	25,-	34	"	"	850,-
	" " "	"	10,-	-	"	"	-
	" " "	"	5,-	-	"	"	-
	" " "	"	2,50	1	"	"	2,50
	" " "	"	1,-	-	"	"	-
	" " "	"	0,50	-	"	"	-
	" " "	"	0,25	-	"	"	-
	" " "	"	0,10	-	"	"	-
	" " "	"	0,05	-	"	"	-
	" " "	"	0,01	-	"	"	-
							Rp. 259.002,50
2)	Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan ordonansi/Spmu/Spm, wesel, tjek, saldo Bank, me- terai, disp, dan bon2					Rp.	443.380,-
Total:						Rp.	702.382,50

Tanda tangan:

ttd.

(OEBED SOEBAGIO)

BENDAHARAWAN

LAMPIRAN

MEMPERKENALKAN

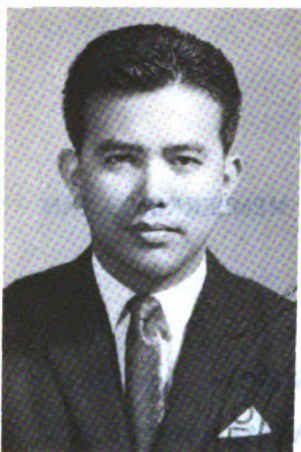
**ANGGOTA – ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH TK. I
DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA**

HASIL

|

PEMILIHAN UMUM 1971

1251



Drs. M.B. SAMOSIR

Agama : Rooms Katolik
 Alamat : Djl. Dr. Mawardi VI/
 504, Grogol, Djakarta.
 Organisasi : Partai Katolik
 Tempat/Tgl. lahir/
 umur : Tapanuli, 1 Nopem-
 ber 1939.
 Pendidikan : S.D. Tahun 1953.
 S.L.P.Tahun 1956.
 S.L.A. Tahun 1959
 Sardjana Lengkap Sos-
 pol Tahun 1965.

Pekerdjaan terachir : Anggota DPRD-GR
 DCI Djakarta.

SUDJA'I NATAKUSUMAH



Agama : Islam
 Alamat : Dukuh Pinggir Gg. 4
 Rt.0015/05. Tanah
 Abang, Djakarta.
 Organisasi : Partai Sjarikat Islam
 Indonesia (P.S.I.I).
 Tempat/tgl. lahir/
 umur : Tasikmalaja, 14 No-
 pember 1926.
 Pendidikan : H.I.S. Tahun 1941.
 Nippon Gokku Tahun
 1942. Perguruan Ting-
 gi Islam Djurnalistik
 (2 th.). Kursus Kader
 P.S.I.I. Tahun 1953.
 Pendidikan ALEC –
 Manila Tahun 1964.
 Pekerdjaan terachir : Anggota DPRD-GR
 DCI Djakarta.



Drs. H.A. SJATIBI

Agama : Islam
Alamat : Djl. Jos Sudarso Lo-
 rong 100/48, Tan-
 djung Priok -Djakarta.
Oragnisasi : Partai Nahdlatul Ulama.
Tempat/tgl. lahir/
umur : Tangerang, 17 Desem-
 ber 1935.
Pendidikan : S.D. Tahun 1950 (amat)
 Tsanawijah Th. 1956
 (amat).
 P.T.A.I.N. Th. 1957.
 (amat).
 I.A.I.N. Th. 1964.
 (amat).
Pekerdjaan terachir : Anggota DPRD-GR
 DCI Djakarta.



Nj MASJRAFAH Z.A. NOEH

Agama : Islam
 Alamat : DjL Prapantja II/5,
 Kebajoran Baru, Dja-
 karta.
 Organisasi : Partai Nahdlatul Ulama.
 Tempat/tgl. lahir/ : Djakarta, 8 Djuli 1940.
 umur.
 Pendidikan : S.D. Th. 1954.
 S.M.P. Th. 1957.
 S.M.A. Klas II Th. 1959.
 Pekerdjaaan terachir : Anggota DPRD-GR
 DCI Djakarta.



MUHASJIM N.

Agama : Islam
 Alamat : Djl. Melati IV Rt.006/
 02, Tjengkareng.
 Organisasi : Partai Nahdlatul Ulama.
 Tempat/Tgl. Lahir/ : Djakarta, 12 Pebruari
 umur : 1939.
 Pendidikan : S.D. Th. 1954.
 Ibtidaijah Th. 1953.
 P.G.A. 4 th. Th. 1959
 (Tamat).
 P.G.A.N Th. 1961
 (Tamat)
 I.A.I.N. Tk.III Th. 1964.
 Up-Grading Bendaharawan
 Th. 1968.

Pekerdjaan terachir : Kepala P.G.A.N. IVth.



H. ABD. MADJID TOJIB

Agama : Islam
 Alamat : Kuningan Timur Rt001/
 04 Djakarta.
 Organisasi : Partai Nahdlatul Ulama
 Tempat/tgl. lahir/ : Djakarta, 10 Pebruari
 umur. : 1937.
 Pendidikan : Madrasah-Ibtidaijah 4 th.
 S.D. 6 Th. tamat.
 S.M.P. 3th. tamat.
 S.M.A. 3th. tamat.

Pekerdjaan terachir : Pedagogang.

MOH. JUSUF ABDULLAH

Agama : Islam
Alamat : Djl. Talang 14 B, Rt.001/
03, Djakarta.
Organisasi : Partai Nahdlatul Ulama
Tempat/Tgl lahir/
umur : Djakarta, 28 April 1935.
Pendidikan : Frobel School Dkt. Th.
1935; Madrasah Al Hi-
dajah Al Islamijah 1941;
Nippongo Gakko Th.
1944; S.M.P. Th. 1953
Pend. KOTRAR Th. 1965.
Pekerdjaan terachir : Adjudan Menteri Ne-
gara KESRA.



HASBULLAH AMIN

Agama : Islam
Alamat : Djl. Dewi Sartika No. 87
Djakarta.
Organisasi : Partai Nahdlatul Ulama.
Tempat/tgl. lahir : Djakarta, 2 Djuli 1939.
umur
Pendidikan : S.D. 6 tahun;
S.M.P. 3 tahun;
S.M.A.-C 3 tahun.
Madrasah Unwanul Huda
(Tamat); Pesantren Al
Hidajah (9th.)
Pekerdjaan terachir : Direktur C.V. HASTI



MUHAMAD ALIE

Agama : Islam
 Alamat : Klender Selatan 33,
 Djakarta.
 Organisasi : Partai Nahdlatul Ulama
 Tempat/Tgl. lahir/ : Djakarta, 22 Djuni 1924.
 umur
 Pendidikan : H.I.S.
 Pendidikan Agama Islam.

Pekerdjaan terachir : Pedagang.



MA'RUF AMIN B.A.

Agama : Islam
 Alamat : Djl. Deli Gg. 27/41,
 Tandjung Priok, Djakarta.
 Organisasi : Partai Nahdlatul
 Ulama.
 Tempat/Tgl. Lahir / : Tangerang, 11 Maret
 umur 1943.
 Pendidikan : S.D. 6 thn. (1955)
 Tsanawijah (1961)
 Sardjana Muda (Th. 1965)

Pekerdjaan terachir : Dinas Penerangan Agama.

AGUS SALIM



Agama : Islam
 Alamat : Djl. Timah A12 Galur,
 Djakarta.
 Organisasi : Parmusi
 Tempat/Tgl. lahir/
 umur : Pangkalan Brandan,
 3 Agustus 1927.
 Pendidikan : H.I.S. Muhammadiyah
 Medan, 1939;
 Taman Dewasa/Siswa Me-
 dan 1943; Akademi Bank
 Perbana Th. 1962; Kur-
 sus Penilik Keuangan
 Negara (Th. 1962); Fak.
 Ekonomi Djajabaja Tk. III
 (1965); Latihan Tjalon
 Perwira Th. 1946.

Pekerdjaan terachir : Pegawai Direktorat Pe-
 nerangan Agama De-
 partemen Agama R.I.

HARTONO MARDJONO S.H.



Agama : Islam
 Alamat : Djl. Hidup Baru 008/07
 Gandaria Utara Djakarta.
 Organisasi : Parmusi.
 Tempat/Tgl. lahir/
 umur : Tegal, 17 Djuni 1937
 Pendidikan : S.D. 6 Th.
 S.M.P. 3 Th.
 S.M.A.-B (Tamat)
 Fak. Hukum & I.P.K.
 Univ. Indonesia (Tamat)
 Pekerdjaan terachir : Pegawai PT. Pengolahan
 Tjat Pernis—Utama.



NJ. HUDININGSIH WIRJADI

Agama : Islam
 Alamat : Tebet Timur Dalam I/
 No.11 A, Djakarta.
 Organisasi : Golongan Karya.
 Tempat/Tgl. lahir/
 umur : Purbolinggo, 22 Desem-
 ber 1933.
 Pendidikan : S.D. (tamat) Th. 1948;
 S.M.P. (tamat Th. 1952);
 S.G.A. (tamat Th. 1954);
 B.I. Bhs. Inggris Th. 1959;
 East West Center, Hawai
 Th. 1963/64.
 Pekerdjaan terachir : Persit Kartika Chandra
 Kirana.



F.M.T. RADJAGUKGUK

Agama : Protestan
 Alamat : Djl. Tjideng Barat 113,
 Djakarta.
 Organisasi : Golongan Karya.
 Tempat/Tgl. lahir/
 umur : Tapanuli Utara, 23 Dja-
 nuari 1941.
 Pendidikan : S.D. Tamat Th. 1953;
 S.M.P. Tamat Th. 1956;
 S.M.A.-C Tamat Th. 1960
 Fak. Ekonomi U.I. (Lulus
 Tk. Persipaan Th. 1965)
 Tk. Sardjana II Th. 1969.
 Pekerdjaan terachir : Pegawai Departemen Per-
 industriian Dasar.



PINANTUN HUTASOIT

Agama : Protestan
Alamat : Djl. Kp. Melaju Ketjil
 III/3A, Djatinegara.
Organisasi : Golongan Karya.
**Tempat/Tgl. lahir/
 umur** : Siborong-borong, 29 Djuli
 1935.
Pendidkan : S.R. Tamat Th. 1951;
 S.M.P. Tamat Th. 1954;
 S.M.A. Tamat Th. 1957.
Pekerdjaan terachir : Anggota DPRD-GR
 DCI Djakarta.



EFFENDI JUSUF S.H.

Agama : Islam
Alamat : Djl. Let Djend. Suprpto
 K 20, Djakarta.
Organisasi : Golongan Karya
**Tempat/Tgl. lahir/
 umur** : Djakarta, 14 Maret 1942.
Pendidikan : S.D. Tamat Th. 1956
 S.M.P. Tamat Th. 1959
 S.M.A. Tamat Th. 1960
 Sardjana Hukum I.P.K.
 Th. 1967.
Pekerdjaan terachir : Anggota DPRD-GR
 DCI Djakarta.



K A F R A W I

Agama : Islam
 Alamat : Kmp. Kepu Gg. VI/218
 Kel. Bungur, Djakarta.
 Organisasi : Golongan Karya.
 Tempat/Tgl. lahir/
 umur : Madura, 4 April 1919.
 Pendidikan : S.D. (Tamat); Schakel
 School 3 Th. (tamat);
 Kursus Kehakiman
 Khusus Pemasjarakat
 (9 bl.); Kursus Kepolisian
 Djokjakarta 6 bln; Kursus
 Hukum Pidana/Ekonomi
 (3 bln.); Kader School
 Malang sebelum Perang
 Dunia ke-II.
 Pekerdjaan terachir : Pensiunan Let. Kol.
 CPM.



ROBERTO BANGUN

Agama : Kristen Protestan
 Alamat : Djl. Karet Tengsin Gg. H.
 Latif I Rt.009/06, Djakarta.
 Organisasi : Golongan Karya.
 Tempat/Tgl. lahir/
 umur : Kabandjahe, 5 September
 1939.
 Pendidikan : S.D. Th. 1953 (tamat)
 S.M.P. Th. 1957 (tamat)
 S.M.A. Th. 1960 (tamat)
 Fak. Publisistik Tk. III
 L.A.N. Th. 1963.
 Pekerdjaan terachir : Wartawan.



H. MOCHTAR ZAKARIA S.H.

Agama : Islam
 Alamat : Djl. Hanglekir I/VII Keb.
 Baru, Djakarta.
 Organisasi : Golongan Karya.
 Tempat/Tgl. lahir/
 umur : Bima, 25 April 1930.
 Pendidikan : S.D. (Tamat Th. 1944);
 S.M.P.(,, Th. 1948);
 S.M.A.(,, Th. 1951);
 Fak. Sospol (BA Th.
 1958) U.G.M.; Fak. Hu-
 kum Djajabaja (Tamat
 Th. 1964)
 Pekerdjaan terachir : Peg. Pemerintah DCI
 Djakarta.



HADJI SA'ALI S.H.

Agama : Islam
 Alamat : Djl. Kramat Raya 44,
 Djakarta.
 Organisasi : Golongan Karya.
 Tempat/Tgl. lahir /
 umur : Djakarta, 1 Djuli 1930.
 Pendidikan : S.D. (Lulus).
 S.M.P. (Lulus).
 S.M.A. (Lulus).
 Sardjana Hukum (Lulus)
 Sedang Kuliah dalam bi-
 dang Notariat dan Bi-
 dang Hukum untuk Ge-
 lar Doktor.
 Pekerdjaan terachir : Biro Hukum Staf Mada
 Hansip VII.



HENRY SIREGAR

Agama : Protestan
 Alamat : Djl. Panglima Polim 87,
 Djakarta.
 Organisasi : Golongan Karya.
 Tempat/Tgl. lahir/
 umur : Tapanuli, 27 April 1926.
 Pendidikan : S.M.A.-C (Tamat Th.
 1956); Fak. Hukum I.P.K.
 Tk. I USU Medan, Th.
 1963/64; S.S.K.A.D.
 1954/1955.
 Pekerdjaan terachir : Anggota DPRD-GR
 DCI Djakarta.



ARIFIN TOBING

Agama : Islam
 Alamat : Djl. Kadji 37 Pav. Dja-
 karta.
 Organisasi : Golongan Karya.
 Tempat/Tgl. lahir/
 umur : Medan, 26 Maret 1923.
 Pendidikan : H.I.S. Th. 1937.
 MULO Th. 1941.
 Pekerdjaan terachir : DPH Sekber GOLKAR
 Pusat.



Drs. SOEDJOKO

Agama : Islam
Alamat : Kompl. Perumahan Perindustrian Pantjoran, Djakarta.
Organisasi : Golongan Karya.
Tempat/Tgl. lahir/umur : Gresik, 7 Mei 1927.
Pendidikan : H.I.S. Th. 1941; Sek. Guru Laki-laki Kls. 4 Th. 1945.; S.M.A. Th. 1951; Fak. Ekonomi U.I. Th. 1964 (tamat)
Pekerdjaan terachir : Depertemen Perindustrian.



NJ. SJAMSIDAR MOERDONO

Agama : Islam
Alamat : Djl. Bonang 7, Djakarta.
Organisasi : Golongan Karya.
Tempat/Tgl. lahir/umur : Bengkalis, 1 Djanuari 1917.
Pendidikan : H.I.S. Th. 1930; MULO Th. 1933; Sek. Pend. Guru Kepandaian Putri (Th. 1933); Kursus Bhs Melaju; Kursus Bhs. Inggris; Kursus Bhs. Perantjis; Kursus Bhs. Djerman; Pernah Kuliah di Fak. Sastera.
Pekerdjaan terachir : Anggota DPRD-GR DCI Djakarta.



NJ. CHAERANI HIDAJAT

Agama : Islam
 Alamat : Djl. Madjapahit No. 9A,
 Djakarta.
 Organisasi : Golongan Karya.
 Tempat/Tgl. lahir/
 umur : Djakarta, 21 Maret 1928.
 Pendidikan : H.I.S. Th. 1941.
 S.K.P. WAKABA (Tidak
 tamat); S.K.P. Negeri (Ta-
 mat Th. 1947); Gov.
 Kweek School K.I.II
 Th. 1949.
 Pekerdjaan terachir : Anggota Pertiwi (Pe-
 ngurus Pusat Persit)



I MADE SUWINDA S.H

Agama : Hindu
 Alamat : Djl. Panti Asuhan 36, Bida-
 ratjina, Djakarta.
 Organisasi : Golongan Karya.
 Tempat/Tgl. lahir/
 umur : Samarinda, 25 Oktober
 1940.
 Pendidikan : S.D. Th. 1952.
 S.M.P. Th. 1955.
 S.M.A. Th. 1958.
 Sardjana Hukum Univ.
 Erlangga Th. 1963.
 Pekerdjaan terachir : Anggota DPRD-GR
 DCI Djakarta.



HASANUDDIN ANIS

Agama : Islam
Alamat : Djl. H. Samanhudi 63 Pav.
 Rt. 007/05, Djakarta.
Organisasi : Golongan Karya.
**Tempat/Tgl. lahir/
 umur** : Bengkulu, 27 Djuli 1939.
Pendidikan : S.D. Th. 1951; S.M.P.
 Th. 1954; S.M.A.-C
 Th. 1958; Ak. Kepemim-
 pinan Niaga Tk. II Th.
 1963; Kursus English 6 bln.
 Th. 1962; Kursus Admi-
 nistrasi (Tamat Th.1958).
Pekerdjaan terachir : Dagang.



PARULIAN SILALAHI

Agama : Kristen Protestan
Alamat : Gg. Buntjit I/Rt.007/02
 Mamp. Prapatan, Djakarta.
Organisasi : Parkindo
**Tempat/Tgl. lahir/
 umur** : Pangukuran, 25 Mei 1939.
Pendidikan : S.D. — S.M.P. Th. 1958;
 S.G.A. Th. 1961; K.D.C.
 Th. 1962/1963; Perg.
 Tinggi Publisistik Tk. II.
Pekerdjaan terachir : Wartawan.



Drs. JUSUF MERUKH

Agama : Protestan
Alamat : Djl. Darmawangsa II A/2
 Keb. Baru, Djakarta.
Organisasi : P.N.I.
**Tempat/Tgl. lahir/
 umur** : Pulau Roti, 10 Djuni
 1934.
Pendidikan : S.D. Th. 1949;
 S.M. Kristen Th. 1952;
 S.P.M.T. Th. 1955;
 Fak. Biologi UNAS –
 Th. 1956; UNTAG Djsr.
 Public Administration
 Sardjana Lengkap UN-
 TAG Th. 1964; Texas
 Agriculture Mechanical
 College Th. 1959; Agri-
 culture Economic divi-
 sion, Texas – Th. 1959.
Pekerdjaan terachir : Dir. Djen Agraria Dept.
 Dalam Negeri.



JONATHAN BISMA MANOPPO

Agama : Islam
Alamat : Kel. Rawasari Rt. 008/04
 Tjemp. Putih, Djakarta.
Organisasi : P.N.I.
**Tempat/Tgl. lahir/
 umur** : Djakarta, 11 Oktober
 1928.
Pendidikan : S.D. Th. 1942;
 S.M.P. Th. 1948;
 S.M.A.-C Th. 1954.
Pekerdjaan terachir : Ketua Jajasan Pendidikan
 Pantjasila.



Ir. ANDJAR SISWOJO

Agama : Islam
 Alamat : Kompl. Perumahan Bappenas Tomang, Djakarta.
 Organisasi : P.N.I.
 Tempat/Tgl. lahir/ umur : Tuban, 27 April 1932
 Pendidikan : S.R. Th. 1944; Taman Madya Tuban 1950; S.M.A. Th. 1953. Doktoral lengkap Pertanian/Kehutanan Bag. Pertanian GAMA Th. 1961.
 Pekerdjaan terachir : Pegawai Bappenas.

RALAT :

Foto jang tertera atas nama **JONATHAN BISMA MANOPPO**, halaman 1266 seharusnya atas nama **KURBIANA HALIMAN**, halaman 1267 dan sebaliknya.



KURBIANA HALIMAN

Agama : Islam
 Alamat : Kompl. Rawabadak BI, II/ 37B, Tandjung Priok, Djakarta.
 Organisasi : P.N.I.
 Tempat/Tgl. lahir/ umur : Lb. Rukam (Baturadja) 18 Agustus 1937.
 Pendidikan : S.M.A.-C Tamat Th. 1964; Univ. Swasta Tk. I; Kursus Kader Koperasi Th. 1960; Kursus Kader Irian Barat Th. 1962; Kursus PN. PTK. Th. 1968; Kursus Keahlian Kompensasi Ketjelakaan
 Pekerdjaan terachir : Peg, Dept. Tenaga Kerdja.

dr. med. J.M.V. SUWARTO

Agama : Rooms Katolik
Alamat : Djl. Tebet Timur Raya
23 Djakarta.
Organisasi: Wkl. IDI Tjab. Dkt. di
Sekber Golkar.
Tempat/ : Solo, 6 Mei 1941.
Tgl.lahir/
umur
Pendidik-: Dokter, lulusan Fak.Ke-
an
dokteran Univ. Indone-
sia.
Pekerdjaan:Dokter.
terachir

M.MOEFFRENI MOE'MIN

Agama : Islam
Alamat : Djl. Jusuf Adiwinata S.H.
29 Djakarta.
Organisasi: Sekber Golkar.
Tempat/ : Rangkasbetung, 12 Pebru-
Tgl.lahir/ ari 1921.
umur
Pendidik-: AMS (selesai); Pendidikan
an Perwira PETA.
Pekerdjaan : Anggota DPRD-GR DCI
terachir Djakarta.

**LET. KOL. GUNAWAN BUDI-
PRAWITO**

Agama : Islam
Alamat : Djl. Radjawali Selatan XI/
29, Djakarta.
Organisasi: Golkar
Tempat/ : Madiun, 27 Desember
Tgl.lahir/ 1924.
umur.
Pendidik-: MULO (Tamat) Th.1942/
an 1943.
Pekerdjaan:WA.AS-3/Pers Kodam V/
terachir Djaya.

KOESTAMTO WIRJODIHARDJO
Major Laut

Agama : Islam
Alamat : Djl. Angin Badai No. 10 A,
Kompl. ALRI Dewarutji,
Tjilintjing, Djakarta.
Organisasi: Golkar
Tempat/ : Surabaya, 20 Mei 1935.
Tgl.lahir/
umur
Pendidik-: BI. Paedagogi; IKIP-Tk.IV.
an
Pekerdjaan:PWA HUKBAR Daerah 3/
terachir Angg. DPRD-GR DCI
Djakarta.

**LET. KOL. BAMBANG GUNAWAN
WIBISONO**

Agama : Islam
Alamat : Djl. Tjempakasari III/I
Harapan Mulia, Djakarta.
Organisasi: Golkar (DPP. Warga Djaya)
Tempat/: Kutoardjo, 14 Maret 1929.
Tgl.lahir/ umur .
Pendidik-: S.M.A.-C (Tamat)
an
Pekerdjaan: ABRI/Angg. DPRD-GR
terachir DCI Djakarta.

KOL. INF. ETJE ANANG SUDJANA

Agama : Islam
Alamat : Djl. Kesehatan Raya No.3,
Djakarta.
Organisasi: Golkar (Kino Hankam)
Tempat/: Madjalaja, 17 Oktober 1920.
Tgl.lahir/umur.
Pendidik-: Sekolah PARA di Richmond
an Sidney Th. 1944.
Pekerdjaan: Angg. DPRD-GR DCI
terachir Djakarta.

**KBP. A. WIRATNO PUSPOAT-
MODJO**

Agama : Katolik
Alamat : Djl. Widaja XVI/16,
Keb. Baru, Djakarta.
Organisasi: Golkar (Angk. 45)
Tempat/: Klaten, 14 Djuli 1923
Tgl.lahir/ umur.
Pendidik-: Sardjana Hukum I.P.K.
an Univ. Indonesia.
Pekerdjaan : POLRI/Angg. DPRD-
terachir GR DCI Djakarta.

**LET. KOL. TITULER (U).
Drs. MUHAMMAD USMAN WIRADI-
MADJA**

Agama : Islam
Alamat : Djl. Radjawali No. 2, P.U.
Halim Perdanakusumah,
Djakarta.
Organisasi: Golkar
Tempat/: Bandung, 4 Oktober 1929.
Tgl.lahir/umur.
Pendidik-: Sardjana Hukum I.A.I.N.
an
Pekerdjaan: Kep. Dinas Rochani Kodam
terachir V/Djaya.

R A L A T

No. Urut	Halaman—baris	Tertulis	Seharusnja
1.	42— 11	Stap	Stof map
2.	43— 9	pemebentukan	pembentukan
3.	52— 17	majsarakat	masjarakat
4.	53— 34	antara formulir untuk DPRD dst.	formulir pentjataan penghi- tungan suara antara DPR dg. DPRD sebagaimana misalnja pembedaan warna blanko surat suara.
5.	64— 18	Pemeringah	Pemerintah
6.	64— 23	tersequt	tersebut
7.	64 terachir	pen	ditiadakan
8.	68— 1	tajlon	tjalon
9.	90— 33	di	ditiadakan
10.	91— 38	ber	ditiadakan
11.	95— 35	Kotak	Kota
12.	193—	Alamsjah	Alamsjah Major Djenderal TNI
13.	201— 19	terlarang	terlarang dalam
14.	202— 20,22, 25,26, 28.	pemunggutuan	pemungutan
15.	202— 24	ber	ditiadakan
16.	227— 25	Rangakapan	Rangkaian
17.	276— 3	djumalh	djumlah
18.	276— 24	Siara	Suara
19.	320— 10	260	920
20.	322— 1;2	7; 6	6, 5
21.	333—	Sjarat-sjarat	2. Sjarat-sjarat
22.	356— 25	No.: 1.b.3/1/4/1969	No.: 1b.3/1/43/1969
23.	371— 16	tindakan	ditiadakan
24.	398— 6	Ibukota Djakarta	Ibukota Djakarta dan membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Dae- rah Khusus Ibukota Djakarta.
25.	415— 32	Dlaam	Dalam
26.	463— 19	Penejlenggaraannja	Penjelenggaraannja
27.	482— 6	Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Kota.	ditiadakan
28.	488— 16	diresmikan	disesuaikan
29.	529— 10	Dekonstrasi	Dekonsentrasi
30.	531— 5	Matraman	Pulo Gadung

No. Urut	Halaman—baris	Tertulis	Seharusnja
31.	532— 5	Matraman	Pulo Gadung
32.	533— 3	Matraman	Pulo Gadung
33.	575— terachir	elclearence	Clearence
34.	584— 16	membantuk	membentuk
35.	592— 4	tjap ttd	Sekretaris tjap/ttd.
36.	623— 165	Pualu	pulau
37.	627—	Kel. Sungeni	Kel. Sungai
38.	632—	Kel. Kepala	Kel. Kelapa
39.	653—No.501	Ketj. Grogol	Ketj. Grogol Petamburan
40.	656—	Kel. Sarengseng	Kel. Serengseng
41.	688— 6	Liasion	Liaison
42.	704— 4	Panitia	Panitia Pemilihan
43.	711— 35	aang	jang
44.	761—No.4	kutipan	kutipkan
45.	761— 29	oleh Kodim	Kepada Kodim untuk diteliti.
46.	762— 1	kutipan	kutipkan
47.	767— 34	Daalm	Dalam
48.	804— 28	mempertjapatnja	mempertjepatnja
49.	917— 16	dari	dan
50.	983— 11	Amir Machmud	ditiadakan
51.	983— 23	Djuklah	Djumlah
52.	998— 15	Ukang	Tukang
53.	1009— 28	doolnomer	deelnomer
54.	1011— 16	ketertiban umum	ketertiban umum
55.	1017— 5	terganggu	tidak terganggu
56.	1028— 20	meliptui	meliputi
57.	1034— 18	dapat	ditiadakan
58.	1060— 23	jang bersangkutan meninggalkan dajwab	jang bersangkutan memasuki s/d meninggalkan djawab

Lay-out dan film-seting : „Star“ Bandung.
I.B.M. Composer : Fa. Pustaka „Star“.

Star* ★ *offset
BANDUNG

U.C. BERKELEY LIBRARIES



C025223610

